



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 136/M.PPN/HK/12/2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI NASIONAL
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)
TAHUN 2021-2024**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah telah menetapkan Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2017-2030;
 - b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah mencantumkan target dan indikator TPB/SDGs ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
 - c. bahwa Peta Jalan TPB/SDGs Tahun 2017-2030 serta target dan indikator TPB/SDGs dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional RPJMN 2020-2024, perlu dijabarkan dalam Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2021-2024 sebagai pedoman Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pencapaian target TPB/SDGs tingkat nasional dan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional ...

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2021-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI NASIONAL TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (TPB/SDGS) TAHUN 2021-2024.**

- PERTAMA : Menetapkan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2021-2024, untuk selanjutnya disebut RAN TPB/SDGs 2021-2024.
- KEDUA : RAN TPB/SDGs 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disusun sebagai dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pementerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta instansi non Pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam mendukung pencapaian target TPB/SDGs.
- KETIGA : RAN TPB/SDGs 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, memuat:
- a. Narasi RAN TPB/SDGs 2021-2024 tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - b. Matriks Program Kegiatan Pemerintah tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 - c. Matriks Program Kegiatan Pemerintah tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : RAN TPB/SDGs 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, merupakan penjabaran dari:
- a. Sasaran TPB Nasional; dan
 - b. Peta Jalan TPB Tahun 2017-2030,
- sebagaimana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : RAN TPB/SDGs 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pementerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta instansi non Pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta pengendalian dalam rangka pencapaian target TPB/SDGs.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 136/M.PPN/HK/12/2021
TANGGAL 15 DESEMBER 2021

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 136/M.PPN/HK/12/2021
TANGGAL 15 DESEMBER 2021

NARASI

RENCANA AKSI NASIONAL
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
TAHUN 2021-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR PUSTAKA	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Keselarasan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Terhadap Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	1
1.2 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs.....	3
1.3 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs	4
1.4 Pembiayaan TPB/SDGs.....	5
1.5 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs.....	6
1.6 Sistematika Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs	6
BAB 2 KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs	8
2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun	8
2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	19
2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	32
2.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.....	45
2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	55
2.6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	86
2.7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern	97
2.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan ..	103
2.9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	117
2.10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	127
2.11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan.....	139
2.12 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.....	148
2.13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan	166

2.14	Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan	180
2.15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	191
2.16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.....	197
2.17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	213
BAB 3	TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs	228
3.1	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	228
3.2	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	239
3.3	Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera.....	247
3.4	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas.....	258
3.5	Tujuan 5 Kesenjangan Gender	270
3.6	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	279
3.7	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	286
3.8	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.....	292
3.9	Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	301
3.10	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	314
3.11	Tujuan 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan	322
3.12	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.....	335
3.13	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	341
3.14	Tujuan 14 Ekosistem Lautan	369
3.15	Tujuan 15 Ekosistem Daratan	374
3.16	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh.....	383
3.17	Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	395
BAB 4	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	406
4.1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.....	406
4.2	Waktu Pemantauan dan Evaluasi	407
4.3	Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	407
4.4	Bahan Pemantauan dan Evaluasi.....	413
4.5	Alat Pemantauan dan Evaluasi	413
BAB 5	PENUTUP	419

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Visi Indonesia 2045 Menuju Indonesia Maju dan TPB/SDGs	1
Gambar 1.2	Sinergi Nawa Cita, RPJMN 2020-2024, dan TPB/SDGs.....	2
Gambar 1.3	TPB/SDGs sebagai instrumen utama transformasi ekonomi Indonesia	3
Gambar 1.4	Metodologi Penyusunan RAN TPB/SDGs 2021 – 2024.....	6
Gambar 2.1	Tingkat kemiskinan nasional dan tingkat kemiskinan ekstrem (PPP\$1,9 per hari)	8
Gambar 2.2	Perkembangan angka kemiskinan jumlah dan persen penduduk miskin, 2015-2019	9
Gambar 2.3	Indikator deprivasi tunggal kemiskinan multidimensi	9
Gambar 2.4	Perkembangan PoU Indonesia tahun 2015-2019 dan proyeksi 2020-2024	10
Gambar 2.5	Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan (morbiditas)	11
Gambar 2.6	Persentase penduduk usia 25-60 tahun yang belum menamatkan SMP.....	11
Gambar 2.7	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh tipe kepemilikan	15
Gambar 2.8	Jumlah korban meninggal dan hilang karena bencana per 100.000	16
Gambar 2.9	Proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan dasar dan perlindungan sosial (%)	18
Gambar 2.10	Prevalensi ketidakcukupan pangan (PoU), 2015-2020.....	20
Gambar 2.11	Prevalensi FIES, 2017-2020.....	21
Gambar 2.12	Prevalensi <i>stunting</i> pada balita, 2013-2019	23
Gambar 2.13	Prevalensi <i>Wasting</i> pada Balita, 2013-2019.....	23
Gambar 2.14	Skor PPH Nasional, Perkotaan, dan Perdesaan Indonesia, 2015-2020.....	24
Gambar 2.15	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja (Rp juta), 2015-2020	26
Gambar 2.16	Tren proporsi persalinan di fasilitas kesehatan menurut status ekonomi, dan selisih kelompok Kuintil 5 dan kuintil 1, 2015-2020.....	33
Gambar 2.17	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan dan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan menurut Provinsi, 2020	34
Gambar 2.18	Tren AKN, AKN dan AKBa, 1991-2017	36

Gambar 2.19	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun menurut daerah tempat tinggal, 2018-2020.....	43
Gambar 2.20	Rasio angka partisipasi pendidikan perempuan dan laki-laki	46
Gambar 2.21	Tingkat penyelesaian sekolah, 2015-2020 Sumber: Susenas Kor, BPS	47
Gambar 2.22	Angka anak tidak sekolah, 2016-2020.....	47
Gambar 2.23	Angka partisipasi kasar perguruan tinggi	48
Gambar 2.24	Proporsi siswa yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan matematika.....	49
Gambar 2.25	Proporsi ruang kelas menurut kondisi berdasarkan jenjang pendidikan dan status sekolah Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020	51
Gambar 2.26	Proporsi sekolah berdasarkan fasilitas belajar, 2018.....	51
Gambar 2.27	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	52
Gambar 2.28	Proporsi kekerasan terhadap perempuan (oleh pasangan atau mantan pasangan) dalam 12 bulan terakhir berdasarkan jenis kekerasan, 2016.....	64
Gambar 2.29	Jumlah kasus kekerasan berbasis gender siber berdasarkan data lembaga layanan, 2019–2020.....	66
Gambar 2.30	Jumlah kasus tiap jenis kekerasan berbasis gender siber berdasarkan data lembaga layanan, 2020	66
Gambar 2.31	Perkembangan angka perkawinan anak perempuan di Indonesia Sumber: BPS	68
Gambar 2.32	Karakteristik perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun, 2020 Sumber: BPS	69
Gambar 2.33	Proporsi laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan manajer, 2015-2020	72
Gambar 2.34	Proporsi perempuan sebagai pemimpin daerah berdasarkan provinsi, 2020	73
Gambar 2.35	Proporsi pejabat eselon 1 dan 2 di lembaga pemerintah berdasarkan jenis kelamin.....	73
Gambar 2.36	Proporsi wanita usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan layanan Kesehatan, 2012 dan 2017	75

Gambar 2.37	Proporsi perempuan usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan berdasarkan daerah tempat tinggal, 2012 dan 2017	75
Gambar 2.38	Proporsi perempuan usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan berdasarkan kelompok umur, 2012 dan 2017	76
Gambar 2.39	Proporsi perempuan usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan berdasarkan tingkat pendidikan, 2012 dan 2017	77
Gambar 2.40	Proporsi perempuan usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan berdasarkan kelompok pendapatan, 2012 dan 2017	77
Gambar 2.41	Faktor pembentuk kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan	78
Gambar 2.42	Proporsi penduduk pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB yang memiliki hak atas tanah pertanian, 2020	80
Gambar 2.43	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam, 2015-2020	81
Gambar 2.44	Demografi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam, 2015-2020.....	82
Gambar 2.45	Peta jangkauan internet di tingkat desa/kelurahan.....	83
Gambar 2.46	Akses Air Minum dan Sanitasi Layak, 2015-2020 (%).....	88
Gambar 2.47	Tren Akses Air Minum dan Sanitasi	88
Gambar 2.48	Disparitas Akses Air Minum dan Sanitasi Layak, 2020 (%)	89
Gambar 2.49	Proporsi Sumber Air Untuk Minum dan Untuk Pemakaian Lainnya, 2020	92
Gambar 2.50	Indeks Kualitas Air (IKA), 2015-2020	95
Gambar 2.51	Tren Indeks Kualitas Lahan (IKL), 2015-2020	97
Gambar 2.52	Target dan realisasi rasio elektrifikasi 2015-2019	98
Gambar 2.53	Capaian rasio elektrifikasi pada semester I tahun 2020	99
Gambar 2.54	Capaian konsumsi listrik per kapita (kWh) per tahun, 2015-2019.....	99
Gambar 2.55	Target dan realisasi rasio elektrifikasi 2020	101
Gambar 2.56	Capaian rasio elektrifikasi pada triwulan I tahun 2021.....	102

Gambar 2.57	PDB per kapita (juta rupiah) dan laju pertumbuhan PDB per kapita dengan harga konstan Indonesia, 2010-2020	104
Gambar 2.58	Pertumbuhan PDB riil per orang bekerja dengan menggunakan PPP, 2011-2020.....	105
Gambar 2.59	Proporsi lapangan kerja formal berdasarkan tempat tinggal dan jenis kelamin, 2015-2020	106
Gambar 2.60	Proporsi lapangan kerja informal berdasarkan umur, 2018-2020.....	107
Gambar 2.61	Proporsi lapangan kerja informal di sektor pertanian, industri dan jasa, berdasarkan tingkat pendidikan, 2018-2020	108
Gambar 2.62	Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal, 2015-2020.....	109
Gambar 2.63	Tingkat setengah pengangguran di Indonesia berdasarkan jenis kelamin dan tempat tinggal, 2015-2020	110
Gambar 2.64	Tingkat upah rata-rata per jam kerja, 2015-2020	110
Gambar 2.65	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET, dalam %), 2010-2020.....	111
Gambar 2.66	Persentase dari pekerja anak (10-17 tahun), 2018-2020.....	112
Gambar 2.67	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan dan proporsi kredit UMKM	113
Gambar 2.68	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (%), 2013-2020	113
Gambar 2.69	Kontribusi pariwisata terhadap PDB, 2010-2020	114
Gambar 2.70	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, 2010-2020..	115
Gambar 2.71	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Indonesia, 2010-2020	115
Gambar 2.72	Penerimaan devisa pariwisata, 2010-2020	116
Gambar 2.73	ATM dan kantor cabang bank per 100.000 penduduk dewasa, 2010-2019	117
Gambar 2.74	Kondisi mantap jalan nasional (%) dan panjang pembangunan jalan tol (km)	119
Gambar 2.75	Panjang Rel Kereta Api yang Beroperasi (km)	120
Gambar 2.76	Jumlah Bandara dan Pelabuhan	120
Gambar 2.77	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB (%) dan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (%).....	123
Gambar 2.78	Proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur (%).....	123

Gambar 2.79	Proporsi ekspor produk industri berteknologi tinggi (%)	125
Gambar 2.80	Pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal dan nasional	129
Gambar 2.81	Kemiskinan (PO) dan indeks gini	131
Gambar 2.82	Kemiskinan (PO) dan indeks gini perkotaan dan pedesaan.....	135
Gambar 2.83	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan.....	136
Gambar 2.84	Belanja dan pertumbuhan belanja perlindungan sosial.....	137
Gambar 2.85	Indeks Kebebasan	138
Gambar 2.86	Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak huni dan terjangkau.....	141
Gambar 2.87	Proporsi kendaraan di jalan raya di Indonesia	142
Gambar 2.88	Perkembangan perubahan guna lahan non-perkotaan Indonesia	143
Gambar 2.89	Perkembangan belanja fungsi pariwisata, 2015-2019	144
Gambar 2.90	Infografis kebencanaan Indonesia 2020.....	144
Gambar 2.91	Jumlah perusahaan yang mengikuti PROPER tahun 2015-2020	151
Gambar 2.92	Timbulan <i>food loss and waste</i> di Indonesia tahun 2000-2019.....	153
Gambar 2.93	Jumlah limbah B3 terdata dan terkelola	157
Gambar 2.94	Capaian pengurangan dan penanganan pengelolaan sampah di Indonesia	158
Gambar 2.95	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001.....	161
Gambar 2.96	Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase PDB	165
Gambar 2.97	Frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi 2015-2019	168
Gambar 2.98	Jumlah korban meninggal, hilang dan terdampak per 100.000 orang ...	169
Gambar 2.99	Kerugian ekonomi akibat bencana	169
Gambar 2.100	Potensi kehilangan PDB sektor terdampak, 2020-2024 ^{*)}	171
Gambar 2.101	Indeks risiko bencana indonesia prioritas nasional, 2015-2019	172
Gambar 2.102	Indeks risiko bencana Indonesia rata-rata nasional, 2015-2019	172
Gambar 2.103	Kecenderungan emisi GRK nasional, 2015-2019.....	174
Gambar 2.104	Capaian potensi penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2020	175
Gambar 2.105	Intensitas emisi GRK, 2010-2020.....	175
Gambar 2.106	Perkembangan Jumlah Sekolah Adiwiyata, 2015-2019	177
Gambar 2.107	Alokasi dan realisasi anggaran untuk perubahan iklim, 2017-2019.....	178

Gambar 2.108	Pencapaian realisasi penyaluran BPAN, 2019	190
Gambar 2.109	Jumlah kasus TSL ilegal yang telah diproses P.21,2015-2020	197
Gambar 2.110	Perkembangan indikator 16.1.1 (a) jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir, 2015-2020	198
Gambar 2.111	Indikator 16.1.2 (a) proporsi kematian yang disebabkan konflik per 100.000 penduduk, 2016-2020	199
Gambar 2.112	Indikator 16.3.1.(b) jumlah penerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, 2015-2020	202
Gambar 2.113	Indikator 16.3.2 (a) proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan, 2015-2020	203
Gambar 2.114	Tren capaian indikator terkait pemberian identitas yang sah, 2015-2019	205
Gambar 2.115	Tren Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), 2015-2020	206
Gambar 2.116	Indikator Pendapatan Pemerintah dan Rasionya Terhadap PDB.....	214
Gambar 2.117	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB (%)...	215
Gambar 2.118	Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	216
Gambar 2.119	.. Proporsi pembayaran utang dan bunga terhadap ekspor barang dan jasa (%).....	217
Gambar 2.120	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati.....	218
Gambar 2.121	Indikator penyediaan infrastruktur TIK	219
Gambar 2.122	Persentase Pengguna Internet	219
Gambar 2.123	Peta jangkauan (teknologi jaringan) internet di Indonesia 2020.....	220
Gambar 2.124	Jumlah kegiatan dan pendanaan KSST	221
Gambar 3.1	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 1 dalam RPJMN 2020-2024	228
Gambar 3.2	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 2 Dalam RPJMN 2020-2024	239
Gambar 3.3	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 3 Dalam RPJMN 2020-2024	247
Gambar 3.4	Prinsip Intergenerasi yang berdampak pada status kesehatan dan kualitas sumber daya manusia	252
Gambar 3.5	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 4 Dalam RPJMN 2020-2024	258
Gambar 3.6	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 5 Dalam RPJMN 2020-2024	270
Gambar 3.7	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 6 Dalam RPJMN 2020-2024	279
Gambar 3.8	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 7 Dalam RPJMN 2020-2024	286
Gambar 3.9	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 8 Dalam RPJMN 2020-2024	292

Gambar 3.10	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 9 Dalam RPJMN 2020-2024	301
Gambar 3.11	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 10 Dalam RPJMN 2020-2024	314
Gambar 3.12	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 11 Dalam RPJMN 2020-2024	322
Gambar 3.13	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 12 Dalam RPJMN 2020-2024	335
Gambar 3.14	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 13 Dalam RPJMN 2020-2024	347
Gambar 3.15	Potensi kerugian ekonomi dampak perubahan iklim.....	354
Gambar 3.16	<i>Delivery strategy</i> Pembangunan Berketahanan Iklim	354
Gambar 3.17	Proyeksi ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021	359
Gambar 3.18	Proyeksi tingkat emisi GRK total dan sektoral hingga tahun 2060 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021.....	360
Gambar 3.19	Alur dan pelaksana pemantauan dalam pencapaian RAN TPB/SDGs Tujuan 13	363
Gambar 3.20	Keterkaitan kegiatan inti dan pendukung dalam pencapaian target pembangunan berketahanan iklim	364
Gambar 3.21	Alur pelaporan pembangunan berketahanan iklim	365
Gambar 3.22	Skema perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan rendah karbon	366
Gambar 3.23	Sumber data PEP pembangunan rendah Karbon.....	367
Gambar 3.24	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 14 Dalam RPJMN 2020-2024	370
Gambar 3.25	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 15 Dalam RPJMN 2020-2024	374
Gambar 3.26	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 16 dalam RPJMN 2020-2024	383
Gambar 3.27	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 17 dalam RPJMN 2020-2024	395
Gambar 4.1	Indikator TPB/SDGs berdasarkan pilar pembangunan.....	407
Gambar 4.2	Alur informasi pemantauan untuk RAN	408
Gambar 4.3	Alur informasi penandaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran TPB/SDGs.....	409
Gambar 4.4	Alur informasi evaluasi untuk RAN	410
Gambar 4.5	Alur informasi pemantauan organisasi nonpemerintah	412

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan jumlah target yang diurusutamakan dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan pilar TPB/SDGs.....	2
Tabel 2.1	Partisipasi sekolah penduduk umur 7-18 tahun dan 7-24 tahun.....	12
Tabel 2.2	Capaian dimensi standar hidup	12
Tabel 2.3	Capaian akses pada fasilitas perumahan dan kehidupan.....	13
Tabel 2.4	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).....	14
Tabel 2.5	Cakupan kepesertaan SJSN Bidang Ketenagakerjaan.....	14
Tabel 2.6	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.....	16
Tabel 2.7	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana	17
Tabel 2.8	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana	17
Tabel 2.9	Proporsi alokasi program pemberantasan kemiskinan	18
Tabel 2.10	Proporsi lahan pertanian produktif dan berkelanjutan, di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB (gabungan), 2020	27
Tabel 2.11	Angka kematian anak* untuk periode 5 tahun sebelum survei menurut jenis kelamin dan jenis indikator, 2017	36
Tabel 2.12	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan per 1.000 Penduduk.....	44
Tabel 2.13	Indikator mutu guru, 2016-2018	50
Tabel 2.14	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir satu sebelum usia sekolah dasar.....	53
Tabel 2.15	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi	56
Tabel 2.16	Proporsi kursi legislatif tingkat pusat dan daerah yang diduduki perempuan	71
Tabel 2.17	Tingkat pendidikan anggota DPR RI perempuan pada Pemilu 2019.....	71
Tabel 2.18	Ketimpangan penguasaan/kepemilikan telepon genggam antar provinsi, 2015—2020	83
Tabel 2.19	Akses air minum dan sanitasi layak, 2015-2020 (%)	87
Tabel 2.20	Perkembangan Jaringan Gas (Jargas) kota (dalam ribu SR)	100
Tabel 2.21	Perkembangan Jaringan Gas (Jargas) kota tahun 2020 (dalam ribu SR).....	103
Tabel 2.22	Rangkuman indikator terkait infrastruktur	121

Tabel 2.23	Rangkuman indikator terkait industri.....	125
Tabel 2.24	Rangkuman indikator terkait Inovasi.....	127
Tabel 2.25	Desa dan daerah tertinggal	128
Tabel 2.26	Indikator kesehatan perbankan.....	130
Tabel 2.27	Elastisitas kemiskinan dan ketimpangan terhadap pertumbuhan.....	134
Tabel 2.28	Perlindungan sosial dan jaminan sosial.....	137
Tabel 2.29	Penegakan HAM	139
Tabel 2.30	Perkembangan penyusunan RTRW	147
Tabel 2.31	Jumlah korban bencana tahun 2015-2019.....	168
Tabel 2.32	Prakiraan potensi kerugian ekonomi dampak perubahan iklim pada empat sektor prioritas, 2020-2024.....	170
Tabel 2.33	Indikator 16.6.1 (a) persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	207
Tabel 2.34	Indikator 16.6.1 (b) persentase instansi pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B, 2015-2020	207
Tabel 2.35	Indikator 16.6.1 (c) persentase instansi pemerintah dengan indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B, Tahun 2015-2020.....	208
Tabel 2.36	Indikator 16.6.2 (a) persentase instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	208
Tabel 2.37	Indikator 16.10.1 (a) Indeks Kemerdekaan Pers (IKP), 2016-2020.....	211
Tabel 2.38	Capaian Indikator Terkait Kualitas Data dan Informasi	224
Tabel 3.1	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	229
Tabel 3.2	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 2 Tanpa Kelaparan.....	240
Tabel 3.3	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera.....	248
Tabel 3.4	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas.....	259
Tabel 3.5	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 5 Kesenjangan Gender.....	271
Tabel 3.6	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 6 Air Minum dan Sanitasi Layak	280
Tabel 3.7	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	287
Tabel 3.8	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	293
Tabel 3.9	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur ..	302
Tabel 3.10	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan.....	315

Tabel 3.11 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan.....	323
Tabel 3.12 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.....	336
Tabel 3.13 <i>Baseline</i> Pembangunan Berketahanan Iklim	341
Tabel 3.14 <i>Baseline</i> Pembangunan Rendah Karbon	342
Tabel 3.15 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	344
Tabel 3.16 Target dan Indikator Sasaran Pembangunan Berketahanan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon	348
Tabel 3.17 Target Pembangunan Berketahanan Iklim	349
Tabel 3.18 Target Skenario Pembangunan Rendah Karbon Sampai Dengan 2060	351
Tabel 3.19 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 14 Ekosistem Lautan	371
Tabel 3.20 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 15 Ekosistem Daratan	375
Tabel 3.21 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh.....	384
Tabel 3.22 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	396
Tabel 4.1 Contoh isian Form 1 capaian kinerja pencapaian sasaran TPB/SDGs	413
Tabel 4.2 Simbol status pencapaian TPB/SDGs tahun berjalan	414
Tabel 4.3 Contoh isian Form 2a realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah pusat	415
Tabel 4.4 Contoh isian Form 3 realisasi program, kegiatan dan anggaran program nonpemerintah	416
Tabel 4.5 Contoh isian Form 4 realisasi Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan Pelaku Usaha	417
Tabel 4.6 Form 4 realisasi proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan pelaku usaha	418

DAFTAR SINGKATAN

3R	: <i>Reduce, Reuse, Recycle</i>
3T	: Terdepan, Terluar, Tertinggal
4R	: <i>Reduce, Reuse, Recycle, Recovery</i>
ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
AIDS	: <i>Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>
AJI	: Aliansi Jurnalis Independen
AKB	: Angka Kematian Bayi
AKBa	: Angka Kematian Balita
AKE	: Angka Kecukupan Energi
AKI	: Angka Kematian Ibu
AKN	: Angka Kematian Neonatal
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APEKSI	: Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
API	: <i>Annual Paracite Incidence</i>
APJII	: <i>Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia</i>
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APL	: Area Penggunaan Lain
ARG	: Anggaran Responsif Gender
ARR	: <i>Annual Reduction Rate</i>
ART	: Anggota Rumah Tangga
ARV	: Antiretroviral
ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nations</i>
ASFR	: <i>Age-Specific Fertility Rate</i>
ASI	: Air Susu Ibu
ATM	: <i>Automated Teller Machines</i>
B2PMI	: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
Balita	: Anak Usia Bawah Lima Tahun
Balitbangkes	: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Balitbangtan	: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAU	: <i>Business as Usual</i>
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional

BB Biogen	: Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BDR	: Belajar dari Rumah
BI	: Bank Indonesia
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKP	: Badan Ketahanan Pangan
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BLK	: Balai Latihan Kerja
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOD	: <i>Biological Oxygen Demand</i>
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPO	: Bahan Perusak Ozon
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRIN	: Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSI LHK	: Badan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUR	: <i>Biennial Update Report</i>
CB	: Cara Bertindak
CEPA	: <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
CO ₂ e	: <i>Carbon Dioxide Equivalent</i>
COP	: <i>Conference of the Parties</i>
CORSIA	: <i>Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation</i>
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease of 2019</i>
DAD-IS	: <i>Domestic Animal Diversity- Information System</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
Dapodik	: Data Pokok Pendidikan
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DBD	: Demam Berdarah Dengue
Desmigratif	: Desa Migran Produktif
DFAT	: <i>The Department of Foreign Affairs and Trade</i>

DI Yogyakarta	: Daerah Istimewa Yogyakarta
Ditjen P2P	: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJSN	: Dewan Jaminan Sosial Nasional
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DO	: <i>Dissolved Oxygen/Oxygen Demand</i>
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPI	: Dampak Perubahan Iklim
DPP	: Destinasi Pariwisata Prioritas
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPT	: Difteri, Pertussis, dan Tetanus
DRPD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
e-monev	: Pemantauan dan Evaluasi Elektronik
e-planning	: Perencanaan Elektronik
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
Fasyankes	: Fasilitas Pelayanan Kesehatan
FIES	: <i>Food Insecurity Experience Scale</i>
FLW	: <i>Food Loss and Waste</i>
FTA	: <i>Free Trade Agreement</i>
Germas	: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
GgCO ₂ e	: <i>Giga Gram Carbon Dioxide Equivalent</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
HAM	: Hak Asasi Manusia
HCFC	: <i>Hydrochloro-fluorocarbon</i>
HCV	: <i>High Conservation Area</i>
HFC	: <i>Hydroflorocarbon</i>
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
HKSR	: Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi
HLPF	: <i>High Level Political Forum</i>
HPK	: Hari Pertama Kehidupan
IA-CEPA	: <i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
IAHP	: Indikator Anomali Harga Pangan
IBCSD	: <i>Indonesian Business Council for Sustainable Development</i>
IGCN	: <i>Indonesian Global Compact Network</i>
IKA	: Indeks Kualitas Air

IKP	: Indeks Kebebasan Pers
IKU	: Indeks kualitas udara
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
Inpres	: Instruksi Presiden
IPAK	: Indeks Perilaku Anti Korupsi
IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPD	: Indeks Pembangunan Desa
IPLT	: Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja
IPKM	: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
Iptek	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRBI	: Indeks Risiko Bencana Indonesia
ISO	: International Standards Organization
ISPO	: <i>Indonesian Sustainable Palm Oil System</i>
ISTA	: <i>Indonesia Sustainable Tourism</i>
ITB	: Insidensi Tuberkulosis
ITB	: Institut Teknologi Bandung
IUU	: <i>Illegal, Unreported and Unregulated</i>
Jampersal	: Program Jaminan Persalinan
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
JTB	: Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan
K/L	: Kementerian-Lembaga
K3	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KB	: Keluarga Berencana
KBGS	: Kekerasan Berbasis Gender Siber
KDRT	: Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kemen PUPR	: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendes	: Kementerian Desa
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenkumham	: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Kementerian PPN	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kemen PPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemensos	: Kementerian Sosial
Kepmen	: Keputusan Menteri
Kg	: Kilogram

KIE	: Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
KKN	: Kuliah Kerja Nyata
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KM	: Kilometer
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
KPBU	: Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHL	: Kesatuan Pengelola Hutan Lindung
KPHP	: Kesatuan Pengelola Hutan Produksi
KRISNA	: Sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KSBSI	: Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia
KSST	: Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular
KTD	: Kehamilan yang Tidak Diinginkan
KtP	: Kekerasan terhadap Perempuan
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHAPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lansia	: Lanjut Usia
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LBU	: Laporan Bulanan Bank Umum
LCGC	: <i>Low Cost Green Car</i>
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Litbang	: Penelitian dan Pengembangan
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan
LJKNB	: Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lokus	: Lokasi Fokus
LP2B	: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LPG	: <i>Liquified Petroleum Gas</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Manula	: Manusia Lanjut Usia
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>

MDR	: <i>Multi Drug Resistance</i>
MICE	: <i>Meeting Incentive Convention and Exhibition</i>
MMS	: <i>Multiple Micronutrient Supplementation</i>
Mol	: <i>Means of Implementation</i>
MR	: <i>Measles and Rubella</i>
MSY	: <i>Maximum Sustainable Yield</i>
NEET	: <i>Not in Employment, Education or Training</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTP/TKP	: Nilai Tambah Pertanian Per Tenaga Kerja
NTT	: Nusa Tenggara Timur
O&M	: <i>Operational and Maintenance</i>
ODF	: <i>Open Defecation Free</i>
ODHA	: Orang Dengan HIV dan AIDS
ODP	: <i>Ozone Depleting Substances</i>
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBI	: Pembangunan Berketahanan Iklim
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
PDB	: Produk Domestik Bruto
PeKKA	: Perempuan Kepala Keluarga
Pemda	: Pemerintah Daerah
PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
Perda	: Peraturan Daerah
PERMEN-KP	: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
Perpres	: Peraturan Presiden
PESK	: Pertambangan Emas Skala Kecil
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PIP	: Program Indonesia Pintar
PISA	: <i>Program for International Student Assessment</i>
PJJ	: Pembelajaran Jarak Jauh
PKBM	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKPA	: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak

PLP2B	:	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
PMSE	:	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PN	:	Prioritas Nasional
PNPM	:	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
POJK	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Pokja	:	Kelompok Kerja
Posyandu	:	Pusat Pelayanan Terpadu
PoU	:	<i>Prevalence of Undernourishment</i>
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPH	:	Pola Pangan Harapan
PPN	:	Perencanaan Pembangunan Nasional
PPP	:	<i>Purchasing Power Parity</i>
PRK	:	Pembangunan Rendah Karbon
Proper	:	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan
Prospera	:	Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian
PSBB	:	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PT	:	Perguruan Tinggi
PT	:	Perseroan Terbatas
PTM	:	Penyakit Tidak Menular
PUS	:	Pasangan Usia Subur
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
RAPBN	:	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RAD	:	Rencana Aksi Daerah
RAN	:	Rencana Aksi Nasional
RAN-PPM	:	Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
Raskin	:	Beras untuk Rumah Tangga Miskin
RENAS-PB	:	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
Renstra	:	Rencana Strategi
RHL	:	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RIPB	:	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
Riskesdas	:	Riset Kesehatan Dasar
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPBD	:	Rencana Pembangunan Bencana Daerah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah

Sakernas	: Survei Angkatan Kerja Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
SCP	: Sustainable Consumption and Production
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDG	: Sumber Daya Genetik
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDKI	: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sembako	: Sembilan Bahan Pokok
SFDRR	: <i>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction</i>
SIH	: Sertifikasi Industri Hijau
SILIN	: Silvikultur Intensif
SITASI	: Survei Pertanian Terintegrasi
SITB	: Sistem Informasi Tuberkulosis
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
SLB	: Sekolah Luar Biasa
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SNC	: <i>Second National Communication</i>
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SNPHAR	: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SP	: Sensus Penduduk
SPALD	: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
SPHPN	: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional
SPM-FP	: Standar Pelayanan Masyarakat Fasilitas Publik
SR	: <i>Sustainability Report</i>
SRS	: <i>Sample Registration System</i>
SSGBI	: Studi Status Gizi Balita di Indonesia
STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Stranas	: Strategi Nasional
Sub-Pokja	: Sub Kelompok Kerja
SUPAS	: Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	: Survei Sosial dan Ekonomi Nasional

SVLK	: <i>Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu</i>
TB	: Tuberkulosis
TCM	: <i>Tb Molecular Rapid Test</i>
TFR	: <i>Total Fertility Rate</i>
TIK	: Teknologi, Informatika dan Komunikasi
TKDN	: Tingkat Kandungan Dalam Negeri
TPA	: Tempat Pemrosesan Akhir
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB/SDGs	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i>
TPPO	: Tindakan Pidana Perdagangan Orang
TSL	: Tumbuhan dan Satwa Liar
TTD	: Tablet Tambah Darah
UCLG-ASPAC	: <i>United Cities and Local Government Asia Pasific</i>
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UN	: <i>United Nations</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UN ECOSOC	: <i>United Nations Economic and Social Council</i>
UNFPA	: <i>United Nations Population Fund</i>
UNFCCC	: <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UNICEF	: <i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>
UNSTAT	: <i>United Nations Statistics Commission</i>
UN Women	: <i>United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</i>
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
USD	: Dolar Amerika Serikat
USO	: <i>Universal Service Obligation</i>
UTK	: Unit Ternak Tropikal
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
VLR	: <i>Voluntary Local Review</i>
VNR	: <i>Voluntary National Review</i>
VSR	: <i>Voluntary Subnational Review</i>
WASH	: <i>Water, Sanitation and Hygiene</i>
WFH	: <i>Work from Home</i>
WHA	: <i>World Health Assembly</i>

WHO	:	<i>World Health Organization</i>
WNPG	:	Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi
WPPNRI	:	Wilayah Pengelolaan Perikanan
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WUS	:	Wanita Usia Subur
YLBHI	:	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
ZEEI	:	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Evidence Summit of Maternal dan Neonatal Mortality Reduction*. Jakarta; 2017
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Laporan Survei Internet APJII 2019-2020.
- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Pusat Kajian Strategis, *Zakat Infak dan Sadaqah untuk Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi*, 2021
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. *Laporan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013*. Jakarta; 2013.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. *Laporan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018*. Jakarta; 2018
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. *Laporan Survei Prevalensi Tuberkulosis Tahun 2015*. Jakarta; 2016
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2020. *Studi Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita Dan Determinan Status Gizi Pada Masa Pandemi COVID-19 Dengan Protokol Kesehatan Tahun 2020*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2020). *Indeks Perilaku Anti Korupsi*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2018). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2019). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2020). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan dan MI. *Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012*. Calverton, Maryland, USA; 2013
- Badan Pusat Statistik. *Laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2016*. Jakarta; 2017
- Badan Pusat Statistik. *Laporan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015*. 2017
- Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan dan MI. *Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2007*. Calverton, Maryland, USA; 2008

- Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan *Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2017*
- Badan Pusat Statistik, Survey Sosial Ekonomi Masyarakat (Susenas)
- Bank Indonesia. *Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Vol. XII*, Maret 2021.
- Bappenas. 2011. *Evaluasi terpadu pelaksanaan uji coba perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (pprg) tahun anggaran 2009 – 2010*.
- BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional). 2020. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia Tahun 2019*. Jakarta.
- Bappenas - UNDP. 2021. *Kajian Manfaat Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dari Ekonomi Sirkular di Indonesia*. Bappenas. Jakarta
- Bappenas, *Metadata Indikator TPB/SDGs Edisi II, 2020*
- BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional). 2020a. *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial. Edisi II*. Jakarta.
- Bappenas, Direktorat KKSDA, *Paparan Direktur KKSDA dalam Koordinasi Penyusunan RAB TPB/SDGs, 2020*
- Bappenas. (2019). *Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia 2019*. Jakarta: Bappenas.
- BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional). 2020d. *Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021*. Jakarta. (Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2020c). Jakarta
- BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional). 2019. *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*. Jakarta.
- Bappenas, BPS, dan UNFPA. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: Bappenas, BPS, UNFPA.
- Bappenas - IATL. 2021. *Rekomendasi Kebijakan: Pengelolaan Limbah B3 Medis dan Sampah Rumah Tangga Penanganan COVID-19*
- Bappenas 2007. *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006 – 2010*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta: Bappenas, Juni 2007 ISBN 978-979-3764-27-6
- BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional). 2020b. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia Tahun 2019*. Jakarta.

- BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020c. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024*. Jakarta. (Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020). Jakarta.
- Bappenas, & PPPA, K. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*.
- BB Biogen (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian). 2021. *Upaya Pelaporan Akses Koleksi Sumber Daya Genetik (SDG) Pertanian untuk Sustainable Development Goals (SDGs)*. Concept note, diperoleh berdasarkan komunikasi pribadi. Bogor.
- Benita, N., Dewantiningrum, J., & Maharani, N. 2012. *Pengaruh Penyuluhan Terhadap Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Siswa Smp Kristen Gergaji*. Jurnal Kedokteran Diponegoro, 1(1), 106293.
- BKP (Badan Ketahanan Pangan), Kementerian Pertanian, 2020. *Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan 2020*. Jakarta.
- BNPB. (2020, May 18). *Updat Bencana Indonesia Tahun 2020*. Retrieved from Situs Resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana: <https://bnpb.go.id/infografis/update-bencana-indonesia-tahun-2020>
- Booth, A (2000), *Poverty and Inequality in the Soeharto Era: An Assessment*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol 36, No. 1. p. 75.
- BPS, Bappenas, UNDP, 2001, Indonesia. *Laporan Pembangunan Manusia 2001. Menuju konsensus baru: Demokrasi dan pembangunan manusia di Indonesia*. Jakarta: BPS-Bappenas-UNDP
- bps.go.id, website Badan Pusat Statistik
- BPS, 2021. *Bahan Pendukung Kemiskinan dan Ketimpangan Penduduk Indonesia*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020*. No. 13/02/Th. XXIV, 5 Februari 2021.
- BPS, 2015. *Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2015, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2015*, Jakarta: BPS
- BPS, 2016. *Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2016, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2016*, Jakarta: BPS
- BPS, 2017. *Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2017, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2017*, Jakarta: BPS
- BPS, 2018. *Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2018, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2018*, Jakarta: BPS

- BPS, 2019. *Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2019, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2019*, Jakarta: BPS
- BPS, 2020. *Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2020, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2020*, Jakarta: BPS
- BPS, 2021. *Keadaan Angkatan Kerja Februari 2021, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2021*, Jakarta: BPS
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2021. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pertanian 2020 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat*. (Hasil Survei Pertanian Terintegrasi). Jakarta.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2020a. *Online Survei Sosial Demografi Dampak COVID 19*. Jakarta.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2020b. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*. Berita Resmi Statistik No.56/07/Th.XXIII, 15 Juli 2020. Jakarta.
- BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Kesehatan. 2020. *Laporan Pelaksanaan Integrasi Susenas Maret 2019 dan SSGBI Tahun 2019*. Jakarta.
- BPS & Bappenas. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*.
- BPS. 2020. *Profil Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2020. *Statistik Pendidikan 2020*. Jakarta.
- BPS. (2019). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019*.
<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YmU5OTk3MjViN2FIZWU2MmQ4NGM2NjYw&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjAvMTIvMDIvYmU5OTk3MjViN2FIZWU2MmQ4NGM2NjYwL3N0YXRpc3Rpay10ZWxla29tdW5pa2FzaS1pbmRvbmVzaWEtMjAxOS5odG1s&twoadfn>
- BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) Bali. 2118. *Kambing Gembrong Jangan Sampai Punah*. <https://bali.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/berita/51-info-aktual/844-kambing-gembrong-jangan->
- Budi Djoko Purnomo, Dr. rer.nat., *Pengaturan Air Tanah di Indonesia*, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Kementerian ESDM, 2020
- Covington, S. S. (2007). Women and the Criminal Justice System. *Women's Health Issues*, 17(4), 180–182. <https://doi.org/10.1016/j.whi.2007.05.004>
- Daniah, R., & Apriani, F. (2017). KEBIJAKAN NASIONAL ANTI- TRAFFICKING DALAM MIGRASI INTERNASIONAL National Anti-Trafficking Policies in International Migration Rahmah Daniah dan Fajar Apriani perdagangan manusia (human trafficking) masalah migrasi internasional , yang merupakan dalam i. *POLitica*, 8(2), 137–162.
- Daud, A. M. (2009). Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Ibu Rumah Tangga Di Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. *Jurnal Biologi Edukasi*, 1(2), 1–4.

- Dewan Energi Nasional (DEN). (2020). *Bauran Energi Nasional*. DEN. Jakarta
- Dewan Pers (2020). *Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia*.
- Dewi, L. P. R. K., & Dartanto, T. (2019). Natural disasters and girls vulnerability: is child marriage a coping strategy of economic shocks in Indonesia? *Vulnerable Children and Youth Studies*, 14(1). <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17450128.2018.1546025?journalCode=rvch20>
- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Berbasis Kinerja, 2020 (<http://ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/>)
- Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan. 2021. *Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi*. Jakarta.
- Duah, H. O., & Adisah-Atta, I. (2017). Determinants of Health Care Decision Making Autonomy among Mothers of Children under Five Years in Ghana: Analysis of 2014 Ghana Demographic and Health Survey. *International Journal of Women's Health and Wellness*, 3(4), 1–7.
- Dzuhayatin, S. R. (2020). Gender glass ceiling in Indonesia: Manifestation, roots and theological breakthrough. *Al-Jami'ah*, 58(1), 209–240. <https://doi.org/10.14421/AJIS.2020.581.209-240>
- FAO (Food and Agriculture Organization) 2020. *Addressing the Impacts of COVID -19 in Food Crises April-December 2020*. Rome.
- FAO (Food and Agriculture Organization). 2021. *Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition: Maternal and Child Diets at the Heart of Improving Nutrition*. Bangkok.
- Farida, Yani dkk. Kajian Dampak dan Kontribusi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap Perlindungan Sosial Pekerja dan Pendalaman Pasar Keuangan. Diakses pada 8 Juli 2021 dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/12/17/162755223221786-kajian-dampak-dan-kontribusi-sistem-jaminan-sosial-nasional-sjsn-terhadap-perlindungan-sosial-pekerja-dan-pendalaman-pasar-keuangan>
- Firmansyah A. 2021. Bogor Tanpa Kantong Plastik. Diakses dari Antara Foto: <https://www.antarafoto.com/seni-budaya/v1543673114/bogor-tanpa-kantong-plastik>
- Fatoni, Z., Astuti, Y., Situmorang, A., NFN, W., & Purwaningsih, S. S. (2015). Implementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi Di Indonesia: Sebelum Dan Sesudah Reformasi. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(1), 65. <https://doi.org/10.14203/jki.v10i1.56>
- Gelgel, N. M. R. Am., & Apriani, K. D. (2019). Rendahnya Keterpilihan Perempuan pada Pemilu 2019 di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 09(02), 263–288.
- Handayani I. 2020. Plastic Reborn 2.0 Kumpulkan 282 Ton Sampah Kemasan Plastik PET. Diakses dari <https://investor.id/lifestyle/plastic-reborn-20-kumpulkan-282-ton->

Kementerian Kesehatan. 2016. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015*. Jakarta.

Kementerian Kesehatan. 2017. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016*. Jakarta.

Kementerian Kesehatan. 2018a. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017*. Jakarta.

Kementerian Kesehatan. 2019. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018*. Jakarta.

Kementerian Kesehatan. 2013. *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)*. Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021. Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020. Jakarta

Kementerian Keuangan. APBN Kita: Kinerja dan Fakta 2020. Edisi Januari 2021.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Renstra 2020-2024

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Strategi Percepatan Konektivitas Broadband di Indonesia, Direktorat Pengembangan Pita Lebar

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Media Briefing Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 2021*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Renstra 2020-2024*

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK. 2020. Renstra Kementerian LHK 2020-2024. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK. Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2020-2024. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK. Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK. 2020 Laporan Capaian SDGs Kementerian LHK Tahun 2020. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK. Jakarta.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Paparan Ditjen SDA, 2020*

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Renstra 2020-2024*

Kementerian Pertanian. (2020). *Buku Statistik Data Lahan 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian. 2021. *Food Estate Sumba Tengah (FEST) Nura Tenggara Timur*. (ppt). Jakarta.

Kementerian Pertanian. 2020a. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Revisi I*. Jakarta. (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/ RC.020/M/11/2020).

Kementerian Pertanian. 2020b. *Roadmap Diversifikasi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Nonberas (2020-2024)*. (ppt). Jakarta.

[Kementerian PPN/Bappenas] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)*

RPJMN 2020-2024 dan SDG Roadmap dalam Kerangka Pembangunan Rendah Karbon.
Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta

[Kementerian PPN/Bappenas] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. *Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia Tahun 2019: Tujuan 12.* Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta

[Kementerian PPN/Bappenas] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2021. *Kajian Food Loss and Waste di Indonesia.* Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta

[Kementerian PPN/Bappenas] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2021. *Pengelolaan Merkuri dalam Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024.* Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta

Kementerian PPN/Bappenas. *Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia 2019.*

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2007). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.*

Kementerian PPN/Bappenas. 2019. *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.* Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). *Lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.*

Kementerian PPN/Bappenas. 2020. *Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.* Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta

Kementerian PPN/Bappenas. *Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III Tahun 2020.* Edisi Vol. 4, No. 3 November 2020.

Kementerian PPN/Bappenas. 2020. *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).* Edisi II. Jakarta.

Kementerian PPN/Bappenas. 2020. *Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).* Edisi II. Jakarta

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2018). *Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) 2017-2019.* Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.* Edisi II. Jakarta.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). *Indonesia's Voluntary National Review 2021: Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) (2018). *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2018*. Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) & Badan Pusat Statistik (BPS) (2017). *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) (2020). *Profil Anak Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Sosial, 2020. *Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024*. Jakarta. (Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020)
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
- Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo No. 53 tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Tatanan New Normal di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)
- Khaerah, N., & Mutiarin, D. (2017). Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2014). *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 3(3).
- Komnas Perempuan. (2021). *Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020*.
- Komnas Perempuan (2020). *Melayani dengan Berani: Gerak Juang Pengada Layanan dan Perempuan Pembela HAM di Masa Covid-19*.
- Komnas Perempuan (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Catatan Tahunan 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2020. Jakarta: Komnas Perempuan
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2018). Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik. In *Catatan Akhir Tahun 2018*.
- Krissetyanti, E. P. L. (2018). Women's Perceptions about Glass Ceiling in their Career Development in Local Bureaucracy in Indonesia. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 25(1). <https://doi.org/10.20476/jbb.v25i1.9643>

- Kusuma, A. A. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 3(1).
- LBH Apik (2020). *Siaran Pers #16HAKTP Gerak Bersama Ciptakan Ruang Aman di Masa Pandemi*.
- Lidyah, R. (2017). Posisi Manager untuk Wanita: Kendala dan Pandangan Islam. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 12(1).
- Luthfi, A. (2010). Akses Dan Kontrol Perempuan Petani Penggarap Pada Lahan Pertanian Ptpn Ix Kebun Merbuk. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 2(2), 74–83. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v2i2.2277>
- Margret, A., Panjaitan, Y., Novitasari, M., & Iksarana, J. (2018). *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*. Cakra Wikara Indonesia. <http://cakrawikara.id>
- Ministry of Health and UNICEF. 2020. *Rapid Health Assessment: Ensuring Sustainability of Essential Health Services for Children and Mothers During the COVID-19 Pandemic in Indonesia*. Jakarta.
- Mundayat, A. A., Noerdin, E., & Aripurnami, S. (2006). STUDI DAMPAK Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender. In *Women Research Institute* (Vol. 1, Issue).
- Noviana, Pi. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13–28.
- Nurhaeni, I., & Habsari, S. (2013). Efektivitas Implementasi Kebijakan Anggaran Responsif Gender. *JIANA (Jurnal Ilmu)*, 74–86.
- Nutrition International. 2019. *Cost-Effectiveness of Transitioning from Iron and Folic Acid to Multiple Micronutrient Supplementation for Pregnancy*. Policy Brief. Indonesia. October 2019. Ottawa. <https://nutritionintl.org/wp-content/uploads/2019/10/MMS-policy-brief-indonesia-2019-10-18-web.pdf>
- NUWSP (National Urban Water Supply Project), <http://labsgue.com/nuwas/>
- Ombudsman Republik Indonesia (2019). *Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Hasil Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional Meningkatkan*. Diakses pada 8 Juli 2021 dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20549>
- [OJK] Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Infografis Lembaga Jasa Keuangan dan Emiten Penerbit Sustainability Report. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/riset-dan-statistik/Pages/Sustainability-Report-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan-dan-Emiten.aspx>. OJK. Jakarta

- Pakasi, D. T., & Kartikawati, R. (2013). Antara Kebutuhan dan Tabu: Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di SMA. *Makara Journal of Health Research*, 17(2), 79–87. <https://doi.org/10.7454/msk.v17i2.3030>
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Dana Bantuan Hukum Pasal 7
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Bagi Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan berbasis Gender dalam Bencana.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan
- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban Dan Anak Saksi
- Pinheiro, P. S. (2006). World Report on Violence Against Children. In *United Nations Publishing Services*.
- Prasetyo, D. D., Widyaningsih, D., Tamyis, A. R., & Kusumawardhani, N. (2019). *Laporan Sintesis Studi Midline MAMPU Akses Perempuan Miskin terhadap Layanan Publik pada Lima Tema Penghidupan*.
- Pratiwi, A. M. (2017). HKSR dan Kebijakan Pembangunan. In *Jurnal Perempuan* (Vol. 22, Issue 2, p. iii).
- Project Appraisal Document, National Urban Water Supply Project, The World Bank, 2019.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. 2021. *Info ringkas indikator SDGs 2.5.2, komunikasi pribadi*. Bogor.
- Pusat Penelitian Oseanografi. 2019. Inisiasi Data Sampah Laut Indonesia untuk Melengkapi Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut sesuai Peraturan Presiden RI No. 83 tahun 2018. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Putra, S. (2019). Kesempatan Perempuan mendapatkan Pelayanan dan Hak Kesehatan Reproduksi di Pedesaan Alor, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 2(1), 42–60. <https://doi.org/10.33541/ji.v2i1.1036>

- Republik Indonesia (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Republik Indonesia (2020). Lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Robins L, Crimp S, van Wensveen M, Alders RG, Bourke RM, Butler J, Cosjin M, Davita F, Lal A, McCarthy JF, McWilliam A, Palo ASM, Thomson N, Warr P and Webb M. 2020. *COVID-19 and Food Systems in the Indo Pacific: An assessment of vulnerabilities, impacts and opportunities for action*. Technical Report 96 ACIAR. Canberra. p 254,
- Sa'dan, M. (2015). Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Ham. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 14(2), 143. <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.143-156>
- Saliem HP, Agustian A dan Perdana RP. 2020. *Dinamika Harga, Permintaan dan Upaya Pemenuhan Pangan Pokok pada Era Pandemi COVID-19. Dalam Suryana A et al. Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian*. IARD Press. Bogor. hlmn 361-380.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta
- Sekretariat Wakil Presiden RI. 2018. *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)*. Jakarta.
- Setiawan, I. (2006). *Petani Pada Berbagai Zona Agroekosistem Di Kabupaten Bandung Bandung*.
- SMERU (2019). Laporan Tematik Studi Midline MAMPU, Tema 5: Pengurangan Kekerasan terhadap Perempuan.
- SMERU (2021). Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis Indonesia.
- Sri Darwati, Puslitbang Perumahan dan Permukiman, Kementerian PUPR, Optimalisasi Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal, , 2018
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan
- Suryana A, Rusastra IW, Sudaryanto T and Pasaribu SM. 2020. Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian. IARD Press. Bogor. 959 halaman.
- Suryani, E. (2017). Efektivitas Penyuluhan Generasi Berencana (Genre) Terhadap Pengetahuan

Dan Sikap Remaja Tentang TRIAD KRR. *Jurnal Kebidanan Darmais*, 9, 1–8.

Susiana, S. (2015). PENERAPAN KONSEP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI DI PROVINSI PAPUA and Budgeting Concept in Local Development Sali Susiana. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.464>

Transparency International. (2020). *Corruption Perception Index 2020*.

Umagapi, J. L. (2020). REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019:TANTANGAN DAN PELUANG. *Journal Kajian*, 25(1). <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/issue/view/210>

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 14(1)

UN Women (2020). Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

UNDP Indonesia. (2021). *Seminar: Understanding the Welfare and Livelihood of Society during COVID-19 Pandemic in Indonesia*. <https://www.youtube.com/watch?v=C9hLx7q1dwc>

UNICEF, UNDP, Prospera dan SMERU. 2021. *The Social and Economic Impacts of COVID-19 on Households and Strategic Policy Recommendation for Indonesia*. UNICEF. May 2021. Jakarta.

UNICEF (2018). Evaluasi Program Roots Indonesia untuk Uji Coba Pencegahan Kekerasan Sebaya dan Perundungan. Jakarta: UNICEF

UNICEF (2020). Access to Justice for Children in the era of COVID-19: Notes from the Field. New York: UNICEF

Unilever Indonesia Tbk, PT., Transformasi Untuk Masa Depan Berkelanjutan, 2018

United Nations for Disaster Risk Reduction. (2021, 8 11). *Global Targets for Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*. Retrieved from Sendai Framework for Disaster Risk Reduction: <https://sendaimonitor.undrr.org/analytics/country-global-targets/15?countries=78>

United Nations Office on Drugs and Crime. (2017). *Hak dan kesehatan perempuan di Lapas/Rutan Indonesia: Tinjauan situasi saat ini*.

UN Women (2020). Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

USAID, Project 5-Year Work Plan, Contract No. AID-497-TO-16-00003, October 2020

USAID IUWASH PLUS, Analisa Kondisi Keuangan PDAM selama masa pandemic COVID 19, Maret 2021.

Wahana Visi Indonesia. 2020. *COVID-19 Pandemic and Its Impact on the Children in Indonesia: A Rapid Assessment for Early Recovery Initiation*. Jakarta.

- Wahdaniyat, H. (2019, 8 20). *Ruang Terbuka Hijau yang Masih Terpinggirkan di Indonesia*. Retrieved from Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: http://ciptakarya.pu.go.id/pbl/index.php/detail_berita/565/ruang-terbuka-hijau-yang-masih-terpinggirkan-di-indonesia
- Watts, C., & Zimmerman, C. (2002). Violence against women: Global scope and magnitude. *Lancet*, 359(6), 1232–1237. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)08221-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08221-1)
- WHO (World Health Organization). 2001. *Iron Deficiency Anaemia Assessment, Prevention and Control, A Guide for Programme Managers*. Geneve.
- Widayatun, & Fatoni, Z. (2013). Permasalahan Kesehatan dalam Kondisi Bencana: Peran Petugas Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 8(1), 37–52.
- World Bank. (2019). *Overview Time to ACT: Realizing Indonesia's Urban potential*. Jakarta: World Bank.
- World Justice Project (2020). The Covid-19 Pandemic and the Global Justice Gap.
- [WWF] World Wildlife Fund. 2020. Fight climate change by preventing food waste: A few simple steps could help reduce the environmental impacts of wasted food. Diakses dari: <https://www.worldwildlife.org/stories/fight-climate-change-by-preventing-food-waste>
- [W4C] Waste4Change. 2021. Kajian Food Loss and Waste di Indonesia. Bahan Paparan pada Stakeholder Meeting. W4C. Bekasi
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) (2020). Laporan YLBHI tentang Penodaan Agama Januari-Mei 2020
- Yusuf AA, T Suganda, Hermanto, F. Mansur, P. Hadisoemarto. 2020. *Strategi Ekonomi Sektor Pertanian di Tengah Pandemi Covid-19*. Center for Sustainable Development Studies Universitas Pajajaran. Prespective 2030 SDGs Center Policy Brief No. 2/2020.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran operasional dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 juga merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) memberikan landasan kokoh dan merupakan instrumen utama untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 1.1 Visi Indonesia 2045 Menuju Indonesia Maju dan TPB/SDGs

RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 telah mengarusutamakan SDGs. Target-target dari 17 *goals* beserta indikatornya terefleksikan dalam agenda pembangunan nasional. Sinergi Nawacita, 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN, dan TPB/SDGs dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Sinergi Nawa Cita, RPJMN 2020-2024, dan TPB/SDGs

Pengarusutamaan target-target TPB/SDGs dalam RPJMN berperan dalam upaya melokalkan pelaksanaan TPB/SDGs sampai dengan tingkat daerah. Dalam RPJMN 2020-2024, sebanyak 124 dari total 169 target TPB/SDGs telah diarusutamakan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. Jumlah ini meningkat dibandingkan target yang diarusutamakan dalam RPJMN 2015-2019 sebanyak 94 target. Dengan diarusutamakannya target TPB/SDGs ke dalam RPJMN maka program dan kegiatan yang terkait pencapaian SDGs beserta alokasi anggarannya dielaborasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahunnya. Selanjutnya, target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan selaras dengan TPB/SDGs menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan nonpemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi seluruh program dan kegiatan yang mendukung pencapaian TPB/SDGs. Dengan demikian, target-target SDGs secara bertahap dapat dicapai hingga tahun 2030.

Tabel 1.1 Perkembangan jumlah target yang diarusutamakan dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan pilar TPB/SDGs

Pilar/Tujuan	Jumlah Target Global	Jumlah Target TPB/SDGs Yang Telah Diarusutamakan	
		RPJMN 2015-2019	RPJMN 2020-2024
Pilar Pembangunan Sosial (Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5)	47	25	38
Pilar Pembangunan Ekonomi (Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17)	54	30	37
Pilar Pembangunan Lingkungan (Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15)	56	31	38
Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (Tujuan 16)	12	8	11
Total	169	94	124

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak triwulan pertama tahun 2020 menyebabkan tekanan besar terhadap sistem kesehatan, perekonomian, dan kondisi sosial masyarakat. Pandemi juga berdampak pada berbagai kemajuan pencapaian sasaran dan target TPB/SDGs. Kondisi ini mendorong Pemerintah melakukan orientasi baru untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan mengejar *gap* sasaran RPJMN termasuk di dalamnya target-target TPB/SDGs, serta agar visi Indonesia Maju dapat dicapai tepat waktu.

Untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan dan berketahanan, Pemerintah menyiapkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan mengukung prinsip keselarasan *green recovery* dan *green economy* yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan TPB/SDGs, pemerintah menyusun enam strategi besar redesain transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID-19 sebagai "*game changer*" menuju Indonesia Maju di tahun 2045 (Gambar 1.3).



Gambar 1.3 TPB/SDGs sebagai instrumen utama transformasi ekonomi Indonesia

1.2 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Memasuki *Decade of Action* pencapaian Agenda 2030, komitmen pencapaian TPB/SDGs semakin kuat melibatkan para pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga nonpemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah hingga desa. Kepemilikan bersama yang tumbuh semakin kuat ini merupakan hasil dari penerapan prinsip inklusif, partisipatif, dan transparan dalam pelaksanaan TPB/SDGs selama ini. Berbagai pendekatan dan instrumen kebijakan yang dikembangkan selama lima tahun terakhir menjadi acuan pengarusutamaan TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan pembangunan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan baik pemerintah maupun nonpemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah disusun Peta Jalan TPB/SDGs 2030, Metadata Indikator TPB/SDGs yang

telah diterbitkan dalam dua edisi, Rencana Aksi Nasional (RAN), laporan tahunan, dan laporan kepada PBB yang disampaikan melalui *Voluntary National Review* (VNR).

Komitmen pelaksanaan SDGs di tingkat lokal terwujud dengan telah ditetapkannya Rencana Aksi Daerah (RAD) di 31 provinsi, sementara 3 (tiga) provinsi lainnya masih berproses. Pelaporan di tingkat global juga telah dilengkapi oleh *Voluntary Sub-national Review* dan *Voluntary Local Review* (VLR) dari beberapa provinsi dan kota. Upaya pelokalan SDGs di tingkat paling bawah ditunjukkan dengan diluncurkannya SDGs Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2020. Melalui SDGs Desa, program, kegiatan, dan pengukuran pencapaian target-target TPB/SDGs dikembangkan sesuai kondisi masyarakat yang sangat beragam.

Keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah diwujudkan melalui pembentukan SDGs *Center/Network/Hub* yang saat ini terdapat di 25 Perguruan Tinggi di tingkat berbagai daerah. Peran filantropi dan pelaku usaha juga meningkat ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah asosiasi serta dalam program dan kegiatan yang berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, semakin banyak perusahaan yang menyampaikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) untuk menunjukkan kontribusinya dalam pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia. Upaya ini juga diikuti juga oleh filantropi. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, program-program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan empat pilar utama TPB/SDGs yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola.

Keterlibatan dan kontribusi organisasi kemasyarakatan juga berperan signifikan, melalui pelaksanaan berbagai program yang mampu menjangkau hingga ke masyarakat dan seluruh pelosok Indonesia. Keterlibatan dan tingginya komitmen pemangku kepentingan nonpemerintah dapat dilihat dari jumlah institusi yang telah menyampaikan rencana program dan kegiatannya pada RAN TPB/SDGs periode 2021-2024 yaitu sebanyak 132 institusi.

1.3 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Melaksanakan TPB/SDGs ibarat *buy one get two* yaitu melaksanakan agenda pembangunan nasional dan sekaligus memenuhi komitmen pembangunan dunia. Dalam penyusunan Rencana Aksi, prinsip-prinsip TPB/SDGs juga diterapkan. **Prinsip pertama** adalah *universality*, yaitu mendorong penerapan TPB/SDGs di seluruh wilayah Indonesia. **Prinsip kedua** adalah *integration*, yang mengandung makna terintegrasinya dan saling keterkaitan antara dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. **Prinsip ketiga** adalah *“No One Left Behind”* atau *“Tidak ada seorangpun yang Tertinggal”* yang menjamin bahwa pelaksanaan TPB/SDGs harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua. Prinsip ini juga telah diterapkan dalam setiap tahapan/proses pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia.

Penerapan prinsip-prinsip di atas memastikan TPB/SDGs dilaksanakan secara inklusif melalui orkestrasi gerakan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah. Sebagai salah satu perwujudan dari prinsip tersebut adalah penetapan Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs yang beranggotakan keempat *platform* partisipasi, yaitu: **(1) Pemerintah dan Parlemen (baik nasional dan daerah), (2) Organisasi Kemasyarakatan, (3) Filantropi dan Pelaku Usaha, dan (4) Akademisi**. Setiap pihak dan unsur dapat berpartisipasi dan berkontribusi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Hal ini untuk memastikan prinsip-prinsip inklusif, partisipasi, dan transparansi dilaksanakan sehingga kepercayaan antarpihak tumbuh dan terjaga.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAN TPB/SDGs melibatkan sejauh mungkin seluruh *platform* yang tercermin pada Matriks Rencana Aksi.

1.4 Pembiayaan TPB/SDGs

TPB/SDGs tidak hanya mencakup cara pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, namun juga memerlukan pembiayaan dan investasi yang memadai. Sebelum pandemi COVID-19, kebutuhan pendanaan SDGs Indonesia sebesar Rp67.083 Triliun, dengan lebih dari Rp14 ribu Triliun yang masih harus dipenuhi. Kebutuhan pendanaan SDGs diperkirakan mengalami peningkatan yang signifikan dengan adanya pandemi COVID-19. Secara global kebutuhan tersebut meningkat sekitar 70 persen. Terdisrupsi target-target SDGs akibat pandemi menyebabkan celah pembiayaan untuk pelaksanaan TPB/SDGs semakin lebar. Sementara itu, penerimaan pajak dan sumber penerimaan lainnya mengalami penurunan. Namun demikian, Presiden RI menekankan meskipun ditempa dengan pandemi COVID-19, target TPB/SDGs Indonesia pada tahun 2030 tidak boleh diturunkan. Sehingga inovasi pembiayaan TPB/SDGs merupakan sebuah kebutuhan.

Strategi pendanaan TPB/SDGs tidak bisa hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas pada sumber-sumber lain yang inovatif. Potensi pendanaan inovatif berkembang dari pelaku usaha, filantropi, potensi keuangan global (*global finance*), serta *impact investment*, dengan spektrum pendanaan beragam baik finansial maupun nonfinansial. Diperlukan sinergi dan integrasi yang dapat menghubungkan seluruh potensi pendanaan inovatif untuk pencapaian TPB/SDGs.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas pada tahun 2019 telah meluncurkan kerangka untuk mengorkestrasi semua potensi tersebut melalui SDGs *Financing Hub* guna memenuhi kebutuhan pendanaan pencapaian target-target SDGs sampai dengan tahun 2030. Pelaksanaan berbagai pembiayaan inovatif ini juga merupakan salah satu wujud dari kesepakatan *Financing for Development* yang tercantum dalam *Addis Ababa Action Agenda*.

1.5 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs

Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2021-2024 disusun mengikuti periode RPJMN 2020-2024 dan juga sebagai tahap selanjutnya dari Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs periode 2017-2019. Sebagai koordinator pelaksana TPB/SDGs, Kementerian PPN/Bappenas melibatkan keempat *platform* partisipasi dalam penyusunan RAN SDGs yang dilakukan melalui proses sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.4 berikut.



Gambar 1.4 Metodologi Penyusunan RAN TPB/SDGs 2021 – 2024

1.6 Sistematika Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs

Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs Indonesia terdiri atas lima bagian dan lampiran, sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan menjelaskan keselarasan TPB/SDGs dengan Nawacita dan RPJMN, serta komitmen Indonesia dalam melaksanakan TPB/SDGs. Bab ini menjabarkan pula *platform* partisipasi dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia sesuai dengan perannya masing-masing, pembiayaan TPB/SDGs, dan proses penyusunan RAN.

Bab kedua menjabarkan kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk beberapa indikator utama dari setiap Tujuan. Bab ini menyajikan gambaran data dasar (*baseline*) tahun 2020 dan capaian yang menjadi tolok ukur penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian TPB/SDGs hingga tahun 2024.

Bab ketiga menyajikan target dan arah kebijakan pada RPJMN 2020-2024 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan arah kebijakan ini, pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tertuang dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari program-program nonpemerintah yang secara lebih rinci terdapat dalam lampiran RAN ini.

Bab keempat menerangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tanggung jawab masing-masing *platform* partisipasi, dan waktu pelaksanaan RAN TPB/SDGs 2021-2024. Bab ini berisi mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan nonpemerintah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kaidah pelaksanaan TPB/SDGs, serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAN. Bab ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAN TPB/SDGs khususnya untuk keterlibatan nonpemerintah yang tertuang pada program dan kegiatannya.

Dokumen RAN juga dilengkapi lampiran berupa matriks. Matriks 2a berisi program dan kegiatan Pemerintah Pusat, Matriks 3 berisi program/kegiatan nonpemerintah untuk Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi, dan Akademia; dan Matriks 4 berisi program/kegiatan nonpemerintah untuk Pelaku Usaha/Bisnis.

BAB 2

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

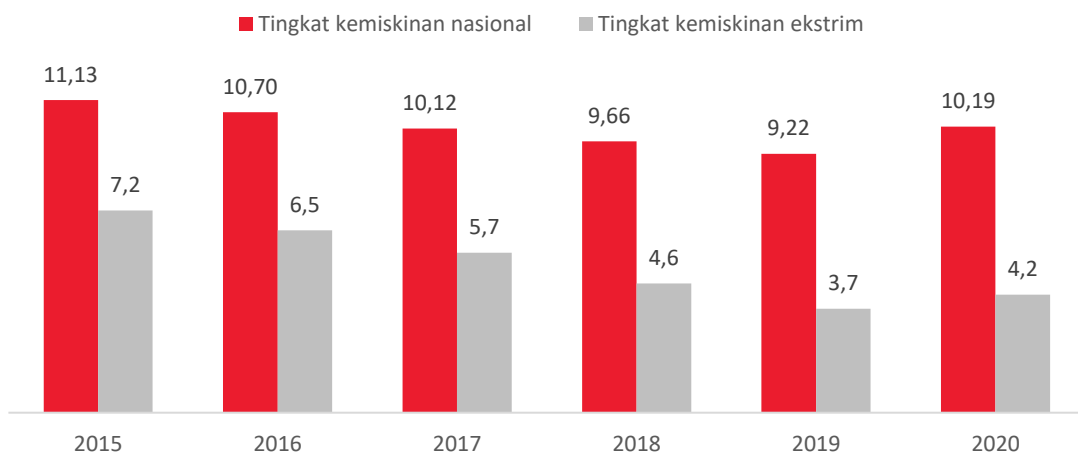
A. Pengantar

Kemiskinan masih menjadi tantangan pembangunan di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah meningkatkan angka kemiskinan sebesar 1% atau 2,7 juta orang miskin baru (September 2019-September 2020). Presiden juga mengarahkan perhatian lebih besar untuk pengurangan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

B. Status Capaian

1. Tingkat Kemiskinan

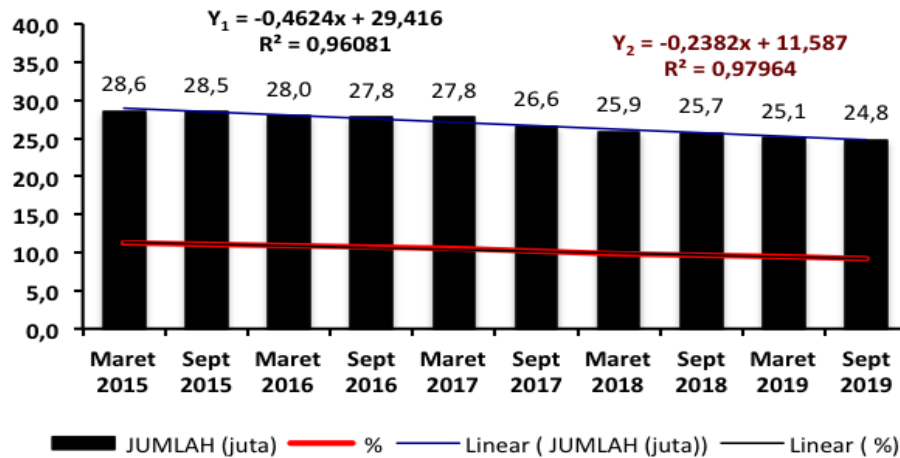
Proporsi penduduk yang hidup di bawah GK baik nasional maupun internasional per hari di Indonesia mengalami penurunan setiap tahun. Penduduk miskin pada September 2019 tercatat sebesar 24,8 juta orang atau 9,2% dari total penduduk, yang meningkat pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Proporsi penduduk yang hidup di bawah \$1,90 per hari (kemiskinan ekstrem) juga menurun, berkurang hampir setengah pada periode 2015-2019. Pandemi COVID-19 yang mengurangi aktivitas ekonomi berdampak pada meningkatnya kemiskinan ekstrem menjadi 3,8% pada Maret 2020 dan 4,2% pada September 2020.



Gambar 2.1 Tingkat kemiskinan nasional dan tingkat kemiskinan ekstrem (PPP\$1,9 per hari)

Sumber: Susenas Kor - September (BPS)

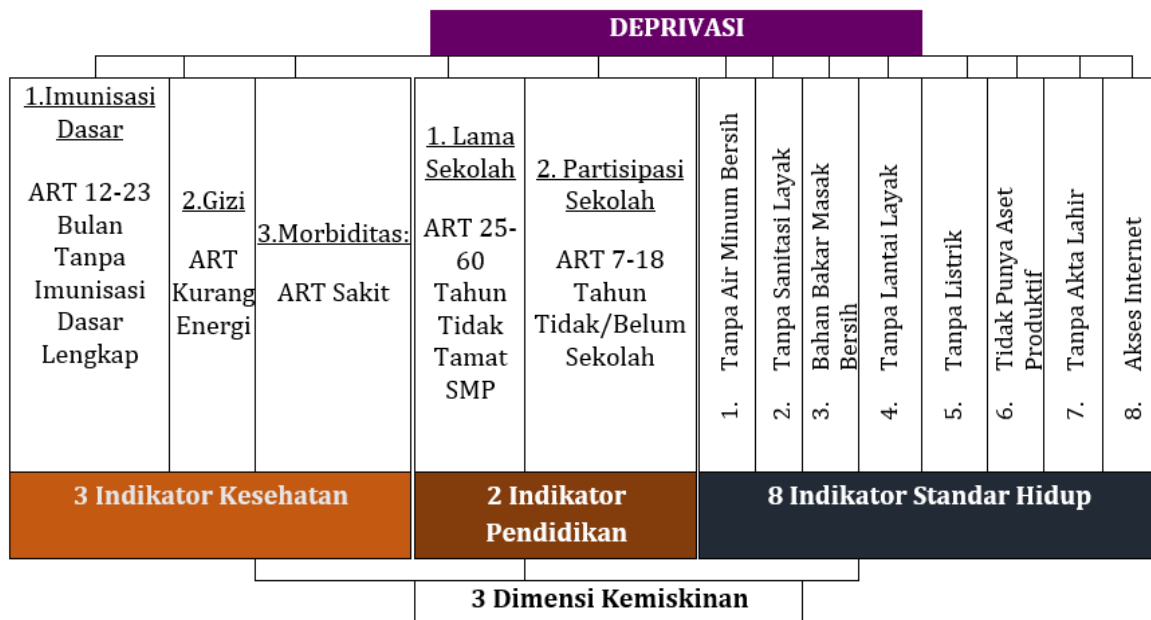
Gambar 2.1 memperlihatkan penurunan jumlah penduduk miskin per semester selama periode 2015-2019. Pada trend pertama (Y_1), secara rata-rata penduduk miskin berkurang 0,46 juta per semester, setara dengan penurunan persen penduduk miskin per semester sebesar 0,24% pada trend kedua (Y_2). Tren ini lebih lambat dari periode sebelumnya.



Gambar 2.2 Perkembangan angka kemiskinan jumlah dan persen penduduk miskin, 2015-2019

2. Pengurangan Deprivasi

Analisis kemiskinan multidimensi memperlihatkan aspek kemiskinan yang lebih luas dari kemiskinan yang diukur berdasarkan pendapatan. Tiga dimensi yang digunakan meliputi: Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, dan Standar Hidup yang diukur menggunakan 12 indikator. Setiap indikator akan ditampilkan untuk kelompok miskin dan rentan.



Gambar 2.3 Indikator deprivasi tunggal kemiskinan multidimensi

2.a. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) anak usia 12-23 bulan

IDL dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kematian anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Balita yang mendapat IDL yang pada tahun 2015 baru mencapai 24,7% pada tahun 2019 balita yang memperoleh IDL telah mencapai 47,2%. Menggunakan

data prediksi dengan interpolasi IDL 1 tahun pada tahun 2019 baru mencapai sekitar 60% dari seluruh anak usia 12-23 bulan yang telah memperoleh imunisasi dasar lengkap. Target RAN 2017-2019 untuk IDL adalah 80% sebagaimana UCI (Universal Coverage of Immunization). WHO (World Health Organization) tahun 2012 merekomendasikan rencana aksi global tahun 2011-2020 menetapkan cakupan imunisasi nasional minimal 90%, cakupan imunisasi di kabupaten 80%, eradikasi polio tahun 2020, eliminasi Campak dan Rubella serta introduksi vaksin baru.

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
IDL Balita (%)	24,7	31,6	44,2	45,7	47,2
IDL 1 tahun (%)	31,3*	40,0*	56,0*	57,9	59,8*

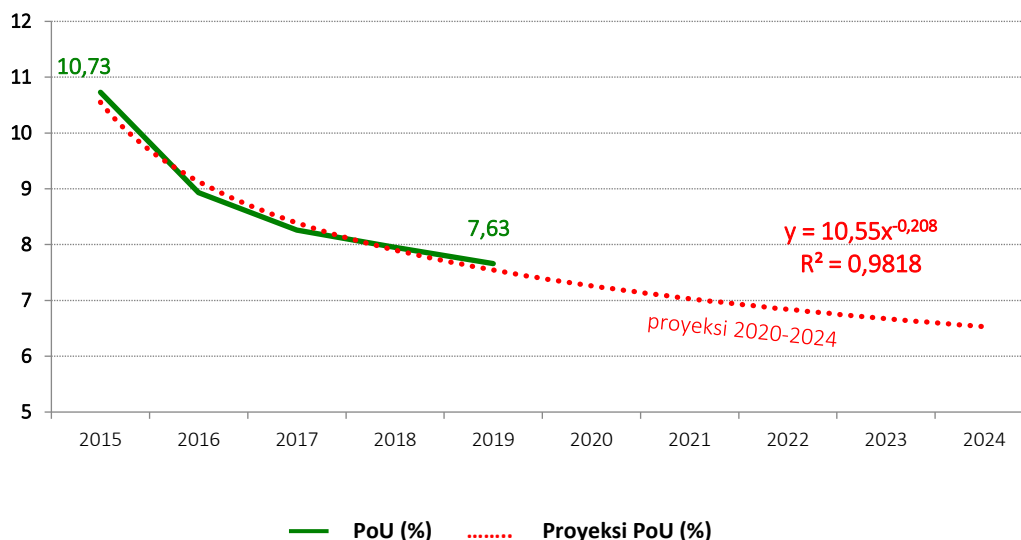
*Menggunakan perkembangan IDL Balita sebagai slope dan IDL 1 tahun (2018) Hasil Riskesdas sebagai angka resmi, dilakukan interpolasi 2015-2019

Sumber: IDL Balita bersumber dari Susenas (BPS)

Angka imunisasi dasar lengkap anak di perdesaan lebih rendah (53,8%) dibandingkan anak-anak di perkotaan (61,5%). Situasi tersebut cukup mengkhawatirkan untuk masa depan kesehatan anak-anak. Angka resmi cakupan IDL bersumber dari Riskesdas, yang rencananya baru akan diselenggarakan pada tahun 2021.

2.b. Ketidacukupan energi (kalori), PoU: *Prevalence of Undernourishment*

Penduduk yang tidak memperoleh pangan/energi harian yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan normal dan tumbuh sehat disebut sebagai penduduk kurang energi.



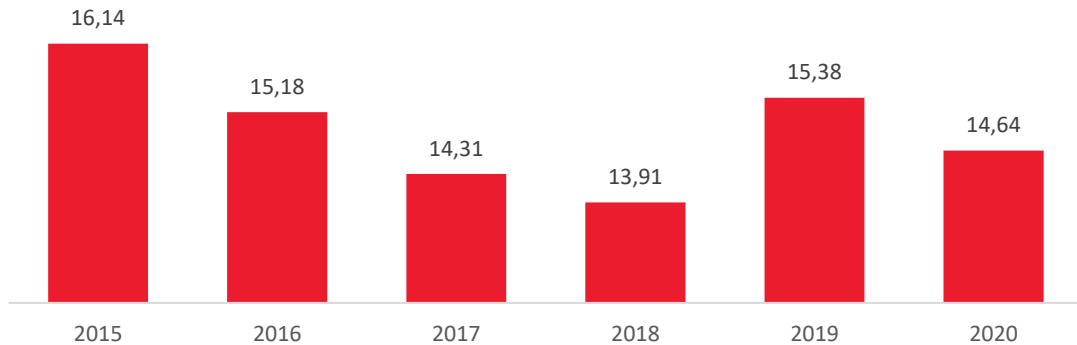
Gambar 2.4 Perkembangan PoU Indonesia tahun 2015-2019 dan proyeksi 2020-2024

Sumber: Susenas (BPS)

Pencapaian ketidacukupan energi penduduk Indonesia pada periode 2015-2019 menunjukkan kinerja yang cukup baik yaitu turun dari 10,73% pada tahun 2015 menjadi 7,63% pada tahun 2019 (Gambar 2.4). Demikian juga dengan asumsi proyeksi *Business as Usual* (BAU) hingga 2024 ditunjukkan persamaan proyeksi pada Gambar 2.4.

2.c. Angka morbiditas

Status kesehatan masyarakat dapat mencerminkan seberapa banyak penduduk dalam sebulan terakhir yang sakit yaitu mereka mempunyai keluhan kesehatan dan mengganggu kegiatan sehari-hari. Sakit yang dimaksud dalam definisi ini adalah sakit yang bersifat akut (mendadak) maupun sakit yang bersifat kronis yang tidak selalu dapat mengancam jiwa. Hasil Susenas pada 2020 pada gambar berikut menunjukkan sekitar 14,64% masyarakat Indonesia yang menderita sakit selama sebulan yang lalu pada saat survei dilakukan.

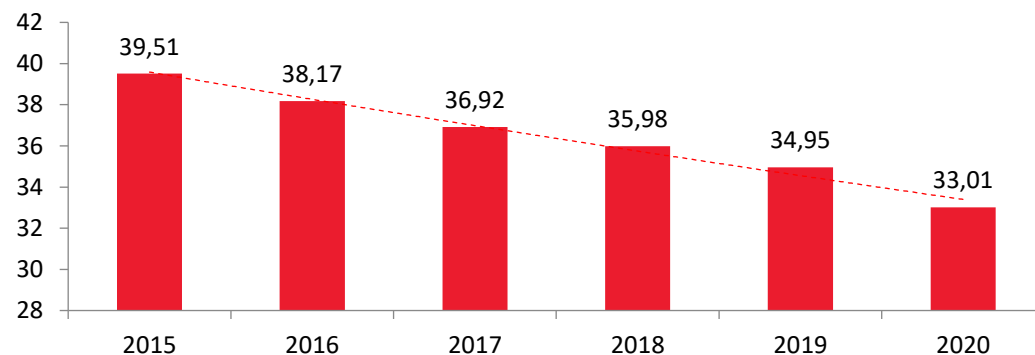


Gambar 2.5 Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan (morbiditas)

Sumber: Susenas (BPS)

2.d. Persentase penduduk usia 25-60 tahun yang belum menamatkan SMP

Indikator ini mencerminkan penduduk usia sekolah SMP (13-15 tahun) yang tidak mendapatkan akses pada pendidikan SMP pada saat program wajib belajar 9 tahun diberlakukan pada tahun 1994. Mereka yang tidak mempunyai ijazah SMP adalah mereka yang dirugikan karena tidak memperoleh atau memanfaatkan kesempatan bersekolah di tingkat SMP sehingga kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dengan melanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi menjadi hilang.



Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk umur 25-60 tahun belum tamat (000)*	123.768,8	125.737,7	127.623,8	129.433,9	131.166,0	132.824,6

Gambar 2.6 Persentase penduduk usia 25-60 tahun yang belum menamatkan SMP

Sumber: * Proyeksi penduduk 2015-2045;

** estimasi kasar dengan dasar % penduduk 15 tahun keatas yang belum tamat SMP.

Diperkirakan bahwa hampir 40% penduduk usia 25-60 tahun pada tahun 2015 belum menamatkan pendidikan tingkat menengah pertama (SMP) yang terus menurun hingga pada tahun 2020 berjumlah 33,01%.

2.e. Partisipasi sekolah penduduk umur 7-18 tahun

Penduduk umur 7-24 tahun yang tidak berada dalam sistem pendidikan jumlahnya sangat rendah yang pada tahun 2015 mencapai 0,84%. Pada tahun 2019 angka tersebut adalah 0,58% atau pengurangan 0,26% poin dibandingkan tahun 2015. Menggunakan estimasi dengan cara *proportionally adjusted* terhadap penduduk 7-24 tahun, penduduk 7-18 tahun yang belum sekolah pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 0,51% yang kemudian pada tahun 2019 berkurang hingga menjadi 0,32% merupakan suatu pengurangan yang berarti walaupun belum mencapai target *zero percentage*.

Tabel 2.1 Partisipasi sekolah penduduk umur 7-18 tahun dan 7-24 tahun

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
7-24 tahun belum sekolah (%)	0,84	0,73	0,63	0,63	0,58
7-18 tahun belum sekolah (%)*	0,51	0,44	0,39	0,35	0,32

* *Proportional adjusted* terhadap 7-24 tahun belum sekolah

Sumber: Susenas (BPS)

Tabel 2.2 Capaian dimensi standar hidup

Sub Indikator 1.2.2 – Capaian Dimensi Standar Hidup	2015	2016	2017	2018	2019
1. Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik, terjadi deprivasi jika tanpa listrik	2,46	2,38	1,86	1,49	1,15
2. Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumahtangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah	29,03	28,46	27,96	26,32	10,73
3. Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumahtangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama	25,66	24,07	22,16	20,65	18,87
4. Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m ² , terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8m ²	10,05	9,33	8,47	8,94	8,74
5. Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3kg

Pada indikator 6 s/d 9 memperlihatkan pencapaian yang menggembirakan karena pada tahun 2019: (i) hanya 1,15% rumah tangga yang belum mempunyai akses pada listrik sebagai penerangan utama,(ii) rumah tangga yang tidak punya akses pada airminum bersih tinggal 10,7%;(iii) rumah tangga yang tidak punya akses pada WC layak tinggal 18,9%; (iv) rumah tangga yang tinggal pada rumah dengan lantai yang tidak layak 8,7%.

Tabel 2.3 Capaian akses pada fasilitas perumahan dan kehidupan

Sub Indikator 1.2.2: Capaian Akses pada Fasilitas Perumahan dan Kehidupan	2015	2016	2017	2018	2019
6. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif, terjadi deprivasi jika rumahtangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil.	PM	PM	PM	PM	PM
7. Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, terjadi deprivasi jika ada anggota rumahtangga yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran	20,08	18,32	16,67	16,45	13,99
8. Akses internet: Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumahtangga yang bisa mengakses internet.	PM	PM	PM	PM	52,31
9. Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu.	PM	PM	PM	PM	PM

Beberapa pencapaian yang perlu dicatat adalah:

- (i) Anak umur 0-17 tahun yang belum mempunyai akta kelahiran pada tahun 2019 adalah 13,71% atau satu dari setiap tujuh anak belum mempunyai akta kelahiran, suatu angka yang cukup tinggi mengingat hak memperoleh identitas bagi seorang anak ketika lahir adalah kepemilikan akta kelahiran; dan
- (ii) Rumah tangga yang tidak punya akses pada internet pada tahun 2019 mencapai 52,31%, artinya akses pada internet belum mencapai separuh dari seluruh rumah tangga di Indonesia.

Catatan:

Karena belum tersedianya data pada indikator aset dan pekerjaan yang dimiliki anggota rumah tangga, maka belum dapat diketahui seberapa besar deprivasi pada tingkat rumah tangga atas kepemilikan asset yang dapat memudahkan anggota rumah tangga dalam melakukan kegiatan, dan juga seberapa besar rumah tangga yang tidak mempunyai akses pada pendapatan.

3. Cakupan Program Jaminan Sosial Nasional

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2019 telah mencapai 83,61% dari seluruh penduduk Indonesia, dengan perkembangan cakupan peserta JKN pada periode 2015-2019 adalah pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Parameter		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penduduk ¹⁾	(000)	255.587,9	258.496,5	261.355,5	264.161,6	266.911,9
Cakupan Peserta JKN ²⁾	(%)	61,5	66,5	71,8	78,5	83,61

Sumber: ¹⁾ Penduduk pertengahan tahun Proyeksi penduduk 2015-2045 (BPS) ²⁾ BPJS Kesehatan; PBI JKN

Karakteristik ketenagakerjaan di Indonesia masih didominasi oleh pekerjaan informal dimana menurut Sakernas 2015-2019 sekitar 60% pekerja informal mewarnai kegiatan perekonomian Indonesia pada periode 2015-2019. Pekerjaan informal sesuai namanya pada umumnya tidak memiliki struktur organisasi dan administrasi keuangan yang memadai serta perikatan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja. Apabila dengan proporsi tertentu iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dibayar oleh pemberi kerja maka mayoritas pemberi kerja menemui kesulitan memenuhi aturan ini.

Sampai dengan tahun 2019, dari 56,02 juta pekerja formal sebanyak 31,65 juta pekerja telah terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan atau cakupan melebihi separuh (56,51%) dari seluruh pekerja formal. Sesuai dengan kendala yang ditemui dalam sistem ketenagakerjaan informal, cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan baru mencakup 2,71 juta pekerja yang terdaftar atau 3,85% dari perkiraan 70,5 juta pekerja informal pada tahun 2019. Perkembangan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

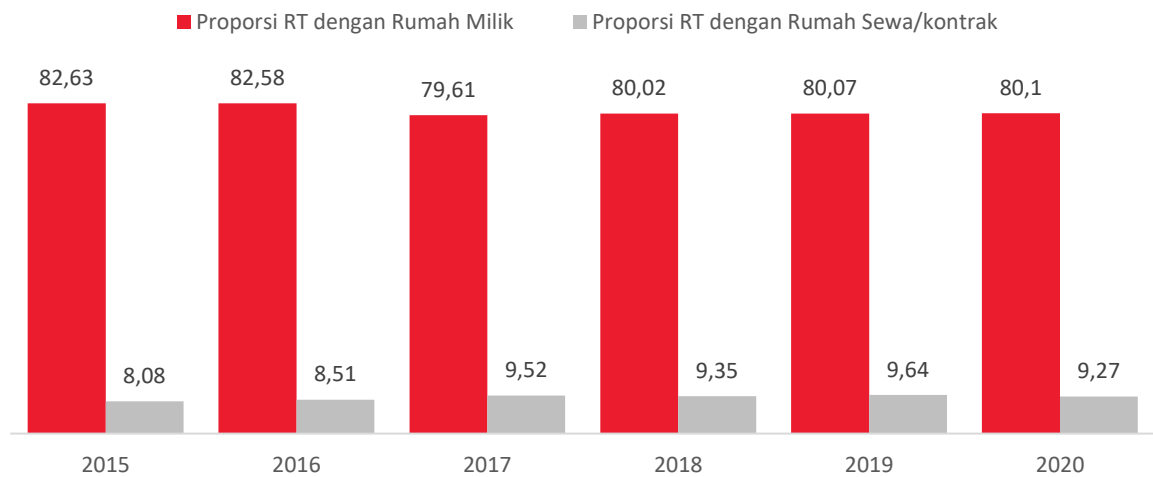
Tabel 2.5 Cakupan kepesertaan SJSN Bidang Ketenagakerjaan

Parameter		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pekerja formal ¹⁾	(juta)	48,46	50,21	52,00	53,52	56,02
Jumlah pekerja informal ¹⁾	(juta)	66,18	68,20	69,02	70,48	70,50
Cakupan pekerja formal ²⁾	(juta)	18,98	21,25	24,53	28,07	31,65
	(%)	39,15	42,33	47,17	52,44	56,51
Cakupan pekerja informal ²⁾	(juta)	0,28	1,38	1,71	2,39	2,71
	(%)	0,43	2,02	2,47	3,39	3,85

Sumber: ¹⁾ Sakernas Agustus (BPS); ²⁾ BPJS Ketenagakerjaan

4. Hak Terhadap Sumber Daya Ekonomi

Akses pada lahan dan perumahan yang terjamin (*secure tenure*) merupakan prasyarat pengurangan kemiskinan, karena penduduk dalam status miskin atau rawan miskin akan terbantu dengan akses tersebut. Dalam periode 2015-2019 terjadi penurunan persentase dari rumahtangga yang tinggal di rumah milik sendiri, dimana pada tahun 2019, 80% dari rumahtangga yang tinggal di rumah milik sendiri dibandingkan pada tahun 2015 yang berjumlah 82,6%. Jika dilihat dari konsep hunian terjamin, maka rumah sewa/kontrak merupakan bagian dari konsep tersebut. Perkembangan hunian terjamin adalah 90,71% pada tahun 2015 menjadi 89,71% pada tahun 2019 merupakan tantangan pengadaan rumah di perkotaan yang berupa rumah susun (apartemen) dengan kepemilikan strata title (rusunami) atau sewa (rusunawa).



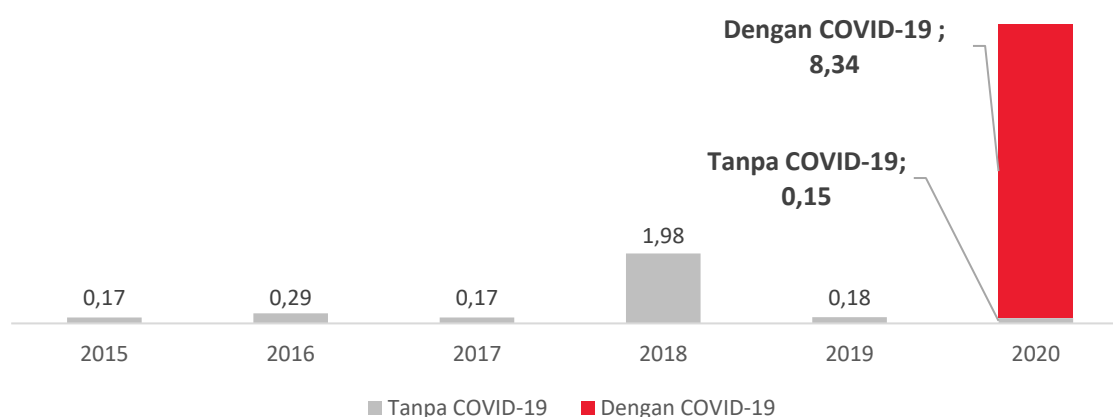
Gambar 2.7 Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh tipe kepemilikan

Sumber: Susenas Kor (BPS)

5. Membangun Ketahanan Masyarakat Miskin dan Rentan Untuk Mengurangi Kerentanan Terhadap Kejadian Ekstrim Terkait Iklim dan Guncangan Ekonomi, Sosial, Lingkungan, dan Bencana

Banyaknya korban bencana tergantung dari jumlah bencana dan kekuatan dari bencana yang menimbulkan korban sebagai dampak dari bencana. Sebagai wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah cincin api Pacific (Pacific ring of fire) risiko terhadap terjadinya bencana¹ di Indonesia tidak dapat dihindari. Kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kawasan yang berisiko bencana serta kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana juga menyumbang pada besaran korban yang terdampak bencana.

¹ Bahaya alam (*natural hazards*) dan bahaya karena ulah manusia (*man-made hazards*) menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction* (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*), bahaya biologi (*biological hazards*), bahaya teknologi (*technological hazards*) dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*).



Gambar 2.8 Jumlah korban meninggal dan hilang karena bencana per 100.000

Sumber: BNPB dalam Laporan BPS

Banyaknya korban mencerminkan jumlah bencana berbagai jenis yang terjadi dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut yang terdiri dari jumlah orang meninggal dan hilang, luka/cedera serta mengungsi. Korban terbanyak terjadi pada tahun 2018 dimana untuk setiap 100.000 orang jumlah orang yang meninggal dan hilang mencapai 2,36, luka dan cedera mencapai 8,01 dan yang mengungsi mencapai 337,84.

Tabel 2.6 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019*
Meninggal dan hilang	0,11	0,22	0,14	2,36	0,22
Luka/Cedera	0,14	1,03	0,40	8,01	1,28
Mengungsi	72,09	169,80	124,35	337,84	163,44

Sumber: BNPB; * Laporan sampai dengan Oktober 2019

Jumlah kerugian ekonomi sebagai dampak bencana juga perlu diketahui baik dalam nominal rupiah maupun persentasenya terhadap PDB. Kerugian terhadap infrastruktur produksi khususnya akan menghambat pemulihan pertumbuhan ekonomi di wilayah terdampak khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kerugian ekonomi yang tercatat pada tahun 2015 dan 2017 berjumlah masing-masing Rp2.647,3 milyar dan Rp4.742,405 milyar atau masing-masing merupakan 0,022% dan 0,0348% dari PDB pada tahun-tahun tersebut.

Upaya pengurangan risiko bencana yang dapat mengurangi potensi jumlah korban dan jumlah kerugian akibat bencana perlu dilakukan secara terus menerus. Cara yang direkomendasikan oleh UN-ISDR adalah dengan merencanakan dan mengimplementasikan stranas pengurangan risiko bencana yang selaras dengan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*.

Pencapaian di Indonesia atas rencana tersebut pada periode 2015-2019 adalah tersedianya 69 dokumen perencanaan untuk diimplementasikan pada tahun 2015 dan 26 dokumen pada tahun 2018.

Tabel 2.7 Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana

INDIKATOR	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	Dokumen	69	N/A	N/A	26	N/A

Pada tahun 2015 baru 15,76% daerah yang telah mengadopsi dan menerapkan strategi yang selaras dengan strategi nasional yang pada tahun 2019 telah terdapat 34,43% daerah yang telah mengadopsi dan menerapkan strategi tersebut. Dengan semakin banyaknya daerah yang telah menerapkan strategi pengurangan risiko bencana, diharapkan dapat dikurangi jumlah korban dan jumlah kerugian ekonomi sebagai dampak bencana.

Tabel 2.8 Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana

INDIKATOR	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	%	15,76	18,68	27,24	32,88	34,43

6. Pengeluaran Untuk Pemberantasan Kemiskinan

Pemberantasan kemiskinan telah menjadi komitmen global khususnya sejak dicanangkan MDGs pada awal tahun 2000. Seberapa besar pemerintah mengalokasikan pembiayaan untuk program pemberantasan kemiskinan menjadi perhatian global karena tanggung jawab utama pengurangan kemiskinan berada pada tangan pemerintah. Pada tabel berikut dapat dilihat selama periode 2015-2019 yaitu mencapai Rp251,9 Trilyun pada tahun 2015 terus meningkat hingga mencapai Rp378,2 Trilyun pada tahun 2019.

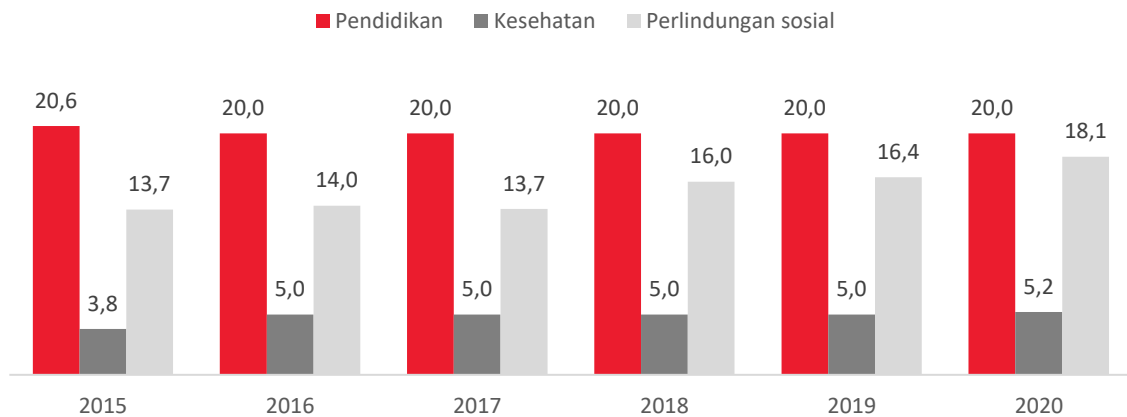
Sebagai catatan dapat ditambahkan bahwa dalam rangka penanganan COVID-19, anggaran pemberantasan kemiskinan pada tahun 2020 telah ditingkatkan dari Rp387,7 Trilyun yang dialokasikan awal pada APBN 2020 menjadi Rp495,5 Trilyun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020.

Tabel 2.9 Proporsi alokasi program pemberantasan kemiskinan

INDIKATOR	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	%	251,9 T (LKPP)	261,2 T (LKPP)	275,7 T (LKPP)	353,9 T (LKPP)	378,2 T (LKPP)	495,5 T (Perpres 72/2020)

7. Pengeluaran Untuk Layanan Pokok (Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial)

Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Gambar 2.9). Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial meliputi jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan melalui jaminan sosial (PBI) yang berasal dari APBN dan jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial (KIP, KPS, PKH, Rastra/Raskin) yang berasal dari APBN. Besarnya pengeluaran tersebut pada tahun 2020 adalah 18,1% dari total pengeluaran pemerintah.



Gambar 2.9 Proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan dasar dan perlindungan sosial (%)

Sumber: Kemenkeu

C. Tantangan

Beberapa kendala yang perlu diatasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan terkait dengan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan adalah:

- 1) Pengukuran kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2017 menunjukkan bahwa penduduk miskin berjumlah 27,8 juta jiwa atau 10,64% dari populasi. Sekitar 20 juta jiwa tinggal di perdesaan dan diantaranya \pm 14 juta orang merupakan petani gurem, butuh tani, pekerja serabutan di pertanian, \pm 2 juta buruh industri rumah tangga, dan \pm 4 juta tidak punya pekerjaan. Lebih kurang 8 juta orang lainnya tinggal di perkotaan yang bekerja sebagai buruh bangunan, pedagang asongan, pekerja serabutan. Rumahtangga miskin berukuran besar, karena secara rata-rata terdiri dari lima anggota rumah tangga,

dengan pendidikan median umur kepala rumahtangga adalah 47,5 tahun serta tidak tamat SD atau tidak pernah bersekolah.

- 2) Banyaknya penduduk yang hidup hampir miskin (*near poor*) atau sedikit di atas garis kemiskinan, sehingga jika terjadi gejolak yang menyebabkan kenaikan garis kemiskinan maka akan banyak penduduk yang jatuh miskin. Seringkali menimbulkan dilema mengenai kebijakan apa yang paling tepat untuk menangani kelompok penduduk ini, apakah pengentasan kemiskinan atau perlindungan sosial.
- 3) Strategi meningkatkan pendapatan dibuat untuk penciptaan kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok penduduk miskin dan hampir miskin. Di sisi lain, pendekatan mengurangi beban pengeluaran penduduk kelompok yang sama telah dilakukan berupa subsidi atas pengeluaran kebutuhan pokok serta program perlindungan sosial.
- 4) Cakupan ketenagakerjaan informal pada tahun 2019 baru mencapai 2,71 juta pekerja yang terdaftar atau 3,85% dari perkiraan 70,5 juta adalah memberikan kesadaran pada pemberi kerja mengenai tanggung jawab memberikan jaminan terkait pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja serta jaminan kesehatan. Perlu dilihat lebih lanjut tentang kemampuan membayar terkait dengan jaminan: kecelakaan kerja (JKK), kematian (JKm), hari tua (JHT), pensiun (JP) pada pekerja informal. Pelayanan dan manfaat JKN, JKK, JKm, JHT dan Jaminan Pensiun (JP), yang belum mencakup kelompok penduduk tertentu yaitu berkebutuhan khusus. Dari sisi pelayanan kesehatan, permasalahan disparitas ketersediaan, kualitas, dan kapasitas merupakan isu utama.

Terjadi krisis akibat pembatasan kegiatan ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada penambahan pengangguran akibat diberlakukannya PHK sebagian pada hampir semua kegiatan ekonomi. Pendapatan hampir seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat tergelong 40% terbawah, menurun. Demikian juga dampak pada penambahan penduduk miskin.

2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

A. Pengantar

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) Tujuan 2 adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan ini dicapai apabila setiap orang, khususnya warga miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan termasuk ibu hamil, bayi dan disabilitas memiliki akses atas pangan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun, untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif, dan produktif. Target menghilangkan kelaparan dan menjamin akses pangan bagi semua orang (2.1) dan target menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi (2.2) merupakan hasil dari pembangunan sistem pangan, perbaikan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.

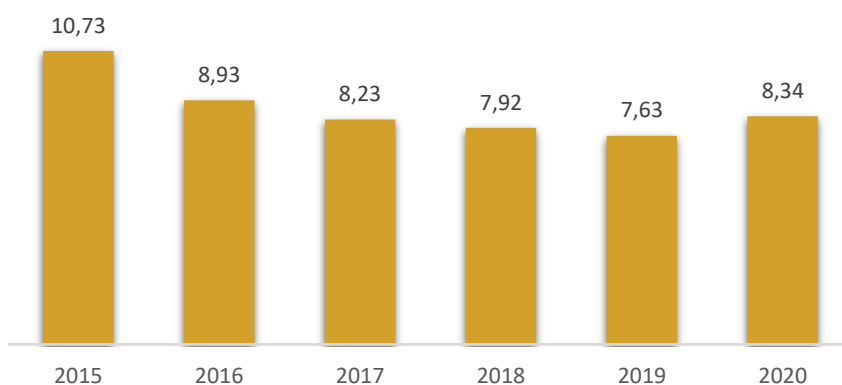
Dalam periode lima tahun terakhir (2015-2019) telah dilaporkan kemajuan dalam pencapaian sasaran dari beberapa indikator TPB/SDGs tujuan 2, namun ada juga beberapa indikator lainnya yang pencapaian sarannya memerlukan upaya lebih besar lagi. Tren capaian positif selama periode lima tahun tersebut terdisrupsi pada tahun berikutnya, karena terjadinya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 yang melanda semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Pandemi berdampak pada pelambatan pertumbuhan bahkan resesi ekonomi yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, serta pada akhirnya menurunkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat. Selain itu, diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak munculnya pandemi ini mengakibatkan terganggunya aktivitas ekonomi dan kinerja sistem pangan, dan terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan pemantauan tumbuh kembang anak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengupayakan perluasan jaring pengaman sosial (*social safety net*) berupa bantuan sosial, salah satunya untuk melindungi daya beli dan menjaga pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat.

B. Status Capaian

1. Menghilangkan Kelaparan dan Menjamin Akses Pangan

1.a. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi (diukur dalam kalori) untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Data untuk menganalisis perkembangan PoU diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS berbagai tahun) yang diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dalam periode 2015-2019 angka PoU membaik dari 10,73% menjadi 7,63%. Angka capaian ini masih lebih besar dari sarannya yaitu 6,69% (Bappenas 2019), namun arah kemajuannya sudah cukup signifikan. Tren positif ini terdisrupsi dengan munculnya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Angka PoU tahun 2020 kembali meningkat menjadi 8,34% lebih besar dari capaian tahun 2017, yang berarti telah terjadi penurunan ketahanan pangan yang cukup signifikan (Gambar 2.10).



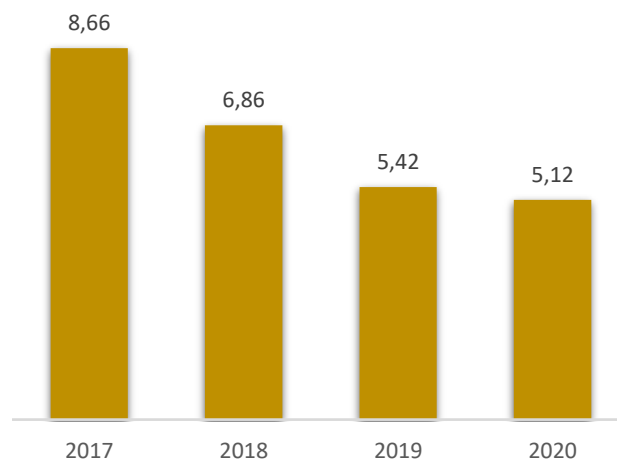
Gambar 2.10 Prevalensi ketidakcukupan pangan (PoU), 2015-2020

Sumber: BPS dari Susenas (Maret), diolah

1.b. Prevalensi kerawanan pangan (FIES)

Prevalensi *Food Insecurity Experience Scale* (FIES) atau Skala Pengalaman Kerawanan Pangan menggambarkan ketidakmampuan rumah tangga atau individu dalam mengakses makanan yang dibutuhkan secara reguler. Angka ini juga menggambarkan besarnya kerawanan pangan sedang dan berat. Prevalensi FIES periode 2017-2019 menurun (membaik) dari 8,66% menjadi 5,42% (BPS berbagai tahun). Dibandingkan dengan sasaran pada tahun 2019 sebesar 5,79 (Bappenas 2019), capaian ini melebihi sarannya dengan penurunan yang cepat yaitu rata-rata 1,62%/tahun. Berbeda dengan angka PoU, prevalensi FIES pada tahun 2020 lebih rendah (membaik) dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,12% walaupun selisih penurunannya kecil dibandingkan periode tiga tahun sebelumnya (0,3%) (Gambar 2.11).

Tren positif ini salah satunya merupakan hasil dari respons cepat pemerintah memberikan bantuan sosial berupa transfer uang dan/atau pangan yang cukup masif kepada penduduk berpendapatan rendah dan yang kehilangan pekerjaan sementara sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Apabila bantuan pemerintah ini tidak ada atau terlambat, dampak sosial pandemi ini akan lebih buruk lagi (UNICEF, UNDP, Prospera, dan SMERU, 2021).



Gambar 2.11 Prevalensi FIES, 2017-2020

Sumber: BPS dari Susenas (Maret 2020), diolah.

Dinamika Pencapaian Ketahanan Pangan

Membaiknya ketahanan pangan nasional periode 2015-2019, yang tercermin dari penurunan angka PoU dan prevalensi FIES sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, terjaganya kestabilan pasokan dan harga pangan. Hal terakhir ini didukung oleh upaya khusus pemerintah dalam peningkatan produksi pangan pokok dan penting dalam negeri dan pengembangan cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat. Kemajuan tersebut terganggu atau terdisrupsi pada tahun 2020 karena terjadinya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia sejak awal tahun. Secara umum pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat utamanya kelompok penduduk yang bekerja sebagai buruh di sektor industri dan di sektor informal (Suryana et al 2020, Robins et al 2020).

Belanja pemerintah untuk perlindungan sosial tahun 2020 dianggarkan sebanyak Rp 203,9 triliun atau sekitar 29,3% dari total biaya penanganan COVID-19 sebesar 695,2 triliun (Kedepatian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas 2021). Dalam program perlindungan sosial, pemerintah memperluas penerima manfaat dari program yang sudah ada sebelumnya. Pemerintah meningkatkan jumlah rumah tangga penerima manfaat pada Program Kartu Sembako dari 15,6 juta menjadi 20 juta rumah tangga berpendapatan rendah, dengan pemberian bantuan pangan non tunai (BPNT) meningkat dari Rp 150.000/bulan menjadi Rp 200.000/bulan. Pemerintah memperluas juga cakupan penerima perlindungan sosial dengan program baru seperti bantuan uang untuk masyarakat paling terdampak, diskon biaya listrik, dan program Kartu Prakerja, yaitu program pengembangan kompetensi yang ditujukan untuk pencari kerja ataupun yang terkena pemutusan hubungan kerja.

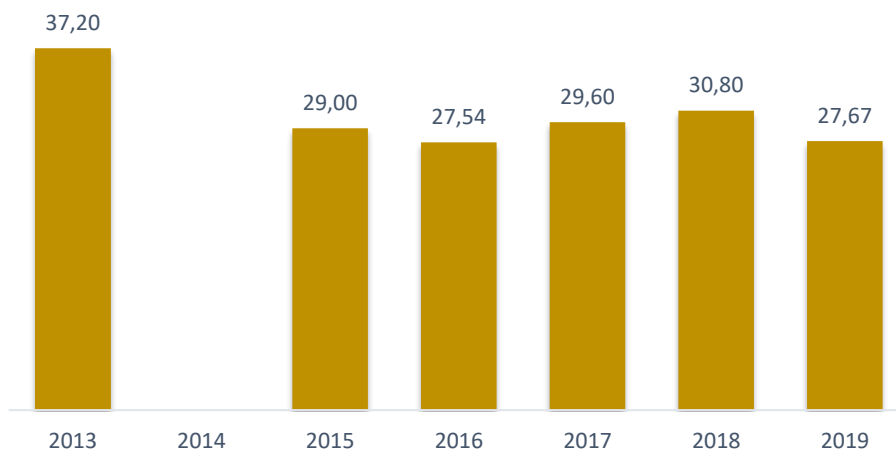
Dengan situasi pandemi COVID-19 masih mempengaruhi dinamika kehidupan yang mempersulit pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, dan penerimaan pendapatan bagi kelompok berpendapatan rendah, berbagai bentuk bantuan atau perlindungan sosial masih tetap diperlukan. Pelaksanaan distribusi paket bantuan sosial perlu dipertajam dalam hal kelancaran dan kecepatan distribusi, ketepatan penerima sasaran, dan keutuhan paket bantuan.

Sektor pertanian yang mendominasi perekonomian perdesaan memiliki resiliensi atau ketangguhan yang cukup tinggi dalam menghadapi guncangan atau krisis yang diakibatkan oleh guncangan dari luar (*external shock*) seperti krisis ekonomi dan politik tahun 1997/1998, krisis moneter internasional tahun 2008 dan pandemi COVID-19 tahun 2020 (Suryana et al. 2020, Yusuf et al 2020). Pada awal masa pandemi, sektor pertanian dan sektor informal di perdesaan mampu menjadi katup pengaman menampung penduduk kota yang kehilangan pekerjaan kembali ke desa dan proses produksi pertanian tidak terpengaruh secara signifikan.

2. Memenuhi Kebutuhan Gizi

2.a. Prevalensi *stunting* pada anak balita

Data *stunting* pada anak di bawah usia lima tahun (balita) diperoleh dari Profil Kesehatan Indonesia (Kementerian Kesehatan 2016, 2017, 2018a), Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) (Kementerian Kesehatan 2013, 2018b) dan Studi Status Gizi Indonesia tahun 2019 (BPS dan Kementerian Kesehatan 2020). Pada tingkat nasional, prevalensi *stunting* pada balita ditargetkan menurun dari 37,2% tahun 2013 menjadi 29,1% (2019). Prevalensi *stunting* tahun 2019 sebesar 27,67%, melampaui target yang ditetapkan (Gambar 2.12).

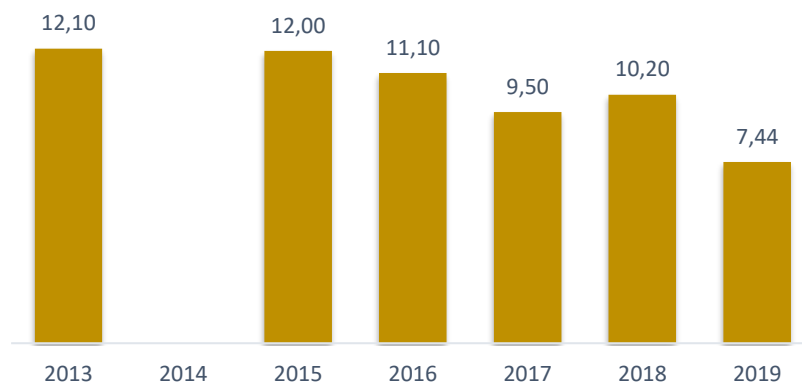


Gambar 2.12 Prevalensi *stunting* pada balita, 2013-2019

Sumber: Riskesdas (2013, 2018); Profil Kesehatan Indonesia 2015-12017. SSGI (2019).
Catatan: data 2014 tidak tersedia.

2.b. Prevalensi *wasting* pada anak balita

Wasting adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang lebih rendah dibandingkan dengan standar *World Health Organization* (WHO). Sumber data untuk prevalensi *wasting* sama dengan untuk prevalensi *stunting*. Dalam periode tahun 2015-2019 secara nasional prevalensi *wasting* menurun cukup signifikan dari 12,00% menjadi 7,44%. Dibandingkan dengan sasaran tahun 2019 sebesar 8,7%, capaian prevalensi *wasting* tersebut lebih baik (Gambar 2.13).



Gambar 2.13 Prevalensi *Wasting* pada Balita, 2013-2019

Sumber: Riskesdas (2013, 2018); Profil Kesehatan Indonesia 2015-12017. SSGI (2019)
Catatan: data 2014 tidak tersedia.

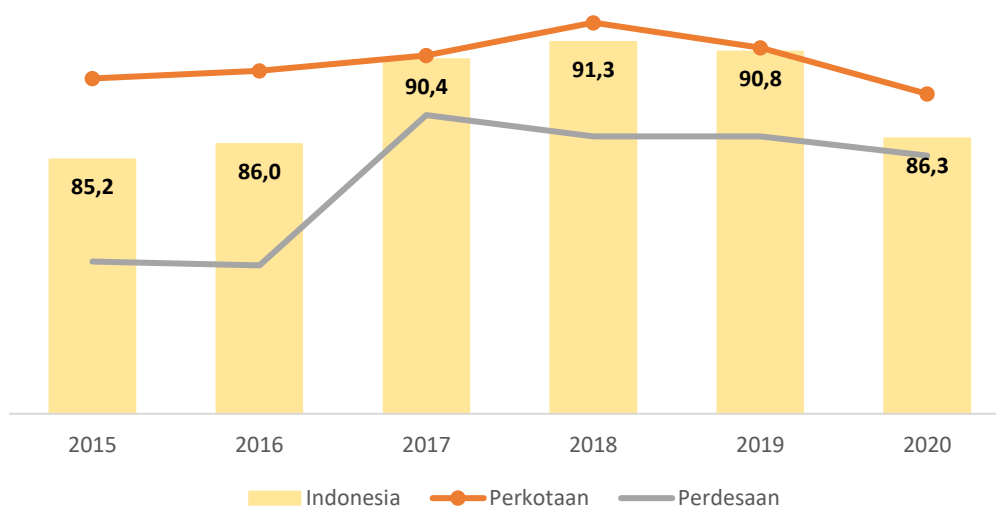
2.c. Kualitas Konsumsi Pangan

Kualitas konsumsi pangan diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian dengan memanfaatkan data Susenas dari BPS. Skor ideal PPH adalah 100, yang menggambarkan komposisi kelompok pangan utama yang dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif, dan produktif. Skor PPH ini dihitung berdasarkan angka kecukupan energi

2.000 kilo kalori/kapita/hari (BKP 2020). Selama periode 2015-2018 skor PPH menunjukkan kecenderungan membaik dari 85,2 menjadi 91,3; kemudian sedikit menurun pada tahun 2019 dengan skor 90,8. Dibandingkan dengan target skor PPH tahun 2019 sebesar 92,5%, capaian tersebut masih di bawah (Gambar 2.14). Penurunan skor PPH tahun 2019 dapat disebabkan oleh perubahan harga relatif antar kelompok pangan, karena pendapatan/kapita pada tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya.

Secara konsisten, selama periode 2015-2019 skor PPH di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Pada tahun 2019 skor PPH di perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 91,0 dan 86,4. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih terbuka dan akses terhadap pasar pangan yang lebih baik di perkotaan menyebabkan kualitas pangan rumah tangga di perkotaan lebih baik dibandingkan di perdesaan.

Pada tahun 2020 skor PPH menurun cukup besar (2,2 poin) dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 86,3 dan lebih rendah dibandingkan posisi 2017 (Gambar 2.14). Penurunan skor PPH dari tahun 2019 ke 2020 sejalan dengan menurunnya PoU pada waktu yang sama. Kedua indikator ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi kuantitas dan kualitas asupan makanan pada tingkat individu dan rumah tangga.



Gambar 2.14 Skor PPH Nasional, Perkotaan, dan Perdesaan Indonesia, 2015-2020

Sumber: BKP, diolah dan dijustifikasi dari Susenas (Maret) untuk angka 2015-2019 dan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian untuk angka 2020.

Keterangan: Dihitung dengan menggunakan angka kecukupan energi (AKE) = 2.000 kkal/kap/hari.

2.d. Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil

Anemia pada ibu hamil terjadi jika kadar hemoglobin darah di bawah standar normal sesuai umur kehamilan. Menurut WHO (2001) anemia berdampak negatif pada perkembangan kognitif dan motorik dan kapasitas kerja, dan di antara perempuan hamil, anemia defisiensi besi dikaitkan dengan hasil reproduksi yang merugikan, termasuk meningkatnya risiko

kematian ibu, persalinan prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah, dan penurunan simpanan zat besi untuk bayi, yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan/.

Anemia pada ibu hamil merupakan masalah gizi yang belum dapat dipecahkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari besarnya prevalensi anemia dari waktu ke waktu. Pada tahun 2015 prevalensi indikator ini sebesar 37,1%, meningkat menjadi 48,9% pada tahun 2018, padahal target yang ditetapkan untuk tahun 2019 sebesar 28,0%. Sebanyak 84,6% anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok usia 15-24 tahun. Jarak antara target dengan capaian penurunan anemia pada ibu hamil sangat lebar, sehingga masih perlu upaya komprehensif yang terencana dengan baik dan masif untuk mampu menurunkannya secara cepat. Sementara itu, *World Health Assembly* (WHA) menentukan target penurunan 50 % anemia pada perempuan usia reproduksi pada akhir tahun 2025.

Untuk mencegah anemia pada ibu hamil, Kementerian Kesehatan melaksanakan program pemberian TTD minimal sebanyak 90 tablet selama kehamilan. Cakupan pemberian TTD pelaksanaannya baru mencapai sekitar 37,7% (Riskesmas 2018). Dengan melihat kecenderungan anemia yang terjadi selama ini dan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian rumah tangga, dikhawatirkan target global maupun nasional tersebut akan sulit dicapai. Salah satu opsi penanggulangan anemia dilakukan dengan cara pemberian *Multiple Micronutrient Supplementation* (MMS) yang dilaporkan *cost effective* bagi penanganan permasalahan kesehatan pada ibu hamil (*Nutrition International*, 2019). Pelaksanaannya perlu dipersiapkan dengan lebih baik menyangkut aspek kebijakan, kemampuan produksi dalam negeri, sistem distribusi, dan monitoring serta evaluasi dampaknya.

3. Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian, Pendapatan Petani Skala Kecil, dan Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan

3.a. Produktivitas tenaga kerja pertanian dan pendapatan petani skala kecil

Data dua indikator pada target 2.3 TPB/SDGs Tujuan 2 masih terbatas, hanya untuk tahun 2020, belum didisagregasi berdasarkan subsektor lingkup pertanian, dan hanya meliputi tiga provinsi saja, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB. Data diperoleh dari hasil Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) 2020 yang dilaksanakan BPS (2021). Untuk dapat dibandingkan secara internasional, nilai produksi dan pendapatan usaha tani skala kecil dinyatakan dalam US Dolar *Purchasing Power Parity* (USD PPP) atau Paritas Daya Beli dalam dolar Amerika Serikat. Kedua indikator tersebut adalah indikator 2.3.1* Volume Produksi per Tenaga Kerja Pertanian (produktivitas tenaga kerja pertanian) menurut subsektor (VP/TKP) dan indikator 2.3.2* Pendapatan Produsen Pertanian Skala Kecil menurut subsektor.

Nilai indikator VP/TKP skala kecil pada tahun 2020 di ketiga provinsi secara agregat sebesar US\$ PPP 36,30/hari kerja atau Rp 172.183/hari kerja (berdasarkan nilai konversi dari Bank Dunia untuk tahun 2020, yaitu Rp 4.743,337 per USD PPP). Nilai produktivitas tenaga kerja petani skala kecil di provinsi Jawa Barat sebesar USD PPP 43,58; Jawa Timur USD PPP 28,52; dan NTB USD PPP 20,15.

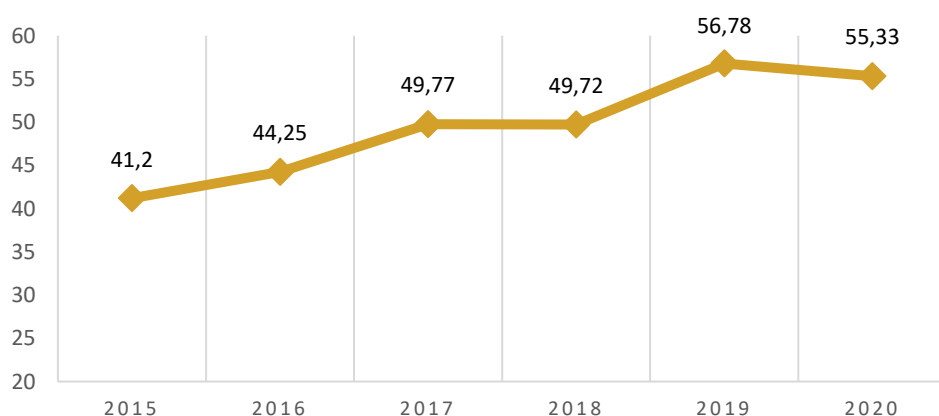
Produsen pertanian (petani) skala kecil didefinisikan sebagai produsen yang secara struktural tidak tergantung pada tenaga kerja upahan tetap dan yang mengelola kegiatan

produksinya terutama menggunakan tenaga kerja keluarga. Usaha tani skala kecil di ketiga provinsi di Indonesia dicirikan apabila dalam kurun waktu satu tahun mengelola lahan kurang dari 0,16 hektare, memelihara ternak kurang dari 0,61 unit ternak tropika (UTK), dan memperoleh pendapatan kurang dari USD PPP 1.044,169 (BPS 2021). Berdasarkan definisi tersebut, proporsi petani skala kecil di provinsi Jawa Barat sebesar 35,82%, Jawa Timur 21,15%, NTB 23,0%, dan agregasi dari tiga provinsi tersebut sebesar 28,77%.

Nilai indikator pendapatan produsen pertanian skala kecil rata-rata pada tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan NTB, masing-masing sebesar USD PPP 683,37; USD PPP 573,83; dan USD PPP 466,73. Nilai pendapatan bersih petani skala kecil di ketiga provinsi secara agregat sebesar USD PPP 641,97 atau sekitar Rp 3,05 juta, sesuai konversi nilai tukar seperti disebutkan di atas.

3.b. Nilai tambah pertanian per tenaga kerja

Data indikator nilai tambah pertanian per tenaga kerja (NTP/TKP) menurut subsektor belum tersedia (indikator 2.3.1.(a)). Data dari BPS yang tersedia baru untuk sektor pertanian secara keseluruhan. NTP/TKP periode 2015-2019 menunjukkan tren meningkat cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 8,5%/tahun. Pada tahun 2015 NTP/TKP sebesar Rp41,20 juta dan pada tahun 2019 menjadi Rp56,78 juta. Besaran NTP/TKP tahun 2019 jauh lebih tinggi dari sasarannya sebesar Rp46,9 juta. Pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan NTP/TK tahun 2020, yaitu turun sekitar 2,6% dari tahun sebelumnya menjadi Rp55,33 juta (Gambar 2.15). Sekali lagi, penurunan ini menunjukkan sektor pertanian terdampak oleh pandemi COVID-19, walaupun tetap menjadi penopang ekonomi nasional, terlebih pada saat terjadi krisis seperti saat pandemi ini. Pada tahun 2020 PDB pertanian masih tetap dapat tumbuh positif sebesar 1,75%, namun sekitar 50% lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 3,6%. Sementara itu, pada tahun 2019 tingkat pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,02% dan pada tahun 2020 mengalami resesi sebesar -2,07%.



Gambar 2.15 Nilai tambah pertanian per tenaga kerja (Rp juta), 2015-2020

Sumber: BPS

Keterangan: *) Angka sementara; **) Angka sangat sementara

3.c. Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan

Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan (*sustainable*) merupakan salah satu indikator TPB/SDGs tujuan 2 target 2.4. Pengukuran indikator 2.4.1 ini mencakup tiga dimensi, terdiri dari 11 tema dan untuk setiap tema ditetapkan satu subindikator. Tiga dimensi berkelanjutan tersebut meliputi (i) dimensi ekonomi dengan tema produktivitas lahan, profitabilitas, dan ketahanan; (ii) dimensi lingkungan dengan tema kesuburan tanah, penggunaan air, risiko penggunaan pupuk, risiko penggunaan pestisida, dan keanekaragaman hayati; dan (iii) dimensi sosial meliputi pekerjaan yang layak, keamanan pangan, dan kepemilikan lahan. Penilaian berkelanjutan untuk setiap subindikator diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu (i) sesuai dengan prinsip berkelanjutan (sesuai dengan yang ingin dicapai), (ii) dapat diterima berciri berkelanjutan, dan (iii) tidak perdesaan. Rumus indikator 2.4.1 menetapkan proporsi areal pertanian produktif adalah persentase terendah untuk salah satu dari 11 subindikator yang masuk pada kriteria sesuai dengan “yang diinginkan” dan “dapat diterima” berdasarkan kriteria berkelanjutan.

Data untuk indikator tersebut bersumber dari SITASI 2020 (BPS, 2021) mencakup data gabungan dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; untuk tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB. Berdasarkan rumus tersebut, di ketiga provinsi tersebut proporsi areal pertanian produktif berkelanjutan sebesar 10,28%.

Namun demikian, dari hasil perhitungan untuk 11 subindikator diketahui terdapat delapan subindikator yang masuk pada kategori ‘diinginkan’ dan ‘dapat diterima’ memenuhi prinsip berkelanjutan lebih dari 90%. Kedelapan subindikator tersebut adalah: profitabilitas (97,13%) dan ketahanan (91,84%) pada dimensi ekonomi; kesuburan tanah (95,35%) penggunaan air (91,40%), dan keanekaragaman hayati (99,45%), dan penggunaan pestisida (98,49%) pada tema lingkungan; serta keamanan pangan (99,79) dan kepemilikan lahan (98,06%) pada tema sosial (Tabel 2.10).

Tabel 2.10 Proporsi lahan pertanian produktif dan berkelanjutan, di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB (gabungan), 2020

Dimensi perdesaan dan tema	% penggunaan lahan berdasarkan kategori pertanian berkelanjutan			
	Diinginkan	Dapat diterima	Berke- lanjutan (2+3)	Tidak ber- kelanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Ekonomi				
1. Produktivitas lahan	8,12	2,16	10,28	89,72
2. Profitabilitas	32,05	65,08	97,13	2,87
3. Resiliensi	90,33	1,52	91,84	8,16
Dimensi Lingkungan				
1. Kesuburan tanah	91,37	3,98	95,35	4,65
2. Penggunaan air	87,24	4,16	91,40	8,60
3. Penggunaan pupuk	30,37	9,46	39,83	60,17
4. Penggunaan pestisida	36,21	62,28	98,49	1,51
5. Keanekaragaman hayati	77,43	22,02	99,45	0,55

Dimensi perdesaan dan tema	% penggunaan lahan berdasarkan kategori pertanian berkelanjutan			
	Diinginkan	Dapat diterima	Berke- lanjutan (2+3)	Tidak ber- kelanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Sosial				
1. Pekerjaan yang layak	65,44	0,00	65,44	34,56
2. Keamanan pangan	99,66	0,13	99,79	0,21
3. Kepemilikan lahan	82,52	15,55	98,06	1,94

Sumber: BPS 2020c

3.d. Proporsi lahan pertanian pangan berkelanjutan

Indikator 2.4.1 (a) adalah proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Indikator ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Penetapannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan peraturan daerah (Perda). Mengingat sawah merupakan lahan produksi pangan pokok masyarakat Indonesia (utamanya padi) yang memiliki nilai sosial, ekonomi dan lingkungan, pada saat ini lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang dicatat Kementerian Pertanian adalah lahan baku sawah.

Dalam periode tahun 2012 sampai 2020, dari 535 kabupaten/kota terdapat 110 pemerintah daerah yang telah menerbitkan Perda tentang Penetapan LP2B, meliputi 28 dari 34 provinsi di Indonesia. Total luas kumulatif LP2B yang ditetapkan seluas 1.974.415 hektare, sebagian besar merupakan lahan sawah beririgasi teknis, semi teknis, sederhana, dan perdesaan; lahan reklamasi, rawa pasang surut dan nonpasang surut; dan lahan tadah hujan. Pada tahun 2019 total luas lahan baku sawah sebesar 7,46 juta hektare (Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional), Dengan menggunakan luas lahan baku sebagai denominator, maka proporsi luas P2LB sekitar 25,6%, masih jauh lebih rendah dari sasaran proporsi LP2B lahan sawah sebesar 50%.

4. Faktor pendukung pengembangan sistem pertanian berkelanjutan

4.a. Pengelolaan sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian

Indikator 2.5.1 adalah jumlah aksesori sumber daya genetik (SDG) tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik untuk jangka menengah ataupun jangka panjang (SDG dikonservasi). Data yang tersedia hanya untuk SDG tanaman. Sejak lebih dari 15 tahun lalu Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), Kementerian Pertanian sudah mengelola SDG tanaman untuk pangan dan pertanian baik di fasilitas konservasi ataupun di lapangan, termasuk membangun Bank Genetik Pertanian (Bank Gen) yang pengelolaannya dilakukan oleh Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BB Biogen), Balitbangtan.

Informasi dari BB Biogen (2021) menunjukkan hingga tahun 2015 data jumlah dan daftar koleksi SDG tanaman belum tersedia. Pada tahun 2019 dilaporkan jumlah koleksi SDG

tanaman yang tersimpan dalam jangka menengah dan/atau jangka panjang sebanyak 10.900 aksesori yang terdiri dari 32 komoditas; sebanyak 8.400 aksesori dalam bentuk benih dan 2.500 tersimpan sebagai tanaman di lapangan. Dari sejumlah aksesori tersebut, yang telah terdaftar dalam penyimpanan jangka menengah dan jangka panjang adalah 4.594 aksesori. Sementara itu, pada tahun 2020 tersimpan SDG tanaman sebanyak 5.246 aksesori, atau bertambah 652 aksesori. Sementara itu, pengelolaan sumber daya genetik ternak untuk pangan dan pertanian belum tersedia.

4.b. Proporsi hewan ternak berisiko punah

Indikator lainnya adalah proporsi hewan ternak yang diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan, yaitu (i) berisiko, (ii) tidak berisiko, dan (iii) risiko yang tidak diketahui. Definisi berisiko punah jika suatu rumpun ternak dengan jumlah betina produktif ≤ 100 ekor dan jantan produktif ≤ 5 ekor. Hewan ternak yang dinilai berisiko punah di Indonesia diidentifikasi hanya satu rumpun ternak yaitu kambing Gembrong dari Bali. Dengan mengacu pada total hewan ternak lokal Indonesia yang dilaporkan kepada *Domestic Animal Diversity-Information System (DAD-IS)* FAO sebanyak 216 rumpun, maka persentase ternak domestik yang berisiko punah sebesar 0,46%, selebihnya tidak berisiko.

Populasi kambing Gembrong dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, sejalan dengan berkurangnya nilai ekonomis dari keunggulan ternak ini yaitu bulu yang panjang sebagai umpan untuk memancing sudah semakin kurang diminati nelayan. Data dari Loka Penelitian Kambing Potong (Lolit Kambing) Balitbangtan di Sei Putih, Sumatera Utara menunjukkan populasi kambing potong di lembaga penelitian ini pada tahun 2013 sebanyak 52 ekor (17 jantan dan 35 betina), pada tahun 2017 berkurang menjadi 23 ekor, kemudian kembali meningkat sehingga di tahun 2019 menjadi 40 ekor (20 jantan dan 20 betina). Sesuai dengan salah satu fungsinya, Lolit Kambing melaksanakan kegiatan pelestarian SGD ternak kambing Gembrong. Menurut peneliti ahli utama yang menangani permasalahan ini pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan (Puslitbangnak), Balitbangtan (2021, komunikasi pribadi) dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali (2018) upaya untuk pelestarian kambing Gembrong dilakukan secara terus menerus, namun karena kambing Gembrong bukan tipe pedaging yang menguntungkan untuk dibudidayakan maka minat masyarakat mengembangkan usaha ternak ini terbatas sehingga populasinya setiap tahun semakin menyusut.

4.c. Anomali harga pangan

Target 2.c dalam TPB/SDGs Tujuan 2 yaitu mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas, termasuk membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim. Capaian indikator (2.c.1*) diukur dengan indikator anomali harga pangan (IAHP), yaitu *the normalized difference of the compound growth rate of prices* dari nilai tengah historisnya untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan sebelumnya. Pergerakan harga-harga pangan diklasifikasikan berdasarkan nilai IAHP sebagai berikut: Normal: $-0,5 \leq \text{IAHP} < 0,5$; moderat tinggi: $0,5 \leq \text{IAHP} < 1$; dan abnormal tinggi: $\text{IAHP} \geq 1$.

Pada tahun 2019 dan 2020 nilai IAHP nasional masing-masing sebesar 0,21 dan 0,43, termasuk pada katagori normal. Pada tahun 2020, di 24 dari 33 ibukota provinsi nilai IAHP berada pada kategori normal, sedangkan yang termasuk katagori abnormal atau sangat tinggi ($IAHP \geq 1$) hanya ditemukan di dua ibukota provinsi, yaitu Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (1,35) dan Kota Ambon, Provinsi Maluku (1,14); dan di tujuh kota lainnya termasuk cukup tinggi ($0,5 \leq IAHP < 1$), yaitu di Banda Aceh, Bandung, Denpasar, Kupang, Palangkaraya, Manado, dan Mamuju. Dari data IAHP tersebut, secara umum dapat disimpulkan volatilitas atau pergerakan harga-harga pangan secara nasional terjaga pada tingkat normal. Komoditas pangan yang dijaga stabilitas pasokan dan harganya oleh pemerintah antara lain padi, beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabai merah, minyak goreng, gula pasir, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam.

C. Tantangan

Permasalahan dan tantangan untuk mencapai target TPB/SDGs tujuan 2 terkait erat dengan pembangunan sistem pangan, pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam **memproduksi pangan** tersebut antara lain:

- a) Konversi lahan pertanian pangan ke penggunaan lain berlangsung terus-menerus yang menurunkan kapasitas memproduksi pangan; sementara perluasan/pembukaan lahan pertanian sebagai penggantinya terbatas pada lahan sub-optimal yang harus dikelola sesuai prinsip perdesaan;
- b) Degradasi kualitas sumber daya air dan perairan serta persaingan dalam pemanfaatan air dengan sektor industri semakin meningkat;
- c) Usaha pertanian pangan didominasi oleh usaha tani skala kecil (rata-rata luas lahan pertanian 0,5 ha luas lahan sawah 0,2 ha) dengan rata-rata usia petani yang menua (*aging farmer*) yang mengakibatkan akses pada sumber teknologi, informasi, pasar, dan pembiayaan usaha terbatas;
- d) Frekuensi dan intensitas kejadian perubahan iklim ekstrim semakin tinggi yang berdampak pada penurunan produktivitas tanaman pangan dan peningkatan risiko gagal panen.

Tantangan aspek lainnya dalam penyediaan pangan terkait dengan rantai pasok pangan dan pengembangan cadangan pangan, yaitu:

- a) Prasarana logistik dan distribusi pangan nasional belum merata ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah timur Indonesia;
- b) Proporsi kehilangan hasil dan pemborosan pangan (*food losses and waste*) sepanjang rantai pasok pangan sampai dimanfaatkan oleh konsumen masih besar sekitar sepertiga dari produksi nasional (SDGs Tujuan 12, target 12.3); dan
- c) Cadangan pangan daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan lumbung pangan desa dan masyarakat belum terbangun menyeluruh di setiap daerah.

Permasalahan dan tantangan dalam **aspek keterjangkauan pangan** mencakup permasalahan yang bersifat fisik dan ekonomis. Keterjangkauan fisik masih dialami oleh

masyarakat yang berada di daerah dengan pembangunan prasarana transportasi yang masih terbatas, termasuk daerah terpencil serta pulau-pulau kecil serta terluar. Masyarakat di wilayah timur Indonesia menghadapi permasalahan ini lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pulau Jawa dan Sumatera. Keterjangkauan ekonomi terkait dengan daya beli atau pendapatan rumah tangga, yang dapat ditera dengan angka kemiskinan. Pada tahun 2020 (Maret) jumlah penduduk miskin sebanyak 26,42 juta orang atau 9,78% dari total penduduk secara nasional, yang akan kesulitan dalam memenuhi konsumsi pangan yang cukup dan beragam bergizi seimbang dan aman. Sebanyak 15,26 juta orang atau 57,8% warga miskin tersebut tinggal di perdesaan

Permasalahan dan tantangan **aspek permintaan dan pola konsumsi pangan** yang dihadapi adalah: (a) Permintaan pangan meningkat secara berkelanjutan dalam jumlah, keragaman, kualitas, serta keamanan pangan; sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan rumah tangga, dan pengetahuan gizi masyarakat; (b) permintaan makanan jadi dan kebiasaan makan di luar rumah meningkat sejalan dengan urbanisasi yang terus berlangsung dan proporsi wanita bekerja yang terus meningkat; (c) karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dalam pemenuhan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang, yaitu (i) kemampuan atau daya beli rumah tangga berpendapatan rendah, (ii) pola konsumsi pangan rumah tangga belum memenuhi kaidah gizi, (iii) tingkat pengetahuan pangan dan gizi ibu rumah tangga masih rendah, dan (iv) kurang optimalnya pemanfaatan pangan lokal. Permasalahan gizi juga dipengaruhi oleh buruknya kondisi lingkungan seperti akses sanitasi dan air bersih, dan rendahnya akses pada fasilitas kesehatan.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya mempercepat penanganan permasalahan gizi pada anak balita lebih rumit lagi. Selain permasalahan di atas, **penurunan kekurangan gizi pada balita** juga berkaitan dengan: (a) rendahnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, (b) rendahnya cakupan imunisasi, (c) belum optimalnya praktik pemberian makanan dan anak balita, (d) kurang baiknya pola asuh keluarga, dan (e) terbatasnya cakupan perlindungan sosial pada keluarga kurang gizi.

Keseluruhan tantangan seperti diuraikan di atas intensitasnya menjadi lebih besar lagi dengan adanya pandemi COVID-19. Sampai pertengahan 2021 pandemi ini masih belum memperlihatkan tanda-tanda berakhir, baik secara global maupun di Indonesia. Pandemi ini mempengaruhi kemampuan dalam penyediaan pangan baik dari produksi dalam negeri atau melalui perdagangan internasional, menghambat kelancaran kinerja rantai pasok pangan, dan menurunkan kemampuan masyarakat, terutama golongan 40% pendapatan terendah, dalam memenuhi konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman. Kelompok yang paling terkena dampak pandemi ini adalah penduduk dengan pendapatan 40% terbawah (2 kuintil terbawah), termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui, balita, dan disabilitas. Pandemi ini juga menyebabkan disparitas perawatan kesehatan yang lebar dan menghadapi tantangan dalam penyediaan tenaga kesehatan yang cukup, sarana alat kesehatan dan obat-obatan serta pembiayaan yang sangat mahal.

2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

A. Pengantar

Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia merupakan isu yang kompleks dan dalam pencapaiannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kesenjangan pelayanan kesehatan, kesenjangan ekonomi, kesetaraan gender, perubahan iklim dan lingkungan, serta transisi epidemiologi penyakit menular dan tidak menular.

Penguatan sistem kesehatan merupakan hal utama dalam mencapai sasaran pembangunan kesehatan berkelanjutan. Sistem kesehatan mencakup pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, pemenuhan tenaga kesehatan serta farmasi dan alat kesehatan, penguatan tata kelola, pemberdayaan, pembiayaan dan sistem informasi kesehatan. Pencapaian sasaran pembangunan kesehatan berkelanjutan sangat bergantung pada peran aktif seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, serta mitra pembangunan.

Pandemi COVID-19 menyebabkan disrupsi sistem kesehatan. Pandemi COVID-19 selama lebih dari setahun juga mempengaruhi kehidupan seluruh penduduk semua usia terutama kelompok rentan, yaitu perempuan (di bidang kesehatan, pada aspek tertentu, mungkin laki-laki lebih rentan), usia dewasa dan lanjut usia dengan komorbid penyakit tidak menular, serta penyandang disabilitas. Pembatasan aktivitas berdampak pada seluruh penduduk pergi ke tempat pelayanan kesehatan, pelayanan obat, serta penyuluhan dan konsultasi kesehatan. Selain itu, pandemi COVID-19 membatasi tenaga kesehatan dalam pemberian layanan kesehatan serta menghambat rantai pasok ketersediaan farmasi dan alat kesehatan. Pandemi COVID-19 memberikan momen penting untuk kesiapsiagaan darurat kesehatan dan untuk investasi dalam layanan publik abad ke 21 yang kritis.

B. Status Capaian dan Tantangan

1. Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI)

Pada akhir pelaksanaan MDGs (2015), AKI telah menurun dari 346 kematian (SP 2010) menjadi 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015), yang berarti penurunan sebesar 2,4% setiap tahun (*Annual Reduction Rate/ARR*). Untuk mencapai target *Roadmap* SDGs Indonesia yaitu mencapai 131 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 dibutuhkan ARR sebesar 5% atau lebih, dua-tiga kali lipat dibandingkan upaya sebelumnya.

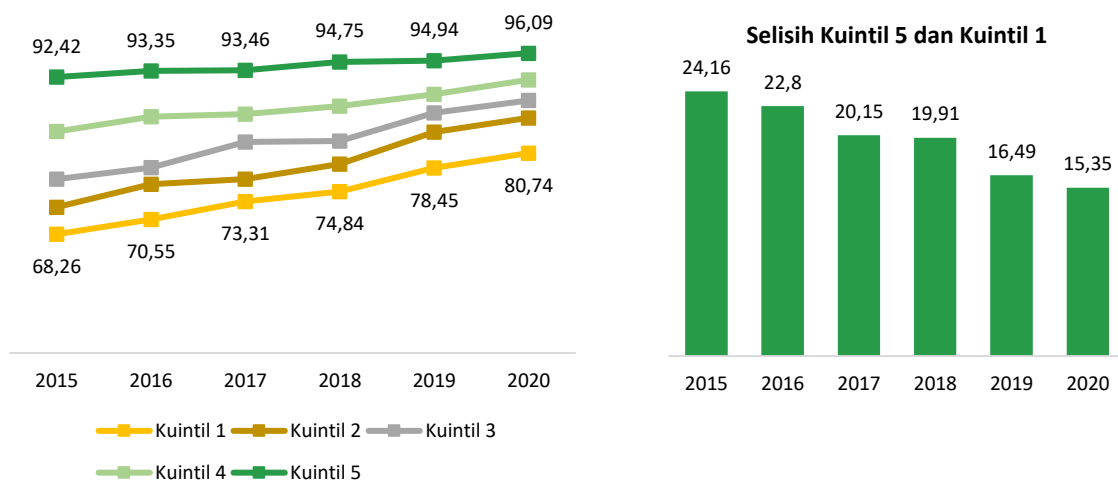
Terobosan atau inovasi program diperlukan untuk memenuhi target tersebut. Untuk merumuskan perubahan kebijakan yang signifikan agar target tercapai, perlu diketahui penyebab kematian ibu sehingga bisa dirumuskan alternatif intervensinya. Pola penyebab kematian ibu berdasarkan *Sample Registration System* (SRS) 2018 menunjukkan penyebab kematian ibu terbanyak adalah hipertensi dalam kehamilan (31,9%), perdarahan (26,9%), dan

komplikasi non-obstetri (18,5%). Hipertensi dalam kehamilan bila telah terdeteksi dari awal kehamilan bisa terkontrol dan kematian ibu bisa dicegah.

Selain itu faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan risiko kematian ibu, seperti anemia yang masih tinggi (48,9%), dan juga kurang energi kronik/KEK (17,3%) pada tahun 2018, perlu untuk diantisipasi.

Salah satu kunci keberhasilan penurunan AKI adalah memastikan **setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan proses melahirkan di fasilitas kesehatan**. Proporsi persalinan yang ditolong oleh **tenaga kesehatan terlatih** meningkat dari 91,51% (2015) menjadi 94,71% (2019) dan 95,16% (2020). Dengan kecenderungan seperti ini, atau ada kenaikan 0,45% per tahun, artinya bisa diasumsikan pada tahun 2024 persalinan oleh tenaga kesehatan bisa dicapai menjadi 97,41%. Peningkatan ini seharusnya terus diupayakan sampai semua persalinan bisa mencapai 100% pada tahun 2030.

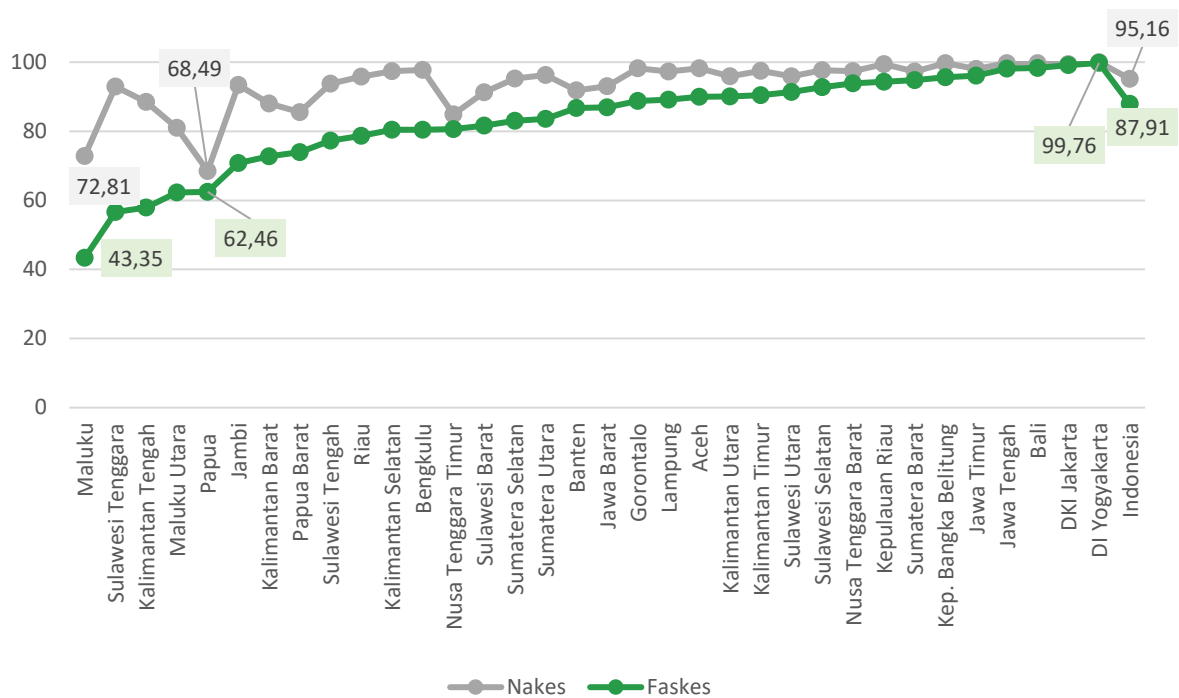
Persentase persalinan di fasilitas kesehatan juga meningkat dari 77,63 (2015) menjadi 85,94% (2019) dan 87,91% (2020). Dengan demikian, target RKP 2020 untuk mencapai persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 87% telah tercapai. Selain itu, terjadi **penurunan kesenjangan** akses persalinan di fasilitas kesehatan antara kelompok kuintil 5 (status ekonomi tertinggi) dan kuintil 1 (status ekonomi terendah). Penurunan kesenjangan antarstatus ekonomi merupakan salah satu kontribusi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jampersal.



Gambar 2.16 Tren proporsi persalinan di fasilitas kesehatan menurut status ekonomi, dan selisih kelompok Kuintil 5 dan kuintil 1, 2015-2020

Sumber: Susenas, BPS

Walaupun target RPJMN 2015-2019 telah tercapai, kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan maternal di fasilitas kesehatan. Terdapat kesenjangan antarwilayah,. Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan tertinggi tahun 2020 di Provinsi DI Yogyakarta (99,76%), sedangkan terendah di Provinsi Maluku (43,35%).



Gambar 2.17 Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan dan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan menurut Provinsi, 2020

Sumber: Susenas, BPS

Tantangan ke depan adalah:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi SDM, fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) termasuk menjamin ketersediaan obat kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan;
- 2) Perbaikan kesehatan ibu hamil, dan jika memungkinkan sebelum kehamilan terjadi, dengan mengurangi prevalensi anemia, dan perbaikan gizinya. Perlu dipastikan bahwa seluruh Ibu hamil dapat mengonsumsi tablet besi sekurang-kurangnya 120 tablet selama kehamilan, dan juga perbaikan konsumsi gizi selama kehamilan;
- 3) Peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi ibu dan remaja, serta pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil;
- 4) Penurunan *unmet need* KB untuk mencegah meningkatnya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), dan juga peningkatan akses dan layanan KB pasca persalinan;
- 5) Peningkatan akses informasi yang komprehensif untuk kesehatan reproduksi dan seksualitas, khususnya pada remaja;
- 6) Peningkatan status gizi wanita pra-hamil dan persiapan calon ibu yang berkualitas;
- 7) Memprioritaskan wilayah sasaran mempunyai AKI tinggi dan cakupan rendah persalinan yang aman oleh tenaga kesehatan; dan

- 8) Aksesibilitas layanan dan fasilitas kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilitas perlu menjadi pertimbangan, diikuti dengan peningkatan kapasitas petugas tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi.

2. Mengakhiri Kematian Bayi Baru Lahir dan Balita yang Dapat Dicegah

Angka kematian neonatal (AKN) dan balita (AKBa) menunjukkan penurunan signifikan sejak 1991 hingga tahun 2017. Berdasarkan SRS 2018, sebesar 27,4% kematian neonatal disebabkan oleh komplikasi intrapartum, 22,3% gangguan pernapasan dan 20,7% berat lahir rendah dan prematuritas. Target Global SDGs 2030 menurunkan AKN menjadi kurang dari 12 per 1.000 kelahiran hidup dan AKBa menjadi 25 per 1000 kelahiran hidup masih menjadi tantangan yang sulit karena penyebab kematian bayi baru lahir yang kompleks berkaitan erat dengan kondisi ibu pada masa kehamilan dan pascapersalinan.

Jika kondisi sebelum pandemi dapat dipertahankan, artinya dengan melihat proses penurunan AKBa dari tahun 2007 (44 per 1000 LH) ke tahun 2017 (32 per 1000 LH), atau ARR sebesar 1,2%, maka dapat diasumsikan AKBa pada tahun 2024 mungkin bisa menjadi 29,4 per 1000 kelahiran hidup. Jika ARR 1.2% bisa ditingkatkan dua kali lipat menjadi 2.4% dari periode 2020-2024, maka besar kemungkinan target 25 per 1000 kelahiran hidup bisa dicapai pada tahun 2030.

Oleh sebab itu, kualitas penanganan saat persalinan dan satu bulan pertama pasca melahirkan sangat penting dilakukan. Selain itu, imunisasi dan juga memperhatikan '*underlying causes*' dari kematian ibu memiliki peran yang penting dalam mencegah kematian pada bayi dan anak.

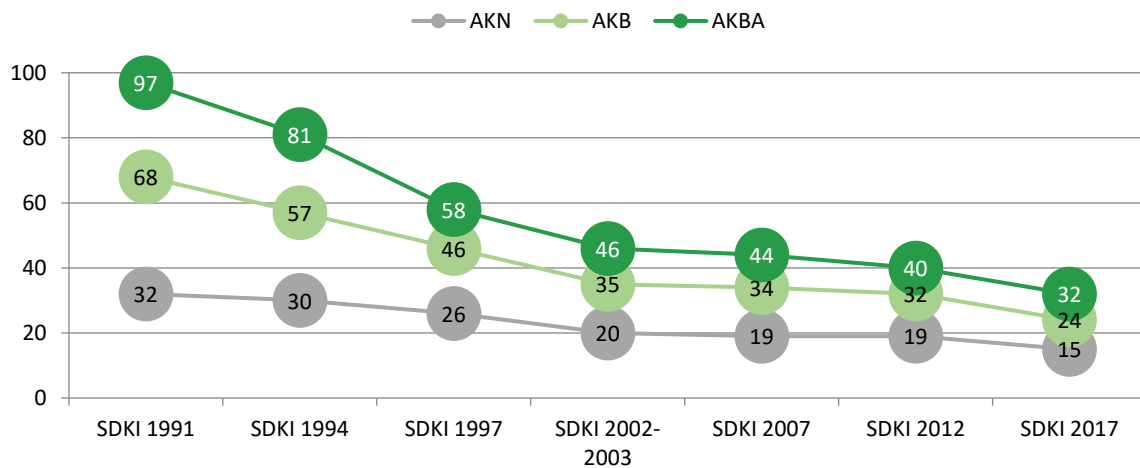
Tantangan dalam upaya penurunan kematian bayi baru lahir dan balita semakin bertambah dengan adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap penurunan layanan kesehatan bayi baru lahir dan balita. Cakupan imunisasi difteri, pertusis dan tetanus (DPT3), campak dan rubella (MR1) berkurang lebih dari 35% pada bulan Mei 2020 dibandingkan periode waktu yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh hambatan akses akibat penghentian layanan disertai dengan menurunnya permintaan disebabkan masyarakat takut tertular COVID-19.

Kerentanan bayi dan anak laki-laki terhadap penyakit secara medis telah diungkapkan. Bayi laki-laki lebih rentan terhadap penyakit. Pada awal kehidupannya indikator yang dipakai untuk mengukur pencapaian Tujuan 3 SDGs adalah AKB dan AKBa. Hasil SDKI berbagai tahun menunjukkan angka kematian bayi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan bayi perempuan. Berikut perbandingan berbagai angka kematian bayi/anak laki-laki dan perempuan pada tahun 2017 (Tabel 2.11).

Tabel 2.11 Angka kematian anak* untuk periode 5 tahun sebelum survei menurut jenis kelamin dan jenis indikator, 2017

Indikator	Laki-laki	Perempuan
Kematian Neonatal (NN)	19	12
Kematian Post Neonatal (PNN)	9	8
Kematian bayi (AKB)	28	20
Kematian anak 1-4 tahun	10	6
Kematian balita (AKBa)	37	26

Sumber: Laporan Hasil SDKI 2017, *per 1000 kelahiran hidup



Gambar 2.18 Tren AKN, AKB dan AKBa, 1991-2017

Sumber: SDKI

Tantangan ke depan adalah:

- 1) Peningkatan status kesehatan ibu hamil dan remaja perempuan untuk mencegah kematian neonatal yang disebabkan oleh komplikasi intrapartum, gangguan pernafasan, dan berat lahir rendah serta prematuritas;
- 2) Penguatan pelayanan kegawatdaruratan neonatal, bayi dan balita di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- 3) Peningkatan pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak;
- 4) Penguatan UKBM (desa siaga, kelas ibu hamil dan posyandu); dan
- 5) Peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama imunisasi dan manfaatnya kepada masyarakat umum

3. Mengakhiri Epidemi Penyakit Menular

Penyakit menular yang menjadi fokus perhatian dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan adalah malaria, HIV, TB-Paru, hepatitis B, serta penyakit tropis yang terabaikan, yaitu filaria dan kusta.

Tren kejadian malaria berdasarkan API (*Annual Paracite Incidence*) menurun dari 1,75 (2011) menjadi 0,84 per 1000 penduduk (2018), dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,94 per 1.000 penduduk. Namun, pencapaian target API dibawah 1 mampu dipertahankan sejak 2014 hingga saat ini.

Selain itu, jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria meningkat dari sebanyak 300 kabupaten/kota pada tahun 2019 menjadi 318 kabupaten/kota pada tahun 2020. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria ditargetkan menjadi 405 pada tahun 2024. Tiga provinsi, dimana seluruh wilayah kabupaten/kotanya telah mencapai bebas penularan malaria, yaitu DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Timur. Provinsi Papua Barat dan Papua merupakan dua provinsi dengan kejadian malaria tertinggi pada tahun 2019, tercatat 7,38 dan 64,03 per 1000 penduduk.

Kasus **HIV/AIDS** menunjukkan kecenderungan meningkat. Peningkatan tajam dari 2015 ke tahun 2017 untuk kasus HIV yaitu dari 30.935 kasus menjadi 48.300 kasus. Namun, pada tahun 2018, terjadi penurunan kasus HIV menjadi 46.659 kasus. Sedangkan kasus AIDS meningkat dari 9.215 kasus (2015) menjadi 10.190 kasus (2018). Secara kumulatif, jumlah kasus HIV adalah sebanyak 327.282 pada tahun 2018, dan jumlah AIDS sebesar 114.065 kasus.

Pada tahun 2018 dilaporkan infeksi baru HIV sebesar 0,24 per 1000 penduduk tidak terinfeksi. Upaya angka ini untuk tetap ditekan ditunjukkan pada tahun 2020 menjadi 0,21 kasus baru per 1.000 penduduk tidak terinfeksi. Kasus baru HIV/AIDS di Indonesia menurun sampai dengan 40% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, penanganan HIV/AIDS masih menghadapi tantangan global dengan adanya ketidaksetaraan dalam layanan pengobatan, dukungan, dan perawatan bagi Orang Dengan HIV AIDS (ODHA). Persentase ODHA yang menjalani terapi ARV (Antiretroviral) ditargetkan sebesar 60% pada tahun 2024. Di samping itu, pandemi COVID-19 juga telah memperburuk respon terhadap HIV/AIDS dengan terhambatnya produksi dan distribusi *anti-retroviral agency* (ARV) untuk pengobatan AIDS.

Untuk itu, diperlukan implementasi *Global AIDS Strategy 2021-2026* untuk memastikan pencapaian '3 Zero' HIV/AIDS dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, yaitu tidak ada lagi infeksi baru HIV; tidak ada lagi kematian akibat AIDS; dan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi pada ODHA. *Global TB report 2020* menunjukkan prevalensi TB di Indonesia menurun dari sebesar 312 per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 301 per 100.000 penduduk pada tahun 2020.

Indonesia juga telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam upaya mengakhiri epidemi **kusta dan filariasis**. Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati telah mencapai 100% (2020). Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta cenderung meningkat dari 368 kabupaten/kota (2019) menjadi 401 kabupaten/kota (Laporan Kinerja Ditjen P2P, 2020). Akan

tetapi perlu pertimbangan antisipasi pada penderita kusta yang sudah sembuh, walaupun tidak akan menjadi penular, mereka akan menjadi penyandang disabilitas. Selain itu mereka juga tetap akan menghadapi stigma (efek dari kusta) yang berdampak panjang pada ekonomi. Pendidikan dan kebutuhan alat bantu jika memerlukan mobilitas kegiatan produktif.

Menurut Sub-Direktorat Filariasis, tercatat 78,84% pada tahun 2019, dan 78,99% penduduk pada tahun 2020 yang mendapat pengobatan penyakit filariasis. Sebanyak 236 kabupaten merupakan daerah endemis filariasis yang tersebar di 28 Provinsi. Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi cenderung meningkat dari 56 kabupaten/kota pada tahun 2019 menjadi 64 kabupaten/kota pada tahun 2020. Ada 6 provinsi yang seluruh kabupatennya adalah daerah non-endemis filariasis, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara. Ada 278 kabupaten/kota adalah daerah non-endemis filariasis.

Tantangan untuk mengakhiri epidemi penyakit menular adalah:

- 1) Perluasan *screening* wajib pada ibu hamil (*triple* eliminasi) dalam mencegah dan mengendalikan HIV/AIDS, Sifilis dan Hepatitis B yang harus dilakukan saat pemeriksaan kehamilan, sehingga penularan kepada bayi dapat dicegah;
- 2) Perluasan penggunaan metode Tes Cepat Molekuler (TCM) TB keseluruhan RS untuk meningkatkan temuan kasus baru TB;
- 3) Peningkatan upaya mencegah *Multi Drug Resistance* (MDR);
- 4) Peningkatan kebutuhan logistik, SDM dan pembiayaan untuk HIV/AIDS (obat ARV, reagen dan *kit diagnostic*), untuk TB (obat anti TB dan *kit diagnostic*), dan untuk malaria (obat anti malaria);
- 5) Peningkatan cakupan HIV testing, terutama pada daerah yang jumlah kasus terbanyak, selain meningkatkan '*treatment retention rates*' Mempercepat peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan yang dapat melakukan *HIV treatment* di Rumah Sakit dan juga di Puskesmas; dan
- 6) Peningkatan upaya pencegahan COVID-19 yang terus menerus dengan melaksanakan protokol Kesehatan: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

4. Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular/PTM

Prevalensi hipertensi meningkat signifikan dari 25,8% (2013) menjadi 34,1% (2018). Artinya sejumlah 60 juta penduduk di atas 18 tahun atau terdapat penambahan 20 juta penduduk penderita hipertensi dari 2013 ke 2018. Prevalensi diabetes melitus (DM) berdasarkan diagnosis dokter meningkat dari 1,5% (2013) menjadi 2% (2018). Sedangkan prevalensi DM menurut hasil pemeriksaan gula darah juga meningkat dari 6,9% (2013) menjadi 8,5% (2018). Selain itu, prevalensi obesitas penduduk di atas usia 18 tahun meningkat dari 10,3% (2007) menjadi 15,4% (2013) dan 21,8% (2018).

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) menunjukkan angka Sub-Indeks PTM yang memburuk dari tahun 2013 ke tahun 2018, yaitu dari 0,6476 menjadi 0,4696. Hal ini diasumsikan, karena pelayanan kesehatan pada kurun waktu 2013-2018 belum

memfokuskan upaya-upaya pencegahan PTM. Salah satu upaya pencegahan PTM, yaitu pencantuman informasi kandungan gula garam lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dari pangan siap saji yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013. Namun, sampai saat ini peraturan tersebut masih belum diberlakukan, karena informasi yang diberikan kurang mencukupi bagi para industri pangan dalam menerapkannya.

Faktor yang memperberat kejadian PTM adalah **perilaku merokok, pola makan dengan gizi tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik**. Faktor-faktor tersebut menjadi penyumbang meningkatnya prevalensi PTM di Indonesia.

Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun meningkat dari 7,2% pada tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2018. Dengan demikian, upaya dalam menurunkan prevalensi merokok pada penduduk 10-18 tahun perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMN pada tahun 2024 menjadi 8,7%.

Peran aktif dari berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama dibutuhkan dalam mendukung upaya berhenti merokok dengan membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif. Pada tahun 2021 tercatat 397 kabupaten/kota (77,2%) sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok/KTR. Namun, pelaksanaannya masih menjadi tantangan.

Tantangan untuk menurunkan kematian akibat penyakit tidak menular antara lain:

- 1) Penjangkauan 2/3 penderita PTM yang belum mengetahui bahwa telah mengidap PTM dengan menyediakan tempat-tempat umum yang memberikan fasilitas pemeriksaan gula darah, fasilitas pemeriksaan tekanan darah gratis disertai dengan konseling jika terdeteksi pre-diabetes, atau pre-hipertensi;
- 2) Upaya promotif dan preventif untuk pengendalian faktor risiko PTM seperti promosi terus menerus untuk tidak merokok, konsumsi sayur dan buah, serta aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Selain itu, diperlukan berbagai upaya untuk perubahan perilaku untuk mencegah obesitas dan penyediaan fasilitas umum yang aman untuk melakukan aktivitas fisik;
- 3) Diberlakukannya Permenkes Nomor 30/2013 untuk pengaturan GGL pada pangan siap saji atau minuman berpemanis yang diproduksi oleh industri pangan;
- 4) Diberlakukannya sanksi untuk implementasi Perda tentang KTR untuk mengurangi perokok;
- 5) Upaya pencegahan PTM yang dimulai pada usia sebelum 50 tahun;
- 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, serta fasilitas layanan kesehatan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita PTM; dan
- 7) Deteksi dini dan screening faktor risiko PTM: **rokok, obesitas, hipertensi, dan diabetes melitus**, termasuk pada anak di sekolah.

5. Memperkuat Pencegahan dan Pengobatan untuk Penyalahgunaan Napza dan Alkohol

Ada dua hal yang perlu dilakukan pada target 3.5 ini yaitu penyalahgunaan narkotika/zat adiktif (napza) dan alkohol. Upaya pencegahan napza sepenuhnya merupakan tanggung jawab/tugas BNN untuk mengupayakan agar penyalahgunaan napza bisa melakukan fungsi sosialnya. Kerjasama pencegahan dilakukan Kemenkes bersama BNN. Sedangkan adiksi alkohol bukan menjadi tanggung jawab BNN. Dua indikator yang menjadi target TPB, yaitu 3.5.1a. penyalahgunaan napza dan alkohol ditangani oleh BNN dan Kementerian Kesehatan, sedangkan 3.5.1b layanan pascarehabilitasi dijalankan oleh BNN.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba yang dilaporkan BNN pada tahun 2017 adalah sebesar 1,77 persen. Prevalensi ini meningkat menjadi 1,80 persen pada tahun 2019. Pada RAN 2019 ditetapkan target prevalensi penyalahgunaan narkoba adalah sebesar 0,02 persen. Dengan demikian, target belum terpenuhi.

Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang mengakses layanan rehabilitasi medis pada tahun 2018 yaitu sebanyak 12.087. Jumlah ini menurun menjadi 6.936 pada tahun 2019. Namun, laporan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) melalui aplikasi SELARAS (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Masyarakat Sejahtera), menunjukkan peningkatan di tahun 2020 menjadi 9.583 klien. Sementara itu, jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi pada tahun 2019 sebanyak 3.818 klien atau 79% dari target yang ditetapkan, yang terdiri dari: i) layanan pascarehabilitasi reguler (1.901 klien), ii) layanan pascarehabilitasi intensif (349 klien), dan iii) layanan pascarehabilitasi lanjut (1.568 klien).

Konsumsi alkohol oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun dilaporkan BPS pada tahun 2019 adalah 0,41 liter/kapita (BPS). Angka ini menurun dibanding tahun 2017 (0,54 liter/kapita) dan tahun 2018 (0,48 liter/kapita). Pada tahun 2020 juga terjadi penurunan menjadi 0,39 liter/kapita. Diharapkan konsumsi alkohol ini terus menurun, terutama pada kalangan usia remaja.

Tantangan dalam pencegahan peningkatan prevalensi penyalahgunaan napza dan alkohol adalah:

- 1) Implementasi Inpres No. 2 tahun 2020 untuk mendorong Pemerintah Daerah mengeluarkan regulasi pengendalian Napza;
- 2) Meningkatkan kerjasama yang sinergis antara BNN, Kemenkes, dan institusi yang terlibat dalam pencegahan dan pengendalian masalah napza dan alkohol;
- 3) Integrasi data untuk optimalisasi peningkatan layanan pascarehabilitasi; dan
- 4) Melakukan advokasi dan sosialisasi yang intensif pada pemegang kebijakan untuk menyediakan anggaran dan komitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan Napza dan alkohol.

6. Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi

Berdasarkan SDKI, angka kelahiran perempuan usia 15-19 tahun (*age specific fertility rate/ASFR*) menurun dari 36 kelahiran per 1.000 perempuan menjadi 31,9 kelahiran per 1.000

perempuan di kelompok umur yang sama (2017). Pada RPJMN 2020-2024 ditargetkan ASFR 15-19 adalah 25 kelahiran per 1.000 perempuan pada tahun 2020. Diperlukan upaya untuk mencapai target 18 kelahiran per 1000 perempuan pada tahun 2024.

Selain itu, ASFR pada usia 10-14 tahun termasuk indikator yang juga dipantau. Hal ini dikaitkan dengan terjadinya kelahiran di usia anak, yang melanggar UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. UU tersebut mengatur tentang usia perkawinan, termasuk pencegahan kekerasan seksual, yang dapat meningkatkan kelahiran tidak diinginkan (KTD).

Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau Wanita Usia Subur (WUS) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern menurun dari 57,9% pada tahun 2012 menjadi 57,2% pada tahun 2017. Sedangkan prevalensi penggunaan metode kontrasepsi semua cara pada pasangan usia subur (15-49 tahun) yang berstatus kawin meningkat dari 61,9% pada tahun 2012 menjadi 63,6% pada tahun 2017. Pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap rantai pasok penyediaan alat kontrasepsi dan akses terhadap layanan kontrasepsi. Dampak yang dirasakan adalah persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi sebelum pandemi COVID-19 adalah 10,6% (SDKI 2017). Persentase tersebut meningkat menjadi 12,4% pada tahun 2018 (Survei RPJMN/SKAP 2016-2018). Angka ini diharapkan tidak meningkat dan dapat ditekan menjadi 7,4% pada tahun 2024, agar mCPR bisa meningkat menjadi 63,41% pada tahun 2024. Jika kondisi ini dapat terpenuhi maka diharapkan *Total Fertility Rate* (TFR) yang berada pada posisi 2,4 (tahun 2017) dapat mencapai target menjadi 2,1 pada tahun 2024.

Tantangan ke depan adalah:

- 1) Peningkatan partisipasi pendidikan atau pengetahuan perempuan untuk mencegah pernikahan anak;
- 2) Peningkatan pemahaman kehidupan berkeluarga, dan peningkatan kualitas pendidikan kesehatan reproduksi terutama bagi anak usia sekolah/remaja;
- 3) Peningkatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP); dan
- 4) peningkatan inovasi layanan dan pemenuhan alat dan obat kontrasepsi selama masa pandemi COVID-19.

7. Mencapai Cakupan Kesehatan Universal

Pemerintah Indonesia terus berupaya mencapai cakupan kesehatan universal, untuk menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Target untuk mencapai kesehatan universal adalah i) penyempurnaan akses terhadap pelayanan kesehatan esensial yang berkualitas, ii) pengurangan jumlah orang yang kesulitan keuangan untuk kesehatan, dan iii) penyempurnaan akses terhadap obat-obatan, vaksin, diagnostik, dan alat kesehatan esensial pada pelayanan kesehatan primer. Dalam rangka mewujudkan cakupan kesehatan universal, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Jumlah penduduk yang tercakup dalam JKN terus meningkat. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, sebanyak 83,61% penduduk telah menjadi peserta sampai dengan 2019, akan tetapi terjadi penurunan menjadi 82,07% pada tahun 2020. Namun, berdasarkan Susenas, *unmet need* pelayanan kesehatan meningkat dari 5,18% (2019) menjadi 5,44% (2020).

Pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya *unmet need* pelayanan kesehatan. Survei yang dilakukan oleh Balitbangkes, Kemenkes pada tahun 2020 menunjukkan meskipun 72,5 persen Puskesmas memiliki jam kerja seperti pada masa sebelum pandemi, 83,6 persen Puskesmas mengalami penurunan kunjungan pasien. Selain itu, 43% dari Puskesmas yang disurvei tidak memberikan layanan Posyandu dan 56,9% melaporkan penurunan cakupan imunisasi.

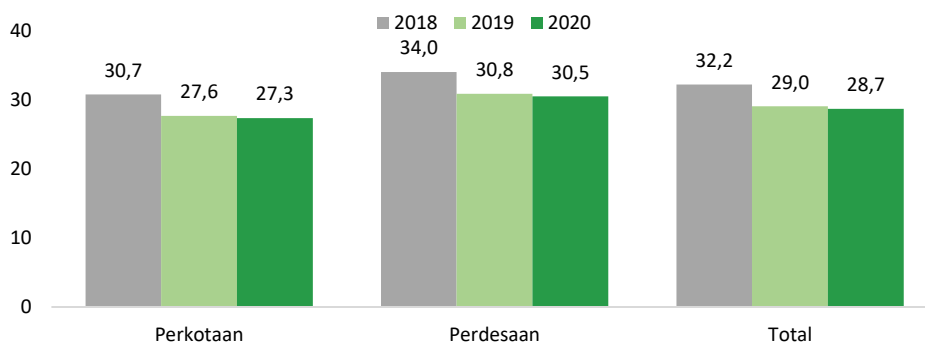
Pelaksanaan cakupan kesehatan universal perlu diarahkan pada upaya pemerataan pelayanan kesehatan antarwilayah. Upaya ke depan diantaranya:

- 1) Menjangkau kepesertaan JKN dari pekerja informal dan pekerja penerima upah;
- 2) Memperluas kerja sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta/mandiri;
- 3) Meningkatkan akses pada fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu;
- 4) Meningkatkan koordinasi dan pola komunikasi yang efektif antar Dinas Kesehatan dan BPJS agar informasi terdistribusi secara lebih berdaya guna dan mengantisipasi terjadinya salah komunikasi;
- 5) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan BPJS pada semua pihak (rumah sakit, PUSKESMAS, dan warga masyarakat), terutama tentang komponen-komponen pelayanan yang ditanggung dan yang tidak ditanggung oleh skema JKN/ BPJS;
- 6) Meningkatkan perhatian, kepedulian terhadap keluhan dan/atau pengaduan warga masyarakat tentang berbagai hal yang terkait dengan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, yang dicakup oleh skema JKN/BPJS; dan
- 7) Meningkatkan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, pemerataan distribusi SDM kesehatan, pemanfaatan data dan sistem informasi, kecukupan anggaran, kenaikan iuran serta regulasi yang mendorong perbaikan penyelenggaraan Program JKN.

8. Perangkat Implementasi

Indikator 3.a.1* Memperkuat pelaksanaan *the Framework Convention on Tobacco Control WHO* di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.

Proporsi penduduk umur di atas 15 tahun yang merokok dan mengunyah tembakau menurun dari 32,2% (2018) menjadi 28,7% (2020). Proporsi perokok di pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan.



Gambar 2.19 Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun menurut daerah tempat tinggal, 2018-2020

Sumber: Susenas, BPS

Bila perilaku merokok tersebut dipilah menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih mendominasi. Menurut hasil Susenas tahun 2018, sejak berumur 5 tahun, terdapat hampir setengah jumlah laki-laki (45,82 persen) merokok. Sementara itu hanya kurang dari satu persen penduduk perempuan yang merokok. Perokok laki-laki umumnya merokok dalam rumah, sehingga perempuan dan anak berpotensi menjadi perokok pasif. Perbandingan perokok menurut laki-laki/perempuan hampir sama pada seluruh lapisan kuintil pengeluaran.

Di setiap negara, diharapkan segala bentuk program yang mengarah pada promosi 'stop smoking' diberlakukan untuk lokasi-lokasi publik, disertai dengan tanda '**daerah bebas asap rokok**', khususnya di institusi pendidikan, tempat layanan kesehatan, restoran, dan lainnya.

Target 3.b Mendukung pemerataan distribusi obat esensial dan vaksin.

Sejak tahun 2015, ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan dasar mencapai 79,38%. Pada tahun 2019, cakupan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin mencapai 96,34% (Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2019). Namun, pandemi COVID-19 telah mengganggu pasokan obat esensial dan vaksin untuk pelayanan kesehatan primer menjadi 92,12% pada tahun 2020. Penyebab utama penurunan ini adalah gangguan distribusi obat selama penerapan PSBB (Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2020).

Dalam rangka memastikan penyediaan akses terhadap obat dan vaksin, indikator yang dipantau adalah:

- 1) Persen anak 12-23 bulan yang sudah mendapat Imunisasi dasar lengkap (3.b.1*);
- 2) *Total Official Development Assistant (ODA)* untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar (3.b.2*); dan
- 3) Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan (3.b.3*).

Persentase anak 12-23 bulan yang sudah mendapat imunisasi dasar lengkap pada tahun 2018 berdasarkan Riskesdas adalah 57,9%. Diharapkan terdapat peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap akan tetapi terkendala dengan adanya pandemi COVID-19. Target

imunisasi dasar lengkap pada RPJMN 2020-2024 yaitu 90% pada tahun 2024.

Untuk indikator 3.b.2*, Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan pada tahun 2020 sebesar Rp8.640.000.000,-. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia mendukung negara berkembang lainnya untuk mengakses obat-obatan esensial dan vaksin yang terjangkau. Hibah tersebut digunakan oleh negara penerima hibah untuk pembelian obat-obatan, alat kesehatan, dan fasilitas kesehatan produksi dalam negeri, untuk merespons pandemi COVID-19.

Indikator 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan, maka ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan menjadi sangat penting. Tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat. Akan tetapi distribusi dan kualitas tenaga kesehatan belum merata, dimana Pulau Jawa menempati jumlah terbesar (46,76%), diikuti Sumatera (26,30%), Sulawesi (9,41%), Kalimantan (7,79%), Bali dan Nusa Tenggara (5,96%), serta Maluku dan Papua (3,78%).

Tabel 2.12 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan per 1.000 Penduduk

Indikator		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.						
	• Dokter Spesialis	0,12	0,14	0,15	0,16	0,16	0,15
	• Dokter Umum	0,42	0,45	0,48	0,51	0,52	0,53
	• Dokter Gigi	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,14
	• Perawat	1,51	1,84	1,94	1,62	1,95	2,19
	• Bidan	1,45	1,73	1,79	1,32	1,57	1,71
	• Tenaga Gizi	0,10	0,12	0,18	0,10	0,13	0,14
	• Tenaga Kesehatan Lingkungan	0,06	0,07	0,11	0,09	0,10	0,10
	• Tenaga Keterampilan fisik	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07
	• Tenaga Keteknisian Medis	0,14	0,17	0,19	0,16	0,19	0,21
	• Apoteker	0,21	0,25	0,24	0,23	0,26	0,29
	• Tenaga Teknik Biomedika	0,18	0,23	0,30	0,21	0,26	0,29
	• Tenaga Kesehatan Masyarakat	0,09	0,15	0,20	0,24	0,27	0,28
	• Tenaga Psikologi Klinik	0,00	0,01	0,00	0,00	0,005	0,01
	• Tenaga Kesehatan Tradisional	N/A	N/A	0,00	0,00	0,002	0,002

Sumber: Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (KKI dan KTKI), Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan berupaya meningkatkan distribusi tenaga kesehatan di setiap provinsi, melalui Program Nusantara Sehat yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit milik pemerintah di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Program lainnya adalah Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) yang bertujuan untuk memberikan pemerataan tenaga spesialis di setiap wilayah di Indonesia.

Tantangan ke depan adalah:

- 1) Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan;
- 2) Pengembangan skema penempatan tenaga kesehatan terutama untuk daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK);
- 3) Redistribusi tenaga kesehatan ke wilayah dengan kekosongan tenaga kesehatan;
- 4) Meningkatkan kemandirian obat dan bahan baku obat;
- 5) Meningkatkan penggunaan obat rasional; dan
- 6) Memperkuat sistem pengawasan obat dan vaksin, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri dapat menjamin mutu produk yang diproduksi dan didistribusikan.

2.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

A. Pengantar

Tujuan 4 berkaitan dengan penjaminan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta peningkatan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pembahasan Tujuan 4 mencakup empat isu utama, yaitu: (1) pemenuhan akses pendidikan; (2) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (3) pendidikan untuk peningkatan kebugaran termasuk pendidikan vokasi dan pelatihan; serta (4) penguatan pendidikan satu tahun pra-sekolah. Tujuan 4 ini terdiri dari 10 target, 7 diantaranya adalah target yang indikatornya secara langsung berkaitan dengan penerima manfaat dari sistem pendidikan, sementara tiga yang lain merupakan faktor pendorong kualitas pengajaran dan pembelajaran. Empat isu utama tersebut saling berkaitan, dan membutuhkan solusi yang sistematis.

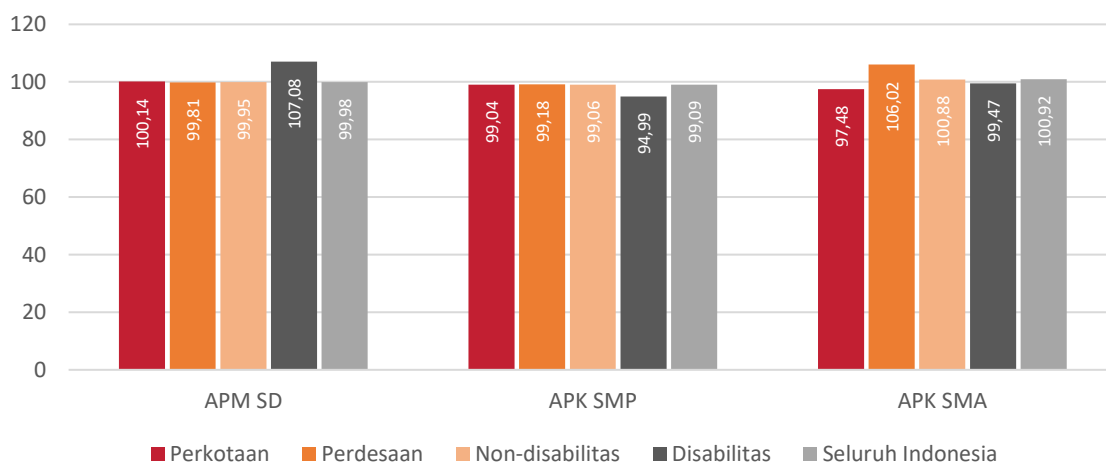
B. Status Capaian

Dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019), tercatat progres yang baik pada pencapaian beberapa indikator Tujuan 4, namun tidak demikian untuk beberapa indikator yang lain. Pada bagian ini status capaian akan dikelompokkan berdasarkan empat isu utama dalam Tujuan 4, yaitu: (1) pemenuhan akses pendidikan; (2) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (3) pendidikan untuk peningkatan kebugaran termasuk pendidikan vokasi dan pelatihan; serta (4) penguatan pendidikan satu tahun pra-sekolah.

1. Pemenuhan Akses Pendidikan

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan akses pendidikan. Hal ini ditunjukkan dalam capaian untuk indikator-indikator yang berkaitan dengan angka partisipasi, sebagaimana indikator 4.5.1: rasio angka partisipasi murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan perguruan tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas. Indikator ini ditujukan untuk melihat tingkat disparitas akses pendidikan antar kelompok demografi.

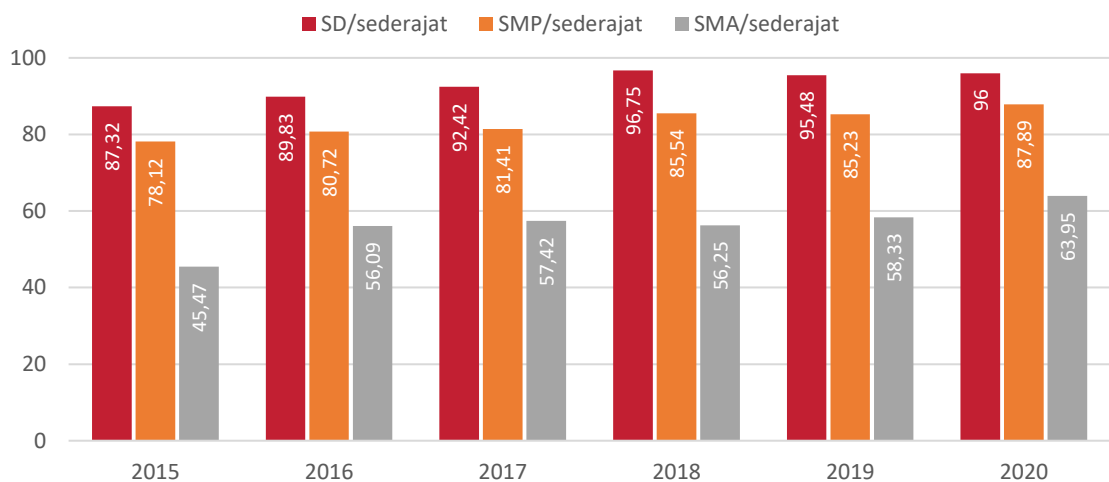
Dalam laporan Tujuan 4 Tahun 2019 (Bappenas, 2020), terlihat bahwa upaya pemerataan kesempatan pendidikan menunjukkan hasil yang nyata. Anak-anak perempuan cenderung memiliki kesempatan yang sama besar bahkan sedikit lebih besar dibandingkan anak laki-laki dalam mengakses pendidikan, baik pendidikan dasar maupun menengah dan pendidikan tinggi. Gambar 2.20 menunjukkan Angka Partisipasi Murni antara perempuan dan laki-laki di jenjang dan konteks yang berbeda.



Gambar 2.20 Rasio angka partisipasi pendidikan perempuan dan laki-laki

Tingkat penyelesaian pendidikan (indikator 4.1.2) merupakan indikator penting untuk memantau akses pendidikan. Sementara angka partisipasi sekolah mengindikasikan proporsi anak dan remaja yang terdaftar dalam satuan pendidikan, tingkat penyelesaian sekolah (*school completion rate*) memberikan informasi tentang anak dan remaja yang menyelesaikan jenjang pendidikan terakhirnya tanpa penundaan yang berlebihan. Gambar 2.21 menunjukkan perkembangan tingkat penyelesaian pendidikan dari tahun 2015 ke tahun 2020. Nampak bahwa peningkatan terjadi pada jenjang SD dan SMP. Pada tahun 2020, tingkat penyelesaian sekolah dasar penduduk usia 13-15 tahun adalah 96% sedangkan tingkat penyelesaian sekolah menengah penduduk usia 19-21 tahun adalah 63,95% (BPS, 2020). Data ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat penyelesaian sekolah yang dicapai penduduk.

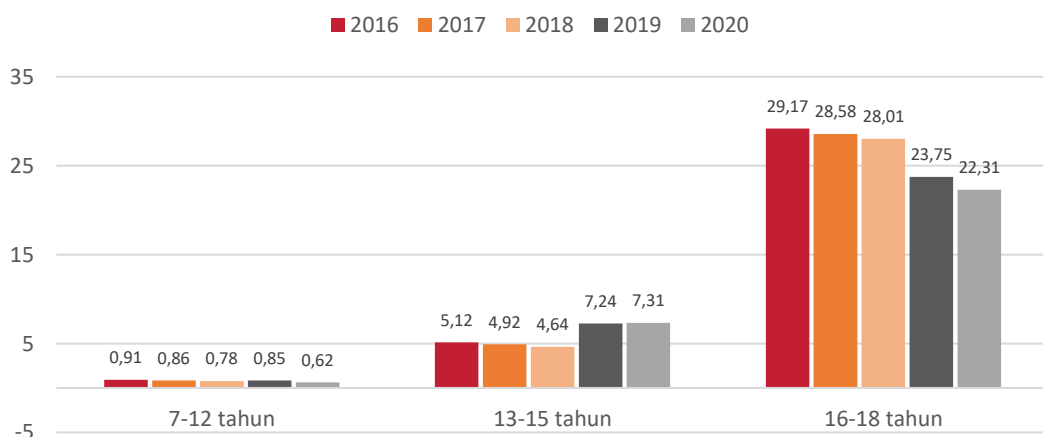
Tingkat penyelesaian pendidikan dasar (SD dan SMP) secara umum terus meningkat dan angkanya relatif tinggi, menunjukkan komitmen Wajib Belajar yang terus dipenuhi pemerintah. Pada tahun 2020 tingkat penyelesaian pendidikan SMP adalah 87,89%. Namun demikian, tingkat penyelesaian pendidikan dasar untuk anak-anak dengan disabilitas masih rendah. Di jenjang SD, hanya 67,90% saja yang menuntaskan jenjang tersebut. Selain itu, pemerataan akses pendidikan dasar juga perlu ditingkatkan karena sampai dengan tahun 2020, di wilayah perdesaan hanya 84,04% dari siswa SMP yang menuntaskan pendidikannya di jenjang tersebut.



Gambar 2.21 Tingkat penyelesaian sekolah, 2015-2020

Sumber: Susenas Kor, BPS

Kesempatan mengakses pendidikan juga diindikasikan melalui jumlah anak usia 7-18 tahun yang tidak pernah bersekolah baik di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat, yang putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya ataupun yang sudah menyelesaikan jenjang sebelumnya namun tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak bertransisi. Gambar 2.22 menunjukkan angka anak tidak sekolah untuk setiap kategori usia dari tahun ke tahun. Untuk anak usia 7 sampai 12 tahun angka ini sangat rendah, menunjukkan bahwa mayoritas anak telah berpartisipasi dalam jenjang sekolah dasar. Penurunan juga terjadi di kelompok usia 16 sampai dengan 18 tahun yang mayoritas merupakan usia sekolah menengah atas atau sederajat. Meskipun ada penurunan, namun angka ini masih tinggi, yaitu 29,17% pada tahun 2016 dan 22,31% pada tahun 2020.



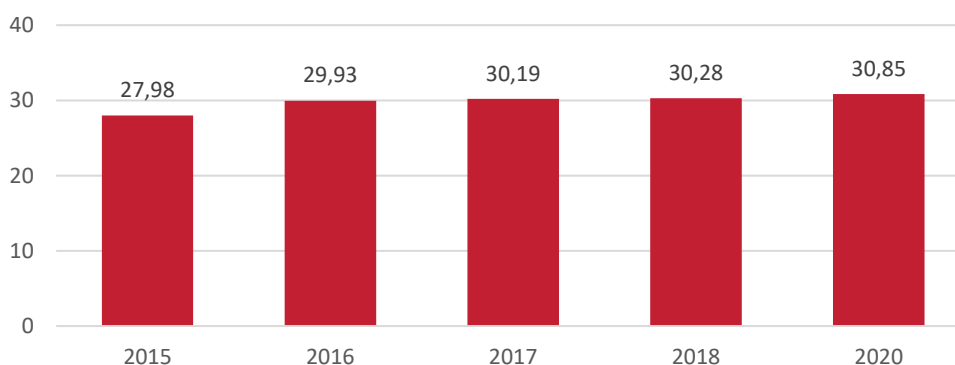
Gambar 2.22 Angka anak tidak sekolah, 2016-2020

Sumber: Susenas Kor, BPS

Salah satu faktor yang dapat menjelaskan tren akses pendidikan dasar dan menengah di Indonesia adalah upaya Pemerintah untuk mendorong tingkat penyelesaian pendidikan dan menurunkan angka anak tidak sekolah berupa bantuan kepada anak-anak dari kelompok sosioekonomi rendah melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Pada Program Indonesia Pintar, bantuan tunai Pendidikan diberikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal

dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. Berdasarkan hasil kajian kemendikbud, hampir separuh orangtua siswa penerima PIP hanya dapat lulus sekolah dasar dan tidak lebih dari 2% dari orangtua tersebut pernah berkuliah di perguruan tinggi. Tingkat pendidikan dari keluarga siswa penerima PIP ini mengindikasikan bahwa program PIP tepat sasaran.

Akses perguruan tinggi juga masih sangat terbatas, belum mampu mencapai target RPJMN pada tahun 2019, di mana targetnya adalah 36,73%. Data BPS menunjukkan bahwa capaian angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi (PT) hanya mencapai 30,85% pada tahun 2020, sebagaimana yang diperlihatkan dalam Gambar 2.23. Walaupun ada kecenderungan kenaikan APK PT dari tahun ke tahun, angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan jenjang SMA/ sederajat (hampir 70%) tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Hal ini menguatkan alasan pentingnya keberkerjaan lulusan sekolah menengah serta kesempatan untuk mengakses pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keberkerjaan lulusan SMA/ sederajat. Pendidikan dan pelatihan untuk keberkerjaan ini akan disampaikan pada bagian lain.



Gambar 2.23 Angka partisipasi kasar perguruan tinggi

Sumber: Susenas Kor, BPS

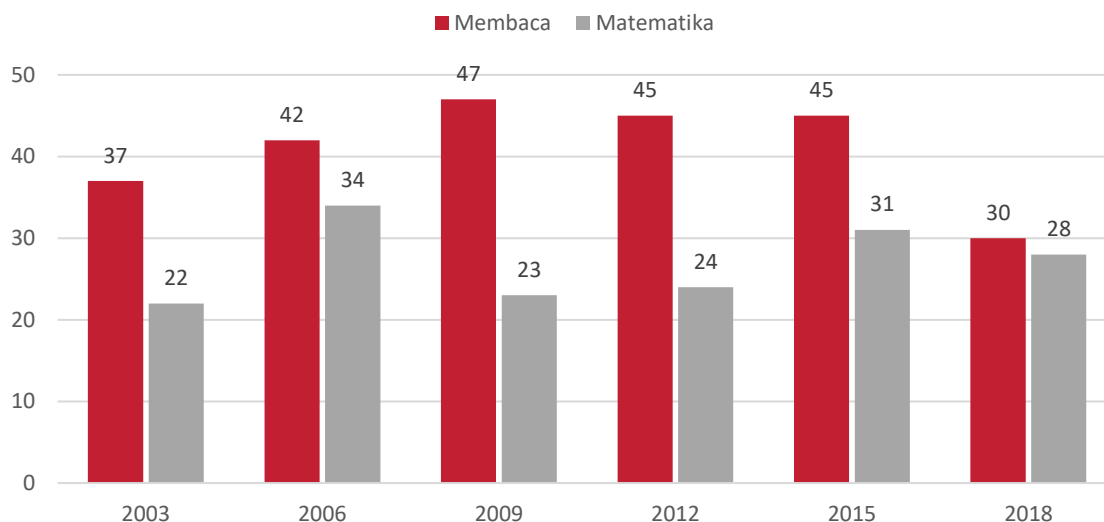
2. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Kualitas pengajaran dan pembelajaran pada umumnya ditunjukkan melalui kualitas hasil belajar peserta didik termasuk kemampuan literasi dan numerasi. Namun demikian, untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran yang dialami peserta didik, indikator kualitas pendidik dan sarana prasarana sekolah perlu diperhatikan. Indikator yang erat kaitannya dengan kualitas pembelajaran tersebut adalah Indikator 4.1.1, 4.a.1, dan 4.c.1.

Angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah terus meningkat, sebagai pemenuhan komitmen Wajib Belajar. Namun demikian, rendahnya proporsi siswa usia 15 tahun yang mencapai kompetensi minimum literasi membaca, matematika, dan sains dalam PISA 2018 menjadi penunjuk penting bahwa kualitas pendidikan yang baik baru dapat diakses oleh sedikit anak-anak dan remaja Indonesia.

Laporan Tujuan 4 tahun 2019 (Bappenas, 2020) menunjukkan bahwa terjadi penurunan proporsi anak-anak dan remaja yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan matematika (indikator 4.1.1). Turunnya capaian ini terjadi terutama

dalam tes PISA yang merupakan survei literasi dan numerasi internasional yang diikuti oleh siswa berusia 15 tahun (pada umumnya siswa kelas 9 SMP dan 10 SMA). Pada tahun 2015, 45% siswa mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan 31% untuk kemampuan minimum dalam matematika. Pada tahun 2018, Indonesia kembali mengikuti tes PISA dan proporsi siswa yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan matematika menurun menjadi masing-masing 30% dan 28%. Proporsi siswa Indonesia usia 15 tahun yang mencapai kemampuan minimum dalam membaca dan matematika sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2018 diperlihatkan dalam Gambar 2.24.



Gambar 2.24 Proporsi siswa yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan matematika

Sumber: PISA, 2018

Rendahnya proporsi siswa Indonesia yang mencapai kemampuan minimum dalam literasi membaca dan matematika menjadi indikasi rendahnya kualitas pembelajaran yang diakses oleh sebagian besar anak-anak dan remaja di Indonesia. Indikator 4.a.1 tentang sarana dan prasarana satuan pendidikan dan indikator 4.c.1 tentang kualifikasi guru dapat menjelaskan kualitas proses belajar yang siswa alami. Laporan Tujuan 4 tahun 2019 (Bappenas, 2020) menunjukkan bahwa Indonesia perlu terus membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua.

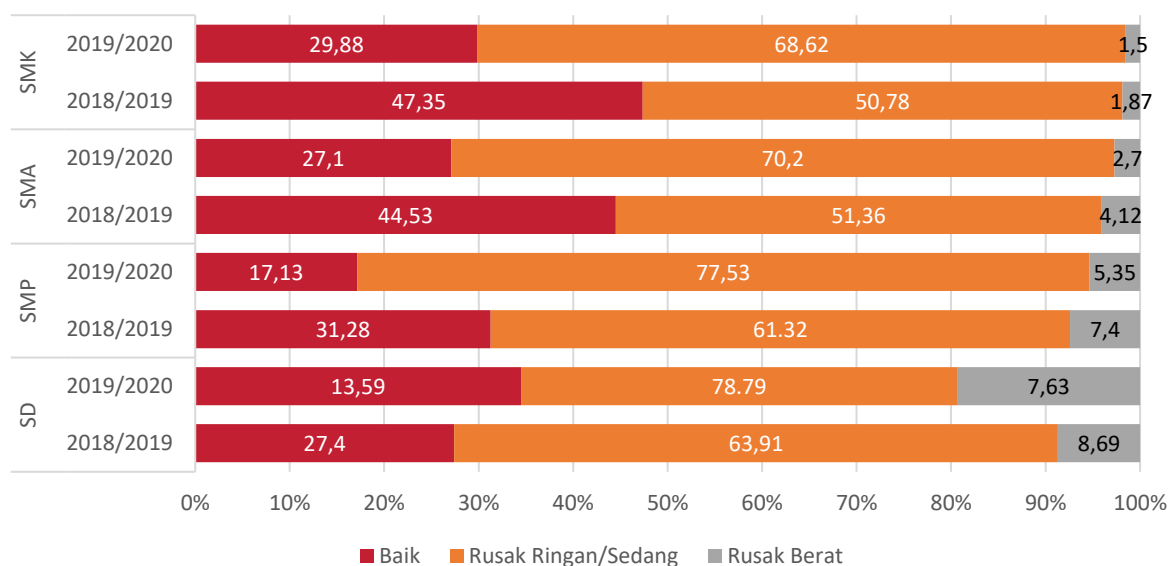
Kualitas hasil belajar siswa juga berkaitan dengan fenomena perundungan yang terjadi di sekolah. Siswa usia 15 tahun yang merupakan korban perundungan setidaknya beberapa kali per bulan memiliki skor membaca di PISA lebih rendah daripada mereka yang tidak mengalami perundungan. Dalam survei PISA 2018 tersebut, didapati bahwa sebanyak 41% siswa Indonesia menjadi korban perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata negara OECD, yaitu 22.7%. Secara khusus di Indonesia, terdapat kecenderungan yang lebih tinggi untuk menjadi korban perundungan bagi siswa laki-laki dan/atau siswa yang memiliki kelebihan secara finansial. Hasil survei ini menunjukkan bahwa upaya untuk menciptakan sekolah yang ramah anak harus terus dikuatkan.

Kualitas hasil belajar sangat dipengaruhi oleh kualitas guru. Berdasarkan data Dapodik Kementerian Pendidikan, kurang dari separuh guru-guru di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi. Selain itu, masih ada guru-guru dengan kualifikasi di bawah sarjana 1 atau diploma 4 (S1/D4). Tabel 2.13 menunjukkan proporsi kualifikasi guru tersebut.

Tabel 2.13 Indikator mutu guru, 2016-2018

	2016	2017	2018
Proporsi guru dengan Sertifikat Guru			
PAUD	68,95	66,67	
SD	45,03	47,8	42,81
SMP	50,07	49,43	45,75
SMA	50,95	49,17	46,49
SMK	37,34	35,72	35,3
Proporsi guru dengan kualifikasi minimum S1 atau D3			
PAUD	52,3	52	
SD	84,2	86	88,4
SMP	92,1	93,2	94,5
SMA	96,9	97,4	98
SMK	94	94,6	95,4

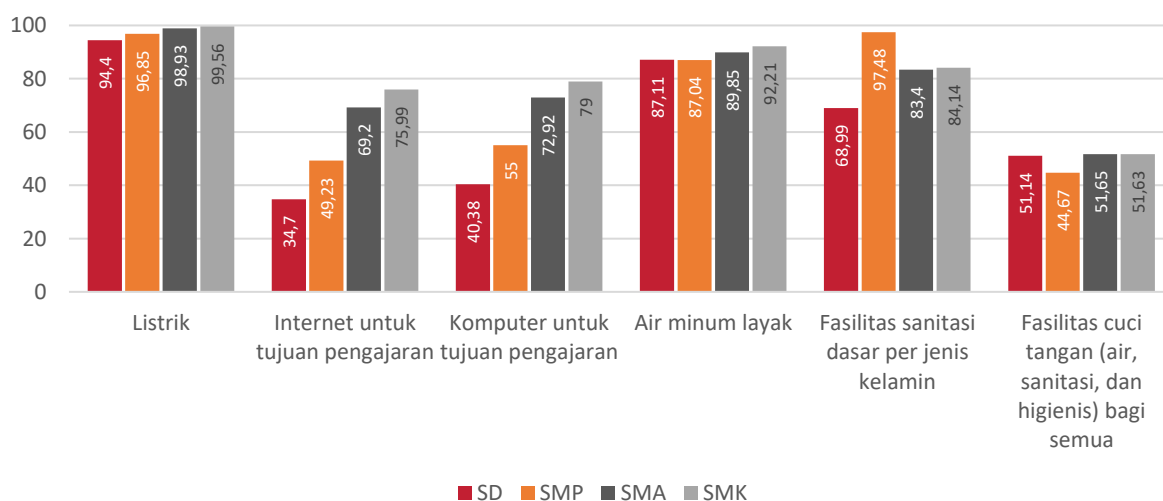
Selain guru, faktor yang berkontribusi pada kualitas pembelajaran adalah sarana prasarana. Indikator 4.a.1 meliputi fasilitas pendidikan yang mendasar untuk kebutuhan belajar anak. Menurut Statistik Pendidikan (BPS, 2020), Indonesia mengalami darurat gedung sekolah. Berdasarkan data Kemdikbud, pada tahun ajaran 2019/2020 terdapat lebih dari 70 persen ruang kelas pada setiap jenjang pendidikan yang kondisinya rusak, baik rusak ringan/sedang maupun rusak berat. Bahkan pada jenjang pendidikan SD dan SMP, ruang kelas dalam kondisi rusak mencapai persentasenya di atas 80 persen. Hal yang cukup memprihatikan adalah ruang kelas dengan kondisi yang baik malah mengalami penurunan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya dan ini terjadi pada setiap jenjang pendidikan.



Gambar 2.25 Proporsi ruang kelas menurut kondisi berdasarkan jenjang pendidikan dan status sekolah Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020

Sumber data: Kemendikbud

Kebutuhan fasilitas belajar tidak terbatas pada sarana dan prasarana yang langsung berkaitan dengan kegiatan belajar, tetapi juga kebutuhan terkait kesehatan, mengingat anak dan remaja menghabiskan banyak waktu di sekolah. Gambar 2.26 memperlihatkan status capaian pemenuhan fasilitas di sekolah. Nampak bahwa belum 100% satuan pendidikan mengakses listrik, dan dapat diduga bahwa di sekolah-sekolah ini kegiatan belajar mudah terganggu oleh cuaca. Di Abad 21, komputer dan internet merupakan kebutuhan dasar untuk melangsungkan proses belajar yang efektif dan efisien. Namun demikian, hingga tahun 2018, proporsi satuan pendidikan yang menggunakan internet dan juga komputer untuk tujuan pembelajaran masih rendah, khususnya di jenjang pendidikan SD dan SMP. Rendahnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran dapat menjadi salah satu faktor yang menjelaskan capaian literasi anak dan remaja di Indonesia.



Gambar 2.26 Proporsi sekolah berdasarkan fasilitas belajar, 2018

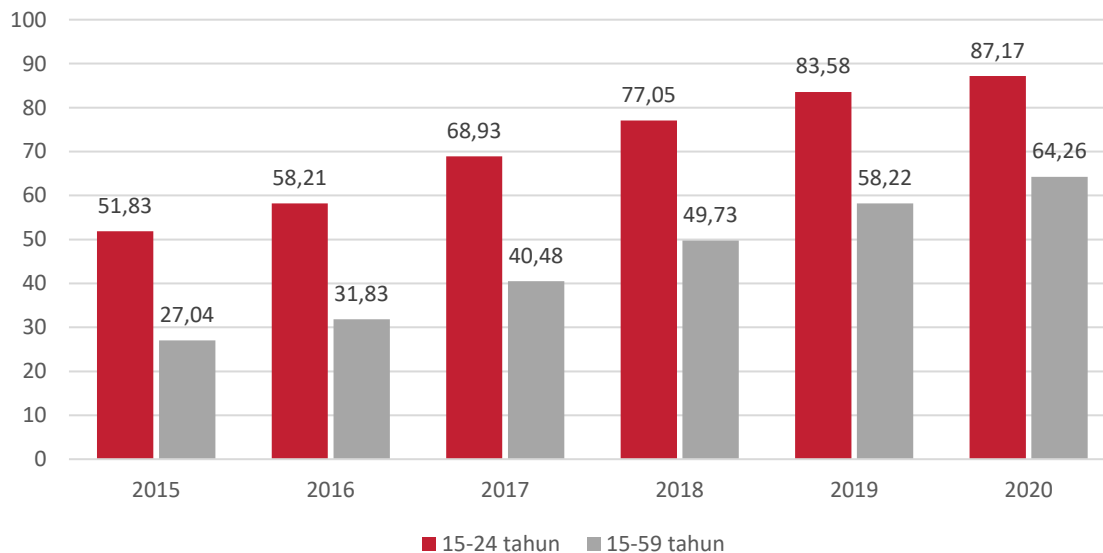
Sumber data: Kemendikbud

Laporan 2019 juga mencatat bahwa fasilitas cuci tangan (*WASH: water, sanitation, and hygiene*) yang tersedia di sekolah perlu ditingkatkan. Di semua jenjang, proporsi satuan pendidikan yang memiliki fasilitas ini hanya sekitar 50%. Data ini menunjukkan bahwa perhatian satuan pendidikan terhadap fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan.

3. Pendidikan Untuk Peningkatan Keberjaan

Laporan pencapaian Tujuan 4 tahun 2019 mencatat bahwa peran pendidikan untuk meningkatkan keberjaan lulusan masih perlu terus ditingkatkan. Angka partisipasi pendidikan tinggi masih relatif rendah, yaitu hanya sekitar 30%. Namun demikian angka ini meningkat sekitar 5% dibandingkan tahun 2015. Dengan rendahnya angka partisipasi perguruan tinggi ini, maka pendidikan non-formal dan pelatihan (*training*) untuk angkatan kerja (remaja dan dewasa) menjadi sangat penting peranannya untuk meningkatkan keberjaan lulusan SMA/ sederajat atau yang lebih rendah.

Data BPS menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi (PT) bervariasi menurut kelompok pengeluaran, di mana kelompok kuintil 5 (kelompok 20 persen tertinggi pengeluarannya atau yang paling sejahtera dibandingkan kelompok lainnya), APK PT-nya mencapai 56,87%, sementara APK-PT untuk kelompok 20 persen termiskin hanya mencapai 16,13%. Mengingat perguruan tinggi berperan penting untuk meningkatkan keberjaan dan kesempatan untuk mobilitas sosial, maka kesenjangan besar akses perguruan tinggi ini perlu diatasi.



Gambar 2.27 Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Sumber data: BPS

Sesuai perkembangan zaman, keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu kompetensi dasar yang perlu dimiliki remaja dan orang dewasa untuk dapat meningkatkan keberjaan mereka. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, proporsi remaja usia 15 sampai dengan 24 tahun dengan keterampilan TIK meningkat dari 51,83% menjadi 87,17%, sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 2.27. Meskipun proporsi remaja

dan dewasa yang memiliki keterampilan teknologi informasi lebih rendah, namun terjadi angka ini bertambah pula dari tahun ke tahun. Peningkatan ini seiring dengan perluasan akses teknologi digital di Indonesia.

Layanan SMK dan perguruan tinggi sudah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan 123 Perguruan Tinggi Negeri dan 3.195 Perguruan Tinggi Swasta pada 2018. Namun demikian, industri dan dunia usaha kerja tetap melaporkan secara konsisten bahwa kompetensi lulusan tidak cocok dengan kebutuhan dunia industri. Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi kuat oleh sektor industri dalam sistem pengembangan kompetensi lulusan (World Bank, 2020). Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) telah mengatur kompetensi yang dibutuhkan, namun pengembangan standar ini masih dinilai kurang fokus pada kebutuhan industri dan mengikuti perkembangan industri yang pesat. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi dengan rancangan yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan sektor industri.

4. Pendidikan Satu Tahun Pra-Sekolah

Pendidikan satu tahun pra-sekolah atau pendidikan anak usia dini untuk anak lima dan enam tahun (PAUD 5-6) merupakan pendidikan yang penting untuk transisi dari belajar di rumah yang pada umumnya tidak terorganisir, menuju pendidikan yang lebih terorganisir dan terstruktur di sekolah. Pada usia emas ini anak-anak membutuhkan berbagai stimulasi untuk perkembangan mereka. Data Susenas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir satu tahun sebelum masuk sekolah dasar, yaitu dari 95,88% pada tahun 2015 menjadi 95,9% pada tahun 2019.

Pandemi COVID-19 yang menyebabkan diberhentikannya kegiatan pembelajaran tatap muka berdampak juga pada tingkat partisipasi ini. Pada tahun 2020 terjadi penurunan tingkat partisipasi pembelajaran terorganisir satu tahun pra-SD, dari 96,37% di tahun 2019 menjadi 92,76% pada tahun 2020. Tabel 2.14 memperlihatkan bahwa turunnya tingkat partisipasi ini terjadi baik di kelompok keluarga yang sejahtera maupun kelompok dengan pengeluaran 40% terbawah. Hal ini mungkin disebabkan oleh menurunnya kebutuhan keluarga akan satuan PAUD. Semula PAUD menjadi salah satu alternatif untuk orang tua menitipkan anak mereka dalam program pendidikan sementara orang tua bekerja. Ketika pandemi memaksa orang tua bekerja dari rumah dan fungsi pengasuhan dan pendidikan dapat mereka ambil alih, maka hal ini dapat berkontribusi pada turunnya tingkat partisipasi. Selain itu, adanya tekanan ekonomi keluarga juga dapat menyebabkan kesulitan orang tua untuk mengakses PAUD.

Tabel 2.14 Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir satu sebelum usia sekolah dasar

Kelompok Pengeluaran	Tingkat Partisipasi	
	2019	2020
40% terbawah	95,26	92,46
40% menengah	96,98	93,29
20% teratas	98,32	92,25

Sumber: BPS

Untuk anak-anak yang masih terdaftar di PAUD 5-6 sekalipun, kualitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19 juga mengalami hambatan. Kegiatan belajar dari rumah (BDR) juga dikhawatirkan menurunkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada kesiapan bersekolah. Asesmen kebutuhan cepat (*rapid needs assessment*) yang dilakukan Save The Children Indonesia pada bulan April 2020 menunjukkan bahwa 25 persen orang tua tidak memiliki alat dan bahan yang memadai untuk mendukung pembelajaran anak di rumah, serta sekitar 40 persen orang tua menilai adanya penurunan motivasi belajar anak-anak mereka yang berusia dini.

C. Tantangan

Permasalahan dan tantangan terkait akses dan kualitas pendidikan dibagi menjadi empat tema, yaitu akses pendidikan yang berkualitas sekaligus terjangkau khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian dari komitmen Wajib Belajar.

Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Bermutu dan Terjangkau

Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu sekolah negeri, merupakan satuan pendidikan yang relatif terjangkau dari segi biaya dan juga lebih terkendali mutunya. Namun demikian, di banyak daerah, akses ke sekolah negeri masih kurang, terutama untuk jenjang sekolah menengah.

Di konteks pendidikan vokasi dan juga pendidikan tinggi, tantangan kualitas pendidikan yang paling nyata adalah mengatasi ketidaksesuaian atau *mismatch* antara kompetensi lulusan atau *supply* tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi dengan ekspektasi (*demand*) industri dapat menyebabkan rendahnya keberkerjaan lulusan.

Relevansi Pendidikan Pra-SD

Peningkatan akses satu tahun pra-SD tidak lepas dari peningkatan jumlah satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK). BPS mencatat bahwa pada Tahun Ajaran 2015/2016 persentase satuan TK di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalami kenaikan sekitar 5,32% pada Tahun Ajaran 2020/2021. Namun demikian, data BPS menunjukkan bahwa pada Tahun Ajaran 2020/2021, proporsi TK Negeri hanya sekitar 5% saja (4.093 satuan TK Negeri), dan 95% lainnya (85.852) merupakan satuan TK swasta. TK Negeri perlu ditambah jumlahnya terutama untuk masyarakat miskin agar akses pendidikan pra-sekolah yang terjangkau dapat ditingkatkan, namun tanpa melemahkan peran masyarakat dalam menyediakan pendidikan ini.

Tantangan Pendidikan di Masa COVID

Sejak sekitar Maret 2020 pembelajaran tatap muka di sekolah diberhentikan karena pandemi COVID-19, dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran dari rumah (BDR) dimulai. Hingga laporan ini ditulis, di beberapa daerah di Indonesia, PJJ masih terus dijalankan. Disrupsi proses belajar ini dapat menjadi hambatan terhadap pencapaian Tujuan 4, terutama dalam pencapaian target-target yang berkaitan dengan kualitas hasil belajar (misalnya Target 4.1 terkait capaian literasi dan numerasi dan Target 4.4 terkait keterampilan dan keberkerjaan).

Memang belum ada informasi yang menunjukkan dampak COVID-19 terhadap indikator target-target tersebut, namun penurunan kualitas proses pembelajaran telah dilaporkan.

Turunnya kualitas belajar di masa pandemi COVID-19 berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi pedagogi guru untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan fasilitas belajar yang tersedia baik untuk pendidik maupun peserta didik. Salah satu yang memberatkan proses belajar PJJ adalah kurang terampilnya guru dalam mengelola pembelajaran, sehingga kegiatan belajar menuntut anak dan remaja untuk duduk berjam-jam di depan laptop ataupun telepon selular mereka untuk mendengarkan guru berceramah. Hal ini berdampak negatif pada motivasi anak untuk belajar. Proses belajar tanpa kehadiran guru dan murid di kelas berpotensi mengurangi kualitas pendidikan.

Pandemi COVID-19 menuntut peran orang tua yang lebih besar dalam proses pembelajaran anak dan remaja. Penilaian Kebutuhan Cepat (*Rapid Need Assessment*) yang dilakukan Save the Children Indonesia pada April 2020 menunjukkan bahwa 25 persen orang tua tidak memiliki alat dan bahan ajar yang memadai, 40 persen orang tua melihat motivasi anak menurun, dan hampir 30 persen guru membutuhkan materi pembelajaran jarak jauh. Dukungan orang tua sangat penting bagi pembelajaran anak, namun tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama dalam mendukung, terutama karena perbedaan sosio-ekonomi.

Selain anak dan remaja dari keluarga dengan sumberdaya yang terbatas dan mereka yang tinggal di wilayah perdesaan, yang juga kehilangan kesempatan belajar secara efektif adalah anak dan remaja dengan kebutuhan khusus. Berdasarkan hasil survei terhadap guru untuk siswa berkebutuhan khusus di Jawa Timur (Afrianty, et al., 2020), ditemui beberapa kendala yang dialami guru dan peserta didik dengan ketunaan selama pembelajaran dengan sistem daring. Sebagian guru kesulitan berkomunikasi karena akses dan keterampilan TIK yang terbatas.

Kajian yang dilakukan RISE Programme in Indonesia mendapati bahwa akibat dari terbatasnya akses internet di sebagian wilayah Indonesia menyebabkan sekitar 30% guru di pulau Jawa tidak dapat beraktivitas setiap hari sebagaimana biasanya, dan proporsi ini lebih besar lagi di luar Jawa, mencapai sekitar 50% guru. Di sisi peserta didik pun ditemui banyak kasus anak-anak yang tidak memiliki akses baik ke jaringan internet ataupun gawai yang dapat mereka gunakan untuk belajar (Alifia, 2020). Disparitas akses ini menjadi tantangan yang lebih besar untuk pencapaian Tujuan 4, khususnya terkait dengan pemerataan kesempatan pendidikan yang berkualitas.

2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

A. Pengantar

Tujuan 5 SDG adalah tentang mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Mendorong terwujudnya Tujuan 5 TPB/SDGs ini tidak hanya upaya untuk memenuhi hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan, tapi juga merupakan landasan untuk menciptakan bangsa yang lebih sejahtera. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan penting untuk memastikan terlibatnya perempuan secara bermakna dalam proses pembangunan.

Pembangunan inklusif gender mewarnai seluruh tujuan dari TPB/SDGs untuk memastikan bahwa jalan menuju kesetaraan gender hanya dapat terwujud jika pembangunan dilakukan secara setara diantara laki-laki dan perempuan di seluruh aspek kehidupan.

Tujuan 5 memiliki 9 target yang diukur melalui 14 indikator. Pada laporan ini, analisis situasi dan tantangan pembangunan gender akan dilakukan terhadap 8 target TPB/SDGs dengan menganalisis capaian 12 indikator TPB/SDGs yang datanya telah tersedia di Indonesia. Sementara dua indikator lain terkait pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dan praktik sunat perempuan belum dapat dianalisis karena metode penghitungan datanya masih dikembangkan.

B. Status Capaian dan Tantangan

1. Kerangka Hukum yang Mendorong dan Memantau Kesetaraan Gender

Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan, dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin merupakan upaya yang dilakukan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini berada dalam kerangka upaya untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia dari seorang perempuan.

Untuk mengukur ketersediaan kerangka hukum yang responsif gender, dilakukan penilaian terhadap kebijakan yang mendorong/memajukan kesetaraan gender yang disertai dengan penegakan hukum dan pemantauan pelaksanaannya. Penilaian menggunakan kuesioner yang terdiri dari 45 pertanyaan terkait capaian di 4 bidang, yaitu dasar hukum umum (12 pertanyaan), kekerasan terhadap perempuan (12 pertanyaan), lapangan kerja dan ekonomi (10 pertanyaan), serta perkawinan dan keluarga (11 pertanyaan) di tingkat nasional. Hasil penilaian perangkat peraturan perundang-undangan Indonesia yang responsif gender di Indonesia pada 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15 Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi

Bidang	Hasil penilaian	Jumlah pertanyaan survei dengan jawaban Ya
Dasar Hukum Umum	100%	12 dari 12 pertanyaan
Kekerasan terhadap Perempuan	91,67%	11 dari 12 pertanyaan
Lapangan Kerja dan Ekonomi	90%	9 dari 10 pertanyaan
Perkawinan dan Keluarga	81,82%	9 dari 11 pertanyaan

Secara umum, tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kerangka peraturan perundang-undangan tingkat nasional di Indonesia (41 dari 45 pertanyaan) telah memenuhi arahan UN di dalam kuesioner standar UN². Bidang dasar hukum umum memiliki nilai skor tertinggi, yaitu 100%, yang berarti bahwa seluruh pertanyaan yang menyangkut dasar hukum umum di Indonesia telah sesuai dengan arahan UN. Bidang dengan skor terendah di antara lainnya adalah bidang perkawinan dan keluarga namun memiliki nilai yang cukup tinggi, yaitu 81,82%. Sementara pada dua bidang lain, bidang kekerasan terhadap perempuan dan lapangan kerja dan ekonomi, masing-masing terdapat satu pertanyaan yang belum terpenuhi.

Namun, baiknya capaian perundang-undangan nasional Indonesia ini masih menyisakan catatan di beberapa aspek, terutama terkait penegakan dan pemantauan implementasi aturan, seperti yang tergambar dalam pembahasan berikut.

a) Bidang Dasar Hukum Umum

Hasil penilaian kesetaraan gender pada bidang dasar hukum umum disajikan di dalam tabel berikut.

	Dasar Hukum Umum	Kondisi Indonesia
Promosi/ pemajuan	● Jika hukum adat adalah dasar hukum yang sah menurut UUD apakah menjadi tidak sah jika tidak sesuai dengan ketentuan UUD tentang kesetaraan dan non diskriminasi?	Ya
	● Jika hukum tentang orang adalah dasar hukum yang sah menurut UUD, apakah menjadi tidak sah jika tidak sesuai dengan ketentuan UUD tentang kesetaraan dan non diskriminasi?	Ya
	● Apakah ada peraturan perUndang-Undangan tentang diskriminasi yang secara langsung maupun tidak langsung melarang diskriminasi terhadap perempuan?	Ya
	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan akses yang sama untuk menduduki jabatan publik (legislatif, eksekutif dan yudikatif)?	Ya
	● Apakah ada kuota untuk kursi parlemen atau calon anggota parlemen?	Ya
	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk berpindah kewarganegaraan mengikuti pasangannya dan anak-anaknya?	Ya
Penegakan/ pemantauan	● Apakah Peraturan perUndang-Undangan membentuk badan independent yang menerima pengaduan tentang diskriminasi berbasis gender?	Ya
	● Apakah bantuan hukum itu diharuskan untuk masalah kriminal?	Ya
	● Apakah bantuan hukum itu diharuskan untuk masalah perdata/keluarga?	Ya
	● Apakah kesaksian perempuan sama derajatnya dengan kesaksian laki-laki di pengadilan?	Ya
	● Apakah ada peraturan perUndang-undangan yang mengharuskan pembuatan dan penerbitan statistik gender?	Ya
	● Apakah ada sanksi untuk partai politik yang tidak memenuhi kuota calon anggota legislatif?	Ya

Terdapat beberapa Undang-Undang (UU) di Indonesia yang menunjukkan adanya kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan serta adanya upaya perlindungan

² Namun, telah baiknya capaian perundang-undangan nasional Indonesia ini masih menyisakan beberapa catatan. Pertama, di tingkat daerah sebenarnya masih banyaknya peraturan yang diskriminatif gender. Namun hal ini diluar pembahasan dokumen ini dan akan menjadi pembahasan di dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Tujuan 5. Kedua, kerangka hukum tingkat nasional yang hampir sesuai dengan arahan UN ini perlu diimplementasikan, diiringi dengan penyelenggaraan pemantauan/evaluasi yang menitikberatkan pada proses pembelajaran dan perbaikan program sehingga program yang mendorong kesetaraan gender dapat berjalan secara efektif dan efisien. Poin kedua ini ini masih menjadi tantangan di Indonesia—hal ini akan dibahas pada sub bab “Alokasi Anggaran Responsif Gender” di dalam Bab 2 pembahasan Tujuan 5 ini.

terhadap perempuan. Walaupun tidak dalam bentuk larangan, UU ini secara jelas menyebutkan memberikan hak pada perempuan.

Kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan yang telah diakui peraturan perundang-undangan Indonesia diantaranya kesetaraan hak dan akses untuk menduduki jabatan publik (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Terdapat kebijakan kuota bagi perempuan untuk menjadi anggota parlemen/calon anggota parlemen. Perempuan dan laki-laki juga memiliki hak yang sama untuk berpindah kewarganegaraan³. Disamping itu, Indonesia juga mengakui hukum adat sebagai salah satu sumber hukum. Namun pemberlakukannya tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945.

Untuk menjamin penegakan kesetaraan gender di Indonesia, terdapat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang merupakan lembaga negara independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Pembentukan lembaga negara ini disahkan melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Bantuan hukum juga tersedia baik untuk urusan kriminal maupun perdata/keluarga seperti yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kesaksian perempuan juga telah diakui memiliki derajat yang sama sebagaimana tercantum dalam KUHAP dan diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Mengingat data statistik yang responsif gender diperlukan untuk mengukur kinerja/situasi kesetaraan gender yang telah dicapai, Indonesia juga sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pembuatan dan penerbitan statistik gender. Terdapat Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak yang diperbaharui Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak. Disamping itu, terdapat pula dasar hukum pengarusutamaan gender dengan statistik gender sebagai salah satu prasyaratnya.⁴

³ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur: ayat (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Sementara pada Ayat (2), Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. ayat (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

⁴ Dasar hukum pengarusutamaan gender dengan statistik gender sebagai salah satu prasyaratnya adalah: UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025; UU No. 23 Tahun 2014 juncto UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender; Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK-02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018.

b) Bidang kekerasan terhadap perempuan

Komponen penilaian terkait kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dapat dilihat di tabel berikut.

	Kekerasan terhadap perempuan	Kondisi Indonesia
Promosi/ pemajuan	● Apakah ada Peraturan perUndang-Undangan tentang KDRT yang mencakup kekerasan fisik?	Ya
	● Apakah ada Peraturan perUndang-Undangan tentang KDRT yang mencakup kekerasan seksual?	Ya
	● Apakah ada Peraturan perUndang-Undangan tentang KDRT yang mencakup kekerasan psikologis?	Ya
	● Apakah ada Peraturan perUndang-Undangan tentang KDRT yang mencakup kekerasan ekonomi?	Ya
	● Apakah ketentuan dalam Peraturan PerUndang-Undangan tentang pengecualian pelaku perkosaan jika dia mengawini korban sesudah melakukan kejahatan itu sudah dicabut atau tidak pernah ada dalam peraturan perUndang-Undangan?	Ya
	● Apakah ketentuan tentang kejahatan untuk mempertahankan kehormatan sudah dicabut atau tidak pernah ada?	Tidak
	● Apakah Peraturan PerUndang-Undangan tentang perkosaan didasarkan pada adanya penolakan (Lack of consent) tanpa pembuktian paksaan fisik dan penetrasi?	Ya
	● Apakah Peraturan perUndang-Undangan menganggap perkosaan dalam perkawinan sebagai pelanggaran hukum atau melegalkan perempuan untuk melaporkan perkosaan oleh suami atau pasangannya?	Ya
	● Apakah ada Peraturan PerUndang-Undangan yang menangani pelecehan seksual?	Ya
Penegakan/ pemantauan	● Apakah ada komitmen pembiayaan pemerintah untuk pelaksanaan Peraturan PerUndang-Undangan tentang kekerasan terhadap perempuan dengan membuat kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait?	Ya
	● Apakah ada komitmen pembiayaan pemerintah untuk pelaksanaan Undang-Undang tentang kekerasan terhadap perempuan dengan memberikan alokasi anggaran khusus untuk mendukung kegiatan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan oleh lembaga non pemerintah ?	Ya
	● Apakah ada rencana aksi atau kebijakan untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan yang diawasi oleh mekanisme nasional yang diberi tugas untuk memantau dan menelaah pelaksanaannya?	Ya

Skor Indonesia untuk bidang kekerasan terhadap perempuan adalah 91,67%, Indonesia telah memenuhi 11 dari 12 kriteria ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kekerasan terhadap perempuan. Meskipun telah banyak aspek yang terpenuhi, namun untuk memberikan perlindungan yang lebih baik pada perempuan, masih terdapat ruang perbaikan terutama terkait dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di ruang publik.

Pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi atas konvensi internasional yang menentang kekerasan terhadap perempuan melalui UU No. 7/1984 dan UU No. 5/1998. Di tingkat nasional, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang meregulasi kekerasan terhadap perempuan. Di ranah domestik (dalam perkawinan), Indonesia telah memiliki kerangka hukum untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Bentuk

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

kekerasan yang telah diatur di dalam UU ini meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran di dalam rumah tangga⁵. Pemerkosaan oleh suami dalam perkawinan juga menjadi aspek yang diatur di dalam UU ini.

Di ranah publik, Indonesia memiliki KUHP untuk menjerat pelaku kekerasan serta UU Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan kekerasan terhadap anak. Berbeda dengan UU PKDRT yang telah melingkupi beragam bentuk kekerasan di dalam rumah tangga, KUHP dan UU Perlindungan Anak memiliki ruang lingkup yang terbatas dalam menjangkau/menangani seluruh perempuan dan seluruh spektrum kekerasan yang berkembang di ranah publik/komunitas⁶. UU Perlindungan Anak hanya menjangkau penduduk usia anak. Sementara KUHP hanya menjangkau kekerasan fisik, yaitu tindak pidana percobaan perkosaan (Pasal 53), melanggar kesusilaan (Pasal 281 ayat 1), pencabulan (289-296), serta penganiayaan (351-356). Padahal, beragam jenis kekerasan non fisik telah berkembang di masyarakat seperti pelanggaran privasi, pelecehan seksual (diraba, diintip, komentar seksis), serta beragam kekerasan non fisik melalui media teknologi (dikenal dengan nama Kekerasan Gender Berbasis Siber (KBGS)).

Indonesia secara harfiah memiliki perangkat hukum untuk menangani pelecehan seksual. Disamping UU PKDRT, KUHP, dan UU perlindungan anak, terdapat UU No. 33 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun pada kedua UU ini, masih terdapat persoalan pada aspek perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Disamping itu, belum terdapat kerangka hukum yang melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual, termasuk pemenuhan hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan/rehabilitasi bagi korban. Ketiga hal ini diperlukan karena korban kekerasan seksual di Indonesia menghadapi tekanan *victim blaming* (perempuan korban kekerasan dianggap sebagai pihak yang bersalah) yang berkembang di masyarakat, dan sikap keluarga yang cenderung menganggap keberadaan anggota keluarga korban kekerasan seksual sebagai aib—sehingga menurunkan kemungkinan untuk melaporkan dan memperoleh keadilan atas kasus yang dialaminya (Hardianti et al., 2021).

Hal yang sudah baik di Indonesia adalah adanya peraturan yang mendorong pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja, yaitu SE Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Akan tetapi, penerapan aturan ini masih menemui dua tantangan utama, yakni (1) maraknya praktik *quid pro quo* yang menekan karyawan untuk mentolerir tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual, sebagai imbalan atas pekerjaan dan (2) kondisi lingkungan kerja yang mengintimidasi dan tidak bersahabat terkait perilaku seksual (Komnas Perempuan, 2021).

⁵ Hal ini tercermin pada pasal-pasal yang ada dalam UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di dalam UU tersebut, terdapat pernyataan bahwa bahwa tindak kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan delik aduan, sedangkan tindakan penelantaran mengandung ancaman pidana bagi pelakunya

⁶ Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021, kekerasan terhadap perempuan di ranah publik/komunitas merujuk pada tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan kerja, bermasyarakat, rukun tetangga, atau lembaga pendidikan sehingga mencakup perempuan pekerja migran yang menjadi korban TPPO.

Hal baik lain di kerangka hukum Indonesia adalah tidak adanya aturan yang membebaskan pelaku kejahatan seksual dari tuntutan pidana ketika menikahi korban. Hal ini berarti bahwa ketika terjadi pernikahan antara korban dan pelaku, tindak kejahatan akan tetap diproses secara hukum. Namun pada kenyataannya, masih terdapat kasus keluarga yang mendorong pernikahan korban dan pelaku kejahatan seksual karena menganggap keberadaan anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai aib sehingga mendorong mereka untuk tidak melaporkan kasus melalui jalur hukum.

Disamping itu, telah terdapat alokasi anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan program dan kegiatan terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana terlihat pada dokumen RPJMN, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Strategis K/L, dan Rencana Kerja K/L. Di tingkat desa, ditemukan adanya inisiatif penggunaan Dana Desa di salah satu desa penelitian yang dilakukan SMERU. Di desa tersebut, Dana Desa dialokasikan untuk menyediakan layanan penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban KDRT (Prasetyo et al., 2019). Pemerintah juga mengalokasi anggaran khusus untuk mendukung kegiatan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan oleh lembaga non pemerintah. Hal ini diantaranya terlihat di dalam Rencana Aksi Program kerjasama (*Country Programme Action Plan*) Pemerintah RI dan lembaga UN. Pemerintah juga telah merumuskan serangkaian kegiatan untuk menjalankan upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan—dirumuskan di dalam dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN). Dokumen RAN yang sudah dimiliki Indonesia sejauh ini adalah RAN Pencegahan dan Penanganan TPPO 2015-2019, RAN Kesehatan Lansia, dan RAN Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS).

c) Bidang lapangan kerja dan ekonomi

Komponen penilaian terkait kesetaraan gender di bidang lapangan kerja dan ekonomi dapat dilihat di tabel berikut.

	Lapangan kerja dan ekonomi	Kondisi Indonesia
Promosi/ pemajuan	● Apakah Peraturan PerUndang-Undangan memerintahkan non-diskriminasi berdasarkan gender dalam pekerjaan?	Ya
	● Apakah Peraturan PerUndang-Undangan memerintahkan penggajian yang setara untuk pekerjaan yang nilainya sama?	Ya
	● Apakah perempuan dapat bekerja di bidang yang berbahaya, sulit dan secara moral kurang pantas sama seperti laki-laki?	Tidak
	● Apakah perempuan dapat bekerja pada bidang yang sama dengan laki-laki?	Ya
	● Apakah perempuan dapat berperan sama dengan laki-laki?	Ya
	● Apakah Peraturan PerUndang-Undangan membolehkan perempuan bekerja pada jam giliran malam sama dengan laki-laki?	Ya
	● Apakah Peraturan PerUndang-Undangan memberikan cuti melahirkan dan pengasuhan untuk ibu sesuai dengan standard ILO?	Ya
	● Apakah Undang-Undang memberikan hak cuti kelahiran anak dengan tetap digaji pada suami atau pasangan?	Ya
Penegakan/ pemantauan	● Apakah ada lembaga publik yang dapat menerima pengaduan tentang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pekerjaan?	Ya
	● Apakah pengasuhan/penitipan anak tersedia secara umum atau disubsidi?	Ya

Bidang lapangan kerja dan ekonomi memiliki skor 90%--Indonesia telah memenuhi 9 dari 10 kriteria ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kekerasan terhadap perempuan. Namun untuk memberikan perlindungan yang lebih baik

pada perempuan agar mereka dapat masuk pasar tenaga kerja dan mampu mengembangkan karier mereka dengan optimal, maka penegakan kerangka hukum tersebut menjadi tantangan tersendiri.

Mengingat perempuan mengalami beragam tantangan berbasis gender ketika masuk ke pasar kerja⁷, maka kesetaraan kesempatan di bidang pekerjaan memiliki peran penting untuk mengoptimalkan potensi perempuan di tempat kerja. Dalam UUD 1945 Pasal 27 (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Indonesia juga telah mengesahkan beragam konvensi ILO terkait kesetaraan gender di dunia kerja.

Pada tahun 2003, Indonesia merumuskan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang isinya juga mengakui bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Dengan kerangka hukum ini, pekerja perempuan dan laki-laki dapat bekerja pada bidang yang sama dan dapat memainkan peran yang sama selama pekerjaan tersebut tidak membahayakan fungsi reproduksi perempuan. Jika membahayakan, misal bekerja pada malam hari serta bekerja sebagai pekerja tambang bawah tanah, terdapat perlindungan yang diberikan perangkat hukum Indonesia terhadap perempuan.

Upaya perlindungan lain yang telah terdapat dalam kerangka hukum Indonesia adalah pemberian cuti melahirkan selama 3 bulan dengan tetap memperoleh gaji dan penyediaan ruang laktasi di tempat kerja dan fasilitas umum. Hal ini juga menjadi perhatian melalui Permen KPPPA no. 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja. Terkait gaji, UU Ketenagakerjaan mengakui hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Komitmen untuk mendorong kesetaraan gaji antara laki-laki dan perempuan terlihat dengan disahkannya Konvensi ILO mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang nilainya sama melalui UU No. 80 Tahun 1957.

Meskipun kerangka hukum yang mendorong kesetaraan gender di pekerjaan telah tersedia, Indonesia masih perlu kerja keras untuk menjamin terwujudnya kesetaraan gender di dunia kerja. Sejauh ini, diskriminasi gender di pekerjaan masih terjadi di Indonesia. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih jauh dibawah laki-laki⁸. Hasil survei yang dilakukan ILO menemukan bahwa tingkat upah perempuan pekerja di Indonesia lebih rendah 23% dari laki-laki. Perempuan yang menduduki posisi managerial juga jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki (dibahas pada Sub Bab 2.5.5). Meskipun kerangka hukum menyediakan ruang laktasi di tempat kerja telah tersedia, pada kenyataannya masih banyak institusi belum

⁷ Tantangan yang dihadapi perempuan bekerja diantaranya adalah buaya patriarki yang memunculkan beban ganda bagi perempuan bekerja—perempuan bekerja tetap bertanggung jawab mengurus urusan domestik; stereotip gender terkait pekerjaan—bahwa pekerjaan tertentu tidak dapat dilakukan oleh perempuan; serta kekerasan seksual di tempat kerja. Di masa pandemi, beban ganda perempuan bekerja bertambah karena adanya peningkatan beban mengurus rumah tangga. Di masa pandemi, banyak perempuan harus bekerja dari rumah bersamaan dengan mendampingi anak yang bersekolah dari rumah. Risiko kekerasan rumah tangga juga tinggi terhadap perempuan di masa pandemi ini.

⁸ TPAK perempuan yang lebih rendah dari laki-laki ini menunjukkan bahwa proporsi perempuan yang masuk pasar tenaga kerja masih sedikit jika dibandingkan laki-laki

menyediakannya, termasuk di kantor pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dan di usaha skala mikro kecil (R. K. Dewi et al., 2016; Gusmelia et al., 2019).

d) Bidang perkawinan dan keluarga

Komponen penilaian terkait kesetaraan gender di bidang perkawinan dan keluarga dapat dilihat di tabel berikut.

	Perkawinan dan keluarga	Kondisi Indonesia
Promosi/ pemajuan	● Apakah batas usia minimum kawin paling rendah 18 tahun tanpa pengecualian, untuk perempuan dan laki-laki?	Ya
	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk menikah and bercerai?	Ya
	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk menjadi wali hukum dari anak-anaknya selama dan setelah perkawinan?	Ya
	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk menjadi kepala keluarga atau rumah tangga?	Tidak
	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk memilih tempat tinggal?	Ya
	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk memilih profesi?	Ya
	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kartu identitas?	Ya
	● Apakah perkawinan dibawah usia yang diijinkan Undang-Undang sah atau dapat disahkan?	Ya
	● Apakah ada pengadilan khusus untuk keluarga?	Tidak
Penegakan/ pemantauan	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan paspor?	Ya
	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk memiliki, mengakses dan mengendalikan kepemilikan harta perkawinan termasuk setelah perceraian?	Ya

Sejauh ini, masih terdapat perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga—laki-laki adalah kepala keluarga, sementara istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pengadilan khusus untuk keluarga juga belum tersedia di Indonesia. Namun di banyak aspek terkait perkawinan dan keluarga, telah terdapat kerangka hukum yang mendorong pemajuan kesetaraan gender. Perempuan dan Laki-laki diakui memiliki hak yang sama untuk memilih tempat tinggal⁹, profesi¹⁰, mendapatkan kartu identitas¹¹, dan menjadi wali hukum untuk anak-anaknya selama/setelah perkawinan¹². Disamping itu, terdapat pula pengakuan kesetaraan hak untuk mendapatkan paspor¹³ dan untuk mengakses dan mengendalikan kepemilikan harta perkawinan¹⁴. Meski terdapat perbedaan pengakuan hak perempuan dan laki-laki terkait pernikahan, Indonesia mengakui persamaan hak untuk bercerai¹⁵. Pada 2019, pemerintah telah meningkatkan batas

⁹ Tidak terdapat peraturan yang membatasi hal ini

¹⁰ Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹¹ Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹² Tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, Hal ini didasari pada Pasal 51 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹³ Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁴ Pasal 65 UU No.1 Tahun 1976 tentang perkawinan

¹⁵ Berdasarkan Pasal 3 (2) UU No. 1 Tahun 1976), suami diizinkan untuk beristri lebih dari seorang tapi tidak berlaku sebaliknya karena didasarkan pada aturan agama yang melarang hal tersebut

minimum perkawinan menjadi 19 tahun yang ditandai dengan disahkannya perubahan atas UU Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019).

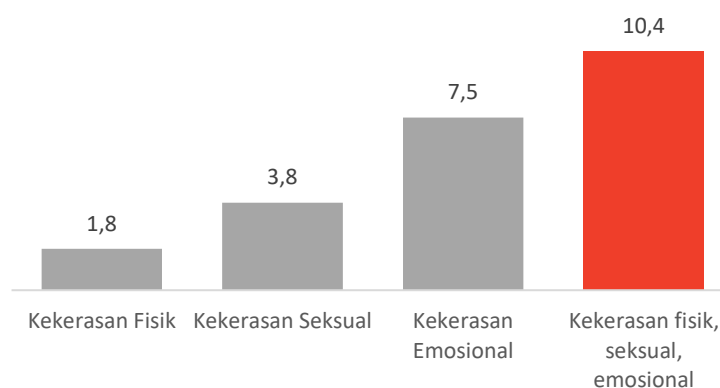
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat dasar untuk mendorong dan memantau kesetaraan gender. Namun, terdapat ruang perbaikan dan peningkatan kerangka hukum di beberapa aspek yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan gender di berbagai bidang.

2. Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Sebagai separuh dari populasi nasional, kapasitas perempuan utamanya yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan merupakan aspek penting yang perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Namun kekerasan berbasis gender yang umumnya dialami oleh perempuan dapat menghambat partisipasi mereka dalam pembangunan bahkan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara (Heise et al., 1994; Watts & Zimmerman, 2002). Dalam jangka panjang, kekerasan ini dapat berdampak pada rendahnya kemampuan bekerja dan kualitas pengasuhan anak yang dilakukan oleh perempuan korban kekerasan. Jika korban masih berada dalam usia anak, kekerasan berpotensi memunculkan perilaku berisiko baik saat mereka masih berada di usia anak maupun saat telah dewasa seperti terlibat aktivitas seksual berisiko dan tindak kejahatan (Pinheiro, 2006).

Kondisi Pencapaian

Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 yang dilakukan oleh Kementerian PPPA dan BPS, sebanyak 10,4% perempuan yang pernah/ sedang menikah mengalami kekerasan oleh pasangan maupun mantan pasangan selama satu tahun terakhir. Jenis kekerasan dengan proporsi tertinggi oleh pasangan yang dialami perempuan adalah kekerasan emosional¹⁶—dialami oleh 7,5% perempuan yang pernah/ sedang menikah, diikuti oleh kekerasan seksual (3,8%) dan kekerasan fisik (1,8%) (Gambar 2.28).



Gambar 2.28 Proporsi kekerasan terhadap perempuan (oleh pasangan atau mantan pasangan) dalam 12 bulan terakhir berdasarkan jenis kekerasan, 2016

Sumber: SPHPN (Kementerian PPPA dan BPS)

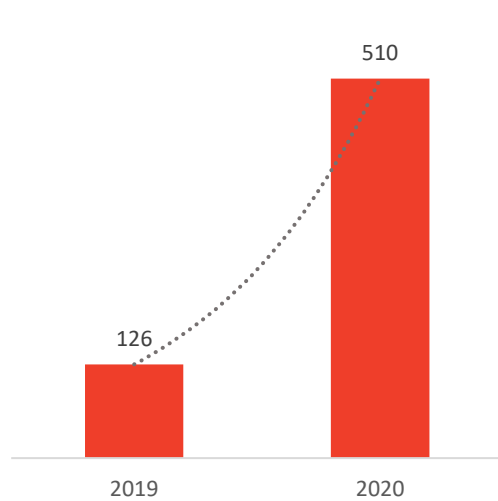
¹⁶ Bentuk kekerasan emosional ini diantaranya adalah ditakut-takuti/diintimidasi, diandam untuk disakiti, serta dihina, direndahkan, dan dipermalukan di depan orang lain.

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dilakukan oleh pasangan, tapi juga oleh orang lain yang bukan pasangan (seperti orang tua/anggota keluarga selain suami, teman, tetangga, guru, rekan/atasan di tempat kerja). Diantara seluruh perempuan usia 15-64 tahun, sebanyak 4,66% pernah mengalami kekerasan seksual oleh orang lain yang bukan pasangan pada 2016 (SPHPN, 2016). Jika dibandingkan berdasarkan status perkawinan, angka kekerasan seksual diantara perempuan yang belum kawin/belum pernah punya pasangan jauh lebih tinggi (mencapai 19,04%) dibandingkan perempuan yang pernah/sedang punya pasangan (hanya 2,16%).

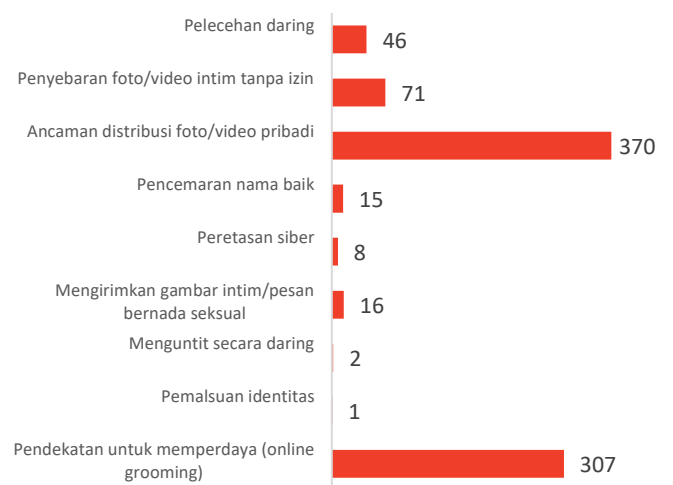
Perkembangan kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2016 hingga 2019 berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan adanya peningkatan pelaporan kasus dari 259.159 kasus pada 2016 menjadi 431.471 kasus pada 2019.

Pada masa pandemi COVID-19, risiko perempuan untuk mengalami kekerasan semakin besar. Hasil survei LPEM FEBUI dan UNDP menunjukkan sekitar 42% responden menyatakan mengalami peningkatan kekerasan selama pandemi. Pasangan hidup ditemukan sebagai pelaku utama kekerasan selama pandemi, dengan jenis kekerasan yang sering terjadi adalah pelanggaran bekerja/keluar rumah, pengambilan uang secara paksa, serta kekerasan verbal (UNDP Indonesia, 2021). Di sisi lain, pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan justru mengalami penurunan. Pendataan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa jumlah pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan turun dari 431.471 kasus pada 2019 menjadi 299.911 kasus pada 2020.

Salah satu jenis kasus kekerasan yang marak terjadi saat pandemi adalah kekerasan berbasis gender siber (KBGS) (Komnas Perempuan, 2021). Pendataan Komnas Perempuan 2021 menunjukkan terjadinya peningkatan KBGS dari 241 kasus menjadi 940 kasus (meningkat 384 kasus) pada periode 2019–2020. Hal ini disebabkan oleh luasnya jangkauan dunia maya yang memungkinkan orang yang belum pernah dikenal sebelumnya untuk menjadi pelaku kekerasan daring. Kondisi tersebut ditambah dengan adanya keterbatasan akses layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan selama pandemi sehingga terdapat tantangan dalam mengukur jumlah kasus kekerasan yang sebenarnya terjadi terlebih dalam menghadapi risiko yang lebih besar.



Gambar 2.29 Jumlah kasus kekerasan berbasis gender siber berdasarkan data lembaga layanan, 2019–2020



Gambar 2.30 Jumlah kasus tiap jenis kekerasan berbasis gender siber berdasarkan data lembaga layanan, 2020

Sumber: Komnas Perempuan (2021)

Tantangan

Kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi fenomena gunung es di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh jumlah kasus terlapor yang dianggap belum dapat merepresentasikan jumlah kasus sesungguhnya. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan juga banyak dilakukan melalui jalur non hukum (seperti mediasi keluarga, tokoh masyarakat, dan penyelesaian adat).

Beragam jenis layanan yang perlu tersedia/dibutuhkan korban kekerasan adalah layanan pendampingan dan pengaduan, layanan penegakan dan bantuan hukum oleh kepolisian/pengadilan, layanan kesehatan (untuk visum), dan layanan rehabilitasi (kesehatan dan sosial). Layanan ini, idealnya, diakses oleh perempuan korban kekerasan agar memperoleh penanganan, perlindungan dan pemulihan dari kejadian kekerasan yang dialami.

Ketersediaan dan keterjangkauan layanan juga menjadi persoalan. Sejauh ini, ketersediaan layanan-layanan ini tidak merata di seluruh Indonesia. Diantara lembaga yang tersedia, terdapat keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM¹⁷, anggaran, dan

¹⁷ Misalnya, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di kepolisian seharusnya berada di unit pelayanan perempuan dan anak. Namun polisi Wanita (polwan) tidak selalu ada di polsek (kepolisian tingkat kecamatan) untuk menangani unit PPA. Layanan visum dan rehabilitasi Kesehatan di tingkat desa tidak tersedia karena tidak ada petugas Kesehatan yang terlatih untuk melakukan visum / menangani korban kekerasan terhadap perempuan. Banyak penyelesaian kasus di kepolisian dilakukan secara non-hukum karena adanya pemaknaan kasus sebagai *Restorative Justice*. Idealnya, restorative justice dilakukan dalam rangka memberi tekanan pada kepentingan korban, termasuk keluarga korban, dan masyarakat luas yang terkena dampaknya serta partisipasi penuh korban dan pihak lain yang terdampak. Namun mekanisme keadilan restoratif yang dipraktekkan hanya ditujukan untuk menghentikan kasus/menghindari proses peradilan pidana yang dianggap tidak efektif, lama, dan mahal.

Di ranah publik, ini terjadi pada kasus mahasiswa UGM – yang kasusnya diselesaikan dengan kekeluargaan

infrastruktur/fasilitas fisik¹⁸, serta belum terbangunnya sistem tata kelola organisasi (Tamyis et al., 2019; Komnas Perempuan, 2021). Dengan kondisi ini, terdapat konsekuensi biaya yang harus ditanggung oleh perempuan korban kekerasan ketika ingin mengakses layanan, terutama bagi perempuan dari keluarga miskin. Konsekuensi biaya ini menjadi penghambat perempuan miskin untuk mengakses layanan. Distribusi infrastruktur ini juga berkaitan erat dengan aspek geografis sehingga perempuan yang tinggal di wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam mengakses fasilitas pelayanan yang tersedia. Di masa pandemi, layanan pengaduan kekerasan juga mengalami pembatasan layanan, termasuk pembatasan proses persidangan di pengadilan agama. Layanan yang ada juga belum beradaptasi mengubah sistem pengaduan dengan menggunakan sistem daring—disamping juga ada persoalan literasi teknologi diantara korban (Komnas Perempuan, 2021).

Ketersediaan data dan informasi yang komprehensif diperlukan untuk mengungkap kasus kekerasan serta membantu membangun pemahaman yang menyeluruh terkait akar persoalan dari yang terjadi. Pada tingkat makro, terdapat data SPHPN yang dihimpun oleh BPS, meskipun data tersebut dikumpulkan satu kali dalam 5 tahun. Sementara dari sisi catatan administrasi, telah terdapat pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh beberapa lembaga layanan seperti pengadilan negeri, kepolisian, *Women's Crisis Centre* dan Lembaga Swadaya Masyarakat, dinas terkait pada tingkat kabupaten, P2TP2A, dan Komnas Perempuan. Namun pendataan kasus dari seluruh jenis layanan terkait kekerasan terhadap perempuan (layanan pendampingan dan pengaduan, layanan penegakan dan bantuan hukum, layanan kesehatan, dan layanan rehabilitasi) belum terintegrasi dengan optimal sehingga data yang tersedia belum mencerminkan jumlah kasus riil.

Upaya KIE yang selama ini dilakukan juga dianggap kurang efektif sehingga masih banyak perempuan dewasa dan anak perempuan yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran atas berbagai bentuk kekerasan sehingga tidak menganggap dirinya memiliki hak atas perlindungan. Di sisi lain, terdapat keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya berupa SDM, anggaran, dan fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan, ketersediaan layanan dan cara menjangkaunya.

Bentuk tantangan lain yang masih dihadapi dalam upaya pengentasan kekerasan terhadap perempuan adalah kerentanan perempuan pekerja migran terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selama ini, perempuan juga lebih rentan menjadi korban TPPO karena beberapa hal seperti kesulitan mencari pekerjaan, kemiskinan, dan posisinya yang bukan merupakan kepala keluarga sehingga tidak dianggap sebagai pengambil keputusan utama dalam rumah tangga (Daniah & Apriani, 2017).

3. Perkawinan Anak

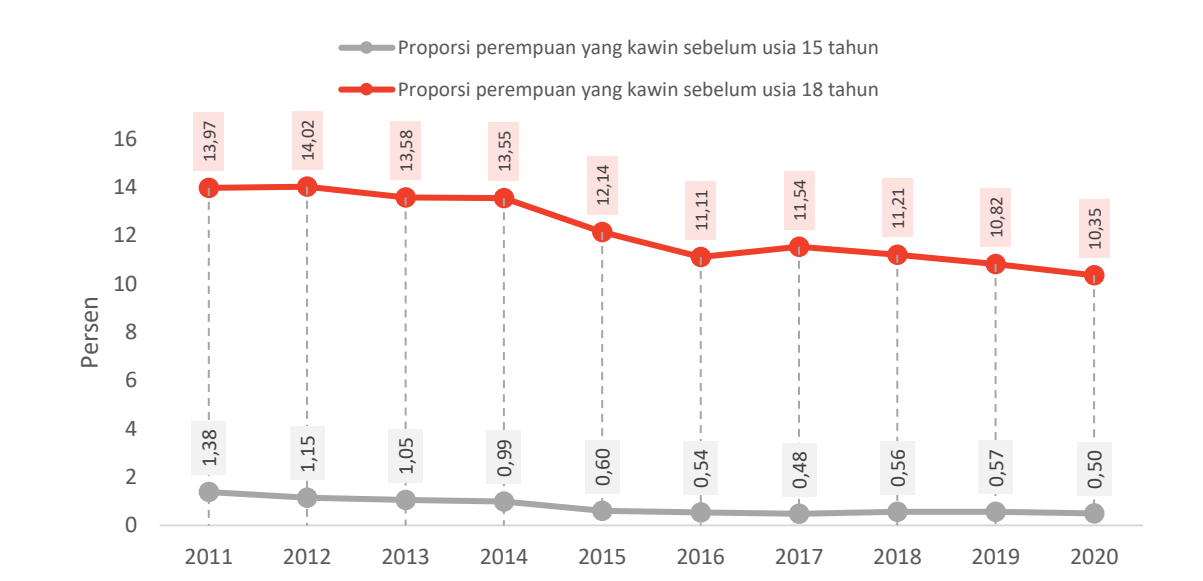
Perkawinan anak memiliki konsekuensi negatif tidak hanya pada anak, tapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ancaman yang muncul dari perkawinan pada usia anak

¹⁸ Misalnya, belum seluruh P2TP2A memiliki rumah aman bagi korban KDRT yang dilengkapi tenaga terlatih untuk melakukan rehabilitasi sosial terhadap korban. Terdapat kab/kota di Indonesia yang tidak memiliki polres sehingga tindak lanjut pelaporan kasus dari polsek diteruskan ke polres kab/kota tetangga.

adalah: putus sekolah, ancaman kesehatan fisik ibu dan anak yang dilahirkan¹⁹, berpotensi mengganggu kesehatan mental, risiko kekerasan dalam rumah tangga serta peluang penerapan pola asuh yang keliru. Perkawinan anak juga memiliki konsekuensi pada terjadinya kasus stunting pada anak bawah lima tahun (Bappenas et al., 2020). Secara makro, persoalan perkawinan anak ini meningkatkan angka fertilitas di Indonesia, mengancam capaian IPM, dan berpotensi mengganggu capaian berbagai indikator SDG—tidak hanya di tujuan 5, tapi juga di Tujuan 1, 2, 3, 4, 8, 10, dan 16.

Kondisi Pencapaian

Angka perkawinan anak di Indonesia telah menunjukkan tren penurunan antara 2015 dan 2019. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun turun dari 12,14% menjadi 10,82% antara 2015 dan 2019. Sementara angka perkawinan anak usia dibawah 15 tahun turun dari 0,6 menjadi 0,57. Namun penurunan angka perkawinan anak ini masih belum memenuhi target. Target SDG untuk angka perkawinan anak usia dibawah 18 tahun pada tahun 2019 sebesar 10,59%. Disamping itu, selama lima tahun pelaksanaan SDG di Indonesia, penurunan angka perkawinan anak tidak terjadi secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan angka perkawinan anak, bahkan untuk perkawinan anak usia dibawah 15 tahun, peningkatan ini masih terjadi hingga tahun 2019.

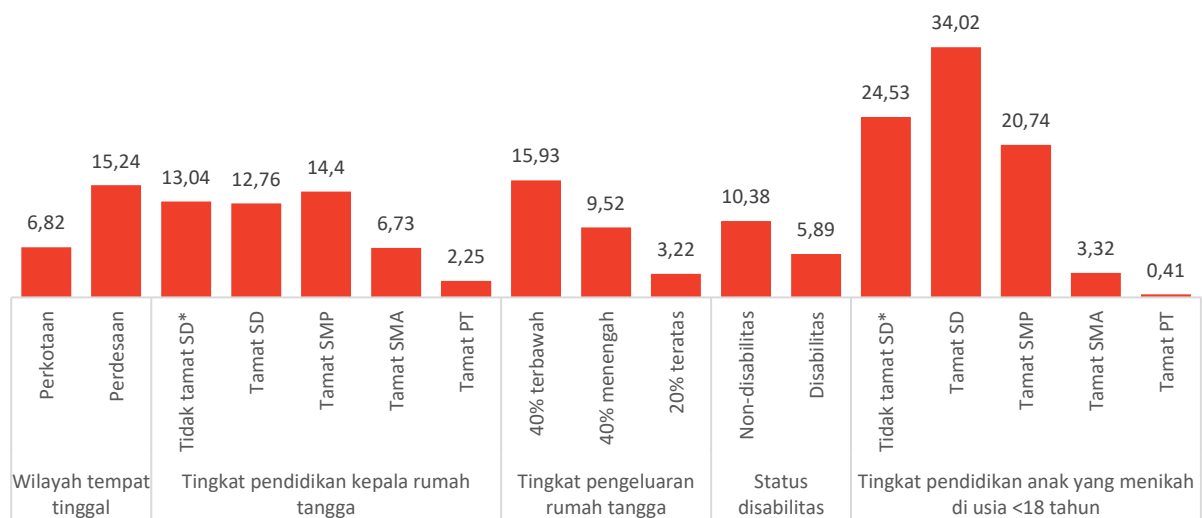


Gambar 2.31 Perkembangan angka perkawinan anak perempuan di Indonesia

Sumber: BPS

Perkawinan anak lebih banyak terjadi pada perempuan yang tinggal di pedesaan, yang berasal dari rumah tangga (kepala rumah tangga) berpendidikan rendah dan tingkat kesejahteraan menengah kebawah. Anak-anak yang mengalami perkawinan anak cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dengan kasus perkawinan anak lebih tinggi terjadi diantara perempuan non disabilitas (Gambar 2.32).

¹⁹ Perempuan yang hamil pada usia dini memiliki potensi lebih tinggi mengalami gangguan kehamilan, kematian saat hamil, kematian saat melahirkan, dan melahirkan bayi stunting



Gambar 2.32 Karakteristik perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun, 2020

Sumber: BPS

Tantangan

Terdapat kompleksitas faktor penyebab praktik perkawinan anak di Indonesia mulai dari tingkat individu anak, keluarga, norma sosial yang berkembang di daerah, serta kebijakan. Tantangan di masing-masing tingkatan kehidupan ini saling berinteraksi satu sama lain menghasilkan intensitas tantangan yang berbeda bagi setiap individu anak di wilayah berbeda.

Pada tingkat individu, anak dan remaja kurang memiliki keberdayaan dan pemahaman terkait kesehatan reproduksi dan dampak negatif perkawinan anak. Dalam konteks kehamilan di luar pernikahan, relasi pertemanan dan kemudahan akses informasi/komunikasi yang tidak diiringi keberdayaan dan kapasitas individu mengenai kesehatan reproduksi menjadi salah satu penyebab kehamilan remaja di luar pernikahan. Norma sosial yang menaburkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja menjadi penghalang peningkatan kapasitas anak dan remaja terhadap kesehatan reproduksi. Ditambah dengan norma sosial di beberapa daerah yang memberikan stigma negatif pada perempuan yang belum menikah di usia muda—stigma ini akhirnya membuat anak penerima perkawinan di usia dini (Bappenas & PPPA, 2020; BPS & Bappenas, 2020).

Di dalam keluarga, faktor ekonomi/kemiskinan dengan banyaknya jumlah anak, pendidikan orang tua yang rendah, serta lemahnya pemahaman mereka terhadap kesehatan reproduksi dan dampak perkawinan anak menjadi faktor pendorong orang tua menikahkan anaknya pada usia anak. Faktor sulitnya akses pendidikan (jumlah sekolah yang terbatas, yang berimplikasi pada besarnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan) juga turut menjadi faktor yang berperan terhadap perkawinan anak seperti yang terlihat pada Gambar 2.32.

Pemerintah juga mendorong penurunan angka perkawinan anak melalui penetapan kabupaten/kota layak anak—salah satu indikator yang digunakan dalam penentuan kabupaten/kota layak anak ini adalah tingkat perkawinan anak. Dukungan peraturan di

berbagai tingkat pemerintahan diperlukan untuk mendorong pencegahan perkawinan anak di tingkat daerah. Namun yang menjadi tantangan saat ini adalah belum seluruh daerah memiliki peraturan terkait. Sementara itu, peraturan di tingkat desa seringkali ditemukan kontradiktif dengan upaya perlindungan hak anak. Di satu sisi, peraturan memberikan batasan dalam berpacaran. Namun ketika terjadi pelanggaran, terdapat sanksi denda atau sanksi sosial yang melukai martabat anak (Bappenas & PPPA, 2020).

Di tingkat nasional, belum terdapat peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari pendewasaan usia perkawinan yang ditetapkan di dalam UU No. 16 Tahun 2019. Angka dispensasi perkawinan oleh pengadilan agama juga tinggi. Dispensasi perkawinan ini akhirnya membuat perkawinan usia anak menjadi sah secara hukum. Langkah maju yang telah ada saat ini terkait dispensasi perkawinan ini adalah telah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 yang memperketat persyaratan untuk menikahkan anak. Tantangan dari upaya pengetatan aturan dispensasi perkawinan ini adalah peluang peningkatan kasus perkawinan yang tidak tercatat di KUA/penyembunyian perkawinan.

4. Partisipasi Perempuan

Tujuan 5 TPB/SDGs menilai keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam bidang politik, ekonomi dan kemasyarakatan melalui proporsi perempuan yang menduduki kursi di parlemen²⁰ dan jabatan pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah, serta perempuan yang menduduki jabatan manajerial/kepemimpinan di pemerintahan dan perusahaan publik/swasta.

Kondisi Pencapaian

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakui hak dan akses yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk menduduki jabatan publik baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Upaya untuk mendorong representasi perempuan di legislatif merupakan proses panjang yang telah dimulai sejak masa awal reformasi. Upaya untuk mendorong representasi perempuan di legislatif ini telah dilakukan dari hulu hingga hilir proses legislasi, mulai dari proses seleksi di internal partai, penempatan perempuan di daftar calon legislatif, dan mekanisme penentuan calon terpilih (Margret et al., 2018).

Partisipasi politik perempuan sebagai pengambil keputusan politik telah didorong di dalam serangkaian peraturan perundang-undangan, dengan target keterwakilan perempuan di parlemen minimal 30%. Kebijakan berawal dari adanya himbauan di dalam UU No. 12/2003 untuk memperhatikan keterwakilan perempuan 30% di legislatif pada kegiatan pemilu 2004. Penetapan kuota ini merupakan tindak lanjut dari konvensi perempuan se dunia Tahun 1995 di Beijing dan hasil sidang umum *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW) pada tahun 2000. Kebijakan kuota ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen tidak hanya merupakan tugas

²⁰ Dalam ranah politik, idealnya pengukuran partisipasi perempuan ini dilakukan secara substantif (mengukur keterlibatan perempuan yang secara aktif terlibat dalam perdebatan dan upaya mendorong kebijakan dan keluaran legislatif yang lebih ramah perempuan). Namun keterbatasan data membuat pengukuran ini sulit dilakukan.

perempuan, tapi juga tanggung jawab negara—diperlukan kebijakan/dukungan dari negara agar keterwakilan perempuan di parlemen ini dapat terealisasi.

Sejauh ini, angka perempuan yang menduduki kursi legislatif terus mengalami peningkatan. Namun hingga pemilu 2019, target 30% perempuan di legislatif baru terpenuhi pada anggota DPD. Sementara proporsi perempuan yang menjadi anggota DPR dan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih jauh dari angka target 30%.

Tabel 2.16 Proporsi kursi legislatif tingkat pusat dan daerah yang diduduki perempuan

	2009	2014	2019
DPR	18,04	17,32	20,52
DPD	26,52	25,76	30,88
DPRD Provinsi	15,50	15,92	17,53
DPRD Kabupaten/Kota		14,24	15,30

Sumber: KPU

Mayoritas anggota DPR RI perempuan mengenyam bangku kuliah dengan komposisi 39,8% lulus D3/D4/S1, 43,2% lulus S2, dan 8,47% lulus S3. Anggota DPR yang tidak kuliah sebesar 8,47% (hanya tamat SMA).

Tabel 2.17 Tingkat pendidikan anggota DPR RI perempuan pada Pemilu 2019

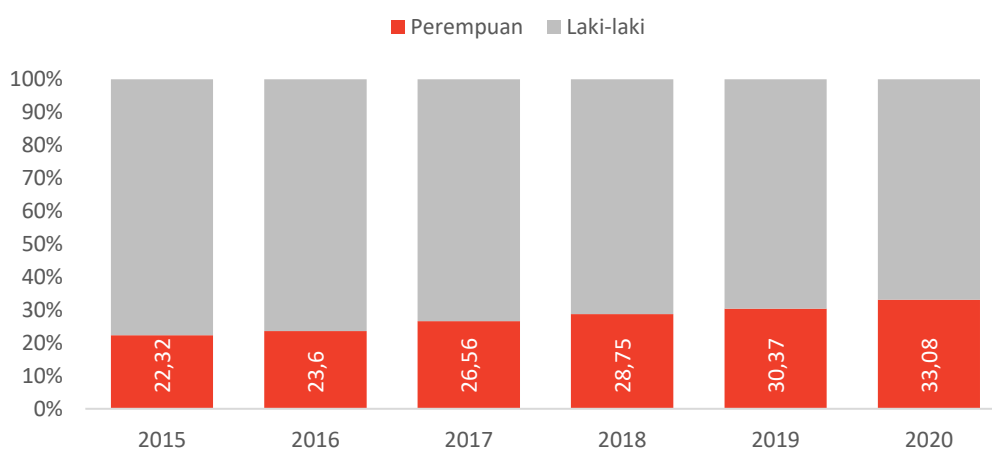
Kategori	2019	
	Jumlah	Persen
Tamat SMA	10	8,47
D3/D4/S1	47	39,83
S2	51	43,22
S3	10	8,47
Total	118	100

Sumber: KPU

Kebijakan kuota 30% ini berhasil membuat 14 dari 24 partai politik peserta pemilu 2004 menempatkan 30% perempuan di dalam daftar calon legislatifnya. Representasi perempuan di DPR pun mengalami peningkatan dari angka 8,8% pada 1999 menjadi 11,81 pada pemilu 2004. Pembentukan kebijakan kemudian dilakukan di UU pemilu selanjutnya (UU No 10 Tahun 2008), dengan menarasikan 30% representasi perempuan di dalam daftar calon sebagai sebuah kewajiban partai politik—agar seluruh partai politik menempatkan 30% perempuan di dalam daftar calon legislatifnya. Ketika hal ini tidak terpenuhi, partai politik dinyatakan tidak bisa mengikuti pemilu. Pada pemilu 2009, angka representasi perempuan di legislatif meningkat tajam menjadi 18,04%. Untuk penyelenggaraan pemilu 2014 dan 2019, ketentuan di dalam UU No 10 Tahun 2008 dipertahankan, dengan diperkuat oleh Peraturan KPU No.7/2013 yang mewajibkan pencalonan 30% perempuan dilakukan di setiap daerah pemilihan.

Terkait partisipasi perempuan sebagai pemimpin di berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah, Indonesia juga sudah memiliki kerangka hukum yang non-diskriminatif. Pada dasarnya, perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam dunia kerja. Di dalam UUD 1945 Pasal 27 (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Indonesia juga telah mengesahkan konvensi ILO No. 111 Tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan melalui UU No. 21 Tahun 1999.

Terdapat tren peningkatan partisipasi perempuan sebagai pengambil kebijakan baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Secara umum, persentase perempuan yang menduduki jabatan manajerial mengalami peningkatan sebesar 11 poin persentase dalam kurun waktu 2015-2020 dari 22,32% menjadi 33,08% (Gambar 2.33).



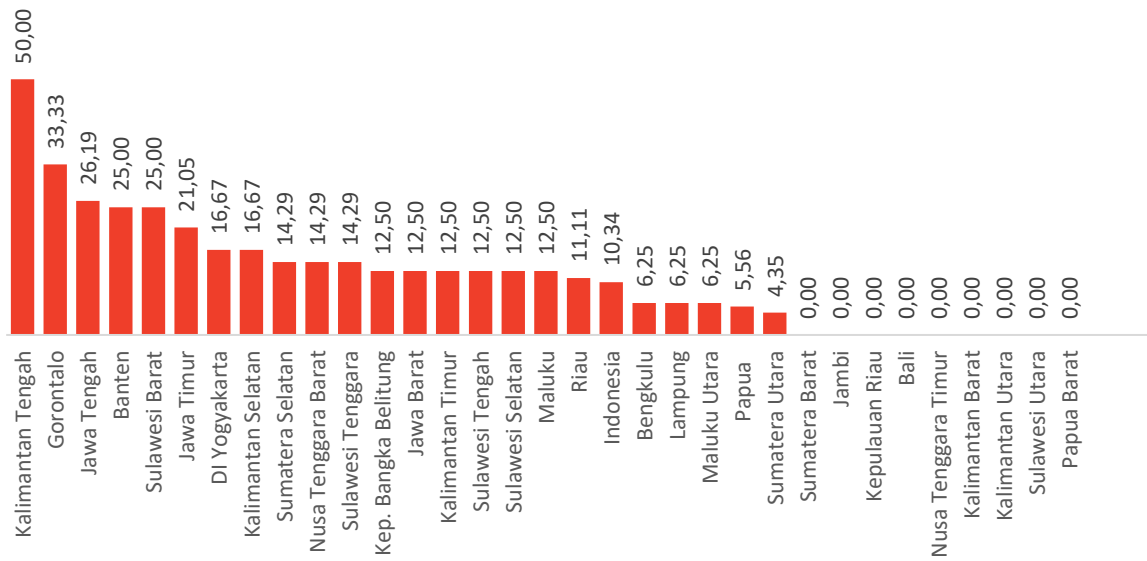
Gambar 2.33 Proporsi laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan manajer, 2015-2020

Sumber: BPS

Jika spesifik mengamati kepemimpinan perempuan di lembaga pemerintahan, dominasi laki-laki dalam juga teramati. Proporsi menteri perempuan pada kabinet Indonesia Maju (2019-2024) hanya sebesar 14,71%. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan angka pada kabinet sebelumnya (Kabinet Kerja 2014-2019) sebesar 23,53%. Sementara proporsi perempuan yang menduduki jabatan kepala/wakil kepala daerah²¹ hanya sebanyak 9,09% untuk jawabatan gubernur/wakil gubernur, dan 9,16% untuk jabatan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota²². Pada pilkada 2020 ini, terdapat 9 provinsi yang tidak memiliki pemimpin daerah perempuan. Hanya satu provinsi yang berhasil mencapai keseimbangan kepemimpinan daerah antara laki-laki dan perempuan, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah.

²¹ Jabatan kepala/wakil kepala daerah meliputi: gubernur/wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota

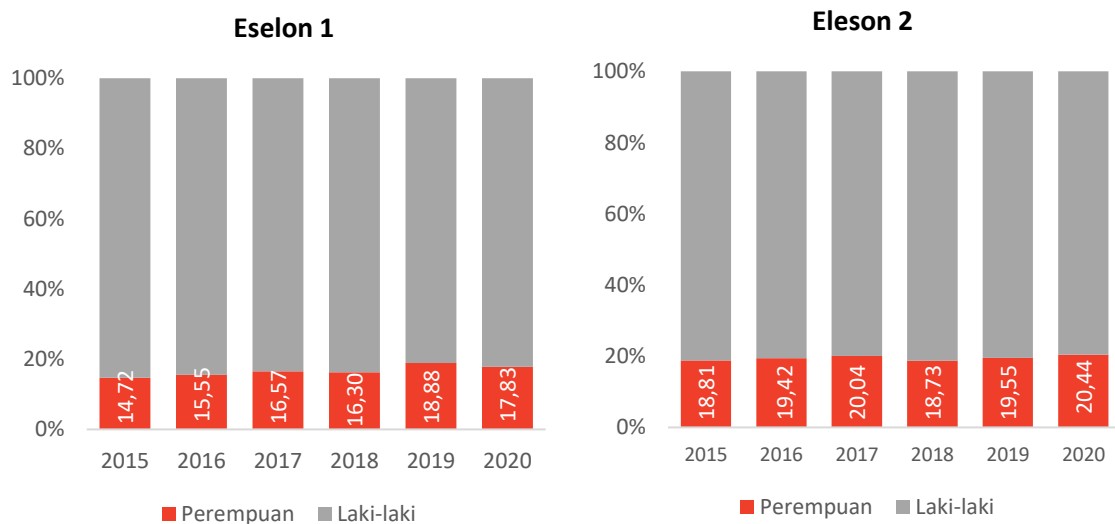
²² Data yang disajikan berdasarkan hasil Pilkada serentak Tahun 2020, tidak memasukkan data Provinsi Aceh dan DKI Jakarta karena kedua provinsi ini tidak mengikuti pilkada serentak tahun 2020.



Gambar 2.34 Proporsi perempuan sebagai pemimpin daerah berdasarkan provinsi, 2020

Sumber: Direktorat Fasilitas Kepala Daerah Kemendagri

Peningkatan teramati pada proporsi perempuan yang menduduki jabatan eselon 1 dan 2, meski peningkatan yang teramati cenderung lambat. Dalam kurun waktu 2015-2019, persentase pejabat eselon 1 perempuan hanya meningkat 2,41 poin (dari 14,72% menjadi 17,83%), sementara peningkatan persentase pejabat eselon 2 hanya 0,44 poin (dari 18,81% menjadi 20,44%). Peningkatan ini pun fluktuatif, tidak konsisten terjadi setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan fakta lambatnya perkembangan karir perempuan dibandingkan laki-laki terutama di lembaga pemerintahan.



Gambar 2.35 Proporsi pejabat eselon 1 dan 2 di lembaga pemerintah berdasarkan jenis kelamin

Sumber: BKN dan BPS

Catatan: data proporsi perempuan yang menduduki posisi manajerial dihitung dengan menggunakan penimbang baru, yaitu SUPAS 2015.

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan mengalami peningkatan di berbagai instansi di Indonesia (lembaga pemerintah, swasta, dan kursi legislatif) meskipun masih didominasi oleh laki-laki.

Tantangan

Dengan beragam kerangka hukum yang telah tersedia, masih terdapat tantangan yang menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di kursi legislatif dan sebagai pengambil keputusan berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah. Hal ini mengakar pada budaya patriarki yang berlaku di masyarakat menciptakan hambatan dari sisi individu perempuan, dan hambatan dari sisi lingkungan yang tidak mendukung partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan.

Di dunia politik, (Gelgel dan Apriani, 2019) mengidentifikasi adanya perlakuan yang berbeda yang diberikan partai politik dalam menyeleksi calon perempuan dan laki-laki. Di internal partai, perempuan cenderung ditempatkan sebagai anggota partai. Dengan kata lain, hanya sedikit perempuan yang menduduki jabatan sebagai pimpinan partai politik.

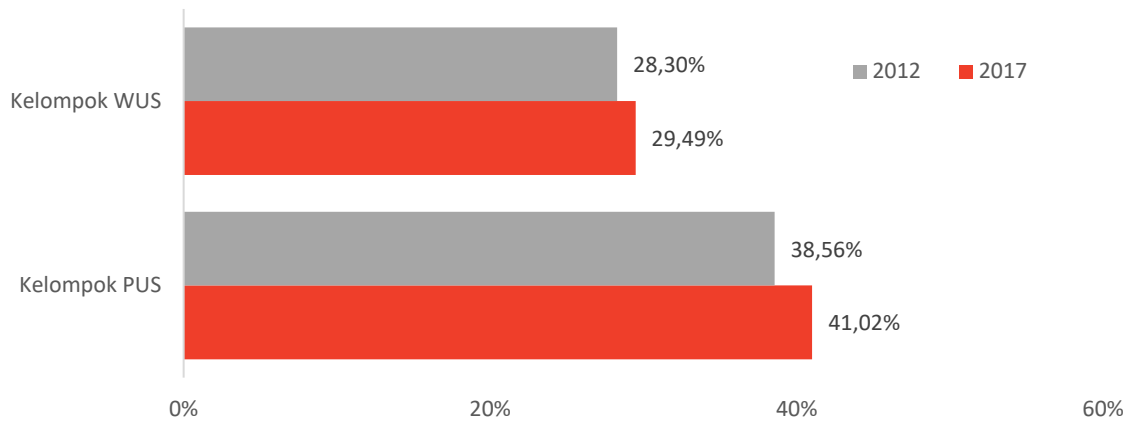
Tantangan lain yang menjadi penyebab rendahnya keterlibatan perempuan di kursi legislatif dan sebagai pengambil keputusan berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah adalah faktor internal perempuan. Untuk terjun ke dunia politik, tantangan perempuan adalah adanya keterbatasan sumber daya (finansial, jejaring sosial), pengalaman politik, serta rendahnya motivasi/ambisi/minat perempuan untuk berkarir di dunia politik (Gelgel & Apriani, 2019; Margret et al., 2018). Ambisi perempuan untuk merencanakan karir dan menduduki posisi manajerial juga ditemukan lebih rendah dibandingkan laki-laki (Lidyah, 2017).

5. Otonomi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Ratifikasi *Beijing Declaration and Platform for Action* pada tahun 1995 beserta hasil penelaahan dari konferensi terkait memunculkan tindak lanjut berupa kesepakatan dari negara yang tergabung dalam PBB untuk menyediakan akses universal terhadap fasilitas penyedia layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

Kondisi Pencapaian

Diantara WUS dan PUS, wanita berstatus kawin memiliki otonomi pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan wanita yang tidak berstatus kawin. Hal ini ditandai dengan lebih tingginya angka otonomi pengambilan keputusan pada PUS dibandingkan WUS (Gambar 2.36). Namun secara umum, lebih dari separuh perempuan belum memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan seksualitas dan reproduksi, baik diantara WUS maupun PUS. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pelaksanaan kebijakan terkait kesehatan reproduksi yang masih berfokus pada *family planning*.

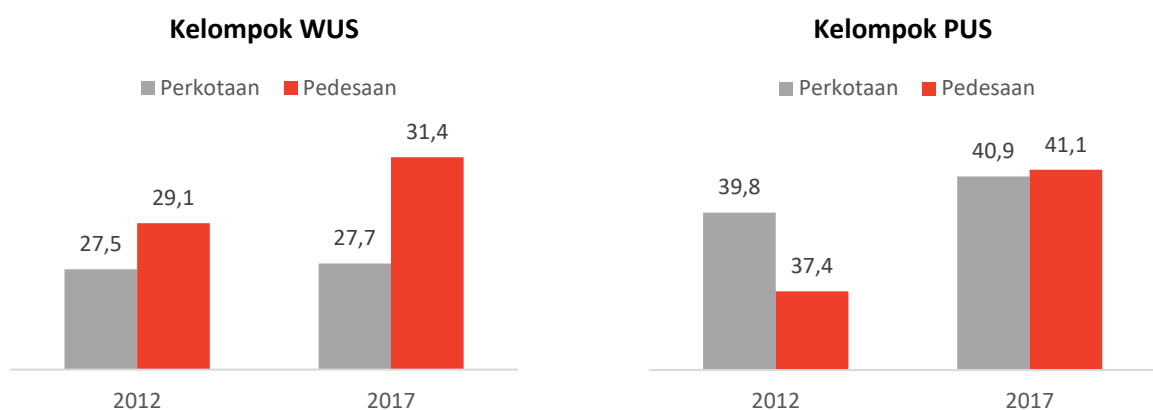


Gambar 2.36 Proporsi wanita usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan layanan Kesehatan, 2012 dan 2017

Sumber: SDKI 2012 dan 2017

Dalam kurun waktu 2012 dan 2017, terdapat peningkatan proporsi perempuan yang dapat membuat keputusan sendiri terkait kesehatan seksual dan reproduksinya. Peningkatan tersebut sebesar 1,2% pada WUS (dari 28,3% menjadi 29,49%) dan 2,46% pada PUS (dari 38,56% menjadi 41,02%).

Terdapat lebih banyak perempuan baik pada kelompok WUS maupun PUS di daerah pedesaan yang dapat mengambil keputusan sendiri terkait kesehatan seksual dan reproduksi daripada perempuan yang tinggal di perkotaan. Peningkatan otonomi pengambilan keputusan juga berkembang lebih pesat di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan. Hal ini kemungkinan berkaitan erat dengan keberhasilan program dan kebijakan afirmatif untuk mengatasi permasalahan akses fasilitas kesehatan reproduksi di desa. Selama ini, para perempuan desa mengalami kesulitan untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi yang belum terdistribusi merata secara geografis (Putra, 2019).

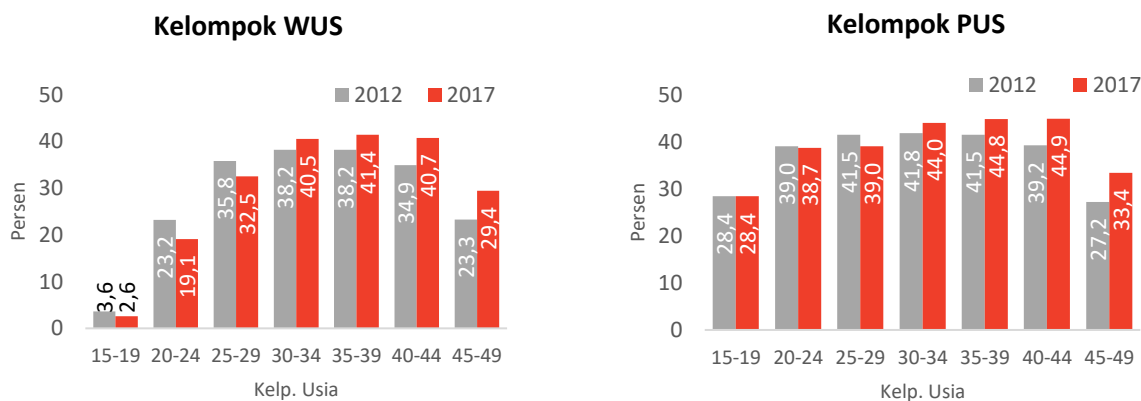


Gambar 2.37 Proporsi perempuan usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan berdasarkan daerah tempat tinggal, 2012 dan 2017

Sumber: SDKI 2012 dan 2017

Terdapat variasi kemampuan mengambil keputusan sendiri antar kelompok usia dengan bentuk hubungan seperti parabola terbalik. Kemampuan pengambilan keputusan wanita masih rendah kelompok usia 15-19 tahun. Kemampuan ini semakin membaik pada kelompok usia yang semakin tinggi, namun menurun kembali pada kelompok usia 45-49 tahun. Diantara kelompok usia muda, adanya anggapan seksualitas sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan kepada remaja merupakan faktor penyebab rendahnya otonomi mereka dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. Anggapan bahwa seksualitas remaja yang dikonstruksikan secara negatif melalui wacana moral justru dapat berakhir kontraproduktif sebab informasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi justru tidak tersampaikan secara utuh sehingga para remaja tersebut tidak memiliki cukup data untuk mengambil keputusan sendiri.

Tingkat pemahaman kesetaraan gender yang lebih lemah diantara kelompok usia tua dibandingkan kelompok usia muda menjadi penjas lebih rendahnya otonomi kelompok tua dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan seksual dan reproduksi dibandingkan kelompok usia yang lebih muda. Kelompok usia tua biasanya merupakan pihak yang mensosialisasikan peran gender yang diwarnai dengan nilai patriarki ke generasi selanjutnya. Dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda, kelompok usia 45-49 tahun ini cenderung menjadi pihak yang memegang nilai patriarki dengan lebih kuat dibandingkan generasi yang lebih muda.

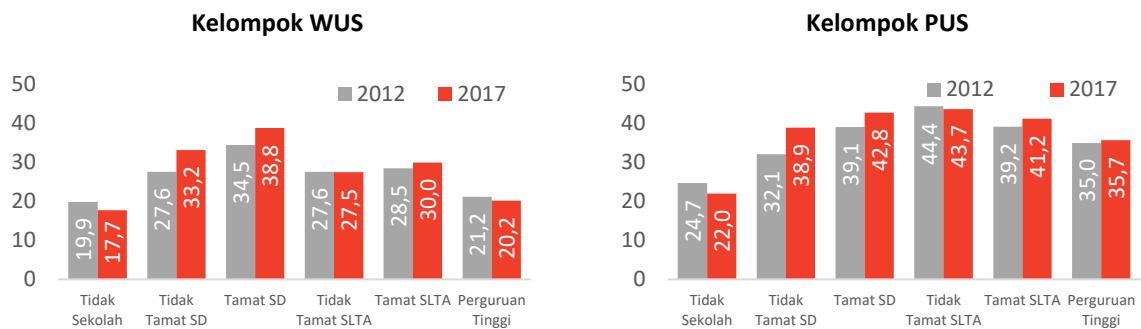


Gambar 2.38 Proporsi perempuan usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan berdasarkan kelompok umur, 2012 dan 2017

Sumber: SDKI 2012 dan 2017

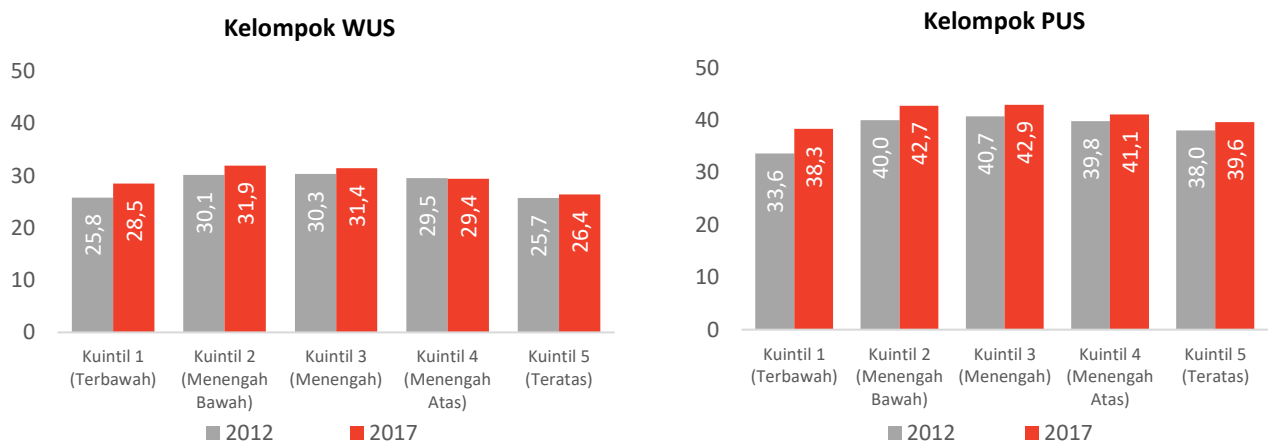
Pada tahun 2012 dan 2017, proporsi perempuan tidak sekolah yang mampu memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan seksual dan reproduksi menduduki posisi terendah jika dibandingkan dengan perempuan yang mengenyam pendidikan. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya program kesehatan reproduksi yang menjangkau kelompok tersebut. Selain itu, aspek pendidikan juga memengaruhi keterbatasan akses mereka terhadap kegiatan penyuluhan terkait HKSR. Adapun perempuan dengan kelompok pendapatan tertinggi pada kategori WUS dan kelompok pendapatan terendah pada kategori PUS memiliki proporsi terendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan perempuan tidak

mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mengambil keputusan baik sendiri maupun bersama pasangan untuk memenuhi HKSR nya.



Gambar 2.39 Proporsi perempuan usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan berdasarkan tingkat pendidikan, 2012 dan 2017

Sumber: SDKI 2012 dan 2017

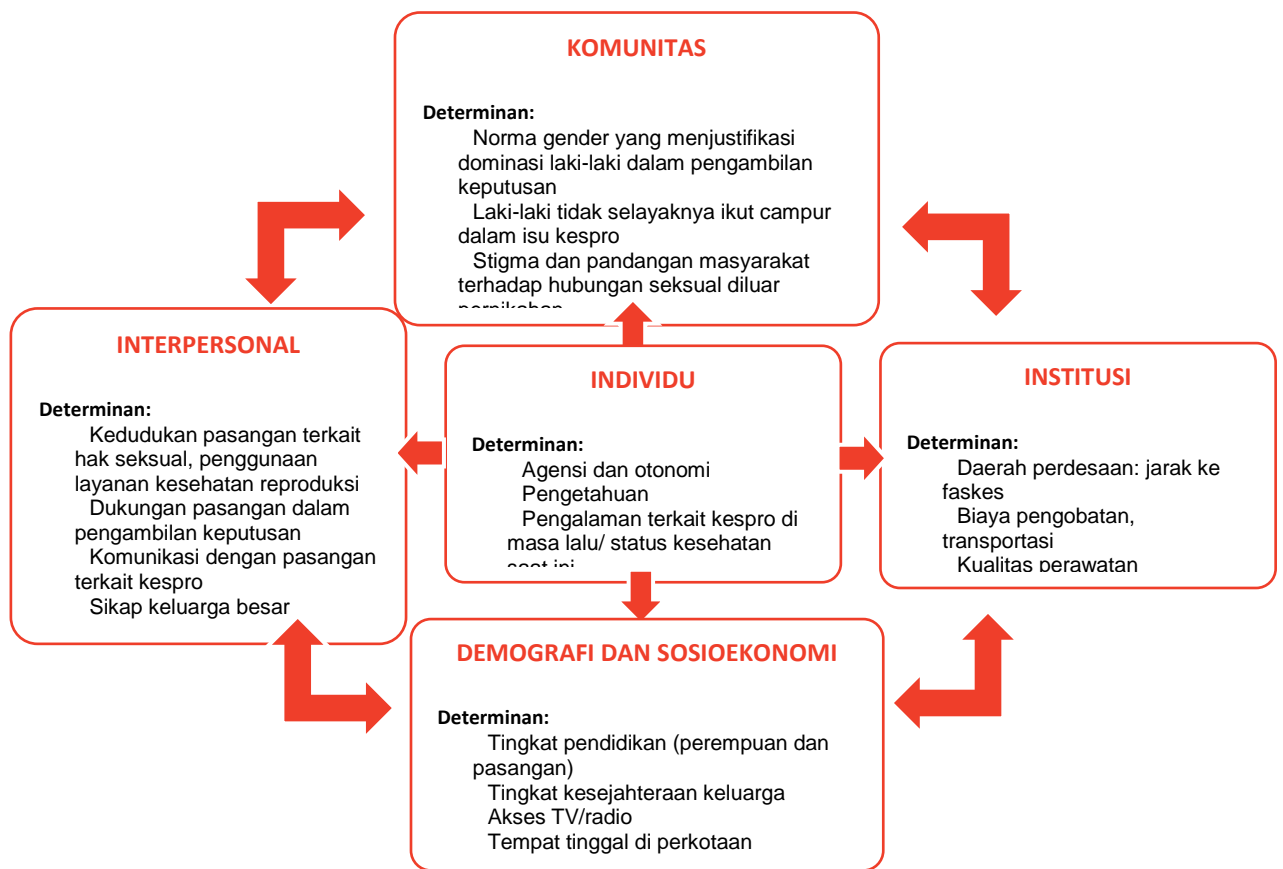


Gambar 2.40 Proporsi perempuan usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan berdasarkan kelompok pendapatan, 2012 dan 2017

Sumber: SDKI 2012 dan 2017

Tantangan

Beragam faktor membentuk kemampuan perempuan mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi seperti yang tergambar pada bagan berikut.



Gambar 2.41 Faktor pembentuk kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan

Sumber: (UNFPA, 2019)

Adanya agensi individu perempuan, pengetahuan dan akses informasi mereka terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi, dan tingkat pendidikan merupakan aspek penting dalam membentuk kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan terkait hak kesehatan seksualitas dan reproduksi. Pengetahuan yang komprehensif mengenai kesehatan seksual dan reproduksi dibutuhkan untuk membentuk kapasitas (pengetahuan, sikap dan keterampilan) perempuan dalam pengambilan keputusan. Namun hal ini tidak berdiri sendiri. Dukungan pasangan dan keluarga dalam pengambilan keputusan, norma sosial/pemahaman nilai agama terkait peran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan turut membentuk terwujudnya kemandirian perempuan dalam pengambilan keputusan.

Anggapan bahwa informasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi sebagai isu yang tabu juga berimplikasi pada keterbatasan pemahaman remaja mengenai realitas perilaku seks dan risiko seksual yang mereka hadapi (Pakasi & Kartikawati, 2013). Hal ini utamanya disebabkan oleh minimnya konstruksi seksualitas remaja yang lebih positif, misalnya dengan menganggap bahwa remaja merupakan makhluk seksual yang perlu mempertanggungjawabkan kesehatan seksual dan reproduksinya.

6. Akses Terhadap Sumber Daya Ekonomi

Kepemilikan dan penguasaan lahan/tanah pertanian oleh perempuan merupakan salah satu kunci dalam peningkatan pemberdayaan perempuan. Hal ini disebabkan oleh

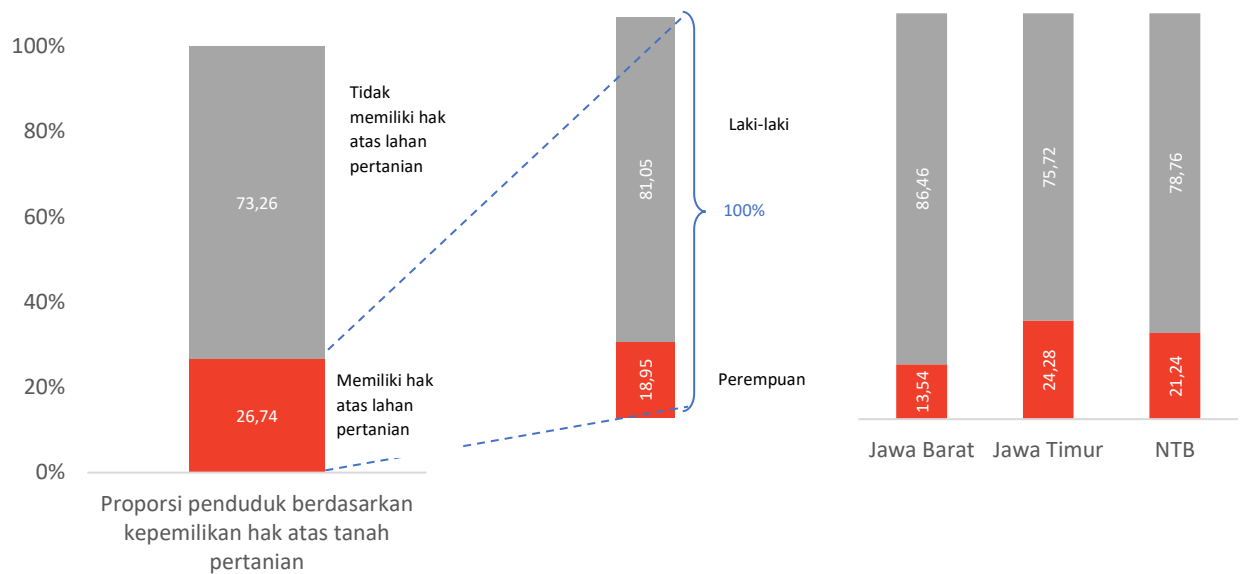
eksistensi lahan sebagai faktor produksi utama dalam kehidupan perekonomian penduduk agraris (Setiawan, 2006). Kepemilikan dan penguasaan perempuan atas lahan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan keluarga, daya tawar mereka di rumah tangga, meningkatkan akses mereka terhadap kredit, bahkan berpotensi membuat pendapat perempuan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan baik pada tingkat rumah tangga maupun desa.

Oleh karena itu, terjaminnya hak yang sah bagi perempuan dalam menguasai, menggunakan, dan memindahkan hak atas lahan dalam bentuk sertifikat maupun penguasaan lahan secara defakto menjadi indikator penting untuk mendorong kesetaraan gender.

Kondisi Pencapaian

Data yang representatif nasional terkait kepemilikan lahan oleh penduduk pertanian (individu dewasa yang tinggal di rumah tangga) pertanian dihimpun melalui kegiatan uji coba Survei Pertanian Terintegrasi (SiTasi). Data SiTasi yang tersedia saat ini hanya data dari 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB)— penghimpunan data ini dilakukan pada tahun 2020. Sementara data provinsi lain masih belum tersedia karena penghimpunan data baru akan dilakukan pada tahun 2021. Meskipun data yang tersedia saat ini belum representatif nasional (karena hanya tersedia di 3 provinsi), data ini tetap dapat memberikan gambaran awal situasi kepemilikan lahan oleh perempuan pertanian.

Data SITASI 2020 menunjukkan bahwa kepemilikan hak atas lahan oleh penduduk pertanian—ditandai dengan adanya sertifikat kepemilikan yang sah selama periode tertentu—di ketiga provinsi di atas masih rendah. Hanya 26,74% penduduk pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB yang memiliki hak atas tanah pertanian. Diantara penduduk pertanian dengan hak atas lahan ini, kepemilikan perempuan atas lahan pertanian hanya 18,95%, sementara sisanya dimiliki oleh laki-laki. Diantara ketiga provinsi, terdapat variasi persentase pemilik lahan perempuan di ketiga provinsi. Di Jawa Barat, kepemilikan lahan oleh perempuan hanya 13,53%, sementara di Jawa Timur dan NTB mencapai angka di atas 20% (Gambar 2.42).



Gambar 2.42 Proporsi penduduk pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB yang memiliki hak atas tanah pertanian, 2020

Sumber: SITASI BPS 2020

Tantangan

Ketimpangan dalam akses dan kontrol formal atas lahan pertanian oleh perempuan tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain pewarisan sumber daya ekonomi yang lebih banyak dialokasikan pada anak/ahli waris laki-laki, akses garapan dan informasi terkait garapan yang lebih banyak diberikan pada kepala keluarga, anggapan bahwa tanggungjawab utama perempuan merupakan ranah domestik, serta belum terakomodasinya kebutuhan perempuan petani dan/atau perempuan adat.

Praktik pewarisan lahan pertanian sebagai sumber daya ekonomi yang condong pada laki-laki utamanya didorong oleh aspek sosial budaya pada masyarakat yang umumnya menganut sistem patrilineal. Sistem tersebut mensyaratkan masyarakat yang menganutnya untuk menarik garis kekerabatan dari pihak ayah. Oleh karena itu, kedudukan anak laki-laki diletakkan lebih utama daripada anak perempuan termasuk dalam pengaturan harta warisan. Tantangan lain yang muncul dari praktik ini ialah adanya fenomena pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan yang tidak melibatkan perempuan meski mereka merupakan pemilik lahan tersebut. Fenomena tersebut erat kaitannya dengan anggapan bahwa perempuan cukup berperan “di atas kertas” sedangkan pemanfaatan lahan, termasuk penjualan, merupakan peran dari anggota keluarga laki-laki.

Hal ini ditambah dengan keberadaan UU No. 16/2019 tentang Perkawinan. Pada regulasi tersebut ditegaskan bahwa suami merupakan kepala keluarga sedangkan isteri merupakan ibu rumah tangga. Posisi tersebut seolah mendorong laki-laki untuk lebih banyak berperan dalam keputusan strategis termasuk pengaturan kepemilikan sumber daya ekonomi keluarga. Selain itu, pemberian akses garapan dan sumber informasi terkait pendidikan, penyuluhan, serta pelatihan biasanya juga lebih mudah diberikan pada kepala keluarga (Luthfi, 2010).

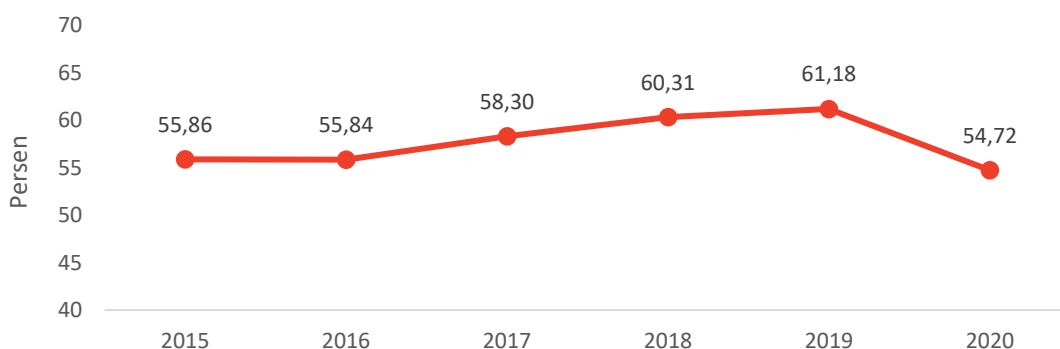
Secara umum, kerangka hukum formal yang menjamin bahwa perempuan memiliki hak kepemilikan dan/atau kontrol atas lahan pertanian telah tersedia melalui UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (atau biasa disebut sebagai UU Pokok Agraria) serta Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria. Bahkan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pun menjamin keterlibatan petani perempuan dalam pembentukan kelompok tani. Kerangka regulasi yang memberikan pengakuan terhadap hak universal atas kepemilikan lahan/tanah diharapkan dapat mendorong adanya peningkatan pemberdayaan perempuan melalui penguasaan sumber daya ekonomi. Akan tetapi, pengimplementasian dari kebijakan tersebut masih menemui tantangan yang ditunjukkan oleh masih rendahnya penguasaan lahan oleh perempuan.

7. Akses Teknologi

Pemerataan kepemilikan telepon genggam berpeluang mendorong pengembangan ekonomi, sosial, partisipasi politik, pengetahuan dan kapasitas dan produktivitas baik pada laki-laki maupun perempuan. Hal ini terutama terjadi karena perkembangan teknologi telepon genggam yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi jarak jauh (mereduksi jarak) dan untuk mengakses internet melalui telepon genggam. Dengan manfaat ini, ketimpangan kepemilikan telepon genggam antara laki-laki dan perempuan memperbesar peluang ketimpangan gender di banyak bidang kehidupan.

Kondisi Pencapaian

Dalam kurun waktu pelaksanaan kerangka pembangunan berkelanjutan sejak 2015, tren akses telepon genggam penduduk (baik perempuan maupun laki-laki) masih menunjukkan perkembangan yang positif. Namun pada 2020, terjadi perlambatan perkembangan akses telepon genggam penduduk. Di tingkat nasional, tingkat akses telepon genggam penduduk turun dari angka 63,53% pada 2019 menjadi 57,48% pada 2020. Penurunan pada tahun 2020 ini mengembalikan capaian akses telepon genggam Indonesia ke kondisi tahun 2015-2016.



Gambar 2.43 Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam, 2015-2020

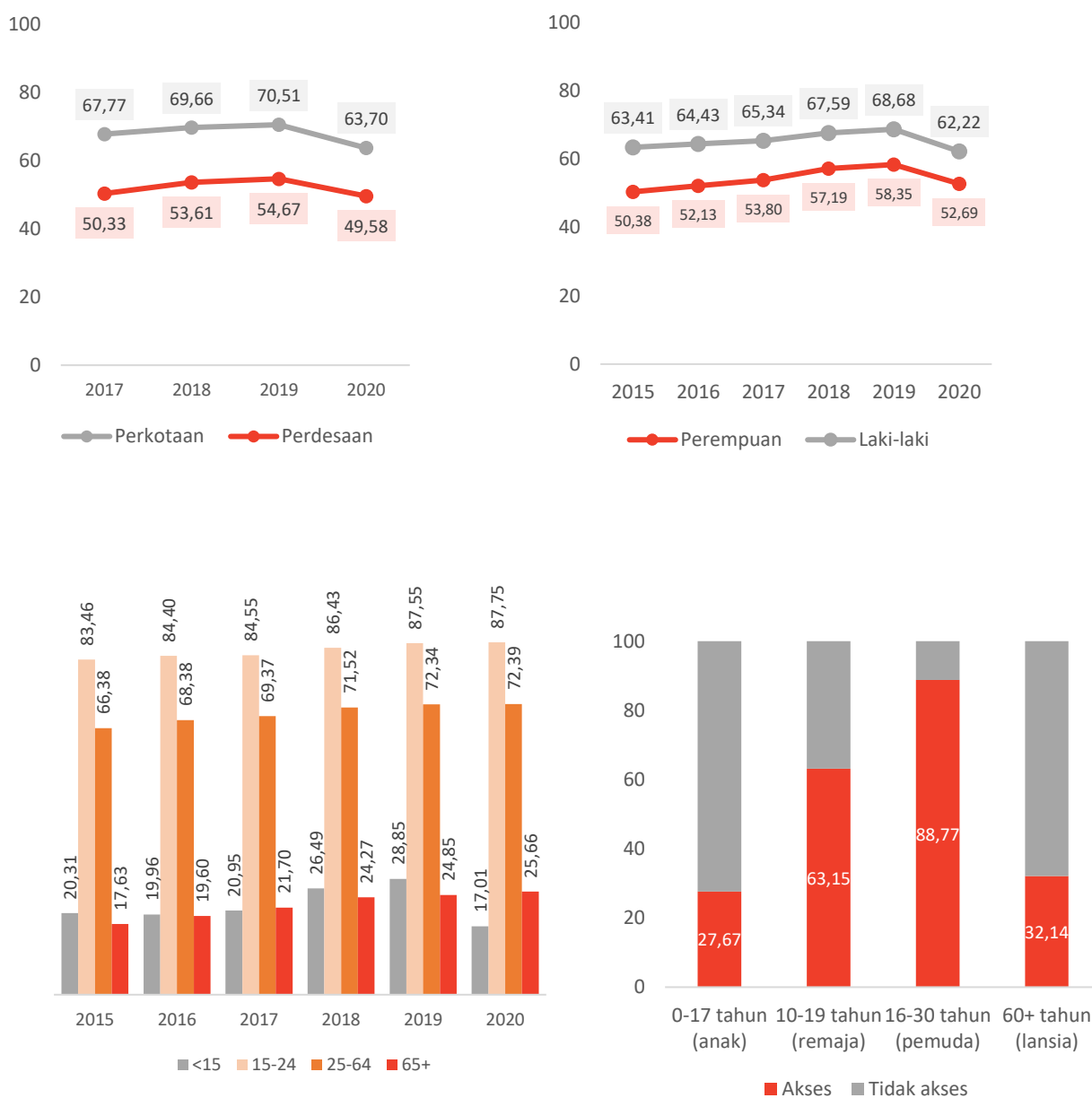
Sumber: Susenas Kor (BPS)

Tingkat akses telepon genggam di perkotaan lebih baik dibandingkan perdesaan. Pada 2020, sekitar 7 dari 10 penduduk perkotaan telah memiliki/menguasai telepon genggam. Sementara di perdesaan, akses telepon genggam hanya dinikmati oleh 5 dari 10 penduduk.

Namun peningkatan kepemilikan telepon genggam di pedesaan sebenarnya kuat karena sejak 2015-2019, rata-rata pertumbuhan tahunan kepemilikan telepon genggam di pedesaan mencapai 3,66%, sementara di perkotaan hanya 1,57%.

Jika dibandingkan antar jenis kelamin, akses telepon genggam penduduk perempuan lebih tertinggal dibandingkan laki-laki. Hal ini secara konsisten terjadi antara tahun 2015-2020. Namun ketimpangan akses ini semakin mengecil dari tahun ke tahun.

Berdasarkan kelompok usia, akses telepon genggam tertinggi dimiliki oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Pada 2020, lebih dari seperempat anak di Indonesia (usia 0-17 tahun) menguasai/memiliki telepon genggam. Kepemilikan telepon genggam oleh remaja mencapai 63,15%, sementara oleh pemuda mencapai 88,77%.



Gambar 2.44 Demografi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam, 2015-2020
 Sumber: Susenas Kor (BPS)

Tabel 2.18 Ketimpangan penguasaan/kepemilikan telepon genggam antar provinsi, 2015—2020

	2015	2020
Min	32.04	40.44
Max	76.93	77.57
Max-min	44.89	37.12
Standar Deviasi	9.76	7.79

Tantangan

Perkembangan akses terhadap telepon genggam paling tidak dipengaruhi oleh adanya peningkatan cakupan (*coverage*) sinyal dan jaringan telepon seluler dan sinyal internet, dan kapasitas masyarakat dan keterjangkauan harga (faktor ekonomi masyarakat).

Terlepas dari faktor pandemi, pemerintah telah berupaya meningkatkan ketercakupan sinyal dan jaringan telepon seluler dan sinyal internet. Wilayah dengan *coverage* masih menantang adalah Maluku dan Papua (proporsi desa yang memiliki sinyal kuat di wilayah ini hanya 27,01%). Sementara cakupan jaringan internet dapat dilihat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.45 Peta jangkauan internet di tingkat desa/kelurahan

Tantangan yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan jangkauan ini adalah wilayah Indonesia yang luas dengan beragam karakteristik geografis—kepulauan, pergunungan, pantai, penduduk tersebar. Situasi ini membutuhkan investasi besar dalam menyediakan jaringan sinyal, terutama sinyal internet. Pembangunan jaringan sinyal di wilayah dengan jumlah penduduk tersebar/jarang kurang menguntungkan. Disamping itu, terdapat pula persoalan pencurian dan vandalisme terhadap infrastruktur telekomunikasi yang dibangun, serta kualitas SDM yang berkerja di bidang TIK.

8. Alokasi Anggaran Responsif Gender

Dukungan anggaran memiliki peranan penting untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan responsif gender. Sejauh ini, pemerintah telah memiliki langkah afirmatif untuk memastikan, memantau dan melacak anggaran responsif gender (ARG) melalui kerangka

hukum nasional berupa Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 8/2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Disamping itu, untuk melacak dan memantau pencapaian kesetaraan gender melalui kebijakan dan ARG dengan sistematis, pemerintah menggunakan strategi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No. 2/2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah, PPRG merupakan instrumen yang digunakan untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan dan penganggaran. Penyusunan PPRG sendiri mempertimbangkan aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk pembangunan yang lebih berkeadilan.

Indikator 5.c.1* menilai sejauh mana sistem untuk melacak dan membuat alokasi ARG telah terpenuhi di Indonesia. Keberadaan dukungan anggaran yang dapat dipantau dan dilacak memiliki peranan penting untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Kondisi Pencapaian

Penilaian terhadap sistem untuk melacak dan membuat alokasi ARG dilakukan dengan mengukur 3 kriteria, yaitu 1) program dan alokasi anggaran untuk mengurangi kesenjangan gender, 2) sistem anggaran untuk mendorong pencapaian kesetaraan gender, serta 3) akses masyarakat terhadap data/informasi alokasi anggaran untuk mencapai kesetaraan gender.

Berdasarkan penilaian menggunakan tiga kriteria di atas, kinerja anggaran responsif gender Indonesia dianggap telah **mendekati pemenuhan persyaratan yang ada**. Hal ini dikarenakan terpenuhinya dua aspek utama dari total tiga aspek kriteria tersebut yakni pada aspek program dan alokasi anggaran untuk mengurangi kesenjangan gender (kriteria 1), dan sistem anggaran untuk mendorong pencapaian kesetaraan gender (kriteria 2).

Situasi ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi anggaran responsif gender Indonesia sejauh ini adalah sebagai berikut. Indonesia telah memiliki kebijakan PUG yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender termasuk pada sektor yang tidak khusus menangani kesetaraan gender. Kebijakan ini merupakan strategi yang harus dilaksanakan oleh seluruh KL dan Pemda. Indonesia juga telah mengembangkan berbagai alat dalam kerangka sistem PPRG yang digunakan untuk memastikan keterpaduan aspek gender pada proses anggaran. Kerangka sistem tersebut dibagi menjadi tiga yakni edaran dan dokumentasi ARG, Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*) yang digunakan untuk menginformasikan kegiatan dan alokasi kegiatan untuk menangani permasalahan gender, serta pelacakan belanja anggaran untuk kesetaraan gender. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran, alat analisis berupa *Gender Analysis Pathway* digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan gender berdasarkan APKM beserta faktor penyebabnya.

Dalam menjalankan kebijakan PUG, tidak dialokasikan anggaran tambahan untuk gender. Sumber daya yang tersedia perlu dialokasikan untuk menjamin kesetaraan akses

antara perempuan dan laki-laki. Sejauh ini, Kementerian Keuangan sudah menerbitkan edaran atau arahan lain tentang petunjuk penyusunan Anggaran yang Responsif Gender melalui Perdirjen Anggaran No. PER-5/AG/2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Pengesahan DIPA. Untuk mendukung hal ini, Bappenas menyusun pedoman penandaan ARG bagi KL. Data dan statistik gender juga telah digunakan dalam pembuatan kebijakan alokasi anggaran yang responsif gender—disyaratkan untuk menyediakan data terpilah gender. ARG menjadi salah satu anggaran tematik APBN yang ditagging dalam sistem Krisna Renja KL.

Tantangan

Sebagai instrumen yang akan digunakan untuk mengintegrasikan aspek gender dalam pembangunan, PPRG diujicobakan pada tujuh kementerian/lembaga dan empat pemerintah provinsi sepanjang periode 2009–2010. Ketujuh kementerian/lembaga tersebut merupakan Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian PPPA, Kementerian Pertanian, dan Bappenas. Sedangkan empat provinsi yang menjadi wilayah ujicoba merupakan Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ujicoba PPRG tersebut dilakukan dengan memasukkan aspek analisis gender dan Gender Budget Statement (GBS) dalam perencanaan dan penganggaran.

Tantangan serupa masih dapat ditemukan dalam upaya pengimplementasian ARG pada tingkat daerah (Khaerah & Mutiarin, 2017). Beberapa tantangan yang muncul berkaitan dengan kapasitas birokrasi dalam memahami perspektif gender dalam penganggaran. Hal ini disebabkan oleh pemahaman pengambil kebijakan mengenai situasi keadilan dan kesetaraan gender serta minimnya derajat partisipasi perempuan dalam urusan publik. Persepsi pemerintah daerah mengenai gender juga mengakibatkan identifikasi ARG sebagai alokasi anggaran yang ditujukan khusus untuk perempuan (Susiana, 2015). Padahal anggaran khusus target gender hanya salah satu dari tiga kategori yang termasuk dalam ARG. Hal tersebut memicu pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan program yang hanya bersifat insidental, seperti lokakarya, alih-alih program yang memiliki keberlanjutan. Selain itu, terdapat tantangan lain berupa kurangnya fasilitasi untuk melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran yang secara tidak langsung menciptakan dominasi struktur.

Pelaksanaan PPRG masih menemui pelbagai kendala. Salah satu kendala utama yang ditemui merupakan perlunya penguatan dasar hukum berupa kebijakan daerah yang menjadi turunan dari Instruksi Presiden No. 9/2000 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/2008 (Khaerah & Mutiarin, 2017; Nurhaeni & Habsari, 2013). Dengan adanya peraturan turunan pada tingkat daerah, maka struktur birokrasi akan mendorong disposisi pemangku kebijakan di masing-masing SKPD untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Selain itu, koordinasi antar institusi juga diharapkan dapat berjalan lebih baik sehingga struktur birokrasi yang ada akan menguatkan penyusunan ARG.

2.6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

A. Pengantar

Target pada Tujuan 6 terdiri dari : (6.1) pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua; (6.2) pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan; (6.3) pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global; (6.4) pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air; (6.5) Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan; dan (6.6) Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

B. Status Capaian dan Tantangan

1. Akses Air Minum dan Sanitasi Aman

Akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman merupakan salah satu infrastruktur dasar untuk memastikan kesehatan masyarakat serta meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Penyediaan akses air minum dan sanitasi perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya air yang mencukupi baik dari sisi kualitas dan kuantitas, pencegahan pencemaran terhadap sumber-sumber air baku dari pencemaran, dan tutupan vegetasi untuk menjaga, memelihara dan menjamin ketersediaan air baku.

Rumah tangga memiliki akses air minum aman apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap dibutuhkan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. Akses layak dasar adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air minum layak dengan waktu pengambilan 30 menit atau kurang. Akses air minum layak terbatas adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air minum layak dengan waktu pengambilan air lebih dari 30 menit. Sumber air minum layak adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air minum utama berupa ledeng, perpipaan, perpipaan eceran, kran halaman, hidran umum, air terlindungi, dan penampungan air hujan. Sumber air minum terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Rumah tangga memiliki akses sanitasi aman apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Akses Layak Sendiri adalah: (i) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik; (ii) untuk di perdesaan, apabila rumah tangga menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya lubang tanah. Akses Layak Bersama adalah: (i) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik atau IPALD; (ii) khusus di perdesaan, apabila rumah tangga menggunakan fasilitas bersama rumah tangga lain tertentu, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya lubang tanah.

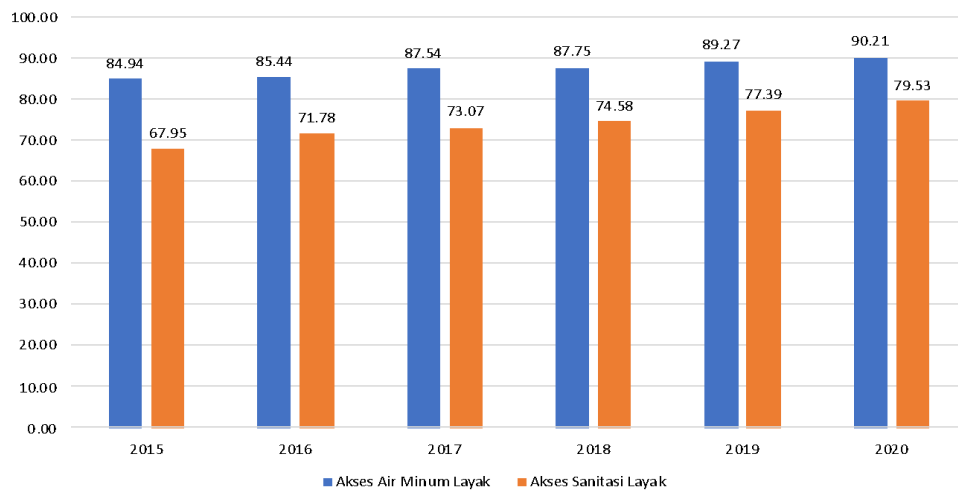
a. Capaian Air Minum dan Sanitasi

Pada tahun 2020 rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 90,21% yang terdiri dari akses air minum perpipaan sebesar 20,69% dan akses air minum perpipaan sebesar 69,52%. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik layak sebesar 79,53% dan akses aman sebesar 7,64%. Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka adalah 6,19%. Capaian akses air minum dan sanitasi layak pada periode 2015-2020 terlihat pada Tabel 2.19 dan grafik pada Gambar 2.46.

Tabel 2.19 Akses air minum dan sanitasi layak, 2015-2020 (%)

Akses	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Air Minum Layak	84,94	85,44	87,54	87,75	89,27	90,21
Sanitasi Layak	67,95	71,78	73,07	74,58	77,39	79,53

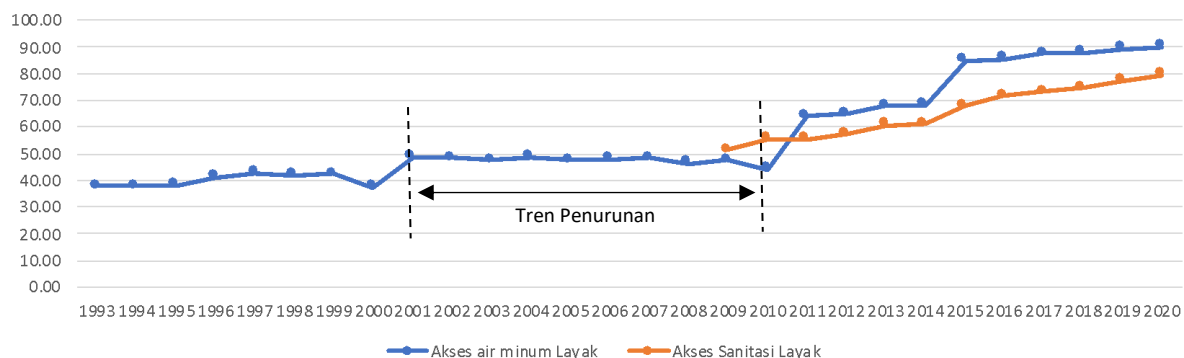
Sumber: Susenas BPS dan Analisis Bappenas



Gambar 2.46 Akses Air Minum dan Sanitasi Layak, 2015-2020 (%)

Sumber: Susenas BPS dan Analisis Bappenas 2015-2020

Peningkatan akses tersebut cukup signifikan dengan rata-rata 2,4 % per tahun, dibandingkan dengan tren peningkatan akses pada periode 1993-2001, sebesar rata-rata 1,3% per tahun, sebagaimana terlihat dalam grafik pada Gambar 2.47.



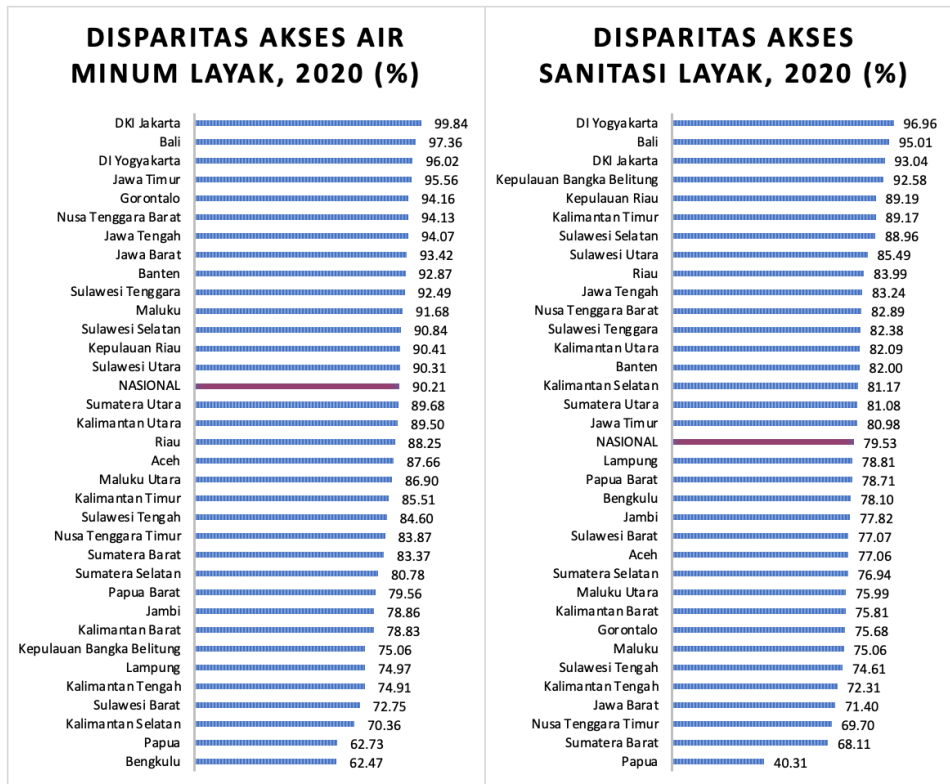
Gambar 2.47 Tren Akses Air Minum dan Sanitasi

Sumber: Susenas BPS dan Analisa Bappenas 1993-2020

Dalam grafik di atas tercatat ada tren penurunan akses air minum layak mulai tahun 2001 sampai 2010, yang kemudian terkoreksi pada 2011 dan meningkat kembali pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan definisi air minum, dimana mulai tahun 2011 BPS menggunakan rumus baru, yaitu sumber air minum layak mencakup sumber air minum utama dan sumber air untuk keperluan lain sehari-hari seperti mandi, mencuci dan memasak. Gambar 2.47 di atas juga menggambarkan tren akses sanitasi layak yang mengikuti tren yang sama dengan akses air minum layak.

Grafik berikut (Gambar 2.48) memperlihatkan disparitas persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum dan sanitasi layak antar provinsi pada tahun 2020. Untuk air minum dan sanitasi layak, akses tertinggi terjadi di DKI Jakarta, yaitu 99,84% dan DI Yogyakarta (96,96%), sedangkan untuk air minum dan sanitasi layak dengan akses paling rendah terdapat

di Bengkulu (62,47%) dan Papua (40,31%). Untuk akses air minum layak, terdapat 14 provinsi yang memiliki akses di atas angka rata-rata nasional, dan untuk akses sanitasi layak, ada 17 provinsi yang aksesnya telah di atas angka rata-rata nasional. Secara nasional, akses sanitasi layak masih tertinggal dibandingkan dengan air minum, tapi untuk akses sanitasi layak, lebih banyak provinsi yang sudah memiliki akses di atas rata-rata nasional, meskipun perbedaannya tidak signifikan.



Gambar 2.48 Disparitas Akses Air Minum dan Sanitasi Layak, 2020 (%)

Sumber: Susenas, BPS

Kemudian, dalam rangka mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, Kementerian Kesehatan telah melakukan sebuah Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAM-RT) di tahun 2020. Berdasarkan hasil studi tersebut, akses air minum aman nasional telah mencapai sebesar 11,9% dengan sebaran akses air minum aman dinilai dari kontaminasi TDS, *E.coli*, pH, Nitrat dan Nitrit pada pulau Papua (tidak termasuk Papua Barat) sebesar 1%, Maluku sebesar 7,5%, Sulawesi sebesar 11,6%, Kalimantan sebesar 16,9%, Nusa Tenggara sebesar 10%, Jawa dan Bali sebesar 13,8%, serta Sumatera sebesar 6,4%.

b. Tantangan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Tantangan dalam penyediaan air minum

Tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Walaupun capaian akses air minum layak sudah mencapai 90,21 % di tahun 2020, namun, akses

air minum perpipaan baru menjangkau 20,69% dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) akses air minum untuk masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman, yaitu berasal dari sumber air yang layak, berada di dalam atau di halaman rumah, dapat diakses setiap saat dibutuhkan, dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan. Pada tahun 2020, baru 11,9% rumah tangga yang memenuhi keempat kriteria tersebut.

Diperlukan upaya percepatan penyediaan akses air minum untuk dalam rangka mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* serta untuk memenuhi kebutuhan air minum aman yang semakin meningkat. Sementara itu, kuantitas dan kualitas sumber air baku mengalami penurunan akibat pengelolaan daerah tangkapan air yang belum optimal. Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan akses air minum aman untuk masyarakat perlu meningkatkan komitmen dan kapasitasnya melalui pengintegrasian target dan sasaran penyediaan air minum nasional dalam dokumen perencanaan daerah, memberikan prioritas melalui alokasi APBD, serta memberikan dukungan kepada penyelenggara. Tantangan kebutuhan pendanaan yang besar dibandingkan dengan kapasitas fiskal pemerintah menuntut Pemerintah dan Pemerintah Daerah meningkatkan *quality spending*, mengoptimalkan sumber sumber pendanaan alternatif Non APBN dan Non APBD, dan melakukan pengelolaan aset yang baik. Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan perluasan cakupan layanan melalui pemanfaatan kapasitas yang telah terbangun sebesar 58.827 liter/detik, peningkatan dan pembangunan SPAM serta pengelolaan aset yang diharapkan dapat menurunkan tingkat *non-revenue water* dari 33% menjadi 25% serta menjamin keberlanjutan dari infrastruktur yang telah terbangun.

Upaya yang telah dan sedang dilakukan Pemerintah dalam rangka pemenuhan air minum aman adalah melalui percepatan penambahan sambungan rumah, antara lain, melalui hibah berbasis kinerja untuk pemasangan sambungan rumah (SR) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah di perkotaan dan perdesaan.²³ Program ini sudah berjalan sejak 2012 dan sampai saat ini (2021) jumlah SR yang telah terpasang adalah sekitar 270 ribu, terdiri dari 210 ribu unit di perkotaan dan 60 ribu unit di perdesaan.²⁴ Percepatan pemasangan SR juga dilakukan melalui *platform* air minum perkotaan skala nasional (NUWAS) yang saat ini sedang dilaksanakan melalui insiasi NUWSP²⁵, dan diharapkan dapat menambah jumlah SR sebanyak 1,2 juta unit pada akhir 2022. Untuk pendanaan air minum di perkotaan, pemerintah telah membuka peluang bagi daerah untuk mendapatkan dana-dana non publik melalui pembentukan lembaga penjaminan dan lembaga keuangan bukan bank, serta berbagai peraturan-perundangan terkait lainnya.²⁶

²³ Program Hibah Air Minum dan Sanitasi adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan output based - <http://ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/>

²⁴ <http://ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/>

²⁵ National Urban Water Supply Project, <http://labsgue.com/nuwas/>

²⁶ Antara lain PT. PII dan PT. SMI, BUMN di bawah Kementerian Keuangan, Perpres 46/2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, dan serangkaian Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait peningkatan kinerja BUMD Air Minum.

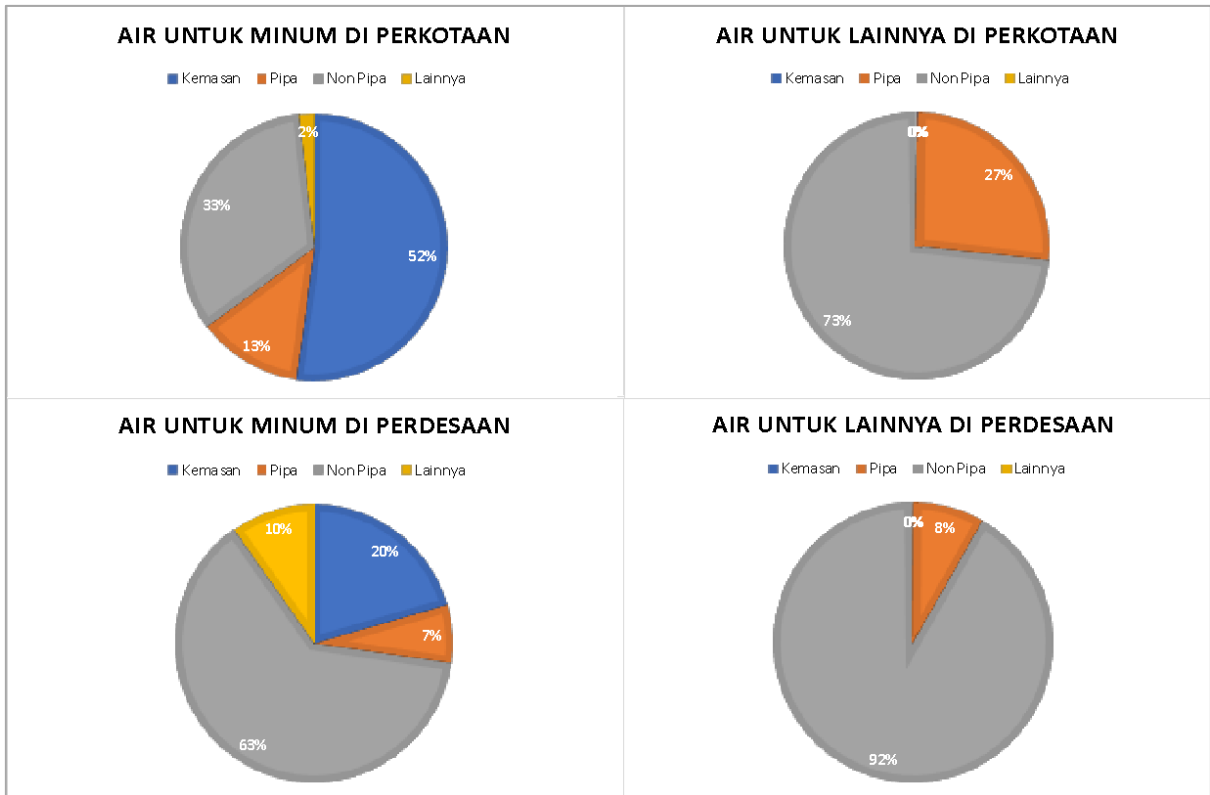
Untuk masyarakat perdesaan, pelayanan air minum dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat. PAMSIMAS, yang merupakan *platform* air minum perdesaan, sejak tahun 2008 telah menyediakan akses air minum layak bagi sekitar 22,1 juta penduduk di 31.700 desa, dan akses sanitasi layak untuk lebih dari 15 juta penduduk.²⁷ Keberlanjutan program menjadi tantangan utama, mengingat program Pamsimas berakhir pada tahun 2021 utamanya untuk keberlangsungan lembaga pengelola dan pengarusutamaan prinsip kolaborasi di tingkat masyarakat.

Tantangan lainnya adalah kapasitas penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang belum optimal. Pada tahun 2020, BUMD Air Minum yang berkinerja sehat baru 61,76%. Diperlukan peningkatan kinerja BUMD Air Minum dan penyelenggara SPAM lainnya (UPTD, Bumdes, Kelompok Masyarakat, dan lain lain) baik dalam hal teknis pengembangan dan pengelolaan SPAM, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pada saat ini, sebagian besar BUMD Air Minum belum didukung dengan tarif air minum yang dapat memenuhi kebutuhan untuk operasional dan pemeliharaan. Dalam rangka mencapai target TPB/SDGs, penyelenggara SPAM diharapkan mampu untuk menyediakan akses air minum aman, dengan menyusun Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) dan melakukan Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM).

Belum optimalnya laju peningkatan sambungan rumah melalui sistem perpipaan berdampak pada meningkatnya penggunaan air kemasan dan air isi ulang untuk air minum, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Data BPS untuk akses air minum perpipaan²⁸ di perkotaan dan di perdesaan menunjukkan besarnya ketergantungan masyarakat pada air kemasan (termasuk air isi ulang), sebagaimana terlihat pada Gambar 2.49..

²⁷ Data sementara dari VISM yang sedang berlangsung, Februari 2021.

²⁸ BPS/Susenas tidak menyebutkan sumber air untuk akses air minum perpipaan apakah dari PDAM atau melalui hasil swadaya masyarakat.



Gambar 2.49 Proporsi Sumber Air Untuk Minum dan Untuk Pemakaian Lainnya, 2020

Sumber: Susenas BPS dan Hasil Analisa

Pemakaian air kemasan dan air isi ulang di perkotaan mencapai 52% dan di perdesaan, meskipun lebih rendah (20%), tetap signifikan. Air pipa (ledeng) untuk penggunaan lainnya (masak, mencuci, mandi dan lainnya) masih banyak terdapat di perkotaan (27%), meskipun ketergantungan terhadap sumber non-pipa masih sangat tinggi, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Air minum dalam kemasan (AMDK) adalah air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk diminum.²⁹ Air pipa (ledeng) adalah air yang bersumber dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.³⁰ Air minum non-perpipaan adalah sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung/mata air tidak terlindung, yang masih dianggap layak untuk sumber air minum. Air Lainnya adalah air permukaan, air hujan dan lainnya, yang dianggap tidak layak sebagai sumber air minum. AMDK masuk dalam kategori air berbotol (*beverages*) dan karenanya tidak dihitung sebagai akses air minum. Air Untuk Lainnya adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci dan lain-lain. Air Untuk Lainnya menggunakan sumber airnya dari sumur

²⁹ Peraturan Menteri Perdagangan No 96/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum dalam Kemasan.

³⁰ Peraturan Pemerintah No 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

bor/pompa, sumur terlindung/sumur tak terlindung, mata air terlindung/mata air tak terlindung, air permukaan/air hujan, dan sumber air lainnya.³¹

Dalam rangka meningkatkan *demand* masyarakat untuk mengurangi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat untuk dapat mengakses air minum aman melalui sistem air minum jaringan perpipaan atau sistem air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Tantangan dalam penyediaan sanitasi

Tantangan penyediaan akses sanitasi layak dan aman secara umum adalah belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi dilihat dari berbagai aspek, mulai dari teknis, perilaku masyarakat, pendanaan, kelembagaan dan regulasinya. Berdasarkan data Susenas BPS 2020 yang diolah Bappenas, persentase rumah tangga yang praktik BABS di tempat terbuka adalah sebesar 6,19%. RPJMN 2020-2024 menetapkan target 0% rumah tangga harus sudah menghentikan praktik BABS di tempat terbuka. Target ini merupakan target lanjutan dari RPJMN 2015-2019 yang belum dapat dipenuhi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target tersebut dan salah satunya adalah melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Penerapan STBM di Indonesia tidak terlepas dari tantangan-tantangan seperti potensi *slippage*, serta tingginya kebutuhan untuk mencapai akses aman (*safely managed*). Cakupan STBM di Indonesia tercatat baru 56% dari jumlah desa di seluruh Indonesia. Dari 56% desa yang tercakup ini, hanya 46% yang menunjukkan efektivitas pemicuan menuju perilaku ODF. Dan dari 46% desa yang ODF, baru 78% desa yang sudah terverifikasi. Tantangannya, baik pada desa yang sudah ODF maupun yang terverifikasi ODF, adalah adanya potensi *slippage*, dimana warga di desa yang sudah terverifikasi ODF kembali ke perilaku asal BABS.³²

Sementara itu, operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Skala Kota dan Skala Regional belum optimal yang ditandai dengan masih terdapat 36,3% kapasitas IPAL yang masih dapat dimanfaatkan. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat juga menghadapi tantangan yang sama, salah satunya terlihat dari rendahnya jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang beroperasi secara optimal.³³

Rendahnya optimalisasi IPLT di daerah ditunjukkan dengan masih rendahnya *demand* masyarakat untuk memanfaatkan layanan pengolahan lumpur tinja. Pemerintah telah meluncurkan Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) sebagai bentuk peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah akan pentingnya pengolahan lumpur tinja rumah tangga secara rutin (paling tidak satu kali setiap tiga tahun berdasarkan Permen PUPR No. 29 Tahun 2018) untuk peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, termasuk penurunan tingkat pencemaran air tanah. Dalam pelaksanaan LLTT, beberapa kendala dapat

³¹ Tabel Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS

³² Hasil Lokakarya Review STBM, Jejaring AMPL, Januari 2019 (<http://www.jejaringampl.org/lokakarya-review-stbm-tantangan-kedepan-slippage-dan-upaya-mencapai-safely-manage/>)

³³ RPJMN 2020-2024

ditemukan pada sisi hulu maupun hilir. Pada sisi hilir (tingkat masyarakat), kendala yang dihadapi antara lain adalah kurangnya pengetahuan tentang tangki septik dan fungsi penyedotan lumpur tinja yang rutin. Di wilayah perkotaan masih banyak rumah yang terletak di gang sehingga akses jalan yang sempit menghambat akses truk tinja ke rumah tangga. Sedangkan permasalahan di tingkat hulu (lembaga layanan) antara lain masih minimnya sarana prasarana penyedotan, belum optimalnya operasional IPLT yang ditunjukkan dari kesiapan kelembagaan, pendanaan dan regulasi. Kesiapan pendanaan dan regulasi yang dimaksud adalah ketersediaan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan, serta ketersediaan peraturan di daerah yang mendukung pelaksanaan LLTT.³⁴

Alokasi anggaran untuk program perumahan dan permukiman masih sangat terbatas

Laporan *Urban Sanitation Development Program* tahun 2017 menunjukkan bahwa hanya 19 dari 47 kabupaten/kota yang dikaji telah mengalokasikan anggaran pengembangan sektor sanitasi yang ideal minimal 2% dari total APBD. Sedangkan dari sisi kelembagaan, fungsi kelembagaan regulator dan operator layanan dasar di daerah masih terbatas baik dalam jumlah maupun kapasitas. Sebagai contoh, hanya 77 kabupaten/kota yang sudah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelolaan layanan air limbah domestik (Kementerian PUPR, 2018).

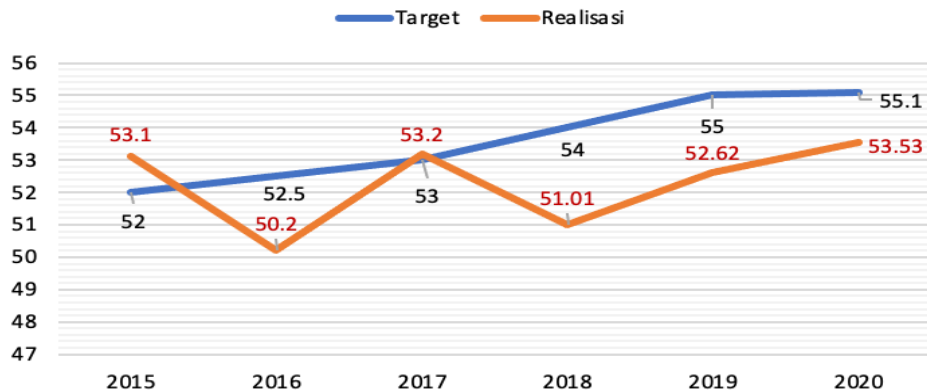
2. Kualitas Air Baku Air Permukaan

Kualitas air baku (air permukaan) diukur dengan Indeks kualitas air (IKA). Nilai IKA mengalami penurunan di tahun 2016 kemudian mengalami kenaikan di tahun 2017 dan turun kembali di tahun 2018. Dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami kenaikan yang artinya terjadi perbaikan kualitas air sungai dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Secara keseluruhan nilai IKA masih dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMN. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN adalah sebagai berikut (i) pertambahan jumlah penduduk, (ii) pertumbuhan industri baik skala besar maupun kecil, (iii) Ijin pembuangan limbah industri belum mempertimbangkan daya tampung beban pencemar secara efektif, dan (iv) belum seluruh industri taat terhadap peraturan.³⁵

³⁴ Optimalisasi Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal, Sri Darwati, Puslitbang Perumahan dan Permukiman, Kementerian PUPR, 2018.

³⁵ Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi, KLHK, 2021 (Surat Kepala Badan kepada Bappenas, 10 Maret 2021).

IKA - Target vs Realisasi



Gambar 2.50 Indeks Kualitas Air (IKA), 2015-2020

Sumber: Media Briefing Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, KLHK, 2021

Grafik pada Gambar 2.50 memperlihatkan gambaran IKA antara target dan realisasi. Berdasarkan hasil perhitungan status mutu air menggunakan metoda Indeks Pencemaran yang datanya berasal dari 725 titik pemantauan kualitas air di 34 provinsi pada periode 2015-2020, dapat disimpulkan bahwa 16% telah memenuhi baku mutu, 65% tercemar ringan, 12% tercemar sedang dan 7% tercemar berat. Berdasarkan tren selama lima tahun terakhir, titik pemantauan air yang memenuhi baku mutu meningkat 28%. Ada 8 (delapan) provinsi yang telah memenuhi target IKA, yaitu Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, Papua, Banten, DI Yogyakarta dan Sulawesi Utara, provinsi lainnya masih belum memenuhi target IKA. Parameter yang menyebabkan tidak terpenuhinya target yaitu BOD, DO dan fecal coli. Hal ini menunjukkan sumber pencemar dari kegiatan domestik, sebagai penyebab penurunan kualitas air, masih dominan³⁶

3. Sumber Air Baku.

a. Air Permukaan

Sampai dengan tahun 2020, dalam rangka peningkatan kehandalan penyediaan air baku, 46 buah bendungan/waduk dan 60 buah embung dan bangunan penampung lainnya selesai dibangun. Pembangunan baru tersebut telah menambah menyediakan pasokan air baku sebesar 2,52 m³/detik³⁷, yang dapat mendukung percepatan akses air minum. Pengelolaan sumberdaya air masih menghadapi tantangan besar, karena meskipun Indonesia memiliki curah hujan rata-rata sebesar 2.700mm per tahun, yang menempati peringkat kesembilan diantara negara-negara dengan curah hujan tertinggi di dunia, distribusinya tidak merata di seluruh daerah, dan perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau cukup

³⁶ Media Briefing Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.

³⁷ Paparan Ditjen SDA, Kementerian PUPR, 2020.

besar.³⁸ Air baku digunakan untuk berbagai keperluan, seperti irigasi, rumah tangga, industri, peternakan, pengairan dan lain-lain.

Meskipun Undang Undang Sumber Daya Air yang baru menegaskan bahwa Negara menjamin hak atas air³⁹, lebih dari 90% sumber air diperlukan untuk irigasi, dan secara historis, pemakaian untuk irigasi sudah lama berlangsung, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi perselisihan dalam penggunaan air. Kajian ilmiah Tim KLHS (2018) menunjukkan bahwa ketersediaan sumber air baku air permukaan di Indonesia akan mengalami krisis, khususnya untuk Pulau Jawa, dengan ketersediaan lebih kecil dari 500 m³/kapita/tahun, yang akan semakin kritis sampai tahun 2045.⁴⁰

b. Air Tanah

Kondisi air tanah di Indonesia, khususnya yang terkait dengan kondisi cekungan air tanah (CAT) sudah banyak yang rusak. Karena ketergantungan yang tinggi pada air tanah, kondisi CAT pada umumnya memburuk. Beberapa CAT yang kondisinya memburuk antara lain di Sumatera (Medan, Metro-Kotabumi), Jawa (Jakarta, Serang-Tangerang, Bogor, Karawang-Bekasi, Pekalongan-Pemalang, Semarang, Karanganyar-Boyolali, Ngawi-Ponorogo), Bali (Denpasar-Tabanan), dan Kalimantan (Palangkaraya dan Banjarmasin). Sesuai pembagian kewenangan berdasarkan UU 23/2014, pengelolaan air tanah berbasis CAT dilakukan dengan pendekatan “*one basin, one management*”, dimana Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk pengelolaan CAT yang berada di dalam wilayahnya, sedangkan untuk CAT lintas provinsi, pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian ESDM) bertanggung jawab dalam pengelolaannya, termasuk penetapan CAT, penetapan zona konservasi air tanah lintas provinsi dan lintas negara, dan rekomendasi teknis CAT lintas provinsi dan lintas negara, serta penyusunan pedoman penetapan nilai perolehan air tanah (NPA). Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, saat ini terdapat 4 CAT lintas negara, 36 CAT lintas provinsi dan 381 CAT dalam provinsi, sehingga jumlah CAT saat ini seluruhnya adalah 421.⁴¹

Tantangan lainnya adalah penggunaan air tanah yang berlebihan, dan menyebabkan penurunan muka air tanah dan intrusi air laut di daerah-daerah dekat pantai. Hampir 50% air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga berasal dari air tanah.⁴²

4. Restorasi Ekosistem Terkait Sumber Daya Air

a. Tutupan Vegetasi

³⁸ Bappenas, 2015

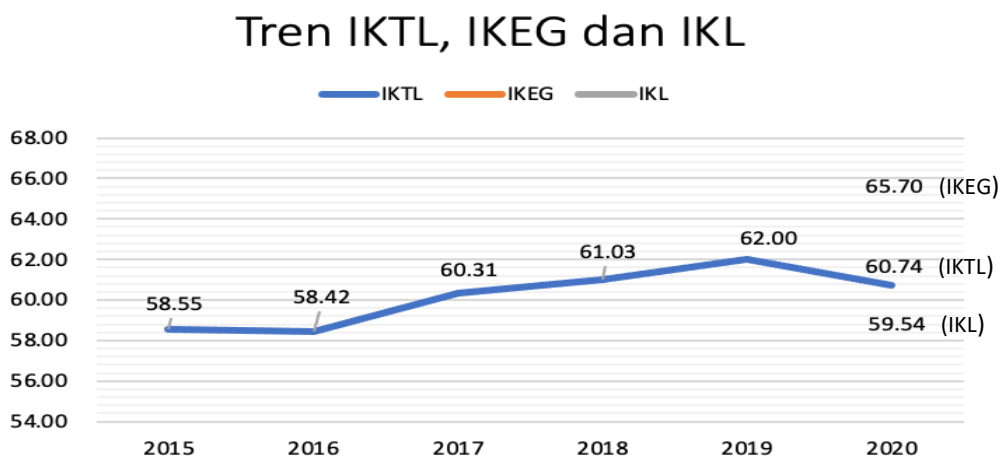
³⁹ Pasal 6 Undang Undang No 17/2019 tentang Sumberdaya Air berbunyi: “Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.”

⁴⁰ Paparan Direktur KKSDA, Bappenas dalam Koordinasi Penyusunan RAN TPB/SDGs Tujuan 6, 22 Maret 2020.

⁴¹ Pengaturan Air Tanah di Indonesia, September 2020.

⁴² Podes 2014

Tutupan vegetasi merupakan bagian penting dalam menjaga, memelihara dan menjamin ketersediaan air baku. Tutupan vegetasi diukur dengan indeks kualitas lahan (IKL), yang merupakan gabungan dari indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dan indeks kualitas ekosistem gambut (IKEG). IKEG mulai diperhitungkan sejak tahun 2020. Nilai IKL merepresentasikan kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh tutupan lahan dan khusus untuk ekosistem gambut dipertimbangkan dampak kebakaran dan keberadaan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan. Pada periode 2015-2020, IKL mengalami tren naik-turun sebagaimana terlihat pada Gambar 2.51.



Gambar 2.51 Tren Indeks Kualitas Lahan (IKL), 2015-2020

Sumber: Media Briefing Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, KLHK, 2021

2.7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

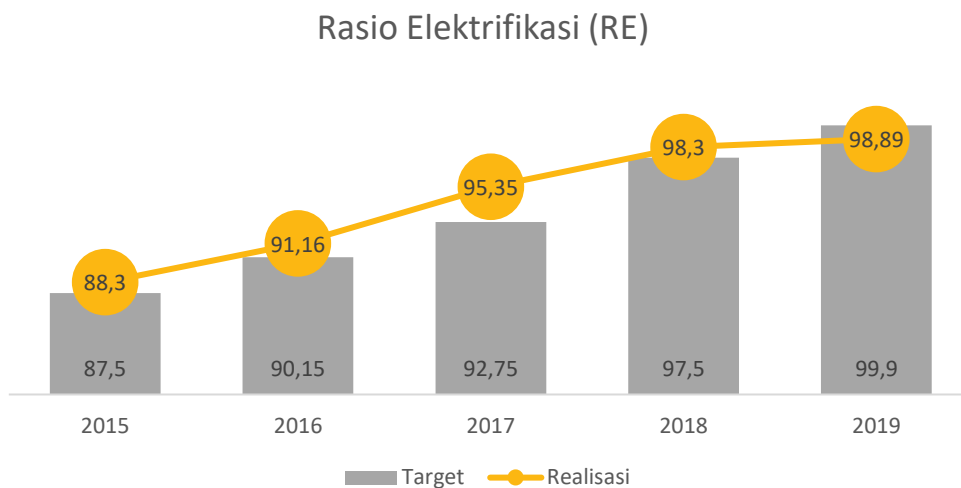
A. Pengantar

Sektor energi dan sumber daya mineral merupakan sektor strategis dan menjadi andalan dalam mendukung pembangunan dan perekonomian nasional. Seluruh kegiatan perekonomian maupun kegiatan-kegiatan yang lain memerlukan energi untuk dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, menjamin akses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan untuk semua sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional, baik pada pilar pembangunan ekonomi maupun pilar pembangunan lainnya.

B. Status Capaian

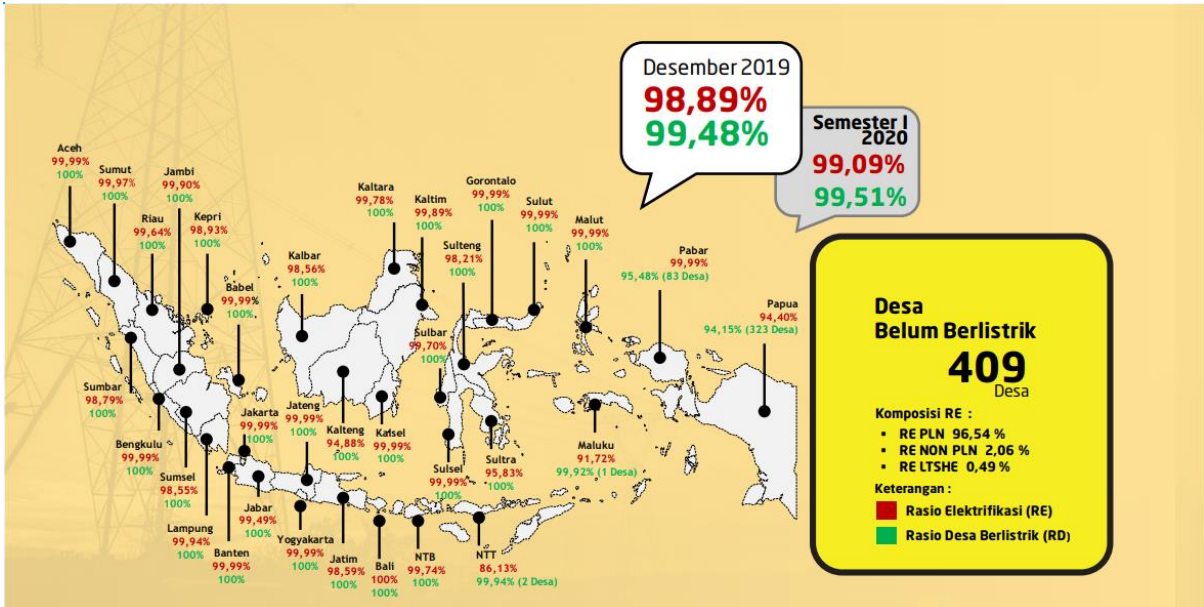
Rasio Elektrifikasi (RE) adalah salah satu indikator utama pembangunan ketenagalistrikan yang menunjukkan perbandingan jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik baik dari listrik PLN maupun non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Rasio elektrifikasi terus mengalami peningkatan dari 88,3% pada tahun 2015 menjadi 98,89% di tahun 2019. Pada tahun 2019, terdapat 29 provinsi yang mempunyai RE lebih dari 95% yang meliputi seluruh provinsi di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, sebagian Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, serta Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Empat provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua mempunyai RE pada kisaran 90-95%, Sedangkan provinsi dengan

RE kurang dari 90% yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan RE dengan strategi *on-grid* melalui perluasan jaringan PLN, *isolated grid* melalui perluasan jaringan terisolasi terutama dengan pembangkit listrik terbaru, dan penyediaan sistem *stand alone* melalui pendistribusian alat lampu tenaga surya. Selain itu, pemerintah juga mendorong peran pemerintah daerah, swadaya masyarakat dan swasta untuk program elektrifikasi non-PLN.



Gambar 2.52 Target dan realisasi rasio elektrifikasi 2015-2019

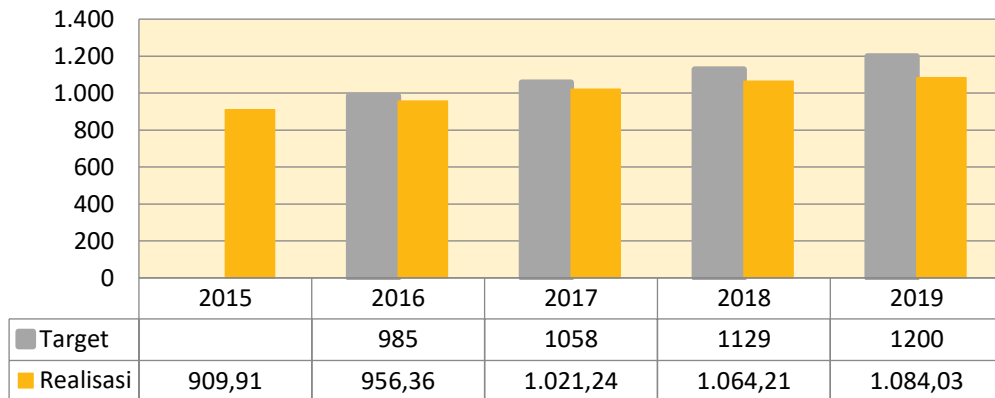
Walaupun secara nasional pencapaian RE sudah mendekati 100%, namun tantangan perluasan akses listrik masih cukup besar di beberapa daerah antara lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Papua terutama di wilayah-wilayah terpencil dan secara geografis sulit dijangkau. Pada tahun 2020 masih terdapat 409 desa belum berlistrik dan 3.090 desa LTSHE yang memerlukan akses listrik serta peningkatan keandalannya (Gambar 2.53). Perlu disadari bahwa indikator RE tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi kualitas layanan mengingat masih terdapat daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan listrik selama 24 jam.



Gambar 2.53 Capaian rasio elektrifikasi pada semester I tahun 2020

Sumber: Renstra ESDM 2020-2024

Salah satu tolok ukur kemajuan suatu negara adalah pada penyediaan energi yang memadai dan andal untuk seluruh masyarakat yang dapat ditunjukkan dengan tingkat konsumsi listrik. Pada periode 2015-2019 konsumsi listrik perkapita mengalami peningkatan dari 910 kWh perkapita pada tahun 2015 menjadi 1.084 kWh per kapita pada tahun 2019, atau meningkat rata-rata sebesar 43,5 kWh per kapita per tahun. Meskipun demikian, peningkatan tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 1.200 kWh per kapita pada tahun 2019 sehingga masih perlu diakselerasi. (Gambar 2.54).



Gambar 2.54 Capaian konsumsi listrik per kapita (kWh) per tahun, 2015-2019

Dalam mendukung pemanfaatan sumber energi yang lebih bersih, andal, dan terjangkau, pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga terus dikembangkan. Jaringan gas rumah tangga terus dibangun, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga di berbagai wilayah yang memiliki potensi gas dan infrastruktur transmisi sumber daya gas bumi. Pada periode 2015-2019 telah dibangun sebanyak 337,93 ribu Sambungan Rumah Tangga (SR) jaringan gas (jargas) kota sehingga total kumulatif jargas meningkat dari 220,36 ribu SR pada tahun 2015

menjadi 537,94 ribu SR pada tahun 2019. Dengan kata lain, penambahan jargas rumah tangga sekitar 68 ribu SR per tahun (Tabel 2.20).

Tabel 2.20 Perkembangan Jaringan Gas (Jargas) kota (dalam ribu SR)

	2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi Non-APBN	12,72	10,22	3,74	0,52	0
Realisasi APBN	7,64	88,93	49,93	89,73	74,5
Tambahan 2015-2020	20,36	99,15	53,67	90,25	74,5
Kumulatif	220,36	319,51	373,18	463,43	537,93

Sumber: Renstra ESDM 2020-2024

Dengan memperhatikan target RPJMN 2020-2024 sebesar 4 juta SR pada tahun 2024, maka diperlukan tambahan rata-rata 692 ribu SR per tahun. Hal ini menunjukkan dibutuhkannya usaha lebih untuk mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2024. Secara umum, tantangan pembangunan jargas kota saat ini adalah terletak pada harga keekonomian yang masih belum menarik bagi badan usaha dan skema pendanaan Pemerintah yang terbatas. Oleh karena itu, saat ini sedang disusun mekanisme Kerjasama Pemerintah - Badan Usaha untuk perluasan pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga dengan konsep pengembangan ekstensifikasi pada lokasi-lokasi jargas eksisting.

Rasio penggunaan gas rumah tangga merupakan indikator untuk menggambarkan proporsi rumah tangga yang telah menggunakan gas sebagai bahan bakar untuk memasak terhadap total rumah tangga secara keseluruhan. Pada periode 2015-2019, menurut data Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik (BPS), capaian indikator ini terus meningkat setiap tahun yaitu dari 68,19% pada tahun 2015 menjadi 79,9 pada tahun 2019. Walaupun secara nasional nilainya terus meningkat dan capaian proporsinya sudah relatif tinggi, tetapi kondisi tersebut belum merata untuk seluruh wilayah Indonesia. Beberapa provinsi misalnya Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat memiliki rasio penggunaan gas rumah tangga yang sangat rendah dibawah 5%, bahkan Provinsi Maluku memiliki rasio penggunaan gas rumah tangga dibawah 1%. Ini menunjukkan tantangan pelaksanaan dalam meningkatkan indikator ini khusus di provinsi-provinsi tersebut masih sangat besar karena terkait infrastruktur distribusi bahan bakar gas maupun faktor keterjangkauan harga serta kebiasaan masyarakat.

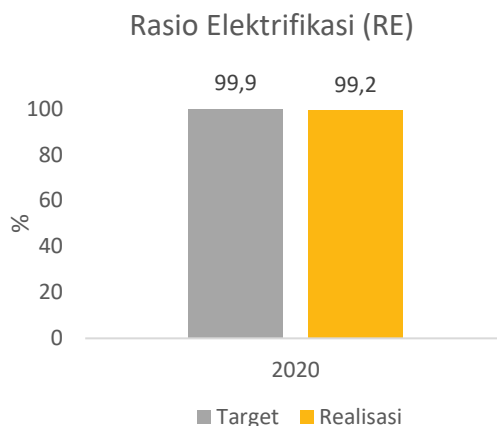
Salah satu tolok ukur penyediaan energi bersih dan berkelanjutan dapat dilihat dari bauran energi terbarukan. Dalam hal ini dapat diukur dari pangsa Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam pasokan energi primer atau *Total Primary Energy Supply (TPES)*. Pada periode 2015-2019 pangsa EBT terus meningkat dari 4,4% pada 2015 menjadi 9,15% pada tahun 2019. Capaian ini masih dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 16% pada tahun 2019. Jika diukur dari *Total Final Energy Consumption (TFEC)*, pada tahun 2019, pangsa EBT telah mencapai 12,7% (termasuk biomasa tradisional) atau 7,1% (tidak termasuk biomasa tradisional).

Peningkatan efisiensi penggunaan energi dapat ditunjukkan oleh nilai intensitas energi primer. Intensitas energi primer adalah jumlah pasokan energi primer yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap satuan Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin rendah angka intensitas energi dalam Setara Barel Minyak (SBM) per satuan PDB (harga konstan 2000), maka semakin produktif dan efisien penggunaan energi di sebuah negara. Selama periode 2015-2019 intensitas energi menurun sebesar 76,1 SBM/ Miliar Rupiah, dari 501 SBM/Miliar Rupiah pada tahun 2015 menjadi 424,87 SBM/Miliar Rupiah pada tahun 2019. Capaian pada tahun 2019 ini setara dengan 140,6 SBM/Miliar Rupiah (pada PDB dengan harga konstan 2010).

Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan (dalam Watt per kapita) digunakan menggambarkan prioritas untuk menggunakan energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi penduduk selama satu tahun. Indikator ini terus mengalami peningkatan dari 33,26 Watt per kapita pada tahun 2015 menjadi 38,42 Watt per kapita pada tahun 2019, seiring dengan peningkatan kapasitas pembangkit EBT dari 8,49 GW pada tahun 2015 menjadi 10,30 GW pada tahun 2019, atau meningkat rata-rata 451,29 MW per tahun.

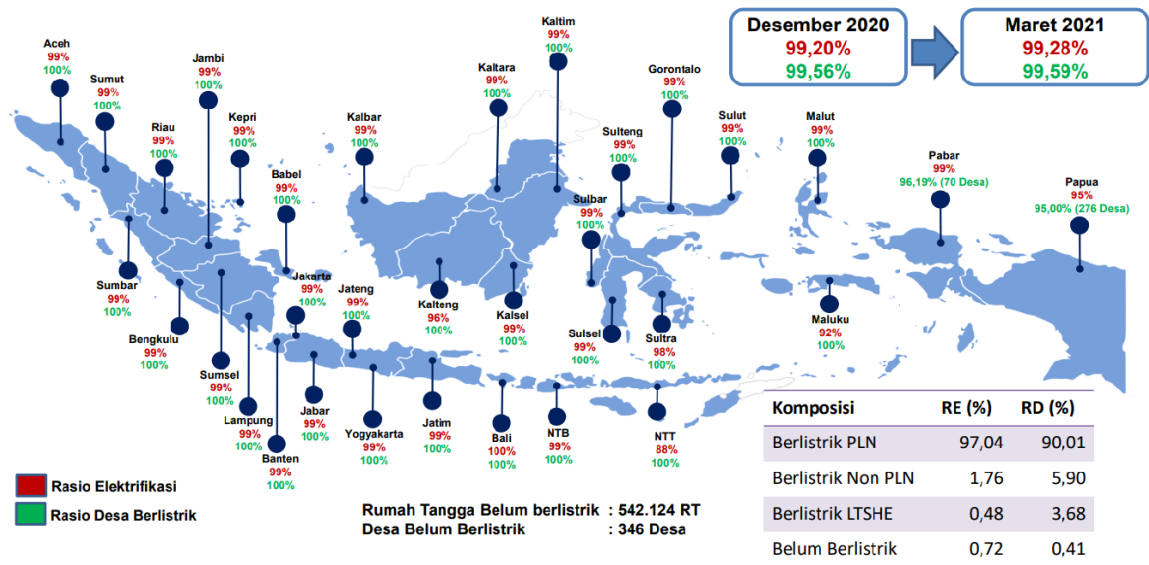
Dampak COVID-19 Terhadap Capaian TPB 7

Capaian Rasio Elektrifikasi (RE) Triwulan IV Tahun 2020 adalah sebesar 99,20%, sedikit dibawah target RE tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam RKP 2020 sebesar 99,9%. Pada Triwulan I 2021, RE meningkat menjadi 99,28% dengan masih adanya 542,124 Rumah Tangga (RT) dan 346 Desa belum berlistrik.



Gambar 2.55 Target dan realisasi rasio elektrifikasi 2020

RASIO ELEKTRIFIKASI (RE) & RASIO DESA BERLISTRIK (RD) TRIWULAN I 2021



Gambar 2.56 Capaian rasio elektrifikasi pada triwulan I tahun 2021

Sumber: DJK ESDM, 2021

Pandemi COVID-19 menyebabkan target RE 100% dan program melistriki desa yang belum berlistrik terhambat. Hal ini disebabkan karena lokasi desa yang belum berlistrik sulit dijangkau serta anggaran yang dialokasikan untuk penuntasan akses tenaga listrik menjadi terbatas. Selain itu, pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan konsumsi listrik terutama di sektor industri dan bisnis. Kebijakan pemerintah yang menerapkan *Work from Home* (WfH) berimplikasi terhadap peningkatan konsumsi listrik sektor rumah tangga. Namun demikian, peningkatan ini tidak mampu mengimbangi turunnya konsumsi sektor industri dan bisnis. Sampai dengan Triwulan IV 2020, konsumsi listrik per kapita mencapai 1.089 kWh per kapita atau mencapai 93.8% dari target RKP 2020 sebesar 1161 kWh per kapita. Capaian ini hanya meningkat 5 kWh per kapita dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.084 kWh per kapita, jauh lebih kecil dari rata-rata peningkatan pertahun sebesar 43,5 kWh per kapita per tahun pada periode 2015-2019. Peningkatan kualitas konsumsi listrik per kapita diharapkan akan membaik seiring dengan upaya pemulihan ekonomi.

Pembatasan mobilitas pada saat pandemi COVID-19 secara umum akan menurunkan konsumsi energi dibandingkan dengan kondisi normal. Kebijakan pemerintah dalam menerapkan WfH dinilai dapat berkontribusi terhadap penurunan intensitas energi primer. Hal ini dapat dilihat pada capaian intensitas energi primer sebesar 133,5 (SBM/Miliar Rp) lebih rendah dari penyesuaian target akibat COVID-19 sebesar 139,5 (SBM/Miliar Rp).

Sampai dengan triwulan IV 2020, pembangunan jaringan gas kota mencapai 135.286 SR atau sebesar 50,85% dari target pada RKP 2020 sebesar 266.070 SR. Dengan penambahan ini, jumlah kumulatif jargas kota menjadi 673.226 SR. Beberapa kendala dari dampak pandemi COVID-19 terhadap pembangunan jargas kota antara lain adalah hambatan mobilisasi pekerja, material proyek, hingga kesulitan mendapatkan *spare part*. Kenyataan ini mengakibatkan adanya penyesuaian target kumulatif pembangunan jargas pada pemutahiran RKP 2021 menjadi 715.800 SR atau target penambahan sebanyak 42.578 SR dari capaian tahun 2020.

Tabel 2.21 Perkembangan Jaringan Gas (Jargas) kota tahun 2020 (dalam ribu SR)

	2020
Realisasi Non-APBN	0
Realisasi APBN	135,28
Tambahan 2015-2020	135,28
Kumulatif	673,22

Sumber: Laporan Kinerja ESDM 2020

Sementara itu, porsi bauran EBT dalam penyediaan energi primer nasional mencapai 11,3%, lebih rendah dari target pada RKP 2020 sebesar 13,4%. Pada triwulan IV 2020, capaian pembangunan PLT Panas bumi, Bioenergi, dan PLT ET lainnya masing-masing adalah 2.131 MW, 1.904 MW, dan 6.246 MW. Capaian ini masih dibawah target yang ditetapkan pada RKP 2020 sebesar 2.273 MW, 1922,5 MW, dan 6949.7 MW masing-masing untuk PLT Panas bumi, Bioenergi, dan PLT ET lainnya. Pandemi COVID-19 memberikan dampak dalam perkembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Hal ini dikarenakan rendahnya harga energi fosil atau bahan bakar minyak (BBM), penurunan permintaan B30 yang secara langsung mengurangi penggunaan Biodiesel, turunnya konsumsi listrik sehingga berpengaruh pada target *Commercial Operation Date* (COD) pembangkit baru (termasuk PLT EBT), serta terganggunya rantai pasok pelaksanaan proyek pembangkit listrik berbasis EBT termasuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli dari luar negeri yang pada akhirnya mengakibatkan melambatnya pengembangan EBT.

2.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

A. Pengantar

Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Tujuan 8 meliputi target-target seperti mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, menciptakan tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, meningkatkan kebijakan pembangunan dan mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang semakin layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mengurangi pekerja anak, mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Bagian ini tidak membahas isu pola konsumsi berkelanjutan yang akan dibahas pada Tujuan 12.

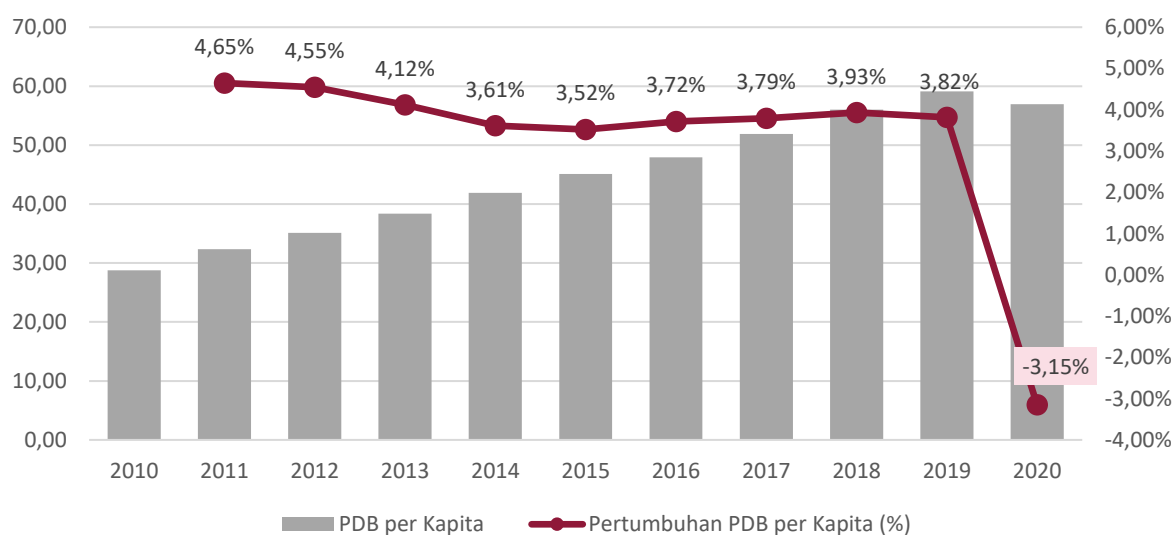
Adanya pandemi COVID-19 berimplikasi kepada menurunnya pencapaian pada sebagian besar indikator yang termasuk ke dalam tujuan ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kebijakan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional yang bersifat inklusif, merata dan berkelanjutan pada masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 menjadi sangat krusial.

B. Status Capaian

1. Perkembangan Ekonomi Makro

Semenjak tahun 2010 hingga 2019, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia secara konsisten mengalami pertumbuhan dari Rp28,8 juta di tahun 2010 menjadi Rp59,1 juta di tahun 2019 dengan tren laju pertumbuhan yang cukup melambat. Tingkat pertumbuhan PDB per kapita Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2012, di mana pertumbuhan PDB per kapita menyentuh 4,67%. Akan tetapi, tren pertumbuhan PDB per kapita Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 4,67% hingga tahun 2015 sebesar 3,52% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,03%.

Pandemi COVID-19 turut memperparah pencapaian pertumbuhan PDB Indonesia. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia kembali merasakan pertumbuhan ekonomi yang negatif setelah terakhir mengalami kondisi serupa pada tahun 1997-1998. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 3,15% pada tahun 2020 dan menyebabkan PDB per kapita turun dari Rp59,1 juta pada tahun 2019 menjadi Rp56,9 juta di tahun 2020.

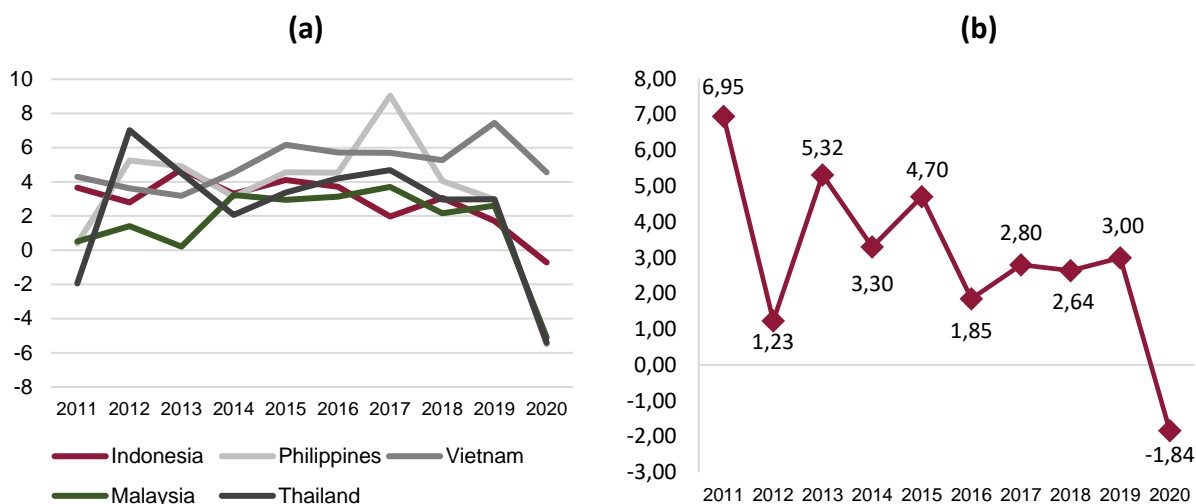


Gambar 2.57 PDB per kapita (juta rupiah) dan laju pertumbuhan PDB per kapita dengan harga konstan Indonesia, 2010-2020

Sumber: Statistik Indonesia

Berdasarkan tingkat produktivitas yang dilihat melalui indikator pertumbuhan PDB per tenaga kerja maka terlihat bahwa tingkat produktivitas pekerja di Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan sepanjang kurun 2011-2020. Bahkan pada tahun 2019, tingkat produktivitas pekerja di Indonesia adalah yang paling rendah dibandingkan dengan negara-

negara ASEAN lainnya. Secara umum, tren menunjukkan negara-negara di ASEAN mengalami penurunan pertumbuhan produktivitas, khususnya pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Meskipun demikian, Vietnam menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil meningkatkan produktivitas per pekerja pada tahun 2019. Produktivitas tenaga kerja di Indonesia terus mengalami penurunan produktivitas sepanjang tahun 2011-2019 (Gambar 2.58 (b)). Khusus pada tahun 2020, pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja untuk pertama kalinya mengalami pertumbuhan negatif atau mencapai -1,84%.



Gambar 2.58 Pertumbuhan PDB riil per orang bekerja dengan menggunakan PPP, 2011-2020

Sumber: World Bank

2. Penciptaan Lapangan Kerja Yang Layak dan Produktif

Beberapa temuan umum untuk masing-masing indikator tersebut adalah: (1) proporsi sektor informal dalam ekonomi Indonesia masih cukup besar. Sebelum adanya COVID-19, mayoritas pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal. Pada tahun 2020, jumlah pekerja informal mencapai hampir 60% dengan persentase perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki; (2) Tingkat upah pekerja terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2015-2020 dengan pertumbuhan yang cukup lambat serta masih adanya isu kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan upah pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya penurunan jam kerja akibat pandemik; (3) Pada tahun 2020, jumlah pengangguran mengalami peningkatan akibat banyaknya pekerjaan yang hilang akibat pandemi COVID-19 dimana sebelumnya pada tahun 2015-2019 Tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran mengalami penurunan tren; (4) Masih banyak pekerja usia produktif yang belum terserap ke dalam pasar tenaga kerja. Jumlahnya mencapai 24,28% pada tahun 2020; dan (5) Dari sisi pekerja anak, persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja mengalami kenaikan, baik secara total, maupun jika dilihat berdasarkan jenis kelamin.

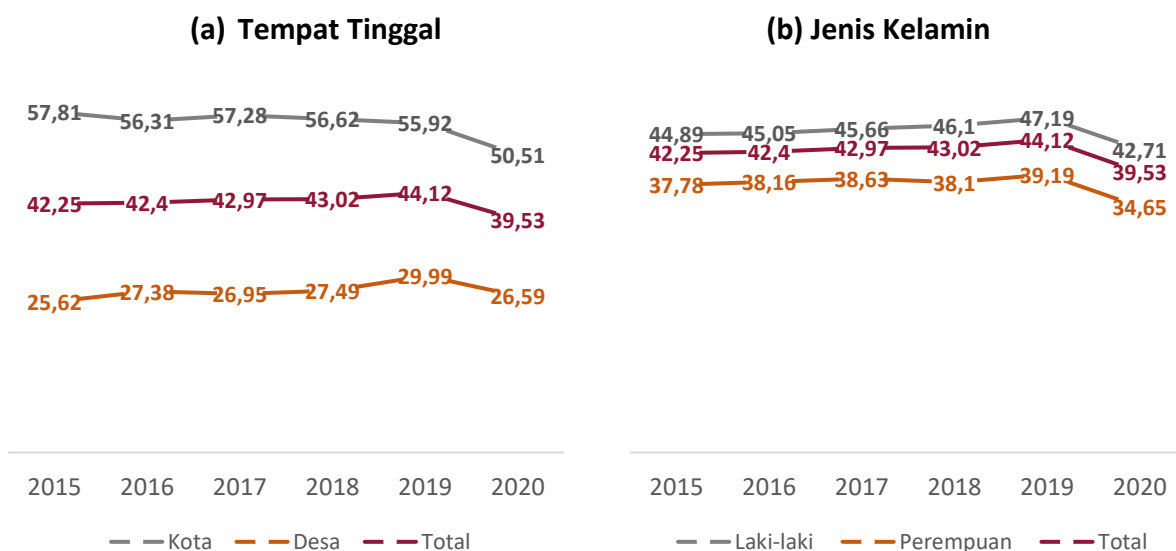
3. Peranan Sektor Formal

Upaya untuk terus melakukan formalisasi lapangan kerja di Indonesia telah menunjukkan sedikit perbaikan, namun mayoritas pekerja masih bekerja di sektor informal. Sekitar 58% penduduk Indonesia bekerja di sektor informal pada tahun 2015 dan nilainya

sempat menurun menjadi 56% pada tahun 2019 (Gambar 2.59). Akan tetapi, dampak yang diberikan oleh pandemi COVID-19 membuat proporsi pekerja di sektor informal meningkat menjadi 60,4% atau naik sebesar 4,59% dibandingkan tahun 2019. Temuan ini mengindikasikan bahwa banyak sektor usaha formal yang berhenti beroperasi dan sektor-sektor informal yang tumbuh sebagai imbas dari pandemi.

Jika melihat kondisi di tingkat kota dan desa pada tahun 2015-2019, mayoritas pekerja di kota bekerja di sektor formal, di mana rata-ratanya mencapai 57%. Pada tahun 2020, jumlah penduduk kota yang bekerja di sektor informal meningkat menjadi 49,49% dari 36% di tahun 2019. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, mayoritas pekerja perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal.

Lain halnya untuk penduduk di desa, di mana secara proporsi mayoritas pekerjanya bekerja di sektor informal, akan tetapi terjadi penurunan jumlah proporsi pekerja di sektor informal, baik secara total maupun berdasarkan jenis kelamin, khususnya hingga tahun 2019. Secara total, pekerja informal di desa turun dari 74% pada tahun 2015 menjadi 73,41% di bulan Agustus 2020.

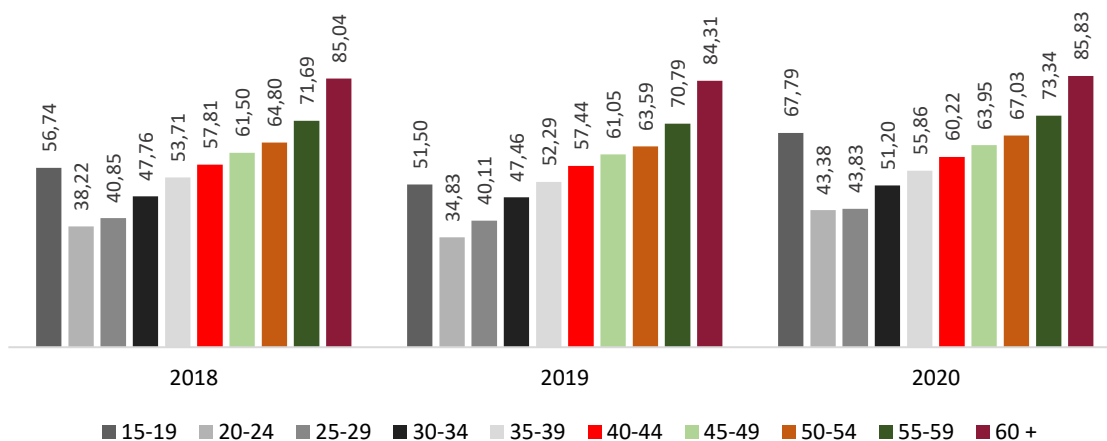


Gambar 2.59 Proporsi lapangan kerja formal berdasarkan tempat tinggal dan jenis kelamin, 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (Sakernas)

Berdasarkan kelompok umur, kelompok usia 60 tahun ke atas dan 55-59 tahun adalah kelompok umur yang banyak bekerja di sektor informal, masing-masing sebanyak 86% dan 73% pada tahun 2020. Untuk kelompok usia muda, khususnya mereka yang berumur 15-19

tahun, jumlah pekerja di sektor informal mencapai 68% pada tahun 2020. Akan tetapi, nilainya cenderung menurun untuk kelompok umur 20-24 tahun (43%). Hal ini juga mengindikasikan bahwa sudah semakin banyak pekerjaan formal yang tersedia untuk pekerja usia produktif sehingga diharapkan dapat memberikan pekerjaan yang layak. Meskipun demikian tetap diperlukan upaya untuk memperluas dan memperbanyak pekerjaan formal pada masa yang akan datang untuk semua kelompok umur.



Gambar 2.60 Proporsi lapangan kerja informal berdasarkan umur, 2018-2020

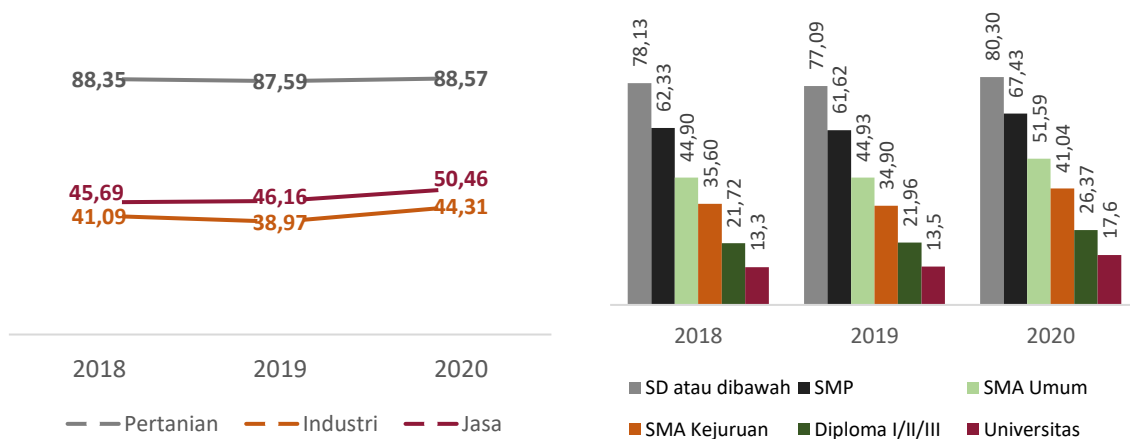
Sumber: Badan Pusat Statistik (Sakernas)

Berdasarkan sektor, sektor pertanian masih didominasi oleh pekerjaan yang bergerak di sektor informal (Gambar 2.61). Untuk sektor industri, terjadi peningkatan proporsi pekerja yang bekerja di sektor informal, khususnya dari tahun 2019 ke 2020. Sama halnya dengan sektor jasa yang mengalami tingkat kenaikan pekerja sektor informal pada tahun 2020 menjadi 44%, meskipun sempat turun menyentuh 39% pada tahun 2019.

Berdasarkan tingkat pendidikan Gambar 2.61 (b) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang negatif terhadap partisipasi di sektor informal. Semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja, maka semakin besar kemungkinan mereka bekerja di sektor formal. Dari sisi pertumbuhan, khususnya dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, maka terlihat bahwa untuk semua tingkat pendidikan terjadi peningkatan proporsi pekerja yang bergerak di sektor informal. Sebagai contoh untuk tamatan SD, jumlahnya naik dari 77,1% pada tahun 2019 menjadi 80,3% di tahun 2020. Hal yang sama terjadi untuk lulusan perguruan tinggi, persentase yang bekerja di sektor informal naik dari 13,5% di tahun 2019 menjadi 17,6% pada tahun 2020.

(a) Sektor

(b) Pendidikan



Gambar 2.61 Proporsi lapangan kerja informal di sektor pertanian, industri dan jasa, berdasarkan tingkat pendidikan, 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (Sakernas)

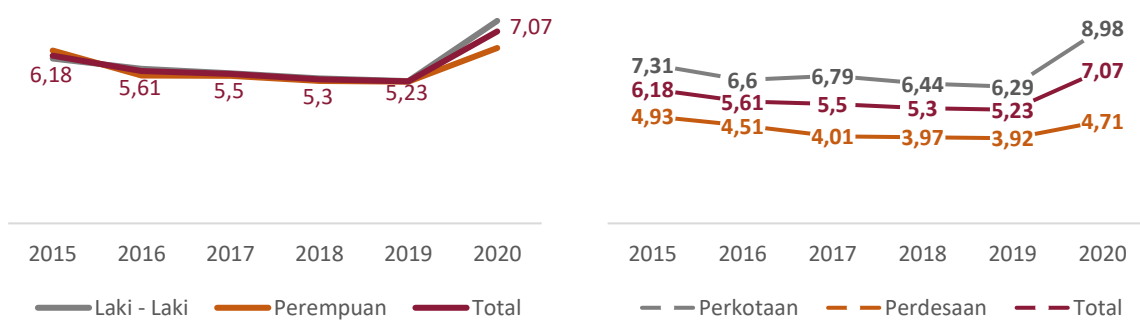
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Setengah Pengangguran

Sebelum adanya COVID-19, indikator tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami tren penurunan. Tingkat pengangguran turun dari 6,18% di tahun 2015 menjadi 5,23% pada tahun 2019. Akan tetapi, pada tahun 2020, tingkat pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,07%. Hal yang cukup menarik adalah COVID-19 menyebabkan persentase laki-laki yang masuk ke dalam tingkat pengangguran meningkat dibandingkan dengan perempuan. Ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan kondisi ini terjadi. Pertama, TPT laki-laki sebelum pandemi relatif rendah dan ketika wabah COVID-19 terjadi, dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih banyak dialami oleh pekerja laki-laki. Kedua, adanya pandemi membuat perempuan yang sebelumnya tidak bekerja terpaksa harus bekerja dan berimplikasi terhadap TPT perempuan yang tidak mengalami peningkatan sebesar yang terjadi untuk laki-laki.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat pengangguran di perkotaan jauh lebih besar dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Dari segi laju pertumbuhan, tingkat pengangguran di desa secara konsisten terus mengalami penurunan dari tahun 2015-2019. Untuk kota, tingkat pengangguran sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2017, namun terus turun hingga tahun 2019. Jika melihat dampak dari COVID-19, terlihat bahwa tingkat pengangguran di daerah perkotaan menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Hal ini kemungkinan disebabkan banyaknya pekerjaan yang hilang karena adanya restriksi mobilitas penduduk dan berdampak terhadap sektor-sektor yang banyak beroperasi di perkotaan. Sedangkan di desa yang mayoritas kegiatan ekonominya bergerak di sektor pertanian, tingkat pengangguran tumbuh, namun tidak setinggi yang dialami oleh penduduk kota.

(a) Jenis Kelamin

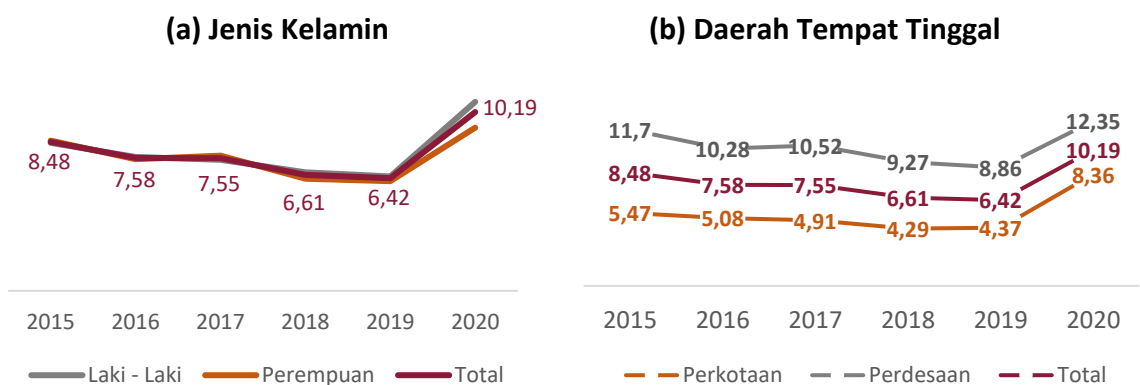
(b) Daerah Tempat Tinggal



Gambar 2.62 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal, 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indikator lainnya adalah tingkat setengah pengangguran. Secara definisi, BPS mendefinisikan setengah penganggur sebagai pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Gambar 2.63 menunjukkan bahwa tingkat setengah pengangguran di Indonesia mengalami laju pertumbuhan yang relatif sama dengan tingkat pengangguran. Terjadi penurunan persentase semenjak tahun 2015-2019, namun mengalami peningkatan cukup besar pada tahun 2020. Pada tahun 2019, persentase tingkat setengah pengangguran di Indonesia sebesar 6,42% dan menjadi 10,19% di tahun 2020. Jika dilihat perbedaan antara tempat tinggal, maka tingkat setengah pengangguran di perdesaan jauh lebih banyak dibandingkan di kota. Secara laju pertumbuhan, kedua daerah terus mengalami penurunan, namun tahun 2020, angkanya menjadi meningkat.



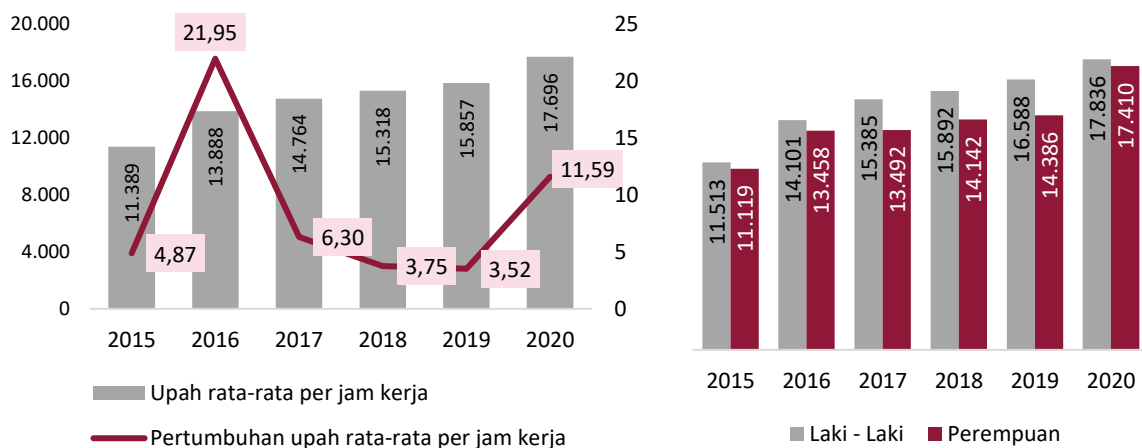
Gambar 2.63 Tingkat setengah pengangguran di Indonesia berdasarkan jenis kelamin dan tempat tinggal, 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

5. Tingkat Upah

Pekerjaan yang layak juga dipengaruhi oleh upah yang diterima oleh pekerja. Berdasarkan Gambar 2.64, upah rata-rata pekerja di Indonesia tumbuh dari Rp11.434 per jam di tahun 2015 menjadi Rp17.696 per jam pada tahun 2020. Meskipun mengalami kenaikan secara nilai sepanjang tahun 2015-2020, akan tetapi jika dilihat dari tingkat pertumbuhan, maka upah di Indonesia justru tidak mengalami pertumbuhan sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pertumbuhan upah pekerja relatif sama dengan tingkat inflasi. Hal ini berarti secara riil upah pekerja tidak mengalami pertumbuhan. Khusus untuk tahun 2020, kenaikan tingkat upah lebih dikarenakan pengurangan jumlah jam kerja yang lebih besar ketimbang perubahan upah, sehingga mengakibatkan upah per jam menjadi meningkat.

Jika membandingkan upah pekerja laki-laki dengan perempuan, maka masih terlihat adanya masalah disparitas gaji antar gender (*gender wage gap*) di Indonesia. Dalam hal ini, gaji pekerja laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan gaji pekerja perempuan. Pada tahun 2015 perbedaan gaji laki-laki dengan perempuan tidak terlalu besar, namun semenjak tahun 2016 hingga 2019, terlihat bahwa gaji pekerja laki-laki terus semakin tinggi. Di sisi yang lain, pekerja perempuan tidak terjadi pertumbuhan upah bahkan terkesan stagnan. Pada tahun 2020, rata-rata upah laki-laki adalah sebesar Rp2,98 juta dan perempuan sebesar Rp2,38 juta. Upah perempuan di Indonesia jauh di bawah upah rata-rata nasional sebesar Rp2,76 juta. Perbedaan upah laki-laki dan perempuan antar waktu juga menyebabkan semakin besarnya disparitas gaji antara pekerja laki-laki dan perempuan di Indonesia. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan TPB terkait kesetaraan hak yang akan diterima oleh semua pihak termasuk berdasarkan jenis kelamin.

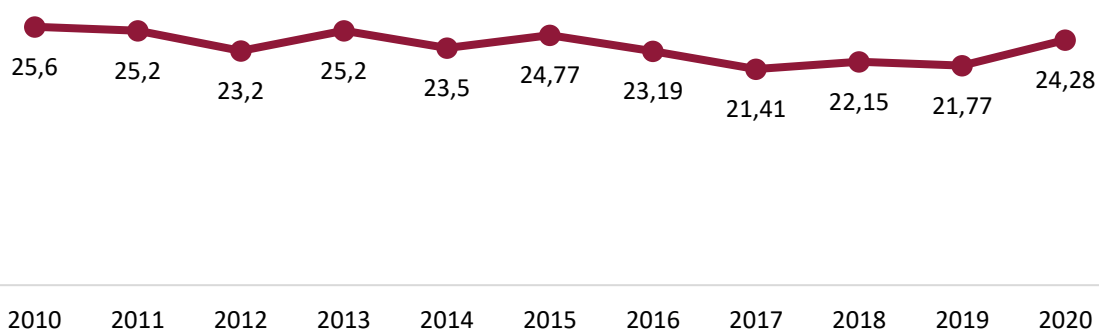


Gambar 2.64 Tingkat upah rata-rata per jam kerja, 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

6. Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET)

Menurut tingkat keaktifannya, sepanjang tahun 2010-2020, proporsi kaum muda berusia 15-24 tahun yang tidak sekolah, bekerja atau tidak dalam pelatihan (*Not in Education, Employment, or Training/NEET*) tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan meskipun terjadi fluktuasi antar waktu. Pada tahun 2010, presentasi NEET sebesar 25,6% dan sempat turun hingga menjadi 21,77% pada tahun 2019. Namun penurunan jumlah tersebut langsung hilang, karena jumlah NEET di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 24,38%. Jumlah ini memang sedikit lebih rendah daripada tahun 2015 (24,77%), namun masih besarnya angka ini menunjukkan masih belum optimalnya tingkat partisipasi penduduk usia muda dalam kegiatan ekonomi.

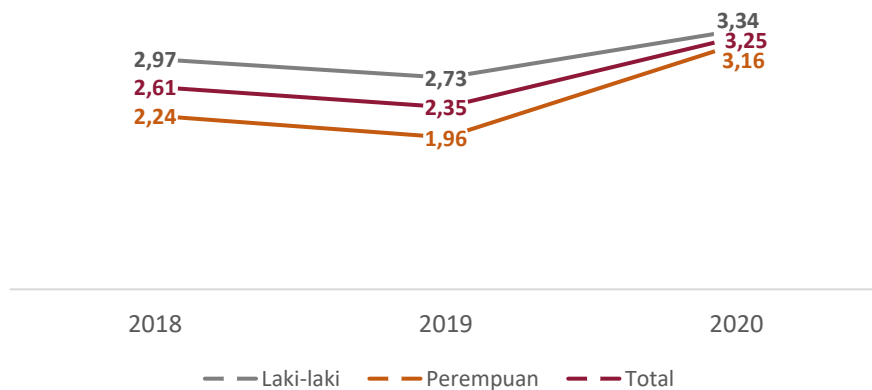


Gambar 2.65 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET, dalam %), 2010-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

7. Pekerja anak

Persentase pekerja anak menjadi salah satu indikator penting dalam indikator TPB. Hal ini dikarenakan banyak pekerja anak bekerja karena dipaksa dan bekerja di pekerjaan yang tidak layak. Sejatinya juga anak seharusnya mengenyam pendidikan ketimbang bekerja. Gambar 2.66, menunjukkan persentase pekerja anak di Indonesia tahun 2018-2020. Persentase pekerja anak turun dari 2,61% pada tahun 2018 menjadi 2,35% pada tahun 2019. Akan tetapi, COVID-19 membuat persentasenya meningkat menjadi 3,25%. Beberapa bukti anedoktal menunjukkan bahwa banyak anak yang terpaksa bekerja untuk membantu keluarganya yang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi. Berdasarkan jenis kelamin, pekerja anak laki-laki secara proporsi lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja anak perempuan.



Gambar 2.66 Persentase dari pekerja anak (10-17 tahun), 2018-2020

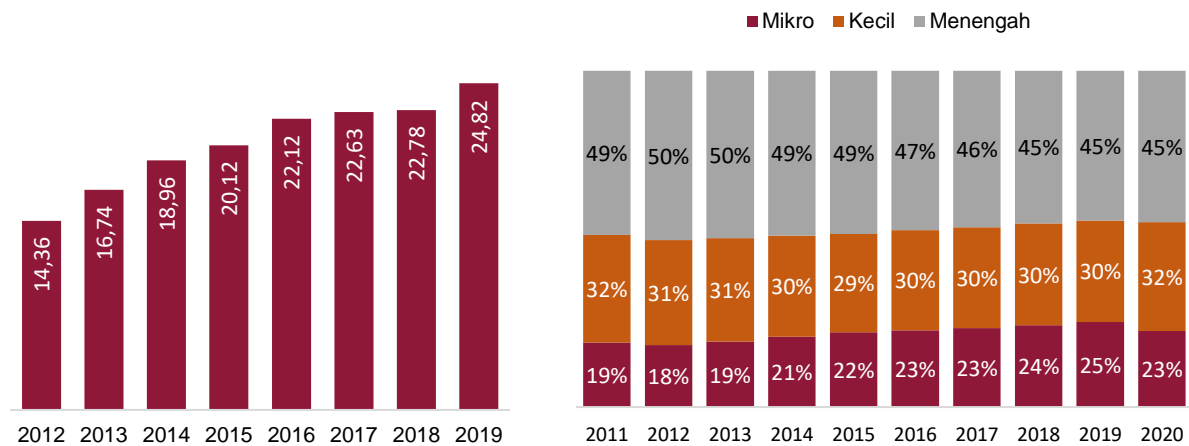
Sumber: Badan Pusat Statistik

8. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kontributor perekonomian Indonesia. Berdasarkan data BPS, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2018 didominasi oleh usaha mikro dengan jumlah sebesar 63,5 juta usaha atau sekitar 98,68% dari total usaha yang ada. Secara output, UMKM di Indonesia pada tahun 2019 berkontribusi sebesar 60% terhadap pendapatan nasional. Dari sisi tenaga kerja, UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja. Besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional tentunya harus diikuti dengan dukungan dari segala pihak. Salah satunya adalah memastikan UMKM bisa tumbuh dan terus berkembang.

Dilihat dari akses UMKM ke layanan keuangan, maka terjadi pertumbuhan persentase UMKM terhadap layanan keuangan (Gambar 2.67). Pada tahun 2012, hanya sekitar 14,36% UMKM yang memiliki akses ke layanan keuangan. Pada tahun 2019, nilainya meningkat menjadi 24,82%. Hal ini mengindikasikan bahwa satu dari empat UMKM yang ada di Indonesia memiliki akses ke layanan keuangan. Berdasarkan proporsi kredit, mayoritas UMKM yang memperoleh kredit adalah usaha menengah.

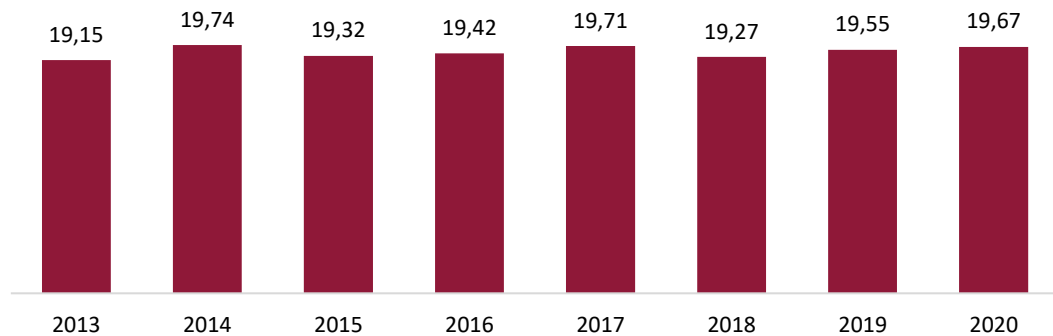
Jumlah usaha mikro yang memperoleh kredit terus mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya sebesar 19% menjadi 25% pada tahun 2019. Semakin besarnya akses kredit bagi usaha mikro akan sangat bermanfaat bagi usaha mikro untuk bisa naik kelas ke tingkat kecil dan menengah. Salah satu dampak COVID-19 terhadap proporsi kredit UMKM adalah usaha mikro mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses permodalan. Proporsi kredit ke usaha mikro turun dari 25% di tahun 2019 menjadi 23% pada tahun 2020. Akan tetapi, usaha kecil mengalami sedikit kenaikan dalam akses permodalan selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, proporsi kredit usaha kecil meningkat menjadi 32% dari 30% pada tahun 2019.



Gambar 2.67 Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan dan proporsi kredit UMKM

Sumber: Badan Pusat Statistik

Terlihat bahwa secara proporsi, kredit UMKM dibandingkan dengan total kredit perbankan belum mengalami perubahan yang signifikan (Gambar 2.68). Sepanjang tahun 2013-2020, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat namun dalam jumlah yang sangat kecil dari 19,15% di tahun 2013 menjadi 19,67% pada tahun 2020. Meskipun ada kenaikan proporsi kredit UMKM walau dalam jumlah yang sangat kecil, akan tetapi jika dibandingkan dengan total kredit perbankan, masih sedikit kredit yang diterima oleh UMKM.



Gambar 2.68 Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (%), 2013-2020

Sumber: Statistik Sistem Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

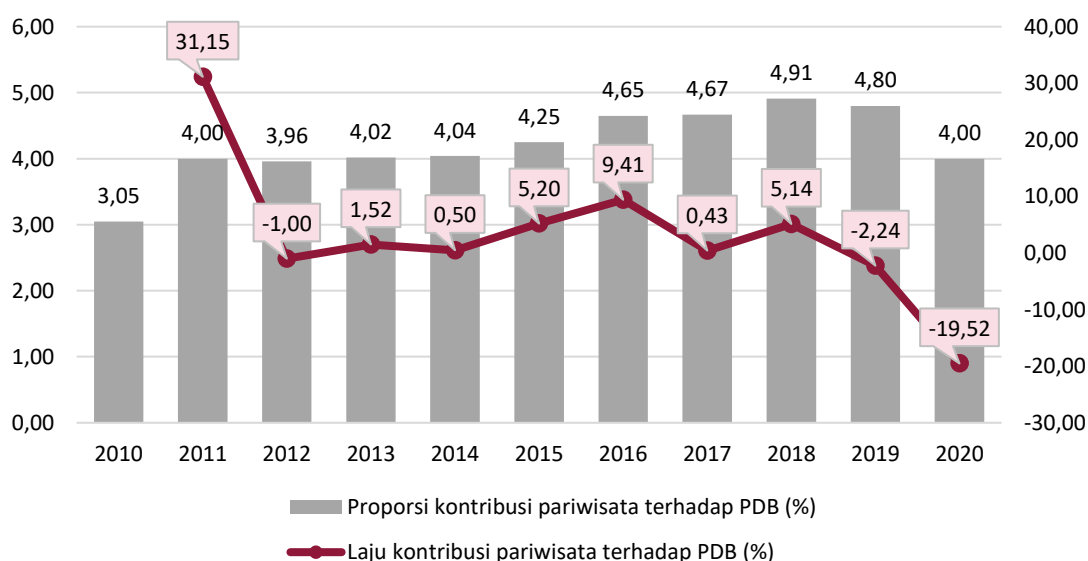
9. Peningkatan Peran Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian Indonesia baik dalam berkontribusi terhadap PDB nasional maupun menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah pekerja di sektor pariwisata mencapai 12,7 juta pekerja atau sekitar 10% dari total penduduk Indonesia yang bekerja. Selain itu, sektor pariwisata juga memiliki efek *multiplier* dan keterkaitan dengan sektor hulu dan hilir yang

cukup besar. Dalam sasaran TPB, target terkait pariwisata adalah proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB (8.9.1*), jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)), jumlah kunjungan wisatawan nusantara (8.9.1(b)), dan jumlah devisa sektor pariwisata (8.9.1(c)).

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia secara konsisten berkisar antara 3,05% pada tahun 2010 menjadi 4,8% pada tahun 2019 (Gambar 2.69). Meskipun demikian, laju pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2012-2019. Pada tahun 2019, pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB turun menjadi 2,24% dibandingkan pada tahun 2018. Nilai ini tentunya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB pada tahun 2011 sebesar 31,15%.

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang terdampak paling dalam akibat COVID-19. Berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia akan turun menjadi 4,0%. Penurunan kontribusi ini juga akan berimplikasi terhadap banyaknya pekerjaan yang hilang dari sektor pariwisata.



Gambar 2.69 Kontribusi pariwisata terhadap PDB, 2010-2020

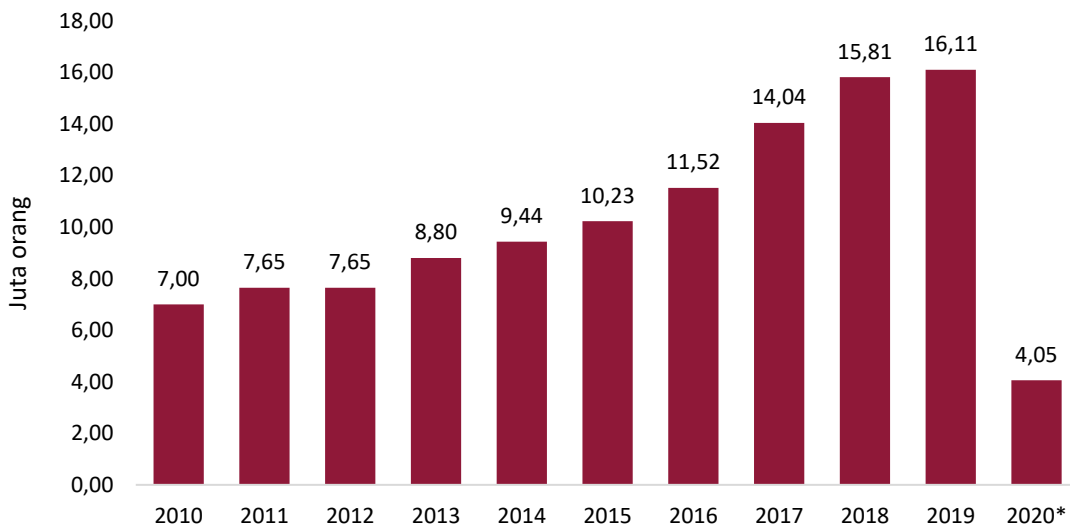
Sumber: Neraca Satelit Pariwisata Nasional

Catatan: Data tahun 2020 adalah nilai proyeksi dari Kemenparekraf

Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia terus mengalami peningkatan. Tahun 2010, ada sekitar 7 juta wisman yang berkunjung ke Indonesia. Nilainya naik lebih dari dua kali lipat menjadi 16,11 juta wisman pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan semakin banyak wisman yang datang ke Indonesia. Selain itu, data ini juga menunjukkan bahwa Indonesia sudah semakin diminati oleh wisman. Dari sisi dalam negeri, jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Indonesia mulai menunjukkan tren peningkatan. Walaupun tingkat pertumbuhannya tidak sebesar yang terjadi untuk kasus wisman, akan tetapi terjadi kenaikan jumlah perjalanan wisatawan dalam negeri dari 234,38 juta di tahun

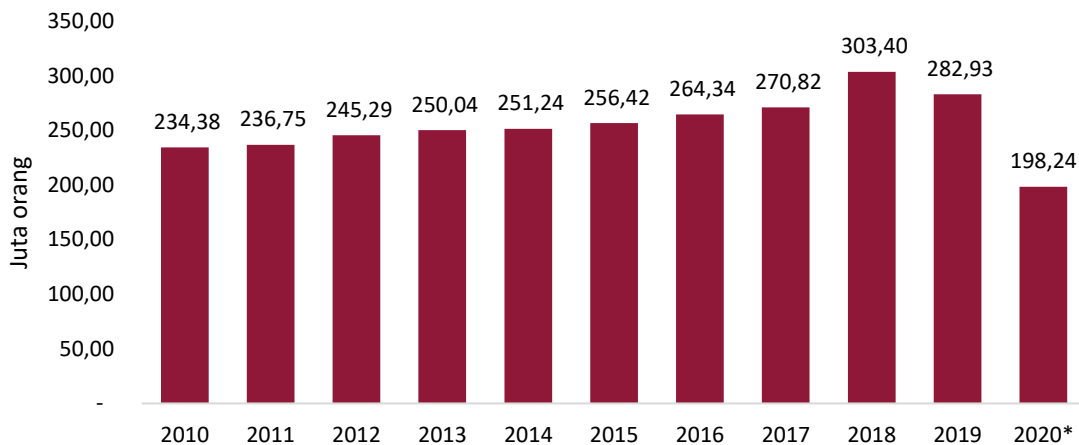
2010 menjadi 282,93 juta pada tahun 2019. Meskipun jika dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi penurunan jumlah wisatawan domestik di Indonesia.

Khusus pada tahun 2020, jumlah wisatawan asing dan domestik mengalami penurunan yang sangat signifikan. Wisman yang datang ke Indonesia turun dari 16,11 juta menjadi 4,05 juta orang. Hal yang sama juga berlaku untuk wisnus, jumlah wisatawan nusantara turun pada tahun 2020 menjadi 198,24 juta jiwa.



Gambar 2.70 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, 2010-2020

Sumber: BPS



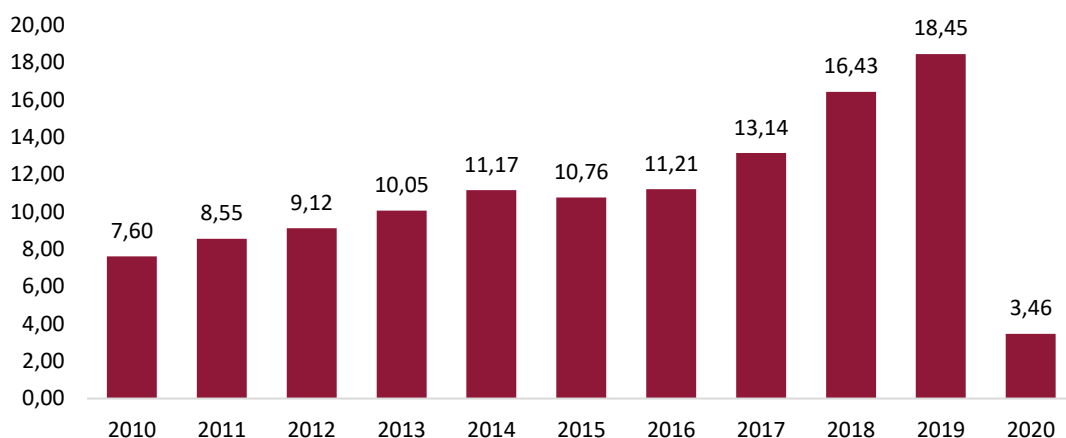
Gambar 2.71 Jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Indonesia, 2010-2020

Sumber: BPS

Catatan: * Data tahun 2020 adalah nilai proyeksi

Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara juga berimplikasi terhadap meningkatkan penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Gambar 2.72 menunjukkan penerimaan devisa dari sektor pariwisata di Indonesia meningkat dari USD 7,6 miliar pada tahun 2010 dan terus meningkat menjadi USD 18,45 miliar pada tahun 2019. Akan tetapi, pada tahun 2020, seiring dengan semakin sedikitnya wisatawan mancanegara dan restriksi mobilitas masyarakat akibat COVID-19, jumlah penerimaan devisa dari sektor pariwisata turun signifikan menjadi USD 3,46 miliar. Besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional tentunya membuat pemerintah perlu memastikan pertumbuhan dan

perkembangan sektor pariwisata ke depannya, khususnya pada masa pemulihan pasca pandemi COVID-19.



Gambar 2.72 Penerimaan devisa pariwisata, 2010-2020

Sumber: Kementerian Pariwisata

10. Kapasitas Lembaga Keuangan Domestik

Menurut studi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2020), masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses terhadap layanan keuangan karena tidak tahu cara, fungsi dan manfaatnya.⁴³ Selain masalah akses, tingkat pemahaman atau literasi keuangan penduduk Indonesia juga masih sangat rendah meskipun telah mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil dari survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2020) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia pada tahun 2019 tergolong masih rendah, dengan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 38,03% walaupun memiliki peningkatan dari tiga tahun sebelumnya yang mencapai 29,7%.

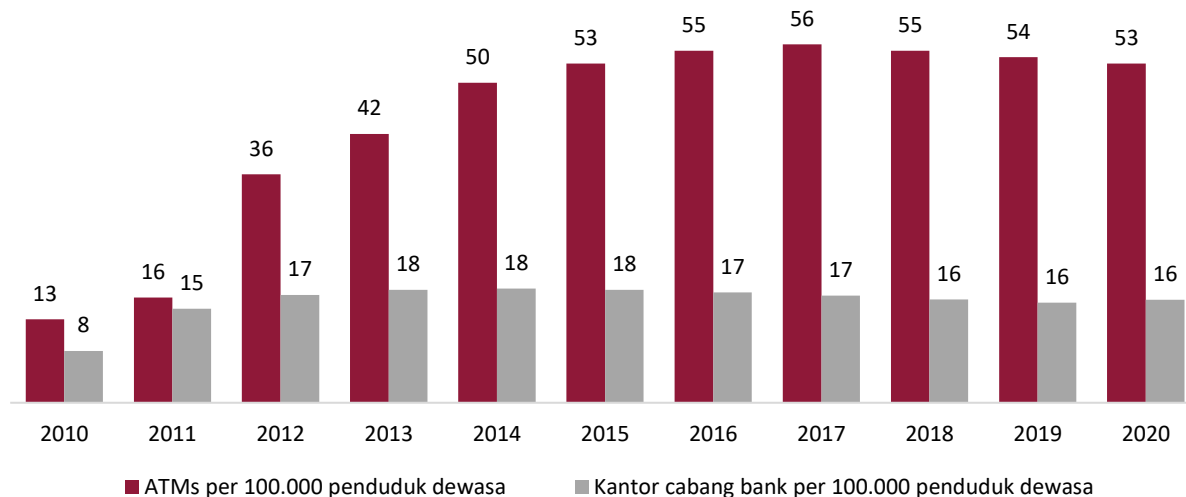
Rendahnya tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Studi yang dilakukan oleh BKF dan LPEM UI (2020) menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat akan produk keuangan yang sangat rendah, berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan, serta sangat dipengaruhi oleh pengalaman masyarakat pernah membeli atau memanfaatkan produk keuangan yang ada.⁴⁴ Sehingga hubungan antara akses dan juga literasi menjadi sangat erat kaitannya.

Gambar 2.73 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah Anjungan Tunai Mandiri/*Automated Teller Machine* (ATM) di Indonesia semenjak tahun 2010-2019. Pada tahun 2010 ada sekitar 13,04 mesin ATM per 100 ribu penduduk dewasa Indonesia. Pada tahun 2019 nilainya meningkat empat kali lipat menjadi 53,41 mesin ATM per 100 penduduk

⁴³ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20549>.

⁴⁴ <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/12/17/162755223221786-kajian-dampak-dan-kontribusi-sistem-jaminan-sosial-nasional-sjsn-terhadap-perindungan-sosial-pekerja-dan-pendalaman-pasar-keuangan>

dewasa. Sama halnya dengan jumlah kantor cabang bank yang terus mengalami penambahan dari segi jumlah. Pada tahun 2010, ada sekitar 8,11 kantor cabang bank per 100 ribu penduduk dan angkanya terus tumbuh hingga hampir dua kali lipat menjadi 16,08 kantor cabang bank per 100 ribu penduduk pada tahun 2020.



Gambar 2.73 ATM dan kantor cabang bank per 100.000 penduduk dewasa, 2010-2019

Sumber: Bank Indonesia

Pertumbuhan dari ketersediaan layanan keuangan juga diiringi dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki rekening bank. Jumlah masyarakat dewasa yang memiliki rekening bank terus mengalami kenaikan dari 20% pada tahun 2011 menjadi 49% pada tahun 2017. Tren yang sama juga terjadi jika dilihat perkembangan kepemilikan rekening bank berdasarkan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan mengalami kenaikan kepemilikan bank. Pada tahun 2017, lebih dari separuh perempuan di Indonesia (51%) memiliki rekening bank, sedangkan jumlah laki-laki yang memiliki rekening di bank atau Lembaga keuangan lain masih sebesar 46%. Meskipun jumlah kepemilikan rekening di bank telah meningkat, namun sebagian besar penduduk di Indonesia (51%) masih belum memiliki rekening bank. Hal ini relevan dengan isu terbatasnya akses ke layanan perbankan dan juga ditambah dengan minimnya literasi keuangan sebagian besar masyarakat.

2.9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

A. Pengantar

Tujuan 9 dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) difokuskan pada aspek-aspek industri, inovasi, dan infrastruktur dimana ketiga aspek tersebut saling terkait dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Pada aspek industri, sasaran-sasaran dipusatkan pada industri manufaktur dan industri berskala kecil sebagai sektor penyerap sebagian besar tenaga kerja. Aspek infrastruktur menekankan pada ketersediaan infrastruktur dalam mendukung konektivitas transportasi darat, laut, dan udara, serta

infrastruktur digital. Sementara aspek inovasi dalam Tujuan 9 menekankan pada tingkat dukungan terhadap riset dan pengembangan sains.

Tujuan 9 TPB/SDGs memiliki peran penting mengingat industrialisasi merupakan mesin utama pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terbangunnya sektor industri mendorong peningkatan produktivitas, menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, dan menaikkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mempercepat pemberantasan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan lain. Infrastruktur merupakan salah satu prasyarat industrialisasi. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh mendorong pembangunan sektor industri yang kuat. Keberadaan sektor industri yang tangguh pada akhirnya akan memicu proses peningkatan nilai tambah melalui adopsi dan inovasi sains dan teknologi.

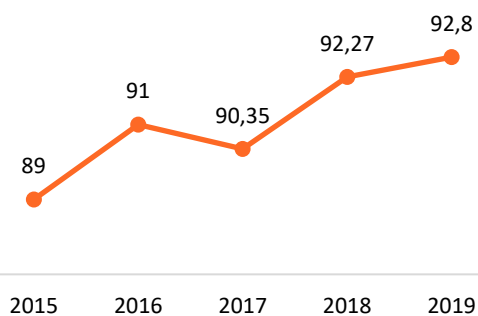
B. Status Capaian

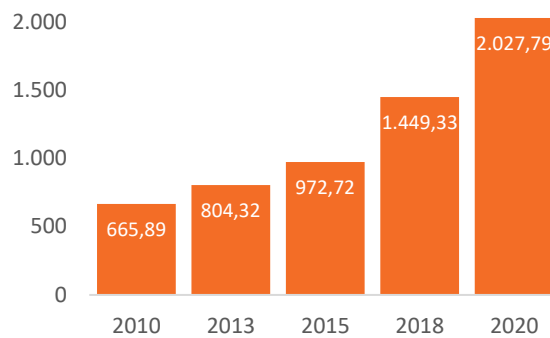
1. Pembangunan Infrastruktur untuk Konektivitas

Indikator terkait pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan andal dalam TPB meliputi populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km dari jalan yang layak (9.1.1*), kondisi mantap jalan nasional (9.1.1.(a)), panjang pembangunan jalan tol (9.1.1.(b)), panjang jalur kereta api (9.1.1.(c)), jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi (9.1.2*), jumlah bandara (9.1.2.(a)), jumlah pelabuhan penyeberangan (9.1.2.(b)), jumlah pelabuhan strategis (9.1.2.(c)), proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband* (9.c.1*).

Kondisi jalan nasional yang masuk dalam kategori mantap didefinisikan sebagai proporsi jalan nasional dalam kondisi baik atau sedang. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi mantap jalan nasional meningkat dari 89% di tahun 2015 menjadi 92,8% di tahun 2019. Tantangan peningkatan kondisi jalan nasional adalah belum memadainya kualitas prasarana jalan akibat masih belum optimalnya ketersediaan kelengkapan jalan seperti drainase untuk mencegah kerusakan jalan karena genangan air, serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah.

Selain kondisi mantap jalan nasional, panjang pembangunan jalan tol juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pergerakan orang dan distribusi barang. Secara kumulatif, panjang jalan tol yang terus mengalami kenaikan dari 665,89 km di tahun 2010 menjadi 2.027,79 km (kumulatif) di tahun 2019. Tantangan pembangunan jalan tol adalah penguatan koordinasi perencanaan pembangunan simpul transportasi dan akses jalan serta pengembangan inovasi pendanaan infrastruktur seperti KPBU, dana jangka panjang, dan dana bergulir.

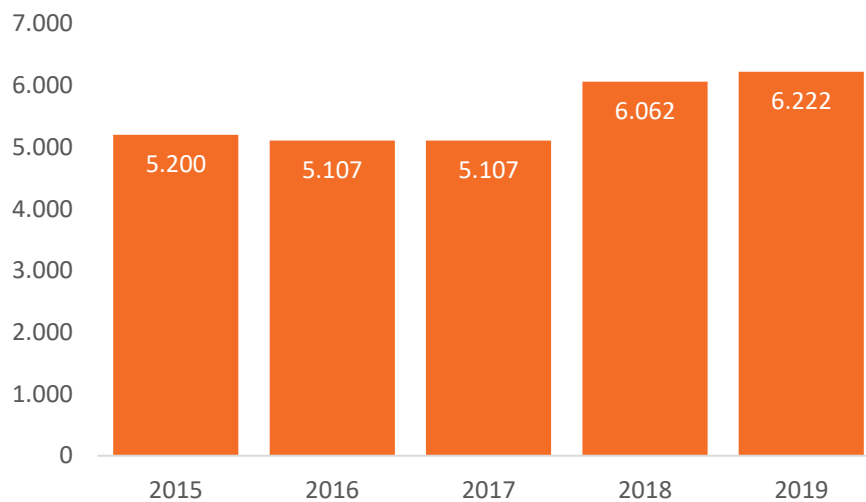




Gambar 2.74 Kondisi mantap jalan nasional (%) dan panjang pembangunan jalan tol (km)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

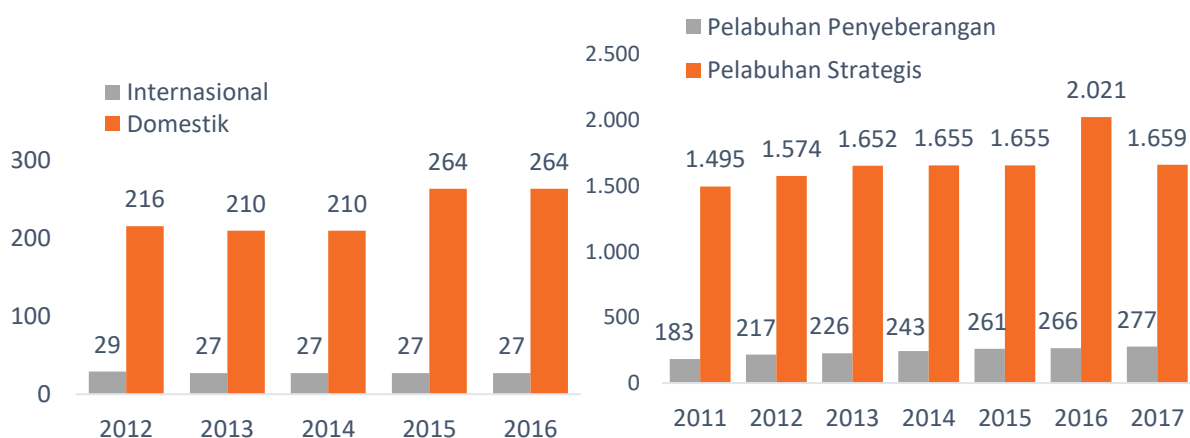
Selain jalan, jaringan kereta api juga merupakan infrastruktur transportasi darat yang penting dalam menunjang pergerakan orang dan barang secara masal. Transportasi berbasis rel mampu menyediakan alternatif moda transportasi yang cepat dan aman. Selain itu, tersedianya jaringan rel kereta api juga berkontribusi dalam mengurangi beban jalan dan polusi udara. Panjang jalur kereta api aktif terus mengalami kenaikan dari 5.532 km pada tahun 2015 menjadi 6.164 km pada tahun 2019. Tantangan pembangunan jaringan kereta api di Indonesia adalah masih rendahnya peran kereta api dalam menunjang pengangkutan barang dan pergerakan penumpang antarkota, belum optimalnya peran kereta api dalam pengangkutan peti kemas, serta waktu tempuh kereta api yang masih belum kompetitif dengan angkutan udara maupun jalan tol.



Gambar 2.75 Panjang Rel Kereta Api yang Beroperasi (km)

Sumber: Statistik Perhubungan Buku I Kementerian Perhubungan (2020)

Untuk mengukur capaian pembangunan di sektor transportasi udara, jumlah bandara merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan. Jumlah bandara mengukur aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Transportasi udara juga menjadi sarana logistik yang penting di daerah dengan kondisi geografis khusus seperti kepulauan dan pegunungan, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Sepanjang periode 2014-2019, terdapat 15 bandara baru sehingga total jumlah bandara naik dari 237 pada tahun 2014 menjadi 252 pada tahun 2019. Tantangan utama pengembangan bandara adalah belum memadainya kapasitas bandara dan kapasitas angkut dalam mendukung pengembangan wilayah, khususnya pada bandara-bandara utama. Kapasitas bandara dari sisi jumlah landasan dan terminal masih belum optimal dalam memenuhi volume angkutan udara nasional yang tumbuh sekitar 9% per tahun (periode 2015-2017). Selain itu, prasarana lapangan terbang kecil (*airstrip*) juga masih belum memadai dalam menunjang penerbangan perintis yang melayani angkutan manusia dan barang di wilayah 3T.



Gambar 2.76 Jumlah Bandara dan Pelabuhan






Sumber: Statistik Perhubungan Buku I Kementerian Perhubungan hlm. 1-52 dan BPS (2020)

Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga transportasi laut memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan konektivitas antarwilayah yang tangguh. Terdapat dua indikator yang dijadikan acuan dalam mengukur capaian TPB di bidang transportasi laut, yaitu jumlah pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan strategis. Jumlah pelabuhan penyeberangan pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketersediaan sarana penunjang mobilitas dalam negeri sedangkan pelabuhan strategis digunakan sebagai proksi untuk mengukur daya saing produsen di tingkat internasional. Jumlah pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan strategis di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 terdapat 261 pelabuhan penyeberangan dan 1.655 pelabuhan strategis. Pada tahun 2019, jumlah tersebut naik menjadi 286 pelabuhan penyeberangan dan 1.659 pelabuhan strategis.

Di era digital saat ini, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan akses universal dan keterjangkauan internet juga menjadi faktor penting bagi Indonesia. Indikator yang digunakan adalah melihat proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*. Definisi dari *mobile broadband* adalah akses yang berkecepatan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*) dan jaringan 4G adalah jaringan seluler yang memenuhi standar generasi keempat untuk mentransmisi nirkabel data seluler. Perhitungan ini ditujukan untuk melihat keterjangkauan jumlah penduduk yang mendapatkan akses atau terlayani fasilitas *mobile broadband* serta sebagai sarana untuk mendorong pengembangan dan kemampuan masyarakat menggunakan TIK.

Akses *mobile broadband* dengan jaringan 4G di Indonesia saat ini masih terus diperluas sejak diluncurkan pada Desember tahun 2015. Secara geografis, di tahun 2020 ketersediaan jaringan 4G belum mencapai 50 persen dari keseluruhan wilayah daratan Indonesia. Adapun berdasarkan populasi di suatu wilayah, baik jaringan 2G, 3G dan 4G sudah mencakup lebih dari 90 persen populasi di Indonesia. Fasilitas *mobile broadband* yang semakin luas menjangkau masyarakat akan mampu memberikan dampak yang besar dengan didukung edukasi masyarakat untuk dapat mengoptimalkan penggunaannya.

Tabel 2.22 Rangkuman indikator terkait infrastruktur

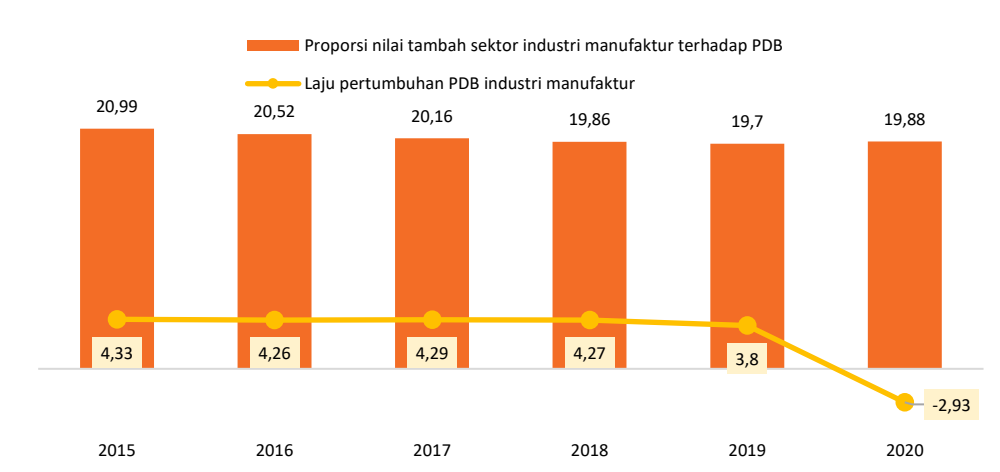
Indikator TPB/SDGs	Capaian	
	2015	2020
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional 	89%	92%
9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol	1.461 km	481 km penambahan
9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api 	6.164 km	6.188 km
9.1.2.(a) Jumlah bandara 	15 (291)	7 penambahan (251)
9.1.2.(b) Jumlah pelabuhan penyeberangan 	24 (261)	6 penambahan (31 penambahan)
9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis	24 (1655)	
9.c.1* Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i> 	127,3%	

2. Pertumbuhan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan

Sektor industri manufaktur merupakan salah satu sektor strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor industri manufaktur mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga perannya dalam peningkatan pendapatan rumah tangga dan penanggulangan kemiskinan menjadi sangat krusial. Indikator terkait pengembangan industri yang inklusif dan berkelanjutan dalam TPB meliputi proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita (9.2.1*), laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (9.2.1.(a)), proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur (9.2.1.(b)), proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri (9.3.1*), proporsi industri kecil dengan pinjaman dan kredit (9.3.2*), proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah (9.b.1), dan kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (9.b.1.(a)).

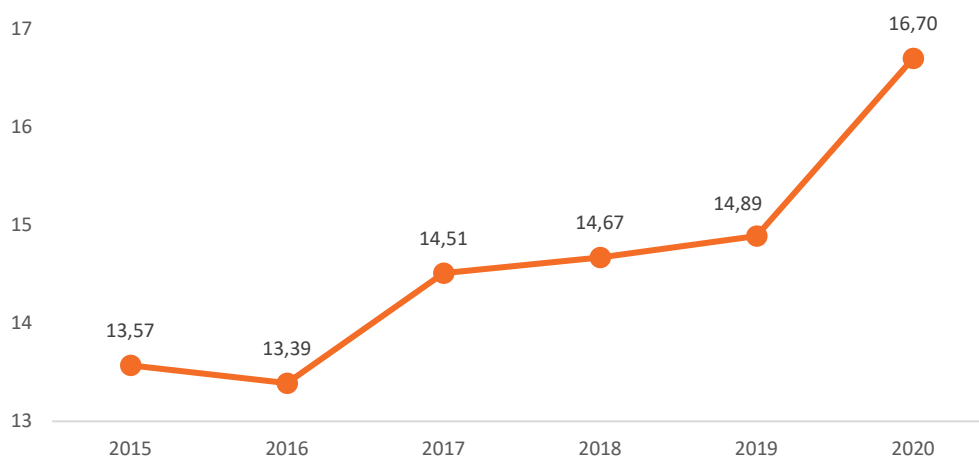
Dua indikator pertama untuk mengetahui kontribusi output dari sektor industri manufaktur terhadap perekonomian nasional adalah proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. Mengacu pada dua indikator tersebut, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian cenderung mengalami penurunan. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB turun dari 20,99% pada tahun 2015 menjadi 19,70% pada tahun 2019. Sementara jika dilihat per kapita, proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur turun dari Rp9,42 juta per tahun pada tahun 2015 menjadi Rp8,28 juta per tahun pada tahun 2018.

Indikator selanjutnya adalah laju pertumbuhan PDB industri manufaktur yang berguna untuk mengetahui bagaimana perkembangan di sektor tersebut dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2015-2018, laju pertumbuhan PDB industri manufaktur cenderung mengalami penurunan dari 4,33 persen pada tahun 2015 menjadi 3,8 persen pada tahun 2019. Akan tetapi, dari sisi penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur cenderung mengalami tren yang naik di periode yang sama. Proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur meningkat dari 13,53 persen pada tahun 2015 menjadi 14,89 persen pada tahun 2019.



Gambar 2.77 Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB (%) dan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)



Gambar 2.78 Proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Sektor industri sebagai motor pembangunan juga memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs lain. Selain kontribusinya terhadap perekonomian secara makro, peran sektor industri juga perlu diarahkan pada upaya mitigasi dampak perubahan iklim. Selain dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah terkait pengendalian perubahan iklim dalam kerangka *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pengembangan sektor industri yang berkelanjutan juga membantu pemerintah dalam pencapaian TPB/SDGs Tujuan 13 mengenai lingkungan. Sinergi antara pencapaian Tujuan 9 tentang industri dan Tujuan 13 tentang lingkungan sangat penting mengingat dampak perubahan iklim dapat mengancam tidak saja lingkungan hidup manusia tetapi juga kinerja sektor industri dalam menopang perekonomian secara luas. Sebaliknya, sektor industri selama ini juga merupakan salah satu kontributor terbesar emisi gas rumah kaca yang mengakselerasi perubahan iklim. Kedepan, pengembangan sektor industri wajib mempertimbangkan faktor lingkungan sehingga tercapai pembangunan industri yang berkelanjutan.

Tentu pencapaian ini mengalami perubahan pasca pandemi. Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar pada pertumbuhan industri dikarenakan terhentinya berbagai aktifitas ekonomi. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB mengalami kenaikan menjadi 19,88 persen pada tahun 2020; dan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur mengalami penurunan menjadi -2,93 persen pada akhir tahun 2020. Demikian pula halnya dengan proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur yang mengalami penurunan menjadi 13,61 persen pada tahun 2020.

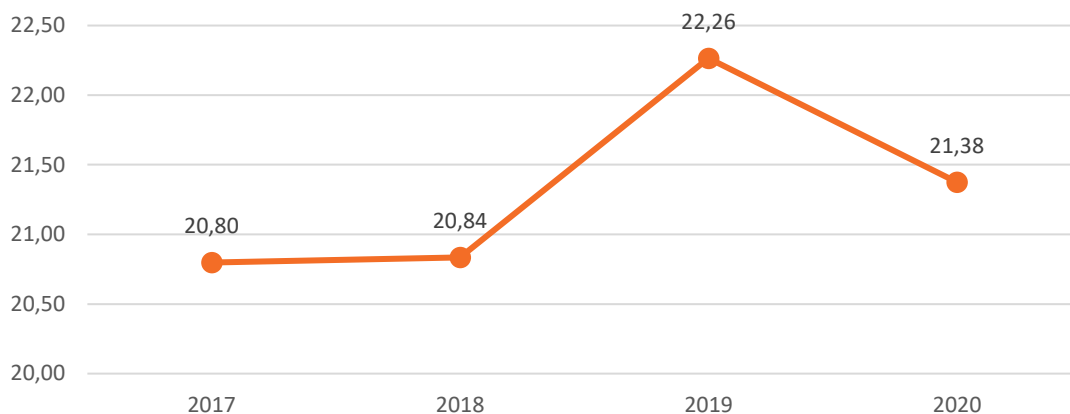
Industri kecil—didefinisikan sebagai usaha dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang—juga memiliki peran yang cukup penting dalam penciptaan nilai tambah sektor industri manufaktur. Indikator proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri manufaktur digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi usaha berskala kecil tersebut. Pada tahun 2015 kontribusi industri kecil terhadap penciptaan nilai tambah sektor industri adalah sebesar 10,43 persen dan meningkat menjadi 18,5 persen pada tahun 2019.

Industri kecil umumnya menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pendanaan usaha. Untuk itu, indikator proporsi industri kecil yang memiliki pinjaman atau kredit digunakan sebagai proksi untuk mengukur kemudahan industri kecil dalam mengakses sumber pendanaan. Di sisi lain, indikator ini juga mencerminkan cakupan layanan sektor jasa keuangan terhadap usaha berskala kecil. Proporsi industri kecil dengan pinjaman/kredit cenderung mengalami tren penurunan dari 10 persen pada tahun 2015 menjadi 7,78 persen pada tahun 2019.

Indonesia sebagai negara berkembang juga memperhatikan pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi untuk diversifikasi industri dan penambahan nilai komoditas. Indikator yang digunakan adalah dengan melihat kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi. Industri berteknologi menengah dan tinggi secara definisi adalah industri-industri dengan klasifikasi ISIC Rev.4 20, 21, 252, 26, 27, 28, 29, 30 (kecuali 301) dan 325. Selain itu, teknologi tinggi tidak hanya dinilai dari produk, namun juga proses dalam menghasilkan produk tersebut yang telah menggunakan teknologi tinggi. Mayoritas produk yang di ekspor dari Indonesia merupakan barang mentah dan barang setengah jadi. Hingga tahun 2016, kondisi ekspor Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand dan China masih jauh tertinggal dalam proporsi ekspor produk teknologi tinggi. Adapun persentasenya justru semakin menurun sejak tahun 2009 hingga 2016 (RPJMN 2020-2024).

Pada tahun 2020, menurut data dari Kementerian Perdagangan kontribusi dari sepuluh produk utama ekspor nonmigas Indonesia mencapai 59.8 persen dimana tiga (3) produknya merupakan barang industri dan industri berteknologi tinggi yaitu besi baja, kendaraan bermotor dan suku cadangnya serta perhiasan. Komoditas besi baja menempati urutan ke-3 pada ekspor nonmigas Indonesia dengan kontribusi sebesar 7 persen atau senilai USD 10,85 miliar dengan pertumbuhan ekspor mencapai 46.84 persen (YoY). Produk kendaraan bermotor dan suku cadangnya berkontribusi sebesar 4.3 persen dan perhiasan memiliki kontribusi sebesar 5.3 persen atau senilai USD 8.2 miliar dengan pertumbuhan 24,21 persen (YoY). Untuk terus mengoptimalkan dan meningkatkan kontribusi ekspor barang berteknologi

tinggi, perjanjian perdagangan sangatlah penting bagi Indonesia untuk memperluas pasar selain itu kesiapan ekspor yang optimal dari dalam negeri juga dibutuhkan baik dari sisi strategi, promosi, produksi dan kerjasama. Sejak 2017, proporsi ekspor produk industri berteknologi tinggi mengalami tren peningkatan meskipun cenderung fluktuatif. Di tahun 2017, proporsi EPIBT nasional sebesar 20,80% dan naik menjadi 22,26% di tahun 2019. Namun di tahun 2020, proporsi tersebut turun ke 21,38%.



Gambar 2.79 Proporsi ekspor produk industri berteknologi tinggi (%)

Sumber: BPS

Tabel 2.23 Rangkuman indikator terkait industri

Indikator TPB/SDGs	Capaian	
	2015	2019
9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	20,9%	19,7%
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	4,3%	3,8%
9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	13,53%	14,91%
9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	10,43%	18,50%
9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman dan kredit	10,0%	7,78%
9.b.1.(a) Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	20,80% (2017)	21,38%

3. Inovasi untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Peran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tidak dapat dilepaskan dalam mendorong inovasi untuk mendukung pengembangan industri dan pembangunan infrastruktur. Per tahun 2019 kapasitas adopsi iptek dan penciptaan inovasi Indonesia hanya mampu menduduki peringkat 85 dari 129 negara dengan skor *Global Innovation Index (GII)* 29.72 dari skala 0-100. Padahal, Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan banyak inovasi yang berdaya guna. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat riset ilmiah.

Riset sendiri terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu penelitian dan pengembangan. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah. Sedangkan pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan yang telah terbukti kebenarannya dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam konteks ini, penting untuk diperhatikan bahwa dalam TPB/SDGs Tujuan 9 inovasi diarahkan untuk mampu mendorong tumbuhnya inovasi yang berkontribusi terhadap penurunan emisi, mendorong munculnya teknologi ramah lingkungan, dan memicu adanya program-program berbasis lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menginisiasi sistem pendukung untuk menghadirkan inovasi di bidang lingkungan seperti Sistem Inventori Gas Rumah Kaca (GRK) dan Program Kampung Iklim (Proklam).

Indikator-indikator terkait peningkatan inovasi dan penerapan iptek meliputi rasio emisi CO₂/gas rumah kaca terhadap nilai tambah sektor industri manufaktur (9.4.1*), penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri (9.4.1.(a)), intensitas emisi sektor industri (9.4.1.(b)), proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB (9.5.1*), jumlah SDM bidang iptek pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per 1 juta penduduk (9.5.2*), proporsi SDM iptek bergelar S3/Doktor (9.5.2.(a)).

Indikator pertama adalah proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. Pada tahun 2019, anggaran riset pemerintah hanya sekitar 0.25 persen dari PDB Indonesia. Dana riset yang dialokasikan masih perlu dioptimalkan lagi untuk dapat benar-benar memberikan manfaat dalam mengatasi sebuah permasalahan dibandingkan dengan habis untuk biaya administratif. Selain itu perangkat infrastruktur penelitian dan SDM juga menjadi tantangan dalam mengoptimalkan manfaat dari anggaran riset yang dimiliki Indonesia.

Untuk menggali lebih dalam terkait ilmu pengetahuan, teknologi dan riset yang dapat menghasilkan berbagai inovasi, jumlah SDM yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk juga perlu diberikan perhatian khusus. Berdasarkan data tahun 2018, jumlah SDM Iptek di Indonesia berjumlah 301.885 yang terdiri dari peneliti, perekayasa dan dosen.

Dari jumlah SDM Iptek tersebut, hanya sekitar 14 persen yang memiliki kualifikasi S3. Angka dari ketiga indikator untuk memperkuat riset ilmiah di Indonesia menunjukkan angka yang relatif kecil. Proporsi anggaran penelitian di Indonesia termasuk yang terkecil di wilayah ASEAN padahal hal ini sangat dibutuhkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas hasil penelitian yang berupa inovasi seperti yang dilakukan oleh banyak negara-negara maju. Selain itu, lemahnya respon industri untuk memanfaatkan hasil riset di dalam negeri seringkali membuat turunnya semangat dari para peneliti sehingga dibutuhkan juga peran dari pihak swasta untuk membangkitkan semangat riset dan menjadi penghubung bagi peneliti dan industri.

Tabel 2.24 Rangkuman indikator terkait Inovasi

Indikator TPB/SDGs	Capaian	
	2015	2019
9.4.1* Rasio emisi CO ₂ /gas rumah kaca terhadap nilai tambah industri manufaktur		
9.4.2.(a) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri		23,46%
9.4.1.(b) Intensitas emisi sektor industri		
9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	na	0,25%
9.5.2* Jumlah SDM Iptek pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per 1 juta penduduk		
9.5.2.(a) Proporsi SDM Iptek dengan gelar S3 (Doktor)	na	13,73%

2.10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

1. Pengurangan Kesenjangan Pendapatan dan Kewilayahan

Dalam mengatasi kesenjangan antarwilayah, khususnya dalam mengurangi jumlah daerah (kabupaten) dan desa tertinggal, Indonesia fokus pada pembangunan kewilayahan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Rangkaian kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik dibangkitkan di berbagai titik seantero negeri. Pembangunan ini menjangkau pula ribuan desa untuk membuat desa tertinggal menjadi desa mandiri, dan desa mandiri menjadi lebih maju lagi.

Dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD), yang sekarang menjadi Indeks Desa, tercatat desa tertinggal sejumlah 20.432 desa pada tahun 2014, lalu berkurang menjadi 13.232 desa pada tahun 2019. Di luar ini terdapat desa dalam kategori tidak tertinggal yang tumbuh dari 53.661 desa pada 2014 menjadi 60.438 desa pada tahun 2018. Kemajuan ini sejalan dengan alokasi Dana Desa yang jumlahnya semakin besar.

Saat ini RKP 2022 telah menyebut 'Indeks Desa' sebagai salah indikator kemajuan pembangunan pedesaan. Dalam RKP itu disebut bahwa tahun 2019 nilai Indeks Desa tercatat sebesar 56,52, sedangkan capaian tahun 2020 sebesar 58,71. Tahun 2021, 2022, dan 2024 Indeks Desa masing-masing ditargetkan mencapai nilai 59,65, 61,00, dan 62,05.

Tabel 2.25 Desa dan daerah tertinggal

Indikator TPB/SDGs	2014	2015	2018	2019	2020
10.1.1.(b) Jumlah desa tertinggal					
● BPS*	20.432		13.232		
● RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022***				19.152	
10.1.1.(c) Jumlah desa mandiri					
● BPS****	2.894		5.559		
● RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022***				1.144	
10.1.1.(d) Jumlah daerah tertinggal					
● Perpres 131/2015 dan 63/2020		122			62
– Jawa		6			0
– Sumatera		13			7
– Kalimantan		12			0
– Sulawesi		18			3
– Bali dan Nusa Tenggara		26			14
– Kepulauan Maluku		14			8
– Papua		33			30

Sumber: *BPS (3 Oktober 2021); **Indeks Desa Membangun 2015; ***RKP 2022; ****BPS (3 Oktober 2021)

Selain desa tertinggal, perhatian pembangunan diarahkan pula pada dimensi ketertinggalan wilayah yang lebih luas, yakni kabupaten tertinggal atau ‘daerah tertinggal’. Sejauh ini status dan jumlah daerah tertinggal secara khusus ditetapkan dalam dua Peraturan Presiden (Perpres). Pertama, Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Kedua, Perpres No. 62 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.⁴⁵ Dalam dua peraturan presiden itu dicatat jumlah daerah tertinggal telah menyusut separuh. Tahun 2015 daerah tertinggal tercatat sejumlah 122, sedangkan lima tahun kemudian jumlah itu menjadi 62 (Tabel 2.25). Di dalam kedua perpres itu, hanya sedikit kabupaten-kabupaten di Jawa dan Kalimantan yang masuk dalam kategori tertinggal. Tahun 2015 hanya enam kabupaten di Jawa dan 12 kabupaten di Kalimantan yang berada dalam kategori itu. Pada tahun 2020 tidak ada lagi kabupaten di Jawa dan Kalimantan yang berada dalam daftar itu. Di pulau-pulau lain, kecuali di Papua, jumlah kabupaten tertinggal susut hampir separuhnya. Di Papua dalam bentang lima tahun antara 2015 dan 2020, hanya tiga kabupaten yang dapat dikeluarkan dari daftar itu.

Lebih jauh lagi, penduduk miskin di daerah tertinggal bergerak mengikuti huruf “V” dalam tiga tahun belakangan antara 2018 dan 2020. Data BPS⁴⁶ menunjukkan tingkat

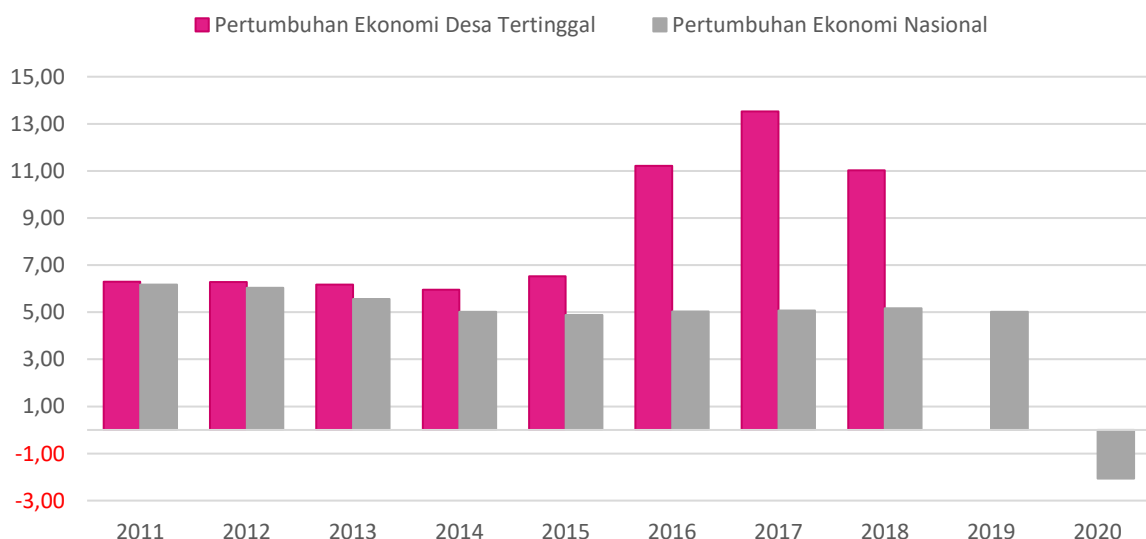
⁴⁵ Pada tingkat yang lebih teknis, status daerah tertinggal ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

⁴⁶ BPS (https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1238/sdgs_1/1) dirujuk 3 Oktober 2021.

kemiskinan di daerah tertinggal sempat sedikit membaik, tetapi pandemi telah membalikkan keadaan menuju situasi yang lebih berat. Antara tiga tahun itu, tingkat kemiskinan di daerah tertinggal berturut-turut 20,49 (2018), 20,10 (2019), dan 26,43 persen (2020).

Kemiskinan di daerah tertinggal menjadi isu yang serius karena keadaan *double burden* yang dihadapi oleh kelompok miskin di wilayah ini. Beban pertama berasal dari keterbatasan kapasitas diri perorangan dalam keadaan miskin; sedangkan beban kedua bersumber dari keterbatasan kapasitas lingkungan naungannya sebagai daerah tertinggal. Beban yang pertama menghambat masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial, sedangkan beban yang kedua menghalangi masyarakat miskin untuk mendapatkan berbagai layanan dan fasilitas publik yang tersedia. Gambaran ini sekaligus menunjukkan dua agenda pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal yang saling terkait, yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dan mengentaskan daerah tertinggal.

Sejauh ini pertumbuhan daerah tertinggal bergerak akseleratif dan selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional (Gambar 2.80). Pada paruh pertama dekade terakhir ini, pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal hanya sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Memasuki tiga tahun pertama paruh kedua, akselerasi terjadi. Saat ekonomi nasional bertumbuh di kisaran 6% pada tiga tahun pertama paruh kedua, daerah tertinggal tumbuh 12%. Jika *trend* ini dapat dilanjutkan konvergensi pertumbuhan amat mungkin terjadi, yakni daerah tertinggal dapat mengejar dan menyusul ketertinggalannya (*catching-up*). Efektivitas kebijakan ‘membangun dari pinggiran’ menemukan justifikasi empirisnya (lihat catatan tentang gambar).



Gambar 2.80 Pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal dan nasional

Sumber: BPS

Catatan: Data pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal hilang dari situs BPS 3 Oktober 2021

Untuk mengurangi kesenjangan, selain upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial, diperlukan juga upaya peningkatan nilai tambah ekonomi. Hal ini terkait dengan stabilitas sistem keuangan sektor perbankan. Sistem keuangan yang stabil dapat

menjaga jantung perekonomian—sektor perbankan dan keuangan—dalam keadaan yang terkendali. Dalam konteks ini, perbankan yang sehat menjadi kuncinya.

Dalam TPB/SDGs indikator 10.5.1.(a) Indikator Kesehatan Perbankan menangkap hal ini. Indikator ini dibagi ke dalam tiga sub-indikator. Pertama, nisbah jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (*regulatory tier 1 capital to risk-weighted assets*) untuk mengukur tingkat ketahanan perbankan dalam neraca. Kedua, nisbah pinjaman bermasalah dengan total pinjaman (*nonperforming loans to total gross loans*) sebagai proksi kualitas aset perbankan yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah terkait kualitas aset dalam portofolio kredit. Ketiga, nisbah pendapatan bersih dengan nilai aset (*return on assets*) yang tidak lain adalah profitabilitas bank yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam mengelola asetnya.

Meski pandemi terjadi, *regulatory tier 1 capital to risk-weighted assets* atau lazim dikenal sebagai CAR (*capital adequacy ratio*) bergerak di sekitar 22% mengikuti kecenderungan historisnya. Sebagai rujukan, batas yang ditetapkan dalam Basel III (*Basel Committee on Banking Supervision*, BCBS) adalah 10,5%, sedangkan tetapan Bank Indonesia adalah 8-11% yang bergerak sejalan dengan tingkat atau profil risiko. Namun demikian, kecenderungan capaian angka CAR di atas nilai rujukan ini perlu disikapi hati-hati, mengingat hal ini dapat saja menunjukkan bahwa perbankan belum mampu mengoptimalisasi modal yang ada. Seajar itu, keadaan ini juga memperlihatkan akumulasi laba bersih tidak terkonversi menjadi investasi dengan kecepatan yang sama.

Keadaan yang berbeda terjadi pada dua sub-indikator lainnya. COVID-19 telah meningkatkan *nonperforming loans to total gross loans* dan menurunkan *return on assets*, masing-masing dari 2,43% menjadi 2,75% dan 2,48% menjadi 1,50%. Peningkatan *nonperforming loans to total gross loans* akan mempersulit perbankan untuk menjalankan fungsinya dalam menyalurkan pinjaman di masa berikutnya. Sementara itu, penurunan *return on assets* memperlihatkan penurunan kemampuan perbankan untuk memanfaatkan keuntungan masa lampau bagi keuntungan pada masa selanjutnya (Tabel 2.26). Kegiatan dunia usaha dan perekonomian yang tertahan sepanjang masa pandemi telah memukul sektor riil sedemikian serius. Sektor keuangan dan perbankan, baik langsung ataupun tak langsung, menerima imbasnya.

Tabel 2.26 Indikator kesehatan perbankan

Sub-Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Nisbah jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (<i>regulatory tier 1 capital to risk-weighted assets</i>)	22,22%	22,65%	21,20%	21,77%	22,16%
Nisbah pinjaman bermasalah dengan total pinjaman (<i>nonperforming loans to total gross loans</i>)	2,90%	2,56%	2,29%	2,43%	2,75%
Nisbah pendapatan bersih dengan nilai aset (<i>return on assets</i>)	2,12%	2,41%	2,51%	2,48%	1,50%

Sumber: IFS-IMS, diakses 3 Februari 2020.

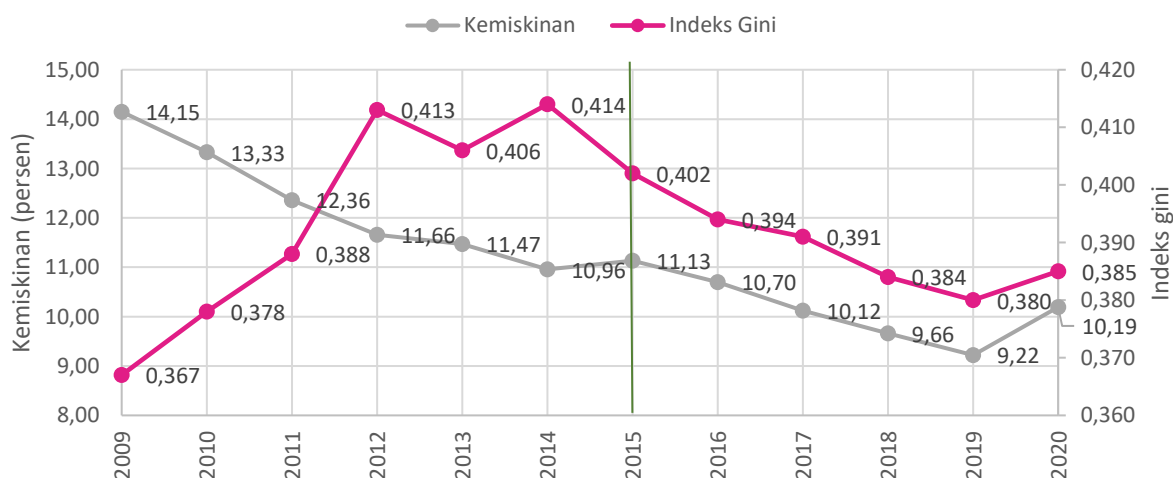
2. Kebijakan Fiskal dan Sosial Untuk Kesetaraan

Kesenjangan dan kemiskinan masih merupakan agenda pembangunan yang penting, kendati Indonesia kini telah berada dalam kategori negara dengan pendapatan menengah. Beragam kebijakan dan tindakan telah diupayakan dalam pengurangan kesenjangan dan kemiskinan, khususnya dalam satu dekade terakhir.

Dalam satu dekade terakhir ini kesenjangan dan kemiskinan membentuk dua pola perilaku. Pertama, dinamika keduanya bertentangan, yakni kesenjangan—melalui Rasio Gini—bergerak dalam arah yang berlawanan dengan kemiskinan. Ini tergambar pada periode 2009-2014, ketika Rasio Gini bergerak naik dari 0,367 menuju 0,414, sedangkan tingkat kemiskinan, P_0 , turun secara konsisten dari 14,15% ke 10,96% (Gambar 2.81). Rasio Gini tahun 2014 bahkan menjadi indeks tertinggi dalam perjalanan sejarah pembangunan Indonesia. Dalam periode 2019-2014 itu, usaha-usaha keras menanggulangi kemiskinan tak serta merta terkonversi menjadi pengurangan ketimpangan.

Kedua, kesenjangan dan kemiskinan bergerak searah, yakni kesenjangan menurun ketika kemiskinan menurun. Ini terjadi pada periode 2015-2019—termasuk pada masa pandemi tatkala kesenjangan dan kemiskinan sama-sama meningkat (2020). Untuk menggambarkan besarnya, pada tahun 2015 ketika tingkat kemiskinan mencapai 11,13%, Rasio Gini tercatat sebesar 0,402. Ketika kemiskinan berhasil ditekan hingga satu digit pada 2018 dan 2019, yakni berturut-turut 9,66% dan 9,22%, Rasio Gini juga menyusut ke tingkat 0,384 dan 0,380. Pada saat COVID-19 mengembalikan tingkat kemiskinan untuk kembali ke tingkat dua digit, 10,19%, melalui Rasio Gini, ketimpangan juga meningkat menjadi 0,385.

Seluruh upaya kebijakan-kebijakan *targeting* telah berhasil membalik keadaan, sehingga berbagai upaya menanggulangi kemiskinan sekaligus juga bermakna sama dengan upaya mengurangi ketimpangan. Dalam keadaan yang sebaliknya, ketidakberhasilan dalam mengatasi kemiskinan berarti pula keketidakterhasilan dalam menanggulangi kesenjangan. Pola pergerakan searah yang cenderung baru ini menyiratkan bahwa pengurangan kemiskinan dan ketimpangan telah menjadi satu paket agenda, *two sides of the same coin*.



Gambar 2.81 Kemiskinan (P_0) dan indeks gini

Sumber: BPS diakses 3 Oktober 2021

Hingga saat ini, baik tingkat kemiskinan maupun ketimpangan masih tergolong tinggi, apalagi ketika ini diperburuk oleh pandemi COVID-19. Tingkat kemiskinan sekitar 10%, misalnya, mencakup hampir 28 juta penduduk.⁴⁷ Sebagai ilustrasi pembandingan, jumlah penduduk di keseluruhan pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua masih lebih kecil, yakni 27 juta jiwa. Pada saat yang sama, meski telah turun dari 0,414 di tahun 2014, Rasio Gini sebesar 0,385 di tahun 2020 secara kualitatif tidak mencerminkan distribusi sumber daya yang merata.

Dalam hal kemiskinan, paruh kedua dalam dekade itu ditandai oleh perlambatan dalam penurunan tahunan. Sebagai ilustrasi, laju penurunan kemiskinan pada paruh pertama terhitung sekitar -0,64 poin, sedangkan pada paruh kedua laju penurunannya per tahunnya hanya -0,13 poin. Kalaupun data pada saat pandemi COVID-19 tidak diikutsertakan pada perhitungan, laju penurunannya masih sekitar separuhnya, yakni -0,35. Pada paruh pertama, kecepatan penurunan bahkan pernah mencapai angka tertinggi, yakni -0,97 poin. Sementara itu, pada paruh kedua bahkan sempat terjadi dua kali kenaikan tingkat kemiskinan, yaitu tahun 2015 dengan 0,17 poin dan tahun 2020 dengan 0,97 poin. Singkatnya, tingkat kemiskinan memang menurun, tetapi dengan laju yang lambat.

Keadaan yang sebaliknya terjadi dalam laju pengurangan ketimpangan. Pada paruh pertama dekade itu, secara rata-rata terjadi kenaikan Rasio Gini sebesar 0,01 poin setiap tahun. Peningkatan ketimpangan terasa di paruh pertama ini. Sementara itu, pada paruh kedua, keadaannya berbeda. Secara rata-rata Rasio Gini berkurang -0,005 setiap tahun. Apabila data saat pandemi COVID-19 tidak disertakan, laju penurunan tahunan itu dua kali lebih besar, mencapai -0,01 poin. Dengan demikian, *trend* penurunan kesenjangan dalam dua dekade itu juga diikuti perbaikan dalam laju penurunan tahunan. Pada paruh pertama, hanya sekali terjadi penurunan Rasio Gini, yakni 0,413 menjadi 0,406 pada tahun 2012-2013. Sebaliknya, pada paruh kedua hanya sekali terjadi kenaikan Rasio Gini, yakni dari 0,380 ke 0,385 ketika pandemi.

Perbaikan dalam pengurangan kesenjangan ini dapat dikonfirmasi melalui dinamika kesejahteraan agregat di setiap kelompok atau kelas masyarakat.⁴⁸ Pada tahun 2009, misalnya, 40%-kelompok terbawah mengambil pangsa kesejahteraan sebesar 18,95%, sedangkan 20%-kelompok kesejahteraan teratas mengambil pangsa 44,91%—dan 40% kelompok di tengah mengambil sisanya, 36,13%. Pada tahun 2014, *share* kelompok bawah menyusut ke titik terendah 16,48%, diikuti pangsa kelompok tengah juga mengecil menjadi 34,83%. Sebaliknya, kelompok atas justru mengambil porsi yang semakin besar, yakni 48,69%—pangsa tertinggi kedua setelah tahun 2011 dengan 48,94%. Lima tahun kemudian, keadaan yang terjadi di setiap kelompok kesejahteraan berbeda arah: porsi kelompok bawah meningkat menjadi 17,47%, sedangkan pangsa kelompok atas menurun ke tingkat 45,56%.

Gambaran serupa ini tersua pula dalam distribusi pengeluaran per kapita menurut kelompok kesejahteraan.⁴⁹ Dalam bentang 2010-2014, pangsa kelompok bawah berkurang dari 18,05% menjadi 17,12%; sedangkan kelompok tengah mengalami situasi serupa, dari

⁴⁷ Sebagai ilustrasi pembandingan lain, penduduk Malaysia secara keseluruhan saat ini berjumlah sekitar 32 juta jiwa dan penduduk Singapura enam juta orang.

⁴⁸ Lihat, BPS, [Persentase Perkembangan Distribusi Pengeluaran](#); diakses 17 April 2021.

⁴⁹ Lihat, BPS, [Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita](#); diakses 17 April 2021.

36,48% menjadi 34,60%. Sementara itu, kelompok atas menikmati peningkatan porsi pengeluaran per kapita dari 45,47% menjadi 48,27%. Koreksi kemudian terjadi dalam lima tahun berikutnya, ketika kelompok bawah menikmati kenaikan pangsa dari 17,10% (2015) menjadi 17,71% (2019)—yang diikuti oleh kelompok tengah dengan porsi 34,65% sebelum menjadi 36,81% dalam bentang waktu yang sama. Dalam gerak yang berlawanan, porsi kelompok atas menyusut dari 48,25% (2015) menjadi 45,48% (2019). Hal ini menandakan bahwa distribusi dan akses sumber daya ke arah kelompok terbawah membentuk dua hal sekaligus: meningkatkan kesejahteraan kelompok bawah dan memperbaiki kesenjangan.

Fenomena perlambatan kemampuan dalam menurunkan kemiskinan dan peningkatan kemampuan dalam mengurangi kesenjangan dapat diterangkan pula oleh perhitungan *growth elasticity of poverty* (GEP) dan *growth elasticity of inequality* (GEI). Tabel 2.27 mengelaborasi persamaan identitas sederhana berikut, $\Delta X = \Delta Y (\Delta X / \Delta Y)$, dengan X adalah tingkat kemiskinan atau ketimpangan dan Y adalah tingkat kesejahteraan—diproksi melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Hasil perhitungan itu disajikan sebagai berikut.

Pertama, GEP secara keseluruhan bernilai negatif dalam bentang 2011-2020, kecuali tahun 2015 ketika kemiskinan meningkat dari 10,96% ke 11,13%. Hal ini berarti pertumbuhan positif pendapatan—yang diproksi melalui konsumsi—mampu menurunkan kemiskinan. Namun demikian, keadaan yang serupa tidak terjadi pada GEI, di mana dalam rentang 2011-2020 GEI justru positif. Hal ini menunjukkan dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan positif kesejahteraan tidak mampu menurunkan ketimpangan, tetapi malah menaikannya.

Kedua, observasi yang lebih detail memperlihatkan dua babak GEP dan GEI, yakni 2011-2015 dan 2016-2020. Dalam periode 2011-2015 GEP terhitung 1,5 kali dan 2,5 kali lebih besar daripada GEP dalam periode 2016-2019 dan 2016-2020, yakni -2,37 berbanding masing-masing -1,69 dan -0,94. Perhitungan ini mempertegas catatan di muka bahwa kemampuan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan mengalami pelemahan pada paruh kedua. Penurunan kemampuan ini semakin jelas terlihat ketika periode wabah COVID-19 disertakan dalam perhitungan.⁵⁰ Sementara itu, dalam paruh pertama dekade itu, GEI terhitung positif, yakni 0,879. Jadi dalam periode ini, pertumbuhan kesejahteraan justru memperburuk ketimpangan. Namun demikian, koreksi terjadi pada paruh kedua dengan nilai GEI negatif—bahkan tatkala masa pandemi disertakan dalam penghitungan. Dalam periode itu GEI terhitung sebesar -0,51; dan praktis tak cukup berubah jika masa pandemi dimasukkan dalam penghitungan, juga sebesar -0,51. Dalam periode ini, pertumbuhan kesejahteraan memperbaiki ketimpangan.

Dari seluruh gambaran ini, pada masa paruh kedua dalam 10 tahun terakhir ini memberi konfirmasi bukti atas apa yang diekspektasi oleh kebijakan dan teori ekonomika. Dengan catatan khusus pada perlambatan kemampuan penurunan kemiskinan, paruh kedua adalah masa di saat tiga kutub penting pembangunan— pertumbuhan, pemerataan, dan

⁵⁰ Suatu catatan perlu diberikan di sini tentang GEP negatif, khususnya pada 2020. Jika pada periode normal GEP dengan nilai negatif bermakna pertumbuhan positif menurunkan kemiskinan, pada masa pandemi GEP seperti itu berarti pertumbuhan negatif meningkatkan kemiskinan.

(anti)kemiskinan—berjalan sebagaimana ekspektasi. Pertumbuhan telah menghasilkan distribusi yang lebih baik dan kemiskinan yang berkurang.

Tabel 2.27 Elastisitas kemiskinan dan ketimpangan terhadap pertumbuhan

Tahun	Perubahan PO (%)	Perubahan Gini (%)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan*	Perubahan Pengeluaran (%)	GEP	GEI
2011	-7.277	2.646	102.23	2.230	-3.263	1.186
2012	-5.663	6.443	104.01	1.741	-3.253	3.701
2013	-1.630	-1.695	104.46	0.433	-3.766	-3.918
2014	-4.446	1.970	104.94	0.460	-9.676	4.288
2015	1.551	-2.899	107.56	2.497	0.621	-1.161
2016	-3.863	-1.990	110.42	2.659	-1.453	-0.748
2017	-5.421	-0.761	113.00	2.337	-2.320	-0.326
2018	-4.545	-1.790	117.19	3.708	-1.226	-0.483
2019	-4.555	-1.042	119.73	2.167	-2.102	-0.481
2020	10.521	1.316	116.70	-2.531	-4.157	-0.520
Median 2011-2020	-4.496	-0.902		2.199	-2.045	-0.410
Rataan 2011-2020	-2.533	0.220		1.570	-1.613	0.140
Rataan 2011-2019	-3.983	0.098		2.026	-1.966	0.048
Rataan 2011-2015	-3.493	1.293		1.472	-2.373	0.879
Rataan 2016-2019	-4.596	-1.396		2.718	-1.691	-0.514
Rataan 2016-2020	-1.573	-0.854		1.668	-0.943	-0.512

Sumber: BPS

*Dihitung dari indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, BPS, (2010=100)

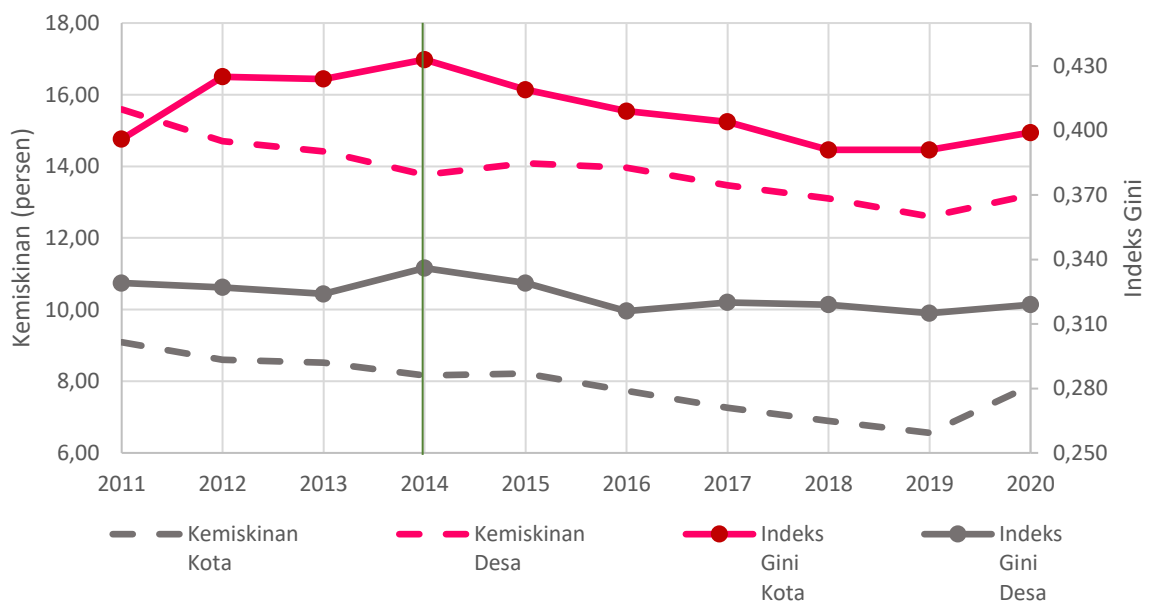
Bagaimana dengan situasi ketimpangan dan kemiskinan di perkotaan dan pedesaan? Dalam satu dekade terakhir ketimpangan lebih terlihat di wilayah perkotaan, sedangkan kemiskinan lebih menonjol di wilayah pedesaan. Rasio Gini di wilayah perkotaan sekitar 1,2-1,3 kali lebih besar daripada indeks yang sama di wilayah pedesaan. Sementara itu, tingkat kemiskinan di pedesaan (P_0) berkisar antara 1,6 hingga 1,9 kali lebih besar daripada ukuran yang sama di wilayah perkotaan. Dalam bentuk yang simplistik dapat dikatakan bahwa kesenjangan adalah fenomena perkotaan, sedangkan kemiskinan merupakan fenomena pedesaan.

Tingkat kemiskinan di kedua kelompok wilayah menurun secara konsisten, tetapi dengan laju penurunan yang berbeda dalam satu dekade terakhir ini. Di perkotaan laju penurunan kemiskinan lebih lambat. Rata-rata tahunan laju penurunan kemiskinan di perkotaan terhitung -0,20 poin per tahun, sedangkan di pedesaan hampir 1,5 kali lebih cepat, yakni -0,34. Bila laju penurunan kemiskinan di pedesaan dapat dipertahankan, apalagi

ditingkatkan, persistensi kemiskinan yang ada amat mungkin memudar, bahkan bukan tidak mungkin hal itu dapat terkonversi menjadi gerakan ke arah konvergensi.

Sementara itu, kurva tahunan Rasio Gini untuk wilayah perkotaan terlihat lebih curam daripada kurva sejenis untuk wilayah pedesaan (Gambar 2.82). Keadaan ini menunjukkan, meski dalam tingkat kesenjangan yang tinggi, pengurangan kesenjangan tahunan di perkotaan lebih cepat daripada pengurangan serupa di pedesaan. Dalam satu dekade observasi, penurunan Rasio Gini di perkotaan sekitar rata-rata -0,002 per tahun, sedangkan di pedesaan kecepatan itu cenderung stagnan, sebagaimana terlihat kurva yang relatif landai.

Namun demikian, observasi yang lebih dekat lagi atas ketimpangan menemukan dua babak perilaku, yakni sebelum dan sesudah 2014. Sebagaimana dalam ketimpangan agregat, tahun 2014 adalah tahun puncak Rasio Gini dalam bentang waktu observasi. Baik di perkotaan maupun di pedesaan, masa sebelum 2014 adalah saat kurva membentuk *slope* positif; dan sebaliknya untuk masa sesudahnya. Masa dengan *slope* positif adalah saat ketika Rasio Gini bergerak naik, sedangkan masa dengan *slope* negatif adalah saat ketika indeks meninggalkan titik puncak menuju titik yang lebih rendah. Rata-rata perubahan Rasio Gini tahunan di perkotaan sebelum tahun 2014 adalah 0,013, sedangkan pada masa setelahnya adalah -0,004. Sementara itu di pedesaan, berturut-turut 0,005 dan -0,002 dalam babak-babak yang sama.

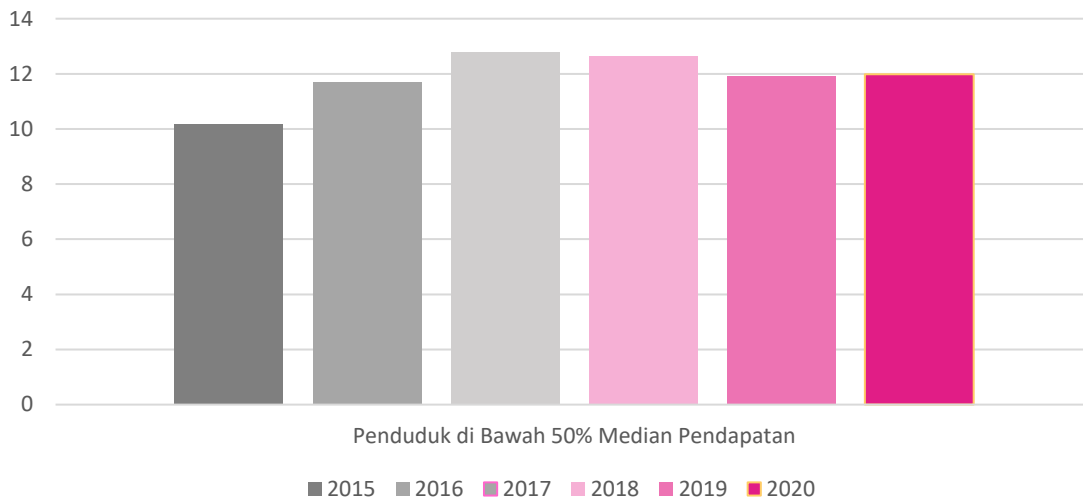


Gambar 2.82 Kemiskinan (P0) dan indeks gini perkotaan dan pedesaan

Sumber: BPS diakses 3 Oktober 2021

Dalam hal proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, yaitu indikator kemiskinan relatif, yang sekaligus juga merupakan indikator ketimpangan pada distribusi terbawah—yang dapat disebabkan oleh eksklusi sosial atau ketidaksetaraan kesempatan. Dalam deskripsi ini, peningkatan besaran indikator ini dalam tiga tahun pertama sejak 2015 menyiratkan pemburukan keadaan (Gambar 2.83). Koreksi telah dilakukan dalam tiga tahun berikutnya, namun belum memadai mengingat capaiannya tidak lebih baik daripada apa yang pernah diraih tahun 2015. Tahun 2015 terdapat 10,17% penduduk hidup di

bawah 50% median pendapatan. Tahun 2020 angka itu mendekati 12%. Tiga tahun sebelum pandemi, keadaannya lebih buruk lagi—mendekati 13%. Capaian tahun 2015 berada dalam *trend* tingkat kemiskinan agregat, tetapi tahun-tahun sesudahnya proporsi itu bergerak di luar *trend* agregat.



Gambar 2.83 Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan

Sumber: BPS

Catatan: Akses 3 Oktober 2021, sumber data hanya memperlihatkan perkembangan 2018-2020.

Sementara akses 17 April 2021 mendapatkan data yang lebih panjang (hingga 2015)

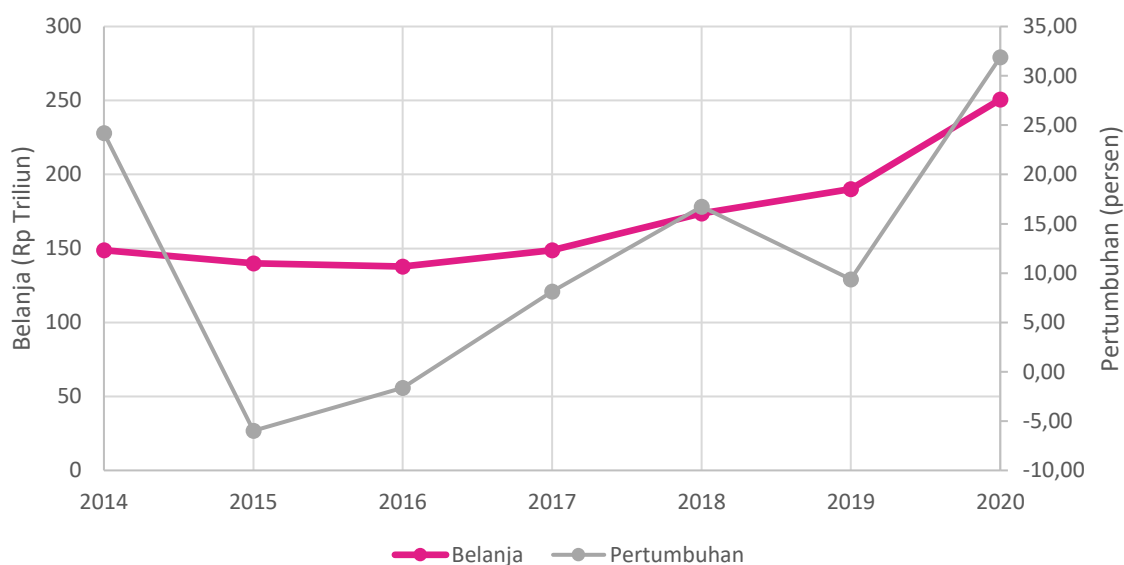
Di antara pelbagai kebijakan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan, APBN juga memiliki peran kuat pada pembiayaan fungsi perlindungan sosial. Dari masa ke masa, rencana anggaran dan belanja fungsi perlindungan sosial terus ditingkatkan. Sebelum pandemi, proporsi anggaran perlindungan sosial masih di bawah 12 persen. Saat pandemi berlangsung, APBN menyesuaikan belanja fungsi perlindungan sosial lebih daripada 12 persen (Tabel 2.28). Hal ini penting dilakukan sebagai bantal pengaman yang meminimumkan tumbukan keras dari perekonomian yang jatuh. *Nota Keuangan dan APBN 2021* juga telah menyatakan bahwa belanja fungsi perlindungan sosial merupakan salah satu belanja yang mendapat prioritas.

Gambar 2.84 menyajikan angka-angka nominal belanja dan pertumbuhan fungsi perlindungan sosial. Secara nominal, belanja fungsi perlindungan sosial telah meningkat lebih Rp100 triliun dalam bentang 2014-2020, yakni dari hampir Rp150 triliun menjadi sekitar Rp250 triliun. Lompatan tajam dalam belanja terjadi saat pandemi melanda; dalam tempo setahun terjadi penambahan Rp60 triliun. Ini penambahan terbesar dari yang pernah ada, sehingga tak heran jika pertumbuhan belanja fungsi perlindungan sosial ini mencapai 32%. Dengan belanja pemerintah pusat yang mendekati Rp2.000 triliun dalam 2020, angka-angka itu memberi penjas peningkatan rasio fungsi perlindungan sosial dalam APBN dari 12,3% menjadi 12,7%. Dalam perspektif yang lebih luas, dapat dikatakan, APBN secara konsisten mengalokasikan belanjanya ke arah investasi pembangunan manusia.

Investasi pembangunan manusia juga diperkuat oleh peningkatan porsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Hal yang penting untuk dicatat adalah pada masa pandemi, kepesertaan itu meningkat lebih dari 1,5 kali, khususnya pada kelompok pekerja formal. Namun demikian, keadaan yang serupa belum terjadi pada kelompok pekerja informal, sebagaimana terlihat dari penurunan porsi kepesertaan dalam program ini. Saat ini masih terlalu dini untuk menyebut bahwa penurunan kepesertaan pekerja informal ini berhubungan dengan peningkatan ‘formalisasi’ pasar kerja. Hal yang paling dekat untuk menjelaskan keadaan ini adalah keterbatasan jangkauan program ini untuk melibatkan pekerja informal yang tersebar—tidak terkonsentrasi—secara spasial ataupun sektoral, apalagi ketika masa pandemi dengan restriksi pergerakan orang yang ketat. Sementara itu, RKP Pemutakhiran 2021 mencatat relasi antara ‘informalitas’ pasar kerja dan kemiskinan. Jumlah orang miskin dan rentan diperkirakan meningkat, utamanya dari kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diestimasi berada pada kisaran 9,7-10,2 persen pada akhir 2020, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai.

Tabel 2.28 Perlindungan sosial dan jaminan sosial

Indikator TPB/SDGs	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10.4.1.(a) Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	1,7%	11,5%	11,3%	11,2%	12,3%	12,7%
10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	-	-	-	-	56,51% (formal) 3,85% (informal)	63,82% (formal) 3,21% (informal)



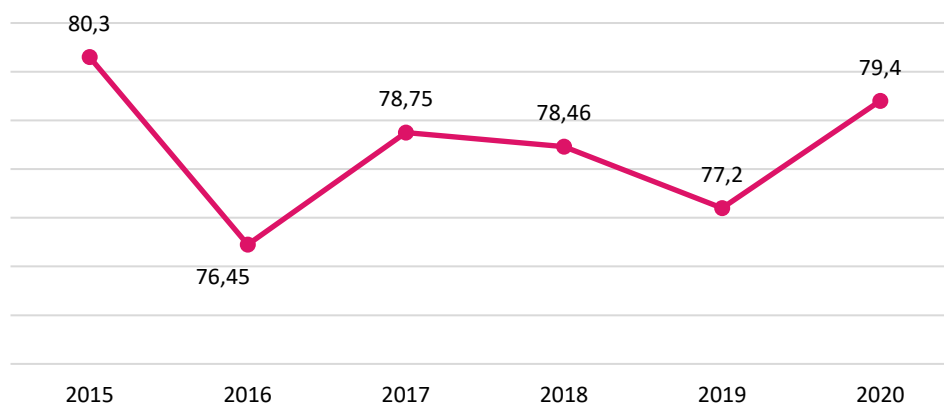
Gambar 2.84 Belanja dan pertumbuhan belanja perlindungan sosial

Sumber: Nota Keuangan dan APBN berbagai terbitan

3. Kesempatan Yang Sama Dalam Hukum Tanpa Diskriminasi

Kesenjangan juga dapat disebabkan oleh ketidaksetaraan hukum dan tidak memiliki kesempatan yang sama. Keadaan ini ditangkap melalui Indeks Kebebasan—yang diturunkan langsung dari Sub-Indeks Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Dalam kurun waktu 12 tahun pengukuran IDI (2009-2020) aspek kebebasan sipil secara konsisten memiliki capaian yang tinggi dan fluktuasi yang relatif kecil dibandingkan dua aspek IDI lainnya, yaitu aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi. Secara umum hal ini menunjukkan bahwa ruang-ruang demokrasi di Indonesia sudah terbuka luas dan dimanfaatkan. Namun, aspek kebebasan sipil masih menyisakan tantangan yang harus kita tuntaskan, seperti masih adanya hambatan dalam mengemukakan pendapat dan masih adanya ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya. Berdasarkan IDI 2020, terdapat tiga indikator dalam aspek kebebasan sipil yang mengalami penurunan. Pertama, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat (indikator 3), dari 65,69 (2019) menjadi 58,82 (2020). Kedua, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (indikator 4) dari 57,35 (2019) menjadi 42,28 (2020). Ketiga, ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya (indikator 10), dari 94,85 (2019) menjadi 86,27 (2020).

Demokrasi Indonesia perlu dilepaskan dari segala bentuk ancaman atau penggunaan kekerasan seperti ini karena dua hal. Pertama, demokrasi adalah agenda reformasi 1997/1998 sebagai koreksi total atas kehidupan sipil dan politik yang jauh dari prinsip-prinsip demokrasi universal. Kedua, ideologi dan konstitusi negara bahkan telah memberikan jaminan atas terselenggaranya demokrasi tanpa ancaman atau tindakan kekerasan. Oleh sebab itu, suatu refleksi dan evaluasi yang mendalam atas kecenderungan penurunan nilai indeks kebebasan sipil yang sistematis perlu ditempatkan sebagai agenda utama penguatan konsolidasi demokrasi. Penting pula dicatat, Tujuan 10 TPB/SDGs menempatkan kesenjangan sebagai isu pokoknya. Kesenjangan antarkomponen pembentuk demokrasi perlu mendapatkan perhatian karena hal itu tidak menunjukkan kelengkapan penerapan prinsip-prinsip demokrasi universal.



Gambar 2.85 Indeks Kebebasan

Sumber: BPS

Lebih lanjut dalam hal penegakan HAM (Tabel 2.29), indikator TPB/SDGs terkait dengan penanganan pengaduan pelanggaran serta perlindungan WNI (termasuk pekerja migran) di luar negeri.

Tabel 2.29 Penegakan HAM

Indikator TPB/SDGs	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penegakan Hukum Nasional						
● 10.3.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM						
● Komnas HAM	4.295				5.314	2.639
● Kemenhukham	659					
● 10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan, terutama kekerasan terhadap perempuan	-	-	-	-	1.419 orang	2.389 orang
● 10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional	-	-	-	-	438	10
Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri						
● 10.7.2.(a) Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	-	-	-	-	15 tambahan dokumen	14 tambahan dokumen
● 10.7.2.(b) Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	-	-	-	-	650 okupasi	365 okupasi

2.11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan

A. Pengantar

Kota dan permukiman memiliki peran penting dalam menjamin kualitas kehidupan manusia. Terlebih saat ini sudah lebih dari separuh penduduk dunia tinggal di kota dan kawasan perkotaan. Kota tidak hanya menjadi habitat bagi manusia dan beragam keanekaragaman hayati lainnya, tetapi juga sebagai sarana bertransaksi ekonomi, interaksi sosial, serta penjagaan ekosistem alam secara berkelanjutan. Di samping itu, dengan konsentrasi penduduk yang begitu besar dan dengan berbagai latar belakang, kota menawarkan beragam peluang bagi penduduknya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan serta mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi baru.

Urbanisasi adalah salah satu tren paling transformatif yang terjadi di seluruh dunia, khususnya di negara-negara yang secara ekonomi sedang berkembang seperti Indonesia. Saat ini, sudah lebih dari setengah dari total penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Angka tersebut akan terus meningkat dan pada tahun 2030, saat periode *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan – TPB) berakhir, persentase penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan di Indonesia akan mencapai sekitar 63,4% (Bappenas, BPS, dan UNFPA, 2013). Dominasi penduduk perkotaan tersebut menunjukkan urgensi untuk membuat lingkungan perkotaan menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sebagaimana yang ingin diwujudkan melalui Tujuan 11 SDGs.

TPB/SDG 11 (yang selanjutnya disebut Tujuan 11) meliputi target yang ingin dicapai untuk mewujudkan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030 dan mencakup perbaikan dari sisi kelayakhunian dan keberlanjutan kota yaitu dari sisi perumahan dan permukiman, transportasi publik, efisiensi penggunaan lahan, ketangguhan terhadap bencana, kualitas lingkungan, ketersediaan RTH, penguatan perencanaan dan juga kebijakan terkait bangunan dan gedung. Pelaksanaan Tujuan 11 berkaitan erat dengan berbagai kegiatan dari institusi lintas sektor yang terlibat dalam pembangunan perkotaan seperti Kementerian/Lembaga diantaranya Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BNPB, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, pelaku usaha dan filantropi, serta lembaga nonpemerintah.

B. Status Capaian dan Tantangan

1. Akses Terhadap Rumah Layak Huni dan Terjangkau

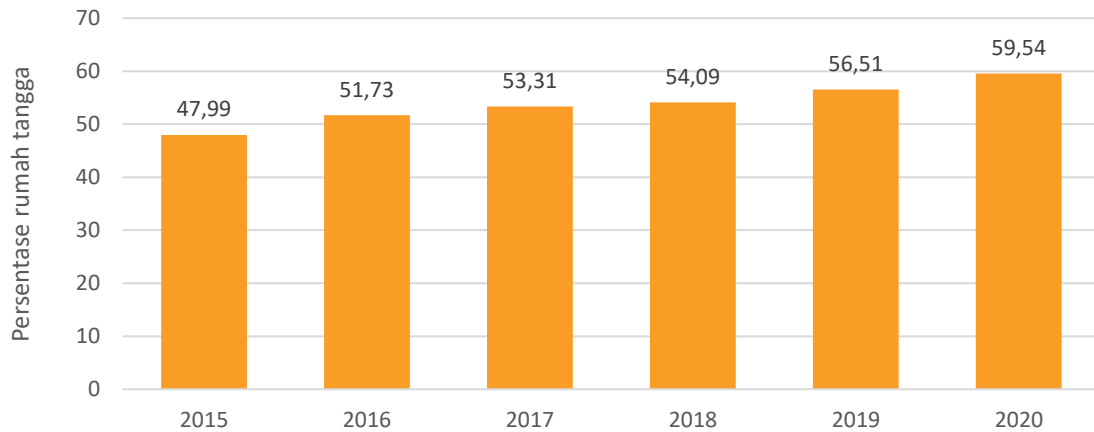
Target 11.1 mengukur tentang akses masyarakat terhadap rumah yang layak untuk dihuni dan terjangkau. Adapun definisi rumah layak huni, sesuai dengan Metadata II, diukur melalui beberapa kriteria kelayakan, antara lain:

1. Ketahanan bangunan (*durable housing*).
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$.
3. Memiliki akses air minum layak.
4. Memiliki akses sanitasi layak.

Di samping itu, terdapat 2 (dua) kriteria hunian terjangkau yang akan terus dikawal, yaitu keamanan bermukim berupa bukti kepemilikan rumah serta pengeluaran hunian yang tidak melebihi dari 30% total pengeluaran rumah tangga.

Target 11.1 tentang akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau dinilai memiliki progress yang relatif baik dari tahun ke tahun meskipun belum optimal. Selain secara kumulatif masih jauh dari target yang ingin dicapai tahun 2030, ketimpangan antar provinsi juga terjadi yaitu terdapat provinsi dengan akses rumah layak huni dan terjangkau di bawah 30% yaitu Kepulauan Bangka Belitung dan Papua pada tahun 2020. Beberapa isu dalam RPJMN 2020-2024 terkait perumahan layak huni dan terjangkau antara lain: (1) terbatasnya akses terhadap pembiayaan perumahan terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan

rendah serta berpenghasilan tidak tetap; (2) manajemen lahan untuk perumahan yang belum efektif serta tidak terintegrasi dengan sistem transportasi publik dan infrastruktur dasar permukiman; (3) belum optimalnya pembinaan dan pengawasan di bidang perumahan dan kawasan permukiman (Bappenas, 2019).



Gambar 2.86 Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak huni dan terjangkau

Sumber: BPS diolah Kementerian PPN/Bappenas, 2020

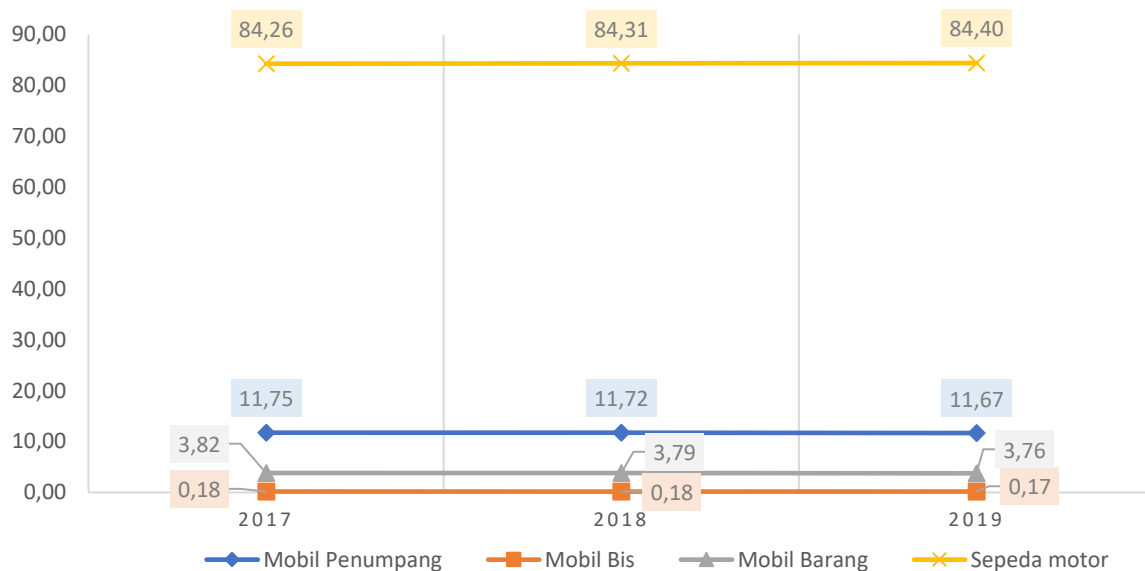
2. Akses Terhadap Transportasi Publik

Target 11.2 diterjemahkan ke dalam dua indikator, yaitu proporsi populasi yang mendapat akses yang nyaman pada transportasi publik serta persentase penduduk terlayani transportasi umum. Akses transportasi yang nyaman didekati dengan jarak terhadap fasilitas transportasi publik seperti halte atau stasiun dalam radius 500 meter. Kedua indikator ini dapat mencerminkan kemudahan masyarakat dalam mengakses transportasi publik dan apakah kemudahan akses tersebut dapat mendorong lebih banyak penduduk untuk menggunakan transportasi publik dan meninggalkan kendaraannya pribadi.

Berdasarkan data SUSENAS BPS di tahun 2017, terlihat bahwa 54,67% penduduk di Indonesia sudah memiliki akses yang nyaman terhadap transportasi publik dan meningkat hingga 56,01% di tahun 2020. Untuk indikator terkait persentase penduduk yang terlayani transportasi umum, secara nasional di tahun 2020 terdapat 5,74% penduduk, atau meningkat dari tahun 2017 sebesar 4,85% (BPS, 2020). Adapun khusus untuk Jabodetabek, proporsi penduduk yang terlayani transportasi umum masih sebesar 32% di tahun 2019 (BPTJ, 2020). Dari kedua data tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun akses terhadap transportasi publik semakin mudah dan baik, tetapi belum banyak penduduk yang memanfaatkan transportasi publik sebagai sarana bertransportasi hariannya. Artinya, diperlukan kebijakan dan program lain untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik di perkotaan.

Masih rendahnya penggunaan transportasi publik di Indonesia semakin diperparah dengan pertumbuhan kendaraan pribadi terus meningkat dari tahun ke tahun, yang tetap didominasi oleh sepeda motor (Gambar 2.87). Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu indikasi bahwa transportasi publik belum menjadi pilihan utama warga, terutama di kota, dalam beraktivitas sehari-hari. Sebagai contoh, di Jakarta, hanya sekitar 25% perjalanan yang

menggunakan transportasi umum di tahun 2019. Di samping itu, pandemi COVID-19 semakin menambah tantangan besar bagi upaya mendorong pergeseran penggunaan sarana mobilitas (*modal shift*) dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Hal ini umumnya karena upaya pencegahan penularan COVID-19 membuat pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan di luar rumah dan masyarakat cenderung memilih menggunakan kendaraan pribadi.



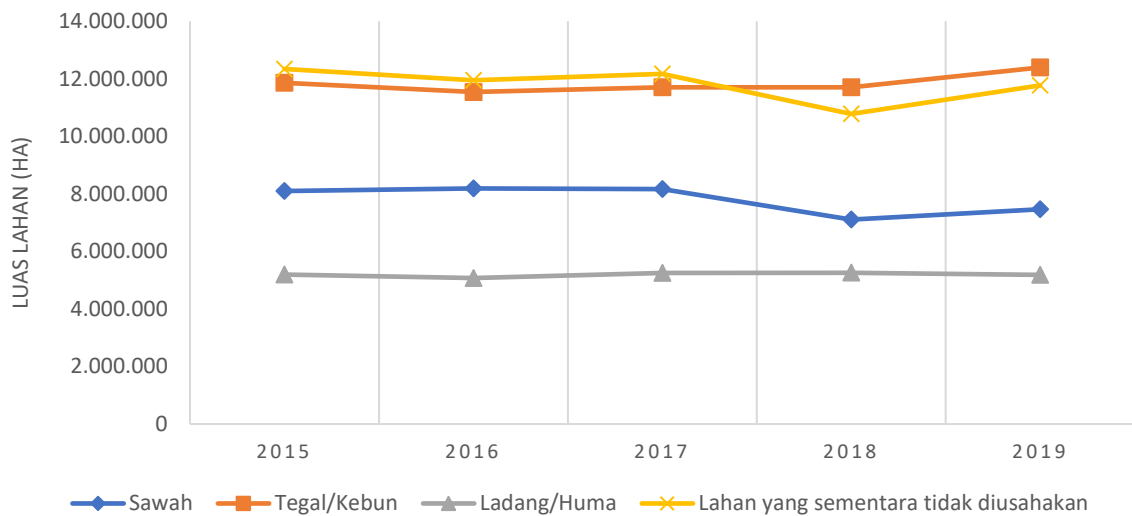
Gambar 2.87 Proporsi kendaraan di jalan raya di Indonesia

Sumber: Diolah dari BPS, 2020

3. Urbanisasi Inklusif

Target ketiga terkait urbanisasi yang inklusif yang diukur melalui rasio perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk juga belum dapat diukur dan dievaluasi pencapaiannya. Lahan terbangun yang dimaksud adalah lahan yang tidak bervegetasi, memiliki tutupan permanen atau semi permanen yang kedap air. Hal ini karena data yang diperlukan, terutama dalam bentuk peta, yang tidak bisa dikumpulkan setiap tahun. Peta yang dibutuhkan yang tersedia adalah pada tahun 2016 dan baru akan diperbarui pada tahun 2024. Kondisi tersebut menyulitkan analisis untuk pencapaian indikator tersebut.

Namun, beberapa kondisi di lapangan dapat menjadi salah satu tolak ukur terkait semakin meluasnya lahan terbangun serta alih fungsi lahan (Gambar 2.88). Konversi lahan, terutama lahan pertanian, cenderung tinggi di beberapa provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk di Pulau Jawa, kondisi lahan pertanian sepanjang 2015-2019 cukup terjaga dengan baik, bahkan sedikit meningkat jumlahnya. Di lain pihak, studi dari Bank Dunia menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2000-2010, fenomena urbanisasi di Indonesia lebih banyak didorong oleh reklasifikasi desa menjadi kota, yakni sebesar lebih dari 80% (World Bank, 2019). Faktor pendorong berikutnya baru pertumbuhan penduduk secara alami di perkotaan dan migrasi desa-kota. Hal ini secara tidak langsung bisa mengindikasikan bahwa perubahan fungsi desa menjadi kota dapat terjadi karena faktor konversi lahan, yang awalnya lahan pertanian atau perkebunan menjadi kawasan permukiman dan komersial.



Gambar 2.88 Perkembangan perubahan guna lahan non-perkotaan Indonesia

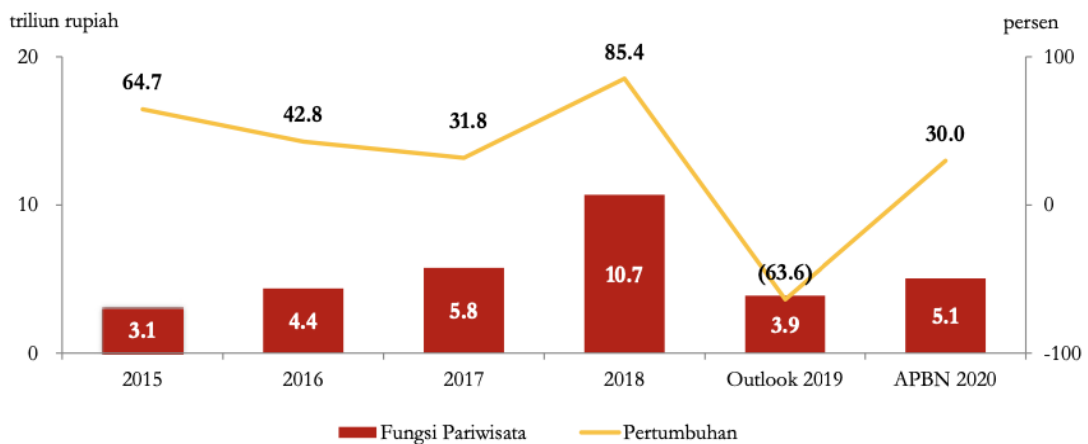
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pertanian, 2020)

Ke depannya, diperlukan penyepakatan antara Kementerian/Lembaga yang terkait indikator ini, antara lain Kementerian ATR/BPN, BIG, LAPAN, dan Bappenas dalam melakukan perhitungan dan pemantauan data secara berkala. Namun, mengingat data terkait laju perubahan tutupan lahan sangat sulit diperoleh untuk skala Indonesia, perhitungan indikator bisa dilakukan tidak setiap tahun, tetapi misalnya 3-5 tahun sekali. Alternatif lainnya adalah dengan memberikan fokus perhitungan kepada wilayah-wilayah perkotaan besar tertentu di Indonesia guna mengendalikan laju urbanisasi dan pertumbuhan kota agar tidak meluas. Di samping itu, perlu juga penyepakatan target indikator ini hingga tahun 2024 oleh Kementerian/Lembaga yang terkait.

4. Konservasi Warisan Budaya dan Alam

Target keempat terkait warisan budaya diukur melalui pengeluaran per kapita untuk alokasi anggaran pemerintah untuk preservasi, perlindungan, dan konservasi warisan budaya. Sejumlah K/L yang memiliki kegiatan yang berkaitan dengan target ini, antara lain Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ANRI, dan sebagainya. Mempertimbangkan hal tersebut, maka data yang diperlukan perlu diidentifikasi secara lengkap dari berbagai instansi yang memiliki kewenangan terkait upaya preservasi dan konservasi warisan budaya dan alam.

Dari hasil penelusuran sejauh ini, terlihat bahwa alokasi anggaran untuk pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mana termasuk upaya pelestarian warisan budaya, semakin meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 2.89). Namun, adanya pandemi COVID-19 turut berpengaruh terhadap pencapaian indikator terkait warisan budaya dan pariwisata. Kontribusi devisa sektor ini turun sangat signifikan karena adanya pembatasan kegiatan, sehingga berdampak lebih jauh terhadap perekonomian daerah dan lapangan pekerjaan.



Gambar 2.89 Perkembangan belanja fungsi pariwisata, 2015-2019

Sumber: Kementerian Keuangan

5. Kebencanaan

Target 11.5 diukur dengan dua indikator yaitu jumlah korban (meninggal, hilang, terluka/cedera dan mengungsi akibat bencana alam serta proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB. Kedua indikator ini dinilai telah sesuai dengan target yang ada. Namun demikian, karena bencana sifatnya tidak bisa diprediksi, kedua indikator dalam target ini hanya bisa dihitung ketika bencana terjadi. Hingga tahun 2019, jumlah korban bencana yang meninggal sebanyak 589 jiwa, luka/cedera sebanyak 3.421 jiwa dan mengungsi sebanyak 436.234 jiwa dengan proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB adalah sebesar 0,05%. Adapun bencana yang seringkali terjadi di sepanjang tahun 2021 adalah banjir, kemudian angin puting beliung dan tanah longsor (Gambar 2.90). Aspek ini perlu mendapat perhatian lebih karena banyaknya kejadian bencana yang terjadi belakangan ini termasuk pandemi COVID-19 yang juga mempengaruhi perkotaan.



Gambar 2.90 Infografis kebencanaan Indonesia 2020

Sumber: BNPB, 2021

Ke depannya, karena target terkait kebencanaan ini tidak bisa diproyeksikan hingga tahun-tahun ke depan, maka diperlukan perbaikan metadata indikator untuk mengetahui kondisi penanganan kebencanaan di Indonesia yang lebih representatif. Dari berbagai diskusi lintas K/L, upaya perhitungan indikator terkait kebencanaan lebih baik untuk difokuskan kepada keberhasilan penanganan pascabencana, daripada menghitung jumlah korban dan kerugian ekonomi. Namun, tentu saja indikator usulan tersebut cukup berbeda dengan indikator global, sehingga diperlukan diskusi yang lebih intensif dengan berbagai pihak.

6. Dampak Lingkungan Perkotaan

Target 11.6 mengenai dampak lingkungan perkotaan ini diterjemahkan ke dalam empat indikator, utamanya terkait pengelolaan sampah dan kualitas udara. Indikator mengenai pengelolaan sampah mencakup persentase rumah tangga perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah dan persentase sampah nasional yang terkelola. Adapun indikator terkait kualitas udara meliputi rata-rata tahunan PM_{10} dan Indeks Kualitas Udara. Keempat indikator tersebut sangat relevan bagi kehidupan perkotaan, sehingga arah pembangunan kota tidak lagi mendegradasi kualitas lingkungan hidup, baik itu dari segi persampahan maupun kualitas udara.

Target keenam ini dinilai menunjukkan kemajuan yang cukup baik meskipun belum mencapai target. Di tahun 2016, persentase rumah tangga perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah masih sebesar 55,73% (penanganan 54,85% dan 0,88% pengurangan) (SUSENAS MKP diolah Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Di samping itu, persentase sampah nasional yang terkelola telah mencapai 50,77%. Namun, capaian pengelolaan sampah nasional ini masih jauh dari yang ditargetkan dalam RAN SDGs yaitu sebesar 80% sampah nasional terkelola. Pengelolaan sampah perkotaan masih menghadapi banyak tantangan antara lain: (1) masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah; (2) kurangnya armada pengangkutan sampah dan adanya tantangan geografis dan aksesibilitas yang menghambat proses pengangkutan sampah; (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang telah terbangun, sebagian besar masih dioperasikan dengan sistem *open dumping*, sedangkan desain dari sistem TPA yang disiapkan adalah sistem *sanitary landfill*; dan (4) komitmen pemerintah daerah masih harus terus ditingkatkan dalam pengelolaan sampah di daerah, khususnya terkait pembiayaan infrastruktur persampahan untuk operasional dan pemeliharaan (O&M) (Bappenas, 2019).

Adapun indikator terkait kualitas udara dinilai menunjukkan perkembangan yang baik. Upaya pemantauan kualitas udara dilakukan dengan pembangunan *Air Quality Monitoring System* (AGMS), yaitu jaringan pemantauan kualitas udara ambien dengan menggunakan peralatan pemantauan otomatis yang beroperasi secara kontinyu. Data yang diterima stasiun pemantau kemudian diolah menjadi data ISPU di ruang kendali dan data konsentrasi dan ISPU tersebut dikirimkan ke display indoor dan outdoor di masing-masing daerah. Adapun parameter yang diukur meliputi PM_{10} , CO, O₃, NO₂, $PM_{2,5}$, HC, SO₂, dan TSP. Rata-rata tahunan PM_{10} dari 25 kota yang terukur oleh Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) menunjukkan kualitas udara yang baik ($<50\mu\text{g}/\text{m}^3$). Di samping itu berdasarkan pemantauan konsentrasi tahunan di 38 SPKUA diperoleh data bahwa PM_{10} di 36 lokasi tersebut berada di

bawah baku mutu yang ditetapkan dalam PP nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu sebesar ($<150\mu\text{g}/\text{m}^3$). Indikator terkait Indeks Kualitas Udara (IKU) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. IKU tahun 2020 adalah sebesar 87,21 atau meningkat sebesar 0,65 poin dari tahun sebelumnya, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 84,10. Secara nasional, tren IKU mengalami peningkatan sejak 2015 hingga 2020. Tahun 2020 merupakan tahun dimana nilai IKU mengalami peningkatan dan mencapai nilai tertinggi akibat turunnya konsentrasi NO_2 dan SO_2 di kabupaten/kota sebagai dampak dari penurunan aktivitas baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak akibat dari pandemi COVID-19 dan penerapan kebijakan pengendalian pencemaran dan pembatasan kegiatan. Terdapat 14 provinsi di tahun 2020 dengan IKU yang sangat baik, 19 provinsi yang tergolong baik, dan 1 provinsi dengan kategori IKU cukup.

7. Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau

Target ketujuh dalam Tujuan 11 ini terkait pentingnya ruang terbuka publik dan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan. Target ini diterjemahkan ke dalam dua indikator: proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua dan proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Yang dimaksud dengan ruang terbuka di perkotaan meliputi ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau dan ruang untuk jalan. Secara lebih khusus, amanat UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa setiap kota wajib untuk menyediakan 30% lahannya untuk RTH, yang mana 20% disediakan oleh publik dan 10% dari privat.

Kedua indikator dalam target ini belum dapat diukur pencapaiannya karena kontinuitas data. Meskipun sudah diamanatkan dalam UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun baru tahun 2020 capaian RTH ini dihitung secara nasional. Dalam perhitungan Adipura 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai memasukkan komponen RTH menjadi salah satu kriteria kota/kabupaten/provinsi untuk mendapatkan Adipura. Di tahun 2019, rata-rata nasional untuk proporsi RTH adalah sebesar 0,079%, yang dihitung dari 250 kabupaten/kota di Indonesia. belum ada kota-kota di Indonesia yang mencapai standar 30% RTH dari luas wilayahnya. RTH di Provinsi DKI Jakarta baru mencapai sekitar 9% dan Kota Bandung sekitar 12% (Wahdaniyat, 2019). Penyediaan RTH di kota ini juga perlu memastikan akses ruang terbuka publik dan RTH untuk semua, terutama bagi kelompok rentan. Di samping itu, indikator terkait kriminalitas dan kekerasan juga cenderung stagnan. Proporsi penduduk laporan korban kekerasan di tahun 2019 adalah 0,06, atau sama dengan tahun 2016. Ke depannya, indikator ini perlu dipertajam dengan memisahkan kejadian kekerasan di ruang publik atau privat.

8. Perencanaan Pembangunan dan Lingkungan

Target 11.a diterjemahkan menjadi indikator proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS. Sejak 2017, setiap rancangan RTRW yang masuk ke Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan persetujuan perlu dilengkapi dengan dokumen KLHS sebagai salah satu syarat perlindungan lingkungan skala kawasan. Hal ini penting untuk menjamin upaya konservasi lingkungan hidup terintegrasi dengan rencana pembangunan,

sehingga dampak dari pembangunan tidak berpengaruh negatif terhadap kualitas lingkungan hidup.

Capaian indikator ini dinilai belum mencapai target sepenuhnya. Tercatat hingga tahun 2020 baru 16 provinsi dari total 34 provinsi yang memiliki RTRW dengan dilengkapi oleh KLHS. Adapun status RTRW per 10 September 2021 menunjukkan bahwa masih banyak dokumen RTRW, terutama di tingkat daerah, yang masih dalam proses perumusan sebelum akhirnya disahkan dalam bentuk peraturan (Tabel 2.30). Hal ini menunjukkan bahwa belum semua daerah memiliki landasan hukum yang kuat yang mengatur pemanfaatan serta pengendalian ruang di daerahnya masing-masing yang sejalan dengan upaya konservasi dan pelestarian lingkungan. Tentu saja, upaya ini harus dipercepat agar dapat memberikan kepastian hukum di daerah.

Tabel 2.30 Perkembangan penyusunan RTRW

RTR Nasional		RTRW		RDTR	
Progres	41	Progres	403	Progres	1.739
Perpres	27	Perda	536	Perda	124

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2021

9. Pengurangan Risiko Bencana sesuai *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)*

Target 11.b diterjemahkan menjadi jumlah rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana di Indonesia yang selaras dengan SFDRR. Indikator ini dinilai telah cukup berhasil dijalankan. Pemerintah pusat melalui BNPB telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 serta Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2015-2019 yang kemudian diteruskan menjadi RENAS PB 2020-2024. Di samping itu, menurut pemantauan UNDRR, skor Indonesia dalam upaya adopsi dan implementasi rencana penanggulangan bencana yang sesuai dengan SFDRR adalah sebesar 0,83 (*United Nations for Disaster Risk Reduction, 2021*). Artinya, dokumen rencana terkait kebencanaan sudah cukup sejalan dengan komitmen internasional. Selain itu, berdasarkan data hasil perhitungan, pada tahun 2020 telah terdapat 190 kab/kota yang telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana dan pada tahun 2024, ditargetkan akan terdapat 210 kab/kota yang telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana dari total 514 Kab/Kota di Indonesia.

Dalam RENAS PB terbaru, bencana kesehatan seperti pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu bencana non-alam yang perlu mendapat perhatian lebih, terutama di sisi pencegahan dan penanggulangannya. Di tingkat daerah, data hingga 2018 menunjukkan baru sekitar 32,1% kabupaten/kota yang memiliki rencana aksi terkait kebencanaan. Ke depannya, upaya pengarusutamaan aspek kebencanaan, baik itu melalui Rencana Aksi maupun terintegrasi dalam RPJMD harus semakin diintensifkan guna meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi risiko akibat dari bencana yang terjadi di Indonesia.

10. Bangunan dan Material Berkelanjutan

Target 11.c mengenai pengaturan terkait penggunaan bangunan dan material berkelanjutan diterjemahkan ke dalam indikator persentase daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang berkelanjutan, berketahanan, dan menggunakan material lokal. Indikator ini dinilai belum dapat diukur pencapaiannya karena merupakan indikator yang baru diusulkan. Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa 445 dari 509 kabupaten/kota atau sekitar 87,42% daerah telah memiliki Perda Bangunan Gedung, seperti yang diamanatkan dalam UU no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Perda Bangunan Gedung ini merupakan salah satu instrumen pengendalian pembangunan agar infrastruktur yang dibangun dapat lebih aman, efisien, berketahanan, serta ramah lingkungan. Di samping itu, implementasi UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga dapat berpengaruh terhadap indikator ini, karena dapat mengubah mekanisme izin pendirian bangunan dan gedung. Akan tetapi, dampak dari UU CK tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut.

2.12 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

A. Pengantar

Sustainable Consumption and Production (SCP) atau konsumsi dan produksi yang berkelanjutan merupakan salah satu subtema aksi menuju perwujudan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang telah dicanangkan sejak Deklarasi Rio tahun 1992, yakni adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berkesinambungan. Dalam principle ke-8 Deklarasi Rio untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan pada tahun 1992, disebutkan bahwa "... untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kualitas hidup lebih baik bagi semua orang, negara-negara harus mengurangi dan menghapus pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan dan mempromosikan kebijakan demografi yang sesuai."

Penerapan SCP di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahapan intervensi, dimulai dari tahap inisiasi (2013-2014), tahap sistemik (2015-2019), tahap akselerasi (2020-2024), hingga tahap pengarusutamaan/*mainstreaming* (2025-2030). Indonesia telah aktif di berbagai forum Internasional dalam bidang SCP sejak tahun 2001 dan menjadi tuan rumah *Asia Pacific Roundtable on SCP (APRSCP)* ke-10 pada November 2011 di Yogyakarta. Pada tahun 2013, Indonesia meluncurkan Dokumen Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (10YF SCP) di Indonesia 2013-2023 yang memuat peta jalan Indonesia dalam menerapkan konsumsi dan produksi berkelanjutan. Pada tahun yang sama, hasil pertemuan *United Nations High Level Panel of Eminent Persons (UN HLPEP) "Post-2015 Development Agenda"* di Bali pada Maret 2013, yang dipimpin oleh Presiden RI, menetapkan SCP sebagai salah satu tema dalam "*Post-2015 Development Agenda*".

Sejak tahun 2015, intervensi pelaksanaan konsumsi dan produksi berkelanjutan ditandai dengan masuknya SCP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain itu, penerapan SCP juga telah menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional SDGs 2017-2019 dan berbagai Rencana Aksi SDGs di berbagai daerah.

Saat ini, penerapan SCP juga menjadi salah satu bagian dalam Prioritas Nasional (PN) 1, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dan Prioritas Nasional (PN) 6, yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pada RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari upaya efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan beban pencemaran terhadap lingkungan hidup serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai dengan diterapkannya pembangunan rendah karbon (*low carbon development*, LCD) dalam rencana pembangunan di Indonesia.

B. Status Capaian

1. Pelaksanaan *the 10-Year Framework of Programmes on SCP Patterns*

Pelaksanaan 10 YFP SCP dicerminkan dengan peningkatan jumlah kolaborasi tematik *quick wins* program di Indonesia. Indonesia telah menyusun dokumen 10 YFP SCP sebagai bagian dari komitmen dalam melaksanakan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Dokumen 10 YFP SCP Indonesia memuat peta jalan Indonesia dalam mengarusutamakan penerapan SCP dalam agenda pembangunan nasional dan pelaksanaan kebijakan/program nasional prioritas dengan program tematik "*Quick Wins*" secara bertahap pada periode waktu 2013–2023.

Sampai tahun 2020, telah terdapat 11 sektor kolaborasi tematik *quick wins* program SCP di Indonesia yang terdiri dari:

1. Sektor Industri, mencakup: Standar Industri Hijau dan *Low Cost Green Car* (LCGC).
2. Sektor Kehutanan, mencakup: Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK); Teknik Silvikultur Intensif (SILIN); Hutan Tanaman Energi; serta Jasa Lingkungan Kehutanan.
3. Sektor Energi, mencakup: Energi Baru dan Terbarukan.
4. Sektor Pariwisata, mencakup: *Indonesia Sustainable Tourism* (ISTA);
5. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mencakup: *Sustainable Construction and Building*.
6. Sektor Transportasi, mencakup: Sustainable transport; dan skema *International Civil Aviation Organization* (ICAO) *Carbon Offsetting and Reduction Scheme For International Aviation* (CORSIA) atau (ICAO Corsia).
7. Sektor Komunikasi dan Informasi, mencakup: teknologi komunikasi informasi yang ramah lingkungan (*Green ICT*).
8. Sektor Inovasi dan Teknologi, mencakup: Teknologi hijau.
9. Sektor Keuangan, mencakup: *Sustainability Finance*.
10. Sektor Pertanian, mencakup: *Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO);
11. Sektor Kelautan dan Perikanan, mencakup: *Sustainable Fisheries*.

SVLK, Silin dan ISTA merupakan dukungan pada sektor kehutanan yang disusun bersama *multistakeholders* dalam pelaksanaan *the 10 YFP SCP*. SVLK merupakan suatu sistem

pelacakan/ verifikasi yang berlaku secara mandatory untuk memastikan legalitas sumber kayu/produk sehingga perusahaan kehutanan dapat memperoleh sertifikat legalitas kayu (SLK). Dalam pelaksanaannya, pemerintah mendukung penerapan SVLK melalui kegiatan inventarisasi UMKM dan pembekalan sumber daya manusia terkait implementasi SVLK melalui bimbingan teknis dan penilaian SLK yang dilakukan oleh Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), KLHK. Sementara itu, berkaitan dengan pembinaan pengelolaan hutan produksi dan industri hasil hutan, terdapat kegiatan peningkatan kapasitas tenaga teknis melalui Diklat GANISPHPL (Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) yang dilakukan di 34 Provinsi, sesuai dengan Permen LHK Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.

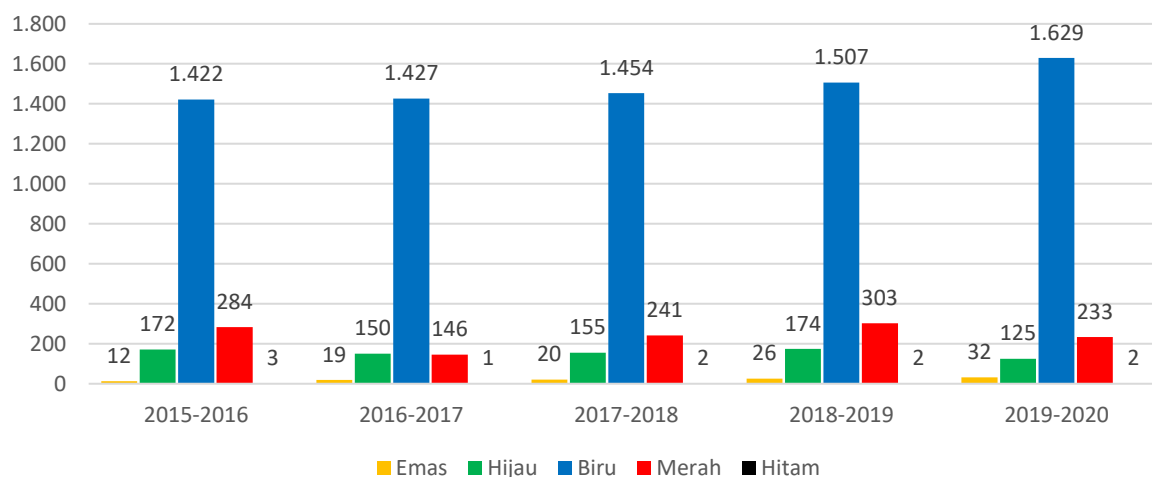
Pada tahun 2020, telah dilakukan pemutakhiran terhadap dokumen 10 YFP SCP Indonesia melalui penerbitan dokumen Kerangka Kerja SCP Indonesia Tahun 2020—2030 dan dokumen Pedoman Aksi SCP. Dokumen ini merupakan pemutakhiran untuk Kerangka Kerja SCP Indonesia Tahun 2013—2030 yang memuat: (1) Arah pelaksanaan perubahan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan di Indonesia; (2) Acuan bersama penyusunan strategi dan aksi untuk perubahan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dari tingkat tapak; serta (3) Acuan pelaksanaan kolaborasi lintas sektoral untuk berbagai kebijakan yang memiliki konten konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Sementara itu, dokumen Pedoman Menu Aksi SCP merupakan kompilasi “Pedoman Aksi Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan” dari kumpulan inovasi dan inisiatif aksi SDG 12 SCP yang telah berkembang di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Dokumen ini diharapkan menjadi referensi pilihan pelaksanaan SCP yang nyata, mudah dipahami, dan bermanfaat (*tangible – deliverable – beneficial*) untuk Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab/Kota), Komunitas yang akan bergerak, dan Bisnis. Selain itu, dalam jangka panjang, masing-masing menu aksi ini dapat menjadi alat akselerasi bersama dalam mencapai SDGs tahun 2030. Pelaksanaan kedua dokumen ini diharapkan bisa menjaga keselarasan dan menjamin konektivitas antara aksi SDGs.

Penerapan SCP di Indonesia meliputi (1) pengembangan perangkat kebijakan dan teknis penerapan produksi bersih (eko-efisiensi); (2) verifikasi kinerja teknologi ramah lingkungan; (3) sistem manajemen lingkungan untuk penerapan produksi berkelanjutan; (4) kriteria ekolabel untuk sertifikasi produk ramah lingkungan dan pengadaan barang/jasa ramah lingkungan untuk penerapan konsumsi berkelanjutan; (5) sistem kompetensi keahlian dan lembaga penyedia jasa untuk penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten; dan (6) pembinaan dan peningkatan kapasitas produsen dan konsumen, termasuk pihak pendukung, a.l. sektor pembiayaan (*green banking*), serta (7) penerapan efisiensi energi, industri hijau, dan pariwisata ramah lingkungan oleh berbagai instansi. Saat ini, pemerintah juga tengah menginisiasi pengembangan kebijakan ekonomi sirkular untuk dapat diimplementasikan secara menyeluruh dalam rantai pasok ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap komitmen produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Salah satu cara mendorong penerapan SCP di tingkat perusahaan adalah melalui pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). PROPER adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Mekanisme dan kriteria penilaian tertuang dalam Permen LHK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan

Hidup. PROPER menggambarkan pola produksi berkelanjutan yang dicerminkan dengan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Terdapat lima kategori PROPER, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam, yang merupakan urutan capaian kinerja perusahaan dari yang terbaik/konsisten sampai dengan yang terendah. Hingga tahun 2020, sebanyak 2.038 perusahaan telah turut serta dalam penilaian PROPER yang berkontribusi terhadap pengurangan beban pencemar sebesar 46,16 juta ton, kegiatan 3R limbah non B3 mencapai 5.029.181 ton, penurunan emisi GRK 131,2 juta ton CO₂e, dan efisiensi penggunaan air sebesar 339.529.963 m³.

Seiring dengan bertambahnya jumlah industri yang berpartisipasi dalam penilaian PROPER serta mendapatkan sertifikasi hijau hingga emas, menunjukkan semakin tingginya kontribusi para pihak terhadap implementasi produksi dan konsumsi yang berkelanjutan di Indonesia.



Gambar 2.91 Jumlah perusahaan yang mengikuti PROPER tahun 2015-2020

Sumber: KLHK 2020

Secara umum, penerima PROPER meningkat dari 1.422 perusahaan pada tahun 2015-2016 menjadi 1.629 perusahaan pada tahun 2019-2020. Selain itu, penerima PROPER Emas juga mengalami peningkatan dari 12 perusahaan (2015-2016) menjadi 32 perusahaan pada tahun 2019-2020. Sementara itu, *trend* perusahaan penerima PROPER Hijau mengalami penurunan dari 172 pada tahun 2015-2016 menjadi 125 pada tahun 2019-2020 seiring beberapa perusahaan meningkat menjadi kategori Emas. Selebihnya, perusahaan penerima PROPER Merah masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun, masih terdapat 2 perusahaan hingga tahun 2020 yang mendapatkan predikat PROPER Hitam.

Penerapan industri hijau yang dilakukan melalui konsep produksi bersih (*cleaner production*) mencakup aplikasi 4R, yaitu *Reduce* (pengurangan limbah pada sumbernya), *Reuse* (penggunaan kembali limbah), *Recycle* (daur ulang limbah), dan *Recovery* (pemisahan suatu bahan atau energi dari suatu limbah). Upaya pemerintah terkait penerapan industri hijau dilakukan melalui penyusunan Standar Industri Hijau dan adanya Sertifikasi Industri Hijau (SIH) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. SIH merupakan salah bentuk

insentif non fiskal dari Pemerintah kepada industri yang telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya material (bahan baku dan bahan penolong), energi, air, proses produksi, manajemen perusahaan, pengelolaan limbah, dan aspek lainnya sehingga tercapai industri yang berkelanjutan. SIH diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagai bagian dari Standardisasi Industri Hijau. Regulasi lebih teknis diatur dalam Permen Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau. Insentif non fiskal diberikan dalam bentuk pembiayaan sertifikasi awal terhadap penerapan industri hijau. Dalam mendukung dan memotivasi industri untuk sertifikasi industri hijau, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Penghargaan Industri Hijau. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2019, sebanyak 895 perusahaan telah mendapatkan penghargaan industri hijau yang berkontribusi dalam penghematan energi dan air secara ekuivalen mencapai Rp 3,5 Triliun dan Rp 228,9 Milyar. Kementerian Perindustrian telah menetapkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) SIH pada tahun 2017-2020. Selama tahun 2017-2020 sebanyak 37 perusahaan industri yang telah tersertifikasi industri hijau melalui kolaborasi pembiayaan oleh pemerintah dan industri. Dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi industri hijau, hingga tahun 2020 terdapat 16 (enam belas) Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terdiri atas 8 (delapan) Balai Besar, 1 (satu) Balai Riset Standardisasi Industri, 1 (satu) Balai Sertifikasi Industri, dan 6 (enam) LSIH eksternal.

Upaya pendukung implementasi 10 YFP SCP juga dilakukan melalui penerapan standar produksi dan konsumsi pada sektor-sektor pembangunan. Salah satunya adalah penerapan standar SCP bidang lingkungan hidup dan kehutanan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini telah dibangun 10 (sepuluh) standar nasional Indonesia (SNI) antara lain: (1) Bidang Standardisasi Pengelolaan (pengelolaan hutan, perbenihan, dan pembibitan; dan manajemen lingkungan); (2) Bidang Standardisasi Produk (hasil hutan bukan kayu, kayu bundar, kayu gergajian, panel kayu, produk lainnya; harmonisasi terhadap standar internasional; kriteria ekolabel); 3) Bidang Standardisasi Teknologi dan Pengujian (kualitas air dan air limbah; kualitas air laut; kualitas udara; bahan berbahaya beracun; dan kriteria ekolabel) (KLHK, 2021b). Untuk memperkuat hal tersebut, akan dibentuk Badan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSI LHK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pembentukan BSI LHK diharapkan memperkuat penyelenggaraan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. BSI LHK dirancang untuk bekerja menjangkau aspek penyusunan produksi standar, implementasi standar, serta pengawasan dan pengendalian standar sehingga salah satunya dapat memastikan dapat mendukung tercapainya profil-profil produksi dan konsumsi berkelanjutan atau bertanggung jawab.

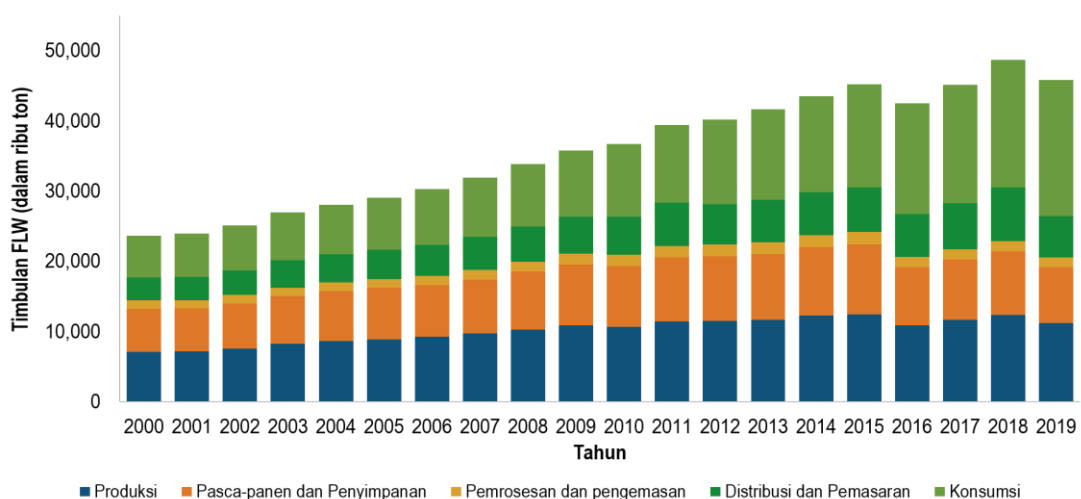
2. Pengurangan Limbah Pangan dan Kehilangan Makanan

Saat ini, kebijakan ketahanan pangan di Indonesia umumnya fokus pada peningkatan produksi pangan dan belum sepenuhnya meningkatkan pengelolaan kehilangan makanan dan sampah makanan (*food loss and waste*, FLW). Menurut FAO (2019), kehilangan makanan atau *food loss* adalah penurunan kuantitas makanan yang dihasilkan makanan yang dihasilkan dari

keputusan dan tindakan pemasok makanan dalam rantai makanan, tidak termasuk retail, penyedia layanan makanan dan konsumen. Sampah makanan atau *food waste* adalah penurunan kuantitas makanan yang dihasilkan dari keputusan dan tindakan pengecer, layanan makanan dan konsumen. *Food loss* berlangsung dari tahap produksi, tahap pascapanen dan penyimpanan, hingga tahap pemrosesan dan pengemasan. Sementara itu, *food waste* terjadi saat distribusi dan pemasaran makanan hingga saat dikonsumsi oleh konsumen.

Menurut kajian *food loss and waste* di Indonesia (Bappenas, 2021), diperkirakan timbulan *food loss and waste* di Indonesia pada tahun 2000-2019 mencapai 23-48 juta ton/tahun atau 115-184 kg/kapita/tahun. Timbulan terbesar terjadi pada rantai pasok konsumsi (5-19 juta ton/tahun). Persentase *food loss* selama 20 tahun cenderung menurun, dari 61% pada tahun 2000 menjadi 45% pada tahun 2019 dengan rata-rata sebesar 56%. Sebaliknya, timbulan *food waste* selama 20 tahun cenderung naik, dari 39% pada tahun 2000 menjadi 55% pada tahun 2019 dengan rata-rata sebesar 44%. Jika ditinjau dari sisi jenis pangan, timbulan FLW terbesar dikontribusikan oleh sektor tanaman pangan, tepatnya dari padi-padian, yaitu sebesar 12-21 juta ton/tahun. Sementara itu, jenis pangan yang paling tidak efisien ialah sektor hortikultura terutama sayur-sayuran – di mana kehilangannya mencapai 62,8% dari seluruh suplai domestik sayur-sayuran yang ada di Indonesia.

Timbulan FLW tersebut memberi dampak multidimensi. Dari aspek lingkungan, timbulan tersebut menghasilkan emisi total gas rumah kaca yang mencapai 1.702,9 Megaton CO₂-ekuivalen. Selanjutnya, dampak dari sisi ekonomi berupa kehilangan ekonomi yang mencapai Rp 213 - 551 Triliun per tahun atau setara dengan 4%-5% PDB Indonesia dan dari sisi sosial berupa kehilangan kandungan energi yang hilang akibat *food loss and waste* setara dengan porsi makan 61 juta - 125 juta orang per tahun. Tidak hanya itu, persoalan FLW ini juga berpengaruh pada pencapaian pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.



Gambar 2.92 Timbulan *food loss and waste* di Indonesia tahun 2000-2019

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2021

Sebagai langkah konkret pengelolaan kehilangan makanan dan sampah dalam rangka penerapan ekonomi sirkular dan pembangunan rendah karbon di Indonesia sekaligus

mendorong capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, beberapa strategi perlu dikembangkan. Strategi disusun dengan menentukan prioritas serta periode pelaksanaan strategi baik jangka pendek, menengah dan panjang di tingkat yang dirangkum dalam 5 (lima) arah kebijakan, yaitu:

1. Perubahan Perilaku dengan fokus pada pengembangan Lembaga Penyuluhan di daerah, peningkatan kapasitas pekerja pangan serta edukasi kepada konsumen untuk meningkatkan perubahan perilaku;
2. Pembenahan Penunjang Sistem Pangan dengan mengembangkan korporasi petani dan nelayan serta menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung efisiensi proses pangan.
3. Penguatan Regulasi dan Optimalisasi pendanaan tepat guna untuk perbaikan infrastruktur pangan, mengembangkan regulasi kehilangan makanan dan sampah makanan di tingkat nasional dan regional, serta menguatkan koordinasi antar lembaga.
4. Pemanfaatan kehilangan makanan dan sampah makanan dengan mendorong pengembangan platform penyaluran makanan, penanganan kehilangan makanan dan sampah makanan yang mendukung ekonomi sirkular seperti pengomposan, dan pengembangan percontohan pemanfaatan kehilangan makanan dan sampah makanan skala kota/kabupaten.

Pengembangan Kajian dan Pendataan kehilangan makanan dan sampah makanan yang terintegrasi baik pada level nasional maupun daerah.

3. Pengelolaan Bahan Kimia dan Semua Jenis Limbah yang Ramah Lingkungan

a. Peran Aktif Mengikuti Kesepakatan Multilateral Internasional tentang Bahan Kimia dan Limbah Berbahaya

Indonesia mempunyai kepentingan besar dalam berperan aktif mendukung kesepakatan terkait pengelolaan bahan kimia dan limbah berbahaya. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau dan secara geografis rentan terhadap datangnya sumber pencemar, termasuk limbah B3, sehingga membutuhkan kerja sama dengan negara lain. Indonesia telah berperan aktif dalam beberapa perjanjian lingkungan hidup di tingkat internasional terkait bahan kimia dan limbah B3, serta telah meratifikasinya, antara lain:

1. Konvensi Basel – terkait dengan pengendalian *Transboundary Movement* dari B3 dan pembuangannya. Tahun 1993, Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 dan amandemen Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2005 untuk melarang limbah padat B3 impor dan menjaga negara menjadi tempat pembuangan bagi segala macam limbah.
2. Konvensi Stockholm – perjanjian yang mengikat (*legally binding*), terkait dengan pengeliminasian Polutan Organik Persisten (POP). Pada tahun 2009, Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui UU Nomor 19 tahun 2009.
3. Konvensi Rotterdam – perjanjian yang mengikat (*legally binding*) terkait dengan implementasi prosedur *the Prior Informed Consent* (PIC), terutama perdagangan Bahan

Berbahaya Beracun. Indonesia meratifikasinya dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2013.

4. Konvensi Minamata – perjanjian terkait limbah merkuri. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui UU Nomor 11 Tahun 2017. Untuk mendukung implementasi, Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

Ketiga konvensi, yaitu Konvensi Basel, Stockholm, dan Rotterdam, secara rutin menyelenggarakan Konferensi Para Pihak (*Conference of Parties*) setiap dua tahun sekali terhadap negara-negara yang telah berkomitmen. Indonesia turut hadir dalam konferensi tersebut dan menyampaikan perkembangan terkini pengelolaan B3 dan limbah B3 di Indonesia sebagai wujud komitmen perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Indonesia juga menjadi tuan rumah sekaligus presidensi penyelenggaraan Conference of Parties (COP)-4 Minamata Convention on Mercury yang diselenggarakan menjadi 2 tahap, tahap I (COP-4.1) diselenggarakan secara virtual pada tahun 2021 dan tahap 2 (COP-4.2) diselenggarakan secara offline pada tahun 2022 mendatang di Bali.

b. Persentase Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dari Baseline 50 ton Penggunaan Merkuri

Sebagai implementasi peran aktif dalam pengelolaan limbah B3 yang sesuai kesepakatan global, terutama terkait ratifikasi Konvensi Rotterdam dan Konvensi Minamata, Indonesia menjadikan upaya pengurangan dan penghapusan merkuri sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Pengurangan merkuri adalah upaya pembatasan merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran merkuri, penggunaan merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan merkuri, sedangkan penghapusan merkuri adalah upaya pelarangan produksi merkuri, penggunaan merkuri, dan/atau penggantian merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM). Upaya pengurangan dan penghapusan merkuri telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. RAN PPM ini diprioritaskan pada 4 (empat) sektor pembangunan meliputi sektor energi, kesehatan, manufaktur, serta pertambangan emas skala kecil (PESK). Selain RAN PPM, pada tahun 2016 Kementerian Kesehatan melalui Permenkes 57/2016 tentang RAN Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri Tahun 2016-2020 yang menginstruksikan penarikan alat-alat kesehatan mengandung merkuri dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Pada COP 4.1 Minamata Convention on Mercury yang diselenggarakan Oktober 2021 di Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa Indonesia telah melakukan sejumlah upaya dalam pengelolaan penggunaan merkuri, yaitu 1) Indonesia telah berhasil menurunkan penggunaan merkuri sebanyak 374,4 kg di sektor industri lampu dan baterai; 2) mengendalikan 710 kg emisi merkuri dari pembakaran pembangkit listrik tenaga uap, 3) mengurangi 4.700 kg merkuri pada sektor kesehatan; 4) penurunan penggunaan merkuri

mencapai 12,4 ton melalui pembangunan fasilitas pengolahan emas non-merkuri. Selain itu, Indonesia juga akan mendorong diadopsinya Deklarasi Bali yang bertujuan untuk penghapusan perdagangan ilegal merkuri di dunia dalam COP 4.2 Minamata mendatang.

Salah satu upaya inovatif awal pengelolaan merkuri secara terintegrasi adalah melalui pembangunan Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan. Laboratorium ini selesai dibangun pada Desember 2020 dan pada tahun 2021 diharapkan dapat beroperasi secara optimal. Laboratorium ini berfungsi untuk mengembangkan jejaring penelitian dan pemantauan merkuri di Indonesia serta pengembangan standar dan instrumen yang mendukung RAN PPM di Indonesia. Selain itu, laboratorium ini diharapkan memperkuat upaya *surveillance* dan pengendalian cemaran merkuri secara cepat dan akurat dari dalam negeri (tidak bergantung pada pengujian dari LN). Laboratorium ini juga diharapkan menjadi *center of excellence* untuk memperkuat kapasitas Laboratorium Lingkungan di Daerah.5) membangun laboratorium merkuri dan metrologi lingkungan yang kedepannya akan menjadi salah satu “centre of excellence of mercury” tidak hanya di regional Asia Tenggara, namun juga di Asia Pasifik.

c. Persentase Penurunan Tingkat Konsumsi Perusak Ozon dari Baseline

Bahan kimia yang dikategorikan bahan perusak ozon (BPO) antara lain *Chlorofluorocarbons* (CFCs), *Halon*, *Carbon tetrachloride* (CTC), *Methyl chloroform* (1,1,1-trichloroethane / TCA), *Hydrochlorofluorocarbons* (HCFCs), *Hydrobromofluorocarbons* (HBFCs), Bromochloromethane, dan Methyl bromide. BPO antara lain digunakan sebagai bahan pendingin refrigerasi dan AC, zat pendorong untuk bahan semprotan, pengembang pembuatan busa, bahan pemadam api, *fumigant* sebagai pembasmi hama, serta sebagai cairan pembersih. Selain kegunaan tersebut, BPO berkontribusi dalam merusak lingkungan. BPO yang lepas ke alam dapat mencapai lapisan stratosfer dan bereaksi dengan ozon (O₃). Hal ini bisa menyebabkan penguraian sehingga jumlah ozon mengalami penurunan. Penurunan ozon ini akan mengurangi peranan pentingnya dalam menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet-B (UV-B) dari matahari, sehingga meningkatkan UV-B yang lolos dan sampai ke permukaan Bumi. Menurut para ahli, setiap 10% penipisan lapisan ozon dapat meningkatkan 20% radiasi UV-B. Bila radiasi UV-B terlalu banyak sampai ke Bumi maka kasus-kasus yang terjadi, antara lain memicu terjadinya penyakit kanker kulit, katarak mata dan menurunkan tingkat kekebalan tubuh terhadap penyakit infeksi. Selain itu, radiasi UV-B juga dapat menghambat pertumbuhan tanaman sehingga menjadi kerdil, menyebabkan kepunahan plankton yang merupakan sumber makanan utama bagi ikan dan organisme air lainnya, dan mengurangi kemampuan sejumlah organisme dalam penyerapan gas karbondioksida (CO₂) yang merupakan salah satu GRK sehingga berpengaruh pada perubahan iklim.

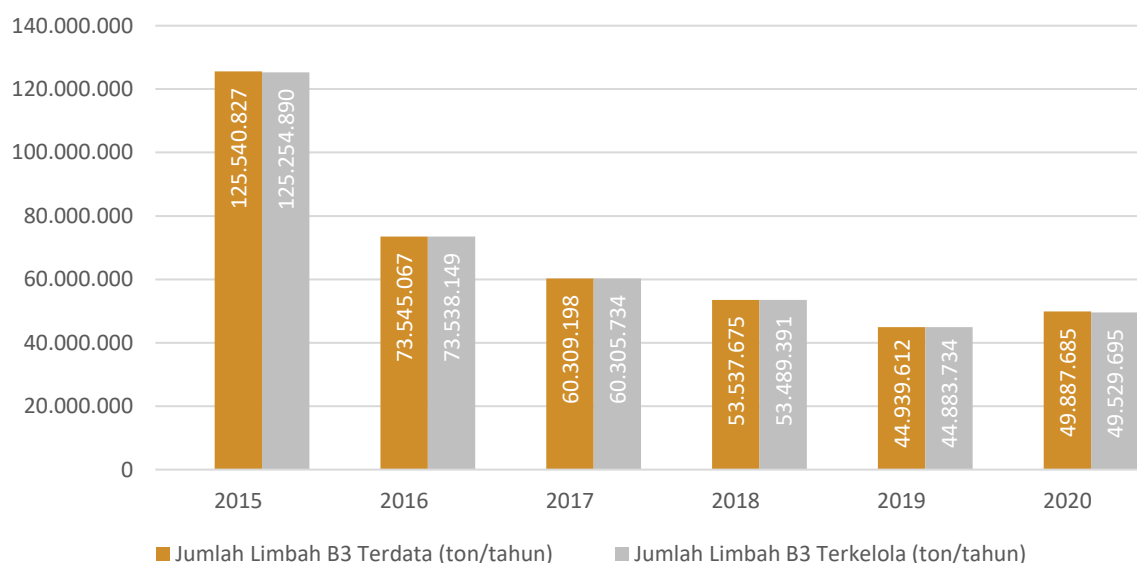
Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyiapkan pengaturan penggunaan bahan perusak ozon sejalan dengan langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Amandemen Kigali yang merupakan penyempurnaan Protokol Montreal. Upaya ini dimulai dari meratifikasi Protokol Montreal pada tahun 1992 yang mengatur konsumsi BPO jenis CFC, HCFC, Halon, Methyl bromide, Methyl chloroform dan Carbon tetrachloride. Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia berhasil

menurunkan konsumsi BPO, khususnya jenis HCFC, sebesar 215,52 ton ODP (Ozone Depleting Potentials) sepanjang tahun 2013—2020.

Pada 1 Januari 2015, Indonesia melarang penggunaan HCFC di industri manufaktur AC dan refrigerasi serta beberapa sektor foam. Selanjutnya, pada tahun 2019, KLHK melakukan studi inventarisasi Hydrofluorocarbon (HFC) sebagai bahan alternatif pengganti BPO. Studi ini merupakan salah satu persiapan dalam meratifikasi Amendemen Kigali yang mengatur penurunan konsumsi HFC secara bertahap.

d. Pengelolaan Limbah B3

Salah satu upaya pengurangan limbah industri di Indonesia dilakukan melalui pengelolaan limbah B3 serta penyusunan kajian upaya pengelolaan limbah B3 di sektor industri. Pada tahun 2020, 95,48% (193,77 juta ton) limbah B3 telah dikelola dari total timbulan sebesar 203,05 juta ton. Capaian pengelolaan limbah B3 yang terkelola ini dipengaruhi oleh perusahaan yang telah menerapkan teknologi bersih sehingga mengurangi penggunaan B3 yang dapat berdampak pada pengurangan timbulan limbah B3. Selain itu, selama 5 tahun terakhir hingga tahun 2020 telah dilakukan pemulihan lahan terkontaminasi seluas ±1,9 juta m² atau setara dengan ±2,9 juta ton limbah B3.



Gambar 2.93 Jumlah limbah B3 terdata dan terkelola

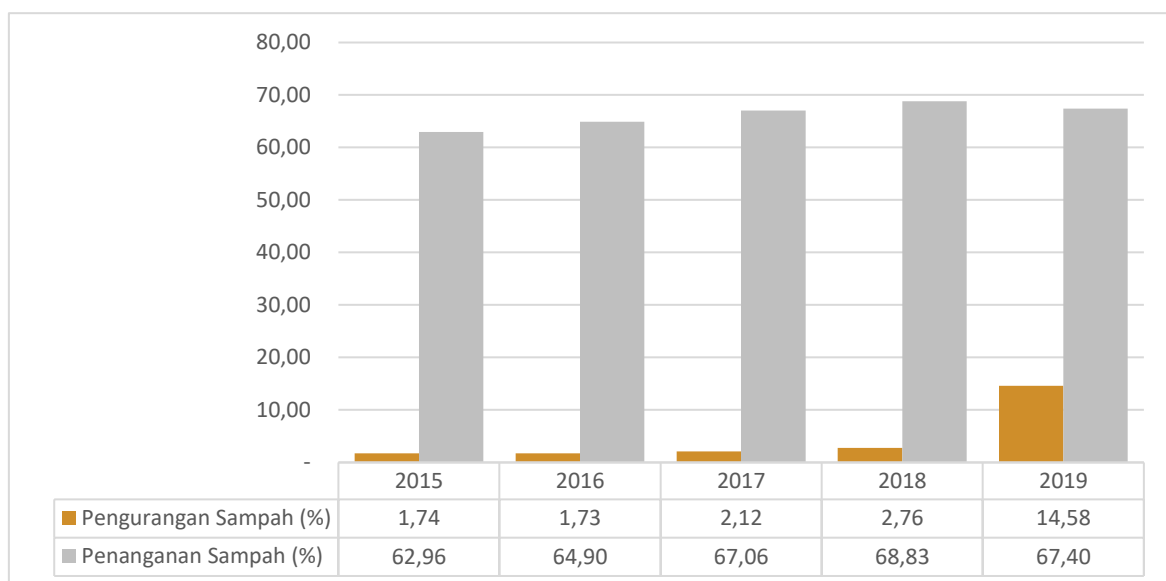
Sumber: KLHK, 2020c dan KLHK, 2021d

4. Pengurangan Produksi Sampah

Pada tahun 2015, masyarakat Indonesia mulai melakukan pengelolaan sampah terpadu *Reduce, Reuse and Recycle* (3R) melalui beroperasinya Pusat Daur Ulang (PDU) skala kota dan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R dengan kapasitas 5 – 20 ton/hari. Pada tahun 2019, KLHK telah mendorong kebijakan perpanjangan tanggung jawab produsen/*extended producer responsibility* (EPR) di Indonesia yang ditandai dengan adanya Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencapai target pengurangan sampah oleh produsen sebesar 30% dibandingkan timbulan sampah pada tahun 2029. Pengurangan sampah yang dimaksud dilakukan melalui pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali.

Pada tahun 2020, tingkat keberhasilan penanganan sampah nasional baru mencapai 46,31 persen dari total timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 57,65 juta ton (290 kab/kota), sementara tingkat pengurangan sampah mencapai 14,17 persen (KLHK, 2021). Dari timbulan sampah yang tidak tertangani tersebut, pada tahun 2020 sekitar 0,52 juta ton terbawa hingga ke laut, yang mana sebagian besar di antaranya merupakan sampah plastik (TKN PSL, 2021)). Selain menimbulkan pencemaran lingkungan, pencemaran sampah plastik juga mengakibatkan gangguan serius bagi kehidupan biota laut. Selain itu, kandungan mikroplastik yang semula terakumulasi pada air dan tubuh hewan laut kini ditemukan juga di tubuh manusia sehingga diprediksi akan menimbulkan dampak dan masalah kesehatan di kemudian hari.



Gambar 2.94 Capaian pengurangan dan penanganan pengelolaan sampah di Indonesia

Sumber: KLHK 2020

Di tingkat masyarakat, upaya pengelolaan persampahan juga didorong melalui adanya Bank Sampah sebagai bentuk *social engineering* atau rekayasa sosial di dalam masyarakat dalam mengedukasi, mengubah perilaku khususnya pengelolaan sampah di sumber (rumah tangga) dan penerapan ekonomi sirkular. Bank sampah masyarakat tidak hanya memberikan manfaat lingkungan namun juga manfaat ekonomi. Menurut data KLHK per Juli 2021, jumlah Bank Sampah sebanyak 11.556 unit yang tersebar di 363 kab/kota di seluruh Indonesia dengan jumlah nasabah sebanyak 419.204 orang dan omset bulanan kurang lebih Rp 2,8M. Capaian tersebut diperkirakan mampu melakukan pengurangan sampah sebanyak 2,7% dari total timbulan sampah nasional. Optimalisasi peran bank sampah juga terus dilakukan

melalui dikeluarkannya Peraturan Menteri LHK No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah dan peluncuran Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah (SIMBA.ID) untuk memperkuat pendataan bank sampah.

5. Praktek Berkelanjutan dalam Siklus Pelaporan Perusahaan

a. Laporan Berkelanjutan Perusahaan

Publikasi penerapan praktik-praktik berkelanjutan dilakukan melalui Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report* atau SR). Laporan Keberlanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Laporan ini merupakan alat bagi industri keuangan untuk menetapkan tujuan, memonitor kinerja, melakukan evaluasi, dan mengelola perubahan untuk menciptakan kegiatan operasional yang berkelanjutan dan efisien. Laporan Keberlanjutan menjadi sarana bagi industri untuk mengungkapkan informasi kinerja keberlanjutannya secara transparan sehingga dapat mendorong perubahan perilaku dalam mengelola risiko, baik keuangan, sosial maupun lingkungan. Dengan demikian, Laporan Keberlanjutan menjadi salah satu alat ukur bagi pemangku kepentingan (eksternal) dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu industri, termasuk industri keuangan. Penyampaian Laporan Keberlanjutan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga dapat meningkatkan daya tarik dan daya saing industri keuangan. Laporan Keberlanjutan juga memuat dukungan kegiatan atau program industri keuangan yang sejalan dengan SDGs dan komitmen pemerintah lainnya.

Pada tahun 2017, OJK telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. POJK Nomor 51 Tahun 2017 bertujuan mendorong implementasi Keuangan Berkelanjutan dan meningkatkan *awareness* serta partisipasi LJK dalam menyalurkan pembiayaan kepada proyek/program yang berkelanjutan. POJK dimaksud mewajibkan beberapa hal, antara lain: 1) Kewajiban LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk menerapkan 8 (delapan) prinsip keuangan berkelanjutan; 2) Kewajiban LJK untuk menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB); 3) Kewajiban LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk menyampaikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*); dan 4) Pengoptimalan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendukung program keuangan berkelanjutan.

Penerapan keuangan berkelanjutan untuk LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dilakukan secara bertahap. Sektor perbankan menjadi pelaksana pertama atas implementasi dari POJK 51 Tahun 2017 sesuai dengan aset bank yang terbagi dalam empat tingkatan atau kategori aset, yaitu Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4, BUKU 3, BUKU 2, dan BUKU 1 dengan BUKU 4 sebagai kategori bank dengan aset terbesar. Implementasi keuangan berkelanjutan pertama kali dilaksanakan oleh bank BUKU 4, BUKU 3, dan Bank Kepemilikan Asing (BKA) pada tahun 2019. Di tahun 2020, bank-bank tersebut menyampaikan Laporan Keberlanjutan atas implementasi keuangan berkelanjutan di tahun 2019. Jumlah bank BUKU 4, BUKU 3, dan BKA yang menyampaikan SR adalah sekitar 55 (lima puluh lima) Bank dimana Laporan Keberlanjutan ini telah tersedia bagi publik pada bulan Juni 2020 atau 2 (dua) bulan

lebih lambat karena kebijakan relaksasi OJK terhadap batas waktu penyampaian SR akibat pandemi Covid-19.

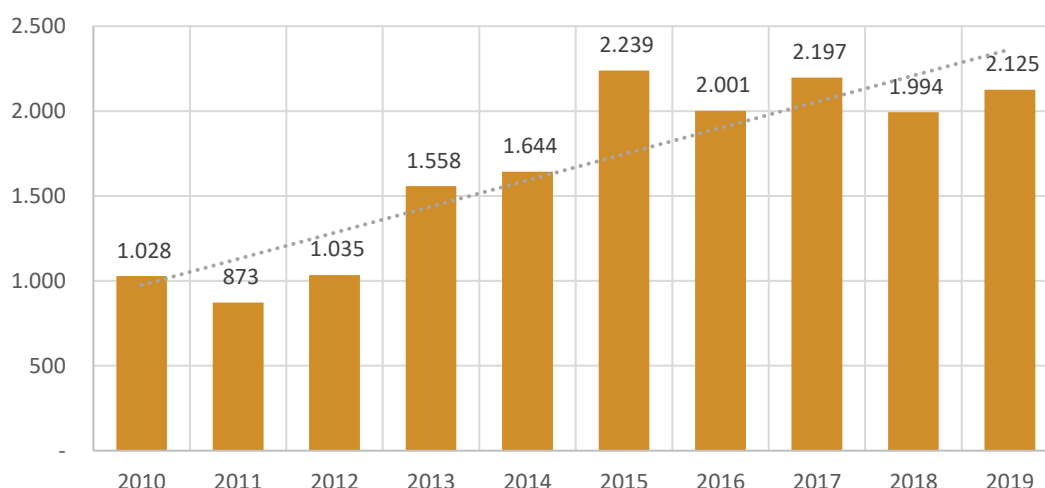
Selanjutnya, POJK Nomor 51 Tahun 2017 juga mewajibkan penerapan Keuangan Berkelanjutan di sektor pasar modal bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah serta Perusahaan Publik wajib menerapkan keuangan berkelanjutan sejak 2020 dan menyusun Laporan Keberlanjutan pertama pada tahun 2021. Namun demikian, OJK memberikan relaksasi batas waktu penyampaian Laporan Keberlanjutan bagi Emiten dan Perusahaan Publik menjadi tahun 2022 akibat pandemi Covid-19.

Beberapa Emiten telah menyusun Laporan Keberlanjutan secara sukarela sebelum diwajibkan oleh POJK Nomor 51 Tahun 2017. Pada tahun 2019, terdapat 64 (enam puluh empat) Emiten yang telah menyusun Laporan Keberlanjutan secara terpisah dari Laporan Tahunan. Emiten dengan jumlah terbanyak yang menyusun Laporan Berkelanjutan bergerak di sektor keuangan (17 Emiten), sektor pertambangan (11 Emiten), dan sektor perdagangan, jasa, dan investasi (10 Emiten).

Di sektor keuangan nonbank, implementasi Keuangan Berkelanjutan wajib diterapkan sejak tahun 2020 oleh perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Lembaga jasa keuangan non-bank (LJKNB) akan menyampaikan Laporan Keberlanjutan pertama kali pada tahun 2021.

b. Perusahaan yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001

Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. Penerapan SNI ISO 14001 berawal dari SNI 19-14001:1996 mengenai Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang memuat persyaratan dan panduan penggunaannya. SNI ISO 14001 mengalami beberapa revisi diantaranya SNI 19-14001:2005 dan terakhir adalah SNI ISO 14001: 2015. ISO 14001 merupakan standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan. Berdasarkan Laporan Capaian SDGs 2020 (Bappenas 2020) dilengkapi *update* capaian SDGs KLHK (2021), jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001 di Indonesia memperlihatkan kecenderungan yang positif. Selama kurun waktu tahun 2009-2019 jumlah perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan SNI ISO 14001 cenderung meningkat dari 1.028 perusahaan (2010) menjadi 2.125 perusahaan (2019).



Gambar 2.95 Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2020 dan KLHK 2021a

6. Praktek Pengadaan Publik yang Berkelanjutan

a. Produk Ramah Lingkungan Teregister dan Masuk dalam Pengadaan Barang - Jasa Pemerintah

Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, salah satu tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Selanjutnya, pada Pasal 68, dijelaskan bahwa PBJP dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan yang terdiri atas: (1) Aspek Ekonomi; (2) Aspek Sosial; dan (3) Aspek Lingkungan. Pengembangan aspek lingkungan dalam pengadaan berkelanjutan salah satunya dicerminkan melalui pengembangan pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan. Pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan ini diamanatkan pada Pasal 43 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 32, pasal 31-37 PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup mengatur sistem label ramah lingkungan serta pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan sebagai instrumen insentif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan berkelanjutan dilaksanakan oleh: (1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa; (2) PPK dalam Menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa; (3) Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan dalam Menyusun Dokumen Pemilihan. Lebih lanjut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja (KAK), dan rancangan kontrak menggunakan produk ramah lingkungan yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Penerapan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan dimaksudkan untuk mendorong perubahan perilaku dan pola pikir dari sisi konsumsi di jajaran instansi Pemerintah agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Penerapan pengadaan barang dan jasa ramah

lingkungan juga bermakna keteladanan perubahan perilaku dari jajaran pemerintah serta pada komunitas – komunitas yang telah terbentuk di masyarakat. Skema yang digunakan sebagai kriteria dalam pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan merupakan kesepakatan bersama antara Kementerian/Lembaga pemilik skema untuk maju bersama mengawal aspek lingkungan dan keberlanjutan secara lintas sektor. Daftar Rujukan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2019 yaitu: (1) Kertas fotokopi dengan skema Ekolabel Tipe 1 (skema dikembangkan oleh KLHK); (2) *Folder file* dengan skema Ekolabel Tipe 2 (KLHK); (3) Kayu untuk furnitur dengan skema SVLK (KLHK); (4) *Microwave Hybrid* dengan skema Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan (KLHK); (5) *Autoclave Hybrid* dengan skema Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan (KLHK); (6) AC dengan skema Label Tanda Hemat Energi (skema dikembangkan oleh Kementerian ESDM).

Sebagai acuan dalam operasional pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan, LKPP telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 16 Tahun 2020 tentang Penetapan Produk Hijau/Hasil Industri Hijau Untuk Dapat Digunakan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan. Produk hijau yang ditetapkan dalam surat edaran ini terdiri dari kertas fotokopi berekolabel, peralatan kantor stationery (*folder file*) berekolabel dan furnitur berbahan kayu bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Surat edaran ini bisa dijadikan acuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkelanjutan.

b. Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa

Pertumbuhan *permintaan* barang dan jasa yang ramah lingkungan mendukung pelaksanaan kebijakan/program *Green Public Procurement, Green Building, Green Tourism, Green Hotel* dan lain-lain. Untuk menunjukkan suatu produk ramah lingkungan, Indonesia telah mengeluarkan logo ekolabel untuk produk ramah lingkungan yang teregister yaitu: (1) Ekolabel Tipe I, Label ini diberikan kepada produk yang telah memenuhi SNI kriteria ekolabel. Sampai bulan April tahun 2021 terdapat 31 produk telah teregistrasi memenuhi Ekolabel Tipe I; (2) Ekolabel Tipe II. Label ini diberikan kepada produk yang memiliki swadeklarasi lingkungan yang terverifikasi. Sampai bulan April tahun 2021, sebanyak 122 produk telah teregistrasi memenuhi ekolabel Tipe II. Standar/kriteria ramah lingkungan dapat ditetapkan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia maupun yang ditetapkan melalui peraturan Menteri serta kriteria aspek lingkungan yang merujuk pada SNI ISO 14021 dan mengikuti tata cara pencantuman logo Ekolabel sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel. Ketentuan ekolabel memiliki 3 (tiga) aspek keberlanjutan yaitu (1) keberlanjutan fungsi produk hutan; (2) keberlanjutan fungsi ekologis hutan; (3) keberlanjutan sosial budaya, sehingga diharapkan pengadaan publik juga dapat sejalan dengan aspek-aspek kelestarian hutan baik dari sumber daya hutan, konservasi, sosial-ekonomi, dan institusi.

7. Informasi dan Kesadaran Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

a. Satuan Pendidikan Formal dan Lembaga/Komunitas Masyarakat Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup

Kesadaran terhadap pentingnya pola hidup ramah lingkungan dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta pengembangan kapasitas manusia dan kelembagaan. Indikator yang digunakan adalah jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup merupakan upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan. Harapannya, pendidikan ini pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Program Adiwiyata merupakan salah satu dari Program KLHK dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Program ini didukung beberapa regulasi, antara lain Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, Permen LHK Nomor 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, serta Permen LHK Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata.

Program Adiwiyata bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah agar dapat menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, murid dan karyawan sekolah) yang diwujudkan dalam: (1) Pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan; (2) Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan; (3) Pengembangan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; serta (4) Pengembangan dan pengelolaan sarana pendukung sekolah berbudaya lingkungan. Pada tahun 2019 terdapat tambahan sekolah yang mengikuti program Adiwiyata sebanyak 434 unit Sekolah Adiwiyata. Terdapat juga 5 (lima) unit lembaga/komunitas Gemilang yang merupakan representasi dari satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup (KLHK, 2021). Selain itu, pada tahun 2019 dihasilkan 363 orang kader lingkungan hidup dan kehutanan, 1.320 orang generasi lingkungan hidup dan kehutanan, serta 785 orang Pramuka Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti. Kader konservasi berperan sebagai pelopor dan penggerak upaya-upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem serta menumbuhkan-kembangkan gerakan konservasi di masyarakat.

KLHK juga memiliki kegiatan penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan dan kehutanan. Kegiatan berupa pengikatan pada kader lingkungan hidup, generasi muda, masyarakat serta pembinaan kepada sekolah di Indonesia. Pelatihan juga ditujukan untuk mendukung program pemerintah, yaitu perhutanan sosial. Melalui kegiatan ini, masyarakat yang telah dilatih

diharapkan dapat menjadi penggerak bagi lingkungan di sekitarnya untuk dapat menjaga dan mengelola lingkungan dengan baik. Pada tahun 2019 terdapat 71.200 orang, dan 5.000 unit sekolah/kampus yang sudah ditingkatkan kapasitasnya agar peduli dan berbudaya lingkungan hidup.

b. Fasilitas Publik yang Menerapkan Pelayanan Masyarakat (SPM) dan Teregister

Kesadaran akan pola hidup ramah lingkungan juga dapat diintervensi melalui keberadaan fasilitas publik ramah lingkungan yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat. Fasilitas publik merupakan lokus yang ideal dalam melakukan intervensi menuju pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Fasilitas publik merupakan tempat terjadinya interaksi antara perilaku masyarakat selaku pengguna fasilitas publik dengan perilaku pemerintah dan swasta selaku pengelola fasilitas publik. Dengan demikian, fasilitas publik dapat menjadi laboratorium sosial bersama dalam mendorong perilaku produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab.

Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik (SPM-FP) menyediakan standar bagi pengelola fasilitas publik melalui Peraturan Menteri LHK No. 90 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan. Permen tersebut mengamanatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana urusan pemerintahan dalam pelayanan masyarakat di fasilitas publik dan peningkatan kualitas lingkungan menuju kota berkelanjutan dengan dukungan Kementerian, Pemerintah Provinsi, serta para pemangku kepentingan. Pada Peraturan Sekretaris Jenderal KLHK No. 8 Tahun 2017 tentang Penerapan dan Penilaian Kesesuaian Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik dijelaskan terkait panduan skema Penilaian Kesesuaian Pihak Pertama SPM-FP. Sampai dengan tahun 2020, telah tersusun 12 (dua belas) dokumen meliputi SPM FP: (1) Tempat Rekreasi; (2) Pariwisata Alam; (3) Pasar Rakyat; (4) Tempat Peribadatan; (5.) Terminal Penumpang Angkutan Jalan; (6) Pusat Perbelanjaan; (7) Pelabuhan; (8) *Rest Area* di Jalan Tol; (9) Pendidikan Tinggi; (10) Penyelenggaraan MICE; (11) Stasiun Kereta Api; dan (12) Pondok Pesantren. Adapun Fasilitas Publik yang telah menerapkan SPM-FP per April 2021 antara lain: (1) SPM-FP Tempat Peribadatan (Masjid Salman ITB dan Gereja Santa Odelia, Bandung); (2) SPM-FP Pariwisata Alam (Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, Bandung); (3) SPM-FP Stasiun Kereta Api (Stasiun Sudirman, Jakarta; Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan; dan Stasiun Klender, Jakarta).

8. Dampak Pembangunan Berkelanjutan terhadap Pariwisata Berkelanjutan

a. Lokasi Penerapan *Sustainable Tourism Development*

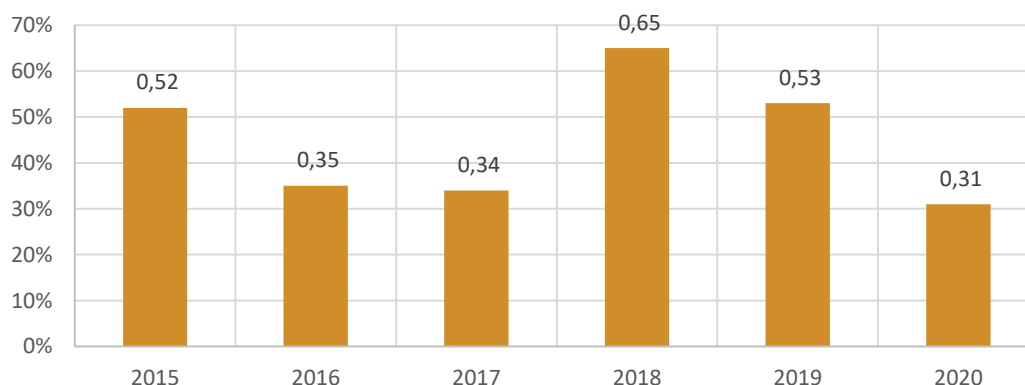
Penerapan *sustainable tourism* atau pariwisata berkelanjutan telah menjadi *mainstreaming* untuk pengembangan pariwisata yang berkualitas sesuai arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sampai dengan tahun 2020, *sustainable tourism* telah dilaksanakan oleh Kementerian/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam bentuk dukungan pada pembangunan *Sustainable Tourism Destinations* dan *Sustainable Tourism Observatory*. Pelaksanaannya difokuskan di beberapa lokasi dalam 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas, 8 (delapan) Destinasi Pariwisata

Pengembangan, dan Destinasi Revitalisasi Bali. Pelaksanaan, penerapan, dan pendanaan sustainable tourism dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan mitra pembangunan. Untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan serta branding dari konsep sustainable tourism, juga diadakan Indonesia Sustainable Tourism Awards (ISTA) sebagai wadah apresiasi dari pembangunan sustainable tourism, yang mencakup tata kelola destinasi wisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, pelestarian budaya, pelestarian lingkungan, akomodasi hijau dan kelompok masyarakat sadar wisata. Penerapan pariwisata berkelanjutan juga perlu disertai dengan kesadaran akan pariwisata yang bertanggung jawab (*responsible tourism*), yang berfokus pada perwujudan destinasi wisata sebagai tempat untuk tinggal dan berwisata. Pembangunan pariwisata bertanggung jawab tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepuasan wisatawan (*tourist satisfaction*) namun juga masyarakat di destinasi (*community satisfaction*), industri, dan lingkungan. Wisata bertanggung jawab melibatkan banyak pihak, seperti operator dan pelaku industri pariwisata, pemerintah, masyarakat sekitar destinasi wisata dan wisatawan yang bertanggung jawab yang dapat membantu perwujudan pariwisata berkelanjutan.

9. Rasionalisasi Subsidi Bahan Bakar Fosil

Pemerintah telah berkomitmen terhadap upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sesuai amanat tujuan SDG 12. Upaya tersebut secara selaras diwujudkan dengan menurunkan subsidi bahan bakar fosil secara bertahap dan terus-menerus. Berdasarkan realisasinya, terlihat tren penurunan realisasi jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase PDB di Indonesia. Persentase subsidi bahan bakar fosil terhadap PDB selama tiga tahun terakhir menurun dari 0,65% (2018) menjadi 0,31% (2020).

Berkurangnya subsidi bahan bakar fosil merupakan bagian dari pelaksanaan transformasi kebijakan subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis target penerima. Transformasi bentuk bantuan yang berbasis target penerima tersebut dilaksanakan melalui integrasi dengan bantuan sosial secara bertahap. Bantuan sosial ditargetkan untuk meningkatkan akses masyarakat yang tidak mampu. Dengan prinsip *no one left behind* sebagaimana digaungkan dalam SDGs, rasionalisasi bahan bakar fosil ke arah yang lebih tepat sasaran turut berkontribusi mensukseskan pembangunan *green economy*.



Gambar 2.96 Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase PDB

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2021b

C. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan SCP di Indonesia, antara lain: (1) Meningkatkan pemahaman terhadap SCP dan komitmen para pemangku kepentingan; (2) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi mengenai pelaksanaan SCP di Indonesia yang belum tersedia secara lengkap; (3) Meningkatkan green infrastruktur termasuk teknologi melalui skema pembiayaan inovatif dan berkelanjutan; (4) Melengkapi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan panduan operasional mengenai penerapan prinsip-prinsip SCP dalam “business cycle” dan “business process” di pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta termasuk UMKM; dan (5) Mengembangkan skema insentif dan disinsentif yang dapat mendorong implementasi SCP

Pelaksanaan SCP memberikan berbagai manfaat bagi pelakunya, baik dari sisi konsumen maupun produsen. Pada level konsumen atau masyarakat, menerapkan perilaku dan gaya hidup ramah lingkungan dapat memberikan manfaat tidak hanya pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, namun juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik dengan penghematan belanja.

Pada level perusahaan dan negara, penerapan SCP dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Proses produksi dan konsumsi perusahaan yang bertanggung jawab akan menyelaraskan pemanfaatan dan pengelolaan SDA untuk pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga pelestarian ekologi. Selain itu, pelaksanaan SCP dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi menciptakan produk ramah lingkungan dan penggunaan bahan yang berasal dari sumber daur ulang menjadi lebih diutamakan.

Menurut kajian dari Kementerian PPN/Bappenas 2021 berjudul “*The Economic, Social, and Environmental Benefits of Circular Economy in Indonesia*”, Penerapan SCP melalui ekonomi sirkular pada 5 (lima) sektor berpotensi menghasilkan tambahan PDB secara keseluruhan pada kisaran Rp593 triliun sampai dengan Rp 642 triliun, penciptaan total lapangan pekerjaan baru mencapai 4,4 juta sampai tahun 2030, dan penurunan emisi CO₂eq mencapai 126 juta ton pada tahun 2030.

2.13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

A. Pengantar

Perubahan iklim telah, sedang dan akan dapat menimbulkan dampak yang nyata terhadap masyarakat di semua negara dan wilayah. Dampak perubahan iklim beresiko mengganggu perekonomian nasional dan mempengaruhi kehidupan masyarakat saat sekarang dan akan lebih besar lagi dampaknya di masa mendatang tanpa ada penanganan yang kontinyu dan menyeluruh. Dampak perubahan iklim ini dapat dirasakan mulai dari perubahan pola cuaca, meningkatnya permukaan air laut, kejadian cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi, hingga bencana terkait iklim atau hidrometeorologi akibat pemanasan global atau perubahan iklim, seperti banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan.

Emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global menurut IPCC (2018) sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia untuk mencapai kesejahteraan global. Aktivitas manusia diperkirakan telah menyebabkan sekitar 1,0°C pemanasan global di atas tingkat pra-industri, dengan kisarannya antara 0.8° C hingga 1.2°C. Namun, pemanasan global kemungkinan besar akan mencapai 1,5° C antara tahun 2030 dan 2052 jika suhu terus meningkat dengan laju seperti saat ini. Suhu rata-rata akan terus meningkat sebesar 3-5°C

pada akhir abad ini dibandingkan dengan pada era pra-industri. Untuk mempertahankan kenaikan suhu di bawah batas 2°C diperlukan koordinasi semua pihak untuk berkontribusi sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Upaya bersama tersebut juga memerlukan berbagai perubahan, termasuk teknologi, kelembagaan dan perilaku.

Indonesia telah mengadopsi kesepakatan bersama, yaitu Paris Climate Agreement yang tujuannya untuk memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan dengan cara menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2,0° C dari angka sebelum masa revolusi industri, dan mengupayakan untuk membatasi peningkatan temperatur hingga setidaknya 1,5° C. Hal ini karena dipahami bahwa pembatasan ini akan dapat mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim secara signifikan (Alisjahbana dan Murniningtyas, 2018).

Penanganan perubahan iklim dalam bentuk pembangunan yang rendah karbon untuk menekan laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan pembangunan yang berketahanan iklim untuk peningkatan ketangguhan dan mengurangi kerentanan masyarakat dan sektor akibat dampak negatif perubahan iklim perlu disinergikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga merupakan instrumen penting dalam upaya transformasi pembangunan hijau menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

B. Status Capaian

1. Pencapaian penguatan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam.

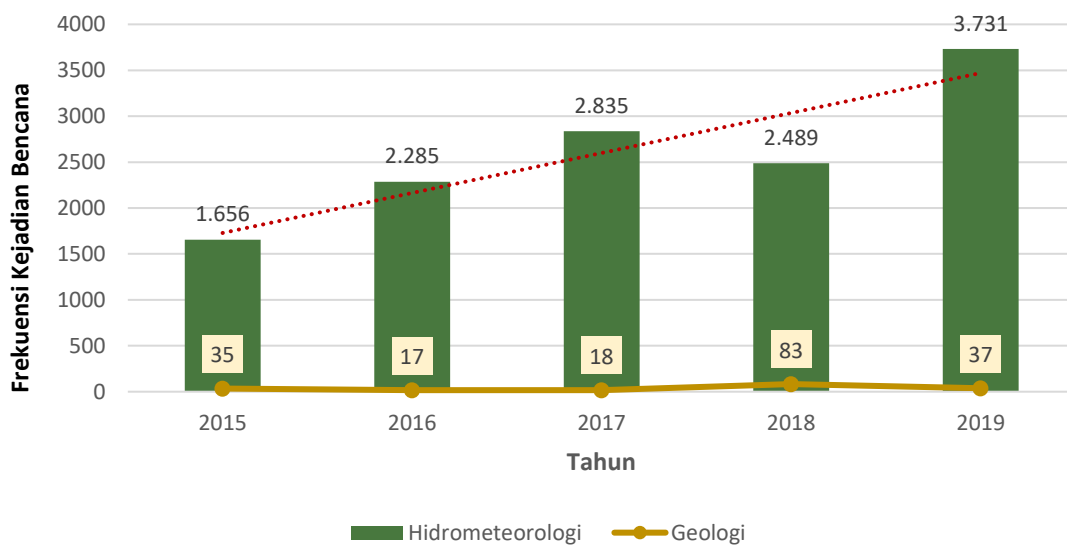
Pencapaian target memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam sampai dengan tahun 2019 diindikasikan dengan kinerja:

1. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi,
2. Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim,
3. Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*,
4. Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.

a. Korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi.

Dalam lima tahun terakhir, bencana yang paling sering terjadi adalah banjir, puting beliung, tanah longsor, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Gambar 2.97 menunjukkan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi di Indonesia dalam kurun waktu antara tahun 2015-2019. Bencana hidrometeorologis tersebut antara lain meliputi berupa banjir, puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang pasang (abrasi). Pada tahun 2019, kelompok bencana hidrometeorologi dengan kecenderungannya yang meningkat jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2015 memiliki jumlah kejadian yang lebih besar dibandingkan dengan kejadian bencana yang disebabkan oleh bencana geologi,

seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api (BNPB, 2020b). Tingginya frekuensi bencana yang terjadi di Indonesia telah memakan korban dan kerugian yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari BNPB (2020b), seperti disajikan pada Tabel 2.31, menunjukkan bahwa selama periode tahun 2015-2019 jumlah penduduk yang meninggal akibat bencana berjumlah 8.061 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menderita dan mengungsi akibat bencana berjumlah 2.305.541 jiwa. Jumlah penduduk yang meninggal dan hilang serta jumlah penduduk yang terdampak dan mengungsi akibat bencana tertinggi pada tahun 2018. Pada tahun 2018, jumlah penduduk yang meninggal akibat bencana berjumlah 6.240 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menderita dan mengungsi akibat bencana berjumlah 913.624 jiwa. Kecenderungan jumlah korban meninggal dan hilang serta terdampak kejadian bencana per 100.000 orang dalam kurun waktu 2015-2019 disajikan pada Gambar 2.98.



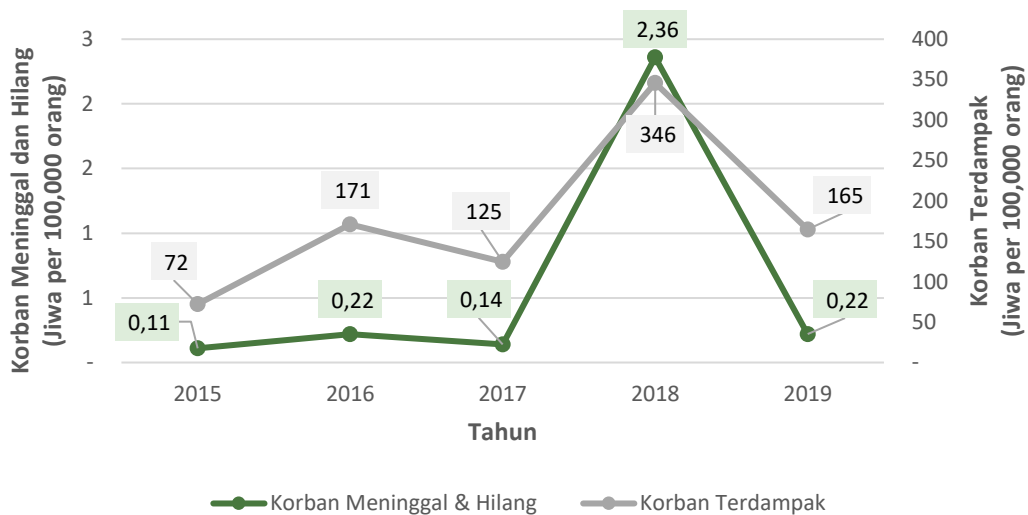
Gambar 2.97 Frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi 2015-2019

Sumber: BNPB, 2020b

Tabel 2.31 Jumlah korban bencana tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Korban (dalam jiwa)	
	Meninggal dan Hilang	Terdampak dan Mengungsi
2015	276	184.624
2016	578	441.600
2017	378	326.038
2018	6.240	913.624
2019	589	439.655

Sumber: BNPB (2020b)

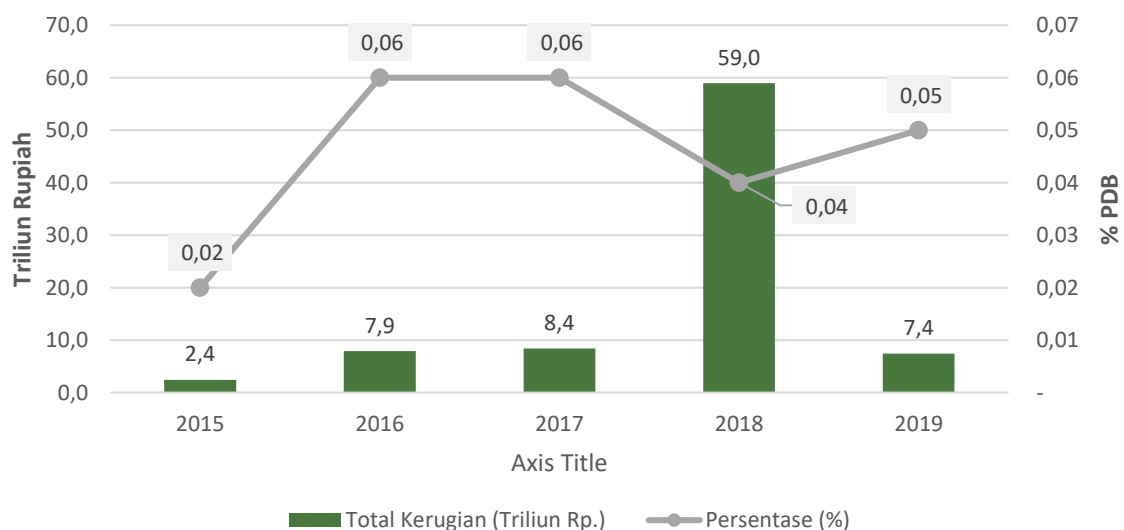


Gambar 2.98 Jumlah korban meninggal, hilang dan terdampak per 100.000 orang

Sumber: BNPB, 2021

b. Potensi pengurangan kehilangan PDB akibat dampak perubahan iklim melalui implementasi kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim

Kerugian akibat bencana tidak saja mengakibatkan korban jiwa dan korban terdampak bencana, namun juga kerugian ekonomi. Dari sisi ketahanan ekonomi, selama rentang waktu 2015-2019, nilai kerugian ekonomi akibat bencana cenderung mengalami penurunan meskipun fluktuatif dimana rata-rata kerugian ekonomi akibat bencana adalah sebesar 17,02 triliun (Gambar 2.99) (Kemen PPN/Bappenas, 2020). Pada tahun 2018, kerugian ekonomi mencapai 59 triliun rupiah (0,04% PDB) akibat terjadi bencana masif yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah. Di tahun 2019, kerugian sebesar 7,4 triliun rupiah (0,05% PDB). Dengan meningkatnya kerugian ekonomi akibat bencana maka akan berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.



Gambar 2.99 Kerugian ekonomi akibat bencana

Sumber: BNPB, 2021

Pengaruh dari perubahan iklim berupa peningkatan cuaca ekstrem, berdampak pada peningkatan kejadian bencana seperti kekeringan, banjir dan tanah longsor, naiknya tinggi muka air laut dan abrasi, serta kejadian gelombang ekstrim di laut. Secara umum, dampak perubahan iklim dibagi dalam dua kategori, yaitu dampak perubahan iklim yang berlangsung cepat (*rapid onset*) dan dampak perubahan iklim yang berlangsung dalam kurun waktu yang relatif panjang (*slow onset*). Kedua hal tersebut dapat memicu kejadian bahaya yang mengakibatkan kerugian ekonomi di empat sektor prioritas. Dampak perubahan iklim *slow onset*, tidak dirasakan secara signifikan saat ini, tetapi terakumulasi dan berpotensi menjadi lebih besar di masa yang akan datang.

Selain kerugian fisik berupa kerusakan infrastruktur, masyarakat juga berpeluang kehilangan mata pencaharian sebagai dampak negatif dari perubahan iklim, terutama yang berprofesi sebagai nelayan perikanan tangkap, nelayan budidaya pesisir, dan petani. Pada tingkat yang lebih makro, perekonomian Indonesia juga diprediksi terpengaruh oleh perubahan iklim, salah satunya yaitu potensi penurunan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan PDB per kapita. Berdasarkan kajian 2019, kerugian ekonomi Indonesia di empat sektor prioritas, kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan diperkirakan sebesar 102,3 triliun rupiah pada tahun 2020 dan 115,4 triliun rupiah pada tahun 2024, atau mengalami peningkatan sebesar 12,76% selama lima tahun. Namun, nilai kerugian ekonomi yang dihasilkan belum menghitung dari seluruh variabel kerugian yang dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim, atau masih undervalue, sehingga dalam riilnya, kerugian ekonomi dari dampak perubahan iklim jauh lebih besar.

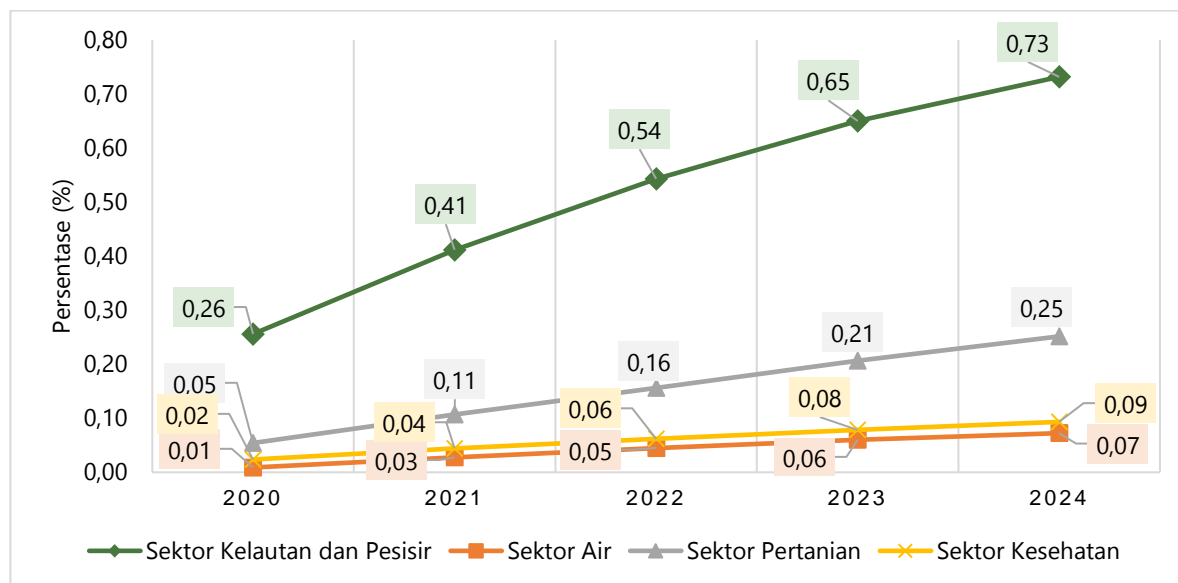
Tabel 2.32 Prakiraan potensi kerugian ekonomi dampak perubahan iklim pada empat sektor prioritas, 2020-2024

Sektor	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kelautan dan Pesisir	81,30	81,43	81,57	81,69	81,82
Air	3,83	4,74	5,61	6,45	7,29
Pertanian	11,20	13,40	15,59	17,77	19,94
Kesehatan	6,03	6,15	6,26	6,37	6,48
Jumlah	102,36	105,72	109,03	112,29	115,53

Sumber: Bappenas (2019)

Sebagai wujud komitmen dalam peningkatan ketahanan iklim, pada April 2021, pemerintah meluncurkan dokumen kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI). Dokumen ini menjadi rujukan perumusan kebijakan PBI yang meliputi lokasi prioritas, program, kerangka kelembagaan, sumber-sumber pendanaan serta kerangka monitoring, pelaporan, dan evaluasi. Capaian peningkatan ketahanan iklim ditunjukkan oleh penurunan potensi kehilangan PDB pada empat (4) sektor prioritas, yaitu kelautan dan pesisir, pertanian, air, serta kesehatan. Target penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dijabarkan pada Gambar 2.100.



Gambar 2.100 Potensi kehilangan PDB sektor terdampak, 2020-2024^{*)}

Sumber: Sekretariat Pembangunan Berketahanan Iklim, Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Catatan: *) Target tahunan

c. Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan bencana.

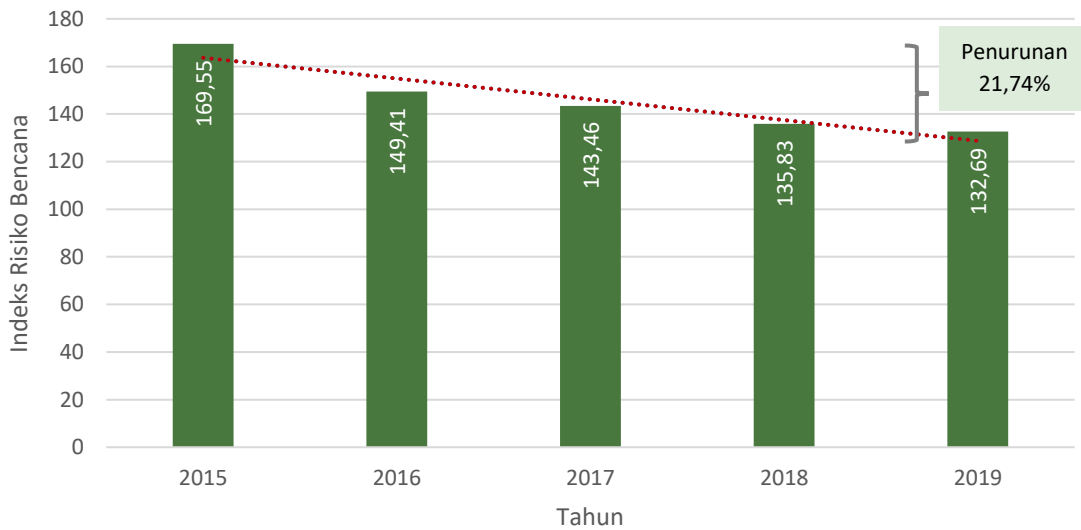
Indonesia telah menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 maupun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 juga telah mengacu pada Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*) 2015-2030 (BNPB, 2020a).

d. Pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan pengurangan risiko bencana daerah.

Sampai dengan tahun 2019, dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) telah dimiliki oleh seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi Kalimantan Utara atau 97.1%. Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) juga telah dimiliki oleh 181 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia atau 35.6% (BPS, 2020; BNPB, 2020c). Dengan telah tersusunnya dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan daerah akan siap dan mampu untuk pencegahan dini atau mengurangi dampak bencana yang akan terjadi. Upaya pengurangan risiko bencana pada suatu daerah dapat dilakukan melalui upaya pengurangan bahaya dan keterpaparan terhadap bencana dan peningkatan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana.

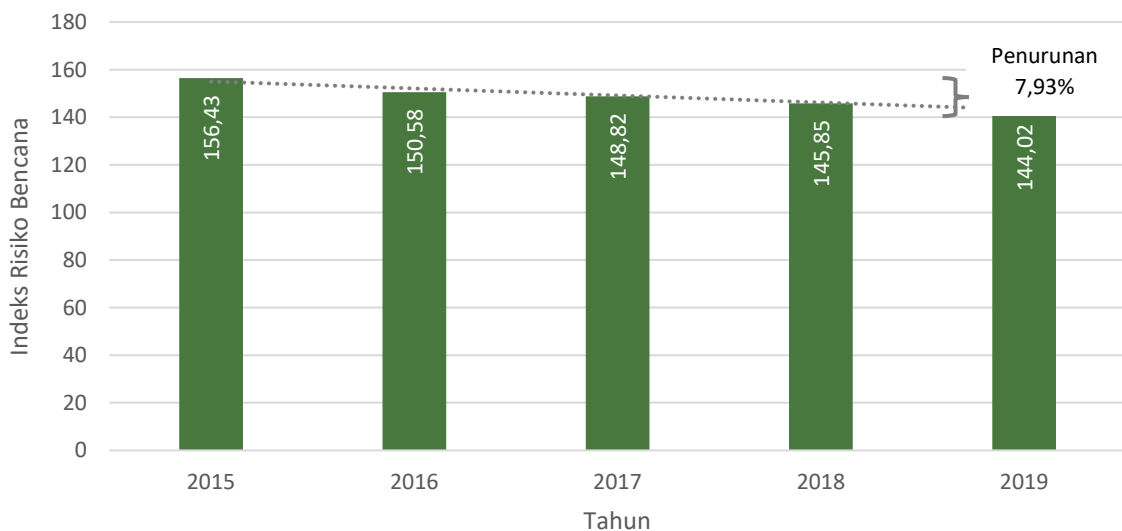
Dalam rentang waktu 2015-2019, data perkembangan Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI (BNPB, 2020b) di pusat pertumbuhan ekonomi berisiko bencana telah berhasil

diturunkan sebesar 21,74% dari 169,55 pada tahun 2015 menjadi 132,69 pada tahun 2019 (Gambar 2.101). Sedangkan nilai IRBI rata-rata nasional pada tahun 2015 sebesar 156,43 diturunkan menjadi 144,02 pada tahun 2019 (Gambar 2.102). Data Indeks Risiko Bencana tingkat provinsi yang paling tinggi adalah Provinsi Banten (skor 173,81) dan yang paling rendah adalah Provinsi DKI Jakarta (skor 72,12). Sedangkan lima provinsi dengan skor Indeks Risiko Bencana tertinggi secara berurutan adalah Provinsi Banten, Bengkulu, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung dan Maluku (BNPB, 2018).



Gambar 2.101 Indeks risiko bencana indonesia prioritas nasional, 2015-2019

Sumber: BNPB 2020b



Gambar 2.102 Indeks risiko bencana Indonesia rata-rata nasional, 2015-2019

Sumber: BNPB, 2020b

2. Integrasi antisipasi perubahan iklim dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

Perubahan iklim menjadi bagian dalam agenda pembangunan Indonesia sejak RPJMN 2009-2014 dan 2015-2019, bahkan semakin diperkuat menjadi prioritas pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan ekonomi dan sosial lainnya pada saat sekarang. Pencapaian target mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional sampai dengan tahun 2019 diindikasikan dengan kinerja:

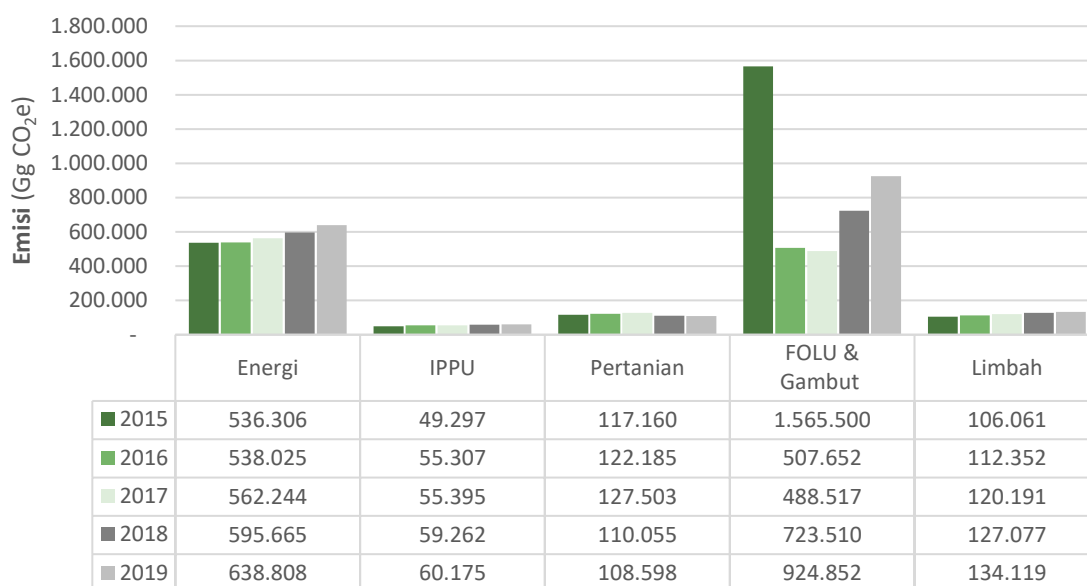
- a) Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK, serta pemantauan, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen *Biennial Update Report* (BUR) dan *National Communications*,
- b) Jumlah emisi GRK per tahun,
- c) Potensi penurunan emisi GRK,
- d) Potensi penurunan intensitas emisi GRK.

a. Penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta pemantauan, pelaporan dan verifikasi emisi GRK

Indonesia memiliki kewajiban untuk melaporkan secara berkala melalui komunikasi nasional, dan untuk menyerahkan laporan pembaruan dua tahunan (BUR) yang berisi pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional, termasuk laporan inventarisasi nasional dan informasi tentang aksi mitigasi, kebutuhan dan dukungan yang diterima, sebagaimana diamanatkan oleh Konferensi Para Pihak pada Sesi Keenambelas (COP 16). Terkait dengan pelaporan dan dokumen perkembangan upaya penanganan perubahan iklim, Indonesia telah menyampaikan dokumen BUR Pertama pada tahun 2016 dan BUR Kedua pada tahun 2018 (UNFCCC, 2021). Dokumen ini berisi tentang update pelaksanaan kegiatan aksi mitigasi yang disampaikan kepada UNFCCC untuk sektor kehutanan, pertanian, energi, industri dan limbah yang disampaikan setiap 2 (dua) tahun. Di samping itu, Indonesia juga telah menyampaikan sebanyak tiga kali laporan Dokumen National Communication, yaitu 1) pada tahun 1999 berupa Initial National Communication, 2) pada November 2010 berupa the Second National Communication (SNC), dan 3) pada tahun 2017 berupa the Third National Communication dimana isi laporan termasuk diantaranya mencakup perkembangan penanganan perubahan iklim di tingkat nasional.

b. Jumlah emisi GRK per tahun

Jumlah emisi GRK berdasarkan perhitungan inventarisasi nasional adalah 1.866.550 Gg CO₂e pada tahun 2019. Kontribusi sektoral terhadap jumlah emisi nasional disajikan pada Gambar 2.103. Untuk tahun 2019, dua penyumbang jumlah emisi terbesar adalah sektor kehutanan dan lahan gambut (49,5%) dan sektor energi (34,2%) (KLHK, 2021).



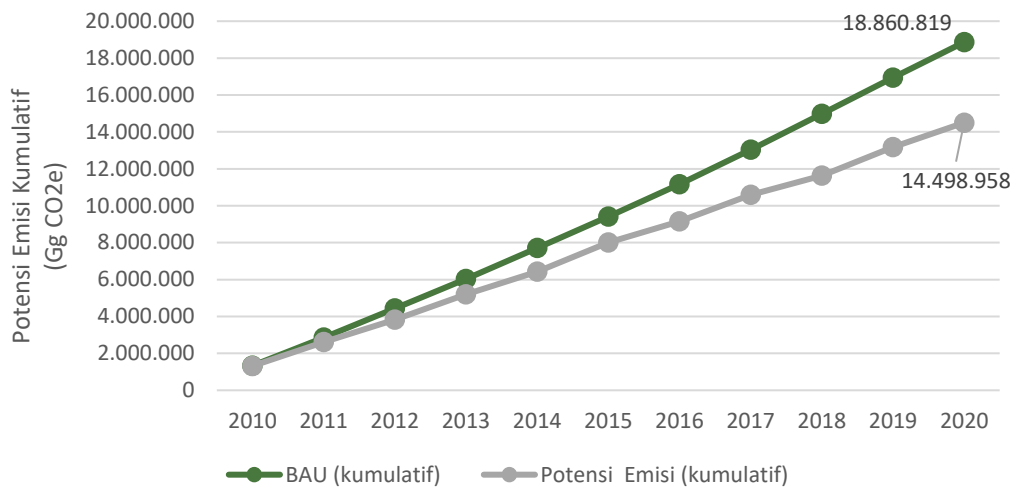
Gambar 2.103 Kecenderungan emisi GRK nasional, 2015-2019

Sumber: KLHK, 2021

c. Potensi penurunan emisi GRK

Berdasarkan hasil pemantauan aksi Pembangunan Rendah Karbon (PRK), capaian penurunan emisi GRK pada tahun 2020 adalah sebesar 25,93% dari baseline kumulatif. Capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan aksi PRK yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemda di 34 provinsi. Upaya penurunan emisi di bidang kehutanan dan lahan gambut dihitung berdasarkan asumsi pencapaian target tahun 2020. Pada tahun 2021, penurunan emisi GRK secara kumulatif ditargetkan sebesar 24,05% (Gambar 2.104). Capaian pengendalian perubahan iklim juga memiliki dampak dalam menekan luas kebakaran hutan dan lahan. Pada bulan Desember tahun 2020, luas kebakaran hutan dan lahan sebesar 296.757 ha, turun secara signifikan dibandingkan luas kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 yakni mencapai sebesar 1.649.258 ha. Selanjutnya angka luas kebakaran hutan sampai bulan Juni tahun 2021 kembali menurun menjadi sebesar 35.273 hektar⁵¹.

⁵¹ Sipongi.menlhk.go.id, diakses bulan Juli 2021

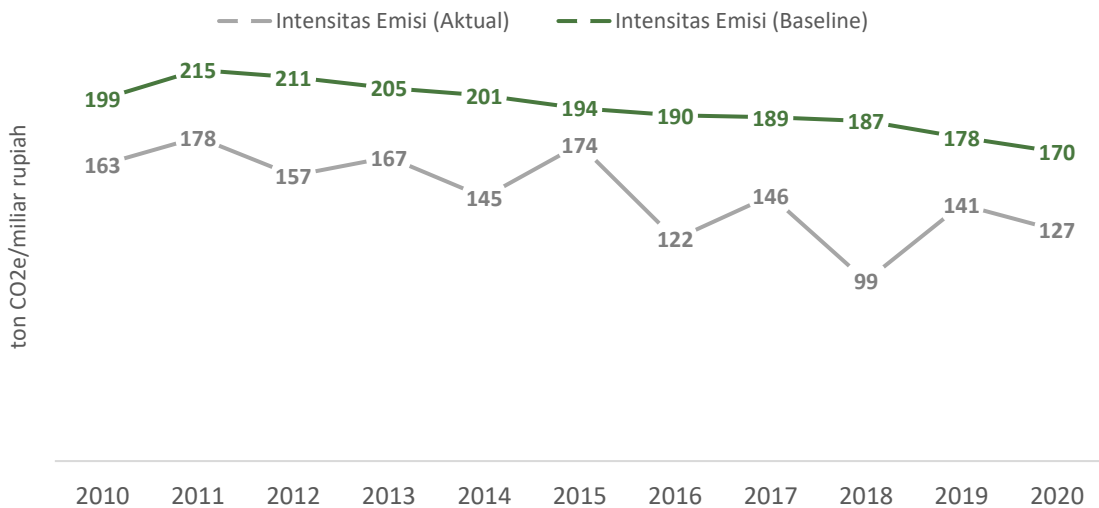


Gambar 2.104 Capaian potensi penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2020

Sumber: Sekretariat Pembangunan Rendah Karbon/Low Carbon Development Initiatives (PRK/LCDI) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, 2021

d. Potensi penurunan intensitas emisi GRK.

Penurunan intensitas emisi GRK pada tahun 2020 mencapai 95 ton CO₂e/miliar rupiah, atau 44,12% lebih rendah apabila dibandingkan dengan baseline sebesar 170 ton CO₂e/miliar rupiah. Target potensi intensitas emisi pada tahun 2021 adalah sebesar 119,50 ton CO₂e/miliar rupiah (Gambar 2.105).



Gambar 2.105 Intensitas emisi GRK, 2010-2020

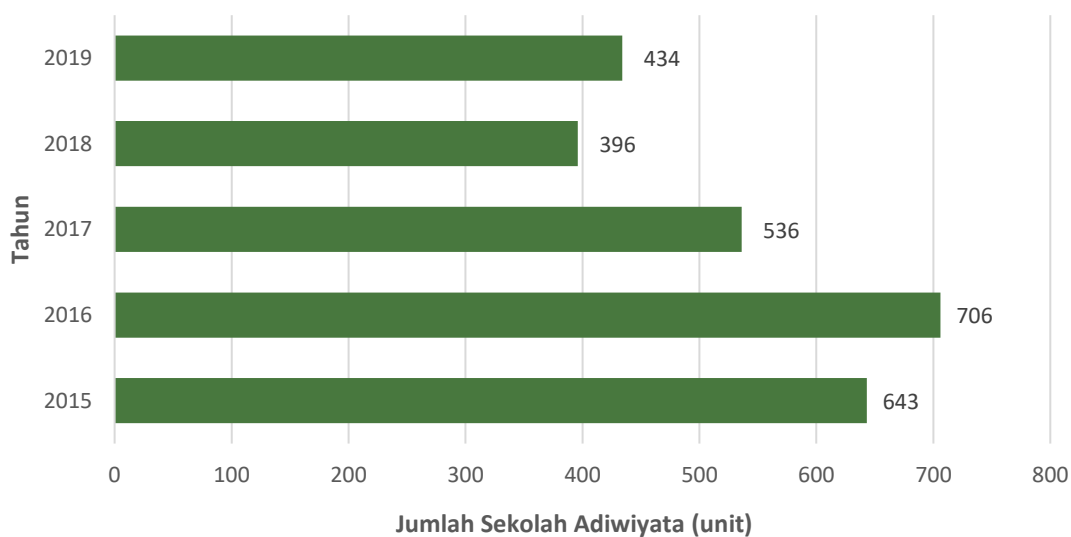
Sumber: Sekretariat PRK/LCDI Kementerian PPN/Bappenas, 2021

3. Peningkatan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.

Penanganan perubahan iklim juga telah dilakukan melalui peningkatan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim. Indikator yang digunakan adalah jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.

Satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup

Tujuan pendidikan lingkungan hidup adalah upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Program Adiwiyata merupakan salah satu dari Program KLHK dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Program ini didukung beberapa regulasi antara lain Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, Permen LHK Nomor 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, serta Permen LHK Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata. Pencapaian jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup berjumlah 2.715 satuan pendidikan yang berupa Sekolah Adiwiyata dicapai selama kurun waktu antara tahun 2015-2019. Pencapaian ini merupakan 54.3% dari target yang direncanakan. Perkembangan pencapaian pembangunan Sekolah Adiwiyata selama kurun waktu tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 2.106.



Gambar 2.106 Perkembangan Jumlah Sekolah Adiwiyata, 2015-2019

Sumber: KLHK, 2021

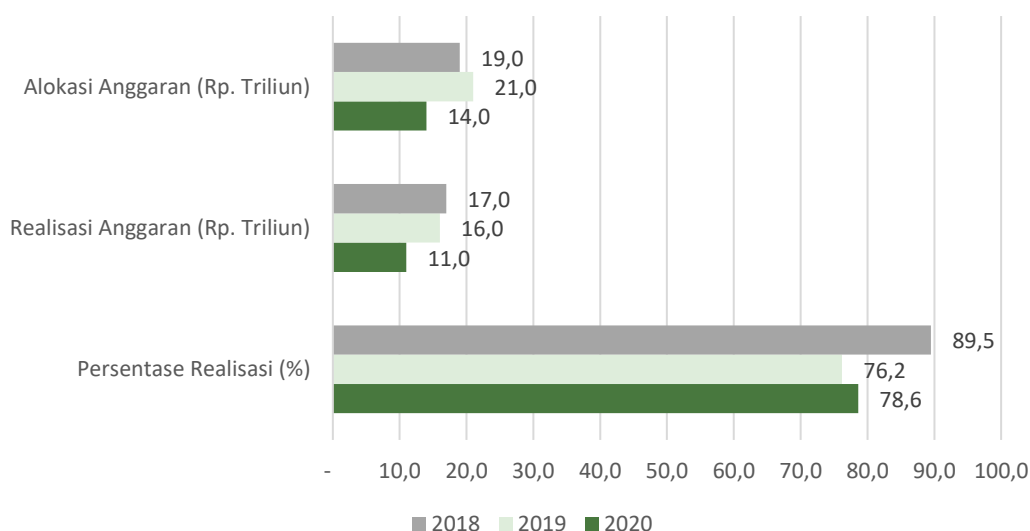
Di samping itu, penanganan perubahan iklim juga dilakukan dengan upaya peningkatan kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim melalui pengembangan kampung iklim, sekolah lapang iklim dan desa/kelurahan tangguh bencana. Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan program untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah. Pencapaian pengembangan kampung iklim sampai dengan tahun 2020 berjumlah 3.573 kampung iklim yang tersebar di 30 provinsi (KLHK, 2020). Kecenderungan pengusulan kampung iklim semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tren peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan dukungan pemerintah daerah yang menerbitkan regulasi, baik dalam bentuk edaran, peraturan gubernur maupun peraturan bupati/walikota yang mendorong pelaksanaan proklim di wilayah masing-masing. Kegiatan sekolah lapang iklim merupakan kegiatan sosialisasi informasi iklim dimana peserta yang menjadi target adalah petugas penyuluh pertanian lapang, pengamat organisme pengganggu tanaman, pegawai dinas pertanian dan para petani. Sampai tahun 2019 telah diselenggarakan kegiatan sekolah lapang iklim di 33 provinsi yang melibatkan 7.700 lebih peserta. Dalam perkembangannya, target sekolah lapang iklim tidak hanya diperuntukan pada sektor pangan, namun telah meluas pada sektor lainnya seperti pengairan (subak), kakao, maupun kopi. Sebagai proses pembelajaran, sekolah lapang iklim telah terbukti sukses meningkatkan penggunaan informasi iklim oleh petani (BMKG, 2020). Sedangkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dilakukan melalui pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana. Pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana (Destana) bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa untuk dapat mengenali ancaman, kerentanan dan kapasitas wilayahnya untuk dapat mengurangi dampak bencana dan

meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang akan terjadi di wilayahnya. Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kapasitas untuk beradaptasi, menghadapi bahaya, dan pulih dalam waktu singkat dari bencana. Desa/kelurahan tangguh bencana merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Pada tahun 2015 telah dilakukan pembentukan dan pengembangan Destana di 100 desa/kelurahan dan hingga tahun 2019 secara kumulatif telah mencapai 587 desa/kelurahan (BNPB, 2020b).

4. Melaksanakan komitmen negara maju pada the UNFCCC untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020.

Jumlah dana publik (*budget tagging*) untuk pendanaan perubahan iklim

Dalam penanganan perubahan iklim, Indonesia juga memiliki komitmen dalam pendanaannya. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk jumlah dana publik untuk pendanaan perubahan iklim yang dapat diketahui atau dimonitor melalui penandaan anggaran (*budget tagging*). Penandaan anggaran perubahan iklim merupakan salah satu perwujudan dari komitmen pemerintah dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon dengan mengedepankan prinsip pembiayaan berkelanjutan. Sistem penandaan anggaran perubahan iklim telah dibangun sejak 2016. Sistem penandaan anggaran perubahan iklim merupakan suatu upaya untuk mendukung pengelolaan anggaran perubahan iklim agar lebih terukur dan terstruktur mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pemantauan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Alokasi dan realisasi anggaran untuk perubahan iklim selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.107. Total alokasi anggaran untuk perubahan iklim selama 2018-2019 sebesar Rp40 triliun, sedangkan realisasinya mencapai Rp33 triliun.



Gambar 2.107 Alokasi dan realisasi anggaran untuk perubahan iklim, 2017-2019

Sumber: Bappenas, 2020

C. Tantangan

Penanganan perubahan iklim telah dilakukan secara bersungguh-sungguh dan telah memberikan hasil yang baik, namun masih diperlukan upaya untuk menanggulangi tantangan dinamika pembangunan masa depan. Tantangan strategis yang masih dihadapi dalam penanganan perubahan iklim, khususnya pembangunan rendah karbon diantaranya (KemenPPN/Bappenas, 2020) adalah:

- a) Penurunan emisi dan intensitas emisi GRK memerlukan upaya yang holistik dan terintegrasi dalam program pembangunan:
 - 1) Untuk mencapai target penurunan emisi GRK sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional di bawah baseline emisi GRK pada tahun 2030 memerlukan penerapan pembangunan rendah karbon yang bersifat holistik dalam penanganan perubahan iklim dan mengintegrasikan kebijakan penanggulangan perubahan iklim ke dalam program pembangunan nasional,
 - 2) Pertumbuhan ekonomi dan sosial perlu dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan yang rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan melalui pembangunan rendah karbon,
 - 3) Penurunan emisi GRK dan intensitas emisi sangat tergantung dari efektifitas implementasi kebijakan di sektor energi, lahan dan gambut, industri, limbah, pertanian serta pesisir dan kelautan.
- b) Pembangunan rendah karbon memerlukan dukungan lintas sektor dan multipihak:
 - 1) Komitmen penerapan pembangunan rendah karbon perlu diperkuat di tingkat sub-nasional, nasional, dan internasional, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah,
 - 2) Keterlibatan dan dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan rendah karbon perlu ditingkatkan, khususnya terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah dan pelaksanaan berbagai aksi pembangunan rendah karbon secara terintegrasi,
 - 3) Keterlibatan dan dukungan aktor non-pemerintah, seperti peneliti, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan terhadap pembangunan rendah karbon masih perlu ditingkatkan,
 - 4) Komunikasi dan penjangkauan terhadap berbagai pihak, khususnya aktor non-pemerintah untuk peningkatan kesadaran terhadap pembangunan rendah karbon masih perlu ditingkatkan.
- c) Upaya peningkatan teknologi rendah emisi perlu terus didorong:
 - 1) Transisi pembangunan rendah karbon perlu diselaraskan dengan dukungan pengembangan teknologi dan inovasi,
 - 2) Ketersediaan teknologi rendah karbon perlu diupayakan agar dapat terjangkau dan memiliki nilai ekonomi yang lebih menguntungkan,

- 3) Kemajuan teknologi perlu dimanfaatkan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan beserta dampaknya terhadap lingkungan secara lebih efisien,
- 4) Inovasi usaha ramah lingkungan masih perlu dikembangkan untuk menurunkan dampak negatif pencemaran dan sekaligus meningkatkan daya saing usaha yang ramah lingkungan,
- 5) Potensi dukungan dunia usaha melalui program CSR pada bidang-bidang pembangunan rendah karbon perlu dioptimalkan.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan penanggulangan bencana adalah:

- a) meningkatnya kejadian bencana geologi dan hidrometeorologi akibat perubahan iklim yang menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi;
- b) kapasitas dan kesadaran para pihak terhadap bencana yang masih rendah; dan
- c) tata kelola kelembagaan termasuk rotasi personel dan konvergensi pembangunan berketahanan bencana dan iklim masih perlu ditingkatkan.

2.14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

1. Penurunan sampah yang terbang ke laut

Pemerintah Indonesia sangat memberikan perhatian terhadap sampah laut yang merupakan masalah global dalam beberapa tahun terakhir. Sampah yang terbang hingga ke laut akan memberikan tekanan ekologi yang memberikan dampak terhadap semakin menurunnya kualitas lingkungan serta kualitas dan kuantitas sumber daya pesisir dan laut.

Berdasarkan perkiraan awal yang telah dilakukan oleh LIPI pada tahun 2018, jumlah sampah laut Nasional mencapai 0,27 – 0,59 juta ton per tahun. Data tersebut merupakan hasil pengamatan lapangan pada 18 lokasi stasiun pengamatan di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan sementara dari Tim Koordinasi Sekretariat Nasional Penanganan Sampah Laut, total sampah yang masuk ke laut pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 521.275 ton, di mana sekitar 12.519 ton berasal dari aktivitas di laut.

Tantangan dalam upaya penurunan sampah yang terbang ke laut antara lain adalah pola pikir, perilaku, dan pengetahuan masyarakat terkait lingkungan, khususnya pengelolaan sampah plastik yang masih terbatas; sumber daya manusia yang masih terbatas dalam penanganan sampah plastik; jumlah sampah plastik yang terlalu banyak; dan komitmen pemerintah daerah yang masih belum maksimal dalam penanganan sampah plastik. Tantangan lainnya adalah terkait pemutakhiran data sampah laut Nasional, terutama sampah plastik yang terapung. Saat ini, pengembangan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh melalui teknologi penerbangan dan antariksa (*earth observation*) diharapkan dapat menambah dan meningkatkan akurasi data sebaran sampah laut dan pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak, serta meningkatkan efektifitas pendataannya.

Upaya yang terus dilakukan dalam rangka penurunan sampah terbuang ke laut selain melalui pengelolaan/pengendalian sampah plastik dari berbagai aktivitas masyarakat dan kegiatan industri hulu/hilir, adalah melalui peningkatan kesadaran masyarakat dengan kampanye 6R, yaitu: *re-design* (design ulang), *reduce* (mereduksi plastik sebagai bahan baku), *remove* (menghilangkan plastik sekali pakai), *reuse* (mengggunakan kembali plastik yang masih bisa digunakan), *recycle* (daur ulang untuk menghindari sampah plastik), *recover* (pembakaran plastik secara ketat untuk produksi energi), dan pendekatan *circular economy*.

2. Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir

a. Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan area lautan

Pengelolaan dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut secara berkelanjutan merupakan upaya untuk mengurangi dampak lingkungan terhadap ekosistem dengan memperkuat ketahanannya (resiliensi) dan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. Landasan pengelolaan sumber daya kelautan adalah UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mengamatkan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Lebih lanjut, UU No. 32/2014 tentang Kelautan mengamatkan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang laut/rencana zonasi meliputi: (1) Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN); (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K); dan (3) Rencana Zonasi Kawasan Laut, yang terdiri dari: Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), serta Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW).

Seluruh dokumen perencanaan ruang diatas ditetapkan dengan peraturan perundangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah) yang akan menjadi panduan dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil untuk 20 tahun ke depan. Prinsip perencanaan ruang laut dilakukan dengan pendekatan *Ecosystem Based, Concensus Planning, Integrated Planning, dan Sustainable Development* berbasiskan pengembangan ekonomi biru (*Blue Economy*), sehingga diharapkan pengelolaan ruang laut lebih efektif, sumberdayanya dikelola secara berkelanjutan, dan terjaganya kesehatan laut (*Ocean Health*). Beberapa hal yang perlu diperhatikan didalam penyusunan dan penetapan dokumen RZ, antara lain perlu dilakukan secara transparan, melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif, dan memperhatikan aspek perizinan pemanfaatan ruang laut yang tidak sekedar mempertimbangkan faktor ekonomi, tetapi juga faktor ekologi untuk keberlanjutan sumberdaya kelautan.

Proses penyusunan rencana tata ruang laut/rencana zonasi dilakukan melalui proses yang sistematis, partisipatif, transparan dan berbasis sains. Penyusunan rencana tata ruang laut/rencana zonasi merupakan upaya untuk mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan terintegrasi melalui: (1) peningkatan perlindungan terhadap lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; (2) perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya maritim, masyarakat adat, dan nelayan tradisional; (3) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan kemaritiman, serta (4) kepastian hukum untuk mendorong investasi. Untuk itu dalam

pelaksanaannya dilakukan analisis valuasi ekonomi dan penyusunan Neraca Sumberdaya WP3K sebagai modal dasar perencanaan ruang laut berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) telah selesai disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Selain itu, hingga tahun 2021, terdapat 28 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah selesai disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk kawasan laut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Selat Makassar, serta terdapat 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) yang meliputi 12 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memberikan amanat untuk melakukan integrasi perencanaan tata ruang darat dan laut. Proses integrasi ini khususnya berlaku pada ruang pesisir dimana terjadi peralihan antara darat dan laut. Proses integrasi ini diharapkan dapat lebih mensinkronkan pengaturan pemanfaatan ruang dan sumberdaya di wilayah pesisir sehingga dapat lebih selaras, serasi, dan efisien. Proses integrasi tersebut dilakukan pada perencanaan ruang skala nasional maupun di tingkat daerah. Selain itu, untuk Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) yang berupa Kawasan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Situs Warisan Dunia tidak diintegrasikan, tetap disusun dan diinisiasi penetapannya oleh KKP kedalam Peraturan Presiden.

Dalam rangka mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan perikanan yang berbasis WPPNRI perlu disinergikan dengan perencanaan ruang yang sifatnya spasial dan implementasi rencana tata ruang laut/rencana zonasi tersebut. Hal ini dilakukan diantaranya melalui penetapan pusat-pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan, sistem jaringan sarana-prasarana kelautan, alokasi ruang laut untuk zona perikanan tangkap, alur migrasi biota, dan kawasan konservasi yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keberlanjutan produksi perikanan. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang ditetapkan melalui Permen KP No. 18/PERMEN-KP/2014 menjadi basis ruang dalam pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Penguatan pengelolaan WPPNRI dilakukan melalui transformasi kelembagaan dan fungsi WPPNRI; pengelolaan, penataan ruang laut, serta pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil.

Selanjutnya dalam pengelolaan WPPNRI terdapat Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) sebagai pedoman yang memuat status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosial ekonomi, isu pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah pengelolaan, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan. RPP yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah RPP Rajungan (Kepmen KP No. 70/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di WPPNRI dan Permen KP No. 12/PERMEN-KP/2020 tentang

Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di WPPNRI) dan RPP Tuna, Tongkol, dan Cakalang (Kepmen KP No. 105/KEPMEN-KP/2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang dan Tongkol).

Pelibatan pemerintah pusat dan daerah, akademisi serta organisasi non-pemerintah diperlukan dalam operasionalisasi RPP. Ke depan, diperlukan penguatan dan pengaturan lebih lanjut terkait kelembagaan WPPNRI, di mana saat ini organisasinya masih dalam kendali dan instruksi dari pusat (Permen KP No.22/2021 tentang Penyusunan RPP dan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP)). Untuk membentuk kelembagaan WPP sebagai platform kawasan pengelolaan usaha perikanan yang mandiri, diperlukan struktur dan mekanisme tata kelola yang tepat, efektif dan efisien untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang baik (*good fisheries management*).

b. Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan

Pemerintah Indonesia terus mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan. Pemerintah telah membagi manajemen manajemen perikanan ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Pengelolaan WPPNRI dilakukan melalui Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI sesuai dengan Permen KP No. 33/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang diperbaharui melalui Permen KP No.22/PERMEN-KP/2021 tentang Penyusunan RPP dan LPP di WPPNRI. LPP WPPNRI bertugas melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan RPP, memberikan masukan penyusunan dan pelaksanaan RPP, dan memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI. RPP merupakan dokumen resmi yang memuat status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan yang disusun berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosial ekonomi, isu pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah pengelolaan, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan.

Saat ini, RPP untuk semua WPPNRI telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan Perikanan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan: No. 75/2016 (WPP 571), No. 76/2016 (WPP 572), No. 77/2016 (WPP 573), No.78/2016 (WPP 711), No. 79/2016 (WPP 712), No. 80/2016 (WPP 713), No. 81/2016 (WPP 714), No. 82/2016 (WPP 715), No. 83/2016 (WPP 716), No. 84/2016 (WPP 717), dan No. 54/2014 (WPP 718)). RPP ini selain menetapkan status perikanan, juga mengatur pelibatan pemerintah pusat dan daerah serta organisasi non-pemerintah dalam operasionalisasi RPP.

Sampai akhir 2019, terdapat 8 WPPNRI yang telah terpetakan potensi sumber daya kelautan dan perikananannya untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan, yaitu WPP 714, WPP 716, WPP 718, WPP 715, WPP 717, WPP 572, WPP 713, dan WPP 573. Pelibatan pemerintah pusat dan daerah, akademisi serta organisasi non-pemerintah sangat diperlukan dalam memetakan potensi sumber daya kelautan dan perikanan tersebut.

Dukungan teknologi penginderaan jauh (*earth observation*) yang telah dilakukan oleh Riset Penerbangan dan Antariksa (Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) terus dibutuhkan pengembangannya dalam rangka pemetaan potensi kelautan dan perikanan, termasuk ekosistem mangrove dan terumbu karang, data kualitas air dan batimetri, dan potensi perikanan tangkap dan budidaya.

Pengelolaan perikanan akan difokuskan pada penguatan manajemen pada 11 WPPNRI dan sentra-sentra produksi perikanan budidaya yang berdaya saing, terutama Sumatera (nila dan udang), Jawa (nila dan udang), Nusa Tenggara (rumput laut dan udang), dan Sulawesi (rumput laut dan nila), serta sentra garam di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Pada tahun 2020, WPP 711, WPP 715, dan WPP 718 telah ditetapkan menjadi WPP model percontohan penguatan tata kelola berdasarkan kriteria: potensi stok dan status pemanfaatan sumber daya ikan saat ini; integrasi dengan potensi ekonomi, sosial, dan budaya setempat; dukungan kawasan konservasi perairan dan habitat penting; pencegahan dan pemberantasan IUU *Fishing*; posisi geografis dan geopolitik yang strategis; dukungan sarana/prasarana dan infrastruktur kelautan dan perikanan; serta pembelajaran yang baik dalam pelibatan *multi-stakeholder*.

3. Tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Indonesia secara konsisten melakukan pemutakhiran angka pendugaan kelimpahan ikan (*stock assessment*) di laut, untuk menduga nilai Potensi Maksimum Lestari (*Maximum Sustainable Yield/MSY*) dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*Total Allowable Catch/TAC*). Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTJ) adalah sebesar 80% dari potensi maksimum lestarnya. Pada tahun 2013, MSY ditetapkan sebesar 7,30 juta ton (Renstra KKP 2015-2019, Permen KP No.25/2015); selanjutnya pada tahun 2016, ditetapkan nilai MSY sebesar 9,93 juta ton (Kepmen KP No.47/2016); dan terakhir pada tahun 2017, nilai MSY ditetapkan sebesar 12,54 juta ton (Kepmen KP No.50/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia).

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 12,54 juta ton per tahun tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Kebijakan perikanan tangkap dalam melakukan pengelolaan perikanan dalam suatu WPPNRI atau jenis ikan tertentu dilakukan dengan menghitung jumlah produksi pada saat tahun berjalan dibagi dengan MSY dan juga mempertimbangkan JTJ. Pada tahun 2020, produksi perikanan tangkap laut mencapai 7,14 juta ton atau 56,91% dari potensi lestarnya (MSY) atau 71,14% dari JTJ. Realisasi proporsi tangkapan laut pada tahun 2020 tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu < 64% dari MSY. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi tangkapan berada dalam batas biologis yang aman, dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di bidang perikanan tangkap. Selanjutnya potensi sumber daya ikan

harus terus dikelola secara optimal dan berkelanjutan sehingga keberlanjutan sumber daya ikan dan keberlanjutan usaha perikanan dapat sama-sama dijaga secara seimbang.

4. Kawasan konservasi perairan laut

Indonesia berhasil meningkatkan luas kawasan konservasi perairan laut seluas 24,11 juta ha (101,3%) dari target tahun 2020 sebesar 23,80 juta ha. Peningkatan luas kawasan konservasi perairan laut tersebut berasal dari: (1) 10 kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan seluas 5,34 juta ha, (2) 161 kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah provinsi seluas 14,2 juta ha dan (3) 30 kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,63 juta ha.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 telah menargetkan penambahan luas kawasan menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024. Selanjutnya secara khusus diharapkan 20 juta ha kawasan konservasi dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan pada tahun 2024.

Selain upaya untuk meningkatkan luas kawasan konservasi perairan laut, juga dilakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaannya, salah satunya melalui penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (EKKP3K) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.44 /KP3K/2012. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan pengelolaan kawasan konservasi, ditemukan tantangan-tantangan baru dalam pengelolaan kawasan konservasi, sehingga pada tahun 2020 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020, disahkan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) dimana syarat penilaian kawasan konservasi adalah kawasan yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan. Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tersebut memerlukan seperangkat kriteria dan indikator yang diuji berdasarkan beberapa elemen evaluasi kunci, meliputi konteks, perencanaan, input, proses, output, dan outcome. Melalui proses siklus ini diharapkan para pengelola kawasan konservasi dapat mengenali dan mampu melakukan adaptasi untuk meningkatkan tindakan pengelolaan kawasan konservasi.

Indonesia merupakan salah satu negara dari 150 negara yang menandatangani Konvensi Keanekaragaman Biologi (*Convention on Biological Diversity/CBD*) pada Rio Earth Summit tahun 1992 dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. *Aichi Biodiversity Target 11* merupakan salah satu target CBD yang khusus bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan luasan kawasan konservasi perairan laut hingga mencapai 10% dari luas laut Nasional atau sebesar 32,57 juta ha. Pada tahun 2020 telah tercapai 24,11 juta ha atau 74,18% dari target Aichi, sehingga diperlukan tambahan 8,39 juta ha luasan kawasan konservasi perairan hingga tahun 2030 untuk memenuhi target Aichi tersebut.

Tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan laut adalah terkait peningkatan efektivitas pengelolaannya. Hal ini membutuhkan upaya peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Selain itu, kawasan konservasi juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara

sosial ekonomi. Utamanya bagi masyarakat di kawasan konservasi yang berada pada wilayah terpencil. Sehingga diperlukan upaya dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk mendukung linearitas manfaat konservasi dari aspek ekologi dan sosial ekonomi.

5. Kepatuhan pelaku usaha

Indikator persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan merupakan indikator *proxy* dari indikator global: tingkat pelaksanaan dari instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*IUU fishing*). Indikator tersebut pada hakikatnya mengukur kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh para pelaku usaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Rumusan indikator ini merupakan representasi kinerja nasional dalam upaya pemberantasan praktik-praktik *Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing* karena dengan meningkatnya kepatuhan para pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan maka secara tidak langsung praktik-praktik para pelaku usaha kelautan dan perikanan bergeser menjadi *Legal, Regulated, and Reported Fishing* serta memperhatikan keseimbangan ekologi untuk keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan yang selaras dengan konsep ekonomi biru. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Indonesia telah menetapkan target capaian kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan hingga 98% pada tahun 2024.

Capaian persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2019 adalah sebesar 93,57% atau melampaui target yang ditetapkan (87%).

Tantangan dari penerapan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan ini, diantaranya:

1. Pembagian kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan antara Pusat dan Daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu memastikan agar pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan izin daerah atau dalam wilayah kewenangan daerah dapat berjalan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Implementasi UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengedepankan penerapan sanksi administratif pada Perizinan Berusaha di semua sektor termasuk sektor kelautan dan perikanan perlu mendefinisikan batasan kepatuhan tidak hanya dalam hal kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha kelautan dan perikanan dengan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, tetapi juga dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha berbasis risiko serta pemenuhan kewajiban pelaku usaha;
3. Aspek hilir dari terciptanya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah pemberian efek jera melalui mekanisme penegakan hukum dalam konteks sanksi pidana;
4. Aspek hulu dari terciptanya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan selain dari kejelasan tatakelola juga perlu didukung oleh proses penyadartahuan dan pelibatan masyarakat serta pelaku usaha. Oleh karena itu, maka dalam implementasinya

indikator ini perlu didukung oleh indikator yang terkait dengan tingkat kesadaran sekaligus partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penegakan hukum dan pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *fishing* merupakan masalah yang memerlukan komitmen tinggi dan kerjasama lintas institusi pada tingkat operasional. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan terluas di dunia, telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memerangi IUU *fishing* di dalam UU No. 31/2004 j.o UU No. 45/2009 tentang Perikanan. Untuk memerangi IUU *fishing*, Pemerintah Indonesia telah melakukan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, peningkatan kerjasama lintas-lembaga terkait dengan melakukan patroli laut, patroli udara dan kerja sama regional dengan negara-negara asing dalam memerangi IUU *fishing*, peningkatan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat, serta penataan perijinan. Selain itu Pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk memerangi *illegal fishing* melalui Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Hal ini sejalan dengan yang dijabarkan pada FAO-Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995 artikel 7.1.7 bahwa dalam mencapai kepatuhan pelaku usaha terhadap tata kelola kelautan dan perikanan serta perlindungan/konservasi sumber daya kelautan dan perikanan, negara perlu menerapkan mekanisme pemantauan (*monitoring*), pengawasan (*surveillance*), pengendalian (*control*) dan penegakan aturan (*enforcement*) secara sistematis, komprehensif, dan efektif.

Selanjutnya, meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan IUU *fishing* dapat menimbulkan tantangan selanjutnya, yaitu pemanfaatan potensi sumber daya ikan secara optimal melalui pelibatan inklusif semua pelaku perikanan secara *legal, reported* dan *regulated*.

6. Penyediaan akses untuk nelayan

a. Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil

Pengakuan dan perlindungan hak akses perikanan skala kecil telah diatur dalam UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk: (1) Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; (2) Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; (3) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; (4) Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; (5) Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan (6) Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Selanjutnya, implementasi dari UU No. 7/2016 adalah terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Peraturan Menteri ini merupakan dasar dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Pengaturan partisipasi masyarakat ini bertujuan untuk: (1) Menjamin terlaksananya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; (2) Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; (3) Mewujudkan penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan (4) Meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

b. Provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan

Kondisi usaha penangkapan ikan saat ini rata-rata masih belum *bankable* sehingga menjadi hambatan dalam mengakses sumber permodalan. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI telah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil untuk Peningkatan Akses Permodalan dalam rangka peningkatan pengembangan diversifikasi usaha melalui Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT). Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi nelayan dalam memperoleh kepastian hukum atas aset yang dimiliki (berupa bidang tanah) agar dapat dijadikan sebagai jaminan (agunan) dalam memperoleh kredit dari lembaga keuangan atau perbankan sehingga nelayan dapat mengembangkan usahanya ataupun dapat mengembangkan usaha ekonomi produktif sebagai mata pencaharian alternatif (diversifikasi usaha).

Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui proses sertifikasi memberikan beberapa manfaat bagi nelayan: (1) mengurangi potensi hilangnya aset tanah nelayan akibat tidak adanya kepastian hukum atas kepemilikan, (2) dengan tanah yang dimiliki maka nelayan dapat membangun tempat tinggal menetap permanen, layak dan sehat, (3) tanah juga merupakan aset yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan/bank, sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan usaha nelayan yaitu permodalan. Dengan tersedianya modal usaha, diharapkan akan mendorong pengembangan dan penciptaan usaha-usaha ekonomi produktif oleh nelayan. Kegiatan ini merupakan kegiatan lintas sektor yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kantor Wilayah BPN Provinsi, Dinas Perikanan Kab/Kota dan Kantor Pertanahan Kab/Kota. Pada tahun 2020, SeHAT Nelayan telah mencapai 10.012 bidang.

Beberapa tantangan dalam peningkatan akses pendanaan usaha nelayan antara lain adalah masih perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan operasionalisasi, penguatan kelembagaan nelayan, penyusunan regulasi yang tepat dalam mengatur pemanfaatan bantuan pendanaan dan bantuan teknis bagi nelayan skala kecil, pengaturan dan pengelolaan

wilayah tangkap, sehingga dapat menjamin terwujudnya model pengelolaan perikanan berkelanjutan.

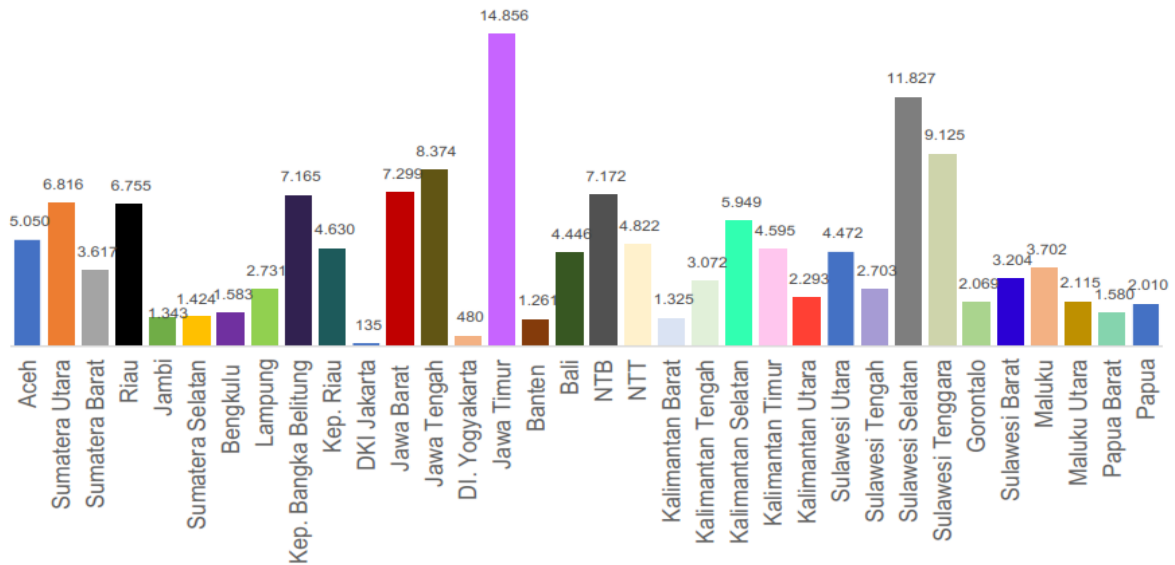
Alternatif lainnya yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan akses pendanaan usaha perikanan skala kecil adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi mikro di pedesaan yang dikelola oleh masyarakat desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Selanjutnya diharapkan melalui BUMDes dapat mengembangkan rencana kerja sama usaha antardesa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (Permendesa PDT dan Transmigrasi No.4/2015 tentang tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa).

c. Nelayan yang terlindungi

Perlindungan terhadap nelayan kecil sebagaimana tertuang dalam UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang mengatur beberapa dukungan untuk nelayan kecil. Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. Adapun tujuan BPAN adalah: (1) memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami Nelayan pada masa yang akan datang, (2) menumbuhkan kesadaran bagi Nelayan terhadap pentingnya berasuransi, (3) membangun keinginan nelayan untuk turut serta berasuransi secara mandiri, (4) memberikan bantuan bagi ahli waris, dan (5) memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak asuransi. Sasaran BPAN Tahun 2019 adalah nelayan kecil dan nelayan tradisional sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2016. Risiko yang dijamin oleh asuransi adalah kematian, cacat tetap, dan biaya pengobatan.

Indikator keberhasilan kegiatan asuransi nelayan adalah tersalurkannya BPAN yang tepat sasaran dan terlaksananya kepastian manfaat asuransi bagi nelayan. Bentuk BPAN berupa bantuan pembayaran premi yang diberikan dalam bentuk uang untuk pembayaran premi dengan jangka waktu pertanggungans asuransi 1 (satu) tahun yang mulai berlaku sejak Polis Realisasi Asuransi diterbitkan oleh Penanggung.

Target BPAN Tahun 2019 sebanyak 150.000 nelayan dengan distribusi target alokasi meliputi 351 Kab/Kota dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Pencapaian realisasi penyaluran BPAN tahun 2019 sebesar 150.000 nelayan atau sebesar 100%. Keberhasilan BPAN didukung oleh adanya penyempurnaan juknis dengan mengakomodir nelayan yang premi asuransinya telah selesai untuk dapat mengikuti asuransi kembali.



Gambar 2.108 Pencapaian realisasi penyaluran BPAN, 2019

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dan bersinergi untuk dapat memfasilitasi keikutsertaan nelayan setempat pada asuransi nelayan, baik yang dibiayai melalui APBD maupun secara mandiri. Tujuan dari fasilitasi perlindungan nelayan (skema asuransi nelayan mandiri) adalah untuk menjamin keberlangsungan perlindungan nelayan melalui program asuransi bagi nelayan yang masa premi BPANnya telah berakhir serta diperuntukkan bagi nelayan lain yang belum mendapatkan program asuransi BPAN. Sebanyak 40.749 orang nelayan atau 203,7% lebih besar dibandingkan target yaitu 20.000 orang nelayan yang telah terfasilitasi perlindungan nelayan dengan skema asuransi nelayan mandiri pada tahun 2020.

7. Kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan dan instrumen terkait dengan pelaksanaan UNCLOS (*the United Nations Convention on the Law of the Sea*) didalam pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya lautan, yaitu antara lain:

1. UU No. 17/1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi PPB tentang Hukum Laut), dimana Indonesia mengakui konvensi hukum laut Internasional, sehingga segala kebijakan di bidang kelautan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam konvensi. UU ini mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh;
2. UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia yang memuat ketentuan-ketentuan dasar tentang hak dan kewajiban negara di laut yang disesuaikan dengan status hukum dari berbagai zona maritim sebagaimana diatur dalam UNCLOS. UU ini mengatur tentang wilayah perairan Indonesia, hak lintas bagi kapal-kapal asing, pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia, serta penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia;

3. UU No. 1/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi koordinasi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.15 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

A. Pengantar

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG) Tujuan 15 Ekosistem Daratan, mempunyai tujuan melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Pencapaian Tujuan 15 ini akan dicapai melalui 12 target dengan 14 indikator yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator nasional yang sesuai dengan indikator global dan 7 (tujuh) indikator nasional sebagai proksi indikator global.

Isu utama dalam Tujuan 15, meliputi: tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, kawasan bernilai konservasi tinggi (*high conservation value/HCV*), melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, serta penegakan hukum. Masing-masing isu dijelaskan pada sub bab di bawah ini.

B. Status Capaian dan Tantangan

1. Tata Kelola Kehutanan

Total daratan Indonesia mencapai 188,0 juta hektare, terdiri dari luas kawasan hutan daratan (terrestrial) seluas 120,6 juta hektare (64,15%) dan penggunaan lain (APL) seluas 67,4 juta hektare (35,85%) (Kementerian LHK 2019). Kondisi penutupan lahan berhutan (*forested*) hingga tahun 2018 mencapai 94,10 juta hektare (50,05%), sedangkan yang tidak berhutan (*not forested*) sebesar 93,95 juta hektare (49,95%) dari luas daratan Indonesia, baik yang terdapat dalam kawasan hutan maupun pada APL.

Luas kawasan hutan Indonesia seluas 125,81 juta hektare, terdiri dari: Hutan Konservasi 27,40 juta hektare (termasuk konservasi perairan seluas 5,32 juta hektare), Hutan Lindung seluas 29,57 juta hektare, dan Hutan Produksi seluas 68,82 juta hektare. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, membagi Hutan Produksi tersebut menjadi Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Sedangkan Hutan Konservasi, terbagi dalam Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa) dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam).

Permasalahan dan tantangan pemanfaatan hasil penafsiran penutupan lahan terdapat pada penggunaannya. Pemanfaatan hasil penafsiran penutupan lahan digunakan untuk analisa tematik khusus, antara lain: penutupan lahan dan laju deforestasi, penyusunan neraca sumber daya hutan, peta lahan kritis, Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB), Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), peta potensi hutan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), *Forest Reference Emission Level* (FREL), dan lain-lain.

Dalam menjaga kondisi hutan dan meningkatkan kondisinya diperlukan pembentukan lembaga pengelola di tingkat tapak yang bisa disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Hingga saat ini total KPH baik di kawasan produksi maupun lindung yang sudah ditetapkan sebanyak 539 unit dengan luas 82,92 juta hektare. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 344 unit dengan luas 59,68 juta hektare, sedangkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 195 unit dengan luas 23,23 juta hektare. Selain KPHP dan KPHL, terdapat juga Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) di mana jumlahnya sebanyak 149 unit dengan luas 12,87 juta hektare.

Tantangan pengelolaan KPH saat ini adalah semua bentuk pemanfaatan hutan pada KPH melalui perizinan berusaha dan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. KPH tidak lagi menjadi subjek hukum dalam pemanfaatan hutan di dalam kawasan hutan, menurut Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 Tahun 2020. UUCK yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 (PP 23/2021) ikut mengatur perubahan peran organisasi KPH yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi: perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkannya.

Dalam peningkatan kualitas lahan kritis maupun kondisi tutupan hutan diperlukan proses Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang salah satunya berfokus kepada Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menjaga kondisi resapan air maupun mengurangi risiko bencana alam. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 4.489 DAS (10,63%) yang perlu dipulihkan daya dukungnya, sedangkan jumlah DAS yang dipertahankan daya dukungnya mencapai 37.721 DAS (89,37%). Jika dihitung berdasarkan luasan dari DAS, maka luasan DAS yang harus dipulihkan daya dukungnya adalah seluas 95.098.704 hektare (50,04%), sedangkan luasan DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah seluas 94.932.826 hektare (49,96%). Data ini mengungkapkan bahwa jika dilihat dari jumlah DAS, maka jumlah yang harus dipulihkan daya dukungnya lebih kecil daripada jumlah DAS yang dipertahankan. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya terus meningkat, ditandai dengan capaian selama tahun 2019 sebesar 84.067,08 hektar.

Permasalahan dan tantangan yang ada terkait dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan adalah keterbatasan anggaran yang tersedia, dan keberlangsungan keberhasilan kegiatan RHL setelah program penanaman selesai. Upaya lain perlu dilakukan pemerintah, seperti juga mendorong masyarakat dan pihak swasta untuk mendukung kegiatan RHL tersebut.

2. Konservasi Keanekaragaman Hayati

Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan berdasarkan fungsinya antara lain perlindungan ekosistem sebagai sistem penopang kehidupan (*life support system*), pengawetan sumber daya alam dan genetiknya, serta pemanfaatan secara lestari. Hingga tahun 2019 telah ditetapkan kawasan konservasi sebanyak 554 unit dengan luas 27,4 juta hektare. Luas kawasan konservasi ini, terdiri dari 22,1 juta hektare kawasan konservasi terestrial dan 5,3 juta hektare kawasan konservasi perairan/laut.

Tantangan pengelolaan kawasan konservasi adalah menghadapi tekanan kompleks yang bisa menjadi penyebab degradasi dan fragmentasi habitat. Oleh karena itu, telah ditetapkan kebijakan pengelolaan kawasan berbasis resort (*resort base management*) dengan menempatkan personil hingga ke tingkat tapak di kawasan konservasi beserta perangkat kebutuhan kerjanya secara optimal.

Selama kurun waktu 2015-2019, jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks *Management effectiveness Tracking Tool* (METT) minimal 70% terus mengalami peningkatan. Tahun 2019 Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mendapat nilai METT minimal 70% telah mencapai 255 KPA. Nilai METT merupakan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan penilaian elemen-elemen utama yang mencakup konteks, perencanaan, alokasi sumber daya (input), kegiatan pengelolaan (proses), produk dan jasa (output) dan dampaknya (outcome).

Dalam konteks konservasi keanekaragaman hayati (kehati) di dalam kawasan, hingga saat ini telah terjadi peningkatan populasi spesies di suatu habitat atau *site monitoring*, hal ini karena adanya kelahiran maupun penambahan individu ke dalam suatu populasi melalui kegiatan pelepasliaran sebagai bagian dari intervensi pengelolaan. Lama waktu perkembangbiakan spesies satu dengan spesies lainnya tidak sama.

Selain satwa endemik dari kawasan hutan, terdapat pula satwa endemik dari laut dan perairan darat. LIPI memberikan rekomendasi terkait 308 spesies (7 taksa) terancam punah prioritas perlindungan ditambah 35 spesies mamalia laut. Tidak semua memiliki data time series status populasi masing-masing spesies tersebut.

Pada sektor pertanian, pelestarian keanekaragaman hayati telah terdokumentasi dalam kebijakan Kementerian Pertanian. Kebijakan tersebut mengamanatkan pelaksanaan pengawasan keamanan hayati. Pengawasan terhadap Jenis Asing Invasif/Invasive Alien Species (IAS) selanjutnya disebut IAS merupakan salah satu objek dalam pengawasan keamanan hayati. Jenis asing yang masuk dalam sebuah ekosistem baru jika kemudian dapat beradaptasi dan bersaing dengan jenis asli dapat berpotensi sebagai IAS. Spesies invasif adalah tanaman, hewan, mikroorganisme, dan bagian non-organisme lainnya yang diintroduksi manusia dari penyebaran habitat alaminya dan menyebabkan kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian ekonomi, dan/atau dampak negatif pada keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia. Beberapa jenis asing introduksi dapat memberikan dampak positif bagi

aspek ekonomi dan terkadang ekologi. Namun, penyebaran IAS ke dalam ekosistem alami dapat menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keanekaragaman hayati di Indonesia.

Dalam daftar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 28/Kpts/HK.060/1/2009 tertanggal 22 Januari 2009, jenis-jenis organisme pengganggu tanaman yang termasuk kategori A1 adalah 129 jenis serangga, 59 jenis nematoda, 121 jenis cendawan, 45 jenis bakteri, 100 jenis virus, 46 jenis gulma, 28 jenis tungau, 31 jenis moluska. Tambahan pula, merujuk pada UU Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bahwa daftar ikan yang termasuk ke dalam kelompok ikan yang perlu dikarantina termasuk di dalamnya ikan-ikan yang dilindungi. Berdasarkan catatan Invasive Alien Species (IAS) Indonesia terdapat 15 jenis ikan invasif yang ada di Indonesia.

Penambahan data dan informasi terkait jenis asing invasif jenis seperti modeling distribusi, pemetaan habitat, analisis resiko dan karakterisasi jaringan sebagai bentuk adaptasi dapat memberikan tambahan informasi tentang bagaimana penanganan dan pengendalian jenis asing invasif secara tepat. Dalam hal ini, beberapa bentuk kontribusi LIPI antara lain: (1) Melakukan inventarisasi dan identifikasi jenis flora dan fauna asing yang berpotensi atau sudah menjadi invasif di TN Ujung Kulon, Banten dan ekosistem esensial (kawasan karst dan sekitarnya di Sumatra Barat dan kawasan Gambut dan sekitarnya di Riau); (2) Melakukan pemetaan dan pemodelan prediksi distribusi jenis asing dan invasif di TN Ujung Kulon, Banten dan ekosistem esensial (kawasan karst dan sekitarnya di Sumatra Barat dan kawasan Gambut dan sekitarnya di Riau); (3) Penilaian status jenis invasif asli Indonesia; (4) Melakukan analisis resiko jenis asing invasif sebagai parameter prediksi resiko potensi jenis asing yang teridentifikasi menjadi invasif atau tidak.

Tantangan kehati yang ada saat ini adalah banyaknya faktor yang memengaruhi perkembangbiakan spesies, diantaranya seks rasio, struktur umur dan juga gangguan luar seperti kerusakan habitat, ketersediaan pakan, perburuan ilegal dan sebagainya. Sebagian besar satwa yang masuk ke dalam 25 satwa prioritas yang akan ditingkatkan populasinya sampai dengan tahun 2019 pada umumnya memerlukan waktu lama untuk berkembang biak.

Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)

Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) adalah kawasan mengandung nilai-nilai penting untuk lingkungan hidup, kehidupan sosial dan ekonomi. Nilai penting itu, di antaranya kawasan bernilai konservasi tinggi yang mempunyai habitat satwa liar endemik (spesies kunci/mega fauna), daerah perlindungan resapan air dan merupakan situs arkeologi (kebudayaan). Nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional maupun global (Konsorsium revisi HCV Toolkit Indonesia 2008). Dengan kata lain bahwa kawasan bernilai konservasi tinggi merupakan kawasan hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang penting, baik pada level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, tidak terkecuali daerah-daerah yang merupakan kantung-kantung satwa prioritas yang wilayah jelajahnya menjangkau dan masuk ke dalam kawasan ekosistem esensial (KEE).

Tantangan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia adalah inventarisasi yang hanya berfokus kepada kawasan konservasi seluas 27,42 juta hektare. Sedangkan pada kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan APL yang mungkin memiliki potensi keanekaragaman hayati tinggi, belum dilakukan inventarisasi dan verifikasi dengan maksimal. Inventarisasi dan verifikasi juga perlu dilakukan pada kawasan konservasi, ini bertujuan untuk mengetahui mana saja kawasan konservasi yang masih memiliki keanekaragaman hayati tinggi untuk dilindungi. Manfaat lain dari identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi adalah dapat memberikan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan seperti: 1) perlindungan sistem penopang kehidupan (*maintance of essential ecological processes and life-support system*); 2) pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya (*preservation of genetic diversity*); dan 3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (*sustainable utilization of species and ecosystem*), sehingga mampu mempertahankan kawasan bernilai konservasi tinggi dan ekosistemnya secara menyeluruh di masa yang akan datang.

3. Melestarikan dan Memanfaatkan Nilai Ekonomi Keanekaragaman Hayati

Dalam dokumen *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)* tahun 2015-2020, keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman bentuk dan susunan bentang alam, daratan, maupun perairan di mana makhluk atau organisme hidup berinteraksi dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan fisiknya; 2) keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem di darat maupun di perairan; dan 3) keanekaragaman genetika adalah keanekaragaman individu di dalam suatu jenis. Ketiga tingkat Kehati tersebut saling terkait satu dengan lainnya.

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (TSL) didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan dasar-dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi (*non detriment findings*) sebagaimana tertuang dalam Article III, IV dan V CITES. Kontribusi perdagangan TSL dalam periode tahun 2014-2020 meliputi kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan devisa negara/nilai ekspor. PNBP perdagangan TSL periode tahun 2014-2020 sebesar Rp. 132.512.862.018,00. Sedangkan devisa negara/nilai ekspor TSL periode tahun 2014-2020 sebesar Rp. 54.850.403.464.243,00.

Tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan jenis TSL ke depan, yaitu: 1) Optimalisasi pemanfaatan jenis TSL atau perdagangan TSL yang bersumber dari hasil penangkaran; 2) Pengembangan produk hilir/industri hilir TSL untuk meningkatkan daya saing produk TSL Indonesia di pasar internasional; dan 3) Pengembangan sistem pelayanan dan birokrasi berbasis teknologi sehingga dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan para pelaku usaha di seluruh Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Selain di tingkat spesies, pemanfaatan berkelanjutan juga dilakukan pada tingkat genetik. Pemanfaatan pada tingkat genetik dilakukan melalui upaya bioprospeksi yaitu penelusuran sistematis, klasifikasi, dan investigasi untuk tujuan komersial dari sumber senyawa kimia baru, gen, protein, mikroorganisme, dan produk lain dengan nilai ekonomi aktual dan potensial, yang ditemukan dalam keanekaragaman hayati. Beberapa bioprospeksi

yang dilakukan di dalam kawasan konservasi, antara lain: isolat mikroba PGPR untuk anti frost, anti kekeringan dan anti hama di Taman Nasional Gunung Ciremai, *Candidaspongia* spp. sebagai senyawa anti kanker di kawasan BKSDA NTT, dan *Taxus Sumatrana* yang memiliki senyawa anti kanker di Taman Nasional Kerinci Seblat.

Nilai ekonomi keanekaragaman hayati yang disajikan hanya sebagian dari kajian empiris dan bukan nilai ekonomi keseluruhan dari keanekaragaman hayati. Estimasi nilai ekonomi dari keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem di Indonesia dapat ditentukan sebagai berikut: 1) nilai konsumsi, nilai ekonomi jamu mencapai Rp 6 triliun dan jutaan karyawan di industri ini; 2) nilai produksi, potensi manfaat dari pemanfaatan berkelanjutan pengelolaan terumbu karang untuk perikanan, pariwisata, nilai perlindungan pantai mencapai USD 16 miliar per tahun; 3) nilai opsi, pada tahun 2012 produksi kelapa Indonesia mencapai nilai ekspor sebesar USD 1,19 miliar, produksi tebu mencapai nilai ekspor sebesar USD 46,2 miliar; 4) nilai eksistensi, nilai agregat keberadaan Taman Nasional Kepulauan Seribu adalah USD 78.751,03 per tahun; 5) nilai jasa ekosistem, kemampuan penyerapan karbon, ekosistem lamun 830 ton per hektare, hutan 300 ton per hektare, dan sepuluh jenis tumbuhan dengan kemampuan tertinggi (IBSAP 2015-2020).

Tantangan saat ini adalah diperlukan iklim usaha yang kondusif, penyusunan panduan dan standar untuk mengembangkan ekonomi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, memperkuat pembangunan perekonomian dengan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, kemudahan akses untuk pengembangan ketersediaan informasi mengenai nilai ekonomi Kehati, pemanfaatan Kehati dan jasa lingkungan, serta mekanisme insentifnya. Pemutakhiran IBSAP 2015-2020 yang masih dalam proses pembahasan menjadi kendala dalam proses implementasi pemanfaatan nilai ekonomi Kehati. Pedoman pemutakhiran merujuk kepada petunjuk NBSAP melalui *The Post 2020 Global Biodiversity Framework (GBF)*. *The Post 2020 GBF* termutakhir memiliki 4 (empat) tujuan jangka panjang hingga tahun 2050. Keempat tujuan tersebut adalah: 1) Konektivitas kawasan dan keutuhan ekosistem alami untuk mendukung populasi yang sehat dan tangguh dari semua spesies sekaligus mengurangi jumlah spesies yang terancam dan menjaga keanekaragaman genetik; 2) Kontribusi alam bagi manusia; 3) Manfaat dari pemanfaatan sumber daya genetik dibagikan secara adil dan merata; serta 4) Kerangka sarana implementasi tersedia untuk mencapai semua tujuan dan target.

4. Penegakan Hukum

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan penegakan hukum setelah sanksi administrasi, dan penegakan hukum perdata. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, terbagi dalam 6 (enam) tipologi, yakni: 1) pembalakan liar, 2) perambahan hutan, 3) peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal, 4) pencemaran lingkungan, 5) kebakaran hutan dan lahan, dan 6) kerusakan lingkungan. Kasus terbanyak adalah kasus dengan tipologi pembalakan liar dan peredaran TSL ilegal. Selama tahun 2019,

sebanyak 104 kasus pembalakan liar (54,74%) dan 65 kasus peredaran TSL ilegal (34,21%) telah ditangani sampai dengan P.21 dari total 190 kasus P.21.

Khusus untuk kasus peredaran TSL ilegal yang telah diproses sampai dengan P.21, sejak tahun 2015-2017 terus mengalami kenaikan yaitu 43 kasus, 51 kasus, dan 55 kasus. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 41 kasus, tetapi tahun 2019 mengalami kenaikan lagi menjadi 65 kasus, dan tahun 2020 jumlah kasus TSL ilegal yang telah diproses sampai dengan P.21 sebanyak 46 kasus, seperti pada Gambar 2.109. Selama 5 (lima) tahun terakhir kasus peredaran TSL ilegal merupakan kasus terbesar kedua setelah tipologi kasus pembalakan liar. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah terhadap pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar dan peredaran TSL ilegal.



Gambar 2.109 Jumlah kasus TSL ilegal yang telah diproses P.21,2015-2020

Tantangan dan permasalahan dalam upaya penegakan hukum atas kasus peredaran TSL ilegal, antara lain keterbatasan sumber daya manusia untuk mengawasi seluruh wilayah pelosok nusantara, serta karakteristik kasus peredaran TSL ilegal sering bersifat *masive* dan terorganisasi. Jaringan tindak pidana peredaran TSL tidak hanya pada wilayah nusantara namun melewati batas wilayah NKRI.

2.16 Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

A. Pengantar

Tujuan 16 merupakan indikator yang menjadi landasan atau pondasi dan menentukan keberhasilan pencapaian Tujuan lainnya dalam TPB/SDGs atau disebut sebagai *enabler goal*. Dalam kerangka pembangunan nasional, Tujuan 16 memfokuskan pada upaya untuk memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai, usaha untuk menciptakan akses yang sama terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat, serta membangun suatu kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif, dalam upaya pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Tujuan 16 terdiri dari 12 target dan 36 indikator berdasarkan pada Metadata Edisi II.

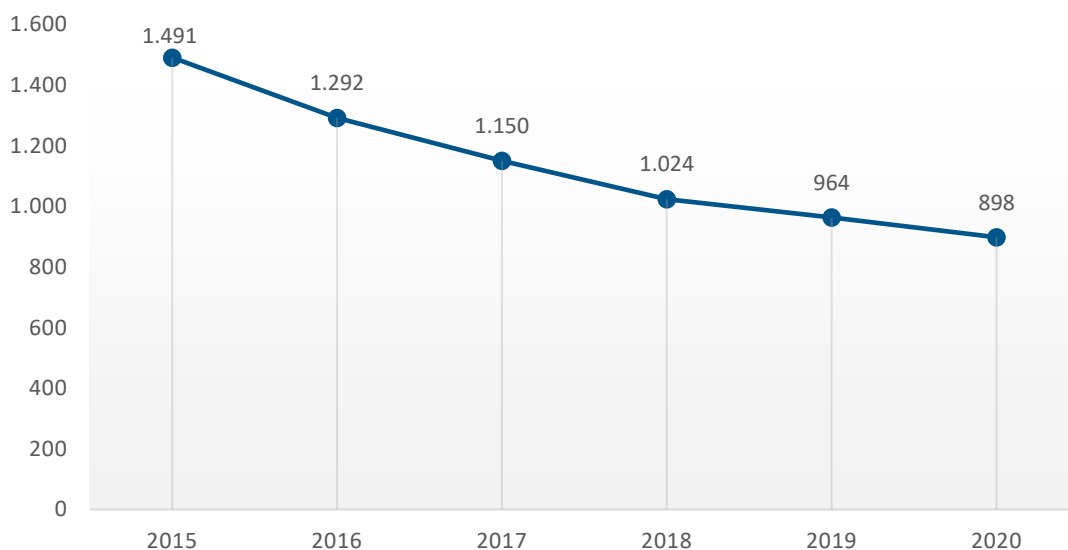
B. Status Capaian

Pada periode antara tahun 2015 hingga 2019, terdapat beberapa pencapaian positif dari beberapa target yang terdapat dalam indikator Tujuan 16, namun beberapa indikator lainnya masih memerlukan perhatian khusus yang juga tidak terlepas dari kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia. Pada bagian ini, status capaian untuk Tujuan 16 akan dikelompokkan menjadi tiga isu utama, yaitu: (1) memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai; (2) akses yang sama terhadap keadilan; dan (3) membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif.

1. MEMPERKUAT MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI

1.a. Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan dan Terkait Angka Kematian Dimanapun

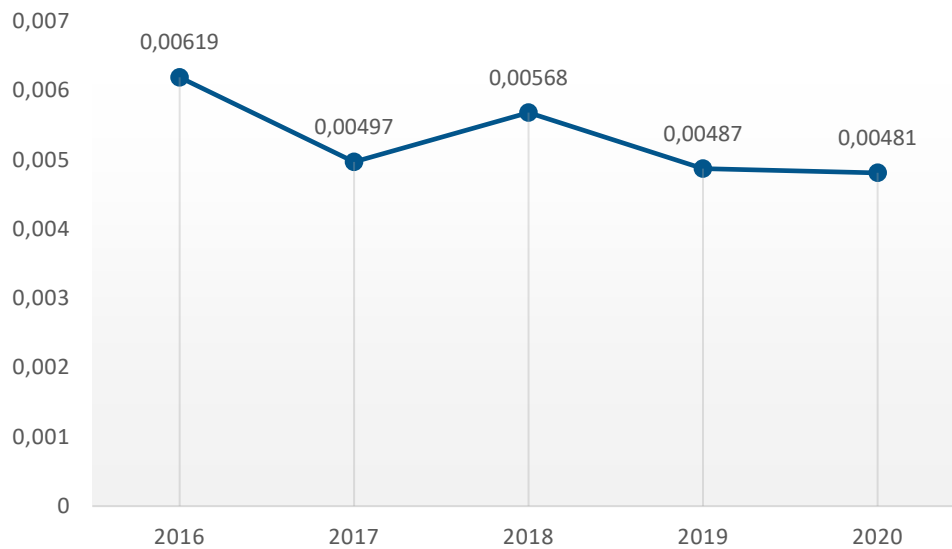
Selama periode tahun 2015 hingga 2019, terlihat adanya upaya mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian yang ditunjukkan oleh beberapa indikator. Indikator 16.1.1 (a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir, merupakan indikator proksi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Seperti terlihat pada Gambar 2.110, penurunan ini menunjukkan adanya penguatan tingkat keamanan di masyarakat dan mampu menekan tingkat kejahatan yang ekstrim.



Gambar 2.110 Perkembangan indikator 16.1.1 (a) jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir, 2015-2020

Sumber: BPS Statistik Kriminal dan Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Indikator utama lainnya yaitu Indikator 16.1.2 (a) kematian yang disebabkan konflik per 100.000 penduduk yang juga mengalami penurunan.



Gambar 2.111 Indikator 16.1.2 (a) proporsi kematian yang disebabkan konflik per 100.000 penduduk, 2016-2020

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Sementara indikator 16.1.3 (a) proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir menunjukkan kondisi yang relatif dinamis di mana terlihat ada kenaikan dan penurunan sepanjang periode 2015 hingga 2019. Hal ini ditunjukkan oleh Tren yang diawali sebesar 0,05 persen pada tahun 2015 sempat mengalami kenaikan menjadi 0,09 persen pada tahun 2017 lalu turun menjadi 0,08 persen (2018) lalu kembali menjadi 0,06 persen di tahun 2019. Walaupun angka ini menunjukkan penurunan, masih adanya korban kejahatan kekerasan berarti menunjukkan perlunya upaya pencegahan dan pengamanan lingkungan.

Indikator 16.3.1 (a) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. Indikator ini menunjukkan tren sebesar 43,58 persen pada tahun 2015 kemudian mencapai 37,5 persen pada tahun 2019 (BPS, Susenas). Selain itu, indikator utama lainnya adalah indikator 16.1.4* yaitu proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, yang menunjukkan tren menurun dari 73,57 persen pada tahun 2014 menjadi 53,32 persen pada tahun 2017. Namun pada tahun 2020, proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya kembali mengalami peningkatan menjadi 62,62 persen. (BPS, SUSENAS).

Capaian-capaian ini memberi indikasi perlunya perhatian khusus dari pemangku kepentingan dalam aspek pencegahan dan keamanan lingkungan karena perasaan aman juga menentukan tingkat kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap indikator proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dengan memasukkan indikator tersebut menjadi salah satu sasaran Program Prioritas mengenai Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020. Beberapa program dan kegiatan pemerintah yang dilakukan terkait

pencapaian tersebut antara lain penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara, dan pembinaan potensi keamanan.

1.b. Menghentikan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak

Upaya menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak memperlihatkan tren yang dinamis di beberapa indikator utama. Indikator 16.2.1 (b) merupakan indikator utama terkait prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya menemukan bahwa terdapat 61,7 persen anak laki-laki dan 62 persen anak perempuan yang mengalami kekerasan (SNPHAR, 2018). Indikator utama selanjutnya yaitu indikator 16.2.3 (a) mengenai proporsi perempuan dan laki-laki usia 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun menunjukkan tren berlawanan antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan pada Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2018, terdapat 10,4 persen perempuan umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. Sedangkan pada kelompok laki-laki yang berusia 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun adalah sebesar 3,1 persen. Diharapkan kasus kekerasan yang menimpa anak maupun perempuan mengalami penurunan yang signifikan pada masa mendatang.

Pada awal pandemi COVID-19, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa (≥ 18 tahun) tercatat sebanyak 173 kasus atau rata-rata 3 kasus per hari selama periode 2 Maret – 26 April 2020. Selanjutnya, jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dewasa tercatat sebanyak 114 orang (Deputi Bidang PHP – Kemen PPPA, 2020). Beberapa organisasi layanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menemukan adanya tren peningkatan jumlah pengaduan dibandingkan sebelum masa pandemi (Komnas Perempuan, 2020; 2021; LBH Apik, 2020). Peningkatan jumlah pengaduan ini belum mencakup perempuan yang mengalami hambatan dalam menyampaikan peristiwa kekerasan yang dialami. Studi SMERU (2019) menemukan adanya 24 persen perempuan miskin yang tidak ingin melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan tersebut.

Pihak nonpemerintah juga berupaya dalam pengurangan tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan. Berbagai bentuk pendekatan yang dilakukan oleh pihak nonpemerintah antara lain dalam bentuk:

- Program untuk membangun kesadaran dan komitmen untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui media elektronik dan cetak berbasis organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga keagamaan serta penguatan dukungan masyarakat sipil.
- Keterlibatan lembaga lokal dalam memberi perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Beberapa inisiatif lembaga pengadaan pelayanan perlindungan serta penguatan jejaring relawan yang fokus pada upaya perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik sebelum maupun di masa pandemi COVID-19. Pengadaan layanan yang

dimaksud termasuk lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat sipil dan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Layanan yang disediakan oleh masyarakat sipil terdiri dari layanan konsultasi dan informasi hukum, konseling psikologis, pendampingan litigasi dan nonlitigasi, membentuk kelompok dukungan serta penguatan komunitas perempuan dan anak. Layanan tersebut biasanya masih disertai dengan kunjungan lapangan, menjangkau korban bila sulit menjangkau lembaga layanan dan kegiatan lain yang mendekatkan akses layanan kepada korban. Pemerintah juga menyediakan layanan melalui P2TP2A/UPT-PPA, selain penyediaan informasi dan layanan konseling, juga melakukan pendampingan litigasi dan nonlitigasi. Baik lembaga layanan masyarakat sipil maupun UPTD-P2TP2A melakukan koordinasi dan membangun sistem rujukan yang melibatkan lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; dan lembaga pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit, serta Dinas Sosial untuk korban yang membutuhkan.

1.c. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif

Indikator 16.b.1 (a) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terkait kebijakan yang masih diskriminatif, dengan menghitung jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan terakhir, berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional. Berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), jumlah kebijakan yang diskriminatif, terutama kepada kaum perempuan, cukup fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2016, Komnas Perempuan menyatakan bahwa jumlah kebijakan yang diskriminatif mencapai 32 kebijakan. Namun pada tahun 2017 tercatat tidak ada laporan mengenai kebijakan diskriminatif dan kembali mengalami peningkatan menjadi 14 kebijakan diskriminatif pada tahun 2018. Pada tahun 2019, kebijakan yang diskriminatif menurun menjadi 4 kebijakan sedangkan pada tahun 2020 tercatat tidak ada kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan.

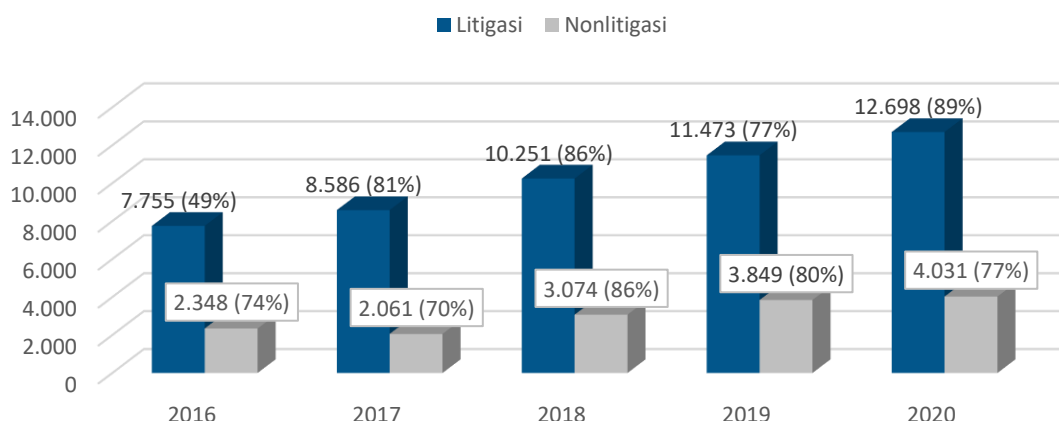
Strategi kebijakan yang terus diupayakan pemerintah terkait pencegahan diskriminasi yaitu meningkatkan upaya perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan diskriminasi, diantaranya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan Kekerasan Seksual masih terus didorong agar disahkan. Program pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban juga ditetapkan dengan terwujudnya sejumlah rekomendasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Selain pemerintah, juga terdapat program yang dijalankan nonpemerintah yaitu dukungan sumber daya untuk mendorong kebijakan bagi pemenuhan hak korban pelanggaran HAM di masa lalu khususnya di tingkat lokal.

2. AKSES YANG SAMA TERHADAP KEADILAN

2.a. Menggalakkan Negara Berdasarkan Hukum dan Menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

Sebagai negara berbasis hukum, pemerintah dengan dukungan dan kerjasama dari berbagai lembaga nonpemerintah terus berusaha melindungi masyarakat dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi seluruh warga negara. Upaya menggalakkan negara berdasarkan hukum dan jaminan akses yang sama terhadap keadilan tercermin pada berbagai indikator utama yang trennya membaik.

Terkait akses pada keadilan, indikator 16.3.1 (b) mengenai masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi menunjukkan tren meningkat sepanjang periode 2016-2020. Seperti terlihat pada Gambar 2.112, persentase orang yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020 (BPHN, Kemenkumham). Selain itu secara total, selama periode 2016 sampai 2020 telah disediakan sebanyak 50.763 pendampingan litigasi bagi masyarakat tidak mampu oleh berbagai organisasi bantuan hukum yang menerima anggaran bantuan hukum. Dari organisasi tersebut juga telah dilaksanakan penyuluhan dan sosialisasi hukum yang berhasil menjangkau puluhan ribu individu rentan lewat sejumlah 13.091 kegiatan (BPHN).



Gambar 2.112 Indikator 16.3.1.(b) jumlah penerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, 2015-2020

Sumber: BPHN, Kemenkumham

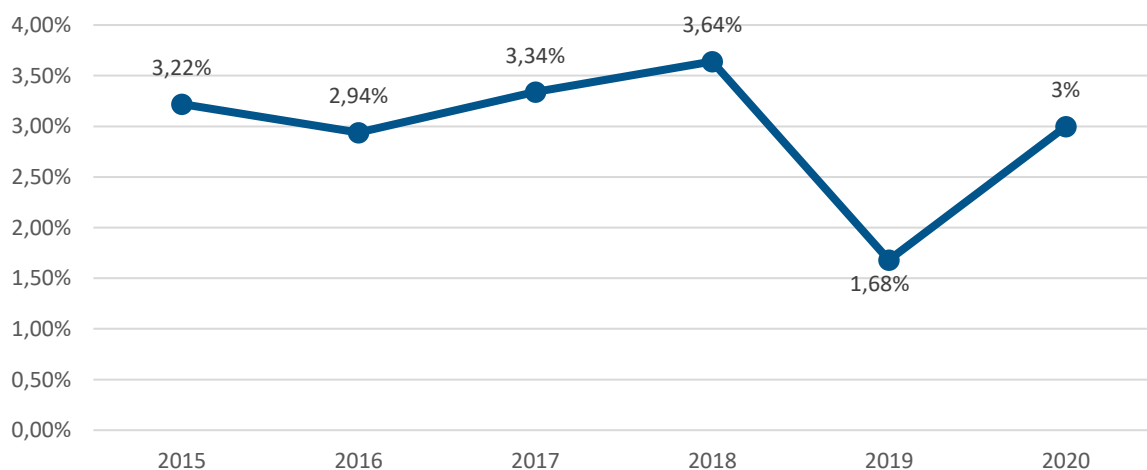
Selanjutnya, indikator 16.3.1 (c) mengenai masyarakat tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara. Semenjak tahun 2015 hingga 2020, persentase orang tidak mampu yang terlayani hampir mencapai 100%, meskipun pada tahun 2019 dan 2020, pelayanan pembebasan biaya perkara mengalami penurunan menjadi 71 persen dan 73 persen. Capaian ini menunjukkan upaya yang nyata dari pemerintah untuk meningkatkan penjaminan akses terhadap keadilan khususnya bagi masyarakat tidak mampu yang selama ini ditengarai mendapati berbagai hambatan untuk memperoleh layanan peradilan. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan persentase orang tidak mampu yang menerima

layanan hukum berupa sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara dan pos bantuan hukum.

Data capaian juga menunjukkan sejumlah 1.448.477 orang terbantu melalui penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos bantuan hukum selama periode 2015-2019. Secara terperinci, terdapat orang yang terlayani melalui sidang di luar gedung pengadilan dan pos bantuan hukum sejumlah 1.061.299 orang. Selain itu, jumlah pembebasan biaya perkara dikabulkan menurut data Mahkamah Agung sejumlah 387.178 perkara.

Pengaruh pandemi COVID-19 terlihat pada terjadinya penurunan total layanan litigasi dan nonlitigasi di tahun 2020 bila dibandingkan tahun 2019 hingga mencapai 17% dan 31%. Sementara itu, pengaruh pandemi belum terlihat nyata untuk penyelenggaraan sidang baik di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos bantuan hukum karena data untuk tahun 2020 belum tersedia.

Pada indikator 16.3.2 (a) mengenai proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap jumlah seluruh tahanan menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif tiap tahunnya.



Gambar 2.113 Indikator 16.3.2 (a) proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan, 2015-2020

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Pemerintah telah menjalankan upaya penjaminan akses keadilan yang dilakukan melalui pendekatan yang salah satunya adalah akses yang terbuka pada putusan pengadilan dari Mahkamah Agung. Dengan terbukanya putusan-putusan pengadilan tersebut, maka analisis dan pemahaman yang lebih baik dapat dilakukan untuk mendalami berbagai perkara hukum yang terjadi, serta memberikan informasi guna menyiapkan berbagai aspek yang diperlukan agar lebih terstandarisasi terkait ketersediaan pendampingan dan bantuan hukum, serta terkait sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos bantuan hukum. Hal ini juga akan sangat mendukung upaya meningkatkan layanan bantuan hukum, khususnya yang terkait dengan perkara-perkara yang melibatkan anak-anak dan kelompok rentan. Berbagai program pemerintah lainnya turut dilakukan dalam rangka penjaminan akses terhadap keadilan yaitu melalui penyelenggaraan pembinaan hukum di

wilayah dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan pelaksanaan bantuan hukum di seluruh kantor wilayah, serta monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan hukum di wilayah.

Strategi program pembangunan yang relevan terkait indikator akses keadilan paling menonjol adalah kebijakan-kebijakan yang merupakan respon di masa pandemi COVID-19. Pemerintah menetapkan kebijakan pelaksanaan persidangan melalui teleconference dengan maksud agar tercapai optimalisasi, efektivitas, efisiensi, dan keamanan dalam pelaksanaannya. Pertimbangan yang mendasari kebijakan ini adalah pertimbangan risiko kesehatan yang dapat muncul selama pandemi COVID-19 sambil tetap memperhatikan hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, serta masyarakat luas dalam kegiatan persidangan.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi (UNICEF, 2020) dengan pertimbangan bahwa fasilitas pemasyarakatan merupakan salah satu tempat penyebaran COVID-19 yang tinggi akibat kondisi sulitnya menjaga jarak dan praktik hidup bersih dan sehat. Upaya pemerintah dalam melakukan pembebasan dini sebagai mitigasi persebaran COVID-19 di dalam lembaga penahanan dan penjara, menurut UNICEF (2020), Indonesia telah membebaskan 992 anak yang merupakan sekitar setengah dari jumlah anak yang menjalani penahanan dan berada di penjara. Berdasarkan data per Maret 2020, masih terdapat 14.512 perempuan dewasa dan 53 anak perempuan yang menempati fasilitas penahanan dan penjara di mana angka tersebut telah menurun menjadi 12.675 perempuan dewasa dan 19 anak perempuan per Desember 2020 (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2020).

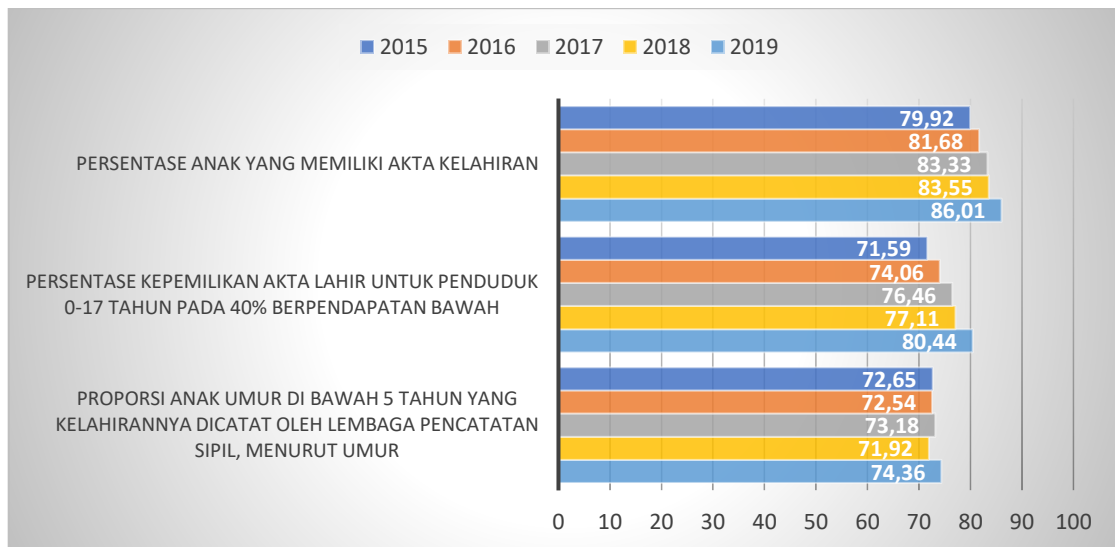
Pemerintah juga mencanangkan kebijakan yang mengamanatkan para aparat penegak hukum agar menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan yang memenuhi kriteria yaitu perlakuan non-diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, tersedianya informasi terkait hak penyandang disabilitas, tersedianya fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, dan penyediaan pendamping disabilitas dan atau penterjemah.

2.b. Memberikan Identitas yang Sah Bagi Semua.

Memberikan identitas yang sah bagi semua orang merupakan suatu bentuk penjaminan pengakuan di hadapan hukum, perlindungan hak-hak, dan memastikan kelalaian dalam hal tersebut tidak akan terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor. Terdapat tiga indikator capaian yang menunjukkan upaya pemerintah dalam memberikan identitas yang sah tersebut:

Pertama, indikator 16.9.1* mengenai capaian proporsi anak berumur kurang dari 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. Tren capaian memperlihatkan adanya peningkatan proporsi dari 72,65 persen pada tahun 2015 menjadi 74,36 persen pada tahun 2019. Capaian indikator **kedua** yaitu indikator 16.9.1 (a) mengenai

persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada kelompok 40 persen berpendapatan bawah. Tren capaian menunjukkan kemajuan dimana pada tahun 2015 terdapat 71,59 persen kepemilikan akta lahir yang mengalami kenaikan menjadi 80,44 persen pada tahun 2019. **Ketiga** adalah capaian indikator 16.9.1 (b) mengenai persentase anak yang memiliki akta kelahiran. Tren capaian di indikator ini menunjukkan kenaikan hingga 88,11 persen di tahun 2020 dibandingkan 79,92 persen pada tahun 2015.



Gambar 2.114 Tren capaian indikator terkait pemberian identitas yang sah, 2015-2019

Sumber: SUSENAS (BPS), Kemendagri

Dalam upaya memberikan identitas yang sah bagi semua, beberapa strategi pemerintah yang sudah dilaksanakan antara lain yaitu komitmen pemerintah untuk terus memperkuat sistem pencatatan sipil (*civil registration*) dan manajemen data kependudukan nasional. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati telah memberikan landasan hukum yang nyata bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperluas cakupan pelayanan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa vital warga negara Indonesia lainnya.

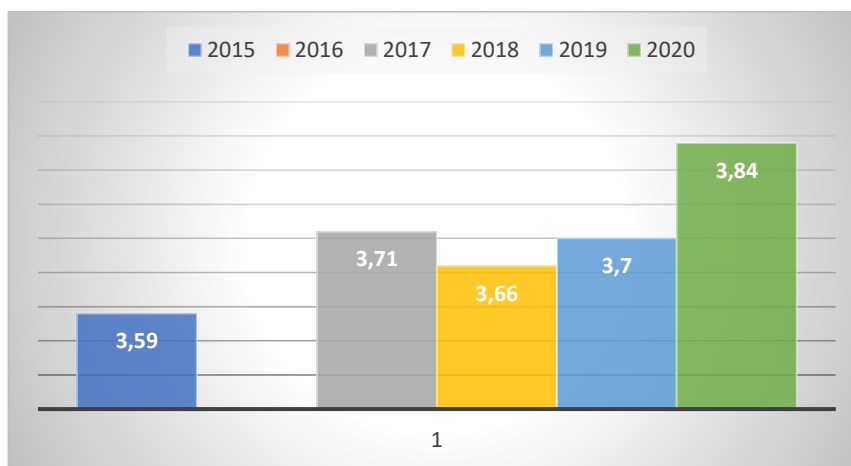
Strategi program pembangunan pemerintah yang relevan terkait capaian ini khususnya selama pandemi, yaitu menjalankan pengalihan proses pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk ke sistem daring (*online*) sejak Maret 2020 melalui surat edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Nomor 443.1/2978/Dukcapil.

3. MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF

Dalam semangat yang intensif untuk membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif, pemerintah dengan didukung dan kerjasama dari berbagai lembaga nonpemerintah mengedepankan berbagai upaya dan pendekatan yang digambarkan oleh berbagai indikator utama.

3.a. Mengurangi Korupsi dan Penyuaan dalam Segala Bentuknya

Indikator pengurangan korupsi dan penyuaan dalam segala bentuknya diukur dengan indikator 16.5.1 (a) tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), yang menunjukkan pola meningkat. Indikator ini menunjukkan tren kenaikan tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi yang berarti semangat *zero tolerance* terhadap praktek korupsi semakin menguat di masyarakat.



Gambar 2.115 Tren Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), 2015-2020

Sumber: BPS

Pemerintah memahami bahwa diperlukan perbaikan yang menyeluruh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Oleh karena itu, pendekatan anti korupsi seperti pemilihan tender, pelacakan arus keuangan, dan penerapan mekanisme pengaduan dan pelaporan terus diterapkan. Peningkatan mekanisme pengawasan internal dengan cara meningkatkan peran inspektorat pada setiap bidang pemerintahan sebagai bentuk pengendalian internal dan memastikan tata kelola yang baik sehingga akan memastikan kegiatan dan program yang berkaitan dengan keuangan negara dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku, juga terus dilakukan.

Dalam konteks pandemi COVID-19, korupsi sangat berbahaya terhadap respons pandemi, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan memutus sumber daya penting dari mereka yang sangat membutuhkan bantuan (World Justice Project, 2020b). Urgensi untuk menanggapi situasi darurat dengan melonggarkan prosedur pengadaan barang dan jasa publik berpotensi menimbulkan perilaku korupsi (World Justice Project, 2020b).

3.b. Membangun Kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan

Beberapa indikator utama dalam target ini menunjukkan dinamika yang mengarah pada pembangunan yang signifikan. Indikator 16.6.1* tentang proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun di mana sejumlah 91,05 persen proporsi tersebut dicapai pada tahun 2015 yang kemudian meningkat hingga 99,7 persen pada tahun 2018 meskipun sempat mengalami penurunan menjadi 93,83 persen di tahun 2019 namun kembali mengalami peningkatan menjadi 94,55 persen pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan peningkatan efektivitas kinerja pemerintah dalam menjalankan program yang telah direncanakan dan penyerapan anggaran.

Indikator 16.6.1 (a) merupakan indikator yang mewakili akuntabilitas lembaga pemerintahan yaitu persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bentuk opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan. Capaian indikator ini pada Tabel 2.33 menunjukkan terjadinya peningkatan WTP baik untuk Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten, maupun Kota.

Tabel 2.33 Indikator 16.6.1 (a) persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Tingkatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
K/L	71	65	84	91	94	97	98
Provinsi	76	85	91	97	94	100	97
Kabupaten	41	54	66	72	79	88	88
Kota	60	65	77	86	90	94	95

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan

Selain ukuran akuntabilitas dari BPK tersebut, indikator lain yang juga mengukur akuntabilitas kelembagaan adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pada tahun 2019, indikator 16.6.1 (b) mengenai persentase instansi pemerintah yang memiliki skor SAKIP B mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2020, persentase instansi pemerintah yang memiliki skor SAKIP B mengalami peningkatan di tingkat Kementerian/Lembaga menjadi 95,24 persen sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota mengalami peningkatan menjadi 62,80 persen, dan di tingkat provinsi memiliki nilai yang sama dengan tahun 2019 (97,06 persen).

Tabel 2.34 Indikator 16.6.1 (b) persentase instansi pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B, 2015-2020

Tingkatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
K/L	76,62	85,00	93,9	91,76	94,05	95,24
Provinsi	50,00	65,00	85,29	91,18	97,06	97,06
Kabupaten/Kota	2,38	14,53	35,40	47,05	57,28	62,80

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Secara spesifik perubahan skor SAKIP dipengaruhi antara lain: (1) keterlibatan langsung pimpinan K/L dan daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja, melalui kegiatan telaah realisasi anggaran dan kinerja secara triwulanan yang semakin meningkat; (2) turunan (cascading) sasaran nasional ke dalam visi-misi organisasi sampai pada tingkatan terendah (indikator kinerja individu) telah diperbaiki; (3) penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja dan pelayanan yang mulai optimal.

Pemerintah secara konsisten terus berusaha menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Lebih lanjut, untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah maka indikator utama yang digunakan adalah persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2019, indikator 16.6.1 (c) tentang persentase instansi pemerintah yang memiliki skor Indeks Reformasi Birokrasi (RB) B mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015. Namun pada tahun 2020, Indeks RB kembali mengalami penurunan di semua tingkatan.

Tabel 2.35 Indikator 16.6.1 (c) persentase instansi pemerintah dengan indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B, Tahun 2015-2020

Tingkatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
K/L	77,5	91,36	95,36	92,94	96,43	96,39
Provinsi	8,82	27,00	47,06	61,76	88,24	79,41
Kabupaten/Kota	0,97	4,31	5,29	12,45	26,41	24,41

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Indikator indeks Reformasi Birokrasi ini mencakup berbagai aspek kualitas layanan meliputi: (a) prosedur layanan, (b) persyaratan layanan, (c) biaya layanan, (d) waktu layanan, (e) jangka waktu layanan, (f) responsifitas layanan, (g) kecakapan SDM, (h) sarana/prasarana layanan, dan (i) fasilitas pengaduan.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi maka indikator utama yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah yaitu indikator 16.6.2 (a) mengenai persentase jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik yang berkategori baik. Seperti terlihat pada Tabel 2.36, indikator utama ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2019. Capaian ini menunjukkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi melalui implementasi komponen standar pelayanan pada tiap unit pelayanan publik di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian kepatuhan pelayanan publik dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.36 Indikator 16.6.2 (a) persentase instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik

Tingkatan	2015	2016	2017	2018	2019
Kementerian	27	44	36	56	50
Lembaga	20	67	33	25	0
Pemerintah Provinsi	9	39	27	63	33
Pemerintah Kabupaten/Kota	5	22	18	33	33

Sumber: Ombudsman RI

Reformasi birokrasi dan tata kelola terus dilakukan dengan meningkatkan persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, program penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, antara lain: 1). peningkatan komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata; 2). peningkatan kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mengelola kinerja organisasi; 3). peningkatan kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi; 4). peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.

Selain itu, juga diatur mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 1). peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 2). peningkatan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 3). peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.

3.c. *Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif*

Capaian target terkait penjaminan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif tercermin pada beberapa indikator utama berikut ini. Perkembangan partisipasi politik perempuan dalam menetapkan kebijakan publik terlihat pada perkembangan indikator 16.7.1 (a) mengenai persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Capaian menunjukkan persentase sebesar 17,32 persen untuk DPR, 34 persen untuk DPRD Provinsi dan 14 persen untuk DPRD Kabupaten/Kota pada tahun 2014 mengalami peningkatan hingga mencapai 20,52 persen untuk DPR, 17,53 persen untuk DPRD Provinsi dan 15,72 persen untuk DPRD Kabupaten/Kota di tahun 2019.

Indikator berikutnya terkait dengan perkembangan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga eksekutif yang tercermin pada indikator 16.7.1 (b) mengenai proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di Lembaga eksekutif setara eselon I dan II. Capaian menunjukkan persentase 15,67 persen untuk kelompok Eselon I dan 13,04 persen untuk kelompok Eselon II di tahun 2015 yang meningkat hingga 16,6 persen untuk kelompok Eselon I dan 13,49 persen untuk kelompok Eselon II di tahun 2020.

Capaian kinerja lembaga demokrasi, kebebasan sipil dan kesetaraan warga dalam menggunakan hak pilihnya dapat dicermati lewat indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Untuk melihat capaian kinerja lembaga demokrasi khususnya penyelenggara pemilu yang

bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen diukur dengan indikator 16.7.2 (a) mengenai Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi. Indeks ini mengukur kapabilitas negara dan lembaga demokrasi untuk menjamin agar prinsip kebebasan dan kesetaraan berjalan dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial. Kapabilitas lembaga demokrasi yang termasuk di dalamnya yakni penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen. Capaian yang terlihat pada tahun 2016 dengan nilai indeks 62,05 telah mengalami peningkatan hingga mencapai nilai indeks 78,73 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, capaian Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi mengalami sedikit penurunan menjadi 75,66.

Capaian kebebasan sipil dilihat hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu yang diukur dengan Indikator 16.7.2 (b) tentang Indeks Kebebasan yang merupakan salah satu prinsip atau variabel dalam pengukuran IDI. Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga terjamin kebebasannya untuk dapat beraktivitas dan mengekspresikan sikap serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Capaian yang terlihat pada tahun 2016 dengan nilai indeks 76,45 mengalami kenaikan mencapai nilai indeks 77,2 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, capaian Indeks Aspek Kebebasan mengalami peningkatan menjadi 79,40.

Capaian keadilan dan kesetaraan akses warga negara dalam hal memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan diukur dengan indikator 16.7.2 (c) mengenai Indeks Kesetaraan yang fokus pada warga terjamin keadilan dan kesetaraan aksesnya terhadap sumber daya politik, ekonomi, dan sosial melalui keterlibatan warga secara langsung dalam bentuk partisipasi atau melalui perwakilan untuk mewakili kepentingannya. Capaian yang terlihat pada tahun 2016 dengan nilai indeks 70,11 mengalami kenaikan mencapai nilai indeks 70,71 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, capaian Indeks Kesetaraan menurun menjadi 67,85.

3.d. *Menjamin Akses Publik Terhadap Informasi dan Perlindungan Kebebasan Mendasar*

Pemerintah terus mengupayakan penjaminan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar yang sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. Dalam upaya tersebut, pemerintah dengan didukung dan kerjasama dari berbagai lembaga nonpemerintah berkomitmen mewujudkan pencapaian berbagai indikator terkait target tersebut agar publik mendapatkan jaminan atas hak-hak untuk bebas dari penyiksaan, penangkapan secara semena-mena dan proses hukum yang berkeadilan memberi jaminan tiadanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh siapa pun. Salah satu indikator utama di aspek ini adalah indikator 16.10.1 (a) tentang Indeks Kemerdekaan Pers. Seperti terlihat pada Tabel 2.37, capaian indikator ini menunjukkan pada tahun 2020 dengan nilai indeks 74 yang mengalami peningkatan dari nilai indeks 63,44 pada tahun 2016.

Tabel 2.37 Indikator 16.10.1 (a) Indeks Kemerdekaan Pers (IKP), 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kemerdekaan Pers	63,44	67,92	69	73,71	74

Sumber: Dewan Pers Nasional

C. Tantangan

1. Tantangan yang dihadapi dalam upaya penghentian berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan anak antara lain:
 - a. masih sulitnya mendapatkan informasi dan ilustrasi yang menyeluruh tentang insiden kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia karena terbatasnya ketersediaan data. Meskipun berbagai layanan yang terkait isu kekerasan perempuan dan anak telah tersedia namun ditengarai masih belum semua bentuk layanan tersebut beroperasi secara baik akibat belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) layanan dan rujukan secara merata, terbatasnya ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan layanan yang belum mampu menjangkau penanganan kasus hingga ke tingkat komunitas.
 - b. upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang dicanangkan belum secara intensif menjangkau kelompok rentan dan terpinggirkan seperti anak dan perempuan yang hidup dalam lingkungan rumah tangga tradisional (Bappenas, 2020).
 - c. tantangan yang dihadapi di tengah masa pandemi khususnya bagi anak dan perempuan yang merupakan kelompok yang paling rentan dalam upaya menanggulangi penyebaran COVID-19 akibat adanya kebijakan pembatasan mobilitas dan kegiatan.
 - d. pengadaan pelayanan dan pendamping di masa pandemi antara lain waktu layanan yang lebih Panjang akibat adanya perubahan waktu dan cara kerja lembaga layanan akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengalihan layanan langsung (offline) menjadi layanan daring/online sehingga berdampak pada kualitas layanan (UNWomen, 2020; Komnas Perempuan, 2020).
2. Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan akses keadilan selama ini masih bertumpu pada isu pemantauan dan perbaikan kualitas pendampingan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi. Salah satu aspek penting dari isu tersebut adalah ketersediaan data berdasarkan persebaran wilayah, jenis kasus, usia tersangka, dan hasil pendampingan yang lebih lengkap dan detil. Perlunya memahami konteks berbagai kasus dari data pendampingan dan kebutuhan hukum di tingkat masyarakat yang tersedia secara berkala, dapat meningkatkan kemampuan analisis yang lebih baik tentang kesesuaian dan efektivitas bantuan hukum yang disediakan pemerintah Indonesia. Selain itu, tantangan dalam upaya peningkatan akses keadilan untuk semua masyarakat yaitu persebaran organisasi bantuan hukum (OBH) yang masih belum merata, sehingga penyediaan layanan bantuan hukum belum dapat menjangkau secara optimal seluruh pelosok wilayah di Indonesia.

3. Tantangan yang dihadapi dalam upaya memberikan identitas yang sah bagi semua terutama pada aspek hambatan pencatatan kelahiran yang masih dialami anak-anak di rumah tangga termiskin. Bagi kelompok anak dalam rumah tangga di kuintil pendapatan terendah, akta kelahiran di antara anak 0-17 tahun baru mencapai sebesar 81,76 persen pada tahun 2020 (Susenas). Beberapa kajian menemukan beberapa aspek yang membatasi akses masyarakat pada akta kelahiran meliputi layanan yang sulit dijangkau, biaya yang muncul dalam proses permohonan serta prosedur yang dianggap rumit (Duff, Kusumaningrum, dan Stark, 2016; Sumner dan Kusumaningrum, 2014).
4. Tantangan yang dihadapi terkait penjaminan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif yaitu terkait pemanfaatan data dan informasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan yang belum optimal. Sebagai contoh, indikator yang mengukur kinerja lembaga demokrasi yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) idealnya digunakan untuk dapat menggambarkan kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia berdasarkan realitas berbasis bukti. Namun, pemanfaatan indikator ini belum secara penuh terjadi di daerah khususnya saat pemerintah daerah melakukan pertimbangan perencanaan pembangunan politik di daerahnya masing-masing. Selain itu, IDI juga dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan. Oleh karena itu, strategi pemerintah terkait indikator ini adalah memperkuat kelompok kerja IDI di daerah.
5. Tantangan yang dihadapi dalam upaya menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar yaitu memastikan semua aturan dan kebijakan yang implementasinya bersifat nondiskriminatif serta memberikan akses yang sama pada keadilan dan layanan dasar bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Dengan kata lain, pemerintah masih perlu memperhatikan pelaksanaan peraturan yang ada apabila masih mengandung unsur-unsur yang mengecualikan kelompok masyarakat tertentu. Menurut Komnas Perempuan, masih ditemukan adanya 438 peraturan baik di tingkat nasional maupun di daerah yang terindikasi memuat aturan diskriminatif terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal di tahun 2019. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), telah terlihat adanya upaya perbaikan dalam penanganan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, di mana mereka melakukan klarifikasi, memfasilitasi mediasi, dan memberhentikan laporan dalam beberapa kasus (YLBHI, 2020). Namun, secara umum masih terdapat beberapa tantangan bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menyediakan solusi dan perlindungan yang adil.

2.17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

A. Pengantar

Dalam periode 2015-2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stagnan sebesar 5 persen yang disebabkan diantaranya oleh produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Sementara itu, defisit transaksi berjalan yang meningkat disebabkan oleh tidak berkembangnya industri pengolahan sehingga berdampak pada kinerja perdagangan internasional. Tantangan tersebut semakin diperberat dengan pandemi COVID-19, yang merupakan *unprecedented shock*⁵², dan berdampak pada berbagai bidang dan turut mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini jelas mempengaruhi pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) termasuk diantaranya Tujuan 17 sebagai Tujuan *Means of Implementation* atau Tujuan yang menjadi Sarana Pelaksanaan guna mendukung pelaksanaan ke-16 Tujuan lainnya.

Capaian dan tantangan sejumlah indikator pada Tujuan 17 sepanjang periode aksi TPB/SDGs antara tahun 2017- 2019, termasuk dampak yang disebabkan pandemi COVID-19 yang mempengaruhi capaian Tujuan 17, akan dijabarkan ke dalam lima (5) isu utama diantaranya (1) penerimaan negara; (2) perdagangan internasional; (3) teknologi informasi dan komunikasi; (4) kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta; dan (5) ketersediaan data.

B. Status Capaian

1.a. Penerimaan Negara

Pada periode 2014-2016 dan 2018, capaian indikator 17.1.1.(a) terkait dengan rasio penerimaan pajak mencapai lebih dari 10%. Apabila dibandingkan dengan rasio penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun 2020 tergolong rendah. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 2020 tercatat sebesar 8,31%. Capaian ini 0,26% lebih rendah dari target yang telah direvisi sebelumnya. Berdasarkan postur makro fiskal Rancangan APBN 2020, rasio pajak ditargetkan mencapai 10,57%-11,18% dari PDB. Namun, realisasi penerimaan perpajakan pada 2020 tercatat sebesar Rp1.282,77 triliun (91,33% dari target APBN Perpres 72 tahun 2020)⁵³, yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.069,98 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp212,79 triliun.

Dengan kinerja penerimaan pajak tersebut, pendapatan negara pun terdampak karena penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pendapatan negara. Pada 2020, sekitar 78,5% dari Pendapatan Negara dan Hibah yang mencapai Rp1.633.59 triliun (96,10% dari target APBN Perpres 72 tahun 2020) merupakan kontribusi dari penerimaan perpajakan. Selain

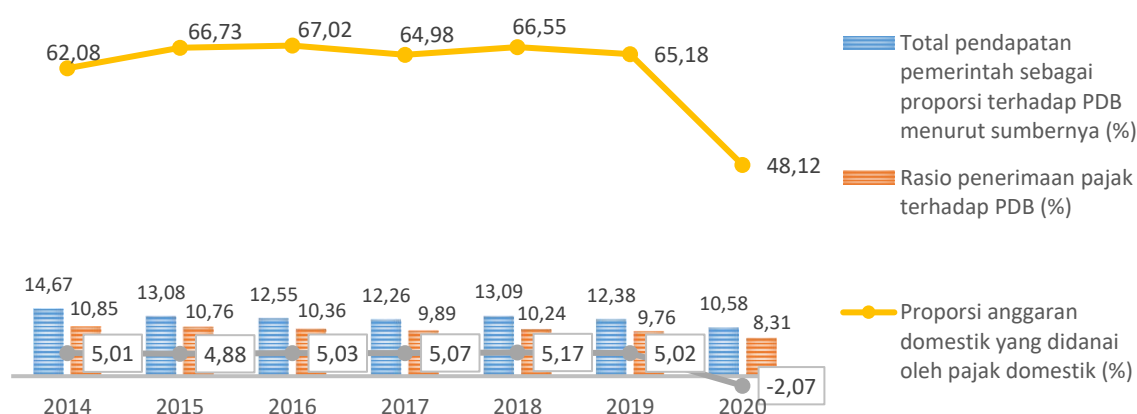
⁵² Dalam sejumlah bidang, pandemi Covid-19 menyebabkan capaian pembangunan yang diperoleh pada 2020 kembali (mundur) lagi hingga setara dengan capaian beberapa tahun sebelumnya. Dalam konteks belanja publik, perencanaan dan penganggaran yang telah disiapkan harus direncanakan, dihitung, dan dialokasikan kembali (*refocusing* dan realokasi) dengan fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya.

⁵³ Pemerintah telah merevisi postur APBN dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 dengan Perpres 72/2020 untuk menampung biaya penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), serta realokasi anggaran/*refocusing* kegiatan pada belanja Kementerian/Lembaga untuk mendukung kebijakan PC-PEN.

perpajakan, sumber pendapatan negara lainnya adalah penerimaan bukan pajak (PNBP) yang pada 2020 tercatat sebesar Rp338,53 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp12,29 triliun.

Dengan capaian tersebut, indikator 17.1.1* terkait proporsi pendapatan pemerintah terhadap PDB tercatat menjadi sebesar 10,58%. Serupa dengan rasio penerimaan pajak, proporsi pendapatan pemerintah terhadap PDB tahun 2020 juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 2020 turun sebesar Rp327,05 triliun atau sekitar 16,68% dari capaian tahun sebelumnya.

Turunnya penerimaan perpajakan pada 2020 juga berdampak pada makin terbatasnya ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan belanja negara. Implikasinya adalah pada penurunan capaian indikator 17.1.2* yaitu proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. Capaian untuk indikator 17.1.2* tercatat sebesar 48,12 % pada tahun 2020, setelah dapat mempertahankan capaian diatas 64% pada 2015-2019. Anggaran domestik ini merupakan representasi dari belanja negara yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Pemerintah tetap berupaya menjaga kestabilan perekonomian melalui instrumen fiskal meski penurunan penerimaan perpajakan relatif tinggi. Defisit APBN 2020 tercatat sebesar Rp956,3 triliun atau sebesar 6,09% dari PDB⁵⁴.



Gambar 2.116 Indikator Pendapatan Pemerintah dan Rasionya Terhadap PDB

Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS

Dalam merespon dampak pandemi COVID-19, pemerintah menggunakan APBN sebagai instrumen *countercyclical* dari sisi belanja untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik⁵⁵. Kebijakan ini diimplementasikan melalui kebijakan fiskal yang ekspansif dengan mengalokasikan stimulus ekonomi yang komprehensif. Stimulus ini tergambar dalam *refocusing* dan realokasi belanja untuk melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan membawa pola baru belanja operasional Kementerian/Lembaga yang lebih efisien menuju adaptasi kebiasaan baru (*new normal*), serta peningkatan belanja negara secara

⁵⁴ Kementerian Keuangan. APBN Kita: Kinerja dan Fakta 2020. Edisi Januari 2021, hal. 28.

⁵⁵ Kementerian Keuangan. APBN Kita: Kinerja dan Fakta 2020. Edisi Januari 2021, hal. 34, Kementerian Keuangan. Dalam teori, kebijakan *countercyclical* didefinisikan sebagai kebijakan pro-aktif pemerintah guna mengatasi pergerakan siklus ekonomi yang ekstrim, baik booming maupun resesi.

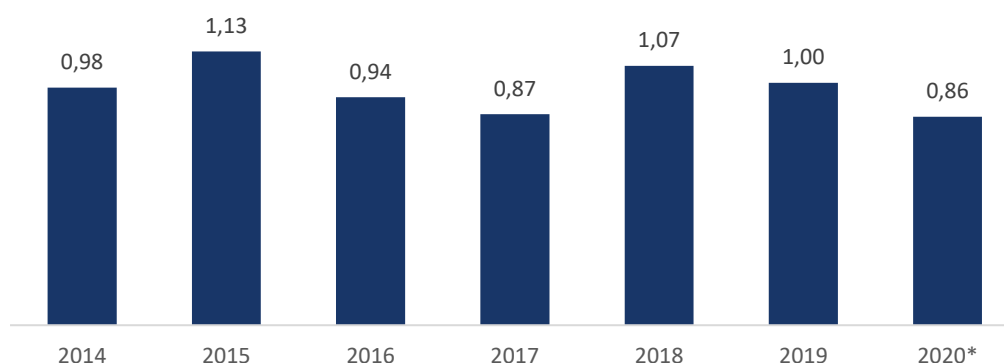
khusus untuk penanganan COVID-19, menahan laju penurunan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kenaikan kemiskinan dan pengangguran.

Program PEN merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional dan daerah yang terdampak oleh pandemi COVID-19 melalui strategi kebijakan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Program ini mencakup enam klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan untuk UMKM, pembiayaan korporasi, serta dukungan ekonomi melalui program sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Langkah kebijakan penanganan dan pemulihan ekonomi ini diarahkan untuk menjaga konsumsi, mendorong investasi, mendukung ekspor impor, serta menjaga dunia usaha tetap beroperasi. Di antaranya adalah alokasi untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*) agar daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin dapat terjaga untuk menjaga kestabilan perekonomian domestik, serta insentif pajak bagi dunia usaha agar tetap produktif.

1.b. Remitansi Pekerja Migran Indonesia

Di masa kini, posisi pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri semakin penting. Remitansi yang mereka hasilkan menjadi salah satu sumber penyumbang devisa negara, yang tercatat dalam neraca pendapatan sekunder. Remitansi ini menjadi salah satu instrumen yang mampu menahan defisit transaksi berjalan, terutama apabila kinerja ekspor sedang menurun. Selama masa pandemi COVID-19, jumlah PMI dan remitansi tercatat menurun dibanding tahun sebelumnya. Pada 2020, jumlah PMI tercatat sebanyak 3,19 juta orang dengan remitansi sebesar 9,43 milyar dollar AS. Sementara itu, jumlah PMI dan remitansi pada 2019 masing-masing sebesar 3,74 juta orang dan 11,44 miliar dollar AS.

Penurunan tersebut berimplikasi pada indikator 17.3.2.(a) proporsi volume remitansi PMI terhadap PDB, di mana pada 2020 tercatat sebesar 0,86%. Sebelumnya, remitansi PMI tergolong membaik dengan capaian minimal 1% terhadap PDB pada periode 2018-2019. Capaian tersebut memang belum setinggi capaian 2015 yang tercatat sebesar 1,13%. Sementara itu, tahun 2017 menjadi tahun dengan capaian proporsi volume remitansi PMI terhadap PDB yang terendah sepanjang periode 2014-2019 (Gambar 2.117).



Gambar 2.117 Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB (%)

Sumber: BPS dan Bank Indonesia

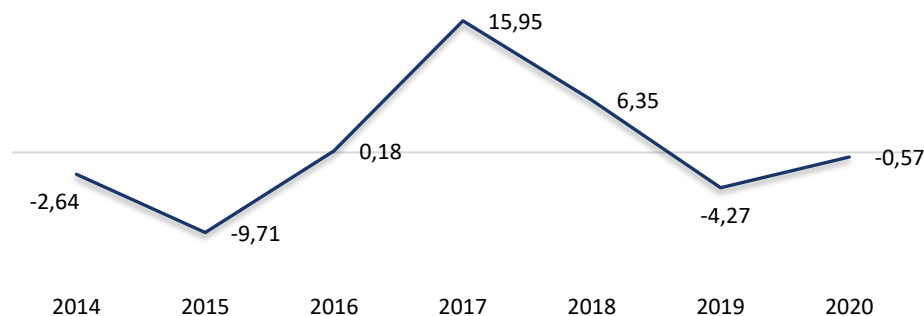
Keterangan: * angka sementara

Pandemi COVID-19 membuat pekerja migran Indonesia rentan kehilangan pekerjaan. Kebijakan pembatasan kegiatan dan perjalanan yang diambil negara-negara tujuan kerja menyebabkan pekerja migran tidak lagi bekerja, baik untuk sementara ataupun secara permanen. Ditambah lagi dengan risiko kesehatan akibat COVID-19 yang tingkatannya bergantung pada tingkat keparahan kesehatan masing-masing negara tempat kerja mereka. Faktor-faktor tersebut turut mempengaruhi kontribusi remitansi pekerja migran bagi devisa negara.

Namun demikian, potensi peningkatan devisa negara yang dihasilkan oleh pekerja migran di masa mendatang masih terbuka lebar. Terutama dengan terjadinya *aging population* atau penuaan penduduk di sejumlah negara Asia yang berpotensi membuat mereka kekurangan tenaga kerja produktif.

2.a. Ekspor Nonmigas

Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang direpresentasikan dengan indikator 17.11.1.(a) pertumbuhan ekspor nonmigas sepanjang periode 2014-2020 mengalami fluktuasi. Dalam kurun waktu tersebut, ekspor nonmigas tercatat tiga kali mengalami pertumbuhan positif, yaitu dalam kurun waktu 2016-2018. Di luar masa tersebut, pertumbuhan ekspor nonmigas tercatat negatif. Titik terendahnya terjadi pada 2015, di mana ekspor nonmigas mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 9,71%. Yang menjadi catatan penting adalah di masa pandemi COVID-19, penurunan ekspor nonmigas dapat dijaga sehingga tidak lebih tinggi dari penurunan tahun sebelumnya. Sepanjang 2020, ekspor nonmigas tercatat sebesar Rp155 milyar dollar AS sehingga hanya turun sekitar 0,57% dari tahun sebelumnya. Pembalikan tren pertumbuhan ekspor nonmigas ini dapat menjadi momentum untuk mencapai pertumbuhan yang positif di tahun-tahun mendatang.



Gambar 2.118 Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)

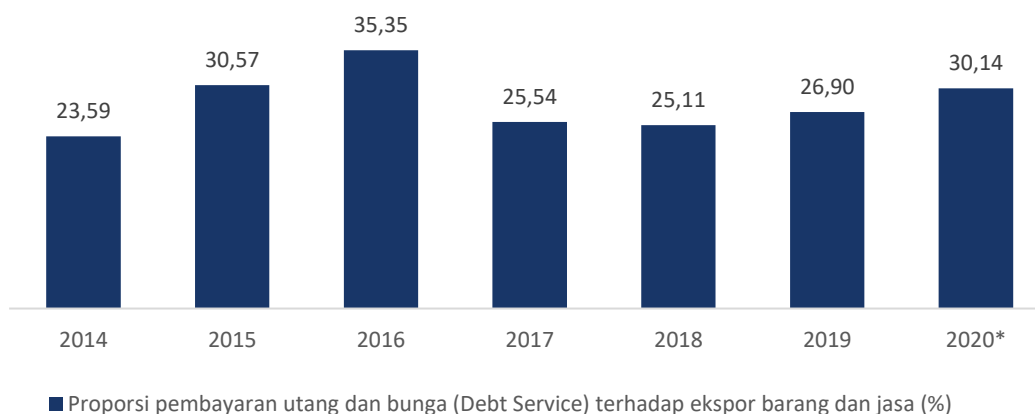
Sumber: BPS

2.b. Pembayaran Utang dan Bunga

Dalam tiga tahun terakhir, indikator 17.4.1* tentang proporsi pembayaran utang dan bunga terhadap ekspor barang dan jasa (*debt service ratio – DSR*) Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. Rasio pembayaran utang dan bunga ini menunjukkan seberapa besar proporsi pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan transaksi berjalan. Tinggi rendahnya rasio pembayaran utang dan bunga ini juga bergantung pada

ekspor barang dan jasa pada tahun berjalan. Ekspor barang dan jasa yang meningkat dapat menurunkan rasio tersebut, sebaliknya ekspor barang dan jasa yang turun dapat meningkatkan rasio pembayaran utang dan bunga ini.

Pada 2020 lalu, rasio pembayaran utang Indonesia tercatat sebesar 30,14%. Capaian ini merupakan yang tertinggi ketiga sepanjang periode 2014-2020, di bawah capaian tahun 2016 dan 2015 yang masing-masing tercatat sebesar 35,35% dan 30,57%. Dalam periode 2014-2020, utang luar negeri Indonesia, yang bersumberkan dari utang sektor publik (pemerintah dan Bank Sentral) dan swasta, menunjukkan tren meningkat. Pada 2020, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 417,5 miliar dolar AS, yang terdiri atas utang sektor publik sebesar 209,2 miliar dolar AS dan sektor swasta sebesar 208,3 miliar dolar AS⁵⁶. Di sisi pemerintah, utang luar negeri digunakan untuk menopang belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Rasio utang pemerintah dijaga tetap di bawah 60% dari PDB sebagaimana diamanatkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rasio utang pemerintah terhadap PDB pada 2020 tercatat sebesar 38,5%. Angka tersebut 8% lebih tinggi dibandingkan rasio utang pemerintah tahun sebelumnya, salah satunya karena meningkatnya defisit anggaran dari 2,3% (2019) menjadi 6,1% (2020).



Gambar 2.119 Proporsi pembayaran utang dan bunga terhadap ekspor barang dan jasa (%)

Sumber: Bank Indonesia

Keterangan: * angka sementara

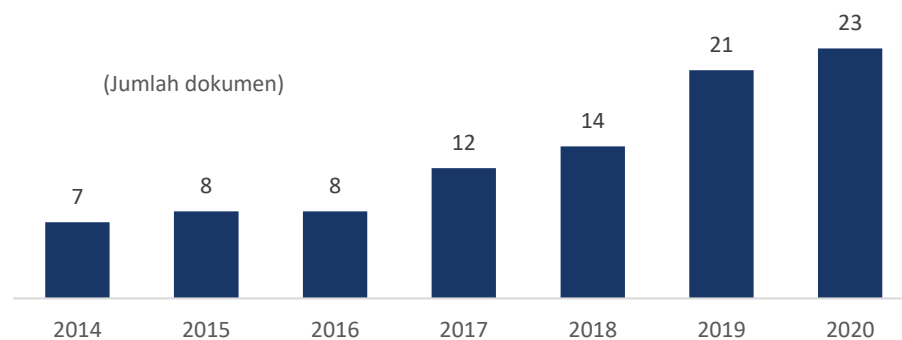
2.c. Perdagangan Internasional

Kerjasama perdagangan internasional secara khusus juga dilakukan melalui indikator 17.10.1.(a) dalam skema *Preferential Trade Agreement* (PTA) dan *Free Trade Agreement* (FTA), serta kemitraan ekonomi melalui *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). PTA, FTA, dan CEPA merepresentasikan komitmen Indonesia untuk membangun kerjasama internasional dalam hal perdagangan barang dan jasa, maupun bidang-bidang lain seperti investasi, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain.

Hingga 2020, Indonesia telah menyelesaikan 23 kerjasama atau perjanjian dalam skema PTA/FTA/CEPA. Dengan tren yang terus meningkat, jumlah perjanjian tersebut lebih

⁵⁶ https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_233921.aspx

dari tiga kali lipat banyaknya dari perjanjian pada 2014. Diantara kerjasama tersebut adalah kerja sama Indonesia Australia - CEPA (IA-CEPA) yang berlaku sejak 5 Juli 2020 merupakan kerjasama ekonomi yang dilaksanakan melalui *Economic Cooperation Program (ECP)*, yang dikordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam skema ini, ECP berfokus pada kegiatan-kegiatan untuk pengembangan kapasitas bagi berbagai pihak di Indonesia untuk mendukung peningkatan performa Indonesia di perdagangan global dan investasi⁵⁷. Ruang lingkup ECP akan mencakup: i) implementasi IA-CEPA; ii) kerjasama di bidang pertanian dan pengolahan makanan; 3) *advanced manufacturing*; serta iv) pengembangan keterampilan dan pelatihan. Kerjasama ekonomi yang komprehensif antara Indonesia dan Australia diharapkan dapat memberi manfaat bagi pelaku usaha Indonesia, di antaranya melalui penghapusan seluruh tarif bea masuk Australia sehingga seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar Australia akan menikmati tarif 0%⁵⁸.



Gambar 2.120 Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati

Sumber: Kementerian Perdagangan

3. Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

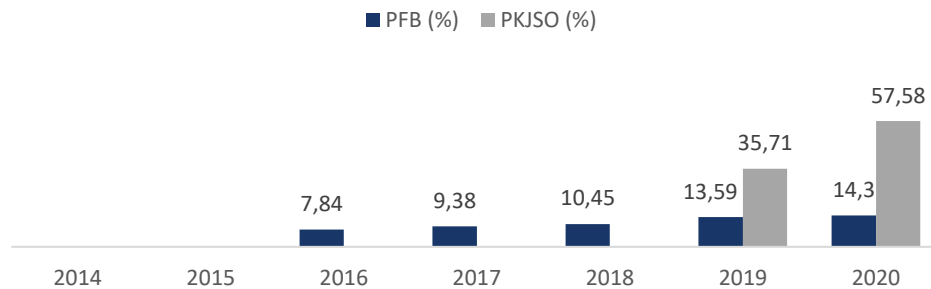
Dalam TPB/SDG Indonesia, terdapat dua indikator penyediaan infrastruktur TIK yang digunakan, yaitu i) persentase rumah tangga terlayani jaringan internet akses *fixed broadband* terhadap total rumah tangga, serta ii) persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik *broadband*. Selain itu, terdapat satu indikator dalam TPB/SDG Indonesia yang merepresentasikan sisi permintaan, yaitu persentase pengguna internet.

Dalam beberapa tahun terakhir, capaian indikator 17.6.1.(a) untuk persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses *fixed broadband* menunjukkan tren yang meningkat. Pada 2019, tercatat 13,59% dari 68,7 juta rumah tangga yang terlayani jaringan internet *fixed broadband* ini. Pada tahun yang sama, terdapat lebih dari sepertiga (35,71%) dari 7.175 kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik *broadband*. Pada 2020, kedua indikator tersebut sama-sama meningkat. Persentase pelanggan terlayani jaringan

⁵⁷ Kementerian PPN/Bappenas. Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III Tahun 2020. Edisi Vol. 4, No. 3 November 2020.

⁵⁸ <https://kemlu.go.id/canberra/id/news/6650/perjanjian-kemitraan-ekonomi-komprehensif-antara-indonesia-dan-australia-akan-berlaku-efektif-5-juli-2020>

akses *fixed broadband* meningkat menjadi 14,3%, sedangkan untuk indikator 17.6.1.(b) terkait persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik *broadband* juga meningkat menjadi 57,58%.

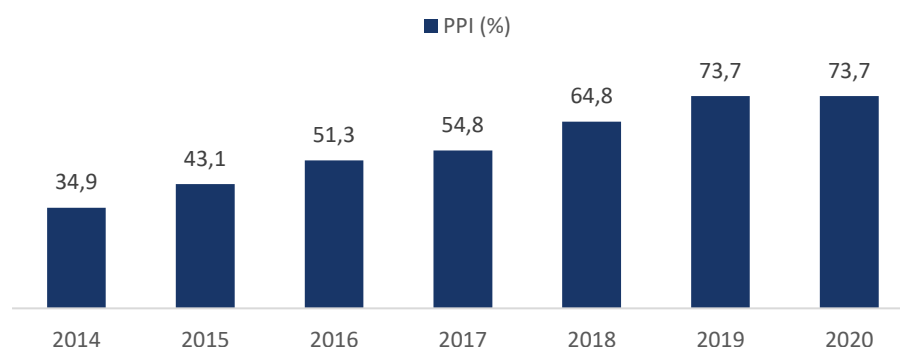


Gambar 2.121 Indikator penyediaan infrastruktur TIK

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Keterangan: PFB = Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) terhadap total rumah tangga - (*data PFB tahun 2014-2015 belum dimasukkan*); PKJSO = Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik *broadband* - (*data PKJSO 2014-2018 belum dimasukkan*)

Capaian indikator 17.8.1* tentang penetrasi pengguna internet di Indonesia, mengalami tren yang meningkat dalam kurun waktu 2014-2019. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), persentase pengguna internet di Indonesia pada 2019 dua kali lipat dari capaian yang diperoleh pada 2014, sementara untuk 2020, capaian indikator ini relatif sama dengan tahun 2019. Stagnasi ini dimungkinkan terjadi karena penambahan populasi penduduk yang setara dengan pertumbuhan penetrasi internet. Pada 2019, secara keseluruhan mencapai 196,71 juta pengguna internet. Peningkatan pengguna internet pada tahun tersebut mencapai 8,9% atau bertambah sebanyak 25,54 juta pengguna dibanding tahun sebelumnya. Dari seluruh pengguna internet pada 2019, yang terbanyak terdapat di pulau Jawa (56,4%), diikuti kemudian oleh Sumatera (22,1%), Sulawesi (7,0%), Kalimantan (6,3%), Bali dan Nusa Tenggara (5,2%), serta yang terendah adalah Maluku dan Papua (3,0%).



Gambar 2.122 Persentase Pengguna Internet

Sumber: APJII

Keterangan: PPI = Persentase pengguna internet; Data tahun 2020 merupakan angka Q2 2020.

Dalam era digital, kebutuhan penyediaan data dengan volume besar dan komunikasi berkecepatan tinggi merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karenanya, ketersediaan jaringan komunikasi pita lebar tetap dan bergerak amat penting untuk dikembangkan. Hingga saat ini, disparitas teknologi jaringan antar wilayah masih menjadi kendala utama. Hingga 2020, hanya pulau Jawa, Sumatera, dan Bali yang hampir seluruh wilayahnya telah telah dijangkau dengan teknologi jaringan 4G, di mana koneksi internet dapat berjalan dengan kecepatan tinggi. Sementara di wilayah lainnya, seperti Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, baru separuhnya saja yang terjangkau jaringan 4G. Kemudian di Maluku dan Papua, hanya sebagian kecil saja yang terjangkau jaringan tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peringkat Indonesia dalam hal kecepatan akses internet relatif lebih rendah secara global. Berdasarkan *Speedtest Global Index* pada Januari 2020, Indonesia berada pada peringkat 120 dari 140 negara untuk *mobile broadband*, serta peringkat 115 dari 175 negara untuk *fixed broadband*⁵⁹.



Gambar 2.123 Peta jangkauan (teknologi jaringan) internet di Indonesia 2020

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Keterangan: Peta jangkauan internet dengan pendekatan administratif desa/kelurahan

Pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk membuat lompatan besar dalam transformasi digital. Pembatasan mobilitas manusia yang berdampak pada berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, telah menstimulasi perubahan perilaku dan mendorong peningkatan kebutuhan pada layanan dan sistem yang berbasis digital. Bersama dengan penguatan ekosistem digital dan sumber daya manusia talenta digital, akselerasi transformasi digital menjadi kunci dari pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional. Akselerasi transformasi digital perlu ditopang penyediaan infrastruktur TIK yang memadai guna meningkatkan cakupan jaringan broadband yang cepat dan terjangkau.

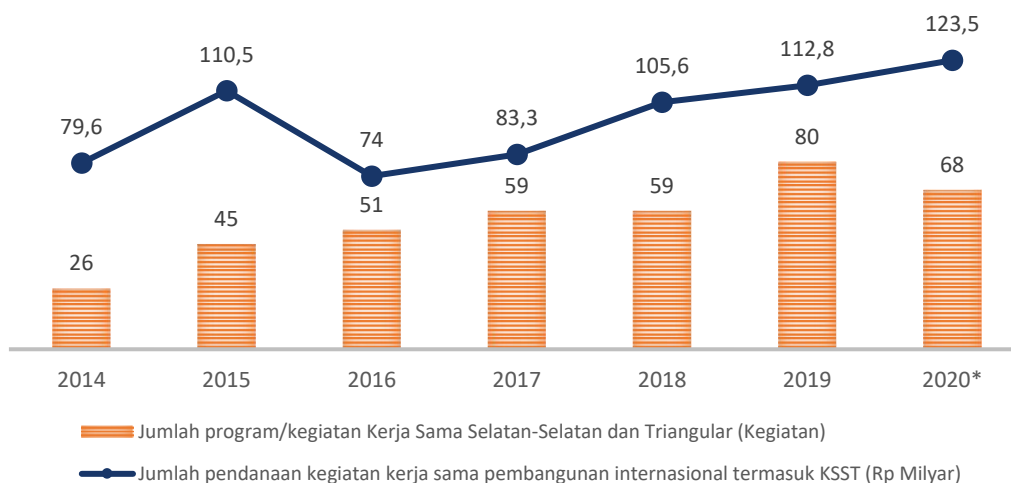
4.a. Kerjasama Pembangunan Internasional

Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama pembangunan internasional, khususnya dengan negara-negara berkembang agar dapat mewujudkan kemandirian bersama yang dilandasi solidaritas, kesetaraan, dan saling memberi manfaat (mutual benefit).

⁵⁹ Renstra 2020-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) menjadi contoh implementasi dari upaya tersebut. Program KSST sendiri menjadi semacam metamorfosis dari Konferensi Asia Afrika, di mana kini tujuannya adalah membantu negara-negara berkembang untuk meningkatkan diri dalam mencapai kemandirian terutama untuk pembangunan.

Dalam kerangka KSST, Indonesia tidak lagi hanya sebagai negara penerima bantuan, tapi juga berkontribusi dan memberi bantuan kepada negara-negara lain. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah program atau kegiatan KSST yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir. Indikator 17.9.1.(b) untuk Jumlah program atau kegiatan KSST, pada 2019 tercatat tiga kali lebih banyak daripada program atau kegiatan pada lima tahun sebelumnya. Selain itu, tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjalankan kebijakan ini. Bantuan yang sering diberikan oleh Indonesia umumnya dalam bentuk pengembangan kapasitas melalui pelatihan. Sejalan dengan tren tersebut, jumlah atau nilai pendanaan yang diberikan pun turut meningkat. Hal ini terefleksikan dari indikator 17.9.1.(a) terkait nilai atau jumlah pendanaan kegiatan kerjasama pembangunan internasional - yang di dalamnya tercakup KSST - yang secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun, khususnya dari sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 yang mencapai 123,5 milyar.



Gambar 2.124 Jumlah kegiatan dan pendanaan KSST

Sumber: Bappenas

Keterangan: * angka sementara

Secara umum, pelaksanaan KSST oleh Indonesia masih didominasi oleh Kementerian/Lembaga. Beberapa contoh pelaksanaan KSST antara lain:

- Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Sekretariat Negara bersama Colombo Plan, sejak 2010, telah menyelenggarakan 17 program peningkatan kapasitas dengan penerima manfaat sebanyak 191 orang dari 19 negara. Melalui program-program

tersebut, Indonesia telah berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mengatasi isu-isu pembangunan dengan negara anggota Colombo Plan⁶⁰.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan pelatihan internasional KSST di bidang kelautan, perikanan, dan keamanan maritim di empat lokasi, yaitu Tegal, Yogyakarta, Sukabumi, dan Jakarta pada bulan Juli 2019. Pelatihan tersebut diberikan kepada 15 petugas perikanan asing dari negara-negara Asia, Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah, serta lima petugas perikanan dalam negeri⁶¹.
- Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Kementerian Pertanian dalam kerangka KSST memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian di bidang budidaya ikan bagi utusan Kementerian Pertanian Palestina untuk mendukung pencapaian target nasional mereka. Pelatihan tersebut juga mencakup teknik ilmiah yang penting tentang akuakultur dan teknik pembiakan dan inseminasi buatan⁶².
- Kementerian Perdagangan yang menyelenggarakan *workshop* “Penyusunan Roadmap Pembentukan Regulasi di Bidang Metrologi Legal” bagi pemerintah Timor-Leste pada tahun 2017. Sasarannya adalah terbentuknya regulasi dan sistem metrologi legal di Timor-Leste. Penyusunan roadmap mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan kemetrolagian, rencana aksi, kerangka waktu, gugus kerja, serta rancangan undang-undang dan standardisasi Timor-Leste, dan secara khusus membahas upaya menemukan langkah terpenting dan konkrit yang dapat diambil oleh Republik Demokratik Timor-Leste dalam pembentukan regulasi dibidang metrologi legal⁶³.

4.b. Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu bentuk kerjasama pembangunan yang melibatkan swasta atau *public private partnership* (PPP) di Indonesia. KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana layanan umum berdasarkan pembagian risiko antara pemerintah dan swasta. KPBU dilakukan untuk: (i) menjembatani kesenjangan pembiayaan melalui investasi swasta, termasuk prakarsa badan usaha (*unsolicited*), pada penyediaan sarana dan prasarana layanan umum; dan (ii) mendapatkan efisiensi sektor swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana layanan umum.

Dalam skema KPBU, Kementerian PPN/BAPPENAS berperan sebagai koordinator, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal PPR (DJPPR) memberikan dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah, dan Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN/BUMD sebagai penanggung jawab proyek kerjasama (PJK). Selain iut, untuk mempercepat tahapan KPBU juga dibentuk lembaga pendukung, seperti Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang berganti menjadi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur

⁶⁰ <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/531599/indonesia-menandatangani-kerja-sama-ksst-dengan-colombo-plan?show=>

⁶¹ <https://news.kkp.go.id/index.php/menteri-susi-buka-secara-resmi-pelatihan-internasional-ksst-dan-hlp-kejahatan-di-industri-perikanan-2019/>

⁶² <https://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/topics/190208.html>

⁶³ <http://ditjenpktn.kemendag.go.id/bali-workshop-kssp-tahap-i-metrologi>

Prioritas (KPPIP), PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang berperan sebagai lembaga pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJPK, serta PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai instrumen penjaminan pembangunan infrastruktur⁶⁴.

Sejak 2017, keberadaan proyek KPBU ini selalu dijaga pemerintah, setelah sebelumnya pada 2014 dan 2016 tercatat tidak ada proyek. Pada 2020, capaian indikator 17.17.1.(b) mengenai jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema KPBU tercatat sebanyak 14 proyek. Dari sisi jumlah dan nilai proyek, angka tersebut meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Pemanfaatan KPBU untuk pembangunan nasional akan diperluas dan dikembangkan untuk sektor sosial antara lain pendidikan, kesehatan, dan lain-lain⁶⁵.

Palapa *Ring* menjadi contoh proyek KPBU yang berhasil. Palapa *Ring* merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Proyek itu terdiri atas tujuh lingkaran kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) dan satu *backhaul* untuk menghubungkan seluruhnya. Pembangunan Palapa *Ring* ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu, Barat, Tengah, dan Timur. Palapa *Ring* diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019, setelah Palapa *Ring* Timur berhasil menghubungkan Papua, Maluku, NTT sampai Pulau Rote. Sementara Palapa *Ring* Tengah telah selesai awal tahun 2019, dan Palapa *Ring* Barat telah selesai tahun 2018. Kelebihan pembangunan Palapa *Ring* melalui skema KPBU ini adalah akses pada sumber daya (pengetahuan, teknologi, dan lainnya) yang lebih luas daripada apabila dilaksanakan oleh pemerintah sendiri⁶⁶. Selain itu, tentunya beban anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah menjadi lebih kecil karena adanya penyertaan modal dari pihak swasta yang lebih besar.

5. Ketersediaan Data dan Informasi Yang Berkualitas

Data dan informasi yang berkualitas merupakan prasyarat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kualitas data dan informasi telah memiliki payung hukum yang kuat melalui capaian indikator 17.18.2.(a) terkait dengan tersedianya Undang Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, di mana Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam penyelenggaraan statistik di Indonesia. Undang Undang tersebut ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan statistik nasional yang terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien.

Secara umum, capaian indikator terkait kualitas data dan informasi selama periode 2017-2019 menunjukkan tren yang positif. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan yang konsisten sepanjang periode tersebut. Khusus untuk indikator yang diukur dengan capaian maksimal 100%, terdapat dua indikator yang hampir tercapai pada 2019. Indikator tersebut adalah 17.18.1.(a) persentase konsumen BPS yang merasa puas dengan kualitas data statistik

⁶⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11824/Mengenal-Kerjasama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-KPBU-Skema-Public-Private-Partnership-PPP-di-Indonesia.html>

⁶⁵ RPJMN 2020-2024 hal. 264

⁶⁶ https://kominfo.go.id/content/detail/15402/proyek-palapa-ring-model-kpbu-pertama-dan-tercepat/0/berita_satker

(98,78%) dan 17.19.2.(d) persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS (98,86%). Indikator 17.19.2.(c) jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website pun terus meningkat. Dari sekitar 1,7 juta pengunjung pada 2017 menjadi 3,1 juta pengunjung pada 2019. Sementara untuk indikator 17.19.1.(a) terkait sisi sumber daya manusia (pejabat fungsional statistisi atau pranata komputer), capaiannya pun meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019, terdapat 6.783 pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga. Dengan demikian, capaian indikator untuk 17.19.1.(b) menjadi sebanyak 68 persen Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer. Selain itu, capaian indikator 17.19.1.(c) untuk kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer telah terpenuhi sebanyak 51%.

Tabel 2.38 Capaian Indikator Terkait Kualitas Data dan Informasi

Indikator (RAN 2017 – 2019)	2015	2016	2017	2018	2019
17.18.1.(a) Persentase konsumen BPS yang merasa puas dengan kualitas data statistik (%)	85,87	89,3	96,61	97,74	98,78
17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama (%)	87,41	91,35	87,05	86,91	89,83
17.18.1.(c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (unit)	N/A	N/A	2.074	2.180	4.232
17.19.1.(a) Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga (orang)	N/A	3.728	4.913	5.602	6.783
17.19.1.(b) Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer (%)	N/A	N/A	59	67	68
17.19.1.(c) Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga (%)	N/A	N/A	47	49	51
17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website (orang)	1.002.812	1.525.766	1.727.450	2.322.354	3.118.501
17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS (%)	81,93	97,64	94,51	96,72	98,86

Indikator (RAN 2017 – 2019)	2015	2016	2017	2018	2019
17.19.2.(e) Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)	N/A	20,46	49,24	50,36	72,25

Sumber: BPS

Capaian lain yang terkait dengan data dan informasi adalah terlaksananya Sensus Penduduk Tahun 2020 dengan baik dalam masa pandemi COVID-19.

C. Tantangan

Tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan aksi TPB/SDGs untuk Tujuan 17 adalah sebagai berikut:

Tantangan dalam **pendapatan negara** antara lain:

- Kontraksi perekonomian sebagai basis pengenaan pajak (*tax base*) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta terbatasnya kegiatan operasional akibat penerapan pembatasan sosial yang dihadapi saat ini.
- Mengamankan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang didorong oleh pesatnya akselerasi ekonomi digital di masa pandemi ini. Pemerintah telah memberlakukan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas pemanfaatan (impor) produk digital dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa oleh konsumen dalam negeri. PPN ini dipungut oleh pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah sesuai dengan kriteria dan ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah persepsi yang keliru dari masyarakat mengenai pemungutan PPN tersebut, yang mana dipahami sebagai pemungutan pajak atas kegiatan belanja *online*. Sejatinya, pemungutan PPN atas PMSE tersebut diterapkan atas barang dan jasa digital luar negeri yang dijual kepada konsumen di Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan keadilan bagi penyedia produk digital dalam negeri⁶⁷.

Tantangan dalam **pengelolaan utang luar negeri** antara lain:

- Mengoptimalkan pengelolaan utang luar negeri sehingga dapat menstimulasi atau memberi *leverage* pada kegiatan ekonomi produktif yang berorientasi ekspor. Dengan demikian perluasan ekspor khususnya nonmigas menjadi salah satu pendekatan untuk mendorong rasio pembayaran utang dan bunga pada tingkat yang lebih aman.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan **kerjasama internasional** adalah:

- Keterlibatan aktor nonpemerintah, baik dari pelaku usaha, organisasi sosial kemasyarakatan, ataupun institusi nonpemerintah lainnya. Hal ini untuk memastikan inklusivitas atau partisipasi aktor nonpemerintah serta meningkatkan kegiatan KSST dari sisi jumlah maupun kualitas. Terkait hal ini, diperlukan sinergi antara pemerintah dan

⁶⁷ Kementerian Keuangan. APBN Kita: Kinerja dan Fakta 2020. Edisi Januari 2021, hal. 65.

aktor nonpemerintah sebagai bagian dari pemangku kepentingan dalam kerangka kerjasama pembangunan internasional.

- Menggali potensi pengembangan inovasi dan kemitraan dalam pembangunan di daerah dengan koordinasi yang lebih efektif antara pusat dan daerah.

Tantangan yang terkait dengan **perdagangan internasional dan PTA/FTA/CEPA** bagi Indonesia adalah:

- Masih dominannya ekspor bahan mentah berbasis sumber daya alam dan bahan olahan dengan nilai tambah rendah.
- Keterlibatan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga tergolong rendah, akibatnya, potensi manfaat yang dapat diperoleh Indonesia tidak optimal.

Tantangan yang dihadapi terkait **infrastruktur TIK**⁶⁸.

- Peningkatan keandalan dan kecepatan pelayanan informasi memerlukan perluasan jaringan *fixed broadband* dan jaringan *mobile broadband*.
- Penyediaan infrastruktur TIK masih menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan. Selain perbedaan perijinan antar daerah yang menyebabkan *right of way* dan *open acces* belum terjadi, tantangan utama yang dihadapi adalah pembangunan di wilayah-wilayah yang tidak komersial, termasuk di lokasi layanan publik. Dalam hal ini, investasi atau biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh.
- Khusus *fixed broadband*, terdapat sejumlah permasalahan yang menyebabkan rendahnya penetrasi jaringan tersebut, seperti⁶⁹:
 - Kebutuhan investasi yang tinggi terutama pada komponen pekerjaan umum, di antaranya penggalian dan pemasangan tiang (proporsi antara 70-80%)
 - Biaya overhead yang tinggi
 - Utilisasi jaringan tergolong rendah (26,02%) terutama di wilayah-wilayah yang tidak layak secara ekonomi (perhitungan keuangan)
 - Harga layanan yang dirasakan mahal oleh masyarakat (dalam studi yang dilakukan Puslitbang SDPPI pada 2018, 56,4% responden menyatakan harga langganan internet *fixed broadband* tergolong mahal⁷⁰).
- Pemanfaatan infrastruktur TIK yang telah diselenggarakan perlu dioptimalkan pada layanan sektor publik, industri, pariwisata, dan jasa untuk memulihkan produktivitas ekonomi.
- Pemanfaatan layanan infrastruktur TIK terhambat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai keahlian di bidang digital. Oleh karenanya perlu dilakukan pengembangan SDM termasuk melalui pendidikan vokasi bidang TIK, pendidikan tinggi yang berasal dari bidang khususnya *science, technology, engineering, and mathematics* (STEM).

⁶⁸ Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, hal. IV.67.

⁶⁹ Direktorat Pengembangan Pita Lebar Kementerian Komunikasi dan Informatika. Strategi Percepatan Konektivitas Broadband di Indonesia.

⁷⁰ Puslitbang SDPPI, Balitbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika. Studi Percepatan Penetrasi Akses Fixed Broadband: Potret Karakteristik Wilayah dan Profil Demand Masyarakat Terhadap Internet Fixed Broadband.

Tantangan dalam implementasi **KPBU** adalah:

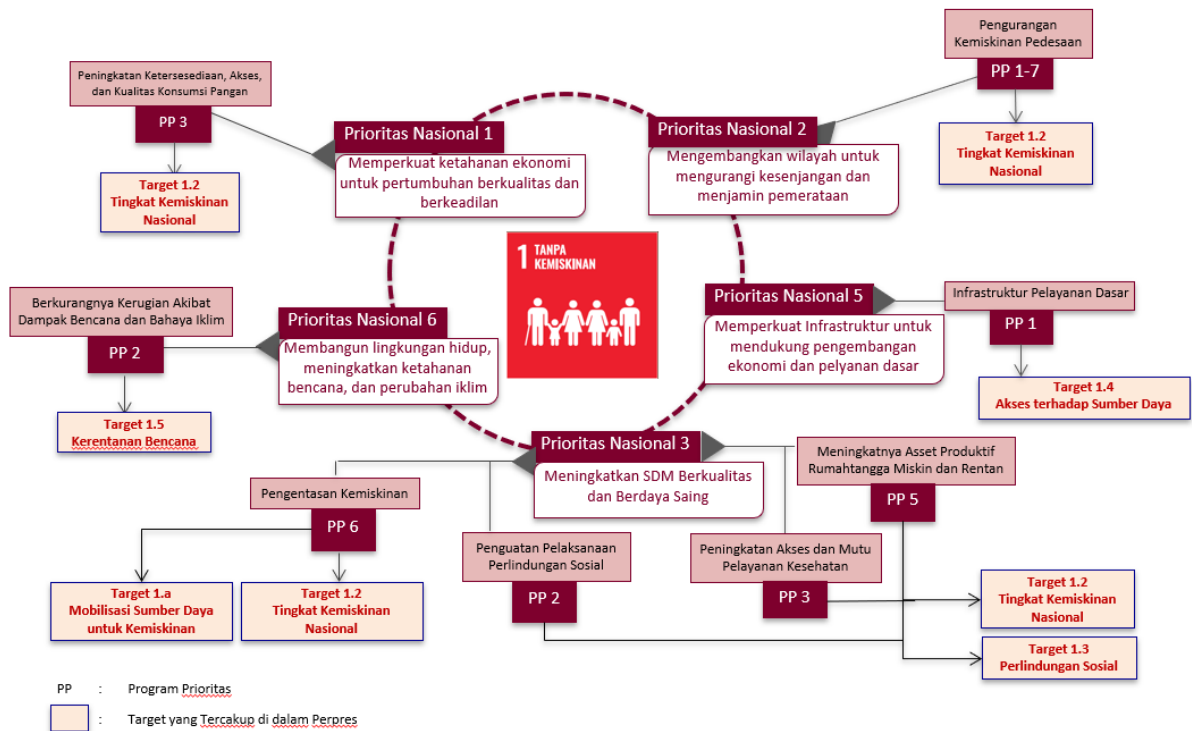
- Risiko politik dan regulasi terkait dengan pelaksanaan KPBU . Dari sisi swasta, skema KPBU dianggap rumit karena memerlukan proses yang relatif panjang, serta melibatkan pemerintah daerah dan DPRD.
- Relatif tingginya risiko investasi serta ketidaklayakan proyek secara finansial. Dalam menyikapi tantangan tersebut, khususnya yang terkait dengan risiko investasi dan ketidaklayakan proyek secara finansial, pemerintah memberikan sejumlah fasilitas guna mendukung proyek KPBU, khususnya bagi proyek yang memiliki manfaat dan dampak ekonomi yang besar, di antaranya adalah dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, pembayaran atas layanan, dan insentif perpajakan. Salah satu instrumennya adalah VGF atau dukungan pemerintah melalui penyediaan sebagian aset, sebagai kontribusi pemerintah pada proyek KPBU guna meningkatkan kelayakan finansial sebuah proyek pembangunan. Dengan adanya dukungan ini, biaya konstruksi sebuah proyek infrastruktur dapat diturunkan sehingga tingkat pengembalian investasi dapat ditingkatkan.

BAB 3

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

3.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Dalam TPB/SDGs Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, terdapat 3 (tiga) target besar yang diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu pada Sasaran Makro Pembangunan, 5 Prioritas Nasional (PN) dan 8 Program Prioritas (PP), yang keterkaitannya dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3.1 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 1 dalam RPJMN 2020-2024

Selain kelima target tersebut, terdapat 1 (satu) target lainnya pada Tujuan 1 yang juga memiliki angka target pencapaian indikator SDGs dari tahun 2021-2024 dengan *baseline* data tahun 2020. Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 33 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.								
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP\$1,9 per hari)	BPS Susenas Kor - Sept	%	4,2	4,1 (Target exercise)	2,6 (Target exercise)	1,4 (Target exercise)	0,4 (Target exercise)
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS Susenas Kor	%	10,14 (Mar) 10,19 (Sept)	9,5-10,1 (outlook)	8,5-9,0 (RKP 2022)	6,5-7 (trajectory RPJMN)	6,0-7,0 (RPJMN 2024)
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
	1. Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12-23 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi dasar	BPS Susenas Kor	%	65,1 (2019)	75,5-76,9 (Target exercise)	80,3-82,8 (Target exercise)	85,3-88,8 (Target exercise)	90,3-94,7 (Target exercise)
				57,9 (2018, Riskesdas)	68	71	75	90
	2. Gizi : <i>Prevalence of Undernourishment</i> (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi	BPS Susenas Kor	%	8,34 (2019)	5,8 (RPJMN 2020-2024)	5,5 (RPJMN 2020-2024)	5,2 (RPJMN 2020-2024)	5 (RPJMN 2020-2024)
	3. Indikator Morbiditas: persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan	BPS Susenas Kor	%	14,64 (2019)	PM	PM	PM	PM
	4. Lama sekolah: Persentase ART usia 25 – 60 tahun yang tidak tamat SMP, terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP pada usia 25 – 60 tahun	BPS Susenas Kor	%	33,9 (2019)	30,61	28,66	27,23	25,67
34,95 (2019)				31,81	30,24	28,73	27,2	
33,21 (2019)				29,66	27,78	25,88	23,92	

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
	5. Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah	BPS Susenas Kor	%	0,32 (2019)	0,23 (Target exercise)	0,18 (Target exercise)	0,14 (Target exercise)	0,09 (Target exercise)
	6. Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik, terjadi deprivasi jika tanpa listrik	BPS Susenas Kor	%	1,15 (2019)	0,92 (Target exercise)	0,84 (Target exercise)	0,77 (Target exercise)	0,69 (Target exercise)
	7. Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumahtangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah.	BPS Susenas Kor	%	10,73 (2019)	9,09 (Target exercise)	8,52 (Target exercise)	8,01 (Target exercise)	7,51 (Target exercise)
	8. Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumahtangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama	BPS Susenas Kor	%	22,61 (2019)	19,2 (Target exercise)	16,8 (Target exercise)	14,5 (Target exercise)	12,5 (Target exercise)
	9. Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m ² , terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8m ² .	BPS Susenas Kor	%	7,85 (Luas lantai < 7,2 m ²)	7,64	7,12	6,6	6,07
				3,89 (lantai tanah)	3,46	3,13	2,79	2,43
	10. Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3kg	BPS Susenas Kor	%	79,38 (2019)	PM	PM	PM	PM

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
	11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya aset produktif, terjadi deprivasi jika rumahtangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil.	BPS Susenas Kor	%	PM	PM	PM	PM	PM
	12. Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, terjadi deprivasi jika ada anggota rumahtangga yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran.	BPS Susenas Kor	%	13,99 (2019)	5	3	2	0
	13. Akses internet: Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bisa mengakses internet.	BPS Susenas Kor	%	52,31 (2019)	39,61 (Target exercise)	32,94 (Target exercise)	26,28 (Target exercise)	19,61 (Target exercise)
	14. Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu.	BPS Susenas Kor	%	PM	PM	PM	PM	PM
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	BDT (Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019, Bappenas) dan BPJS Kesehatan diolah	%	90,11	108,6 juta (RPJMN 2020-2024)	110 juta (RPJMN 2020-2024)	111,4 juta (RPJMN 2020-2024)	112,9 juta (RPJMN 2020-2024)
					≈ 96,2%	≈ 97,4%	≈ 98,7%	≈ 100,0%
					96,8 juta (capaian, 38% terbawah)	80 juta (35% terbawah, Surat MenPPN ke Presiden)	60 juta	40 Juta

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPJS Kesehatan (PBI); Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2019, 2020	%	96,6 juta	108,6 juta (RPJMN 2020-2024)	110 juta (RPJMN 2020-2024)	111,4 juta (RPJMN 2020-2024)	112,9 juta (RPJMN 2020-2024)
				≈ 90,11% (VNR 2021- cakupan JKN pada 40% terbawah)	≈ 96,2%	≈ 97,4%	≈ 98,7%	≈ 100,0%
					96,8 juta (capaian, 38% terbawah)	80 juta (35% terbawah, Surat MenPPN ke Presiden)	60 juta	40 Juta
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan	%	semua: 23,34	33,89	54,02	62	65
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	BPS Susenas Kor	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1. Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum	BPS Susenas Kor	%	90,21	92,81 (RKP 2022)	95,1 (RKP 2022)	97,99 (RPJMN 2020-2024)	100 (RPJMN 2020-2024)
	2. Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi	BPS Susenas Kor	%	79,53	Target: 79,43 (RKP 2022)	Target: 82,07 (R-RKP 2022)	Target: 86,03 (RPJMN 2020-2024)	90 (RPJMN 2024)
	3. Persentase penduduk dengan akses pada layanan mobilitas Dasar di Pedesaan	Potensi Desa	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
	4. Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar	BPS Susenas Kor	%	76,07 (2019)	82,66 (Target exercise)	85,29 (Target exercise)	87,34 (Target exercise)	89,87 (Target exercise)
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	BPS: SP dan Susenas; SDKI	%	Laki-laki : 10,22%	Laki-laki: 13,9%	Laki-laki: 17,14%	Laki-laki: 19,41%	Laki-laki: 21,61%
				Perempuan: 6,69%	Perempuan: 9,2%	Perempuan: 11,32%	Perempuan: 12,81%	Perempuan : 14,26%
	1. Proporsi rumahtangga dengan Rumah milik	BPS: SP dan Susenas; SDKI	%	80,07 (2019)	80 (Target exercise)	78,5 (Target exercise)	76 (Target exercise)	75 (Target exercise)
	2. Proporsi rumahtangga dengan Rumah Sewa/Kontrak	BPS: SP dan Susenas; SDKI	%	9,64 (2019)	10,4 (Target exercise)	12 (Target exercise)	13,5 (Target exercise)	15 (Target exercise)
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BNPB DIBI	per 100.000 jiwa	tanpa COVID-19: 0,15;	0,2	0,2	0,2	0,2
				dengan COVID-19: 8,34				
		BNPB (Pusat, Data, Informasi dan Komunikasi Bencana)	per 100.000 jiwa	0,16	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.	BNPB (Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	%	0,08	0,1 (RKP 2022)	0,1 (RKP 2022)	0,1 (RPJMN 2020-2024)	0,1 (RPJMN 2020-2024)
			%	0,03	N/A	N/A	N/A	N/A

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi/rencana nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	BNPB	Dokumen	180	50 (RPJMN 2020-2024)	50 (RPJMN 2020-2024)	50 (RPJMN 2020-2024)	50
		BNPB (Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana)	Dokumen	N/A	1	1	1	1
		BNPB	Dokumen	2	2	2	2	2
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	BNPB dan Bappenas	%	36,96	45	50	55	60
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.								
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	DJA Kemenkeu	%	18,09%	PM	PM	PM	PM
			Triliun	495,5 (Perpres 72/2020)	419,3	PM	PM	PM
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Bappenas	%	Pendidikan:20	20	20	20	20
				Kesehatan: 5,2	6,17	5	5	5
				Perlindungan Sosial: 18,1	14,86	PM	PM	PM
			Triliun	Pendidikan: 547,8	550	PM	PM	PM
				Kesehatan: 212,5	169,7	PM	PM	PM
Perlindungan sosial: 378,2 (LKPP, 2019)	408,8	PM	PM	PM				

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Menjadi perhatian utama pemerintah adalah mengentaskan penduduk miskin dan sangat miskin (kemiskinan ekstrim), yaitu yang diukur dengan GK internasional yaitu sebesar 1,9 dolar AS PPP per kapita sehari. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini setara dengan pengukuran kemiskinan BPS dan Kemensos yang disebut penduduk sangat/fakir miskin. Dalam literatur penganggulangan kemiskinan kelompok penduduk ini menjadi sasaran Program Keluarga Harapan yaitu Bantuan Tunai dengan Syarat dimana pada beberapa tahun terakhir sasaran dari PKH berjumlah 10 juta keluarga sangat miskin. Diharapkan bahwa pada tahun 2024, tidak lagi ditemui penduduk/ keluarga yang tergolong dalam kelompok sangat miskin.

Dalam rangka mencapai tujuan dan target tanpa kemiskinan, arahan RPJMN 2020–2024 adalah pada tiga kebijakan utama, yaitu:

- a) Pertama, penyelenggaraan perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Program jaminan dan bantuan sosial yang tepat sasaran dilaksanakan melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran dengan satu kartu. Program ini diharapkan juga dapat memperluas inklusi keuangan dan kepesertaan jaminan sosial.
- b) Kedua, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan melalui
 1. Perluasan penyediaan sarana dan prasarana dasar,
 2. Peningkatan pelayanan dasar yang inklusif, dan
 3. Peningkatan pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk menysasar kebutuhan dasar 40,0% penduduk berpendapatan terendah, seperti kepemilikan dokumen kependudukan dan perumahan.
- c) Ketiga, pengembangan penghidupan berkelanjutan. Perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi dilaksanakan melalui
 1. Peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil;
 2. Peningkatan akses terhadap permodalan usaha; dan
 3. Peningkatan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha.

Tiga kebijakan tersebut diimplementasikan dalam daftar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) RPJMN 2020 – 2024⁷¹, yaitu empat *Major Project* yang terkait dengan TPB 1 Tanpa Kemiskinan sebagai berikut:

- a. *Major Project* Nomor 18. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh karena:
 1. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi dalam bentuk barang dan tunai memiliki mekanisme yang beragam;
 2. Penyaluran bantuan sosial menggunakan lebih dari satu kartu sehingga tidak efisien dan menyulitkan penerima; dan

⁷¹ Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

3. Data penerima manfaat belum sepenuhnya terintegrasi sehingga mengurangi ketepatan sasaran dan efektivitas program.
- b. *Major Project* Nomor 32. Akses Sanitasi (Airlimbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga) karena: Penyediaan akses sanitasi sangat berkorelasi dengan penurunan angka stunting dan penurunan pencemaran air dari sumber air limbah domestik.
- c. *Major Project* Nomor 33. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) karena kurangnya akses air minum yang layak dan aman merupakan salah satu penyebab tingginya prevalensi penyakit yang disebabkan oleh air, seperti diare dan juga stunting
- d. *Major Project* Nomor 34. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) karena:
 1. Belum optimalnya pemanfaatan lahan di perkotaan untuk kebutuhan hunian;
 2. Masyarakat menengah ke bawah bertempat tinggal jauh dari pusat kegiatan; dan
 3. Belum adanya sistem penyediaan perumahan di perkotaan yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Penyebaran COVID-19 di Indonesia mempengaruhi kondisi perekonomian dan sasaran pembangunan, termasuk pembangunan SDM. Jumlah orang miskin dan rentan miskin meningkat terutama dari kelompok rentan dan pekerja informal, bahkan pekerja formal. Pendanaan pembangunan tahun 2021 ditujukan untuk melanjutkan percepatan penanganan dampak COVID-19 yaitu dengan melanjutkan jaring pengaman sosial, menjaga daya beli masyarakat, revitalisasi ekonomi domestik, yang memiliki dampak langsung dan segera terhadap pemulihan akibat dampak COVID-19, serta tetap melakukan konsolidasi penyiapan investasi publik untuk menjaga momentum pembangunan. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, kebijakan terkait kemiskinan yang dilakukan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19, beberapa diantaranya diarahkan untuk:

- 1) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial melalui reformasi sistem perlindungan sosial, antara lain integrasi program bantuan sosial untuk meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan sebagai upaya meredam penambahan penduduk miskin akibat dampak COVID-19; dan
- 2) Memperluas akses penduduk miskin, rentan, dan terdampak COVID-19 terhadap aset produktif, seperti modal, pemberdayaan, dan legalitas kepemilikan tanah.

Secara umum penguatan dan perluasan implementasi program perlindungan sosial selama pandemi COVID-19, menjadi strategi utama yang terus ditempuh ditambah pembangunan infrastruktur untuk perbaikan akses penduduk miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar, berbagai kegiatan tersebut dilakukan melalui:

- 1) Peningkatan ketepatan sasaran bantuan sosial dilakukan melalui reformasi sistem perlindungan sosial antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi *exclusion* dan *inclusion error*, terutama

kelompok miskin dan rentan baru pascapandemi COVID-19. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat;

- 2) Peningkatan dan perluasan bantuan sosial sebagai stimulus ekonomi untuk meredam dampak COVID-19, khususnya pada kelompok rentan dan terdampak seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan pekerja sektor informal;
- 3) Pelaksanaan bantuan sosial secara digital yang lebih tajam dan terintegrasi antarprogram;
- 4) Pengembangan dan perluasan kepesertaan jaminan sosial bagi kelompok pekerja informal dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap dampak bencana seperti pandemi COVID-19;
- 5) Pengembangan program perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, termasuk pandemi COVID-19;
- 6) Penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan rumah tangga misakin dan rentan yang menempati hunian layak dan terjangkau;
- 7) Melanjutkan program subsidi untuk keluarga miskin dan rentan berupa subsidi energi listrik dan gas serta untuk pendidikan melalui KIP;
- 8) Memperluas akses penduduk miskin, rentan, dan terdampak COVID-19 terhadap aset produktif, seperti modal, pemberdayaan, dan legalitas kepemilikan tanah;
- 9) Pembangunan infrastruktur tahun 2021 melalui berupa peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman akan mendukung penguatan sistem kesehatan nasional;
- 10) Meningkatkan jumlah pemerintah daerah untuk kesiapan mengurangi dampak bencana dan bahaya iklim khususnya dalam mengurangi potensi kehilangan PDB, serta kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada TPB/SDGs Tujuan 1

Sesuai dengan prinsip inklusi, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, peran aktor nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Nasional (RAN). Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari aktor nonpemerintah untuk Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan diantaranya adalah:

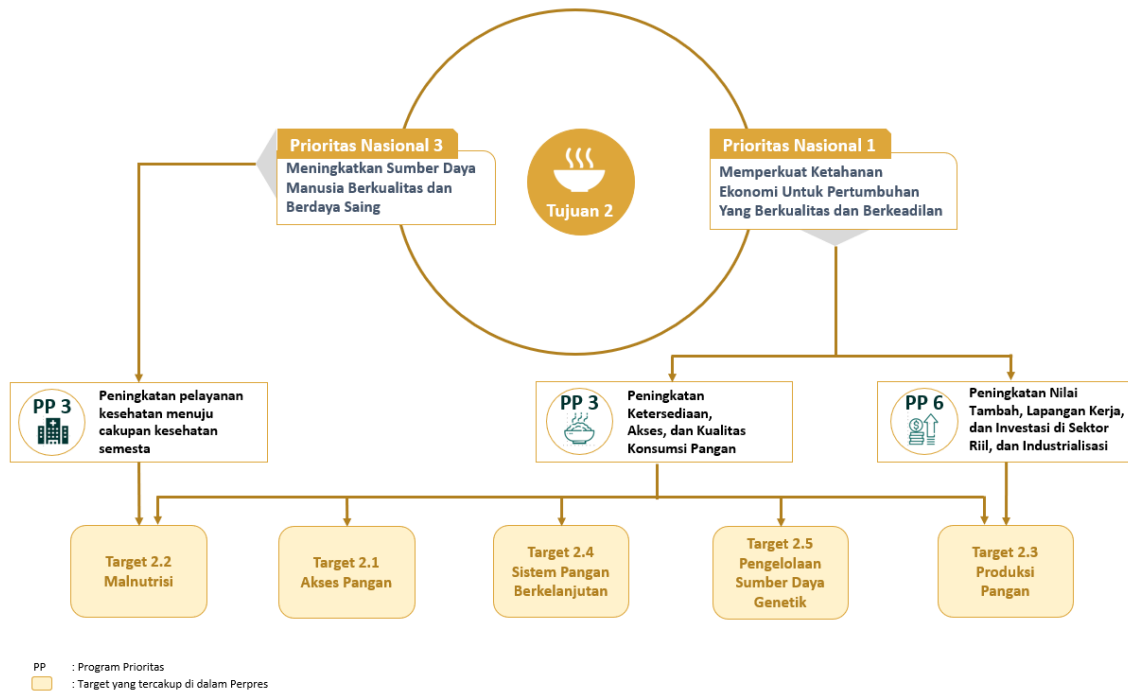
- Organisasi Kemasyarakatan, yaitu: Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Prakarsa, Institut KAPAL Perempuan, UCLG ASPAC-APEKSI, dan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC).
- Organisasi Kemasyarakatan Berbasis Agama, yaitu: LAZISMU, Baitul Muamalat, Yayasan Budha Tzu Chi, dan BAZNAS.
- Akedemisi, yaitu: SDGs Hub UI, SDGs Hub UNDIP, dan CIMSA Indonesia.
- Bisnis dan Filantropi:

- BRI
- PT Sidomuncul
- PT Transkon Jaya Tbk
- PT Trisula Textile Industries
- PT Autsindo Nusantara Jaya
- Danone
- IBCSD
- PT. Terregra Asia Energy Tbk
- PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL)
- PT Sinar Mas Multifinance (SMMF)
- PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
- BTPN
- PT. PAN BROTHERS TBK
- PT BERLINA Tbk
- Asia Pulp & Paper
- PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
- PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
- BCA
- PT. Victoria Insurance, Tbk
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Panin Sekuritas Tbk
- PT Vale Indonesia Tbk

Kegiatan yang dikontribusikan pada umumnya bersifat: (1) jaminan sosial, (2) perbaikan dan renovasi rumah korban bencana, (3) pendampingan kesehatan dan keselamatan kerja, (4) edukasi kesehatan masyarakat, (5) penguatan kapasitas multipihak sebagai pelaku pemantauan (6) memastikan perempuan dan kelompok minoritas menerima bantuan program perlindungan sosial, (7) bantuan konsultasi hukum dan edukasi hukum, (8) bantuan pangan, obat-obatan dan keperluan lainnya dilokasi bencana, (9) pengembangan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan kelompok minoritas di masa pandemi covid-19. Program dan kegiatan aktor nonpemerintah lainnya secara lebih rinci dapat dilihat pada Matriks 3 dan Matriks 4 pada Lampiran RAN SDGs 2020-2024.

3.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Dalam TPB/SDGs Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, terdapat 5 (lima) target yang telah diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 2 (dua) Prioritas Nasional (PN) dan 3 (tiga) Program Prioritas (PP), yang dapat dilihat keterkaitannya sebagai berikut:



Gambar 3.2 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 2 Dalam RPJMN 2020-2024

Selain kelima target tersebut, terdapat 3 (tiga) target lainnya pada Tujuan 2 yang juga memiliki angka target pencapaian indikator SDGs dari tahun 2021-2024 dengan *baseline* data tahun 2020, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2020)	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernutrition</i>)	BPS	%	8,34	5,8	5,5	5,2	5
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (<i>FIES</i>)	BPS	%	5,12	4,8	4,5	4,2	4
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	SSGBI	%	27,67 (SSGBI, 2019)	21,1	18,4	16	14
2.2.2*	Prevalensi <i>wasting</i> (<i>berat badan/tinggi badan</i>) pada balita	SSGBI	%	7,4 (SSGBI 2019)	7,8	7,5	7,3	7
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan, yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	BKP Kementan	Skor 1-100	86,3	91,6	92,8	94	95,2
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Riskesdas	%	48,9 (Riskesdas 2018)	42,0	39,0	36,0	33
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.								
2.3.1*	Volume produksi/tenaga kerja pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Biro Perencanaan, Kementan	USD PPP	PM	37,83	39,11	40,43	41,79
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian/tenaga kerja pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	BPS	Rp. juta/ tenaga kerja	55.33	57,20	59,13	61,12	63,18
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Biro Perencanaan, Kementan	USD PPP	PM	663,60	685,97	709,08	732,98

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2020)	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.								
2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.	Kementan	%	PM	PM	PM	PM	PM
2.4.1 (a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, (untuk lahan baku sawah)	Kementan	%	50	65	80	90	100
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan.								
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, jangka menengah atau jangka panjang.	Komnas Plasma Nuffah/BB Biogen, Balitbangtan, Kementan	Jumlah Akses SDG tanaman	5.246	5.696	6.572	7.255	7.860
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Puslitbangnak, Balitbangtan Kementan	%	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerja sama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.								
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Bappenas/ Kemenkeu	Indeks	PM	PM	PM	PM	PM
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian	Bappenas/ Kemenkeu	Rp milyar	PM	PM	PM	PM	PM
2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.								
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian	Kemendag/ Kemenkeu	Rp. Milyar	PM	PM	PM	PM	PM
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrem.								
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan	BPS	Nilai	0,43	0,21	0,44	0,44	0,45

Keterangan: a) Nilai tahun 2020 merupakan hasil Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) yang dilaksanakan BPS di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Angka di atas merupakan gambaran dari ketiga provinsi tersebut. Data untuk keseluruhan provinsi (nasional) dan rincian per subsektor belum tersedia; b) Nilai tahun 2020 merupakan hasil perhitungan BPS dengan menggunakan data Sakernas dan Data Nilai Tambah Pertanian; angka sangat sementara.

A. Arah kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Arah kebijakan PP 3 (Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan) dan PP 6 (Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi) pada PN 1 dalam RPJMN 2020-2024, dilaksanakan dengan serangkaian strategi:

- a) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan
- b) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok
- c) meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar
- d) menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi; serta
- e) meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

Kebijakan yang terkait dengan PP 3 (Peningkatan Pelayanan dan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta) pada PN 3, khususnya untuk percepatan perbaikan gizi, dilaksanakan dengan serangkaian strategi:

- a) percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
- b) peningkatan intervensi yang bersifat *life-saving* dengan didukung data yang kuat (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi dan pemberian *multiple micronutrient*;
- c) penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*);
- d) penguatan sistem surveilans gizi;
- e) peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; dan
- f) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

Kebijakan dan program yang mendukung pencapaian TPB/SDGs Tujuan 2 tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) dan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai komponen pemangku kepentingan (pemerintah, pemda, swasta, BUMN, organisasi masyarakat, dan para petani/nelayan) pembangunan sistem pangan dan kesehatan masyarakat di daerah seluruh Indonesia. Kebijakan dan program tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing K/L terkait, khususnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Di Kementerian Kesehatan terdapat 2 (dua) program yang terkait langsung dengan pencapaian Target 2.2 (Penurunan prevalensi malnutrisi) yaitu:

1. Program Kesehatan Masyarakat dengan sasaran meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat. Kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian Target 2.2. adalah (a) pembinaan kesehatan keluarga (pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi baru lahir, dan balita), (b) pembinaan gizi masyarakat

(surveilans gizi, kemampuan Puskesmas dalam tata laksana gizi buruk pada balita, dan pemberian ASI eksklusif), dan (c) penyehatan lingkungan (sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar dan tempat pengelolaan pangan yang memenuhi standar).

2. Program Pencegahan Pengendalian Penyakit dengan sasaran menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa. Kegiatan yang terkait langsung dengan Target 2.2. adalah surveilan dan karantina kesehatan, dengan indikator pencapaian sasaran bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 95% (perhatian khusus diberikan ke provinsi Papua dan Papua Barat), anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan campak rubella sebesar 95%.

Di Kementerian Sosial terdapat 2 (dua) program untuk pencapaian TPB/SDGs Tujuan 2 yang terkait dengan Target 2.1 dan Target 2.2 yaitu:

1. Program Keluarga Harapan yang dirancang agar keluarga penerima manfaat untuk dapat mengakses layanan kesehatan rutin dan muatan pendampingan akan pentingnya konsumsi gizi yang memenuhi standar kecukupan saat kehamilan dan tumbuh kembang anak.
2. Program Sembako yang dilaksanakan dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diarahkan untuk menambah penyediaan pangan pada tingkat rumah tangga untuk pemenuhan pangan dan gizi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Keluarga penerima manfaat mendapat bantuan uang tunai setiap bulannya untuk membeli pangan sumber karbohidrat dan protein.

Di Kementerian Pertanian terdapat 1 (satu) program yang terkait langsung dengan pencapaian TPB/SDGs Tujuan 2 adalah Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Implementasi program ini terdiri dari Lima Cara Bertindak (5 CB), yaitu:

1. Peningkatan kapasitas produksi, terkait dengan pencapaian Target 2.1, terdiri dari percepatan tanam padi; pengembangan lahan pertanian pangan baru, termasuk Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) sebagai salah satu *Major Project* PN 1 di lima provinsi, perluasan areal tanam baru padi, jagung, kedelai; dan peningkatan produksi pangan dengan pertumbuhan tinggi untuk mengurangi ketergantungan pada impor (disebut CB1).
2. Pengembangan diversifikasi pangan lokal sumber karbohidrat berbasis kearifan lokal dan kegiatan pekarangan pangan lestari, terkait dengan pencapaian Target 2.1 dan Target 2.2, untuk meningkatkan ketersediaan pangan lokal sumber karbohidrat dan aneka pangan sumber protein, vitamin dan mineral yang diproduksi di sekitar rumah (CB2).
3. Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, terkait dengan pencapaian Target 2.1, terdiri dari penguatan cadangan beras pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota; pengembangan lumbung pangan masyarakat; dan pengembangan sistem logistik pangan nasional untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan membangun sistem logistik pangan nasional yang mampu melayani kebutuhan pangan bagi masyarakat di seluruh wilayah (CB3).

4. Pengembangan pertanian modern, terkait dengan pencapaian Target 2.4, terdiri dari pengembangan *smart farming*, pengembangan dan pemanfaatan *screen house*, dan pengembangan korporasi petani dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pertanian, serta meningkatnya produktivitas usaha pertanian (CB4).
5. Peningkatan ekspor komoditas pertanian melalui Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks), terkait dengan Target 2.3, terdiri dari tiga kegiatan utama berupa: (a) peningkatan volume ekspor komoditas pertanian, (b) peningkatan hilirisasi/industri produk pertanian, dan (c) gerakan pembangunan ekonomi masyarakat (CB5).

Di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terdapat sasaran strategis/program untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi hasil perikanan sebagai sumber protein hewani, yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan sasaran meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya (ikan, rumput laut), terkait dengan Target 2.3.
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran meningkatnya konsumsi ikan per kapita masyarakat), terkait dengan Target 2.2.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (RKP 2021), dampak pandemi COVID-19 yang mendisrupsi seluruh aspek kehidupan menjadi pertimbangan utama untuk dapat segera dilakukan pemulihan. Untuk mengatasi terdisripsinya kemajuan pencapaian ketahanan pangan dan gizi, berbagai kegiatan prioritas yang dilakukan adalah revitalisasi sistem pangan, pemenuhan kebutuhan pasar produk pangan, peningkatan nilai tambah, pemulihan lapangan kerja pertanian-perikanan, dan mengatasi kerawanan pangan dan gizi. Dalam RKP 2021, berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan melalui:

- (a) peningkatan kegiatan rantai pasok *online* dan penguatan logistik pangan, termasuk penguatan rantai dingin perikanan dan sistem distribusi garam;
- (b) pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan pemenuhan permintaan ekspor untuk produk pangan, termasuk produk perikanan dan kelautan bernilai tinggi;
- (c) peningkatan kegiatan padat karya dalam bidang pertanian, perikanan dan kelautan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan;
- (d) perlindungan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
- (e) pendayagunaan integrasi elektronik data pangan mendukung perencanaan dan pengendalian akses dan kualitas konsumsi pangan;
- (f) bantuan distribusi pangan antarmoda di wilayah basis produksi dan akses pasar konsumen;
- (g) bantuan pangan untuk rumah tangga rawan pangan;
- (h) bantuan tunai bersyarat bagi ibu hamil dan yang memiliki anak dalam rangka pemenuhan kecukupan gizi untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

- (i) peningkatan produktivitas pertanian di lahan kering (*dryland and upland*) serta pemanfaatan lahan terlantar, seperti pada perkebunan;
- (j) pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*);
- (k) pengembangan *triple helix* peternakan sapi terpadu dan riset inovatif kolaboratif; serta
- (l) pengembangan SNI beras biofortifikasi, jamu dan kratom.

Percepatan Pencegahan Stunting

Stunting merupakan masalah gizi yang menjadi salah satu perhatian utama dalam pencapaian TPB/SDGs Tujuan 2, Target 2.2, Indikator 2.2.1. Pemerintah mempunyai komitmen tinggi untuk percepatan pencegahan stunting. Upaya percepatan tersebut dilakukan melalui intervensi gizi spesifik kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dan kepada kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0-23 bulan, anak usia 24-59 bulan, remaja putri, serta wanita usia subur. Upaya ini secara umum dilakukan oleh sektor kesehatan melalui:

- (a) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin,
- (b) Suplementasi tablet tambah darah bagi ibu hamil, wanita usia subur, dan remaja putri.
- (c) Promosi dan konseling menyusui dan pemberian makanan bayi dan anak kepada ibu menyusui,
- (d) Tata laksana gizi buruk akut pada anak 0-23 bulan dan 23-59 bulan,
- (e) Pemberian makanan tambahan pemulihan anak gizi kurang akut pada anak 0-23 bulan dan 24-59 bulan, dan
- (f) Pemantauan pertumbuhan anak 0-23 bulan dan 24-59 bulan.

Intervensi gizi sensitif ditujukan kepada masyarakat umum melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan lain melalui:

- (a) Peningkatan akses air minum yang aman dan sanitasi yang layak,
- (b) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan: keluarga berencana, jaminan kesehatan, dan bantuan uang tunai bagi keluarga kurang mampu,
- (c) Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak,
- (d) Peningkatan akses pangan bergizi, berupa pemberian bantuan pangan non tunai (BPNT), fortifikasi bahan pangan utama, pemanfaatan lahan pekarangan, dan penguatan regulasi label dan iklan pangan.

Upaya percepatan pencegahan stunting ini pada tahun 2020 terganggu dengan adanya pandemi COVID-19, antara lain terhambatnya layanan kesehatan kepada masyarakat sebagai dampak dari kebijakan pembatasan sosial dan menurunnya daya beli masyarakat untuk pangan bergizi seimbang karena berkurangnya pendapatan. Permasalahan ini diatasi pemerintah dengan menambah penerima manfaat bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah berupa bantuan tunai dan pangan, serta mengupayakan pelayanan kesehatan dasar tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN SDGs Tujuan 2

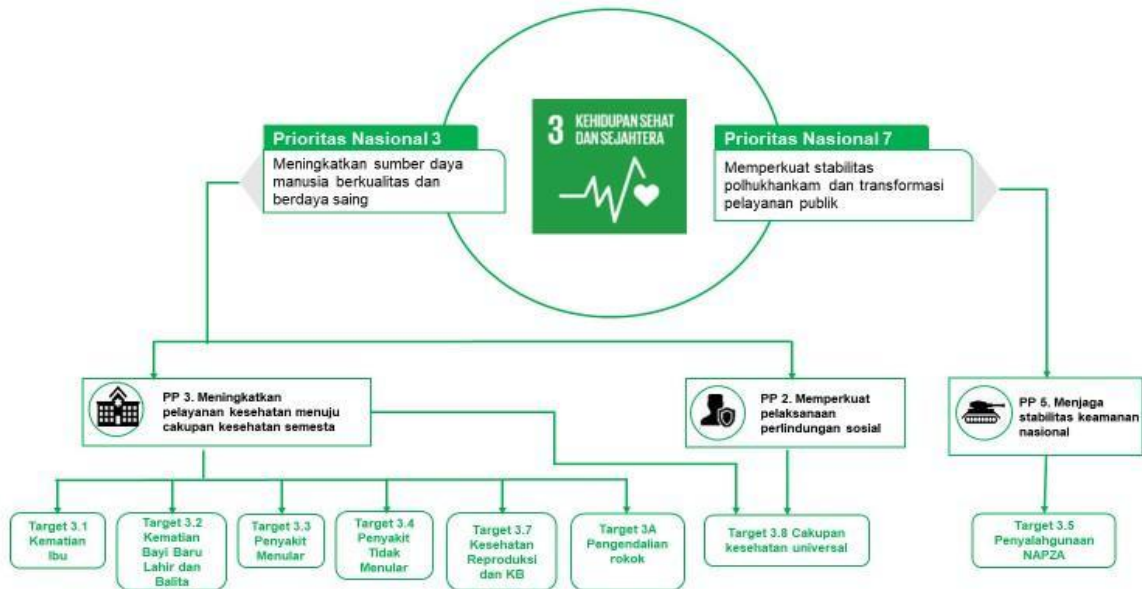
Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Nasional (RAN). Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari Aktor Nonpemerintah untuk TPB/SDGs Tujuan 2 diantaranya adalah:

- Organisasi Kemasyarakatan, yaitu: *Foodbank of Indonesia*, Tanoto Foundation, dan Wahana Visi Indonesia.
- Organisasi Kemasyarakatan Berbasis Agama, yaitu : LAZISMU, Aisyiyah, dan BAZNAS.
- Akademi, yaitu: CIMSA Indonesia.
- Bisnis dan Filantropi: ASTRA, Asia Pulp & Paper, Danone, dan PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk.

Sebagai contoh, di bidang pertanian BAZNAS memiliki program pertanian berkelanjutan dengan kegiatan berupa peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani guna meningkatkan pendapatan petani. Hal tersebut terkait dengan capaian SDGs Tujuan 2 Target 2.3 Produksi Pangan Berkelanjutan. Contoh lain, kegiatan Rumah Gizi Aisyiyah yang merencanakan turut serta dalam upaya percepatan pencegahan stunting dengan memberikan pengetahuan kepada 5.000 orang ibu hamil, ibu memunyai anak balita, dan remaja putri setiap tahunnya. Program Aisyiyah ini terkait dengan pencapaian TPB/DGGs Tujuan 2, Target 2.2 Pengurangan Malnutrisi. Program Aktor Nonpemerintah lainnya secara lebih rinci dapat dilihat pada Matriks 3 dan Matriks 4 pada Lampiran RAN SDGs 2020-2024.

3.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Terdapat 8 (delapan) target yang telah diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 2 (dua) Prioritas Nasional (PN) dan 5 (lima) Program Prioritas (PP), yang dapat dilihat keterkaitannya sebagai berikut:



Gambar 3.3 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 3 Dalam RPJMN 2020-2024

Adapun, rincian target pada Tujuan 3 selama periode 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Sensus Penduduk (SP); Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS)	Kematian per 100.000 Kelahiran Hidup	305 (2015)	217	205	194	183
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Susenas	%	87,91	89	91	93	95
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.								
3.2.1*	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	SDKI	Kematian per 1.000 Kelahiran Hidup	24 (2017)	19,5	18,6	17,6	16
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	SDKI	Kematian per 1.000 Kelahiran Hidup	15 (2017)	12,2	11,6	11	10
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Laporan bulanan konseling dan testing HIV, Subdit HIV AIDS dan PIMS (Kemenkes)	Kasus baru per 1000 penduduk tidak terinfeksi	0,18	0,21	0,19	0,19	0,18
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Laporan tahunan (Pemodelan Matematika) (Kemenkes)	Kasus baru per 100.000 penduduk	301 (2020)	252	231	211	190
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Laporan tahunan Ditjen P2P (Kemenkes)	Kab/Kota	318	345	365	385	405
3.3.4*	Insiden Hepatitis B	Kementerian Kesehatan: Laporan Program Subdit Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan	%	1,77 ^{a)}	1,54	1,39	1,24	1,09

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
3.3.5.(a)	Jumlah Kabupaten/Kota dengan eliminasi Kusta.	Laporan tahunan Ditjen P2P (Kemenkes)	Kab/Kota	401	436	458	482	514
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Laporan tahunan Ditjen P2P (Kemenkes)	Kab/Kota	64	93	106	150	190
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)	%	9,1 (2018)	9	8,9	8,8	8,7
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)	%	34,1 (2018)	34,1	34,1	34,1	34,1
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)	%	21,8 (2018)	21,8	21,8	21,8	21,8
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.								
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Laporan Tahunan P2MKJN, Ditjen P2P	Orang	9.583	10.000	10.500	11.000	11.500
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern							
	Angka prevalensi kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i>)	SDKI (BPS dan BKKBN)	Persen	57,9 (SKAP/SRPJMN 2020 dalam RKP 2022)	62.16	62.54	62.92	63.41

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	SDKI (BPS dan BKKBN)	Persen	13,4 (SKAP/SRPJMN 2020 dalam RKP 2022)	8.30	8.00	7.70	7.40
3.7.2*	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	SDKI dalam laporan tahunan BKKBN	Kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	31,9	24	21	20	18
3.7.2.(a)	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun	SDKI (BPS dan BKKBN)	Jumlah anak per WUS 15-49 tahun	2,4 (SDKI 2017)	2.24	2.21	2.19	2.1
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Kementerian Kesehatan-Profil kesehatan; BPJS Kesehatan	%	82,07	84	87	91	98
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional							
	Imunisasi Dasar Lengkap anak usia 12-23 bulan	Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas).	%	70	68	71	75	90
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Kementerian Kesehatan: Laporan rutin Farmalkes	%	92,12	90	92	94	96

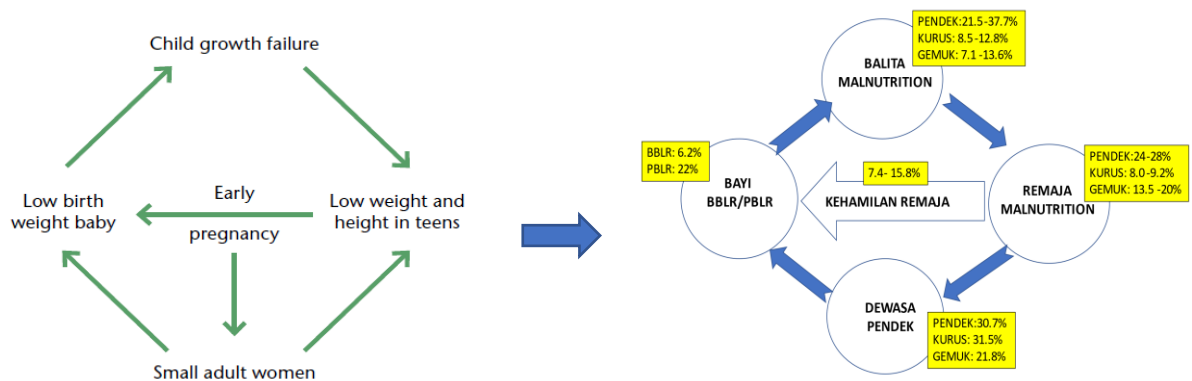
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.								
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.							
	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Laporan tahunan BPPSDM (Kemenkes)	%	39,6	59	65	71	83
	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	Laporan tahunan BPPSDM (Kemenkes)	%	69,77	75	80	85	90

Keterangan:

a) Insiden Hepatitis B merupakan data terolah estimasi dari prevalensi Hepatitis B Riskesdas 2018

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Untuk mencapai tujuan dan target SDGs 3, maka kebijakan harus berprinsip pada Goal TPB/SDGs yaitu **“No one left behind”**, yang diartikan semua tanpa perkecualian harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Gambar 3.4 mengilustrasikan kejadian masalah intergenerasi yang sangat erat kaitannya dengan status kesehatan untuk semua umur yang perlu diantisipasi. Dimulai pada masih tingginya masalah kehamilan remaja di Indonesia yang bisa menyebabkan bayi lahir dengan badan rendah atau panjang badan yang jauh di bawah standar, yang pada akhirnya berlanjut pada usia balita dan remaja dengan masalah gizi dan kesehatan. Kejadian kurang gizi ini akan berlanjut ke usia dewasa dengan risiko penyakit tidak menular. Tingginya masalah penyakit tidak menular pada usia dewasa 18 tahun keatas disertai COVID-19 akan meningkatkan angka kematian.



Gambar 3.4 Prinsip Intergenerasi yang berdampak pada status kesehatan dan kualitas sumber daya manusia

Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan di semua kelompok umur sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Saat ini, dunia sedang menghadapi krisis kesehatan global karena pandemi COVID-19, yang berdampak pada menurunnya status kesehatan dan juga mengacaukan ekonomi global. Sebelum pandemi, kemajuan besar telah terjadi dalam meningkatkan status kesehatan yang terlihat dengan meningkatnya umur harapan hidup, Menurunnya beberapa penyakit infeksi, dan juga menurunnya angka kematian bayi, dan kematian balita. Walaupun untuk Indonesia, kematian ibu masih cukup tinggi.

Diperlukan kebijakan yang dapat menekan penyakit tidak menular yang sebenarnya dapat memperberat kondisi yang dialami saat ini semasa pendemi COVID-19. Dampak besar dari pandemi COVID-19 mengharuskan Pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan karena akan mengancam stabilitas ekonomi nasional. Dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 yang telah memperburuk kesehatan nasional, perlu dibangun upaya menjaga pasokan kebutuhan sistem kesehatan nasional, terutama alat dan obat-obatan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi perlu dioptimalkan untuk meningkatkan sinergi komunikasi pusat dan daerah sehingga mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Arah kebijakan 2020-2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health*

care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Selanjutnya, strategi untuk mencapai target TPB/SDGs-3 yaitu:

1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat;
3. Peningkatan pengendalian penyakit;
4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan
5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Lebih rinci strategi kebijakan tersebut diuraikan seperti berikut:

1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mencakup:
 - a. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani pelayanan emergensi komprehensif didukung dengan jaminan pembiayaan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan;
 - b. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan;
 - c. Perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi;
 - d. Penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat;
 - e. Pencatatan kematian ibu dan penyebabnya di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata laksana;
 - f. Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap, termasuk vaksin untuk pneumonia;
 - g. Peningkatan gizi remaja putri dan juga ibu hamil;
 - h. Perluasan akses dan pelayanan KB serta kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah yang didukung oleh optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah melalui advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan konseling KB dan Kespro; peningkatan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), tenaga lini lapangan, dan tenaga kesehatan dalam pelayanan KB; penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan peningkatan KB pasca persalinan; dan
 - i. peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.

2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat yang ditujukan untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda mencakup:
 - a. Penguatan komitmen, kampanye, dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;
 - b. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh, dan perbaikan sanitasi lingkungan, serta penyediaan air bersih;
 - c. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
 - d. Peningkatan intervensi yang bersifat *life saving* dengan dukungan bukti (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi pangan;
 - e. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*);
 - f. Penguatan sistem surveilans gizi;
 - g. Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; dan
 - h. Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.
3. Peningkatan Pengendalian Penyakit

Upaya dilakukan dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup:

 - a. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans *real-time*, penguatan surveilans *real time*, pengendalian vektor dan perluasan layanan berhenti merokok;
 - b. Penguatan *health security* terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan *alert system* kejadian luar biasa dan karantina kesehatan
 - c. Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera;
 - d. Pengendalian resistensi antimikrobia;
 - e. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.
4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui GERMAS yang mencakup:
 - a. Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, UKS dan lingkungan kerja sehat;
 - b. Penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan ruang terbuka publik, transportasi masal, lingkungan sehat, dan penurunan polusi udara;

- c. Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau pelarangan total iklan dan promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak;
 - d. Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pembudayaan olah raga, pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat; dan
 - e. Peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan, perluasan akses terhadap buah dan sayur dan perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan.
5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
- a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan pada penguatan fungsi Puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan;
 - b. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang difokuskan pada afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis dan distribusinya di daerah pertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar (DTPK);
 - c. Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan yang difokuskan pada efisiensi penyediaan obat dan vaksin;
 - d. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *post* market obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguatan laboratorium dan balai pengawas obat dan makanan; dan
 - e. Penguatan tata Kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan yang difokuskan pada pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas provinsi dan kabupaten/kota.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19 Tahun 2021

Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian akibat COVID-19. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan SDM kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi terutama upaya pencegahan dan kuratif COVID-19 menyebabkan

pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, dan pengendalian penyakit terhambat.

Upaya untuk merespon dampak pandemi COVID-19 terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas adalah melalui penguatan sistem kesehatan nasional dan penguatan pembudayaan masyarakat hidup sehat. Strategi kunci Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yaitu:

- a. **Pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan**, melalui beasiswa wajib penempatan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan tenaga kesehatan, inovasi pada pendidikan spesialis, pengembangan dan/atau perluasan kapasitas program studi tenaga kesehatan langka, redistribusi tenaga kesehatan di kabupaten/kota, dan sistem penghargaan tenaga kesehatan;
- b. **Penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama**, melalui penguatan Puskesmas sebagai pembina wilayah, penguatan fungsi promotif-preventif dan upaya kesehatan masyarakat (UKM), pembangunan Puskesmas di kecamatan tanpa Puskesmas, pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan, dan penyempurnaan sistem akreditasi FKTP;
- c. **Peningkatan kapasitas RS dan pelayanan kesehatan di DTPK**, melalui peningkatan rasio tempat tidur RS per penduduk, sistem rujukan berbasis kompetensi dan sistem rujukan khusus kepulauan, penyebaran RS rujukan nasional dan RS rujukan provinsi, pengembangan layanan RS unggulan, inovasi *Flying Health Care* dan RS kapal, serta perluasan *sister hospital*;
- d. **Kemandirian farmasi dan alat kesehatan**, melalui riset dan penguatan regulasi pemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, pengembangan produk sediaan farmasi bersertifikat halal, produksi sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, dan standarisasi dan sertifikasi alat kesehatan dalam negeri;
- e. **Penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan**, melalui surveilans penyakit terpadu, *real time* dan berbasis laboratorium dan berbasis masyarakat, jejaring, mekanisme rujukan, dan akreditasi laboratorium, peningkatan kapasitas tenaga dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium dan bahan medis habis pakai (BMHP), pemenuhan sarana dan prasarana dan SDM di pintu masuk negara (KKP) sesuai standar kelas, dan pengembangan kesiapsiagaan (*preparedness*) dan *readiness* sistem di masa pandemi;
- f. **Pengendalian penyakit dan perluasan imunisasi** melalui perluasan cakupan imunisasi, pengingat imunisasi dan register data imunisasi, perluasan antigen imunisasi, perluasan penemuan kasus dan pengobatan penyakit, dan pemantauan *real-time* stock obat dan sarana dan prasarana pengendalian penyakit;
- g. **Inovasi pembiayaan kesehatan**, melalui pengembangan mekanisme *fund-channeling*, perluasan skema DAK berbasis kinerja, kemandirian RS, kontrak pelayanan, kebijakan kompensasi pelayanan kesehatan, *co-sharing* BPJS-K, kapitasi berbasis kinerja, dan melibatkan swasta untuk pelayanan kesehatan; serta

- h. **Digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat**, melalui digitalisasi pelayanan (termasuk *telemedicine*), integrasi sistem informasi dan *single entry data* puskesmas dan RS, revitalisasi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM), peningkatan *health literacy* masyarakat, dan pengembangan data rutin dan data berbasis individu.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN SDGs Tujuan 3

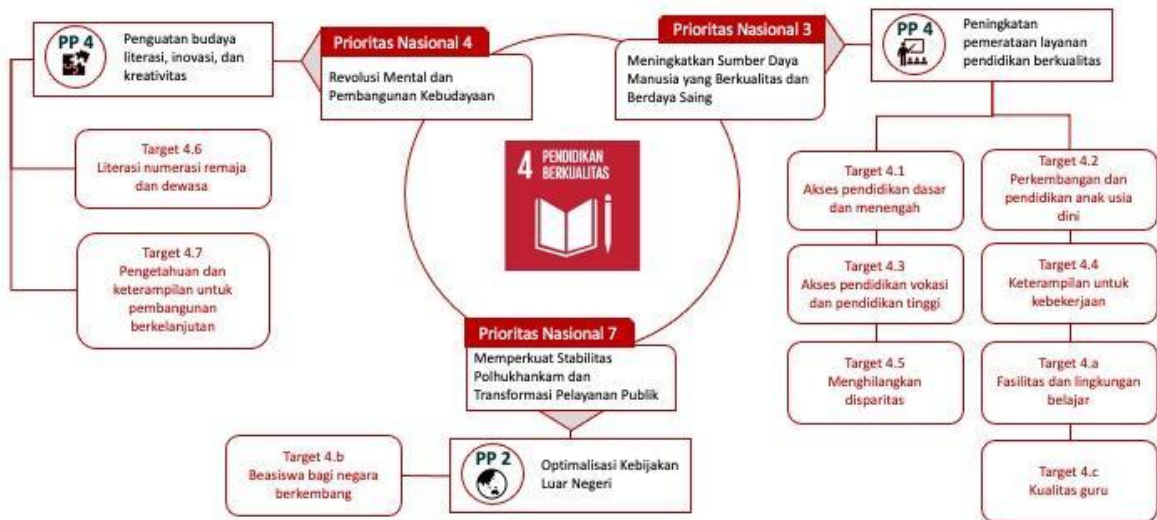
Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, aktor nonpemerintah menjadi bagian dalam Rencana Aksi Nasional (RAN). Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari aktor nonpemerintah untuk Tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera diantaranya adalah: (1) Universitas Diponegoro, (2) SDGs Hub Universitas Indonesia, (3) LAZISMU, (4) *International Institute for Sustainable Development* (IISD), (4) Muslimat NU, (5) Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), (6) Institut Kapal Perempuan, (7) Prakarsa, (8) CIMSA Indonesia, (9) Asia Pulp & Paper, (10) PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk, (11) BRI, (12) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, (13) ASTRA, (14) Indah Prakarsa Sentosa, serta (5) Nutrifood.

Sebagai contoh, Yayasan Kesehatan Perempuan memiliki program pengabdian masyarakat dengan penyadaran dan Pendidikan kesehatan reproduksi, melalui kegiatan Pendidikan kesehatan reproduksi remaja, Pendidikan kesehatan reproduksi pada kelompok perempuan dan laki-laki dewasa, sosialisasi kesehatan reproduksi kepada *stakeholder*, kelompok masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta kegiatan penelitian layanan kesehatan reproduksi dengan skema JKN. Hal tersebut terkait dengan capaian SDGs Target 3.7 menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Selain Yayasan Kesehatan Perempuan, program dan kegiatan aktor nonpemerintah lainnya secara lebih rinci dapat dilihat pada Matriks 3 dan Matriks 4 pada Lampiran RAN SDGs 2020-2024.

Dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut, dilakukan secara terintegrasi baik di sektor kesehatan dan sektor lain yang terkait, juga pada Goal TPB/SDGs lainnya, terutama Goal 1, 2, 4, 5, dan 6.

3.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB/SDGs berkaitan dengan penjaminan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta peningkatan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan berkualitas untuk semua, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 12 indikator global. Target-target tersebut sesuai dengan prioritas nasional serta program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sebagaimana yang diperlihatkan dalam Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 4 Dalam RPJMN 2020-2024

Gambar 3.5 di atas menunjukkan bahwa seluruh target Tujuan 4 terintegrasi dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta upaya memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Target-target Tujuan 4 mencakup empat isu utama, yaitu pemenuhan akses pendidikan, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pendidikan untuk peningkatan keberkerjaan termasuk pendidikan vokasi dan pelatihan, serta penguatan pendidikan satu tahun pra-sekolah. Upaya untuk mencapai Tujuan 4 tersebut dijabarkan dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Target pencapaian indikator SDGs dari tahun 2021-2024 dengan *baseline* data tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1 (a)	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) di kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:							
	(i) membaca	AKM	%	53,17 (2016) (AKSI)	55	58	60	63
	(ii) matematika	AKM	%	22,87 (2016) (AKSI)	27,4	28,3	29,2	30,1
	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) di kelas 8 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:							
	(i) membaca	PISA	%	30,10 (2018) (AKSI)	55	58	60	63
	(ii) matematika	PISA	%	28,10 (2018) (AKSI)	27,4	28,3	29,2	30,1
	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) di usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:							
	(i) membaca	PISA	%	30,1	-	33 (R-RKP 2022 Hal. IV.48)	-	34,1
	(ii) matematika	PISA	%	28,1	-	30 (R-RKP 2022 Hal. IV.48)	-	30,9
	(iii) sains	PISA	%	40	-	42,6 (R-RKP 2022 Hal. IV.48)	-	44

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat							
	(a) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SD/ sederajat	BPS RKP 2021	%	96,00	97,16 (Target 2021 dalam R-RKP 2022)	97,93 (R-RKP 2022 Hal. IV.49)	98,41	98,94 (Target 2024 dalam R-RKP 2022)
	(b) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMP/ sederajat	BPS RKP 2021	%	87,89	89,15 (Target 2021 dalam R-RKP 2022)	90,54 (R-RKP 2022 Hal. IV.49)	91,94	93,33 (Target 2024 dalam R-RKP 2022)
	(c) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/ sederajat	BPS RKP 2021	%	63,95	68,69 (Target 2021 dalam R-RKP 2022)	69,08 (R-RKP 2022 Hal. IV.49)	70,86	71,71 (Target 2024 dalam R-RKP 2022)
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang:							
	SD/ sederajat	Susenas, BPS	%	0,62				
	SMP/ sederajat	Susenas, BPS	%	7,29				
	SMA/ sederajat	Susenas, BPS	%	22,31				
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar								
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin	Integrasi Susenas dan Riskesdas 2018	%	pm	pm	pm	pm	pm
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Susenas, BPS	%	92,76	93,48	94,21	94,93	95,65

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas								
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Biro Perencanaan, Kementan						
	(1) usia 15 – 24 tahun	Susenas MSBP, BPS	%	48,66 (2018)	pm	pm	pm	pm
	(2) usia 15 – 59 tahun	Susenas MSBP, BPS	%	2,30 (2018)	pm	pm	pm	pm
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Susenas Kor	%	30,85	31,16 (Target 2021 dalam R-RKP 2022)	31,52 (R-RKP 2022 Hal. IV.49)	31,89	32,28 (Target 2024 dalam R-RKP 2022)
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan								
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)							
	(1) usia 15-24 tahun	Susesnas Kor	%	87,17	pm	pm	pm	pm
	(2) usia 15-59 tahun	Susesnas Kor	%	64,26	pm	pm	pm	pm
4.5 menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan								
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki- laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.							

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
	(i.a) Rasio APM-SD Perempuan/Laki-laki	Susenas Kor	%	99,98	99,984	99,986	99,988	99,990
	(i.b) Rasio APM-SD Pedesaan / Perkotaan	Susenas Kor	%	99,44	99,50	99,55	99,61	99,66
	(i.c) Rasio APM-SD Kuintil Terendah/ Kuintil Tertinggi	Susenas Kor	%	99,97	99,970	99,973	99,977	99,980
	(i.d) Rasio APM-SD Disabilitas / Tanpa Disabilitas	Susenas Kor	%	91,18	pm	pm	pm	pm
	(ii) Rasio APK Perempuan / Laki-laki pada tingkat:							
	SMP/Sederajat	Susenas Kor	%	99,09	99,18	99,27	99,36	99,45
	SMA/SMK/ Sederajat	Susenas Kor	%	100,92	100,83	100,74	100,64	100,55
	Perguruan Tinggi	Susenas Kor	%	109,01	105,5 (Target RPJMN Matriks Hal A.3.29)	104,4 (Target RPJMN Matriks Hal A.3.29)	104,4 (Target RPJMN Matriks Hal A.3.29)	104,4 (Target RPJMN Matriks Hal A.3.29)
	(ii) Rasio APK Pedesaan / Perkotaan pada tingkat:							
	SMP/Sederajat	Susenas Kor	%	98,98	99,08	99,19	99,29	99,39
	SMA/SMK/ Sederajat	Susenas Kor	%	90,63	91,57	92,51	93,44	94,38
	Perguruan Tinggi	Susenas Kor	%	51,24	54,10	56,95	59,81	62,67
	(ii) Rasio APK Kuintil Terendah / Kuintil Tertinggi pada tingkat:							
	SMP/Sederajat	Susenas Kor	%	97,87	98,08	98,30	98,51	98,72
	SMA/SMK/Sederajat	Susenas Kor	%	76,75	80,04	81,29	81,93	82,56
	Perguruan Tinggi	Susenas Kor	%	28,37	22,87	23,93	24,93	25,89
	(ii) Rasio APK Disabilitas/Tanpa Disabilitas pada tingkat:							
	SMP/Sederajat	Susenas Kor	%	78,66	pm	pm	pm	pm
	SMA/SMK/Sederajat	Susenas Kor	%	62,18	pm	pm	pm	pm
	Perguruan Tinggi	Susenas Kor	%	44,69	pm	pm	pm	pm

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Susesnas Kor.	%	96,00	pm	pm	pm	pm
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua								
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%					
	(1) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	95,07				
	(2) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	96,96				
	(3) SMA dan SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	98,15				
	(4) SLB	Dapodik (Kemdikbud)	%	97,80				
	Proporsi sekolah dengan akses ke (b) internet untuk tujuan pengajaran							
	(1) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	34,70 (2018)				
	(2) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	49,23 (2018)				
	(3) SMA	Dapodik (Kemdikbud)	%	69,20 (2018)				
	(4) SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	75,99 (2018)				
	Proporsi sekolah dengan akses ke (c) komputer untuk tujuan pengajaran							
	(1) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	60,07				
	(2) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	74,12				
	(3) SMA dan SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	86,17				
	(4) SLB	Dapodik (Kemdikbud)	%	59,69				

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
	Proporsi sekolah dengan akses ke (d) air minum layak							
	(1) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	79,91				
	(2) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	81,34				
	(3) SMA dan SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	90,75				
	(4) SLB	Dapodik (Kemdikbud)	%	90,75				
	Proporsi sekolah dengan akses ke (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin							
	(1) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	58,38				
	(2) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	72,91				
	(3) SMA dan SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	70,08				
	(4) SLB	Dapodik (Kemdikbud)	%	49,87				
	Proporsi sekolah dengan akses ke (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)							
	(1) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	51,14 (2018)				
	(2) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	44,67 (2018)				
	(3) SMA dan SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	51,65 (2018)				
	(4) SLB	Dapodik (Kemdikbud)	%	51,63 (2018)				
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir	Kemdikbud, OECD (PISA)	%	41 (2018)	pm	pm	pm	pm
4.b Pada 2020, secara substansial memperbanyak jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara Afrika, untuk masuk ke pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan dan teknologi informasi dan komunikasi, teknik, program teknik dan sains, di negara-negara maju dan negara berkembang lainnya								
4.b.1	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang. Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	Kemdikbud, Kemenlu	Orang	328	528	528	pm	pm

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
4.c Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negaranegara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil								
4.c.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan							
	Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/ SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik		%	40,83	91,05	%	40,83	67,47 (target RKP 2020 Tabel 4.7)
				41,01	43,32	45,29	47,27	49,25
	(i) PAUD	Dapodik (Kemdikbud)	%	-	pm	pm	pm	pm
	(ii) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	42,81 (2018)	pm	pm	pm	pm
	(iii) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	45,75 (2018)	pm	pm	pm	pm
	(iv) SMA	Dapodik (Kemdikbud)	%	46,49 (2018)	pm	pm	pm	pm
	(v) SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	35,30 (2018)	pm	pm	pm	pm
	Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/ SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		%	89,33	pm	pm	pm	pm
	(i) PAUD	Dapodik (Kemdikbud)	%	88,40 (2018) 88,35 (Statistik Pendidikan 2020, capaian 2019)	pm	pm	pm	pm
	(ii) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	94,50 (2018) 94,45 (Statistik Pendidikan 2020, capaian 2019)	pm	pm	pm	pm

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>Baseline</i>) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
	(iii) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	98,00 (2018) 97,97 (Statistik Pendidikan 2020, capaian 2019)	pm	pm	pm	pm
	(iv) SMA	Dapodik (Kemdikbud)	%	95,40 (2018) 74,38 (Statistik Pendidikan 2020, capaian 2019)	pm	pm	pm	pm
	(v) SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	88,40 (2018) 88,35 (Statistik Pendidikan 2020, capaian 2019)	pm	pm	pm	pm

Keterangan:

- a) Indikator 4.2.2: RPJMN menggunakan indikator yang berbeda persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (*baseline*: 62,48% tahun 2020 dan target 72,77% tahun 2024). Nilai tahun 2020 merupakan hasil perhitungan BPS dengan menggunakan data Sakernas dan Data Nilai Tambah Pertanian; angka sangat sementara.
- b) Indikator 4.a.1: Data *baseline* bersumber Laporan Indikator TPB BPS 2020
- c) Indikator 4.c.1 (bagian kedua): Dalam Statistik Pendidikan oleh BPS, indikator ditulis sebagai Persentase Guru Layak Mengajar

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Arah kebijakan pembangunan pendidikan terkait pencapaian TPB/SDGs selaras dengan arahan utama Presiden Republik Indonesia, terutama arahan terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM), yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa salah satu strategi pembangunan SDM adalah melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya untuk mencapai pembangunan sumber daya manusia (SDM) sekaligus mencapai Tujuan 4 TPB/SDGs melalui strategi besar sebagai berikut:

- a) optimalisasi angka partisipasi pendidikan,
- b) peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan,
- c) peningkatan relevansi pendidikan,
- d) penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter, dan
- e) penguatan tata kelola pendidikan.

Terdapat enam program yang ditetapkan Kemendikbud dan diimplementasikan pada tahun 2021 sampai dengan 2024 terkait dengan pencapaian Tujuan 4. Program tersebut adalah:

- a) program dukungan manajemen untuk terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas,
- b) program kualitas pengajaran dan pembelajaran,
- c) program PAUD dan Wajib Belajar 12 tahun,
- d) program pendidikan dan pelatihan vokasi,
- e) program pendidikan tinggi, dan
- f) program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Sejak awal tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia telah mengalami disrupsi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Kegiatan pembelajaran di sekolah harus digantikan dengan pembelajaran dari rumah (BDR atau belajar dari rumah) secara jarak jauh (PJJ atau pembelajaran jarak jauh). Kesulitan dalam melakukan BDR serta tekanan ekonomi keluarga yang meningkat pada masa pandemi dapat menyebabkan turunnya kualitas pembelajaran bahkan peningkatan angka putus sekolah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan pada tahun 2021 ditekankan pada upaya merespon kondisi pembelajaran yang berubah drastis, agar risiko-risiko tersebut dapat dihindari.

Respon untuk memulihkan dampak COVID-19 terhadap pembelajaran juga termuat dalam kebijakan pembangunan SDM pada tahun 2021, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Bappenas, 2020). Untuk menghindari terputusnya proses pembelajaran selama masa pandemi sekaligus untuk memulihkan pembelajaran pasca pandemi COVID-19, beberapa inisiatif dan kebijakan diarahkan untuk:

- Upaya peningkatan kembali tingkat produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi. Upaya ini dilakukan melalui program kewirausahaan mahasiswa vokasi dan peningkatan kompetensi dan keterampilan melalui pelatihan program prakerja.
- Upaya pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan menyediakan infrastruktur jaringan internet. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan paket data internet terjangkau untuk pendidikan tinggi, penggunaan dana BOS untuk membantu satuan pendidikan mengurangi dampak negatif pandemik COVID-19 salah satunya untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar.
- Upaya pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual terutama di masa krisis. Termasuk dalam upaya ini adalah penyediaan berbagai macam sumber media pembelajaran daring dan pembelajaran jarak jauh melalui media non-digital seperti modul cetak untuk belajar mandiri, radio, dan televisi. Selain itu, museum sebagai sumber belajar luar sekolah pun dibuka secara daring sehingga peserta didik dan masyarakat tetap dapat berkunjung secara virtual ke museum-museum.
- Upaya pengurangan risiko pembelajaran jarak jauh di sekolah swasta melalui BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer, pembayaran tenaga kependidikan, belanja kebutuhan pembelajaran daring, dan belanja kebutuhan kebersihan terkait pencegahan COVID-19.
- Penyederhanaan kurikulum yang telah dimulai pada masa pandemi COVID-19 dilanjutkan implementasinya sesuai arah paradigma pembelajaran yang berorientasi pada penguatan dan pengembangan kompetensi.
- Upaya pencegahan penurunan partisipasi pendidikan. Upaya ini dilakukan melalui pemberian keringanan biaya bagi mahasiswa yang mengalami kendala finansial dan kendala dalam mengikuti proses pembelajaran akibat pandemi.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN SDGs Tujuan 4

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Nasional (RAN). Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari Aktor Nonpemerintah untuk TPB/SDGs Tujuan 4 diantaranya adalah:

1. Organisasi Masyarakat, yaitu: *Foodbank of Indonesia*, *2030 Youth Force Indonesia*, dan *SAFE Indonesia*.
2. Organisasi Masyarakat Berbasis Keagamaan, yaitu: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Baitulmaal Muamalat, Baznas, Laz Harapan Dhuafa dan Baznas Bazis DKI Jakarta.

3. Akademisi, yaitu: *SDGs Hub* Universitas Indonesia, *SDGs Center* Universitas Padjadjaran, *SDGs Center* Universitas Diponegoro, *SDGs Center* Universitas Kalimantan Utara, *SDGs Center* Universitas Negeri Gorontalo, dan CIMSA Indonesia.
4. Filantropi dan Bisnis, yaitu: Indonesia Global Compact Network (IGCN), Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas, PT Transkon Jaya Tbk, dan Sinas Mas Land.

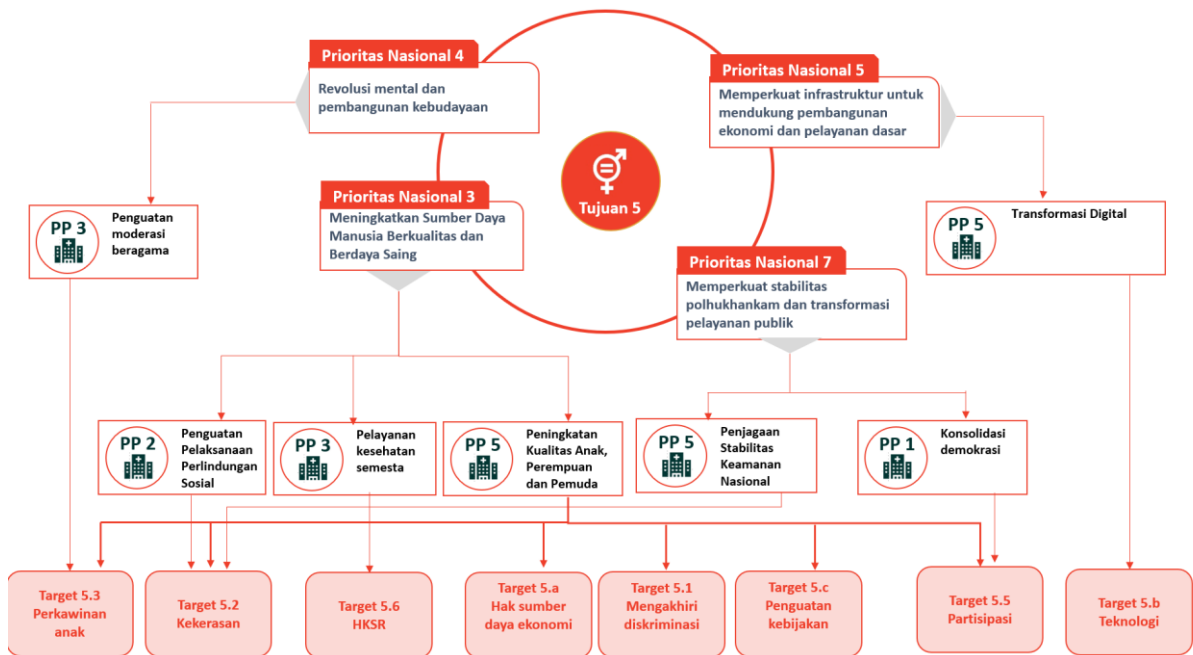
Sebagai contoh, di bidang pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama memiliki program PAUD berkualitas dengan kegiatan pembangunan fasilitas sekolah PAUD, program literasi dengan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam rangka program Paket A, B dan serta program pembuatan keran air bersih dan penyediaan sabun cuci tangan di PAUD. Contoh lain di bidang pendidikan, Foodbank of Indonesia memiliki program saya dari ibu dengan kegiatan pendampingan ibu bersama posyandu dalam pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa periode emas dan program mentari bangsaku dengan kegiatan pemberian makanan tambahan dan edukasi pada anak-anak di lembaga PAUD.

Contoh lain di bidang pendidikan *SDGs Hub* Universitas Indonesia memiliki program kerjasama eksternal dengan kegiatan penyusunan modul *SDGs Academy* Indonesia, pelatihan-pelatihan pendidikan nonformal utk peningkatan kapasitas stakeholders *SDGs*. Contoh lain di bidang pendidikan IGCN memiliki program transformasi pendidikan dengan kegiatan pengembangan video untuk proses belajar mengajar.

3.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Di dalam dokumen RPJMN 2020-2024, gender menjadi salah satu aspek yang diarusutamakan. Pengarusutamaan ini memberikan arahan bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan harus memiliki perspektif gender.

Mengamati TPB/SDGs Tujuan 5 Kesetaraan Gender, terdapat 8 (delapan) target yang telah menjadi bagian dari target di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 4 (empat) Prioritas Nasional (PN) dan 7 (tujuh) Program Prioritas (PP). Keterkaitan RPJMN dengan empat target Tujuan 5 TPB/SDGs dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.6 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 5 Dalam RPJMN 2020-2024

Angka target pencapaian indikator SDGs dari tahun 2021-2024 dengan *baseline* data tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 5 Kesetaraan Gender

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun								
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.	Kemen PPPA	Persen	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang dasar hukum (100%) • Bidang kekerasan terhadap perempuan (91,67%) • Bidang lapangan kerja dan ekonomi (90%) • Bidang perkawinan dan keluarga (81,82%) 	PM	PM	PM	PM
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	SHPN (Kemen PPPA dan BPS)	Persen	10,4 (2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	SHPN (Kemen PPPA dan BPS)	Persen	4,66 (2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun	Susenas Kor (BPS)	Persen	0,5	PM	PM	PM	PM
	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama -sebelum umur 18 tahun	Susenas Kor (BPS)	Persen	10,35	9,8	9,44	9,08	8,74
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5.1*	(a) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat (DPR dan DPD RI)							
	DPR	KPU	Persen	20,52 (2019)	N/A	N/A	N/A	22,52%
	DPD	KPU	Persen	30,88 (2019)	N/A	N/A	N/A	PM
	(b) Proporsi kursi legislatif dan jabatan pemerintah yang diduduki perempuan di pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilu (DPRD provinsi dan kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota)							
	DPRD Provinsi	KPU	Persen	17,53 (2019)	N/A	N/A	N/A	20%
	DPRD Kab/Kota	KPU	Persen	15,3 (2019)	N/A (RPJMN)	N/A (RPJMN)	N/A (RPJMN)	17%
5.5.2*	(a) Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial di pemerintahan							
	Menteri	BKN	Persen	20,59	PM	PM	PM	PM
	Gubernur dan Wakil Gubernur	Direktorat Fasilitas Kepala Daerah Kemendagri (diolah Bappenas)	Persen	9,09	PM	PM	PM	PM

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
	Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota	Direktorat Fasilitas Kepala Daerah Kemendagri (diolah Bappenas)	Persen	9,16	PM	PM	PM	PM
	Eselon I	BKN	Persen	17,83	PM	PM	PM	PM
	Eselon II	BKN	Persen	20,44	PM	PM	PM	PM
	(b) Proporsi perempuan yang menduduki posisi managerial di perusahaan publik atau swasta	Sakernas BPS	Persen	33,08	PM	PM	PM	PM
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.								
5.6.1*	(1) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (seluruh wanita usia subur/WUS)	SDKI (BKKBN dan BPS)	Persen	29,49 (2017)	PM	PM	PM	PM
	(2) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (hanya Pasangan Usia Subur/PUS)	SDKI (BKKBN dan BPS)	Persen	41,02 (2017)	PM	PM	PM	PM

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	<ul style="list-style-type: none"> – Kemen PPPA – Kemenkumham – BKKBN – Kemenkes – Kemendikbud 	Dokumen	Sedang asistensi dengan UN Women	PM	PM	PM	PM
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.								
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian;	SITASI (BPS)	Persen	Jawa Barat: 25,95* Jawa Timur: 27,63* NTB: 25,88* Angka rata-rata 3 provinsi: 26,74*	PM	PM	PM	PM
	(2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	SITASI (BPS)	Persen	Jawa Barat: 13,54* Jawa Timur: 24,28* NTB: 21,24* Angka rata-rata 3 provinsi: 18,95*	PM	PM	PM	PM
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.	Kemen PPPA	Tingkatan (0-3)	Sedang asistensi dengan UN Women	PM	PM	PM	PM

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Susenas Kor (BPS)	% total	57,48	72	73	74	75.7
			% perempuan	52.69	PM	PM	PM	PM
			% laki-laki	62.22	PM	PM	PM	PM
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.								
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Laporan Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender (Kemen PPN/Bappenas dan Kemenkeu)	Kriteria	Kemungkinan E	PM	PM	PM	PM

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Arah kebijakan yang terkait dengan target **mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan** dalam RPJMN 2020-2024 adalah penguatan sistem perlindungan anak, peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan peningkatan perlindungan perempuan, melalui strategi:

- a. Penguatan kebijakan dan regulasi yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak;
- b. Penguatan kebijakan dan regulasi terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- c. Penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi perempuan korban kekerasan dan TPPO;
- d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman berbagai pihak tentang perlindungan anak, kesetaraan gender dan perlindungan perempuan; dan
- e. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggaraan pemerintahan tentang kekerasan terhadap perempuan.

Arah kebijakan yang terkait dengan target **penghapusan kekerasan berbasis gender dan perkawinan anak** dalam RPJMN 2020-2024 adalah penguatan sistem perlindungan anak, peningkatan perlindungan perempuan termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO, dan penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber, melalui strategi:

- a. Penguatan regulasi, pencegahan, penanganan dan penegakan hukum;
- b. Peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- c. Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
- d. Penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; dan
- e. Penguatan infrastruktur, SDM, dan regulasi keamanan siber; penyelesaian kejahatan siber; dan pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerja sama internasional bidang siber.

Kebijakan yang terkait dengan **partisipasi kepemimpinan perempuan** adalah peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan penguatan kesetaraan dan kebebasan, melalui strategi:

- a) Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan
- b) pendidikan politik dan pemilih secara konsisten.

Arah kebijakan yang terkait dengan **akses teknologi** dalam RPJMN 2020-2024 adalah penuntasan infrastruktur TIK, dan fasilitas pendukung transformasi digital melalui strategi:

- a) Penyediaan BTS untuk desa non komersil, dan penyediaan satelit multifungsi untuk akses internet;
- b) Pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur telekomunikasi dan internet;

- c) Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar; dan
- d) Pengembangan literasi digital masyarakat.

Kebijakan yang terkait dengan **penguatan kebijakan dan perundang-undangan untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan** adalah peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui strategi percepatan pelaksanaan PUG di KL, pemerintah daerah dan desa melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Pencapaian TPB/SDGs Tujuan 5 untuk target 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 dan 5.c di **KPPPA** tergambar di dalam lima tujuan KPPPA, yaitu 1) meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan; 2) meningkatkan pemenuhan hak anak; 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pembangunan pppa; 4) meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPO; dan 5) meningkatkan perlindungan khusus anak.

Pencapaian target-target ini diupayakan melalui Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak di KPPPA. Sasaran dari program ini adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L dan pemda;
- b) Meningkatnya kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik;
- c) Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak termasuk penurunan perkawinan anak dan pengasuhan layak anak;
- d) Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak;
- e) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f) Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO; dan
- g) Meningkatnya Kelembagaan dan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus.

Program yang terkait langsung dengan pencapaian TPB/SDGs Tujuan 5 untuk target 5.2 dan 5.6 di **Kementerian Kesehatan** adalah program kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Melalui kegiatan pembinaan kesehatan keluarga, Kementerian Kesehatan mengupayakan ketersediaan tenaga kesehatan terlatih pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan TPPO, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia reproduksi di seluruh kab/kota.

Di BKKBN, terdapat strategi yang terkait dengan pencapaian TPB/SDG Tujuan 5 untuk target 5.3 dan 5.6, yaitu peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja; penguatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program Bangga Kencana serta Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif; dan peningkatan ketahanan keluarga melalui optimalisasi pola asuh dan pendampingan anak termasuk remaja. **BKKBN** memiliki target menurunkan angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dari 8,6% pada 2020 menjadi 7,4% pada 2024—penurunan angka ini

secara tidak langsung dapat menggambarkan perbaikan otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi.

Kemendagri ikut berperan dalam pencapaian TPB/SDGs Tujuan 5 untuk target 5.2, 5.3, 5.6 dan 5.c yang diupayakan dengan mendorong daerah untuk a) mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis Hak, b) menerapkan perencanaan dan penganggaran berbasis gender, c) melaporkan pelaksanaan gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang, dan d) melakukan evaluasi kabupaten/kota layak anak.

Pencapaian TPB/SDGs Tujuan 5 untuk target 5b di **Kemenkominfo** diupayakan melalui program aksesibilitas telekomunikasi dan informasi, pengembangan aplikasi informatika, penyelenggaraan informatika. Kegiatan pada program ini yang terkait langsung dengan pencapaian target 5b adalah a) penyediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK yang meliputi internet, BTS, dan satelit; b) pembinaan dan pengembangan TIK untuk pemberdayaan masyarakat; c) pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi.

Di **KPU**, pencapaian TPB/SDGs Tujuan 5 untuk target 5.5 diupayakan melalui kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas. Sementara Kemensos memiliki kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian target 5.2 yaitu memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban perdagangan orang.

Pencapaian TPB/SDGs Tujuan 5 untuk target 5.c di **Bappenas** diupayakan melalui program perencanaan pembangunan nasional. Sasaran program ini adalah tersusunnya kebijakan percepatan lingkup keluarga, perempuan, anak, pemuda, dan olahraga; dan terwujudnya perencanaan pendanaan pembangunan yang terintegrasi dengan penganggaran. Terdapat pula upaya penguatan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang mempertimbangkan dampak COVID-19.

B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN SDGs Tujuan 5

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Nasional (RAN). Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari Aktor Nonpemerintah untuk Tujuan 5 SDGs diantaranya adalah:

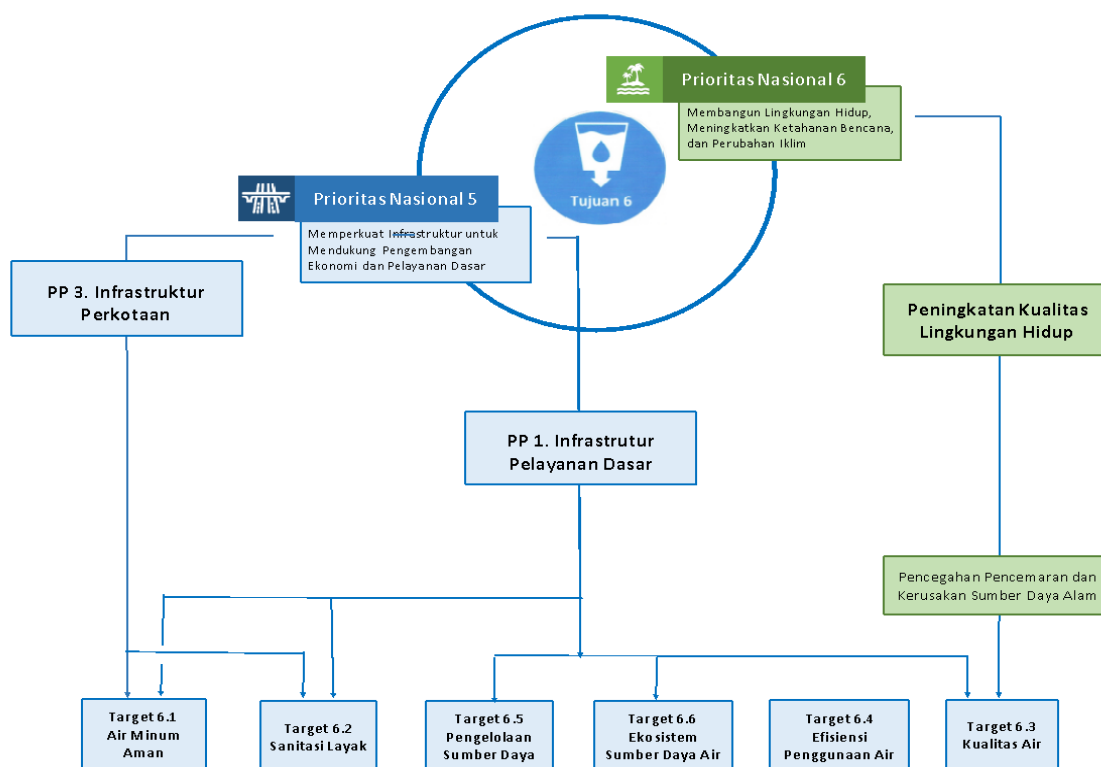
- Organisasi Kemasyarakatan, yaitu: Wahana Visi Indonesia; Institut KAPAL Perempuan; Yayasan PEKKA; Yayasan Kesehatan Perempuan;
- Akademi, yaitu: LPPM UNDIP

Sebagai contoh, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) memiliki program yang berkaitan dengan pencapaian Target 5.6, yaitu program penyadaran dan pendidikan kesehatan reproduksi kepada kelompok perempuan dan laki-laki dewasa, remaja, dan jurnalis/media. Terkait Target 5.2, Institut KAPAL Perempuan memiliki program pengembangan kapasitas pengasuhan dalam rumah tangga; dan pengembangan kapasitas remaja putri dan putra dalam merespon kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam

konteks COVID-19, Institut KAPAL Perempuan juga merancang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memperkuat kesadaran gugus tugas COVID-19 tingkat desa, pemerintah lokal, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan terkait risiko kekerasan dalam rumah tangga dan isu-isu perempuan dan anak di masa pandemi. Selain YKP dan Institut KAPAL Perempuan, program dan kegiatan aktor nonpemerintah lainnya secara lebih rinci dapat dilihat pada Matriks 3 dan Matriks 4 pada Lampiran RAN SDGs 2020-2024.

3.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Dalam TPB/SDGs Tujuan 6 Air Minum dan Sanitasi, terdapat 6 (enam) target yang telah diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 2 (dua) Prioritas Nasional (PN) dan 3 (tiga) Program Prioritas (PP), yang dapat dilihat keterkaitannya sebagai berikut⁷²:



Gambar 3.7 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 6 Dalam RPJMN 2020-2024

Keenam target tersebut (kecuali Target 6.a dan 6.b yang merupakan indikator global yang masih akan dikembangkan) memiliki angka target pencapaian indikator SDGs dari tahun 2021-2024 dengan *baseline* data tahun 2020 (kecuali disebutkan berbeda), yang dapat dilihat pada tabel berikut:

⁷² Lima Prioritas Nasional lainnya adalah (1) penguatan ketahanan ekonomi; (2) pengembangan wilayah; (3) peningkatan SDM; (4) peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; dan (5) stabilitas politik hukum dan transformasi pada publik.

Tabel 3.6 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 6 Air Minum dan Sanitasi Layak

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	1. Kemenkes 2. Susenas BPS	Persen	11,9 ^{a)}	12,68 ^{b)}	13,45 ^{c)}	14,23 ^{d)}	15 ^{e)}
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.							
	a. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Susenas BPS	Persen	48,4 (2018)	PM	PM	PM	PM
	b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Susenas BPS	Persen	79,53	79,43	82,07	86,03	90
	c. Persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka	1. Susenas BPS 2. Kemenkes	Persen	6,19	PM	PM	PM	PM
	d. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T	Kemen PUPR	Persen	0,55	PM	PM	PM	PM
	e. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja	Kemen PUPR	Persen	7,07	PM	PM	PM	PM
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman	KLHK	Persen	PM	PM	PM	PM	PM

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku	KLHK	Indeks	52,62	55,20	55,30	55,40	55,50
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku.	Kemen ESDM	Indeks	PM	PM	PM	PM	PM
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaanya	Kemen PUPR	Persen	PM	PM	PM	PM	PM
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya	Data Podes, BPS	Persen	PM	PM	PM	PM	PM
6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepentingan.								
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	1. PUPR 2. KLHK	Persen	PM	PM	PM	PM	PM
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	1. KLHK 2. PUPR 3. ESDM	Persen	PM	PM	PM	PM	PM
6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.								
6.6.1 *	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu (Indek kualitas tutupan lahan dan gambut)	LAPAN, BIG, KLHK, ESDM	Indeks	59,54	62,5	63,5	64,5	65,5
	Genangan air		Indeks	PM	PM	PM	PM	PM
	Tutupan vegetasi		Indeks	62,00 (2019)	60,43	60,53	60,63	60,73
	Kuantitas air sungai dan estuary		Indeks	PM	PM	PM	PM	PM

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
	Kualitas badan air (permukaan dan tanah)		Indeks	Terwakili oleh Indikator 6.3.2.(a) Kualitas air permukaan sebagai air baku, dan Indikator 6.3.2.(b) Kualitas air tanah sebagai air baku				
	Kuantitas akuifer air tanah		Indeks	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan:

- a) Dengan akses Layak 89,27% dengan akses perpipaan 20,18%
- b) Dengan akses Layak 89,27% dengan akses perpipaan 20,18%
- c) Dengan akses Layak 92,89% dengan akses perpipaan 23,26%
- d) Dengan akses Layak 95,58% dengan akses perpipaan 25,83%
- e) Dengan akses Layak 98,26% dengan akses perpipaan 28,39%
- f) Dengan akses Layak 100% dengan akses perpipaan 30%

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Arah kebijakan yang terkait pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam RPJMN 2020-2024 yaitu penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dilaksanakan dengan serangkaian strategi⁷³:

- a) peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak maupun aman;
- b) peningkatan kapasitas penyelenggara air minum;
- c) pengembangan dan pengelolaan SPAM;
- d) peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air, mengakses layanan air minum perpipaan atau menggunakan sumber air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi secara swadaya, serta menerapkan pengelolaan air minum aman dalam rumah tangga;
- e) peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi;
- f) peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan;
- g) pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah;
- h) peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi; dan
- i) pengembangan kerja sama dan pola pendanaan yang inovatif.

Kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku, yang dilaksanakan dengan serangkaian strategi:

- a) strategi untuk percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi;
- b) strategi untuk peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu; dan
- c) strategi untuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya air.

Kebijakan dalam rangka optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi antara lain adalah penambahan kapasitas tampungan air, dan peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air.

Strategi untuk penambahan kapasitas tampungan air antara lain:

- a) perencanaan bendungan multiguna dengan protokol berkelanjutan;
- b) perencanaan pemanfaatan tampungan alami;
- c) rehabilitasi bendungan kritis; dan
- d) pembangunan multiguna dengan melibatkan badan usaha.

Strategi untuk peningkatan fungsi tampungan air antara lain:

⁷³ RPJMN 2020-2024, Lampiran I Bab VI

- a) pemanfaatan bendungan untuk berbagai keperluan secara terpadu seperti air baku, irigasi, dan pengendali banjir;
- b) revitalisasi danau kritis; dan
- c) pemanfaatan potensi danau untuk air baku, dan kebutuhan lainnya.

Arah kebijakan yang terkait dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup, yang dilakukan melalui serangkaian strategi⁷⁴:

- a) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- a) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kebijakan dan program yang mendukung pencapaian TPB/SDGs Tujuan 6 tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) dan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai komponen pemangku kepentingan dalam akses air minum dan sanitasi layak di daerah seluruh Indonesia. Kebijakan dan program tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing K/L terkait⁷⁵, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pertama, Program dari Kementerian PUPR dengan rencana strategis (a) membangun Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas daya tampung 68,11 m³/kapita /tahun; (b) 88% pelayanan air minum; dan (c) 85% pelayanan sanitasi.

Kedua, Program dari Kementerian Kesehatan dengan rencana strategis (a) peningkatan akses air minum aman dan perilaku hygiene, (b) penguatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), dan (c) presentasi desa stop buang air besar sembarangan (BABS) sampai 90%. Kegiatan lain yang terkait dengan pencapaian target 6.1. adalah penyehatan lingkungan (sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar dan tempat pengelolaan pangan yang memenuhi standar).

Ketiga, Program dari KLHK dengan rencana strategis (a) pengendalian pencemaran air; dan (b) pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air.

Keempat, Program dari Kementerian ESDM dalam Arah Kebijakan dalam Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan⁷⁶, dengan rencana strategis (a) percepatan penyediaan air

⁷⁴ RPJMN 2020-2024, Lampiran I Bab VII.

⁷⁵ Renstra 2020-2024 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral

⁷⁶ Dalam periode 5 tahun RPJMN 2020-2024 indikator pembangunan sumur air tanah untuk air baku ditargetkan sebesar 3.000 sumur. Namun setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kegiatan pembangunan

baku dari sumber terlindungi, dan (b) peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Berkenaan dengan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020, dampak pandemik terhadap kualitas pelayanan air minum dan sanitasi belum dapat diidentifikasi secara kuantitatif. Dampak yang diperkirakan terjadi antara lain menurunnya kinerja unit penyelenggara pelayanan air minum dan sanitasi, dan berkurangnya anggaran di daerah yang mengalami *refocusing* dalam rangka mitigasi pandemi.

Analisis dampak pandemi terhadap 26 PDAM⁷⁷ memperlihatkan adanya variasi dampak terhadap kinerja operasional PDAM terutama terhadap pendapatan, antara lain akibat tidak adanya penambahan pelanggan baru dan terganggunya pencatatan meter pelanggan. Hal tersebut berdampak pada penagihan yang menurun menjadi 70 sampai 80%. Pandemi juga berdampak pada tertundanya investasi baru untuk pengembangan. Upaya pemulihan dampak pandemi terhadap pelayanan air minum oleh PDAM antara lain melalui reduksi tarif air minum.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN SDGs Tujuan 6

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Nasional (RAN). Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari Aktor Nonpemerintah untuk Tujuan 6 SDGs diantaranya adalah:

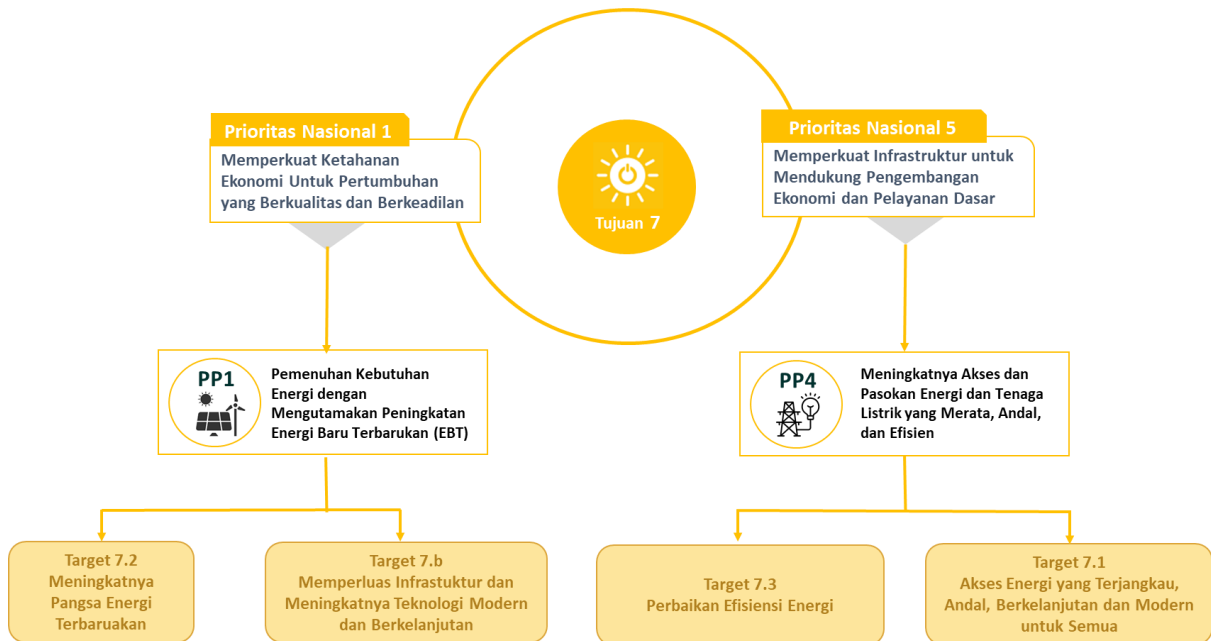
- Organisasi Kemasyarakatan, yaitu: LAZ Harapan Dhuafa, UCLG ASPAC, Wahana Visi Indonesia, Yayasan Obor Tani, IRFC Indonesia, Kemitraan, KONSEPSI, SNV Indonesia;
- Organisasi Kemasyarakatan Berbasis Agama, yaitu : Muslimat NU, BAZNAS, Aisyiyah, Islami Relief (IR) Indonesia;
- Akademi, yaitu: SDGs Hub UNDIP;
- Pelaku Bisnis, yaitu: APP Sinar Mas, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Indika Energy, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Solusi Bangun Indonesia Tbk;
- Lembaga Donor Bilateral dan Multilateral, yaitu: Bank Dunia, USAID, Bank Pembangunan Asia, DFAT (Australia), Asian Development Bank, JICA, KfW Development Bank, IUWASH Plus, USAID, UNICEF, Korean Exim Bank, KIAT.

sumur air tanah menjadi tanggung jawab penuh Kementerian PUPR, sehingga KESDM mulai tahun 2021 tidak memasukkan indikator tersebut dalam Renstra. Sedangkan untuk tahun 2020 indikator tersebut berubah menjadi eksplorasi dan pelayanan sumur pantau air tanah dengan target 570 sumur dan untuk tahun 2021 sampai 2024 indikator berubah menjadi pengembangan jaringan pemantauan air tanah (Cekungan Air Tanah/CAT) dengan target total 52 CAT.

⁷⁷ USAID IUWASH PLUS, Analisa Kondisi Keuangan PDAM selama masa pandemi COVID-19, Maret 2021.

3.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Dalam TPB/SDGs Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, terdapat 4 (empat) target yang telah diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 2 (dua) Prioritas Nasional (PN) dan 2 (dua) Program Prioritas (PP), yang dapat dilihat keterkaitannya sebagai berikut:



Gambar 3.8 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 7 Dalam RPJMN 2020-2024

Selain keempat target yang sudah memiliki angka capaian indikator-indikator SDGs seperti gambar diatas, terdapat juga target dengan indikator global yang masih dikembangkan yaitu terkait kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih. Secara lengkap, target indikator SDGs Tujuan 7 dari tahun 2021-2024 dengan *baseline* data tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
7.1 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	RPJMN 2020-2024, RKP 2022	%	99,2	~100	~100	~100	~100
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Renstra ESDM 2020-2024, RKP 2022	kWh/kapita	1.089	1.203	1.268	1.336	1.408
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Renstra ESDM 2020-2024, RKP 2021, RKP 2022	SR	673.222	1.470.506 ¹	2.410.061 ¹	1.600.384	4.010.445 ²
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	79,9	pm	pm	pm	Pm
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.								
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Renstra ESDM 2020-2024, Laporan Kinerja ESDM 2020, RKP 2022	%	11,3%	14,5	15,7	17,9	~23
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.								
7.3.1*	Intensitas energi primer	RPJMN 2020-2024, Renstra ESDM 2020-2024, Laporan Kinerja ESDM 2020	SBM/Miliar Rp	133,5	138,0 ³	136,6 ³	135,2 ³	133,8 ³
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.								
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida		pm	pm	pm	pm	pm	pm

TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang								
7.b.1*	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan (dalam watt per kapita)	RPJMN 2020-2024, RKP 2022, BPS	Watt per kapita	38,71 ⁴	44,00 ⁵	50,57 ⁵	56,55 ⁶	68,58 ⁵

Keterangan:

pm : Pre memori

1 penyesuaian dampak COVID-19

2 kumulatif 2020-2024

3 dihitung dengan menggunakan PDB konstan 2010

4 dihitung dari capaian kapasitas terpasang energi terbarukan pada RKP 2022 dan hasil sensus penduduk BPS 2020

5 dihitung dari target kapasitas terpasang energi terbarukan pada RKP 2022 dan proyeksi penduduk BPS 2015-2045

6 dihitung dari target tambahan kapasitas terpasang energi terbarukan pada RPJMN 2020-2024 dan proyeksi penduduk BPS 2015-2045

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, telah ditetapkan lima target yang diukur melalui tujuh indikator. Lima arah kebijakan dan strategi pada RPJMN 2020-2024 dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, andal, efisien, dan berkelanjutan, dalam rangka pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, ditempuh melalui:
 - a. Meningkatkan pemanfaatan EBT antara lain panas bumi, air, surya, dan bioenergi;
 - b. Mengembangkan mini/micro grid berbasis energi bersih;
 - c. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi penyimpanan energi (*energy storage system*) termasuk baterai; serta
 - d. Memanfaatkan energi surya atap (*solar rooftop*) dan PLTS terapung (*floating solar power plant*) beserta pengembangan industri sel surya dalam negeri;
2. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, melalui:
 - a. Mengembangkan *Energy Service Company* (ESCO);
 - b. Memperluas, merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas sistem transmisi dan distribusi;
 - c. Mengembangkan sistem manajemen informasi dan kontrol data;
 - d. Mengembangkan dan pemanfaatan teknologi jaringan cerdas (*smart grid*); dan
 - e. Memanfaatkan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi (*high efficiency and low emission/HELE*).
3. Melakukan penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, ditempuh melalui:
 - a. Melakukan pemenuhan tenaga listrik di kawasan-kawasan prioritas;
 - b. Menyediakan bantuan pasang baru listrik untuk rumah tangga tidak mampu;
 - c. Memberikan dukungan penyediaan energi primer (gas dan batubara) untuk listrik;
 - d. Meningkatkan infrastruktur gas bumi, khususnya seperti jaringan pipa transmisi gas dan distribusi non-pipa khususnya LNG receiving terminal;
 - e. Membangun jaringan gas perkotaan, LPG (termasuk DME), dan kompor bersih berbasis listrik;
 - f. Meningkatkan kemampuan rekayasa nasional untuk energi dan ketenagalistrikan yang didukung industri dalam negeri; dan
 - g. Melakukan pengembangan infrastruktur pendukung kendaraan bermotor listrik.
4. Meningkatkan tata kelola energi dan ketenagalistrikan, ditempuh melalui:
 - a. Meningkatkan tugas dan fungsi kelembagaan di sektor ketenagalistrikan;

- b. Melakukan penguatan independensi operator sistem transmisi; dan
 - c. Mendorong kebijakan harga/tarif energi dan penerapannya sehingga mencapai harga keekonomian secara bertahap.
5. Mengembangkan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, ditempuh melalui:
- a. Mengembangkan subsidi tepat sasaran melalui subsidi langsung dan realokasi belanja;
 - b. Menerapkan penyesuaian tarif listrik dan harga energi;
 - c. Memanfaatkan pembiayaan dengan persyaratan yang ringan dan wajar, alternatif instrumen dan *leverage asset*; dan
 - d. Mengembangkan skema pendanaan yang sesuai dan berkesinambungan.

RPJMN 2020-2024 telah menetapkan beberapa Proyek Prioritas (*Major Project*) yang secara langsung akan mendukung pencapaian Tujuan ke-7 dari TPB yaitu:

- i. Pembangunan energi terbarukan *green fuel* berbasis kelapa sawit;
- ii. Infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta Sambungan Rumah;
- iii. Pipa gas bumi Trans-Kalimantan (2.219 KM);
- iv. Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA; dan
- v. Pembangunan dan pengembangan kilang minyak.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, program prioritas pembangunan infrastruktur yang terkait dengan TPB 7 dilaksanakan melalui pemberian stimulus tarif listrik untuk perlindungan sosial dan ekonomi, mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti pembangkit, jaringan transmisi, jaringan gas, dan kilang minyak.

Upaya mencapai target penuntasan akses tenaga listrik dilakukan melalui perluasan jaringan eksisting, membangun sistem jaringan dan pembangkit dengan energi berbasis potensi daerah untuk sistem *isolated* di daerah 3T serta melalui pendistribusian Tabung Listrik (Talis)/Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL). Pemerintah menyediakan stimulus tarif listrik untuk pengguna tenaga listrik sebagai upaya menjaga tingkat konsumsi listrik masyarakat. Selain itu, pemerintah juga peningkatan kualitas konsumsi tenaga listrik melalui promosi penggunaan kompor listrik dan pengembangan kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya, serta perbaikan kualitas pelayanan dengan penurunan durasi pemadaman dan susut juga pengembangan pencatat meter cerdas (*smart metering*).

Permasalahan umum dalam upaya peningkatan porsi energi EBT dalam bauran energi akibat dampak COVID-19 adalah rendahnya harga energi fosil dan terganggunya rantai pasok pembangunan energi terbarukan sehingga banyak pembangunan pembangkit EBT menjadi terhambat. Upaya percepatan pencapaian porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional dilakukan melalui penguatan rantai pasok pelaksanaan proyek pembangkit

tenaga listrik berbasis EBT. Pemerintah juga mendorong pengembangan sistem penyimpan energi (*energy storage system*) dan jaringan pintar (*smart grid*) untuk mendorong penetrasi pembangkit terbarukan lebih banyak. Selain itu, upaya penanggulangan dampak COVID-19 pada sub-sektor EBT dilakukan melalui skema stimulus pendanaan, insentif pajak, dan percepatan proyek EBT yang bersifat desentralisasi dan padat karya di daerah. Stimulus pendanaan dapat berupa penangguhan angsuran pinjaman untuk proyek aneka EBT, penurunan suku bunga pinjaman proyek aneka EBT, penyesuaian mekanisme pengadaan IPP proyek aneka EBT, dan pengenaan *surcharge* BBM jenis Minyak Solar dan Pemberian subsidi melalui APBN kepada BBN jenis Biodiesel. Sedangkan insentif pajak berupa penangguhan dan penghapusan PPN bagi pengembang aneka EBT dan penangguhan dan penghapusan PPh Badan bagi pengembang aneka EBT. Pembangunan PLTS atap (kantor instansi pemerintah, industri perikanan (*cold storage*), dll), PLTMH, dan PLTS *off-grid* didorong untuk percepatan proyek EBT yang bersifat desentralisasi dan padat karya di daerah.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN SDGs Tujuan 7

Pencapaian target-target indikator sasaran pada RAN SDG Tujuan 7 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, Aktor Nonpemerintah baik dari badan usaha, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan organisasi mitra pembangunan dapat berkontribusi aktif dalam pencapaian target-target tersebut sesuai dengan rencana kegiatan masing-masing institusi.

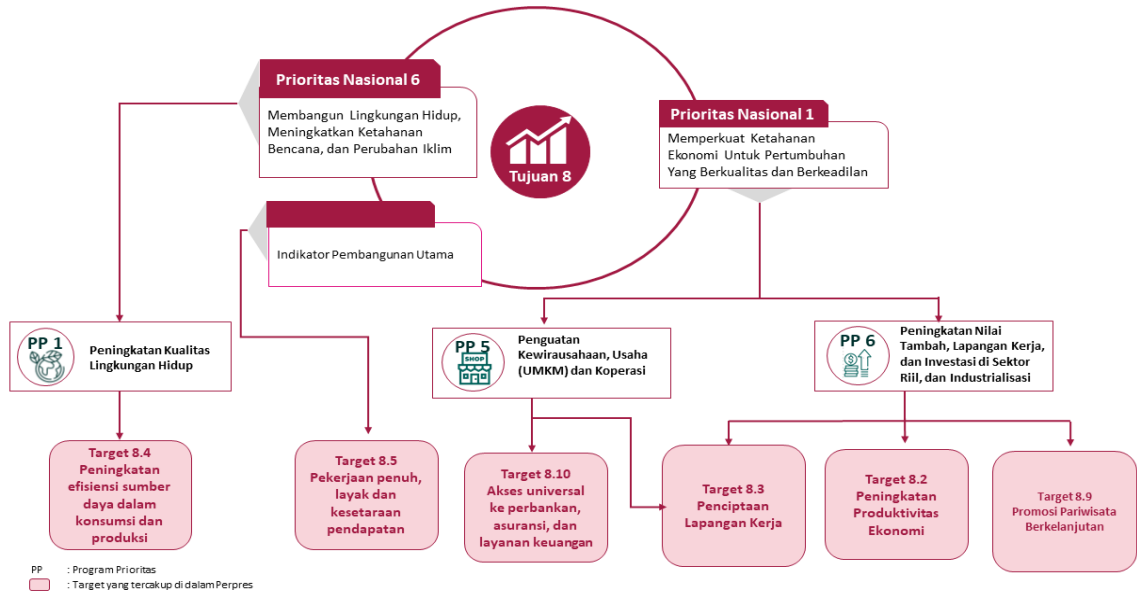
Berikut adalah beberapa contoh institusi Aktor Nonpemerintah yang berkontribusi dalam mengisi Rencana Aksi Nasional (RAN) SDG Tujuan 7:

- Badan Usaha: PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), PT. ThorCon Power Indonesia, APP Sinar Mas, PT Sinar Mas Land, PT PAN Brothers Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Semen Indonesia , PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT Trisula Textile Industries Tbk, PT Bank BRI Tbk, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk, PT Transkon Jaya Tbk,
- Organisasi Kemasyarakatan dibidang energi: *Indonesian Institute for Energy Economics (IIEE)*, *Institute for Essential Services Reform (IESR)*, dan Energi Bersih Indonesia (Enerbi)
- Organisasi Mitra Pembangunan: *Global Green Growth Institute (GGGI)*.

Rencana kegiatan masing-masing aktor nonpemerintah sangat beragam mulai kegiatan pembangun fisik fasilitas energi terbarukan (Target 7.2) seperti yang dilakukan oleh badan usaha (Pertamina, PLN, dan ThorCon) sampai kepada kegiatan *capacity building* tentang konservasi energi disektor pendidikan (Target 7.3) seperti yang dilakukan oleh IIEE. Disadari bahwa masih banyak aktor-aktor nonpemerintah yang dalam rencana kegiatannya kegiatannya berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian target-target pada SDG Tujuan 7 namun belum dimasukkan dalam lampiran dokumen ini. Beberapa program lain yang dilakukan oleh aktor nonpemerintah bisa dilihat secara rinci pada Matriks 3 dan Matriks 4 pada lampiran RAN SDGs 2020-2024.

3.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam TPB/SDGs Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, terdapat 6 (enam) target yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Keenam target tersebut, terbagi ke dalam 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN) dan 3 (tiga) program Prioritas (PP). Kaitan antara target dalam TPB dengan RPJMN dijelaskan oleh gambar berikut:



Gambar 3.9 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 8 Dalam RPJMN 2020-2024

Selain keenam target di atas, terdapat 4 (empat) target indikator lainnya pada Tujuan 8. Keempat indikator ini juga memiliki target pencapaian indikator SDGs dari tahun 2021-2024 dengan menggunakan *baseline* data pada tahun 2020. Informasi tersebut dalam dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.8 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 8
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang								
8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Badan Pusat Statistik	%	-3,15	3,0	4,4-4,9	4,2-5,1	4,3-5,4
8.1.1.(a)	PDB per kapita	Badan Pusat Statistik	juta rupiah	56,93	61,9	66,5-66,8	71,2-72,3	76,2-78,2
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.								
8.2.1	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Badan Pusat Statistik	%	-1,84	2,0-2,5	2,5-4,0	3,5-4,3	3,7-4,5
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Badan Pusat Statistik	%	60,47	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	● Laki-Laki	Badan Pusat Statistik	%	57,29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	● Perempuan	Badan Pusat Statistik	%	65,35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	● Pertanian	Badan Pusat Statistik	%	88,57	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	● Manufaktur	Badan Pusat Statistik	%	44,31	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	● Jasa-Jasa	Badan Pusat Statistik	%	50,46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Badan Pusat Statistik	%	24,40	26,5	27,8	29,3	30,8
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.								
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Kementerian Lingkungan Hidup		2	2	2	2	2
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	Rupiah/jam	17.696	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	%	7,07	5,9-6,5	5,5-6,3	4,0-4,6	3,6-4,3
	• Laki-laki	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	%	7,46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	• Perempuan	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	%	6,46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	• Usia 15-24	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	%	20,46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	• Usia 25+	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	%	4,61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8.5.2.(a)*	Persentase setengah pengangguran.	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	%	10,19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.								
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	%	24,28	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.								
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	%	3,25	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	• Laki-Laki		%	3,34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	• Perempuan		%	3,16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	• Usia 10-12		%	3,60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	• Usia 13-14		%	3,34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	• Usia 15-17		%	2,85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.								
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Kementerian Ketenagakerjaan	Perusahaan	2.317	3.960	4.356	4.792	5.271
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	Badan Pusat Statistik (Neraca Satelit Pariwisata Nasional)	%	4,00	4,2	4,3	4,4	4,5
	• Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB		%	4,00				
	• Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB		%	-16,67				
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Badan Pusat Statistik	Juta Orang	4,05	4,0-7,0	8,5-10,5	13,0-14,5	16,0-17,0
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata	Juta Orang	198,24	180-220	260-280	300-315	320-335

TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Kementerian Pariwisata	Miliar USD	3,46	4,8-8,5	10,6-11,31	16,9-18,9	21,5-22,9
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.								
8.10.1*	Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia	Unit	52,95	56,3	56,7	57,1	57,5
8.10.2*	Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia	Unit	17,67	15,4	15,3	15,3	15,3
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Bank Indonesia (Statistik Sistem Keuangan Indonesia)	%	19,67	20,3	20,9	21,4	22,0
8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan <i>the Global Jobs Pact of the International Labour Organization</i>.								
8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.		Dokumen	1	1			

Keterangan:

- (1) Angka 2019 dan 2020 adalah angka realisasi, kecuali indikator 8.9.1 angka tahun 2019 dan 2020 adalah outlook. Angka 2019, jika dihitung dari Sakernas, dihitung ulang menggunakan hasil *backcasting* berdasarkan penimbang hasil proyeksi penduduk SUPAS 2015.
- (2) Angka 2021 adalah *outlook* atau target RKP 2021/RPJMN, 2022 target sesuai RKP 2022, 2023-2024 target RPJMN 2020-2024.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Dalam pelaksanaan TPB, fokus dalam Tujuan 8 adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menyediakan kesempatan kerja yang layak dan melindungi hak-hak pekerja. Target-target dari Tujuan 8 meliputi upaya memastikan pertumbuhan ekonomi per kapita, meningkatkan produktivitas ekonomi, mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif dan bernilai tambah tinggi, kebijakan penciptaan lapangan kerja yang layak, meningkatkan kontribusi sektor formal dalam perekonomian nasional, meningkatkan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mendorong UMKM untuk naik kelas, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan.

Dalam upaya mencapai tujuan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2030, telah ditetapkan beberapa arah kebijakan dan strategi pada RPJMN 2020-2024, secara khusus terkait: 1) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi; (2) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. (3) Peningkatan produktivitas dan daya saing; (4) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya terkait peningkatan pendalaman sektor keuangan; dan (5) Pengembangan sektor pariwisata. Secara rinci bisa dijabarkan sebagai berikut.

Kebijakan yang terkait dengan penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi akan dilakukan dengan beberapa strategi:

- a. Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar;
- b. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
- c. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
- d. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; dan
- e. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

Selanjutnya langkah dan upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi akan dilakukan sebagai berikut

- a. Meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
- b. Meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
- c. Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata;
- d. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
- e. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
- f. Mengembangkan industri halal.

Program pemerintah dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
- b. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
- c. Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi;
- d. Pengembangan budaya dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional;
- e. Penguatan pendampingan pembangunan; dan
- f. Pengelolaan manajemen talenta nasional.

Kebijakan yang terkait dengan sektor keuangan adalah pendalaman sektor keuangan dengan beberapa pilihan strategi:

- a. Peningkatan akses keuangan masyarakat (inklusi keuangan);
- b. Perluasan inovasi produk keuangan dengan pemanfaatan teknologi;
- c. Pengembangan infrastruktur sektor keuangan;
- d. Penempatan devisa hasil ekspor (DHE) pada sistem keuangan di dalam negeri; dan
- e. Harmonisasi dan penguatan kebijakan sektor keuangan.

Terakhir, dalam upaya pengembangan sektor pariwisata, pemerintah telah mencanangkan beberapa strategi yang mampu membuat sektor ini tumbuh lebih cepat. Strateginya antara lain:

- a. Pengembangan destinasi wisata;
- b. Pengembangan kewirausahaan di kawasan pariwisata;
- c. Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata;
- d. Peningkatan nilai tambah pariwisata melalui peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan;
- e. Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP): Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai;
- f. Pengembangan 8 destinasi pariwisata: Batam-Bintan, Bukittinggi-Padang, Bandung-Halimun-Ciletuh, Banyuwangi, Sambas-Singkawang, Derawan-Berau, Toraja-Makassar-Selayar, dan Biak-Teluk Cendrawasih;
- g. Melakukan diversifikasi jenis pariwisata;
- h. Meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata; dan
- i. Meningkatkan peran praktik berkelanjutan pada industri pengolahan.

Kebijakan dan program yang mendukung pencapaian TPB/SDGs Tujuan 8 juga menjadi prioritas berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) dan mengikutsertakan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama dengan program pemerintah. Beberapa K/L lain yang memiliki program yang terkait langsung dengan upaya mencapai TPB Tujuan 8 adalah

Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Tenaga Kerja.

Kemenko Perekonomian memiliki program khusus yang terkait dengan Tujuan 8.1 dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan PDB per kapita, antara lain: a) Koordinasi kebijakan pengembangan industri, b) koordinasi kebijakan bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan. Selain itu, Kemenko Perekonomian juga memiliki kebijakan khusus yang terkait dengan indikator 8.5.1 terkait upah rata-rata pekerja. Strategi kebijakan yang akan dilakukan sepanjang periode 2020-2024 adalah a) Koordinasi kebijakan Cipta Kerja dan b) Koordinasi kebijakan harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing yang terkait dengan Tujuan 8, Kementerian Perindustrian juga akan melaksanakan berbagai kegiatan yang akan meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri. Khususnya kebijakan-kebijakan yang akan mengoptimalkan penggunaan teknologi 4.0 untuk industri nasional. Selain itu, Kemenperin juga berencana untuk melakukan pengembangan wilayah industri dalam negeri.

Kementerian Koperasi dan UKM dalam periode 2020-2024 akan melakukan pengembangan program kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi. Khususnya program-program yang terkait dengan: a) pengembangan dan pembaruan perkoperasian, b) pengembangan kualitas SDM, c) penguatan rantai pasok usaha mikro, d) optimalisasi proses pendampingan, dan e) memberikan konsultasi bisnis secara menyeluruh.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk: a) pelatihan bidang industri, b) pengembangan model dan inkubasi bisnis, c) pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja, serta d) program pembinaan ketenagakerjaan.

Terakhir, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga akan melaksanakan beberapa kegiatan untuk mengembangkan kualitas SDM di sektor pariwisata. Program-program yang akan dilakukan antara lain: a) pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata, b) program pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, c) pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif, d) peningkatan komunikasi pemasaran, e) pemasaran pariwisata regional, f) pemasaran ekonomi kreatif, g) pengembangan wisata alam, serta h) pengembangan penyelenggaraan. Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh K/L terkait secara detail dan terkait dengan upaya mencapai TPB/SDGs Tujuan 8 bisa dilihat pada matriks 2.

B. Upaya pemulihan Dampak COVID-19

COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu dari sisi ketenagakerjaan, semakin banyak pekerja yang harus mengalami pemutusan kerja. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang sangat besar bagi sektor pariwisata. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, ada beberapa program khusus yang terkait dengan pemulihan pandemi COVID-19 adalah:

1. Pemulihan usaha koperasi dan UMKM, melalui a) pemberian pinjaman modal, b) keringanan kredit, c) pendampingan pemulihan usaha, d) pemberian insentif pajak, e)

peningkatan akses koperasi dan UMKM, f) pendampingan untuk mengakses saluran pembiayaan, dan g) peningkatan kemitraan.

2. Pemulihan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui a) pemulihan pasar wisatawan nusantara melalui dukungan insentif dan pengaturan libur nasional, b) pemulihan pasar wisatawan mancanegara (wisman) melalui misi penjualan dan paket tur, c) dukungan penyelenggaraan acara/event nasional dan internasional, d) percepatan pembangunan infrastruktur amenities, aksesibilitas, dan atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif, e) penerapan standar kebersihan dan penerapan, f) pemulihan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pembiayaan, kerjasama rantai pasok, dan pelatihan, dan g) peningkatan pertumbuhan usaha kreatif.
3. Peningkatan investasi, melalui a) percepatan integrasi sistem perizinan, b) percepatan realisasi investasi skala besar, c) penyediaan layanan *debottlenecking* dan *aftercare* investasi, dan d) perluasan *positive list* investasi.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN SDGs Tujuan 8

Peranan aktor non pemerintah menjadi sangat krusial dalam memastikan pencapaian RAN SDGs bisa diperoleh secara optimal. Hal ini juga terkait dengan pelaksanaan prinsip inklusif, dimana semua pihak diharapkan untuk mampu mendukung pemerintah dalam menapai target-target di TPB. Secara umum, ada beberapa program yang akan dilakukan oleh aktor nonpemerintah yang relevan dengan pencapaian Tujuan 8, diantaranya adalah

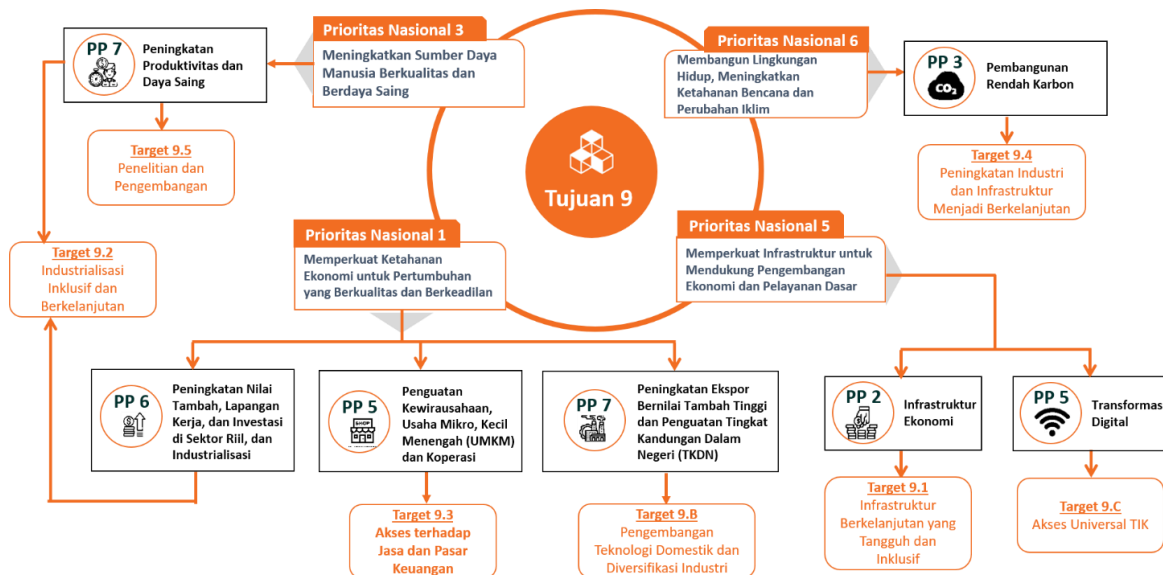
- Organisasi kemasyarakatan: LAZISMU, LAZ Harapan Duafa, BAZNAS Pusat, BAZNAS (Basis) DKI Jakarta, PEKKA, JARAK, PAACLA, LPKP, SANTAI, PKPA, STAPA center, GAPKI, YKAI, eRKA, Serikat Buruh Migran Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
- Akademisi: SDGs Hub Universitas Indonesia, SDGs Center Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, SDGs Center Universitas Negeri Gorontalo; dan
- Filantropi dan Bisnis : IGCN dan Mitra , PT Vale Indonesia , APP Sinarmas , Pertamina, Sinar Mas Land , IBCSD , PT Traskon Jaya , PT Austindo Nusantara Jaya, PT Astra Internasional, Sintesa Group, PT industri jamu dan Farmasi Sido Muncul, PT SMART Tbk, PT PAN Brothers Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Semen Indonesia, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT Trisula Textile Industries Tbk, PT Bank BRI Tbk, PT Sinar Mas Multifinance, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, PT. Victoria Insurance, Tbk, PT Medikaloka Hermina Tbk, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT Panin Securitas Tbk, PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA, UOB kay Hian Sekuritas.

Sebagai contoh, Serikat Buruh Migran Indonesia yang melakukan pemberdayaan ekonomi untuk pekerja migran melalui koperasi di 22 Kabupaten di Indonesia. Dari sisi akademisi, SDGs Hub UI berencana untuk menyusun kajian yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dengan ekonomi kreatif dalam menyambut *International Year of Creative Economy 2021*. Dari sisi filantropi dan Bisnis terdapat contoh program dari *Sintesa Group* mengenai pengembangan portfolio bisnis untuk kontribusi SDGs melalui *new business model*. Beberapa program lain yang dilakukan oleh aktor nonpemerintah bisa dilihat secara rinci pada Matriks 3 dan Matriks 4 pada lampiran RAN SDGs 2020-2024.

3.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

TPB/SDGs Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang memiliki peran sangat penting dalam mendorong kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor industri mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan mendorong peningkatan inovasi. Kinerja sektor industri suatu negara sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Selanjutnya, inovasi menjadi syarat yang menjamin sektor industri terus mampu menjadi motor perekonomian secara berkesinambungan.

Dalam TPB/SDGs Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, terdapat 7 (tujuh) target yang telah diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 4 (empat) Prioritas Nasional (PN) dan 6 (enam) Program Prioritas (PP), yang dapat dilihat keterkaitannya sebagai berikut:



Gambar 3.10 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 9 Dalam RPJMN 2020-2024

Rincian angka target pencapaian indikator SDGs dari tahun 2021-2024 dengan baseline data tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.9 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 9
Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

TUJUAN 9 INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, DAN INOVASI								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.								
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Badan Pusat Statistik (BPS): Potensi Desa (PODES).	Km					
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Persen	92,8 (2019)	93	94	95	97
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Km	1.461	+242 (2.184)	+200 (2.384)	+100 (2.484)	2.500
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	Kementerian Perhubungan	Km	6.357 (6.221)	6.463	6.633	6.768	7.255
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.	1. Kementerian Perhubungan; 2. Badan Pusat Statistik (BPS).	Orang	N/A				
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	1. Kementerian Perhubungan; 2. Badan Pusat Statistik (BPS); 3. PT. Angkasa Pura	Bandara	215 (2019)	12 (berlanjut)	16	19	21
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan	Kementerian Perhubungan	Pelabuhan Penyeberangan	24 (2019) 286 (2019)	+6 (36)	+0 (36)	+0 (36)	36

TUJUAN 9 INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, DAN INOVASI								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	19,9	19,8	19,9	20,40	21,00
	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	-2,93	3,5	5,3	7,5	8,10
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Persen	13,61	14,0	15,0	15,3	15,7
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.								
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri terhadap total nilai tambah industri	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	18,5 (2019)	18,80	19,3	19,6	20,0
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	2,4 (2019)	2,80	3,4	4,1	5
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.								
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Badan Pusat Statistik	Tingkat emisi CO2 (ton)	3.119.594				

TUJUAN 9 INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, DAN INOVASI								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri	Kementerian PPN/Bappenas: AKSARA	Persen	0,6 (2019)	2,3	2,5	2,6	2,9
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri	Kementerian PPN/Bappenas: AKSARA	Ton CO2/Miliar Rp	31,0	29,2	28,5	27,7	27,0
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelajaran publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.								
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	1. Kementerian Riset Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional; 2. Badan Pusat Statistik; 3. Kementerian Keuangan; 4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Persen	0,25 (2019)	0,30	0,34	0,38	0,42
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.	1. Kementerian Riset Teknologi / Badan Riset Inovasi Nasional; 2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 4. Badan Pusat Statistik.	Jumlah SDM Iptek per 1 juta penduduk	1.197	1.163	1.188	1.207	1.242

TUJUAN 9 INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, DAN INOVASI								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>Baseline</i>) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
9.5.2.(a)	Proporsi sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).	1. Kementerian Riset Teknologi / Badan Riset Inovasi Nasional; 2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Persen	13,73 (2019)	14,55	14,96	17,48	20,00
9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diverfikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.								
9.b.1.(a)	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	21,38	10,79	11,9	12,5	13
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.								
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i>	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 2. Badan Pusat Statistik	Persen	77,70	98,5	99	99,5	100

A. Arah kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Arah kebijakan yang terkait dengan **pembangunan infrastruktur untuk konektivitas** dalam RPJMN 2020-2024 yaitu infrastruktur ekonomi dan transformasi digital yang dilaksanakan dengan serangkaian strategi:

- a) meningkatkan kualitas jalan dan ketersediaan jaringan jalan;
- b) memprioritaskan pembangunan konektivitas kereta api;
- c) melakukan pembangunan konektivitas transportasi laut untuk mendukung kinerja logistik nasional;
- d) meningkatkan bandara dan kapasitas angkut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas daerah 3T;
- e) pengurangan praktik pembebasan berlebih di jalan dan mendukung keterpaduan layanan transportasi antarmoda;
- f) mengoptimalisasi dana *Universal Service Obligation* (USO) dalam menyediakan dan menjaga kualitas layanan akses telekomunikasi dan internet;
- g) menyediakan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat;
- h) melakukan penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar hingga ke kecamatan-kecamatan, dengan prioritas pada kawasan pariwisata strategis, kawasan industri, perguruan tinggi;
- i) memperluas pemanfaatan TIK pada sektor-sektor pertumbuhan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan;
- j) meningkatkan kemandirian industri dan SDM TIK dalam negeri; dan
- k) mengadopsi pemanfaatan teknologi global bersifat lintas sektor dalam proses perencanaan, pemantauan, maupun pelaksanaan kinerja.

Kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan industri yang inklusif dan berkelanjutan adalah (i) penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi, (ii) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, (iii) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), (iv) peningkatan produktivitas dan daya saing, dan (v) pembangunan rendah karbon yang dilaksanakan dengan serangkaian strategi:

- a) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
- b) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*;
- c) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
- d) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan *smelter* dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
- e) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata;
- f) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
- g) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan;
- h) mengembangkan industri halal;

- i) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
- j) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor;
- k) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri;
- l) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global;
- m) meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA) / Free Trade Agreement (FTA) / Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi;
- n) meningkatkan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi;
- o) melakukan reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
- p) mengembangkan industri hijau.
- q) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0

Kebijakan yang terkait dengan **inovasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan** adalah peningkatan produktivitas dan daya saing dengan serangkaian strategi:

- a) mengembangkan perguruan tinggi sebagai produsen Iptek-inovasi dan pusat keunggulan (*center of excellence*)
- b) meningkatkan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri
- c) memanfaatkan Iptek dan inovasi di bidang-bidang fokus RIRN 2017-2045 untuk pembangunan berkelanjutan
- d) mengembangkan *research power-house*
- e) menciptakan ekosistem inovasi
- f) meningkatkan kualitas belanja litbang

Untuk mendukung pencapaian target dan indikator tersebut, maka pemerintah telah menetapkan arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 yang berkaitan dengan masing-masing indikator sebagai berikut:

Target 9.1 Membangun infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas dan andal

Untuk mencapai sasaran 9.1, yaitu membangun infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas dan andal, arah kebijakan RPJMN 2020-2024 yang selaras antara lain:

1. Meningkatkan konektivitas jalan, ditempuh melalui:
 - a. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan.
 - b. Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah.
2. Meningkatkan konektivitas kereta api, ditempuh melalui:
 - a. Pengembangan KA Makassar-Parepare dan KA kecepatan tinggi Pulau Jawa.
 - b. Pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian prasarana dan fasilitas perkeretaapian.
3. Meningkatkan konektivitas laut, ditempuh melalui:
 - a. Standarisasi kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan pada sejumlah pelabuhan utama meliputi tingkat kedalaman pelabuhan, panjang dermaga, dan kinerja bongkar muat.

- b. Membangun koordinasi kelembagaan antaroperater pada tujuh pelabuhan utama (Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Kijing, Tanjung Perak, Makassar New Port, Bitung, dan Sorong).
4. Meningkatkan konektivitas udara, ditempuh melalui:
 - a. Peningkatan bandara dan kapasitas angkut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas daerah 3T.
5. Meningkatkan konektivitas darat, ditempuh dengan:
 - a. Mengurangi praktik pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) melalui penyelenggaraan jembatan timbang yang terintegrasi dengan penyelenggaraan jalan (skema KPBU-AP).
 - b. Mendorong keterpaduan layanan transportasi antarmoda dengan menyediakan angkutan bus yang terhubung dengan simpul-simpul transportasi serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan

Untuk mencapai sasaran 9.2, yaitu mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 yang selaras antara lain:

1. Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, ditempuh dengan:
 - a. Meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir.
 - b. Meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan *smelter* dan kawasan industri terutama di luar Jawa.
 - c. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi termasuk reformasi ketenagakerjaan.

Target 9.3. Meningkatkan akses industri dan usaha kecil terhadap jasa keuangan

Untuk mencapai sasaran 9.3, yaitu meningkatkan akses industri dan usaha skala kecil terhadap jasa keuangan, arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 yang selaras antara lain:

1. Pendalaman sektor keuangan, baik konvensional maupun syariah, melalui:
 - a. Peningkatan akses keuangan masyarakat (inklusi keuangan).
 - b. Perluasan inovasi produk keuangan dengan pemanfaatan teknologi.
 - c. Pengembangan infrastruktur sektor keuangan.
 - d. Penempatan devisa hasil ekspor (DHE) pada sistem keuangan dalam negeri.

Target 9.4. Meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar berkelanjutan

Untuk mencapai sasaran 9.4, yaitu meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar berkelanjutan, arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 yang selaras antara lain:

1. Pengembangan industri hijau, melalui:
 - a. Konservasi dan audit penggunaan energi pada industri.
 - b. Penerapan modifikasi proses dan teknologi.
 - c. Manajemen limbah industri.

Target 9.5. Menguatkan riset ilmiah dan kapabilitas teknologi sektor industri

Untuk mencapai sasaran 9.5, yaitu menguatkan riset ilmiah dan kapabilitas teknologi sektor industri, arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 yang selaras antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing, ditempuh melalui:
 - a. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri.
 - b. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas.
 - c. Peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi.

Target 9.b. Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi

Untuk mencapai sasaran 9.b, yaitu mendukung pengembangan teknologi domestik, riset, dan inovasi, arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 yang selaras antara lain:

1. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui:
 - a. Meningkatkan diversifikasi nilai tambah dan daya saing produk ekspor dan jasa.
 - i. Peningkatan ekspor produk industri yang lebih kompleks termasuk yang berteknologi menengah dan tinggi.
 - ii. Penguatan platform informasi ekspor dan impor yang mencakup informasi pasar, regulasi dan prosedur, serta insentif dan advokasi termasuk tentang kerjasama bilateral dan multilateral.
 - b. Meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor, dengan cara:
 - i. Pembiayaan ekspor dan impor.
 - ii. Penguatan skema kerjasama *business-to-business*.
 - c. Mengelola impor, yang disinergikan dengan strategi peningkatan TKDN dan penggunaan produk dalam negeri, dengan cara:
 - i. Pengembangan pemasok komponen.
 - ii. Peningkatan kualitas barang dan jasa dalam negeri untuk pengadaan industri dan pemerintah.
 - d. Meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global, dengan cara:
 - i. Memberikan insentif fiskal terhadap bahan baku melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Target 9.c. Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi

Untuk mencapai sasaran 9.c, yaitu meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 yang selaras antara lain:

1. Mengembangkan infrastruktur dan ekosistem TIK Perkotaan, ditempuh dengan:
 - a. Menggelar infrastruktur jaringan tetap pitalebar untuk perkotaan melalui pemberian kemudahan perijinan, peningkatan kapasitas industri lokal pendukung, pengembangan layanan/aplikasi/konten yang mencerdaskan dan sesuai kebutuhan masyarakat perkotaan.
2. Menuntaskan infrastruktur TIK, ditempuh dengan:

- a. Optimalisasi dana *Universal Service Obligation* (USO) dalam menyediakan dan menjaga kualitas layanan akses telekomunikasi dan internet.
- b. Penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat.
- c. Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar hingga ke kecamatan-kecamatan dengan prioritas pada kawasan pariwisata strategis, kawasan industri, dan perguruan tinggi.
- d. Penataan alokasi spektrum frekuensi.
- e. Pengembangan jaringan intra pemerintah.
- f. Mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur pasif yang dapat digunakan secara berbagi-pakai.

Kebijakan dan program yang mendukung pencapaian TPB/SDGs Tujuan 9 tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) dan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai komponen pemangku kepentingan pembangunan sistem pangan dan kesehatan masyarakat di daerah seluruh Indonesia. Kebijakan dan program tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing K/L terkait, khususnya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Di Kementerian PUPR dalam program Infrastruktur Konektivitas dengan sasaran meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing. Kegiatan pada program ini yang terkait langsung dengan pencapaian target 9.1 adalah (i) pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan tol dan (ii) pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol.

Di Kementerian Perhubungan dalam program Infrastruktur Konektivitas dengan sasaran terwujudnya konektivitas nasional. Kegiatan pada program ini yang terkait langsung dengan pencapaian target 9.1 adalah (i) infrastruktur konektivitas transportasi darat, (ii) infrastruktur konektivitas transportasi perkeretaapian, (iii) infrastruktur konektivitas transportasi laut, dan (iv) infrastruktur konektivitas transportasi udara.

Di Kementerian Perindustrian dalam program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran meningkatnya peran industri nonmigas dalam perekonomian nasional. Kegiatan pada program ini yang terkait langsung dengan pencapaian target 9.2, target 9.3 dan target 9.b adalah (i) penumbuhan dan pengembangan industri maritim, alat transportasi dan alat pertahanan, (ii) penumbuhan dan pengembangan industri elektronika dan telematika, (iii) penumbuhan dan pengembangan industri permesinan dan alat mesin pertanian, (iv) penumbuhan dan pengembangan industri logam, (v) penumbuhan dan pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan, (vi) penumbuhan dan pengembangan industri makanan, hasil laut dan perikanan, (vii) penumbuhan dan pengembangan industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar, (viii) penumbuhan dan pengembangan industri tekstil, kulit dan alas kaki, (ix) penumbuhan dan pengembangan industri kimia hilir dan farmasi, (x) penumbuhan dan pengembangan industri kimia hulu, (xi) penumbuhan dan pengembangan industri semen, keramik dan pengolahan bahan galian nonlogam, (xii) penumbuhan dan

pengembangan industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur, (xiii) penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah kimia, sandang, kerajinan dan industri aneka, (xiv) penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika dan alat angkut, (xv) peningkatan ketahanan dan iklim usaha industri, (xvi) pengembangan akses industri internasional dan (xvii) pengembangan wilayah industri.

Dalam program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan sasaran meningkatkan tenaga kerja industri yang kompeten. Kegiatan pada program ini yang terkait langsung dengan pencapaian target 9.2 adalah peningkatan kualitas SDM industri.

Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Pendidikan Vokasi dengan sasaran terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri. Kegiatan pada program ini yang terkait langsung dengan pencapaian target 9.2 adalah (i) pembinaan SMK dan pembinaan kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri dan (ii) pembinaan pendidikan tinggi vokasi dan profesi dan pembinaan kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri.

Dalam program Pendidikan Tinggi dengan sasaran meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Kegiatan pada program ini yang terkait langsung dengan pencapaian target 9.5 adalah (i) peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan serta pengembangan kelembagaan dan (ii) peningkatan kualitas sumber daya.

Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dengan sasaran terlaksananya inventarisasi GRK dan verifikasi dan registri aksi mitigasi tingkat nasional dan sub nasional. Kegiatan pada program ini yang terkait langsung dengan pencapaian target 9.4 adalah inventarisasi gas rumah kaca serta monitoring, pelaporan dan verifikasi.

Di Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan sasaran meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau. Kegiatan pada program ini yang terkait langsung dengan pencapaian target 9.c adalah (i) penyediaan BTW 4G di 9.113 desa 3T, (ii) penyediaan internet seluler 4G oleh operator di 3.435 desa non 3T dan (iii) akses internet.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Sejak awal tahun 2020 pandemi virus korona melanda seluruh negara di dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia. Situasi pandemi mengakibatkan perputaran aktivitas perekonomian global terhenti secara total selama beberapa waktu. Sampai saat ini pun perekonomian global masih berada di tengah masa pandemi dan sedang berupaya untuk keluar dari situasi tersebut melalui vaksinasi. Dalam konteks TPB, khususnya Tujuan 9 tentang infrastruktur, industri dan inovasi, muncul kebutuhan baru untuk memasukkan konteks ancaman yang bersifat global seperti pandemi ini ke dalam penetapan sasaran.

Konektivitas global yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menciptakan kondisi dimana pandemi selanjutnya akan semakin mudah terjadi. Untuk itu, pembangunan

infrastruktur khususnya di Indonesia sebaiknya mulai mempertimbangkan kesiapan dalam menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang.

Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang signifikan pada sektor industri dalam negeri, diantaranya dengan adanya berbagai kebijakan pembatasan yang menghambat aktivitas produksi dan distribusi barang, serta adanya disrupsi rantai pasok global, hingga pengurangan jam dan jumlah tenaga kerja. Di sisi lain, situasi pandemi juga mendorong peningkatan kebutuhan atas barang-barang tertentu. Misalnya, di awal masa pandemi, terjadi peningkatan permintaan atas masker dengan spesifikasi khusus yang mendorong terjadinya kelangkaan. Peningkatan jumlah kasus infeksi juga mendorong peningkatan kebutuhan atas oksigen tabung. Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang sama dalam masa pandemi yang akan datang, maka pembangunan industri sebaiknya juga didorong untuk meningkatkan utilisasi produksi. Dengan demikian, tantangan kenaikan kebutuhan alat dan barang khusus, misalnya alat kesehatan dan produksi vaksin, dapat direspon oleh industri dalam negeri dengan lebih efektif.

Kemudian, pengembangan iptek di dalam negeri sebaiknya juga mulai diarahkan untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan global di masa mendatang, termasuk tantangan perubahan iklim dan ancaman pandemi selanjutnya. Pandemi virus korona yang sedang berjalan saat ini menekankan perlunya konteks penanganan yang mempertimbangkan karakteristik lokal. Hal ini penting untuk menjamin efektivitas kebijakan penanganan pandemi di masyarakat.

Merespons dampak pandemi COVID-19 terhadap terdisrupsi kemajuan pencapaian infrastruktur untuk konektivitas, berbagai kegiatan prioritas yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur, yang dilaksanakan melalui: mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, jalan koridor utama, jalan akses ke kawasan-kawasan prioritas dan penghubung simpul transportasi, pembangunan dan pengembangan bandara, pelabuhan; memastikan tersedianya layanan infrastruktur seperti layanan akses internet, layanan angkutan perintis darat, laut dan udara, subsidi tol laut, angkutan laut perintis, angkutan darat, angkutan kereta api, kargo dan angkutan udara;

Untuk upaya memulihkan dampak pandemi dalam pertumbuhan industri yang inklusif, berbagai kegiatan penting yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Pemulihan usaha koperasi dan UMKM melalui pemberian pinjaman modal kerja yang dilakukan melalui *channelling* dengan lembaga keuangan, pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan subsidi bunga bagi UMKM yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan, dan pendampingan untuk mengakses saluran pembiayaan untuk koperasi dan UMKM.
- b) Pemulihan industri pengolahan dan perdagangan melalui fasilitasi *re-hiring* dan *re-training* tenaga kerja, pemulihan produktivitas, peningkatan ekspor, peningkatan belanja pemerintah dan BUMN untuk penggunaan produk dalam negeri, percepatan operasionalisasi Kawasan Industri prioritas, pemulihan produktivitas dan pemasaran produk IKM.

- c) Penajaman fokus pendidikan dan pelatihan vokasi melalui pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel, revitalisasi lembaga pendidikan vokasi yang mendukung industri 4.0, serta pelaksanaan pelatihan vokasi dan pemagangan di industri 4.0.

Upaya untuk mempercepat pemulihan pembangunan pasca pandemi COVID-19 dalam meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing diantaranya difokuskan terhadap:

- a) menyediakan infrastruktur jaringan layanan internet secara lebih merata.
- b) reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja berbasis digital, pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia, pengembangan riset dan inovasi terkait sektor-sektor strategis dalam menghadapi dampak COVID-19 khususnya sektor kesehatan dan sektor-sektor pendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.
- c) peningkatan kapabilitas penciptaan inovasi yang berdampak ekonomi dan pemecahan permasalahan bangsa dengan riset mendalam untuk penemuan antivirus/obat/vaksin serta prototipe alat kesehatan.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN SDGs Tujuan 9

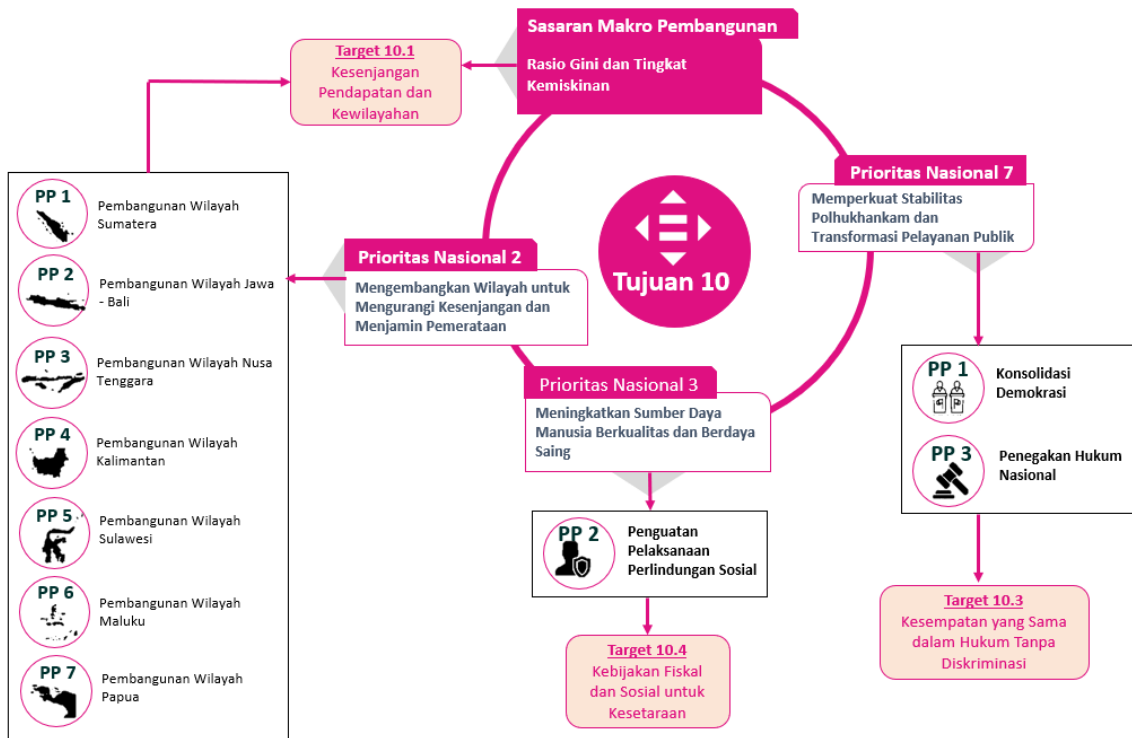
Sesuai dengan prinsip inklusif, optimalisasi pencapaian SDGs perlu mengikutsertakan aktor nonpemerintah sebagai bagian dalam mengisi Rencana Aksi Nasional (RAN). Secara garis besar, program-program dalam lingkup nasional yang berasal dari aktor nonpemerintah untuk Tujuan 9 antara lain:

- Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan: Nahdhatul Ulama, BAZNAS
- Akademisi: Universitas Diponegoro, SDGs *Center* UNPAD
- Perusahaan: Sinar Mas, PT Vale Indonesia, Sintesa Group, PT Pertamina, PT Transkon Jaya, PT Trisula Textile Industries, PT Victoria Insurance, PT Semen Indonesia, PT Terregra Asia Energy, PT PAN Brothers, PT Berlina, PT Medikaloka Hermina, PT Bank BTPN, PT Smart, PT Solusi Bangun Indonesia, PT Danone Indonesia.

Nahdhatul Ulama (NU) memiliki beberapa program dan kegiatan pada Tujuan 9 terkait dengan industri kecil, seperti jumlah koperasi muslimat NU dan program inklusi desa berbasis digital.

3.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Dalam TPB/SDGs Tujuan 10 ‘Berkurangnya Kesenjangan’, terdapat tiga target yang telah terarusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada Sasaran Makro Pembangunan, tiga Prioritas Nasional (PN) dan 10 Program Prioritas (PP). Keterkaitan di antara ketiganya dapat dilihat dalam Gambar 3.11 berikut:



Gambar 3.11 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 10 Dalam RPJMN 2020-2024

Selanjutnya, terdapat pula tiga target lain yang secara eksplisit sejalan dengan target pencapaian indikator SDGs tahun 2021-2024 dengan baseline data tahun 2020. Target-target itu dapat dilihat melalui Tabel 3.10 berikut:

**Tabel 3.10 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 10
Berkurangnya Kesenjangan**

TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
10.1.1*	Rasio Gini	Badan Pusat Statistik (BPS)	Nilai	0,385	0,377 - 0,382	0,376 - 0,378	0,375 - 0,377	0,374 - 0,376
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	10,14 (Mar) 10,19 (Sept)	9,5-10,1 (<i>outlook</i>)	8,5-9,0 (RKP 2022)	6,5-7 (<i>trajectory</i> RPJMN)	6,0-7,0 (RPJMN 2024)
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	Badan Pusat Statistik (BPS): Indeks Desa.	Desa	14.461 (2018)	15.152	12.152	10.152	9.152
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	Badan Pusat Statistik (BPS): Indeks Desa.	Desa	5.606 (2018)	3.444	4.444	5.444	6.444
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.	Badan Pusat Statistik (BPS): Potensi Desa	Kabupaten	62	NA	NA	NA	37 (terentaskan 25 Kab)
10.1.1.(e)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).	Persen	26,43	24,6 - 25,1	24,2 - 24,7	23,9 - 24,4	23,5 - 24

TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.								
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).	Persen	11,99	PM	PM	PM	PM
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.								
10.3.1(a)	Indeks Kebebasan.	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	79,40	82,5	83,0	83,5	84,0
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan: Laporan Data Pengaduan.	Aduan	Komnas HAM: 2.639	4.324	4.324	4.324	4.324
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Kasus	2389	PM	PM	PM	PM
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Kebijakan/ Dokumen	10	10	10	10	10

TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.								
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Kementerian Keuangan	Persen	12,7	13,31	12,7	12,7	12,7
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan BPS	Persen	Formal: 63,82 Informal: 3,21	Formal 53,37 Informal 8,48	Formal 56,19 Informal 13,06	Formal 67,40 Informal 16,93	Formal 74,57 Informal 25,94
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.								
10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan.	Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).	Nilai					
	Jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (<i>Regulatory Tier 1 Capital to risk-Weighted Assets</i>)			22,16	PM	PM	PM	PM
	Pinjaman bermasalah dengan total pinjaman (<i>Non-performing Loans to Total Gross Loans</i>)			2,75	PM	PM	PM	PM
	Pendapatan bersih dengan nilai aset (<i>Return on Assets</i>)			1,50	PM	PM	PM	PM

TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>Baseline</i>) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.								
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	BP2MI	Penambahan Dokumen	14	23 dokumen	25 dokumen	27 dokumen	30 dokumen
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	BP2MI	Fasilitasi TKLN	365	450 okupasi	550 okupasi	650 okupasi	700 okupasi

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020 – 2024

Arah kebijakan yang terkait dengan berkurangnya **kesenjangan pendapatan** dalam RPJMN 2020-2024 adalah penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, yang dijalankan melalui strategi:

- a. Pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi; dan
- b. Keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola SJSN.

Sementara itu, arah kebijakan yang terkait dengan berkurangnya **kesenjangan kewilayahan** dalam RPJMN 2020-2024, yaitu peningkatan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, ditempuh melalui strategi:

- a. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi;
- b. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan
- c. Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah desa, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) perbatasan negara.

Arah kebijakan yang terkait dengan **kesetaraan hak** dalam RPJMN 2020-2024, yaitu penguatan kesetaraan dan kebebasan, peningkatan akses terhadap keadilan dan penguatan integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri, dilaksanakan melalui strategi:

- a. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat;
- b. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat; dan
- c. Penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, dan multilateral serta meningkatkan upaya pencegahan terjadinya masalah WNI di luar negeri.

Akhirnya, arah kebijakan yang berhubungan dengan **kesehatan perbankan** dalam RPJMN 2020-2024, yaitu penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, digerakkan melalui strategi peningkatan pendalaman sektor keuangan.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19, khususnya untuk mencegah pemburukan pencapaian pengentasan kemiskinan dan penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, berbagai strategi yang dilakukan adalah:

- a. Peningkatan ketepatan sasaran bantuan sosial;
- b. Peningkatan peran bantuan sosial sebagai stimulus ekonomi untuk meredam dampak COVID-19, khususnya pada kelompok rentan dan terdampak seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan pekerja sektor informal;

- c. Pengembangan opsi mekanisme penyaluran bantuan sosial melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan alternatif penyaluran lain yang lebih memudahkan penerima manfaat, utamanya saat terjadi krisis, bencana dan wabah, dan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);
- d. Pelaksanaan bantuan sosial secara digital yang lebih belum tajam dan terintegrasi antarprogram;
- e. Pengembangan kepesertaan jaminan sosial bagi kelompok pekerja informal dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap dampak bencana seperti pandemi COVID-19;
- f. Pengembangan perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, termasuk pandemi COVID-19; dan
- g. Penguatan pemantauan dan evaluasi dengan memanfaatkan semua sumber data.

Sementara itu, untuk mengembangkan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi, berbagai strategi yang dijalankan adalah

- a. Penguatan peran pendamping desa dalam rangka mendukung Desa Tangguh lawan COVID-19 dan penajaman prioritas penggunaan Dana Desa yang difokuskan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- b. Pengembangan produksi dan pengolahan nilai tambah komoditas unggulan bernilai ekonomis dengan masa panen pendek dan menengah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan sekitarnya di kawasan transmigrasi, kawasan perdesaan dan daerah tertinggal;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau pasar yang lebih luas pada kawasan transmigrasi, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal dalam kerangka pemulihan ekonomi masyarakat;
- d. Penguatan Sistem Informasi Desa termasuk monografi desa melalui digitalisasi desa sebagai sarana pelaporan dan pengawasan dana desa, serta media pemutakhiran dan keterpaduan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/registrasi sosial;
- e. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan kolaborasi para pihak dalam pemulihan ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- f. Perluasan pembagian paket *converter kit* Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk nelayan dan petani, serta pembagian paket konversi minyak tanah ke elpiji.

Untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi serta memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, berbagai strategi yang ditetapkan dalam perbankan adalah

- a. Pemberian insentif pada bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan UMKM dan kegiatan lainnya; dan
- b. Restrukturisasi kredit seperti antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga.

Untuk memperkuat konsolidasi demokrasi, penegakan hukum nasional dan optimalisasi kebijakan luar negeri, berbagai strategi yang dilaksanakan adalah:

- a. Pendampingan dan pemberian bantuan terhadap WNI di luar negeri yang terdampak pandemi COVID-19.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN TPB Tujuan 10

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, aktor nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Nasional (RAN). Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari aktor nonpemerintah untuk Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan di antaranya adalah:

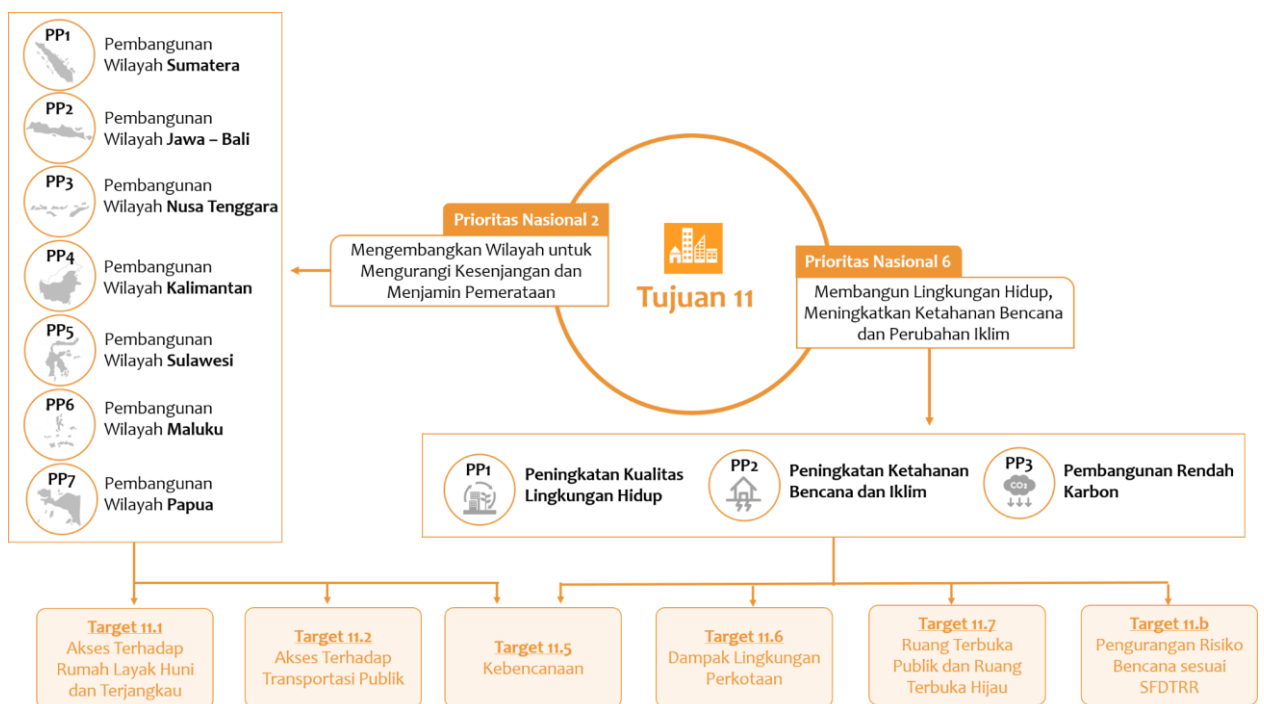
- Akademisi: Universitas Diponegoro, SDGs Hub UI, SDGs Center UNG
- Organisasi Keagamaan: Baznas, Muhammadiyah
- Organisasi Kemasyarakatan: Perkumpulan Prakarsa
- Perusahaan: PT Astra Internasional

Di bidang pemerataan kewilayahan, Universitas Diponegoro memiliki program pengabdian masyarakat dalam bentuk 'Program Pengembangan Desa Mitra' (PPDM) di berbagai desa mandiri. Kegiatan ini terkait dengan usaha pencapaian SDGs Target 10.1 'Kesenjangan Pendapatan dan Kewilayahan'. Sementara itu, universitas ini juga memiliki dua program setara lainnya, yakni 'Iptek Bagi Desa Binaan Undip' (IDBU) dan UNDIP for Science Techno Tourism Development (UFST2D).

Selain Universitas Diponegoro, program dan kegiatan aktor nonpemerintah lainnya secara lebih rinci dapat dilihat pada Matriks 3 dan Matriks 4 pada Lampiran RAN SDGs 2020-2024.

3.11 Tujuan 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan

Dalam Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan, terdapat 6 (enam) target yang telah terurusutamakan ke dalam berbagai dokumen rencana pemerintah, termasuk ke dalam RPJMN 2020-2024. Dari sisi kewilayahan, Tujuan 11 berkaitan erat dengan Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan yang dijabarkan ke tiap wilayah pulau sampai ke level Kegiatan Prioritas, khususnya mengenai pengembangan kawasan perkotaan. Selain itu Tujuan 11 juga berkaitan dengan Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Keterkaitan antara pencapaian target TPB dan RPJMN tersebut dapat dilihat dari diagram berikut:



Gambar 3.12 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 11 Dalam RPJMN 2020-2024

Angka target pencapaian 6 (enam) Target pada Tujuan 11 yang berkaitan dengan Prioritas Nasional 2 dan 6 dari tahun 2021-2024 dengan baseline data tahun 2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3.11 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 11
Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan**

TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.								
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS Susenas	Persen	56,51 (2019)	62,32	65,1	67,8	70
11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.								
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapat akses yang nyaman pada transportasi publik	BPS Susenas	Persen	56,01	PM	PM	PM	PM
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	1. BPS Susenas 2. Kemen Perhubungan	Persen	5,74	PM	PM	PM	PM
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.								
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.	BIG		PM	PM	PM	PM	PM
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.								
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	1. Kemenkeu 2. KLHK 3. Kemanparekraf 4. ANRI 5. Kemendikbud 6. LIPI 7. Kementerian PUPR	Miliar Rupiah	PM	586,58	532,85	543,85	542,75

TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
		8. Pemerintah Daerah						
		Kemendikbud	Miliar Rupiah	PM	572,78	518,85	518,85	522,75
		Kemenparekraf	Miliar Rupiah	PM	13,8	14	25	20
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang							
	a. Meninggal	BNPB (Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana)	Orang	418	PM	PM	PM	PM
	b. Luka/Cedera		Orang	619	PM	PM	PM	PM
	c. Mengungsi		Orang	922.367	PM	PM	PM	PM
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB.	BNPB (Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	Persen	0,03	PM	PM	PM	PM
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah	Susenas MKP, Laporan Tahunan Adipura Kota KLHK Kementerian PUPR	Persen	59,08 penanganan dan 1,55 pengurangan (2016)	73,70 penanganan dan 5,51 pengurangan	75,28 penanganan dan 9,13 pengurangan	77,64 penanganan dan 14,57 pengurangan	80 penanganan dan 20 pengurangan
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	KLHK	Persen	60,48 (penanganan dan pengurangan)	98	99	99	99
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	KLHK	µgram/m ³	31,64 (2019)	< 40 (Kondisi baik)	< 40 (Kondisi baik)	< 40 (Kondisi baik)	< 40 (Kondisi baik)
11.6.2.(b)	Indeks kualitas udara	KLHK	Indeks	87,21	84,2	84,3	84,4	84,5

TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.								
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	1. LAPAN	Persen	0,093	PM	PM	PM	PM
		2. Kemen PUPR						
11.7.2 (a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	BPS Susenas Statistik Kriminal	Persen	0,06 (2019)	≤ 0,06	≤ 0,06	≤ 0,06	≤ 0,06
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.								
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS*	1. Kemen ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri 2. Bappenas 3. KLHK	Persen	16 Provinsi	18 Provinsi	21 Provinsi	25 Provinsi	27 Provinsi
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>.								
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>	BNPB	Dokumen	1	1	1	1	1
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	BNPB	Persen	183 Kab/kota (2019)	195 Kab/kota	200 Kab/kota	205 Kab/kota	210 Kab/kota

TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.								
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal	Kementerian PUPR; Kementerian Dalam Negeri	Persen	87,42 (2017) 445 dari 509 kab/kota	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Capaian dan target untuk KLHS yang tervalidasi KLHK/Gubernur

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Arah kebijakan terkait Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Kebijakan pembangunan perkotaan, di antaranya: (1) Perencanaan Wilayah Metropolitan di Luar Jawa; (2) Pengembangan Wilayah Metropolitan di Luar Jawa; (3) Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jawa; (4) Pengembangan Kota Besar, Sedang, Kecil; (5) Pembangunan Kota Baru; (6) Pembangunan Ibu Kota Negara. Untuk mendukung kebijakan pembangunan kota tersebut, maka perlu didukung oleh berbagai kebijakan sektoral yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

1. Hunian Layak, Aman dan Terjangkau

Dalam rangka Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau, kebijakan yang disusun yaitu meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Strategi difokuskan pada tiga aspek, yakni sisi permintaan (*demand side*) terkait sistem pembiayaan, dari sisi pasokan (*supply side*) terkait pemanfaatan lahan dan penyediaan perumahan, dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) terkait kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Selain itu, pada RPJMN 2020- 2024 juga telah direncanakan dan dianggarkan *Major Project* Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) sebagai langkah konkret pencapaian sasaran pembangunan terkait perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan. *Major Project* ini direncanakan terintegrasi antara beberapa sumber pendanaan seperti APBN, APBD, dan Badan Usaha. Salah satu manfaat yang diharapkan dari *Major Project* tersebut adalah terbentuknya sistem perumahan publik yang profesional di metropolitan (*public housing*) yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh.

2. Transportasi Publik Perkotaan

Kebijakan sektor transportasi bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah baik itu melalui moda transportasi di darat, laut, maupun udara serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Prinsip ini juga tercantum di dalam kebijakan transportasi publik perkotaan, dengan mengedepankan pengembangan sistem angkutan umum massal. Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan diprioritaskan pada 6 (enam) kota metropolitan utama, yaitu kawasan metropolitan Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar. Dalam upaya percepatan pengembangan angkutan umum massal di kota-kota metropolitan, disiapkan program pembangunan angkutan umum massal perkotaan yang mengatur dukungan pendanaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan sejumlah kriteria. Kriteria penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yaitu tersedianya rencana mobilitas perkotaan terpadu atau *Sustainable Mobility Plan* (SUMP) dan keberadaan kelembagaan otoritas transportasi perkotaan yang berbasis wilayah metropolitan (lintas batas administratif).

Proyek prioritas transportasi perkotaan meliputi: i) Pembangunan sistem angkutan umum massal termasuk di 6 Wilayah Metropolitan (*Major Project*); ii) Pembangunan fasilitas

alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi, iii) Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan, iv) Pembangunan jalan lingkar perkotaan, serta v) Penyediaan PSO dan subsidi angkutan umum massal perkotaan.

3. Pelestarian Warisan Budaya dan Alam

Kebijakan terkait pelestarian warisan budaya akan dilakukan melalui berbagai ajang promosi pariwisata. Kegiatan tersebut akan dijadikan sebagai wahana untuk meningkatkan penghargaan dan perayaan terhadap warisan alam, budaya dan keragaman tatanan sosial masyarakat yang memperkuat regenerasi dan citra bangsa Indonesia. Keterpaduan pemasaran juga melibatkan diaspora Indonesia dalam perayaan kekayaan budaya, termasuk kekayaan kuliner Indonesia melalui diplomasi gastronomi. Di samping itu, regenerasi warisan budaya akan dilaksanakan pada 20 lokasi hingga tahun 2024. Selain itu, kebijakan pelestarian warisan budaya juga dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya tak benda, revitalisasi museum dan taman budaya, serta pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam rangka pengelolaan warisan budaya.

Upaya melestarikan warisan budaya dan alam Indonesia ini juga sejalan dengan kebijakan untuk mendorong ekonomi lokal. Nilai-nilai warisan budaya dan alam berpotensi untuk mendatangkan devisa bagi Indonesia jika dikelola dengan baik dalam bentuk pengembangan kawasan pariwisata terpadu. Untuk itu, Pemerintah Indonesia fokus mengembangkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yaitu Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai. Pengembangan DPP tersebut juga meliputi pelestarian warisan budaya dan alam sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Kebijakan kewilayahan ini juga didukung dengan peningkatan infrastruktur pendukung untuk mengakses kawasan wisata, seperti jalan, bandara, serta pelabuhan.

4. Ketahanan Bencana dan Iklim

Arah kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim dilakukan melalui sinkronisasi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Adapun strategi untuk mewujudkan kebijakan tersebut, antara lain:

1. Penanggulangan bencana yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; (b) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; (c) Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; (d) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana; (e) Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana; (f) Penguatan Penanganan Darurat Bencana; (g) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; (h) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MHEWS; dan (i) Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui *social re-engineering* ketahanan bencana multilevel,

terutama level keluarga, komunitas maupun desa; dan (j) Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.

2. Peningkatan Ketahanan Iklim, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas, melalui: (a) Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan, baik berupa penguatan infrastruktur adaptasi berbasis ekosistem, penyadartahuan masyarakat, pengembangan teknologi, maupun diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir; (b) Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim, melalui peningkatan penyediaan pasokan air baku dan perlindungan terhadap daya rusak air; (c) Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim; serta (d) Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim.

Terdapat juga upaya intervensi yang dapat dilakukan oleh perkotaan untuk meningkatkan ketahanan iklim, yaitu (1) Pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan suplai air bersih perkotaan dan meminimalisir daya rusak air akibat potensi bencana iklim, (2) Antisipasi penggenangan pesisir dan pulau-pulau kecil, (3) Climate Smart Agriculture and Urban Farming dalam mempertahankan produktivitas pangan, dan (4) Peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat untuk mengantisipasi peningkatan KLB DBD dan penyakit lainnya akibat perubahan iklim.

Di samping itu, arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketahanan bencana mencakup pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai. Strategi untuk pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital terhadap risiko bencana banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, lumpur, dan sedimen antara lain: (a) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana; (b) Penilaian dan peningkatan keamanan infrastruktur vital terhadap bencana; (c) Penetapan standar bangunan tangguh bencana; dan (d) Pengembangan infrastruktur hijau.

Strategi tersebut didukung oleh peningkatan kualitas industri konstruksi serta pengawasan mutu dan manajemen rantai pasok industri konstruksi. Kolaborasi antara lembaga penelitian dan pelaku industri dalam penguasaan teknologi juga perlu ditingkatkan serta didukung oleh peningkatan kualitas SDM di bidang konstruksi. Selain itu, perlu adanya inovasi pendanaan untuk meningkatkan efisiensi penganggaran dalam upaya peningkatan ketahanan bencana. Strategi untuk mendukung pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana antara lain: (a) Program terintegrasi dalam pengelolaan risiko bencana, khususnya risiko banjir pada daerah perkotaan, dengan kombinasi pendekatan struktural dan non-struktural termasuk infrastruktur hijau; (b) Penetapan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana; (c) Penyusunan peta risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah; (d) Pengembangan sistem pemantauan penurunan tanah; dan (e) Penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor. Strategi untuk mendukung restorasi dan konservasi daerah aliran sungai antara lain: (a) Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai; (b)

Konservasi kawasan rawa dan gambut; dan (c) Pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi.

5. Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan

Kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang sesuai dengan Tujuan 11 difokuskan dalam dua bidang, yaitu pengelolaan sampah dan kualitas udara. Kebijakan dalam pengelolaan sampah antara lain: (1) Pengelolaan sampah dilakukan secara satu kesatuan dari hulu hingga ke hilir dengan prinsip pengurangan dan penggunaan kembali; (2) Penguatan kampanye pengurangan sampah; (3) Penguatan kapasitas pemerintah daerah, regulasi dan lembaga pengelola sampah; (4) Pembangunan infrastruktur berdasarkan perencanaan yang komprehensif; (5) Penegakan hukum secara kontinyu; dan (6) Pemantauan, evaluasi dan penegakan hukum.

Beberapa kebijakan untuk memperbaiki kualitas udara perkotaan antara lain dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon. Adapun strategi khusus terkait peningkatan kualitas hidup, antara lain:

- a. **Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut; (b) Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan; (c) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (d) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (e) Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir, serta Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut; (f) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (g) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta (h) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
- b. **Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; (b) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu.
- c. **Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (c) Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (d) Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah; serta (e) Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah.
- d. **Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup; serta (c) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA dan LH.

Arah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim adalah pembangunan yang lebih berketahanan dan berkelanjutan, dengan penekanan pada aktivitas pembangunan yang beremisi dan berkarbon rendah dan upaya penanganan perubahan iklim sebagai basis pemulihan ekonomi. Prinsip ini dikenal dengan *Build Back Better* atau membangun kembali dengan lebih baik. Terdapat tiga prioritas utama mewujudkan pembangunan rendah karbon, terutama di masa pascapandemi, yaitu: (a) Menerapkan dan mengintegrasikan rencana pemulihan COVID-19 yang hijau ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional; (b) Menerapkan stimulus fiskal untuk mengakselerasi transisi menuju pembangunan rendah karbon; dan (c) Membangun ketahanan masyarakat dan sektor terhadap terhadap guncangan/gangguan eksternal seperti pandemi serta *climate-related disasters*. Adapun strategi yang akan diambil sesuai dengan RPJMN adalah sebagai berikut:

- a. **Pembangunan Energi Berkelanjutan**, yang dilaksanakan melalui: (a) Pengelolaan Energi Baru Terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; (b) Efisiensi dan Konservasi Energi; serta (c) Penyusunan Studi Kelayakan untuk Pembangunan Pilot Project Industri IVO/ILO (*Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil*) sebagai bahan baku Industri Greenfuel/B100.
- b. **Pemulihan Lahan Berkelanjutan yang dilaksanakan melalui:** (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (c) Pengurangan Laju Deforestasi; serta (d) Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian menuju Pertanian Berkelanjutan.
- c. **Pengelolaan Limbah yang dilaksanakan melalui:** (a) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga; dan (b) Pengelolaan Limbah Cair.
- d. **Pengembangan Industri Hijau yang dilaksanakan melalui:** (a) Konservasi dan Audit Penggunaan Energi pada Industri; (b) Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi; (c) Manajemen Limbah Industri; serta (d) Penyusunan Standar Industri Hijau (SIH) dan Penerapan Sertifikasi Industri Hijau.
- e. **Rendah Karbon Pesisir dan Laut** yang dilaksanakan melalui Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan.

6. Penataan Ruang

Kebijakan terkait penataan ruang erat kaitannya dengan upaya pembangunan dan pemerataan wilayah. Kebijakan terkait penataan ruang dilakukan dengan meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi pembangunan: (a) Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; (b) Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah; (c) Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; (d) Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19 Tahun 2021

Dalam merespons dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terhambatnya pencapaian target dan indikator Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan, maka dilakukan berbagai kebijakan dan strategi. Salah satu sektor pemulihan ekonomi dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 adalah infrastruktur perkotaan, yang juga sejalan dengan pencapaian Tujuan 11. Berikut adalah beberapa kebijakan terkait infrastruktur perkotaan.

1. Memulihkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau serta didukung dengan infrastruktur dasar permukiman termasuk air minum dan sanitasi;
2. Meningkatkan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan melalui penambahan debit air baku, penataan regulasi dan kelembagaan SDA, serta pengembangan sistem informasi sumber daya air terpadu;
3. Meningkatkan layanan keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Meningkatkan ketahanan bencana melalui penyusunan rencana peningkatan ketangguhan secara terpadu, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sistem peringatan dini;
5. Meningkatkan layanan irigasi, optimalisasi pemanfaatan waduk multiguna, dan memodernisasi irigasi;
6. Meningkatkan konektivitas wilayah;
7. Mengembangkan angkutan umum massal di enam kota metropolitan;
8. Meningkatkan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien;
9. Melakukan kerjasama internasional seperti koridor Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia (KSST) di bidang energi dan ketenagalistrikan;
10. Pengembangan subsidi energi dan listrik yang tepat sasaran termasuk pengurangan pembayaran tagihan listrik;
11. Mendorong sinergi antara penyediaan energi dan ketenagalistrikan dengan berbagai program pemerintah;
12. Meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; dan
13. Mengoptimalkan strategi investasi badan usaha seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), maupun sumber-sumber pembiayaan kreatif lainnya, dan mengembangkan metode-metode atau aplikasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan proyek infrastruktur dengan mengacu pada beberapa metode yang diterapkan di negara maju dan negara-negara anggota G20 seperti *Five Case Model (5CM)*, *Project Initiation Routemap (PIR)*, dan *Building Information Modelling (BIM)*.

Di samping pemulihan ekonomi di sektor infrastruktur perkotaan, upaya mengatasi dampak ekonomi pascapandemi COVID-19 di tahun 2021 juga perlu didukung dengan

lingkungan yang aman. Untuk itu, upaya peningkatan ketangguhan infrastruktur bencana akan difokuskan pada wilayah perkotaan, daerah pascabencana dan pusat-pusat pariwisata. Strategi peningkatan ketangguhan pada wilayah tersebut akan diupayakan melalui:

1. Penguatan kebijakan pengelolaan bencana terpadu melalui percepatan penyelesaian rencana induk ketahanan wilayah untuk daerah-daerah dengan risiko tinggi;
2. Percepatan pemulihan infrastruktur wilayah pascabencana dengan pendekatan *build-back-better*;
3. Investasi terpadu dan multi pembiayaan dalam peningkatan ketangguhan untuk daerah-daerah dengan risiko tinggi yang telah memiliki rencana induk ketangguhan; dan
4. Memprioritaskan intervensi yang bersifat multiguna, yang tidak hanya mampu mengelola risiko banjir, tetapi juga memiliki manfaat lain dalam peningkatan kesehatan masyarakat; dan potensi pariwisata. Upaya-upaya investasi tersebut diutamakan melalui pelibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi lokal.

Sebagai salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19, aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu dipulihkan secara bertahap. Kebijakan pemulihan ini dilakukan melalui:

1. Pemulihan pasar wisatawan nusantara sebagai langkah tercepat untuk mendorong pemulihan pariwisata yang didukung insentif dan pengaturan hari libur nasional;
2. Pemulihan pasar wisatawan mancanegara (wisman) melalui misi penjualan dan paket tur *quality tourism* yang didukung kerja sama dengan maskapai penerbangan *wholesaler*
3. Dukungan penyelenggaraan event nasional dan internasional (*Meeting-Incentive-Convention-Exhibition* (MICE) pemerintah dan bisnis, olahraga, seni dan budaya);
4. Percepatan pembangunan infrastruktur amenities, aksesibilitas, dan atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Penerapan standar kebersihan dan keselamatan, serta diversifikasi destinasi wisata;
6. Pemulihan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi akses ke pembiayaan, kerjasama rantai pasok, serta pelatihan- sertifikasi-penempatan SDM; dan
7. Peningkatan penumbuhan usaha kreatif/*start-up* yang didukung pendampingan, serta pengembangan jejaring produksi dan pasar. Pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif tidak hanya difokuskan pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), namun juga destinasi pariwisata pengembangan mencakup Batam-Bintan, Bukittinggi-Padang, Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran, Banyuwangi, Sambas-Singkawang, Derawan-Berau, Toraja-Makassar-Selayar, dan Biak-Teluk Cenderawasih, serta pemulihan Bali sebagai pintu masuk utama wisman.

Salah satu dukungan untuk pemulihan sektor pariwisata, termasuk wisata budaya, kebijakan utama yang diambil di tahun 2021 adalah dengan membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, mengembangkan media baru berbasis IT sebagai wahana ekspresi budaya, dan mengembangkan dana perwalian kebudayaan, yang menjadi bagian dari upaya Revolusi Mental. Untuk itu, terdapat beberapa proyek prioritas yang mendukung, antara lain:

1. Penyelenggaraan festival budaya daerah secara sinergi dan holistik melalui *platform* Indonesiana di 20 lokasi;
2. Pengembangan desa pemajuan kebudayaan untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan sumber daya kebudayaan daerah di 34 lokasi; dan
3. Penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai pagelaran karya budaya bangsa yang dilahirkan dari ajang kompetisi dan edukasi secara berjenjang dan berkelanjutan.

Sebagai upaya percepatan pembangunan pascapandemi COVID-19, pelaksanaan proyek prioritas tersebut difokuskan pada daerah destinasi pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19.

C. Kontribusi Aktor Non-Pemerintah pada RAN SDGs Tujuan 11

Sesuai dengan prinsip inklusivitas, dalam RAN SDGs Tujuan 11 ini juga dicantumkan berbagai kontribusi dan partisipasi dari aktor-aktor non-pemerintah, seperti LSM, lembaga riset, komunitas, sektor swasta, dan filantropi, yang mendukung tercapainya target-target dalam Tujuan 11. Adapun beberapa lembaga non-pemerintah yang memiliki program lingkup nasional untuk mencapai Tujuan 11, antara lain:

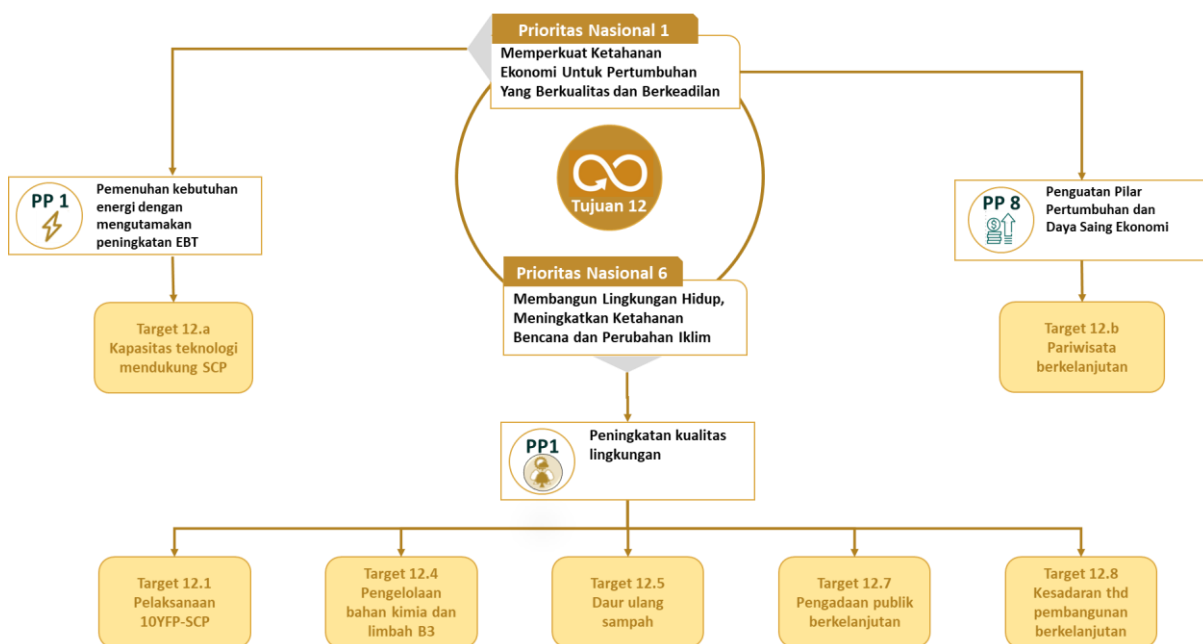
1. Muslimat NU, yang memiliki program bedah rumah untuk rakyat miskin dan fasilitasi akses kepemilikan rumah subsidi untuk masyarakat dengan pendapatan di bawah 4 juta rupiah.
2. International Coalition on Clean Transportation, yang memiliki program *Remote Sensing Testing* dan *Diesel Leapfrogging Campaign* yang bertujuan untuk mengkampanyekan kualitas udara yang lebih bersih.
3. ITDP Indonesia, yang memiliki berbagai program di beberapa kota di Indonesia yang mengadvokasikan transportasi publik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, seperti optimalisasi layanan Transjakarta di Jakarta, integrasi transportasi publik dengan kendaraan tidak bermotor, perencanaan detail koridor transportasi berkelanjutan, serta asistensi kebijakan inklusif di transportasi publik.
4. *Greeneration Foundation*, yang memiliki program perlindungan lingkungan seperti dukungan terhadap gaya hidup pilah sampah serta kajian Zero Waste Index di tingkat nasional.
5. LPBI NU, yang memiliki program nasional terkait manajemen persampahan di berbagai daerah, termasuk di kampus dan pesantren, sehingga dapat mengurangi timbunan sampah sekaligus untuk mengedukasi generasi muda agar lebih cinta lingkungan. LPBI NU juga memiliki program untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk bencana alam dan non-alam (pandemi COVID-19). Di samping itu, terdapat pula program-program terkait upaya pengurangan risiko bencana dengan memberikan edukasi kepada masyarakat serta aksi kemanusiaan pascabencana.
6. Kemitraan Kota Hijau, yang memiliki program advokasi dan kampanye untuk menambah Ruang Terbuka Hijau kepada berbagai pemerintah daerah.

- Ayo ke taman, yang memiliki program kampanye dan edukasi publik untuk mengajak masyarakat berkunjung ke taman dan ruang publik lainnya serta program untuk mendorong keanekaragaman hayati yang ada di taman-taman publik di berbagai kota.

Selain daripada lembaga-lembaga non-pemerintah di atas, masih terdapat beberapa pihak lainnya, termasuk dari pihak swasta yang memiliki program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target dari Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan. Namun, sebagian aktor non-pemerintahan tersebut tidak memiliki program berskala nasional atau kesulitan untuk menerjemahkan program yang mereka miliki ke dalam format matriks. Adapun daftar lembaga tersebut dapat dilihat secara lengkap dalam lampiran Matriks 3 dan 4 dalam RAN SDGs.

3.12 Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Dalam SDGs Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, terdapat 7 (tujuh) target yang telah diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 2 (dua) Prioritas Nasional (PN) dan 3 (tiga) Program Prioritas (PP), yang dapat dilihat keterkaitannya sebagai berikut:



Gambar 3.13 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 12 Dalam RPJMN 2020-2024

Selain kesembilan target tersebut, terdapat beberapa target lainnya pada Tujuan 12 yang juga memiliki angka target pencapaian indikator SDGs dari tahun 2021-2024 dengan baseline data tahun 2020, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.12 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 12
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab**

TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKI YANG BERTANGGUNG JAWAB								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.								
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	KLHK	Dokumen	1	2	2	2	2
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan								
12.3.1.(a)	Persentase Sisa makanan	KLHK: SIPSN	Persen	39.75% (24.414.017 ton) (2019)	(18.554.652 ton) Pengurangan 24%	(18.066.372 ton) Pengurangan 26%	(17.822.232 ton) Pengurangan 27%	(17.578.092 ton) Pengurangan 28%
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.	Sekretariat dan <i>Focal Point</i> masing-masing konvensi	Kebijakan/Peraturan	PM	PM	PM	PM	PM
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari <i>baseline</i> 50 ton penggunaan merkuri	KLHK	Persen	PM	10% (5 ton)	20% (10 ton)	20% (10 ton)	20% (10 ton)
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari <i>baseline</i>	KLHK	Persen	PM	23,56	23,58	25,24	25,25
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita	KLHK: Laporan Tahunan	Juta Ton	44,9 ¹ (2019)	PM	PM	PM	PM
	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya.		Persen	100% (44,8 juta ton)	100% (98,68 juta ton)	100% (107,99 juta ton)	100% (117,22 juta ton)	100% (126,49 juta ton)

TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali								
12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	KLHK (Roadmap industri bahan baku untuk kertas dan plastik)	Juta Ton	3,4 (2019)	9,53	10,84	11,89	12,8
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.								
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	1. OJK	Perusahaan	55 (2020)	107	1.035	1.112	1.112
		2. Perusahaan						
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	KLHK: Laporan Tahunan	Unit	2.125 (2019)	2.634	3.423	4.211	5.000
12.7 Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional								
12.7.1*	Tingkatan (<i>degree</i>) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi	LKPP	Indeks	PM	2,68	3,38	3,98	3,98
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	KLHK (Laporan Tahunan)	Produk	PM	10	15	20	25
12.7.1.(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	KLHK	Dokumen	PM	15	20	30	40
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.								
12.8.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan Lembaga / komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	KLHK	Unit	PM	260	230	1.780	1.781
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	KLHK	Unit	3 (2019)	PM	PM	PM	PM

TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.								
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)	1. Ditjen Ketenagalistrikan, Kemen ESDM;	MW	PM	1001,1	1921,8	1778,2	3662,7
		2. Pusdatin Kemen ESDM;						
		3. BPS.						
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i>	Kememparekraf	Lokasi	PM	5	5	5	5
12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.								
12.c.1*	(a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan	1. BPS; 2. Kementerian ESDM; 3. KemenPPN/Bappenas	Persen	0,5 (2019)	0,3	0,3	0,2	0,2
	(b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.	Kemenkeu.	Persen	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan:

1) Jumlah limbah B3 terdata (juta ton)

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Kebijakan Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab telah termuat dalam RPJMN 2020-2024, terutama pada Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dan Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Upaya penerapan konsumsi dan produksi bertanggung jawab diarahkan pada:

1. Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas dalam Penerapan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan melalui (i) Pembinaan satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup; (ii) Penerapan Sustainable Public Procurement (SPP) serta pengembangan produk ramah lingkungan; (iii) Pengembangan *sustainable tourism* melalui pembangunan *Sustainable Tourism Destinations* dan *Sustainable Tourism Observatory*; dan (iv) peningkatan fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
2. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3 dan Limbah Non B3 yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui: (i) Penguatan kebijakan terkait B3 sejalan dengan Konvensi Basel, Rotterdam, dan Stockholm (BRS) dan Minamata serta penguatan NSPK pengelolaan LB3 dan Non B3; (ii) Pengurangan dan Penghapusan Merkuri pada 4 (empat) sektor prioritas sesuai dengan Peraturan Presiden 21 tahun 2019 serta penguatan laboratorium pengujian merkuri menjadi center of excellence bagi seluruh daerah; (iii) peningkatan jasa pengelola limbah B3 yang berizin dan menerapkan standar sesuai regulasi, (iv) Pemulihan lahan terkontaminasi LB3 dan Non B3 pada sektor institusi dan non institusi; (v) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu; dan (vi) Penguatan data dan sistem informasi B3, Limbah B3 dan Limbah Non B3.
3. Peningkatan kinerja pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik dengan pendekatan ekonomi sirkular melalui: (i) Pengembangan kebijakan dan NSPK terkait pengelolaan sampah spesifik serta penguatan NSPK dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; (ii) Peningkatan implementasi pemilahan dari sumber, pengangkutan terjadwal, dan optimalisasi pengolahan sampah di hulu; (iii) Pengembangan skema pembiayaan inovatif dan restrukturisasi retribusi persampahan untuk peningkatan pendanaan di daerah; (iv) Penguatan data dan sistem informasi pengelolaan sampah; dan (v) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi serta penguatan keterlibatan swasta dalam pengelolaan sampah melalui penerapan *Extended Producer Responsibility*.
4. Pengelolaan pangan berkelanjutan serta penanganan food loss and waste yang dilaksanakan dengan (i) pengembangan kebijakan dan penerapan sustainable fisheries dan good agriculture practices; (ii) perubahan perilaku dengan fokus pada pengembangan lembaga penyuluhan di daerah, peningkatan kapasitas pekerja pangan serta edukasi kepada konsumen; (iii) pembenahan penunjang sistem pangan dengan mengembangkan

korporasi petani dan nelayan serta menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung efisiensi proses pangan; (iv) penguatan regulasi dan optimalisasi pendanaan tepat guna untuk perbaikan infrastruktur pangan, mengembangkan regulasi kehilangan makanan dan sampah makanan di tingkat nasional dan regional, serta menguatkan koordinasi antar lembaga; (v) pemanfaatan kehilangan makanan dan sampah makanan dengan mendorong pengembangan *platform* penyaluran makanan, penanganan kehilangan makanan dan sampah makanan yang mendukung ekonomi sirkular seperti pengomposan dan pengembangan percontohan pemanfaatan kehilangan makanan dan sampah makanan skala kota/kabupaten; serta (vi) pengembangan kajian dan pendataan kehilangan makanan dan sampah makanan yang terintegrasi baik pada level nasional maupun daerah.

5. Pengembangan industri yang berkelanjutan dilaksanakan dengan (i) Konservasi dan audit penggunaan energi pada industri; (ii) Penerapan modifikasi proses dan teknologi; (iii) Manajemen limbah industri; (iv) Mendorong pengembangan skema insentif dan disinsentif untuk PROPER dan Industri Hijau; (v) Penyusunan dan penetapan Standar Industri Hijau (SIH) dan Fasilitasi sertifikasi industri hijau; serta (vi) mendorong penyusunan *sustainable report untuk industri*.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor pembangunan di Indonesia termasuk pencapaian TPB/SDGs 12. Adapun dampak pandemi COVID-19 pada target SDG 12 terutama adalah meningkatnya timbulan limbah B3 medis akibat penanganan COVID-19. Diperkirakan timbulan limbah medis dari 2.867 Rumah Sakit di seluruh Indonesia sebelum pandemi COVID-19 adalah sebesar 294.660 kg/hari (Kemenkes, 2018). Sejak pandemi COVID-19 diperkirakan ada tambahan timbulan limbah medis COVID-19 sebesar 30% dari kondisi sebelum pandemi (KLHK, 2021). Timbulan limbah B3 medis ini menjadi salah satu isu prioritas dalam pencapaian pelaksanaan SDG 12 sejak pandemi COVID-19 menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020 hingga saat ini.

Pandemi COVID-19 pun telah mengubah pola hidup masyarakat dan memberikan dampak multidimensi pada kebijakan pembangunan di Indonesia sehingga menjadikan penerapan penerapan konsumsi dan produksi bertanggung jawab melalui circular economy (ekonomi sirkular) menjadi lebih relevan dalam rangka efisiensi dan memperkuat rantai pasok. Ekonomi sirkular dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ketahanan pasca pandemi dengan memaksimalkan penggunaan bahan baku dan sumber daya serta seluruh potensi lainnya. Pendekatan ini pun mendukung green recovery dan transformasi ekonomi hijau pasca pandemi COVID-19.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN SDGs Tujuan 12

Sejalan dengan prinsip inklusifitas dan untuk optimalisasi pencapaian SDGs, rencana dan program kegiatan aktor pemerintah menjadi bagian penting dalam Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 12. Rincian rencana program/kegiatan aktor non pemerintah secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran Matriks 3 dan 4. Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari aktor nonpemerintah untuk Tujuan 12 SDGs diantaranya adalah:

- Organisasi Kemasyarakatan, yaitu: LPBI NU Pusat bekerjasama dengan MUI dan Ewaware & Carbonetics dan Balifokus.
- Pelaku Usaha, yaitu: Sintesa Group, PT Jasa Marga, PT Solusi Bangun Indonesia, dan Bank Syariah Indonesia
- Akademisi, yaitu: SDGs Center Universitas Diponegoro Semarang;

Sebagai contoh, di sektor pengelolaan sampah LPBI NU Pusat bekerja sama dengan organisasi keagamaan lainnya, pemerintah daerah bahkan beberapa perusahaan sangat berperan dalam pengelolaan sampah terutama pada Lembaga Pendidikan seperti pesantren. Hal tersebut terkait dengan capaian SDGs Target 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. Contoh lainnya adalah peran perusahaan seperti PT Solusi Bangun Indonesia yang mendukung beberapa indikator capaian SDGs antara lain terkait pelaksanaan SCP, pengelolaan limbah dan sampah, publikasi *Sustainability Report*, serta penerapan SNI ISO di perusahaan.

3.13 Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

3.13.1 Baseline Kebijakan TPB/SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana

3.13.1.1 Baseline Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan Berketahanan Iklim diukur dengan sasaran kinerja mengurangi penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim. Baseline yang dipergunakan untuk penghitungan adalah nilai kerugian ekonomi Indonesia untuk empat sektor prioritas RPJMN 2020-2024 yaitu sektor Kelautan dan Pesisir, Air, Pertanian dan Kesehatan. Nilai *baseline*-nya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Baseline Pembangunan Berketahanan Iklim

Tahun	Baseline (Triliun Rupiah)
2020	102,36
2021	105,71
2022	109,03
2023	112,28
2024	115,53

Kerugian ekonomi Indonesia di empat sektor prioritas, kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan diperkirakan sebesar 102,36 Triliun Rupiah pada tahun 2020 dan 115,53 Triliun Rupiah pada tahun 2024, atau mengalami peningkatan sebesar 12,76% selama lima tahun.

3.13.1.2 *Baseline* Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon atau pengendalian emisi dalam pembangunan sebagaimana dilakukan melalui: penetapan baseline intensitas emisi GRK; penetapan target penurunan intensitas emisi GRK; peningkatan pertumbuhan ekonomi; penurunan tingkat kemiskinan; penyusunan arah kebijakan pembangunan rendah karbon; penyusunan kebijakan strategis; penyusunan kriteria Indikator Aksi PRK; penyusunan aksi PRK; dan program, kegiatan, dan penganggaran PRK.

Dalam memperhitungkan potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan rendah karbon, tahap awal yang dilakukan adalah menentukan nilai proyeksi dasar atau baseline *business as usual* (BAU), yaitu proyeksi nilai emisi dan intensitas emisi tanpa adanya intervensi kebijakan, program maupun kegiatan Pembangunan Rendah Karbon. Kemudian, persentase potensi penurunan emisi dan intensitas emisi merupakan angka kumulatif dari tahun baseline sampai dengan tahun target. Dalam hal ini, tahun dasar sebagai rujukan awal yang digunakan sebagai baseline emisi adalah tahun 2010, dengan nilai sebagai berikut:

- 1) *Baseline* emisi sebesar 1.334.000 ribu ton CO₂e
- 2) *Baseline* intensitas emisi sebesar 0,163 ribu ton CO₂e/miliar rupiah

Sedangkan proyeksi *baseline* emisi GRK nasional hingga tahun 2060 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 *Baseline* Pembangunan Rendah Karbon

Tahun	Baseline Emisi GRK (Gigaton CO ₂ eq)
2020	1,82
2021	1,68
2022	1,74
2023	1,76
2024	1,93
2030	2,19
2045	3,39
2060	4,64

Penghitungan *baseline* intensitas emisi GRK di tingkat nasional menggunakan data Baseline emisi GRK sebagaimana dimaksud pada Tabel 3.14 dan data informasi satuan *output* Produk Domestik Bruto Nasional. Sedangkan penghitungan *baseline* intensitas emisi GRK

daerah menggunakan data Baseline emisi GRK daerah dan data informasi satuan output Produk Domestik Bruto Daerah.

Baseline intensitas emisi GRK yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan apabila terjadi: perubahan *baseline* emisi GRK, perubahan data informasi satuan output Produk Domestik Bruto Nasional dan Daerah; dan perubahan metodologi penghitungan Baseline emisi GRK dan data informasi satuan *output* Produk Domestik Bruto Nasional dan Daerah.

3.13.2 Target TPB/SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana

3.13.2.1 Target Pencapaian TPB/SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana Tahun 2021-2024

TPB/SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim memiliki 3 (tiga) target, yaitu:

- (1) memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam,
- (2) mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional, dan
- (3) meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim

Indikator dan target capaian TPB/SDGs Tujuan 13 untuk periode tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.15.

**Tabel 3.15 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 13
Penanganan Perubahan Iklim**

TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara								
13.1.1. (a)	Jumlah korban meninggal dan hilang akibat terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	BNPB	Per 100.000 orang	0,16	Maksimal 0,2	Maksimal 0,2	Maksimal 0,2	Maksimal 0,2
13.1.1. (b)	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	Bappenas	% PDB	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15
13.1.2 *	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030	BNPB	Dokumen	PM	1	1	1	1
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional	BNPB	Persen	36,96	37,94	39,88	36,96	36,96

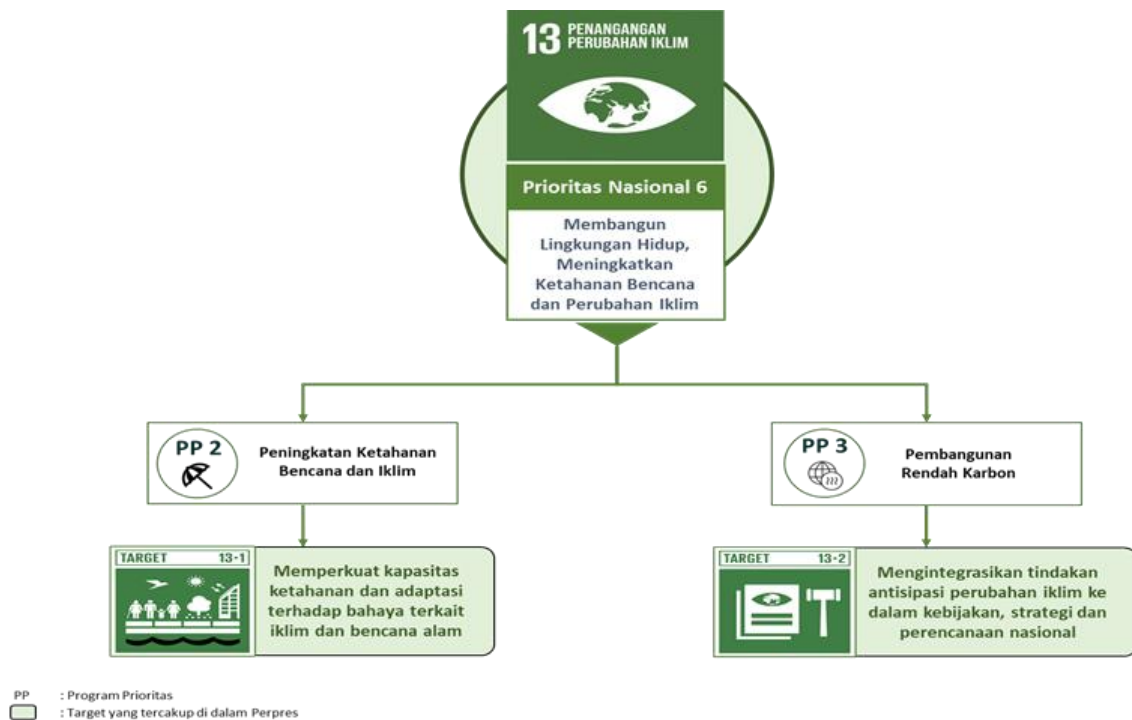
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional								
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen <i>Biennial Update Report</i> (BUR) dan <i>National Communications</i>	1. KLHK; 2. Bappenas	Dokumen	1	1	1	1	1
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Bappenas	Mton CO2e	1.455,95	1.446,60	1.487,21	1.495,78	1.583,72
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Bappenas	Persen	25,93	24,05	26,87	27,02	27,27
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Bappenas	Persen	24,57	23,40	21,54	23,22	23,22
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim								
13.3.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	KLHK, BMKG, BNPB	Jumlah satuan pendidikan dan desa/kelurahan	2.238	3.020	3.380	3.800	3.820
		KLHK	Jumlah peserta Sekolah Adiwiyata	518	1.530	1.530	1.530	1.530
		KLHK	Jumlah kampung iklim	100	195	200	250	325

TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>Baseline</i>) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
		BMKG	Jumlah peserta Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan	1.500	6.000	6.400	6.400	6.400
		BNPB	Jumlah desa tangguh bencana	120	120	90	120	120
13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.								
13.a.1.(a)	Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim	Bappenas dan Kemenkeu (KRISNA-SAKTI)	Miliar Rupiah (Rupiah murni)	11	PM	PM	PM	PM

Indikator dan target capaian TPB/SDGs Tujuan 13 tersebut relevan dengan target penanganan perubahan iklim di dalam RPJMN 2020-2024 Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Program Prioritas 2 Pen Indikator dan target capaian TPB/SDGs Tujuan 13 tersebut relevan dengan target penanganan perubahan iklim di dalam RPJMN 2020-2024 Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Program Prioritas 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dan Program Prioritas 3 Pembangunan Rendah Karbon Gambar (3.14).



Gambar 3.14 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 13 Dalam RPJMN 2020-2024

Secara detail, target Pembangunan Berketahanan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Target dan Indikator Sasaran Pembangunan Berketahanan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon

Target Penanganan Perubahan Iklim	Indikator	Satuan	Target Pencapaian			
			2020	2021	2022	2023
Pembangunan Berketahanan Iklim	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	Persen PDB	0,34	0,59	0,81	1,00
	Sektor Kelautan dan Pesisir		0,26	0,41	0,54	0,65
	Sektor Air		0,01	0,03	0,05	0,06
	Sektor Pertanian		0,05	0,11	0,16	0,21
	Sektor Kesehatan		0,02	0,04	0,06	0,08
Pembangunan Rendah Karbon	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Persen	25,93	24,05	26,87	27,02
	Sektor Berbasis Lahan		38,02	35,11	39,55	38,05
	Sektor Energi		14,45	14,08	10,58	13,27
	Sektor IPPU		1,95	4,18	17,87	17,88
	Sektor Limbah		7,70	6,89	35,75	36,81
	Sektor Pesisir dan Laut		6,50	6,60	6,80	7,04
	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Persen	24,57	23,40	21,54	23,22

3.13.2.2 Target Tujuan 13 TPB/SDGs Pasca Tahun 2024

Target Tujuan 13 TPB/SDGs yang terkait dengan penanganan perubahan iklim pasca tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisis dan proyeksi yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk mencapai target penurunan emisi dan pembangunan berketahanan iklim pada tahun 2030, 2045, dan pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat. Hasil analisis dan proyeksi tersebut menjelaskan bagaimana perkiraan pencapaian penurunan emisi GRK dan pembangunan berketahanan iklim di masa mendatang, implikasinya pada pola pembangunan dan pilihan kebijakan pembangunan yang harus diterapkan.

Target dan Arah Kebijakan pasca 2024 menjelaskan bagaimana upaya transformasi menuju ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, dimana diharapkan dapat menjawab: (1) komitmen Indonesia secara global yang akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga 2030 dalam Peraturan Presiden Nomor 59/2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sekaligus menjawab target penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% pada tahun 2030 sebagaimana diamanatkan dalam UU 16/2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement; (2) upaya Indonesia mengejar target Visi Indonesia 2045; dan (3) upaya Indonesia dalam mencapai NZE.

I. Pembangunan Berketahanan Iklim

Secara umum target Pembangunan Berketahanan Iklim difokuskan pada pencapaian target pengurangan kerugian ekonomi akibat bahaya iklim dalam PDB hingga tahun 2024. Namun, dengan mempertimbangkan potensi ancaman krisis iklim dan bencana hidrometeorologi yang terus meningkat maka Kebijakan PBI perlu terus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional hingga tahun 2060 khususnya dalam siklus RKP, RPJMN maupun RPJPN. Program dan kegiatan yang ada saat ini akan terus diperkuat dan dikembangkan, sedangkan target detail akan disusun pada fase penyiapan dokumen Teknokratik RPJMN dan RPJPN.

Tabel 3.17 Target Pembangunan Berketahanan Iklim

Target Makro Pembangunan Berketahanan Iklim		Satuan	Tahun		
			2024-2030	2031-2045	2046-2060
Pengurangan Kerugian Ekonomi		Persen (%) PDB	N/A	N/A	N/A
Sektor	Kebijakan	Satuan	2024-2030	2031-2045	2046-2060
Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Kelautan terhadap Perubahan Iklim	Jumlah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)	Unit (Kawasan)	N/A	N/A	N/A
	Jumlah pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi lebih dari 80% (pelabuhan)	Unit (Kawasan)	N/A	N/A	N/A
	Panjang tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan (km)	Km	N/A	N/A	N/A
	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya	Lokasi	N/A	N/A	N/A
	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Hektar (ha)	N/A	N/A	N/A

Sektor	Kebijakan	Satuan	2024-2030	2031-2045	2046-2060
Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	Tambahan debit air baku di kawasan Rawan Air (m3/detik)	m3/detik	N/A	N/A	N/A
	Jumlah wilayah sungai yang ditingkatkan ketahanan infrastruktur vitalnya terhadap risiko bencana dan perubahan iklim (wilayah sungai)	Unit (Kawasan)	N/A	N/A	N/A
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Hektar (ha)	N/A	N/A	N/A
	Pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah kolam	N/A	N/A	N/A
Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	Jumlah unit bangunan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian (unit)	Unit (bangunan)	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Penyuluh Pertanian dan Petani yang meningkat Pemahaman Iklim melalui Sekolah Lapang Iklim (orang)	Orang	N/A	N/A	N/A
	Teknologi Adaptasi Perubahan iklim	Jumlah unit teknologi	N/A	N/A	N/A
	Penerapan Penanganan DPI	Hektar (ha)	N/A	N/A	N/A
Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan Kabupaten/kota Sehat (KKS) (kab/kota)	Kab/Kota	N/A	N/A	N/A
	Pengendalian Penyakit <i>Arbovirosis</i>	Persentase kab/kota dengan <i>Incidence Rate (IR)</i> $DBD \leq 49/100.000$ penduduk (persen)	N/A	N/A	N/A
	Kewaspadaan dini Respon peringatan dini Kejadian Luar Biasa (KLB) kejadian penyakit	Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (<i>alert systems</i>) (kab/kota)	N/A	N/A	N/A

II. Pembangunan Rendah Karbon

Secara umum, target Pembangunan Rendah Karbon pasca tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- (1) potensi penurunan emisi GRK secara bertahap hingga mencapai *net-zero emission* pada tahun 2060
- (2) Intensitas emisi GRK yang terus menurun, menandakan pencapaian akan ekonomi hijau dalam jangka panjang

Target tersebut dapat dicapai dengan pelaksanaan skenario pembangunan rendah karbon, sebagaimana tersaji dalam tabel 3.18.

Tabel 3.18 Target Skenario Pembangunan Rendah Karbon Sampai Dengan 2060

Target Makro Pembangunan Rendah Karbon		Satuan	Tahun		
			2024-2030	2031-2045	2046-2060
Potensi penurunan emisi GRK		Persen	27,3 - 29	34 - 84	86 – 100
Intensitas emisi GRK		Ton CO2/miliar rupiah	253 - 420	35 - 236	0 – 29

Sektor	Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon	Satuan	2024-2030	2031-2045	2046-2060
Energi	Tingkat Efisiensi Energi	Persen/tahun	1,5 - 6,0	6,0	6,0
	Produksi Listrik dari Pembangkit EBT terhadap Total Pembangkit	Persen	27,0 - 64,0	67,0 - 87,0	89,0 - 96,0
	Produksi Listrik dari PLTA terhadap Total Pembangkit	Persen	9,0 - 40,0	27,0 - 45,0	15,0 - 25,0
	Produksi Listrik dari PLTP terhadap Total Pembangkit	Persen	9,0 - 12,0	7,0 - 8,0	6,0 - 8,0
	Produksi Listrik dari PLTS terhadap Total Pembangkit	Persen	1,0 - 5,0	6,0 - 28,0	30,0 - 44,0
	Produksi Listrik dari PLTB terhadap Total Pembangkit	Persen	0,0 - 7,0	8,0 - 21,0	22,0 - 29,0

Sektor	Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon	Satuan	2024-2030	2031-2045	2046-2060
	Produksi Listrik dari PLTBm terhadap Total Pembangkit	Persen	6,0 - 3,0	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0
	Share Kendaraan Listrik	Persen	0,0 -16,0	19,0 - 63,0	67,0 - 95,0
	Penghapusan Subsidi Fosil		Subsidi energi fosil mulai dihapus	Subsidi energi fosil dihapus sepenuhnya	Subsidi energi fosil dihapus sepenuhnya
	Pajak Karbon		Ditetapkannya Pajak Karbon	Ditetapkannya Pajak Karbon	Ditetapkannya Pajak Karbon
	Penghentian Penggunaan Batubara		Pengurangan penggunaan batubara dimulai	Pengurangan penggunaan batubara	Penghentian penggunaan batubara pada 2060
	Elektrifikasi Rumah Tangga	Persen	100%	100%	100%
	Share BBM ke Hidrogen	Persen	0,0	0,0 - 2,0	2,0 - 4,0
	Share Gas Industri ke Hidrogen	Persen	0,0	0,0 - 50,0	50,0 - 100
IPPU	Intensitas Emisi IPPU	Ton/miliar Rupiah	22,4 - 30,0	14,1 - 21,7	11,7 - 14,0
	Persentase Industri yang menerapkan teknologi Carbon Capture & Storage	Persen	0,0	0,0 - 50,0	50,0 - 100
Lahan	Pengurangan Alih Fungsi Lahan dari Hutan ke Lahan Pertanian		Tidak ada alih fungsi lahan dari hutan ke lahan pertanian	Tidak ada alih fungsi lahan dari hutan ke lahan pertanian	Tidak ada alih fungsi lahan dari hutan ke lahan pertanian
	Share Pertanian Berkelanjutan (LP2B)	Persen/tahun	0-0,4%	0,4%	0,4%
	Restorasi Lahan Gambut per tahun	Ha/tahun	50.000	50.000	0,3%
	Dekomposisi Lahan Gambut	Ton/ha/tahun	24-28	25-28	28-31
	Restorasi Lahan Bera	Ha/tahun	110.000 – 150.000	150.000 – 240.000	250.000

Sektor	Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon	Satuan	2024-2030	2031-2045	2046-2060
Limbah	Pengurangan Produksi Sampah	Persen	0,0 - 5,0	5,0 - 18,0	18,0 - 20,0
	Tingkat Sampah yang Berkumpul	Persen	80,0 - 90,0	90,0 - 100	90,0 - 100
	Pengurangan Produksi Limbah Cair Industri	Persen	0,0 - 23,0	23,0 - 62,0	62,0 - 100
	Tingkat Daur Ulang Sampah Perkotaan	Persen	1,4 - 10,0	10,0 - 25,0	25,0 - 40,0
	Tingkat Penggunaan Sampah untuk Energi	Persen	10,0 - 12,5	12,5 - 16,0	16,0 - 20,0
	Tingkat Sampah yang Terkompos	Persen	10,0 - 17,0	17,0 - 28,0	28,0 - 40,0
Pesisir dan Kelautan	Tingkat Kerusakan Mangrove Per Tahun	Persen/tahun	0,9%	0,3%	0,3%
	Restorasi Mangrove	Ha/tahun	12.000	12.000	50.000

3.13.3 Arah Kebijakan dan Strategi TPB/SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana

3.13.3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2021-2024

I. Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI)

Krisis iklim mengancam beberapa sektor kunci di Indonesia yaitu 5,8 juta km² wilayah perairan Indonesia berbahaya bagi kapal nelayan <10 GT, 1.800 km garis pantai masuk dalam kategori sangat rentan dan produksi beras akan menurun di beberapa wilayah. Selain itu, juga ada ancaman tenggelamnya beberapa wilayah di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian Proyeksi Iklim Laut, tingkat kenaikan muka laut bervariasi dari 0,6 cm/tahun sampai lebih dari 1,2 cm/tahun. Hal tersebut diperparah dengan fenomena land subsidence, dimana rata-rata laju Land Subsidence mencapai 1-15 cm /tahun

Selain kerugian fisik, masyarakat juga berpeluang kehilangan mata pencaharian sebagai dampak negatif dari perubahan iklim. Seiring dengan hal tersebut, ekonomi Indonesia juga diprediksi terancam oleh perubahan iklim, dimana terdapat potensi penurunan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita. Berdasarkan kajian 2019, kerugian ekonomi Indonesia untuk empat sektor prioritas RPJMN 2020-2024 diperkirakan adalah 102,36 triliun rupiah di tahun 2020 dan 115,53 triliun rupiah pada tahun 2024 atau peningkatan kerugian sebesar 12,76% selama lima tahun. Nilai ini belum mempertimbangkan *Consumption*, *Investment* dan *Government Spending* sebagai variabel antara yang menghubungkan antara



perubahan iklim dengan kondisi makroekonomi di level nasional maupun provinsi (Gambar 3.15).

SEKTOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
 Kelautan & Pesisir	81,30	81,43	81,57	81,69	81,82
 Air	3,83	4,74	5,61	6,45	7,29
 Pertanian	11,20	13,40	15,59	17,77	19,94
 Kesehatan	6,03	6,15	6,26	6,37	6,48
JUMLAH	102,36	105,72	109,03	112,29	115,53

Gambar 3.15 Potensi kerugian ekonomi dampak perubahan iklim

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019

Kebijakan penanganan dampak perubahan iklim dilakukan melalui Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) difokuskan pada empat sektor terdampak perubahan iklim yaitu Sektor Kelautan dan Pesisir; Sektor Pertanian; Sektor Air; dan Sektor Kesehatan yang dilakukan melalui strategi sebagai berikut (Gambar 3.16):

	 KELAUTAN DAN PESISIR	 AIR	 PERTANIAN	 KESEHATAN
Infrastruktur	Mengombinasikan pendekatan Ecosystem-based adaptation (EbA) dan community-based adaptation (CbA)	Memperhitungkan kapasitas daya tampung dengan pertimbangan jumlah KK terkena dampak, luasan area pertanian, dan industri	Memenuhi kebutuhan air pertanian pada daerah-daerah sentra komoditas pangan yang berpotensi kekeringan dan penurunan produksi	Memperhitungkan kapasitas fasilitas kesehatan dengan pertimbangan jumlah KK terkena dampak
Teknologi	Teknologi yang mampu mendeteksi gelombang ekstrem untuk mengurangi jumlah kecelakaan kapal	Secara realtime dan mampu menyalurkan air ke wilayah yang mengalami kekeringan	Mengadopsi dan memodifikasi teknologi untuk identifikasi pertumbuhan tanaman, merekam penggunaan air dan nutrisi	Tersedianya sistem informasi dan peringatan dini wabah DBD
Peningkatan Kapasitas	Penyediaan alternatif mata pencaharian bagi nelayan kecil yang tidak bisa melaut akibat gelombang ekstrem	Peningkatan kesadaran masyarakat (sense of belonging) untuk memanfaatkan dan mengolah sumber air untuk persediaan saat kekeringan	Meningkatkan pemahaman petani terhadap informasi iklim yang bermanfaat untuk menentukan waktu tanam dan praktik pertanian	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM terkait adaptasi perubahan iklim untuk penguatan kesehatan masyarakat dan lingkungan
Tata Kelola	Penyediaan perangkat regulasi dan informasi terkait bahaya gelombang tinggi dan jenis dan kapasitas kapal nelayan	Pengembangan atau revisi Desain Engineering/ standar teknis/ operasional infrastruktur yang adaptif	Mengembangkan database terpadu pertanian sebagai bagian dari strategi Climate Smart Agriculture	Merevitalisasi program pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan proyeksi KLB DBD

Gambar 3.16 Delivery strategy Pembangunan Berketahanan Iklim

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019

PBI juga dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketahanan iklim, melalui strategi (i) penguatan dan harmonisasi sistem, regulasi serta tata kelola kelembagaan yang efektif dan efisien; (ii) penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana; (iii) peningkatan kapasitas dan kapabilitas yang cepat dan andal; serta (iv) penguatan tata kelola dan pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana dan upaya peningkatan ketahanan iklim.

II. Pengurangan Risiko Bencana

Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 juga telah mengacu pada Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*) 2015-2030 (BNPB, 2020). Di tingkat daerah, Pemerintah daerah mengadopsi, mengembangkan dan menerapkan strategi penanggulangan bencana lokal melalui penyusunan dan pengesahan dokumen strategi PB tingkat daerah (RPBD, RAD PB, dan/atau RAD API) yang memuat kebijakan dan strategi, serta rencana aksi untuk implementasi pengurangan risiko bencana di tingkat daerah.

III. Pembangunan Rendah Karbon (PRK)

Arah kebijakan pembangunan rendah karbon merupakan kebijakan pembangunan terpilih untuk menghindari terjadinya saling mengurangi (*trade off*) antara target pertumbuhan ekonomi, penurunan intensitas emisi GRK dan penurunan tingkat kemiskinan. Kebijakan pembangunan terpilih tersebut bertujuan untuk: mendukung terwujudnya target pertumbuhan ekonomi; menurunkan intensitas emisi GRK dibawah baseline intensitas emisi GRK yang ditetapkan; mendukung pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan; meningkatkan komitmen dan mendukung inisiatif pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan rendah karbon; dan meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

Arah kebijakan dan strategi utama dalam pembangunan rendah karbon difokuskan pada upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada sektor-sektor prioritas yang diharapkan selain dapat mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terlepas di atmosfer, sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka pembangunan nasional. Selain itu dengan penerapan aksi pembangunan yang rendah karbon dan emisi, berpeluang menciptakan lapangan kerja hijau (*green job*) sehingga berpotensi pula meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga merupakan tulang punggung upaya untuk menuju transformasi ekonomi pasca pandemi Covid-19 untuk tumbuh lebih baik dan berkelanjutan. Adapun strategi untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan rendah karbon mencakup:

- a) Pembangunan energi dan transportasi berkelanjutan:
 - 1) Pengelolaan energi baru terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan,
 - 2) Efisiensi dan konservasi energi,
 - 3) Peningkatan teknologi pembangkit dan industri,
 - 4) Peningkatan penggunaan kendaraan listrik,
 - 5) Penerapan disinsentif untuk bahan bakar fosil,
 - 6) Pengurangan secara bertahap menuju penghentian penggunaan bahan bakar fosil.
- b) Pemulihan lahan berkelanjutan:
 - 1) Restorasi dan pemulihan lahan gambut,
 - 2) Rehabilitasi hutan dan lahan,
 - 3) Pengurangan laju deforestasi,
 - 4) Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian berkelanjutan.
- c) Pengelolaan limbah:
 - 1) Pengelolaan sampah rumah tangga,
 - 2) Pengelolaan limbah cair.
- d) Pengembangan industri hijau:
 - 1) Konservasi dan audit penggunaan energi pada industri,
 - 2) Penerapan modifikasi proses dan teknologi,
 - 3) Manajemen limbah industri.
- e) Rendah karbon pesisir dan laut: inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Agar target-target Pembangunan Rendah Karbon tercapai, diperlukan strategi-strategi yang mendukung keberjalanan berbagai kebijakan sektoral di atas. Beberapa strategi yang telah diidentifikasi antara lain:

1. Dukungan pendanaan baik dari APBN maupun skema pendanaan inovatif yang mendorong pihak swasta maupun masyarakat umum untuk turut serta melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, seperti skema pendanaan PLTS atap di gedung pemerintah, komersial, maupun perumahan,
2. Dorongan insentif maupun stimulus fiskal seperti pengurangan pajak untuk menarik minat pihak swasta berinvestasi pada kegiatan rendah karbon, serta penerapan disinsentif bagi sumber penghasil emisi karbon, seperti penerapan pajak karbon,
3. Penyiapan kebijakan yang mendorong industri untuk melakukan praktik bisnis hijau, seperti penerapan ekonomi sirkular dan penggunaan EBT sebagai sumber energi industri.

IV. Peningkatan Pendidikan, Penumbuhan Kesadaran dan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan terkait Penanganan Perubahan Iklim

Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terkait mitigasi, adaptasi dan pengurangan dampak perubahan iklim, dilakukan dilaksanakan melalui penguatan pendidikan formal maupun informal yang diselenggarakan melalui lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah. Beberapa strategi yang dilaksanakan diantaranya adalah penerapan program Sekolah Adiwiyata untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, penyelenggaraan kampung iklim, sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan dan pembentukan desa tangguh bencana. Strategi lainnya adalah melalui pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi mengenai perubahan iklim melalui berbagai moda telekomunikasi, serta dalam berbagai pertemuan/ forum informal maupun formal.

3.13.3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pasca Tahun 2024

I. Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI)

Kebijakan Pasca Tahun 2024

Dampak bahaya iklim, bencana hidrometeorologi dan ancaman *loss & damage* akan menjadi permasalahan serius yang kita hadapi setelah pandemi COVID 19. Diperlukan upaya yang extraordinary untuk merespon hal tersebut, dimana penguatan ketahanan iklim perlu menjadi pilar utama pembangunan.

Pasca tahun 2024, Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim tetap akan menjadi terobosan kebijakan pembangunan yang tidak hanya fokus pada isu adaptasi perubahan iklim melainkan sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekologis.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional, Kebijakan PBI berperan sebagai rujukan untuk penyusunan rencana kerja pemerintah serta RPJMN dan RPJPN periode berikutnya. Terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dikembangkan dalam kebijakan PBI pasca tahun 2024 yaitu:

- **Peningkatan Ketahanan Ekonomi**

Peningkatan ketahanan ekonomi dalam PBI akan dilaksanakan dengan pendekatan aspek infrastruktur (climate-resilient infrastructure), teknologi (climate-proof technology), peningkatan kapasitas, tata kelola dan pendanaan. Adapun tujuannya adalah untuk melaksanakan pembangunan berketahanan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan pada sektor prioritas dan kawasan terdampak.

- **Peningkatan Ketahanan Sosial**

Peningkatan ketahanan sosial dalam PBI akan dilaksanakan melalui implementasi perlindungan sosial adaptif, dimana Intervensi dari kegiatan akan diarahkan pada lokasi prioritas ketahanan iklim dan dengan tingkat kemiskinan tinggi. Beberapa Intervensi Perlindungan Sosial Adaptif yang dapat diterapkan dan termasuk dalam Aksi Ketahanan Iklim yaitu (1) implementasi mekanisme asuransi pertanian, kapal nelayan, dan perikanan

budidaya; (2) bantuan pembiayaan dan wirausaha sektor produksi; (3) Jaminan kesehatan; serta (4) Infrastruktur umum dan layanan dasar masyarakat.

- Peningkatan Ketahanan Ekologis

Peningkatan ketahanan ekologis dalam PBI akan dilaksanakan melalui aksi ketahanan iklim yang bersifat *nature based solution*. Terdapat timbal balik yang saling menguntungkan antara aksi ketahanan iklim berbasis ekosistem dengan ketahanan ekologis. Kelestarian sumber daya alam menjadi modal utama dalam peningkatan produksi pertanian dan perikanan dalam sektor ketahanan iklim yang berkelanjutan.

Salah satu sektor krusial yang membutuhkan ketahanan ekologis yang tinggi adalah sektor kelautan dan pesisir. Ancaman kenaikan tinggi muka laut mencapai 0,7 cm/tahun sampai 1 cm/tahun yang kemudian diperparah dengan adanya fenomena *land subsidence* yang mencapai 1-15 cm/tahun. Dampak tersebut akan semakin terasa pada tahun-tahun mendatang, sehingga aksi ketahanan iklim seperti pembangunan struktur hybrid pelindung pantai menjadi solusi kunci untuk mengantisipasinya.

Kesuksesan implementasi Pembangunan Berketahanan Iklim pada aspek ekonomi, sosial dan ekologis akan menjadi instrumen pendukung untuk implementasi Ekonomi Hijau yang berperan untuk mendorong transformasi ekonomi ke arah yang lebih berkelanjutan dan melepaskan Indonesia dari ancaman dari *middle income trap* sebelum 2045.

II. Pembangunan Rendah Karbon

Kebijakan Tahun 2024-2030

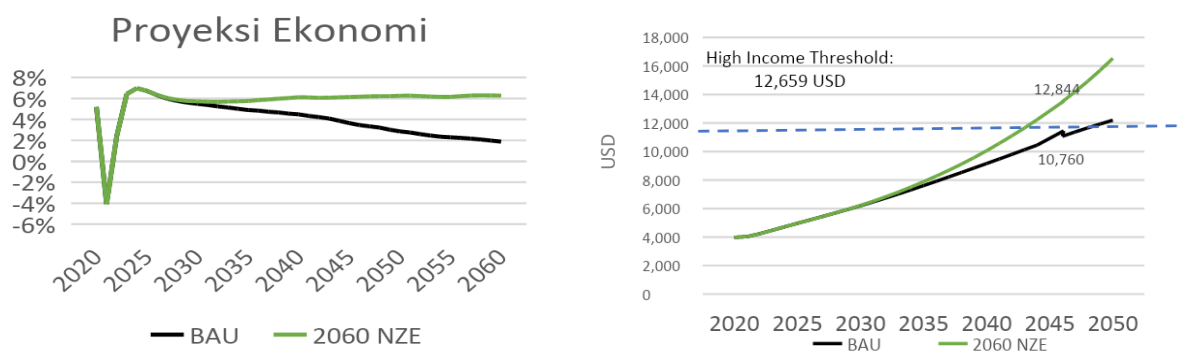
Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon sampai dengan tahun 2030 difokuskan pada pencapaian target penurunan emisi GRK sebesar 29% dan penguatan persiapan upaya implementasi Paris Agreement pasca 2030. Adapun strategi untuk dapat mencapai target penurunan emisi GRK tersebut dilakukan dengan 1) sektor energi: tingkat efisiensi energi mencapai 1,5-6,0%, peningkatan produksi listrik dari Pembangkit energi baru terbarukan yang mencapai diatas 60% terhadap total pembangkit, share kendaraan listrik dibanding total kendaraan sebesar sampai dengan 16%, penghapusan subsidi energi fosil, penetapan pengaturan pajak karbon, pengurangan penggunaan batu bara; 2) sektor industri: intensitas emisi IPPU mencapai 22,4 ton/miliar rupiah; 3) sektor lahan: moratorium alih fungsi lahan hutan ke hutan pertanian, share pertanian berkelanjutan mencapai 0,4%; 4) sektor limbah: pengurangan produksi sampah mencapai 5%, 90% sampah terkelola, pengurangan limbah cair produksi mencapai 23%, sampah dikomposkan mencapai 17% dan 12,5% penggunaan sampah untuk energi; 5) sektor pesisir dan kelautan:menekan laju tingkat kerusakan mangrove per tahun mencapai 0,9%

Selanjutnya, penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon juga dilakukan melalui implementasi stimulus hijau sebagai bagian dari pemulihan ekonomi yang difokuskan pada inisiatif pengembangan bangunan hijau atau pemasangan panel surya atap pada 70

gedung pemerintah, penanaman kembali pada sektor berbasis lahan, serta implementasi ekonomi sirkular pada lima sektor utama ekonomi (makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, perdagangan grosir dan eceran, serta peralatan listrik dan elektronik). Studi yang telah dilakukan oleh Bappenas menunjukkan bahwa dengan mengadopsi peluang ekonomi sirkular di ke-lima sektor ini, terdapat beberapa potensi, manfaat dan keuntungan sebagai berikut: PDB Indonesia berpotensi meningkat dari IDR 593 menjadi 638 triliun (USD 4 Miliar - USD 45 Miliar dibandingkan dengan pendekatan “business as usual” pada tahun 2030; 4,4 juta pekerjaan hijau (green jobs) dapat diciptakan secara kumulatif antara tahun 2021 dan 2030, dimana 75 persennya membuka kesempatan utama untuk perempuan; dan emisi CO₂eq dan penggunaan air berkurang menjadi 126 juta ton dan 6,3 miliar meter kubik pada tahun 2030.

Kebijakan Tahun 2031-2045

Pada tahun 2045, Indonesia diharapkan telah melalui babak baru pembangunan yang telah menyelesaikan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045 dan dapat mencapai Visi Indonesia 2045, yang salah satunya adalah menjadi menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar ke-5 pada tahun 2045. Capaian pertumbuhan tersebut tentu saja didukung oleh penerapan ekonomi hijau yang menjadi syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan tangguh dalam jangka panjang, serta selaras dengan tujuan Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Untuk itu, kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang menerapkan target-target yang ambisius sangat diperlukan untuk dapat mencapai Visi Indonesia 2045 tersebut, mengingat pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim merupakan prasyarat utama untuk penerapan ekonomi hijau (Gambar 3.17).



Gambar 3.17 Proyeksi ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita

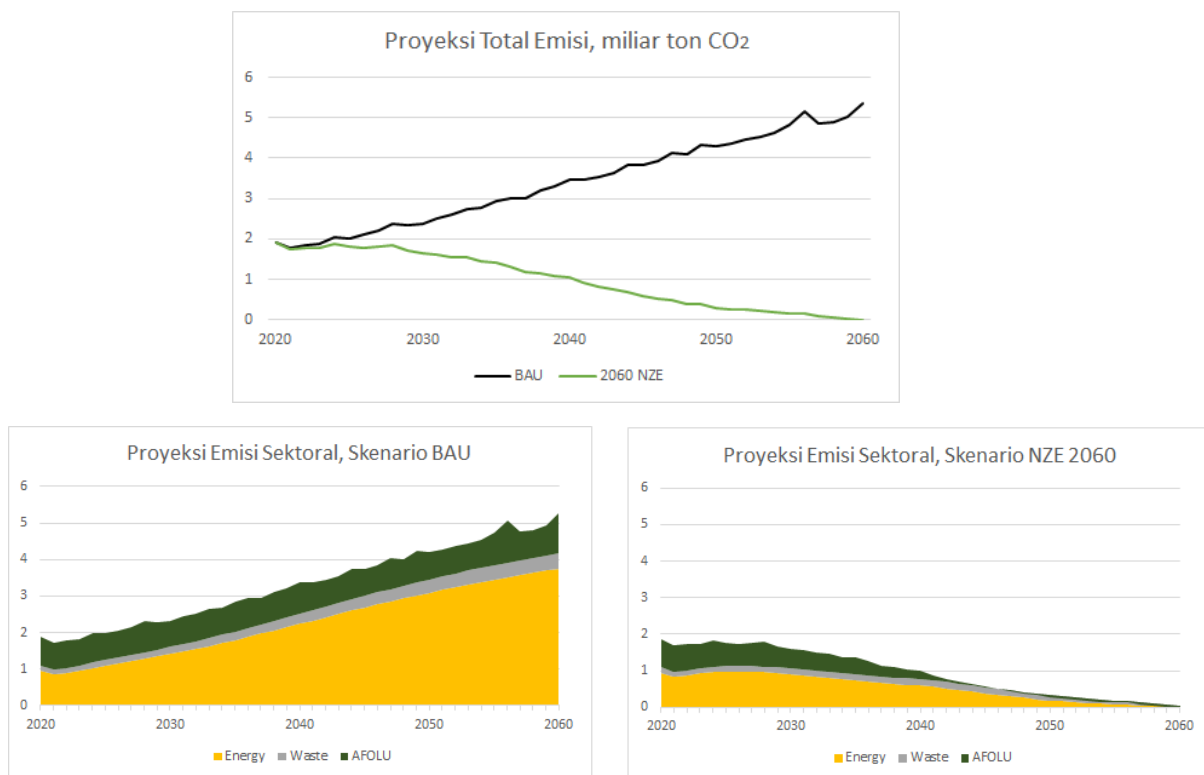
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Adapun strategi penerapan pembangunan rendah karbon sampai dengan tahun 2045 yang perlu dilakukan diantaranya 1) sektor energi: tingkat efisiensi energi mencapai 6%, peningkatan produksi listrik dari Pembangkit energi baru terbarukan yang mencapai sampai dengan 87% terhadap total pembangkit, share kendaraan listrik dibanding total kendaraan sebesar sampai dengan 63%, penghapusan subsidi energi fosil sepenuhnya, ditetapkannya pajak karbon, pengurangan penggunaan batu bara; 2) sektor industri: intensitas emisi IPPU mencapai 14% ton/miliar rupiah; 3) sektor lahan: moratorium alih fungsi lahan hutan ke hutan

pertanian, share pertanian berkelanjutan mencapai 0,4%; 4) sektor limbah: pengurangan produksi sampah mencapai 18%, 90-100% sampah terkelola, pengurangan limbah cair produksi mencapai 62%, sampah dikomposkan mencapai 28%, daur ulang sampah mencapai 25%, dan 16% penggunaan sampah untuk energi; 5) sektor pesisir dan kelautan: mengurangi tingkat kerusakan mangrove sampai dengan 3% per tahun disertai dengan restorasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

Kebijakan Tahun 2046-2060

Berdasarkan analisis Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia dapat mencapai puncak atau peak emisi GRK pada sektor energi pada tahun 2027 dan dapat mencapai Net Zero Emission (NZE) atau karbon netral pada tahun 2060 atau lebih cepat, sebagai upaya transformasi menuju ekonomi hijau.. Berdasarkan exercise terhadap proyeksi total emisi gas rumah kaca hingga tahun 2060, penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar berasal dari sektor energi dan berbasis lahan (Gambar 3.18). Sektor energi merupakan kontributor terbesar emisi gas rumah kaca. Sektor tersebut mampu menghasilkan 36,44 gigaton karbon dioksida ekuivalen (GtCO₂e) atau 71,5% dari total emisi pada 2017 lalu. Pertanian serta perubahan tata guna lahan dan hutan (*land-use change and forestry/LULUCF*) turut berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global. Kedua sektor tersebut masing-masing berkontribusi menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 5,88 GtCO₂e dan 3,22 GtCO₂e. Untuk itu, Pemerintah Indonesia menitikberatkan kebijakan utamanya pada kedua bidang tersebut.



Gambar 3.18 Proyeksi tingkat emisi GRK total dan sektoral hingga tahun 2060

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Adapun strategi penerapan pembangunan rendah karbon sampai dengan tahun 2060 yang perlu dilakukan diantaranya 1) sektor energi: tingkat efisiensi energi mencapai 6%, peningkatan produksi listrik dari Pembangkit energi baru terbarukan yang mencapai sampai dengan 96% terhadap total pembangkit, share kendaraan listrik dibanding total kendaraan sebesar sampai dengan 95%, penghapusan subsidi energi fosil sepenuhnya, ditetapkannya pajak karbon,, penghentian penggunaan batu bara; 2) sektor industri: intensitas emisi IPPU mencapai 11% ton/miliar rupiah; 3) sektor lahan: moratorium alih fungsi lahan hutan ke hutan pertanian, share pertanian berkelanjutan mencapai 0,4%; 4) sektor limbah: pengurangan produksi sampah mencapai 20%, 90-100% sampah terkelola, pengurangan limbah cair produksi mencapai 62%, sampah dikomposkan mencapai 40%, daur ulang sampah mencapai 40%, dan 20% penggunaan sampah untuk energi; 5) sektor pesisir dan kelautan: mengurangi tingkat kerusakan mangrove sampai dengan 3% per tahun disertai dengan restorasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

3.13.4 Kerangka Pelaksanaan dan Sistem Pelaporan, Evaluasi dan Pelaporan

3.13.4.1 Kerangka Pelaksanaan

Dalam hal pelaksanaan RAN TPB/ SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Pemerintah Pusat melaksanakan kegiatan yang mendukung target penanganan perubahan iklim sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen ini. Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengacu kepada dokumen RANAN TPB/ SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim ini dan menyusun:

- 1) Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD), yang meliputi sekurang-kurangnya baseline intensitas emisi GRK daerah, target dan arah kebijakan PRK Daerah, kebijakan strategis, aksi PRK Daerah, dan program, kegiatan dan penganggaran PRK; dan
- 2) Rencana Pembangunan Berketahanan Iklim Daerah (RPBID), yang meliputi setidaknya penyusunan baseline RPBI Daerah, target dan arah kebijakan PBI Daerah, kebijakan strategis, aksi PBI Daerah, dan program, kegiatan dan penganggaran PBI;

Selanjutnya, Dokumen RPRKD dan RPBID perlu diurus-utamakan ke dalam dokumen perencanaan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah), baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk memastikan pelaksanaan penanganan perubahan iklim yang holistik dan integratif.

Penghitungan baseline intensitas emisi GRK di tingkat nasional dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, dan digunakan untuk penetapan target PRK Nasional. Sedangkan penghitungan dan proyeksi Baseline intensitas emisi GRK daerah dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dan digunakan sebagai dasar dalam penetapan target Pembangunan Rendah Karbon Daerah. Dalam hal terjadi perubahan pada baseline intensitas emisi GRK yang telah ditetapkan, maka dilakukan koordinasi Perubahan Baseline intensitas emisi GRK untuk tingkat nasional oleh Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, sedangkan Perubahan Baseline intensitas emisi GRK daerah dikoordinasikan oleh gubernur untuk tingkat provinsi dan bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota.

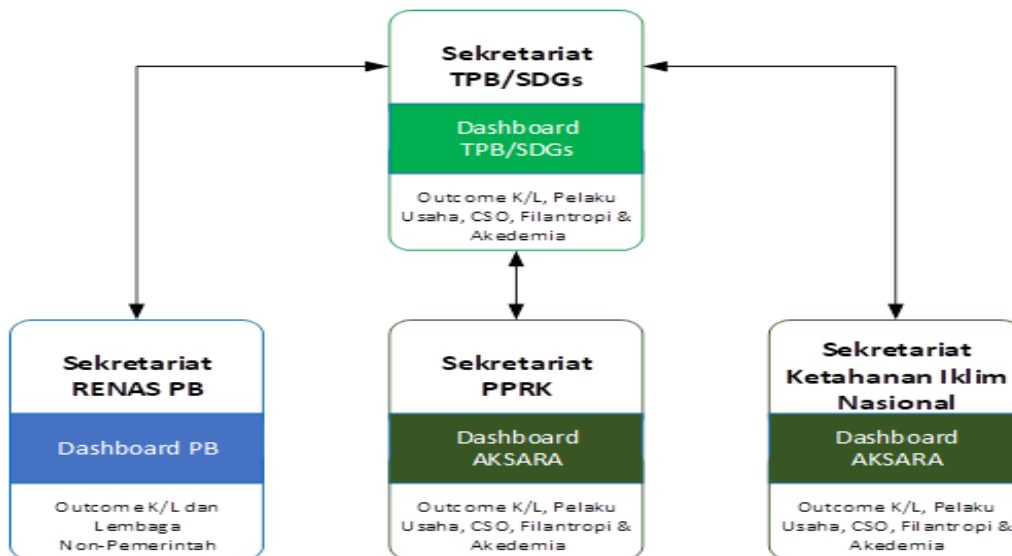
Dalam rangka penyusunan Aksi PRK dan PBI di dalam dokumen RPRKD dan RPBIID perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: penentuan target keluaran dan hasil; penentuan lokasi dan batas waktu suatu program dan kegiatan; pembagian tanggung jawab program dan kegiatan; pendayagunaan sumber-sumber potensi pendanaan; dan peningkatan partisipasi para Pemangku Kepentingan.

Dalam rangka penyusunan RPRK dan RPBI daerah, Bupati/Walikota dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan RPRK daerah kepada Gubernur. Gubernur mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengharmonisasikan usulan program dan kegiatan RPRK dan RPBI daerah dari Bupati/Walikota dan kemudian ditetapkan sebagai RPRK dan RPBI daerah dengan Peraturan Gubernur setelah berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Menteri Dalam Negeri.

Kerangka Pendanaan PRK dan PBI dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional. Pendanaan Aksi PRK yang termuat dalam RAN TPB/ SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim ini disesuaikan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang termuat dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan/atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

3.13.4.2 Sistem Pelaporan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP)

Dalam rangka pencapaian target RAN TPB/ SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, dilakukan pemantauan dan evaluasi capaian target yang telah ditetapkan. Alur pemantauan dan evaluasi RAN TPB/ SDGs dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sekretariat SDGs Nasional melakukan mensinkronkan pemantauan dan evaluasi Tujuan 13 TPB/SDGs yang dilaksanakan oleh Sekretariat Renas PB untuk kegiatan Penanggulangan Bencana, Sekretariat PRK untuk kegiatan PRK, dan Sekretariat PBI untuk kegiatan PBI, sebagaimana pada Gambar 3.19.



Gambar 3.19 Alur dan pelaksana pemantauan dalam pencapaian RAN TPB/SDGs Tujuan 13

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tujuan 13 TPB/SDGs untuk Pembangunan Berketahanan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon dilaksanakan menggunakan platform Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) yang telah dibangun oleh Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2013. AKSARA merupakan platform perekaman aksi pembangunan berketahanan iklim dan rendah karbon yang transparan, akurat, lengkap, konsisten dan terintegrasi. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) melalui platform AKSARA diperlukan untuk (i) mempermudah proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan capaian indikator PBI dan PRK; (ii) meningkatkan akuntabilitas, akurasi dan ketepatan waktu untuk menghasilkan data capaian penurunan emisi GRK dengan menggunakan sistem dan metodologi yang sistematis, objektif dan transparan; (iii) serta meningkatkan proses evaluasi kegiatan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk mengukur efektivitas pemanfaatan anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan ketahanan iklim dan penurunan emisi GRK.

AKSARA dibangun dengan mengadopsi Pasal 8 pada UU 25 Tahun 2004 yaitu tahapan perencanaan pembangunan nasional: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Platform AKSARA ini dapat diakses oleh pengguna dari kalangan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pengguna lainnya yang terdaftar. AKSARA dapat diakses melalui tautan <https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>.

Kerangka PEP Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI)

Pelaksanaan PEP PBI Tujuan 13 TPB/SDGs diselaraskan dengan upaya PEP target PBI di dalam RPJMN 2020-2024 PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim untuk mencapai sasaran utama penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim dengan penerapan aksi-aksi pembangunan berketahanan iklim.

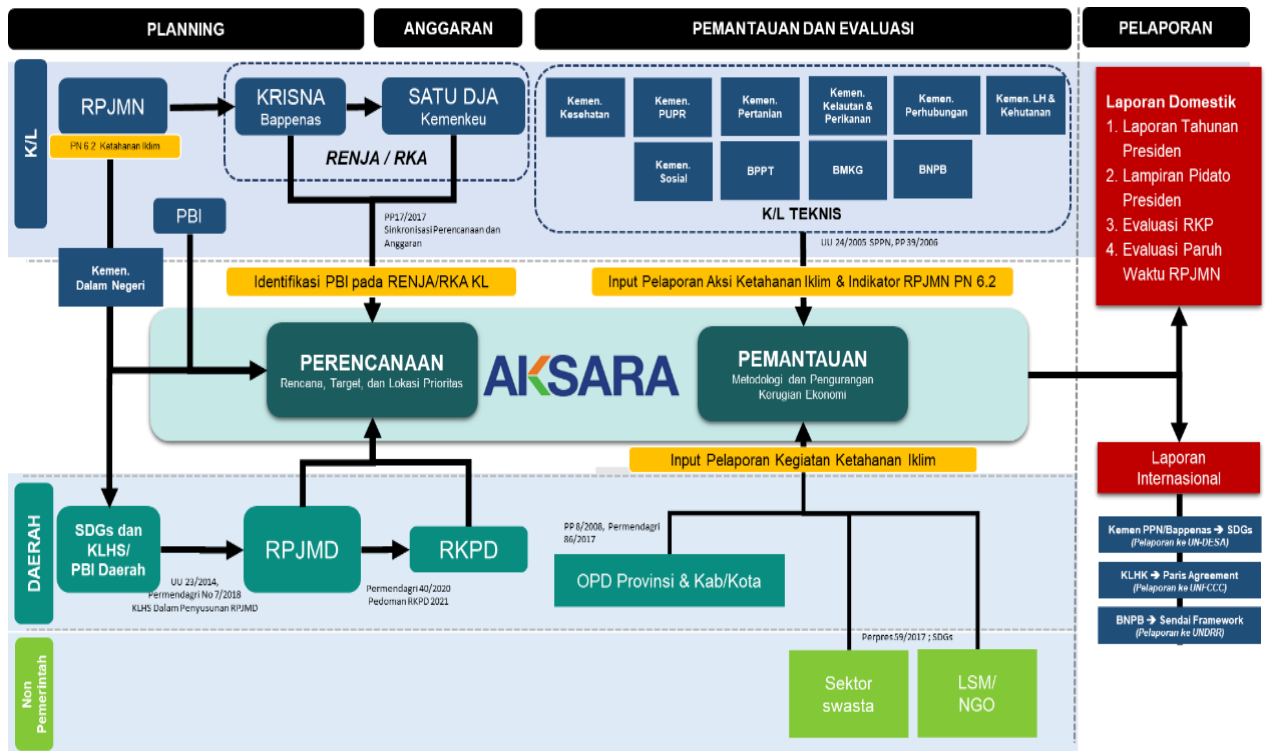
Terdapat 2 (dua) jenis aksi PBI yakni Kegiatan Inti, yakni kegiatan ketahanan iklim yang keluarannya dapat secara langsung berkontribusi pada penurunan kerugian ekonomi di 4 (empat) sektor prioritas (Sektor Air, Sektor Kelautan dan Pesisir, Sektor Kesehatan dan Sektor Pertanian) Keluaran dari kegiatan inti dapat dikonversikan dalam nilai rupiah PDB, sedangkan Kegiatan pendukung merupakan kegiatan pembangunan yang keluarannya tidak dapat dikonversikan dalam nilai rupiah PDB, namun dapat berkontribusi sebagai pendukung penurunan risiko bahaya sektoral melalui peningkatan kapasitas ketahanan iklim dan penurunan tingkat kerentanan, yang dapat berimplikasi pada pengurangan kerugian ekonomi dampak perubahan iklim. (Gambar 3.20).



Gambar 3.20 Keterkaitan kegiatan inti dan pendukung dalam pencapaian target pembangunan berketahanan iklim

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

PEP PBI dilaksanakan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui mekanisme yang melibatkan Kementerian/ Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non-Pemerintah termasuk juga sektor swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Gambar 3.21). Hasil pemantauan evaluasi dan pelaporan implementasi pembangunan berketahanan iklim dilaporkan secara periodik T+1 sebagai laporan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs.



Gambar 3.21 Alur pelaporan pembangunan berketahanan iklim

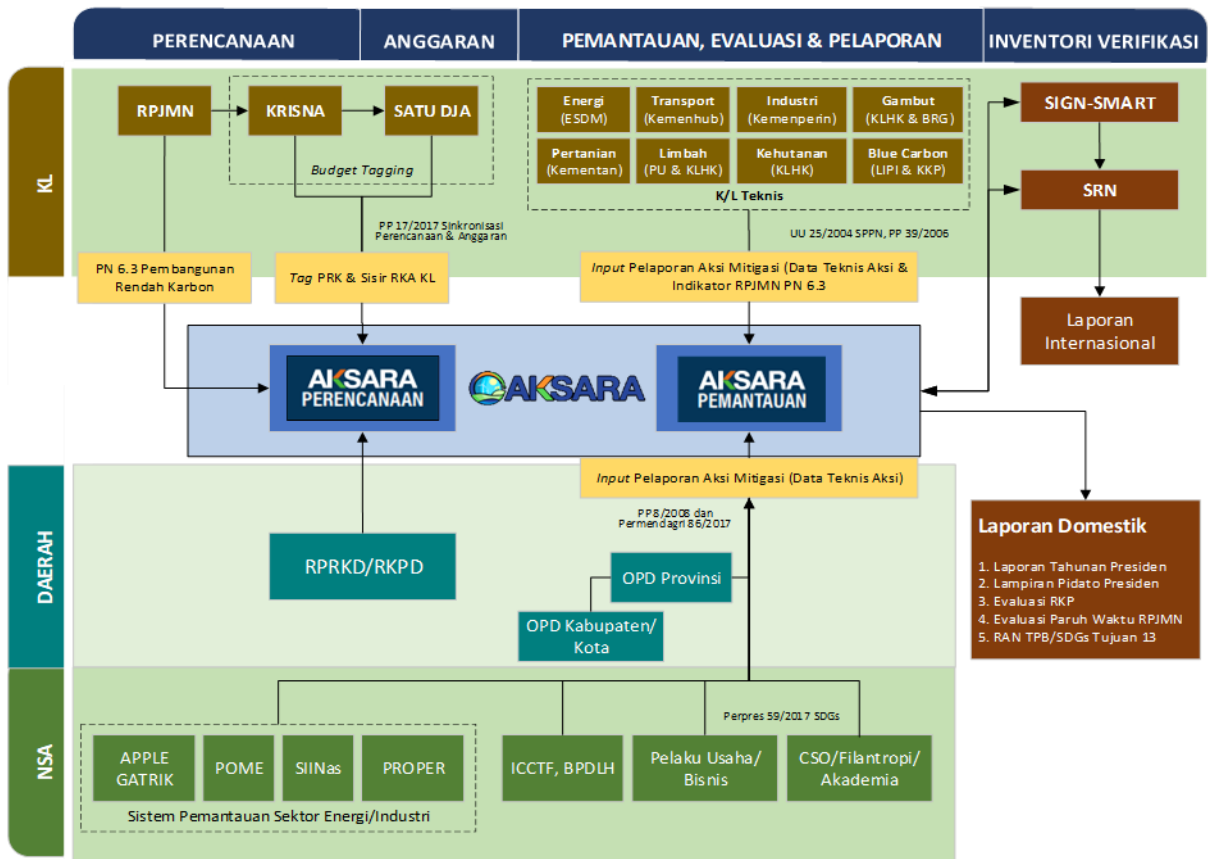
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Kerangka PEP Pembangunan Rendah Karbon (PRK)

PEP PRK dilakukan terhadap: baseline intensitas emisi GRK; capaian penurunan intensitas emisi GRK; peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan penurunan tingkat kemiskinan. PEP PRK dilakukan melalui platform AKSARA sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. PEP PRK dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun berdasarkan pelaporan aksi PRK dari tingkat nasional (Kementerian/ Lembaga) dan aksi PRK tingkat daerah (dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi). PEP PRK difokuskan pada implementasi target kegiatan inti dan kegiatan pendukung yang telah ditetapkan sebagaimana petunjuk teknis aksi PRK yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas. PEP PRK ini juga selaras dengan pemantauan pencapaian target RPJMN 2020-2024 PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, PP 3 Pembangunan Rendah Karbon.

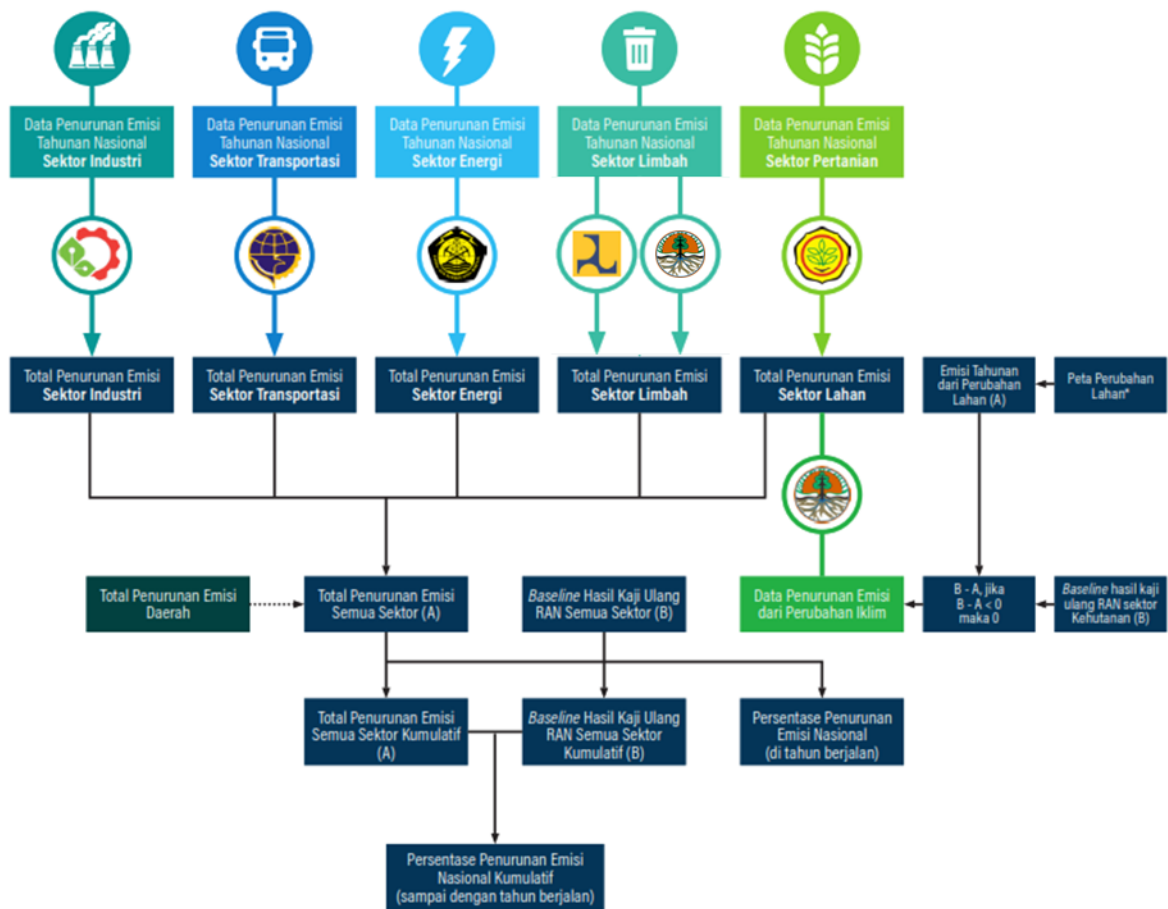
Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melaporkan capaian aksi PRK pada Triwulan Pertama pasca tahun pelaksanaan. Selanjutnya, Kementerian PPN/Bappenas melakukan validasi laporan pemantauan potensi pencapaian PRK pada Triwulan Kedua pasca tahun pelaksanaan, dan melakukan pelaporan selambatnya pada akhir Triwulan Ketiga pasca tahun pelaksanaan (T+1) .

Adapun alur monitoring dan evaluasi pembangunan rendah karbon mengikuti proses sebagaimana disajikan pada Gambar 3.22 dan Gambar 3.23.



Gambar 3.22 Skema perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan rendah karbon

Sumber:Kementerian PPN/Bappenas, 2020



Gambar 3.23 Sumber data PEP pembangunan rendah Karbon

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

3.13.5 Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor pembangunan di Indonesia. Pandemi juga berdampak pada pencapaian TPB/SDGs Tujuan 13. Di satu sisi, pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi sehingga menurunkan emisi GRK pada tahun 2020. Namun disisi lain proses pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi pada tahun 2021 dan seterusnya diperkirakan akan dapat berdampak pada meningkatnya emisi GRK jika proses pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi COVID-19 tidak diiringi dengan peningkatan aksi pembangunan rendah karbon untuk menekan laju emisi. Kajian Kementerian PPN/Bappenas (2021) menunjukkan penurunan emisi mengalami pelemahan dari sebesar 25.9% pada tahun 2020 menjadi hanya sebesar 24.1% pada tahun 2021. Namun, berbagai upaya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan penanganan perubahan iklim melalui implementasi pembangunan rendah karbon diperkirakan akan memberikan dampak penurunan emisi GRK dan mampu mengembalikan rencana penurunan emisi GRK sesuai target mulai tahun 2022 hingga tahun 2024.

Untuk mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi pasca pandemi COVID-19, kebijakan pembangunan untuk meningkatkan ketahanan bencana hidrometeorologi dan perubahan iklim pada tahun 2022 akan diprioritaskan pada 1) penguatan sistem ketahanan bencana dan peringatan dini terhadap multi-ancaman bencana, baik bencana-bencana

sudden onset, seperti banjir bandang, maupun bencana-bencana *slow onset*, seperti kerusakan akibat perubahan iklim, dan 2) peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK pada masa pemulihan aktivitas sosial ekonomi dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi. Sedangkan untuk operasionalisasi program ketahanan iklim maka disusun dokumen kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi ketahanan iklim. Dokumen PBI mencakup 1) lokasi prioritas dan daftar aksi ketahanan iklim, 2) kelembagaan ketahanan iklim, 3) peran lembaga non pemerintah untuk mendukung aksi ketahanan iklim, 4) sumber-sumber pendanaan untuk mendukung aksi ketahanan iklim, dan 5) mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (RKP, 2021).

3.13.6 Kontribusi Aktor Nonpemerintah Untuk Pencapaian TPB/SDGs Tujuan 13

Sejalan dengan prinsip inklusifitas dan untuk optimalisasi pencapaian SDGs, rencana dan program kegiatan aktor pemerintah menjadi bagian penting dalam Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 13. Rencana program/kegiatan Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi dan Akademia dapat berkontribusi terhadap pencapaian semua target dan indikator TPB/SDGs Tujuan 13, sedangkan rencana program/kegiatan pelaku usaha/bisnis dapat berkontribusi pada penurunan emisi GRK dan adaptasi perubahan iklim. Rincian rencana program/kegiatan aktor non pemerintah secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran Matriks 3 dan 4.

Program/kegiatan Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi dan Akademia yang dapat berkontribusi dalam pencapaian TPB/SDGs Tujuan 13 diantaranya adalah:

- a) Program perlindungan dan pengawetan kawasan konservasi,
- b) Program pengembangan inisiatif program perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE),
- c) Program penguatan kebijakan konservasi,
- d) Program pengembangan program jasa lingkungan,
- e) Program peningkatan kapasitas bagi Unit Pelaksana Teknis KLHK pusat dan daerah serta masyarakat sekitar,
- f) Program replikasi model terbaik pendampingan masyarakat dan pengembangan sumber penghidupan di Kalimantan Barat,
- g) Program pengembangan pangan Bijak Nusantara (hijau, lokal, sehat, adil),
- h) Program aksi kemanusiaan bencana di Indonesia,
- i) Program *building with Nature* Indonesia,
- j) Program restorasi dan pengelolaan gambut berkelanjutan berbasis masyarakat,
- k) Program restorasi dan pengelolaan gambut berkelanjutan untuk mitigasi perubahan iklim,
- l) Program konservasi kawasan mangrove,
- m) Program *building resilience towards natural disaster in Central Sulawesi*,
- n) Program pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim,

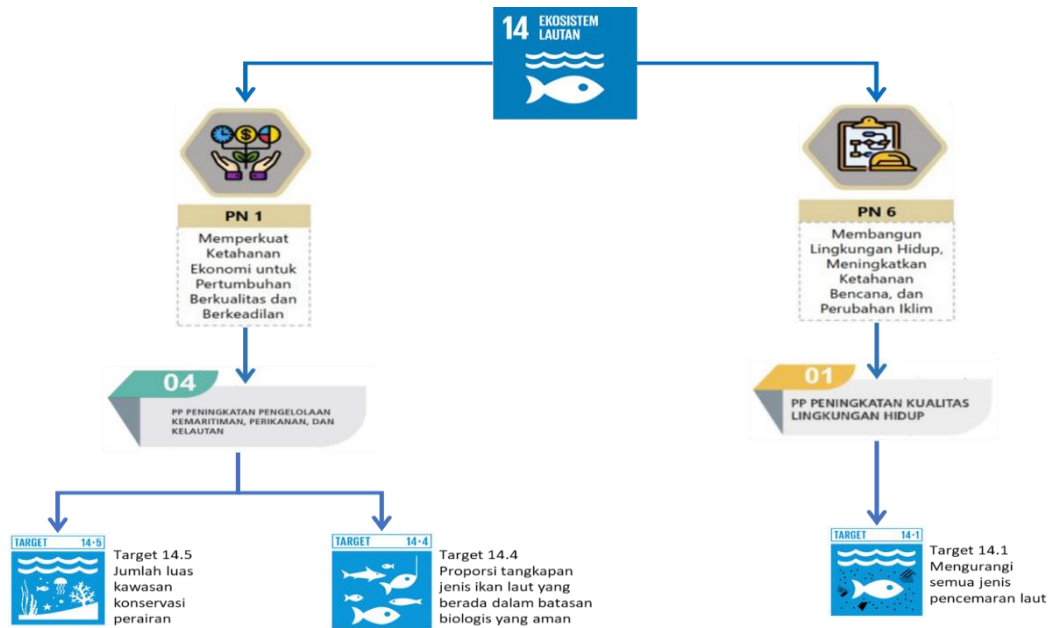
- o) Program penguatan kebijakan pembangunan rendah karbon di tingkat provinsi,
- p) Program penguatan kebijakan pembangunan rendah karbon di sektor energi dan industri,
- q) Program pengembangan kurikulum dan materi untuk *SDGs Academy* Indonesia,
- r) Program penguatan kebijakan pembangunan rendah karbon di sektor persampahan,
- s) Program pengembangan kurikulum pembelajaran *sustainable finance* yang mengakomodasi aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,
- t) Program *leading the change*,
- u) Program pembelajaran ekonomi hijau inklusif dan rendah karbon,
- v) Program satuan pendidikan aman bencana dan perubahan iklim.

Sedangkan program/kegiatan pelaku usaha/bisnis yang dapat berkontribusi dalam pencapaian TPB/SDGs Tujuan 13 diantaranya adalah:

- a) Program pengurangan emisi karbon,
- b) Program pengurangan intensitas emisi karbon,
- c) Program *community* untuk peningkatan kapasitas mengenai pengelolaan lingkungan,
- d) Program promosi *business leadership towards net zero emissions*.

3.14 Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Tujuan 14 TPB/SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai Tujuan 14 tersebut, maka terdapat 3 (tiga) target yang telah diurutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 2 (dua) Prioritas Nasional (PN) dan 2 (tiga) Program Prioritas (PP), yang dapat dilihat keterkaitannya dalam diagram berikut:



Gambar 3.24 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 14 Dalam RPJMN 2020-2024

Selain ketiga target tersebut di atas, maka secara umum target pencapaian Tujuan 14 dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Sampah laut berkurang sebesar 60% sampah laut berkurang pada tahun 2024;
2. Kawasan konservasi perairan diharapkan tercapai seluas 26,9 juta hektar (atau 80% dari target Aichi) pada tahun 2024;
3. Pengelolaan WPPNRI mencapai 11 unit pada tahun 2024;
4. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman mencapai maksimum 80% dari MSY pada tahun 2024;
5. Terdapat 34 provinsi yang memiliki akses pendanaan usaha nelayan pada tahun 2024.

Target pencapaian TPB/SDGs Tujuan 14 dalam RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.19 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 14 Ekosistem Lautan

TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.								
14.1.1.(a)	Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut	KKP, LIPI, KLHK, LAPAN, BIG, KLHK	Persen	15,3	30	40	50	60
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.								
14.2.1 (a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional (integrasi RTRLN dengan RTRWN)	KKP	Dokumen kebijakan, regulasi, pedoman/ dokumen teknis lainnya pada tingkat nasional	ada	ada	ada	ada	ada
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	KKP	WPP	11 (2019)	11	11	11	11
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.								
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (berdasarkan MSY)	KKP	Persen	56,91	< 67	< 72	< 75	≤ 80%
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.								
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	KKP	Juta Ha	24,11	24,2 (7,4% total luas perairan Indonesia)	25,1 (7,7% total luas perairan Indonesia)	26 (8,0% total luas perairan Indonesia)	26,9 (8,3% total luas perairan Indonesia)

TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the <i>World Trade Organization</i>.								
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	KKP	Persen	94,76	95	96	97	98
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.								
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	KKP	Dokumen kebijakan, regulasi, pedoman/ dokumen teknis lainnya pada tingkat nasional	ada	ada	ada	ada	ada
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	KKP	Provinsi	34 (2019)	34	34	34	34
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	KKP	Nelayan	150.000 (2019)	120.000	120.000	120.000	120.000
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari “The future we want”.								
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>).	KKP	Dokumen kebijakan, regulasi, pedoman/ dokumen teknis lainnya pada tingkat nasional	ada	ada	ada	ada	ada

A. Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs

Tujuan 14 Ekosistem Lautan merupakan bagian dari pembangunan nasional bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam rangka pemeliharaan sumber daya sebagai aset pembangunan nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan, serta peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan, arah kebijakan pembangunan terkait pengelolaan Tujuan 14 Ekosistem Lautan difokuskan pada arah kebijakan utama, yaitu:

1. Peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan; serta
2. Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengolah dan pemasar hasil perikanan/petambak garam.

Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan dengan berbasis ilmiah (keilmuan) dan diimplementasikan berbasis masyarakat dengan menerapkan prinsip berkelanjutan serta memperhatikan daya dukung lingkungan.

Kebijakan pengelolaan Tujuan 14 Ekosistem Lautan telah termuat dalam RPJMN 2020-2024, terutama pada Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan melalui peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan; dan Agenda Pembangunan Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Upaya peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan diarahkan pada:

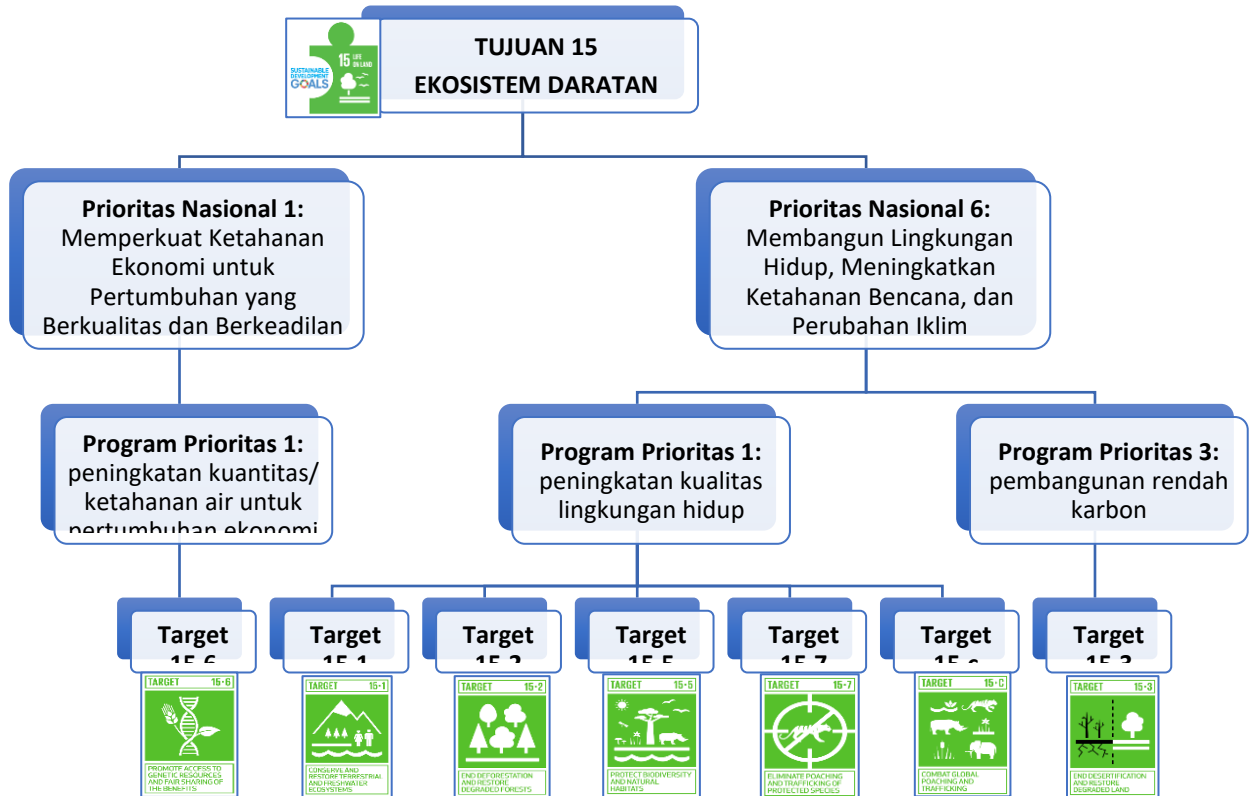
1. Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*) transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir;
2. Pengelolaan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan;
3. Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
4. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; dan
5. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan *database* kelautan dan perikanan.

Sementara itu, peningkatan kualitas lingkungan hidup yang terkait dengan pengelolaan Tujuan 14. Ekosistem Lautan diarahkan pada:

1. Pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dan pesisir, serta pemantauan kesehatan ekosistem laut, dan
2. Pencegahan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan perairan.

3.15 Tujuan 15 Ekosistem Daratan

TPB/SDGs Tujuan 15 Ekosistem Daratan mempunyai 12 target terdiri dari 9 (sembilan) target utama dan 3 (tiga) target *mens of implementation* (MOI). Target-target tersebut terdapat 7 (tujuh) target yang telah diarusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 2 (dua) Prioritas Nasional (PN) dan 3 (tiga) Program Prioritas (PP), yang dapat dilihat keterkaitannya pada Gambar 3.25.



Gambar 3.25 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 15 Dalam RPJMN 2020-2024

Selain 7 (tujuh) target tersebut, terdapat 5 (lima) target lain pada Tujuan 15 yang juga memiliki angka target pencapaian indikator SDGs dari tahun 2021-2024 dengan *baseline* data tahun 2020, yang dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 15 Ekosistem Daratan

TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1*	Proporsi tutupan lahan berhutan terhadap total luas daratan (% tutupan lahan berhutan)	KLHK	Persen	50,1 (2019)	50,1	50,1	50,1	50,1
15.1.2.(a)	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)	KLHK	Ha (juta)	33,71	29,4	39,7	51,8	70,0
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.								
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju	KLHK	KPH Maju	24	30	30	30	40
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi								
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	KLHK	Persen	0,06	0,12	0,12	0,12	0,12
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan termasuk keanekaragaman hayatinya untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan								
15.4.1*	Situs keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	KLHK	Situs Kehati (juta ha)	4,13 (2019)	4,13	4,13	4,13	4,13
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan	KLHK	Indeks (%)	98 (2019)	98	98	98	98
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.								
15.5.1*	Indeks Daftar Merah (Red-list index)	KLHK, KKP, LIPI	Persen	40,77 (2019)	2	2	2	2
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.								
15.6.1*	Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata	KLHK	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.								
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL	KLHK	Kasus	51 (2019)	104	124	158	166
15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.								
15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI).	KLHK, Kementan, KKP, LIPI	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.								
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi target 2 dari Rencana Strategis	Bappenas	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.								
15.a.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	Bappenas	Juta rupiah	PM	PM	PM	PM	PM
15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.								
15.b.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	Bappenas	Juta rupiah	PM	PM	PM	PM	PM
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.								
15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL	KLHK	Kasus	51 (2019)	104	124	158	166

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Arah kebijakan yang terkait dengan Tujuan 15 Ekosistem Daratan dalam RPJMN 2020-2024, khususnya terkait dengan prioritas nasional memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan (PN 1) yang dilaksanakan dengan serangkaian strategi:

1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Arah kebijakannya yaitu: peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) memantapkan kawasan hutan berfungsi lindung; (2) mengelola hutan berkelanjutan; (3) menyediakan air untuk pertanian dan perikanan darat; (4) menyediakan air baku untuk kawasan prioritas; (5) memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; serta (6) mengembangkan waduk multiguna.

2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Arah kebijakannya yaitu: penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; (2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; (3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; (4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata; (5) reformasi fiskal; serta (6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Penerapan kemajuan teknologi, terutama industri 4.0 dalam lima tahun mendatang dilaksanakan secara bertahap pada lima subsektor yaitu makanan-minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia termasuk farmasi. Penerapannya diperluas untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing di sektor pertanian, perikanan dan kemaritiman, kehutanan, energi, pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi, perdagangan, dan jasa keuangan.

Sedangkan arah kebijakan yang terkait dengan Tujuan 15 Ekosistem Daratan dalam RPJMN 2020-2024, khususnya terkait dengan prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN 6), terdiri dari: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon. Strategi untuk mewujudkan masing-masing arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup, dengan beberapa strategi:

a. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

- b. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- c. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- d. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 mencakup: Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Ketahanan Iklim.

Kebijakan dan program yang mendukung pencapaian Tujuan 15 terutama didukung kebijakan di Kementerian LHK dan beberapa kebijakan di Kementerian/Lembaga lain (Kementan, LIPI, KKP, Bappenas) dan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai komponen pemangku kepentingan. Kebijakan dan program tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing K/L terkait. Kebijakan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan terdiri dari kebijakan tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV), melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, serta penegakan hukum.

Beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan Tujuan 15, antara lain: a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; c) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; g) Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan; h) Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; serta i) Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pertama, Tata Kelola Kehutanan. Tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*) menjadi prinsip dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Arah kebijakan sektor kehutanan untuk mencapai tata Kelola yang baik adalah mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan dengan melibatkan semua *stakeholders*, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan yang berbasis masyarakat, pembentukan dan operasionalisasi KPH, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan mempermudah perizinan dalam melakukan investasi di sektor kehutanan, serta memperkuat kelembagaan KPH.

Perubahan peran KPH sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 dan Permen LHK 8 Tahun 2021 yang secara garis besar mengatur teknis tugas dan fungsi KPH sesuai dengan amanat UU 11 tahun 2020. KPH diharapkan menjadi fasilitator dan regulator ditingkat tapak dalam mengelola kawasannya, sehingga KPH tidak lagi dapat melakukan pemanfaatan langsung tetapi melalui izin multi-usaha dengan memfasilitasi kesepakatan pemegang pengelolaan oleh BUMN Kehutanan atau perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan masyarakat setempat. Jangka waktu kemitraan kehutanan disesuaikan dengan masa berlakunya perizinan berusaha pemanfaatan hutan.

Kedua, Konservasi Keanekaragaman Hayati. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati, serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Sedangkan arah kebijakan RPJMN 2020-2024, bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati serta ciri khas ekosistem yang spesifik dengan tingkat endemisitas spesies yang tinggi pada masing-masing pulau.

Telah ditetapkan 25 jenis satwa prioritas yang akan ditingkatkan populasinya, yaitu Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak, Owa, Elang, Jalak Bali, Komodo, Banteng, Orang Utan, Kakatua, Bekantan, Babi Rusa, Anoa, Maleo, Macan Tutul Jawa, Rusa Bawean, Cendrawasih, Surili, Tarsius, Monyet Hitam Sulawesi, Julang Sumba, Kasturi Tengkek-Ungu, Penyu, Kanguru Pohon, dan Celepuk Rinjani. Jenis-jenis satwa tersebut, 10 jenis satwa berhasil meningkat populasinya, yaitu: Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak, Owa, Bekantan, Komodo, Jalak Bali, Maleo, Tarsius, dan Monyet Hitam Sulawesi. Sedangkan untuk jenis babirusa dan anoa belum dilakukan analisis peningkatan populasi. Sampai dengan tahun 2019, capaian atas indikator peningkatan populasi 25 spesies prioritas terancam punah mencapai 40,79%. Peningkatan populasi satwa prioritas tersebut sesuai dengan *The IUCN Red List of Threatened Species*.

Perlindungan keanekaragaman hayati juga ditujukan terhadap *Invasive Alien Species* (IAS) atau jenis asing invasif (JAI) yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem asli Indonesia. Salah satu parties CBD, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan identifikasi dan prioritasasi JAI (*list of priority species*), menentukan jalur masuk (*pathway*) dan mengontrol *pathway* JAI prioritas, serta mengendalikan JAI prioritas untuk mencegah kerusakan habitat asli/ekosistem asli.

Pengendalian JAI di kawasan konservasi, Indonesia dalam hal ini Kementerian LHK, Kementan, KKP, LIPI dan stakeholder terkait telah menerbitkan beberapa regulasi, antara lain: (1) Dokumen Strategi Nasional dan Arahkan Rencana Aksi Pengelolaan Jenis Asing Invasif di Indonesia; (2) UU No. 21/2019 tentang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; (3) Permen LHK No. 94/2016 tentang Jenis Invasif; (4) Peraturan Menteri Pertanian No.

61/Permentan/OT.140/10/2010 yang mengamanatkan pelaksanaan pengawasan keamanan hayati; (5) Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan No. 107/KEP-BKIPM/2017 tentang Pedoman Analisis Risiko Jenis Asing Invasif; dan (6) Perdirjen KSDAE No. 6/2018 tentang Kemitraan Konservasi.

Indikator pelestarian kehati juga sudah dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024 yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pertanian. Indikator tersebut berupa jumlah Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia sebesar 4.250 akses, yang dikerjakan oleh salah satu unit kerja di Kementerian Pertanian (Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian).

Ketiga, Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV). Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan dengan prinsip konservasi, yaitu perlindungan ekosistem sebagai sistem penopang kehidupan (*life support system*), pengawetan sumber daya alam dan genetiknya, serta pemanfaatan secara lestari. Kawasan konservasi telah ditetapkan hingga tahun 2019 adalah sebanyak 554 unit dengan luas 27,4 juta hektare, terdiri atas 22,1 juta hektare kawasan konservasi terestrial dan 5,3 juta hektare kawasan konservasi perairan/laut.

Kawasan konservasi juga menghadapi tekanan kompleks yang bisa menjadi penyebab degradasi dan fragmentasi habitat. Oleh karena itu, untuk mencegah degradasi dan fragmentasi habitat, pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan kawasan berbasis resort (*resort base management*) dengan menempatkan personil hingga ke tingkat tapak di kawasan konservasi beserta perangkat kebutuhan kerjanya secara optimal.

Keempat, Melestarikan dan Memanfaatkan Nilai Ekonomi Keanekaragaman Hayati. Kerangka regulasi yang diperlukan untuk melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi keanekaragaman hayati mencakup dukungan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, serta pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang mengenai Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) yang merupakan tindak lanjut dari upaya koordinasi penerapan ratifikasi Protokol Nagoya (2010) yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ratifikasi Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya. Kebijakan lainnya, yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity*; dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati).

Pengelolaan sumber daya genetik terwujud dengan adanya komitmen Indonesia dalam pengelolaan sumber daya genetik pada tataran global dan nasional melalui ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan ratifikasi Nagoya Protokol serta regulasi nasional berupa Peraturan Menteri LHK Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya. Komitmen

tersebut dapat menempatkan sumber daya genetik Indonesia sebagai sumber daya yang perlu dilindungi untuk pembangunan nasional serta masyarakat setempat (*local wisdom*).

Namun demikian, pengelolaan sumber daya genetik di Indonesia perlu mendapat dukungan dalam hal, antara lain: (1) riset dan akses ke teknologi untuk pengungkapan potensi dan manfaat serta memberikan nilai tambah terhadap sumber daya genetik, (2) penerapan *benefit sharing* dalam pemanfaatannya, (3) mengembangkan jejaring dan kerja sama di tingkat nasional dan global, (4) integrasi data dan informasi sumber daya genetik (sistem *big data* nasional), (5) harmonisasi kebijakan di tingkat nasional dan daerah, serta (6) penyusunan *roadmap* strategi serta rencana aksi.

Pemanfaatan jenis TSL dalam bentuk perdagangan tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dan selanjutnya lebih detail pengaturannya dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL. Keputusan Menteri tersebut mengatur kegiatan-kegiatan pemanfaatan TSL mulai dari hulu sampai dengan hilir dan penerapan mekanisme perizinan serta dokumen angkutnya baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menjamin terlaksananya prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan jenis melalui pengaturan pelaksanaan aspek *sustainability, legality, dan traceability*.

Selain itu, pembangunan pertanian berkelanjutan sudah menjadi spirit dalam setiap konsep pembangunan pertanian. Setiap program pembangunan pertanian memasukkan ketiga unsur berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan ekologi. Pada RPJMN dan Renstra Kementan 2020-2024 telah dicanangkan penyebaran dan produksi masal terkait varietas unggul pangan baru seperti padi biofortifikasi yang memiliki unsur zat Zn lebih tinggi agar bisa mencegah terjadinya *stunting*. Sejak tahun 2020, kegiatan pendampingan kelompok bisnis dilakukan secara intensif sehingga mampu mengeksplor porang, selain berorientasi ekonomi dan dapat mensejahterakan petani dan secara ekologi bisa tetap berlanjut secara jangka panjang. Untuk itu, Pemerintah bekerja sama dengan swasta memproduksi hasil inovasinya secara masal. Industri berbasis keanekaragaman hayati di sektor pertanian mampu tumbuh pesat seiring adanya pandemi.

Kelima, Penegakan Hukum. Penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan menggunakan pendekatan multi instrumen, yaitu sanksi administratif, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi salah satu dasar dalam melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati, selain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 juga mengamanatkan adanya peraturan pemerintah mengenai sanksi yang mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif dan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 disusun berdasarkan asas *ultimum remedium* dan *restoratif justice*, dengan muatan substansi meliputi inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah

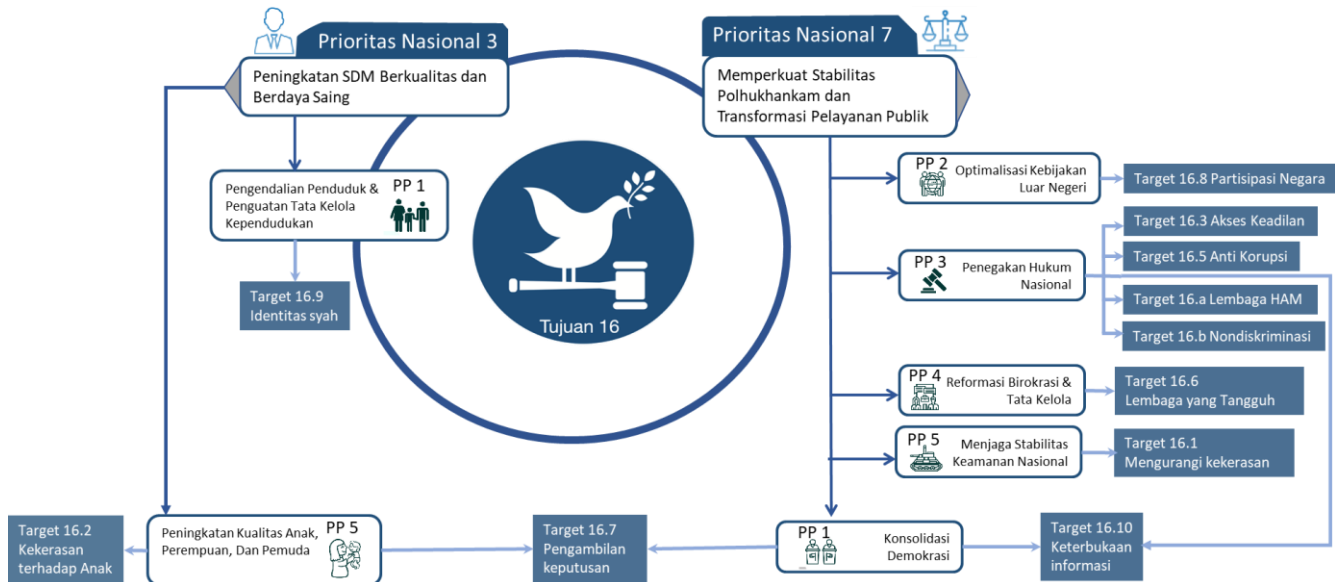
terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, tata cara penyelesaian, tata cara pengenaan sanksi administratif, tata cara perhitungan denda administratif, tata cara PNBP yang berasal dari denda administratif, serta tindakan pemerintah terhadap pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian lingkungan hidup yang merupakan hak warga negara. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang sejalan dengan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya dan dukungan yang diperlukan untuk penegakan hukum kasus tindak pidana TSL, antara lain: 1) upaya pencegahan dengan menggunakan *cyber patrol* mengingat perdagangan TSL ilegal saat ini marak melalui media sosial; 2) perlu adanya kajian komprehensif atas UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan dibuatkan peraturan turunannya untuk mengisi kekurangan dari Undang-Undang Kehutanan; serta 3) dalam hal penegakan hukum terkait kasus TSL dalam implementasi di lapangan seringkali sulit menjerat pelaku dengan menggunakan UU No. 5 tahun 1990 dan UU No. 41 tahun 1999 dalam pasal persangkaan, maka perlu adanya penanganan secara *multidoor* dengan pasal yang terkait dengan UU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan UU tentang Kelautan.

3.16 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

Dalam Tujuan 16 terdapat 11 (sebelas) target yang telah diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 2 (dua) Prioritas Nasional (PN) dan 7 (tujuh) Program Prioritas (PP), yang dapat dilihat keterkaitannya sebagai berikut:



Gambar 3.26 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 16 dalam RPJMN 2020-2024

Angka target pencapaian indikator Tujuan 16 untuk tahun 2021-2024 berikut baseline data tahun 2020 dapat dilihat pada tabel matriks 1 Tujuan 16 di bawah ini.

Tabel 3.21 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>Baseline</i>) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.								
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	BPS Statistik Kriminal dan Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri	Kasus	898	880	711	622	533
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Biro Pengendalian Operasi POLRI	Orang	0,00481	≤ 13	≤ 13	≤ 13	≤ 13
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional - Susenas)	Persentase	0,06 (2019)	≤ 0,06	≤ 0,06	≤ 0,06	≤ 0,06
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional - Susenas Modul Ketahanan Sosial	Persentase	62,62	> 55	> 55	> 60	> 60
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.								
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional - Susenas Modul Ketahanan Sosial	Persentase	48,40	PM	PM	PM	PM
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja - SNPHAR)	Persentase	Laki-laki: 61,70 Perempuan: 62,00 (2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) selaku Sekretariat Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Persentase	NA	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja - SNPHAR)	Persentase	Laki-laki: 3,10 Perempuan: 10,40 (2018)	PM	PM	PM	PM
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.								
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas))	Persentase	18,73	30,12	25,68	21,25	16,81
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	Persentase	Litigasi : 89% Non-Litigasi : 77%	Litigasi: 7,025 orang Non-Litigasi: 938 kegiatan	Litigasi: 7,025 orang Non-Litigasi: 938 kegiatan	Litigasi : 7,025 orang Non-Litigasi: 938 kegiatan	Litigasi: 9,169 orang Non-Litigasi: 1,221 kegiatan
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Mahkamah Agung	Persentase	Sidang diluar gedung pengadilan: 100% Pembebasan Biaya Perkara: 73% Pos Layanan Hukum: 100%	111.584 Jam Layanan	111.584 Jam Layanan	111.584 Jam Layanan	111.584 Jam Layanan

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Persentase	3,00	NA	NA	NA	NA
16.3.3(a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (<i>Access to Justice Index</i>)	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Direktorat Hukum dan Regulasi	Indeks	69,6 (2019)	65-70%	71-80%	71-80%	71-80%
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.								
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Badan Pusat Statistik (Survei Perilaku Anti Korupsi - SPAK).	Indeks	3,84	3,88	4,03	4,06	4,09
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.								
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Kementerian Keuangan: Direktorat Jenderal Anggaran	Persentase	94,55	100	100	100	100
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase	K/L: 97 Provinsi: 100 Kab: 88 Kota: 94 (2019)	NA	NA	NA	K/L: 95 Provinsi: 95 Kabupaten: 85 Kota: 95
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Persentase	K/L: 94,05 Provinsi: 97,06 Kab/Kota: 62,80	K/L: 96 Provinsi: 87 Kab/Kota: 55	K/L: 98 Provinsi: 90 Kab/Kota: 65	K/L: 100 Provinsi: 100 Kab/Kota: 75	K/L: 100 Provinsi: 100 Kab/Kota: 80
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Persentase	K/L: 96,39 Provinsi: 88,24 Kab/Kota: 24,80	K/L: 75 Provinsi: 60 Kab/Kota: 35	K/L: 80 Provinsi: 70 Kab/Kota: 45	K/L: 85 Provinsi: 80 Kab/Kota: 55	K/L: 85 Provinsi: 85 Kab/Kota: 70

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Ombudsman RI	Persentase	K/L: 28,57 (2 dari 4 Kementerian dan 0 dari 3 Lembaga) Provinsi: 33,33 (2 dari 6 Prov) Kota: 33,33 (12 dari 36 Kota) Kab: 33,02 (71 dari 215 Kabupaten) (2019)	142 per 587	150 per 587	157 per 587	164 per 587
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan								
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Komisi Pemilihan Umum	Persentase	DPR: 20,52 DPRD Prov: 17,53 DPRD Kab/Kota: 15,72 (2019)	N/A	N/A	N/A	DPR RI: 22,52% DPRD Provinsi: 20 DPRD Kab/Kota: 17
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Badan Kepegawaian Nasional	Persentase	Eselon I = 16,60 Eselon II = 13,49	Belum menjadi indikator dalam RPJMN 2020-2024	Belum menjadi indikator dalam RPJMN 2020-2024	Belum menjadi indikator dalam RPJMN 2020-2024	Belum menjadi indikator dalam RPJMN 2020-2024
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan didukung oleh Badan Pusat Statistik (Indeks Demokrasi Indonesia - IDI)	Indeks	75,66 (2020)	76,30	77,25	79,50	80,23

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan didukung oleh Badan Pusat Statistik (Indeks Demokrasi Indonesia - IDI)	Indeks	79,40 (2020)	82,5	83	83,5	84
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan didukung oleh Badan Pusat Statistik (Indeks Demokrasi Indonesia - IDI)	Indeks	67,85 (2020)	77,9	78,82	79,67	80,47
16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.								
16.8.1 (a)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional	Kementerian Luar Negeri: Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga Internasional: 200 Jumlah Kontribusi: 533 Milyar Rupiah	Jumlah Lembaga Internasional: 198 Jumlah Kontribusi: 908 Milyar Rupiah	Jumlah Lembaga Internasional: 198 Jumlah Kontribusi: 1.135 Milyar Rupiah	Jumlah Lembaga Internasional: 198 Jumlah Kontribusi: 1.169 Milyar Rupiah	Jumlah Lembaga Internasional: 198 Jumlah Kontribusi: 1.204 Milyar Rupiah
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional - Susenas)	Persentase	77,2	N/A	N/A	N/A	N/A

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	BPS (Susenas) Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional - Susenas)	Persentase	83,47	N/A	N/A	N/A	N/A
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	BPS dan Kemendagri	Persentase	88,11	95	97	98	100
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.								
16.10.1 (a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media	Dewan Pers Nasional (Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia)	Indeks	75,27	75,5	76	77	78
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan	Kasus	Komnas HAM: 2639 aduan Kemenkum HAM: 1.067	4324	4324	4324	4324
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Jumlah	2.389	PM	PM	PM	PM
16.10.2*	Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Komisi Informasi Pusat	UU	1	1	1	1	1

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif	Komisi Informasi Pusat (Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik)	Persentase	60 BP	40 BP	45 BP	55 BP	60 BP
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.	Komisi Informasi Pusat: Kepaniteraan	Persentase	76 sengketa	92 sengketa (carried over)	90 sengketa	100 sengketa	110 sengketa
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.								
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Lembaga	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.								
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Kebijakan/ Dokumen	0	10	10	10	10

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

- 1. Arah kebijakan yang terkait dengan pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan** dalam RPJMN 2020-2024 yaitu memperkuat tata Kelola kependudukan melalui percepatan cakupan administrasi kependudukan. Arah kebijakan ini sejalan dengan Target 16.9. Pelaksanaan arah kebijakan ini mencakup:
 - a. Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil bagi seluruh penduduk, mencakup: pendekatan layanan ke tingka desa dan kelurahan; peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat;
 - b. Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus; dan
 - c. Integrasi sistem administrasi kependudukan, mencakup: penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antarsektor; dan penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.

- 2. Arah kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda** dalam RPJMN 2020-2024 sejalan dengan Target 16.2 dan Target 16.7; yang dilaksanakan melalui:
 - a. Penguatan sistem perlindungan anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya, mencakup: penguatan regulasi dan penegakan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
 - b. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mencakup penguatan kebijakan dan regulasi, percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
 - c. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO, mencakup: penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi; pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KtP dan TPPO; peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintah tentang KtP dan TPPO.
 - d. Program yang terkait dengan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, secara khusus terwujud dalam bentuk peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan dengan antara lain penanganan kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Strategi ini secara khusus berupaya melakukan peningkatan perlindungan perempuan khususnya pekerja migran dari kekerasan dan TPPO, yang mencakup:
 - i. penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi;
 - ii. peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang kekerasan terhadap perempuan dan TPPO;
 - iii. peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan tentang kekerasan terhadap perempuan dan TPPO;

- iv. penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan, koordinasi antar bidang penyedia layanan, penguatan data dan informasi serta pengawasan;
 - v. pengembangan sistem data terpadu kekerasan terhadap perempuan dan TPPO;
 - vi. pengembangan sistem layanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO;
 - vii. penguatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga bantuan hukum; dan
 - viii. pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO.
- e. Peningkatan kualitas pemuda, mencakup: penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda; peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda; serta pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

3. Arah kebijakan yang terkait dengan konsolidasi demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 yaitu penguatan kapasitas lembaga demokrasi melalui penguatan kesetaraan dan kebebasan serta peningkatan kualitas komunikasi publik yang sejalan dengan Target 16.7 dan Target 16.10. Pelaksanaan arah kebijakan ini mencakup:

- a. Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas, melalui: peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun; peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata.
- b. Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten;
- c. peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
- d. penyelenggaraan kepemiluan yang baik
- e. penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
- f. peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
- g. penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

4. Arah kebijakan yang terkait dengan optimalisasi kebijakan luar negeri dalam RPJMN 2020-2024 yaitu meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional melalui meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional dan global yang sejalan dengan Target 16.8. Pelaksanaan arah kebijakan ini mencakup:

- a. Peningkatan inisiasi/posisi Indonesia yang diterima di tingkat regional dan global;
- b. peningkatan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia;
- c. Peningkatan koordinasi di dalam negeri untuk melaksanakan komitmen internasional.

- 5. Arah kebijakan yang terkait penegakan hukum nasional** dalam RPJMN 2020-2024 yaitu penataan regulasi, perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, penguatan sistem anti korupsi, dan peningkatan akses terhadap keadilan. Arah kebijakan ini sejalan dengan beberapa Target yaitu Target 16.3, Target 16.5, Target 16.10, Target 16.a, dan Target 16.b yang dilaksanakan melalui:
- a. penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan;
 - b. pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum;
 - c. penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 - d. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh;
 - e. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi. Keempat, pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHP, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.
 - f. Peningkatan akses terhadap keadilan yang diwujudkan melalui strategi penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.
- 6. Arah kebijakan yang terkait reformasi birokrasi dan tata kelola** dalam RPJMN 2020-2024 yaitu penguatan implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), penataan kelembagaan dan proses bisnis, reformasi terkait akuntabilitas kinerja dan transformasi pelayanan publik yang sejalan dengan Target 16.6. Pelaksanaan arah kebijakan ini melalui:
- a. penguatan implementasi manajemen ASN;
 - b. Perluasan implementasi sistem integritas;
 - c. pelayanan publik yang berbasis elektronik (*E-services*) yang terintegrasi; dan
 - d. penguatan pelayanan terpadu.
- 7. Arah kebijakan yang terkait upaya menjaga stabilitas nasional** dalam RPJMN 2020-2024 yaitu penguatan kemampuan pertahanan dan reformasi anggaran, dan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang sejalan dengan Target 16.1. Pelaksanaan arah kebijakan ini melalui:
- a. Program yang terkait dengan penguatan reformasi anggaran terwujud dalam bentuk reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi, dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
 - b. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diwujudkan dengan peningkatan layanan kepolisian yang profesional, modern dan terpercaya, dan peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan Polri.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Untuk memperkuat konsolidasi demokrasi, penegakan hukum nasional dan optimalisasi kebijakan luar negeri, berbagai strategi yang dilakukan adalah:

- a. Pendampingan dan pemberian bantuan terhadap WNI di luar negeri yang terdampak pandemi COVID-19;
- b. Perbaikan sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi;
- c. Penguatan kerjasama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama; dan
- d. Meningkatkan efektivitas dalam merespons dampak pandemi COVID-19 melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*) dalam situasi politik yang stabil.

Pemerintah Indonesia juga mencanangkan terwujudnya akses pada keadilan di tahun 2021 melalui tiga hal:

1. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana berbasis elektronik dalam proses penanganan perkara dalam sistem peradilan;
2. Optimalisasi alternatif penyelesaian perkara dan penanggungan penahanan; dan
3. Optimalisasi pelaksanaan asimilasi dan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan dalam rangka pengurangan kelebihan kapasitas.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada TPB/SDGs Tujuan 16

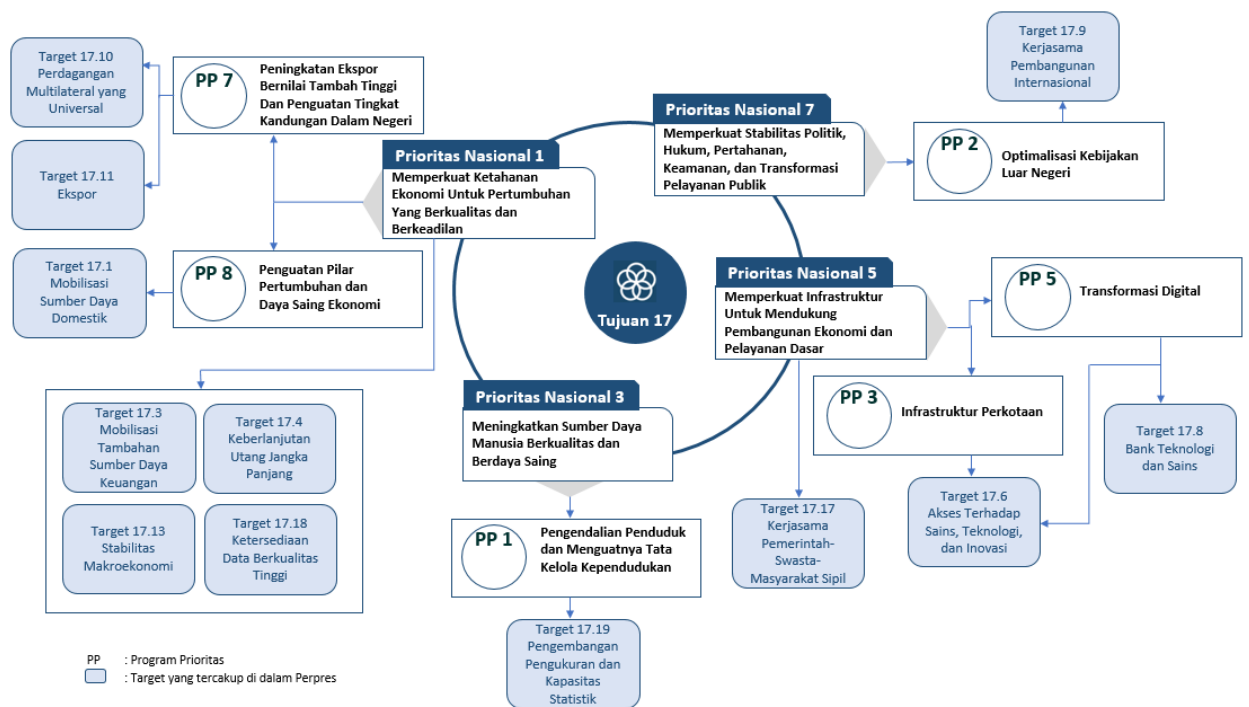
Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, aktor nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Nasional (RAN). Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari aktor nonpemerintah untuk Tujuan 16 diantaranya adalah: Akuntabilitas Ramah Anak; Pengasuhan dan dukungan terhadap Pengasuh Utama; Edukasi pencegahan tindak pidana korupsi; Edukasi hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat; Pemantauan dan advokasi terhadap partisipasi dan keterlibatan perempuan, anak dan kelompok marjinal; Pemantauan dan pendataan kepemilikan akta kelahiran terutama dari masyarakat miskin, kelompok marjinal, dan wilayah khusus; Pelatihan *digital safety* untuk jurnalis; Pelatihan paralegal jurnalis; Advokasi bersama Komite Keselamatan Jurnalis; Sosialisasi dan komunikasi tentang *Business Code of Conduct* (BCOC) yang di dalamnya termasuk aspek anti korupsi.

Terdapat dua kelompok kegiatan dan program yang dijalankan aktor nonpemerintah yaitu: Organisasi Kemasyarakatan (CSO), Filantropi, dan Akademisi; dan, Pelaku Usaha/Bisnis. Program dan kegiatan aktor nonpemerintah secara lebih rinci untuk aktor nonpemerintah pertama dapat dilihat pada Matriks 3 dan untuk aktor nonpemerintah kedua dapat dilihat pada Matriks 4 di dalam Lampiran RAN SDGs 2021-2024.

3.17 Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) membutuhkan kerjasama dan kemitraan global yang kuat, terutama dengan adanya pandemi COVID-19 yang dampaknya multidimensi dan multisektoral. Pasca pandemi COVID-19, ekonomi global diproyeksikan menuju keseimbangan baru, yang proses transformasinya terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional⁷⁸. Adaptasi kebiasaan baru menjadi sebuah cara dan perilaku hidup dalam tatanan kehidupan normal baru dalam merespon pandemi yang terjadi. Selain itu, dunia juga masih menghadapi krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik yang berkepanjangan serta persoalan perubahan iklim. Di sisi lain, dunia kini semakin terkoneksi dengan kemajuan teknologi. Disrupsi di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan banyak bidang lainnya telah menggugah kesadaran tentang pentingnya meningkatkan akses pengetahuan dan teknologi guna berbagi ide dan mengakselerasi inovasi dan kreativitas. Revolusi industri 4.0 memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian menuju era *society* 5.0.

Dalam Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan mencakup 19 target global, 12 target diantaranya telah terarusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Secara khusus, terdapat 4 Prioritas Nasional (PN) dan 6 Program Prioritas (PP) yang terkait dengan ke-12 target TPB/SDGs tersebut.



Gambar 3.27 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 17 dalam RPJMN 2020-2024

Target pencapaian indikator SDGs Tujuan 17 dari tahun 2021-2024 dengan baseline data tahun 2020, yang dapat dilihat melalui tabel Matrik 1 sebagai berikut:

⁷⁸ Narasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 Hal. II.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 122 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021: Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2020.

Tabel 3.22 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik	Persentase (%)	10,58	10,13 - 10,24	10,18-10,44	10,19 - 10,89	10,22 – 11,10
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri	Persentase (%)	8,31	8,32 - 8,38	8,37 - 8,42	8,37 - 8,67	8,40 - 8,88
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik	Persentase (%)	48,12	51,17 - 51,24	52,24 - 54,54	60,93 - 62,12	61,61 -62,34
17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.								
17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB	Direktorat Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan	Persentase (%)	NA	NA	NA	NA	NA
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.								
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	BNP2TKI dan BI	Persentase (%)	0,86	0,90	0,91	0,93	0,95
17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.								
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Laporan Bank Indonesia (Neraca Pembayaran)	Persentase (%)	30,14	27,04	26,49	25,98	25,45

TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga.	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Pitalebar, dan Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika); Badan Pusat Statistik.	Persentase (%)	14,3	16,25	20,83	25,42	30
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif).	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Pitalebar, dan Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika).	Persentase (%)	57,58	37,2	42,9	50	60
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.								
17.8.1*	Persentase pengguna internet	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)	Persentase (%)	73,7	74,20	79,2	80,7	82,30

TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.								
17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerjasama pembangunan internasional termasuk KSST	BAPPENAS/ KL Pelaksana KSS	Rp Milyar	123,5*	138,1	154	171,4	190
17.9.1.(b)	Jumlah program/kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	BAPPENAS/ KL Pelaksana KSS	Kegiatan	68*	100	115	133	152
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.								
17.10.1.(a)	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati	Kementerian Perdagangan; World Trade Organization; dan ADB ARIC (ASIA Regional Integration Center)	Jumlah dokumen	23	25	30	35	40
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.								
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Laporan Ekspor BPS	Persentase (%)	-0,57	6,3	7,2	8,5	9,80
17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.								
17.13.1*	Tersedianya <i>Dashboard</i> Makroekonomi.	Kementerian PPN/Bappenas	Dashboard	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.								
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Kementerian dan Lembaga pelaksana KPBU, pemerintah daerah	Dokumen	1	1	1	1	1
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Kementerian dan Lembaga pelaksana KPBU, pemerintah daerah	Proyek	14	15	20	20	20

TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Kementerian dan Lembaga pelaksana KPBU, pemerintah daerah	Nilai investasi (Rp Milyar)	229,3	189,8	180,7	102,3	130,8
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data	Persentase (%)	92,93	30	35	40	45
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Badan Pusat Statistik: Sistem publikasi statistik BPS	Persentase (%)	NA	74	78	82	86
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi	Badan Pusat Statistik	Negara	UU 16/1997 tentang Statistik	UU 16/1997 tentang Statistik	UU 16/1997 tentang Statistik	UU 16/1997 tentang Statistik	UU 16/1997 tentang Statistik
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.	Badan Pusat Statistik	Negara	Renstra BPS 2020-2024	Renstra BPS 2020-2024	Renstra BPS 2020-2024	Renstra BPS 2020-2024	Renstra BPS 2020-2024
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.								
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.	Badan Pusat Statistik: Website romantik.bps.go.id dan Survei Kebutuhan Data BPS.	Persentase (%)	NA	30	35	40	45

TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data BPS	Persentase (%)	NA	64	68	72	76
17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 2020.	Sensus Penduduk	Terlaksana	NA	NA	NA	NA
17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Kementerian Dalam Negeri.	Data Registrasi	NA	5	5	5	5

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

1. **Arah kebijakan terkait dengan perdagangan multilateral dan ekspor** dalam RPJMN 2020-2024 adalah peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), yang dilaksanakan dengan strategi:
 - (1) Meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - (2) Meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - (3) Mengelola impor;
 - (4) Meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - (5) Meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - (6) Meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; dan
 - (7) Meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)*/*Free Trade Agreement (FTA)*/*Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi.
2. **Arah kebijakan terkait dengan mobilisasi sumber daya domestik** dalam RPJMN 2020-2024 adalah penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, yang dilaksanakan melalui:
 - (1) Reformasi fiskal, yang difokuskan pada:
 - a. Optimalisasi penerimaan negara diarahkan untuk mendukung daya saing dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal;
 - b. Optimalisasi perpajakan mencakup pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*) dan *smart customs and excise system*, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai, penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau (HT), peningkatan tarif cukai HT, serta penguatan kelembagaan penerimaan negara;
 - c. Peningkatan belanja negara yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
 - d. Optimalisasi kontribusi penerimaan negara dan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas serta pembiayaan utang yang produktif dan efisien.
 - (2) Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi difokuskan pada:
 - a. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;
 - b. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data;
 - c. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;

- e. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia; dan
- f. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas.

Terdapat penyesuaian indikator pada Tujuan 17 terkait dengan data dan informasi ini yang tertuang dalam Metadata Indikator Edisi II, yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020–2024. Penyesuaian tersebut dilakukan guna merespon kebutuhan data statistik berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.

Dalam lingkup BPS, arah kebijakan ini kemudian dituangkan dalam Renstra BPS 2020-2024 yang berisikan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPS. Dalam Renstra BPS 2020-2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam program *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia* (Statcap CERDAS).

3. **Arah kebijakan terkait dengan pengembangan pengukuran kependudukan** dalam RPJMN 2020-2024 adalah pengendalian pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan, yang dilaksanakan dengan strategi:
 - (1) Percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - (2) Integrasi sistem administrasi kependudukan; dan
 - (3) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kependudukan.
4. **Arah kebijakan terkait dengan akses terhadap sains, teknologi, dan inovasi** dalam RPJMN 2020-2024 adalah pembangunan infrastruktur perkotaan, khususnya infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, serta transformasi digital.
 - a. Pembangunan infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan dilaksanakan dengan strategi Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar untuk perkotaan (kawasan perumahan, pusat ekonomi, pusat pendidikan).
 - b. Transformasi digital, yang juga terkait dengan **bank teknologi dan sains**, mencakup:
 - (1) Penuntasan infrastruktur TIK, yang dilaksanakan dengan strategi:
 - i. Optimalisasi dana *Universal Service Obligation* (USO) dalam menyediakan dan menjaga kualitas layanan akses telekomunikasi dan internet, melalui penyediaan BTS untuk desa non komersil, dan penyediaan satelit multifungsi untuk akses internet;
 - ii. Penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat, melalui pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur telekomunikasi dan internet; dan
 - iii. Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar hingga ke kecamatan-kecamatan, dengan prioritas pada kawasan pariwisata strategis, kawasan

industri, perguruan tinggi, melalui pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar, dan peningkatan kapasitas industri lokal pendukung jaringan tetap pitalebar.

(2) Pemanfaatan infrastruktur TIK, yang dilaksanakan dengan strategi:

- i. Perluasan layanan bantuan sosial non tunai, konten digital pendidikan, konten digital informasi publik, layanan digital kesehatan serta informasi pertanian, melalui pemberian insentif *start up* yang fokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik serta informasi pertanian; dan
- ii. Perluasan pemanfaatan TIK pada sektor-sektor pertumbuhan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan, melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi dengan pemanfaatan TIK (digitalisasi sektor ekonomi).

(3) Fasilitas pendukung transformasi digital, yang dilaksanakan dengan strategi:

- i. Peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK dalam negeri; dan
- ii. Adopsi pemanfaatan teknologi global (*Big Data*, IoT, AI, dan lain-lain) bersifat lintas sektor dalam proses perencanaan, pemantauan, maupun pelaksanaan kinerja.

5. Arah kebijakan terkait dengan kerjasama pembangunan internasional dalam RPJMN 2020-2024 adalah optimalisasi kebijakan luar negeri, khususnya memperkuat kerjasama pembangunan internasional, yang dilaksanakan dengan strategi:

- (1) Peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru;
- (2) Penciptaan lingkungan yang mendukung peningkatan partisipasi swasta dalam kerjasama pembangunan internasional;
- (3) Penguatan KSST untuk mendukung perdagangan dan investasi; dan
- (4) Pembentukan lembaga pemberi bantuan dan kerjasama pembangunan internasional.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Merespons dampak pandemi COVID-19 untuk penguatan ketahanan ekonomi guna pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan melalui pemulihan industri pengolahan dan perdagangan adalah melalui:

- a. Peningkatan fasilitasi ekspor melalui relaksasi barang dilarang dan/atau dibatasi (lartas) impor, *National Logistics Ecosystem* dan perluasan akses pendanaan ekspor;
- b. Peningkatan jumlah pelaku ekspor melalui penguatan program pendampingan ekspor, pelatihan ekspor, dan pusat informasi ekspor;
- c. Optimalisasi diplomasi ekonomi serta skema perjanjian perdagangan dan ekonomi bilateral, regional dan multilateral dalam *Preferential Trade Agreement/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* serta forum lainnya;
- d. Peningkatan efisiensi logistik yang didukung antara lain melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan

- e. Transformasi menuju industri maju melalui penerapan industri 4.0 dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital terutama pada sektor-sektor strategis di beberapa Kawasan.

Dalam upaya meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021, diarahkan untuk mengendalikan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan yang dihadapkan pada peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, terutama menjangkau wilayah sulit dan kelompok khusus, termasuk pemutakhiran data penduduk pascapandemi COVID-19.

Untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 difokuskan pada upaya mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, di antaranya dengan:

- a. Melakukan kerja sama internasional seperti koridor Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia (KSST) di bidang energi dan ketenagalistrikan;
- b. Meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta
- c. Mengoptimalkan strategi investasi badan usaha seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), maupun sumber-sumber pembiayaan kreatif lainnya, dan mengembangkan metode-metode atau aplikasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan proyek infrastruktur dengan mengacu pada beberapa metode yang diterapkan di negara maju dan negara-negara anggota G20.

Sebagai upaya memulihkan dampak pandemi COVID-19, kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan di bidang politik luar negeri antara lain:

- a. Peningkatan kerja sama internasional dan diplomasi pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19;
- b. Intensifikasi Kemitraan Multi-Pihak (KMP) sebagai instrumen dalam berkolaborasi untuk solusi permasalahan pembangunan; serta
- c. Peningkatan kerja sama regional dan global termasuk Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) di bidang pertanian, perikanan, kesehatan/vaksin, dan infrastruktur.

Dalam menangani dampak pandemi COVID-19, selain tetap melaksanakan efisiensi dan *refocusing* anggaran khususnya yang terkait dengan stimulus kepada sektor perekonomian, dilakukan percepatan penyiapan proyek-proyek dan kegiatan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, terutama pada proyek padat karya yang dapat menciptakan lapangan kerja. Adanya *refocusing*, realokasi, dan efisiensi anggaran pemerintah juga digunakan sebagai momentum untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam pendanaan pembangunan melalui berbagai mekanisme kerjasama seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema *blended finance*.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada TPB/SDGs Tujuan 17

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, aktor nonpemerintah menjadi bagian penting pula dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs. Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari aktor nonpemerintah untuk Tujuan 17 SDGs diantaranya adalah:

- (1) SDGs *Hub* Universitas Indonesia, melalui program:
 - a. Kerjasama eksternal
 - b. Internal
- (2) SDGs *Center* Universitas Padjajaran, melalui program:
 - a. Pelatihan
 - b. Kerjasama riset
- (3) SDGs *Center* Universitas Gorontalo, melalui program:
 - a. Penguatan multistakholder partnership
- (4) SDGs *Center* Universitas Diponegoro, melalui program
 - a. Inovasi
 - b. Pendidikan internet untuk masyarakat
 - c. Pemantauan SDGs
 - d. Peningkatan Database dan Informasi Demografis
- (5) *The Prakarsa*, melalui program:
 - a. Riset perpajakan
- (6) Unilever Indonesia, melalui program:
 - a. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan
- (7) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lapeksdam PBNU), melalui program:
 - a. Inklusi desa berbasis digital
 - b. *Knowledge management* untuk penguatan demokrasi dan keagamaan
- (8) Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS), melalui program:
 - a. Aktif dalam gerakan zakat dunia
- (9) *Indonesia Business Council for Sustainable Development* (IBCSD), melalui pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing
- (10) PT Transkon Jaya TBK, melalui pendampingan peserta UMKM dan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pengetahuannya dan merancang silabus terkait isu keberlanjutan bisnis

BAB 4

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi pada tingkat nasional maupun daerah, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan TPB/SDGs.

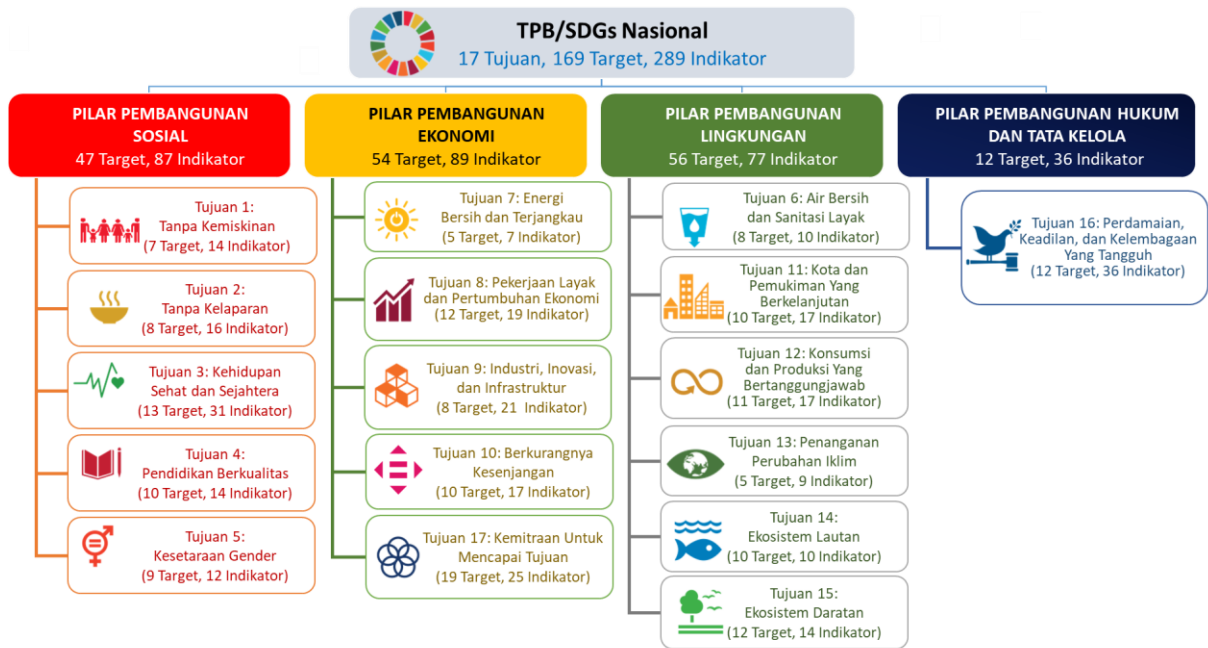
Landasan Peraturan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan Pasal 7 butir b Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs diamanatkan pada Pasal 17, yang menugaskan setiap Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional. Khusus untuk pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk organisasi nonpemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tersendiri.

Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

4.1 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPJMN 2020-2024. Rincian target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAN TPB/SDGs 2021-2024. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (*output*) yang tercantum dalam RAN TPB/SDGs 2021-2024 yang dibiayai yang bersumber dari APBN dan nonpemerintah.



Gambar 4.1 Indikator TPB/SDGs berdasarkan pilar pembangunan

4.2 Waktu Pemantauan dan Evaluasi

Berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat 3, pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan Ayat 4 menyatakan bahwa evaluasi dilaksanakan satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

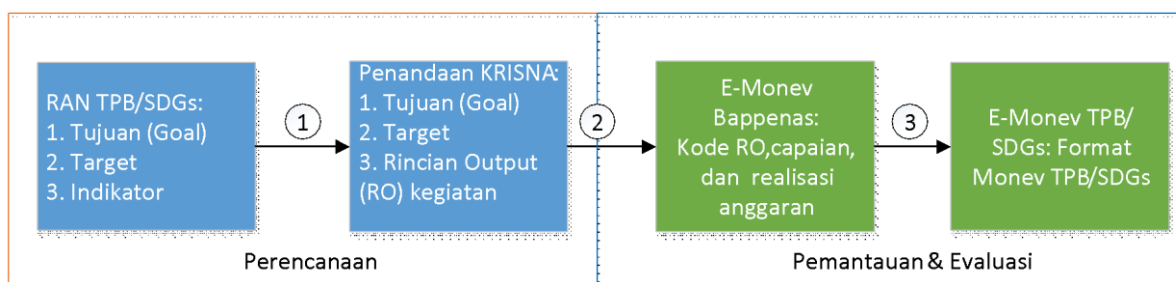
Laporan pemantauan disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan. Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilaporkan pada tanggal 15 bulan Juli. Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilaporkan pada tanggal 15 Januari. Laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs disampaikan satu bulan setelah tahun berjalan.

4.3 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

4.3.1 Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN)

Alur pemantauan dan evaluasi RAN dilakukan dengan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mekanisme pemantauan pelaksanaan TPB/SDGs diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Selain pemantauan terhadap perkembangan capaian target dan indikator TPB/SDGs, pemantauan pelaksanaan RAN TPB/SDGs juga akan dilakukan pada tataran program, kegiatan, dan keluaran (*output*) sesuai Renja Kementerian/Lembaga (K/L) yang terdapat pada sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). KRISNA merupakan sistem *e-planning* yang mengintegrasikan *platform* perencanaan dan anggaran ke dalam satu sistem tunggal dan terhubung dengan sistem *e-monev*. Dengan demikian proses pemantauan RAN TPB/SDGs terintegrasi dengan *platform* perencanaan dan anggaran nasional serta *platform* pemantauan dan evaluasi yang berbasis elektronik. Adapun alur informasi pemantauan RAN TPB/SDGs yang terintegrasi dengan KRISNA adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3 Alur informasi penandaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran TPB/SDGs

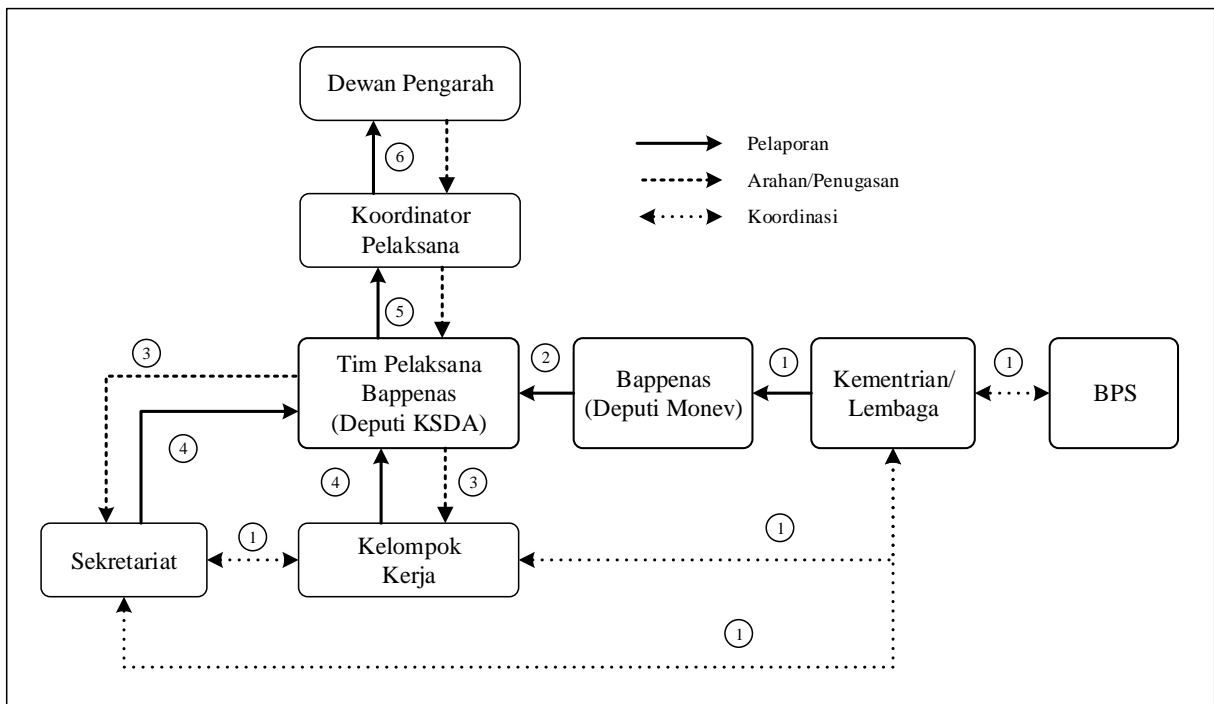
Secara umum, alur informasi penandaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran (secara khusus pedoman penandaan (*tagging*) RAN TPB/SDGs akan dibuat terpisah dari dokumen ini) mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sekretariat Nasional TPB/SDGs menyampaikan matriks Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs dengan menggunakan format yang terdapat dalam panduan penyusunan rencana aksi nasional TPB/SDGs kepada kelompok kerja (Pokja) dan sub pokja penanggung jawab tujuan (*goal*) SDGs. Matriks RAN TPB/SDGs berisi tujuan (*goal*), target, indikator TPB/SDGs, program, kegiatan, dan rincian *output* K/L yang terkait dengan pencapaian indikator TPB/SDGs. Penandaan (*tagging*) KRISNA terhadap intervensi pemerintah yang terkait tujuan (*goal*), target dan indikator TPB/SDGs dilakukan pada tingkat rincian *output* (RO) kegiatan. Penandaan pada tingkat rincian *output* dapat menggambarkan intervensi yang dilakukan oleh unit atau satuan kerja (satker) terkait dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs. Rincian *output* dinilai memiliki informasi yang lebih memadai untuk mengetahui indikator capaian, besaran dana yang dialokasikan, dan realisasi anggaran untuk setiap intervensi yang dilakukan K/L (*langkah 1*);
2. Penandaan (*tagging*) KRISNA terhadap intervensi pemerintah yang terkait tujuan (*goal*), target dan indikator TPB/SDGs dilakukan pada tingkat rincian *output* (RO) kegiatan akan memudahkan sistem *e-monev* Bappenas dalam melakukan analisis kinerja K/L. *E-monev* dapat mempermudah dalam melakukan analisis seperti: (a) pemantauan pelaksanaan RAN TPB/SDGs secara triwulanan, (b) pengukuran pencapaian kinerja program/kegiatan pelaksanaan RAN TPB/SDGs secara semesteran dan tahunan, (c) pemantauan terhadap pencapaian target TPB/SDGs, (d) memfasilitasi K/L untuk dapat saling berinteraksi dalam

menyampaikan permasalahan pelaksanaan program/kegiatan RAN TPB/SDGs, dan (e) mendukung pelaksanaan evaluasi pelaksanaan target TPB/SDGs. (*langkah 2*);

3. Hasil penapisan yang dilakukan oleh *e-monev* Bappenas terhadap perkembangan pelaksanaan *output* K/L yang mendukung pencapaian tujuan (*goal*), target dan indikator dalam RAN TPB/SDGs akan dibaca oleh *e-monev* SDGs secara otomatis sebagai data dasar untuk menyusun laporan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran TPB/SDGs. Laporan tersebut akan disajikan dalam bentuk matriks sebagaimana yang terdapat pada Tabel 4.3. Formulir capaian program, kegiatan, rincian *output*, dan realisasi anggaran program pemerintah pusat dalam dokumen ini (*langkah 3*).

Sejalan dengan pemantauan, alur mekanisme evaluasi RAN 2020-2024 mengacu kepada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Gambar 4.4 Alur informasi evaluasi untuk RAN

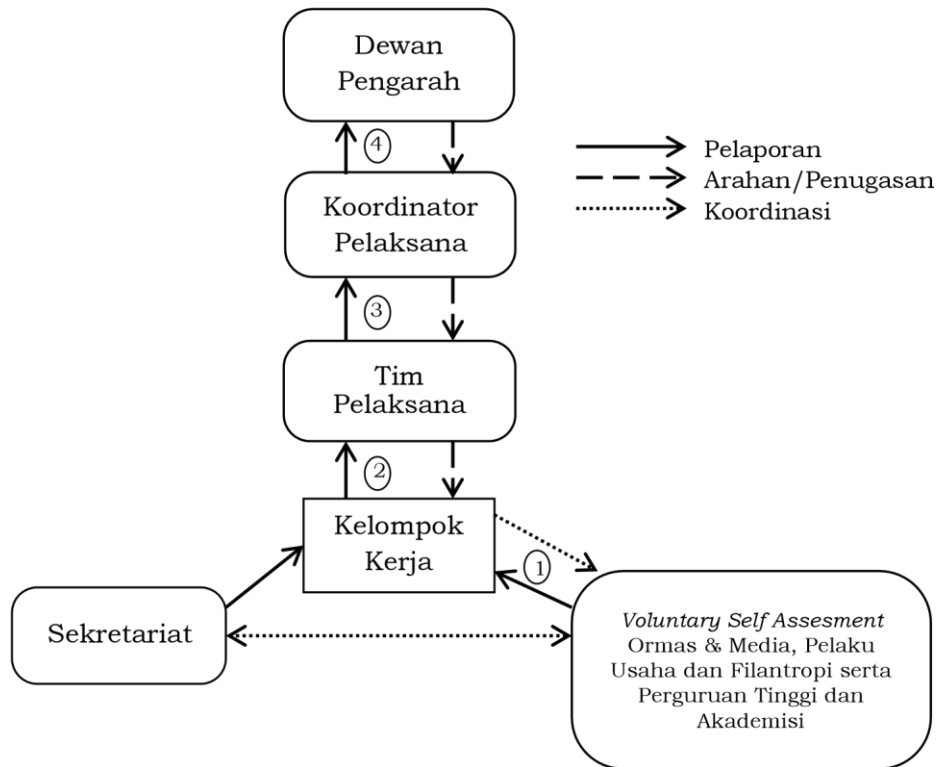
Alur pelaporan dalam evaluasi RAN mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga (K/L) menyusun laporan evaluasi pencapaian indikator-indikator TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan sesuai Permen PPN Nomor 7 Tahun 2018 (dapat menggunakan data capaian Badan Pusat Statistik) untuk kemudian disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas c.q. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Kementerian/Lembaga memberikan tembusan laporan evaluasi pencapaian indikator-indikator TPB/SDGs dan berkoordinasi dengan Sekretariat dan Kelompok Kerja (*Langkah 1*).

2. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui Ketua Tim Pelaksana yang dalam hal ini Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas (*Langkah 2*).
3. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk mengkaji dan memvalidasi laporan evaluasi pencapaian yang disampaikan oleh K/L dalam rangka mengetahui status pencapaian setiap target dan indikator dibantu oleh sekretariat. Selain itu, Pokja juga akan mengevaluasi keterpaduan pencapaian TPB/SDGs dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN (*Langkah 3*).
4. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 4*).
5. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (*Langkah 5*).
6. Koordinator TPB/SDGs Nasional melaporkan Laporan Evaluasi TPB/SDGs Indonesia kepada Dewan Pengarah (*Langkah 6*).

4.3.2 Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Nonpemerintah

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self-assessment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self-assessment tool* (SAT) yang disepakati.



Gambar 4.5 Alur informasi pemantauan organisasi nonpemerintah

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Organisasi nonpemerintah melakukan *voluntary self-assessment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan *format self-assessment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (*Langkah 1*).
2. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 2*).
3. Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana (*Langkah 3*).
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (*Langkah 4*).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan

tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

4.4 Bahan Pemantauan dan Evaluasi

Bahan yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi di tingkat pusat adalah:

1. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs 2020-2024;
2. Data pencapaian sasaran indikator TPB/SDGs termutakhir;
3. Data program, kegiatan, dan rincian *output* yang terkait dengan TPB/SDGs termasuk capaian target dan realisasi anggarannya; dan
4. Dokumen pencapaian kinerja nonpemerintah.

4.5 Alat Pemantauan dan Evaluasi

Alat pemantauan dan evaluasi menggunakan formulir pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs. Substansi laporan pemantauan dan evaluasi diuraikan sebagai berikut:

4.5.1 Form 1 (Formulir Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran TPB/SDGs)

Form 1 digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pencapaian sasaran seluruh indikator-indikator TPB/SDGs ditingkat nasional (RAN) dan daerah (RAD) sesuai dengan Metadata Edisi II. Di tingkat pusat (RAN), angka dasar dan capaian tahun berjalan menggunakan capaian nasional dengan target tahun berjalan diambil dari dokumen RPJMN, RKP atau Renstra Kementerian/Lembaga.

Berikut ini adalah contoh isian Form 1 yang memiliki informasi sebagai berikut: (1) nama tujuan TPB/SDGs; (2) nama target TPB/SDGs; (3) kode indikator TPB/SDGs; (4) nama indikator TPB/SDGs; (5) sumber data; (6) satuan; (7) angka dasar (*baseline*); (8) target tahun berjalan; (9) capaian tahun berkalan; dan (10) status pencapaian.

Tabel 4.1 Contoh isian Form 1 capaian kinerja pencapaian sasaran TPB/SDGs

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN (1)							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator TPB/SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (<i>Baseline</i>) 2020 (7)	Target 2021 (8)	Capaian 2021 (9)	Status (10)
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. (2)							
2.1.1*	Prevalensi ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernutrition</i>)	BPS	%	8,34	5,8		

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN (1)							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator TPB/SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (Baseline) 2020 (7)	Target 2021 (8)	Capaian 2021 (9)	Status (10)
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (FIES)	BPS	%	5,12	4,8		
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. (2)							
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian/tenaga kerja pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian	Rp. Juta/tenaga kerja	55,33	57,20		

Catatan:

- Nomor (9): diisi dengan capaian/realisasi tahun berjalan (tahun 2021) pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir yaitu hasil survei atau laporan program yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai sumber data yang tertulis pada tabel di atas (kolom nomor 5).
- Nomor (10) diisi dengan simbol yang menunjukkan status pencapaian indikator SDGs yang diukur dari perbandingan capaian indikator TPB/SDGs tahun berjalan dengan target indikator TPB/SDGs tahun berjalan. Simbol status pencapaian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Simbol status pencapaian TPB/SDGs tahun berjalan

Simbol	Keterangan
● : Tercapai (<i>achieved</i>)	Target tahun berjalan dapat tercapai.
▶ : Akan tercapai/membaik (<i>positive change</i>)	Tren capaian naik dari tahun sebelumnya walaupun belum mencapai target tahun berjalan.
▼ : Perlu perhatian khusus (<i>negative change</i>)	Tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai.

4.5.2 Form 2 (Formulir Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah)

Form 2 digunakan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pemerintah yang mendukung pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs baik di tingkat pusat dan daerah. Di tingkat pusat (Form 2a), pemantauan dan evaluasi dilakukan pada tataran rincian output (RO) K/L yang tercantum dalam RAN TPB/SDGs

dan dilakukan penandaan (*tagging*) TPB/SDGs pada aplikasi KRISNA-Renja K/L. Sementara di tingkat daerah (Form 2b), pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap subkegiatan dari Renja OPD sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang tercantum dalam RAD TPB/SDGs setiap provinsi.

Berikut ini adalah contoh isian Form 2a untuk memantau perkembangan realisasi capaian RO K/L tahun anggaran 2021 termasuk realisasi anggarannya setiap semester. Informasi yang diperlukan untuk dapat mengisi Form 2a antara lain: (1) nama program, kegiatan, dan RO K/L; (2) satuan dari RO K/L; (3) target tahun 2021 sesuai Renja dan RKA K/L tahun 2021; (4) realisasi target RO K/L pada semester I dan II tahun 2021; (5) alokasi anggaran RO K/L tahun 2021; (6) realisasi anggaran pada semester I dan II tahun 2021; (7) lokasi aktual di mana kegiatan RO dilaksanakan atau barang/layanan diberikan kepada penerima manfaat; dan (8) instansi pelaksana.

Tabel 4.3 Contoh isian Form 2a realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah pusat

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN											
Program/Kegiatan/ Rincian Output (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2021 (3)	Realisasi Target Tahun 2021 (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2021 (Rp Juta) (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp Juta) (6)		Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
					Sem I	Sem II		Sem I	Sem II		
PROGRAM PEMERINTAH PUSAT											
Indikator TPB/SDGs:											
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita											
2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe											
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
2080	Pembinaan Gizi Masyarakat	2080. QEA. 001	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Ibu Hamil KEK	238.000		63.265,09				Kemenkes
		2080. QEA. 003	Anak balita yang mendapat Suplementasi Gizi Mikro	Balita	140.000		5.265,99				Kemenkes
059.GH Program Komunikasi Publik											
4494	Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik	4494. QMB. 003	Diseminasi Informasi mengenai <i>Stunting</i>	Layanan	234		13.972,67				Kemen-kominfo

4.5.3 Form 3 (Formulir *Self Assessments* Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan, dan Anggaran Program Nonpemerintah Untuk Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi, dan Akademia)

Form 3 digunakan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran nonpemerintah untuk organisasi kemasyarakatan/CSO, filantropi, dan akademia. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap *output* kegiatan dari setiap program

yang menjadi target dari Lembaga Non Pemerintah yang ditunjukkan untuk mendukung pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs. Data yang digunakan mengacu pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah.

Berikut ini adalah contoh isian Form 3 untuk memantau perkembangan realisasi capaian tahun anggaran 2021 termasuk realisasi anggarannya setiap semester. Informasi yang diperlukan untuk dapat mengisi Form 3 antara lain: (1) nama program, kegiatan, dan *output* kegiatan; (2) satuan dari *output* kegiatan; (3) target *output* kegiatan tahun 2021; (4) realisasi target semester I dan II tahun 2021; (5) alokasi anggaran untuk setiap atau seluruh *output* kegiatan tahun 2021; (6) realisasi anggaran pada semester I dan II tahun 2021 untuk setiap *output* kegiatan; (7) sumber pendanaan pelaksanaan setiap/ seluruh *output* kegiatan; (8) lokasi aktual di mana *output* kegiatan dilaksanakan; dan (9) nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program.

Tabel 4.4 Contoh isian Form 3 realisasi program, kegiatan dan anggaran program nonpemerintah

TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB											
Program/Kegiatan/ Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2021 (3)	Realisasi Target Tahun 2021 (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2021 (Rp Juta) (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp Juta) (6)		Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Lembaga Pelaksana (9)	
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II				
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Indikator TPB/SDGs: 12.3.1.(a) Persentase Sisa makanan											
Nama Program: Dapur Pangan											
Kegiatan 1: Program Dapur Pangan adalah program mendekatkan akses pangan berbasis masyarakat.	1.1 Jumlah mitra Dapur Pangan	Mitra	115		35.120			Galang dana, mitra dunia usaha		Institusi Dapur Pangan Nasional	
	1.2 Jumlah penerima manfaat program Dapur Pangan	Orang	5.750							Institusi Dapur Pangan Nasional	
Kegiatan 2: Edukasi tentang pencegahan dan penanganan makanan berlebih melalui Dapur Pangan	2.1 Jumlah kegiatan edukasi yang terlaksana	Kegiatan	3								Institusi Dapur Pangan Nasional
	2.2 Jumlah mitra program yang mendapatkan edukasi	Edukasi	25								Institusi Dapur Pangan Nasional

4.5.4 Form 4 (Formulir Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan Pelaku Usaha Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017)

Form 4 digunakan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan program/kegiatan pelaku usaha. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kegiatan dari setiap program/kegiatan yang menjadi target dari pelaku usaha yang ditunjukkan untuk mendukung pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs. Data yang digunakan mengacu pada dokumen resmi seperti rencana kerja pelaku usaha.

Berikut ini adalah contoh isian Form 4 untuk memantau perkembangan realisasi capaian pelaku usaha sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017. Informasi yang diperlukan untuk dapat mengisi Form 4 antara lain: (1) kode yang disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017; (2) kegiatan usaha berkelanjutan yang mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-lte-TJSL; (3) kode indikator TPB/SDGs; (4) nama indikator TPB/SDGs; (5) nomor urut kegiatan/proyek/program; (6) nama proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan; (7) nama indikator capaian yang menjadi ukuran keberhasilan proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan; (8) satuan untuk mengukur indikator capaian; (9) waktu (durasi) pelaksanaan usaha sampai mencapai target; (10) angka target yang akan dicapai; dan (11) angka capaian target.

Tabel 4.5 Contoh isian Form 4 realisasi Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan Pelaku Usaha

Nama Perusahaan: Perusahaan A

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Indikator SDGs		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan					Evaluasi Target	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian	Satuan	Waktu (Tahun)	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.6.c.2.b.	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja	1	Penerapan upah minimum sesuai peraturan pada pekerja	Upah minimum sesuai dengan regulasi	%	1	100	
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	2	Training tentang BCoC/Kode Etik Bisnis kepada karyawan	Persentase kelulusan peserta training dengan nilai minimal 70%	%	1	100	

4.5.5 Form 5 (Formulir Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut)

Form ini ditujukan untuk mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target-target TPB/SDGs antara lain sesuai kategori berikut ini: (a) sumber daya manusia; (b) kelembagaan; (c) keuangan; (d) regulasi; (e) operasional; (f) politik; dan (g) lainnya, serta rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan institusi pelaksanaannya baik pemerintah maupun nonpemerintah.

Tabel 4.6 Form 4 realisasi proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan pelaku usaha

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/ Non Pemerintah
	Kategori	Deskripsi Masalah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nomor dan Nama Tujuan Target	Sumber Daya Manusia			
	Kelembagaan			
	Keuangan			
	Regulasi			
	Operasional			
	Politik			
	Lainnya			

4.5.6 Form 6 (Format pelaporan pembelajaran TPB/SDGs)

Form 6 ditujukan untuk merekam informasi dan pengalaman baik yang dilaksanakan baik institusi pemerintah dan nonpemerintah, sehingga dapat direplikasi di daerah lain. Skala pengalaman bisa bersifat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas, program dan kegiatan yang jelas, data yang akurat, dan dapat direplikasi di tempat lain. Pembelajaran dituliskan dalam *box* dan mencakup informasi berikut.

1. Nama Tujuan dalam TPB/SDGs
2. Nama Institusi
3. Nama Program
4. Lokasi dan Waktu Kegiatan
5. Latar Belakang
6. Proses Pelaksanaan (strategi, pihak terlibat, penerima manfaat, dll)
7. Hasil dan Dampak
8. Tantangan dan Pembelajaran
9. Peluang replikasi

Catatan: maksimal satu halaman termasuk grafik, foto, peta lokasi (koordinat), website, dll.

BAB 5

PENUTUP

Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs periode 2021-2024 merupakan kelanjutan RAN periode pertama sebelumnya yang disusun sebagai dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah dan nonpemerintah yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target TPB/SDGs. Saat ini, target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Setelah pelaksanaan RAN periode pertama, komitmen pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs semakin kuat tidak hanya dari sisi pemerintah tetapi juga nonpemerintah, baik di tingkat nasional maupun di daerah, bahkan hingga tingkat desa. Kepemilikan bersama yang tumbuh semakin kuat diantara para pihak merupakan hasil dari penerapan prinsip inklusif, partisipatif, dan transparan dalam pelaksanaan TPB/SDGs sehingga dapat meningkatkan kepercayaan antarpihak. Oleh karena itu, setiap tahapan penyusunan RAN TPB/SDGs selalu didasarkan pada prinsip dan semangat inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pihak pemerintah maupun nonpemerintah. Hal ini diharapkan juga menjadi landasan untuk memastikan pelaksanaan RAN TPB/SDGs dilakukan bersama dan memberikan manfaat untuk seluruh pemangku kepentingan.

Keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah juga terus meningkat, antara lain melalui pembentukan SDGs *Center/Network/Hub* di berbagai Perguruan Tinggi. Peran filantropi dan pelaku usaha juga terus meningkat ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah asosiasi yang terlibat dan berkomitmen nyata dalam pelaksanaan TPB/SDGs melalui proses bisnisnya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang memberikan mandat bagi perusahaan untuk menyampaikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) guna menunjukkan kontribusinya dalam pelaksanaan TPB/SDGs yang juga mulai diikuti oleh filantropi. Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian BUMN mendorong pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di seluruh BUMN yang dilaksanakan berdasarkan empat pilar utama TPB/SDGs yaitu pilar sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola. Keterlibatan dan kontribusi organisasi kemasyarakatan juga berperan signifikan dalam pencapaian TPB/SDGs melalui pelaksanaan berbagai program yang mampu menjangkau hingga ke masyarakat dan seluruh pelosok Indonesia. Keterlibatan dan tingginya komitmen pemangku kepentingan nonpemerintah dapat dilihat dari jumlah institusi yang telah menyampaikan rencana program dan kegiatannya pada RAN TPB/SDGs periode 2021-2024 yaitu sebanyak 132 institusi. Seluruh upaya tersebut merupakan dukungan pihak nonpemerintah dalam pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah.

Berbagai komitmen seluruh pemangku kepentingan di tahun-tahun mendatang tertuang dalam berbagai program dan kegiatan dalam dokumen RAN TPB/SDGs 2021 – 2024 yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung pelaksanaan pencapaian target-target TPB/SDGs. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target-target

pada 17 Tujuan TPB/SDGs juga mendukung pencapaian berbagai Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) dalam agenda pembangunan nasional. Dokumen RAN TPB/SDGs periode kali ini juga memuat berbagai kebijakan dan strategi hingga rencana aksi dalam mengurangi dampak pandemi COVID-19, sebagai bagian dari implementasi “*decade of actions*” SDGs melalui pendekatan “*build forward better*”. Hal ini juga untuk memenuhi arahan Presiden RI yang menekankan meskipun ditempa dengan pandemi COVID-19 namun target TPB/SDGs Indonesia pada tahun 2030 tidak boleh diturunkan.

Dalam rangka memastikan terlaksananya berbagai rencana aksi Pemerintah, pada RAN periode ini disusun intervensi/kegiatan yang mendukung pencapaian target TPB/SDGs oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sampai dengan tataran Rincian Output (RO). Hal ini untuk memastikan intervensi yang telah dituangkan dalam RAN TPB/SDGs diprioritaskan dalam perencanaan dan penganggaran K/L setiap tahunnya. Hal ini akan mempermudah penandaan anggaran (*budget tagging*) yang bermanfaat untuk membantu perhitungan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs setiap tahunnya. Selain itu, penandaan anggaran juga akan memudahkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja tahunan dari pelaksanaan RAN TPB/SDGs dengan memanfaatkan berbagai aplikasi pemantauan dan evaluasi eksisting di Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu. Sementara pada sisi kepentingan nonpemerintah, telah dilakukan juga akomodasi format rencana program dan kegiatan pelaku usaha yang selaras dengan POJK. Penambahan format ini untuk mempermudah para pelaku usaha menyusun rencana aksi TPB/SDGs yang sekaligus selaras dengan penyusunan dan publikasi Laporan Keberlanjutan Perusahaan seperti yang dimandatkan oleh POJK. Hal ini diharapkan bisa memperluas cakupan peran pelaku usaha dalam pencapaian target TPB/SDGs sekaligus meningkatkan citra perusahaan yang berperan mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Komitmen dalam pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs juga ditunjukkan dengan upaya Indonesia untuk terus memperkuat mekanisme pelaporan baik di tingkat nasional maupun global. Di tingkat nasional, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara reguler terhadap pencapaian target indikator TPB/SDGs dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs dan juga terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah dan nonpemerintah. Pada tingkat global juga, Indonesia telah 3 (tiga) kali melaporkan berbagai capaian target TPB/SDGs melalui *Voluntary National Review (VNR)* pada *High Level Political Forum (HPLF)* UN ECOSOC tahun 2017, 2019, dan 2021 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya untuk memastikan tidak ada satupun yang tertinggal (*no one left behind*).

Selain proses pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan tercapainya target TPB/SDGs, diperlukan juga penguatan sarana pelaksanaan (*means of implementation*) seperti pada periode RAN sebelumnya. Berbagai penguatan sarana pelaksanaan pada periode RAN sebelumnya yang meliputi: (1) perluasan penggunaan teknologi; (2) penguatan kerja sama multipihak; (3) penguatan koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; (5) pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi, tetap akan ditingkatkan pada rencana implementasi RAN periode ini. Selain itu dikembangkan pula berbagai pendekatan dan inovasi yang mendukung ketersediaan

data serta pembiayaan dan investasi yang memadai yang tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak non pemerintah.

Inovasi dalam pembiayaan TPB/SDGs merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka mempercepat pencapaian TPB/SDGs dan melengkapi upaya pembiayaan pembangunan. Strategi pendanaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun perlu diperluas sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan dari berbagai potensi yang lebih inovatif. Dalam menggali potensi pendanaan inovatif tersebut, spektrum pendanaan itu sendiri beragam dengan berbagai tujuan, baik finansial maupun nonfinansial. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi dan integrasi yang dapat menghubungkan seluruh potensi pendanaan inovatif untuk pencapaian TPB/SDGs. Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari: (1) optimalisasi penerimaan negara; (2) sumber pembiayaan nonpemerintah dari masyarakat; (3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat; serta (4) sumber-sumber lainnya yang dibutuhkan dalam mendukung investasi jangka panjang.

Dokumen RAN TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, baik secara daring (*online*) dan luring (*offline*). Pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR
KEP. 136/M.PPN/HK/12/2021
TANGGAL 15 DESEMBER 2021

PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
PROGRAM PEMERINTAH											
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN											
INDIKATOR TPB/SDGs:											
1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim											
1.2.1 * Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur											
1.2.2 * Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional											
027.DQ Program Perlindungan Sosial											
6318	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	6318.QAA.001	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Orang	163.400.000	219.900.000	277.500.000	280.000.000	419.644,0	Pusat	Kemensos
		6318.UAB.001	Layanan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	Sistem Informasi	1	1	1	1	631.678,5	Pusat	Kemensos
6284	Penyelenggaraan Program Sembako	6284.QAH.101	Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako	Layanan	2	2	2	2	25.203,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.101	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	5.513.785	5.513.785	5.513.785	5.513.785	52.596.057,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.102	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	5.238.372	5.238.372	5.238.372	5.238.372	49.941.640,4	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.103	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	4.847.877	4.847.877	4.847.877	4.847.877	46.271.796,2	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.104	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	3.612.185	3.612.185	3.612.185	3.612.185	17.338.488,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.105	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	3.928.384	3.928.384	3.928.384	3.928.384	18.856.243,2	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.105	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	3.928.384	3.928.384	3.928.384	3.928.384	18.856.243,2	Pusat	Kemensos

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6284.QEB.106	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	2.459.431	2.459.431	2.459.431	2.459.431	11.805.268,8	Pusat	Kemensos
6283	Pelayanan Akses Sumber Daya Ekonomi	6283.QEB.101	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah di Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	6.000	6.000	6.000	6.000	501.778,9	Pusat	Kemensos
		6283.QEB.102	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah di Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	6.000	6.000	6.000	6.000	501.778,9	Pusat	Kemensos
		6283.QEB.103	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah di Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	6.000	6.000	6.000	6.000	503.998,9	Pusat	Kemensos
6282	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	6282.QDC.101	Sumber Daya Manusia yang dikelola	Orang	40.211	40.211	40.211	40.211	4.880.699,2	Pusat	Kemensos
		6282.QEB.201	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Keluarga	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	191.493.238,1	Pusat	Kemensos
6273	Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan	6273.ACD.101	Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Institusi	-	1.200	1.200	1.200	17.485.081,0	Pusat	Kemensos
		6273.ACD.102	Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang/Barang (PUB)	Institusi	-	270	270	270	1.152.556,0	Pusat	Kemensos
6274	Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu	6274.BDB.101	Karang Taruna Yang Diberdayakan	Lembaga	-	608	608	608	4.015.610,0	Pusat	Kemensos
		6274.BDB.102	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Yang Diberdayakan	Lembaga	-	100	100	100	485.490,0	Pusat	Kemensos
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan											
027.DQ Program Perlindungan Sosial											
6282	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	6282.QDC.101	Sumber Daya Manusia yang dikelola	Orang	40.211	40.211	40.211	40.211	4.880.699,2	Pusat	Kemensos

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6282.QEB.201	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Keluarga	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	191.493.238,1	Pusat	Kemensos
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
5610	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS	5610.QEA.001	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS	Penduduk (juta)	96,8	110,0	111,4	112,9	266.061.200,0	34 Provinsi	Kemenkes
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
2200	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2200.QIH.001	Perusahaan yang menerapkan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja	Badan Usaha	5.782	-	-	-	13.409,0	34 provinsi	Kemenaker
5586	Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5586.ABK.001	Desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran, dan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja	Rekomendasi Kebijakan	3	-	-	-	755,6	Pusat	Kemenaker
		5586.BDH.001	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Edukasi Program Jaminan Sosial	Badan Usaha	66				395,0	34 provinsi	Kemenaker
6619	Peningkatan Pendidikan Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial	6619.ABK.001	Desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran dan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja	Rekomendasi Kebijakan	-	3	3	3	5.857,4	Pusat	Kemenaker
		6619.BDC.007	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Edukasi Program Jaminan Sosial	Orang	-	1.000	1.500	2.000	10.500,0	34 provinsi	Kemenaker
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan											
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
5610	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS	5610.QEA.001	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS	Penduduk (juta)	96,8	110,0	111,4	112,9	266.061.200,0	34 Provinsi	Kemenkes
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
2200	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2200.QIH.001	Perusahaan yang menerapkan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja	Badan Usaha	5.782	-	-	-	13.409,0	34 provinsi	Kemenaker

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5586	Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5586.ABK.001	Desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran, dan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja	Rekomendasi Kebijakan	3	-	-	-	755,6	Pusat	Kemenaker
		5586.BDH.001	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Edukasi Program Jaminan Sosial	Badan Usaha	66				395,0	34 provinsi	Kemenaker
6619	Peningkatan Pendidikan Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial	6619.ABK.001	Desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran dan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja	Rekomendasi Kebijakan	-	3	3	3	5.857,4	Pusat	Kemenaker
		6619.BDC.007	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Edukasi Program Jaminan Sosial	Orang	-	1.000	1.500	2.000	10.500,0	34 provinsi	Kemenaker
035.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan											
4545	Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan	4545.PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	Paket Rekomendasi	2	2	2	2	5.000,0	Pusat	Kemenko Perekonomian
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan											
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
2200	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2200.QIH.001	Perusahaan yang menerapkan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja	Badan Usaha	5.782	-	-	-	13.409,0	34 provinsi	Kemenaker
5586	Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5586.ABK.001	Desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran, dan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja	Rekomendasi Kebijakan	3	-	-	-	755,6	Pusat	Kemenaker
		5586.BDH.001	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Edukasi Program Jaminan Sosial	Badan Usaha	66				395,0	34 provinsi	Kemenaker

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6619	Peningkatan Pendidikan Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial	6619.ABK.001	Desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran dan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja	Rekomendasi Kebijakan	-	3	3	3	5.857,4	Pusat	Kemenaker
		6619.BDC.007	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Edukasi Program Jaminan Sosial	Orang	-	1.000	1.500	2.000	10.500,0	34 provinsi	Kemenaker
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar											
010.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.FBA.037	Fasilitasi Penyusunan RAD AMPL	Daerah	-	-	-	-	34.000,0	Pusat	Kemendagri
		6139.UBA.001	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Air Minum dan Air Limbah	Provinsi	412	412	412	412	44.000,0	Pusat	Kemendagri
		6139.UBA.013	Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Provinsi	34	34	34	34	21.000,0	Pusat	Kemendagri
		6139.UBA.014	Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Provinsi	34	34	34	34	20.000,0	Pusat	Kemendagri
		6139.UBA.015	Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman	Provinsi	34	34	34	34	30.000,0	Pusat	Kemendagri
		6139.UBA.016	Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)	Provinsi	34	34	34	34	45.000,0	Pusat	Kemendagri

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6139.UBA.017	Provinsi yang terfasilitasi penyusunan/pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	Provinsi	34	34	34	34	20.000,0	Pusat	Kemendagri
1244	Penataan Sistem Pelayanan Administrasi Desa	1244.AEC.002	Desa yang telah bekerjasama antar desa dalam pengelolaan air minum dan sanitasi	Kerjasama Desa	32	-	-	-	29.243,0	Provinsi	Kemendagri
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan	6468.RAI.002	Sarana Pelayanan Dasar yang dibangun/ dikembangkan/ direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	14.053,0	Kab. Banyuwasin dan Buol	Kemendes PDPT
6470	Penyerasian Pembangunan Daerah Tertinggal	6470.RBG.001	Prasarana Air Bersih di Daerah Tertinggal yang Dibangun	Unit	1	2	3	4	15.900,0	Kab. Jayawijaya	Kemendes PDPT
		6470.RBG.002	Prasarana Air Bersih di Daerah Perbatasan yang dibangun	Unit	2	2	2	2	20.350,0	Kab. Boven Digoel dan Kab. Kepulauan Aru	Kemendes PDPT
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.4.2* Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan											
056.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan											
4402	Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	4402.QAB.001	Penatausahaan Tanah Ulayat	Provinsi	33	33	33	33	49.000,0	33 Satker	Kemen ATR/BPN
6416	Pendaftaran Tanah dan Ruang	6416.QAA.001	SHAT PTSL Kategori 1	Bidang	150.000	665.469	1.008.702	955.781	1.710.891,6	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.002	SHAT PTSL Kategori 2	Bidang	208.503	587.909	604.564	672.331	2.076.345,3	6 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.003	SHAT PTSL Kategori 3	Bidang	500.150	2.441.202	2.569.412	2.831.480	4.277.334,8	10 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.004	SHAT PTSL Kategori 4	Bidang	600.000	747.677	831.724	1.031.726	4.213.510,4	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.005	SHAT PTSL Kategori 5	Bidang	6.055.772	4.726.016	4.366.125	4.038.703	33.505.520,7	7 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.009	SHAT PTSL PM Kategori 3	Bidang	119.254	0	0	0	709.239,8	7 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.010	SHAT PTSL PM Kategori 4	Bidang	720.000	0	0	0	3.578.762,9	3 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.013	SHAT Mandiri Kategori 1	Bidang	9.637	0	0	0	123.759,3	3 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.014	SHAT Mandiri Kategori 2	Bidang	20.125	0	0	0	224.355,6	6 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.015	SHAT Mandiri Kategori 3	Bidang	39.232	0	0	0	372.802,2	10 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.016	SHAT Mandiri Kategori 4	Bidang	16.002	0	0	0	123.402,7	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
6416.QAA.017	SHAT Mandiri Kategori 5	Bidang	47.755	0	0	0	285.064,1	7 Provinsi	Kemen ATR/BPN		

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6418	Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	6418.QAA.001	SK Redistribusi Tanah Kategori I	SK	25.891	43.415	205.000	155.000	177.007,1	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.002	SK Redistribusi Tanah Kategori II	SK	122.289	80.044	165.500	130.240	173.035,0	6 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.003	SK Redistribusi Tanah Kategori III	SK	209.510	227.661	432.774	377.500	375.958,0	10 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.004	SK Redistribusi Tanah Kategori IV	SK	73.318	41.150	148.500	138.500	100.974,2	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.005	SK Redistribusi Tanah Kategori V	SK	41.300	25.150	20.120	20.120	21.683,5	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.006	SK Redistribusi Tanah Kategori VI	SK	9.510	6.000	0	0	8.010,2	2 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.007	SK Redistribusi Tanah Kategori VII	SK	816	1.000	0	0	406,3	1 Provinsi	Kemen ATR/BPN
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang											
103.FA Program Ketahanan Bencana											
3891	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang dukungan sumber daya darurat	3891.QEE.003	Pengelolaan dana bantuan kedaruratan	Kegiatan	10	10	10	10	1.056.400,0	34 provinsi	BNPB
4285	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang dukungan infrastruktur darurat	4285.UAC.001	Pengelola infrastruktur darurat	Personil	100	100	100	100	6.100,0	34 provinsi	BNPB
4286	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi	4286.UAC.002	Pendamping penanganan korban dan pengungsi	Orang	570	570	570	570	56.000,0	34 Provinsi	BNPB
4287	Layanan pusat pengendalian operasi	4287.UAC.001	Pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan	Personil	105	105	105	105	8.200,0	Pusat	BNPB
027.DQ Program Perlindungan Sosial											
6281	Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana	6281.BEE.101	Korban Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan	Paket	5.800	30.000	40.000	50.000	76.800,1	Pusat	Kemensos

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6281.QEE.101	Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat	Paket	150.000	200.000	250.000	250.000	1.099.734,2	Pusat	Kemensos
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.5.2* Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB											
103.FA Program Ketahanan Bencana											
4288	Pengelolaan Logistik dan Peralatan PB	4288.QEE.001	Pemenuhan kebutuhan logistik PB	Kab/Kota	33	33	33	33	89.341,1	33 Provinsi	BNPB
3885	Pemulihan dan Peningkatan Pascabencana Bidang Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam	3885.QAH.001	Layanan Pemulihan dan Peningkatan Pascabencana Bidang Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Lokasi	8	8	8	8	25.200,0	34 Provinsi	BNPB
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.5.3* Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6136.UBA.001	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	Daerah	133	375	468	568	15.625,0	Kabupaten/ Kota	Kemendagri
		6136.UBA.004	Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah	Daerah	34	34	34	34	6.060,0	Provinsi	Kemendagri
		6136.UBA.005	Daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan tanggap darurat	Daerah	34	34	34	34	4.240,0	Provinsi	Kemendagri
103.FA Program Ketahanan Bencana											
3882	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pencegahan melalui kesiapsiagaan	3882.UBB.001	Pembentukan Desa Tangguh Bencana Banjir dan Gunungapi	Lokasi	2	2	2	2	2.400,0	Pusat	BNPB
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.5.4* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional											
103.FA Program Ketahanan Bencana											
3893	Layanan data dan informasi serta komunikasi kebencanaan	3893.QEG.001	Prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan	Unit	10	10	10	10	58.000,0	Pusat	BNPB
		3893.QMB.002	Budaya sadar bencana	Layanan	81	81	81	81	12.200,0	Pusat	BNPB

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
103.WA Program Dukungan Manajemen											
3878	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	3878.SCK.001	Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB dan Simulasi PB di daerah	Orang	760	760	760	760	54.900,0	34 Provinsi	BNPB
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan											
027.DQ Program Perlindungan Sosial											
6284	Penyelenggaraan Program Sembako	6284.QAH.101	Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako	Layanan	2	2	2	2	25.203,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.101	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	5.513.785	5.513.785	5.513.785	5.513.785	52.596.057,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.102	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	5.238.372	5.238.372	5.238.372	5.238.372	49.941.640,4	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.103	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	4.847.877	4.847.877	4.847.877	4.847.877	46.271.796,2	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.104	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	3.612.185	3.612.185	3.612.185	3.612.185	17.338.488,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.105	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	3.928.384	3.928.384	3.928.384	3.928.384	18.856.243,2	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.106	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	2.459.431	2.459.431	2.459.431	2.459.431	11.805.268,8	Pusat	Kemensos

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah											
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	6141.UBA.002	Daerah yang Memenuhi Indikator <i>Mandatory Spending</i>	Daerah	350	400	459	542	1.912,0	Jakarta	Kemendagri
		6141.UBA.004	Daerah yang Memenuhi Penganggaran SPM	Daerah	210	318	426	542	3.762,0	Jakarta	Kemendagri
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN											
INDIKATOR TPB/SDGs:											
2.1.1 * Prevalensi ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)											
2.1.2 * Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan pangan											
2.2.2.(a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)											
018.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas											
1761	Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	1761.CAI.611	Kawasan Kedelai	Unit	125.000	129.377	133.902	138.590	1.152.831,0	26 Provinsi	Kementan
		1761.RAI.612	Kawasan Ubi Kayu	Unit	35.000	36.226	37.492	38.805	488.339,7	18 Provinsi	Kementan
		1761.RAI.613	Kawasan Ubi Jalar	Unit	2.000	2.072	2.142	2.218	36.872,2	4 Provinsi	Kementan
		1761.CAI.614	Kawasan Kacang Tanah	Unit	1.000	1.035	1.071	1.109	122.728,3	24 Provinsi	Kementan
		1761.CAI.615	Kawasan Kacang Hijau	Unit	5.000	5.175	5.356	5.544	46.709,0	16 Provinsi	Kementan
		1761.CAI.618	Kawasan Aneka kacang dan Umbi Lainnya (Ha)	Unit	4.000	4.141	4.286	4.434	100.899,0	Jawa Barat, Banten	Kementan
1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal/Tanaman Pangan	1762.RAI.621	Kawasan Padi	Unit	540.000	540.000	540.000	540.000	4.691.890,0	Pusat, 32 Provinsi	Kementan
		1762.RAI.622	Kawasan jagung	Unit	15.000	15.000	15.000	15.000	245.925,0	27 Provinsi	Kementan
		1762.RAI.625	Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Unit	50.000	100.000	150.000	200.000	707.400,0	Sentra padi	Kementan
		1762.CAI.626	Kawasan Sereal/Tanaman Lainnya	Unit	5.000	5.000	5.000	5.000	25.982,5	20 Provinsi	Kementan
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	1777.RAI.006	Kawasan Sagu	Unit	1.000	1.000	1.000	1.000	25.461,9	Pusat, 14 Provinsi	Kementan
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	1785.PDA.001	Benih Ternak Unggul	Produk/Dosis	956.095 produk	5.901.000	5.901.000	5.901.000	237.772,0	3 Kab	Kementan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		1785.PDA.002	Bibit Ternak Unggul	Produk/ Dosis	970.450 produk	970.100	970.100	970.100	317.981,5	Pusat, 8 Kab/Kota	Kementan
		1785.QEH.003	Ternak ruminansia potong	Ekor/ Kelompok Masyarakat	1.477 Kelompok Masyarakat	500	500	500	173.761,8	Pusat, 17 Kab/Kota	Kementan
		1785.QEH.002	Ternak ruminansia perah	Ekor/ Kelompok Masyarakat	44 Kelompok Masyarakat	500	500	500	556.569,9	Pusat, 12 Provinsi	Kementan
		1785.QEH.004	Ternak unggas dan aneka ternak	Ekor/ Kelompok Masyarakat	5.556 Kelompok Masyarakat	100.500	100.500	100.500	973.637,8	Pusat, 14 kab/kota	Kementan
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1771.CAI. 014	Kawasan Sayuran Lainnya	Unit	850	850	850	850	44.020,0	40 Kab/Kota	Kementan
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	5886.CAI.010	Kawasan Pisang	Unit	1.100	1.100	1.100	1.100	111.615,0	4 Provinsi	Kementan
		5886.CAI.011	Kawasan Manggis	Unit	800	800	800	800	39.600,0	Pusat, 10 Provinsi	Kementan
		5886.CAI.016	Kawasan Jeruk	Unit	500	500	500	500	29.900,0	Pusat, 7 Provinsi	Kementan
		5886.CAI.017	Kawasan Buah Lainnya	Unit	1.015	1.015	1.015	1.015	108.684,0	Pusat, 4 Provinsi	Kementan
		5886.RAI.012	Kawasan Durian	Unit	1.340	1.340	1.340	1.340	78.748,0	26 Kab	Kementan
		5886.RAI.013	Kawasan Mangga	Unit	750	750	750	750	32.708,0	Pusat	Kementan
1814	Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	1814.BDD.001	Pangan yang terdistribusi	Kelompok Masyarakat	32.150	32.150	32.150	32.150	125.000,0	22 Provinsi	Kementan
1815	Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	1815.QDD.001	Pertanian keluarga	Kelompok Masyarakat	200	200	200	200	177.718,7	17 Provinsi	Kementan
		1815.BMA.003	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Layanan	549	549	549	549	143.669,8	Pusat, 34 Provinsi	Kementan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
1816	Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1816.BDD.001	Diversifikasi pangan	Lokasi	35	35	35	35	263.191,5	34 Provinsi	Kementan
		1816.QDD.001	Pekarangan Pangan Lestari	Lokasi	5.100	5.100	5.100	5.100	1.311.725,9	34 Provinsi	Kementan
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan	6468.RAG.004	Bantuan Saranadan Prasarana Pendukung Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di Kawasan Perdesaan	Unit	6	6	6	6	23.152,0	Pusat	Kemendes PDTT
INDIKATOR TPB/SDGs:											
2.2.1 * Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita											
2.2.2 * Prevalensi <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe											
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
2080	Pembinaan Gizi Masyarakat	2080.QEA.001	Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Ibu Hamil KEK	238.000	210.000	140.000	140.000	607.197,0	Pusat	Kemenkes
		2080.QEA.003	Anak balita yang mendapat Suplementasi Gizi Mikro	Balita	140.000	190.000	240.000	290.000	69.414,0	Pusat	Kemenkes
		2080.QEA.002	Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	Balita Kurus	441.000	325.000	210.000	210.000	626.695,0	Pusat	Kemenkes
		2080.QEA.004	Ibu hamil dan balita yang diberikan pendidikan gizi melalui pemberian makanan tambahan lokal	Ibu Hamil dan Balita	114.184	115.000	115.000	115.000	139.000,0	Pusat	Kemenkes
		2080.QKA.504	Surveilans gizi yang ditingkatkan kualitasnya	Laporan	515	515	515	515	143.469,0	Pusat dan 34 Provinsi	Kemenkes
5833	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	5833.PEA.002	Koordinasi LP/LS peningkatan posyandu aktif	Kegiatan	35	35	35	35	110.164,7	Pusat, provinsi, dan Kabupaten kota lokus	Kemenkes
		5833.PEA.003	Koordinasi LP/LS Pencegahan <i>Stunting</i>	Kegiatan	35	35	35	35	5.742,0	Pusat dan provinsi	Kemenkes
		5833.QDD.003	Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Pencegahan <i>Stunting</i>	Kelompok Masyarakat	360	460	514	514	94.402,3	Kabupaten/kota lokus	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5834	Penyehatan Lingkungan	5834.UBA.001	Kab/kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kab/Kota	514	514	514	514	175.875,0	34 provinsi	Kemendes
		5834.UBA.003	Kab/kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pengawasan Sarana Air Minum (SAM)	Kab/Kota	514	514	514	514	176.209,0	34 provinsi	Kemendes
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
2058	Surveilans dan Karantina Kesehatan	2058.PEF.002	Sosialisasi pelaksanaan imunisasi	Orang	762	708	708	708	2.673,0	Pusat dan DKI Jakarta	Kemendes
		2058.QMA.002	Media komunikasi, informasi, edukasi imunisasi	Layanan	13	13	13	13	388.093,2	Pusat	Kemendes
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
2065	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	2065.QEC.518	Paket penyediaan obat gizi	Paket	1	1	1	1	1.458.394,8	Pusat	Kemendes
063.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan											
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPOM	Produk	2.550	2.670	2.700	2.700	15.262,8	34 Provinsi	Badan POM
		3165.QDB.002	Desa pangan aman	Desa	427	648	874	1.105	183.153,0	34 Provinsi	Badan POM
068.DJ Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana											
3331	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	3331.QDE.001	Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan 1000 HPK	Keluarga	4.122.784	4.122.784	4.122.784	4.122.784	136.018,0	34 Provinsi	BKKBN
		3331.QDD.001	PIK Remaja yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remajaputrisebagai calonibu	Kelompok	29.620	31.101	32.656	34.289	261.088,0	34 Provinsi	BKKBN
023.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
4459	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	4459.BDB.145	Satuan PAUD yang melaksanakan program UKS	Lembaga	1.000	671	1.000	1.000	55.134,2	Pusat	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4459.QDB.143	Satuan PAUD yang menyelenggarakan pendekatan holistik integratif	Lembaga	5.000	5.000	5.000	5.000	111.831,0	Pusat	Kemendikbud Ristek
		4459.QDB.144	Satuan PAUD yang mendapatkan fasilitasi peningkatan pencapaian perkembangan anak	Lembaga	1.000	370	1.000	1.000	31.359,7	Pusat	Kemendikbud Ristek
059.GH Program Komunikasi Publik											
4494	Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik	4494.QMB.003	Diseminasi Informasi Mengenai <i>Stunting</i>	Layanan	234	250	270	290	75.426,3	Pusat	Kemkominfo
032.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
2357	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	2357.PEH.001	Kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan)	Lokasi	34	34	34	34	137.500,0	34 Provinsi	KKP
010.CM Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.011	Daerah yang meningkatkan kapasitas aparturnya dalam penilaian kinerja penanganan <i>stunting</i>	Daerah	360	460	512	512	12.000,0	Pusat	Kemendagri
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4840	Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	4840.UBA.001	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	Daerah (Prov/Kab/Kota)	509	296	292	278	750.400,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4840.RBB.001	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Regional	Unit	1.500	6.270	6.270	6.270	18.682.000,0	28 Kab/Kota	Kemen PUPR
		4840.RBB.002	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota		149.324						Kemen PUPR
		4840.RBB.003	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Unit	4.145	21.663	21.663	21.663	25.894.000,0	168 Kab/Kota	Kemen PUPR
		4840.RBB.010	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat	Unit	20.300						Kemen PUPR
		4840.RBB.004	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota	Unit	30	101	152	151	4.435.000,0	374 kab/kota	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4840.RBB.011	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	Unit	51.300	-	-	-	568.059,1	100 Kab/Kota	Kemen PUPR
4973	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak	4973.BAH.001	Fasilitasi Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Peralatan Bidang Air Minum	Layanan	1	1	1	1	35.908,0	Pusat	Kemen PUPR
		4973.RBB.001	Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	Liter per detik	1.279	5.658	7.282	8.486	329.539.000,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.RBB.002	Pembangunan SPAM Regional	Unit	7	7	7	7		7 wilayah pelayanan SPAM Regional Prioritas	Kemen PUPR
		4973.RBB.003	Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota	Liter per detik	555	2.424	3.121	3.637		Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.RBB.004	Peningkatan SPAM Regional	Unit	2	2	2	2		Kabupaten/ Kota terlayani SPAM Regional	Kemen PUPR
		4973.RBB.005	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	SR	51.525	577.423	721.779	866.135		Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.RBB.006	Perluasan SPAM Regional	Unit	3	3	3	3	Kabupaten/ Kota terlayani SPAM Regional	Kemen PUPR	
		4973.RBB.007	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	SR	400.200	-	-	-	1.571.634,6	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.DCB.001	Pembinaan Teknis Bidang Air Minum	Orang	800	800	800	800	33.020,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.UBA.001	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	Kab/Kota	509	509	509	509	1.285.226,9	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
2794	Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya	2794.UBA.002	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Peningkatan Kapasitas PUG/PPRG Penurunan <i>Stunting</i>	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7	6	7	10	4.030,0	Pusat	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
2812	Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan	2812.UBA.001	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHA atas Kesehatan (<i>Stunting</i>)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	40	40	40	40	3.529,68	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
018.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas											
1816	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1816.QDD.002	Pekarangan pangan lestari <i>Stunting</i>	Lokasi	1.000	1.000	1.000	1.000	302.912,0	260 Kabupaten/ kota	Kementan
1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal/ia Tanaman Pangan	1762.RAI.625	Kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi)	Kawasan	50.000	100.000	150.000	200.000	707.400,0	Sentra Padi	Kementan
081.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
6248	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Agroindustri	6248.SDB.015	Prototipe Produk Pangan Fungsional padat gizi untuk cegah <i>stunting</i> (<i>stunting</i>)	Prototipe	2	-	-	-	13.400,0	Kota Tangerang Selatan	BPPT
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan	6468.QDD.001	Desa yang mendapatkan Penanganan Konvergensi <i>Stunting</i>	Kelompok Masyarakat	360	360	360	360	21.000,0	Pusat	Kemendes PDPT
027.DQ Program Perlindungan Sosial											
6282	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	6282.QEB.201	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Keluarga	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	114.839,3	Pusat	Kemensos
6284	Penyelenggaraan Program Sembako	6284.QEB.101	KPM yang memperoleh bantuan sosial pangan melalui program sembako pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	6.999.407	6.999.407	6.999.407	6.999.407	77.119,1	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.102	KPM yang memperoleh bantuan sosial pangan melalui program sembako pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	6.636.581	6.636.581	6.636.581	6.636.581	73.140,2	Pusat	Kemensos

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6284.QEB.103	KPM yang memperoleh bantuan sosial pangan melalui program sembako pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	5.164.023	5.164.023	5.164.023	5.164.023	58.555,7	Pusat	Kemensos
025.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama											
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	2104.QDE.001	Keluarga Islam yang memperoleh bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah	Orang	120.083	355.800	355.800	355.800	398.000,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
080.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
6333	Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Inovasi Teknologi Nuklir di Bidang Kesehatan	6333.PBU.001	Rekomendasi Kebijakan Penanganan <i>Stunting</i> berdasarkan Asesmen Kecukupan Gizi Mikro pada Baduta <i>Stunting</i> dengan Menggunakan Metode Analisis Berbasis Nuklir	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1.620.422,0	Provinsi Jawa Barat	BATAN
		6333.PBU.002	Rekomendasi Kebijakan untuk Produk Kemaritiman dan Olahannya di Daerah Kasus <i>Stunting</i> (Kabupaten Lamongan dan Sukabumi)	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1.286.350,0	Provinsi Banten	BATAN
INDIKATOR TPB/SDGs: 2.2.3* Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun											
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
2080	Pembinaan Gizi Masyarakat	2080.QEA.004	Ibu hamil dan balita yang diberikan Pendidikan Gizi melalui Pemberian Makanan Tambahan Lokal	Kab/Kota	514	514	514	514	88.865,0	34 Provinsi	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs:											
2.3.1* Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usahatani/tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan											
2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah											
032.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
2345	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	2345.QEG.001	Sarana Kawasan Perikanan Budidaya yang disalurkan ke masyarakat	Unit	120	120	120	120	552.850,0	10 provinsi	KKP
2337	Pengelolaan Kapal	2337.QEG.001	Kapal perikanan bantuan yang	Unit	96	100	100	100	183.391,0	34 provinsi	KKP
		2337.QEG.002	Alat penangkapan ikan	Unit	750	1.000	1.250	1.500	150.500,0	7 Lokasi	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs: 2.3.1.(a) Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/ kehutanan											
018.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
5885	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	5885.CAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Unit	7.035	7.035	7.035	7.035	2.877.320,3	Pusat, 34 Provinsi	Kementan
		5885.CAG.002	Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Unit	142	142	142	142	90.519,0	Pusat, 26 Provinsi	Kementan
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	5887.RAG.010	Sarana Pascapanen Hortikultura	Unit	75	75	75	75	30.576,0	Pusat, 81 Kab/Kota	Kementan
		5887.RAG.011	Sarana Pengolahan Hortikultura	Unit	200	200	200	200	107.407,9	Pusat, 237 Kab/Kota	Kementan
		5887.RBK.010	Prasarana Pascapanen Hortikultura	Unit	185	185	185	185	245.476,0	Pusat, 15 Kab/Kota	Kementan
		5887.RBK.011	Prasarana Pengolahan Hortikultura	Unit	250	250	250	250	153.642,0	Pusat, 141 Kab/kota	Kementan
5889	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	5889.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	Unit	200	200	200	200	124.002,8	Pusat, 78 Kab/Kota	Kementan
		5889.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Unit	735	735	735	735	485.651,3	Pusat, 238 Kab/Kota	Kementan
		5889.RBK.001	Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	Unit	194	194	194	194	196.006,1	Pusat, 78 Kab/Kota	Kementan
		5889.RBK.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Unit	757	757	757	757	611.078,8	Pusat, 238 Kab/Kota	Kementan
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	5891.RAG.001	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Unit	70	49	54	60	36.875,0	Pusat, 31 Kab/Kota	Kementan
		5891.RBK.001	Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Unit	44	49	54	60	14.300,0	Pusat, 16 Provinsi	Kementan
018.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
1810	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	1810.PDI.001	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	Orang	1.000	1.100	1.209	1.333	19.485,7	Pusat, 7 Provinsi	Kementan
5892	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	5892.QDD.001	Wirausahawan Muda Pertanian	Kelompok	822	1.436	1.436	1.436	189.801,8	Pusat, 11 Provinsi	Kementan

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs:											
2.3.2* Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor											
2.4.1.(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan											
018.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas											
1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	1795.PBR.002	Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	Rekomendasi Kebijakan	55	55	55	55	127.363,6	15 provinsi	Kementan
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5036	Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi	5036.RBG.006	Bendung irigasi Serdang yang dibangun	Unit	1	1	1	1	656.411,6	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5036.RBS.001	Daerah irigasi Baliase yang dibangun	Km	87	87	87	87	715.412,2	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5036.RBS.004	Daerah irigasi Bubi yang dibangun	Km	12	12	12	12	271.173,0	Provinsi Maluku	Kemen PUPR
		5036.RBS.005	Daerah irigasi Dataran Kotamobagu yang direhabilitasi	Km	30	30	30	30	46.643,2	Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
		5036.RBS.006	Daerah irigasi DI Tinco (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	6	6	6	6	12.066,6	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5036.RBS.009	Daerah irigasi Kalukku yang dibangun	Km	5	5	5	5	273.036,9	Provinsi Sulawesi Barat	Kemen PUPR
		5036.RBS.012	Daerah irigasi Lembor (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	1	1	1	1	27.897,1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
		5036.RBS.013	Daerah irigasi Maloso yang ditingkatkan	Km	10	10	10	10	288.468,9	Provinsi Sulawesi Barat	Kemen PUPR
		5036.RBS.015	Daerah irigasi Palaka (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	16	16	16	16	12.066,6	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5036.RBS.020	Daerah irigasi rawa Belanti I dan II (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	40	40	40	40	21.388,2	Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
		5036.RBS.021	Daerah irigasi rawa Tabunganen (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	60	60	60	60	16.625,2	Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
		5036.RBS.028	Daerah irigasi Tapin (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	20	20	20	20	12.762,8	Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
		5036.RBS.030	Daerah irigasi Tommo yang ditingkatkan	Km	7	7	7	7	167.068,3	Provinsi Sulawesi Barat	Kemen PUPR
		5036.RBS.031	Daerah irigasi Toraut yang direhabilitasi	Km	38	38	38	38	31.434,3	Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024			
5036.RBS.033	Daerah irigasi Wawotobi-Ameroro yang direhabilitasi	Km	2	2	2	2	156.751,3	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
5036.RBS.034	Foodestate dikawasan eks PLG Kalimantan Tengah	Km	7.000	7.000	7.000	7.000	24.283.631,7	Provinsi Kalimantan Tengah	Kemen PUPR
5036.RBS.036	Daerah irigasi Cijung yang direhabilitasi	Km	46	46	46	46	214.586,4	Provinsi Banten	Kemen PUPR
5036.RBS.037	Daerah irigasi Cibaliung yang direhabilitasi	Km	3	3	3	3	195.591,6	Provinsi Banten	Kemen PUPR
5036.RBS.048	Daerah irigasi Cikunten yang direhabilitasi	Km	22	22	22	22	202.615,7	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5036.RBS.049	Daerah irigasi Manganti yang direhabilitasi	Km	36	36	36	36	705.910,3	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5036.RBS.050	Daerah irigasi Manganti (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	48	48	48	48	62.189,4	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5036.RBS.060	Daerah irigasi Jragung yang direhabilitasi	Km	16	16	16	16	102.541,5	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5036.RBS.063	Daerah irigasi Serayu yang ditingkatkan	Km	42	42	42	42	975.049,4	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5036.RBS.064	Daerah irigasi Slinga yang dibangun	Km	6	6	6	6	752.770,2	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5036.RBS.065	Daerah irigasi Wadaslintang (IPDMIP) yang ditingkatkan	Km	2	2	2	2	48.960,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5036.RBS.067	Daerah irigasi Banjarcahaya yang direhabilitasi	Km	5	5	5	5	2.784,6	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5036.RBS.068	Daerah irigasi SIM (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	12	12	12	12	63.475,6	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
5036.RBS.069	Daerah irigasi Waduk Bening yang direhabilitasi	Km	3	3	3	3	175.107,6	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
5036.RBS.070	Daerah irigasi Pekalen yang direhabilitasi	Km	12	12	12	12	115.915,8	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
5036.RBS.075	Daerah irigasi Jambo Aye yang dibangun	Km	4	4	4	4	126.467,3	Provinsi Aceh	Kemen PUPR
5036.RBS.076	Daerah irigasi Lhok guci yang dibangun	Km	3	3	3	3	211.018,6	Provinsi Aceh	Kemen PUPR
5036.RBS.077	Daerah irigasi Baro Raya yang direhabilitasi	Km	5	5	5	5	231.121,8	Provinsi Aceh	Kemen PUPR
5036.RBS.083	Daerah irigasi Sei Ular (SIMURP) yang direhabilitasi	Km	1	1	1	1	44.089,5	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
5036.RBS.084	Daerah irigasi Kawasan Sawah Laweh Tarusan yang dibangun	Km	5	5	5	5	415.442,7	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5036.RBS.085	Daerah irigasi Batanghari yang ditingkatkan	Km	11	11	11	11	256.711,6	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.086	Daerah irigasi Batang Asai yang dibangun	Km	37	37	37	37	1.112.496,7	Provinsi Jambi	Kemen PUPR
	5036.RBS.087	Daerah irigasi Air Manjuto yang ditingkatkan	Km	11	11	11	11	218.721,9	Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
	5036.RBS.088	Daerah irigasi Air Ketahun yang direhabilitasi	Km	8	8	8	8	48.892,0	Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
	5036.RBS.089	Daerah irigasi Air Seluma yang direhabilitasi	Km	8	8	8	8	71.632,9	Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
	5036.RBS.090	Daerah irigasi Lematang yang dibangun	Km	2	2	2	2	235.201,2	Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.092	Daerah irigasi Komerling yang dibangun	Km	55	55	55	55	140.657,7	Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.094	Daerah irigasi Sekampung Batanghari yang ditingkatkan	Km	5	5	5	5	148.263,8	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5036.RBS.095	Daerah irigasi Way Rarem yang ditingkatkan	Km	8	8	8	8	224.934,9	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5036.RBS.096	Daerah irigasi Way Seputih yang ditingkatkan	Km	55	55	55	55	174.489,7	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5036.RBS.097	Daerah irigasi Way Tulung Mas yang ditingkatkan	Km	4	4	4	4	126.036,1	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5036.RBS.098	Daerah irigasi Way Umpu yang ditingkatkan	Km	22	22	22	22	668.385,4	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5036.RBS.099	Daerah irigasi Raman Utara yang ditingkatkan	Km	5	5	5	5	160.714,2	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5036.RBS.102	Daerah irigasi Panti Rao (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	6	6	6	6	34.420,4	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.103	Daerah irigasi Batang Tongar (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	4	4	4	4	27.626,8	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.029	Daerah irigasi Tapin yang dibangun	Km	8	8	8	8	396.542,5	Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.041	Jaringan irigasi SS Macan (SIMURP) yang direhabilitasi	Km	1	1	1	1	67.294,5	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.046	Daerah irigasi DI Cikeusik (SIMURP) yang direhabilitasi	Km	1	1	1	1	136.909,5	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.047	Daerah irigasi Rentang yang dimodernisasi	Km	115	115	115	115	3.759.123,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5036.RBS.066	Daerah irigasi Kedungputri (SIMURP) yang direhabilitasi	Km	14	14	14	14	134.589,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5036.RBS.093	Daerah irigasi rawa Karang Agung hilir yang direhabilitasi	Km	97	97	97	97	83.538,0	Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
		5036.CBS.036	Daerah irigasi tambak Kersik putih yang ditingkatkan	Km	10	10	10	10	17.403,8	Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
		5036.CBS.038	Daerah irigasi tambak Marangkayu yang dibangun	Km	5	5	5	5	18.146,3	Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
		5036.CBS.039	Daerah irigasi tambak Sepunggur yang ditingkatkan	Km	23	23	23	23	33.879,3	Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
5300	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	5300.CDR.007	P3TGAI	Km	4	4	4	4	10.442.250,0	-	Kemen PUPR
5040	Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	5040.RBS.015	Food Estate Humbanghasundutan yang dikembangkan	Km	32	0	0	0	580.125,0	Provinsi Sulawesi Tengah	Kemen PUPR
INDIKATOR TPB/SDGs: 2.5.1* Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang											
018.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
4584	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Pertanian	4584.SDA.508	Sumber Daya Genetik yang Terkonservasi, Terkarakterisasi dan Terdokumentasi	Akses/ Produk	4.250 produk	4.250	4.250	4.250	5.394,2	Pusat	Kementan
4585	Penelitian dan Pengembangan Tanaman, Peternakan dan Veteriner	4585.DDA.508	Sumber Daya Genetik Peternakan yang Terkonservasi, Terkarakterisasi dan Terdokumentasi	Akses/ Produk	19 produk	19	19	19	9.965,0	3 Provinsi	Kementan
		4585.DDA.536	Sumber Daya Genetik Perkebunan yang Terkonservasi, Terkarakterisasi dan Terdokumentasi	Akses/ Produk	422 produk	5.820	5.837	5.875	7.556,5	5 Provinsi	Kementan
		4585.SDA.502	Galur Harapan Tanaman	Galur/ Produk	19 produk	7	7	7	56.963,2	3 Provinsi	Kementan
INDIKATOR TPB/SDGs: 2.5.2* Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah											
018.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
4585	Penelitian dan Pengembangan Tanaman, Peternakan dan Veteriner	4585.DDA.522	Bibit Ternak	Ekor/ Produk	100.320 produk	110.330	120.340	130.350	52.786,0	3 Provinsi	Kementan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 2.a.2* Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 2.b.1* Subsidi ekspor pertanian											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 2.c.1* Indikator anomali harga pangan											
018.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas											
1814	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	1814.BMA.001	Data dan Informasi Pasokan dan Harga Pangan	Layanan	35	35	35	35	158.607,0	Pusat, 34 Provinsi	Kementan
		1814.BDD.001	Pangan yang terdistribusi	Unit	32.150	32.150	32.150	32.150	125.000,0	22 Provinsi	Kementan
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA											
INDIKATOR TPB/SDGs:											
3.1.1 * Angka Kematian Ibu (AKI)											
3.1.2 * Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan											
3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup											
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup											
024.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
2072	Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan	2072.SDC.001	Model Penguatan sistem pencatatan kelahiran, kematian, dan penyebab kematian	Model	5	5	3	3	100.626,5	Pusat 17 Provinsi dan 17 kabupaten/kota	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
2090	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2090.QDB.004	Pembinaan RS yang melakukan operasi <i>sectio caesaria</i> darurat dalam waktu kurang atau sama dengan 30 menit	Rumah sakit	66	66	66	66	11.100,0	Pusat	Kemenkes
2087	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	2087.AAG.002	Rancangan Revisi Permenkes No. 83 Tahun 2014 tentang UTD, BDRS, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah	Rancangan	1	-	-	-	201,8	Pusat	Kemenkes
2065	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	2065.QEC.508	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak	Paket	2	2	2	2	7.000,0	Pusat	Kemenkes
		2065.QEC.516	Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin	Paket	1	1	1	1	4.891.609,8	Pusat	Kemenkes
		2065.QEC.517	Paket Penyediaan Vaksin Baru	Paket	1	1	1	1	31.125,0	Pusat	Kemenkes
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga	5832.AEA.004	Ibu hamil Terinformasi terkait kesehatan masa kehamilan, persalinan, nifas, KB dan perawatan BBL	Kegiatan	12	12	12	12	362,4	Pusat	Kemenkes
2080	Pembinaan Gizi Masyarakat	2080.QEA.001	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Orang	238.000	210.000	140.000	140.000	607.196,7	Pusat	Kemenkes
		2080.QEA.003	Anak balita yang mendapat Suplementasi Gizi Mikro	Orang	140.000	190.000	240.000	290.000	69.414,0	Pusat	Kemenkes
024.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
2076	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2076.SCJ.051	Pelatihan Tenaga Kesehatan Transfusi Darah di Unit Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit	Orang	199	100	100	100	10.300,0	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kemenkes
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
2058	Surveilans dan Karantina Kesehatan	2058.PEF.002	Sosialisasi pelaksanaan imunisasi	Orang	762	708	708	708	2.673,0	Pusat dan DKI Jakarta	Kemenkes
		2058.QMA.002	Media komunikasi, informasi, edukasi imunisasi	Layanan	13	13	13	13	388.093,2	Pusat	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
2060	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	2060.PEF.007	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA	Orang	275	300	300	325	1.130,0	Pusat	Kemenkes
		2060.QMA.007	Media Komunikasi, Informasi, edukasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA	Layanan	5	5	5	5	627,6	Pusat	Kemenkes
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
2794	Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya	2794.QDB.001	K/L Bidang sosial dan budaya yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PUG	K/L	11	11	13	13	3.744,1	Pusat	Kemen PPPA
		2794.UBA.003	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Penurunan AKI dan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Desa bidang Pendidikan	Daerah (Prov/Kab/Kot)	-	4	4	4	1.650,0	Provinsi	Kemen PPPA
		2794.UBA.001	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan kebijakan PUG bidang sosial dan budaya	Daerah (Prov/Kab/Kot)	7	9	11	13	5.417,5	Provinsi	Kemen PPPA
2812	Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan	2812.UBA.001	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHA atas Kesehatan (<i>Stunting</i>)	Daerah (Prov/Kab/Kot)	40	40	40	40	3.529,68	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
068.DJ Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana											
3320	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	3320.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan pelayanan KB pasca persalinan	Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	34	34	34	34	3.309,0	34 Provinsi	BKKBN
010.CP Program Tata Kelola Kependudukan											
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1271.UBA.002	Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	5	5	5	5	28.950,0	34 Provinsi	Kemendagri

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi											
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
2065	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	2065.QEC.514	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS	Paket	1	1	1	1	4.384.830,5	Pusat	Kemenkes
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
2060	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	2060.PEF.007	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	Orang	600	300	500	500	1.130,0	Pusat	Kemenkes
		2060.QMA.001	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	Layanan	5	5	5	5	2.464,2	Pusat	Kemenkes
		2060.QAH.005	Deteksi Dini Penyakit HIV AIDS dan IMS di Papua dan Papua Barat	Layanan	5	5	5	5	3.238,7	Papua dan Papua Barat	Kemenkes
4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	4249.QAH.014	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	Layanan	338	338	338	338	4.720,6	Pusat	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.3.2* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk											
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
2089	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	2089.PEF.002	Orang yang diberi sosialisasi dan diseminasi serta edukasi pengendalian TB di tempat kerja (Tambahan TB)	Orang	10.169	-	-	-	13.287,5	Pusat dan 34 provinsi	Kemenkes
		2089.UBA.002	Provinsi / Kab Kota yang difasilitasi dan dibina terkait pelaksanaan pencegahan TB di tempat kerja (Tambahan TB)	Prov/Kab/Kota	200	-	-	-	5.842,8	Pusat dan 34 provinsi	Kemenkes
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
2065	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	2065.QEC.511	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB	Paket	1	1	1	1	2.061.936,1	Pusat	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
2060	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	2060.QAH.007	Layanan Deteksi Dini Terduga TBC	Layanan	3	4	4	4	594.132,9	DKI Jakarta	Kemenkes
		2060.PEF.003	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB	Orang	300	400	500	600	19.511,8	Pusat	Kemenkes
		2060.QMA.003	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB	Layanan	3	5	7	9	9.508,0	Pusat	Kemenkes
		2060.QAH.008	Layanan Diteksi Dini Terduga TBC Papua dan Papua Barat	Layanan	6	8	8	8	2.683,3	Papua dan Papua Barat	Kemenkes
4249	Dukungan Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	2060.QAH.015	Layanan deteksi dini terduga TBC	Layanan	467	467	467	467	6.641,7	Pusat	Kemenkes
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
5836	Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	5836.QDB.007	Pembinaan RS Rujukan Nasional yang telah melakukan Surveilans AMR sesuai Standar	Lembaga	-	-	-	-	988,3	Pusat	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs:											
3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang											
3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria											
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
2065	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	2065.QEC.512	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria	Paket	1	1	1	1	90.092,4	Pusat	Kemenkes
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
2059	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	2059.PEF.001	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit malaria	Orang	776	776	776	776	3.886,5	Pusat dan 32 Provinsi	Kemenkes
		2059.QAH.005	Surveilans dan deteksi dini penyakit malaria Tingkat Provinsi	Lokasi	32	32	32	32	14.619,0	Pusat	Kemenkes
		2059.QAH.006	IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah)	Layanan	8	8	8	8	808,6	7 Provinsi	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2059.QAH.007	IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah) di daerah sulit katagori I (daerah sulit selain Provinsi Papua dan Papua Barat)	Layanan	8	12	7	4	1.026,6	7 Provinsi	Kemenkes
		2059.QMA.001	Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit malaria	Layanan	4	5	5	6	1.401,9	Pusat	Kemenkes
		2059.PEF.002	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit malaria di Papua dan Papua Barat	Orang	100	100	100	100	120,0	Papua dan Papua Barat	Kemenkes
		2059.QAH.022	IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah) Papua dan Papua Barat	Layanan	56	16	16	16	110,0	Papua dan Papua Barat	Kemenkes
		2059.QAH.023	IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah) di daerah sulit katagori II (Provinsi Papua dan Papua Barat)	Layanan	8	8	8	8	1.918,5	Papua dan Papua Barat	Kemenkes
4249	Dukungan Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	4249.QAH.010	Layanan Pengendalian Vektor Malaria	Layanan	166	166	166	166	844,3	Pusat	Kemenkes
		4249.QAH.020	Layanan Penemuan Aktif Surveilans migrasi malaria	Layanan	588	588	588	588	375,8	Pusat	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk											
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
2060	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	2060.PEF.006	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis	Orang	500	500	500	500	3.138,1	Pusat	Kemenkes
		2060.QAH.003	Surveilans dan Deteksi Dini Hepatitis	Layanan	22	22	22	22	3.202,7	Pusat	Kemenkes
		2060.QMA.006	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis	Paket	1	1	1	1	892,3	Pusat	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs:											
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta											
3.3.5.(a) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta											
3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi											
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
2059	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	2059.PEF.004	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit Filariasis dan Kecacingan	Orang	200	200	200	200	1.494,4	Pusat	Kemenkes
		2059.QAH.001	Surveilans dan deteksi dini penyakit Filariasis dan Kecacingan	Layanan	35	55	55	55	7.072,9	Pusat	Kemenkes
		2059.QAH.031	Pelaksanaan POPM Filariasis dan Kecacingan	Layanan	48	48	48	48	48.914,6	Pusat	Kemenkes
		2059.QMA.004	Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit Filariasis dan Kecacingan	Layanan	8	9	9	9	3.532,8	Pusat	Kemenkes
		2059.PEF.007	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit Filariasis dan Kecacingan Papua dan Papua Barat	Orang	60	60	60	60	605,8	Papua dan Papua Barat	Kemenkes
		2059.QMA.009	Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit Filariasis dan Kecacingan Papua Papua Barat	Layanan	2	-	-	-	726,8	Papua dan Papua Barat	Kemenkes
2060	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	2060.PEF.004	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta	Orang	1.300	1.300	1.300	1.300	2.394,5	Pusat	Kemenkes
		2060.QAH.001	Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Kusta	Layanan	130	207	239	271	50.931,4	Pusat dan 32 Provinsi	Kemenkes
		2060.QAH.006	Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Kusta di Papua dan Papua Barat	Layanan	49	49	49	49	21.613,5	Papua dan Papua Barat	Kemenkes
		2060.QMA.004	Media Komunikasi, Edukasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta	Layanan	3	3	3	3	901,3	Pusat	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR TPB/SDGs:										
3.4.1.(a) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun										
3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun										
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit										
2061 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	2061.PEF.001	Sosialisasi dan diseminasi pelaksanaan layanan upaya berhenti merokok	Orang	938	1.000	1.000	1.000	4.425,4	Pusat	Kemenkes
	2061.QMA.001	Media komunikasi, informasi, edukasi layanan upaya berhenti merokok	Layanan	1	1	1	1	2.793,7	Pusat	Kemenkes
	2061.PEA.006	Koordinasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok	Kegiatan	4	4	4	4	6.066,9	Pusat	Kemenkes
063.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan										
4123 Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	4123.QIA.001	Label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	Label dan Iklan	60.200	60.400	60.600	60.800	9.083,0	Pusat	Badan POM
INDIKATOR TPB/SDGs:										
3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi										
3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun										
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit										
2061 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	2061.PEF.002	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus dan gangguan metabolik	Orang	1.105	1.105	1.105	1.105	4.421,9	Pusat	Kemenkes
	2061.QMA.002	Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus dan gangguan metabolik	Layanan	1	1	1	1	3.024,8	Pusat	Kemenkes
	2061.PEF.003	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	Orang	329	329	329	329	5.110,9	Pusat	Kemenkes
	2061.QMA.003	Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	Layanan	1	1	1	1	1.516,6	Pusat	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2061.PEF.004	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit kanker dan kelainan darah	Orang	830	900	900	900	4.779,8	Pusat	Kemenkes
		2061.QMA.004	Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit kanker dan kelainan darah	Layanan	1	1	1	1	684,8	Pusat	Kemenkes
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5833	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	5833.PEH.001	Promosi Peningkatan Literasi Germas melalui berbagai media	Promosi	35	35	35	35	371.612,9	Pusat dan 34 provinsi	Kemenkes
		5833.QDD.001	Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Germas	Kelompok Masyarakat	35	35	35	35	262.776,8	Pusat dan 34 provinsi	Kemenkes
2089	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	2089.UBA.001	Provinsi / Kab Kota yang difasilitasi dan dibina terkait pelaksanaan kesehatan kerja	Kegiatan	368	368	368	368	46.076,2	Pusat dan 34 provinsi	Kemenkes
		2089.SCI.004	Tenaga kesehatan yang dilatih kesehatan olahraga	Orang	60	60	60	60	2.590,6	Pusat	Kemenkes
		2089.UBA.004	Provinsi yang difasilitasi dan dibina terkait penguatan Aktivitas Fisik Anak Sekolah (Tambahkan SKN)	Prov/Kab/Kota	34	-	-	-	6.512,5	Pusat dan 34 provinsi	Kemenkes
		2089.UBA.005	Provinsi/kab/kota yang difasilitasi dan dibina terkait pelaksanaan kesehatan olahraga	Prov/Kab/Kota	368	368	368	368	34.903,4	Pusat dan 34 provinsi	Kemenkes
090.EF Program Perdagangan Dalam Negeri											
3716	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	3716.PEH.001	Jumlah Pedagang Mikro Kecil Menengah (PMKM) yang mengikuti promosi makanan dan minuman sehat nusantara	PMKM	125	420	430	430	41.130,0	34 provinsi	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs:											
3.5.1.(a) Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis											
3.5.1.(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi											
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
5837	Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5837.PEA.004	Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi Penyalahguna Napza yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis	Kegiatan	20	20	20	20	2.912,7	Pusat	Kemenkes
066.BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)											
3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	3260.BDB.001	Lembaga rehabilitasi yang operasional	Lembaga	635	700	730	750	123.741,2	Pusat dan Daerah	BNN
		3260.BDD.001	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	Kelompok Masyarakat	207	250	250	250	47.973,0	Pusat dan Daerah	BNN
		3260.PDD.001	Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Lembaga	20	20	20	20	14.223,4	Pusat dan Daerah	BNN
		3260.QDD.001	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	Kelompok Masyarakat	45	50	55	60	6.739,7	Pusat dan Daerah	BNN
4020	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	4020.BAA.001	Program Rehabilitasi 12 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	Orang	20	20	20	20	3.229,7	Daerah	BNN
		4020.BAA.002	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	Orang	590	590	590	590	42.876,4	Daerah	BNN

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		4020.BAA.003	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	Orang	140	140	140	140	5.559,2	Daerah	BNN
		4020.BAA.004	Program Rehabilitasi 12 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	Orang	12	12	12	12	1.677,1	Daerah	BNN
		4020.BAA.005	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	Orang	138	138	138	138	10.138,2	Daerah	BNN
		4020.BAA.006	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	Orang	100	100	100	100	4.442,4	Daerah	BNN
		4020.BAA.007	Program Rehabilitasi 12 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	Orang	6	6	6	6	850,8	Daerah	BNN
		4020.BAA.008	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	Orang	126	126	126	126	9.619,7	Daerah	BNN

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		4020.BAA.009	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	Orang	168	168	168	168	6.833,3	Daerah	BNN
		4020.BAA.010	Program Rehabilitasi 12 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	Orang	10	10	10	10	1.162,3	Daerah	BNN
		4020.BAA.011	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	Orang	70	70	70	70	4.558,1	Daerah	BNN
		4020.BAA.012	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	Orang	120	120	120	120	3.970,3	Daerah	BNN
		4020.BAA.013	Program Rehabilitasi 12 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	Orang	6	6	6	6	632,2	Daerah	BNN
		4020.BAA.014	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	Orang	66	66	66	66	3.797,6	Daerah	BNN

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4020.BAA.015	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	Orang	88	88	88	88	2.535,4	Daerah	BNN
		4020.BAA.016	Program Rehabilitasi 12 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	Orang	5	5	5	5	578,2	Daerah	BNN
		4020.BAA.017	Program Rehabilitasi 6 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	Orang	40	40	40	40	2.606,3	Daerah	BNN
		4020.BAA.018	Program Rehabilitasi 3 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	Orang	105	105	105	105	3.211,9	Daerah	BNN
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs:											
3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern											
3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama											
3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR)											
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga	5832.AEA.007	Komitmen/Kesepahaman Kab/Kota dalam Kesehatan Reproduksi	Kegiatan	4	4	4	4	1.404,6	Pusat	Kemenkes
068.DJ Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana											
3316	Pembinaan Akses Pelayanan KB	3316.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang akses pelayanan KB	Daerah	34	34	34	34	895,0	34 Provinsi	BKKBN

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
3318	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Lini Lapangan Program Bangga Kencana	3318.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan SDM lini lapangan	Daerah	34	34	34	34	3.403,0	34 Provinsi	BKKBN
3320	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	3320.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan pelayanan KB pasca persalinan	Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	34	34	34	34	3.309,0	34 Provinsi	BKKBN
3327	Pembinaan Kualitas Pelayanan KB	3327.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas pelayanan KB	Daerah	34	34	34	34	2.504,0	34 Provinsi	BKKBN
3322	Peningkatan Pelayanan KB Wilayah Khusus	3322.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pelayanan KB wilayah khusus	Daerah	34	34	34	34	2.338,0	34 Provinsi	BKKBN
3331	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	3331.BDB.001	Faskes yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	Lembaga	7.546	7.546	7.546	7.546	37.029,0	34 Provinsi	BKKBN
		3331.QEI.001	Faskes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon)	Lembaga	11.774	11.774	11.774	11.774	1.130.244,0	34 Provinsi	BKKBN
010.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah IV	6139.UBA.023	Jumlah daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis hak	Provinsi, Kabupaten/ Kota	50	55	60	70	1.200,0	Pusat	Kemendagri
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.8.1 * Cakupan pelayanan kesehatan esensial 3.8.1.(a) <i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan 3.8.2 * Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)											

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
5610	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS	5610.QEA.001	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS	Penduduk (juta)	96,8	110,0	111,4	112,9	266.061.200,0	34 provinsi	Kemenkes
2051	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2051.RAB.003	FKTP yang dipenuhi SPA sesuai standar	Paket	1	-	-	-	70.000,0	Pusat	Kemenkes
		2051.QDB.001	RSUD yang diberikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan SPA Sesuai standar	Lembaga	130	130	130	130	1.593,0	Pusat	Kemenkes
		2051.QDB.002	RS DTPK yang diberikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana dan alat	Lembaga	7	7	7	7	1.062,1	Pusat	Kemenkes
		2051.QDB.003	Puskesmas DTPK yang diberikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan standar SPA	Lembaga	250	250	250	250	5.310,1	Pusat	Kemenkes
2087	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	2087.QAH.001	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) Dekonsentrasi	Layanan	192	192	192	192	148.950,8	28 Provinsi	Kemenkes
2090	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2090.QDB.005	Fasyankes yang dilakukan pengembangan jejaring pelayanan <i>telemedicine</i>	Lembaga	67	67	67	67	8.387,4	Pusat	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.b.1* Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional											
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
2065	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	2065.QEC.516	Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin	Paket	1	1	1	1	4.891.609,8	Pusat	Kemenkes
		2065.UBA.001	Instalasi Farmasi Kab/Kota yang Menerapkan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	264	264	264	264	39.594,5	Pusat	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.b.2* Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar											
063.WA Program Dukungan Manajemen											
3158	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	3158.PEE.002	Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	Kesepakatan	2	2	2	2	5.000,0	Pusat	Badan POM
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.b.3* Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan											
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
2064	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	2064.QDB.002	Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Lembaga	1.355	1.355	1.355	1.355	7.354,9	Pusat	Kemenkes
		2064.QDB.001	Rumah Sakit dengan penggunaan obat sesuai Fornas	Lembaga	255	272	289	306	14.596,6	Pusat	Kemenkes
2065	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	2065.QEC.515	Paket Penyediaan Buffer Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Paket	10	10	10	10	1.139.142,1	Pusat	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan											
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
2078	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	2078.QAA.001	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim	Orang	1.493	1.200	1.200	1.200	296.800,0	Pusat	Kemenkes
		2078.QAA.003	Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu	Orang	5.487	4.000	4.000	4.000	270.000,0	Pusat	Kemenkes
		2078.QAA.002	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Orang	270	200	200	200	14.300,0	Pusat	Kemenkes
		2078.QAA.004	Pendayagunaan Dokter Spesialis	Orang	660	660	660	660	75.200,0	Pusat	Kemenkes
		2078.QAA.005	Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Orang	40	40	40	40	6.800,0	Pusat	Kemenkes
		2078.QAA.006	Pendayagunaan Dokter pasca internsip	Orang	400	600	800	800	613.800,0	Pusat	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
024.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
2077	Pendidikan SDM Kesehatan	2077.SBA.001	Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kemenkes Yang Didayagunakan di Fasyankes Pemerintah	Orang	500	1.000	1.500	1.500	1.407,8	Pusat	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.d.1* Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan											
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
2058	Surveilans dan Karantina Kesehatan	2058.PEF.001	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit potensial KLB/Wabah	Orang	532	200	200	200	3.016,4	Pusat	Kemenkes
		2058.QAH.001	Penyelidikan epidemiologi/investigasi penyakit potensial KLB/ wabah	Layanan	390	390	390	390	31.681,2	Pusat dan DKI Jakarta	Kemenkes
		2058.QAH.007	Surveilans dan deteksi dini penyakit potensial KLB/Wabah	Layanan	297	297	297	297	24.019,6	DKI Jakarta	Kemenkes
		2058.QAH.008	Tindakan pengendalian pada KLB/wabah	Layanan	1	1	1	1	5.312,2	Pusat	Kemenkes
4249	Dukungan Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	4249.QAH.003	Layanan Kekearifan Kesehatan di POS Lintas Batas Darat Negara (PLBDN)	Layanan	679	679	679	679	580.489,0	Pusat	Kemenkes
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS											
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika											
023.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
2029	Penyediaan Informasi Asesmen dan Pembelajaran	2029.QDB.001	Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Asesmen	Lembaga	271.523	271.523	271.523	271.523	362.469,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		2029.PBH.001	Bahan Kebijakan Hasil Penilaian Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	5	3	5	5	127.605,6	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		2029.SDC.001	Soal yang dikembangkan	Model	18.000	9.000	18.000	18.000	69.626,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		2029.SDC.002	Model Penilaian Pendidikan	Model	9	3	9	9	45.380,4	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		2029.SDC.003	Perangkat Pembelajaran Yang Dikembangkan	Model	213	213	213	213	47.129,6	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
2027	Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan	2027.PDI.002	Pengembang kurikulum yang berkompeten	Orang	50	25	50	50	8.371,2	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		2027.QMA.001	Sistem Informasi kurikulum dan perbukuan	Layanan	1	1	1	1	8.814,4	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		2027.SDC.001	Model kurikulum yang dikembangkan	Model	214	190	214	214	94.464,6	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		2027.ABH.002	Kebijakan dan Standar Perbukuan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	1	1	7.846,2	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		2027.SDC.002	Buku yang dinilai dan diawasi	Model	4.010	1.500	4.010	4.010	73.779,4	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		2027.SDC.003	Buku umum dan buku pendidikan yang dikembangkan	Model	291	50	291	291	325.157,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
4461	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama	4461.QDB.335	SMP yang mendapatkan Pembinaan Asesmen Kompetensi	Lembaga	22.329	1.602	22.329	22.329	138.105,2	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4461.QDB.338	SMP Yang Menerapkan Kurikulum yang berlaku	Lembaga	514	796	514	514	105.818,5	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
4460	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar	4460.QDB.235	SD yang mendapatkan Pembinaan Asesmen Kompetensi	Lembaga	514	2.144	514	514	148.623,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4460.QDB.238	SD Yang Menerapkan Kurikulum Yang Berlaku	Lembaga	2.570	1.338	2.570	2.570	151.757,4	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
4462	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas	4462.QDB.435	SMA yang Mendapatkan Pembinaan Asesmen Kompetensi	Lembaga	650	982	650	650	44.893,2	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4462.QDB.438	SMA yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku	Lembaga	810	982	810	810	51.864,9	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
4463	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	4463.QDB.538	Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Lembaga	2.259	685	2.259	2.259	157.055,8	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4463.QDB.541	Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Yang Mendapatkan Pembinaan Asesmen Kompetensi	Lembaga	548	685	548	548	31.595,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
023.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	4262.QDB.050	SMK yang Melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)	Lembaga	200	0	200	200	91.661,5	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
025.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
4422	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	4422.SDC.001	Model Pembelajaran Madrasah yang dikembangkan	Model	1	0	2.042	2.042	170.220,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	4433.SDC.001	Model Pembelajaran Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dikembangkan	Model	1	5	1	1	65.500,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	2127.SDC.001	Model Kurikulum dan Pembelajaran PAI yang Dikembangkan	Model	1	1	1	1	35.000,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
INDIKATOR TPB/SDGs:											
4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat											
4.1.2.(a) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat											
023.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
2003	Pembinaan Sekolah Dasar	2003.QDB.203	SD yang mendapat pembinaan Program Afirmasi	Lembaga	757	274	437	437	91.074,9	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
2000	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	2000.QDB.313	SMP yang mendapat pembinaan Afirmasi	Lembaga	450	164	450	450	53.247,9	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	5627.QDB.405	SMA yang Mendapatkan Pembinaan Afirmasi	Lembaga	34	34	34	34	104.631,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
023.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
5637	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas	5637.FBA.005	Fasilitasi daerah dalam pengelolaan guru dan tenaga kependidikan Dikdas	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	34	34	34	233.837,4	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		5637.UBA.002	Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	34	34	34	30.726,2	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5638	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	5638.FBA.006	Fasilitasi daerah dalam pengelolaan guru dan tenaga kependidikan Dikmen dan Diksus	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	34	34	34	170.538,9	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		5638.UBA.003	Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	34	34	34	22.026,6	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
025.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	2129.QEK.005	Siswa MI Penerima BOS	Orang	3.958.979	3.959.206	3.973.614	3.973.614	14.279.075,4	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2129.QEK.006	Siswa MTs Penerima BOS	Orang	3.425.948	3.245.425	3.260.964	3.260.964	14.314.055,8	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2129.QEK.007	Siswa MA Penerima BOS	Orang	1.429.150	1.429.150	1.439.744	1.439.744	8.606.682,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2129.BEI.003	Bantuan Pengembangan Madrasah Inklusif	Lembaga	5	143	450	450	36.150,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2129.BEI.001	Madrasah Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana	Lembaga	35	2.250	2.391	2.391	698.110,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2129.CBI.002	Prasarana Madrasah yang ditingkatkan (SBSN)	Unit	634	216	269	269	4.345.745,5	Pusat dan Daerah	Kemenag
2128	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	2128.QEK.005	Santri Tk. Ula/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	Orang	18.693	18.693	21.102	21.102	71.631,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2128.QEK.006	Santri Tk. Wustha/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	Orang	99.202	99.202	107.109	107.109	453.884,2	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2128.QEK.007	Santri Tk. Ulya/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	Orang	69.925	71.925	69.925	69.925	422.550,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2128.BEK.001	Santri Penerima Beasiswa	Orang	1.625	1.625	3.800	3.800	31.900,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2128.BEI.001	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana	Lembaga	100	3.625	11.957	11.957	5.405.525,8	Pusat dan Daerah	Kemenag
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	2136.QEK.004	Siswa SMTK/SMAK Penerima BOS	Orang	9.533	9.421	10.100	10.500	64.263,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2136.QEK.005	Siswa SMPTK Penerima BOS	Orang	3.636	3.611	4.520	5.150	18.572,1	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2136.QEK.006	Siswa SDTK Penerima BOS	Orang	3.482	3.305	3.950	4.150	13.561,6	Pusat dan Daerah	Kemenag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	2139.QEK.008	Siswa SMAK Penerima BOS (PN)	Orang	2.162	5.146	2.162	2.162	22.301,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	2142.QEK.001	Siswa penerima BOS Tk Adi	Orang	339	480	550	600	1.549,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2142.QEK.002	Siswa penerima BOS Tk Madya	Orang	107	160	180	200	924,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2142.QEK.003	Siswa penerima BOS Tk Utama	Orang	124	615	550	600	2.995,5	Pusat dan Daerah	Kemenag
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	4012.QEI.001	Lembaga Pendidikan Keagamaan yang diberikan Bantuan	Lembaga	1.030	867	1.100	1.100	97.970,2	Pusat dan Daerah	Kemenag
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4253	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan	4253.RBI.001	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	Unit	1.611	37	0	0	5.551.136,4	Provinsi/Kab/Kota	Kementerian PUPR
		4253.RBI.002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Luar Biasa	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Provinsi/Kab/Kota	Kementerian PUPR
		4253.RBI.003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah	Unit	196	7	0	0	1.216.320,2	Provinsi/Kab/Kota	Kementerian PUPR
		4253.RBI.004	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Keagamaan	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Provinsi/Kab/Kota	Kementerian PUPR
		4253.RBI.005	Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Baru	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Provinsi/Kab/Kota	Kementerian PUPR
		4253.RBI.006	Pembangunan Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan Baru	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Provinsi/Kab/Kota
INDIKATOR TPB/SDGs:											
4.2.1* Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin											
4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin											
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
2812	Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan	2812.UBA.002	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAKP	Daerah (Prov/Kab/Kota)	58	63	63	58	3.980,4	Provinsi/Kab/Kota	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
2809	Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan	2809.UBA.001	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAPL	Daerah (Prov/Kab/Kota)	20	20	20	20	2.500,0	Provinsi/ Kab/Kota	Kemen PPPA
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga	5832.AEA.008	Komitmen/kesepahaman dalam pelayanan kesehatan balita	Kegiatan	79	79	79	79	5.784,5	Pusat	Kemenkes
023.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
6395	Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	6395.AEE.007	Kemitraan Bidang PAUD dan Parenting	Kesepakatan	12	12	12	12	2.343,2	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
4459	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	4459.QDB.143	Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif	Lembaga	5.000	5.000	5.000	5.000	111.832,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4459.QDB.142	Lembaga/Mitra PAUD Memperoleh Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Lembaga	1.626	590	1.626	1.626	121.042,1	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4459.QDB.136	Satuan PAUD Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan	Lembaga	1.112	1.112	1.112	1.112	205.676,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4459.QDB.138	Satuan PAUD yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang Berlaku	Lembaga	1.542	565	1.542	1.542	134.358,4	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4459.QDB.144	Satuan PAUD yang Mendapatkan Fasilitas Peningkatan Pencapaian Perkembangan Anak	Lembaga	1.000	370	1.000	1.000	31.359,8	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	6397.QDB.850	Satuan PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi Penjaminan Mutunya	Lembaga	214.067	120.399	214.067	214.067	731.031,4	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
023.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
4272	Pembinaan PAUD	4272.RAA.141	Satuan PAUD Memperoleh Bantuan Sarana Pembelajaran Termasuk Alat Permainan Edukatif (APE)	Paket	4.100	0	4.100	4.100	342.750,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4272.QEK.106	Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus Penerima Bantuan	Orang	6.000	6.000	6.000	6.000	62.807,4	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4272.QDB.103	Satuan PAUD Mendapatkan Pembinaan Afirmasi	Lembaga	274	237	274	274	75.499,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
025.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	2129.QEK.008	Siswa RA penerima BOP	Orang	1.334.443	1.353.594	1.334.443	1.334.443	3.232.169,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	4012.QEK.001	BOP Nava Dhammasekha	Orang	721	750	760	770	3.384,1	Pusat dan Daerah	Kemenag
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin											
023.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	4278.QDC.001	Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	Orang	50.000	30.000	50.000	50.000	740.369,5	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4278.QDC.002	Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	Orang	16.676	16.676	16.676	16.676	362.171,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4278.QDB.001	Lembaga Kursus dan Pelatihan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kerja/ berbasis dunia kerja	Lembaga	200	0	100	100	83.444,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	4262.QDB.013	Kurikulum SMK yang Dikembangkan sesuai Kebutuhan IDUKA	Model	48	50	48	48	168.895,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4262.RBI.002	Unit SMK Baru yang dibangun	Unit	1	0	0	0	18.560,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4262.QDB.007	SMK yang Direvitalisasi	Lembaga	895	0	895	895	3.904.632,8	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
023.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
5626	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	5626.QDC.509	Remaja dan Perempuan Dewasa yang Mendapatkan pelatihan Peningkatan Kualitas Hidup	Orang	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5626.QDB.508	Satuan Pendidikan Yang Mendapat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Lembaga	514	514	514	514	61.680,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
025.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
2128	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	2128.QEI.001	Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	Lembaga	5.000	5.000	275.000	275.000	11.200.000,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	4012.RAA.001	Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan	Paket	246	63	1.300	1.325	41.156,1	Pusat dan Daerah	Kemenag
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)											
023.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	4467.RBJ.003	Gedung Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	Unit	10	10	10	10	1.840.316,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
023.DK Program Pendidikan Tinggi											
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	4471.RAA.003	Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN)	Paket	18	5	5	5	990.559,6	Pusat dan daerah	Kemendikbud Ristek
025.DK Program Pendidikan Tinggi											
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	2132.BGC.001	PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui BLU	Lembaga	18	18	18	18	8.497.689,3	Pusat	Kemenag
		2132.BGC.002	PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui PNBPN	Lembaga	40	40	40	40	4.116.933,3	Pusat	Kemenag
		2132.QEI.001	Bantuan Operasional Kopertais	Lembaga	71	70	70	70	49.500,0	Pusat	Kemenag
		2132.QEI.002	Bantuan pendanaan PTN-BH	Lembaga	1	1	1	1	346.923,6	Pusat	Kemenag
		2132.QEI.003	BOPTN	Lembaga	58	58	58	58	2.919.014,9	Pusat	Kemenag
5106	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Budha	5106.QEI.001	BOPTN	Lembaga	2	2	2	2	4.007,1	Pusat	Kemenag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5101	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen	5101.BEI.001	BOPTN	Lembaga	17.628	17.629	17.629	17.629	119.875,5	Pusat	Kemenag
2131	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik	2131.QEI.003	Lembaga Pendidikan tinggi keagamaan yang menerima Bantuan operasional (PN)	Lembaga	25	22	25	25	12.900,0	Pusat	Kemenag
		2131.QEI.004	BOPTN (PN)	Lembaga	365	365	365	365	5.240,0	Pusat	Kemenag
4438	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Ma'had Ali	4438.BEI.001	Bantuan operasional Ma'had Aly	Lembaga	22	60	60	60	60.600,0	Pusat	Kemenag
5104	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu	5104.QEI.001	BOPTN	Lembaga	4	4	4	4	44.490,6	Pusat	Kemenag
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4253	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan	4253.CBJ.001	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri	Unit	91	14	-	-	2.403.819,5	Daerah	Kementerian PUPR
		4253.CBJ.002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Unit	13	-	-	-	1.076.757,4	Daerah	Kementerian PUPR
		4253.CBJ.003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Lainnya	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Daerah	Kementerian PUPR
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)											
025.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	2129.BAH.001	Platform E-learning Madrasah yang dikelola	Layanan	100	100	100	100	25.000,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2129.CAA.001	Sarana Madrasah Menunjang Pembelajaran	Paket	1.060	1.350	2.788	2.788	534.050,0	Pusat dan Daerah	Kemenag

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas										
023.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun										
4465 Layanan Pembiayaan Dasar Menengah	4465.QEK.012	Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	10.360.614	10.360.614	10.360.614	10.360.614	16.881.920,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
	4465.QEK.013	Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	4.369.968	4.369.968	4.369.968	4.369.968	5.483.715,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
	4465.QEK.014	Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	1.368.243	1.368.243	1.368.243	1.368.243	2.396.459,3	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
	4465.QEK.015	Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	1.829.167	1.829.167	1.829.167	1.829.167	3.095.743,2	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
5626 Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	5626.QEK.507	Siswa Penerima Afiriasi Pendidikan Menengah (ADEM)	Orang	2.895	2.895	2.895	2.895	417.445,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
	5626.QDB.540	Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	Lembaga	500	500	500	500	43.818,1	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
2003 Pembinaan Sekolah Dasar	2003.QDB.204	Community Learning Center (CLC) SD yang mendapatkan Pembinaan	Lembaga	111	111	111	111	62.872,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
023.WA Program Dukungan Manajemen										
4269 Layanan Pembiayaan Pendidikan	4269.BEJ.017	Beasiswa Unggulan	Orang	4.440	3.470	0	0	269.888,4	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
023.DK Program Pendidikan Tinggi										
4469 Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	4469.QEJ.016	Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah	Orang	1.108.810	670.158	670.158	670.158	35.839.345,7	Pusat dan daerah	Kemendikbud Ristek
	4469.QEJ.018	Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Orang	7.382	8.417	8.417	8.417	684.577,4	Pusat dan daerah	Kemendikbud Ristek
025.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun										
2129 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	2129.QEK.001	Siswa Madrasah MI Penerima PIP	Orang	939.607	939.607	939.607	939.607	2.018.507,0	Pusat dan Daerah	Kemenag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2129.QEK.002	Siswa Madrasah MTs Penerima PIP	Orang	745.315	745.086	745.086	745.086	2.235.509,9	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2129.QEK.003	Siswa Madrasah MA Penerima PIP	Orang	320.372	320.372	320.372	320.372	2.235.509,9	Pusat dan Daerah	Kemenag
2128	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	2128.QEK.001	SantriPPS Ula/PaketA/Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	Orang	23.487	23.487	30.930	30.930	48.975,3	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2128.QEK.002	SantriPPS Wustha/PaketB/Hanya Mengaji/ Muadalah Terima PIP	Orang	92.533	92.533	107.728	107.728	241.560,9	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2128.QEK.003	SantriPPS Ulya/PaketC/Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	Orang	45.571	45.571	54.895	54.895	200.932,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	2136.QEK.001	Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP	Orang	11.309	8.342	10.435	11.000	38.119,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2136.QEK.002	Siswa SMPTK Penerima PIP	Orang	2.769	2.760	3.870	4.644	67.995,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2136.QEK.003	Siswa SSDK Penerima PIP	Orang	2.554	2.434	2.700	2.800	4.664,2	Pusat dan Daerah	Kemenag
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	2139.QEK.009	Siswa SMAK Penerima PIP (PN)	Orang	656	2.078	656	656	5.585,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	2142.QEK.004	Siswa penerima PIP Tk Adi	Orang	246	365	400	500	654,3	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2142.QEK.005	SiswapenerimaPIPTkMadya	Orang	102	150	175	200	511,7	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2142.QEK.006	SiswapenerimaPIPTkUtama	Orang	65	296	400	500	1.447,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
025.DK Program Pendidikan Tinggi											
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	2132.QEJ.004	Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi	Orang	280	200	200	200	9.600,0	Pusat	Kemenag
		2132.QEJ.007	Mahasiswa Penerima KIP Kuliah	Orang	61.030	71.645	52.795	52.795	3.121.349,2	Pusat	Kemenag
2131	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik	2131.QEJ.004	MahasiswapenerimaKIPKuliah	Orang	370	370	350	350	15.805,0	Pusat	Kemenag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5106	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Budha	5106.QEJ.001	Mahasiswa PTKB Penerima PIP Kuliah	Orang	628	400	400	400	10.726,6	Pusat, STAB Raden Wijaya, dan STABN Sriwijaya	Kemenag
5104	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu	5104.QEJ.001	Mahasiswa Penerima KIP Kuliah	Orang	2.844	3.198	2.314	2.314	139.746,2	Pusat	Kemenag
5101	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen	5101.QEJ.001	Mahasiswa Penerima KIP Kuliah	Orang	5.238	7.288	6.310	6.310	296.462,0	Pusat	Kemenag
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun											
023.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
5626	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	5626.QDB.511	Lembaga yang Mendapat Pembinaan Budaya Baca Masyarakat	Lembaga	200	200	200	200	42.721,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		5626.QDC.510	Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan	Orang	97.177	97.177	97.177	97.177	290.442,6	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik, (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))											
023.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
2000	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	2000.RAA.337	SMP Mendapatkan Bantuan Peralatan Pendidikan	Paket	6.435	0	6.435	6.435	2.028.411,8	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
2003	Pembinaan Sekolah Dasar	2003.RAA.237	SD Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan	Paket	4.981	4.981	5.000	5.000	1.549.080,3	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	5627.RAA.406	SMA yang Mendapatkan Bantuan Peralatan Pendidikan	Paket	1.195	0	1.195	1.195	371.168,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
5626	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	5626.RAA.537	Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan	Paket	147	0	147	147	53.532,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
023.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	4262.RAA.020	SMK yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan Pada Sektor Prioritas	Paket	575	575	575	575	270.578,8	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
025.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun										
2129 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	2129.BEI.002	Bantuan Madrasah daerah 3T	Lembaga	20	40	50	50	13.500,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
	2129.BEI.004	Bantuan Peningkatan Mutu UKS/M	Lembaga	90	450	420	420	84.700,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
2128 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	2128.BEI.001	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana	Lembaga	100	0	11.957	11.957	2.531.267,9	Pusat dan Daerah	Kemenag
025.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran										
4433 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	4433.QEI.001	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas	Lembaga	35	250	250	250	46.500,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.a.1.(a) Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir										
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak										
2810 Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	2810.PEA.001	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak dari kekerasan	Kegiatan	12	6	6	6	3.280,9	Provinsi/ Kab/Kota	Kemen PPPA
	2810.UBA.001	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PKAK	Daerah (Prov/Kab/Kot)	8	8	8	8	2.801,1	Provinsi/Kab/Kota	Kemen PPPA
2812 Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan	2812.UBA.002	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAKP	Daerah (Prov/Kab/Kot)	58	63	63	58	3.980,4	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
023.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran										
6393 Kebijakan Penguatan Karakter	6393.QMB.001	Layanan Penguatan Karakter Satuan Pendidikan	Layanan	1	0	1	1	139.569,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
	6393.QMB.002	Layanan Penguatan Karakter Keluarga	Layanan	1	0	1	1	92.683,8	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
	6393.QMB.003	Layanan Penguatan Karakter Masyarakat	Layanan	1	1	1	1	141.105,6	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
4460 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar	4460.QDB.231	SD yang Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler	Lembaga	3.085	1.161	3.085	3.085	125.335,8	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
4461	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama	4461.QDB.331	SMP yang Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler	Lembaga	475	475	475	475	119.918,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
4462	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas	4462.QDB.431	SMA yang Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler	Lembaga	650	776	650	650	120.110,2	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
025.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
4422	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	4422.SCI.001	Siswa Madrasah mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Orang	2.000	2.500	3.000	3.500	30.000,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	2127.SCI.003	Siswa Sekolah Umum yang mendapat penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Orang	10	500	10	10	5.000,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	4433.QDB.001	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Lembaga	1.000	1.000	3.120	3.120	19.600,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	4437.PEF.001	Siswa Agama Buddha yang Mendapat Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	Orang	7.119	6.823	7.119	7.119	50.134,5	Pusat dan Daerah	Kemenag
025.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	2129.BEI.003	Bantuan Pengembangan Madrasah Inklusif	Lembaga	5	143	450	450	36.150,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.b.1* Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang											
023.DK Program Pendidikan Tinggi											
4259	Pengembangan Kelembagaan	4259.QEJ.001	Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)	Orang	528	396	396	396	178.626,6	Pusat	Kemendikbud Ristek
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan											
023.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
4271	Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	4271.PDG.001	Guru dan Tendik yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi	Orang	400	152	400	400	25.546,8	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
025.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	4433.PDG.002	Ustadz Guru Penerima Beasiswa Gelar S1	Orang	500	500	1.000	1.000	18.250,0	Pusat dan Daerah	Kemenag

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER										
INDIKATOR TPB/SDGs: 5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin										
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak										
6372 Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	6372.AFA.001	Rumusan NSPK Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	NSPK	1	-	-	-	1.050,0	Pusat	Kemen PPPA
	6372.AAA.001	Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender	UU	1	-	-	-	900,0	Pusat	Kemen PPPA
	6372.AAD.001	Rancangan Peraturan Presiden tentang <i>Grand Design</i> Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen	Peraturan Presiden	1	-	-	-	750,0	Pusat	Kemen PPPA
6376 Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	6376.AFA.001	Rumusan NSPK Bidang Perlindungan Hak Perempuan	NSPK	1	-	-	-	4.583,4	Pusat	Kemen PPPA
6373 Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	6373.AAC.001	Peraturan Pemerintah tentang Dispensasi Kawin	Peraturan Pemerintah	1	-	-	-	104,5	Pusat	Kemen PPPA
013.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM										
5853 Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	5853.ABD.001	Rekomendasi Analisis Peraturan Perundang-Undangan dari Perspektif HAM	Rekomendasi Kebijakan	9	12	15	18	375,5	Pusat	Kemenkum HAM
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM										
5681 Pencegahan dan Penanggulangan Segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	5681.ABD.004	Rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Kebijakan	10	10	10	10	1.000,0	Pusat	Komnas HAM/Komnas Perempuan
INDIKATOR TPB/SDGs:										
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir										
5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir										
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak										
6376 Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	6376.QMA.001	Data dan Informasi Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)	Layanan	1	-	-	1	14.389,0	Pusat	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6375	Layanan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	6375.QAA.001	Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rujukan akhir komprehensif	Orang	100	250	250	250	14.735,2	Pusat	Kemen PPPA
2797	Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan	2797.UBA.001	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PHP dari Kekerasan dalam Rumah Tangga, Ruang Publik, Situasi Darurat serta Kondisi Khusus	Daerah (Prov/Kab/Kota)	17	20	27	34	4.960,3	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
		2797.QMB.001	KIE PHP dari KdRT, ruang publik, SDKK	Layanan	5	2	2	2	4.623,0	Pusat	Kemen PPPA
2800	Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO	2800.UBA.001	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PHP dalam naker dan dari TPPO	Daerah (Prov/Kab/Kota)	17	17	21	29	4.749,7	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
		2800.BMB.001	KIE Pelaksanaan Kebijakan PHP dalam Ketenagakerjaan dan dari TPPO	Layanan	7	4	4	4	5.209,0	Pusat	Kemen PPPA
6377	Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	6377.QMA.001	Data dan Informasi SNP HAR	Layanan	1	-	-	1	40.000,0	Pusat	Kemen PPPA
2810	Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	2810.UBA.001	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PKAK	Daerah (Prov/Kab/Kota)	8	8	8	8	2.801,1	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
		2810.BMB.001	KIE Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	Layanan	3	3	4	4	1.238,0	Pusat	Kemen PPPA
2805	Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus	2805.UBA.001	Daerah yang di berikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PAKK	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3	3	3	3	2.003,6	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
		2805.BMB.001	KIE Perlindungan Anak Kondisi Khusus	Layanan	7	7	7	7	3.035,0	Pusat	Kemen PPPA
6378	Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	6378.QAA.001	AMPK yang Mendapat Layanan Komprehensif	Orang	420	450	500	550	12.228,0	Pusat	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6374	Peningkatan Partisipasi Keluarga	6374.UBA.001	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Keluarga dalam KG, PHP, dan PA	Daerah (Prov/Kab/Kota)	11	11	11	11	9.400,0	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
		6374.AAH.001	Kebijakan tentang Peningkatan Partisipasi Keluarga dalam PPPA	Peraturan	1	1	1	1	1.300,0	Pusat	Kemen PPPA
6373	Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	6373.ABN.001	Rumusan Kebijakan Bidang Pengasuhan dan Lingkungan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	2.310,0	Pusat	Kemen PPPA
025.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama											
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	2104.QDE.001	Keluarga Islam yang memperoleh bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah	Orang	120.083	355.800	355.800	355.800	398.000,0	Pusat	Kemenag
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	2137.BDE.001	Bimbingan Keluarga Kristiani	Keluarga	1.271	1.497	1.600	1.700	334.333,3	Pusat	Kemenag
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	2140.BDE.001	Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	Keluarga	350	700	350	350	22.227,3	Pusat	Kemenag
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	2143.BDE.001	Bimbingan Keluarga Sukinah	Keluarga	2.060	130	3.500	4.000	37.510,5	Pusat	Kemenag
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	2145.QDE.001	Bimbingan Keluarga Hitta Sukkhaya	Keluarga	1.881	1.881	1.881	1.881	22.038,1	Pusat	Kemenag
027.DQ Program Perlindungan Sosial											
6277	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan	6277.BAA.104	Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	5.000	6.000	7.000	8.000	7.200.000,0	DKI Jakarta, Tanjung Pinang dan Pontianak	Kemensos

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6279	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak	6279.QAA.101	Jumlah Anak yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)	Orang	30.000	35.000	50.000	60.000	77.188.773,0	Kab Aceh Besar, Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kabupaten Magelang, Kota Mataram, Kota Kupang dan Kota Makasar	Kemensos
013.BF Peningkatan Pelayanan dan Penegakkan Hukum Keimigrasian											
1584	Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa, dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi	1584.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	Rekomendasi	28	28	28	28	11.930,0	Nasional	Kemendikbud
1587	Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian	1587.AEC.001	Kerja Sama Keimigrasian	Kesepakatan	10	10	10	10	32.280,0	Nasional	Kemendikbud
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga	5832.DCI.012	Tenaga Kesehatan Terlatih Pelayanan Kesehatan bagi Korban KtP/A dan TPPO	Orang	40	40	40	40	17.500,0	Pusat dan provinsi	Kemendikbud
060.BI Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana											
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	3142.BCA.001	Penanganan Tindak Pidana Umum	Perkara	90.299	-	-	-	1.193.958,0	Pusat dan Daerah	POLRI
		3142.BCE.001	Penanganan Tindak Pidana Umum	Perkara	-	90.299	90.299	90.299	3.707.134,0	Pusat dan Daerah	POLRI
060.BP Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri											
5062	Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri	5062.RBM.005	Peningkatan Layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal	Unit	3	4	4	4	45.000,0	Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat	POLRI
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
2174	Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	2174.BAA.003	Layanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Orang	800	-	-	-	5.000,0	Pusat	Kemendikbud

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2174.BAA.001	Layanan Pelindungan CPMI	Orang	-	174.800	175.000	178.500	56.188,5	Pusat	Kemenaker
		2174.QAA.001	Layanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh atase dan staf teknis di 12 Negara Penempatan	Orang	200.000	250.000	250.000	250.000	134.070,7	Pusat	Kemenaker
104.DP Program Penempatan dan Pelindungan PMI											
3894	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Penempatan dan Pelindungan pekerja Migran Indonesia	3894.QAA.004	Pelayanan Pelindungan terhadap PMI	Orang	17.131	12.000	17.131	17.131	56.169.700,0	Daerah	BP2MI
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.025	Daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	Provinsi, Kabupaten/ Kota	20	22	26	32	12.080,9	Pusat	Kemendagri
059.GH Program Komunikasi Publik											
4494	Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik	4494.QMB.002	Diseminasi Informasi Bidang PMK	Layanan	412	382	390	400	104.703,5	Pusat	Kemenkominfo
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5681	Pencegahan dan Penanggulangan Segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	5681.ABD.004	Rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Kebijakan	10	10	10	10	1.000,0	Pusat	Komnas HAM/Komnas Perempuan
INDIKATOR TPB/SDGs: 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun											
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
2809	Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan	2809.UBA.001	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAPL	Daerah (Prov/Kab/Kota)	20	20	20	20	2.500,0	Provinsi/ Kab/Kota	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024					
068.DJ Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana											
3331	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	3331.QDD.001	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Kelompok masyarakat	29.620	31.101	32.656	34.289	261.088,0	34 Provinsi	BKKBN
025.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama											
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	2104.QDE.001	Keluarga Islam yang memperoleh bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah	Orang	120.083	355.800	355.800	355.800	398.000,0	Pusat	Kemenag
		2104.QAA.002	Layanan Nikah dan Rujuk	Orang	2.646.587	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.985.831,5	Pusat dan Daerah	Kemenag
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	2137.BDE.001	Bimbingan Keluarga Kristiani	Keluarga	1.271	1.497	1.600	1.700	334.333,3	Pusat	Kemenag
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	2140.BDE.001	Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	Keluarga	350	700	350	350	22.227,3	Pusat	Kemenag
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	2143.BDE.001	Bimbingan Keluarga Sukinah	Keluarga	2.060	130	3.500	4.000	37.510,5	Pusat	Kemenag
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	2145.QDE.001	Bimbingan Keluarga Hitta Sukkhaya	Keluarga	1.881	1.881	1.881	1.881	22.038,1	Pusat	Kemenag
059.GH Program Komunikasi Publik											
4494	Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik	4494.QMB.002	Diseminasi Informasi Bidang PMK	Layanan	412	382	390	400	104.703,5	Pusat	Kemenkominfo
INDIKATOR TPB/SDGs:											
5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah											
5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial											
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
6372	Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	6372.AAD.001	Rancangan Peraturan Presiden tentang <i>Grand Design</i> Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen	Peraturan Presiden	1	-	-	-	750,0	Pusat	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
2790	Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	2790.QDB.001	K/L Bidang Politik dan Hukum yang Diberikan Bimtek dan Supervisi Tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG	K/L	5	7	7	10	4.005,0	Pusat	Kemen PPPA
		2790.UBA.001	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi Tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG di Bidang Politik dan Hukum	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4	4	5	7	6.467,0	Provinsi	Kemen PPPA
		2790.UBA.002	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi Tentang Pelaksanaan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	8	7	7	7	10.740,0	Provinsi	Kemen PPPA
076.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi											
3364	Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.xxx.xxx (TA 2022)	Jumlah KPU yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas	Unit	-	549 Satker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Satker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Satker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	63.800,0	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	KPU
010.CR Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum											
6145	Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	6145.QDC.001	Pendidikan Politik Masyarakat di Daerah	Orang	1000	1.100	8.000	10.000	11.200,0	Daerah	Kemendagri
INDIKATOR TPB/SDGs:											
5.6.1 * Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan											
5.6.2 * Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi											
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga	5832.AEA.007	Komitmen/Kesepahaman Kab/Kota dalam Kesehatan Reproduksi	Kegiatan	4	4	4	4	1.404,6	Pusat	Kemenkes
068.DJ Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana											
3316	Pembinaan akses pelayanan KB	3316.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang akses pelayanan KB	Daerah (Provinsi/ Kab/Kota)	34	34	34	34	895,0	34 Provinsi	BKKBN

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
3320	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	3320.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam Peningkatan pelayanan KB pasca persalinan	Daerah (Provinsi/ Kab/Kota)	34	34	34	34	3.309,0	34 Provinsi	BKKBN
3322	Peningkatan pelayanan KB wilayah khusus	3322.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pelayanan KB wilayah khusus	Daerah (Provinsi/ Kab/Kota)	34	34	34	34	2.338,0	34 Provinsi	BKKBN
3327	Pembinaan kualitas pelayanan KB	3327.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas pelayanan KB	Daerah (Provinsi/ Kab/Kota)	34	34	34	34	2.504,0	34 Provinsi	BKKBN
3331	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	3331.QDD.001	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Kelompok masyarakat	29.620	31.101	32.656	34.289	261.088,0	34 Provinsi	BKKBN
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.023	Jumlah daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis hak	Provinsi, Kabupaten/ Kota	50	55	60	70	7.612,5	Pusat	Kemendagri
		6139.UBA.025	Daerah yang menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	Provinsi, Kabupaten/ Kota	18	24	30	34	14.575,0	Pusat	Kemendagri
013.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
1606	Kerja Sama HAM	1606.ABD.002	Kota/Kabupaten Peduli HAM	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	224,5	Pusat	Kemenkum HAM
INDIKATOR TPB/SDGs:											
5.a.1* (1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan											
5.a.2* Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol											
056.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanian											
4402	Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	4402.QAB.001	Penatausahaan Tanah Ulayat	Provinsi	33	33	33	33	16.366,0	Satker	Kemen ATR/BPN

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6416	Pendaftaran Tanah dan Ruang	6416.QAA.001	SHAT PTSL ASN Kategori 1	Bidang	150.000	665.469	1.008.702	955.781	1.710.891,6	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.002	SHAT PTSL ASN Kategori 2	Bidang	208.503	587.909	604.564	672.331	2.076.345,3	6 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.003	SHAT PTSL ASN Kategori 3	Bidang	500.150	2.441.202	2.569.412	2.831.480	4.277.334,8	10 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.004	SHAT PTSL ASN Kategori 4	Bidang	600.000	747.677	831.724	1.031.726	4.213.510,4	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.005	SHAT PTSL ASN Kategori 5	Bidang	6.055.772	4.726.016	4.366.125	4.038.703	33.505.520,7	7 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.009	SHAT PTSL PM Kategori 3	Bidang	119.254	0	0	0	709.239,8	7 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.010	SHAT PTSL PM Kategori 4	Bidang	720.000	0	0	0	3.578.762,9	3 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.013	SHAT Mandiri Kategori 1	Bidang	9.637	1.062	0	0	2.812,7	3 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.014	SHAT Mandiri Kategori 2	Bidang	20.125	5.895	0	0	5.099,0	6 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.015	SHAT Mandiri Kategori 3	Bidang	39.232	14.122	0	0	8.472,8	10 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.016	SHAT Mandiri Kategori 4	Bidang	16.002	3.581	0	0	2.804,6	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
6416.QAA.017	SHAT Mandiri Kategori 5	Bidang	47.755	69.807	0	0	6.478,7	7 Provinsi	Kemen ATR/BPN		
6418	Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	6418.QAA.U01	SK Redistribusi Tanah Kategori I	SK	25.891	43.415	205.000	155.000	177.007,1	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.U02	SK Redistribusi Tanah Kategori II	SK	122.289	80.044	165.500	130.240	173.035,0	6 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.U03	SK Redistribusi Tanah Kategori III	SK	209.510	227.661	432.774	377.500	375.958,0	10 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.U04	SK Redistribusi Tanah Kategori IV	SK	73.318	41.150	148.500	138.500	100.974,2	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.U05	SK Redistribusi Tanah Kategori V	SK	41.300	25.150	20.120	20.120	21.683,5	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.U06	SK Redistribusi Tanah Kategori VI	SK	9.510	6.000	0	0	8.010,2	2 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.U07	SK Redistribusi Tanah Kategori VII	SK	816	1.000	0	0	406,3	1 Provinsi	Kemen ATR/BPN
INDIKATOR TPB/SDGs: 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam											
059.GF Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)											
4501	Pengembangan Jaringan Fixed Broadband dan Mobile Broadband	4501.UBA.001	Penerapan Saluran Telekomunikasi (Ducting) Bersama	Kabupaten/ Kota	2	4	6	8	25.500,0	Tersebar	Kemenkominfo

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
4961	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi	4961.RAI.001	Palapa Ring	Kabupaten/ Kota	57	57	57	57	9.615.700,0	Tersebar	Kemenkominfo
		4961.RAI.002	BTS/Last mile	Lokasi (Kumulatif)	2.417	3.704	9.510	9.510	23.557.000,0	Tersebar	Kemenkominfo
		4961.RAI.003	Penyediaan Kapasitas Satelit	Gbps	31	37	37	37	11.715.244,0	Tersebar	Kemenkominfo
		4961.RAI.004	Akses Internet	Lokasi (Kumulatif)	15.532	37.532	77.532	117.532	8.968.840,0	Tersebar	Kemenkominfo
044.EB Program Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi											
2739	Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro	2739.BDG.002	Usaha Mikro yang difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui E-Commerce/Online	UMKM	1.000	540	540	540	5.653,3	Pusat	Kemen KUKM
2751	Kemitraan dan Perluasan Pasar UKM	2751.QDG.002	UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi	UMKM	250	152	152	152	11.728,7	Pusat	Kemen KUKM
2764	Pengembangan SDM UKM	2764.DAA.001	UKM/StartUp yang ditingkatkan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika	Orang	200	1.000	1.000	1.000	17.575,7	Pusat	Kemen KUKM
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
6474	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	6474.UBB.001	Desa Digital yang dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD)	Desa	200	250	250	250	130.000,0	Pusat	Kemendes PDPT
INDIKATOR TPB/SDGs: 5.c.1* Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan											
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
6372	Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	6372.BMA.001	Rumusan Profil Tematik Bidang Kesetaraan Gender	Layanan	1	1	1	1	2.400,0	Pusat	Kemen PPPA
055.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional											
6266	Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	6266.ABN.408	Kebijakan Percepatan Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	Pusat	1	1	1	1	9.000,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
6269	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	6269.UAB.500	Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran	Pusat	1	1	1	1	33.000,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.024	Jumlah daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	Unit	22	24	28	34	9.250,0	Pusat	Kemendagri
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan	6468.UBB.002	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Desa	74.593	74.961	74.961	74.961	43.250,0	Pusat	Kemendes PDTT
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK											
INDIKATOR TPB/SDGs: 6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman											
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4973	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak	4973.RBB.001	Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	Liter per detik	1.279	1.530	1.530	0	PM	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.RBB.002	Pembangunan SPAM Regional	Unit	-	3	-	-	PM	Kota Binjai, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Wonogiri	Kemen PUPR
		4973.RBB.003	Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota	Liter per detik	555	375	375	0	PM	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.RBB.004	Peningkatan SPAM Regional	Liter per detik	500	-	-	-	PM	Kabupaten/ Kota terlayani SPAM Regional	Kemen PUPR
				Unit	-	1	-	-	PM	Kab. Bantul	Kemen PUPR
		4973.RBB.005	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	SR	51.525	192.000	192.000	192.000	8.028.900,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
				Unit	-	41	-	-		36 Kabupaten/Kota	Kemen PUPR
		4973.RBB.006	Perluasan SPAM Regional	Unit	-	3	-	-	8.028.900,0	Kab. Rokan Hilir, Kab. Pasuruan, Kab. Buleleng	Kemen PUPR
				SR	400.200	400.000	400.000	400.000		PM	Seluruh provinsi
		4973.RBB.007	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	SR	-	210.400	400.000	400.000	8.028.900,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
SR	-			210.400	400.000	400.000	PM	Seluruh provinsi		Kemen PUPR	
4973.UBA.001	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	Kab/Kota	509	509	509	509	1.055.000,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR		

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
6470 Penyerasian Pembangunan Daerah Tertinggal	6470.RBG.001	Prasarana Air Bersih di Daerah Tertinggal yang Dibangun	Unit	1	2	3	4	55.100,0	Kab. Kupang, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Lombok Utara, Kepulauan Sula, Sigi, Tojo Una- una, Kepulauan Mentawai, Puncak, Jayawijaya, Teluk Wondama, Maybrat, Tambrau, Pegunungan Arfak Puncak Jaya, Tolikara, Yahukimo, Nduga, Yalimo, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Teluk Wondama, Maybrat, Tambrau,	Kemendes PDTT	
	6470.RBG.002	Prasarana Air Bersih di Daerah Perbatasan yang Dibangun	Unit	1	2	2	2	30.000,0	Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Kep. Aru, Kab. Malaka, Kab. Supiori, Kab. Boven Digoel, Kab. Keerom	Kemendes PDTT	
	6470.RBG.003	Prasarana Air Bersih di Pulau Kecil dan Terluar yang Dibangun	Unit	1	1	1	1	37.400,0	Kab. Nias Selatan (P. Simuk), Kab. Kep. Aru (P. Panambulai), Maluku Barat Daya (P. Lirang, P. Wetar, P. Letti, P. Marsela, P. Metimarang, P. Kisar), Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Supiori (P. Bras, P. Meosbepondi), Kab. Teluk Wondama	Kemendes PDTT	
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5834	Penyehatan Lingkungan	5834.PEF.003	Orang yang diberi Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pengawasan Sarana Air Minum	Orang	641	8.000	10.000	15.000	38.725,0	34 Provinsi	Kemendes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5834.UBA.003	Kab/kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pengawasan Sarana Air Minum (SAM)	Kab/Kota	514	514	514	514	176.209,0	34 provinsi	Kemenkes
		5834.QEG.001	Reagensia dan Peralatan Surveilans Kualitas Air Minum	Unit	5.000	13.000	13.000	13.000	123.360,0	514 Kab/kota	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs: 6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun											
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4840	Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	4840.RBB.001	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Regional	KK	1.500	-	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
				KK	-	1	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
		4840.RBB.002	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	KK	149.324	-	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
				KK	-	7.909	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
		4840.RBB.003	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	KK	4.145	-	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
				KK	-	503	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
		4840.RBB.010	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat	KK	20.300	-	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
				KK	-	10.920	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
		4840.RBB.002	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota	KK	149.324	-	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
				KK	-	7.909	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
		4840.RBB.011	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	KK	51.300	-	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
				KK	-	51.500	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
		4840.RBB.014	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Komunal	KK	0	-	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
				KK	-	11.560	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5834	Penyehatan Lingkungan	5834.PEF.001	Orang yang diberi Sosialisasi dan Diseminasi Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Orang	662	30.000	40.000	50.000	191.498,0	Pusat	Kemenkes
		5834.UBA.001	Kab/kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kab/Kota	514	514	514	514	175.875,0	34 provinsi	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 6.3.1.(a) Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman											
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6034	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	6034.QDI.001	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air	Industri	2.625	3.000	3.375	3.750	75.814,0	Seluruh Provinsi	Kemen LHK
		6034.RAG.001	Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum	Unit	10	10	21	21	124.591,0	DAS Citarum	Kemen LHK
		6034.RAG.002	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Unit	43	22	67	67	265.506,0	Seluruh Provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs:											
6.3.2.(a) Kualitas air permukaan sebagai air baku											
6.3.2.(b) Kualitas air tanah sebagai air baku											
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5040	Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	5040.RBS.001	<i>Emergency Reconstruction and Rehabilitation Assistance (for Palu)</i> (ADB) untuk Air Baku yang direhabilitasi	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	278.460,00	Provinsi Sulawesi Tengah	Kemen PUPR
		5040.RBS.002	Saluran Pembawa Air Baku Karian (KSCS) yang dibangun	Km	1,00	0,00	0,00	0,00	2.320,5	Provinsi Banten	Kemen PUPR
		5040.RBS.003	Prasarana Air baku Bendungan Gondang yang dibangun	Km	11,00	0,00	0,00	0,00	243.884,6	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5040.RBS.004	Prasarana Air baku Tapinyang dibangun	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	139.230,0	Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
		5040.RBS.005	Prasarana Air baku Bajulmati yang dibangun	Km	2,00	0,00	0,00	0,00	184.890,5	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
		5040.RBS.006	Prasarana Air baku Waduk Jatigede yang dibangun	Km	0,10	0,00	0,00	0,00	99.781,5	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5040.RBS.007	Prasarana Air baku sistem Kesugihan yang dibangun	Km	2,00	0,00	0,00	0,00	426.972,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5040.RBS.008	Prasarana Air baku KEK Kendal yang dibangun	Km	0,15	0,00	0,00	0,00	957.639,2	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5040.RBS.009	Prasarana Air baku sistem Gandus yang dibangun	Km	3,15	0,00	0,00	0,00	440.895,0	Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
		5040.RBS.010	Prasarana Air baku Kota Pekalongan yang dibangun	Km	0,04	0,00	0,00	0,00	69.615,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5040.RBS.011	Prasarana Air baku Long Storage Yeh Empas yang dibangun	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	194.178,6	Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5040.RBS.012	Prasarana Air baku Aur Duri yang dibangun	Km	1,40	0,00	0,00	0,00	116.025,0	Provinsi Jambi	Kemen PUPR
		5040.RBS.013	Prasarana Air Baku Jonggol dan Klapanunggal yang dibangun	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	392.799,9	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5040.RBS.014	Bendung Karet Tawang Sari yang direhabilitasi	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	167.076,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5040.RBS.015	Food Estate Humbanghasundutan yang dikembangkan	Km	31,50	0,00	0,00	0,00	580.125,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5040.RBS.016	Penyediaan air hortikultura Kab. Belu yang dibangun	Km	13,50	0,00	0,00	0,00	125.307,0	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
		5040.RBS.041	Penyediaan Air Baku Bendungan Pengga untuk KEK Mandalika di Kab. Lombok Tengah yang dibangun	Km	5,00	0,00	0,00	0,00	163.595,3	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6034	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	6034.UBA.001	Fasilitasi Pemantauan Effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	33	40	60	60	29.540,0	15 DAS prioritas pemulihan	Kemen LHK
6033	Pemantauan Kualitas Lingkungan	6033.RAG.001	Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	Unit	21	14	174	213	889.588,0	15 DAS Prioritas	Kemen LHK
		6033.QMA.002	Data dan Informasi Kualitas Air Manual	Layanan	591	652	591	591	45.500,0	Seluruh provinsi	Kemen LHK
5393	Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	5393.DDA.001	Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan	Produk	1	-	-	-	100,3	Pusat	Kemen LHK
		5393.PDF.001	Sertifikasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan	Lembaga	2	-	-	-	868,7	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
020.FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi											
6347	Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	6347.PBI.401	Cekungan Air Tanah yang Dipantau	CAT	6	4	13	16	30.380,2	Tersebar	Kemen ESDM
		6347.PBI.502	Rekomendasi Teknis Pengusahaan Air Tanah	Rekomendasi	250	250	300	300	4.424,7	Provinsi DKI Jakarta	Kemen ESDM
		6347.ABI.401	Pemutakhiran Data Eksplorasi Air Tanah	Laporan	1	1	1	1	10.227,1	Pusat	Kemen ESDM
		6347.ABI.503	Pemutakhiran Data Konservasi Cekungan Air Tanah Jakarta	Laporan	1	(suspended) 0	1	1	1.302,3	Pusat	Kemen ESDM
INDIKATOR TPB/SDGs: 6.4.2.(a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya											
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5040	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	5040.CBG.121	Prasarana jaringan bidang air tanah dan air baku yang dibangun	Km	500,00	500,00	500,00	600,00	13.001.111,0	PM	Kemen PUPR
		5040.CBG.122	Prasarana jaringan bidang air tanah dan air baku yang direhabilitasi	Km	40,00	45,00	50,00	40,00	1.643.256,0	PM	Kemen PUPR
		5040.CBS.001	Prasarana Air Baku di Kab. Indramayu yang dibangun	Km	2,00	0,00	0,00	0,00	13.923,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5040.CBS.002	Penyediaan Air Baku Sistem Payaman Kab. Magelang yang dibangun	Km	0,20	0,00	0,00	0,00	23.205,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5040.CBS.006	Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Siborong-Borong yang dibangun	Km	6,00	0,00	0,00	0,00	32.487,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5040.CBS.007	Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Tarutung, Kab. Tapanuli Utara yang dibangun	Km	11,00	0,00	0,00	0,00	245.973,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5040.CBS.008	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Penyediaan Air Baku di IKK Siak Kab. Siak yang dibangun	Km	0,10	0,00	0,00	0,00	69.615,0	Provinsi Riau	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5040.CBS.009	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Penyediaan Air Baku di IKK Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dibangun	Km	5,96	0,00	0,00	0,00	116.025,0	Provinsi Riau	Kemen PUPR
		5040.CBS.010	Intake dan Jaringan transmisi Air Baku Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar yang dibangun	Km	3,00	0,00	0,00	0,00	116.025,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5040.CBS.011	Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Batang Karimo Kab. Sijunjung yang direhabilitasi	Km	2,00	0,00	0,00	0,00	59.404,8	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5040.CBS.012	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Sungai Lansek Kab. Dharmasraya yang dibangun	Km	2,50	0,00	0,00	0,00	37.128,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5040.CBS.013	Intake dan Pipa Transmisi Air Baku di Kab. Sarolangun yang dibangun	Km	4,62	0,00	0,00	0,00	139.230,0	Provinsi Jambi	Kemen PUPR
INDIKATOR TPB/SDGs: 6.4.2.(b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya											
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5040	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	5040.CBG.121	Prasarana jaringan bidang air tanah dan air baku yang dibangun	Titik	450,00	450,00	550,00	550,00	2.988.404,0	PM	Kemen PUPR
		5040.CBG.122	Prasarana jaringan bidang air tanah dan air baku yang direhabilitasi	Titik	50,00	50,00	50,00	50,00	217.406,0	PM	Kemen PUPR
		5040.CBG.001	Prasarana Air Tanah untuk Air Baku di Kab. Aceh Barat dan Kab. Aceh Selatan yang dibangun	Unit	2,00	2,00	2,00	2,00	7.193,6	Provinsi Aceh	Kemen PUPR
		5040.CBG.002	Prasarana Air Tanah untuk Air Baku di Kabupaten Bireuen dan Kab. Aceh Utara yang dibangun	Unit	2,00	2,00	2,00	2,00	6.033,3	Provinsi Aceh	Kemen PUPR
		5040.CBG.003	Sumur Uji Produksi untuk Penanganan KHG di Provinsi Riau yang dibangun	Unit	30,00	30,00	30,00	30,00	13.923,0	Provinsi Riau	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5040.CBG.004	Sumur Air Tanah Untuk Air Baku Pada Daerah Kekeringan di Provinsi Sumatera Selatan yang dibangun	Unit	5,00	5,00	5,00	5,00	9.282,0	Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
		5040.CBG.005	Penyediaan Air Tanah untuk Air Baku pada Daerah Kekeringan di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Way Kanan, dan Lampung Utara yang dibangun	Unit	8,00	8,00	8,00	8,00	18.564,0	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
		5040.CBG.006	Sumur Bor Air Tanah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur dan Lampung Tengah yang direhabilitasi	Unit	26,00	1,00	1,00	1,00	9.282,0	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
		5040.CBG.007	Sumur Uji Produksi untuk Air Baku di Kec. Bandar Surabaya yang dibangun	Unit	1,00	1,00	1,00	1,00	18.564,0	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
		5040.CBG.008	Air Baku dari Air Tanah Pada Daerah Rawan Kering Di Provinsi Kalimantan Timur yang dibangun	Unit	3,00	1,00	1,00	1,00	27.846,0	Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
		5040.CBG.009	Sumur dan jaringan air tanah untuk air baku di perluasan kawasan Food Estate di luar Eks-PLG Paket 2 yang dibangun	Unit	0,00	1,00	1,00	1,00	0,0	Provinsi Kalimantan Tengah	Kemen PUPR
		5040.CBG.010	Sumur bor dan jaringan air tanah untuk air baku Kabupaten Kapuas yang dibangun	Unit	19,00	1,00	1,00	1,00	153.399,0	Provinsi Kalimantan Barat	Kemen PUPR
INDIKATOR TPB/SDGs: 6.5.1* Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5406	Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	5406.BDB.001	Layanan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Lembaga	1	1	1	1	21.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5406.QDB.001	Lembaga/Forum Peduli DAS yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lembaga	34	34	34	34	20.400,0	34 Propinsi	Kemen LHK
		5406.UAB.001	Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time	Sistem Informasi	1	1	1	1	71.400,0	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024					
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
2419	Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi	2419.ABF.006	Pola pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direviu	Rekomendasi Kebijakan	12	12	12	12	4.019.708,0	Pusat	Kemen PUPR
		2419.ABF.007	Rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direviu	Rekomendasi Kebijakan	7	7	7	7	10.712.850,0	Pusat	Kemen PUPR
		2419.ABF.001	Rekomendasi kebijakan pembinaan perencanaan jangka panjang bidang SDA yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1.600,0	Pusat	Kemen PUPR
		2419.ABF.002	Rekomendasi kebijakan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran bidang SDA yang disusun	Dokumen	14	14	14	14	81.151,9	Pusat	Kemen PUPR
		2419.ABF.003	Rekomendasi kebijakan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran bidang SDA yang disusun	Dokumen	14	14	14	14	32.216,4	Pusat	Kemen PUPR
		2419.ABF.004	Rekomendasi kebijakan pembinaan evaluasi dan pengadaan tanah bidang SDA yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	18.904,8	Pusat	Kemen PUPR
		2419.ABF.005	Rekomendasi kebijakan pembinaan kerja sama bidang SDA yang disusun	Dokumen	3	3	3	3	3.595,0	Pusat	Kemen PUPR
		2419.ABF.006	Rekomendasi kebijakan rencana, program, kerja sama, dan evaluasi program UPT Ditjen SDA yang disusun	Dokumen	57	57	57	57	150.951,2	Pusat	Kemen PUPR
4537	Layanan Teknis SDA	4537.ABF.001	Rekomendasi kebijakan pembinaan layanan teknis bidang SDA yang disusun	Rekomendasi Kebijakan	9	9	9	9	9.841.300,0	Pusat	Kemen PUPR
		4537.BMA.001	SISDA yang dikelola	Layanan	45	45	45	45	38.675.767,0	Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4537.BMA.002	Informasi hidrologi dan kualitas air yang dikelola	Layanan	36	36	36	36	83.034.020,0	Pusat	Kemen PUPR
		4537.BMA.003	EWS yang dikelola	Layanan	2	2	2	2	185.000,0	Pusat	Kemen PUPR
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
1244	Penataan Sistem Pelayanan Administrasi Desa	1244.AEC.002	Desa yang telah bekerjasama antar desa dalam pengelolaan air minum dan sanitasi	Kesepakatan	32	50	-	-	49.295,4	Pusat	Kemendagri
INDIKATOR TPB/SDGs:											
6.5.2* Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional											
6.6.1* Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5404	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	5404.RAG.001	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Unit	56.000	220.000	220.000	220.000	14.653.035,0	34 Propinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.002	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	Unit	2.500	3.000	3.000	3.000	312.000,0	34 Propinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.003	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Unit	1.250	1.250	1.250	1.250	162.000,0	34 Propinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.004	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	Unit	1.500	1.500	1.500	1.500	54.900,0	Kalimantan Timur	Kemen LHK
5407	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	5407.RBK.001	Sumber Benih Unggul yang Dibangun	Unit	100	100	100	100	4.500,0	34 Propinsi	Kemen LHK
		5407.RBK.002	Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	Unit	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	900.000,0	34 Propinsi	Kemen LHK
		5407.RBK.003	Benih Berkualitas	Unit	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	39.000,0	34 Propinsi	Kemen LHK
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5037	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	5037.RBH.001	Bendung gerak Cikarang Bekasi Laut yang dibangun	Unit	2	PM	PM	PM	100.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBH.002	Bendung gerak Kanal Banjir Barat Kota Semarang yang dibangun	Unit	0,0001	PM	PM	PM	14.900.000,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBH.003	Check dam Citarum Hulu yang dibangun	Unit	1	PM	PM	PM	20.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBH.004	Check dam Hulu Sungai Wanggu yang dibangun	Unit	6	PM	PM	PM	45.000.000,00	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	5037.RBH.005	Kolam retensi Andir dan Polder-Polder di Kab. Bandung yang dibangun	Unit	1	PM	PM	PM	138.660.103,00	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBH.006	Pengendalian sedimen Batang Kuranji yang dibangun	Unit	1	PM	PM	PM	45.606.098,00	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBH.008	Pengendalian sedimen DAS Bone Gorontalo yang dibangun	Unit	5	PM	PM	PM	59.500.000,00	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBH.009	Pengendalian sedimen DAS Milangodaa yang dibangun	Unit	1	PM	PM	PM	97.960.000,00	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBH.010	Pintu air Demangan yang dibangun	Unit	1	PM	PM	PM	63.378.900,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBH.011	Pompa Ancol Sentiong yang dibangun	Unit	1	PM	PM	PM	201.635.361,0	Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
	5037.RBH.012	FMSRB Sungai Way Batu Merah yang dibangun	Unit	4	PM	PM	PM	33.648.799,0	Provinsi Maluku	Kemen PUPR
	5037.RBH.013	Infrastructure Reconstruction Sector Loan Central Sulawesi yang dilaksanakan	Unit	0,0001	PM	PM	PM	39.493.718,0	Provinsi Sulawesi Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBH.014	Pengendalian banjir Kota Tanjung Pinang yang dibangun	Unit	1	PM	PM	PM	23.500.000,0	Provinsi Kepulauan Riau	Kemen PUPR
	5037.RBS.001	Drainase KI Batang yang dibangun	Km	1,5	PM	PM	PM	60.000.000,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.002	Drainase KI Subang yang dibangun	Km	10	PM	PM	PM	100.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.003	Oxbow DAS Citarum yang ditangani	Km	1	PM	PM	PM	20.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.006	Pengamanan Pantai Eretan yang dibangun	Km	1	0	0	0	139.230,00	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.007	Pengamanan Pantai Kalianda yang dibangun	Km	3,47	0	0	0	717.777,10	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5037.RBS.008	Pengamanan Pantai KEK Tanjung Lesung yang dibangun	Km	3,5	0	0	0	464.100,00	Provinsi Banten	Kemen PUPR
	5037.RBS.009	Pengamanan Pantai Limbangan yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	162.435,00	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.010	Pengamanan Pantai Loh Buaya di Pulau Rinca yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	120.016,30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.011	Pengamanan Pantai pulau terluar di Provinsi Riau yang dibangun	Km	3,15	0	0	0	362.445,00	Provinsi Riau	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		5037.RBS.012	Pengamanan Pantai Ruas Gerokgak - Kalisada yang dibangun	Km	1,4	0	0	0	148.950,00	Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBS.013	Pengamanan Pantai Ruas Lembeng - Purnama yang dibangun	Km	0,9	0	0	0	232.050,00	Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBS.014	Pengamanan Pantai Sekotong yang dibangun	Km	0,8	0	0	0	162.435,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.015	Pengamanan Pantai Shopialousia/Sepatang yang dibangun	Km	0,65	0	0	0	139.230,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.019	Pengendalian banjir Tukad Unda yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	147.611.961,0	Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBS.020	Pengendalian banjir Air Selagan yang dibangun	Km	1,68	PM	PM	PM	44.500.000,0	Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
		5037.RBS.021	Pengendalian banjir Avfour Buntung yang dibangun	Km	0,184	PM	PM	PM	9.000.000,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.022	FMSRB Sungai Ciujung yang dibangun	Km	8	PM	PM	PM	84.000.000,0	Provinsi Banten	Kemen PUPR
		5037.RBS.023	Pengendalian banjir avfour Watudakon yang dibangun	Km	1,5	PM	PM	PM	52.700.000,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.024	Pengendalian banjir Batang agam yang dibangun	Km	0,6	PM	PM	PM	19.000.000,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.025	Pengendalian banjir Batang Lembang yang dibangun	Km	0,4	PM	PM	PM	15.500.000,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.026	Pengendalian banjir Batang Siat yang dibangun	Km	0,3	PM	PM	PM	10.000.000,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.027	Pengendalian banjir Batang Suliti yang dibangun	Km	0,75	PM	PM	PM	25.000.000,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.028	Pengendalian banjir Batang Tambuo yang dibangun	Km	0,6	PM	PM	PM	19.000.000,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.029	Pengendalian banjir Bengawan Solo Hilir yang dibangun	Km	1,5	PM	PM	PM	145.042.293,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.030	Pengendalian banjir dan rob di Kab. Pekalongan yang dibangun	Km	1185	PM	PM	PM	81.004.185,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBS.031	Pengendalian banjir DAS Bolango Hulu yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	50.000.000,0	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
		5037.RBS.032	Pengendalian banjir DAS Konawe yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	40.000.000,0	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.033	Pengendalian banjir DAS Serang yang dibangun	Km	3,5	PM	PM	PM	134.251.000,0	Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.034	Pengendalian banjir DAS Taludaa yang dibangun	Km	0,4	PM	PM	PM	8.000.000,0	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.035	Pengendalian banjir di Tandun yang dibangun	Km	0,2	PM	PM	PM	10.000.000,0	Provinsi Riau	Kemen PUPR
	5037.RBS.036	Pengendalian banjir Kali Bekasi yang dibangun	Km	3	PM	PM	PM	332.048.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.037	Pengendalian banjir Kali Blorong yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	70.000.000,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.038	Pengendalian banjir Kali Bogel yang dibangun	Km	3,63	PM	PM	PM	48.834.988,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.039	Pengendalian banjir Kali Gunting yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	8.950.000,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.040	Pengendalian banjir Kali Jeroan yang dibangun	Km	1,5	PM	PM	PM	84.500.000,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.041	Pengendalian banjir Kali Kemuning yang dibangun	Km	3	PM	PM	PM	100.000.000,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.042	Pengendalian banjir Kali Lamong yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	100.000.000,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.043	Pengendalian banjir Kali Welang yang dibangun	Km	0,9	PM	PM	PM	34.339.662,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.044	Pengendalian banjir Kanal Banjir Timur Kota Semarang yang dibangun	Km	2,2	PM	PM	PM	59.018.187,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.045	Pengendalian banjir Kota Makassar yang direvitalisasi	Km	0,6	PM	PM	PM	15.000.000,0	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.046	Pengendalian banjir Kota Merauke yang dibangun	Km	1,7	PM	PM	PM	18.850.000,0	Provinsi Papua	Kemen PUPR
	5037.RBS.047	Pengendalian banjir Muara Sungai Bogowonto yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	332.863.000,0	Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.048	Pengendalian banjir muara Sungai Cikapundung yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	17.500.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.049	Pengendalian banjir pertemuan Sungai Batang Bangko dan Batang Suliti yang dibangun	Km	1,5	PM	PM	PM	50.000.000,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.050	Pengendalian banjir Pertemuan tiga Sungai di kab. Ponorogo yang dibangun	Km	0,8	PM	PM	PM	40.000.000,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.051	Pengendalian banjir Ring Ngotok Kanal yang dibangun	Km	1,5	PM	PM	PM	50.000.000,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.052	Pengendalian banjir rob Semarang -Demak yang dibangun	Km	5,3	PM	PM	PM	600.000.000,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.053	Pengendalian banjir segmen Griya Mukti yang dibangun	Km	0,3	PM	PM	PM	7.500.000,0	Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.054	Pengendalian banjir Sungai Aek Siguluan, Aek Silubung, Aek Sitete, Aek Tomok yang dibangun	Km	2,1	PM	PM	PM	50.000.000,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.055	Pengendalian banjir Sungai Aek Silang yang dibangun	Km	0,55	PM	PM	PM	15.000.000,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.056	Pengendalian banjir Sungai Ampal yang dibangun	Km	0,35	PM	PM	PM	40.000.000,0	Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.057	Pengendalian banjir Sungai Andegile yang dibangun	Km	0,8	PM	PM	PM	20.000.000,0	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.058	Pengendalian banjir Sungai Babakan yang dibangun	Km	0,3	PM	PM	PM	7.500.000,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.059	Pengendalian banjir Sungai Babura yang dibangun	Km	0,15	PM	PM	PM	5.000.000,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.060	Pengendalian banjir Sungai Batanghari Hilir yang dibangun	Km	0,3	PM	PM	PM	10.000.000,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.061	Pengendalian banjir Sungai Belawan yang dibangun	Km	0,2	PM	PM	PM	5.000.000,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.062	Pengendalian banjir Sungai Bogowonto dan anak Sungai lainnya yang dibangun	Km	2,5	PM	PM	PM	159.326.000,0	Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.063	Pengendalian banjir Sungai Bolango Hilir yang dibangun	Km	1,2	PM	PM	PM	45.000.000,0	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.064	Pengendalian banjir Sungai bolango yang dibangun	Km	2,5	PM	PM	PM	41.692.820,0	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.065	Pengendalian banjir Sungai Bone yang dibangun	Km	0,72	PM	PM	PM	83.000.000,0	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.066	Pengendalian banjir Sungai Brazza yang dibangun	Km	0,15	PM	PM	PM	18.450.000,0	Provinsi Papua	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024			
5037.RBS.067	Pengendalian banjir Sungai Bringin yang dibangun	Km	3,84	PM	PM	PM	114.400.000,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5037.RBS.068	Pengendalian banjir Sungai Cibeet yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	15.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.069	Pengendalian banjir Sungai Ciberang yang dibangun	Km	0,3	PM	PM	PM	50.000.000,0	Provinsi Banten	Kemen PUPR
5037.RBS.070	Pengendalian banjir Sungai Cidurian yang dibangun	Km	2	PM	PM	PM	73.500.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.071	Pengendalian banjir Sungai Cilemah Abang yang dibangun	Km	0,8	PM	PM	PM	25.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.072	Pengendalian banjir Sungai Ciliwung yang dibangun	Km	0,3	PM	PM	PM	50.000.000,0	Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
5037.RBS.073	Pengendalian banjir Sungai Cimanuk yang dibangun	Km	0,2	PM	PM	PM	15.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.074	Pengendalian banjir Sungai Cirasea yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	10.500.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.075	Pengendalian banjir Sungai Cisadane yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	50.000.000,0	Provinsi Banten	Kemen PUPR
5037.RBS.076	Pengendalian banjir Sungai Cisanggarung yang dibangun	Km	0,15	PM	PM	PM	7.000.000,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5037.RBS.077	Pengendalian banjir Sungai Cisangkuy yang dibangun	Km	0,35	PM	PM	PM	13.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.078	Pengendalian banjir Sungai Cisaranteun yang dibangun	Km	0,27	PM	PM	PM	4.400.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.079	Pengendalian banjir Sungai	Km	1,4	PM	PM	PM	10.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.080	Pengendalian banjir Sungai Citarum yang dibangun	Km	0,4	PM	PM	PM	15.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.081	Pengendalian banjir Sungai Deli yang dibangun	Km	0,15	PM	PM	PM	5.000.000,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
5037.RBS.082	Pengendalian banjir Sungai Desa Embacang Gedang yang dibangun	Km	0,25	PM	PM	PM	34.900.000,0	Provinsi Jambi	Kemen PUPR
5037.RBS.083	Pengendalian banjir Sungai Gelis yang dibangun	Km	4,25	PM	PM	PM	84.230.000,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5037.RBS.084	Pengendalian banjir Sungai Jajar yang dibangun	Km	4,08	PM	PM	PM	82.810.000,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5037.RBS.085	Pengendalian banjir Sungai Jeneponto yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	13.100.000,0	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		5037.RBS.086	Pengendalian banjir Sungai Juana yang dibangun	Km	3825	PM	PM	PM	82.687.500,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBS.087	Pengendalian banjir Sungai Kapuas yang dibangun	Km	0,3	PM	PM	PM	37.600.000,0	Provinsi Kalimantan Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.088	Pengendalian banjir Sungai Karang Mumus yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	40.000.000,0	Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.089	Pengendalian banjir Sungai Kec. Ponoosian Timur yang dibangun	Km	0,75	PM	PM	PM	30.000.000,0	Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.090	Pengendalian banjir Sungai Klafma yang dibangun	Km	0,45	PM	PM	PM	15.000.000,0	Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.093	Pengendalian banjir Sungai Krueng Singkil yang dibangun	Km	0,4	PM	PM	PM	30.100.000,0	Provinsi Aceh	Kemen PUPR
		5037.RBS.094	Pengendalian banjir Sungai Lamasi yang dibangun	Km	2,1	PM	PM	PM	30.000.000,0	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5037.RBS.095	Pengendalian banjir Sungai Lambidaro-Sekanak yang dibangun	Km	0,2	PM	PM	PM	52.000.000,0	Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
		5037.RBS.096	Pengendalian banjir Sungai Malibaka yang dibangun	Km	3	PM	PM	PM	75.000.000,0	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.097	Pengendalian banjir Sungai Masamba yang dibangun	Km	2,1	PM	PM	PM	40.000.000,0	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5037.RBS.098	Pengendalian banjir Sungai Musi yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	72.000.000,0	Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
		5037.RBS.099	Pengendalian banjir Sungai Ongkak Dumoga yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	41.500.000,0	Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.100	Pengendalian banjir Sungai Opak yang dibangun	Km	1,6	PM	PM	PM	26.000.000,0	Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
		5037.RBS.101	Pengendalian banjir Sungai Paguyaman yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	20.000.000,0	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
		5037.RBS.102	Pengendalian banjir Sungai Peliang yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	17.000.000,0	Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.103	Pengendalian banjir Sungai Percut yang dibangun	Km	0,15	PM	PM	PM	4.000.000,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.104	Pengendalian banjir Sungai Putih yang dibangun	Km	0,12	PM	PM	PM	5.000.000,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.105	Pengendalian banjir Sungai Radda yang dibangun	Km	1,5	PM	PM	PM	20.000.000,0	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5037.RBS.106	Pengendalian banjir Sungai Randangan yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	15.000.000,0	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.107	Pengendalian banjir Sungai Remu yang dibangun	Km	1398	PM	PM	PM	105.000.000,0	Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.108	Pengendalian banjir Sungai Rongkong yang dibangun	Km	1,2	PM	PM	PM	30.000.000,0	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.109	Pengendalian banjir Sungai Sadar yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	50.000.000,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.110	Pengendalian banjir Sungai Sario yang dibangun	Km	0,4	PM	PM	PM	7.000.000,0	Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.111	Pengendalian banjir Sungai Sikambing yang dibangun	Km	0,17	PM	PM	PM	6.000.000,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.112	Pengendalian banjir Sungai Sunter yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	50.000.000,0	Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.113	Pengendalian banjir Sungai Tamalate yang dibangun	Km	0,4	PM	PM	PM	17.500.000,0	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.114	Pengendalian banjir Sungai Tondano yang dibangun	Km	0,34	PM	PM	PM	19.000.000,0	Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.115	Pengendalian banjir Sungai Tubhi yang dibangun	Km	0,18	PM	PM	PM	10.000.000,0	Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.116	Pengendalian banjir Sungai Tuntang yang dibangun	Km	4,25	PM	PM	PM	103.783.315,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.117	Pengendalian banjir Sungai Waemese yang dibangun	Km	1,5	PM	PM	PM	40.000.000,0	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.118	Pengendalian banjir Sungai Wariori yang dibangun	Km	0,4	PM	PM	PM	19.950.000,0	Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.119	Pengendalian banjir SWD 1 dan 2 yang dibangun	Km	4,76	PM	PM	PM	130.232.050,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.120	Pengendalian banjir Tukad Badung yang dibangun	Km	0,04	PM	PM	PM	5.000.000,0	Provinsi Bali	Kemen PUPR
	5037.RBS.121	Pengendalian banjir upper Citarum yang dibangun	Km	10	PM	PM	PM	34.904.368,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.122	Pengendalian Sungai Maen KEK Likupang yang dibangun	Km	2	PM	PM	PM	15.000.000,0	Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.123	Pengendalian banjir anak Sungai Citarum yang dibangun	Km	0,27	PM	PM	PM	5.300.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.124	Pengendalian banjir Sungai Lawe Alas yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	30.000.000,0	Provinsi Aceh	Kemen PUPR
	5037.RBS.125	Sudetan Ciliwung KBT yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	150.000.000,0	Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5037.RBS.126	Sudetan Floodway Sedayu lawas yang ditingkatkan	Km	0,5	PM	PM	PM	59.561.500,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.127	UFC kota Bima yang dibangun	Km	0,0001	PM	PM	PM	3.500.000,0	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.128	UFC Kota Jambi yang dibangun	Km	0,0001	PM	PM	PM	3.500.000,0	Provinsi Jambi	Kemen PUPR
		5037.RBS.129	UFC Kota Padang yang dibangun	Km	0,0001	PM	PM	PM	3.500.000,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.130	UFC Kota Pekanbaru yang dibangun	Km	0,0001	PM	PM	PM	3.500.000,0	Provinsi Riau	Kemen PUPR
		5037.RBS.131	Pengendalian banjir Batang Sumpur yang dibangun	Km	0,85	PM	PM	PM	18.500.000,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR

TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

INDIKATOR TPB/SDGs:

7.1.1* Rasio elektrifikasi

7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita

020.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan

6353	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6353.QEG.002	Alat Penyimpan Daya Listrik (APDAL)	Unit	12.586	11.347	-	-	104.772,9	Papua dan Papua Barat	Kemen ESDM
6350	Pengelolaan Ketenagalistrikan	6350.PBI.008	Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat	Rekomendasi	1	1	1	1	6.182,5	Pusat	Kemen ESDM
		6350.PBI.007	Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	Rekomendasi	1	1	1	1	20.439,1	Pusat	Kemen ESDM
		6350.PBI.005	Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	Rekomendasi	1	1	1	1	23.021,2	Pusat	Kemen ESDM
		6350.PBI.006	Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	Rekomendasi	1	1	1	1	21.150,8	Pusat	Kemen ESDM

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6350.PBI.010	Rekomendasi Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Infrastruktur Pengisian Listrik (IPL) pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	IPL/ Rekomendasi Kebijakan	390 (IPL)	1 (Rekomendasi Kebijakan)	1 (Rekomendasi Kebijakan)	1 (Rekomendasi Kebijakan)	25.164,3	Pusat	Kemen ESDM
010.CM Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.FBA.003	Fasilitasi Pencapaian Target Rencana Umum Energi Daerah RUED-P	Daerah (Prov/Kab/Kota)	16	7	30	34	3.581,2	Pusat	Kemendagri
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan	6468.UBB.002	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Desa	74.953	74.961	74.961	74.961	42,3	Pusat	Kemendes PDTT
120.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan											
4830	Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	4830.ABI.003	Kebijakan Pencapaian Rasio Elektrifikasi dan Peningkatan Keandalan Pasokan Listrik	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	2.520,4	Pusat	Kemenko Marves
INDIKATOR TPB/SDGs:											
7.1.2.(a) Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga											
7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga											
020.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan											
6349	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	6349.QEG.003	Infrastruktur Jaringan gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN)	SR	120.776	40.000	-	-	6.872.182,4	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Muara Enim, Kab. Siak, Kab. Pelalawan, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Indramayu, Kota Semarang, Kota Probolinggo, Kab. Gresik, Kab. Wajo, Kab. Lumajang	Kemen ESDM
120.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan											
4830	Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	4830.ABI.001	Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	2.055,1	Pusat	Kemenko Marves

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR TPB/SDGs:										
7.2.1* Bauran energi terbarukan										
7.b.1* Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan (dalam watt per kapita)										
020.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan										
6353 Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6353.BEG.001	PLT EBT (Revitalisasi)	Unit	5	11	0	0	304.165,0	Kab. Nias Utara, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Tanggamus, Kab. Kotabaru, Kab. Kolaka Timur, Kab. Manokwari, Kab. Lanny Jaya	Kemen ESDM
	6353.BEG.002	PLTS Penunjang Tugas Teknis K/L	Unit	25	0	0	0	120,0	DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua	Kemen ESDM
	6353.QEG.001	PLTS Rooftop	MWp/Unit	35,88	2,3/79 Unit	10/300 Unit	10/300 Unit	1.165.877,8	34 Provinsi	Kemen ESDM
6352 Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6352.PBI.004	Evaluasi Eksplorasi Panas Bumi oleh Pemerintah	Rekomendasi Kebijakan	5	0	0	0	72.810,0	Kab. Sukabumi, Kab. Majalengka, Kab. Lebak, Kab. Lombok Timur, Kab. Ngada, Kab. Donggala, Kab. Tana Toraja, Kab. Halmahera Barat	Kemen ESDM
	6352.QIA.003	Monitoring TKDN Bidang Panas Bumi	Persen	35	35	33	35	4.050,0	Pusat	Kemen ESDM
	6352.QIA.002	Monitoring TKDN bidang Aneka EBT	Persen	PLTA (70) PLTS (40) PLTB (40)	PLTA (70) PLTS (40) PLTB (40)	PLTA (70) PLTS (40) PLTB (40)	PLTA (70) PLTS (40) PLTB (40)	2.583,6	Pusat	Kemen ESDM
	6352.QIA.001	Monitoring TKDN Bidang Bioenergi	Persen	40	40	40	40	2.140,0	Pusat	Kemen ESDM
	6352.PBI.001	Volume Biofuel untuk Domestik	Juta KL	9,2	9,6	10,4	14,2	15.918,5	Tersebar	Kemen ESDM
	6352.ABI.002	Penambahan Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Berbasis Bioenergi	MW	12,0	30,3	159	252,6	4.553,4	Tersebar	Kemen ESDM
	6352.ABI.001	Pengembangan Biomassa dan Biogas	Pemanfaatan Biogas (Ribu M3/Tahun)	28.342	29.314	33.770	35.390	6.317,8	Tersebar	Kemen ESDM

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6045	Kegiatan Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Agro	6045.ABI.001	Business Plan Industri IVO/ILO (Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil) sebagai bahan baku Industri Greenfuel/ B100	Industri	1	1	1	1	3.346,9	Pusat	Kemenperin
		6045.ABI.002	Studi Kelayakan (Feasibility Study) dan Detail Engineering Design (DED) yang disusun untuk pembangunan Pilot Plant Industri IVO/ILO (Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil) sebagai bahan baku Industri Greenfuel/ B100	Industri	2	2	2	2	9.204,0	Pusat	Kemenperin
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5398	Peningkatan Usaha Hutan Produksi	5398.QAC.001	Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	Badan Usaha	10	20	20	20	3.744,0	Pusat	Kemen LHK
		5398.BIH.001	Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	Badan Usaha	10	20	20	20	46.344,0	Pusat	Kemen LHK
5435	Perencanaan Kawasan Hutan	5435.BAH.001	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Layanan	100	300	300	300	4.762,0	Pusat	Kemen LHK
5423	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	5423.QAH.001	Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	Layanan	-	151	151	151	2.100,0	Pusat	Kemen LHK
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
5456	Pengelolaan Sampah	5456.FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target pengurangan Jakstrada	Daerah (Prov/Kab/Kota)	50	50	50	50	30.300,0	Pusat	Kemen LHK
5454	Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	5454.ACD.001	Layanan Perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	Institusi	400	500	500	500	59.508,5	Pusat	Kemen LHK
		5454.BDI.001	Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3	Industri	4.000	4.000	4.000	4.000	28.449,3	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
029.FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim											
5477	Mitigasi Perubahan Iklim	5447.QDB.001	Data Pemantauan Aksi Mitigasi yang Tervalidasi	Layanan	1	1	1	1	10.620,6	Pusat	Kemen LHK
5448	Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi	5448.BMA.001	Data Inventarisasi GRK dan Verifikasi serta Registri yang termutakhirkan	Layanan	1	1	1	1	15.556,5	Pusat	Kemen LHK
120.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan											
4830	Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	4830.ABI.002	Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional 2025	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	2.798,5	Pusat	Kemenko Marves
015.CE Program Kebijakan Fiskal											
4763	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	4763.PBA.002	Akselerasi Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan melalui Kebijakan Fiskal yang Efektif	Rekomendasi Kebijakan	-	1	-	-	700.000,0	Pusat	Kemenkeu
015. CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko											
6218	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	6218.FAE.628	Rekomendasi Penerapan Skema Baru Fasilitas Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP)	Laporan	3	-	-	-	462,2	Pusat	Kemenkeu
INDIKATOR TPB/SDGs: 7.3.1* Intensitas energi primer											
020.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan											
6352	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6352.PDA.001	Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi	Peralatan/ Produk	2	1	-	-	1.927,9	Pusat	Kemen ESDM
		6352.AEF.001	Bimbingan Teknis Konservasi Energi	Orang	300	300	400	400	3.244,8	Tersebar	Kemen ESDM
		6352.BIC.001	Manajemen Energi Lembaga	Lembaga	1	1	1	1	PM	Pusat	Kemen ESDM
		6352.PBI.002	Penurunan Intensitas Energi Final	SBM/Miliar Rupiah	0,9	0,9	0,8	0,8	67.162,0	Pusat	Kemen ESDM
6353	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6353.BEG.003	Penerangan Jalam Umum Tenaga Surya (PJU TS)	Unit	22.000	22.000	20.000	20.000	1.808.108,5	Tersebar	Kemen ESDM
		6353.QEG.001	PLTS Atap	MWp/Unit	35,88	2,3/79 Unit	10/300 Unit	10/300 Unit	1.165.877,8	34 Provinsi	Kemen ESDM

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
015.CE Program Kebijakan Fiskal											
4763	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	4763.PBA.001	Formulasi Kebijakan Pengembangan Industri Mobil Listrik Berdaya Saing	Rekomendasi Kebijakan	-	1	-	-	850.500,0	Pusat	Kemenkeu
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI											
INDIKATOR TPB/SDGs:											
8.1.1* Laju Pertumbuhan PDB per kapita											
8.1.1.(a) PDB per kapita											
035.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan											
2519	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri	2519.ABK.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	5.355,8	Pusat	Kemenko Perekonomian
		2519.PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	3.530,1	Pusat	Kemenko Perekonomian
		2519.PBK.002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	7.930,8	Pusat	Kemenko Perekonomian
		2519.PBK.003	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	2.994,7	Pusat	Kemenko Perekonomian
2521	Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional	2521.ABB.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	4.278,0	Pusat	Kemenko Perekonomian
		2521.PBB.001	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	2.785,1	Pusat	Kemenko Perekonomian
		2521.PBB.002	Rekomendasi Kebijakan Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	2.311,1	Pusat	Kemenko Perekonomian
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6056	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	6056.BDI.001	Pendampingan dan Fasilitasi Peningkatan Ekspor Ditjen IKFT	Rekomendasi Kebijakan	15	15	15	15	8.367,3	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6058	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	6058.BDI.001	Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Industri	35	35	35	35	41.836,3	Pusat	Kemenperin
		6058.BDI.002	Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Semen Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Industri	20	20	20	20	5.229,5	Pusat	Kemenperin
		6058.BDI.003	Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan Apparel	Industri	100	100	100	100	31.377,2	Pusat	Kemenperin
6044	Perbaikan Rantai Pasok Industri Agro	6044.BDI.001	Perbaikan Rantai Pasok di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Melalui Transformasi Industri 4.0	Industri	2	2	2	2	12.550,9	Pusat	Kemenperin
6049	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Agro	6049.BDI.001	Industri yang diberikan Fasilitas Peningkatan Ekspor	Industri	1	1	1	1	8.367,3	Pusat	Kemenperin
6051	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Agro	6051.BDI.001	Perusahaan di Sektor Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan yg dilakukan pendampingan penerapan industry 4.0	Industri	1	1	1	1	10.459,1	Pusat	Kemenperin
		6051.BDI.002	Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	Industri	1	1	1	1	10.459,1	Pusat	Kemenperin
6068	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	6068.BDI.001	Industri yang terfasilitasi melalui Export Coaching Dalam Rangka Peningkatan Ekspor	Industri	10	10	10	10	20.918,1	Pusat	Kemenperin
6070	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	6070.BDI.001	Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	Industri	10	10	10	10	10.459,1	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6070.BDI.002	Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan dan <i>Center of Excellence</i>	Industri	10	10	10	10	20.918,1	Pusat	Kemenperin
		6070.BDI.003	Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	Industri	10	10	10	10	10.459,1	Pusat	Kemenperin
6071	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	6071.BDI.011	IKM Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Industri	163	163	163	163	35.665,4	Pusat	Kemenperin
		6071.BDI.013	IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Industri	62	62	62	62	15.897,8	Pusat	Kemenperin
		6071.BDI.016	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Industri	205	205	205	205	47.111,0	Pusat	Kemenperin
		6071.BDI.018	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Industri	95	95	95	95	23.675,1	Pusat	Kemenperin
		6071.BDI.022	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Industri	160	160	160	160	61.917,7	Pusat	Kemenperin
		6071.BDI.024	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Industri	54	54	54	54	4.183,6	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6074	Pengembangan Perwilayahan Industri	6074.BDH.001	Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	Badan Usaha	5	9	9	9	22.918,1	Pusat	Kemenperin
		6074.BDH.002	Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan	Badan Usaha	8	18	18	18	10.459,1	Pusat	Kemenperin
040.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
5349	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	5349.PDI.001	Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Bali	Orang	700	700	700	700	5.577,3	Bali	Kemenparekraf
		5349.PDI.002	Sertifikasi Profesi dan SDM Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	Orang	800	800	800	800	9.204,0	Jawa Barat	Kemenparekraf
		5349.PDI.003	Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Makassar	Orang	2.850	2.850	2.850	2.850	3.984,9	Sulawesi Selatan	Kemenparekraf
		5349.PDI.004	Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Medan	Orang	500	1.200	1.200	1.200	13.055,0	Sumatera Utara	Kemenparekraf
		5349.PDI.005	Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Palembang	Orang	289	289	289	289	7.895,3	Sumatera Selatan	Kemenparekraf
		5349.PDI.006	Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Lombok	Orang	500	600	650	700	1.882,6	NTB	Kemenparekraf
		5349.PEC.001	Layanan Kerjasama Nasional dan Internasional Poltekpar Bali	Kesepakatan	8	8	8	8	3.364,9	Bali	Kemenparekraf
		5349.PEC.002	Layanan Kerjasama Nasional dan Internasional Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	Kesepakatan	20	20	20	20	2.091,8	Jawa Barat	Kemenparekraf
		5349.PEC.003	Layanan Kerjasama Nasional dan Internasional Poltekpar Makassar	Kesepakatan	20	20	20	20	2.958,7	Sulawesi Selatan	Kemenparekraf
		5349.PEC.004	Layanan Kerjasama Nasional dan Internasional Poltekpar Medan	Kesepakatan	10	10	10	10	9.025,3	Sumatera Utara	Kemenparekraf
		5349.PEC.006	Layanan Kerjasama Nasional dan Internasional Poltekpar Lombok	Kesepakatan	19	15	20	25	4.288,6	NTB	Kemenparekraf
		5349.RAA.001	Sarana Bidang Pendidikan Poltekpar Bali	Paket	1	1	1	1	161.030,7	Bali	Kemenparekraf

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5349.RAA.002	Sarana Bidang Pendidikan Sekolah Tinggi Priwisata Bandung	Paket	7	19	15	10	36.388,4	Jawa Barat	Kemenparekraf
	5349.RAA.003	Sarana Bidang Pendidikan Poltekpar Makassar	Paket	504	504	504	504	12.550,9	Sulawesi Selatan	Kemenparekraf
	5349.RAA.004	Sarana Bidang Pendidikan Poltekpar Medan	Paket	50	50	50	50	47.510,1	Sumatera Utara	Kemenparekraf
	5349.RAA.005	Sarana Bidang Pendidikan Poltekpar Palembang	Paket	1	1	1	1	117.231,1	Sumatera Selatan	Kemenparekraf
	5349.RAA.006	Sarana Bidang Pendidikan Poltekpar Lombok	Paket	6	4	3	1	30.958,8	NTB	Kemenparekraf
	5349.RJB.001	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Poltekpar Bali	Unit	1	1	1	1	20.918,1	Bali	Kemenparekraf
	5349.RJB.003	Prasarana Bidang Pendidikan Poltekpar Makassar	Unit	2	2	2	2	158.977,8	Sulawesi Selatan	Kemenparekraf
	5349.RJB.004	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Poltekpar Medan	Unit	2	2	2	2	255.702,0	Sumatera Utara	Kemenparekraf
	5349.RJB.005	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Poltekpar Palembang	Unit	2	2	2	2	209.181,4	Sumatera Selatan	Kemenparekraf
	5349.RJB.006	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Poltekpar Lombok	Unit	2	1	1	1	302.681,6	NTB	Kemenparekraf
	5349.SAD.001	Penyelenggaraan Pendidikan Poltekpar Bali	Orang	2.500	2.500	2.500	2.500	122.309,2	Bali	Kemenparekraf
	5349.SAD.002	Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Priwisata Bandung	Orang	2.350	2.500	2.550	2.550	149.939,1	Jawa Barat	Kemenparekraf
	5349.SAD.003	Penyelenggaraan Pendidikan Poltekpar Makassar	Orang	2.027	2.050	2.100	2.150	113.306,8	Sulawesi Selatan	Kemenparekraf
	5349.SAD.004	Penyelenggaraan Pendidikan Poltekpar Medan	Orang	1.400	1.400	1.400	1.400	86.605,3	Sumatera Utara	Kemenparekraf
	5349.SAD.005	Penyelenggaraan Pendidikan Poltekpar Palembang	Orang	1.200	0	0	0	89,1	Sumatera Selatan	Kemenparekraf
	5349.SAD.006	Penyelenggaraan Pendidikan Poltekpar Lombok	Orang	1.400	1.520	1.640	1.760	56.829,6	NTB	Kemenparekraf
	5349.SDC.001	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Poltekpar Bali	Orang	1.100	100	100	100	19.643,8	Bali	Kemenparekraf

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5349.SDC.002	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	Orang	550	5.000	5.000	5.000	14.642,7	Jawa Barat	Kemendikbud
		5349.SDC.003	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Poltekpar Makassar	Orang	310	310	310	310	3.439,4	Sulawesi Selatan	Kemendikbud
		5349.SDC.004	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Poltekpar Medan	Orang	600	48	51	54	3.437,7	Sumatera Utara	Kemendikbud
		5349.SDC.005	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Poltekpar Palembang	Orang	400	400	400	400	3.702,1	Sumatera Selatan	Kemendikbud
		5349.SDC.006	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Poltekpar Lombok	Orang	300	400	500	600	6.275,4	NTB	Kemendikbud
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun											
044.EB Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi											
4442	Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian	4442.QDF.001	Koperasi yang difasilitasi sistem digitalisasi	Koperasi	225	325	425	525	35.000,0	Pusat	Kemen KUKM
		4442.QDF.002	Koperasi yang difasilitasi melakukan kemitraan	Koperasi	150	250	350	450	20.000,0	Pusat	Kemen KUKM
		4442.QDF.003	Koperasi yang dikembangkan Jaringan Usahanya	Koperasi	230	300	400	500	49.230,0	Pusat	Kemen KUKM
5615	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	5615.QDD.001	Kelompok Masyarakat untuk Membentuk Koperasi	Kelompok Masyarakat	100	200	300	400	21.010,0	Pusat	Kemen KUKM
		5615.SCF.001	Pengurus atau Pengelola Koperasi yang diberikan Pelatihan	Orang	2.300	3.000	4.000	5.000	150.620,0	Pusat	Kemen KUKM
		5615.SCF.002	Pelatihan bagi Pelaku Koperasi di Daerah	Orang	1.250	2.500	3.500	4.500	31.760,0	Pusat	Kemen KUKM
2739	Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro	2739.QDG.001	Usaha Mikro yang dikembangkan melalui Pendekatan klaster/Komoditas	Umi	362	450	550	650	69.460,0	Pusat	Kemen KUKM
4445	Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro	4445.QDG.001	Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan	Umi	3.250	4.000	6.000	8.000	158.840,0	Pusat	Kemen KUKM

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
4450	Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM	4450.QDG.001	UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok	UKM	150	200	250	300	24.010,0	Pusat	Kemen KUKM
		4450.QDG.002	UKM/Sentra Yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk	UKM	300	350	400	450	81.640,0	Pusat	Kemen KUKM
		4450.QDJ.001	Start-Up yang diperluas rantai pasok	Start-Up	100	250	350	450	50.180,0	Pusat	Kemen KUKM
2751	Kemitraan dan Perluasan Pasar UKM	2751.QDG.001	Kemitraan Usaha yang diperluas dan dibentuk	UKM	180	300	400	500	6.190,0	Pusat	Kemen KUKM
		2751.QDJ.001	Kemitraan Usaha Start-Up yang diperluas dan dibentuk	Start-Up	50	150	250	350	4.810,0	Pusat	Kemen KUKM
2764	Pengembangan SDM UKM	2764.DCF.001	UKM/Start-Up yang dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis	Orang	2.100	3.500	4.500	6.000	95.130,0	Pusat	Kemen KUKM
		2764.DBE.001	UKM yang ditingkatkan Kapasitasnya melalui Sertifikasi	Orang	400	800	1.200	1.600	13.000,0	Pusat	Kemen KUKM
2757	Konsultasi Bisnis dan Pendampingan	2757.QDC.001	Jumlah Wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis	Orang	7.000	8.000	9.000	10.000	68.790,0	Pusat	Kemen KUKM
		2757.QDC.002	Jumlah Peserta yang didampingi Usahanya	Orang	5.000	6.000	7.000	8.000	183.200,0	Pusat	Kemen KUKM
019.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
4957	Pelatihan Vokasi Industri	4957.ADI.001	Tenaga Kerja Industri Kompeten yang Tersertifikasi	Orang	10.000	10.000	10.000	10.000	36.147,7	Pusat	Kemenperin
		4957.DCH.001	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)	Orang	86.500	86.500	86.500	86.500	2.559.106,6	Pusat	Kemenperin
4958	Pendidikan Tinggi Vokasi Industri	4958.DAG.001	Mahasiswa dan Lulusan Program DIII dan DIV Berbasis Kompetensi	Orang	11.405	11.405	11.405	11.405	476.169,1	Pusat	Kemenperin
		4958.DAG.002	Mahasiswa dan Lulusan Program DI dan DII Berbasis Kompetensi	Orang	1.800	1.800	1.800	1.800	92.856,2	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
4959	Pendidikan Menengah Kejuruan Industri	4959.DAG.001	SDM yang Mengikuti Pendidikan Menengah Kejuruan Industri	Orang	6.763	6.763	6.763	6.763	205.345,1	Pusat	Kemenperin
032.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
2376	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	2376.SAC.001	Peserta pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	Orang	8.308	10.633	12.286	13.115	1.155.800,0	19 UPT	KKP
2375	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2375.SCC.001	Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih	Orang	29.000	27.000	28.000	30.000	289.000,0	34 Provinsi	KKP
026.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
4060	Pengembangan Standar Kompetensi dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas	4060.SCH.001	PBK UPTP	Orang	20.585	-	-	-	208.029,5	Pusat	Kemenaker
		4060.SCH.002	Pelatihan Kerjasama Pihak Ketiga (PFLK)	Orang	655	-	-	-	3.318,8	Pusat	Kemenaker
		4060.SCH.003	PBK di BLK Komunitas	Orang	43.552	-	-	-	142.197,6	Pusat	Kemenaker
		4060.SCH.004	PBK Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Orang	129	-	-	-	1.401,6	Pusat	Kemenaker
		4060.SCH.006	PBK Kerjasama Dengan Dunia Industri	Orang	1.649	-	-	-	10.067,8	Pusat	Kemenaker
		4060.SCH.008	PBK Provinsi Jawa Barat	Orang	5.776	-	-	-	32.085,1	Provinsi Jawa Barat	Kemenaker
		4060.SCH.009	PBK Provinsi Jawa Tengah	Orang	7.568	-	-	-	38.927,6	Provinsi Jawa Tengah	Kemenaker
		4060.SCH.010	PBK Provinsi D.I Yogyakarta	Orang	1.824	-	-	-	9.946,5	Provinsi DI Yogyakarta	Kemenaker
		4060.SCH.011	PBK Provinsi Jawa Timur	Orang	8.400	-	-	-	45.040,5	Provinsi Jawa Timur	Kemenaker
		4060.SCH.012	PBK Provinsi Aceh	Orang	1.520	-	-	-	8.079,1	Provinsi Aceh	Kemenaker
		4060.SCH.013	PBK Provinsi Sumatera Utara	Orang	2.480	-	-	-	8.237,8	Provinsi Sumatera Utara	Kemenaker
		4060.SCH.014	PBK Provinsi Sumatera Barat	Orang	2.480	-	-	-	11.939,7	Provinsi Sumatera Barat	Kemenaker
		4060.SCH.015	PBK Provinsi Riau	Orang	752	-	-	-	4.154,2	Provinsi Riau	Kemenaker
		4060.SCH.016	PBK Provinsi Jambi	Orang	1.072	-	-	-	5.791,8	Provinsi Jambi	Kemenaker
		4060.SCH.017	PBK Provinsi Sumatera Selatan	Orang	1.536	-	-	-	6.708,6	Provinsi Sumatera Selatan	Kemenaker

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4060.SCH.018	PBK Provinsi Lampung	Orang	672	-	-	-	2.979,0	Provinsi Lampung	Kemenaker
		4060.SCH.019	PBK Provinsi Kalimantan Barat	Orang	800	-	-	-	3.610,1	Provinsi Kalimantan Barat	Kemenaker
		4060.SCH.020	PBK Provinsi Kalimantan Tengah	Orang	944	-	-	-	5.925,0	Provinsi Kalimantan Tengah	Kemenaker
		4060.SCH.021	PBK Provinsi Kalimantan Selatan	Orang	1.920	-	-	-	13.011,8	Provinsi Kalimantan Selatan	Kemenaker
		4060.SCH.022	PBK Provinsi Kalimantan Timur	Orang	688	-	-	-	4.642,9	Provinsi Kalimantan Timur	Kemenaker
		4060.SCH.023	PBK Provinsi Sulawesi Utara	Orang	640	-	-	-	4.681,1	Provinsi Sulawesi Utara	Kemenaker
		4060.SCH.024	PBK Provinsi Sulawesi Tengah	Orang	848	-	-	-	5.600,7	Provinsi Sulawesi Tengah	Kemenaker
		4060.SCH.025	PBK Provinsi Sulawesi Selatan	Orang	2.320	-	-	-	14.098,3	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemenaker
		4060.SCH.026	PBK Provinsi Sulawesi Tenggara	Orang	736	-	-	-	3.946,1	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemenaker
		4060.SCH.027	PBK Provinsi Maluku	Orang	288	-	-	-	1.734,9	Provinsi Maluku	Kemenaker
		4060.SCH.028	PBK Provinsi Bali	Orang	1.520	-	-	-	8.394,8	Pusat	Kemenaker
		4060.SCH.029	PBK Provinsi Nusa Tenggara Barat	Orang	1.904	-	-	-	11.149,9	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemenaker
		4060.SCH.030	PBK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Orang	726	-	-	-	4.198,8	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemenaker
		4060.SCH.031	PBK Provinsi Papua	Orang	1.232	-	-	-	7.440,9	Provinsi Papua	Kemenaker
		4060.SCH.032	PBK Provinsi Bengkulu	Orang	1.744	-	-	-	10.183,6	Provinsi Bengkulu	Kemenaker
		4060.SCH.033	PBK Provinsi Banten	Orang	352	-	-	-	1.644,9	Provinsi Banten	Kemenaker
		4060.SCH.034	PBK Provinsi Bangka Belitung	Orang	432	-	-	-	2.328,8	Kota Pangkal Pinang	Kemenaker
		4060.SCH.035	PBK Provinsi Gorontalo	Orang	608	-	-	-	3.539,9	Kota Gorontalo	Kemenaker
		4060.SCH.036	PBK Provinsi Kepulauan Riau	Orang	256	-	-	-	1.660,7	Provinsi Kepulauan Riau	Kemenaker
		4060.SCH.037	PBK Provinsi Sulawesi Barat	Orang	224	-	-	-	1.612,2	Provinsi Sulawesi Barat	Kemenaker
		4060.SCH.038	PBK Provinsi Kalimantan Utara	Orang	576	-	-	-	3.954,3	Provinsi Kalimantan Utara	Kemenaker
		4060.SCH.039	PBK Provinsi Maluku Utara	Orang	80	-	-	-	604,9	Provinsi Maluku Utara	Kemenaker
		4060.SCH.040	PBK Provinsi Papua Barat	Orang	240	-	-	-	1.536,2	Provinsi Papua Barat	Kemenaker

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
4057	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	4057.SCH.003	PBK UPTP	Orang	-	26.192	26.192	26.192	298.342,0	Pusat	Kemenaker
		4057.SCH.004	PBK di BLK Komunitas	Orang	-	98.064	98.064	98.064	992.898,0	Pusat	Kemenaker
		4057.SCH.005	PBK Kerjasama Dengan Dunia Industri	Orang	-	4.800	4.800	4.800	78.663,4	Pusat	Kemenaker
		4057.SCH.006	PBK Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Orang	-	3.008	3.008	3.008	54.730,6	Pusat	Kemenaker
		4057.SCH.008	PBK Provinsi Jawa Barat	Orang	-	6.880	6.880	6.880	140.736,9	Provinsi Jawa Barat	Kemenaker
		4057.SCH.009	PBK Provinsi Jawa Tengah	Orang	-	8.352	8.352	8.352	209.949,9	Provinsi Jawa Tengah	Kemenaker
		4057.SCH.010	PBK Provinsi D.I Yogyakarta	Orang	-	2.032	2.032	2.032	32.558,7	Provinsi DI Yogyakarta	Kemenaker
		4057.SCH.011	PBK Provinsi Jawa Timur	Orang	-	9.792	9.792	9.792	157.604,9	Provinsi Jawa Timur	Kemenaker
		4057.SCH.012	PBK Provinsi Aceh	Orang	-	1.520	1.520	1.520	28.061,3	Provinsi Aceh	Kemenaker
		4057.SCH.013	PBK Provinsi Sumatera Utara	Orang	-	1.600	1.600	1.600	30.649,8	Provinsi Sumatera Utara	Kemenaker
		4057.SCH.014	PBK Provinsi Sumatera Barat	Orang	-	2.432	2.432	2.432	41.758,7	Provinsi Sumatera Barat	Kemenaker
		4057.SCH.015	PBK Provinsi Riau	Orang	-	816	816	816	14.307,4	Provinsi Riau	Kemenaker
		4057.SCH.016	PBK Provinsi Jambi	Orang	-	1.072	1.072	1.072	20.581,2	Provinsi Jambi	Kemenaker
		4057.SCH.017	PBK Provinsi Sumatera Selatan	Orang	-	1.712	1.712	1.712	23.302,6	Provinsi Sumatera Selatan	Kemenaker
		4057.SCH.018	PBK Provinsi Lampung	Orang	-	672	672	672	9.177,2	Provinsi Lampung	Kemenaker
		4057.SCH.019	PBK Provinsi Kalimantan Barat	Orang	-	800	800	800	11.304,7	Provinsi Kalimantan Barat	Kemenaker
		4057.SCH.020	PBK Provinsi Kalimantan Tengah	Orang	-	816	816	816	16.347,4	Provinsi Kalimantan Tengah	Kemenaker
		4057.SCH.021	PBK Provinsi Kalimantan Selatan	Orang	-	2.048	2.080	2.080	45.493,6	Provinsi Kalimantan Selatan	Kemenaker
		4057.SCH.022	PBK Provinsi Kalimantan Timur	Orang	-	608	608	608	12.595,7	Provinsi Kalimantan Timur	Kemenaker
		4057.SCH.023	PBK Provinsi Sulawesi Utara	Orang	-	1.024	1.024	1.024	37.935,5	Provinsi Sulawesi Utara	Kemenaker

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4057.SCH.024	PBK Provinsi Sulawesi Tengah	Orang	-	640	640	640	14.210,1	Provinsi Sulawesi Tengah	Kemenaker
		4057.SCH.025	PBK Provinsi Sulawesi Selatan	Orang	-	2.048	2.048	2.048	38.516,8	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemenaker
		4057.SCH.026	PBK Provinsi Sulawesi Tenggara	Orang	-	816	816	816	13.697,8	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemenaker
		4057.SCH.027	PBK Provinsi Maluku	Orang	-	240	240	240	4.407,8	Provinsi Maluku	Kemenaker
		4057.SCH.028	PBK Provinsi Bali	Orang	-	1.376	1.376	1.376	23.372,1	Pusat	Kemenaker
		4057.SCH.029	PBK Provinsi Nusa Tenggara Barat	Orang	-	1.760	1.760	1.760	31.374,9	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemenaker
		4057.SCH.030	PBK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Orang	-	768	768	768	12.804,5	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemenaker
		4057.SCH.031	PBK Provinsi Papua	Orang	-	1.232	1.232	1.232	22.814,6	Provinsi Papua	Kemenaker
		4057.SCH.032	PBK Provinsi Bengkulu	Orang	-	1.760	1.760	1.760	32.157,0	Provinsi Bengkulu	Kemenaker
		4057.SCH.033	PBK Provinsi Banten	Orang	-	352	352	352	5.049,9	Provinsi Banten	Kemenaker
		4057.SCH.034	PBK Provinsi Bangka Belitung	Orang	-	336	336	336	8.751,2	Kota Pangkal Pinang	Kemenaker
		4057.SCH.035	PBK Provinsi Gorontalo	Orang	-	480	480	480	8.700,9	Kota Gorontalo	Kemenaker
		4057.SCH.036	PBK Provinsi Kepulauan Riau	Orang	-	240	240	240	4.208,1	Provinsi Kepulauan Riau	Kemenaker
		4057.SCH.037	PBK Provinsi Sulawesi Barat	Orang	-	224	224	224	3.560,0	Provinsi Sulawesi Barat	Kemenaker
		4057.SCH.038	PBK Provinsi Kalimantan Utara	Orang	-	528	528	528	11.095,1	Provinsi Kalimantan Utara	Kemenaker
		4057.SCH.039	PBK Provinsi Maluku Utara	Orang	-	80	80	80	1.651,7	Provinsi Maluku Utara	Kemenaker
		4057.SCH.040	PBK Provinsi Papua Barat	Orang	-	240	240	240	4.793,9	Provinsi Papua Barat	Kemenaker
		4057.SCH.041	Pelatihan Kerjasama Pihak Ketiga (PFLK)	Orang	-	665	665	665	8.597,6	Pusat	Kemenaker
4059	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalavotas	4059.SCH.002	Pelatihan peningkatan produktivitas	Orang	8.275	12.970	12.970	12.970	145.727,0	34 Provinsi	Kemenaker
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur 8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran											

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
2172	Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja	2172.BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Orang	61	500	550	600	30.431	Pusat	Kemenaker
2175	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	2175.BEI.010	Lembaga yang mendapat bantuan kegiatan Padat karya	Lembaga	1.125	1.250	1.250	1.250	488.850,8	Pusat	Kemenaker
		2175.BDC.004	Tenaga Kerja yang mengikuti kegiatan padat Karya	Orang	45.000	-	-	-	13.902,9	Pusat	Kemenaker
		2175.BDC.003	Tenaga Kerja yang mendapat Pembinaan Untuk Menjadi Tenaga Kerja mandiri	Orang	101.800	-	-	-	42.178,2	Pusat	Kemenaker
		2175.BDC.020	Tenaga Kerja yang mengikuti kegiatan padat Karya	Orang	-	50.000	52.000	54.000	45.500,0	Pusat	Kemenaker
		2175.BDC.030	Tenaga Kerja yang mendapat Pembinaan Untuk Menjadi Tenaga Kerja mandiri	Orang	-	54.500	55.000	55.500	328.839,4	Pusat	Kemenaker
		2175.QEA.003	Tenaga Kerja mandiri lanjutan	Orang	1.800	-	-	-	27.000,0	Pusat	Kemenaker
		2175.QEA.010	Tenaga kerja mandiri pemula	Orang	100.000	-	-	-	226.000,0	Pusat	Kemenaker
6616	Perluasan kesempatan kerja Binapenta	6616.QEA.001	Tenaga kerja mandiri pemula	Orang	-	50.000	52.000	54.000	358.000,0	Pusat	Kemenaker
		6616.QEA.002	Tenaga Kerja mandiri lanjutan	Orang		3.971	4.000	4.100	185.565,0	Pusat	Kemenaker
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6071	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	6071.BDI.010	Wirausaha Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi serta Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Industri	550	550	550	550	117.856,2	Pusat dan Daerah	Kemenperin
		6071.BDI.015	Wirausaha Industri Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan Yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Industri	550	550	550	550	117.730,7	Pusat dan Daerah	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6071.BDI.021	Wirusaha Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Industri	550	550	550	550	117.019,4	Pusat dan Daerah	Kemenperin
019.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
4957	Pelatihan Vokasi Industri	4957.BDC.001	Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirusaha Industri	Orang	25	25	25	-	10.367,3	Pusat	Kemenperin
044.EB Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi											
4451	Penguatan Pengelolaan dan Perlindungan Usaha Mikro	4451.BDG.001	Usaha Mikro yang difasilitasi penerbitan izin usaha (Izin Usaha Mikro Kecil/ IUMK)	UMi	5000	7000	9000	10.000	14.000,0	Pusat	Kemen KUKM
4445	Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro	4445.BDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMi	360	450	500	700	26.380,0	Pusat	Kemen KUKM
2739	Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro	2739.QDG.002	UMKM yang didampingi melalui PLUT-UMKM	UMKM	71	100	200	300	19.860,0	Pusat	Kemen KUKM
2738	Pendampingan Konsultasi dan Bantuan Hukum	2738.BBA.001	Layanan Bantuan Hukum Perorangan	Layanan	1	1	1	1	41.524,0	Pusat	Kemen KUKM
2763	Pembiayaan dan Investasi UKM	2763.QDG.002	UKM yang difasilitasi Pengembangan Investasi, fiskal dan pajak	UKM	300	500	700	10.000	4.980,0	Pusat	Kemen KUKM
4450	Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM	4450.QDG.002	UKM/Sentra Yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk	UKM	300	500	700	900	81.640,0	Pusat	Kemen KUKM
2751	Kemitraan dan Perluasan Pasar UKM	2751.QDG.002	UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi	UKM	250	350	450	550	32.100,0	Pusat	Kemen KUKM
		2751.QDG.003	Jaringan dan Pemasaran Ekspor yang diperkuat	Kegiatan	6	8	10	12	18.160,0	Pusat	Kemen KUKM
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
2795	Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	2795.QDB.001	K/L bidang ekonomi yang difasilitasi dalam peningkatan indeks PUG	K/L	5	8	10	12	3.400,0	Pusat	Kemen PPPA
		2795.UBA.001	Daerah mitra Asdep PUG Bidang Ekonomi yang difasilitasi dalam Peningkatan Indeks PUG	Daerah	5	8	9	10	5.200,0	Provinsi	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2795.UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan	Daerah	5	5	5	5	13.200,0	Daerah	Kemen PPPA
INDIKATOR TPB/SDGs:											
8.3.1.(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan											
8.10.1.(a) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit											
044.EB Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi											
2746	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	2746.BDF.002	Koperasi yang mendapatkan akses dan skema pembiayaan	Koperasi	150	200	250	350	15.000,0	Pusat	Kemen KUKM
		2746.QDF.001	Koperasi yang mendapatkan Dukungan Permodalan dan Penjaminan	Koperasi	250	350	400	450	46.420,0	Pusat	Kemen KUKM
4446	Perkuatan Fasilitas Pembiayaan dan Pengembangan Investasi Usaha Mikro	4446.QDG.001	Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT)	UMKM	10.000	12.000	14.000	16.000	76.530,0	Pusat	Kemen KUKM
2763	Pembiayaan dan Investasi UKM	2763.QDG.001	UKM/Sentra yang difasilitasi Akses Pembiayaan	UKM	250	300	350	400	16.640,0	Pusat	Kemen KUKM
4455	Pembiayaan Wirausaha	4455.BDC.001	Jumlah Peserta yang difasilitasi Sosialisasi Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif Bagi Wirausaha Pemula	Orang	240	350	450	550	11.490,0	Pusat	Kemen KUKM
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6071	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	6071.BDI.032	IKM yang mendapatkan fasilitas promosi dan pendampingan pembiayaan KUR	Industri	1.000	1.000	1.000	1.000	12.959,1	Pusat dan Daerah	Kemenperin
032.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
2360	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	2360.QDG.001	UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi	UMKM	60	65	70	75	30.700,0	34 Provinsi	KKP
		2360.QDG.002	Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	UMKM	200	200	200	200	11.000,0	34 Provinsi	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi										
6469 Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	6469.QDH.004	Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana BUMDesa Bersama Berkembang	Badan Usaha	27	27	27	27	5.400,0	27 Kabupaten	Kemendes PDTT
	6469.QDH.005	Bimbingan Teknis Pengelolaan Unit Usaha BUM Desa Bersama Konsolidasi	Badan Usaha	23	23	23	23	1.200,0	Pusat	Kemendes PDTT
	6469.QDH.006	Bimbingan Teknis Pengelolaan Unit Usaha BUM Desa Bersama Berkembang	Badan Usaha	12	12	12	12	800,0	Pusat	Kemendes PDTT
	6469.QDH.007	Workshop Pengembangan Usaha BUM Desa Bersama	Badan Usaha	1	1	1	1	2.400,0	Pusat	Kemendes PDTT
	6469.QEI.003	Bantuan modal stimulan untuk pengembangan BUMDesa Dit. Perencanaan Teknis	Lembaga	500	500	500	500	12.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
	6469.QEH.001	Bantuan modal stimulan untuk pengembangan usaha Ekonomi Desa yang terintegrasi dengan BUMDes	Kelompok Masyarakat	50	50	50	50	45.250,0	Pusat	Kemendes PDTT
	6469.QEI.001	Bantuan modal stimulan untuk pengembangan BUMDesa Dit. Perencanaan Teknis	Lembaga	500	500	500	500	245.627,5	Pusat	Kemendes PDTT
	6469.QEI.002	Bantuan modal stimulan untuk pengembangan BUMDesa Dit. Pengembangan Produk Unggulan	Lembaga	500	500	500	500	8.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
	6469.QEH.002	Bantuan modal stimulan untuk pengembangan usaha Ekonomi Desa yang terintegrasi dengan BUMDes Dit. Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan	Kelompok Masyarakat	50	50	50	50	2.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
	6469.QEI.004	Bantuan modal stimulan untuk pengembangan BUMDesa Dit. Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan	Lembaga	500	500	500	500	18.000,0	Pusat	Kemendes PDTT

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
Program Peningkatan Kapasitas UMKM											
-	Pelatihan Pencatatan Laporan Keuangan UMKM	-	Jumlah pelatihan		NA	NA	NA	NA	NA	Kantor Perwakilan BI	Bank Indonesia
-	Business Matching Pembiayaan Bank dan Fintech	-	Jumlah pembiayaan yang disalurkan		NA	NA	NA	NA	NA	Kantor Perwakilan BI	Bank Indonesia
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.4.1.(a) Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5444	Peningkatan Penyuluhan	5444.QDC.001	KTH Mandiri yang terbentuk	Kelompok Masyarakat	80	100	100	100	10,5	Pusat	Kemen LHK
		5444.QDD.001	Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	Orang	1.500	1.500	1.500	1.500	20.597,5	Pusat	Kemen LHK
		5444.QDD.002	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	Kelompok Masyarakat	70	70	70	70	11,5	Pusat	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja											
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
6587	Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan	6587.QDH.002	Perusahaan yang mendapatkan Pelatihan Penyusunan Struktur dan Skala Upah	Badan Usaha	500	-	-	-	498,2	Pusat	Kemenaker
6619	Peningkatan Pendidikan Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	6619.QDH.002	Perusahaan yang mendapatkan Pelatihan Penyusunan Struktur dan Skala Upah	Badan Usaha	-	500	1.000	1.500	10.998,2	Pusat	Kemenaker
035.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan											
4550	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	4550.PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	21.391,0	Pusat	Kemenko Perekonomian
4545	Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	4545.ABK.001	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	3.139,0	Pusat	Kemenko Perekonomian
		4545.PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	4.278,0	Pusat	Kemenko Perekonomian

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur										
023.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi										
4263 Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi	4263.PDI.016	Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi	Orang	15.000	15.000	16.000	16.500	101.724,10	Pusat	Kemendikbud Ristek
	4263.QDB.002	Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri	Lembaga	120	120	120	120	1.151.954,40	Pusat	Kemendikbud Ristek
023.DK Program Pendidikan Tinggi										
4258 Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan	4258.QEJ.002	Mahasiswa menjalankan wirausaha	Orang	50.000	3.000	60.000	65.000	267.123,40	Pusat	Kemendikbud Ristek
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)										
026.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi										
4057 Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	4057.SCH.001	Peserta yang magang di perusahaan dalam negeri	Orang	108.300	55.000	64.559	67.453	337.298,0	34 Provinsi	Kemenaker
	4057.SCH.002	Peserta yang magang di perusahaan luar negeri	Orang	1.500	3.000	3.000	3.000	59.533,7	Pusat	Kemenaker
4060 Pengembangan Standar Kompetensi dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas	4060.BDC.001	Pengembangan Talenta	Orang	150	-	-	-	725,6	Pusat	Kemenaker
	4060.BDC.001	Pengembangan Talenta Muda	Orang	-	75	75	75	6.840	Pusat	Kemenaker
029.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi										
5441 Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	5441.SCE.002	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	Orang	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000,0	Pusat	Kemen LHK
5442 Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	5442.RBI.001	Pembangunan Sekolah	Unit	3	-	-	-	15.302,0	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5442.SAE.001	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	Orang	479	479	479	479	303.490,0	SMK Kadipaten (Jawa Barat), SMK Pekanbaru (Riau), SMK Makassar (Sulsel), SMK Samarinda (Kaltim), SMK Manokwari (Papua Barat).	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.7.1.(a) Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur											
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
2198	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	2198.BIB.001	Pekerja anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Pekerja Anak	500	-	-	-	2.627,7	Pusat	Kemenaker
		2198.BIH.001	Perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan dan anak	Badan Usaha	924	-	-	-	4.903,4	Pusat	Kemenaker
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3											
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
2199	Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2199.BIH.001	Perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Badan Usaha	3.960	-	-	-	13.809,9	Pusat	Kemenaker
5587	Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	5587.QAC.001	Perusahaan yang mendapatkan layanan pengujian K3	Perusahaan	4.500	-	-	-	28.387,8	Pusat	Kemenaker
6588	Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	6588.QIH.001	Perusahaan yang diperiksa dari jumlah perusahaan dalam WLKP Online	Badan Usaha	1.211	9.000	10.000	11.000	18.013,8	Pusat	Kemenaker
6590	Peningkatan Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	6590.QDH.002	Perusahaan yang menerapkan SMK3	Badan Usaha		1.300	1.400	1.500	5.063,6	Pusat	Kemenaker
6592	Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	6592.QAC.001	Perusahaan yang mendapatkan layanan pengujian K3	Badan Usaha	-	3.000	4.000	5.000	49.190,6	Pusat	Kemenaker
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
2089	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	2089.SCI.003	Tenaga kesehatan yang dilatih K3 Fasyankes	Orang	120	120	120	120	2.978,9	Pusat	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR TPB/SDGs:										
8.9.1* Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB										
8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara										
8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara										
8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata										
040.EA Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif										
4308 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	4308.QDC.001	Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Kemitraan Usaha Sebagai Pemasok Industri Pariwisata	Orang	1.100	1.100	1.100	1.100	38.484,0	Pusat	Kemenparekraf
	4308.QDC.002	SDMPariwisata yang difasilitasi pelatihan dan pembinaan sadar wisata	Orang	2.300	2.300	2.300	2.300	46.028,0	Pusat	Kemenparekraf
	4308.QDC.003	SDM pariwisata di desa wisata yang difasilitasi melalui pendampingan	Orang	2.450	2.450	2.450	2.450	68.288,0	Pusat	Kemenparekraf
	4308.SCD.001	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja	Orang	12.600	12.600	12.600	12.600	30.992,0	Pusat	Kemenparekraf
4309 Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	4309.SCL.003	Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Bimbingan Teknis	Orang	2.300	2.300	2.300	2.300	23.000,0	Pusat	Kemenparekraf
	4309.SCL.004	Aparatur Sipil Negara Kabupaten/Kota dan Provinsi yang difasilitasi Bimbingan Teknis	Orang	1.750	1.750	1.750	1.750	17.500,0	Pusat	Kemenparekraf
	4309.SCL.005	SDM Kreatif dan Champion/Unggulan yang difasilitasi Pelatihan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Orang	6.000	6.000	6.000	6.000	87.600,0	Pusat	Kemenparekraf
	4309.SCL.006	SDM Ekonomi Kreatif difasilitasi Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	3.000	3.000	3.000	3.000	54.000,0	Pusat	Kemenparekraf
	4309.PDI.001	SDM Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Sertifikasi	Orang	2.500	2.500	2.500	2.500	66.000,0	Pusat	Kemenparekraf
4323 Komunikasi Pemasaran	4323.PEH.001	Publikasi Media Digital	Promosi	1	1	1	1	677.832,0	Pusat	Kemenparekraf
	4323.PEH.002	Publikasi Media Sosial dan Owned Media	Promosi	1	1	1	1	1.006.508,0	Pusat	Kemenparekraf

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4323.PEH.003	Publikasi Media Elektronik	Promosi	1	1	1	1	384.192,0	Pusat	Kemenparekraf
		4323.PEH.004	Publikasi Media Cetak dan Media Luar Ruang	Promosi	1	1	1	1	368.068,0	Pusat	Kemenparekraf
4324	Pemasaran Pariwisata Regional I (Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania)	4324.PEH.001	Pameran Wisata Destinasi Prioritas untuk Wilayah Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania	Promosi	8	8	8	8	93.599,6	Pusat	Kemenparekraf
		4324.PEH.002	Misi Penjualan Destinasi Prioritas untuk Wilayah Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania	Promosi	8	8	8	8	41.200,0	Pusat	Kemenparekraf
		4324.PEH.003	Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas untuk Wilayah Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania	Promosi	1	1	1	1	40.000,0	Pusat	Kemenparekraf
		4324.PEH.004	Kerjasama Promosi dengan Maskapai dan Wholesaler di Wilayah Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania	Promosi	1	1	1	1	20.000,0	Pusat	Kemenparekraf
4325	Pemasaran Pariwisata Regional II (Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Tengah)	4325.PEH.001	Pameran Wisata Destinasi Prioritas Di Regional II (Pasar Asia Timur, Selatan dan Tengah)	Promosi	4	4	4	4	38.908,6	Pusat	Kemenparekraf
		4325.PEH.002	Misi Penjualan Destinasi Prioritas Di Regional II (Pasar Asia Timur, Selatan dan Tengah)	Promosi	8	8	8	8	23.284,1	Pusat	Kemenparekraf
		4325.PEH.003	Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas untuk Wilayah Pasar Asia Timur, Selatan dan Tengah	Promosi	4	4	4	4	19.034,0	Pusat	Kemenparekraf
		4325.PEH.004	Kerjasama Promosi dengan Maskapai dan Wholesaler di Wilayah Pasar Asia Timur, Selatan dan Tengah	Promosi	8	8	8	8	50.614,4	Pusat	Kemenparekraf
4326	Pemasaran Pariwisata Regional III (Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika)	4326.PEH.001	Pameran Wisata Destinasi Prioritas Di Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika	Promosi	4	4	4	4	112.000,0	Pusat	Kemenparekraf

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4326.PEH.002	Misi Penjualan Destinasi Prioritas Di Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika	Promosi	4	4	4	4	19.896,8	Pusat	Kemenparekraf
		4326.PEH.003	Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas untuk Wilayah Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika	Promosi	4	4	4	4	23.656,5	Pusat	Kemenparekraf
		4326.PEH.004	Kerjasama Promosi dengan Maskapai dan Wholesaler di Wilayah Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika	Promosi	4	4	4	4	10.000,0	Pusat	Kemenparekraf
4327	Pemasaran Ekonomi Kreatif	4327.PEH.001	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran bagi Pelaku Ekonomi Kreatif pada Subsektor Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Televisi dan Radio	Promosi	1	2	3	4	42.150,6	Pusat	Kemenparekraf
		4327.PEH.002	Pemasaran terintegrasi bagi pelaku ekonomi kreatif	Promosi	1	2	3	4	288.386,0	Pusat	Kemenparekraf
		4327.PEH.003	Dukungan Pemasaran bagi Pelaku Kreatif pada Subsektor Aplikasi dan Pengembangan Permainan	Promosi	1	2	3	4	34.886,0	Pusat	Kemenparekraf
		4327.PEH.004	Dukungan Pemasaran bagi Pelaku Kreatif pada Subsektor Seni Pertunjukan, Seni Rupa dan Musik	Promosi	1	2	3	4	42.577,4	Pusat	Kemenparekraf
4329	Pengembangan Wisata Alam, Budaya, dan Buatan	4329.PBK.002	Pola Perjalanan Wisata	Rekomendasi Kebijakan	18	18	18	18	64.000,0	Pusat	Kemenparekraf
		4329.PBK.004	Produk Wisata	Rekomendasi Kebijakan	15	15	15	15	86.000,0	Pusat	Kemenparekraf
4330	Promosi Wisata Minat Khusus	4330.PEH.001	Pengenalan Produk Wisata Minat Khusus	Promosi	20	20	20	20	40.000,0	Pusat	Kemenparekraf
		4330.PEH.002	Partisipasi Pada Pameran Wisata Minat Khusus	Promosi	4	4	4	4	38.000,0	Pusat	Kemenparekraf
		4330.PEH.003	Kerjasama Terpadu Promosi Wisata Minat Khusus	Promosi	5	5	5	5	20.000,0	Pusat	Kemenparekraf
		4330.PEH.004	Media Promosi Wisata Minat Khusus	Promosi	12	12	12	12	100.000,0	Pusat	Kemenparekraf

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
4331	Pengembangan Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran	4331.PEG.001	Bidding MICE yang diselenggarakan	Promosi	8	6	6	6	55.120,0	Pusat	Kemendagri
		4331.PEH.001	Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional	Promosi	2	2	2	2	6.900,0	Pusat	Kemendagri
		4331.PEH.002	Delegate Boosting yang ditingkatkan melalui promosi MICE	Promosi	1	1	1	1	8.320,0	Pusat	Kemendagri
		4331.PEH.003	MICE yang dipromosikan melalui misi penjualan	Promosi	2	2	2	2	2.500,0	Pusat	Kemendagri
		4331.PEH.004	Event MICE Dalam Negeri yang didukung	Promosi	6	6	6	6	120.300,0	Pusat	Kemendagri
		4331.PEH.005	Pemasaran MICE yang dipromosikan Lewat Media	Promosi	2	2	2	2	25.100,0	Pusat	Kemendagri
4332	Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	4332.PEH.002	Materi Promosi Produk Wisata dan Kegiatan (Events)	Promosi	30	30	30	30	271.756,0	Pusat	Kemendagri
		4332.PEH.003	Promosi dan Publikasi Produk Wisata dan Kegiatan (Events)	Promosi	10	10	10	10	957.800,0	Pusat	Kemendagri
		4332.PEH.004	Evaluasi Promosi Produk Wisata dan Kegiatan (Events)	Promosi	10	10	10	10	10.444,0	Pusat	Kemendagri
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan	6468.RBN.001	Fasilitas Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan (mendukung Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Di Kawasan Super Prioritas Pariwisata Nasional)	Unit	1	1	1	1	139,4	Pusat	Kemendes PDTT
		6468.RBN.002	Sarana dan prasarana wisata desa yang dibangun	Unit	50	50	50	50	137.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6468.RBN.004	Sarana dan prasarana wisata desa yang dibangun untuk mendukung destinasi wisata	Unit	75	75	75	75	183,0	Pusat	Kemendes PDTT

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6468.RBN.005	Sarana dan prasarana wisata desa yang dibangun untuk mendukung destinasi wisata super prioritas	Unit	47	47	47	47	178.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6468.RBN.006	Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan (mendukung Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Di Kawasan Super Prioritas Pariwisata Nasional)	Unit	2	2	2	2	16.085,4	Pusat	Kemendes PDTT
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa											
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	6141.FBA.013	Daerah yang Menerapkan Transaksi Non Tunai (Cashless)Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) atas Pengeluaran Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	217	318	426	542	5.826,2	Pusat	Kemendagri
		6141.FBA.015	Daerah yang Menerapkan Transaksi Non Tunai (Cashless)Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) atas Penerimaan Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	100	150	200	250	6.483,0	Pusat	Kemendagri
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.b.1 Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional											
092.DB Program Kepemudaan											
3808	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	3808.QDC.001	Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	Orang	5.000	5.000	5.000	5.000	24.000,0	Pusat	Kemempora

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR										
INDIKATOR TPB/SDGs:										
9.1.1* Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak										
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional										
033.GA Program Infrastruktur Konektivitas										
2409 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	2409.CBC.001	Pembangunan Jalan	Km	213,84	15,74	250,00	250,00	8.939.204,2	Sumatera Utara, Bali, Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, Kalimantan	Kemen PUPR
	2409.CBC.004	Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	Km	56,51	74,60	122,86	123,54	3.918.813,1	Papua, Papua Barat	Kemen PUPR
	2409.CBC.005	Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)	Km	403,07	180,18	430,54	353,16	18.447.692,9	Aceh, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, NTT, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Aceh, Jawa Tengah	Kemen PUPR
	2409.CBC.006	Pembangunan Jalan Kawasan Prioritas (ProPN)	Km	84,96	42,50	50,20	35,10	4.620.684,7	Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
	2409.CBC.007	Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	Km	24,40	42,43	18,40	21,50	1.144.882,1	PM	Kemen PUPR
	2409.CBC.008	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	Km	18,11	6,61	50,00	50,00	1.690.917,5	PM	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2409.CBF.001	Pembangunan Jembatan	Meter	18.967,24	10.326,04	137,96	228,55	2.635.783,4	PM	Kemen PUPR
		2409.CBF.002	Pembangunan <i>Flyover</i> / <i>Underpass</i> /Terowongan	Meter	2.321,08	331,50	7.070,20	3.513,50	7.617.318,8	PM	Kemen PUPR
		2409.CBF.003	Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	Meter	1.368,75	853,40	921,18	1.313,28	2.677.549,2	Papua, Papua Barat	Kemen PUPR
		2409.CBF.004	Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN)	Meter	3.099,64	7.183,05	3.602,98	4.285,74	7.795.412,1	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
		2409.CBF.005	Pembangunan Jembatan Kawasan Prioritas (ProPN)	Meter	3.440,35	207,36	376,39	373,13	1.125.172,1	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
		2409.CBF.007	Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Meter	766,11	818	500	500	792.385,6	Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol											
033.GA Program Infrastruktur Konektivitas											
2409	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	2409.CBC.003	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	km	340,20	262,80	671,60	1.065,30	345.905.961,0	Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Banten	Kemen PUPR
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api											
022.GA Program Infrastruktur Konektivitas											
4643	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	4643.RBA.001	Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan Light Rail Transit Provinsi Sumatera Selatan termasuk supervisi	Km	46,80	-	-	-	2.515.001,7	Sumatera Selatan	Kemenhub
		4643.RBA.002	Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara) (Tahap II)	Km	4,00	-	-	-	334.086,4	DKI Jakarta	Kemenhub
		4643.RBA.003	Pembangunan Jalur KA Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA)	Km	6,00	-	-	-	318.279,5	Sulawesi Selatan	Kemenhub
		4643.RBA.004	Pembangunan Jalur Kereta Api Solo Balapan - Bandara Adi Soemarmo	Km	11,12	-	-	-	65.598,3	Jawa Barat	Kemenhub
		4643.RBA.005	Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar - Parepare Segmen 3 (Makassar - Barru)	Km	64,00	-	-	-	420.000,0	Sumatera Utara, Aceh	Kemenhub
		4643.RBA.006	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Bekasi s/d Cikarang	Km	3,80	-	-	-	170.000,0	Banten	Kemenhub
4641	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	4641.RBA.010	Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracandong - Cicalengka Tahap 1 Segmen Gedebage - Haurpugur	Km	13,09	4,53	-	-	524.595,9	Jawa Barat	Kemenhub
		4641.RBA.011	Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor - Sukabumi	Km	26,60	-	-	-	439.769,1	Jawa Barat	Kemenhub
		4641.RBA.012	Pembangunan Jalur Ganda KA Mojokerto - Sepanjang	Km	33,00	-	-	-	246.157,8	Jawa Timur	Kemenhub
		4641.RBA.013	Peningkatan Jalur KA Lintas Araskabu - Siantar	Km	35,00	-	-	-	64.000,0	Sumatera Utara	Kemenhub

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	4641.RBA.014	Peningkatan Jalur KA R42 Lintas Lahat - Lubuklinggau Segmen Bungamas - Lubuklinggau	Km	44,73	44,53	-	-	492.464,2	Sumatera Selatan	Kemenhub
	4641.RBA.015	Peningkatan Jalur KA antara Serang - Merak Lintas Rangkasbitung - Merak	Km	34,13	-	-	-	160.000,0	Banten	Kemenhub
	4641.RBA.016	Peningkatan Jalur KA Lintas Bandung - Banjar	Km	52,00	-	-	-	25.834,4	Jawa Barat, Jawa Tengah	Kemenhub
	4641.RBA.017	Peningkatan Jalur KA Lintas Banjar - Kroya	Km	28,75	-	-	-	24.000,0	Jawa Tengah	Kemenhub
	4641.RBA.018	Peningkatan Jalur KA Lintas Padang-Pariaman	Km	20,06	16,35	-	-	279.468,6	Sumatera Barat	Kemenhub
	4641.RBA.019	Penggantian Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Stasiun Cikarang - Stasiun Cikampek	Km	40,72	-	-	-	230.550,0	Jawa Barat	Kemenhub
	4641.RBA.020	Penggantian Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Bandung dan Ciroyom	Km	0,74	-	-	-	98.400,0	Jawa Barat	Kemenhub
	4641.RBA.021	Penggantian Sistem Persinyalan Stasiun Yogyakarta - Stasiun Lempuyangan	Km	0,65	0,66	-	-	114.876,9	D.I Yogyakarta	Kemenhub
	4641.RBA.022	Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakarta Kota	Km	25,50	25,50	-	-	1.036.600,0	Jabodetabek	Kemenhub
	4641.RBA.023	Elektrifikasi Jalur KA Lintas Solo Balapan - Solo Jebres	Km	3,50	-	-	-	152.125,0	Jawa Tengah	Kemenhub
	4641.RBA.035	Jabodetabek <i>Railway Capacity Enhancement Phase I</i>	Km	1,00	-	-	-	1.000,0	Jabodetabek	Kemenhub

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.1.2.(a) Jumlah bandara											
022.GA Program Infrastruktur Konektivitas											
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	4645.RBE.001	Bandar Udara Baru	Unit	10	10	10	10	1.779.246,4	Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat	Kemenhub
		4645.RBE.002	Bandara Wamena (<i>Major Project</i>)	Unit	1	-	-	-	70.000,0	Papua	Kemenhub
		4645.RBE.003	Bandara Ilaga (<i>Major Project</i>)	Unit	1	-	-	-	47.944,0	Papua	Kemenhub
		4645.RBE.004	Bandara Tanah Merah (<i>Major Project</i>)	Unit	1	-	-	-	46.320,0	Papua	Kemenhub
		4645.RBE.005	Bandar Udara	Unit	37	37	37	38	5.415.322,8	Tersebar	Kemenhub
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.1.2.(b) Jumlah pelabuhan penyeberangan											
022.GA Program Infrastruktur Konektivitas											
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	4637.RBP.022	Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional)	Unit	20	30	30	30	2.453.789,5	Bali, Kab. Asmat, Kab. Banyuasin, Kab. Kotawaringin Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat,	Kemenhub
		4637.RBP.024	Pelabuhan Sungai (Prioritas Nasional)	Unit	7	10	10	10	606.502,9	Kab. Asmat, Kab. Banyuasin, Kab. Kotawaringin Timur	Kemenhub

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4637.RBP.026	Pelabuhan Danau (Prioritas Nasional)	Unit	12	20	20	20	1.126.077,1	Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Bali Sulawesi Tengah	Kemenhub
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis											
022.GA Program Infrastruktur Konektivitas											
4660	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	4660.RBD.001	Fasilitas Pelabuhan Laut Prioritas Nasional	Unit	20	20	20	20	5.114.864,5	Jawa Barat, Sulawesi barat, Sulawesi Tengah, Papuabarat, Sulawesi utara, Sulawesi Selatan, Maluku, NTT, NTB.Kalimantan Selatan	Kemenhub
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita											
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur											
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6056	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	6056.BDI.001	Pendampingan dan Fasilitasi Peningkatan Ekspor Ditjen IKFT	Rekomendasi Kebijakan	15	15	15	15	8.367,3	Pusat	Kemenperin
6058	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	6058.BDI.001	Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Industri	35	35	35	35	41.836,3	Pusat	Kemenperin
		6058.BDI.002	Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Semen Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Industri	2	2	2	2	5.229,5	Pusat	Kemenperin
		6058.BDI.003	Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan Apparel	Industri	100	100	100	100	31.377,2	Pusat	Kemenperin
6044	Perbaikan Rantai Pasok Industri Agro	6044.BDI.001	Perbaikan Rantai Pasok di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Melalui Transformasi Industri 4.0	Industri	2	2	2	2	12.550,9	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6049	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Agro	6049.BDI.001	Industri yang diberikan Fasilitas Peningkatan Ekspor	Industri	1	1	1	1	8.367,3	Pusat	Kemenperin
6051	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Agro	6051.BDI.001	Perusahaan di Sektor Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan yg dilakukan pendampingan penerapan industry 4.0	Industri	1	1	1	1	10.459,1	Pusat	Kemenperin
		6051.BDI.002	Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	Industri	1	1	1	1	10.459,1	Pusat	Kemenperin
6068	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	6068.BDI.001	Industri yang terfasilitasi melalui <i>Export Coaching</i> Dalam Rangka Peningkatan Ekspor	Industri	10	10	10	10	20.918,1	Pusat	Kemenperin
6070	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	6070.BDI.001	Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	Industri	10	10	10	10	10.459,1	Pusat	Kemenperin
		6070.BDI.002	Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan dan <i>Center of Excellence</i>	Industri	10	10	10	10	20.918,1	Pusat	Kemenperin
		6070.BDI.003	Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	Industri	10	10	10	10	10.459,1	Pusat	Kemenperin
6071	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	6071.BDI.011	IKM Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Industri	163	163	163	163	35.665,4	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6071.BDI.013	IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Industri	62	62	62	62	15.897,8	Pusat	Kemenperin
		6071.BDI.016	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Industri	205	205	205	205	47.111,0	Pusat	Kemenperin
		6071.BDI.018	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Industri	95	95	95	95	23.675,1	Pusat	Kemenperin
		6071.BDI.022	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Industri	160	160	160	160	61.917,7	Pusat	Kemenperin
		6071.BDI.024	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Industri	54	54	54	54	4.183,6	Pusat	Kemenperin
6073	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri	6073.BDH.002	Peningkatan kemitraan dalam Global Value Chain	Badan Usaha	5	5	5	5	8.367,3	Pusat	Kemenperin
		6073.ABK.004	Industrial Intelligence dan Peluang Kerja Sama Industri di Luar Negeri	Rekomendasi Kebijakan	6	6	6	6	29.285,4	Pusat	Kemenperin
6074	Pengembangan Perwilayahan Industri	6074.BDH.001	Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	Badan Usaha	5	9	9	9	22.918,1	Pusat	Kemenperin
		6074.BDH.002	Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan	Badan Usaha	8	18	18	18	10.459,1	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
065.ED Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal											
3232	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur	3232.QDI.025	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Proyek	7	7	8	8	3.500,0	Pusat	BKPM
090.EF Program Perdagangan Dalam Negeri											
3732	Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	3732.PDC.051	Layanan Pengujian Mutu Barang	Produk	3.600	3.800	4.000	4.200	21.103,2	Pusat	Kemendag
3733	Standardisasi dan Pengendalian Mutu	3733.ACA.051	Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Produk	60	60	60	60	1.312,1	Pusat	Kemendag
		3733.BDB.051	Lembaga yang Didampingi dan atau Dimonitor Penerapan Standar/ Persyaratan Teknis	Lembaga	4	4	4	5	3.813,9	Pusat	Kemendag
		3733.BDB.052	Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Jejaring Lab Acuan Pengujian yang Dibina	Lembaga	40	40	40	40	6.360,0	Pusat	Kemendag
3734	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi	3734.PDC.051	Layanan Kalibrasi	Produk	6.900	6.950	7.000	7.050	7.142,5	Pusat	Kemendag
3735	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi	3735.PDC.051	Layanan Sertifikasi	Produk	51	49	50	51	3.343,7	Pusat	Kemendag
		3735.PDI.052	Layanan Sertifikasi	Orang	128	120	121	122	9.119,1	Pusat	Kemendag
042.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
5718	Pengembangan Teknologi dan Produk Inovasi Industri	5718.SDA.001	Produk Inovasi Litbangjirap di Industri	Produk	20	15	15	15	243.797,0	Pusat	BRIN
		5718.SDA.002	Penelitian <i>Flagship</i> Riset Nasional (pembelian lisensi tranfer teknologi)	Produk	15	15	15	15	1.862.890,0	Pusat	BRIN
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur											
019.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
4957	Pelatihan Vokasi Industri	4957.ADI.001	Tenaga Kerja Industri Kompeten yang Tersertifikasi	Orang	10.000	10.000	10.000	10.000	36.147,7	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4957.DCH.001	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)	Orang	86.500	86.500	86.500	86.500	2.559.106,6	Pusat	Kemenperin
4958	Pendidikan Tinggi Vokasi Industri	4958.DAG.001	Mahasiswa dan Lulusan Program DIII dan DIV Berbasis Kompetensi	Orang	11.405	11.405	11.405	11.405	476.169,1	Pusat	Kemenperin
		4958.DAG.002	Mahasiswa dan Lulusan Program DI dan DII Berbasis Kompetensi	Orang	1.800	1.800	1.800	1.800	92.856,2	Pusat	Kemenperin
4959	Pendidikan Menengah Kejuruan Industri	4959.DAG.001	SDM yang Mengikuti Pendidikan Menengah Kejuruan Industri	Orang	6.763	6.763	6.763	6.763	205.345,1	Pusat	Kemenperin
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri											
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6071	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	6071.BDI.010	Wirausaha Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi serta Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Industri	550	550	550	550	117.856,2	Pusat dan Daerah	Kemenperin
		6071.BDI.015	Wirausaha Industri Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan Yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Industri	550	550	550	550	117.730,7	Pusat dan Daerah	Kemenperin
		6071.BDI.021	Wirausaha Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Industri	550	550	550	550	117.019,4	Pusat dan Daerah	Kemenperin
		6071.BDD.001	Sentra IKM dan UPT Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur Yang Mendapat Fasilitas	Kelompok Masyarakat	14	14	14	14	45.619,5	Pusat dan Daerah	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6071.BDD.002	Sentra IKM dan UPT Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka yang mendapat Fasilitas	Kelompok Masyarakat	7	7	7	7	27.194,7	Pusat dan Daerah	Kemenperin
		6071.BDD.003	Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitas	Kelompok Masyarakat	20	20	20	20	34.683,4	Pusat dan Daerah	Kemenperin
044.EB Program Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi											
2765	Pengembangan Bisnis UKM Produk	2765.QDG.001	UMKM yang difasilitasi penguatan sarana dan prasarana produksi	UMKM	250	250	250	250	18.315,3	Pusat	Kemen KUKM
		2765.QDG.002	Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk UKM yang difasilitasi peningkatan manajemen dan mutu produk UKM	UMKM	450	450	450	450	50.960,0	Pusat	Kemen KUKM
063.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan											
6385	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	6385.BDG.001	UMKM Kosmetik yang sesuai standar	UMKM	35	39	41	43	12.063,3	33 provinsi	Badan POM
4132	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4132.BDG.001	UMKM pangan yang sesuai standar	UMKM	52	54	56	58	16.251,8	Jawa Barat dan Jabodetabek	Badan POM
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh BB/Balai POM	UMKM	-	842	910	978	9.736,4	33 provinsi	Badan POM
		3165.BDG.002	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM I	UMKM	-	106	146	186	1.225,7	33 provinsi	Badan POM
		3165.BDG.003	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM II	UMKM	-	51	72	93	589,7	33 provinsi	Badan POM

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit											
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6071	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	6071.BDI.032	IKM yang mendapatkan fasilitasi promosi dan pendampingan pembiayaan KUR	Industri	1.000	1.000	1.000	1.000	12.959,1	Pusat dan Daerah	Kemenperin
044.EB Program Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi											
4455	Pembiayaan Wirausaha	4455.QDC.002	Wirausaha Pemula yang mendapatkan Bantuan	UMKM	1.500	1.500	1.500	1.500	120.000,0	Pusat	Kemen KUKM
4448	Peningkatan akses pembiayaan, pengembangan investasi UKM dan Kualitas SDM di sektor pertanian dan perkebunan	4448.QDG.001	UKM yang difasilitasi Akses Pembiayaan	UMKM	700	700	700	700	7.600,0	Pusat	Kemen KUKM
4446	Perkuatan Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Investasi Usaha Mikro	4446.QDG.001	Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT)	UMKM	10.000	10.000	10.000	10.000	35.212,8	Pusat	Kemen KUKM
INDIKATOR TPB/SDGs:											
9.4.1* Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur											
9.4.1.(a) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri											
9.4.1.(b) Intensitas emisi sektor industri											
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6034	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	6034.QDI.001	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara	Industri	2.625	3.000	3.375	3.750	20,5	34 provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB											
042.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
5716	Penelitian dan Inovasi Perguruan Tinggi, serta Pengabdian Masyarakat (BOPTN)	5716.QDJ.001	Calon <i>Startup</i> Inovasi dari Perguruan Tinggi	UMKM	300	130	135	150	404.464,0	Pusat	BRIN

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
024.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
2069	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	2069.SDA.001	Produk Hasil Penelitian dan Pengembangan <i>Life Sciences</i> Bidang Kesehatan	Hasil Penelitian dan Pengembangan	4	4	4	4	93.313,8	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Yogyakarta, Sumatera Barat	Kemenkes
		2069.SDA.002	Produk hasil Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Gizi Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional	Hasil Penelitian dan Pengembangan	1	1	1	1	222.695,7	34 provinsi	Kemenkes
2070	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat	2070.SDA.001	Produk Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah II	Riset	1	1	7	2	259.222,7	Sumut, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jabar, Banten, Maluku	Kemenkes
		2070.SDA.002	Produk Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah V	Riset	1	1	6	2	133.714,7	Babel, Kalbar, Kalsel,, Sultra, Gorontalo, Pabar	Kemenkes
		2070.SDA.003	Produk Hasil Riset Evaluasi Intervensi Kesehatan Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	Riset	1	1	1	1	66.582,8	34 provinsi	Kemenkes
2071	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	2071.SDA.001	Produk Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah I	Riset	1	1	7	2	264.734,0	Aceh, Riau, Jakarta, Jateng, DIY, NTT, Sulsel	Kemenkes
		2071.SDA.002	Produk Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah IV	Riset	1	1	7	2	124.513,9	Jambi, Kepri, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulteng, Sulbar	Kemenkes
2072	Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan	2072.SDA.001	Produk Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah III	Riset	1	1	7	2	299.695,5	Sumbar, Jatim, Bali, NTB, Sulut, Malut, dan Papua	Kemenkes
019.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
6080	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri	6080.DDB.001	Teknologi yang dikembangkan bidang teknologi industri agro (PRN Industri Agro)	Purwarupa	12	12	12	12	58.685,3	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6080.DDB.002	Teknologi yang dikembangkan bidang teknologi industri KFTLMATE (PRN Industri KFTLMATE)	Purwarupa	3	3	3	3	62.754,4	Pusat	Kemenperin
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.5.2* Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk 9.5.2.(a) Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)											
042.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
4291	Peningkatan Kualifikasi SDM Iptek	4291.QEJ.001	SDM Litbang Penerima Beasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri	Orang	550	550	550	550	243.600,0	Pusat	BRIN
3390	Pembinaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti	3390.QEJ.008	Peserta Pendidikan Berbasis Riset Untuk Bidang Ilmu Strategis	Orang	250	350	500	500	163.500,0	Pusat	LIPI
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.b.1 Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah 9.b.1.(a) Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi											
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6056	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	6056.BDI.001	Pendampingan dan Fasilitas Peningkatan Ekspor Ditjen IKFT	Rekomendasi Kebijakan	15	15	15	15	8.367,3	Pusat	Kemenperin
6058	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	6058.BDI.001	Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Industri	35	35	35	35	41.836,3	Pusat	Kemenperin
		6058.BDI.002	Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Semen Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Industri	2	2	2	2	5.229,5	Pusat	Kemenperin
		6058.BDI.003	Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan Apparel	Industri	100	100	100	100	31.377,2	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6044	Perbaikan Rantai Pasok Industri Agro	6044.BDI.001	Perbaikan Rantai Pasok di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Melalui Transformasi Industri 4.0	Industri	2	2	2	2	12.550,9	Pusat	Kemenperin
6049	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Agro	6049.BDI.001	Industri yang diberikan Fasilitas Peningkatan Ekspor	Industri	1	1	1	1	8.367,3	Pusat	Kemenperin
6051	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Agro	6051.BDI.001	Perusahaan di Sektor Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan yg dilakukan pendampingan penerapan industry 4.0	Industri	1	1	1	1	10.459,1	Pusat	Kemenperin
		6051.BDI.002	Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	Industri	1	1	1	1	10.459,1	Pusat	Kemenperin
6068	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	6068.BDI.001	Industri yang terfasilitasi melalui Export Coaching Dalam Rangka Peningkatan Ekspor	Industri	10	10	10	10	20.918,1	Pusat	Kemenperin
6070	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	6070.BDI.001	Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	Industri	10	10	10	10	10.459,1	Pusat	Kemenperin
		6070.BDI.002	Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan dan <i>Center of Excellence</i>	Industri	10	10	10	10	20.918,1	Pusat	Kemenperin
		6070.BDI.003	Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	Industri	10	10	10	10	10.459,1	Pusat	Kemenperin
090.EE Program Perdagangan Luar Negeri											
3714	Penyelenggaraan Atase Perdagangan	3714.ABB.101	Laporan Informasi Intelijen Bisnis	Rekomendasi Kebijakan	25	25	25	25	11.513,1	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		3714.ABB.102	Laporan Analisis Intelijen Bisnis	Rekomendasi Kebijakan	25	25	25	25	10.175,5	Pusat	Kemendag
		3714.ABB.103	Laporan Data Statistik Perdagangan	Rekomendasi Kebijakan	25	25	25	25	8.104,5	Pusat	Kemendag
3717	Pengembangan Produk Ekspor	3717.SDA.001	Pengembangan desain melalui <i>Indonesian Design Development Center</i>	Produk	110	120	125	130	27.221,1	Pusat	Kemendag
		3717.SDA.003	Pendampingan Pengembangan Produk Ekspor, Jasa dan Ekonomi Kreatif	Produk	30	40	50	60	14.433,5	Pusat	Kemendag
3731	Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	3731.PEB.001	Partisipasi pada Forum terkait Produk Industri dan Pertambangan	Forum	3	3	3	3	797.402,0	Pusat	Kemendag
3738	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	3738.PBB.001	Kebijakan Penurunan Hambatan Akses Pasar	Rekomendasi Kebijakan	70	92	94	88	218.500,0	Pusat	Kemendag
		3738.PBB.003	Rekomendasi Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional	Rekomendasi Kebijakan	7	7	7	7	40.800,0	Pusat	Kemendag
		3738.QDH.001	Fasilitasi FTA <i>Center</i> Jakarta	Badan usaha	100	200	200	200	4.586,4	Pusat	Kemendag
		3738.QDH.002	Fasilitasi FTA <i>Center</i> Bandung	Badan usaha	100	200	200	200	4.586,4	Pusat	Kemendag
		3738.QDH.003	Fasiltiasi FTA <i>Center</i> Makassar	Badan usaha	100	200	200	200	4.586,4	Pusat	Kemendag
		3738.QDH.005	Fasilitasi FTA <i>Center</i> Semarang	Badan usaha	100	200	200	200	4.586,4	Pusat	Kemendag
3740	Perundingan Perdagangan Jasa	3740.PBB.002	<i>Roadmap</i> Jasa <i>Research</i> dan <i>Development</i>	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	20.000,0	Pusat	Kemendag
		3740.PBB.003	Analisis Daya Saing Sektor Jasa Keuangan dan Jasa Komunikasi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	20.000,0	Pusat	Kemendag
3741	Perundingan Perdagangan Multilateral	3741.PBB.004	Perdagangan Multilateral dalam Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	Rekomendasi Kebijakan	3	3	3	3	1.549,0	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		3741.PBB.005	Kebijakan Perdagangan Multilateral dalam Instrumen Perdagangan (<i>Fisheries Subsidies, Anti-dumping, Safeguard dan Countervailing Measures</i>)	Rekomendasi Kebijakan	3	3	3	3	2.765,0	Pusat	Kemendag
		3741.PBB.007	Kebijakan Perdagangan Multilateral dalam <i>Investment Facilitation</i>	Rekomendasi Kebijakan	3	3	3	3	1.975,0	Pusat	Kemendag
		3741.PBB.009	Kebijakan Perdagangan Multilateral dalam Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Bidang Market Akses Perdagangan	Rekomendasi Kebijakan	3	3	3	3	1.165,3	Pusat	Kemendag
3742	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	3742.PEC.001	ASEAN <i>Trade in Goods Agreement</i> (ATIGA)	Kesepakatan	1	1	1	1	2.368,4	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.002	ASEAN <i>Comprehensive Investment Agreement</i> (ACIA)	Kesepakatan	1	1	1	1	300,4	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.006	Kerja Sama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	Kesepakatan	1	1	1	1	5.715,5	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.007	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-China FTA	Kesepakatan	1	1	1	1	2.030,7	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.008	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Korea FTA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.147,5	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.009	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Japan CEP	Kesepakatan	1	1	1	1	1.360,6	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.011	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Australia-New Zealand (AANZ) FTA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.841,0	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.012	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Hongkong FTA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.083,9	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.013	Kerja Sama Perdagangan ASEAN Canada	Kesepakatan	1	1	1	1	633,6	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.014	Kerja Sama Perdagangan ASEAN EU	Kesepakatan	1	1	1	1	1.109,6	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		3742.PEC.015	Kerja Sama Perdagangan ASEAN USTR	Kesepakatan	1	1	1	1	400,0	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.016	Kerja Sama Perdagangan ASEAN EAEU	Kesepakatan	1	1	1	1	309,9	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.017	Kerja Sama Perdagangan ASEAN Russia	Kesepakatan	1	1	1	1	309,9	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.018	Kerja Sama Perdagangan dalam RCEP	Kesepakatan	1	1	1	1	1.142,2	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.019	Kerja Sama Perdagangan dalam East Asian Summit (EAS)	Kesepakatan	1	1	1	1	219,5	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.020	Kerja Sama Perdagangan dalam ASEAN Plus Three (APT)	Kesepakatan	1	1	1	1	219,5	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.021	Kerja Sama Perdagangan dalam Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT)	Kesepakatan	1	1	1	1	792,7	Pusat	Kemendag
3743	Perundingan Perdagangan Bilateral	3743.PED.001	Indonesia-EU CEPA	Perjanjian	1	1	1	1	3.009,0	Pusat	Kemendag
		3743.PED.002	Indonesia-Turkey CEPA	Perjanjian	1	1	1	1	2.007,1	Pusat	Kemendag
		3743.PED.003	Indonesia-Morocco CEPA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.872,5	Pusat	Kemendag
		3743.PED.004	Indonesia-Bangladesh CEPA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.610,7	Pusat	Kemendag
		3743.PED.005	Indonesia-Mauritius PTA	Kesepakatan	1	1	1	1	2.283,0	Pusat	Kemendag
		3743.PED.006	Indonesia-India PTA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.447,7	Pusat	Kemendag
		3743.PED.007	Indonesia-Iran PTA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.592,4	Pusat	Kemendag
		3743.PED.008	Indonesia-Pakistan TIGA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.680,1	Pusat	Kemendag
		3743.PED.009	Indonesia-Malaysia BTA	Perjanjian	1	1	1	1	2.109,7	Pusat	Kemendag
3744	Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional	3744.PEC.001	Kerja Sama Akses Perdagangan dan Investasi Forum APEC	Kesepakatan	1	1	1	1	7.093,8	Pusat	Kemendag
		3744.PEC.002	Kerja Sama Fasilitasi Perdagangan dan Investasi Forum APEC	Kesepakatan	1	1	1	1	6.893,9	Pusat	Kemendag
		3744.PEC.003	Kerja Sama Antar Fora APEC	Kesepakatan	2	2	2	2	1.446,6	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		3744.PEC.005	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Karet Internasional	Kesepakatan	3	3	3	3	2.394,0	Pusat	Kemendag
		3744.PEC.008	Kerja Sama Perdagangan Negara G20	Kesepakatan	3	3	3	3	2.418,0	Pusat	Kemendag
		3744.PEC.009	Kerja Sama Perdagangan Negara OKI	Kesepakatan	2	2	2	2	2.765,6	Pusat	Kemendag
3745	Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	3745.QCB.001	Penanganan Kasus <i>Trade Remedy</i> dan Hambatan Teknis Perdagangan	Perkara	30	30	30	30	5.701,8	Pusat	Kemendag
3751	Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor	3751.PEH.002	<i>Display</i> Produk Ekspor di Luar Negeri	Promosi	3	4	5	6	14.453,7	Pusat	Kemendag
		3751.QAC.001	<i>InaExport</i> Daerah (Surabaya)	Badan usaha	1	2	3	4	12.475,6	Pusat	Kemendag
3753	Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor	3753.PBB.001	Analisa dan informasi pasar ekspor di negara tujuan ekspor utama/potensial	Rekomendasi Kebijakan	6	7	8	9	13.387,6	Pusat	Kemendag
		3753.PBB.002	Analisa dan informasi pasar ekspor di Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Rekomendasi Kebijakan	4	5	6	7	8.317,0	Pusat	Kemendag
		3753.QAC.001	Layanan <i>Inquiry</i> dan Temu Bisnis	Badan usaha	50	50	50	50	2.810,3	Pusat	Kemendag
		3753.QMA.003	Pengembangan <i>market place</i> berorientasi ekspor	Layanan	1	1	1	1	11.669,0	Pusat	Kemendag
3754	Pengembangan Promosi dan Citra	3754.PEH.001	Pameran ke Negara Mitra Dagang Mitra Utama	Promosi	5	5	7	8	16.083,1	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.002	Pameran Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Promosi	5	6	7	8	34.511,6	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.003	Partisipasi Pameran CA Expo Nanning	Promosi	1	1	1	1	8.367,2	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.004	Partisipasi China International Import Expo-Shanghai	Promosi	1	1	1	1	8.367,2	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.005	Partisipasi Pameran Hannover Messe	Promosi	1	1	1	1	8.367,2	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.006	Partisipasi Pameran Terintegrasi Lainnya	Promosi	4	5	6	7	11.295,8	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		3754.PEH.007	Pameran Trade Expo Indonesia	Promosi	1	1	1	1	21.976,1	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.008	Partisipasi Pameran Dalam Negeri	Promosi	5	5	6	7	29.285,4	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.009	Partisipasi Expo 2020 Dubai	Promosi	1	1	0	0	346.000,0	Pusat	Kemendag
		3754.QDH.001	Misi Dagang ke Negara Mitra Dagang Utama	Badan usaha	60	65	70	75	25.856,1	Pusat	Kemendag
		3754.QDH.002	Misi Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Badan usaha	35	40	45	50	28.244,9	Pusat	Kemendag
3755	Kerja Sama Pengembangan Ekspor	3755.PEC.001	Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Ekspor	Kesepakatan	5	6	7	8	9.509,4	Pusat	Kemendag
		3755.QDH.001	Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor	Badan usaha	100	110	120	130	12.287,3	Pusat	Kemendag
3756	Pendidikan dan Pelatihan Ekspor	3756.QDG.001	<i>Export Coaching Program</i>	Pelaku Usaha	150	175	200	225	16.777,3	Pusat	Kemendag
		3756.SCF.001	Pendidikan dan Pelatihan Ekspor	Orang	4	4	4	4	61.434,8	Pusat	Kemendag
3777	Pengembangan Promosi Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)	3777.AEH.001	Promosi ITPC	Promosi	57	57	57	57	66.004,4	Pusat	Kemendag
		3777.PBB.004	<i>Market Intelligence</i>	Rekomendasi Kebijakan	19	19	19	19	6.260,2	Pusat	Kemendag
		3777.QAC.002	<i>Buyer Inquiry</i>	Badan usaha	144	240	240	240	10.000,0	Pusat	Kemendag
		3777.QAC.003	<i>CoWorking Space</i> di Pasar Potensial	Badan usaha	6	6	7	0	1.200,0	Pusat	Kemendag
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i>											
059.GF Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)											
4961	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi	4961.RAI.002	BTS/ <i>Last Mile</i>	Lokasi (kumulatif)	4.200	3.704	9.586	9.586	23.557.000,0	Tersebar	Kemenkominfo
		4961.RAI.003	Penyediaan Kapasitas Satelit	Gbps	37	37	37	37	11.715.244,0	Tersebar	Kemenkominfo

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN											
INDIKATOR TPB/SDGs:											
10.1.1* Rasio Gini											
10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur											
027.DQ Program Perlindungan Sosial											
6318	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	6318.QAA.001	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Orang	163.400.000	219.900.000	277.500.000	280.000.000	419.644,0	Pusat	Kemensos
		6318.UAB.001	Layanan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	Sistem Informasi	1	1	1	1	631.678,5	Pusat	Kemensos
6284	Penyelenggaraan Program Sembako	6284.QAH.101	Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako	Layanan	2	2	2	2	25.203,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.101	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	5.513.785	5.513.785	5.513.785	5.513.785	52.596.057,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.102	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	5.238.372	5.238.372	5.238.372	5.238.372	49.941.640,4	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.103	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	4.847.877	4.847.877	4.847.877	4.847.877	46.271.796,2	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.104	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	3.612.185	3.612.185	3.612.185	3.612.185	17.338.488,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.105	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	3.928.384	3.928.384	3.928.384	3.928.384	18.856.243,2	Pusat	Kemensos

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6284.QEB.106	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	2.459.431	2.459.431	2.459.431	2.459.431	11.805.268,8	Pusat	Kemensos
6282	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	6282.QDC.101	Sumber Daya Manusia yang dikelola	Orang	40.211	40.211	40.211	40.211	4.880.699,2	Pusat	Kemensos
		6282.QEB.201	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Keluarga	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	191.493.238,1	Pusat	Kemensos
040.EA Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif											
4314	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	4314.PEA.001	Kabupaten/Kota Kreatif yang Dikembangkan	Kegiatan	3	8	12	16	35.000,0	Tahun 2021: Manado, Minahasa Utara, Lombok	Kemenparekraf
4315	Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional I	4315.PEA.002	Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Regional I yang Dikembangkan	Kegiatan	25	29	29	29	28.000,0	DSP Danau Toba dan DSP Borobudur	Kemenparekraf
4316	Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional II	4316.PEA.004	Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Regional II yang Dikembangkan	Kegiatan	6	25	25	25	21.500,0	Tahun 2021: 1. Desa Wisata Sade, Lombok Tengah 2. Desa Wisata Bilibante, Lombok Tengah 3. Desa Wisata Liang Dara, NTT 4. Desa Wisata Wae Bobo, Manggarai Barat 5. Desa Wisata Marisao, Minahasa Utara 6. Desa Wisata Pulisan, Minahasa Utara	Kemenparekraf
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.1.1.(b) Jumlah Desa Tertinggal											
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
6467	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	6467.QDC.001	Pendampingan Desa	Orang	-	35.168	35.168	35.168	6.875.500,0	Pusat	Kemendes PDDT

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6474	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	6474.UBB.001	Desa Digital yang Dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD)	Desa	200	250	250	250	130.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
6476	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	6476.UBB.001	Desa Digital yang dikembangkan melalui Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Pendamping Desa (P3PD)	Desa	9.028	9.028	9.028	9.028	360.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
6477	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi PBP-Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	6477.PBP.001	Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui <i>Smart Village</i>	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	40.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan	6468.QDD.001	Desa yang Mendapatkan Penanganan Konvergensi <i>Stunting</i>	Kelompok Masyarakat	360	360	360	360	21.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6468.QDD.006	Pranata Adat yang Ditingkatkan Perannya dalam Penanganan Konflik Sosial	Kelompok Masyarakat	20	5	5	5	8.200,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6468.QDC.004	Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana	Orang	200	100	100	100	8.791,8	Kabupaten Donggala & Kabupaten Sigi	Kemendes PDTT
		6468.QDC.006	Aparatur Pemerintah Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana	Orang	420	420	420	420	2.750,0	Kab. Bima, Kab. Rote Ndao, dan Kab. Landak	Kemendes PDTT
		6468.RAI.001	Pasar untuk Mendukung Prukades dan Kegiatan Ekonomi yang Dibangun	Unit	100	20	100	100	105.757,0	Pusat	Kemendes PDTT

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6468.RAI.002	Sarana Pelayanan Dasar yang Dibangun/ Dikembangkan/ Direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	24.581,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6468.RBN.002	Sarana dan Prasarana Wisata Desa yang Dibangun	Unit	50	50	50	50	137.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6468.RBN.005	Sarana dan Prasarana Wisata Desa yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Wisata Super Prioritas	Unit	47	47	47	47	178.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
6469	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	6469.QDD.003	Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Kelompok Masyarakat	500	500	750	750	279.028,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6469.QDH.002	Bantuan Sarana Prasarana BUM Desa Bersama Konsolidasi	Badan Usaha	23	23	23	23	27.600,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6469.QDH.003	Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana BUM Desa Bersama Berkembang	Badan Usaha	12	12	12	12	52.761,3	Pusat	Kemendes PDTT
		6469.QDH.004	Fasilitasi Pengembangan dan Pemasaran BUM Desa Bersama Maju	Badan Usaha	27	27	27	27	5.400,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6469.QEH.001	Bantuan Modal Stimulan untuk Pengembangan Usaha Ekonomi Desa yang Terintegrasi dengan BUMDes	Kelompok Masyarakat	50	50	50	50	45.250,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6469.QEI.001	Bantuan Modal Stimulan untuk Pengembangan BUMDes	Lembaga	500	500	500	500	245.627,5	Pusat	Kemendes PDTT
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
1244	Penataan Sistem Pelayanan Administrasi Desa	1244.UBB.013	Desa yang Telah Memiliki Batas Wilayah Sesuai Ketentuan	Desa	100	500	500	500	21.974,3	Pusat	Kemendagri
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan	6468.PFA.001	Sistem dan Prosedur yang Dikembangkan	NSPK	6	4	4	4	7.924,1	Pusat	Kemendagri
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/ Pengurus Kelembagaan Desa	1248.UAC.004	Pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	Orang	2.232	2.350	2.350	2.350	37.608,4	Kab. Lampung Selatan, Kab. Sleman, Kota Malang	Kemendagri

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah Desa Mandiri											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5444	Peningkatan Penyuluhan	5444.QDC.001	KTH Mandiri yang terbentuk	Kelompok Masyarakat	80	100	100	100	10,5	Pusat	Kemen LHK
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
5484	Pembangunan Sarana Prasarana Desa	5484.RBN.001	Sarana dan prasarana wisata desa yang dibangun	Unit	50	50	50	50	134.000,0	33 Provinsi	Kemendes PDTT
		5484.RBN.001	Sarana dan prasarana wisata desa yang dibangun untuk mendukung destinasi wisata super prioritas	Unit	15	15	15	15	93.750,0	DPP Danau Toba, DPP Borobudur, DPP Mandalika, DPP Labuan Bajo, DPP Likupang	Kemendes PDTT
5486	Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	5486.QEH.001	Bantuan modal stimulan untuk pengembangan usaha Ekonomi Desa yang terintegrasi dengan BUMDes	Kelompok Masyarakat	50	30	23	22	40.060,9	33 Provinsi	Kemendes PDTT
		5486.QEI.001	Bantuan modal stimulan untuk pengembangan BUMDesa	Lembaga	500	391	361	331	135.005,3	33 Provinsi	Kemendes PDTT
5490	Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan	5490.RAI.001	Pasar untuk mendukung Prukades dan kegiatan ekonomi yang dibangun	Unit	1	1	1	1	5.000,0	62 Kabupaten Kawasan Perdesaan Prioritas	Kemendes PDTT
5489	Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	5489.QDH.004	Bantuan Pengembangan Saranan Prasarana BUM Desa Bersama Berkembang	Badan Usaha	12	12	12	500	7.200,0	62 Kabupaten Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	Kemendes PDTT
		5489.QDH.005	Fasilitasi Pengembangan dan Pemasaran BUM Desa Bersama Maju	Badan Usaha	27	27	27	27	5.400,0	62 Kabupaten Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	Kemendes PDTT
INDIKATOR TPB/SDGs:											
10.1.1.(d) Jumlah daerah tertinggal											
10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal											
10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal											
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan	6468.RAG.002	Sarana Produksi dan Pasca Panen di Daerah Tertinggal Rawan Pangan yang disediakan	Unit	6	-	-	-	2.400,0	Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Mappi, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Maybrat, Kab. Tambrauw	Kemendes PDTT

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		6468.RAG.005	Gudang Pangan Lokal dan Lantai Jemur yang dibangun di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Unit	2	-	-	-	2.000,0	Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Tambrauw	Kemendes PDTT
		6648.xxx.xxx (TA 2022)	Embung dan Bangunan Air Lainnya yang dibangun di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Unit	0	6	5	6	71.870,0	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Boven Digoel, Kab. Keerom, Kab. Supiori, Kab. Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Wondama, Maybrat, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni	Kemendes PDTT
		6468.QDC.004	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pemulihan ekonomi pasca bencana	Orang	200					Kab. Donggala, Tojo Una-una, Sigi, Kab. Pesisir Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Malaka, Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Barat, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Teluk Wondama	Kemendes PDTT
		6468.QDC.006	Aparatur Pemerintah Desayang ditingkatkan kapasitasnya dalam perencanaan penanggulangan bencana	Orang	420	1642	1634	1634	41.991,8		
		6468.QDD.006	Pranata Adat Yang Ditingkatkan Perannya Dalam Penanganan Konflik Sosial	Kelompok Masyarakat	70	-	-	-	2.600,0	Kab. Lembata, Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Donggala, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Sigi, Kab. Lombok Utara, Kab. Sorong	Kemendes PDTT
		6468.RAM.001	Sarana Seni dan Budaya di Daerah Rawan Konflik di Daerah Tertinggal	Unit	8	-	-	-	700,0	Kab. Lembata, Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Donggala, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Sigi, Kab. Lombok Utara, Kab. Sorong	Kemendes PDTT
		6468.QDC.005	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa yang ditingkatkan kapasitasnya di Daerah Rawan Konflik di Daerah tertinggal	Orang	100	471	471	471	12.500,0	Kab. Sumba Barat Daya, Malaka, Belu, Manggarai, Kab. Donggala, Kab. Sorong	Kemendes PDTT

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		6468.QDC.009	Pelaku Wisata di Daerah Tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	2155	-	-	-	21.715,6	Kab. Kepulauan Aru, Kab. Lembata, Kab. Aceh Singkil, Kab. Lampung Barat, Kab. Bondowoso, Kab. Alor, Kab. Donggala, Kab. Tojo Una-una, Kab. Pulau Morotai, Kab. Jayawijaya, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Bima, Kab. Sumbawa, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Timur, Kab. Nagekeo, Kab. Ende, dan kabupaten lainnya yang mendapat pelatihan melalui forum fasilitasi secara online	Kemendes PD TT
		6468.RBN.007	Amenitas Wisata di DT yang Dibangun/Dikembangkan	Unit	15	-	-	-	12.827,6	Kab. Sumba Tengah, Kab. Teluk Wondama, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Jayawijaya, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Tambora, Kab. Nias Selatan, Kab. Lembata, Kab. Lombok Utara, Kab. Manggarai Timur	Kemendes PD TT
6470	Penyerasian Pembangunan Daerah Tertinggal	6470.RBG.002	Prasarana Air Bersih di Daerah Perbatasan yang dibangun	Unit/ KK	2 Unit	200 KK	300 KK	246 KK	30.000,0	Kab. Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Kab. Malaka, Kab. Supiori, Kab. Boven Digoel, Kab. Keerom	Kemendes PD TT
		6470.RBC.002	Jalan Strategis Desa yang Ditingkatkan di Daerah Perbatasan	Km	3	10	6	4	54.000,0	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Kab. Supiori, Kab. Boven Digoel, Kab. Keerom	Kemendes PD TT
		6470.RAG.001	Sarana pasca Panen yang disediakan di daerah perbatasan	Unit	3	-	-	-	2.424,3	Kab. Belu, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Keerom	Kemendes PD TT
		6470.RAL.001	Sarana pasca Panen yang disediakan di daerah perbatasan	Unit	1	-	-	-	675,7	Kab. Kepulauan Tanimbar	Kemendes PD TT

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	6470.QDC.009	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya di Bidang Pertanian dan Perikanan di Daerah Perbatasan	Orang	195	-	-	-	1.200,0	Kab. Belu, Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Keerom	Kemendes PD TT
	6470.RBG.003	Prasarana Air Bersih di Pulau Kecil dan Terluar yang dibangun	Unit	1	3	4	3	37.400,0	Kab. Nias Selatan (P. Simuk), Kab. Kepulauan Aru (P. Panambulai), Maluku Barat Daya (P. Lirang, P. Wetar, P. Letti, P. Marsela, P. Metimarang, P. Kisar), Kepulauan Tanimbar, Kab. Supiori (P. Bras, P. Meosbepondi), Kab. Teluk Wondama	Kemendes PD TT
	6470.QDC.011	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya di Bidang Pertanian, dan Perikanan di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Orang	150	-	-	-	1.200,0	Kab. Lembata, Kab. Nabire, Kab. Nias Selatan, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Sumba Timur, Kab. Kepulauan Sula	Kemendes PD TT
	6470.QDC.010	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya di Bidang Pariwisata di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Orang	75	-	-	-	750,0	Kab. Sabu Raijua, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Tojo Una-una	Kemendes PD TT
	6470.RBN.001	Prasarana Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata di Daerah Pulau Kecil dan Terluar yang dibangun	Unit	6	-	-	-	2.700,0	Kab. Donggala, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Sabu Raijua, Kab. Rote Ndao, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Tojo Una-una	Kemendes PD TT
	6470.RAG.002	Sarana pasca Panen yang disediakan di daerah pulau kecil dan terluar	Unit	3	-	-	-	900,0	Kab. Lembata, Kab. Nabire, Kab. Nias Selatan	Kemendes PD TT
	6470.RAL.002	Sarana pasca Panen yang disediakan di daerah pulau kecil dan terluar	Unit	3	-	-	-	900,0	Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Sumba Timur, Kab. Kepulauan Sula	Kemendes PD TT

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6470.QDC.001	Tenaga Kerja Bidang Pendidikan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	930					Kab. Lombok Utara, Kab. Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab. Pesisir Barat, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Kab. Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Kupang, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Malaka, Sumba Barat, Belu, Kab. Tojo Una-una, Donggala, Sigi, Kab. Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak, Jayawijaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai, Kab. Nabire, Kab. Supiori, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Sorong, Kab. Peg. Arfak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Sorong Selatan, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Tambrauw	Kemendes PD TT
		6470.QDC.002	Tenaga Kerja Bidang Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	950						Kemendes PD TT
		6470.QDC.003	Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	240	750	750	750	30.000,0		Kemendes PD TT
		6470.QDC.004	Tenaga Kerja BUMDes yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	160						Kemendes PD TT

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	6470.RBC.001	Jalan Desa Strategis yang dibangun/ditingkatkan di Daerah Tertinggal	Km	2,0	15,4	7,9	9,7	80.000,0	Kab. Kepulauan Aru, Buru Selatan, Kab. Lombok Utara, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Sigi, Kab. Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Mamberamo Raya, Nabire, Intan Jaya, Dogiyai, Paniai, Kab. Pegunungan Arfak, Sorong	Kemendes PDDT
	6470.RBG.001	Prasarana Air Bersih di Daerah Tertinggal yang Dibangun	Unit	1	8	9	6	55.100,0	Kab. Kupang, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Lombok Utara, Kepulauan Sula, Sigi, Tojo Una-una, Kepulauan Mentawai, Puncak, Jayawijaya, Teluk Wondama, Maybrat, Tambrau, Pegunungan Arfak Puncak Jaya, Tolikara, Yahukimo, Nduga, Yalimo, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Teluk Wondama, Maybrat, Tambrau, Pegunungan Arfak	Kemendes PDDT

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6469	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	6469.RAG.001	Prasarana Prukades di Daerah Tertinggal yang dibangun	Unit/Kab	16 Unit	13 Kab	13 Kab	12 Kab	73.050,0	Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Sigi, Donggala, Tojo Una-una, Kab. Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Lombok Utara, Kab. Malaka, Manggarai Timur, Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat, Timor Tengah Selatan, Belu, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Kab. Tolikara, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Puncak, Yalimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga, Kab. Boven Digoel, Mappi, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom, Kab. Nabire, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Kab. Sorong, Manokwari Selatan, Sorong Selatan, Maybrat, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Tambrauw	Kemendes PDPT
		6469.QDC.002	Masyarakat di Daerah Tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Nilai Tambah Prukades	Orang	100	-	-	-	1.000,0	Pusat	Kemendes PDPT
027.DQ Program Perlindungan Sosial											
6276	Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat	6276.QEB.101	Warga KAT Yang Mendapat Pemberdayaan Tahun I	Keluarga	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemensos
		6276.QEB.102	Warga KAT Yang Mendapat Pemberdayaan Tahun II	Keluarga	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemensos
		6276.QEB.103	Warga KAT Yang Mendapat Pemberdayaan Tahun III	Keluarga	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemensos

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6282	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	6282.QDC.101	Sumber Daya Manusia yang dikelola	Orang	40.211	40.211	40.211	40.211	4.880.699,2	Pusat	Kemensos
		6282.QEB.201	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Keluarga	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	191.493.238,1	Pusat	Kemensos
6284	Penyelenggaraan Program Sembako	6284.QAH.101	Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako	Layanan	2	2	2	2	25.203,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.101	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	5.513.785	5.513.785	5.513.785	5.513.785	52.596.057,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.102	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	5.238.372	5.238.372	5.238.372	5.238.372	49.941.640,4	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.103	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	4.847.877	4.847.877	4.847.877	4.847.877	46.271.796,2	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.104	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	3.612.185	3.612.185	3.612.185	3.612.185	17.338.488,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.105	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	3.928.384	3.928.384	3.928.384	3.928.384	18.856.243,2	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.106	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	2.459.431	2.459.431	2.459.431	2.459.431	11.805.268,8	Pusat	Kemensos

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
032.HB Program Pengelolaan Perikanan Tangkap											
2344	Pengelolaan Perbenihan Ikan	2344.QDD.001	Kelompok Masyarakat di SKPT Rote Ndao yang difasilitasi dan dibina	Kelompok Masyarakat	75	75	75	75	2.750,0	Rote Ndao	KKP
		2344.RDQ.001	OM Prasarana SKPT Rote Ndao yang sudah dibangun	Unit	1	1	1	1	1.000,0	Rote Ndao	KKP
		2344.QEG.003	Bibit Rumput Laut yang didistribusikan ke masyarakat (SBK)	Unit	200.000	250.000	275.000	300.000	32.200,0	Jatim, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Sulsel	KKP
2346	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	2346.QDD.001	Kelompok Masyarakat di SKPT Sumba Timur yang difasilitasi dan dibina	Kelompok Masyarakat	75	75	75	75	2.000,0	Sumba Timur	KKP
2360	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	2360.QDB.002	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak Numfor yang mandiri	Lembaga	1	1	1	1	19.750,0	Biak Numfor	KKP
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	2362.QDD.001	Kelompok Masyarakat di SKPT Kepulauan Mentawai yang diberikan fasilitasi dan pembinaan	Kelompok Masyarakat	10	10	10	10	4.076,4	Kab. Kepulauan Mentawai	KKP
		2362.RDQ.001	OM Prasarana SKPT Kepulauan Mentawai	Unit	12	12	12	12	4.992,7	Kab. Kepulauan Mentawai	KKP
2366	Perencanaan Ruang Laut	2366.RDQ.001	OM Prasarana SKPT Maluku Barat Daya	Unit	12	12	12	12	5.309,2	Kab. Maluku Barat Daya	KKP
		2366.RBQ.001	Prasarana di SKPT Maluku Barat Daya	Unit	1	1	1	1	2.306,6	Kab. Maluku Barat Daya	KKP
033.WA Program Dukungan Manajemen											
5592	Pengembangan Infrastruktur Wilayah	5592.PBP.005	Rencana Induk Pengembangan dan PJM Daerah Tertinggal Musi Rawas Utara dan Pesisir Barat di 2 Provinsi (Sumsel dan Lampung)	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	11.000,0	Pusat	Kemen PUPR
		5592.PBP.024	Rencana Induk Pengembangan dan PJM Wilayah Adat Laa Pago	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	26.600,0	Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5592.PBP.007	Rencana Induk Pengembangan dan PJM Kawasan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	15.000,0	Pusat	Kemen PUPR
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5036	Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi	5036.RBS.004	Daerah irigasi Bubi yang dibangun - Provinsi Maluku	Km	12	12	12	12	271.173,0	Provinsi Maluku	Kemen PUPR
		5036.RBS.007	Daerah irigasi Gumbasa (EARR dan IRSL) yang direhabilitasi - Provinsi Sulawesi Tengah	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		5036.RBS.032	Daerah irigasi Wae Dingin (IPDMIP) yang direhabilitasi - Provinsi Nusa Tenggara Timur	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
5039	Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	5039.RBG.007	Bendungan Mbay yang dibangun - Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		5039.RBG.008	Bendungan Welikis yang dibangun - Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		5039.RBG.045	Bendungan Manikin yang dibangun - Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		5039.RBG.047	Bendungan Temef yang dibangun - Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	4978.RBB.010	Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Unit	-	-	-	-	31.229,00	34 Provinsi	Kemen PUPR
		4978.RBB.008	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	115.230	101.000	108.000	129.601	16.867.991,00	34 Provinsi	Kemen PUPR
		4978.RBB.002	Pembangunan Rumah khusus	Unit	3.354	2.461	1.310	1.300	2.769.730,00	34 Provinsi	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
4840	Penyelenggaraan Sanitasi Yang Layak	4840.RBB.001	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Regional	KK	42.000	52.000	52.000	22.000	10.128.301,0	28 Kab/Kota	Kemen PUPR
		4840.RBB.002	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota								Kemen PUPR
		4840.RBB.003	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	KK	26.000	32.000	32.000	32.000	3.719.612,0	PM	Kemen PUPR
		4840.RBB.010	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat	KK	19.000	19.000	19.000	19.000	629.000,0	168 Kab/Kota	Kemen PUPR
		4840.RBB.002	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota	KK	263.000	323.000	323.000	323.000	1.746.444,0	374 kab/kota	Kemen PUPR
		4840.RBB.011	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	KK	21.800	21.800	21.800	21.800	806.500,0	100 Kab/Kota	Kemen PUPR
4973	Penyelenggaraan Air Minum Yang Layak	4973.RBB.001	Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	Liter per detik	4.600	1.530	1.530	0	16.082.500,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.RBB.002	Pembangunan SPAM Regional							7 wilayah pelayanan SPAM Regional Prioritas	Kemen PUPR
		4973.RBB.003	Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota	Liter per detik	375	375	375	0	1.438.800,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.RBB.004	Peningkatan SPAM Regional							Kabupaten/ Kota terlayani SPAM Regional	Kemen PUPR
		4973.RBB.005	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	SR	192.000	192.000	192.000	192.000	6.000.000,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.RBB.006	Perluasan SPAM Regional							Kabupaten/ Kota terlayani SPAM Regional	Kemen PUPR
		4973.RBB.007	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	SR	400.000	400.000	400.000	400.000	6.000.000,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024					
033.GA Program Infrastruktur Konektivitas											
2409	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	2409.RBC.008	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - JALAN TRANS PULAU BURU(NAMROLE - LEKSULA)	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR	
			Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - DOBO (BBM) - DERMAGA	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
			Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - PIRU - WAISALA	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
			Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - ILWAKI - LURANG	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
			Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SIWAHAN - ARMA	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
			Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - LARAT - LAMDESAR TIMUR	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
			Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - PIRU - SP. ETI	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
			2409.RBC.004	Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN MAMBERAMO - ELELIMI	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
		Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong(MP)- JALAN MAMBERAMO - ELELIM II		Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
		Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN SINAK - ILAGA V	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN PERBATASAN OKSIBIL - TOWE HITAM	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ALIH TRASE GUNUNG PASIR	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN WANGGAR-KWATISORE-KAMP. MURI (BTS. PROV. PAPUA BARAT)	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN RUAS ENAROTALI - SUGAPA (DANAU ENAROTALI)	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN WAGETE - TIMIKA	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN UBRUB - TOWE HITAM - OKSIBIL	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
	2409.RBF.007	Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - JEMBATAN WAI NALBESSY II DAN WAI WAI NALBESSY III - JALAN TRANS PULAU BURU (NAMROLE - LEKSULA)	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2021	2022	2023	2024				
			Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - JEMBATAN WAI ANGGUMELA, CS	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR	
			Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - JEMBATAN WAI ARKAY, CS	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR	
022.GA Program Infrastruktur Konektivitas												
1960	Pelayanan Transportasi Udara	1960.QAH.006	Jembatan Udara di Papua	Layanan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
4654	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	4654.RBE.002	Pembangunan Bandar Udara Baru Mentawai	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
		4654.RBE.012	Pengembangan Bandar Udara Wamena	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
		4654.RBE.013	Pengembangan Bandara Illaga	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
		4654.RBE.051	Pengembangan Bandara Dekai (Nop Goliat Dekai)	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
		4654.RBE.052	Pengembangan Bandara Oksibil	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
		4654.RBE.074	Pengembangan Bandara Sinak	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
		4654.RBE.070	Pengembangan Bandara Kiwirok	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
		4654.RBE.082	Pengembangan Bandara Elelim	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
		4654.RBE.077	Pengembangan Bandara Bilorai	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
		4654.RBE.007	Pembangunan Bandara Sobaham	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.017	Pengembangan Bandara Inanwatan	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.028	Pengembangan Bandara Anggi	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
		4654.RBE.029	Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.049	Pengembangan Bandara Raja Ampat	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.050	Pengembangan Bandara Babo	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.069	Pengembangan Bandara Kambuaya	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.073	Pengembangan Bandara Rendani	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.010	Pembangunan Bandara Nabire Baru	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.035	Pengembangan Bandara Timika	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.053	Pengembangan Bandara Numfor	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.018	Pengembangan Bandara Lapter Towe Hitam	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.014	Pengembangan Bandara Tanah Merah	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.019	Pengembangan Bandara Kimaam	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.030	Pengembangan Bandar Udara Ewer	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.031	Pengembangan Bandar Udara Kepi	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.076	Pengembangan Bandara Mopah	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.078	Pengembangan Bandara Kamur	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.071	Pengembangan Bandara Mindiptana	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
4660	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	4660.RBD.003	Pengembangan Pelabuhan Seba - Kab. Sabu Raijua	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4660.RBD.008	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Arwala - Kab. Maluku Barat Daya	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
1283	Pembinaan inovasi daerah	1283.UBA.003	Penerapan pilot project inovasi daerah bersifat tematik untuk mendukung iklim inovasi di daerah 3T	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3	PM	PM	PM	102,3	PM	Kemendagri
023.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
5626	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	5626.QEK.507	Siswa Penerima Afiriasi Pendidikan Menengah (ADEM)	Orang	2.895	2.895	2.895	2.895	104.361,2	Pusat	Kemendikbud Ristek
023.DK Program Pendidikan Tinggi											
4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	4469.QEJ.018	Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	orang	7.382	8.417	8.417	8.417	684.577,4	Pusat dan daerah	Kemendikbud Ristek
020.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan											
6353	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6353.QEG.001	PLTS Atap	MW	35,88 (APBN: 10)	38,53 (APBN: 10)	47,37 (APBN: 10)	51,78 (APBN: 10)	1.203,2	Tersebar	Kemen ESDM
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6071	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	6071.BDI.010	Wirasaha Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Industri	550	550	550	550	117.856,20	Pusat dan Daerah	Kemenperin
		6071.BDI.015	Wirasaha Industri Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Industri	550	550	550	550	117.730,70	Pusat dan Daerah	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6071.BDI.021	Wirausaha Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi serta Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Industri	550	550	550	550	117.019,40	Pusat dan Daerah	Kemenperin
040.EA Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif											
4314	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	4314.PEA.001	Kabupaten/Kota Kreatif yang Dikembangkan	Kegiatan	3	8	12	16	35.000,0	Tahun 2021 : Jateng, Bali, Kaltim (Kegiatan ini berbasis proposal)	Kemenparekraf
4315	Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional I	4315.PEA.002	Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Regional I yang Dikembangkan	Kegiatan	29	29	29	29	31.790,0	Pusat dan Daerah	Kemenparekraf
4316	Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional II	4316.PEA.004	Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Regional II yang Dikembangkan	Kegiatan	25	25	25	25	25.000,0	Pusat dan Daerah	Kemenparekraf
044.EB Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi											
4455	Peningkatan Kompetensi SDM dan Perluasan Akses Pembiayaan Wirausaha	4455.QDC.001	Wirausaha Pemula yang mendapatkan Bantuan	Orang	1.500	1.500	1.500	1.500	120.000,0	Pusat (tidak sepenuhnya dialokasikan untuk daerah tertinggal)	Kemen KUKM
2757	Penumbuhan Wirausaha	2757.SCF.001	Peserta Pelatihan Kewirausahaan	Orang	5.000	5.000	5.000	5.000	68.000,0	Pusat (tidak sepenuhnya dialokasikan untuk daerah tertinggal)	Kemen KUKM
4445	Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro	4445.QDG.001	Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan	UMKM	3.250	3.250	3.250	3.250	83.600,0	Pusat (tidak sepenuhnya dialokasikan untuk daerah tertinggal)	Kemen KUKM
4451	Penguatan Pengelolaan dan Perlindungan Usaha Mikro	4451.QEE.001	Bantuan Permodalan bagi Usaha Mikro yang Terdampak Bencana	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	14.000,0	Pusat (tidak sepenuhnya dialokasikan untuk daerah tertinggal)	Kemen KUKM
059.GF Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)											
4961	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi	4961.RAI.004	Akses Internet	Lokasi (Kumulatif)	15.532	37.532	77.532	117.532	8.968.840,0	Tersebar	Kemenkominfo

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.3.1 Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia											
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5680	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	5680.BKA.005	Pengamatan situasi terhadap pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan HAM	Laporan	4	4	4	4	4.465,0	Pusat	Komnas HAM
		5680.QKA.006	Pengamatan Situasi atas Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Hak Sipil dan Politik Masyarakat Papua	Laporan	1	1	1	1	2.500,0	Daerah	Komnas HAM
5681	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	5681.ABD.007	Rekomendasi umum komnas perempuan terkait penghapusan KtP yang ditindaklanjuti pemerintah, APH dan pengambil kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	5.815,0	Pusat	Komnas Perempuan
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.3.1.(a) Indeks Kebebasan											
076.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi											
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.xxx.xxx (TA 2022)	Jumlah KPU melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Satker	0	549	549	549	21.300,0	Pusat dan Daerah	KPU
		3364.xxx.xxx (TA 2022)	Jumlah KPU melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	Satker	0	549	549	549	63.800,0	Pusat dan Daerah	KPU
115.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi											
4358	Fasilitasi Pengawasan	4358.QDC.001	Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Lembaga	248	348	448	549	63.800,0	Pusat dan Daerah	Bawaslu

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.3.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)										
013.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM										
1607 Pelayanan Komunikasi Masyarakat	1607.ABD.001	Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	Rekomendasi Kebijakan	260	260	260	260	4.300,0	Pusat	Kemenum HAM
	1607.ABD.002	Rekomendasi Pemulihan Korban Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat secara Non Yudisial	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	13.330,0	Pusat	Kemenum HAM
5255 Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	5255.ABD.002	Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	Rekomendasi Kebijakan	33	33	33	33	6.120,0	Daerah	Kemenum HAM
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM										
5680 Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	5680.BCC.001	Pelayanan pengaduan perkara dugaan pelanggaran HAM	Perkara	3.360	3.360	3.360	3.360	6.210,0	Pusat	Komnas HAM
	5680.BCC.003	Penanganan perkara pelanggaran HAM	Perkara	864	864	864	864	9.255,0	Pusat	Komnas HAM
	5680.BCC.004	Mediasi perkara pelanggaran HAM	Perkara	100	100	100	100	9.255,0	Pusat	Komnas HAM
	5680.BCC.007	Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat	Perkara	1	1	1	1	1.885,0	Pusat	Komnas HAM
	5680.PBD.008	Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban	Rekomendasi Kebijakan	450	450	450	450	10.500,0	Pusat	Komnas HAM
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan										
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM										
5681 Pencegahan dan penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	5681.ABD.001	Perangkat standar pencapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	6.250,0	Pusat	Komnas Perempuan
	5681.ABD.003	Rekomendasi Mekanisme Penanganan dan Pencegahan Konflik terhadap Perempuan di Aceh dan Maluku (Centre of Peace)	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	500,0	Daerah	Komnas Perempuan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5681.ABD.006	Rekomendasi penguatan mekanisme keadilan restoratif bagi perempuan korban pelanggaran HAM	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	4.000,0	Pusat	Komnas Perempuan
		5681.PBD.009	Konsep standar pengaturan untuk perlindungan dan pemutakhiran pengetahuan dan data tentang Perempuan Pembela HAM	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	4.500,0	Pusat	Komnas Perempuan
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional											
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5679	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	5679.PFA.001	Standar Norma dan Pengaturan HAM	NSPK	4	4	4	4	12.000,0	Pusat	Komnas HAM
5681	Pencegahan dan penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	5681.PBD.004	Rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Kebijakan	10	10	10	10	9.000,0	Pusat	Komnas Perempuan
		5681.PBD.005	Kebijakan/regulasi Pemerintah Daerah yang mengadopsi SPPT-PKKTP, baik berupa muatan program, anggaran atau mekanisme kerja	Rekomendasi Kebijakan	6	6	6	6	12.500,0	Pusat	Komnas Perempuan
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.4.1 Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.4.1.(a) Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat											
015.CE Program Kebijakan Fiskal											
4766	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	4778.FAD.001	Nota Keuangan APBN/P	Dokumen	1	1	1	1	5.311,1	Pusat	Kemenkeu

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan											
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
2200	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2200.QIH.001	Perusahaan yang menerapkan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja	Badan Usaha	5.782	-	-	-	13.409,0	34 provinsi	Kemeneraker
5586	Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5586.BDH.001	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Edukasi Program Jaminan Sosial	Badan Usaha	66	-	-	-	395,0	34 provinsi	Kemeneraker
		5586.ABK.001	Desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran, dan kepesertaan program jaminan sosial	Rekomendasi Kebijakan	3	-	-	-	756,0	Pusat	Kemeneraker
6619	Peningkatan Pendidikan Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial	6619.ABK.001	Desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran dan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja	Rekomendasi Kebijakan	-	3	3	3	5.857,0	Pusat	Kemeneraker
		6619.BDC.007	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Edukasi Program Jaminan Sosial	Orang	-	1.000	1.500	2.000	10.500,0	34 provinsi	Kemeneraker
INDIKATOR TPB/SDGs:											
10.5.1* Financial Soundness Indicator											
10.5.1.(a) Indikator Kesehatan Perbankan											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.6.1 Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.7.1 Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs:											
10.7.2 Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik											
10.7.2.(a) Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan											
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
2174	Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	2174.AEC.001	Kesepakatan Kerjasama Pelindungan dan Penempatan PMI	Kesepakatan	10	-	-	-	3.782,0	Pusat	Kemenaker
		2174.AEC.001	Nota Kerjasama bilateral penempatan dan perlindungan PMI	Kesepakatan	-	10	11	12	19.700,0	Pusat	Kemenaker
011.AL Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik											
6028	Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI Pusat	6028.QAA.001	Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Orang	23.862	23.862	23.862	23.862	261.333,1	Pusat	Kemenlu
		6028.BAH.003	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayan Publik di Bidang Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	Layanan	2	2	2	2	860,0	Pusat	Kemenlu
4439	Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI Perwakilan RI	4439.QAA.001	Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Orang	112.090	112.090	112.090	112.090	699.992,2	Perwakilan RI	Kemenlu
011.AM Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional											
6030	Optimalisasi Diplomasi Hukum dan Perjanjian Internasional	6030.AEC.003	Kesepakatan Hukum dan Perjanjian di Bidang Sosial dan Budaya	Kesepakatan	34	35	36	37	6.117,5	Pusat	Kemenlu
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.7.2.(b) Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi											
104.DP Program Penempatan dan Pelindungan PMI											
3894	Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	3894.QAA.002	Pelayanan Penempatan PMI oleh pemerintah	Orang	7.500	8.000	9.000	10.000	11.395,8	Pusat, Aceh, Bandung, Bajarbaru, Denpasar, Jakarta, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Manado, Mataram, Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Surabaya, Tanjung Pinang, Yogyakarta	BP2MI

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		3894.QAA.003	Pelayanan Penempatan PMI oleh non pemerintah	Orang	292.500	300.000	341.000	423.629	212.604,2	Pusat, Aceh, Bandung, Bajarbaru, Denpasar, Jakarta, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Manado, Mataram, Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Surabaya, Tanjung Pinang, Yogyakarta	BP2MI
		3894.QAA.004	Pelayanan Perlindungan terhadap PMI	Orang	17.000	15.000	13.000	10.500	175.000,0	Pusat, Aceh, Bandung, Bajarbaru, Denpasar, Jakarta, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Manado, Mataram, Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Surabaya, Tanjung Pinang, Yogyakarta	BP2MI
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.7.3 Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.7.4 Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.a.1 Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.b.1 Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain)											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN											
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau											
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	4978.RBB.010	Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Unit	0	-	-	-	0,0	Pusat	Kemen PUPR
			Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Unit	-	3.000	4.500	4.500	1.125.000,0	34 Provinsi	Kemen PUPR
		4978.RBB.001	PSU Rumah Umum	Unit	40.000	-	-	-	288.812,3	Pusat	Kemen PUPR
			Pembangunan PSU Perumahan Bagi MBR	Unit	-	20.500	-	-	169.500,0	34 Provinsi	Kemen PUPR
			Pembangunan PSU Perumahan	Unit	-	-	71.950	71.955	3.905.000,0	34 Provinsi	Kemen PUPR
		4978.RBB.007	Bantuan Perumahan Swadaya Sejahtera	Unit	-	-	PM	PM	PM	Pusat	Kemen PUPR
		4978.RBB.008	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	114.000	-	-	-	2.315.715,0	Pusat	Kemen PUPR
		4978.RBB.009	Bantuan Perumahan Swadaya Usaha	Unit	900	-	-	-	51.500,0	Pusat	Kemen PUPR
			Bantuan Perumahan Swadaya Usaha (PEN)	Unit	-	0	-	-	0,0	Pusat	Kemen PUPR
		4978.RBB.004	Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja	Unit	1.134	-	-	-	1.165.002,3	Pusat	Kemen PUPR
			Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja	Unit	-	1.601	-	-	785.509,3	Pusat	Kemen PUPR
		4978.RBB.010	Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja (PEN)	Unit	-	29	-	-	184.709,5	Kab. Batang	Kemen PUPR
		4978.RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI	Unit	2.831	-	-	-	1.371.063,2	Pusat	Kemen PUPR
			Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI	Unit	-	178	-	-	117.950,0	Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4978.RBB.002	Rumah Khusus	Unit	2.423	-	-	-	548.443,9	Pusat	Kemen PUPR
			Rumah Khusus	Unit	-	2.481	-	-	368.840,2	Pusat	Kemen PUPR
		4978.RBB.011	Rumah Khusus (PEN)	Unit	-	0	-	-	0,0	Pusat	Kemen PUPR
		4978.CBB.005	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi	Unit	2.278	-	-	-	861.865,3	Pusat	Kemen PUPR
			Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi				0	-	-	0,0	Pusat
		4978.CBB.006	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	Unit	2.040				443.744,6	Pusat	Kemen PUPR
			Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan				21	-	-	4.687,0	Kab. Bangka
INDIKATOR TPB/SDGs:											
11.2.1.(a) Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik											
11.2.1.(b) Persentase penduduk terlayani transportasi umum											
022.GA Program Infrastruktur Konektivitas											
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	4637.QAH.004	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan (Prioritas Nasional)	Layanan	10	12	15	21	500.000,0 (TA 2021)	Pusat	Kemenhub
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	4639.RAC.053	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	Unit	33	33	33	33	776.400,0 (TA 2021)	Pusat	Kemenhub
4641	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	4641.QAH.007	Subsidi Perintis LRT Sumatera Selatan	Layanan	1	-	-	-	114.063,5	Sumatera Selatan	Kemenhub
		4641.RBA.010	Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong - Cicalengka Tahap 1 Segmen Gedebage - Haurpugur	Panjang jalur yang dibangun (km)	13,09	4,53	-	-	389.725,0 (TA 2021)	Jawa Barat	Kemenhub
		4641.RBA.011	Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor - Sukabumi	Km	26,6	-	-	-	439.769,1	Kabupaten Sukabumi	Kemenhub
		4641.RBA.012	Pembangunan Jalur Ganda KA Mojokerto - Sepanjang	Km	33	-	-	-	246.157,8	Kabupaten Mojokerto	Kemenhub
		4641.RBA.013	Peningkatan Jalur KA Lintas Araskabu - Siantar	Km	35	-	-	-	64.000,0	Sumatera Utara	Kemenhub
		4641.RBA.014	Peningkatan Jalur KA R42 Lintas Lahat - Lubuklinggau Segmen Bungamas - Lubuklinggau	Km	44,73	44,53	-	-	246.783,8 (TA 2021)	Lubuk Linggau	Kemenhub

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		4641.RBA.015	Peningkatan Jalur KA antara Serang - Merak Lintas Rangkasbitung - Merak	Km	34,13	-	-	-	160.000,0	Kabupaten Serang	Kemenhub
		4641.RBA.016	Peningkatan Jalur KA Lintas Bandung - Banjar	Km	52	-	-	-	25.834,4	Jawa Barat	Kemenhub
		4641.RBA.017	Peningkatan Jalur KA Lintas Banjar - Kroya	Km	28,75	-	-	-	24.000,0	Jawa Tengah	Kemenhub
		4641.RBA.018	Peningkatan Jalur KA Lintas Padang-Pariaman	Km	20,06	16,35	-	-	153.972,5 (TA 2021)	Kabupaten Padang Pariaman	Kemenhub
		4641.RBA.019	Penggantian Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Stasiun Cikarang - Stasiun Cikampek	Km	40,72	-	-	-	230.550,0	DKI Jakarta	Kemenhub
		4641.RBA.021	Penggantian Sistem Persinyalan Stasiun Yogyakarta - Stasiun Lempuyangan	Km	0,65	0,66	-	-	57.000,0 (TA 2021)	DIY	Kemenhub
		4641.RBA.022	Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakarta Kota	Km	25,5	25,5	-	-	518.300,0 (TA 2021)	Pusat	Kemenhub
		4641.RBA.023	Elektrifikasi JalurKALintasSolo Balapan - Solo Jebres	Km	3,5	-	-	-	152.125,0	Kota Surakarta	Kemenhub
		4641.RBA.035	Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I	Km	1	-	-	-	1.000,0	DKI Jakarta	Kemenhub
4643	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	4643.RBA.001	Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan Light Rail Transit Provinsi Sumatera Selatan termasuk supervisi	Km	46,8	-	-	-	2.515.001,7	Kota Palembang	Kemenhub
		4643.RBA.002	Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara) (Tahap II)	Km	4	-	-	-	334.086,4	DKI Jakarta	Kemenhub
		4643.RBA.006	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Bekasi s/d Cikarang	Km	3,8	-	-	-	170.000,0	DKI Jakarta	Kemenhub
		4643.PBF.001	Engineering ServicesFor Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I (PHLN)	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-	89.505,2	Pusat	Kemenhub

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2021	2022	2023	2024				
		4643.RBA.001	Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan Light Rail Transit Provinsi Sumatera Selatan termasuk supervisi	Km	46,8	-	-	-	2.515.001,6	Kota Palembang	Kemenhub	
4648	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Jabodetabek	4648.RBA.001	Elevated Loopline Provinsi DKI Jakarta	PM	PM	PM	PM	PM	PM	DKI Jakarta	Kemenhub	
		4648.RBA.002	Elevated Loopline Provinsi Jawa Barat	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Jawa Barat	Kemenhub	
		4648.RBA.003	Elevated Loopline Provinsi Banten	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Banten	Kemenhub	
		4648.RBL.001	Inland Waterways Cikarang Bekasi Laut	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Jawa Barat	Kemenhub
		4648.RBL.002	Sistem Logistik Perkotaan Jabodetabek Provinsi DKI Jakarta	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Jakarta	Kemenhub
		4648.RBL.003	Sistem Logistik Perkotaan Jabodetabek Provinsi Jawa Barat	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Jawa Barat	Kemenhub
		4648.RBL.004	Sistem Logistik Perkotaan Jabodetabek Provinsi Banten	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Banten	Kemenhub
		4648.RBP.001	Fasilitas Integrasi Simpul Transportasi Provinsi DKI Jakarta	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Jakarta	Kemenhub
		4648.RBP.002	Fasilitas Integrasi Simpul Transportasi Provinsi Jawa Barat	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Jawa Barat	Kemenhub
		4648.RBP.003	Fasilitas Integrasi Simpul Transportasi Provinsi Banten	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Banten	Kemenhub
4649	Pelayanan Transportasi Jabodetabek	4649.RAC.001	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan/ Integrated Land Transport System Provinsi DKI Jakarta	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	DKI Jakarta	Kemenhub	
		4649.RAC.002	Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek	Unit	1	-	-	-	15.372,0	Banten	Kemenhub	
		4649.RAC.003	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan/ Integrated Land Transport System Provinsi Jawa Barat	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Jawa Barat	Kemenhub	

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4649.RAC.004	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan/ Integrated Land Transport System Provinsi Banten	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Banten	Kemenhub
		4649.RAC.005	Sistem BRT Feeder Transportasi Umum Provinsi DKI Jakarta	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	DKI Jakarta	Kemenhub
		4649.RAC.006	Sistem BRT Feeder Transportasi Umum Provinsi Jawa Barat	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Jawa Barat	Kemenhub
		4649.RAC.007	Sistem BRT Feeder Transportasi Umum Provinsi Banten	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Banten	Kemenhub
		4649.RAC.008	Sistem Pengendalian Lalu Lintas Modern (Termasuk ERP) Jabodetabek Provinsi DKI Jakarta	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	DKI Jakarta	Kemenhub
		4649.RAC.009	Sistem Pengendalian Lalu Lintas Modern (Termasuk ERP) Jabodetabek Provinsi Jawa Barat	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Jawa Barat	Kemenhub
		4649.RAC.010	Sistem Pengendalian Lalu Lintas Modern (Termasuk ERP) Jabodetabek Provinsi Banten	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Banten	Kemenhub
		4649.RBP.001	Terminal Tipe A Jatijajar	Jumlah Terminal Type A yang di bangun (terminal)	PM	PM	PM	PM	14.107,0	Jawa barat	Kemenhub
		4649.RBP.002	Terminal Tipe A Pondok Cabe	Jumlah Terminal Type A yang di kembangkan (terminal)	PM	PM	PM	PM	48.120,0	Banten	Kemenhub
4650	Keselamatan Transportasi Jabodetabek	4650.RAC.001	Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan Provinsi DKI Jakarta	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	DKI Jakarta	Kemenhub
		4650.RAC.002	Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan Provinsi Jawa Barat	Unit	6	-	-	-	PM	Jawa Barat	Kemenhub

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4650.RAC.003	Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan Provinsi Banten	Unit	3	-	-	-	PM	Banten	Kemenhub
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.3.1.(a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	5433.PCD.002	SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	Hektar	600	600	600	600	261.743,0	Pusat	Kemen LHK
		5433.QAH.001	Penyiapan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan	Layanan	1	1	1	-	6.000,0	Kalimantan Timur	Kemen LHK
		5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	169.698,0	Pusat	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.4.1.(a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5421	Pengelolaan Kawasan Konservasi	5421.PBV.006	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya (6 Taman Nasional Situs Warisan Dunia)	Rekomendasi Kebijakan	6	6	6	6	11.964,0	TN Ujung Kulon, TN Gunung Leuser, TN Sembilang, TN Komodo, TN Kerinci Seblat, TN Lorentz	Kemen LHK
040.EA Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif											
4314	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	4314.RBN.003	Ruang dan Sarana Kreatif untuk Cultural Heritage Regeneration	Unit	1	2	3	4	20.918,1	Semarang (TA 2021)	Kemenparekraf
4324	Pemasaran Pariwisata Regional I (Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania)	4324.PEH.001	Pameran Wisata Destinasi Prioritas untuk Wilayah Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania	Promosi	1	1	1	1	111.284,5	Pusat	Kemenparekraf
4325	Pemasaran Pariwisata Regional II (Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Tengah)	4325.PEH.001	Pameran Wisata Destinasi Prioritas Di Regional II (Pasar Asia Timur, Selatan dan Tengah)	Promosi	1	1	1	1	40.802,5	Pusat	Kemenparekraf
4326	Pemasaran Pariwisata Regional III (Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika)	4326.PEH.001	Pameran Wisata Destinasi Prioritas Di Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika	Promosi	1	1	1	1	194.538,7	Pusat	Kemenparekraf

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
023.DH Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan											
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	4275.QMA.001	Warisan Budaya yang Ditetapkan	Unit	227	409	409	409	34.640,0	34 provinsi	Kemendikbud Ristek
		4275.RBN.003	Museum yang Dibangun	Unit	4	0	0	0	55.000,0	Museum PDRI Sumbar, Museum NatunaKep. Riau, Museum Maritim Kep. Babel, Museum Samudera Pasai Aceh	Kemendikbud Ristek
		4275.RDN.002	Warisan Budaya yang Dilindungi	Unit	51	26	51	51	117.005,4	34 provinsi	Kemendikbud Ristek
5178	Pengelolaan Permuseuman	5178.RDN.001	Koleksi Museum yang Dikelola	Unit	57.351	48.318	57.351	57.351	26.325,9	DKI Jakarta (Museum Munasprok, Museum Basuki Abdullah, Museum Nasional, Museum Kitnas, Museum Sumpah Pemuda), DIYogyakarta (Museum Benteng Vredeburg), Jawa Barat (Museum Kepresidenan RI Balai Kirti)	Kemendikbud Ristek
5179	Pelestarian Nilai Budaya	5179.QMA.003	Karya Budaya yang Dilestarikan	Unit	1.294	770	1.294	1.294	36.484,5	34 provinsi	Kemendikbud Ristek
5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	5181.RDN.015	Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	3.785	3.900	3.785	3.785	509.531,8	34 provinsi	Kemendikbud Ristek
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4971	Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung	4971.CBN.001	Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya dan Istana	Unit	3	-	-	-	114.369,6	Pusat	Kemen PUPR
			Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya dan Istana	Unit	-	0	-	-	PM	Pusat	Kemen PUPR
		4971.CBN.003	Penataan Bangunan Kawasan Cagar Budaya dan Permukiman Tradisional	Unit	7	-	-	-	224.228,2	Pusat	Kemen PUPR
			Penataan Bangunan Kawasan Cagar Budaya dan Permukiman Tradisional	Unit	-	4	-	-	37.473,1	Kab. Rembang, Kota Semarang, Kab. Ngawi, Kab. Barito Kuala	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang											
103.FA Program Ketahanan Bencana											
4285	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang dukungan infrastruktur darurat	4285.UAC.001	Pengelola infrastruktur darurat	Personil	100	100	100	100	6.100,0	34 provinsi	BNPB
4287	Layanan pusat pengendalian operasi	4287.UAC.001	Pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan	Personil	105	105	105	105	8.200,0	Pusat	BNPB
3891	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang dukungan sumber daya darurat	3891.QEE.003	Pengelolaan dana bantuan kedaruratan	Kegiatan	10	10	10	10	1.056.400,0	34 provinsi	BNPB
4286	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi	4286.UAC.002	Pendamping penanganan korban dan pengungsi	Orang	570	570	570	570	56.000,0	34 provinsi	BNPB
024.WA Program Dukungan Manajemen											
2044	Pengelolaan Krisis Kesehatan	2044.QHC.001	Mobilisasi Tenaga Penanggulangan Krisis Kesehatan	Operasi	35	35	35	35	19.798,0	Kabupaten/ Kota terdampak bencana dan DTPK	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.5.2.(a) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB											
103.FA Program Ketahanan Bencana											
4288	Pengelolaan Logistik dan Peralatan PB	4288.QEE.001	Pemenuhan kebutuhan logistik PB	Kab/Kota	33	33	33	33	89.341,1	33 Provinsi	BNPB
		4288.QEG.001	Bantuan Peralatan/Sarana	Kab/Kota	103	102	101	101	186.462,8	514 Kab/Kota	BNPB
4289	Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan PB	4289.QEE.001	Distribusi Logistik dan Peralatan PB	Paket	5	5	5	5	52.200,0	33 Provinsi	BNPB
INDIKATOR TPB/SDGs:											
11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya											
11.6.1.(b) Persentase sampah nasional yang terkelola											
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4840	Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	4840.RBB.006	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional	KK	50.000	40.917	-	-	PM	Pusat	Kemen PUPR
			Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional	Unit	-	-	2	-	PM	Pusat	Kemen PUPR
		4840.RBB.007	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	KK	1.137.407	-	-	-	PM	Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024					
			Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	KK	-	10.005	-	-	PM	Pusat	Kemen PUPR
	4840.RBB.008		Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	KK	16.250	-	-	-	PM	Pusat	Kemen PUPR
			Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	KK	-	1.001	-	-	PM	Pusat	Kemen PUPR
	4840.RBB.009		Sistem Pengelolaan Persampahan Menjadi Sumber Energi Terbarukan	KK	22.022	-	-	-	PM	Pusat	Kemen PUPR
			Sistem Pengelolaan Persampahan Menjadi Sumber Energi Terbarukan	KK	-	10.001	-	-	PM	Pusat	Kemen PUPR
	4840.RBB.013		Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	KK	-	21.200	-	-	PM	Pusat	Kemen PUPR
			Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Unit	-	-	565	565	691.000,0	120 kab/kota	Kemen PUPR
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
5456	Pengelolaan Sampah	5456.BDG.001	Pembinaan dan Fasilitas Bank Sampah	UMKM	150	1.500	1.500	1.500	67.840,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.BDH.001	Fasilitas penerapan EPR untuk pengurangan sampah	Badan Usaha	15	30	30	30	7.709,6	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.FBA.001	Fasilitas dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target pengurangan Jakstrada	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	35	80	80	80	36.717,2	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.FBA.002	Fasilitas dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target penanganan Jakstrada	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	35	80	80	80	65.488,4	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.FBA.003	Penilaian Kinerja Daerah dalam Pengelolaan Sampah Melalui ADIPURA	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	310	320	330	350	148.386,7	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.RAG.001	Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas	Unit	7	7	7	7	80.000,0	Tersebar (34 Provinsi)	Kemen LHK
		5456.RAG.002	Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional	Unit	5	20	20	20	180.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5456.RAG.003	Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di DAS Citarum	Unit	4	6	6	6	29.325,0	34 Provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs:											
11.6.2.(a) Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10											
11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara											
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6033	Pemantauan Kualitas Lingkungan	6033.QMA.001	Data dan Informasi Kualitas Udara Manual	Layanan	500	500	500	500	159,9	34 Provinsi	Kemen LHK
		6033.RAG.002	Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	Unit	12	27	30	35	249.100,0	Tersebar	Kemen LHK
6034	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	6034.QDI.001	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara	Industri	2.625	3.000	3.375	3.750	20,5	34 provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.7.1.(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5407	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	5407.RBK.001	Sumber Benih Unggul yang Dibangun	Unit	100	100	100	100	4.500,0	33 Propinsi	Kemen LHK
		5407.RBK.002	Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	Unit	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	900.000,0	34 Propinsi	Kemen LHK
		5407.RBK.003	Benih Berkualitas	Unit	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	39.000,0	34 Propinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.7.2.(a) Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir											
060.BI Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana											
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	3142.BCA.001	Penanganan Tindak Pidana Umum	Perkara	90.299	90.299	90.299	90.299	6.336.009,7	Pusat dan Daerah	POLRI
060.BQ Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat											
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	3130.BHB.004	Layanan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli	Operasi	1.300.863	1.300.863	1.300.863	1.300.863	1.710.266,8	Pusat dan Daerah	POLRI
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	5076.BKA.002	Pemberdayaan Potensi Keamanan	Laporan	578.772	578.772	578.772	578.772	4.069.919,2	Pusat dan Daerah	POLRI
		5076.BKA.003	Penguatan Peran Bhabinkamtibmas	Laporan	1.557.317	1.557.317	1.557.317	1.557.317	788.404,7	Pusat dan Daerah	POLRI

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.a.1.(a) Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS										
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup										
5436 Pencegahan Dampak Lingkungan	5436.UBA.001	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	15	15	15	15	51.300,0	34 provinsi	Kemen LHK
056.IC Program Penyelenggaraan Penataan Ruang										
4405 Kegiatan Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II	4405.PBT.021	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Kalimantan	Persub RTRW Prov/Kab/Kota	0	0	0	0	1.200,0	Kalimantan	Kemen ATR/BPN
	4405.PBT.022	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Maluku	Persub RTRW Prov/Kab/Kota	2	2	2	2	2.000,0	Maluku	Kemen ATR/BPN
	4405.ABT.021	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Kalimantan	Persub RTRW Prov/Kab/Kota	0	0	0	0	1.200,0	Kalimantan	Kemen ATR/BPN
	4405.ABT.022	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Maluku	Persub RTRW Prov/Kab/Kota	2	2	2	2	2.000,0	Maluku	Kemen ATR/BPN
	4405.ABT.023	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Kepulauan Nusa Tenggara	Persub RTRW Prov/Kab/Kota	4	4	4	4	4.000,0	Nusa Tenggara	Kemen ATR/BPN
	4405.ABT.024	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Papua	Persub RTRW Prov/Kab/Kota	1	1	1	1	1.000,0	Papua	Kemen ATR/BPN
	4405.ABT.025	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Sulawesi	Persub RTRW Prov/Kab/Kota	9	9	9	9	9.000,0	Sulawesi	Kemen ATR/BPN
5541 Kegiatan Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I	5541.ABT.009	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Sumatera	Persub RTRW Prov/Kab/Kota	15	15	15	15	15.000,0	Sumatera	Kemen ATR/BPN
	5541.ABT.010	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Jawa Bali	Persub RTRW Prov/Kab/Kota	13	13	13	13	13.000,0	Jawa Bali	Kemen ATR/BPN

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.b.1* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											
020.FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi											
6347	Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	6347.PBI.401	Jaringan Pemantauan Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah (CAT)	Cekungan Air Tanah (CAT)	13	13	13	13	221.667,4	Tersebar	Kemen ESDM
6346	Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi	6346.ABS.307	Rekomendasi Mitigasi Bencana Gunung Merapi dan Kebencanaan Geologi	Rekomendasi	9	9	9	9	8.089,7	Pusat	Kemen ESDM
		6346.ABS.308	Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana Geologi	Wilayah	60	60	65	65	2.598,7	Tersebar	Kemen ESDM
		6346.DDB.310	Teknologi dan Instrumentasi Kebencanaan Geologi	Purwarupa	2	2	2	2	3.978.485,0	Pusat	Kemen ESDM
		6346.PBS.201	Sistem Mitigasi Bencana Geologi Yang Dikembangkan	Lokasi	17	17	17	17	245.626,4	Tersebar	Kemen ESDM
		6346.PBS.202	Pos Pengamatan Gunungapi yang Dikembangkan	Pos Pengamanan Gunung Api	13	14	14	14	140.292,1	Tersebar	Kemen ESDM
		6346.PBS.206	Peta Kawasan RawanBencana Geologi	Peta	20	20	20	20	11.556,6	Tersebar	Kemen ESDM
		6346.ABS.203	Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Geologi (Erupsi Gunungapi, Gempa Bumi, Tsunami dan Gerakan Tanah)	Rekomendasi	148	148	176	176	50.897,9	Pusat	Kemen ESDM
		6346.ABS.204	Sosialisasi dan Informasi Mitigasi Bencana Geologi	Wilayah/ Kabupaten	29	29	39	39	30.121,5	Tersebar	Kemen ESDM
		6346.ABS.309	Data dan Informasi Hasil Penyelidikan, Penelitian, Pengembangan Metode dan Analisis Laboratorium Kebencanaan Geologi	Layanan Data	22	22	22	22	33.171,5	Pusat	Kemen ESDM
		6346.PBS.412	Rekomendasi Geologi Penurunan Muka Tanah di Kawasan Pesisir Pantai Utara Pulau Jawa (PATGTL)	Rekomendasi	2	2	2	2	62.159,0	Tersebar	Kemen ESDM
		6346.PBS.413	Rekomendasi Penyelidikan Geologi Terpadu untuk Penataan Ruang	Rekomendasi Kebijakan	2	4	4	4	29.752.675,8	Pusat	Kemen ESDM

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
075.GJ Program Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika											
3350	Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG	3350.QAH.003	Layanan peringatan dini cuaca dengan <i>Scalling Up Weather Capacity II</i>	Layanan	3	24	34	34	346.200,0	34 Provinsi	BMKG
5201	Pengelolaan Meteorologi Maritim BMKG	5201.QAH.003	Layanan Informasi Meteorologi Maritim (<i>Strengthening of Marine Meteorology</i>)	layanan	20	20	20	20	1.792.300,0	100 Pelabuhan	BMKG
3349	Pengelolaan Meteorologi Penerbangan BMKG	3349.QAH.002	pembangunan Alat Pendeteksi Geser Angin (<i>windshear</i>)	Bandara	3	3	4	4	278.500,0	14 Bandara	BMKG
3345	Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG	3345.QAH.001	Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami yang Berkualitas	Layanan	110	50	25	0	1.441.271,0	34 Provinsi	BMKG
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5406	Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	5406.BDB.001	Layanan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Lembaga	1	1	1	1	21.000	Pusat	Kemen LHK
		5406.QDB.001	Lembaga/Forum Peduli DAS yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lembaga	34	34	34	34	20.400	34 Provinsi	Kemen LHK
		5406.UAB.001	Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time	Sistem Informasi	1	1	1	1	71.400	Pusat	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.b.2* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana											
010.CM Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.020	Jumlah provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	Provinsi	10	17	24	34	12.562,5	Tersebar	Kemendagri
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6136.UBA.004	Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah	Provinsi	34	34	34	34	2.100,0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kemendagri
		6136.UBA.001	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	Daerah	133	133	133	133	7.247,5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kemendagri
		6136.UBA.005	Daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan tanggap darurat	Daerah	34	34	34	34	1.000,0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kemendagri

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
1241	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	1241.UBA.001	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	Daerah	13	13	13	13	7.200,0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kemendagri
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5037	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	5037.RBR.001	<i>Consulting Services of Bali Beach Conservation Project (Phase 2)</i> yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1	33.330,1	Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBR.002	<i>Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II</i> yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	19.500,0	Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
		5037.RBR.003	Dokumen desain Pengendalian banjir upper Citarum yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	10.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBR.004	<i>Engineering service project</i> Batam dan Bintan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Kepulauan Riau	Kemen PUPR
		5037.RBR.005	<i>Engineering service project</i> di Pulau Bangka yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Bangka Belitung	Kemen PUPR
		5037.RBR.006	<i>Engineering service project</i> di Sungai Cipunegara yang dibangun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBR.007	<i>Engineering service project</i> Sungai Siak yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Riau	Kemen PUPR
103.FA Program Ketahanan Bencana											
3893	Layanan data dan informasi serta komunikasi kebencanaan	3893.QEG.001	Prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan	Unit	10	10	10	10	58.000,0	Pusat	BNPB
		3893.QMB.002	Budaya sadar bencana	Layanan	81	81	81	81	12.200,0	Pusat	BNPB

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
3882	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pencegahan melalui kesiapsiagaan	3882.UBB.001	Pembentukan Desa Tangguh Bencana Banjir dan Gunungapi	Lokasi	2	2	2	2	2.400,0	Pusat	BNPB
103.WA Program Dukungan Manajemen											
3878	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	3878.SCK.001	Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB dan Simulasi PB di daerah	Orang	760	760	760	760	54.900,0	34 Provinsi	BNPB
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.c.1.(a) Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal											
029.WA Program Dukungan Manajemen											
5382	Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5382.PFA.001	Rancangan Standardisasi Bidang LHK	NSPK	1	1	1	1	1.892,0	Pusat	Kemen LHK
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4971	Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung	4971.UBA.002	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	509	-	-	-	139.038,7	Pusat	Kemen PUPR
		4971.UBA.002	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	513	-	-	81.408,5	Pusat	Kemen PUPR
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Kab/Kota	-	-	48	48	480.000,0	Kawasan Metropolitan	Kemen PUPR
		4971.CBN.003	Penataan Bangunan Kawasan Cagar Budaya dan Permukiman Tradisional	unit	7	-	-	-	224.228,2	Pusat	Kemen PUPR
		4971.CBN.003	Penataan Bangunan Kawasan Cagar Budaya dan Permukiman Tradisional	unit	-	4	-	-	37.473,1	Kab. Rembang, Kota Semarang, Kab. Ngawi, Kab. Barito Kuala	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB											
INDIKATOR TPB/SDGs: 12.1.1* Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											
029.WA Program Dukungan Manajemen											
5382	Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5382.PFA.001	Rancangan Standardisasi Bidang LHK	NSPK	32	-	-	-	6.114,0	Pusat	Kemen LHK
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6760	Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6760.PFA.051	Standar Instrumen LHK	NSPK	-	4	12	12	12.400,0	Pusat	Kemen LHK
6759	Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	6759.PFA.001	Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	NSPK	-	1	6	8	13.960,0	Pusat	Kemen LHK
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
6761	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	6761.PFA.051	Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	NSPK	-	1	4	6	18.508,0	Pusat	Kemen LHK
5401	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	5401.BDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	Kelompok UMKM	200	-	-	-	-	Pusat	Kemen LHK
6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	6733.QDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	UMKM	-	150	100	100	-	Pusat	Kemen LHK
029.FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim											
6762	Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6762.PFA.051	Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	NSPK	-	1	5	8	9.810,0	Pusat	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 12.3.1.(a) Persentase Sisa Makanan											
018.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
5885	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	5885.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Unit	7.034	5.700	5.700	5.700	2.195.984,0	Pusat	Kementan
		5885.RAG.002	Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Unit	143	144	143	143	92.610,0	Pusat	Kementan
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	5887.RAG.010	Sarana Pascapanen Hortikultura	Unit	75	75	60	60	56.100,0	Pusat	Kementan
		5887.RAG.011	Sarana Pengolahan Hortikultura	Unit	200	200	136	136	80.512,0	Pusat	Kementan
		5887.CAG.012	Sarana Pemasaran Hortikultura	Unit	100	100	100	100	20.000,0	Pusat	Kementan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5887.RBK.010	Prasarana Pascapanen Hortikultura	Unit	185	185	60	60	234.600,0	Pusat	Kementan
		5887.RBK.011	Prasarana Pengolahan Hortikultura	Unit	250	250	102	101	172.500,0	Pusat	Kementan
		5887.CBK.012	Prasarana Pemasaran Hortikultura	Unit	40	40	40	40	12.500,0	Pusat	Kementan
5889	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	5889.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	Unit	200	315	189	189	113.531,0	Pusat, 93 Kab/Kota	Kementan
		5889.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Unit	735	800	726	726	551.818,0	Pusat, 226 Kab/Kota	Kementan
		5889.RBK.001	Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	Unit	194	170	208	208	217.375,0	Pusat, 103 Kab/Kota	Kementan
		5889.RBK.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Unit	680	726	726	726	275.760,0	Pusat, 226 Kab/Kota	Kementan
		5887.RBK.012	Rantai Dingin Holtikultura	Unit	300	300	300	300	532.500,0	Pusat	Kementan
4580	Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan	4580.SDB.001	Model Pertanian Modern	Purwarupa	1	1	1	1	37.200,0	Pusat	Kementan
4584	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Pertanian	4584.SDA.513	Teknologi Mekanisasi Pertanian	Produk	13	6	6	6	32.500,0	Pusat	Kementan
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
5456	Pengelolaan Sampah	5456.FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target pengurangan Jakstrada	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	35	80	80	80	36.717,2	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.FBA.002	Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target penanganan Jakstrada	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	35	80	80	80	65.488,4	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.FBA.003	Penilaian Kinerja Daerah dalam Pengelolaan Sampah Melalui ADIPURA	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	310	320	330	350	148.386,7	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.BDG.001	Pembinaan dan Fasilitasi Bank Sampah	UMKM	150	1.500	1.500	1.500	67.840,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.BDH.001	Fasilitasi penerapan EPR untuk pengurangan sampah	Badan usaha	15	30	30	30	7.709,6	34 Provinsi	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
032.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
2358	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	2358.QEG.001	Chest freezer penyimpanan ikan	Unit	300	500	500	500	14.500,0	Pusat	KKP
		2358.RBQ.001	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun menuju Zero Waste	Unit	2	2	2	2	40.600,0	Pusat	KKP
2356	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	2356.RBQ.001	Gudang Beku	Unit	1	1	1	1	99.901,0	Pusat	KKP
		2356.QEG.001	Gudang Beku Portable	Unit	15	12	20	20	234.500,0	Pusat	KKP
		2356.QEG.002	Mobil refrigasi (berpendingin)	Unit	9	31	41	51	105.125,0	Pusat	KKP
		2356.QEG.003	Mobil nonrefrigasi (tidak berpendingin)	Unit	6	10	10	10	11.340,0	Pusat	KKP
		2356.RBQ.002	Pabrik Es	Unit	4	4	10	10	140.000,0	Pusat	KKP
INDIKATOR TPB/SDGs:											
12.4.1* Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya											
12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari <i>baseline</i> 50 ton penggunaan merkuri											
12.4.1.(b) Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari <i>baseline</i>											
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
5452	Pengelolaan B3	5452.RAG.001	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di Daerah PESK	Unit	2	8	9	5	70.100,0	25 provinsi	Kemen LHK
		5452.ABJ.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan B3	Rekomendasi Kebijakan	4	5	5	5	5.775,0	Pusat	Kemen LHK
		5452.FAB.001	Sistem Informasi dan Monitoring Pengelolaan B3	Sistem Informasi	1	1	1	1	3.150,0	Pusat	Kemen LHK
5393	Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	5393.PDF.001	Sertifikasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan	Lembaga	2	7	7	8	12.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5393.BJA.001	Penyidikan dan Pengujian Produk pada Laboratorium Lingkungan Rujukan Nasional untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup	Produk	100	100	100	100	2.564,2	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5393.BJB.001	Penyidikan dan Pengujian Peralatan Laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang akurat dan ketertelusuran pengukuran	Unit	200	200	200	200	1.099,0	Pusat	Kemen LHK
020.JB Program Pertambangan Mineral dan Batubara											
6355	Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	6355.ABI.004	Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	Rekomendasi Kebijakan	10	10	10	10	83.498,0	Pusat	Kemen ESDM
INDIKATOR TPB/SDGs: 12.4.2* (a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengelolaannya											
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
5454	Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	5454.RAG.001	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes	Unit	4	8	8	7	549.200,0	32 provinsi (diutamakan kota ibukota provinsi)	Kemen LHK
		5454.ACD.001	Layanan Perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	Institusi	400	500	500	500	59.508,5	Pusat	Kemen LHK
		5454.BDI.001	Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3	Industri	4.000	4.000	4.000	4.000	28.449,3	Pusat	Kemen LHK
5455	Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3	5455.QAH.001	Layanan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi	Layanan	2	2	2	2	560.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5455.BDI.001	Pembinaan dan Supervisi Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Institusi	Industri	8	30	35	35	33.200,0	Pusat	Kemen LHK
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6078	Pengembangan Industri Hijau	6078.ABK.002	Kajian Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di sektor industri	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	4.928,5	Pusat	Kemenperin
		6078.ABK.003	Kebijakan Penerapan Ekonomi Sirkular di Sektor Industri	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	3.400,0	Pusat	Kemenperin
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5834	Penyehatan Lingkungan	5834.PEF.004	Orang yang diberi Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes	Orang	600	1.000	1.500	2.000	70.000,0	34 Prov/ 514 Kab/Kota	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5834.UBA.004	Kab/Kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes	Kab/Kota	514	514	514	514	300.000,0	34 Prov/ 514 Kab/Kota	Kemenkes
020.JB Program Pertambangan Mineral dan Batubara											
6355	Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	6355.ABI.004	Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	Rekomendasi Kebijakan	10	10	10	10	83.498,00	Pusat	Kemen ESDM
INDIKATOR TPB/SDGs: 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang											
5456	Pengelolaan Sampah	5456.FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target pengurangan Jakstrada	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	35	80	80	80	36.717,2	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.FBA.002	Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target penanganan Jakstrada	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	35	80	80	80	65.488,4	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.FBA.003	Penilaian Kinerja Daerah dalam Pengelolaan Sampah Melalui ADIPURA	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	310	320	330	350	148.386,7	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.BDG.001	Pembinaan dan Fasilitasi Bank Sampah	UMKM	150	1.500	1.500	1.500	67.840,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.BDH.001	Fasilitasi penerapan EPR untuk pengurangan sampah	Badan usaha	15	30	30	30	7.709,6	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.RAG.001	Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas	Unit	7	7	7	7	80.000,0	Tersebar (34 Provinsi)	Kemen LHK
		5456.RAG.002	Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional	Unit	5	20	20	20	180.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.RAG.003	Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di DAS Citarum	Unit	4	6	6	6	29.325,0	34 Provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs:											
12.6.1* Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya											
12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001											
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6078	Pengembangan Industri Hijau	6078.BDI.001	Fasilitasi Sertifikasi Industri Hijau	Industri	5	5	5	5	3.137,7	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6078.BIC.001	Hasil Penilaian dan Pengawasan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	Lembaga	10	10	10	10	2.091,8	Pusat	Kemenperin
		6078.BKB.001	Hasil Pengendalian dan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Industri Hijau	Produk	1	1	1	1	2.091,8	Pusat	Kemenperin
		6078.PFA.001	Rancangan Standar Industri Hijau	NSPK	5	6	8	10	11.950,0	Pusat	Kemenperin
		6078.ABK.002	Kajian Peningkatan Penerapan Manajemen Energi, Manajemen Air, dan pemanfaatan EBT sektor industri	Rekomendasi kebijakan	1	1	1	1	5.350,0	Pusat	Kemenperin
029.WA Program Dukungan Manajemen											
5382	Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5382.PFA.001	Rancangan Standardisasi Bidang LHK	NSPK	32	-	-	-	6.114,0	Pusat	Kemen LHK
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6034	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	6034.QDI.001	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara	Industri	2.625	3.000	3.375	3.750	20.450,0	Pusat	Kemen LHK
		6034.QDI.002	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air	Industri	2.625	3.000	3.375	3.750	75.814,0	Pusat	Kemen LHK
		6034.QDI.003	Layanan Penilaian Kinerja Industri Pertambangan dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Industri	85	90	110	113	11.350,0	Pusat	Kemen LHK
		6034.QDI.004	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Industri	350	400	450	500	6.515,0	Pusat	Kemen LHK
		6034.QDH.001	Layanan Penilaian Kinerja Pelabuhan yang Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut	Badan usaha	25	30	40	50	10.200,0	Pusat	Kemen LHK
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6760	Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6760.PFA.051	Standar Instrumen LHK	NSPK	-	4	12	12	12.400,0	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6759	Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	6759.PFA.001	Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	NSPK	-	1	6	8	13.960,0	Pusat	Kemen LHK
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
6761	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	6761.PFA.051	Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	NSPK	-	1	4	6	18.508,0	Pusat	Kemen LHK
5401	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	5401.BDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	Kelompok UMKM	200	-	-	-	-	Pusat	Kemen LHK
6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	6733.QDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	UMKM	-	150	100	100	-	Pusat	Kemen LHK
029.FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim											
6762	Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6762.PFA.051	Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	NSPK	-	1	5	8	9.810,0	Pusat	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs:											
12.7.1* Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi											
12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah											
12.7.1.(b) Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa											
029.WA Program Dukungan Manajemen											
5382	Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5382.PFA.001	Rancangan Standardisasi Bidang LHK	NSPK	32	-	-	-	6.114,0	Pusat	Kemen LHK
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6760	Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6760.PFA.051	Standar Instrumen LHK	NSPK	-	4	12	12	12.400,0	Pusat	Kemen LHK
6759	Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	6759.PFA.001	Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	NSPK	-	1	6	8	13.960,0	Pusat	Kemen LHK
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
6761	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	6761.PFA.051	Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	NSPK	-	1	4	6	18.508,0	Pusat	Kemen LHK
5401	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	5401.BDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	Kelompok UMKM	200	-	-	-	-	Pusat	Kemen LHK
6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	6733.QDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	UMKM	-	150	100	100	-	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
029.FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim											
6762	Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6762.PFA.051	Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	NSPK	-	1	5	8	9.810,0	Pusat	Kemen LHK
106.CJ Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Nasional											
6323	Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ	6323.ABK.131	Rekomendasi Kebijakan Perluasan Kesempatan Usaha dalam PBJP	Rekomendasi Kebijakan	1	2	4	4	2.827,0	Pusat	LKPP
INDIKATOR TPB/SDGs: 12.8.1.(a) Jumlah satuan pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup											
029.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
5443	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	5443.DCE.001	SDM Masyarakat yang terlatih dalam Pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan	Orang	1.530	1.530	1.530	1.530	18.360,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5443.QDB.001	Pembinaan Kepedulian dan Budaya Lingkungan Hidup	Lembaga	365	365	365	365	14.760,0	34 Provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 12.8.1.(b) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister											
010.CM Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.001	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Air Minum dan Air Limbah	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	412	412	412	412	11.413,2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kemendagri/ Pemerintah Daerah
029.WA Program Dukungan Manajemen											
5382	Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5382.PFA.001	Rancangan Standardisasi Bidang LHK	NSPK	32	-	-	-	6.114,0	Pusat	Kemen LHK
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6760	Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6760.PFA.051	Standar Instrumen LHK	NSPK	-	4	12	12	12.400,0	Pusat	Kemen LHK
6759	Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	6759.PFA.001	Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	NSPK	-	1	6	8	13.960,0	Pusat	Kemen LHK
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
6761	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	6761.PFA.051	Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	NSPK	-	1	4	6	18.508,0	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5401	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	5401.BDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	Kelompok UMKM	200	-	-	-	-	Pusat	Kemen LHK
6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	6733.QDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	UMKM	-	150	100	100	-	Pusat	Kemen LHK
029.FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim											
6762	Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6762.PFA.051	Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	NSPK	-	1	5	8	9.810,0	Pusat	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 12.a.1* Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)											
020.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan											
6353	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6353.BEG.001	PLT EBT (Revitalisasi)	Unit	5	0	5	5	370.474,4	Kab. Nias Utara, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Tanggamus, Kab. Kotabaru, Kab. Kolaka Timur, Kab. Manokwari, Kab. Lanny Jaya	Kemen ESDM
		6353.BEG.002	PLTS Penunjang Tugas Teknis K/L	Unit	25	0	23	23	200.904,1	DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua	Kemen ESDM
		6353.QEG.001	PLTS Rooftop	MWp/ Unit	35,88	38,53	10/300	10/300	1.165.877,8	34 Provinsi	Kemen ESDM
6352	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6352.PBI.003	Wilayah Panas Bumi yang Ditawarkan	Wilayah	0	-	4	3	2.957,8	Tersebar	Kemen ESDM
		6352.PBI.004	Evaluasi Eksplorasi Panas Bumi oleh Pemerintah	Rekomendasi Kebijakan	8	0	11	12	72.810,0	Kab. Sukabumi, Kab. Majalengka, Kab. Lebak, Kab. Lombok Timur, Kab. Ngada, Kab. Donggala, Kab. Tana Toraja, Kab. Halmahera Barat	Kemen ESDM
		6352.QIA.003	Monitoring TKDN Bidang Panas Bumi	Persen	35	35	33,0	35,0	4.050,0	Pusat	Kemen ESDM
		6352.QIA.002	Monitoring TKDN Bidang Aneka EBT	Persen	PLTA (70) PLTS (40) PLTB (40)	PLTA (70) PLTS (40) PLTB (40)	PLTA (70) PLTS (40) PLTB (40)	PLTA (70) PLTS (40) PLTB (40)	PLTA (70) PLTS (40) PLTB (40)	2.583,6	Pusat

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6352.QIA.001	Monitoring TKDN Bidang Bioenergi	Persen	40,0	40,0	40,0	40,0	2.140,0	Pusat	Kemen ESDM
		6352.PBI.001	Volume Biofuel untuk Domestik	Juta KL	9,2	9,6	10,4	14,2	15.918,5	Pusat	Kemen ESDM
		6352.ABI.002	Penambahan Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Berbasis Bioenergi	MW	12,0	30,3	159,0	252,6	4.553,4	Tersebar	Kemen ESDM
		6352.ABI.001	Pengembangan Biomassa dan Biogas	Pemanfaatan Biogas (Ribu M3/ Tahun)	28.342	29.314	33.770,0	35.390,0	6.317,8	Tersebar	Kemen ESDM
6350	Pengelolaan Ketenagalistrikan	6350.PBI.001	Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	Rekomendasi	1	1	1	1	15.067,3	Pusat	Kemen ESDM
INDIKATOR TPB/SDGs: 12.b.1.(a) Jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i>											
040.EA Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif											
4313	Pengembangan Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan	4313.PEA.002	Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Kegiatan	1	1	1	1	18.198,4	Pusat	Kemenparekraf
		4313.PEA.003	Lomba Konsep Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Kegiatan	3	3	3	3	21.231,5	Pusat	Kemenparekraf
4329	Pengembangan Wisata Alam, Budaya, dan Buatan	4329.BDC.004	Penguatan Jejaring dan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Produk Wisata	Orang	2.500	2.500	2.500	2.500	52.713,7	Pusat	Kemenparekraf
		4329.PBK.002	Pola Perjalanan Wisata	Rekomendasi Kebijakan	18	18	18	18	87.856,2	Pusat	Kemenparekraf
		4329.PBK.004	Produk Wisata	Rekomendasi Kebijakan	15	15	15	15	25.101,8	Pusat	Kemenparekraf
4330	Pengembangan Wisata Minat Khusus	4330.QDB.001	Fasilitasi pengembangan produk dan aktivitas wisata minat khusus	(Lembaga/ kelompok masyarakat)	0	1	1	2	6.000,0	PM	Kemenparekraf
055.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional											
6264	Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark	6264.PBI.400	Koordinasi strategis implementasi Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark yang terintegrasi SDGs	Dokumen	1	1	1	1	20.000,0	Pusat	Kementerian PPN/Bappenas

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
020.FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi											
6347	Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	6347.PBI.606	Warisan Geologi yang ditetapkan	Lokasi	4	4	4	4	10.200,0	Pusat	Kemen ESDM
029.WA Program Dukungan Manajemen											
5382	Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5382.PFA.001	Rancangan Standardisasi Bidang LHK	NSPK	32	-	-	-	6.114,0	Pusat	Kemen LHK
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6760	Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6760.PFA.051	Standar Instrumen LHK	NSPK	-	4	12	12	12.400,0	Pusat	Kemen LHK
6759	Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	6759.PFA.001	Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	NSPK	-	1	6	8	13.960,0	Pusat	Kemen LHK
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
6761	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	6761.PFA.051	Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	NSPK	-	1	4	6	18.508,0	Pusat	Kemen LHK
5401	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	5401.BDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	Kelompok UMKM	200	-	-	-	-	Pusat	Kemen LHK
6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	6733.QDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	UMKM	-	150	100	100	-	Pusat	Kemen LHK
029.FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim											
6762	Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6762.PFA.051	Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	NSPK	-	1	5	8	9.810,0	Pusat	Kemen LHK
010.CM Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah dan Desa											
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	1237.PEC.015	Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP	Kerja sama	3	3	3	3	4.936,7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kemendagri/ Pemerintah Daerah
032.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	2363.QEG.001	Sarana prasarana Wisata Bahari	Unit	15	14	16	18	51.956,0	Pusat	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR TPB/SDGs: 12.c.1* (a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan (b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil										
020.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan										
6352 Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	6352.PDA.001	Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi	Peralatan/ Produk	2	1	0	0	1.927,9	Pusat	Kemen ESDM
	6352.QIC.001	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor ESDM	Juta Ton	67	91	116	142	5.518,0	Pusat	Kemen ESDM
6350 Pengelolaan Ketenagalistrikan	6350.PBJ.001	Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Rekomendasi	1	1	1	1	9.000,0	Pusat	Kemen ESDM
015.CB Program Pengelolaan Belanja Negara										
4778 Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	4778.FAD.007	Nota Keuangan APBN/P	Dokumen	1	1	1	1	5.311,1	Pusat	Kemenkeu
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM										
INDIKATOR TPB/SDGs: 13.1.1.(a) Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang										
Kegiatan Inti										
103.FA Program Ketahanan Bencana										
3893 Prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan	3893.QEG.001	Jumlah kegiatan prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang ditingkatkan	lokasi	10	10	10	10	58,0	34 Provinsi	BNPB
4288 Pemenuhan Logistik dan Peralatan PB	4288.QEE.001	Jumlah layanan pemenuhan kebutuhan logistik PB	Paket	33	33	33	33	89.341,1	33 Provinsi	BNPB
	4288.QEG.001	Jumlah unit pemenuhan kebutuhan peralatan PB	Unit	139	36	165	180	186.462,8	514 Kab/Kota	BNPB
4289 Distribusi Logistik dan Peralatan PB	4289.QEE.001	Jumlah Kegiatan Distribusi Logistik dan Peralatan PB (kegiatan)	kegiatan	5	1	5	5	5.220,0	34 Provinsi	BNPB
3882 Penguatan Desa Tangguh Bencana	3882.UBB.001	Jumlah Penguatan Desa Tangguh Bencana	desa	120	90	120	120	47.100,0	34 provinsi	BNPB
4283 Satuan Pendidikan Aman Bencana	4283.QDC.001	Jumlah masyarakat yang difasilitasi dan dibina	Orang	320	320	320	320	19.500,0	34 provinsi	BNPB

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
Sarana Pendukung (Means of Implementation)											
103.FA Program Ketahanan Bencana											
4285	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Dukungan Infrastruktur Darurat	4285.UAC.001	Jumlah pengelola infrastruktur darurat yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	100	100	100	100	6.100,0	34 Provinsi	BNPB
4287	Layanan Pusat Pengendalian Operasi	4287.UAC.001	Jumlah personil yang mendapat pendampingan teknis SKPDB dan keposkoan	Orang	105	105	105	105	8.200,0	Pusat	BNPB
3891	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Dukungan Sumber Daya Darurat	3891.QEE.003	Jumlah kegiatan dalam Pengelolaan dana bantuan kedaruratan	Paket	10	30	10	10	1.056.400,0	34 Provinsi	BNPB
4286	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi	4286.UAC.002	Jumlah pendamping penanganan korban dan pengungsi	Orang	570	570	570	570	56.000,0	34 Provinsi	BNPB
INDIKATOR TPB/SDGs: 13.1.1.(b) Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim											
032.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
2345	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	2345.RAL.001	Sarana Kawasan Perikanan Budidaya yang disalurkan ke masyarakat	Unit	120	120	120	120	552.850,0	10 provinsi	KKP
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	2337.QEG.001	Kapal perikanan bantuan yang disalurkan	Unit	97	75	90	110	180.607,2	34 provinsi	KKP
		2337.QEG.002	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang disalurkan	Unit	750	1.000	1.250	1.500	111.311,5	7 Lokasi	KKP
2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	2363.QAH.001	Layanan Perizinan Reklamasi	layanan	5	5	5	5	11.410,1	Daerah	KKP
032.HB Program Pengelolaan Perikanan Tangkap											
2344	Pengelolaan Perbenihan Ikan	2344.QEG.003	Bibit Rumput Laut yang didistribusikan ke masyarakat (SBK)	Unit	200	250	450	500	51.200,0	Jatim, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Sulsel	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim											
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5037	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	5037.RBR.001	Consulting Services of Bali Beach Conservation Project (Phase 2) yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1	33.330,1	Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBR.002	Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	19.500,0	Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
		5037.RBR.003	Dokumen desain Pengendalian banjir upper Citarum yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	10.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBR.004	Engineering service project Batam dan Bintan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Kepulauan Riau	Kemen PUPR
		5037.RBR.005	Engineering service project di Pulau Bangka yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Bangka Belitung	Kemen PUPR
		5037.RBR.006	Engineering service project di Sungai Cipunegara yang dibangun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBR.007	Engineering service project Sungai Siak yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Riau	Kemen PUPR
Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan											
2428	Riset Kelautan	2428.PBR.002	Jumlah Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir (kawasan)	kawasan	10	12	12	13	25,00	34 provinsi	KKP
		2428.PBR.003	Jumlah Data dan/atau Informasi Pemetaan Karakteristik dan Dinamika Laut di WPP (paket)	paket	2	3	4	4	10,00	11 WPP	KKP
018.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
1810	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	1810.QDB.001	Penumbuhan dan Penguatan P4S	Unit	240	240	240	240	29,90	Pusat, 7 Provinsi	Kementan
1812	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	1812.QDB.001	Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang terfasilitasi	Unit	5.646	5.646	5.646	5.646	69,6	34 Provinsi	Kementan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
1812	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	1812.QDD.002	Kelembagaan Ekonomi Petani yang dikembangkan	Unit	100	100	100	100	61,1	34 Provinsi	Kementan
018.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	1779.RAI.001	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Ha	1.245	1.245	1.245	1.245	84,7	15 Provinsi	Kementan
018.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas											
1773	Perlindungan Hortikultura	1773.BDD.010	Penerapan PHT	Kelompok	180	180	180	180	48,2	30 Provinsi	Kementan
1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	1794.RBK.001	Irigasi Perpipaan	Unit	138	138	138	138	84,3	21 Provinsi	Kementan
		1794.RBK.002	Embung Pertanian	Unit	400	400	400	400	254,8	31 Provinsi	Kementan
		1794.RBK.003	Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	Unit	200	200	200	200	134,2	Pusat dan 22 provinsi	Kementan
		1794.RDK.001	Jaringan Irigasi Tersier	Ha	269.884	269.884	269.884	269.884	1.536,0	32 Provinsi	Kementan
1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	1795.PBR.001	Survei Investigasi dan Desain Cetak Sawah	Dokumen	10	10	10	10	31,9	10 Provinsi	Kementan
3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	3994.RBK.001	Asuransi Pertanian	Hektar	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	779,80	Pusat dan 24 Provinsi	Kementan
		4580.RAI.001	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Ha	100.000	100.000	100.000	100.000	1.353,8	33 provinsi	Kementan
		4580.RAI.002	Areal Penanganan DPI	Lokasi	5.000	5.000	5.000	5.000	303,9	31 Provinsi	Kementan
		4580.SDB.001	Model Pertanian Modern	Model	1	1	1	1	82,9	Jawa Barat	Kementan
018.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
1801	Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	1801.DDA.502	Diseminasi Teknologi Pertanian	Teknologi	3	3	3	3	23,2	1 Provinsi	Kementan
4584	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Pertanian	4584.DDA.505	Peta Sumberdaya Lahan Pertanian	Peta	50	50	50	50	31,7	1 Provinsi	Kementan
		4584.SDA.513	Teknologi Mekanisasi Pertanian	Teknologi	8	8	8	8	36,0	1 Provinsi	Kementan
022.GA Program Infrastruktur Konektivitas											
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	4639.RAC.061	Kapal Patroli/Multipurpose (Prioritas Nasional)	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Pusat	Kemenhub

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4639.RAC.064	Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Rambu Suar Prioritas Nasional	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Pusat	Kemenhub
4658	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	4658.CAE.001	Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Unit	24	24	24	24	1.086.000,0	Pusat	Kemenhub
		4658.CAE.002	Telekomunikasi Pelayaran	Unit	19	19	19	19	482.000,0	Pusat	Kemenhub
		4658.CCE.001	Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Unit	62	62	62	62	728.500,0	Pusat	Kemenhub
		4658.CCE.002	Telekomunikasi Pelayaran	Unit	20	20	20	20	670.000,0	Pusat	Kemenhub
		4658.RAE.001	Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Prioritas Nasional	Unit	1	1	1	1	25.000,0	Pusat	Kemenhub
		4658.RAE.003	Telekomunikasi Pelayaran Prioritas Nasional	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Pusat	Kemenhub
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
2058	Surveilans dan Karantina Kesehatan	2058.PEF.001	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit potensial KLB/Wabah	Orang	532	200	200	200	3.016,4	Pusat	Kemenkes
		2058.QAH.008	Tindakan pengendalian pada KLB/wabah	Layanan	1	1	1	1	5.312,2	Pusat	Kemenkes
024.WA Program Dukungan Manajemen											
2044	Pengelolaan Krisis Kesehatan	2044.QHC.001	Mobilisasi Tenaga Penanggulangan Krisis Kesehatan	Operasi	35	35	35	35	19.798,0	Kabupaten/ Kota terdampak bencana dan DTPK	Kemenkes
029.FB-Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim											
5446	Adaptasi Perubahan Iklim	5446.BDD.001	Kampung Iklim	Kelompok Masyarakat	195	200	250	325	15.525,8	34 Provinsi	Kemen LHK
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup											
5408	Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	5408.RAG.001	Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat	Unit	188	-	-	-	2.931,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5408.RBK.001	Danau dan Segmen Sungai yang Dikendalikan Kerusakannya	Unit	15	-	-	-	3.351,1	13 Provinsi	Kemen LHK
		5408.RBK.002	Mata Air yang Dipulihkan	Unit	75	-	-	-	2.452,8	34 Provinsi	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6738	Rehabilitasi Perairan Darat	6738.RAG.001	Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat	Unit	-	170	665	665	10.905,9	34 Provinsi	Kemen LHK
		6738.RBK.001	Danau yang Dikendalikan Kerusakannya	Unit	-	15	15	15	5.878,5	13 Provinsi	Kemen LHK
		6738.RBK.002	Segmen Sungai yang Dikendalikan Kerusakannya	Unit	-	15	15	15	1.722,2	13 Provinsi	Kemen LHK
		6738.RBK.003	Mata Air yang Dipulihkan	Unit	-	50	142	142	7.314,0	34 Provinsi	Kemen LHK
6035	Pemulihan Kerusakan Lingkungan	6035.REA.001	Lahan Gambut yang direstorasi pada 7 Provinsi	Hektar	300.000	-	-	-	413.638,6	7 provinsi	Kemen LHK
		6035.REA.002	Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya	Hektar	1.040	1.500	2.000	3.000	279.172,6	12 provinsi	Kemen LHK
		6035.REA.003	Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan	Hektar	30	90	148	148	59.252,7	34 provinsi	Kemen LHK
6765	Pemantauan, Pengendalian, dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut	6765.REA.001	Lahan Gambut yang Direstorasi	Hektar	-	300.000	389.000	389.000	621.970,6	7 provinsi	Kemen LHK
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5404	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	5404.QDB.001	Kelompok Kerja Mangrove dan Forum Peduli Mangrove yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lembaga	29	34	34	34	7.894.285,0	34 provinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.001	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Unit	56.000	230.000	230.000	230.000	3.467.711.742,0	Tersebar	Kemen LHK
		5404.RAG.002	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	Unit	1.917	5.000	5.000	5.000	172.851.911,0	Tersebar	Kemen LHK
		5404.RAG.003	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Unit	1.250	1.250	1.250	1.250	109.622.989,0	Tersebar	Kemen LHK
		5404.RAG.004	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	Unit	1.500	1.500	1.500	1.500	41.444.378,0	Tersebar	Kemen LHK
		5404.RAG.005	Forest Program II	Unit	2	2	2	2	149.411.840,0	Tersebar	Kemen LHK
		5404.RAG.006	Forest Program III	Unit	1	1	1	1	39.148.176,0	Tersebar	Kemen LHK
5405	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	5405.RAG.001	Forest Programme IV Sulawesi Barat	Unit	3	3	3	3	63.849.936,0	Tersebar	Kemen LHK
5407	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	5407.RBK.002	Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	Unit	39.019.950	77.500.000	77.500.000	77.500.000	591.769.414,0	Tersebar	Kemen LHK
		5407.RBK.003	Benih Berkualitas	Unit	36.250.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	29.481.767,0	Tersebar	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5421	Pengelolaan Kawasan Konservasi	5421.PBV.002	Areaterbuka (Opened Area) di kawasan konservasi yang ditangani	Rekomendasi Kebijakan	194.139	194.139	194.139	194.139	64.647.883,0	Tersebar	Kemen LHK
		5421.RAG.001	Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	Unit	1	1	1	1	8.108.820,0	Tersebar	Kemen LHK
032.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
2428	Riset Kelautan	2428.RAL.002	Sarana Riset Data Citra Satelit Radar	Unit	350	350	500	500	60.027,5	BROL-Perancak	KKP
4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4346.QDD.002	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diedukasi Mitigasi Bencana dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Kelompok Masyarakat	-	2	2	2	3,0	Daerah	KKP
		4346.RBH.001	Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	Unit	2	2	2	2	67,4	Daerah	KKP
		4346.REA.001	Kawasan mangrove yang direhabilitasi	Ha	400	200	400	400	127,4	60 Lokasi	KKP
		4346.REA.002	Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	Ha	10	10	10	10	10.270,0	tersebar	KKP
032.HB Program Pengelolaan Ruang Laut											
2366	Perencanaan Ruang Laut	2366.PBR.001	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	Rekomendasi Kebijakan	4	5	5	5	19.538,9	10 Perairan Laut	KKP
		2366.PBR.002	Perairan KSN yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSN yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	Rekomendasi Kebijakan	5	3	4	5	22.880,5	75 Kawasan	KKP
		2366.PBR.003	Perairan KSNT yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	Rekomendasi Kebijakan	13	14	16	17	26.906,2	75 Kawasan	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
033.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
4202	Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum	4202.SAB.002	Pendidikan Teknologi Konstruksi Bangunan Air	orang	174	225	275	350	9.380,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
2408	Pengendalian Lumpur Sidoarjo	2408.RBS.001	Tanggul penahan lumpur yang ditingkatkan/ direhabilitasi	Km	1,9	2	2	2	47.992,9	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
5036	Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi	5036.CBG.001	Daerah irigasi Baing yang dibangun	unit	3	3	3	3	32.250,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
		5036.CBG.012	Daerah irigasi Tilong yang direhabilitasi	unit	1	1	1	1	35.000,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
		5036.CBG.020	Bendung irigasi Air Nipis Seginim yang direhabilitasi	unit	1	1	1	1	20.014,4	17-Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
		5036.CBG.021	Bendung irigasi Air Alas yang direhabilitasi	unit	1	1	1	1	2.525,0	17-Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
		5036.CBS.005	Daerah irigasi Aimasi yang direhabilitasi	Km	9,02	9,02	9,02	9,02	26.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
		5036.CBS.006	Daerah irigasi Amandit yang dibangun	Km	5	5	5	5	28.000,0	63-Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
		5036.CBS.008	Daerah irigasi Batang Alai yang dibangun	Km	8,4	8,4	8,4	8,4	48.066,8	63-Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
		5036.CBS.010	Daerah irigasi Bulucenrana yang direhabilitasi	Km	2,5	2,5	2,5	2,5	12.305,8	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5036.CBS.011	Daerah irigasi Dakaino yang dibangun	Km	6,3	6,3	6,3	6,3	22.000,0	82-Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
		5036.CBS.012	Daerah irigasi DAS Tukad Oos yang ditingkatkan	Km	2,1	2,1	2,1	2,1	6.214,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
5036.CBS.015	Daerah irigasi DAS Tukad Sungai yang ditingkatkan	Km	2,1	2,1	2,1	2,1	5.820,3	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR		

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5036.CBS.022	Daerah irigasi Meko yang dibangun	Km	3	3	3	3	10.000,0	72-Provinsi Sulawesi Tengah	Kemen PUPR
	5036.CBS.023	Daerah irigasi Oransbari yang dibangun	Km	1,5	1,5	1,5	1,5	13.850,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5036.CBS.024	Daerah irigasi Paguyaman yang direhabilitasi	Km	3,5	3,5	3,5	3,5	11.930,6	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5036.CBS.025	Daerah irigasi Pitap yang dibangun	Km	3	3	3	3	29.699,4	63-Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
	5036.CBS.027	Daerah irigasi rawa Kurik yang ditingkatkan	Km	17	17	17	17	45.000,0	94-Provinsi Papua	Kemen PUPR
	5036.CBS.028	Daerah irigasi rawa Petung yang ditingkatkan	Km	5	5	5	5	3.500,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
	5036.CBS.029	Daerah irigasi rawa Tanah Miring yang dibangun	Km	31,5	31,5	31,5	31,5	11.200,0	94-Provinsi Papua	Kemen PUPR
	5036.CBS.031	Daerah irigasi rawa Wapeko yang dibangun	Km	31,5	31,5	31,5	31,5	11.500,0	94-Provinsi Papua	Kemen PUPR
	5036.CBS.033	Daerah irigasi Salugan yang dibangun	Km	6,2	6,2	6,2	6,2	86.432,8	72-Provinsi Sulawesi Tengah	Kemen PUPR
	5036.CBS.042	Daerah irigasi Tutiling yang direhabilitasi	Km	6,34	6,34	6,34	6,34	16.000,0	82-Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
	5036.CBS.044	Tunggakan Daerah irigasi Batang Alai	Km	1	1	1	1	11.724,0	63-Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
	5036.CBS.046	Tunggakan Daerah irigasi Raknamo	Km	1	1	1	1	185.000,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5036.CBS.047	Tunggakan Daerah irigasi Tanju Kanan	Km	1	1	1	1	651.125,0	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
	5036.CBS.049	Jaringan irigasi SS Kedunggedel yang direhabilitasi	Km	1	1	1	1	20.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5036.CBS.051	DI Leuwigoong yang dibangun	Km	7,58	7,58	7,58	7,58	10.805,5	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5036.CBS.055	Daerah irigasi Leuwigoong yang ditingkatkan	Km	1	1	1	1	1.553,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5036.CBS.057	Daerah irigasi Cacaban yang direhabilitasi	Km	6,48	6,48	6,48	6,48	26.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.CBS.058	Daerah irigasi Tingal yang dibangun	Km	1,1	1,1	1,1	1,1	10.997,4	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.CBS.059	Daerah Irigasi karangtalun yang ditingkatkan	Km	9,8	9,8	9,8	9,8	20.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.CBS.060	Daerah irigasi Sukodono yang dibangun	Km	10	10	10	10	11.705,6	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5036.CBS.062	Daerah irigasi Gondang yang direhabilitasi	Km	20	20	20	20	20.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.CBS.063	Daerah irigasi Sungkur yang direhabilitasi	Km	8,49	8,49	8,49	8,49	20.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5036.CBS.064	Daerah irigasi Bendo yang ditingkatkan	Km	12,639	12,639	12,639	12,639	20.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5036.CBS.066	Daerah irigasi Pante Lhong yang direhabilitasi	Km	4,154	4,154	4,154	4,154	7.000,0	11-Provinsi Aceh	Kemen PUPR
	5036.CBS.069	Daerah irigasi Sei Padang yang ditingkatkan	Km	2,46	2,46	2,46	2,46	17.904,2	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5036.CBS.071	Daerah irigasi rawa Kota Baru Siberida yang ditingkatkan	Km	11	11	11	11	10.837,1	14-Provinsi Riau	Kemen PUPR
	5036.CBS.072	Daerah irigasi Osaka yang dibangun	Km	1	1	1	1	30.000,0	14-Provinsi Riau	Kemen PUPR
	5036.CBS.073	Daerah irigasi rawa Siak yang ditingkatkan	Km	2	2	2	2	45.000,0	14-Provinsi Riau	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5036.CBS.074	Daerah irigasi Kerandin yang dibangun	Km	2,5	2,5	2,5	2,5	30.950,0	21-Provinsi Kepulauan Riau	Kemen PUPR
	5036.CBS.075	Daerah irigasi Batang Pangian yang dibangun	Km	2,1	2,1	2,1	2,1	16.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5036.CBS.076	Daerah irigasi Batang Bayang yang dibangun	Km	1	1	1	1	15.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5036.CBS.077	Daerah irigasi Limun Singkut yang direhabilitasi	Km	4,917	4,917	4,917	4,917	11.000,0	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
	5036.CBS.078	Daerah irigasi rawa Sei Cemara yang direhabilitasi	Km	25	25	25	25	13.570,0	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
	5036.CBS.079	Daerah irigasi rawa Dendang yang direhabilitasi	Km	20	20	20	20	10.450,0	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
	5036.CBS.082	Daerah irigasi Air Alas yang direhabilitasi	Km	4,5	4,5	4,5	4,5	15.000,0	17-Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
	5036.CBS.091	Jaringan irigasi yang dibangun	Km	1	1	1	1	58.106,4	00-Pusat	Kemen PUPR
	5036.CBS.092	Jaringan irigasi yang direhabilitasi	Km	1	1	1	1	71.362,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5036.RBG.006	Bendung irigasi Serdang yang dibangun	unit	1	1	1	1	141.437,5	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5036.RBR.001	Dokumen desain Food estate yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	13.050,0	62-Provinsi Kalimantan Tengah	Kemen PUPR
	5036.RBS.001	Daerah irigasi Baliase yang dibangun	Km	86,93	86,93	86,93	86,93	154.150,4	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.004	Daerah irigasi Bubi yang dibangun	Km	12,4	12,4	12,4	12,4	58.429,9	81-Provinsi Maluku	Kemen PUPR
	5036.RBS.005	Daerah irigasi Dataran Kotamobagu yang direhabilitasi	Km	29,5	29,5	29,5	29,5	10.050,3	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	5036.RBS.006	Daerah irigasi DI Tincio (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	5,5	5,5	5,5	5,5	2.600,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.009	Daerah irigasi Kalukku yang dibangun	Km	5	5	5	5	58.831,5	76-Provinsi Sulawesi Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.012	Daerah irigasi Lembor (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	0,75	0,75	0,75	0,75	6.011,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5036.RBS.013	Daerah irigasi Maloso yang ditingkatkan	Km	10,235	10,235	10,235	10,235	62.156,6	76-Provinsi Sulawesi Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.015	Daerah irigasi Palaka (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	15,5	15,5	15,5	15,5	2.600,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.020	Daerah irigasi rawa Belanti I	Km	40	40	40	40	4.608,5	63-Provinsi	Kemen PUPR
	5036.RBS.021	Daerah irigasi rawa	Km	60	60	60	60	3.582,3	63-Provinsi	Kemen PUPR
	5036.RBS.028	Daerah irigasi Tapin (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	20,24	20,24	20,24	20,24	2.750,0	63-Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.029	Daerah irigasi Tapin yang dibangun	Km	8	8	8	8	85.443,3	63-Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.030	Daerah irigasi Tommo yang ditingkatkan	Km	7	7	7	7	35.998,4	76-Provinsi Sulawesi Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.031	Daerah irigasi Toraut yang direhabilitasi	Km	37,66	37,66	37,66	37,66	6.773,2	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5036.RBS.033	Daerah irigasi Wawotobi-Ameroro yang direhabilitasi	Km	2	2	2	2	33.775,3	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
	5036.RBS.036	Daerah irigasi Ciujung yang direhabilitasi	Km	46,0079	46,0079	46,0079	46,0079	140.702,1	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR
	5036.RBS.037	Daerah irigasi Cibaliung yang direhabilitasi	Km	2,9	2,9	2,9	2,9	42.144,3	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR
	5036.RBS.041	Jaringan irigasi SS Macan (SIMURP) yang direhabilitasi	Km	1	1	1	1	14.500,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5036.RBS.046	Daerah irigasi DI Cikeusik (SIMURP) yang direhabilitasi	Km	1	1	1	1	29.500,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.047	Daerah irigasi Rentang yang dimodernisasi	Km	115,1539	115,1539	115,1539	115,1539	809.981,3	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.048	Daerah irigasi Cikunten yang direhabilitasi	Km	21,71	21,71	21,71	21,71	43.657,8	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.049	Daerah irigasi Manganti yang direhabilitasi	Km	36,26	36,26	36,26	36,26	152.103,1	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.050	Daerah irigasi Manganti (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	48,34	48,34	48,34	48,34	13.400,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.060	Daerah irigasi Jragung yang direhabilitasi	Km	15,804	15,804	15,804	15,804	22.094,7	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.RBS.063	Daerah irigasi Serayu yang ditingkatkan	Km	41,6	41,6	41,6	41,6	210.094,7	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.RBS.064	Daerah irigasi Slinga yang dibangun	Km	5,6	5,6	5,6	5,6	162.200,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.RBS.065	Daerah irigasi Wadaslintang (IPDMIP) yang ditingkatkan	Km	2,2	2,2	2,2	2,2	10.549,4	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.RBS.066	Daerah irigasi Kedungputri (SIMURP) yang direhabilitasi	Km	14	14	14	14	29.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.RBS.067	Daerah irigasi Banjarcahaya yang direhabilitasi	Km	5	5	5	5	600,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.RBS.068	Daerah irigasi SIM (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	12	12	12	12	13.677,1	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5036.RBS.069	Daerah irigasi Waduk Bening yang direhabilitasi	Km	3,2	3,2	3,2	3,2	37.730,6	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5036.RBS.070	Daerah irigasi Pekalen yang direhabilitasi	Km	12	12	12	12	24.976,5	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5036.RBS.075	Daerah irigasi Jambo Ayey yang dibangun	Km	3,5	3,5	3,5	3,5	27.250,0	11-Provinsi Aceh	Kemen PUPR
	5036.RBS.076	Daerah irigasi Lhokguci yang dibangun	Km	2,686	2,686	2,686	2,686	45.468,3	11-Provinsi Aceh	Kemen PUPR
	5036.RBS.077	Daerah irigasi Baro Raya yang direhabilitasi	Km	5,28	5,28	5,28	5,28	49.800,0	11-Provinsi Aceh	Kemen PUPR
	5036.RBS.083	Daerah irigasi Sei Ular (SIMURP) yang direhabilitasi	Km	1	1	1	1	9.500,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5036.RBS.084	Daerah irigasi Kawasan Sawah Laweh Tarusan yang dibangun	Km	4,9	4,9	4,9	4,9	89.515,8	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.085	Daerah irigasi Batanghari yang ditingkatkan	Km	11	11	11	11	55.313,9	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.086	Daerah irigasi Batang Asai yang dibangun	Km	36,74	36,74	36,74	36,74	239.710,6	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
	5036.RBS.088	Daerah irigasi Air Ketahun yang direhabilitasi	Km	7,5	7,5	7,5	7,5	10.534,8	17-Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
	5036.RBS.089	Daerah irigasi Air Seluma yang direhabilitasi	Km	7,5	7,5	7,5	7,5	15.434,8	17-Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
	5036.RBS.090	Daerah irigasi Lematang yang dibangun	Km	1,5	1,5	1,5	1,5	50.679,0	16-Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.092	Daerah irigasi Komering yang dibangun	Km	54,5	54,5	54,5	54,5	30.307,6	16-Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.093	Daerah irigasi rawa Karang Agung hilir yang direhabilitasi	Km	97	97	97	97	18.000,0	16-Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.094	Daerah irigasi Sekampung Batanghari yang ditingkatkan	Km	5,16	5,16	5,16	5,16	31.946,5	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5036.RBS.095	Daerah irigasi Way Rarem yang ditingkatkan	Km	8,1	8,1	8,1	8,1	48.466,9	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024					
	5036.RBS.096	Daerah irigasi Way Seputih yang ditingkatkan	Km	55	55	55	55	37.597,4	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR	
	5036.RBS.097	Daerah irigasi Way Tulung Mas yang ditingkatkan	Km	4,2	4,2	4,2	4,2	27.157,1	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR	
	5036.RBS.098	Daerah irigasi Way Umpu yang ditingkatkan	Km	22,2	22,2	22,2	22,2	144.017,5	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR	
	5036.RBS.099	Daerah irigasi Raman Utara yang ditingkatkan	Km	5,35	5,35	5,35	5,35	34.629,2	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR	
	5036.RBS.102	Daerah irigasi Panti Rao (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	6,1	6,1	6,1	6,1	7.416,6	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR	
	5036.RBS.103	Daerah irigasi Batang Tongar (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	4,3	4,3	4,3	4,3	5.952,8	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR	
	5036.RBS.106	Daerah irigasi tambak Kersik putih yang ditingkatkan	Km	10	10	10	10	3.750,0	63-Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR	
	5036.RBS.108	Daerah irigasi tambak Marangkayu yang dibangun	Km	5	5	5	5	3.910,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR	
	5036.RBS.109	Daerah irigasi tambak Sepunggur yang ditingkatkan	Km	22,7	22,7	22,7	22,7	7.300,0	63-Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR	
5037	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	5037.CBH.001	Check dam hulu Bendungan Leuwikeris yang dibangun	unit	2	0	0	0	14.900,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.CBH.002	Check dam Sungai Cijolang yang dibangun	unit	3	0	0	0	25.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.CBS.008	Pengamanan Pantai Karapyak yang dibangun	Km	2	0	0	0	55.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.009	Pengamanan Pantai Amal Baru yang dibangun	Km	0,52	0	0	0	34.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.010	Pengamanan Pantai baru yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		5037.CBS.011	Pengamanan Pantai Bone yang dibangun	Km	0,17	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.012	Pengamanan Pantai Buhobuho yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	15.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.013	Pengamanan Pantai Cilallang yang dibangun	Km	0,35	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.014	Pengamanan Pantai Desa Sole Pulau Seram yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	5.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.015	Pengamanan Pantai di Raja Ampat yang dibangun	Km	0,35	0	0	0	15.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.016	Pengamanan Pantai di sepanjang Jalan Kab. Ketapang Kec. Kendawangan yang dibangun	Km	0,35	0	0	0	20.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.017	Pengamanan Pantai Galesong yang dibangun	Km	0,25	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.018	Pengamanan Pantai Hili yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	8.750,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.019	Pengamanan Pantai Kab. Bengkayang yang dibangun	Km	0,14	0	0	0	7.900,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.020	Pengamanan Pantai Kab. Kep. Selayar yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.021	Pengamanan Pantai Kab. Sambas yang dibangun	Km	0,35	0	0	0	18.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.022	Pengamanan Pantai karya Bersama yang dibangun	Km	0,35	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.023	Pengamanan Pantai kec. Helumo yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	0,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.024	Pengamanan Pantai Kec. Ponorosan yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	12.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.CBS.025	Pengamanan Pantai Kec. Posigodan yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.026	Pengamanan Pantai Kec. Pulau-Pulau Lease yang dibangun	Km	0,46	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.027	Pengamanan Pantai KI Batang yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	93.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.028	Pengamanan Pantai Kota Meulaboh yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	40.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.029	Pengamanan Pantai Kota Raha yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	16.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.030	Pengamanan Pantai Mampie yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	5.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.031	Pengamanan Pantai Modong yang dibangun	Km	1,2	0	0	0	20.800,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.032	Pengamanan Pantai Moroyang dibangun	Km	0,4	0	0	0	12.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.033	Pengamanan Pantai Muara Sebamban Lama yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	0,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.034	Pengamanan Pantai Nangaroro yang dibangun	Km	0,13	0	0	0	4.600,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.035	Pengamanan Pantai Ndalir yang dibangun	Km	0,07	0	0	0	10.300,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.036	Pengamanan Pantai Oesapa yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	7.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.037	Pengamanan Pantai Pagatan Kusan Hilir yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	16.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.038	Pengamanan Pantai panjang yang dibangun	Km	0,58	0	0	0	28.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.039	Pengamanan Pantai Penyak-Terentang yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	33.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.CBS.040	Pengamanan Pantai Pesaren yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	8.900,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.041	Pengamanan Pantai Pesisir Barat Desa Kerbang Dalam yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	7.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.042	Pengamanan Pantai Poigar, Tiberias, dan Nonapan yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	9.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.043	Pengamanan Pantai Pulau Miangas yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	35.800,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.044	Pengamanan Pantai Pulau Parit yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	7.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.045	Pengamanan Pantai Pulau Sedanau yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	11.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.046	Pengamanan Pantai Randomayang yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	5.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.047	Pengamanan Pantai Samak-Pegantungan yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	16.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.048	Pengamanan Pantai Sonit yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	7.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.049	Pengamanan Pantai Tanjung Aru yang dibangun	Km	0,74	0	0	0	27.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.050	Pengamanan Pantai terluar panipahan yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	21.250,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.051	Pengamanan Pantai Ujung Pandaran yang dibangun	Km	0,45	0	0	0	26.800,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.052	Pengendalian banjir Sungai Kec. Rumbio Jaya yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.053	Pengendalian banjir di Candi Muaro Jambi yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	0,0	00-Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	5037.CBS.054	Pengendalian Banjir di Kabupaten Jayapura (Sungai Kemiri dan Yahim, Bello, Flavou, Abhealle) yang dibangun	Km	2	0	0	0	72.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.055	Pengendalian banjir Kali Konda yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.056	Pengendalian banjir Kali Senowo yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	29.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.057	Pengendalian banjir kali Yetni yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	8.450,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.058	Pengendalian banjir KEK Mandalika yang dibangun	Km	2	0	0	0	40.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.059	Pengendalian banjir Kota Sintang yang dibangun	Km	0,25	0	0	0	20.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.060	Pengendalian banjir Sungai Akelaka yang dibangun	Km	6	0	0	0	45.650,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.061	Pengendalian banjir Sungai Asemgandok dan Grindulu yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	15.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.062	Pengendalian banjir Sungai Awo yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.063	Pengendalian banjir Sungai Barabai yang dibangun	Km	37	0	0	0	100.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.064	Pengendalian banjir Sungai Batang Bungo yang dibangun	Km	10	0	0	0	22.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.065	Pengendalian banjir Sungai Bendung yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	10.800,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.066	Pengendalian banjir Sungai Bottoe yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.CBS.067	Pengendalian banjir Sungai Brang Rea yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	15.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.068	Pengendalian banjir Sungai Cakung yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	7.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.069	Pengendalian banjir Sungai Cisabuk yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	5.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.070	Pengendalian banjir Sungai Cibeureum yang dibangun	Km	5,2	0	0	0	23.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.071	Pengendalian banjir Sungai Cijangkelok yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	5.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.072	Pengendalian banjir Sungai Cilamaya yang dibangun	Km	3	0	0	0	15.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.073	Pengendalian banjir Sungai Cipakancilan yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	9.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.074	Pengendalian banjir Sungai Citanduy yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	11.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.075	Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Asmat yang dibangun	Km	0,37	0	0	0	14.600,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.076	Pengendalian banjir Sungai di Kec. Batang Peranap yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	0,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.077	Pengendalian Banjir Sungai Digoel yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	12.350,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.078	Pengendalian banjir Sungai Kedukan yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	5.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.079	Pengendalian banjir Sungai Kelekar yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	5.400,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.080	Pengendalian banjir Sungai Lariang yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.CBS.081	Pengendalian banjir Sungai Maloso yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.082	Pengendalian banjir Sungai mapili yang dibangun	Km	0,45	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.083	Pengendalian banjir Sungai Martapura yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	15.750,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.084	Pengendalian banjir Sungai Motaain yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	10.010,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.085	Pengendalian banjir Sungai Saddang yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.086	Pengendalian banjir Sungai Seberang yang dibangun	Km	2	0	0	0	26.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.087	Pengendalian banjir Sungai Siwa yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.088	Pengendalian banjir Sungai Tabalong yang dibangun	Km	0,08	0	0	0	15.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.089	Pengendalian banjir Sungai Tammerodo yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.090	Pengendalian banjir Sungai Tolabit yang dibangun	Km	2,5	0	0	0	10.800,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.091	Pengendalian banjir Tukad Ayung yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	4.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.092	Pengendalian banjir Way Terusan Kiri yang dibangun	Km	5	0	0	0	7.900,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.093	Tanggul Bendung Tami yang dibangun	Km	0,08	0	0	0	5.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.RBH.001	Bendung gerak Cikarang Bekasi Laut yang dibangun	unit	2	0	0	0	100.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBH.003	Check dam Citarum Hulu yang dibangun	unit	1	0	0	0	20.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBH.004	Check dam Hulu Sungai Wanggu yang dibangun	unit	6	0	0	0	45.000,0	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
	5037.RBH.005	Kolam retensi Andir dan Polder-Polder di Kab. Bandung yang dibangun	unit	1	0	0	0	138.660,1	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBH.006	Pengendalian sedimen Batang Kuranji yang dibangun	unit	1	0	0	0	45.606,1	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBH.008	Pengendalian sedimen DAS Bone Gorontalo yang dibangun	unit	5	0	0	0	59.500,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBH.009	Pengendalian sedimen DAS Milangodaa yang dibangun	unit	1	0	0	0	97.960,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBH.010	Pintu air Demangan yang dibangun	unit	1	0	0	0	63.378,9	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBH.014	Pengendalian banjir Kota Tanjung Pinang yang dibangun	unit	1	0	0	0	23.500,0	21-Provinsi Kepulauan Riau	Kemen PUPR
	5037.RBS.001	Drainase KI Batang yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	60.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.002	Drainase KI Subang yang dibangun	Km	10	0	0	0	100.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.004	Pengamanan Pantai Dadap yang dibangun	Km	1	0	0	0	75.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.005	Pengamanan Pantai di Jakarta yang dibangun	Km	0,32	0	0	0	229.935,2	31-Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.006	Pengamanan Pantai Eretan yang dibangun	Km	1	0	0	0	30.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.007	Pengamanan Pantai Kalianda yang dibangun	Km	3,47	0	0	0	154.660,0	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5037.RBS.008	Pengamanan Pantai KEK Tanjung Lesung yang dibangun	Km	3,5	0	0	0	100.000,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.009	Pengamanan Pantai Limbangan yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	35.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.010	Pengamanan Pantai Loh Buaya di Pulau Rinca yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	25.860,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.011	Pengamanan Pantai pulau terluar di Provinsi Riau yang dibangun	Km	3,15	0	0	0	109.500,0	14-Provinsi Riau	Kemen PUPR
	5037.RBS.012	Pengamanan Pantai Ruas Gerokgak - Kalisadaya yang dibangun	Km	1,4	0	0	0	45.000,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
	5037.RBS.013	Pengamanan Pantai Ruas Lembeng - Purnama yang dibangun	Km	0,9	0	0	0	50.000,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
	5037.RBS.014	Pengamanan Pantai Sekotong yang dibangun	Km	0,8	0	0	0	35.000,0	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.015	Pengamanan Pantai Shopialousia/Sepatang yang dibangun	Km	0,65	0	0	0	30.000,0	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.016	Pengamanan Pantai Taludaa yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	7.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.017	Pengamanan Pantai Waha yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	30.000,0	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
	5037.RBS.018	Pengamanan Pantai Weda yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	20.000,0	82-Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.019	Pengendalian banjir Tukad Unda yang dibangun	Km	1	0	0	0	147.612,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
	5037.RBS.020	Pengendalian banjir Air Selagan yang dibangun	Km	1,68	0	0	0	44.500,0	17-Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
	5037.RBS.021	Pengendalian banjir Avfour Buntung yang dibangun	Km	0,18	0	0	0	9.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.022	FMSRB Sungai Ciujung yang dibangun	Km	8	0	0	0	84.000,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	5037.RBS.023	Pengendalian banjir avfour Watudakon yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	52.700,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.024	Pengendalian banjir Batang agam yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	19.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.025	Pengendalian banjir Batang Lembang yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	15.500,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.026	Pengendalian banjir Batang Siat yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	10.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.027	Pengendalian banjir Batang Suliti yang dibangun	Km	0,75	0	0	0	25.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.028	Pengendalian banjir Batang Tambuo yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	19.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.029	Pengendalian banjir Bengawan Solo Hilir yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	145.042,3	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.030	Pengendalian banjir dan rob di Kab. Pekalongan yang dibangun	Km	1,19	0	0	0	81.004,2	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.031	Pengendalian banjir DAS Bolango Hulu yang dibangun	Km	1	0	0	0	50.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.032	Pengendalian banjir DAS Konawe yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	40.000,0	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
	5037.RBS.033	Pengendalian banjir DAS Serang yang dibangun	Km	3,5	0	0	0	134.251,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.034	Pengendalian banjir DAS Taludaa yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	8.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.035	Pengendalian banjir di Tandun yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	10.000,0	14-Provinsi Riau	Kemen PUPR
	5037.RBS.036	Pengendalian banjir Kali Bekasi yang dibangun	Km	3	0	0	0	332.048,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.037	Pengendalian banjir Kali Blorong yang dibangun	Km	1	0	0	0	70.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.038	Pengendalian banjir Kali Bogel yang dibangun	Km	3,63	0	0	0	48.835,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.039	Pengendalian banjir Kali Gunting yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	8.950,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.040	Pengendalian banjir Kali Jeroan yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	84.500,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.041	Pengendalian banjir Kali Kemuning yang dibangun	Km	3	0	0	0	100.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.042	Pengendalian banjir Kali Lamong yang dibangun	Km	1	0	0	0	100.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.043	Pengendalian banjir Kali Welang yang dibangun	Km	0,9	0	0	0	34.339,7	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.044	Pengendalian banjir Kanal Banjir Timur Kota Semarang yang dibangun	Km	2,2	0	0	0	59.018,2	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.045	Pengendalian banjir Kota Makassar yang direvitalisasi	Km	0,6	0	0	0	15.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.046	Pengendalian banjir Kota Merauke yang dibangun	Km	1,7	0	0	0	18.850,0	94-Provinsi Papua	Kemen PUPR
	5037.RBS.047	Pengendalian banjir Muara Sungai Bogowonto yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	332.863,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.048	Pengendalian banjir muara Sungai Cikapundung yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	17.500,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.049	Pengendalian banjir pertemuan Sungai Batang Bangko dan Batang Suliti yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	50.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		5037.RBS.050	Pengendalian banjir Pertemuan tiga Sungai di kab. Ponorogo yang dibangun	Km	0,8	0	0	0	40.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.051	Pengendalian banjir Ring Ngotok Kanal yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	50.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.052	Pengendalian banjir rob Semarang-Demak yang dibangun	Km	5,3	0	0	0	600.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBS.053	Pengendalian banjir segmen Griya Mukti yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	7.500,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.054	Pengendalian banjir Sungai Aek Siguluan, Aek Silubung, Aek Sitete, Aek Tomok yang dibangun	Km	2,1	0	0	0	50.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.055	Pengendalian banjir Sungai Aek Silang yang dibangun	Km	0,55	0	0	0	15.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.056	Pengendalian banjir Sungai Ampal yang dibangun	Km	0,35	0	0	0	40.000,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.057	Pengendalian banjir Sungai Andegile yang dibangun	Km	0,8	0	0	0	20.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
		5037.RBS.058	Pengendalian banjir Sungai Babakan yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	7.500,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBS.059	Pengendalian banjir Sungai Babura yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	5.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.060	Pengendalian banjir Sungai Batanghari Hilir yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	10.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.061	Pengendalian banjir Sungai Belawan yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	5.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.062	Pengendalian banjir Sungai Bogowonto dan anak Sungaiinya yang dibangun	Km	2,5	0	0	0	159.326,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.063	Pengendalian banjir Sungai Bolango Hilir yang dibangun	Km	1,2	0	0	0	45.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.064	Pengendalian banjir Sungai bolango yang dibangun	Km	2,5	0	0	0	41.692,8	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.065	Pengendalian banjir Sungai Bone yang dibangun	Km	0,72	0	0	0	83.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.066	Pengendalian banjir Sungai Brazza yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	18.450,0	94-Provinsi Papua	Kemen PUPR
	5037.RBS.067	Pengendalian banjir Sungai Bringin yang dibangun	Km	3,84	0	0	0	114.400,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.068	Pengendalian banjir Sungai Cibeet yang dibangun	Km	1	0	0	0	15.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.069	Pengendalian banjir Sungai Ciberang yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	50.000,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR
	5037.RBS.070	Pengendalian banjir Sungai Cidurian yang dibangun	Km	2	0	0	0	73.500,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.071	Pengendalian banjir Sungai Cilemah Abang yang dibangun	Km	0,8	0	0	0	25.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.072	Pengendalian banjir Sungai Ciliwung yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	50.000,0	31-Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.073	Pengendalian banjir Sungai Cimanuk yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	15.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.074	Pengendalian banjir Sungai Cirasea yang dibangun	Km	1	0	0	0	10.500,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.075	Pengendalian banjir Sungai Cisadane yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	50.000,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR
	5037.RBS.076	Pengendalian banjir Sungai Cisanggarung yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	7.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.077	Pengendalian banjir Sungai Cisangkuy yang dibangun	Km	0,35	0	0	0	13.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.078	Pengendalian banjir Sungai Cisaranteun yang dibangun	Km	0,27	0	0	0	4.400,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.079	Pengendalian banjir Sungai Cisunggalah yang direhabilitasi	Km	1,4	0	0	0	10.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.080	Pengendalian banjir Sungai Citarum yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	15.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.081	Pengendalian banjir Sungai Deli yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	5.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.082	Pengendalian banjir Sungai Desa Embacang Gedang yang dibangun	Km	0,25	0	0	0	34.900,0	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
	5037.RBS.083	Pengendalian banjir Sungai Gelis yang dibangun	Km	4,25	0	0	0	84.230,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.084	Pengendalian banjir Sungai Jajar yang dibangun	Km	4,08	0	0	0	82.810,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.085	Pengendalian banjir Sungai Jeneponto yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	13.100,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.086	Pengendalian banjir Sungai Juana yang dibangun	Km	3,83	0	0	0	82.687,5	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.087	Pengendalian banjir Sungai Kapuas yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	37.600,0	61-Provinsi Kalimantan Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.088	Pengendalian banjir Sungai Karang Mumus yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	40.000,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.089	Pengendalian banjir Sungai Kec. Ponolesian Timur yang dibangun	Km	0,75	0	0	0	30.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.090	Pengendalian banjir Sungai Klafma yang dibangun	Km	0,45	0	0	0	15.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.093	Pengendalian banjir Sungai Krueng Singkil yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	30.100,0	11-Provinsi Aceh	Kemen PUPR
	5037.RBS.094	Pengendalian banjir Sungai Lamasi yang dibangun	Km	2,1	0	0	0	30.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.095	Pengendalian banjir Sungai Lambidaro-Sekanak yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	52.000,0	16-Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.096	Pengendalian banjir Sungai Malibaka yang dibangun	Km	3	0	0	0	75.000,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.097	Pengendalian banjir Sungai Masamba yang dibangun	Km	2,1	0	0	0	40.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.098	Pengendalian banjir Sungai Musi yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	72.000,0	16-Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.099	Pengendalian banjir Sungai Ongkak Dumoga yang dibangun	Km	1	0	0	0	41.500,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.100	Pengendalian banjir Sungai Opak yang dibangun	Km	1,6	0	0	0	26.000,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.101	Pengendalian banjir Sungai Paguyaman yang dibangun	Km	1	0	0	0	20.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.102	Pengendalian banjir Sungai Peliang yang dibangun	Km	1	0	0	0	17.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.103	Pengendalian banjir Sungai Percut yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	4.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.104	Pengendalian banjir Sungai Putih yang dibangun	Km	0,12	0	0	0	5.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.105	Pengendalian banjir Sungai Radda yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	20.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.106	Pengendalian banjir Sungai Randangan yang dibangun	Km	1	0	0	0	15.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.107	Pengendalian banjir Sungai Remu yang dibangun	Km	1,4	0	0	0	105.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.108	Pengendalian banjir Sungai Rongkong yang dibangun	Km	1,2	0	0	0	30.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.109	Pengendalian banjir Sungai Sadar yang dibangun	Km	1	0	0	0	50.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.110	Pengendalian banjir Sungai Sario yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	7.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.111	Pengendalian banjir Sungai Sikambang yang dibangun	Km	0,17	0	0	0	6.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.112	Pengendalian banjir Sungai Sunter yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	50.000,0	31-Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.113	Pengendalian banjir Sungai Tamalate yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	17.500,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.114	Pengendalian banjir Sungai Tondano yang dibangun	Km	0,34	0	0	0	19.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.115	Pengendalian banjir Sungai Tubhi yang dibangun	Km	0,18	0	0	0	10.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.116	Pengendalian banjir Sungai Tuntang yang dibangun	Km	4,25	0	0	0	103.783,3	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.117	Pengendalian banjir Sungai Waemese yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	40.000,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.118	Pengendalian banjir Sungai Wariori yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	19.950,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.119	Pengendalian banjir SWD 1 dan 2 yang dibangun	Km	4,76	0	0	0	130.232,1	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5037.RBS.120	Pengendalian banjir Tukad Badung yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	5.000,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBS.121	Pengendalian banjir upper Citarum yang dibangun	Km	10	0	0	0	34.904,4	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.122	Pengendalian Sungai Maen KEK Likupang yang dibangun	Km	2	0	0	0	15.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.123	Pengendalian banjir anak Sungai Citarum yang dibangun	Km	0,27	0	0	0	5.300,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.124	Pengendalian banjir Sungai Lawe Alas yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	30.000,0	11-Provinsi Aceh	Kemen PUPR
		5037.RBS.131	Pengendalian banjir Batang Sumpur yang dibangun	Km	0,85	0	0	0	18.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.RBS.133	Pengendalian banjir KEK Mandalika yang dibangun	Km	2	0	0	0	40.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
5039	Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	5039.CBG.008	Embung Siulak Hosa yang ditingkatkan	unit	1	0	0	0	0,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5039.CBG.009	Embung Sungsang yang dibangun	unit	1	0	0	0	10.000,0	14-Provinsi Riau	Kemen PUPR
		5039.CBG.010	Embung Babusan yang dibangun	unit	1	0	0	0	13.700,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5039.CBG.011	Embung Talago Mumbuang yang dibangun	unit	1	0	0	0	6.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5039.CBG.012	Embung Lasuang Batu yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5039.CBG.013	Embung Bandara Bungo yang dibangun	unit	1	0	0	0	29.878,5	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
		5039.CBG.014	Embung Universitas Sriwijaya yang dibangun	unit	1	0	0	0	12.400,0	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	5039.CBG.015	Embung Konservasi Kolong Yamin yang dibangun	unit	1	0	0	0	5.000,0	19-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kemen PUPR
	5039.CBG.016	Embung Konservasi Kolong Kelubi yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
	5039.CBG.017	Embung Desa Nibung yang dibangun	unit	1	0	0	0	20.000,0	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5039.CBG.018	Embung Bakar yang dibangun	unit	1	0	0	0	19.200,0	63-Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
	5039.CBG.019	Embung Danau Asam yang dibangun	unit	1	0	0	0	72.000,0	62-Provinsi Kalimantan Tengah	Kemen PUPR
	5039.CBG.020	Embung Serbaguna Sei Fatimah yang dibangun	unit	1	0	0	0	5.000,0	65-Provinsi Kalimantan Utara	Kemen PUPR
	5039.CBG.021	Embung Pondok Pesantren Tanara yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR
	5039.CBG.022	Embung Wanakaya yang dibangun	unit	1	0	0	0	15.150,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.CBG.023	Embung Serbaguna Hanum yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.CBG.024	Embung Pangkalan yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5039.CBG.025	Embung Cijoho yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.CBG.026	Embung Politeknik PUPR yang dibangun	unit	1	0	0	0	35.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.CBG.027	Embung Bandungrejo yang dibangun	unit	1	0	0	0	20.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.CBG.028	Embung Muallimin yang dibangun	unit	1	0	0	0	7.700,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5039.CBG.029	Embung Imogiri 2 yang dibangun	unit	1	0	0	0	18.600,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5039.CBG.030	Embung Desa Sendangtirta yang dibangun	unit	1	0	0	0	9.700,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5039.CBG.031	Embung Dukun yang dibangun	unit	1	0	0	0	10.600,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5039.CBG.032	Embung Tlogoguwo yang dibangun	unit	1	0	0	0	14.500,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5039.CBG.033	Embung Banteran yang dibangun	unit	1	0	0	0	13.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.CBG.034	Bendung Gerak Karangnongko yang dibangun	unit	1	0	0	0	74.916,2	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.CBG.035	Embung Sidomulyo yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.CBG.036	Embung Peniwen yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.CBG.037	Embung Montorna yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.CBG.038	Embung Sanur yang dibangun	unit	1	0	0	0	22.000,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
	5039.CBG.039	Embung Getakan II yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
	5039.CBG.040	Embung Samada yang dibangun	unit	1	0	0	0	3.500,0	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
	5039.CBG.041	Embung Kab. Sumba Timur yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5039.CBG.042	Embung Serbaguna di Kab. Timor Tengah Utara yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		5039.CBG.043	Embung Serbaguna di Kab. Sumba Tengah yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
		5039.CBG.044	Embung Serbaguna Wae Robang yang dibangun	unit	1	0	0	0	5.825,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
		5039.CBG.045	Embung Serbaguna Wae Nio yang dibangun	unit	1	0	0	0	5.825,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
		5039.CBG.046	Embung Konservasi Lepangan yang dibangun	unit	1	0	0	0	8.500,0	76-Provinsi Sulawesi Barat	Kemen PUPR
		5039.CBG.047	Embung Watulawu yang dibangun	unit	1	0	0	0	6.500,0	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
		5039.CBG.048	Embung Serbaguna Kab. Takalar yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5039.CBG.049	Embung Serbaguna Bonea Timur yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5039.CBG.050	Embung Liku Rombe yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5039.CBG.051	Embung di Kabupaten Seram Bagian Timur yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	81-Provinsi Maluku	Kemen PUPR
		5039.CBG.052	Embung Ohoi Wab yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	81-Provinsi Maluku	Kemen PUPR
		5039.CBG.053	Embung Konservasi Nakamura Pulau Morotai (Desa Sabala) yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	82-Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
		5039.CBG.054	Embung di Distrik Botawa yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	94-Provinsi Papua	Kemen PUPR
		5039.CBG.056	Embung Karangkemiri yang dibangun	unit	1	0	0	0	10.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5039.CBG.057	Embung Sumingkir yang dibangun	unit	1	0	0	0	16.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	5039.CBG.058	Embung Wanagama yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.CBG.059	Embung Binade yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.CBG.060	Embung Wrikapal (Kalimati) yang dibangun	unit	1	0	0	0	29.650,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5039.CBG.061	Embung Konservasi Tembeling yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	26.303,2	21-Provinsi Kepulauan Riau	Kemen PUPR
	5039.CBG.062	Embung Rumah Sakit Muhammad Hosein yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	0,0	16-Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
	5039.CBG.063	Embung Bayur Raya yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	0,0	61-Provinsi Kalimantan Barat	Kemen PUPR
	5039.CBG.069	Embung Jangkar yang ditingkatkan	unit	1	0	0	0	5.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.CBG.070	Embung Giwu yang dibangun	unit	1	0	0	0	15.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.001	Bendungan Sei Busung yang dibangun	unit	1	0	0	0	1.500,0	21-Provinsi Kepulauan Riau	Kemen PUPR
	5039.RBG.002	Bendungan Riam Kiwa yang dibangun	unit	1	0	0	0	500,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.003	Bendungan Batu Lepek yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.004	Bendungan Cibeet yang dibangun	unit	1	0	0	0	2.682,7	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.005	Bendungan Cijurey yang dibangun	unit	1	0	0	0	2.682,7	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.RBG.006	Bendungan Kedunglanggar yang dibangun	unit	1	0	0	0	190.000,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5039.RBG.007	Bendungan Mbay yang dibangun	unit	1	0	0	0	75.000,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.008	Bendungan Welikis yang dibangun	unit	1	0	0	0	12.500,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.009	Bendungan Jenelata yang dibangun	unit	1	0	0	0	3.500,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5039.RBG.010	Bendungan Wairoro yang dibangun	unit	1	0	0	0	1.000,0	82-Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
	5039.RBG.011	Bendungan Keureuto yang dibangun	unit	1	0	0	0	188.874,3	82-Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
	5039.RBG.012	Bendungan Rukoh yang dibangun	unit	1	0	0	0	263.000,0	82-Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
	5039.RBG.013	Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh yang dibangun	unit	1	0	0	0	21.000,0	82-Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
	5039.RBG.014	Bendungan Lau Simeme yang dibangun	unit	1	0	0	0	529.625,4	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5039.RBG.015	Bendungan Tiga Dihaji yang dibangun	unit	1	0	0	0	458.732,1	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5039.RBG.016	Bendungan Margatiga yang dibangun	unit	1	0	0	0	441.117,2	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5039.RBG.017	Bendungan Way Sekampung yang dibangun	unit	1	0	0	0	644.659,2	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5039.RBG.018	Bendungan Sepaku Semoi yang dibangun	unit	1	0	0	0	158.000,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.019	Bendungan Lambakan yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.020	Bendungan Karian yang dibangun	unit	1	0	0	0	331.696,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5039.RBG.021	Bendungan Ciawi yang dibangun	unit	1	0	0	0	495.968,5	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.022	Bendungan Sukamahi yang dibangun	unit	1	0	0	0	158.369,1	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.023	Bendungan Sadawarna yang dibangun	unit	1	0	0	0	591.214,4	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.024	Bendungan Cipanas yang dibangun	unit	1	0	0	0	669.028,7	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.025	Bendungan Kuningan yang dibangun	unit	1	0	0	0	37.400,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.026	Bendungan Leuwikeris yang dibangun	unit	1	0	0	0	1.017.216,3	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.027	Bendungan Randugunting yang dibangun	unit	1	0	0	0	179.645,7	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.RBG.028	Bendungan Jragung yang dibangun	unit	1	0	0	0	210.919,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.RBG.029	Bendungan Bener yang dibangun	unit	1	0	0	0	292.989,2	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.RBG.030	Bendungan Jlantah yang dibangun	unit	1	0	0	0	190.513,4	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.RBG.031	Bendungan Bendo yang dibangun	unit	1	0	0	0	237.457,9	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.032	Bendungan Gongseng yang dibangun	unit	1	0	0	0	119.084,4	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.033	Bendungan Pidekso yang dibangun	unit	1	0	0	0	354.449,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.RBG.034	Bendungan Tukul yang dibangun	unit	1	0	0	0	206.613,9	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5039.RBG.035	Bendungan Bagong yang dibangun	unit	1	0	0	0	181.262,9	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.036	Bendungan Semantok yang dibangun	unit	1	0	0	0	1.223.466,7	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.037	Bendungan Tugu yang dibangun	unit	1	0	0	0	805.035,5	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.038	Bendungan Sidan yang dibangun	unit	1	0	0	0	644.154,7	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
	5039.RBG.039	Bendungan Tamblang yang dibangun	unit	1	0	0	0	220.649,9	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
	5039.RBG.040	Bendungan Beringin Sila yang dibangun	unit	1	0	0	0	451.986,1	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.041	Bendungan Meninting yang dibangun	unit	1	0	0	0	317.444,5	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.042	Bendungan Tiu Suntuk yang dibangun	unit	1	0	0	0	170.796,9	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.043	Bendungan Bintang Bano yang dibangun	unit	1	0	0	0	331.868,5	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.044	Pelengkap Bendungan Tanju dan Bendungan Mila yang dibangun	unit	1	0	0	0	5.000,0	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.045	Bendungan Manikin yang dibangun	unit	1	0	0	0	539.799,3	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.046	Bendungan Napun Gete yang dibangun	unit	1	0	0	0	255.914,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.047	Bendungan Temef yang dibangun	unit	1	0	0	0	266.177,5	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.048	Bendungan Kuwil Kawangkoan yang dibangun	unit	1	0	0	0	487.717,4	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5039.RBG.049	Bendungan Lolak yang dibangun	unit	1	0	0	0	858.726,3	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5039.RBG.050	Bendungan Bulango Ulu yang dibangun	unit	1	0	0	0	154.050,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5039.RBG.051	Bendungan Budong-Budong yang dibangun	unit	1	0	0	0	148.894,5	76-Provinsi Sulawesi Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.052	Bendungan Ameroro yang dibangun	unit	1	0	0	0	322.000,0	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
	5039.RBG.053	Bendungan Ladongi yang dibangun	unit	1	0	0	0	325.742,2	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
	5039.RBG.054	Bendungan Pamukkulu yang dibangun	unit	1	0	0	0	311.901,5	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5039.RBG.055	Bendungan Karalloe yang dibangun	unit	1	0	0	0	202.701,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5039.RBG.056	Bendungan Way Apu yang dibangun	unit	1	0	0	0	324.780,0	81-Provinsi Maluku	Kemen PUPR
	5039.RBG.057	Bendungan Wonogiri yang direhabilitasi (Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir Slice II)	unit	1	0	0	0	48.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.RBG.058	Danau Sipin yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	10.000,0	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
	5039.RBG.059	Danau Sebedang yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	5.000,0	61-Provinsi Kalimantan Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.060	Danau Rawa Pening yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	35.929,9	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.RBG.061	Danau Tondano (Lanjutan) Segmen Tolour-Tounsaru yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	75.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5039.RBG.062	Danau Limboto yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	30.450,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
		5039.RBG.063	Danau Tempe yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	0,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5039.RBG.064	Danau Sentani yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	8.500,0	94-Provinsi Papua	Kemen PUPR
		5039.RBG.065	Danau Ayamaru yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	30.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
		5039.RBG.066	Revitalisasi Rowojombor Kabupaten Klaten	unit	1	0	0	0	100.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5040	Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	5040.CBG.097	Waduk Panepat yang ditingkatkan	unit	1	1	1	1	31.500,0	61-Provinsi Kalimantan Barat	Kemen PUPR
		5040.CBS.042	Bangunan Penyediaan Air Baku likupang yang dibangun	Km	1	0	0	0	54.995,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
		5040.RBS.015	Food Estate Humbanghasundutan yang dikembangkan	Km	31,5	0	0	0	125.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5040.RBS.041	Peyediaan Air Baku Bendungan Pengga untuk KEK Mandalika di Kab. Lombok Tengah yang dibangun	Km	5	0	0	0	35.250,0	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
075.GJ Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika											
3346	Pengelolaan Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG	3346.QDC.001	Layanan Informasi iklim terapan melalui Sekolah lapang Iklim (SLI)	orang	2.200	2.400	2.400	2.400	49.100,0	Wilayah sentra produksi pertanian	BMKG
5201	Pengelolaan Meteorologi Maritim BMKG	5201.BAH.001	Layanan Informasi Meteorologi Maritim yang Berkualitas	layanan	1	1	1	1	155.879,7	34 provinsi	BMKG
		5201.BAH.002	Layanan Informasi Meteorologi Maritim di Daerah	layanan	1	1	1	1	27.819,8	34 provinsi	BMKG

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5201.QAH.001	Layanan Informasi meteorologi maritim (Strengthening of Marine Meteorology)	layanan	20	20	20	20	1.792.300,0	34 provinsi	BMKG
		5201.QDC.001	Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN)	orang	3.800	4.000	4.000	4.000	29.700,0	34 provinsi	BMKG
103.FA Program Ketahanan Bencana											
3882	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis pada Lingkup Pencegahan Melalui Kesiapsiagaan	3882.ABS.001	Jumlah Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dalam Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Rekomendasi Kebijakan	2	2	3	3	2.475,0	Pusat	BNPB
3882	Penguatan Desa Tangguh Bencana	3882.UBB.001	Jumlah Penguatan Desa Tangguh Bencana	desa	120	90	120	120	47,10	34 provinsi	BNPB
4280	Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana	4280.PBS.001	Jumlah Risiko Bencana	Jumlah peta risiko bencana yang disusun	5	1	5	5	26.300,0	Pusat	BNPB
4281	Pengembangan Strategi PB	4281.PBS.001	Jumlah Analisis Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	9	5	9	9	17.867,9	Pusat	BNPB
4282	Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana	4282.UAB.001	Jumlah Sistem Informasi Bidang Kebencanaan yang dibangun	Sistem Informasi	5	2	5	5	23.000,0	Pusat	BNPB
4283	Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis pada Lingkup Pencegahan Melalui Mitigasi Bencana	4283.RBH.001	Jumlah Rambu, Papan Evakuasi dan Informasi Bencana yang terpasang	Unit	-	8.600	1.540	0	32.800,0	25 Provinsi (237 Kab/Kota)	BNPB
4284	Peringatan Dini	4284.QAH.001	Jumlah Layanan Sistem Peringatan Dini	Layanan	8	5	10	11	32.600,0	34 Provinsi	BNPB
		4284.ABS.001	Jumlah Rancang Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana yang dibangun	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-	5.000,0	Pusat	BNPB

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4284.TAJ.001	Jumlah Platform MHEWS dan Sistem Penunjang Pengambilan Keputusan yang dibangun	Unit	-	-	1	-	19.865,0	Pusat	BNPB
		4284.TAJ.001	Jumlah Sistem Penyebaran Informasi Peringatan Multi-Bahaya yang dikembangkan	Unit	-	-	-	1	9.965,5	Pusat	BNPB
Kegiatan Pendukung											
010.CM Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.020	Jumlah provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	Provinsi	10	20	24	34	10,719.0	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5037	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	5037.RBH.001	Bendung gerak Cikarang Bekasi Laut yang dibangun	unit	2	0	0	0	100.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBH.002	Bendung gerak Kanal Banjir Barat Kota Semarang yang dibangun	unit	0	0	0	0	14.900.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBH.003	Check dam Citarum Hulu yang dibangun	unit	1	0	0	0	20.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBH.004	Check dam Hulu Sungai Wanggu yang dibangun	unit	6	0	0	0	45.000.000,0	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
		5037.RBH.005	Kolam retensi Andir dan Polder-Polder di Kab. Bandung yang dibangun	unit	1	0	0	0	138.660.103,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBH.006	Pengendalian sedimen Batang Kuranji yang dibangun	unit	1	0	0	0	45.606.098,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBH.008	Pengendalian sedimen DAS Bone Gorontalo yang dibangun	unit	5	0	0	0	59.500.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
		5037.RBH.009	Pengendalian sedimen DAS Milangodaa yang dibangun	unit	1	0	0	0	97.960.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
		5037.RBH.010	Pintu air Demangan yang dibangun	unit	1	0	0	0	63.378.900,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBH.011	Pompa Ancol Sentiong yang dibangun	unit	1	0	0	0	201.635.361,0	31-Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5037.RBH.012	FMSRB Sungai Way Batu Merah yang dibangun	unit	4	0	0	0	33.648.799,0	81-Provinsi Maluku	Kemen PUPR
		5037.RBH.013	Infrastructure Reconstruction Sector Loan Central Sulawesi yang dilaksanakan	unit	0	0	0	0	39.493.718,0	Provinsi Sulawesi Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBH.014	Pengendalian banjir Kota Tanjung Pinang yang dibangun	unit	1	0	0	0	23.500.000,0	21-Provinsi Kepulauan Riau	Kemen PUPR
		5037.RBS.001	Drainase KI Batang yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	60.000.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBS.002	Drainase KI Subang yang dibangun	Km	10	0	0	0	100.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.003	Oxbow DAS Citarum yang ditangani	Km	1	0	0	0	20.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.004	Pengamanan Pantai Dadap yang dibangun	Km	1	0	0	0	75.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.005	Pengamanan Pantai di Jakarta yang dibangun	Km	0,32	0	0	0	229.935.193,0	31-Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
		5037.RBS.006	Pengamanan Pantai Eretan yang dibangun	Km	1	0	0	0	30.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.007	Pengamanan Pantai Kalianda yang dibangun	Km	3,47	0	0	0	154.660.000,0	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR
		5037.RBS.008	Pengamanan Pantai KEK Tanjung Lesung yang dibangun	Km	3,5	0	0	0	100.000.000,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR
		5037.RBS.009	Pengamanan Pantai Limbangan yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	35.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.010	Pengamanan Pantai Loh Buaya di Pulau Rinca yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	25.860.000,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.011	Pengamanan Pantai pulau terluar di Provinsi Riau yang dibangun	Km	3,15	0	0	0	109.500.000,0	14-Provinsi Riau	Kemen PUPR
		5037.RBS.012	Pengamanan Pantai Ruas Gerokgak - Kalisada yang dibangun	Km	1,4	0	0	0	45.000.000,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBS.013	Pengamanan Pantai Ruas Lembeng - Purnama yang dibangun	Km	0,9	0	0	0	50.000.000,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBS.014	Pengamanan Pantai Sekotong yang dibangun	Km	0,8	0	0	0	35.000.000,0	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.015	Pengamanan Pantai Shopialousia/Sepatang yang dibangun	Km	0,65	0	0	0	30.000.000,0	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.016	Pengamanan Pantai Taludaa yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	7.000.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.017	Pengamanan Pantai Waha yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	30.000.000,0	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
	5037.RBS.018	Pengamanan Pantai Weda yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	20.000.000,0	82-Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.019	Pengendalian banjir Tukad Unda yang dibangun	Km	1	0	0	0	147.611.961,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
	5037.RBS.020	Pengendalian banjir Air Selagan yang dibangun	Km	1,68	0	0	0	44.500.000,0	17-Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
	5037.RBS.021	Pengendalian banjir Avfour Buntung yang dibangun	Km	0,18	0	0	0	9.000.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.022	FMSRB Sungai Ciujung yang dibangun	Km	8	0	0	0	84.000.000,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR
	5037.RBS.023	Pengendalian banjir avfour Watudakon yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	52.700.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.024	Pengendalian banjir Batang agam yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	19.000.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.025	Pengendalian banjir Batang Lembang yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	15.500.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.026	Pengendalian banjir Batang Siat yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	10.000.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.027	Pengendalian banjir Batang Suliti yang dibangun	Km	0,75	0	0	0	25.000.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.028	Pengendalian banjir Batang Tambuo yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	19.000.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.029	Pengendalian banjir Bengawan Solo Hilir yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	145.042.293,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.030	Pengendalian banjir dan rob di Kab. Pekalongan yang dibangun	Km	1,19	0	0	0	81.004.185,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.031	Pengendalian banjir DAS Bolango Hulu yang dibangun	Km	1	0	0	0	50.000.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.032	Pengendalian banjir DAS Konawe yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	40.000.000,0	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
	5037.RBS.033	Pengendalian banjir DAS Serang yang dibangun	Km	3,5	0	0	0	134.251.000,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.034	Pengendalian banjir DAS Taludaa yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	8.000.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.035	Pengendalian banjir di Tandun yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	10.000.000,0	14-Provinsi Riau	Kemen PUPR
	5037.RBS.036	Pengendalian banjir Kali Bekasi yang dibangun	Km	3	0	0	0	332.048.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.037	Pengendalian banjir Kali Blorong yang dibangun	Km	1	0	0	0	70.000.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.038	Pengendalian banjir Kali Bogel yang dibangun	Km	3,63	0	0	0	48.834.988,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.039	Pengendalian banjir Kali Gunting yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	8.950.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.040	Pengendalian banjir Kali Jeroan yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	84.500.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.041	Pengendalian banjir Kali Kemuning yang dibangun	Km	3	0	0	0	100.000.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.042	Pengendalian banjir Kali Lamong yang dibangun	Km	1	0	0	0	100.000.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.043	Pengendalian banjir Kali Welang yang dibangun	Km	0,9	0	0	0	34.339.662,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.044	Pengendalian banjir Kanal Banjir Timur Kota Semarang yang dibangun	Km	2,2	0	0	0	59.018.187,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.045	Pengendalian banjir Kota Makassar yang direvitalisasi	Km	0,6	0	0	0	15.000.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.046	Pengendalian banjir Kota Merauke yang dibangun	Km	1,7	0	0	0	18.850.000,0	94-Provinsi Papua	Kemen PUPR
	5037.RBS.047	Pengendalian banjir Muara Sungai Bogowonto yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	332.863.000,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.048	Pengendalian banjir muara Sungai Cikapundung yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	17.500.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.049	Pengendalian banjir pertemuan Sungai Batang Bangko dan Batang Suliti yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	50.000.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.050	Pengendalian banjir Pertemuan tiga Sungai di kab. Ponorogo yang dibangun	Km	0,8	0	0	0	40.000.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.051	Pengendalian banjir Ring Ngotok Kanal yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	50.000.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.052	Pengendalian banjir rob Semarang -Demak yang dibangun	Km	5,3	0	0	0	600.000.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.053	Pengendalian banjir segmen Griya Mukti yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	7.500.000,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.054	Pengendalian banjir Sungai Aek Siguluan, Aek Silubung, Aek Sitete, Aek Tomok yang dibangun	Km	2,1	0	0	0	50.000.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.055	Pengendalian banjir Sungai Aek Silang yang dibangun	Km	0,55	0	0	0	15.000.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.056	Pengendalian banjir Sungai Ampal yang dibangun	Km	0,35	0	0	0	40.000.000,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.057	Pengendalian banjir Sungai Andegile yang dibangun	Km	0,8	0	0	0	20.000.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.058	Pengendalian banjir Sungai Babakan yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	7.500.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.059	Pengendalian banjir Sungai Babura yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	5.000.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.060	Pengendalian banjir Sungai Batanghari Hilir yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	10.000.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.061	Pengendalian banjir Sungai Belawan yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	5.000.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.062	Pengendalian banjir Sungai Bogowonto dan anak Sungai lainnya yang dibangun	Km	2,5	0	0	0	159.326.000,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.063	Pengendalian banjir Sungai Bolango Hilir yang dibangun	Km	1,2	0	0	0	45.000.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.064	Pengendalian banjir Sungai bolango yang dibangun	Km	2,5	0	0	0	41.692.820,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.065	Pengendalian banjir Sungai Bone yang dibangun	Km	0,72	0	0	0	83.000.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.066	Pengendalian banjir Sungai Brazza yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	18.450.000,0	94-Provinsi Papua	Kemen PUPR
	5037.RBS.067	Pengendalian banjir Sungai Bringin yang dibangun	Km	3,84	0	0	0	114.400.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.068	Pengendalian banjir Sungai Cibeet yang dibangun	Km	1	0	0	0	15.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.069	Pengendalian banjir Sungai Ciberang yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	50.000.000,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR
	5037.RBS.070	Pengendalian banjir Sungai Cidurian yang dibangun	Km	2	0	0	0	73.500.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.071	Pengendalian banjir Sungai Cilemah Abang yang dibangun	Km	0,8	0	0	0	25.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.072	Pengendalian banjir Sungai Ciliwung yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	50.000.000,0	31-Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.073	Pengendalian banjir Sungai Cimanuk yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	15.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		5037.RBS.074	Pengendalian banjir Sungai Cirasea yang dibangun	Km	1	0	0	0	10.500.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.075	Pengendalian banjir Sungai Cisadane yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	50.000.000,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR
		5037.RBS.076	Pengendalian banjir Sungai Cisanggarung yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	7.000.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBS.077	Pengendalian banjir Sungai Cisangkuy yang dibangun	Km	0,35	0	0	0	13.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.078	Pengendalian banjir Sungai Cisaranteun yang dibangun	Km	0,27	0	0	0	4.400.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.079	Pengendalian banjir Sungai Cisunggalah yang direhabilitasi	Km	1,4	0	0	0	10.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.080	Pengendalian banjir Sungai Citarum yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	15.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.081	Pengendalian banjir Sungai Deli yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	5.000.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.082	Pengendalian banjir Sungai Desa Embacang Gedang yang dibangun	Km	0,25	0	0	0	34.900.000,0	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
		5037.RBS.083	Pengendalian banjir Sungai Gelis yang dibangun	Km	4,25	0	0	0	84.230.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBS.084	Pengendalian banjir Sungai Jajar yang dibangun	Km	4,08	0	0	0	82.810.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBS.085	Pengendalian banjir Sungai Jeneponto yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	13.100.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5037.RBS.086	Pengendalian banjir Sungai Juana yang dibangun	Km	3,83	0	0	0	82.687.500,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBS.087	Pengendalian banjir Sungai Kapuas yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	37.600.000,0	61-Provinsi Kalimantan Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.088	Pengendalian banjir Sungai Karang Mumus yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	40.000.000,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.089	Pengendalian banjir Sungai Kec. Ponoosian Timur yang dibangun	Km	0,75	0	0	0	30.000.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.090	Pengendalian banjir Sungai Klafma yang dibangun	Km	0,45	0	0	0	15.000.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.093	Pengendalian banjir Sungai Krueng Singkil yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	30.100.000,0	11-Provinsi Aceh	Kemen PUPR
		5037.RBS.094	Pengendalian banjir Sungai Lamasi yang dibangun	Km	2,1	0	0	0	30.000.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5037.RBS.095	Pengendalian banjir Sungai Lambidaro-Sekanak yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	52.000.000,0	16-Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.096	Pengendalian banjir Sungai Malibaka yang dibangun	Km	3	0	0	0	75.000.000,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.097	Pengendalian banjir Sungai Masamba yang dibangun	Km	2,1	0	0	0	40.000.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.098	Pengendalian banjir Sungai Musi yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	72.000.000,0	16-Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.099	Pengendalian banjir Sungai Ongkak Dumoga yang dibangun	Km	1	0	0	0	41.500.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.100	Pengendalian banjir Sungai Opak yang dibangun	Km	1,6	0	0	0	26.000.000,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.101	Pengendalian banjir Sungai Paguyaman yang dibangun	Km	1	0	0	0	20.000.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.102	Pengendalian banjir Sungai Peliang yang dibangun	Km	1	0	0	0	17.000.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.103	Pengendalian banjir Sungai Percut yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	4.000.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.104	Pengendalian banjir Sungai Putih yang dibangun	Km	0,12	0	0	0	5.000.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.105	Pengendalian banjir Sungai Radda yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	20.000.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.106	Pengendalian banjir Sungai Randangan yang dibangun	Km	1	0	0	0	15.000.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.107	Pengendalian banjir Sungai Remu yang dibangun	Km	1,4	0	0	0	105.000.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.108	Pengendalian banjir Sungai Rongkong yang dibangun	Km	1,2	0	0	0	30.000.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.109	Pengendalian banjir Sungai Sadar yang dibangun	Km	1	0	0	0	50.000.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.110	Pengendalian banjir Sungai Sario yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	7.000.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.111	Pengendalian banjir Sungai Sikambang yang dibangun	Km	0,17	0	0	0	6.000.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.112	Pengendalian banjir Sungai Sunter yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	50.000.000,0	31-Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.113	Pengendalian banjir Sungai Tamalate yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	17.500.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.114	Pengendalian banjir Sungai Tondano yang dibangun	Km	0,34	0	0	0	19.000.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.115	Pengendalian banjir Sungai Tubhi yang dibangun	Km	0,18	0	0	0	10.000.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.116	Pengendalian banjir Sungai Tuntang yang dibangun	Km	4,25	0	0	0	103.783.315,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5037.RBS.117	Pengendalian banjir Sungai Waemese yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	40.000.000,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.118	Pengendalian banjir Sungai Wariori yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	19.950.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.119	Pengendalian banjir SWD 1 dan 2 yang dibangun	Km	4,76	0	0	0	130.232.050,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBS.120	Pengendalian banjir Tukad Badung yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	5.000.000,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBS.121	Pengendalian banjir upper Citarum yang dibangun	Km	10	0	0	0	34.904.368,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.122	Pengendalian Sungai Maen KEK Likupang yang dibangun	Km	2	0	0	0	15.000.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.123	Pengendalian banjir anak Sungai Citarum yang dibangun	Km	0,27	0	0	0	5.300.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.124	Pengendalian banjir Sungai Lawe Alas yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	30.000.000,0	11-Provinsi Aceh	Kemen PUPR
		5037.RBS.125	Sudetan Ciliwung KBT yang dibangun	Km	1	0	0	0	150.000.000,0	31-Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
		5037.RBS.126	Sudetan Floodway Sedayu lawas yang ditingkatkan	Km	0,5	0	0	0	59.561.500,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.127	UFC kota Bima yang dibangun	Km	0	0	0	0	3.500.000,0	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.128	UFC Kota Jambi yang dibangun	Km	0	0	0	0	3.500.000,0	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
		5037.RBS.129	UFC Kota Padang yang dibangun	Km	0	0	0	0	3.500.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.130	UFC Kota Pekanbaru yang dibangun	Km	0	0	0	0	3.500.000,0	14-Provinsi Riau	Kemen PUPR
		5037.RBS.131	Pengendalian banjir Batang Sumpur yang dibangun	Km	0,85	0	0	0	18.500.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
103.FA Program Ketahanan Bencana											
3893	Layanan data dan informasi serta komunikasi kebencanaan	3893.QEG.001	Jumlah prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang ditingkatkan	Unit	10	10	10	10	58.000,0	Pusat	BNPB
		3893.QMB.001	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan budaya sadar bencana	Layanan	81	81	81	81	12.200,0	Pusat	BNPB
3882	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pencegahan melalui kesiapsiagaan	3882.UBB.001	Jumlah daerah yang memiliki rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Lokasi	2	2	2	2	2.400,0	Pusat	BNPB

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
103.WA Program Dukungan Manajemen											
3878	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	3878.SCK.001	Jumlah sumber daya manusia pelaksanaan diklat teknis dan simulasi di daerah	Orang	760	760	760	760	54.900,0	34 Provinsi	BNPB
INDIKATOR TPB/SDGs: 13.1.2* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											
020.FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi											
6347	Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	6347.PBI.401	Jaringan Pemantauan Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah (CAT)	Cekungan Air Tanah (CAT)	13	13	13	13	221.667,4	Tersebar	Kemen ESDM
075.GJ Program Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika											
3350	Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG	3350.QAH.003	Prediksi dan peringatan dini cuaca dengan Scalling Up Weather Capacity II	Layanan	3	24	34	34	346.200,0	34 Provinsi	BMKG
5201	Pengelolaan Meteorologi Maritim BMKG	5201.QAH.003	Informasi Meteorologi Maritim (Strengthening of Marine Meteorology)	Layanan	20	20	20	20	1.792.300,0	100 Pelabuhan	BMKG
3349	Pengelolaan Meteorologi Penerbangan BMKG	3349.QAH.002	Informasi peringatan dini windshear	Bandara	3	3	4	4	278.500,0	14 Bandara	BMKG
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5406	Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	5406.BDB.001	Layanan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Lembaga	1	1	1	1	21.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5406.QDB.001	Lembaga/Forum Peduli DAS yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lembaga	34	34	34	34	20.400,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5406.UAB.001	Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time	Sistem Informasi	1	1	1	1	71.400,0	Pusat	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana											
010.CM Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.020	Jumlah provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	Provinsi	10	20	24	34	10.719,0	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6136.UBA.004	Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah	Provinsi	34	34	34	34	2.100,0	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6136.UBA.001	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	Daerah	133	133	133	133	7.247,5	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
		6136.UBA.004	Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah	Provinsi	34	34	34	34	2.100,0	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
		6136.UBA.005	Daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan tanggap darurat	Daerah	34	34	34	34	1.000,0	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	1241.UBA.001	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	Daerah	-	13	13	13	7.200,0	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5037	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	5037.RBR.001	Consulting Services of Bali Beach Conservation Project (Phase 2) yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1	33.330,1	Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBR.002	Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	19.500,0	Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
		5037.RBR.003	Dokumen desain Pengendalian banjir upper Citarum yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	10.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBR.004	Engineering service project Batam dan Bintan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Kepulauan Riau	Kemen PUPR
		5037.RBR.005	Engineering service project di Pulau Bangka yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Bangka Belitung	Kemen PUPR
		5037.RBR.006	Engineering service project di Sungai Cipunegara yang dibangun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBR.007	Engineering service project Sungai Siak yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Riau	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
103.FA Program Ketahanan Bencana										
3893 Layanan data dan informasi serta komunikasi kebencanaan	3893.QEG.001	Jumlah prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang ditingkatkan	Unit	10	10	10	10	58.000,0	Pusat	BNPB
	3893.QMB.001	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan budaya sadar bencana	Layanan	81	81	81	81	12.200,0	Pusat	BNPB
3882 Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pencegahan melalui kesiapsiagaan	3882.UBB.001	Jumlah Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dalam Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Rekomendasi Kebijakan	2	3	3	3	3.375,0	Pusat	BNPB
103.WA Program Dukungan Manajemen										
3878 Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	3878.SCK.001	Jumlah sumberdaya manusia pelaksanaan diklat teknis dan simulasi di daerah	Orang	570	570	760	760	54.900,0	34 Provinsi	BNPB
INDIKATOR TPB/SDGs: 13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National										
029.FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim										
5447 Mitigasi Perubahan Iklim	5447.QDB.001	Data Pemantauan Aksi Mitigasi yang Tervalidasi	Layanan	1	1	1	1	10.620,6	Pusat	Kemen LHK
5448 Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi	5448.BMA.001	Data Inventarisasi GRK dan Verifikasi serta Registri yang termutakhirkan	Layanan	1	1	1	1	15.556,5	Pusat	Kemen LHK
Kegiatan Pendukung										
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa										
6139 Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.016	Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	17	22	28	34	30.693,8	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
	6139.UBA.015	Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	10	17	24	34	7.035,8	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
	6139.UBA.13	Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	10	17	24	34	6.126,8	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6139.UBA.14	Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	10	17	24	34	6.438,8	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
		6139.UBA.17	Provinsi yang terfasilitasi penyusunan/pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	17	22	28	34	14.596,0	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
		6139.UBA.19	Provinsi yang mengalami penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	10	17	24	34	10.756,0	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
INDIKATOR TPB/SDGs:											
13.2.2* Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun											
13.2.2.(a) Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)											
13.2.2.(b) Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)											
020.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan											
6350	Pengelolaan Ketenagalistrikan	6350.PBJ.001	Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Rekomendasi	1	1	1	1	9.000,0	Pusat	Kemen ESDM
6352	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6352.PBI.003	Wilayah Panas Bumi yang Ditawarkan	Wilayah	0	N/A	4	3	2.957,8	Tersebar	Kemen ESDM
		6352.PBI.004	Evaluasi Eksplorasi Panas Bumi oleh Pemerintah	Rekomendasi Kebijakan	8	0	11	12	72.810,0	Kab. Sukabumi, Kab. Majalengka, Kab. Lebak, Kab. Lombok Timur, Kab. Ngada, Kab. Donggala, Kab. Tana Toraja, Kab. Halmahera Barat	Kemen ESDM
		6352.QIA.003	Monitoring TKDN Bidang Panas Bumi	Persen	35,0	35,0	33,0	35,0	4.050,0	Pusat	Kemen ESDM
		6352.QIA.002	Monitoring TKDN Bidang Aneka EBT	Persen	PLTA (70) PLTS (40) PLTB (40)	PLTA (70) PLTS (40) PLTB (40)	PLTA (70) PLTS (40) PLTB (40)	PLTA (70) PLTS (40) PLTB (40)	2.583,6	Pusat	Kemen ESDM
		6352.QIA.001	Monitoring TKDN Bidang Bioenergi	Persen	40,0	40,0	40,0	40,0	2.140,0	Pusat	Kemen ESDM

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
020.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan											
6532	Efisiensi dan Konservasi Energi	6532.PBI.002	Penurunan Intensitas Energi Final	SBM/Miliar Rupiah	0.90	0.90	0.80	0.80	38.694,4	Pusat	Kemen ESDM
6352	Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	6352.PDA.001	Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi	Peralatan/ Produk	2	1	N/A	N/A	1.927,9	Pusat	Kemen ESDM
		6352.AEF.001	Bimbingan Teknis Konservasi Energi	Orang	300	400	400	400	3.244,8	Tersebar	Kemen ESDM
		6352.BIC.001	Manajemen Energi Lembaga	Lembaga	1	1	1	1	PM	Pusat	Kemen ESDM
022.GA Program Infrastruktur Konektivitas											
4649	Pelayanan Transportasi Jabodetabek	4649.RAC.002	Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek	Unit	1	41	N/A	N/A	41.253,2	Jabodetabek	Kemenhub
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4840	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	4840.CBB.006	Sistem pengelolaan persampahan skala regional	unit	46	46	46	47	2.539.100,0	224 kab/kota	Kemen PUPR
		4840.CBB.006	Sistem pengelolaan persampahan skala kota	unit	46	46	46	47	25.391.000,0	224 kab/kota	Kemen PUPR
		4840.CBB.006	Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	unit	6270	6270	6270	6270	18.682.000,0	28 kab/kota	Kemen PUPR
4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4346.RAI.001	Kawasan mangrove yang direhabilitasi	Ha	400	400	400	400	187.400,0	60 Lokasi	KKP
		4346.RBH.001	Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	Unit	2	2	2	2	67.365,3	Daerah	KKP
032.HB Program Pengelolaan Ruang Laut											
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	2362.REA.003	Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan (Kumulatif)	Ha	N/A	N/A	19.000.000	20.000.000	86.703,6	34 Provinsi	KKP
		2362.RAI.001	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Baru yang Ditetapkan	Ha	800	900	900	900	27.501,5	9 Provinsi	KKP
		2362.RAI.002	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional	Ha	N/A	N/A	19.000.000	20.000.000	196.833,6	46 Lokasi	KKP
		2362.PEC.001	Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati	Kesepakatan	2	2	5	5	8.742,0	Pusat	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2362.PEE.001	Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Kerjasama	3	5	5	5	11.484,0	Pusat	KKP
		2362.REB.001	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	Jenis	10	14	18	20	22.505,7	Pusat	KKP
022.GA Program Infrastruktur Konektivitas											
4641	Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	4641.RBA.010	Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong - Cicalengka Tahap 1 Segmen Gedebage - Haurpugur	km	13,09	4,53	N/A	N/A	704.336,2	Jawa Barat	Kemenhub
		4641.RBA.011	Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor - Sukabumi	km	26,6	26,8	N/A	N/A	846.630,5	Jawa Barat	Kemenhub
		4641.RBA.012	Pembangunan Jalur Ganda KA Mojokerto - Sepanjang	km	33	N/A	N/A	N/A	246.157,8	Jawa Timur	Kemenhub
		4641.RBA.013	Peningkatan Jalur KA Lintas Araskabu - Siantar	km	35	N/A	N/A	N/A	64.000,0	Sumatera Utara	Kemenhub
		4641.RBA.014	Peningkatan Jalur KA R42 Lintas Lahat - Lubuklinggau Segmen Bungamas - Lubuklinggau	km	44,73	N/A	N/A	N/A	246.783,8 (2021)	Sumatera Selatan	Kemenhub
		4641.RBA.015	Peningkatan Jalur KA antara Serang - Merak Lintas Rangkasbitung - Merak	km	34,13	N/A	N/A	N/A	160.000,0	Banten	Kemenhub
		4641.RBA.016	Peningkatan Jalur KA Lintas Bandung - Banjar	km	52	N/A	N/A	N/A	25.834,4	Jawa Barat, Jawa Tengah	Kemenhub
		4641.RBA.017	Peningkatan Jalur KA Lintas Banjar - Kroya	km	28,75	N/A	N/A	N/A	24.000,0	Jawa Tengah	Kemenhub
		4641.RBA.018	Peningkatan Jalur KA Lintas Padang-Pariaman	km	20,06	16,35	N/A	N/A	362.780,8	Sumatera Barat	Kemenhub
		4641.RBA.019	Penggantian Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Stasiun Cikarang - Stasiun Cikampek	km	40,72	N/A	N/A	N/A	230.550,0	Jawa Barat	Kemenhub
		4641.RBA.022	Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakarta Kota	km	25,5	25,5	N/A	N/A	922.504,1	Jabodetabek	Kemenhub
		4641.RBA.023	Elektrifikasi Jalur KA Lintas Solo Balapan - Solo Jebres	km	3,5	3,5	N/A	N/A	261.954,5	Jawa Tengah	Kemenhub

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
4650	Keselamatan Transportasi Jabodetabek	4650.RAC.001	Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan Provinsi DKI Jakarta	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DKI Jakarta	Kemenhub
		4650.RAC.002	Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan Provinsi Jawa Barat	Unit	6	16	N/A	N/A	35.983,2	Jawa Barat	Kemenhub
		4650.RAC.003	Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan Provinsi Banten	Unit	3	4	N/A	N/A	13.049,7	Banten	Kemenhub
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4840	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	4840.UBA.001	Pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi	kab/kota	509	509	234	224	735.000,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.012	Jumlah Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi	Provinsi	17	22	28	34	15.400,0	Pusat	Kemendagri
032.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2365.RBK.001	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya	Pulau	4	7	7	7	186.100,0	8 Provinsi	KKP
4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4346.RAI.001	Kawasan mangrove yang direhabilitasi	Ha	400	400	400	400	187.400,0	60 Lokasi	KKP
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6078	Pengembangan Industri Hijau	6078.AFA.001	Rancangan Standar Industri Hijau	NSPK	4	4	4	4	5.010,2	Pusat	Kemenperin
		6078.BDI.001	Fasilitasi Sertifikasi Industri Hijau	Industri	5	5	5	5	3.137,7	Pusat	Kemenperin
		6078.AEB.001	Forum Campaign Penerapan Standar Industri Hijau	Forum	1	1	1	1	1.045,9	Pusat	Kemenperin
		6078.AEB.002	Forum Penghargaan Industri Hijau	Forum	1	1	1	1	4.183,6	Pusat	Kemenperin
		6078.AEB.003	Forum Penguatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	Forum	1	1	1	1	2.091,8	Pusat	Kemenperin
		6078.ABK.001	Kajian Pemberlakuan Wajib Standar Industri Hijau	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1.673,5	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6078.ABK.003	Kajian Kebijakan Penerapan Ekonomi Sirkular di Sektor Industri	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	3.346,9	Pusat	Kemenperin
		6078.BIC.001	Hasil Penilaian dan Pengawasan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	Lembaga	10	10	10	10	2.091,8	Pusat	Kemenperin
		6078.BKB.001	Hasil Pengendalian dan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Industri Hijau	Produk	1	1	1	1	2.091,8	Pusat	Kemenperin
INDIKATOR TPB/SDGs: 13.3.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup											
029.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
5443	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	5443.DCE.001	SDM Masyarakat yang terlatih dalam Pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan	Orang	1.530	1.530	1.530	1.530	18.360,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5443.QDB.001	Pembinaan Kepedulian dan Budaya Lingkungan Hidup	Lembaga	365	365	365	365	14.760,0	34 Provinsi	Kemen LHK
029.FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim											
5446	Adaptasi Perubahan Iklim	5446.BDD.001	Kampung Iklim	Kelompok Masyarakat	195	200	250	325	15.525,8	34 Provinsi	Kemen LHK
075.GJ Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika											
3346	Pengelolaan Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG	3346.QDC.001	Layanan Informasi iklim terapan melalui Sekolah lapang Iklim (SLI)	orang	2.200	2.400	2.400	2.400	49.100,0	Wilayah sentra produksi pertanian	BMKG
5201	Pengelolaan Meteorologi Maritim BMKG	5201.QDC.001	Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN)	orang	3.800	4.000	4.000	4.000	29.700,0	34 provinsi	BMKG
103.FA Program Ketahanan Bencana											
3882	Penguatan Desa Tangguh Bencana	3882.UBB.001	Jumlah Penguatan Desa Tangguh Bencana	Desa	120	90	120	120	47,10	34 provinsi	BNPB
INDIKATOR TPB/SDGs: 13.a.1.(a) Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim											
029.WA Program Dukungan Manajemen											
5369	Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi	5369.EAB.001	Layanan Perencanaan	Layanan	1	1	1	1	106.300,0	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN											
INDIKATOR TPB/SDGs: 14.1.1.(a) Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut											
032.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2365.RQB.001	Prasarana/Infrastruktur di pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar	Pulau	4	5	7	7	101.150,2	19 lokasi	KKP
4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4346.RBQ.002	Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	Kawasan Pesisir Pulau	2	5	5	5	20.863,3	17 Lokasi	KKP
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6033	Pemantauan Kualitas Lingkungan	6033.QMA.003	Data dan Informasi Kualitas Air Laut	Layanan	34	34	34	34	32.400,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		6033.QMA.004	Data dan Informasi Sampah Laut	Layanan	23	23	44	44	25.174,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		6033.QDH.001	Layanan Penilaian Kinerja Pelabuhan yang Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut	Badan usaha	8	30	35	35	10.200,0	34 Provinsi	Kemen LHK
6034	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	6034.UBA.002	Layanan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	2	2	12	12	17.367,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		6034.RAG.003	Padang Lamun/Terumbu Karang yang dipulihkan Fungsinya	Unit	4	6	10	10	37.900,0	34 Provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 14.2.1* Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan											
032.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
2366	Perencanaan Ruang Laut	2366.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan.	Rekomendasi Kebijakan	2	5	2	-	11.085,7	10 RZ KAW, 9 tindaklanjut RZ KAW dan 3 peninjauan kembali RZ KAW	KKP
		2366.PBR.007	Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Laut Nasional yang akan diintegrasikan ke dalam RTRWN	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	4.850,0	1 Materi Teknis dan Pengintegrasian Rencana Tata Ruang Laut Nasional kedalam RTRWN	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2366.PBR.002	Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan ke dalam RTR KSN	Rekomendasi Kebijakan	2	3	3	1	16.138,6	11 Materi Teknis dan 17 Integrasi dengan RTR KSN	KKP
		2366.PBR.003	Rekomendasi Kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam RTR KSN	Rekomendasi Kebijakan	8	12	16	16	17.610,4	58KSNT (PPKT) dan 8 Integrasi RTR KSN	KKP
		2366.QAH.001	Pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan di laut	Lokasi	5	56	14	14	23.171,3	34 Provinsi, 8 UPT dan Pusat	KKP
		2366.UBA.001	Penyelenggaraan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi	8	-	-	-	2.768,6	12 Dok RZWP3K, 28 Integrasi RZWP3K dengan RTRW dan 27 Bantek	KKP
		2366.UBA.003	Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	Provinsi	4	8	8	8	13.991,0	8 Dok RZWP3K, 26 Integrasi RZWP3K dengan RTRW dan 27 Bantek	KKP
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5404	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	5404.QDB.001	Kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove yang meningkat kapasitasnya	Lembaga	34	34	34	34	20.400,0	33 Provinsi	Kemen LHK
		5404.REA.003	Rehabilitasi hutan mangrove	Unit	1.250	1.250	1.250	1.250	162.000,0	34 provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 14.2.1.(a) Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan											
032.HB Program Pengelolaan Perikanan Tangkap											
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	2341.PBR.002	Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	Rekomendasi Kebijakan	3	3	11	11	2.050,0	11 WPP	KKP
		2341.QGA.001	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	Lembaga	11	11	11	11	7.271,0	11 WPP	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
INDIKATOR TPB/SDGs: 14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman											
032.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	2341.PBR.001	Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan	Rekomendasi Kebijakan	11	11	11	11	6.175,0	UPT Pusat dan UPT Daerah	KKP
		2341.ABR.003	Rekomendasi alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi	Rekomendasi kebijakan	11	11	11	11	4.350,0	UPT Pusat dan UPT Daerah	KKP
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	2339.PCA.001	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	Unit	9.600	10.000	10.700	10.750	9.860,0	34 Provinsi	KKP
		2339.UBA.001	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	Provinsi	34	34	34	34	31.188,0	34 Provinsi	KKP
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	2337.QEG.001	Kapal perikanan bantuan yang disalurkan	Unit	97	75	90	110	180.607,2	34 Provinsi	KKP
		2337.QEG.002	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang disalurkan	Unit	750	1.000	1.250	1.500	111.311,5	34 Provinsi	KKP
032.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
2427	Riset Perikanan	2427.PBR.002	Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (NRI)	Rekomendasi Kebijakan	11	11	11	11	94.562,6	11 WPP	KKP; mulaitahun 2022 Kegiatan terkait Riset dialihkan ke BRIN
		2427.PBR.003	Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (NRI) di Perairan Darat	Rekomendasi Kebijakan	5	4	14	14	21.795,8	14 PUD	KKP; mulaitahun 2022 Kegiatan terkait Riset dialihkan ke BRIN

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
2428	Riset Kelautan	2428.PBW.002	Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir	Rekomendasi Kebijakan	10	12	12	13	21.439,5	34 provinsi	KKP; mulai tahun 2022 Kegiatan terkait Riset dialihkan ke BRIN
		2428.PBW.003	Data dan/atau Informasi Pemetaan karakteristik dan dinamika laut di WPP	Rekomendasi Kebijakan	2	2	4	4	9.198,9	11 WPP	KKP; mulai tahun 2022 Kegiatan terkait Riset dialihkan ke BRIN
		2428.RAL.002	Sarana Riset Data Citra Satelit Radar	Unit	109	-	-	-	7.580,0	BROL-Perancak	KKP
032.WA Program Dukungan Manajemen											
2329	Pengelolaan Data dan Informasi	2329.RAN.002	Sarana Data Citra Satelit Radar	Unit	-	1	1	1	16.680,09	BROL-Perancak	KKP
INDIKATOR TPB/SDGs: 14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut											
032.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	2362.REA.003	Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan	Ha	12.500.000	13.800.000	19.000.000	20.000.000	93.503,6	79 Kawasan (10 KKPN, 69KKPD)	KKP
		2362.REA.001	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Baru yang Ditetapkan	Ha	1.600.000	-	-	-	10.801,5	9 Provinsi	KKP
		2362.REA.002	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Operasional	Ha	12.500.000	13.800.000	19.000.000	20.000.000	196.833,6	79 Kawasan (10 KKPN, 69KKPD)	KKP
		2362.PEC.001	Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati	Kerjasama	2	2	5	5	10.615,7	Pusat	KKP
		2362.PEE.001	Jejaring kemitraan konservasi yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut	Kerjasama	3	3	5	5	25.357,7	Pusat	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2362.REB.001	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	Spesies	7	14	18	20	22.505,7	Pusat	KKP
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5421	Pengelolaan Kawasan Konservasi	5421.PBV.006	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya (8 Taman Nasional Laut/Perairan)	Rekomendasi Kebijakan	8	8	8	8	11.964,0	TN Komodo, TN Bunaken, TN Karimun Jawa, TN Kepulauan Seribu, TN Taka Bonerate, TN Teluk Cendrawasih, TN Wakatobi, TN Kep. Togean	Kemen LHK
5423	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	5423.QDD.001	Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	Kelompok Masyarakat	8	8	8	8	1.724,0	TN Komodo, TN Bunaken, TN Karimun Jawa, TN Kepulauan Seribu, TN Taka Bonerate, TN Teluk Cendrawasih, TN Wakatobi, TN Kep. Togean	Kemen LHK
		5423.RAG.003	Destinasi Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan	Unit	4	4	4	4	4.850,0	TN Komodo, TN Bunaken, TN Karimun Jawa, TN Kepulauan Seribu, TN Taka Bonerate, TN Teluk Cendrawasih, TN Wakatobi, TN Kep. Togean	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha											
032.HB Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan											
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	2352.QIC.001	Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	40	45	50	55	18.100,0	Daerah	KKP
		2352.QIC.002	Unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	Lembaga	360	410	510	585	8.091,1	34 provinsi	KKP
		2352.BIC.001	Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya	Lembaga	35	40	45	50	3.902,4	Pusat	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2352.BIC.002	Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya	Lembaga	75	75	105	115	4.349,4	Pusat	KKP
		2352.BIC.003	Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya	Lembaga	80	100	130	140	5.381,3	Pusat	KKP
		2352.BIC.004	Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	Lembaga	115	130	145	155	3.535,7	Pusat dan Daerah	KKP
		2352.BIC.005	Unit Usaha pemanfaatan ruang laut yang diaudit	Lembaga	-	10	10	10	3.000,0	Pusat	KKP
		2353.BDC.001	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	Orang	750	775	800	825	7.219,3	Pusat	KKP
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	2353.QIC.001	Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya	Lembaga	20.588	21.750	22.000	22.350	37.318,3	Pusat dan Daerah	KKP
		2353.QIC.003	Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya	Lembaga	665	700	563	613	14.026,2	Pusat dan Daerah	KKP
		2353.BIC.001	Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya	Lembaga	600	660	680	705	6.933,3	Pusat dan Daerah	KKP
		2353.BIC.002	Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya	Lembaga	490	490	412	437	7.977,0	Pusat dan Daerah	KKP
2350	Pemantauan dan Operasi Armada	2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	Hari Operasi	122	100	180	180	1.909.728,9	Pusat	KKP
		2350.RAL.001	Kapal Pengawas	Unit	4	2	3	3	904.414,8	Pusat	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2350.RCG.002	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	Unit	1	1	1	1	48.828,4	Pusat	KKP
		2350.RAL.002	Speedboat pengawas	Unit	2	-	10	10	77.788,6	Pusat	KKP
		2350.BAB.001	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	Lembaga	-	5.000	5.000	5.000	8.250,0	Pusat	KKP
		2350.QDD.001	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	Kelompok Masyarakat	1050	1100	1150	1200	25.425,8	Pusat	KKP
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang kelautan dan Perikanan	2351.BDC.001	Nelayan yang difasilitasi pemulangannya	Orang	100	50	100	100	3.517,3	Pusat dan Daerah	KKP
		2351.BDC.002	Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin	Orang	300	300	300	300	3.467,3	Pusat dan Daerah	KKP
3990	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	3990.PDD.003	Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (<i>Official Control</i>) Lingkup Otoritas Kompeten	Unit	150	150	150	150	87.400,0	34 Provinsi	KKP
		3990.BIC.001	Unit kerja dan pelaku Usaha KIPM yang diperiksa tingkat kepatuhannya berdasarkan regulasi pemasukan dan pengeluaran	Unit Kerja	46	46	46	46	21.673,0	34 Provinsi	KKP
3988	Karantina Ikan	3988.QCE.001	Kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang diselesaikan	Kasus	80	80	80	80	14.489,0	34 Provinsi	KKP
INDIKATOR TPB/SDGs:											
14.b.1* Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil											
14.b.1.(a) Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan											
14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi											
032.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
2375	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2375.SCC.001	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	Orang	12.120	15.000	50.000	58.000	133.600,0	34 Provinsi	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2375.QDD.001	Kelompok Pelaku Utama/usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	Kelompok	44.827	41.000	49.000	55.000	472.506,0	34 Provinsi	KKP
032.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
2426	Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	2426.SDC.001	Model Sosial Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan	Model	3	3	-	-	7.621,5	Pusat	KKP; mulai tahun 2022 Kegiatan terkait Riset dialihkan ke BRIN
032.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	2339.QKA.001	Nelayan penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang diidentifikasi	Laporan	0	120.000	120.000	120.000	7.402,5	34 Provinsi	KKP
		2339.QEA.002	Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang tersalurkan	Orang	-	120.000	120.000	120.000	86.583,0	34 Provinsi	KKP
		2339.QDC.003	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	Orang	2.000	2.000	6.000	7.000	26.000,0	34 Provinsi	KKP
		2339.QDD.002	Kelompok Usaha Bersamayang meningkatkan kapasitas kelembagaannya	Kelompok masyarakat	2.400	2.500	2.750	3.000	6.403,0	34 Provinsi	KKP
		2339.QDC.001	Fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan	Bidang	-	-	-	-	1.295,0	34 Provinsi	KKP
		2339.QDD.001	Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	Orang	7.500	7.500	15.000	15.000	7.250,0	34 Provinsi	KKP
		2339.QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	Orang	-	1.500	-	-	2.915,0	34 Provinsi	KKP
2344	Pengelolaan Perbenihan Ikan	2344.BAB.001	Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan	Lembaga	250	500	500	500	5.800,0	34 Provinsi	KKP
2346	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	2346.BAB.001	Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan	Lembaga	2.250	3.000	3.500	4.000	30.063,0	34 Provinsi	KKP
		2346.QEA.001	Bantuan premi asuransi pembudidaya ikan skala kecil yang disalurkan	Orang	5.000	7.500	9.000	10.000	25.550,0	34 Provinsi	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
2360	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	2360.QDG.001	Jumlah pelaku usahayang difasilitasi dalam kegiatan berusaha dan berinvestasi	UMKM	1.620	65	1.840	1.950	30.700,0	34 Provinsi	KKP
		2360.QDG.003	UMKMMP yang difasiiitasi kases pembiayaan kredit	UMKM	2.200	-	-	-	-	-	KKP
		2360.QDG.002	Wirusaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	UMKM	200	300	200	200	11.000,0	34 Provinsi	KKP
2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	2363.RAI.001	Lahan garam yang difasilitasi	Ha	120	200	750	750	265.352,60	12 Provinsi	KKP
		2363.QEG.003	Sarananiagagaramrakyatyang dibangun	Unit	30	25	100	100	169.925,55	12 Provinsi	KKP
		2363.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	Rekomendasi Kebijakan	2	5	5	5	11.798,67	Daerah	KKP
		2363.QEG.004	Saranproduksi biofarmakologi yang dibangun	Unit	2	2	2	2	14.320,41	10 Provinsi	KKP
INDIKATOR TPB/SDGs: 14.c.1* Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)											
032.WA Program Dukungan Manajemen											
2322	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	2322.PEC.001	Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan	Kegiatan	1	1	2	2	39.501,0	Pusat	KKP
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN											
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.1.1* Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	5433.BAH.001	Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Layanan	30	30	30	30	62.670,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5433.BMA.001	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Layanan	1	1	1	1	1.920,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5433.PCD.001	SK Penetapan Kawasan Hutan	Institusi	12	12	12	12	9.240,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5433.BAH.002	Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan	Layanan	6	6	6	6	6.956,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	169.698,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	261.403,0	34 Provinsi	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	5434.BMA.001	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutandan Kawasan Hutan	Layanan	12	12	12	12	11.280,0	34 Provinsi	Kemen LHK
5404	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	5404.RAG.001	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Unit	56.000	220.000	220.000	220.000	14.653.035,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.002	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	Unit	2.500	3.000	3.000	3.000	312.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.003	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Unit	1.250	1.250	1.250	1.250	162.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.004	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	Unit	1.500	1.500	1.500	1.500	54.900,0	Kalimantan Timur	Kemen LHK
5407	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	5407.RBK.001	Sumber Benih Unggul yang Dibangun	Unit	100	100	100	100	4.500,0	33 Provinsi	Kemen LHK
		5407.RBK.002	Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	Unit	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	900.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5407.RBK.003	Benih Berkualitas	Unit	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	39.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK
5397	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	5397.BAH.002	Layanan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi	Unit	1	1	1	1	3.843,0	33 Provinsi	Kemen LHK
5398	Peningkatan Usaha Hutan Produksi	5398.BIC.001	Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi yang diawasi dan dikendalikan	Lembaga	20	20	20	20	60.670,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5398.QDB.001	Pembinaan Teknis/Supervisi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	Lembaga	20	20	20	20	65.200,0	28 Provinsi di luar pulau Jawa	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.1.2.(a) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5420	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	5420.PBV.002	Kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Rekomendasi Kebijakan	56	56	56	56	56.973,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5420.QMA.001	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	Layanan	74	74	74	74	226.600,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5420.QMA.003	Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	Layanan	2	2	2	2	36.300,0	34 Provinsi	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
5424 Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	5424.PBJ.001	Kebijakan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keaneekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	6.720,0	Pusat	Kemen LHK	
	5424.PBJ.002	Kebijakan Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	13.360,0	Pusat	Kemen LHK	
	5424.PBJ.003	Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Rekomendasi Kebijakan	35	35	35	35	17.247,0	34 Provinsi	Kemen LHK	
	5424.QMA.001	Kawasan dengan Nilai Keaneekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	Layanan	4.266.362	4.266.362	4.266.362	4.266.362	50.109,0	34 Provinsi	Kemen LHK	
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.2.1.(a) Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5397	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	5397.QDB.002	Fasilitasi dan Pembinaan KPHP Menuju Kategori Maju	Lembaga	12	12	12	12	231.172,0	34 Provinsi	Kemen LHK
5405	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	5405.QDB.001	KPHL Maju	Lembaga	10	10	10	10	11.018,0	34 Provinsi	Kemen LHK
5421	Pengelolaan Kawasan Konservasi	5421.PBV.006	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	Rekomendasi Kebijakan	376	376	376	376	465.295,0	34 Provinsi	Kemen LHK
5444	Peningkatan Penyuluhan	5444.QDD.001	Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	Orang	1.700	1.700	1.700	1.700	24.717,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5444.QDC.001	KTH Mandiri yang terbentuk	Kelompok Masyarakat	80	80	80	80	12.600,0	33 Provinsi (Selain DKI Jakarta)	Kemen LHK
		5444.QDD.002	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	Kelompok Masyarakat	70	70	70	70	13.800,0	33 Provinsi (Selain DKI Jakarta)	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.3.1* Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5404	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	5404.BDB.001	Layanan Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Lembaga	1	1	1	1	27.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5404.RAG.001	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Unit	56.000	220.000	220.000	220.000	14.653.035,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.002	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	Unit	2.500	3.000	3.000	3.000	312.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.003	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Unit	1.250	1.250	1.250	1.250	162.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.004	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	Unit	1.500	1.500	1.500	1.500	54.900,0	Kalimantan Timur	Kemen LHK
5407	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	5407.RBK.001	Sumber Benih Unggul yang Dibangun	Unit	100	100	100	100	4.500,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5407.RBK.002	Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	Unit	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	900.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5407.RBK.003	Benih Berkualitas	Unit	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	39.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK
5421	Pengelolaan Kawasan Konservasi	5421.PBV.002	Area terbuka (<i>Opened Area</i>) di kawasan konservasi yang ditangani	Rekomendasi kebijakan	41.251	41.251	41.251	41.251	716.675,4	34 Provinsi	Kemen LHK
		5421.RAG.001	Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	Unit	1	1	1	1	51.600,0	Kalimantan Timur	Kemen LHK
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6035	Pemulihan Kerusakan Lingkungan	6035.RAG.004	Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan	Hektar	30	100	100	100	381.134,1	34 Provinsi	Kemen LHK
		6035.RAG.001	Lahan Gambut yang direstorasi pada 7 Provinsi	Hektar	300.000	300.000	300.000	300.000	1.858.700,0	7 Provinsi	Kemen LHK
		6035.RAG.005	Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya	Hektar	1.500	25.000	25.000	30.000	1.135.100,0	12 provinsi	Kemen LHK
		6035.UBB.001	Fasilitasi Desa mandiri peduli gambut di 7 Provinsi	Desa	75	75	75	75	120.000,0	Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.4.1* Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5420	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	5420.PBV.001	Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Informasi Konservasi Alam, dan Kerjasama	Rekomendasi Kebijakan	5	5	5	5	30.900,0	Pusat	Kemen LHK
		5420.PBV.002	Kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Rekomendasi Kebijakan	56	56	56	56	56.973,1	34 Provinsi	Kemen LHK
		5420.QMA.001	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	Layanan	74	74	74	74	226.600,3	34 Provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.4.2* Indeks tutupan hijau pegunungan											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	5434.BMA.001	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Layanan	12	12	12	12	11.280,0	34 Provinsi	Kemen LHK
5420	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	5420.PBV.001	Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Informasi Konservasi Alam, dan Kerjasama	Rekomendasi Kebijakan	5	5	5	5	30.900,0	Pusat	Kemen LHK
5421		Pengelolaan Kawasan Konservasi	5421.PBV.002	Area terbuka (<i>Opened Area</i>) di kawasan konservasi yang ditangani	Rekomendasi kebijakan	41.251	41.251	41.251	41.251	716.675,4	Pusat
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.5.1* Indeks Daftar Merah (<i>Red-list index</i>)											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5422	Konservasi Spesies dan Genetik	5422.ABV.001	Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	3.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5422.PBJ.001	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Rekomendasi Kebijakan	140	140	140	140	377.161,3	34 Provinsi	Kemen LHK
		5422.PBJ.002	Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keamanan hayati	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	57.780,5	Pusat	Kemen LHK
		5422.QDB.001	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	Lembaga	52	52	52	52	56.215,0	34 Provinsi	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5422.QDB.002	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	Lembaga	413	413	413	413	27.352,4	34 Provinsi	Kemen LHK
		5422.RAG.001	Pusat Konservasi Satwa yang dibangun	Unit	3	3	3	3	852.884,4	Provinsi Sulawesi Tenggara, Banten, Maluku	Kemen LHK
032.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	2362.RAG.001	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	Spesies	10	14	18	20	308.000,0	Pusat	KKP
		2362.RAG.002	Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan	Spesies	7	16	18	20		Pusat	KKP
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.6.1* Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5421	Pengelolaan Kawasan Konservasi	5421.AED.001	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	Perjanjian	2.000	2.000	2.000	2.000	226.296,0	Pusat	Kemen LHK
		5421.BDB.001	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	Lembaga	1.833	1.833	1.833	1.833	441.657,9	34 Provinsi	Kemen LHK
		5421.PBV.003	Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	12.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5421.PBV.004	Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	12.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5421.PBV.005	Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	24.000,0	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5422	Konservasi Spesies dan Genetik	5422.PBJ.002	Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keamanan hayati	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	57.780,5	Pusat	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.7.1.(a) Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL											
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
5429	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	5429.QCE.001	Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	Perkara	25	144	155	175	330.648,4	Pusat	Kemen LHK
5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5431.QCE.001	Kasus Tindak Pidana LHK P21	Perkara	170	367	403	453	583.644,8	34 Provinsi	Kemen LHK
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	5428.QHB.001	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Operasi	90	130	130	130	185.430,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5428.QHB.002	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Operasi	73	110	110	110	207.300,0	34 Provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.8.1* Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5421	Pengelolaan Kawasan Konservasi	5421.QMA.002	Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	Layanan	1	1	1	1	4.560,0	Pusat	Kemen LHK
5422	Konservasi Spesies dan Genetik	5422.ABV.001	Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	3.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5422.PBJ.001	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Rekomendasi Kebijakan	140	140	140	140	377.161,3	34 Provinsi	Kemen LHK
		5422.PBJ.002	Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keamanan hayati	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	57.780,5	34 Provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.9.1.(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi target 2 dari Rencana Strategis											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5420	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	5420.PBV.001	Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Informasi Konservasi Alam, dan Kerjasama	Rekomendasi kebijakan	5	5	5	5	30.900,0	34 Provinsi	Kemen LHK
5422	Konservasi Spesies dan Genetik	5422.ABV.001	Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	3.000,0	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5422.PBJ.001	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Rekomendasi Kebijakan	140	140	140	140	377.161,3	34 Provinsi	Kemen LHK
		5422.PBJ.002	Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keamanan hayati	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	57.780,5	34 Provinsi	Kemen LHK
		5422.QDB.001	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	Lembaga	52	52	52	52	56.215,0	34 Provinsi	Kemen LHK
6031	Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan	6031.PBV.001	Rekomendasi penyiapan akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, KK, IPHPS	Rekomendasi Kebijakan	5	5	5	5	98.760,0	Pusat	Kemen LHK
		6031.PBV.002	Izin perhutanan sosial yang dievaluasi	Rekomendasi Kebijakan	100	100	100	100	13.200,0	33 Provinsi (Selain DKI Jakarta)	Kemen LHK
		6031.PCC.001	Izin akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, KK, IPHPS	Kelompok Masyarakat	5	5	5	5	22.500,0	33 Provinsi (Selain DKI Jakarta)	Kemen LHK
6032	Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6032.QDD.001	Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan	Kelompok Masyarakat	310	310	310	310	21.618,0	33 Provinsi (Selain DKI Jakarta)	Kemen LHK
		6032.QDG.001	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum	UMKM	75	75	75	75	90.000,0	33 Provinsi (Selain DKI Jakarta)	Kemen LHK
		6032.QEH.001	Sarana dan Prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	Kelompok Masyarakat	1520	1520	1520	1520	584.229,0	33 Provinsi (Selain DKI Jakarta)	Kemen LHK
		6032.QDB.002	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	Lembaga	413	413	413	413	27.352,4	34 Provinsi	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
055.CK Perencanaan Pembangunan Nasional											
6264	Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	6264.ABJ.501	Kebijakan Perencanaan Lingkup Lingkungan Hidup	Rekomendasi kebijakan	1	1	1	1	7.000,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
		6264.ABJ.508	Kebijakan Percepatan Lingkup Lingkungan Hidup	Rekomendasi kebijakan	3	1	1	1	56.500,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
		6264.AEA.503	Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Lingkungan Hidup	Kegiatan	2	1	1	1	13.500,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
		6264.FAE.505	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Lingkungan Hidup	Laporan	1	1	1	1	24.500,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.a.1.(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5422	Konservasi Spesies dan Genetik	5422.ABV.001	Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	3.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5422.QDB.002	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	Lembaga	413	413	413	413	27.352,4	34 Provinsi	Kemen LHK
		5422.RAG.001	Pusat Konservasi Satwa yang dibangun	Unit	3	3	3	3	852.884,4	34 Provinsi	Kemen LHK
055.CK Perencanaan Pembangunan Nasional											
6264	Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	6264.ABV.201	Kebijakan Perencanaan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Rekomendasi	1	1	1	1	6.700,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
		6264.ABV.208	Kebijakan Percepatan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Rekomendasi	3	1	1	1	98.000,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
		6264.AEA.203	Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Kegiatan	2	1	1	1	5.900,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6264.FAE.205	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Laporan	2	1	1	1	5.400,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.b.1.(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5422	Konservasi Spesies dan Genetik	5422.ABV.001	Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	3.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5422.QDB.002	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	Lembaga	413	413	413	413	27.352,4	34 Provinsi	Kemen LHK
		5422.RAG.001	Pusat Konservasi Satwa yang dibangun	Unit	3	3	3	3	852.884,4	34 Provinsi	Kemen LHK
055.CK Perencanaan Pembangunan Nasional											
6264	Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	6264.ABV.201	Kebijakan Perencanaan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Rekomendasi	1	1	1	1	6.700,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
		6264.ABV.208	Kebijakan Percepatan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Rekomendasi	3	1	1	1	98.000,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
		6264.AEA.203	Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Kegiatan	2	1	1	1	5.900,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
		6264.FAE.205	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Laporan	2	1	1	1	5.400,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.c.1.(a) Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL											
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
5429	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	5429.QCE.001	Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	Perkara	25	144	155	175	330.648,4	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5431.QCE.001	Kasus Tindak Pidana LHK P21	Perkara	170	367	403	453	583.644,8	34 Provinsi	Kemen LHK
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	5428.QHB.001	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Operasi	90	130	130	130	185.430,0	34 Propinsi	Kemen LHK
		5428.QHB.002	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Operasi	73	110	110	110	207.300,0	34 Propinsi	Kemen LHK
5398	Peningkatan Usaha Hutan Produksi	5398.QAC.001	Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	Badan Usaha	10	20	20	20	3.744,0	Pusat	KLHK
		5398.BIH.001	Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	Badan Usaha	10	20	20	20	46.344,0	Pusat	KLHK
5435	Perencanaan Kawasan Hutan	5435.BAH.001	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Layanan	100	300	300	300	4.762,0	Pusat	KLHK
5423	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	5423.QAH.001	Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	Layanan	-	151	151	151	2.100,0	Pusat	KLHK
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh											
INDIKATOR TPB/SDGs:											
16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir											
16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir											
060.BI Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana											
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	3142.BCA.001	Penanganan Tindak Pidana Umum	Perkara	90.299	90.299	90.299	90.299	6.336.009,7	Pusat dan Daerah	POLRI
060.BQ Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat											
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	3130.BHB.004	Layanan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli	Operasi	1.300.863	1.300.863	1.300.863	1.300.863	1.710.266,8	Pusat dan Daerah	POLRI
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	5076.BKA.002	Pemberdayaan Potensi Keamanan	Laporan	578.772	578.772	578.772	578.772	4.069.919,2	Pusat dan Daerah	POLRI
		5076.BKA.003	Penguatan Peran Bhabinkamtibmas	Laporan	1.557.317	1.557.317	1.557.317	1.557.317	788.404,7	Pusat dan Daerah	POLRI
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5679	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	5679.AEF.004	Festival HAM Nasional dan Internasional	Orang	400	440	484	532	2.320,0	Pusat	Komnas HAM
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk											
060.BP Program Modernisasi Almatsum dan Sarana Prasarana POLRI											
3084	Pengembangan Peralatan POLRI	3084.CAF.001	Pemenuhan Almatsum (Alat Material Khusus)	Unit	53.486	53.486	53.486	53.486	610.833.351,1	Pusat dan Daerah	POLRI
		3084.CAF.003	Pemenuhan Almatsum (Sumber PHLN dan PDN)	Unit	1	1	1	1	6.009.504,1	Pusat dan Daerah	POLRI
060.BQ Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat											
5087	Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri	5087.BHB.002	Kesiapan kemampuan personel dalam penanggulangan gangguan kamdagri berintensitas tinggi	Operasi	101.744	101.744	101.744	101.744	135.215,7	Pusat dan Daerah	POLRI
		5087.BHB.003	Pengamanan gangguan kamdagri berintensitas tinggi	Operasi	1.991	1.991	1.991	1.991	327.709,4	Pusat dan Daerah	POLRI
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya											
060.BI Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana											
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	3142.BCA.001	Penanganan Tindak Pidana Umum	Perkara	90.299	90.299	90.299	90.299	6.336.009,7	Pusat dan Daerah	POLRI
3143	Penindakan Tindak Pidana Terorisme	3143.BCA.001	Penanganan Tindak Pidana Terorisme	Perkara	42	42	42	42	3.989.460,2	Pusat dan Daerah	POLRI
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	3144.BCA.001	Penanganan Tindak Pidana Narkoba	Perkara	20.987	20.987	20.987	20.987	3.061.169,1	Pusat dan Daerah	POLRI
3151	Penindakan Tindak Pidana Siber	3151.BCA.001	Penanganan Tindak Pidana Siber	Perkara	3.237	3.237	3.237	3.237	303.100,5	Pusat dan Daerah	POLRI
060.BQ Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat											
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	3130.BHB.004	Layanan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli	Operasi	1.300.863	1.300.863	1.300.863	1.300.863	1.710.266,8	Pusat dan Daerah	POLRI
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	5076.BKA.002	Pemberdayaan Potensi Keamanan	Laporan	578.772	578.772	578.772	578.772	4.069.919,2	Pusat dan Daerah	POLRI
		5076.BKA.003	Penguatan Peran Bhabinkamtibmas	Laporan	1.557.317	1.557.317	1.557.317	1.557.317	788.404,7	Pusat dan Daerah	POLRI
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir											
047.DE Program Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
2809	Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan	2809.UBA.002	Daerah yang Difasilitasi dalam Pengasuhan Berbasis Hak Anak	Daerah	9	9	9	9	3.575,0	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2809.UBA.004	Daerah yang Difasilitasi dalam Penguatan dan Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Daerah	20	20	20	20	3.700,0	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
		2809.UBA.005	Daerah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Daycare Ramah Anak	Daerah	10	10	10	10	2.423,1	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
6373	Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	6373.PBN.001	Rekomendasi Kebijakan Kelembagaan KLA	Rekomendasi Kebijakan	34	34	34	34	6.600,0	Provinsi	Kemen PPPA
6374	Peningkatan Partisipasi Keluarga	6374.FBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kualitas keluarga	Daerah	2	2	2	2	2.000,0	Provinsi	Kemen PPPA
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga	5832.DCI.012	Tenaga Kesehatan Terlatih Pelayanan Kesehatan bagi Korban KtP/A dan TPPO	Orang	40	40	40	40	17.500,0	Pusat dan provinsi	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya											
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
6377	Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	6377.QMA.001	Data Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR)	Layanan	1	-	-	1	40.000,0	Pusat	Kemen PPPA
2810	Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	2810.UBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak dari kekerasan	Daerah	8	8	8	8	9.496,4	Provinsi	Kemen PPPA
		2810.UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam bimbingan teknis tentang perlindungan khusus anak dari kekerasan	Daerah	8	8	8	8	9.636,2	Provinsi	Kemen PPPA
2805	Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus	2805.UBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Daerah	3	3	3	3	11.950,0	Provinsi/ Kab/Kota	Kemen PPPA
		2805.UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Penyedia Layanan yang mampu memberikan dukungan psikososial berbasis masyarakat di kawasan kebencanaan	Daerah	8	8	9	9	800,0	Provinsi	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6378	Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	6378.QAA.001	AMPK yang Mendapatkan Penanganan yang Komprehensif	Orang	420	450	500	550	27.895,0	Pusat	Kemen PPPA
013.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
1607	Pelayanan Komunikasi Masyarakat	1607.ABD.001	Rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran hak anak	Rekomendasi Kebijakan	260	280	300	320	46.597,4	Pusat dan Daerah	Kemenkum HAM
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi											
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
2800	Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO	2800.AEA.001	Koordinasi pelaksanaan kebijakan PHP Pekerja dan TPPO	Kegiatan	3	3	3	3	4.200,0	Pusat	Kemen PPPA
		2800.AEA.002	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PUG dan Perlindungan Perempuan Pekerja dan TPPO	Kegiatan	1	1	1	1	6.000,0	Pusat	Kemen PPPA
		2800.BDB.001	K/L yang mendapatkan advokasi dan KIE kebijakan PHP Pekerja dan TPPO	Lembaga	29	29	29	29	9.346,7	Pusat	Kemen PPPA
		2800.FAE.001	Informasi hasil pelaksanaan kebijakan PHP pekerja dan TPPO	Laporan	1	1	1	1	6.800,0	Pusat	Kemen PPPA
		2800.UBA.001	SDM Unit Layanan yang sudah mendapat Bimtek Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO	Daerah	17	17	17	17	5.600,0	Provinsi	Kemen PPPA
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga	5832.DCI.012	Tenaga Kesehatan Terlatih Pelayanan Kesehatan bagi Korban KtP/A dan TPPO	Orang	40	40	40	40	17.500,0	Pusat dan provinsi	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun											
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
2810	Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	2810.PEA.002	Kegiatan penanganan kekerasan dan eksploitasi pada anak di daerah	Kegiatan	12	14	14	16	3.700,0	Provinsi/ Kab/Kota	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi											
060. BP Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana POLRI											
5062	Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi POLRI	5062.RBM.005	Peningkatan Layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal	Unit	3	3	3	3	45.000,0	Pusat dan Daerah	POLRI
		5062.RBM.010	Pembangunan SPKT Tingkat Polres sesuai SPM yang terintegrasi secara online	Unit	1	1	1	1	6.000,0	Pusat dan Daerah	POLRI
		5062.RBM.011	Pembangunan SPKT tingkat Polsek sesuai SPM	Unit	2	2	2	2	12.000,0	Pusat dan Daerah	POLRI
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.3.1.(b) Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi											
013.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum											
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	4841.QBA.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Orang	5.699	5.699	5.699	5.699	227.960,0	Daerah	Kemenkum HAM
		4841.QBC.001	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	Kelompok Masyarakat	758	758	758	758	40.439,5	Daerah	Kemenkum HAM
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.3.1.(c) Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara											
005.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum											
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.QBA.001	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Maluku Utara	Orang	2	2	2	2	11.040,0	Daerah	MA
		1049.QBA.002	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Banten	Orang	5	5	5	5	18.400,0	Daerah	MA
		1049.QBA.003	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bangka Belitung	Orang	1	1	1	1	3.680,0	Daerah	MA
		1049.QBA.004	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Gorontalo	Orang	0	0	0	0	-	Daerah	MA

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	1049.QBA.005	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah DKI Jakarta	Orang	25	25	25	25	92.000,0	Daerah	MA
	1049.QBA.006	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jawa Barat	Orang	8	8	8	8	26.788,0	Daerah	MA
	1049.QBA.007	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jawa Tengah	Orang	8	8	8	8	18.400,0	Daerah	MA
	1049.QBA.008	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Yogyakarta	Orang	3	3	3	3	11.040,0	Daerah	MA
	1049.QBA.009	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jawa Timur	Orang	8	8	8	8	29.440,0	Daerah	MA
	1049.QBA.010	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Banda Aceh	Orang	10	10	10	10	36.800,0	Daerah	MA
	1049.QBA.011	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Utara	Orang	9	5	5	5	11.040,0	Daerah	MA
	1049.QBA.012	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Barat	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
	1049.QBA.013	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Riau	Orang	9	5	5	5	33.120,0	Daerah	MA
	1049.QBA.014	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jambi	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	1049.QBA.015	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Palembang	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
	1049.QBA.016	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Lampung	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
	1049.QBA.017	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Barat	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
	1049.QBA.018	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Tengah	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
	1049.QBA.019	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Selatan	Orang	4	4	4	4	12.160,0	Daerah	MA
	1049.QBA.020	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Timur	Orang	5	5	5	5	16.000,0	Daerah	MA
	1049.QBA.021	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Utara	Orang	2	2	2	2	6.080,0	Daerah	MA
	1049.QBA.022	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Tengah	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
	1049.QBA.023	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Selatan	Orang	3	3	3	3	12.600,0	Daerah	MA
	1049.QBA.024	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Tenggara	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		1049.QBA.025	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Maluku	Orang	6	6	6	6	0,0	Daerah	MA
		1049.QBA.026	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Denpasar	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
		1049.QBA.027	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Nusa Tenggara Barat	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
		1049.QBA.028	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Nusa Tenggara Timur	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
		1049.QBA.029	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Papua	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
		1049.QBA.030	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bengkulu	Orang	7	7	7	7	14.720,0	Daerah	MA
		1049.QBA.031	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Orang	3.983	3.983	3.983	3.983	30.552,6	Daerah	MA
		1049.QBA.032	Pos Bantuan Hukum	Orang	40.000	40.000	40.000	40.000	55.705,7	Daerah	MA
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	1059.QBA.001	Pengguna Layanan yang dilayani bantuan hukum di Lingkungan Peradilan TUN	Orang	2.880	2.880	2.880	2.880	4.914,0	Daerah	MA
		1059.QBA.002	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Orang	66	66	66	66	205,0	Daerah	MA
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1053.QBA.001	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Orang	17.766	17.766	17.766	17.766	35.079,2	Daerah	MA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		1053.QBA.002	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	Orang	28.906	28.906	28.906	28.906	150.520,1	Daerah	MA
		1053.QBA.003	Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama	Orang	177.442	177.442	177.442	177.442	80.359,3	Daerah	MA
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.3.2.(a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan											
006.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum											
1109	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	1109.PEF.001	Bimtek Penuntut Umum sebagai Fasilitator dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	Orang	66	66	66	66	9.378,0	Pusat	Kejaksaan RI
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.3.3.(a) Indeks Akses Terhadap Keadilan (Access to Justice Index)											
013.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
1606	Kerja Sama HAM	1606.PBD.003	Pelaksanaan Aksi HAM dalam RAN HAM	Rekomendasi Kebijakan	1.250	1.300	1.350	1.400	4.424,8	Pusat	Kemerkum HAM
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	4841.PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah	Lembaga	524	524	524	524	9.999,6	Daerah	Kemerkum HAM
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5680	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	5680.UAB.002	Integrasi Database Pengelolaan Penanganan Pelanggaran HAM	Sistem Informasi	1	-	-	-	750.000,0	Pusat	Komnas HAM
006.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum											
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	1103.QAA.004	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Orang	164.850	164.850	164.850	164.850	7.142,4	Daerah	Kejaksaan RI
077.BJ Program Penanganan Perkara Konstitusi											
4246	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara Mengenai Pancasila dan Konstitusi	4246.QDC.003	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara Mengenai Pancasila dan Konstitusi	Orang	300	300	300	300	6.000,0	Pusat	MK

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)											
006.WA Program Dukungan Manajemen											
1083	Perencanaan yang meliputi Pengelolaan Data, Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja, Pemantauan dan Evaluasi, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana serta Fasilitas Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	1083.TAK.001	Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI	Laporan	33	33	33	33	9.025,0	Daerah	Kejaksaan RI
013.WA Program Dukungan Manajemen											
1563	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	1563.TAK.001	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah I	Laporan	1	1	1	1	4.402,1	Pusat	Kemenkum HAM
1564	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	1564.TAK.001	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah II	Laporan	1	1	1	1	6.487,2	Pusat	Kemenkum HAM
1565	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	1565.TAK.001	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah III	Laporan	1	1	1	1	8.769,3	Pusat	Kemenkum HAM
1566	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	1566.TAK.001	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah IV	Laporan	1	1	1	1	7.533,0	Pusat	Kemenkum HAM
1567	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	1567.TAK.001	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah V	Laporan	1	1	1	1	6.595,8	Pusat	Kemenkum HAM
1568	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	1568.TAK.001	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI	Laporan	1	1	1	1	11.884,7	Pusat	Kemenkum HAM
093.BC Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi											
3848	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan KPK, serta pengkajian Sistem Pengelolaan Administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah	3848.QKC.003	Pelaksanaan Survey Penelitian Integritas	Laporan	1	1	1	1	126.060,0	Pusat	KPK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5208	Koordinasi dan Supervisi Pencegahan	5208.QDB.001	Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Lembaga	35	35	35	35	64.133,4	Pusat	KPK
007.WA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI											
4245	Penyelenggaraan pengawasan intern	4245.EAK.002	Pembangunan zona integritas	Laporan	3	3	2	1	2.500,0	Pusat	MK
005.WA Program Dukungan Manajemen											
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I	1077.TAK.001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah I	Laporan	43	43	43	43	7.282,1	Daerah	MA
1078	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II	1078.TAK.001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah II	Laporan	40	40	40	40	7.318,1	Daerah	MA
5258	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III	5258.TAK.001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah III	Laporan	51	51	51	51	9.890,8	Daerah	MA
5259	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV	5259.TAK.001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV	Laporan	27	27	27	27	6.191,5	Daerah	MA
048.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN											
6191	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	6191.UAI.001	Jumlah Evaluasi WBK/WBBM di wilayah I	Unit Kerja	350	350	350	350	4.400,0	Pusat	Kemen PAN RB
		6191.UAI.002	Jumlah Evaluasi WBK/WBBM di wilayah II	Unit Kerja	350	350	350	350	4.400,0	Pusat	Kemen PAN RB

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6191.UAI.003	Jumlah Evaluasi WBK/WBBM di wilayah III	Unit Kerja	300	300	300	300	4.500,0	Pusat	Kemen PAN RB
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui											
015.CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko											
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	6212.BMB.003	Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN	Orang	87	87	87	87	10.062,0	Pusat	Kemenkeu
		6212.FAL.001	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	Orang	273	273	273	273	35.553,0	Pusat	Kemenkeu
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)											
015. CD Program Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko											
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	6212.BMB.002	Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	Orang	620	620	620	620	15.542,2	Pusat	Kemenkeu
		6212.FAH.003	Komunikasi dan Edukasi Penyusunan LKKL dan LKBUN	Orang	138	138	138	138	12.192,3	Pusat	Kemenkeu
089.CH Program Pengawasan Pembangunan											
4207	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Ekonomi dan Keuangan	4207.FAG.511	Rekomendasi hasil pengawasan atas kualitas pengendalian intern K/L bidang ekonomi dan keuangan	Laporan	15	15	15	15	1.634.350,0	Pusat	BPKP
4208	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam	4208.FAG.511	rekomendasi hasil pengawasan atas kualitas pengendalian intern K/L bidang pangan, pengelolaan energi dan sumber daya alam	Laporan	10	10	10	10	698.400,0	Pusat	BPKP
4209	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan	4209.FAG.511	Rekomendasi hasil pengawasan atas kualitas pengendalian intern K/L bidang infrastruktur, tata ruang dan perhubungan	Laporan	4	4	4	4	355.515,0	Pusat	BPKP
4210	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	4210.FAG.511	Rekomendasi hasil pengawasan atas kualitas pengendalian intern K/L bidang ekonomi kreatif, perdagangan dan ketenagakerjaan	Laporan	10	10	10	10	250.000,0	Pusat	BPKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
4213	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Politik dan Penegakan Hukum	4213.FAG.521	Rekomendasi hasil pengawasan atas kualitas pengendalian intern K/L bidang politik dan penegakan hukum	Laporan	2	2	2	2	54.000,0	Pusat	BPKP
4214	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Sosial dan Penanganan Bencana	4214.FAG.521	Rekomendasi hasil pengawasan atas kualitas pengendalian intern K/L bidang sosial dan penanganan bencana	Laporan	8	8	8	8	903.625,0	Pusat	BPKP
4216	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Reformasi Birokrasi	4216.FAG.521	Rekomendasi hasil pengawasan atas kualitas pengendalian intern K/L bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan reformasi birokrasi	Laporan	2	2	2	2	80.600,0	Pusat	BPKP
4217	Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	4217.FAG.131	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan	Laporan	5	5	5	5	856.220,0	Pusat	BPKP
4219	Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa	4219.FAG.232	Rekomendasi hasil pengawasan atas pengendalian intern	Laporan	3	3	3	3	383.625,0	Pusat	BPKP
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B											
048.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN											
6191	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan	6191.UAI.004	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Instansi	95	95	95	95	3.200,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		6191.UAI.007	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Instansi	83	83	83	83	13.000,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		6191.UAI.005	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Instansi	97	97	97	97	3.200,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6191.UAI.008	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Instansi	217	217	217	217	13.000,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		6191.UAI.006	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Instansi	189	189	189	189	3.700,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		6191.UAI.009	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Instansi	219	219	219	219	14.000,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B											
048.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN											
6191	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	6191.FAI.001	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang telah diberikan asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah I	Instansi	212	212	212	212	3.500,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		6191.FAI.002	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang telah diberikan asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah II	Instansi	143	143	143	143	4.000,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		6191.FAI.003	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang telah diberikan asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah III	Instansi	123	123	123	123	4.500,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		6191.FAI.004	Jumlah evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi di wilayah I	Instansi	212	212	212	212	3.000,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		6191.FAI.005	Jumlah evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi di wilayah II	Instansi	189	189	189	189	3.000,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6191.FAI.006	Jumlah evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi di wilayah III	Instansi	182	182	182	182	4.500,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		6191.PBL.001	Jumlah rekomendasi Tim RB nasional terhadap pelaksanaan RB pada sektor pembangunan prioritas	Rekomendasi	9	9	9	9	49.000,0	Pusat	Kemen PAN RB
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik											
048.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN											
4350	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	4350.PBM.001	Jumlah sektor layanan strategis yang di-review/ dipetakan	Sektor Layanan	2 sektor layanan strategis	-	-	-	1.000,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		4350.UAB.002	Jumlah sektor pelayanan publik strategis yang data dan informasinya masuk kedalam SIPP	Sektor Layanan	2 sektor pelayanan (dasar dan perizinan)	-	-	-	2.000,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
6189	Perumusan Kebijakan PANRB	6189.AAG.009	Jumlah sektor pelayanan publik strategis yang distandarisasi proses bisnisnya	Sektor Layanan	1 PermenPAN RB tentang Standar Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Pusat	1 sektor pelayanan	1 sektor pelayanan	-	3.000,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
6190	Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat	6190.UAE.001	Pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan	Laporan	130.000	130.000	130.000	130.000	8.300,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
6195	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik	6195.PEC.001	Kesepakatan replikasi inovasi pelayanan publik	Kesepakatan	50	50	50	50	5.000,0	Pusat	Kemen PAN RB
110.CG Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik											
5618	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	5618.QAA.001	Laporan/ Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan	Orang	630	660	680	700	29.892,8	Pusat dan Daerah	Ombudsman RI
		5618.QAA.002	Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan	Orang	5.670	5.940	6.120	6.300	60.643,7	Pusat dan Daerah	Ombudsman RI

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5619	Pencegahan Maladministrasi	5619.QIC.001	Survei Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat	Lembaga	39	39	39	39	19.021,7	Pusat dan Daerah	Ombudsman RI
		5619.QIE.001	Survei Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan	Pemerintah Daerah	548	548	548	548	57.064,3	Pusat dan Daerah	Ombudsman RI
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)											
076.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi											
3364	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.EAE.032	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Unit	6.158	38.511	42.362	46.598	106.400,0	Pusat dan Daerah	KPU
		3364.xxx.xxx (TA 2022)	Jumlah KPU melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Satker	0	549	549	549	21.300,0	Pusat dan Daerah	KPU
		3364.xxx.xxx (TA 2022)	Jumlah KPU melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	Satker	0	549	549	549	63.800,0	Pusat dan Daerah	KPU
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
6372	Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	6372.ABN.002	Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif dan Pengambilan Keputusan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-	750,0	Pusat	Kemen PPPA
2790	Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	2790.UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Hukum	Daerah	8	7	7	7	9.240,0	Provinsi	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)										
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak										
2790 Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	2790.QDB.001	K/L Bidang Politik dan Hukum yang difasilitasi dalam Peningkatan Indeks PUG	K/L	5	7	7	10	4.005,0	Pusat	Kemen PPPA
	2790.UBA.001	Daerah Mitra Asdep KG Bidang Politik dan Hukum yang difasilitasi dalam Peningkatan Indeks PUG	Daerah	4	4	5	7	6.467,0	Provinsi	Kemen PPPA
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.7.2.(a) Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi										
010.CR Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum										
6145 Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	6145.QDC.002	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	Orang	50	500	700	800	11.500,0	Pusat dan Daerah	Kemendagri
	6145.QEI.001	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	Lembaga	9	9	9	9	7.679,9	Pusat	Kemendagri
	6145.UBA.001	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15	34	34	34	17,5	Daerah	Kemendagri
	6145.PBC.001	Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	Rekomendasi Kebijakan	2	2	N/A	N/A	6,0	Pusat	Kemendagri
076.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi										
3364 Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.BMA.005	Publikasi Informasi	Layanan	1081	1.849	2034	2238	71.000,0	Pusat dan Daerah	KPU
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.7.2.(b) Indeks Aspek Kebebasan 16.7.2.(c) Indeks Kesetaraan										

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
076.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi											
3364	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.EAE.032	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Unit	6.158	38.511	42.362	46.598	106.400,0	Pusat dan Daerah	KPU
		3364.xxx.xxx (TA 2022)	Jumlah KPU melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Satker	0	549	549	549	21.300,0	Pusat dan Daerah	KPU
		3364.xxx.xxx (TA 2022)	Jumlah KPU melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	Satker	0	549	549	549	63.800,0	Pusat dan Daerah	KPU
		3364.BAA.007	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Orang	1.158	549	549	549	85.100,0	Pusat dan Daerah	KPU
		3364.BMA.005	Publikasi Informasi	Layanan	1.081	1.849	2.034	2.238	71.000,0	Pusat dan Daerah	KPU
115.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi											
4358	Fasilitasi Pengawasan	4358.QDC.001	Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Orang	248	348	448	549	63.800,0	Pusat dan Daerah	Bawaslu
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	5245.QDC.001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	Orang	34	34	34	34	42.600,0	Pusat dan Daerah	Bawaslu
4359	Fasilitasi Penanganan Pelanggaran	4359.QAH.001	Pengawasan Netralitas ASN	Layanan	0	1	1	1	85.200,0	Pusat dan Daerah	Bawaslu
010.CR Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum											
6145	Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	6145.QDC.001	Pendidikan Politik masyarakat di Daerah	Orang	1.000	6.000	8.000	10.000	11.200,0	Pusat dan Daerah	Kemendagri
		6145.QDD.002	Kapasitas Pengurus Ormas	Kelompok Masyarakat	200	3.000	3.300	4.200	63.500,0	Pusat dan Daerah	Kemendagri

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.8.1.(a) Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional										
011.AK Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri										
6021 Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral	6021.AEB.051	Partisipasi Aktif Indonesia dalam SMU PBB	Forum	12	12	12	12	7.507,9	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.053	Kerja Sama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional	Forum	1	16	16	16	2.767,6	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.054	Kerja Sama Multilateral terkait Isu Senjata Pemusnah Massal dan Konvensional	Forum	3	4	4	4	2.964,1	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.055	Kerja Sama Multilateral terkait Isu Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara	Forum	7	8	8	8	2.784,6	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.056	Kerja Sama Multilateral terkait Isu Terorisme	Forum	3	5	5	5	1.539,3	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.057	Kerjasama Multilateral dalam Rangka Pemajuan dan Perlindungan HAM	Forum	20	21	49	49	14.048,6	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.058	Kerjasama Multilateral dalam Rangka Penanganan Isu Kemanusiaan	Forum	2	4	20	20	4.309,6	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.059	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	Forum	34	22	30	30	25.089,4	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.060	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Lingkungan Hidup	Forum	6	3	10	10	3.956,6	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.061	Kerjasama Multilateral terkait isu Perdagangan	Forum	18	16	16	16	7.105,2	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.062	Kerjasama Multilateral terkait isu Komoditas	Forum	14	6	6	6	4.375,9	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.063	Kerjasama Multilateral terkait isu Kekayaan Intelektual	Forum	4	6	6	6	2.035,0	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.064	Kerja Sama Multilateral terkait Isu Sosial Budaya	Forum	18	18	18	18	14.447,8	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.065	Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Organisasi Internasional Negara Berkembang	Forum	8	8	8	8	5.332,8	Pusat	Kemenlu

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6021.PEB.067	Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan HAM PBB Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan HAM PBB	Forum	30	30	0	0	5.300,0	Pusat	Kemenlu
6020	Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerja Sama ASEAN	6020.AEB.001	Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Organisasi Regional/Internasional	Forum	25	20	30	20	46.621,2	Pusat	Kemenlu
011.AA Program Diplomasi dan Kerjasama Internasional											
6024	Pemantapan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	6024.AEB.001	Prakarsa/Rekomendasi Indonesia pada Forum Kerjasama Intrakawasan dan Antarkawasan Aspasaf	Forum	20	20	21	21	10.555,7	Pusat	Kemenlu
6025	Pemantapan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional di Kawasan Amerika dan Eropa	6025.AEB.001	Prakarsa/rekomendasi pada forum intra kawasan dan antar kawasan Amerika dan Eropa	Forum	13	12	17	19	12.436,7	Pusat	Kemenlu
074.WA Program Dukungan Manajemen											
3335	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama	3335.EAI.003	Layanan Kerja Sama 052-Layanan Kerja Sama Internasional	Laporan	5	5	5	5	2.564,0	Pusat	Komnas HAM
INDIKATOR TPB/SDGs:											
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur											
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah											
16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun											
010.CP Program Tata Kelola Kependudukan											
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	1269.QAA.001	Akta Kematian Yang Diterbitkan	Orang	110.000	110.000	110.000	110.000	PM	34 Provinsi	Kemendagri
		1269.QAA.002	Akta Perkawinan yang Diterbitkan	Orang	30.000	30.000	30.000	30.000	PM	34 Provinsi	Kemendagri
		1269.QAA.003	Akta Perceraian yang Diterbitkan	Orang	4.000	4.000	4.000	4.000	PM	34 Provinsi	Kemendagri
		1269.QAA.004	Akta Kelahiran yang diterbitkan	Orang	220.000	220.000	220.000	220.000	22.950,0	34 Provinsi	Kemendagri

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1271.UBA.001	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)	Daerah	10	10	10	10	PM	Provinsi/Kab/Kota	Kemendagri
		1271.UBA.002	Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	Daerah	5	5	5	5	PM	Provinsi/Kab/Kota	Kemendagri
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
2811	Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	2811.AEA.001	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Kegiatan	1	1	1	1	4.600,0	Pusat	Kemen PPPA
		2811.BDB.001	K/L yang Difasilitasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Lembaga	8	8	8	8	1.550,0	Pusat	Kemen PPPA
		2811.UBA.001	Daerah yang Difasilitasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Sipil dan Informasi Layak Anak	Daerah	17	17	17	17	8.000,0	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.10.1.(a) Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media											
059.GH Program Komunikasi Publik											
4523	Penguatan Lembaga Pers dan Jurnalis	4523.QAH.001	Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Kasus Pers dan Layanan Saksi Ahli Pers	Layanan	1	1	1	1	3.500,0	Pusat	Kemenkominfo
		4523.PBD.001	Survei Indeks Kemerdekaan Pers	Rekomendasi Kebijakan	34	34	34	34	28.400,0	34 provinsi	Kemenkominfo
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)											
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5680	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	5680.BCC.001	Pelayanan pengaduan perkara dugaan pelanggaran HAM	Perkara	1.993	3.360	3.600	3.600	7.871,0	Pusat	Komnas HAM
		5680.BCC.003	Penanganan perkara pelanggaran HAM	Perkara	470	864	720	720	11.752,0	Pusat	Komnas HAM
		5680.BCC.004	Mediasi perkara pelanggaran HAM	Perkara	61	100	150	150	11.448,0	Pusat	Komnas HAM

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5680.BCC.007	Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat	Perkara	1	1	1	1	2.473,0	Pusat	Komnas HAM
		5680.PBD.008	Penanganan pelanggaran ham yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban	Rekomendasi Kebijakan	250	750	750	750	11.233,0	Pusat	Komnas HAM
		5680.QKA.006	Pengamatan situasi atas pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya dan hak sipil dan politik masyarakat Papua	Laporan	1	1	1	1	2.000,0	Pusat	Komnas HAM
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5679	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	5679.AEF.003	Penyebarluasan wawasan HAM	Orang	16.390	22.924	25.216	27.738	5.122,0	Pusat	Komnas HAM
		5679.AEF.004	Festival HAM Nasional dan Internasional	Orang	400	440	484	532	2.320,0	Pusat	Komnas HAM
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.10.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan											
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5681	Pencegahan dan penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	5681.ABD.001	Perangkat standar pencapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	18.012,0	Pusat	Komnas Perempuan
		5681.ABD.003	Rekomendasi Mekanisme Penanganan dan Pencegahan Konflik terhadap Perempuan di Aceh dan Maluku (<i>Centre of Peace</i>)	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	4.500,0	Daerah	Komnas Perempuan
		5681.ABD.006	Rekomendasi penguatan mekanisme keadilan restoratif bagi perempuan korban pelanggaran HAM	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	7.800,0	Pusat	Komnas Perempuan
		5681.PBD.009	Konsep standar pengaturan untuk perlindungan dan pemutakhiran pengetahuan dan data tentang Perempuan Pembela HAM	Rekomendasi	1	1	1	1	6.900,0	Pusat	Komnas Perempuan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5681.PBD.002	Rekomendasi Instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	9.300,0	Daerah	Komnas Perempuan
013.BB Program Pembentukan Regulasi											
1601	Rancangan Peraturan perundang-undangan	1601.AAA.001	Rancangan Peraturan perundang-undangan yang mengakomodir peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	RPUU	1	1	1	1	30.000,0	Nasional	KemenkumHAM
5851	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukamkesra	5851.ABD.004	Rancangan Peraturan perundang-undangan hasil harmonisasi perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban pada tahun 2024 berdasarkan permohonan pengharmonisasian	Persentase	80	80	80	80	30.000,0	Nasional	KemenkumHAM
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.10.2* Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi											
059.GH Program Komunikasi Publik											
4525	Tata Kelola Komunikasi Publik	4525.AFA.001	NSPK Pengelolaan Bidang Komunikasi Publik	NSPK	2	2	2	2	13.800,0	Pusat	Kemenkominfo
		4525.QMB.001	Diseminasi informasi di wilayah 3T melalui mitra strategis	Layanan	33.000	36.000	39.000	42.000	31.880,2	Pusat	Kemenkominfo
4511	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	4511.PBM.001	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	27.400,0	Pusat	Kemenkominfo
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif											
059.GH Program Komunikasi Publik											
4511	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	4511.QIC.001	Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah	Lembaga	40	45	55	60	13.700,0	Pusat	Kemenkominfo

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.10.2.(b) Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi											
059.GH Program Komunikasi Publik											
4511	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	4511.QCB.001	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Perkara	92	100	110	120	8.300,0	Pusat	Kemenkominfo
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.a.1* Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles											
074.WA Program Dukungan Manajemen											
3335	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama	3335.EAB.001	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	1	1	1	1	3.812,0	Pusat	Komnas HAM
		3335.EAL.001	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Laporan	5	5	5	5	3.985,0	Pusat	Komnas HAM
		3335.EAK.001	Audit Internal	Laporan	19	22	23	24	3.200,0	Pusat	Komnas HAM
		3335.EAI.001	Layanan Informasi Publik	Layanan	1	1	1	1	2.000,0	Pusat	Komnas HAM
		3335.EAI.002	Layanan Keprotokoleran	Layanan	1	1	1	1	2.682,0	Pusat	Komnas HAM
		3335.EAI.003	Layanan Kerja Sama	Layanan	1	1	1	1	4.095,0	Pusat	Komnas HAM
3336	Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum	3336.EAH.001	Layanan Manajemen Organisasi	Indeks	BB	A	A	A	4.250,0	Pusat	Komnas HAM
		3336.EAN.001	Dokumen Keuangan Unit Eselon I	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	4.250,0	Pusat	Komnas HAM
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional											
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5679	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	5679.PFA.001	Standar Norma dan Pengaturan HAM	NSPK	4	4	4	4	36.170,0	Pusat	Komnas HAM
		5679.ABD.002	Hasil Kajian/Penelitian HAM	Rekomendasi dan Kebijakan	2	7	9	11	19.354,0	Pusat	Komnas HAM
5681	Pencegahan dan penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	5681.PBD.004	Rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Kebijakan	10	10	10	10	24.277,0	Pusat	Komnas Perempuan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5681.PBD.005	Kebijakan/regulasi Pemerintah Daerah yang mengadopsi SPPT-PKKTP, baik berupa muatan program, anggaran atau mekanisme kerja	Rekomendasi Kebijakan	6	8	10	15	19.500,0	Pusat	Komnas Perempuan
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN											
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya											
015.CE Program Kebijakan Fiskal											
4771	Kegiatan Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	4771.AAC.001	Rancangan Peraturan, Kebijakan, dan Standar Teknis di Bidang KUP dan PPSP	Rancangan Peraturan	1	1	1	1	15.770,36	Kantor Pusat	Kemenkeu
015.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara											
6208	Perumusan Kebijakan Administratif	6208.AAG.001	Peraturan Menteri Terkait Bidang Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	Peraturan Menteri	2	2	2	2	343,6	Kantor Pusat	Kemenkeu
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.1.1.(a) Rasio Pajak terhadap PDB											
010.CM Program Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa											
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	3991.UAE.001	Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil <i>review</i> Kemendagri	Laporan	23	23	23	23	16.500,0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kemendagri
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	1237.UBA.002	Inisiasi kesepakatan kerja sama daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	Daerah	48	48	48	48	10.457,0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kemendagri
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/ Pengurus Kelembagaan Desa	1248.UAC.004	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Lingkup Regional	Orang	2.312	2.430	2.520	2.250	8.774,2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kemendagri
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik											
055.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional											
6269	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	6269.FAB.500	Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat	Persen	100	-	-	-	21.000,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6269.FAB.500	Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah	Persen	75	100	-	-	-	Daerah	Kemen PPN/ Bappenas
		6269.FAB.500	Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah	Persen	50	75	100	-	-	Pusat dan Daerah	Kemen PPN/ Bappenas
		6269.FAB.500	Jumlah fitur yang diperbaiki, disempurnakan, atau ditambahkan	Jumlah	3	3	3	3	12.000,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.2.1.(a) Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.3.2.(a) Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.4.1* Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa											
015.CE Program Kebijakan Fiskal											
4773	Pengelolaan Pembiayaan Syariah	4773.PAC.937	Kajian perubahan PP terkait pengembangan pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan SBSN dengan skema investasi pemerintah	Laporan Kajian	1	-	-	-	686,5	Pusat	Kemenkeu
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.5.1 Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara berkembang termasuk negara-negara kurang berkembang											
055.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional											
6262	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	6262.ABB.408	Jumlah Kebijakan Percepatan Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	Rekomendasi	3	3	3	3	-	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.6.1.(a) Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga											
059.GF Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)											
4501	Pengembangan jaringan fixed broadband dan mobile broadband	4501.QDC.001	Akses Internet tetap Pitalebar	Titik/Lokasi	688	1.000	1.050	1.100	100.700,0	Pusat	Kemenkominfo
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.6.1.(b) Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)											
059.GF Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)											
4961	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi	4961.RAI.001	Palapa Ring	Kabupaten/ Kota	57	57	57	57	9.615.700,0	Tersebar	Kemenkominfo
4501	Pengembangan jaringan fixed broadband dan mobile broadband	4501.UBA.001	Penerapan Saluran Telekomunikasi (Ducting) Bersama	Kabupaten/ Kota	2	4	6	8	25.500,0	Tersebar	Kemenkominfo
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.8.1* Persentase pengguna internet											
059.GF Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)											
4961	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi	4961.RAI.002	BTS/Last Mile	Lokasi (kumulatif)	2.417	3.704	9.510	9.510	23.557.000,0	Tersebar	Kemenkominfo
		4961.RAI.003	Penyediaan Kapasitas Satelit	Gbps	31	37	37	37	11.715.244,0	Tersebar	Kemenkominfo
		4961.RAI.004	Akses Internet	Lokasi (kumulatif)	15.532	37.532	77.532	117.532	8.968.840,0	Tersebar	Kemenkominfo
INDIKATOR TPB/SDGs :											
17.9.1.(a) Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST											
17.9.1.(b) Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular											
055.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional											
6268	Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	6268.PEC.400	Jumlah Knowledge Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	Kegiatan	1	1	1	1	13.500,00	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
015.CE Program Kebijakan Fiskal											
4762	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	4762.ABA.003	Rekomendasi kebijakan dan strategi diplomasi terkait ekonomi pembangunan internasional	Rekomendasi	6	6	6	6	14.136,0	Pusat	Kemenkeu

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
4764	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	4764.ABA.006	Pelaksanaan Analisis dan Perumusan Rekomendasi Kebijakan Kerjasama Regional dan Bilateral	Rekomendasi	6	6	6	6	9.542,7	Pusat	Kemenkeu
015.WA Program Dukungan Manajemen											
6389	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	6389.FAM.002	Perjanjian Penyaluran Hibah	Perjanjian	6	-	-	-	180,1	Pusat	Kemenkeu
011.AA Program Diplomas dan Kerja sama Internasional											
6026	Peningkatan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional	6026.ABC.001	Rekomendasi Kebijakan Bantuan Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia	Rekomendasi Kebijakan	8	8	9	9	9.197,2	Pusat	Kemenlu
		6026.AEH.002	Promosi Aset Seni dan Budaya	Promosi	3	3	3	3	26.959,6	Pusat	Kemenlu
		6026.AEH.003	Promosi Aset Diplomas	Promosi	53	59	63	66	26.031,7	Pusat	Kemenlu
063.WA Program Dukungan Manajemen											
3158	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	3158.PEE.002	Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	Kesepakatan	2	2	2	2	5.000,0	Pusat	Badan POM
032.WA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP											
2322	Legislasi, Litigasi dan Kerja sama	2322.PEC.001	Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan	Kesepakatan	1	1	1	1	27.000,0	Pusat	KKP
018.WA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian											
1747	Fasilitasi Bantuan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Bidang Pertanian	1747.AEC.102	Kerjasama Luar Negeri Bidang Pangan dan Pertanian	Kesepakatan	1	1	1	1	523,0	Pusat	Kementan
090.EF Program Perdagangan Dalam Negeri											
3726	Peningkatan Tertib Ukur	3726.AEF.063	SDM yang mengikuti <i>technical assistance</i> program KSST bidang <i>metrology legal</i>	Orang	40	40	40	40	1.673,5	Kota Bandung	Kemendag
023.DK Program Pendidikan Tinggi											
4259	Pengembangan Kelembagaan	4259.QEJ.001	Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	Orang	528	396	396	396	178.626,6	Pusat	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
023.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran										
6395 Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	6395.AEE.001	Kemitraan Bidang Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh di Kawasan Asia Tenggara	Kesepakatan	32	34	36	38	3.198,4	Pusat	Kemendikbud Ristek
	6395.AEE.002	Kemitraan Bidang Biologi Tropika di Kawasan Asia Tenggara	Kesepakatan	10	9	9	8	829,6	Pusat	Kemendikbud Ristek
	6395.AEE.005	Kemitraan Bidang Peningkatan Pendidik dan Tendik Bidang IPA di Kawasan Asia Tenggara	Kesepakatan	3	3	3	3	777,8	Pusat	Kemendikbud Ristek
	6395.AEE.006	Kemitraan Bidang Peningkatan Pendidik dan Tendik Bidang Bahasa di Kawasan Asia Tenggara	Kesepakatan	3	4	4	4	391,7	Pusat	Kemendikbud Ristek
	6395.AEE.007	Kemitraan Bidang PAUD dan Parenting	Kesepakatan	12	12	12	12	2.635,0	Pusat	Kemendikbud Ristek
	6395.DCI.001	Pelatihan calon pelatih pemanfaatan Model Bidang PTJJ di Kawasan Asia Tenggara	Orang	5.000	11.000	7.000	8.000	16.117,7	Pusat	Kemendikbud Ristek
	6395.DCI.002	Pelatihan Calon Pelatih Pemanfaatan Model Bidang Biologi Tropika di Kawasan Asia Tenggara	Orang	2.000	2.000	2.000	2.000	5.368,0	Pusat	Kemendikbud Ristek
	6395.DCI.004	Pelatihan calon pelatih pemanfaatan Model Bidang Peningkatan Pendidik dan Tendik Bidang Matematika di Kawasan Asia Tenggara	Orang	690	545	570	720	4.343,3	Pusat	Kemendikbud Ristek
	6395.DCI.005	Pelatihan calon pelatih pemanfaatan Model Bidang Peningkatan Pendidik dan Tendik Bidang IPA di Kawasan Asia Tenggara	Orang	1.250	2.230	1.500	1.500	12.417,2	Pusat	Kemendikbud Ristek
	6395.DCI.006	Pelatihan calon pelatih pemanfaatan Model Bidang Peningkatan Pendidik dan Tendik Bidang Bahasa di Kawasan Asia Tenggara	Orang	420	1.850	570	620	5.954,2	Pusat	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6395.DCI.007	Pelatihan calon pelatih pemanfaatan Model Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Parenting di Kawasan Asia Tenggara	Orang	1.000	1.000	1.000	1.000	5.388,5	Pusat	Kemendikbud Ristek
		6395.PEE.001	Kemitraan Bidang Gizi dan Pangan di Kawasan Asia Tenggara	Kesepakatan	5	16	7	7	988,1	Pusat	Kemendikbud Ristek
		6395.SCI.001	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme dalam rangka pengembangan dan implementasi model pangan dan gizi	Orang	2.000	0	5.000	5.000	7.027,9	Pusat	Kemendikbud Ristek
		6395.SDC.001	Jumlah model yang dikembangkan dan diimplementasikan di kawasan Asia Tenggara	model	2	0	3	3	5.985,9	Pusat	Kemendikbud Ristek
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.10.1.(a) Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati											
090.EE Program Perdagangan Luar Negeri											
3714	Penyelenggaraan Atase Perdagangan	3714.ABB.101	Laporan Informasi Intelijen Bisnis	Rekomendasi Kebijakan	25	25	25	25	11.513,1	Pusat	Kemendag
		3714.ABB.102	Laporan Analisis Intelijen Bisnis	Rekomendasi Kebijakan	25	25	25	25	10.175,5	Pusat	Kemendag
		3714.ABB.103	Laporan Data Statistik Perdagangan	Rekomendasi Kebijakan	25	25	25	25	8.104,5	Pusat	Kemendag
3731	Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	3731.PEB.001	Partisipasi pada Forum terkait Produk Industri dan Pertambangan	Forum	3	3	3	3	2.922,5	Pusat	Kemendag
3740	Perundingan Perdagangan Jasa	3740.PBB.002	Roadmap Jasa Research dan Development	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	20.000,0	Pusat	Kemendag
		3740.PBB.003	Analisis Daya Saing Sektor Jasa Keuangan dan Jasa Komunikasi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	20.000,0	Pusat	Kemendag
3741	Perundingan Perdagangan Multilateral	3741.PEC.001	Partisipasi Aktif pada Mini Ministerial Meeting WTO, KTM WTO dan Sidang Reguler WTO	Kesepakatan	3	3	3	3	10.373,8	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
3742	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	3742.PEA.001	Koordinasi Pemanfaatan Hasil Perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN	Kegiatan	8	8	8	8	19.100,4	Pusat	Kemendag
		3742.PEA.002	Koordinasi Penanganan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN dan Mitra ASEAN	Kegiatan	1	1	1	1	1.300,6	Pusat	Kemendag
		3742.PEA.003	Koordinasi Pemenuhan AEC Blueprint 2025	Kegiatan	2	2	2	2	1.012,2	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.001	ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)	Kesepakatan	1	1	1	1	2.368,4	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.002	ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	Kesepakatan	1	1	1	1	300,4	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.006	Kerja Sama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	Kesepakatan	1	1	1	1	5.715,5	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.007	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-China FTA	Kesepakatan	1	1	1	1	2.030,7	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.008	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Korea FTA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.147,5	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.009	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Japan CEP	Kesepakatan	1	1	1	1	1.360,6	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.011	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Australia-New Zealand (AANZ) FTA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.841,0	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.012	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Hongkong FTA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.083,9	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.013	Kerja Sama Perdagangan ASEAN Canada	Kesepakatan	1	1	1	1	633,6	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.014	Kerja Sama Perdagangan ASEAN EU	Kesepakatan	1	1	1	1	1.109,6	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.015	Kerja Sama Perdagangan ASEAN USTR	Kesepakatan	1	1	1	1	400,0	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.016	Kerja Sama Perdagangan ASEAN EAEU	Kesepakatan	1	1	1	1	309,9	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.017	Kerja Sama Perdagangan ASEAN Russia	Kesepakatan	1	1	1	1	309,9	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.018	Kerja Sama Perdagangan dalam RCEP	Kesepakatan	1	1	1	1	1.142,2	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.019	Kerja Sama Perdagangan dalam East Asian Summit (EAS)	Kesepakatan	1	1	1	1	219,5	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		3742.PEC.020	Kerja Sama Perdagangan dalam ASEAN Plus Three (APT)	Kesepakatan	1	1	1	1	219,5	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.021	Kerja Sama Perdagangan dalam Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT)	Kesepakatan	1	1	1	1	792,7	Pusat	Kemendag
3743	Perundingan Perdagangan Bilateral	3743.PEA.001	Koordinasi Pemanfaatan Hasil Perundingan Bilateral	Kegiatan	3	3	3	3	5.681,3	Pusat	Kemendag
		3743.PED.001	Indonesia-EU CEPA	Perjanjian	1	1	1	1	3.009,0	Pusat	Kemendag
		3743.PED.009	Indonesia-Malaysia BTA	Perjanjian	1	1	1	1	2.109,7	Pusat	Kemendag
3744	Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional	3744.PEC.001	Kerja Sama Akses Perdagangan dan Investasi Forum APEC	Kesepakatan	1	1	1	1	7.093,8	Pusat	Kemendag
		3744.PEC.002	Kerja Sama Fasilitas Perdagangan dan Investasi Forum APEC	Kesepakatan	1	1	1	1	6.893,9	Pusat	Kemendag
		3744.PEC.003	Kerja Sama Antar Fora APEC	Kesepakatan	2	2	2	2	1.446,6	Pusat	Kemendag
		3744.PEC.005	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Karet Internasional	Kesepakatan	3	3	3	3	2.394,0	Pusat	Kemendag
		3744.PEC.008	Kerja Sama Perdagangan Negara G20	Kesepakatan	3	3	3	3	2.418,0	Pusat	Kemendag
		3744.PEC.009	Kerja Sama Perdagangan Negara OKI	Kesepakatan	2	2	2	2	2.765,6	Pusat	Kemendag
3738	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	3738.PBB.001	Kebijakan Penurunan Hambatan Akses Pasar	Rekomendasi Kebijakan	70	92	94	88	218.500,0	Pusat	Kemendag
		3738.PEF.001	Sosialisasi Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	Orang	600	1.000	1.000	1.000	7.099,8	Pusat	Kemendag
		3738.PBB.003	Rekomendasi Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional	Rekomendasi Kebijakan	7	7	7	7	40.800,0	Pusat	Kemendag
		3738.PBB.002	Rekomendasi Kebijakan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perundingan	Rekomendasi Kebijakan	1	2	2	2	4.658,6	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		3738.UAC.001	Peningkatan Kapasitas Negosiator Perundingan Perdagangan Internasional	Orang	100	170	170	170	4.225,7	Pusat	Kemendag
3745	Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	3745.QCB.001	Penanganan Kasus <i>Trade Remedy</i> dan Hambatan Teknis Perdagangan	Perkara	30	30	30	30	22.807,1	Pusat	Kemendag
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.11.1.(a) Pertumbuhan ekspor produk non migas											
090.EE Program Perdagangan Luar Negeri											
3751	Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor	3751.PEH.002	Display Produk Ekspor di Luar Negeri	Promosi	3	4	5	6	3.454,8	Pusat	Kemendag
		3751.QAC.001	InaExport Daerah (Surabaya)	Badan usaha	1	2	3	4	3.000,0	Pusat	Kemendag
3753	Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor	3753.PBB.001	Analisa dan informasi pasar ekspor di negara tujuan ekspor utama/potensial	Rekomendasi Kebijakan	6	7	8	9	3.200,0	Pusat	Kemendag
		3753.PBB.002	Analisa dan informasi pasar ekspor di Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Rekomendasi Kebijakan	4	5	6	7	2.000,0	Pusat	Kemendag
		3753.QAC.001	Layanan <i>Inquiry</i> dan Temu Bisnis	Badan usaha	50	50	50	50	671,7	Pusat	Kemendag
		3753.QMA.003	Pengembangan <i>Market Place</i> Berorientasi Ekspor	Layanan	1	1	1	1	2.800,0	Pusat	Kemendag
3754	Pengembangan Promosi dan Citra	3754.PEH.001	Pameran ke Negara Mitra Dagang Mitra Utama	Promosi	5	5	7	8	3.844,3	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.002	Pameran Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Promosi	5	6	7	8	8.249,2	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.003	Partisipasi Pameran CA Expo Nanning	Promosi	1	1	1	1	2.000,0	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.004	Partisipasi China International Import Expo-Shanghai	Promosi	1	1	1	1	2.000,0	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.005	Partisipasi Pameran Hannover Messe	Promosi	1	1	1	1	2.000,0	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.006	Partisipasi Pameran Terintegrasi Lainnya	Promosi	4	5	6	7	2.700,0	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.007	Pameran Trade Expo Indonesia	Promosi	1	1	1	1	5.252,9	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		3754.PEH.008	Partisipasi Pameran Dalam Negeri	Promosi	5	5	6	7	7.000,0	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.009	Partisipasi Expo 2020 Dubai	Promosi	1	1	0	0	235.000,0	Pusat	Kemendag
		3754.QDH.001	Misi Dagang ke Negara Mitra Dagang Utama	Badan usaha	60	65	70	75	6.302,3	Pusat	Kemendag
		3754.QDH.002	Misi Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Badan usaha	35	40	45	50	6.751,3	Pusat	Kemendag
3755	Kerja Sama Pengembangan Ekspor	3755.PEC.001	Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Ekspor	Kesepakatan	5	6	7	8	2.300,0	Pusat	Kemendag
		3755.QDH.001	Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor	Badan usaha	100	110	120	130	3.000,0	Pusat	Kemendag
3756	Pengembangan SDM Bidang Ekspor	3756.SCF.001	Pendidikan dan Pelatihan Ekspor	Orang	3.577	3.677	3.777	3.877	30.989,7	Pusat	Kemendag
3777	Pengembangan Promosi Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)	3777.AEH.001	Promosi ITPC	Promosi	57	57	57	57	66.004,4	Pusat	Kemendag
		3777.PBB.004	Market Intelligence	Rekomendasi Kebijakan	22	23	24	25	6.260,2	Pusat	Kemendag
		3777.QAC.002	Buyer Inquiry	Badan usaha	144	240	240	336	10.000,0	Pusat	Kemendag
		3777.QAC.003	Co Working Space di Pasar Potensial	Badan usaha	6	7	8	9	1.200,0	Pusat	Kemendag
3975	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	3975.UBA.001	Optimalisasi Ekspor Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	14	14	14	14	5.651,6	Pusat (Dekonsentrasi)	Kemendag
		3975.UBA.002	Fasilitas Pelatihan Pengembangan Produk dan Promosi Kepada UKM	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	34	34	34	41.732,1	Pusat (Dekonsentrasi)	Kemendag
		3975.UBA.003	Fasilitas Pengembangan Promosi di Kawasan Perbatasan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4	4	4	4	3.541,0	Pusat (Dekonsentrasi)	Kemendag
3730	Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	3730.QDG.001	Fasilitas Penerbitan Dokumen Ekspor Produk Industri Kehutanan	UMKM	60	60	60	60	8.000,0	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.13.1* Tersedianya Dashboard Makroekonomi											
055.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional											
6262	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	6262.FAE.105	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi RKP Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	Dokumen	1	1	1	1	-	Pusat	Kemen PPN/Bappenas
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.17.1.(a) Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun											
055.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional											
6269	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	6269.ABL.508	Kebijakan Percepatan Lingkup Pengembangan Pendanaan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	10.670,0	Terpusat	Kemen PPN/Bappenas
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.17.1.(b) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)											
033.WA Dukungan Manajemen											
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4197.ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	1	2	2	8.446,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	4	4	3	4	94.253,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	4.357,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	6.010,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.006	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	11.757,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	4	3	3	3	124.230,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	17.136,0	Terpusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4197.ABF.010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	5.762,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	61.108,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	5.920,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	26.838,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.014	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	10.150,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	107.250,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	10.250,0	Terpusat	Kemen PUPR
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.17.1.(c) Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi											
033.WA Dukungan Manajemen											
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4197.AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	2	2	2	2	21.859,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	13	10	12	12	34.600,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	4	4	4	3	25.881,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	1	2	2	2	80.403,0	Terpusat	Kemen PUPR
INDIKATOR TPB/SDGs:											
17.18.1.(a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional											
17.18.1.(b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional											
054.GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik											
2896	Pengembangan dan Analisis Statistik	2896.BMA.004	Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik	Layanan/ Publikasi/ Laporan	38	38	38	38	27.183,2	Pusat, Provinsi	BPS

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	2906.BMA.003	Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan rakyat	Layanan/ Publikasi/ Laporan	5	5	5	5	6.136,2	Pusat	BPS
		2906.BMA.006	Publikasi/Laporan Susenas	Layanan/ Publikasi/ Laporan	525	525	525	525	1.272.467,2	Pusat, Provinsi/ Kab/Kota	BPS
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.18.2* Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi											
054.WA Program Dukungan Manajemen											
2882	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	2882.EAG.001	Layanan Penyusunan Produk Hukum	Layanan	1	1	1	1	11.809,8	Pusat	BPS
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.18.3* Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan											
054.WA Program Dukungan Manajemen											
2881	Penyusunan, Pengembangan dan Evaluasi Program dan Anggaran	2881.EAB.002	Dokumen Renja-KL	Layanan	1	1	1	1	1.454,7	Pusat	BPS
INDIKATOR TPB/SDGs:											
17.19.1.(a) Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik											
17.19.1.(b) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar											
054.GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik											
2896	Pengembangan dan Analisis Statistik	2896.BDB.100	Pembinaan Statistik Sektoral	Lembaga	1	1	1	1	209,4	Pusat	BPS
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.19.2.(a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020											
054.GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik											
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Keteagakerjaan	2905.QMA.006	Publikasi/Laporan Sensus Penduduk	Layanan/ Publikasi/ Laporan	515	35	0	0	2.193.671,1	Pusat, 514 Provinsi/ Kab/Kota	BPS

INDIKATOR TPB/SDGs: 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)											
010.CP Program Tata Kelola Kependudukan											
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1271.UBA.002	Fasilitasi pembentukan data kelahiran dan kematian yang terintegrasi antar lembaga	Daerah	5	5	5	5	23.900,0	34 provinsi	Kemendagri
024.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
2072	Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan	2072.SDC.001	Model Penguatan sistem pencatatan kelahiran, kematian, dan penyebab kematian	Model	5	5	3	3	100.626,5	17 Provinsi dan 17 kabupaten /kota	Kemendes

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 136/M.PPN/HK/12/2021
TANGGAL 15 DESEMBER 2021

PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Nama Pemangku Kepentingan: ADRA INDONESIA									
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN									
Indikator 11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.									
Nama Program: SAFE - Seismic Friendly House Project - Sigi, Central Sulawesi									
Nama Kegiatan: Pembangunan 20 Hunian Tetap menggunakan teknik plastered wire ferrocement reinforcement.	Jumlah Hunian yang dibangun dengan menggunakan teknik plastered wire ferrocement reinforcement.	Unit Rumah	20			IDR 3,978,000,000	Hibah	Kab. Sigi, Sulawesi Tengah	ADRA Indonesia
Nama Kegiatan: Retrofit 80 rumah rusak sedang agar aman dari ancaman gempa bumi mendatang	Jumlah Hunian yang di retrofit agar aman dari ancaman gempabumi	Unit Rumah	80						
Indikator 11.b.2* Persentase jumlah daerah yang memiliki dokumen strategi penanggulangan bencana (RPB) yang sesuai dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB)									
Nama Program: Locally Led Disaster Preparedness and Protection through strong institutions, capable staff and continuous learning in Three provinces in Indonesia.									
Nama Kegiatan: Improved sub-national capacity to prepare and implement effective protection focused humanitarian response through inclusive institutional strengthening and contingency planning	Output Kegiatan: # of functional contingency plans and local Disaster Response Frameworks	Dokumen	6 (3 Rencana Kontinjensi dan 3 RPKB)			IDR 6,271,814,623	Hibah	Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, Kab. Pandeglang, Banten	ADRA Indonesia
	Output Kegiatan: Number of people covered by early action/contingency plans	Orang	1.580.000						
	Output Kegiatan: # of community members taking part in contingency and LDRF Planning through project activities	Orang	1.800						
	Output Kegiatan: # of Standard Operating procedures for activation of D&P Cluster at a provincial level	Dokumen	12						
	Output Kegiatan: Number of Operations Control Centre (PUSDALOPS) utilize digital platforms and are capable to support Covid-19 Task Force (Subnational level)	Pusdalops/Lembaga	3						
Nama Kegiatan : Improved professional quality and accountability of humanitarian response by of government duty bearers and civil society stakeholders according to their respective mandates and international humanitarian standards in future disasters.	Output Kegiatan: Capacity building (Protection). Number of participants showing an increased knowledge on the protection subject in focus (Protection & DP Capacity Building KRI)	Persentase	30% meningkat pengetahuan			IDR 6,271,814,623	Hibah	Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, Kab. Pandeglang, Banten	ADRA Indonesia
	Output Kegiatan: # of curricula and training materials developed	Dokumen	7						
	Output Kegiatan: # of persons receiving training	Orang	1200						
	Output Kegiatan: # of trainees that are certified and vetted trainers of humanitarian system and principles	Orang	60						
	Output Kegiatan: # of qualified individuals with capacity to deploy listed in provincial D&P Cluster Rosters.	Orang	50						

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan: Analysis, lessons learned and recommendations on best practices, and other relevant issues related to strengthening local humanitarian response can be utilized in other provinces, regencies.	Output Kegiatan: # types advocacy products produced and disseminated and transmitted to the relevant stakeholders on subnational, national and regional level	Dokumen	5							
	Output Kegiatan: # of agencies/organizations either contributed to the production of advocacy materials or have been reached by them	Lembaga	72							
TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
Nama Program : Gerakan Lumbung Hidup 'Aisiyah										
Kegiatan: Pelatihan penanaman	Meningkatkan kapasitas dalam melakukan penanaman	orang	3.000	3.000	3.000	3.000	100.000.000	swadaya, kemitraan	34 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisiyah
Kegiatan: Pelatihan budikdamber (budi daya ikan dalam ember)	Meningkatkan kapasitas budidaya ikan	orang	1.500	1.500	1.500	1.500	70.000.000	swadaya, kemitraan	34 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisiyah
Kegiatan: Penanaman pohon dan toga	Menyediakan sumber pangan keluarga	pohon	1,5 juta	1,5 juta	1,5 juta	1,5 juta	1.000.000.000	swadaya, kemitraan	34 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisiyah
Kegiatan: Budidaya ikan	Menyediakan sumber gizi protein keluarga	orang	1.200	1.200	1.200	1.200	70.000.000	swadaya, kemitraan	34 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisiyah
Kegiatan: lomba video program ketahanan pangan	Adanya dokumentasi good practice program Lumbung Hidup	orang	150				25.000.000	swadaya, kemitraan	nasional	Pimpinan Pusat 'Aisiyah
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										
Nama Program: Rumah Gizi										
Kegiatan: sosialisasi pencegahan stunting	Ibu hamil, ibu dengan balita, remaja, memiliki pengetahuan tentang pencegahan stunting	orang	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000.000	swadaya, kemitraan	15 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisiyah
Kegiatan: Pemberian sertifikat ASI Eksklusif	Memberikan apresiasi bagi ibu yang telah memberikan ASI Eksklusif	orang	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000.000	swadaya, kemitraan	15 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisiyah
Kegiatan: Pelatihan pengolahan makanan bergizi	Ibu memiliki pemahaman dan ketrampilan pengolahan makanan bergizi	orang	2.000	2.000	2.000	2.000	35.000.000	swadaya, kemitraan	15 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisiyah
Kegiatan: Pemberian MPASI	Balita mendapatkan tambahan makanan bergizi	orang	3.000	3.000	3.000	3.000	50.000.000	swadaya, kemitraan	15 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisiyah
Kegiatan: Bantuan Sosial bagi ibu hamil dan keluarga stunting	Ibu hamil dan keluarga dengan anak stunting mendapatkan tambahan gizi	orang	3.000	3.000	3.000	3.000	100.000.000	swadaya, kemitraan	15 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisiyah
Kegiatan: Konseling menyusui	Ibu menyusui mendapatkan konseling tentang menyusui	orang	500	500	500	500	10.000.000	swadaya, kemitraan	15 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisiyah

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Kegiatan: Sosialisasi PHBS	adanya pemahaman tentang PHBS untuk mencegah stunting	orang	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000.000	swadaya, kemitraan	15 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisiyyah
Kegiatan: sosialisasi pencegahan stunting bagi keluarga (suami dan nenek)	Adanya pemahaman dan dukungan dari keluarga untuk mencegah stunting	orang	3.400	3.400	3.400	3.400	50.000.000	swadaya, kemitraan	15 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisiyyah
Kegiatan: pengajian pencegahan stunting oleh muballigh/muballighat	Meningkatnya keterlibatan tokoh agama dalam mencegah stunting	orang	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000.000	swadaya, kemitraan	15 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisiyyah
	Meningkatnya pemahaman tentang pencegahan stunting dari perspektif Islam									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.										
Nama Program 1: Peningkatan pendapatan usaha pertanian										
Kegiatan: pengembangan Rumah Bibit	Output Kegiatan: meningkatnya ketersediaan bibit	rumah bibit	5	5	5	5	100000000	Swadaya dan kemitraan	Jatim dan Jateng	Pimpinan Cabang/Ranting (kec/desa) 'Aisiyyah
	Output Kegiatan: meningkatkan pendapatan petani perempuan									
Kegiatan: pelatihan dan pendampingan kelembagaan koperasi tani 'Aisiyyah	Output Kegiatan: menjaga keberlanjutan koperasi tani 'Aisiyyah	koperasi tani	5	5	5	5	150000000	Swadaya dan kemitraan	Jatim dan Jateng	Pimpinan Cabang/Ranting (kec/desa) 'Aisiyyah
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.										
Nama Program: Penguatan Kelompok Tani 'Aisiyyah										
Kegiatan: Pelatihan pertanian organik	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani perempuan tentang pertanian organik	orang	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000.000	Swadaya dan kemitraan	5 provinsi (jatim, jabar, jateng, sulsel, sulbar)	Pimpinan Daerah/Cabang/Ranting (kab/kota/kec/desa) 'Aisiyyah
Nama Kegiatan: budidaya pertanian organik	Meningkatkan produksi pertanian organik	orang	750	750	750	750	75.000.000	Swadaya dan kemitraan	5 provinsi (jatim, jabar, jateng, sulsel, sulbar)	Pimpinan Daerah/Cabang/Ranting (kab/kota/kec/desa) 'Aisiyyah
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
Indikator 6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.										
Nama Program: Gerakan 'Aisiyyah Sehat dan Rumah Gizi										
Edukasi konsumsi air minum yang bersih	Masyarakat memiliki pemahaman tentang pentingnya konsumsi air minum bersih untuk kualitas kesehatan dan gizi	orang	35.000	40.000	40.000	40.000				AISIYYAH
Produksi dan promosi air minum sesuai standar kesehatan dan sertifikasi halal	Tersedianya produk air minum yang sesuai dengan standar kesehatan dan sertifikasi halal	buah	100.000	100.000	100.000	100.000				AISIYYAH
Indikator 6.2.1*Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.										
Nama Program: Gerakan 'Aisiyyah Sehat dan Rumah Gizi										
Penyediaan fasilitas cuci tangan dan sabun di masyarakat dan sekolah	Tersedianya fasilitas cuci tangan dan sabun di sekolah maupun di komunitas	buah	6.000	5.000	5.000	5.000				AISIYYAH

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Penyediaan fasilitas jamban rumah tangga dan sekolah	tersedianya fasilitas jamban di sekolah dan komunitas	buah	3.400	3.000	3.000	3.000				AISYIYAH
Edukasi tentang cuci tangan menggunakan sabun	Masyarakat maupun warga sekolah memiliki pemahaman tentang pentingnya cuci tangan	orang	750.000	500.000	500.000	500.000				
Edukasi tentang perilaku BAB di jamban	Masyarakat dan warga sekolah memiliki pemahaman dan keserasan tentang perilaku BAB di	orang	35.000	40.000	40.000	40.000				
Nama Pemangku Kepentingan: Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisyiyah										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
Nama Program 1: Gerakan Lumbung Hidup 'Aisyiyah										
Kegiatan: Pelatihan penanaman	Meningkatkan kapasitas dalam melakukan penanaman	orang	3000	3000	3000	3000	100.000.000	swadaya, kemitraan	34 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisyiyah
Kegiatan: Pelatihan budidkamber (budi daya ikan dalam ember)	Meningkatkan kapasitas budidaya ikan	orang	1500	1500	1500	1500	70.000.000	swadaya, kemitraan	34 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisyiyah
Kegiatan: Penanaman pohon dan toga	Menyediakan sumber pangan keluarga	pohon	1,5 juta	1,5 juta	1,5 juta	1,5 juta	1.000.000.000	swadaya, kemitraan	34 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisyiyah
Kegiatan: Budidaya ikan	Menyediakan sumber gizi protein keluarga	orang	1200	1200	1200	1200	70.000.000	swadaya, kemitraan	34 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisyiyah
Kegiatan: lomba video program ketahanan pangan	Adanya dokumentasi good practice program Lumbung Hidup	orang	150				25.000.000	swadaya, kemitraan	nasional	Pimpinan Pusat 'Aisyiyah
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										
Nama Program 1: Rumah Gizi										
Kegiatan: sosialisasi pencegahan stunting	Ibu hamil, ibu dengan balita, remaja, memiliki pengetahuan tentang pencegahan stunting	orang	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000.000	swadaya, kemitraan	15 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisyiyah
Kegiatan: Pemberian sertifikat ASI Eksklusif	Memberikan apresiasi bagi ibu yang telah memberikan ASI Eksklusif	orang	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000.000	swadaya, kemitraan	15 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisyiyah
Kegiatan: Pelatihan pengolahan makanan bergizi	Ibu memiliki pemahaman dan ketrampilan pengolahan makanan bergizi	orang	2.000	2.000	2.000	2.000	35.000.000	swadaya, kemitraan	15 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisyiyah
Kegiatan: Pemberian MPASI	Balita mendapatkan tambahan makanan bergizi	orang	3.000	3.000	3.000	3.000	50.000.000	swadaya, kemitraan	15 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisyiyah
Kegiatan: Bantuan Sosial bagi ibu hamil dan keluarga stunting	Ibu hamil dan keluarga dengan anak stunting mendapatkan tambahan gizi	orang	3.000	3.000	3.000	3.000	100.000.000	swadaya, kemitraan	15 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisyiyah
Kegiatan: Konseling menyusui	Ibu menyusui mendapatkan konseling tentang menyusui	orang	500	500	500	500	10.000.000	swadaya, kemitraan	15 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisyiyah

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Kegiatan: Sosialisasi PHBS	Adanya pemahaman tentang PHBS untuk mencegah stunting	orang	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000.000	swadaya, kemitraan	15 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisyiyah
Kegiatan: sosialisasi pencegahan stunting bagi keluarga (suami dan nenek)	Adanya pemahaman dan dukungan dari keluarga untuk mencegah stunting	orang	3.400	3.400	3.400	3.400	50.000.000	swadaya, kemitraan	15 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisyiyah
Kegiatan: pengajian pencegahan stunting oleh muballigh/muballighat	Meningkatnya keterlibatan tokoh agama dalam mencegah stunting	orang	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000.000	swadaya, kemitraan	15 provinsi	Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah 'Aisyiyah
	Meningkatnya pemahaman tentang pencegahan stunting dari perspektif Islam									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.										
Nama Program 1: Peningkatan pendapatan usaha pertanian										
Kegiatan: pengembangan Rumah Bibit	Meningkatnya ketersediaan bibit	rumah bibit	5	5	5	5	100.000.000	Swadaya dan kemitraan	Jatim dan Jateng	Pimpinan Cabang/Ranting (kec/desa) 'Aisyiyah
	Meningkatkan pendapatan petani perempuan									
Kegiatan: pelatihan dan pendampingan kelembagaan koperasi tani 'Aisyiyah	Menjaga keberlanjutan koperasi tani 'Aisyiyah	koperasi tani	5	5	5	5	150.000.000	Swadaya dan kemitraan	Jatim dan Jateng	Pimpinan Cabang/Ranting (kec/desa) 'Aisyiyah
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.										
Nama Program 1: Penguatan Kelompok Tani 'Aisyiyah										
Kegiatan: Pelatihan pertanian organik	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani perempuan tentang pertanian organik	orang	1000	1000	1000	1000	100.000.000	Swadaya dan kemitraan	5 provinsi (Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel, Sulbar)	Pimpinan Daerah/Cabang/Ranting (kab/kota/kec/desa) 'Aisyiyah
Nama Kegiatan: Budidaya pertanian organik	Meningkatkan produksi pertanian organik	orang	750	750	750	750	75.000.000	Swadaya dan kemitraan	5 provinsi (Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel, Sulbar)	Pimpinan Daerah/Cabang/Ranting (kab/kota/kec/desa) 'Aisyiyah
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
Indikator 6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.										
Nama Program: Gerakan 'Aisyiyah Sehat dan Rumah Gizi										
Nama Kegiatan: Edukasi konsumsi air minum yang bersih	Output Kegiatan: Masyarakat memiliki pemahaman tentang pentingnya konsumsi air minum bersih untuk kualitas kesehatan dan gizi	orang	35.000	40.000	40.000	40.000				AISYIYAH
Nama Kegiatan: Produksi dan promosi air minum sesuai standar kesehatan dan sertifikasi halal	Output Kegiatan: Tersedianya produk air minum yang sesuai dengan standar kesehatan dan sertifikasi halal	buah	100.000	100.000	100.000	100.000				AISYIYAH
Indikator 6.2.1*Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.										
Nama Program: Gerakan 'Aisyiyah Sehat dan Rumah Gizi										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Kegiatan: Penyediaan fasilitas cuci tangan dan sabun di masyarakat dan	Output Kegiatan: Tersedianya fasilitas cuci tangan dan sabun di sekolah maupun di komunitas	buah	6.000	5.000	5.000	5.000			AISYIYAH	
Nama Kegiatan: Penyediaan fasilitas jamban rumah tangga dan sekolah	Output Kegiatan: tersedianya fasilitas jamban di sekolah dan komunitas	buah	3.400	3.000	3.000	3.000				
Nama Kegiatan: Edukasi tentang cuci tangan menggunakan sabun	Output Kegiatan: Masyarakat maupun warga sekolah memiliki pemahaman tentang pentingnya	orang	750.000	500.000	500.000	500.000				
Nama Kegiatan: Edukasi tentang perilaku BAB di jamban	Output Kegiatan: Masyarakat dan warga sekolah memiliki pemahaman dan keserasan tentang	orang	35.000	40.000	40.000	40.000				
Nama Pemangku Kepentingan: YAYASAN AHLI BADAK INDONESIA (YABI) DAN MITRA										
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN										
Indikator 15.1.1* Proporsi kawasan hutan terhadap total luas hutan										
Indikator 15.4.1* Situs keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi										
Nama Program: Konservasi habitat badak Sumatera dan Jawa										
Nama Kegiatan: Restorasi Habitat Badak Sumatera di Rawa Bunder	Tanaman pakan Badak	Luas lahan ditanam (ha)	35 ha	45 ha	55 ha	65 ha	1.500.000.000	IRF	Resort Rawa Bunder, SPTN Way Kanan, TNWK, Lampung	YABI dan Balai TN Way Kambas (TNWK)
		Jumlah pohon yang ditanam (bibit)	>17 rb bibit	>22 rb bibit	>27 rb bibit	>32 rb bibit	500.000.000			
		Unit sarana prasarana restorasi					1.250.000.000			
Nama Kegiatan: Restorasi Habitat Badak Sumatera di Rawa Kidang	Tanaman pakan badak	Luas Lahan yang ditanam (ha)	20 ha	30 ha	40 ha	50 ha	1.800.000.000	IRF	Rawa Kidang, Resor Margahayu, Seksi III Kuala Panet, Lampung	YABI dan Balai TNWK bekerjasama dg Kelompok Tani Hutan (KTH) Rahayujaya
		Jumlah pohon yang ditanam (bibit)	>30 rb bibit	>40 rb bibit	>50 rb bibit	>60 rb bibit	700.000.000			
		Unit sarana prasarana restorasi.					1.250.000.000			
		Jumlah Masyarakat (kepala keluarga / kk) sekitar kawasan yang terlibat dalam kegiatan restorasi :								
		- Desa labuhan Ratu VII	1342 kk	1342 kk	1342 kk	1342 kk	335.500.000			
- Dusun Margahayu	110 kk	110 kk	110 kk	110 kk	27.500.000					
- Anggota keluarga KTH	35 kk	35 kk	35 kk	35 kk	8.000.000					

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
	Usaha kelompok dalam pembibitan, budidaya lebah, penggemukan sapi ternak, perikanan, budidaya bebek petelur, wisata pendidikan lingkungan	3 juta / bln / kk	3 juta / bln / kk	3 juta / bln / kk	3 juta / bln / kk	25.000.000				
Pengendalian Langkap di Taman Nasuinal Ujung Kulon (TNUK)	Pengendalian pohon langkap (Arenga Palm) untuk pakan badak lebih banyak	Luasan lahan (ha)	65	65	65	65	2.500.000.000	IRF	TN Ujung Kulon (TNUK)	YABI melalui JRSCA bekerjasama dengan TNUK
Monitoring Badak Jawa di Taman Nasuinal Ujung Kulon (TNUK)	Survei dan Monitoring Camera Trap	Pemasangan Camera Trap (unit)	125	200	250	300	2.715.000.000	IRF	TN Ujung Kulon (TNUK)	YABI, TNUK, dan Masyarakat Lokal
	Hasil analisa Survei Camera Trap	Jumlah Populasi Badak Jawa (individu)					4.800.000.000	TNUK & IRF		
Nama Program: Perlindungan eksistensi badak dari kepunahan sehingga tidak lagi termasuk kategori satwa yang terancam punah (critically endangered species)										
Rhino Protection Unit (RPU)	Patroli dan survei monitoring.	Survei untuk menemukan badak (individu)	5				10.000.000.000	IRF	TN Bukit Barisan Selatan, TN Way Kambas, TN Ujung Kulon	RPU YABI di Wilayah Kerja TNBBS, TNWK, dan TNWU
		Luas areal patroli (ha)	90%							
		Frekuensi Tindakan ilegal (kasus)	>5 kasus	>5 kasus	>5 kasus	>5 kasus				
Penerapan Aplikasi SMART untuk Sistem Database Badak	Strategi penerapan SMART. Peta sebaran badak.	Jumlah operator SMART (orang)	10	15	22	28	280.000.000	IRF, KfW	TN Bukit Barisan Selatan, TN Way Kambas, TN Ujung Kulon	RPU YABI BBS, RPU YABI WK, RPU YABI UK
Suaka Badak Sumatera (SRS)	Kesehatan satwa Badak di SRS	Jumlah badak yang dilahirkan melalui natural breeding (individu)	1	-	2	-	6.000.000.000	IRF	TN Way Kambas	YABI SRS dengan TNWK
	Fasilitas yang lengkap	Sarana prasarana untuk suaka badak Sumatera di TNWK								

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Rencana Aksi Darurat Penyelamatan Badak Sumatera	Tanda keberadaan badak Sumatera	Pemasangan Camera Trap	110	110	110	-	16.400.000.000	SRRA, TFCA Sumatera	TN Bukit Barisan Selatan, TN Way Kambas	ALERT, YABI, TNWK & TNBBS
	Survei trajektori dan monitoring kamera trap	% Luas lahan habitat badak	70	80	90	-				ALERT, YABI, TNWK
	Satwa badak Sumatera	Jumlah badak yang berhasil direscue dan di translokasi ke SRS TNWK				-				YABI, TNWK dan TNBBS
Indikator 15.7.1.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.										
Nama Program: Pemberantasan Tindakan Ilegal Terhadap Satwa Badak										
Intelligent and Law Enforcement Unit (ILEU)	Hasil unit intelejen	Frekuensi Tindakan ilegal					2.500.000.000	IRF & KfW	TN Bukit Barisan Selatan, TN Way Kambas	YABI melalui RPU-ILEU dengan TNBBS, RPU TNWK
	Operasi tangkap tangan pelaku	Penangkapan (OTT) minimal kasus	> 10 Kasus	> 10 Kasus	> 10 Kasus	> 10 Kasus				
	Berkas Perkara yang diproses di kejaksaan dan pengadilan	Jumlah kasus ilegal yang sampai P21	> 10 Kasus	> 10 Kasus	> 10 Kasus	> 10 Kasus				
		Pengembangan Kasus	> 5 Kasus	> 5 Kasus	> 5 Kasus	> 5 Kasus				
Nama Pemangku Kepentingan: Institut for Transportation and Development (ITDP) Indonesia										
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN										
Indikator 11.2.1.(a) Proporsi populasi yang mendapat akses yang nyaman pada transportasi publik										
Nama Program: Reducing Emissions through Integration and Optimization of Public Transport in Indonesia										
Optimalisasi layanan Transjakarta dengan penyediaan direct services dan integrasi antar moda serta Transjakarta BRT dan Non-BRT di 20 rute.	Terdapat 5 BRT stations yang memiliki akses yang diperbaiki dan terintegrasi dengan moda lain (utamanya dengan metro)	station		5 (telah tercapai 8 stasiun pada 2019)				IKI	Jakarta	Asistensi teknis oleh ITDP Indonesia, diimplementasikan oleh PT Transjakarta, Dinas Bina Marga DKI Jakarta, MRT Jakarta
	Terdapat 6 koridor perak Transjakarta (koridor yang telah memenuhi standar perak berdasarkan BRT Standard)	koridor		6				IKI	Jakarta	Asistensi teknis oleh ITDP Indonesia, diimplementasikan oleh PT Transjakarta
Perbaiki akses transportasi publik di Jakarta melalui integrasi efektif dengan penyelenggaraan kendaraan-tidak bermotor	Terdapat layanan sepeda sewa yang aksesibel	sepeda dockless		telah tercapai pada 2020				IKI	Jakarta	Asistensi teknis oleh ITDP Indonesia, diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta
	Terdapat 5 BRT stations yang aksesnya diperbaiki dan memiliki integrasi dengan fasilitas pejalan kaki dan sepeda	station		5 (telah tercapai 14 stasiun 2020)				IKI	Jakarta	Asistensi teknis oleh ITDP Indonesia, diimplementasikan oleh PT Transjakarta dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Perencanaan detail koridor transportasi berkelanjutan dan inklusif atas TOD, BRT, NMT dan TDM yang diterima dan dapat diaplikasikan oleh Medan dan Semarang	Terdapat 2 kota yang menyetujui dan berinisiatif untuk implementasi rekomendasi koridor transportasi berkelanjutan dan inklusif	kota		2				IKI	Medan dan Semarang	Asistensi teknis oleh ITDP Indonesia, diimplementasikan oleh Kementerian Perhubungan, Pemerintah Kota Semarang, TransSemarang dan Pemerintah Kota Medan
Asistensi teknis perencanaan dan perancangan jaringan jalur sepeda di Jakarta	Implementasi jalur sepeda di DKI Jakarta	km	172	242	290	328		AGCI	Jakarta	Asistensi teknis oleh ITDP Indonesia, diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta
Asistensi teknis penerapan kebijakan inklusif dalam perbaikan layanan transportasi publik rendah emisi	Terdapat 10 kebijakan inklusif yang diadopsi oleh Jakarta	kebijakan		10				IKI	Jakarta	Asistensi teknis oleh ITDP Indonesia, diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta
Indikator 11.2.1.(b) Persentase penduduk yang terlayani transportasi umum										
Nama Program: Reducing Emissions through Integration and Optimization of Public Transport in Indonesia										
Optimalisasi layanan Transjakarta dengan penyediaan direct services dan integrasi antar moda serta Transjakarta BRT dan Non-BRT di 20 rute.	Terdapat 20 rute direct service yang terimplementasi	rute		20 (telah tercapai 248 rute pada 2020)				IKI	Jakarta	Asistensi teknis oleh ITDP Indonesia, diimplementasikan oleh PT Transjakarta
Indikator 11.6.2.(b) Indeks kualitas udara										
Nama Program: Road Map of Two-Wheeler Electrification Plan in Jakarta										
Penyusunan peta jalan (roadmap) elektrifikasi kendaraan sepeda motor angkutan daring di Jakarta	Terdapat peta jalan (roadmap) elektrifikasi kendaraan sepeda motor angkutan daring di Jakarta	Dokumen	1					UK PACT	Jakarta	ITDP Indonesia
	Terdapat dokumen rekomendasi kebijakan nasional dan lokal untuk mendukung elektrifikasi kendaraan sepeda motor	Dokumen	1					UK PACT	Jakarta	ITDP Indonesia
	Terdapat dokumen rekomendasi suplai listrik untuk mendukung elektrifikasi kendaraan sepeda motor	Dokumen	1					UK PACT	Jakarta	ITDP Indonesia
	Terdapat dokumen panduan desain ruang jalan yang mengakomodasi adanya kendaraan listrik roda dua	Dokumen		1				UK PACT	Jakarta	ITDP Indonesia
Nama Program: Building Capacity and Action Plan to Scale-up Transjakarta E-bus										
Penyusunan rencana aksi untuk mendukung transisi Transjakarta menuju penggunaan bus listrik, khususnya rute mikrotrans	Terdapat peta jalan (roadmap) elektrifikasi bus Transjakarta untuk rute mikrotrans	Dokumen	1					UK PACT	Jakarta	ITDP Indonesia
	Terdapat dokumen rekomendasi kebijakan pendukung	Dokumen	1					UK PACT	Jakarta	ITDP Indonesia
	Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan terkait (operator angkutan umum, pemerintah daerah, dan lainnya)	Lokakarya		3				UK PACT	Jakarta	ITDP Indonesia
	Terdapat dokumen panduan proses perencanaan implementasi bus listrik	Dokumen		1				UK PACT	Jakarta	ITDP Indonesia
Nama Program: Support for e-mobility transition in Jakarta										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Asistensi teknis untuk penyusunan rencana aksi untuk mendukung transisi Transjakarta menuju penggunaan bus listrik, khususnya rute BRT dan Non-BRT	Terdapat peta jalan (roadmap) elektrifikasi bus Transjakarta untuk rute BRT dan Non-BRT	Dokumen	1 (telah tercapai)					UNEP	Jakarta	ITDP Indonesia
	Terdapat dokumen rekomendasi kebijakan pendukung kendaraan listrik di tingkat nasional dan lokal	Dokumen						UNEP	Jakarta	ITDP Indonesia
	Feasibility study untuk integrasi sumber energi terbarukan (solar panel) pada stasiun pengisian daya bus listrik Transjakarta	Dokumen	1					UNEP	Jakarta	ITDP Indonesia
	Penghitungan reduksi GRK berdasarkan rencana elektrifikasi	Dokumen	1							
Nama Program: Reducing Emissions through Integration and Optimization of Public Transport in Indonesia										
Penerapan strategi dalam mengurangi tarvel demand, terlebih pembatasan parkir dan integrasi kawasan serta penerapan TOD	Penerapan 3 program TDM (Transport Demand Management) oleh pemerintah DKI Jakarta	kebijakan	2 (rencana)	3				IKI	Jakarta	Asistensi teknis oleh ITDP Indonesia, diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta
	Terdapat 1 area percontohan TOD	area		1 (telah tercapai pada 2018)				IKI	Jakarta	ITDP Indonesia
Asistensi oleh Kementerian Perhubungan dan/atau Bappenas dalam kebijakan yang mendukung peningkatan pembiayaan dalam penyelenggaraan transportasi yang rendah emisi	Terdapat 2 proyek nasional yang mendapatkan bantuan pembiayaan oleh nasional	proyek		2 (telah tercapai pada 2019)				IKI	Medan dan Semarang	Asistensi teknis oleh ITDP Indonesia, diimplementasikan oleh Kementerian Perhubungan, Pemerintah Kota Semarang, TransSemarang dan Pemerintah Kota Medan
Nama Program: E-mobility Adoption Roadmap for the Indonesian Mass Transit Program										
Asistensi teknis perencanaan implementasi bus listrik di Medan dan Bandung	Analisis finansial dan model bisnis implementasi bus listrik di Medan dan Bandung	Dokumen	1					World Bank	Medan dan Bandung	ITDP Indonesia dan ICCT sebagai konsultan dari World Bank
	Analisis reduksi GRK berdasarkan rencana implementasi bus listrik di Medan dan Bandung	Dokumen	1					World Bank	Medan dan Bandung	ITDP Indonesia dan ICCT sebagai konsultan dari World Bank
Nama Pemangku Kepentingan: Serikat Nelayan Indonesia										
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN										
Indikator 14.2.1* Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan										
Nama Program: Konsultasi Publik di Wilayah SNI di Indonesia terkait perda tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)										
Nama Kegiatan: Konsultasi Publik antara nelayan dan pemerintah daerah	Output Kegiatan : Tersusunnya dokumen RZWP3K secara partisipatif	400 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	760		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Output Kegiatan : Inisiatif nelayan terkait RZWP3K untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah dan DPRD	400 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	450		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
Nama Kegiatan: mendorong inisiatif raperda melalui seminar, dan lobby terkait perda RZWP3K yang memihak para nelayan kecil	Output Kegiatan : Inisiatif raperda RZWP3K untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah	260 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	370		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
	Output Kegiatan : Perda RZWP3K dengan proses keterlibatan partisipasi nelayan	370 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	560		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
Indikator 14.2.1.(a) Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan										
Nama Program: Konsultasi Publik 11 WPPNRI Pemetaan potensi sumber daya perikanan										
Nama Kegiatan: konsultasi publik pemetaan sumber daya ikan di 11 WPP bersama aparat pemerintah	Output Kegiatan: adanya skema kerjasama antara pemerintah dan nelayan dalam melakukan pencegahan penangkapan dengan cara merusak di 11 WPP	150 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	660		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
	Output Kegiatan kegiatan bersama antara nelayan dan pemerintah dalam pemetaan potensi 11 WPPNRI	360 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	560		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
Nama Kegiatan: pengelolaan 11 WPP dengan monitoring dan pencegahan dari penangkapan yang merusak (illegal fishing)	Output Kegiatan : terbentuknya badan keamanan laut yang dibentuk nelayan dalam rangka fungsi pengawasan terkait alat tangkap yang merusak	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	480		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
	Output Kegiatan : membuat peraturan dan badan pengawasan nelayan yang melakukan pecegahan dan upaya tidak bersama unsur pemerintah daerah	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	550		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
Indikator 14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.										
Nama Program: Pendataan hasil tangkap nelayan jenis rajungan di WPP 712										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan: Melakukan pendataan jenis rajungan terkait penangkapan yang dilakukan nelayan	Output Kegiatan : mengetahui habitat rajungan yang menjadi andalan para nelayan kecil. Baik jumlah tangkapan, ukuran, dsb	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	760	Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah	Serikat Nelayan Indonesia
	Output Kegiatan membuat dokumen dan langkah dalam pengembangan rajungan yang menjadi primadona para nelayan kecil di WPP 712	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	880	Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah	Serikat Nelayan Indonesia
Nama Kegiatan: melakukan rekrutman enumerator dalam melakukan pendataan	Output Kegiatan: adanya enumerator atau orang yang melakukan pendataan hasil tangkapan langsung kepada nelayan	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	780	Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah	Serikat Nelayan Indonesia
	Output Kegiatan: membuat data base dan aplikasi dalam melakukan input data yang sudah dilakukan oleh enumerator	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	735	Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah	Serikat Nelayan Indonesia
Indikator 14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut									
Nama Program: Penguatan daya tahan wilayah pesisir melalui penghijauan									
Nama Kegiatan: konsultasi publik terkait pengembangan daerah kawasan ekosistem laut	Output Kegiatan : teridentifikasinya daerah ekosistem laut dalam pengembangan reboisasi dengan melakukan penanaman mangrove	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	380	Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Output Kegiatan : perencanaan bersama dalam melakukan upaya penanaman mangrove	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	470		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
Nama Kegiatan: Dokument pengembangan kawasan perlindungan dalam mengantisipasi abrasi laut	Output Kegiatan : bekerjasama dengan pemerintah propinsi, dan desa dalam melakukan perencanaan bersama	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	560		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
	Output Kegiatan : membuat peraturan daerah terkait wilayah perlindungan kawasan pesisir	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	490		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
Indikator 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha.										
Nama Program: Pengawasan dan Pendataan Produksi Nelayan										
Nama Kegiatan: Pengembangan pendataan produksi nelayan berbasis aplikasi	Output Kegiatan: pelatihan dan pengembangan pendataan produksi nelayan berbasis digital	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	670		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
	Output Kegiatan: pelatihan bagi enumerator dalam melakukan pendataan	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	890		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan indonesia
Nama Kegiatan: pengawasan swadaya nelayan dalam mencegah IUU Fishing	Output Kegiatan: patroli bersama antara pengawas swadaya dan aparat keamanan dalam memberantas IUU Fishing	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	908		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
	Output Kegiatan: membuat posko nelayan untuk pengaduan yang secara langsung	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	670		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Indikator 14.b.1* Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil									
Nama Program: Inisiatif peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan nelayan skala kecil dan pemenuhan akses pangan, fasilitas bagi nelayan kecil									
Nama Kegiatan: Workshop nelayan skala kecil tentang pedoman tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil	Output Kegiatan: draft rancangan inisiatif raperda nelayan	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	860	Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
	Output Kegiatan: Rapat dengar pendapat umum antara nelayan dan pemerintah	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	740	Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
Nama Kegiatan: sosialisasi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam	Output Kegiatan: nelayan dapat mengetahui informasi dan hak-hak nelayan terkait UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam No.7/2016	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	560	Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
	Output Kegiatan: Nelayan dapat melakukan usahanya dan aksesnya yang dijamin oleh UU No.7/2016	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	763	Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
Indikator 14.b.1.(a) Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.									
Nama Program: Advokasi finansial nelayan									
Nama Kegiatan: Konsultasi Publik antara nelayan dan perbankan, Lembaga keuangan dan pemerintah daerah	Output Kegiatan : adanya komunikasi antara nelayan dan pihak perbankan dalam memfasilitasi akses pendanaan bagi para nelayan kecil	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	780	Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
	Output Kegiatan : meningkatnya jumlah nelayan disetiap propinsi dalam mengakses pendanaan nelayan kecil	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	650	Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
Nama Kegiatan: mendampingi para nelayan dalam melakukan peminjaman akses pendanaan kepada perbankan dan menyiapkan pinjaman kepada keluarga nelayan skala kecil	Output Kegiatan : memastikan nelayan bisa langsung mengakses pendanaan yang diberikan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	630	Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Output Kegiatan: mempunyai lembaga keuangan nelayan (koperasi) yang bisa memberikan pinjaman kepada keluarga nelayan kecil	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	890		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
Indikator 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.										
Nama Program: Memperluas jaminan sosial, bagi nelayan kecil dan keluarga nelayan										
Nama Kegiatan: pembuatan kartu asuransi nelayan	Output Kegiatan : nelayan dan keluarga nelayan (ABK) mempunyai kartu asuransi nelayan nelayan	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	569		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
	Output Kegiatan nelayan dan keluarga nelayan (ABK) dapat memahami tatacara pembuatan kartu asuransi nelayan	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	630		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
Nama Kegiatan: pembuatan kartu usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bagi pelaku usaha perikanan (perempuan)	Output Kegiatan : perempuan (keluarga nelayan) dapat mempunyai kartu usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA)	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	750.000.000		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
	Output Kegiatan : perempuan nelayan bisa memiliki kartu KUSUKA	300 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	750		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
Indikator 14.c.1* Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).										
Nama Program:Meninisatikan rancangan peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan UNCLOS dan memperkuat armada nelayan dari nelayan pantai menjadi nelayan lepas pantai										
Nama Kegiatan: workshop nelayan kecil terkait PBB tentang hukum laut Internasional	Output Kegiatan: Nelayan kecil (tradisional) dapat memahami kaidah hukum laut internasional melalui UNCLOS 1982	150 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	450		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
	Output Kegiatan: Adanya perda dalam melaksanakan UNCLOS terkait perlindungan kepada nelayan diperbatasan	150 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	670		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan: Advokasi pedoman internasional dalam membangun relasi perlindungan nelayan diperbatasan dan mendorong nelayan pantai menjadi nelayan lepas pantai	Output Kegiatan: Melakukan upaya advokasi lintas sektoral dalam perlindungan nelayan diperbatasan	150 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	700		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
	Output Kegiatan: Nelayan Indonesia bisa mengakses wilayah perairan ZEE dengan kapasitas armada 60 GT	150 orang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	850		Propinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Serikat Nelayan Indonesia
Nama Pemangku Kepentingan: RARE Indonesia										
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN										
Indikator 14.2.1* Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan										
Nama Program: Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP)										
Nama Kegiatan: Penguatan Data untuk Pengambilan Keputusan	Output Kegiatan: Tersedianya data kesehatan terumbu karang di dalam kawasan PAAP	Jumlah lokasi PAAP yang diamati dan memiliki data untuk pengambilan keputusan	15	0	15	0	450	Walton Foundation, MACP, BMU, Bloomberg Philantrophy	11 kabupaten pesisir di Sultra (Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Muna, dan Muna Barat)	RARE Indonesia
	Output Kegiatan: Tersedianya data perikanan tangkap skala kecil di kawasan PAAP	Jumlah Bulan	12	12	12	12	300	Pew, DPCL, Walton Foundation, MACP, BMU, Bloomberg Philantrophy	a. 11 kabupaten pesisir di Sultra (Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Muna, dan Muna Barat); dan b. 9 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondou Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondou dan Bolaang Mongondou Utara)	RARE Indonesia

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Indikator 14.b.1* Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil										
Nama Program: Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP)										
Nama Kegiatan: Penguatan Tata Kelola dan Kebijakan	Terbangunnya dasar hukum yang kuat bagi penerapan PAAP di tingkat nasional dan daerah	Jumlah peraturan yang ditetapkan	1	2	1	0	250	Angell Foundation, Bloomberg Philanthropy, GCF	a. Tingkat Nasional: Jakarta b. Tingkat Provinsi: Sulawesi Utara	RARE Indonesia
	Terintegrasikannya PAAP ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat PAAP sebagai instrumen pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan perikanan skala kecil	17	22	22	22	500	Angell Foundation, Bloomberg Philanthropy, GCF	a. Sultra dan 11 kabupaten pesisir di Sultra (Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Muna, dan Muna Barat) b. Sulut dan 9 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara)	RARE Indonesia
	Terintegrasikannya PAAP ke dalam dokumen penganggaran/keuangan pembangunan daerah	Jumlah dokumen penganggaran pemerintah daerah yang memuat alokasi pendanaan untuk kegiatan terkait PAAP	15	22	22	22	50	Angell Foundation, Bloomberg Philanthropy, GCF	a. Sultra dan 11 kabupaten pesisir di Sultra (Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Muna, dan Muna Barat) b. Sulut dan 9 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara)	RARE Indonesia

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
	Terbangunnya dan berfungsinya kerangka kelembagaan PAAP dan pencapaian SDG-14	Jumlah lembaga yang terbentuk dan berfungsi bagi pengembangan PAAP dan pencapaian SDG-14	8	9	9	9	500	Angell Foundation, Bloomberg Philantrophy, GCF	a. Sultra dan 11 kabupaten pesisir di Sultra (Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Muna, dan Muna Barat) b. Sulut dan 9 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara) c. Papua Barat dan 11 kabupaten/kota pesisir di Papua Barat (Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Raja Ampat, Kab. Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kota Sorong)	RARE Indonesia
Nama Kegiatan 2: Penguatan Pengawasan berbasis Masyarakat	2.1 Terbentuknya divisi pengawasan berbasis masyarakat di setiap kawasan PAAP	Jumlah divisi pengawasan di Kelompok PAAP terbentuk	12	0	12	12	200	Walton Foundation, MACP, BMU, Bloomberg Philantrophy	a. Sultra dan 11 kabupaten pesisir di Sultra (Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Muna, dan Muna Barat) b. Sulut dan 9 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara)	RARE Indonesia

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Terbentuknya divisi pengawasan berbasis masyarakat di setiap kawasan PAAP yang berfungsi secara optimal/mandiri	Jumlah divisi pengawasan di Kelompok PAAP yang berfungsi	10	12	0	12	400	Walton Foundation, MACP, BMU, Bloomberg Philanthropy	a. Sultra dan 11 kabupaten pesisir di Sultra (Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Muna, dan Muna Barat) b. Sulut dan 9 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara)	RARE Indonesia
Indikator 14.b.1.(a) Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.										
Nama Program: Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP)										
Nama Kegiatan: Penguatan Inklusi Keuangan	Terbentuknya Kelompok Simpan Pinjam sebagai wadah untuk mengumpulkan dan mengakses modal usaha bagi nelayan, pengolah dan pembeli ikan.	Jumlah kelompok simpan pinjam PAAP	18	0	10	10	800	Dutch Postcode Lottery, MACP	Sultra dan 4 kabupaten pesisir (Buton, Muna, Konawe Selatan dan Bombana)	RARE Indonesia
	Terbangunnya kompetensi nelayan, pengolah dan pembeli ikan dalam pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan keuangan dan transaksi dengan lembaga keuangan formal (termasuk mengakses pembiayaan usaha)	Jumlah nelayan, pengolah dan pembeli ikan yang mengikuti pelatihan literasi keuangan.	979	160	170	170	800	Dutch Postcode Lottery, MACP	Sultra dan 4 kabupaten pesisir (Buton, Muna, Konawe Selatan dan Bombana)	RARE Indonesia
	Terbangunnya kompetensi unit usaha perikanan tangkap skala mikro/ kecil dalam prinsip dan pendekatan Ecosystem-based Adaptation (EbA), literasi keuangan serta keterampilan wirausaha	Jumlah unit usaha perikanan tangkap skala mikro/kecil yang sudah dilatih	15	0	0	0	235	BMU	Sultra dan 4 kabupaten pesisir (Buton, Muna, Konawe Selatan dan Bombana)	RARE Indonesia
Indikator 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.										
Nama Program: Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP)										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan: Pembentukan Badan Pengelola yang Efektif	Terbentuknya kelompok PAAP	Jumlah Kelompok PAAP	12	11	12	11	600	Walton Foundation, MACP, BMU, Bloomberg Philantrophy	a. Sultra dan 11 kabupaten pesisir di Sultra (Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Muna, dan Muna Barat) b. Sulut dan 9 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara)	RARE Indonesia
Nama Kegiatan: Pembentukan wilayah PAAP	Terbentuknya wilayah PAAP	Hektar wilayah PAAP	55.316	67.000	130.500	195.200	700	Walton Foundation, MACP, BMU, Bloomberg Philantrophy	a. Sultra dan 11 kabupaten pesisir di Sultra (Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Muna, dan Muna Barat) b. Sulut dan 9 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara)	RARE Indonesia

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan: Pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL)	Terbentuknya Daerah Perlindungan Laut (DPL) dalam wilayah PAAP	Hektar Daerah Perlindungan Laut (DPL)	6.908	12.000	36.450	54.700	500	Walton Foundation, MACP, BMU, Bloomberg Philantrophy	a. Sultra dan 11 kabupaten pesisir di Sultra (Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Muna, dan Muna Barat) b. Sulut dan 9 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara)	RARE Indonesia
Nama Kegiatan: Penjangkauan dan Perubahan Perilaku	Terlindunginya akses masyarakat desa pesisir terhadap sumberdaya pesisir dan lautan	Jumlah desa pesisir	57	65	110	165	400	Walton Foundation, MACP, BMU, Bloomberg Philantrophy	a. Sultra dan 11 kabupaten pesisir di Sultra (Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Muna, dan Muna Barat) b. Sulut dan 9 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara)	RARE Indonesia

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Terlindunginya akses desa pesisir terhadap sumberdaya pesisir dan lautan	Jumlah nelayan pesisir	12.995	16.000	41.000	62.500	600	Walton Foundation, MACP, BMU, Bloomberg Philantrophy	a. Sultra dan 11 kabupaten pesisir di Sultra (Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Muna, dan Muna Barat) b. Sulut dan 9 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara)	RARE Indonesia
Meningkatnya pengetahuan masyarakat pesisir tentang perikanan berkelanjutan	Presentasi jumlah nelayan yang meningkat pengetahuannya tentang perikanan berkelanjutan	65	80	60	80	450	Walton Foundation, MACP, BMU, Bloomberg Philantrophy	a. Sultra dan 11 kabupaten pesisir di Sultra (Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Muna, dan Muna Barat) b. Sulut dan 9 kabupaten pesisir di Sulut (Sangihe, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondouw Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw dan Bolaang Mongondouw Utara)	RARE Indonesia

Nama Pemangku Kepentingan: Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)

TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN

Indikator 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.

Nama Program: Pendataan dan Pendampingan pendaftaran kartu KUSUKA

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan: Pendataan dan Pendampingan pendaftaran kartu KUSUKA	Database nelayan		√	√	√	√		Kab. Sergai, Kota Medan, Kab. Demak, Kab. Lombok Timur, Kab. Pematang, Kab. Tangerang, Kab. Lombok Utara, Kota Pekalongan, kab. Aceh Selatan, Kota Semarang, Kab. Batu bara, Kab. Tanjungbalai-Asahan, Kab. Bintan, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kab. Tuban, Kota Tarakan, kab. Indramayu, Kab. Bangkalan, Kabupaten Pekalongan, Kab. Rembang,	Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)	
Nama Kegiatan: Edukasi: (1) Hak-hak nelayan kecil dan tradisional serta perempuan pesisir; (2) manfaat dan pentingnya terdaftar dalam kartu KUSUKA	Output Kegiatan : Perempuan Pesisir yang bekerja disektor perikanan juga dapat mempunyai KUSUKA		√	√	√	√		Kab. Sergai, Kota Medan, Kab. Demak, Kab. Lombok Timur, Kab. Pematang, Kab. Tangerang, Kab. Lombok Utara, Kota Pekalongan, kab. Aceh Selatan, Kota Semarang, Kab. Batu bara, Kab. Tanjungbalai-Asahan, Kab. Bintan, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kab. Tuban, Kota Tarakan, kab. Indramayu, Kab. Bangkalan, Kabupaten Pekalongan, Kab. Rembang,	Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)	
Nama Program: Pendampingan dalam aksesibilitas BBM bersubsidi										
Nama Kegiatan: Pendampingan pembuatan pas kapal	Nelayan tertib aturan		Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen			Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
Nama Pemangku Kepentingan: Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI)										
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN										
Indikator 15.1.1* Proporsi kawasan hutan terhadap total luas hutan										
Nama Program: Restorasi hutan berbasis masyarakat di TNBBS										
Nama Kegiatan: restorasi hutan berbasis masyarakat di eks areal perambahan	Pendekatan sosial untuk penanganan perambahan hutan di TNBBS	jumlah KK	250	270	300	300	500.000.000	tfca sumatra, UNDP	3 desa penyangga TNBBS	PILI, TNBBS dan Kelompok masyarakat
	Pemulihan ekosistem	hektare	137	20	0	0	2.000.000.000	TFCA Sumatra, ELTI Yale University	3 desa penyangga, 17 resor di TNBBS	PILI, TNBBS dan Kelompok masyarakat
Nama Kegiatan: Pelestarian dan penyadaran masyarakat	Pelestarian jenis asli tanaman hutan TNBBS	jumlah jenis	155	155	155	200	430.000.000	tfca sumatra, UNDP	TNBBS	PILI, TNBBS dan Kelompok masyarakat
	Penyadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan pemulihan hutan di TNBBS	jumlah jiwa	600	100	100	100	1.500.000.000	tfca sumatra, UNDP	Desa penyangga di TNBBS	PILI, TNBBS dan Kelompok masyarakat

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Indikator 15.1.2.(a) Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)										
Nama Program: Restoring Environmental Services and Protecting Biodiversity in the Hutan Harapan Ecosystem Restoration Concession, Sumatra										
Nama Kegiatan: Monitoring dan assasment HCV area di Jambi	Update status HCV	hektare	200	200	200	200	300.000.000	Perusahaan: App, PT. BIA, PT. NBS, PT. ADS	Jambi, Merauke, Nabire	PILI, TNBBS dan Kelompok masyarakat
	Monitoring berkala HCV 1-6	hektare	200	200	200	200	300.000.000	Perusahaan: App, PT. BIA, PT. NBS, PT. ADS	Jambi, Merauke, Nabire	PILI, TNBBS dan Kelompok masyarakat
Indikator 15.2.1.(a) Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju										
Nama Program: Pelibatan diskusi pemangku kepentingan untuk pengusulan kawasan ekosistem esensial dengan KPH di daerah										
Nama Kegiatan: FGD dan peningkatan kapasitas untuk pengusulan KEE di NTT, flores	FGD pemangku kepentingan	unit	1	1	1	1	50.000.000	Kemitraan walacea, burung indonesia	NTT, Flores	PILI, UPT terkait
	Pemetaan Partisipatif dan ground check areal pengusulan KEE di NTT	unit	1	1	1	1	50.000.000	Kemitraan walacea, burung indonesia	NTT, Flores	PILI, UPT terkait
Nama Kegiatan: Diskusi pengelolaan hutan di Propinsi Lampung	FGD pengelolaan hutan di propinsi lampung	unit	2	1	1	1	10.000.000	PILI	Lampung barat , tanggamus, lampung Tmur	PILI, forum kolaborasi hutan lampung
	Forum kolaborasi hutan lampung	unit	1	1	1	1	10.000.000	PILI	Lampung barat , tanggamus, lampung Tmur	PILI, forum kolaborasi hutan lampung
Indikator 15.3.1* Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan										
Nama Program: kajian kebakaran lahan dan perburuan liar di Taman Nasional Way Kambas (TNWK)										
Nama Kegiatan: kajian persepsi kebakaran lahan di TNWK	Identifikasi pelaku dan sebab kebakaran lahan di 2 resor TNWK	jumlah KK	100				200.000.000	ACB - KFW German	Lampung timur	PILI, TNWK dan FRDP
	Penyadaran masyarakat untuk dampak kebakaran lahan hutan yang berbatasan di 2 desa penyangga TNWK	jumlah KK	100				200.000.000	ACB - KFW German	TNWK, Lampung timur	PILI, TNWK dan FRDP
Nama Kegiatan: Kajian ekologi kebakaran lahan di TNWK	Survey biodiversitas di areal eks kebakaran lahan dan areal terdegradasi akibat kebakaran lahan di 2 resor TNWK	Hektare	50				300.000.000	ACB - KFW German	TNWK, Lampung timur	PILI, TNWK dan FRDP
	Penyusunan strategi pengelolaan areal kebakaran lahan hutan di 2 resor TNWK	dokumen perenc	1				50.000.000	ACB - KFW German	TNWK, Lampung timur	PILI, TNWK dan FRDP
Indikator 15.4.1* Situs keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi										
Nama Program: Perencanaan strategis untuk situs kehati dilindungi										
Nama Kegiatan: Survey jenis spesies dilindungi untuk kodok merah	Survey jenis dilindungi kodok merah di Jawa barat	jumlah spesies	1	2	2	2	100.000.000	PILI	TNGGP, TNGC, Jawa BArat	PILI
	Survey habitat untuk jenis satwa dilindungi kodok merah di kawasan Jawa Barat	jumlah spesies	1	2	2	2	50.000.000	PILI	TNGGP, TNGC	PILI
Nama kegiatan: Penyusunan strategi IPZ TNBBS	FGD serial TNBBS menjadi situs warisan TRHS	jumlah pertemuan	2	1	1	1	10.000.000	PILI	TNBBS, lampung	PILI
	Lokatulis renstra IPZ di TNBBS	dokumen perenc	1				10.000.000	PILI	TNBBS, Lmapung	PILI
Nama Program: Perlindungan dan pelestarian daftar merah spesies di lindungi										
Nama Kegiatan: penyusunan SRAK biawak komodo	FGD pemangku kepentingan	jumlah spesies					50.000.000	Kemitraan walacea, burung indonesia	NTT, flores	KSP, PILI , KSDA NTT dan para pihak
	Spot check dan lokatulis SRAK	jumlah spesies					50.000.000	Kemitraan walacea, burung indonesia	NTT, Flores	KSP, PILI , KSDA NTT dan para pihak
Indikator 15.6.1* Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata										
Nama Program: Pemberdayaan masyarakat di sekitar penyangga Taman nasional										
Nama Kegiatan: penyiapan prakondisi kemitraan konservasi di lampung Barat kawasan TNBBS	Pendampingan penyusunan proposal kemkon	jumlah kelompok	1	1	1	1	10.000.000	PILI, TFCA sumatra	TNBBS, lampung	PILI , TNBBS
	Kajian sosial untuk prakondisi ijin kemitraan konservasi di lampung barat	jumlah desa	1	1	1	1	80.000.000	PILI, TFCA sumatra	TNBBS, lampung	PILI , TNBBS
Nama Kegiatan: pendampingan	Pendampingan penyusunan RKT kelompok	jumlah kelompok	2	3	3	3	10.000.000	PILI, TFCA sumatra	TNBBS, lampung	PILI , TNBBS

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
penyusunan RKT ijin pemanfaatan air dan energi air di TNBBS	Dukungan monitoring ijin pemanfaatan air dan energi di TNBBS	jumlah desa	2	3	3	3	10.000.000	PILI, TFCA sumatra	TNBBS, lampung	PILI, TNBBS
Nama Pemangku Kepentingan: Prakarsa										
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN										
Indikator 1.2.2 Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional										
Program: Indeks kemiskinan multidimensi										
Kegiatan: Indeks Kemiskinan Multidimensi	Jumlah riset yang terlaksana (IKM dan working paper kemiskinan multidimensi)	Unit	-	1	-	1	600.000	Dalam proses pencarian pendanaan	Nasional	PRAKARSA
	Kegiatan desiminasi hasil riset IKM	Orang	-	100	-	100				
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA										
Indikator 3.8.2 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)										
Program: Alternative financing and participatory monitoring of UHC										
Kegiatan: Pembiayaan alternatif dan monitoring partisipatif JKN	Jumlah riset yang terlaksana (Pendanaan JKN, Indeks UHC Indonesia, media analisis JKN, persepsi masyarakat terhadap Covid-19)	Unit	2	1	-	1	1.200.000	Masih dalam proses pendanaan	Nasional dan daerah (Kab. Semarang, Kota Kupang, Kota Medan, Kota Bogor, Kab. Mamuju, Kab. Pandeglang)	PRAKARSA dan Mitra Daerah (Yayasan Percik, SMI, Perkumpulan PIKUL, YASMIB, LK2P)
	Jumlah CSO daerah yang berkolaborasi advokasi JKN	Lembaga	6	-	-	-				
	Jumlah kegiatan advokasi terkait pembiayaan JKN berkelanjutan dan pencapaian UHC	kegiatan	5	-	-	-				
	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap program JKN	Orang	200	100	100	100				
	Penyusunan apps pemantauan JKN partisipatif	Unit	1	-	-	-				
Penggunaan apps oleh masyarakat secara partisipatif dan fasilitas kesehatan	Orang	50	500	500	500	300.000	Tahun 2022 - 2024 Masih dalam proses pencarian pendanaan			
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESEJANGAN										
Indikator 10.5.1 (a) Indikator Kesehatan Perbankan										
Program: Fair Fainance Asia										
Kegiatan: Bank Assesment	Jumlah riset yang terlaksana (Bank assesment dan case study)	Unit	2	2	1	1	7.000.000	SIDA (Swedish Embassy)	Nasional, Regional Asia & Internasional	PRAKARSA, Koalisi Responsibank, FFGI & FFA
	Jumlah bank yang mendapatkan penilaian kebijakan dan investasi	Bank	-	11	-	11				
	Jumlah kegiatan advokasi terkait pembiayaan pembangunan berkelanjutan	kegiatan	3	3	2	2				
	Capacity building for sustaiable finance	Orang	30	30	30	30				
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPI TUJUAN										
Indikator 17.1.1 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya										
Program: Riset Perpajakan										
Kegiatan: Riset Perpajakan (Examining Multinational Enterprises (MNCs) Profit Shifting Behavior in Palm oil Industry in	Jumlah riset yang terlaksana	Unit	3	1	1	1	1.384.000	Ford Foundation Tahun 2022 - 2024 Masih dalam proses	Nasional dan Regional Asia	PRAKARSA, Forum Pajak Berkeadilan dan TAFJA
	Kegiatan desiminasi hasil riset	Orang	100	100	100	100				
	Jumlah Kegiatan Advokasi	kegiatan	2	2	2	2				
Kegiatan: Improving economic-social justice through agriculture value chains fiscal system	Jumlah riset yang terlaksana	Unit	1	1	1	1	3.039.152	SIDA (Swedish Embassy)	Nasional	PRAKARSA dan FFA

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Pemangku Kepentingan: PP Muhammadiyah										
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN										
Indikator 1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim.										
Program: Dakwah Khusus Daerah 3T(Terluar, Terdepan & Tertinggal)										
Kegiatan: Capacity Building	Meningkatnya keterampilan dai dalam memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan	kegiatan	10	15	20	25	18.600.000.000,- (Anggarannya include dalam Indikator 4.2.2.*)	Galang dana, mitra dunia usaha	31 kota/kabupaten 8 provinsi	LDK PP Muhammadiyah
	Meningkatnya kemampuan sosialisasi tentang pendidikan inklusi	kegiatan	10	15	20	25				
Kegiatan: Pengiriman Dai	Terkirimnya dai secara merata di daerah 3T	Kabupaten/Kota	75	120	150	200				
	Terselenggaranya kegiatan dakwah di daerah 3T	Kabupaten/Kota	75	120	150	200				
Indikator 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.										
Program: Pembinaan Hidimu (Himpunan Disabilitas Muhammadiyah)										
Kegiatan: Pendidikan dan perkaderan anggota Hidimu	Jumlah propinsi yang terbentuk jejaring Hidimu di Indonesia	propinsi	1	10	20	34	175.000	Galang dana, mitra dunia usaha, Lazismu	2 kota/kabupaten 2 provinsi	MPK PPM
	Jumlah peserta/ anggota Hidimu yang mengikuti program	orang	50	100	200	500				
Kegiatan: Pelatihan Life Skill bagi Hidimu	Jumlah kegiatan pelatihan yang terlaksana	kegiatan	1	2	3	5				
	Jumlah peserta/ anggota Hidimu yang mengikuti program	orang	20	50	80	100				
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS										
Indikator 4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.										
Program: Dakwah Khusus Daerah 3T(Terluar, Terdepan & Tertinggal)										
Kegiatan: Capacity Building	Meningkatnya keterampilan dai dalam memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan	kegiatan	10	15	20	25	18.600.000.000,-	Galang dana, mitra dunia usaha	31 kota/kabupaten 8 provinsi	LDK PP Muhammadiyah
	Meningkatnya kemampuan sosialisasi tentang pendidikan inklusi	kegiatan	10	15	20	25				
Kegiatan: Pengiriman Dai	Terkirimnya dai secara merata di daerah 3T	Kabupaten/Kota	75	120	150	200				
	Terselenggaranya kegiatan dakwah di daerah 3T	Kabupaten/Kota	75	120	150	200				
Indikator SDGs : 4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan nonformal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin										
Program: Olimpiade Sains dan IPS serta PORSENI bagi sekolah, madrasah dan pondok pesantren Muhammadiyah										
Kegiatan: Penyelenggaraan Olimpiade Ahmad Dahlan (Olympicad)Sains dan IPS dan lomba kreatifitas sekolah Muhammadiyah	Terselenggaranya Olympicad	orang		5000		5000	5000	Muhammadiyah, Pemerintah dan CSR	Nasional	Dikdasmen PPM
	Terselenggaranya Lomba Kreatifitas									
Program: Beasiswa Kaum Disabilitas										
Kegiatan: Pemberian dana subsidi pendidikan untuk kaum disabilitas dengan jenjang pendidikan perguruan tinggi	Jumlah mitra Perguruan Tinggi (PT) penerima/ penyalur beasiswa	mitra	1	5	10	25	2.120	Mitra dunia usaha, Lazismu, PT Mu	10 kota/kabupaten 10 provinsi	MPK PPM, PT Muh, Majelis Dikti PP Muh
	Jumlah peserta/ anggota Hidimu yang mendapatkan beasiswa	orang	3	5	15	30				
Indikator 4.4.1 Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).										
Program: Peningkatan Keterampilan penggunaan Teknologi Informasi										
Kegiatan: Peningkatan Keterampilan	Jumlah kegiatan pelatihan yang terlaksana	kegiatan	-	1	1	2		Mitra dunia usaha,	10 kota/kabupaten	MPK PPM, PT Muh, Majelis Dikti

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
penggunaan Teknologi Informasi	Jumlah peserta yang mengikuti program	orang	-	30	50	100	800	Lazismu, PT Muhammadiyah	10 provinsi	PP Muh
Indikator SDGs : 4.5.1* Rasio APM pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio APK pada tingkat SMP/ sederajat; SMA/SMK/ sederajat, dan PT untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) perkotaan/ perdesaan, c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas										
Program: Pendidikan Muhammadiyah yang Holistik dan Kurikulum Integratif (iman, iptek, dan akhlak)										
Kegiatan: Menyempurnakan Pendidikan Muhammadiyah yang Holistik	Tersedianya naskah buku pendidikan Muhammadiyah yang holistik	buku		2	1		150	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Kegiatan: Menyusun Kurikulum Pendidikan Muhammadiyah yang integratif (iman, iptek, dan akhlak)	Tersusunnya naskah kurikulum pendidikan Muhammadiyah yg integratif	buku		2	1		500	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Program: Memperkuat dan memperteguh identitas Pendidikan Muhammadiyah										
Kegiatan: Menyempurnakan buku pendidikan Al-Islam dan Kemuhimmadiyahan	Tersusunnya naskah buku AIK	buku		4	3		350	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Kegiatan: Pemerataan metode pembelajaran Al-Islam dan Kemuhimmadiyahan	Meratanya Metode Pembelajaran AIK	orang		100	100		300	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Kegiatan: Pengembangan metode pembelajaran Al-Islam dan Kemuhimmadiyahan online	Terumuskannya Metode Pembelajaran AIK online	orang	300	200	200	200	400	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Indikator SDGs: 4.7.1 Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan HAM pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa										
Program: Mengintensifkan pembinaan ideologi Muhammadiyah dan penekanan pendidikan karakter;										
Kegiatan: Pembinaan Ideologi Muhammadiyah bagi warga Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren	Tersedianya buku ketentuan pembinaan ideologi Muhammadiyah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Muhammadiyah Terlaksananya pembinaan ideologi Muhammadiyah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Muhammadiyah	buku		2			150	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Program: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Dikdasmen Muhammadiyah										
Kegiatan: Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Dikdasmen Muhammadiyah	Tersusunnya RPJP Dikdasmen Muhammadiyah	buku	1				1000	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Kegiatan: Sosialisasi dan implementasi RPJP Dikdasmen Muhammadiyah	Tercapainya ketersebaran RPJP Dikdasmen Muhammadiyah	kegiatan	1	2			500	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Kegiatan: Penyusunan Renstra Dikdasmen Muhammadiyah	Tersusunnya Renstra Dikdasmen Muhammadiyah			1			500	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Kegiatan: Workshop Pengembangan akselerasi pendidikan Muhammadiyah yang unggul yang unggul	Terselenggaranya workshop pengembangan akselerasi pendidikan Muhammadiyah yang unggul Melaksanakan lesson study	orang	50	100	100	100	750	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Kegiatan: Rakor Sekolah/Madrasah	Terlaksananya pertemuan koordinatif guna peningkatan kualitas sekolah/madrasah	orang	250	250	250	250	1000	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Program: Pangkalan Data Dikdasmen Muhammadiyah										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Kegiatan: Pembuatan Pangkalan Data Dikdasmen Muhammadiyah	Tersedianya pangkalan data Dikdasmen Muhammadiyah	aplikasi	1				1000	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Kegiatan: Workshop Pangkalan Data Dikdasmen Muhammadiyah	Terlaksananya workshop pangkalan data Dikdasmen Muhammadiyah	orang	500	500	500	500	500	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Program: Penguatan peran dan fungsi pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat kaderisasi										
Kegiatan: Pembinaan ortom dalam lembaga pendidikan sebagai pusat kaderisasi	Terselenggaranya pembinaan ortom di sekolah/madrasah/pesantren Muhammadiyah	orang	150	150	150	150	150	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Program: Penguatan Ukhuwah dan Silaturahmi antar Lembaga Pendidikan Muhammadiyah;										
Kegiatan: Workshop tindak lanjut tentang kebijakan PTM mengembangkan sekolah Muhammadiyah di daerah PTM setempat	Tersusunnya kebijakan teknis tentang kewajiban PTM mengembangkan sekolah di daerah PTM setempat	buku		2			250	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Kegiatan: Menyelenggarakan pengawasan pada pelaksanaan sistem cluster sekolah binaan dan sekolah percontohan	Terlaksananya sistem cluster di bawah pengawasan Majelis Dikdasmen PPM	buku		2			250	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Kegiatan: Mendirikan dan mengembangkan sekolah-sekolah di daerah 3T (terpinggir, terluar, terpencil) dengan sistem cluster dengan melibatkan PTM	Terlaksananya sekolah di daerah 3T melalui sistem cluster kerjasama PTM Program KKN, Pengabdian masyarakat	sekolah	4	5	5	5	7500	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Program: Penguatan Jaringan, kemitraan, dan kerjasama Pendidikan dalam dan luar negeri										
Kegiatan: Menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan, lembaga, institusi pengembang pendidikan baik PTM maupun PTN	Terjalin hubungan dengan lembaga lain/institusi pengembang pendidikan (PTM, PTN)	orang	20	20	20	20	300	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Kegiatan: Menyelenggarakan Program magang luar negeri tingkat ASEAN dan CHINA melalui SEAMEO atau ACC (Asean China Centre) pengiriman alumni untuk sekolah di luar negeri melalui lembaga internasional ACC, KOIKA, JICA, ICC dst.	Terselenggaranya Program magang luar negeri tingkat ASEAN dan CHINA melalui SEAMEO atau ACC (Asean China Centre) dan pengiriman alumni untuk sekolah di luar negeri melalui lembaga internasional ACC, KOIKA, JICA, ICC dst.	orang	20	50	50	50	300	Muhammadiyah, CSR	Nasional	Dikdasmen PPM
	Terselenggaranya pengiriman alumni untuk sekolah di luar negeri melalui lembaga internasional ACC, KOIKA, JICA, ICC dst, dan mendatangkan peserta didik dari luar negeri									
	Terdapat peserta didik dari luar negeri yang belajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah									
Kegiatan: Menyelenggarakan konferensi/seminar tentang Pendidikan Ramah Anak	Terselenggaranya konferensi/seminar Pendidikan Ramah Anak	orang			250		500	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Kegiatan: Pelatihan pembelajaran berbasis Tablet untuk Guru	Jumlah guru menguasai penggunaan sumber belajar berbasis digital (tablet)	orang	100	150	150	150	500	Muhammadiyah, CSR	Nasional	Dikdasmen PPM LazisMu
Program: Penguatan pendidikan link and match bagi Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah untuk menyiapkan tenaga terampil dan berjiwa kewirausahaan untuk menghadapi persaingan global.										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Kegiatan: Meningkatkan pelaksanaan Link and Match antara SMK Muh dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri baik dalam maupun Luar Negeri.	Meningkatnya pelaksanaan Link and Match antara SMK Muh dengan DuDi	sekolah	50	50	50	50	1000	Muhammadiyah, Pemerintah dan CSR	Nasional	Dikdasmen PPM
Kegiatan: Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK Muhammadiyah Melalui Pembuatan alat Sendiri	Terciptanya peralatan pendidikan SMK Muh yang Modern oleh guru, siswa dan mitra industri.	sekolah	5	5	5	10	5000	Muhammadiyah, Pemerintah dan CSR	Nasional	Dikdasmen PPM
Kegiatan: Melakukan alih teknologi dengan mitra di dalam dan luar negeri melalui pembentukan Teaching Industry	Terwujudnya alih teknologi dengan mitra di dalam dan luar negeri dengan membentuk Teaching Industry.	sekolah	30	30	30	30	300	Muhammadiyah, Pemerintah dan CSR	Nasional	Dikdasmen PPM
Program: Darul Arqam Nasional										
Kegiatan: Pendidikan/ pelatihan yang menyatukan visi dan pemahaman nilai agama dan pancasila serta aksi gerakan tingkat nasional	Jumlah majelis/ lembaga peserta pelatihan wakil wilayah/ propinsi	lembaga	34	34	34	34	2.000	Mitra dunia usaha, Lazizmu, PT Mu	2 kota/kabupaten 34 provinsi	MPK PPM, MPK PWM
	Jumlah peserta kegiatan	orang	50	50	50	50				
	Jumlah kegiatan pelatihan yang terlaksana	kegiatan	1	1	1	1				
Program: Darul Arqam Wilayah/ Daerah 3T										
Kegiatan: Pendidikan/ pelatihan yang menyatukan visi dan pemahaman nilai agama, nilai pancasila dan anti korupsi serta aksi gerakan di tingkat wilayah/	Jumlah majelis/ lembaga peserta pelatihan wakil daerah/ kota	lembaga	30	30	30	30	2.000	Mitra dunia usaha, Lazizmu, PT Mu	5 kota/kabupaten 5 provinsi	MPK PPM, MPK PWM
	Jumlah peserta kegiatan	orang	50	50	50	50				
	Jumlah kegiatan pelatihan yang terlaksana	kegiatan	1	1	1	1				
Program: Darul Arqam Keluarga Pahlawan										
Kegiatan: Pendidikan/ pelatihan yang menyatukan visi dan pemahaman nilai agama, nilai pancasila dan anti korupsi serta aksi gerakan di tingkat wilayah/	Jumlah majelis/ lembaga peserta pelatihan wakil daerah/ kota	lembaga	30	30	30	30	2.000	Mitra dunia usaha, Lazizmu, PT Mu	5 kota/kabupaten 5 provinsi	MPK PPM, MPK PWM
	Jumlah peserta kegiatan	orang	50	50	50	50				
	Jumlah kegiatan pelatihan yang terlaksana	kegiatan	1	1	1	1				
Indikator SDGs: 4.b.1* Jumlah bantuan resmi MuhammadiyahAID (MuAID) kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.										
Program: Palestinian Scholarship										
Kegiatan: Bantuan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa/i Universitas Islam Gaza	Pelunasan sebagian biaya pendidikan mahasiswa S1, S2 dan S3 Universitas Islam Gaza dan UCAS.	orang	-	-	-	-	200.000 USD	Fund Raising	Jalur Gaza	IESCO
Kegiatan: Bantuan paket kebutuhan pokok	Paket leduh Fitri keluarga mahasiswa	orang								
Program: Rohingya Scholarship										
Kegiatan: Bantuan beasiswa pendidikan bagi pemuda/i Muslim dan Budha	Pelatihan tukang kayu, tukang instalasi air, tukang las dan tukang servis handphone	orang	100	-	-	-	90.000 USD	Fund Raising	Sittwe, Myanmar	CSI
Program: Pattani Scholarship										
Kegiatan: Bantuan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa/i Muslim	Pemberian biaya pendidikan mahasiswa S1.	orang	100	-	-	-	200.000 USD	PP Muhammadiyah	Univ Muhammadiyah	Majelis Diktilitbang
Indikator SDGs: 4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan										
Program: Meningkatkan mutu pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah berdasarkan 9 (sembilan) Standar Nasional Pendidikan Muhammadiyah										
Kegiatan: Membuat Sekolah Pilot Project	Terwujudnya sekolah Pilot Project	sekolah	11	15	15	15	10000	Muhammadiyah, Pemerintah dan CSR	Nasional	Dikdasmen PPM

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Kegiatan: Menyusun pedoman dan pemetaan mutu serta melakukan penjaminan mutu sekolah, madrasah, dan pesantren	Tersusunnya buku panduan (termasuk instrumen) penjaminan mutu	buku					200	Muhammadiyah, Pemerintah dan CSR	Nasional	Dikdasmen PPM
	Tersusunnya pemetaan mutu sekolah dan pondok pesantren									
	Terlaksananya kegiatan penjaminan mutu dalam bentuk sosialisasi	kegiatan		2	4		300	Muhammadiyah, Pemerintah dan CSR	Nasional	Dikdasmen PPM
Kegiatan: Menyusun pedoman dan menyelenggarakan sekolah Inklusi	Tersusunnya buku panduan sekolah inklusi	buku			5		275	Muhammadiyah, Pemerintah dan CSR	Nasional	Dikdasmen PPM
	Terselenggaranya sekolah inklusi									
Kegiatan: Menyusun pedoman dan menyelenggarakan pendidikan ramah anak	Tersusunnya panduan pendidikan ramah anak	buku			5		225	Muhammadiyah, Pemerintah dan CSR	Nasional	Dikdasmen PPM
	Terselenggaranya sekolah dan pondok pesantren ramah anak									
Program: Meningkatkan kualitas kepemimpinan pembelajaran bagi guru dan kepala sekolah, tata kelola, peraturan, dan penjaminan mutu pendidikan Muhammadiyah										
Kegiatan: Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah/madrasah	Tersusunnya panduan diktusdapa yang lebih komprehensif	buku					100	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
	Terlaksananya diktusdapa seluruh wilayah Muhammadiyah	orang	300	300	300	300	1000	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
	Tersusunnya panduan penjaminan mutu hingga SOP manajemen sekolah	buku					100	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
	Terlaksananya pelatihan penjaminan mutu manajemen	orang	300	300	300	300	1000	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Kegiatan: Peningkatan kepemimpinan kepala sekolah/madrasah dan peningkatan proses pembelajaran bagi guru	Terlaksananya pelatihan kepemimpinan kepala sekolah dan pembelajaran bagi guru sekolah, madrasah dan pesantren	orang		150	150	300	1000	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Kegiatan: Membina Sekolah Binaan dan Percontohan di setiap wilayah Muhammadiyah	Terbinanya sekolah binaan dan percontohan di sekitar wilayah Muhammadiyah	sekolah	11	10	10	10	5000	Muhammadiyah	Nasional	Dikdasmen PPM
Program: Meningkatkan mutu penyelenggaraan Madrasah dan Pondok Pesantren Muhammadiyah										
Kegiatan: Sosialisasi kurikulum Pesantren	Terwujudnya sosialisasi pendidikan pesantren Muhammadiyah	kegiatan		5			250	Muhammadiyah, CSR	Nasional	Dikdasmen PPM LP2PPM
Kegiatan: Orientasi pengembangan metode pembelajaran di Pesantren	Meningkatnya kemampuan guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi	orang		250	250		750	Muhammadiyah, Pemerintah dan CSR	Nasional	Dikdasmen PPM LP2PPM
Kegiatan: Pembinaan pesantren (bekerjasama dengan LP2PPM)	Kualitas penyelenggaraan Pondok Pesantren lebih baik	pesantren	10	10	10	10	500	Muhammadiyah, Pemerintah dan CSR	Nasional	Dikdasmen PPM LP2PPM
Program: Peduli Guru										
Kegiatan: Memberikan tunjangan ekonomi kepada guru	Jumlah guru yang dibantu	orang	500	1000	1500	2000	5.000	Muhammadiyah dan CSR	Nasional	Dikdasmen PPM LazisMu
Kegiatan: Memberikan beasiswa pendidikan tinggi kepada guru	Jumlah guru yang dibantu	orang		450	450		900	Muhammadiyah dan CSR	Nasional	Dikdasmen PPM LazisMu
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
Indikator SDGs 6.5.1. Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu										
Program: Eco Masjid										
Kegiatan: Eco Masjid	Pembuatan penampungan air hujan	Unit	15	30	50	70	Rp 1.400	Mandiri	Semua Provinsi	MLH
	Pemanfaatan kembali air bekas wudhu	Unit	15	30	50	70	Rp 1.400	Mandiri	Semua Provinsi	MLH
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun (Rupiah Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Indikator 8.3.1.(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan										
Program: Inklusi keuangan untuk wirausaha										
Kegiatan: Standarisasi kelengkapan administrasi, laporan keuangan (R/L, Cash flow, Neraca), dan kinerja keuangan melalui share function	Jumlah peserta share function	orang	150	170	250	15.840	Mitra dunia usaha	20 kota/kabupaten 14 provinsi	LPCR PP Muhammadiyah, PP Aisyiah, AMM	
	Jumlah UMKM bankable	unit	14	22	30					
	Jumlah pencapaian penyaluran modal UMKM	juta rupiah	1400	2200	3000					
Jumlah sosialisasi dan workshop terlaksana	kegiatan	85	115	200						
Indikator 8.3.1.(c). Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan										
Program: Digital EcoMu										
Kegiatan: Pengembangan Aplikasi Marketplace untuk Komunitas Kader Muhammadiyah	Jumlah aplikasi terinstall	aplikasi	-	1	1	500	Mitra dunia usaha, Lazismu, PT Muh, Jaringan SaudagarMuh	-	MPK PPM, MPK PWM	
	Jumlah partisipasi kader	orang	-	50	100					500
	Jumlah partisipasi produk	produk	-	10	30					50
Indikator 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.										
Program: Microenterprise woman entrepreneur										
Kegiatan: Pelatihan kewirausahaan untuk perempuan	Jumlah pelatihan terlaksana	kegiatan	85	115	200	30.060	Galang dana, mitra dunia usaha	20 kota/kabupaten 14 provinsi	LPCR PP Muhammadiyah, PP Aisyiah, AMM	
	Jumlah penerima manfaat program	orang	2.500	3.500	6.000					
Kegiatan: Pendampingan untuk menciptakan usaha baru	Jumlah kegiatan pendampingan yang terlaksana	kegiatan	12	12	12					
	Jumlah usaha baru yang tercipta	unit	50	75	100					
TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR										
Indikator 9.3.1*. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.										
Program: Learning Management System (LMS) Perkaderan										
Kegiatan: Pengembangan Aplikasi Learning Management System untuk Perkaderan	Jumlah aplikasi terinstall	aplikasi	-	1	1	500	Mitra dunia usaha, Lazismu, PT Muh, Jaringan SaudagarMuh	-	MPK PPM, MPK PWM	
	Jumlah partisipasi kader	orang	-	500	1000					2000
	Jumlah kegiatan berbasis LMS	kegiatan	-	10	30					50
Program: Materi Perkaderan Berbasis Android										
Kegiatan: Pengembangan Materi Perkaderan Berbasis Android	Jumlah aplikasi terinstall	aplikasi	-	1	1	500	Mitra dunia usaha, Lazismu, PT Muh, Jaringan SaudagarMuh	-	MPK PPM, MPK PWM	
	Jumlah partisipasi kader	orang	-	500	1000					2000
	Jumlah materi berbasis android	kegiatan	-	5	10					15
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN										
Indikator 10.1.1(b) Jumlah desa tertinggal										
Program: Dakwah Khusus Daerah 3T (Terluar, Terdepan & Tertinggal)										
Kegiatan: Capacity Building	Meningkatnya keterampilan dai dalam memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan	kegiatan	10	15	20	18.600.000.000,- (Anggarannya include dalam Indikator 4.2.2.*)	Galang dana, mitra dunia usaha	31 kota/kabupaten 8 provinsi	LDK PP Muhammadiyah	
	Meningkatnya kemampuan sosialisasi tentang pendidikan inklusi	kegiatan	10	15	20					25
Kegiatan: Pendampingan Masyarakat desa tertinggal	Terkirimnya dai secara merata di daerah 3T	Kabupaten/Kota	75	120	150	200				
	Terseleenggaranya kegiatan dakwah di daerah 3T	Kabupaten/Kota	75	120	150	200				
Program: Kader pembangunan desa										
Kegiatan: Pelatihan kader pembangunan desa	Jumlah pelatihan terlaksana	kegiatan	70	80	90	5.680	Galang dana	20 kota/kabupaten 14 provinsi	LPCR PP Muhammadiyah, PP Aisyiah, AMM	
	Jumlah penerima manfaat program	orang	1.500	2.000	3.000					
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN										
Indikator SDGs 11.1.1. (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau										
Program: Audit Lingkungan Mandiri Muhammadiyah (ALiMM)										
Kegiatan: Audit Lingkungan Mandiri Muh	Pembuatan buku panduan ALiMM	Eksemplar	1500	2500	5000	10000	Rp 700	PTM/A	Semua Provinsi	MLH
	Sosialisasi ALiMM	Kegiatan	15	20	25	34	Rp 1.560	PTM/A	Semua Provinsi	MLH
	Pelatihan ALiMM	Kegiatan	100	200	300	470	Rp 28.000	PTM/A	Semua Provinsi	MLH
	Pelaksanaan ALiMM	Kegiatan	100	200	300	470	Rp 33.600	PTM/A	Semua Provinsi	MLH

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun (Rupiah (Juta))	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Indikator SDGs 11.6.1. (a) Persentase sampah nasional yang terkelola										
Program: Shodaqoh Sampah										
Kegiatan: Shodaqoh Sampah	Pembuatan buku panduan shodaqoh sampah	Eksemplar	1500	2500	5000	10000	Rp 700	Mandiri	Semua Provinsi	MLH
	Sosialisasi shodaqoh sampah	Kegiatan	15	20	25	34	Rp 1.560	Mandiri	Semua Provinsi	MLH
	Pelatihan manajemen shodaqoh sampah	Kegiatan	100	200	300	470	Rp 28.000	Mandiri	Semua Provinsi	MLH
	Pelatihan Pengelolaan sampah	Kegiatan	100	200	300	470	Rp 28.000	Mandiri	Semua Provinsi	MLH
Indikator SDGs: 11.c.1 Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumber daya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.										
Program: Community development and learning center										
Kegiatan: Pendirian Balai Latihan Kerja	Pembelian lahan tanah dan pembangunan gedung	unit	1	-	-	-	150.000 USD	Fund Raising	Sittwe, Myanmar	CSI
Kegiatan: Pendirian pusat kegiatan masyarakat	Pembelian lahan tanah dan pembangunan gedung	unit	-	-	-	-	150.000 USD	Fund Raising	Sittwe, Myanmar	CSI
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB										
Indikator SDGs 12.1.1.* Rencana dan implementasi strategi pelaksanaan sasaran pola konsumsi dan produksi berkelanjutan										
Program: Sekolah lingkungan										
Kegiatan: Sekolah Lingkungan	Pelatihan petani gambut	Kegiatan	2	4	6	9	Rp 330	BRGM	Semua Provinsi	MLH
	Pendampingan petani gambut	Kegiatan	2	4	6	9	Rp 440	BRGM	Semua Provinsi	MLH
Indikator SDGs 12.5.1. (a) Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang										
Program: Budidaya sampah										
Kegiatan: Budidaya sampah	Pelatihan budidaya sampah menjadi barang bernilai	Kegiatan	2	4	6	9	Rp 330	PTM/A	Semua Provinsi	MLH
Indikator SDGs 12.8.1.(a) Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat pedulian berbudaya lingkungan hidup										
Program: Sekolah ramah lingkungan										
Kegiatan: Sekolah ramah lingkungan	Pendampingan sekolah ramah lingkungan	Kegiatan	100	200	300	470	Rp 16.800	Mandiri/AUM	Semua Provinsi	MLH
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM										
Indikator SDGs 13.2.2. (a) Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)										
Program: Kader Lingkungan Muhammadiyah										
Kegiatan: Kader Lingkungan Muhammadiyah	Pembentukan dan Pelatihan Kader Lingkungan Muh	Kegiatan	15	20	26	34	Rp 1.020	Mitra/Mandiri	Semua Provinsi	MLH
	Gerakan Penghijauan	Kegiatan	15	20	26	34	Rp 1.530	Mitra/Mandiri	Semua Provinsi	MLH
	Pelatihan Tingkat Lanjut Kader Lingkungan	Kegiatan	15	20	26	34	Rp 1.530	Mitra/Mandiri	Semua Provinsi	MLH
	Gerakan Perawatan Lingkungan	Kegiatan	15	20	26	34	Rp 1.530	Mitra/Mandiri	Semua Provinsi	MLH
	Pembentukan Tim Pengawas Lingkungan	Kegiatan	15	20	26	34	Rp 1.020	Mitra/Mandiri	Semua Provinsi	MLH
Kampanye Lingkungan	Kegiatan	15	20	26	34	Rp 1.020	Mitra/Mandiri	Semua Provinsi	MLH	
Indikator SDGs 13.3.1. (a) Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat pedulian berbudaya lingkungan hidup										
Indikator SDGs 13.3.1. (a)										
Program: Sekolah ramah lingkungan										
Kegiatan: Sekolah Ramah Lingkungan	Pendampingan sekolah ramah lingkungan	Kegiatan	100	200	300	470	Rp 11.200	Mandiri/AUM	Semua Provinsi	MLH
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN										
Indikator SDGs 14.5.1.* Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut										
Program: Pengelolaan lingkungan gambut dan mangrove										
Kegiatan: Pengelolaan Lingkungan Gambut	Penanaman kembali hutan mangrove	Kegiatan	2	4	6	9	Rp 440	BRGM	Semua Provinsi	MLH
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN										
Indikator SDGs 15.1.1.* Proporsi kawasan hutan terhadap luas lahan										
Indikator SDGs 15.1.2. (a) Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)										
Indikator SDGs 15.2.1. (a) Jumlah KPH yang masuk kategori maju										
Program: Hutan Pendidikan Muhammadiyah										
Kegiatan: Hutan Pendidikan Muhammadiyah	Pengelolaan Hutan Pendidikan	PTMA	6	7	8	9	Rp 350	PTM/A	Beberapa PTMA	MLH
	Workshop Tata Kelola Hutan Pendidikan PTMA	PTMA	30	40	50	60	Rp 3.000	PTM/A	Beberapa PTMA	MLH
Program: Kawasan Penyejuk Bumi										
Kegiatan: Kawasan Penyejuk Bumi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Hektar	2500	5000	7500	10000	Rp 26.000	PTM/A	Kalimantan Selatan	MLH
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Indikator 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya										
Program: Dakwah Khusus Daerah 3T (Terluar, Terdepan & Tertinggal)										
Kegiatan: Capacity Building	Meningkatnya keterampilan dai dalam memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan	kegiatan	10	15	20	25	18.600.000.000,- (Anggarannya include dalam Indikator 4.2.2.*)	Galang dana, mitra dunia usaha	31 kota/kabupaten & 8 provinsi	LDK PP Muhammadiyah
	Meningkatnya kemampuan sosialisasi tentang pendidikan inklusi	kegiatan	10	15	20	25				
Kegiatan: Pendampingan Masyarakat desa tertinggal	Terkirimnya dai secara merata di daerah 3T	Kabupaten/Kota	75	120	150	200				
	Terseleenggaranya kegiatan dakwah di daerah 3T	Kabupaten/Kota	75	120	150	200				
Indikator SDGs: 16.8.1 Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.										
Program: Keanggotaan di organisasi Internasional										
Kegiatan: Special Consultative ECOSOC	Tanggapan isu-isu sosial dan ekonomi	Kegiatan	3 daring	-	-	-	100.000 USD	PP Muhammadiyah	New York	LHKI
Kegiatan: Negotiator ICG (International C	Membantu negosiasi Bangsamoro dengan Pemerintah	Kegiatan	7 daring	-	-	-	100.000 USD	PP Muhammadiyah	Mindanao	LHKI
Nama Pemangku Kepentingan: Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia										
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN										
Indikator 1.5.3 Rencana dan implementasi strategis nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reducti on 2015-2030										
Program: Pembatasan Sosial Berskala Besar										
Kegiatan: Penyaluran Bantuan Covid-19	Jumlah beras yang dibagikan	kg	-	-	-	-	Galang Dana, Donatur, Mitra	34 Provinsi	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia	
	Jumlah mitra lembaga penyalur bantuan	instansi	-	-	-	-				
Program: Program Bantuan Imlek Nasional 2021										
Kegiatan: Penyaluran Bantuan Covid-19	Jumlah beras yang dibagikan	kg	7.381.790	-	-	-	Galang Dana, Donatur, Mitra	27 Provinsi	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia	
	Jumlah masker yang dibagikan	lembar	13.739.840	-	-	-				
	Jumlah instansi/lembaga penerima	instansi/lembaga	375	-	-	-				
	Jumlah penerima bantuan beras	kepala keluarga	738.179	-	-	-				
Program: Pembatasan Kegiatan Masyarakat										
Kegiatan: Penyaluran Bantuan Covid-19	Jumlah beras yang dibagikan	kg	10.938.880	-	-	-	Galang Dana, Donatur, Mitra	17 Provinsi	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia	
	Jumlah mitra perusahaan dalam program penyaluran 7 juta paket beras PPKM	perusahaan	19	-	-	-				
	Jumlah oksigen konsentrator yang disalurkan	unit	3.773	-	-	-				
	Jumlah rumah sakit penerima bantuan oksigen konsentrator	rumah sakit/klini	96	-	-	-				
	Jumlah penerima bantuan beras PPKM	kepala keluarga	1.897.259	-	-	-				
Kegiatan: Pembagian Paket Sembako Ped	Jumlah paket sembako yang dibagikan	paket	-	-	-	-	Galang Dana, Donatur, Mitra	13 Provinsi		
	Jumlah nasi kotak yang disalurkan	kotak	31.696	-	-	-	Relawan, Galang Dana, Donatur	5 Provinsi		
Kegiatan: Pembagian Nasi Kotak (Bantuan	Jumlah pihak yang menyediakan makanan untuk disalurkan	pihak penyedia/relawan	231	-	-	-				
	TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA									
Indikator 3.8.1 Cakupan pelayanan kesehatan esensial										
Program: Misi kesehatan dan Bakti Sosial Tzu Chi										
Kegiatan: Bakti sosial kesehatan	Jumlah penerima bakti sosial degeneratif	orang	5.255	5.732	6.210	6.688				
	Jumlah tim medis bakti sosial degeneratif	orang	645	703	762	820				

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
degeneratif	Jumlah relawan yang terlibat dalam bakti sosial degeneratif	orang	620	677	733	789		4 kota/kabupaten	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia	
Kegiatan: Bakti sosial kesehatan umum	Jumlah penerima bakti sosial kesehatan umum	pasien	13.490	14.717	15.943	17.169	Galang Dana, Donatur, Mitra	4 kota/kabupaten		
	Jumlah tim medis bakti sosial kesehatan umum	orang	817	891	966	1.040				
	Jumlah relawan yang terlibat dalam bakti sosial kesehatan umum	orang	1.049	1.145	1.240	1.336				
	Pelaksanaan pemberian bantuan bakti sosial kesehatan umum	kota/kabupaten	5	7	9	11				
Kegiatan: Program Sentra Vaksinasi Nasional	Jumlah tervaksin	orang	300.324	-	-	-				8 Provinsi
Kegiatan: Donor Darah	Jumlah pendonor darah	orang	6.582	7.779	8.378	8.976				9 kota/kabupaten
	Jumlah kantong darah	kantong	5.646	6.159	6.673	7.186				
	Lokasi pengadaan kegiatan donor darah	tempat	10	11	12	13				
Kegiatan: Bantuan Covid-19	Jumlah masker bantuan Covid-19 yang didistribusikan (masker medis, masker n95, dan masker kn95)	lembar	20.973.465	-	-	-		Galang Dana, Donatur, Sponsor, Mitra		31 Provinsi
	Jumlah oksigen konsentrator bantuan Covid-19 yang didistribusikan	oksigen konsentrator	3.773	-	-	-				
	Jumlah rumah sakit/klirik yang menerima bantuan oksigen konsentrator	rumah sakit/klirik	93	-	-	-				
Kegiatan: Pembangunan Tzu Chi Hospital	Jumlah lantai rumah sakit	lantai	23	-	-	-		Galang Dana, Donatur, Mitra		1 kabupaten/kota
	Kapasitas maksimal tempat tidur	tempat tidur	520	-	-	-				
	Jumlah ruang operasi	ruangan	12	-	-	-				
	Jumlah poli yang tersedia	poli	13	-	-	-				
Kegiatan: Rumah Sakit Tzu Chi Cengkareng	Kapasitas maksimal tempat tidur rawat inap	kasur	30	-	-	-	Galang Dana, Donatur	1 kabupaten/kota		
	Jumlah pasien dengan pembayaran pelayanan kesehatan tanpa sistem Down Payment	orang								
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS										
Indikator 4.1.2 Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, dan SMA/ sederajat.										
Program: Pemberian beasiswa jenjang pendidikan SD s.d SMA										
Kegiatan: Beasiswa pendidikan untuk jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat	Angka penerima bantuan untuk mendapatkan akses pendidikan jenjang SD s.d SMA	siswa	3.459	3.805	4.185	4.604	-	Galang dana	12 kota/kabupaten	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
	Jumlah lokasi yang dijangkau dalam program beasiswa pendidikan	kota/kabupaten	13	15	16	18				
Program: Pembangunan Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng Bagi Masyarakat Prasejahtera										
Kegiatan: Pembangunan Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi	Proposi siswa tamat jenjang pendidikan SD	siswa	145	160	176	194	-	Galang dana	1 kota/kabupaten	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
	Proposi siswa tamat pendidikan jenjang SMP	siswa	145	164	181	199				
	Proposi siswa tamat pendidikan SMA/SMK	siswa	182	232	255	281				
	Jumlah lokasi yang dijangkau dalam pembangunan Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi	kota/kabupaten	2	2	3	3				
Indikator 4.3.1(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).										
Program: Beasiswa dan Pembangunan Universitas										
Kegiatan: Program beasiswa pendidikan khusus Perguruan Tinggi	Jumlah siswa yang menerima manfaat program beasiswa pendidikan untuk S1	siswa	124	136	150	164	-	Galang dana	11 kota/kabupaten	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
	Jumlah siswa yang menerima manfaat program beasiswa pendidikan untuk S2	siswa	18	20	22	24				
	Jumlah siswa yang menerima manfaat program beasiswa pendidikan untuk S3	siswa	9	10	11	12				

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam program beasiswa	kota/kabupaten	8	9	10	11				
Kegiatan: Program pembangunan universitas	Jumlah universitas yang dibangun	gedung	2	2	3	3		Galang dana	3 kota/kabupaten	
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam program pembangunan	kota/kabupaten	2	2	3	3				
Indikator 4.7.1 Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a)kebijakan pendidikan nasional, (b)kurikulum, ©pendidikan guru, (d) penilaian										
Program: Pengajaran Budi Pekerti dan Budaya Humanis										
Kegiatan: Program Pendidikan Budi Pekerti	Jumlah siswa yang menerima pendidikan budi pekerti dan budaya humanis	siswa	2.964	3.260	3.587	3.945		Galang dana	7 kota/kabupaten	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
	Jumlah sekolah yang berpartisipasi dalam penerapan budaya humanis dan budi pekerti	sekolah	17	19	21	23				
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam program pengajaran budi pekerti dan budaya humanis	kota/kabupaten	8	9	10	11				
Kegiatan: Pemberian Mata Pelajaran Budi Pekerti bagi Siswa Sekolah Cinta Kasih & Tzu Chi School	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti kelas Budi Pekerti	siswa	565	622	684	752		Galang dana	1 kota/kabupaten	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
Indikator 4.a.1 Proporsi sekolah dengan akses ke : (a) listrik, (b) internet untuk tujuan pengajaran, © komputer untuk tujuan pengajaran, (d)air minum layak, € fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))										
Program: Pembangunan Sekolah dan Renovasi Gedung Pendidikan										
Kegiatan: Program Pembangunan Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun	sekolah	11	11	12	12		Galang dana	10 kota/kabupaten	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam program beasiswa	kota/kabupaten	8	9	10	11				
Kegiatan: Program Renovasi Gedung Pendidikan	Jumlah ruangan yang direnovasi	ruang	40	45	50	55		Galang dana		
	Jumlah siswa yang terbantu	siswa	2.942	3.236	3.560	3.916				
Program: Pendukung Kebutuhan Sarana Pengajaran										
Kegiatan: Program Pemberian Laptop untuk KBM	Jumlah siswa yang menerima	siswa	5	6	7	8		Galang dana	3 kota/kabupaten	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
	Jumlah laptop yang diberikan	unit	5	6	7	8				
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam prog	kota/kabupaten	4	4	5	5				
Kegiatan: Program Pemberian Handphon	Jumlah siswa yang menerima	siswa	69	76	86	94		Galang dana	4 kota/kabupaten	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
	Jumlah HP yang diberikan	unit	69	76	86	94				
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam progr	kota/kabupaten	4	5	5	6				
Kegiatan: Program Pemberian Kuota Inter	Jumlah siswa yang menerima	siswa	224	246	271	298		Galang dana	3 kota/kabupaten	
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam progr	kota/kabupaten	4	5	6	6				
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN										
11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau										
Program: Bebenah Kampung										
Kegiatan: Bedah Rumah	Jumlah rumah yang sudah direnovasi	unit	47	51	55	59		Galang Dana, Donatur	5 Provinsi	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
	Jumlah anggota keluarga dari rumah yang ikut dalam program bedah rumah	anggota keluarga	158	173	187	201				
	Lokasi tempat pelaksanaan kegiatan bedah rumah	kota	7	9	11	13				
Program: Pengelolaan Rumah Susun Cinta Kasih										
Kegiatan: Rusun Cinta Kasih Tzu Chi Ceng	Pengelolaan perumahan yang terintegrasi dan berkelanjutan	unit	-	-	-	-		Galang Dana, Mitra, Donatur	1 Provinsi	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
Kegiatan: Rusun Cinta Kasih Tzu Chi Muar	Pengelolaan Perumahan yang terintegrasi dan berkelanjutan	unit	-	-	-	-				

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk										
Program: Rekonstruksi dan Rehabilitasi										
Kegiatan: Pembangunan Perumahan Cinta Kasih Tadulako Palu	Jumlah rumah yang dibangun	unit	-	-	-	-	Sponsor, Mitra, Donatur	2 Kota/kabupaten	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia	
	Jumlah mitra yang bekerja sama dalam penggalangan dana	mitra	-	-	-	-				
	Jumlah ruangan dalam setiap rumah	ruangan	-	-	-	-				
	Jumlah furniture yang diserahkan bersama dengan unit rumah yang diberikan	furniture	-	-	-	-				
Kegiatan: Pembangunan Perumahan Cinta Kasih Pombewe Sigi	Jumlah rumah yang dibangun	unit	-	-	-	-				
	Jumlah mitra yang bekerja sama dalam penggalangan dana	mitra	-	-	-	-				
	Jumlah ruangan dalam setiap rumah	ruangan	-	-	-	-				
	Jumlah furniture yang diserahkan bersama dengan unit rumah yang diberikan	furniture	-	-	-	-				
Kegiatan: Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi	Jumlah rumah yang dibangun	unit	-	-	-	-	Sponsor, Mitra, Donatur	1 Kota/kabupaten	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia	
	Jumlah mitra yang bekerja sama dalam penggalangan dana	mitra	-	-	-	-				
	Jumlah ruangan dalam setiap rumah	ruangan	-	-	-	-				
	Jumlah furniture yang diserahkan bersama dengan unit rumah yang diberikan	furniture	-	-	-	-				
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB										
Indikator 12.5.1 Tingkat daur ulang nasional, ton bahan daur ulang										
Program: Program Pelestarian Lingkungan										
Kegiatan: Titik Pelestarian Lingkungan	Jumlah titik pelestarian lingkungan	titik	46	50	55	61	-	Galang dana	11 kota/kabupaten	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
	Jumlah lokasi yang dijangkau dalam program pelestarian lingkungan	kota/kabupaten	12	13	14	16				
Indikator 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang										
Program: Daur ulang										
Kegiatan: Depo Pelestarian Lingkungan	Jumlah depo pelestarian lingkungan	depo	24	26	29	32	-	Galang dana	11 kota/kabupaten	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
	Jumlah lokasi yang dijangkau dalam program daur ulang	kota/kabupaten	12	13	14	16				
	Jumlah kertas yang terkumpul untuk didaur ulang	kg	492.311	541.542	595.697	655.266		Donasi	10 kota/kabupaten	
	Jumlah plastik yang terkumpul untuk didaur ulang	kg	104.742	115.216	126.737	139.411				
	Jumlah logam yang terkumpul untuk didaur ulang	kg	43.117	47.429	52.172	57.389				
	Jumlah kaca yang terkumpul untuk didaur ulang	kg	38.344	42.179	46.397	51.037				
Indikator 12.8.1.(a) Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.										
Program: Sosialisasi Gaya Hidup Pelestarian Lingkungan (dengan melakukan penghematan sumber daya alam, mengurangi penggunaan plastik, mendorong pola konsumsi ramah lingkungan (vegetarian).										
Kegiatan: Vegan Catering	Jumlah orang yang berpartisipasi	orang	8.066	8.872	9.760	10.736	-	Galang dana	18 kota/kabupaten	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
	Jumlah lokasi yang dijangkau dalam program penanaman pohon	kota/kabupaten	14	15	16	18				
	Jumlah paket yang telah terjual	paket	52.134	57.347	63.082	69.391				
Kegiatan: Sosialisasi Gaya Hidup Pelestarian Lingkungan Bagi Siswa di Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi	Angka partisipasi sosialisasi gaya hidup pelestarian lingkungan di sekolah	siswa	565	622	684	752	-	1 kota/kabupaten	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia	
Kegiatan: Sosialisasi Gaya Hidup Pelestarian Lingkungan Bagi Komunitas Masyarakat, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Perusahaan	Angka partisipasi kegiatan sosialisasi gaya hidup pelestarian lingkungan	orang	660	726	798	878				17kota/kabupaten

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024					
Kegiatan: Penerapan Gaya Hidup Pelestarian Lingkungan sebagai bagian dari pengetahuan dasar Relawan	Angka partisipasi pendidikan pelestarian lingkungan bagi relawan Tzu Chi	relawan	15.759	17.335	19.069	20.976			17kota/kabupaten		
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM											
Indikator 13.3.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup											
Program: Pendidikan pelestarian lingkungan											
Kegiatan: Penanaman pohon	Jumlah pohon yang sudah ditanam	batang	17.418	19.160	21.076	23.184	-	Galang dana	7 kota/kabupaten	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia	
	Jumlah lokasi yang dijangkau dalam program penanaman pohon	kota/kabupaten	4	5	6	7					
	Jumlah titik penanaman	titik	36	39	43	48					
Kegiatan: Penerapan Pendidikan Pelestarian Lingkungan sebagai Mata Pelajaran di Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi	Angka partisipasi kegiatan pendidikan pelestarian lingkungan di sekolah	siswa	565	622	684	752	-	Galang dana	1 kota/kabupaten		
Kegiatan: Pendidikan Pelestarian Lingkungan Bagi Komunitas Masyarakat, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Perusahaan	Angka partisipasi kegiatan pendidikan dan praktik pelestarian	orang	660	726	798	878	-	Galang dana	17 kota/kabupaten		
Kegiatan: Penerapan Pendidikan Pelestarian Lingkungan sebagai bagian dari pengetahuan dasar Relawan	Angka partisipasi pendidikan pelestarian lingkungan bagi relawan Tzu Chi	relawan	15.759	17.335	19.069	20.976	-		17 kota/kabupaten		
Nama Pemangku Kepentingan: Kapal Perempuan											
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN											
Indikator 1.2.2 Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.											
Program: Pemantauan dan advokasi program penanggulangan kemiskinan untuk memperkecil tingkat kemiskinan perempuan, laki-laki dan anak dari semua usia hingga tahun 2030 menurun 50 persen											
Kegiatan: Mengembangkan manual pemantauan dan advokasi program penanggulangan kemiskinan	Jumlah manual pemantauan	Dokumen		1			Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, Jawa Timur, NTT	Institut KAPAL Perempuan dan mitra daerah	
	Kegiatan: Penguatan kapasitas Multipihak sebagai pelaku pemantauan	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Kegiatan		10			Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, Jawa Timur, NTT	Institut KAPAL Perempuan dan mitra daerah
		Jumlah peserta yang mendapatkan penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Orang		100						
		Persentase jumlah pemahaman peserta yang mendapatkan penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Persen		80						
	Jumlah kegiatan follow up hasil penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Kegiatan		10							
Kegiatan: Implementasi pemantauan	Jumlah kegiatan pemantauan	Kegiatan			3	3	Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, Jawa Timur, NTT	Institut KAPAL Perempuan dan mitra daerah	
	Jumlah orang yang berpartisipasi dalam pemantauan	Orang			100	100					

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Kegiatan: Pelembagaan hasil pemantauan dalam Voluntary Local Report	Jumlah kegiatan pertemuan	Kegiatan			9	9	Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, Jawa Timur, NTT	Institut KAPAL Perempuan dan mitra daerah
	Advokasi hasil pemantauan	Dokumen (Policy paper)			2	2				
Kegiatan: Advokasi anggaran responsif gender dan pro poor	Jumlah kegiatan pertemuan	Kegiatan			9	9	Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, Jawa Timur, NTT	Institut KAPAL Perempuan dan mitra daerah
	Advokasi anggaran responsif gender dan pro poor	Dokumen			3	3				
Indikator 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok s emua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.										
Program: Memastikan perempuan dan kelompok minoritas menerima bantuan program perlindungan sosial										
Kegiatan: Bantuan untuk korban bencana banjir untuk perempuan, kelompok disabilitas, lansia dan anak	Jumlah kegiatan pembagian sembako, obat-obatan dan kebutuhan perempuan, kelompok disabilitas, lansia dan anak	Kegiatan					82.900.000	Move 92	Gorontalo dan Bali	Institut KAPAL Perempuan, Gusdurian Gorontalo, dan Bali Srti
	Jumlah penerima sembako, obat-obatan dan kebutuhan perempuan, kelompok disabilitas, lansia dan anak	KK								
Kegiatan: Mengembangkan manual pemantauan dan advokasi program perlindungan sosial	Jumlah manual pemantauan	Dokumen		1			Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, Jawa Timur, NTT	Institut KAPAL Perempuan dan mitra daerah
Kegiatan: Penguatan kapasitas Multipihak sebagai pelaku pemantauan	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Kegiatan		10			Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, Jawa Timur, NTT	Institut KAPAL Perempuan dan mitra daerah
	Jumlah peserta yang mendapatkan penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Orang		100						
	Persentase jumlah pemahaman peserta yang mendapatkan penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Persen		80						
	Jumlah kegiatan follow up hasil penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Kegiatan		10						
Nama Kegiatan 4: Pelembagaan hasil pemantauan dalam Voluntary Local Report	Jumlah kegiatan pertemuan	Kegiatan			9	9	Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, Jawa Timur, NTT	Institut KAPAL Perempuan dan mitra daerah
	Advokasi hasil pemantauan	Dokumen (Policy paper)			2	2				
Nama Kegiatan 5: Advokasi anggaran responsif gender dan pro poor	Jumlah kegiatan pertemuan	Kegiatan			9	9	Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, Jawa Timur, NTT	Institut KAPAL Perempuan dan mitra daerah
	Advokasi anggaran responsif gender dan pro poor	Dokumen			3	3				
Indikator 1.3.1 (a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan.										
Program: Memastikan masyarakat miskin, perempuan, anak dan kelompok marginal mendapatkan jaminan kesehatan bersubsidi (JKN-PBI)										
Kegiatan: Mengembangkan manual pemantauan program jaminan kesehatan bersubsidi (JKN-PBI)	Jumlah manual pemantauan	Dokumen		1			Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, Jawa Timur, NTT	Institut KAPAL Perempuan dan mitra daerah
Kegiatan: Penguatan kapasitas Multipihak sebagai pelaku pemantauan	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Kegiatan		10			Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, Jawa Timur, NTT	Institut KAPAL Perempuan dan mitra daerah
	Jumlah peserta yang mendapatkan penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Orang		100						
	Persentase jumlah pemahaman peserta yang mendapatkan penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Persen		80						

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Jumlah kegiatan follow up hasil penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Kegiatan		10						
Kegiatan: Pelembagaan hasil pemantauan dalam Voluntary Local Report	Jumlah kegiatan pertemuan	Kegiatan			9	9	Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, Jawa Timur, NTT	Institut KAPAL Perempuan dan mitra daerah
	Advokasi hasil pemantauan	Dokumen (Policy paper)			2	2				
Kegiatan: Advokasi anggaran responsif gender dan pro poor	Jumlah kegiatan pertemuan	Kegiatan			9	9	Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, Jawa Timur, NTT	Institut KAPAL Perempuan dan mitra daerah
	Advokasi anggaran responsif gender dan pro poor	Dokumen			3	3				
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER										
INDIKATOR SDGs: 5.1.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun										
Program: Data untuk Mendukung Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan										
Kegiatan: Penyediaan data tentang aturan formal dan non-formal yang menghambat dan mendukung penghapusan diskriminasi perempuan	Jumlah pengumpulan data tentang aturan formal dan non-formal	Kegiatan		13	13		Belum ada	Dalam proses pencarian dana	DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulsel, Sulbar, Sumbar, Gorontalo, Aceh, Bali dan Maluku Utara	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah
	Jumlah database hasil pengumpulan data tentang aturan formal dan non-formal	Dokumen		13	13					
	Advokasi kebijakan tingkat desa-kabupaten yang dijadikan aturan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan	Kegiatan		13	13					
	Kampanye hasil pengumpulan data dan advokasi kebijakan	Kegiatan		13	13					
Kegiatan: Advokasi kebijakan di tingkat lokal	Jumlah kegiatan pengumpulan data isu gender dan kemiskinan	Kegiatan	12				89.750.000	Move 92	Kabupaten Kupang, NTT	Institut KAPAL Perempuan dan PEKA-PM
	Jumlah profil data gender hasil dari pengumpulan data	Orang	200							
	Jumlah advokasi Peraturan Desa	Dokumen	4							
INDIKATOR SDGs: 5.2.1. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, a tau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir										
Program: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan										
Kegiatan: Peluncuran dan Pendidikan Kesadaran Hukum untuk Penanganan Kasus Perkawinan Anak dan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah peluncuran Pendidikan Kesadaran Hukum untuk Penanganan Kasus Perkawinan Anak dan Kekerasan Terhadap Perempuan. Diluncurkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kegiatan					67.100.000	Equal Measures 2030, Institut KAPAL Perempuan dan KPPPA	NTT,NTB,Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat	Institut KAPAL Perempuan bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan LPSDM NTB
	Jumlah peserta peluncuran Pendidikan Kesadaran Hukum. Peserta 90% perempuan yang hadir	Orang								
	Jumlah kegiatan Pendidikan Kesadaran Hukum untuk Penanganan Kasus Perkawinan Anak dan Kekerasan Terhadap Perempuan	Kegiatan								
	Jumlah peserta Pendidikan Kesadaran Hukum	Orang								
	Follow up Pendidikan Kesadaran Hukum	Kegiatan	5							
	Persentase tumbuhnya pemahaman peserta tentang pendekatan hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Perkawinan Anak	Persen	100							
Kegiatan: "Pengembangan Radio Komunitas Perempuan untuk Memperkecil Resiko Pandemi COVID-19 terhadap Perempuan dan Anak di	Penyusunan konsep pengembangan Radio Komunitas	Dokumen					89.760.000	Digital Access Programme (DAP) - The Foreign, Commonwealth &	Pangkep, Sulawesi Selatan dan Lombok Utara, NTB	Institut KAPAL Perempuan dan mitra wilayah di Lombok, NTB dan Pangkep, Sulawesi Selatan
	Jumlah jangkauan desa yang ada Radio Komunitas	Desa								

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Wilayah terpeciil" Melalui Siaran Radio	Jumlah penerima manfaat dari Radio Komunitas (Warga masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pengambil kebijakan)	Orang	9.353				Development (FCDO) United Kingdom		
Kegiatan: Pengumpulan, pengolahan dan verifikasi data penerima bantuan pangan untuk perempuan korban kekerasan terutama korban perkawinan anak	Jumlah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan verifikasi data	Kegiatan				42.860.000	EU dan HIVOS	DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Makassar.	Institut KAPAL Perempuan
	Jumlah penerima bantuan pangan berdasarkan database yang sudah diolah dan diverifikasi	Orang							
	Jumlah database lengkap penerima bantuan pangan yang sudah diolah dan diverifikasi	Dokumen							
Kegiatan: Koordinasi dengan jaringan produsen pedesaan dan warung lokal yang menyediakan bahan pangan untuk	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan jaringan produsen pedesaan dan warung lokal	Kegiatan				7.080.000	EU dan HIVOS	DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Makassar.	Institut KAPAL Perempuan
	Jumlah produsen pedesaan dan warung lokal	Toko/ warung							
Kegiatan: Pengadaan bahan pangan baik untuk distribusi langsung dalam bentuk	Jumlah konsolidasi antar pos-pos distribusi bantuan pangan	Rapat				506.400.000	EU dan HIVOS	DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Lombok	Institut KAPAL Perempuan
	Penyusunan protokoler distribusi bantuan pangan	Dokumen							
	Jumlah penyaluran bantuan pangan dan kebutuhan khusus	Kegiatan							
	Jumlah bantuan pangan dan kebutuhan khusus yang didistribusikan	Paket bahan pangan							
	Jumlah penerima bantuan pangan dan kebutuhan khusus	Orang							
	Dokumentasi penyaluran bantuan pangan dan kebutuhan khusus	Dokumen							
	Penyusunan laporan penyaluran bantuan pangan dan kebutuhan khusus	Dokumen							
Kegiatan: Penguatan kesadaran Gugus Tugas COVID-19 untuk penegak hukum, pemerintah lokal dan pemimpin lokal/komunitas untuk penanganan kasus perempuan korban kekerasan terutama perkawinan anak di masa pandemik	Jumlah penguatan kesadaran Gugus Tugas Covid-19	Kegiatan				76.450.000	EU dan HIVOS	DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Makassar.	Institut KAPAL Perempuan
	Jumlah peserta penguatan kesadaran Gugus Tugas Covid-19	Orang							
	Jumlah persentase tumbuhnya kesadaran tentang resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan isu-isu perempuan dan anak di masa pandemik pada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat desa, pemerintah lokal, tokoh masyarakat, perempuan pemimpin di wilayah program	Persen							
	Pendampingan untuk memberikan perhatian dan tindakan khusus dalam penanganan masalah KDRT dan isu-isu perempuan dan anak melalui penyediaan data, layanan informasi, rujukan kasus dan penyediaan rumah aman.	Kegiatan							
Kegiatan: Penguatan kesadaran kelompok perempuan dan kelompok remaja korban kekerasan terutama perkawinan anak tentang resiko meningkatnya KDRT pada masa Pandemi	Jumlah penguatan kesadaran untuk kelompok perempuan dan kelompok remaja korban kekerasan	Kegiatan				60.000.000	EU dan HIVOS	DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Makassar.	Institut KAPAL Perempuan
	Jumlah peserta penguatan untuk kelompok perempuan dan kelompok remaja korban kekerasan	Orang							

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Jumlah persentase tumbuhnya kesadaran tentang resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan isu-isu perempuan dan anak di masa pandemik pada kelompok perempuan, kelompok remaja dan disabilitas di wilayah program	Persen								
	Jumlah leader perempuan yang terlibat aktif dalam mengawal pendataan, pelayanan dan pencegahan KDRT serta isu-isu perempuan dan anak.	Orang								
Kegiatan: Kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang meningkatnya resiko perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan isu-isu perempuan dan anak di masa pandemik	Jumlah pelaksanaan pendidikan publik sebagai bagian dari kampanye publik (webinar, radio atau televisi, infografis, liputan berita, tulisan dan video pendek untuk membangun kesadaran atas resiko KDRT dalam masa pandemik)	Kegiatan					83.650.000	EU dan HIVOS	DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Makassar.	Institut KAPAL Perempuan
	Jumlah peserta yang mengikuti kampanye publik	Orang								
	Jumlah materi dan alat yang akan dipakai di kampanye publik (infografis, video pendek, bahan liputan berita, tulisan, T-Shirt/Scraft tenun)	Dokumen								
Kegiatan: Mengembangkan pelayanan pengaduan online untuk perempuan korban kekerasan terutama korban perkawinan anak	Jumlah diskusi pembahasan pengembangan pelayanan pengaduan online	Kegiatan					274.800.000	EU dan HIVOS	DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Makassar.	Institut KAPAL Perempuan
	Jumlah desain untuk pengaduan yang mudah dipahami dan digunakan oleh para relawan	Dokumen								
	Jumlah aplikasi pengaduan online untuk pengaduan yang mudah dipahami dan digunakan oleh para relawan	Aplikasi Online								
	Jumlah penguatan kapasitas para relawan operator pengaduan online untuk perempuan korban kekerasan terutama korban perkawinan anak	Kegiatan								
	Jumlah penyelenggaraan pelayanan pengaduan online untuk perempuan korban kekerasan terutama korban perkawinan anak	Kegiatan								
	Jumlah profil data gender dari pelayanan pengaduan online untuk perempuan korban kekerasan terutama korban perkawinan anak	Orang								
Kegiatan: Advokasi dan membangun kerjasama dengan CSO dan pemerintah dalam penanganan isu kekerasan perempuan terutama korban	Jumlah diskusi untuk integrasi layanan dengan layanan aduan dari pemerintah agar data terintegrasi dan proses penanganan kasus terkoordinasi dari nasional sampai ke daerah	Kegiatan					16.000.000	EU dan HIVOS	DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Makassar.	Institut KAPAL Perempuan

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
perkawinan anak	Jumlah rumah aman korban kekerasan di komunitas yang berfungsi untuk perlindungan sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebelum dirujuk untuk proses penanganan selanjutnya (konseling, pemrosesan secara hukum).	Rumah aman								
Kegiatan: Rancangan pengembangan dan penguatan usaha-usaha ekonomi yang dikelola secara kolektif oleh komunitas untuk perempuan korban kekerasan terutama korban perkawinan anak	Jumlah assesment kebutuhan produksi dan sumber daya yang dibutuhkan oleh masing-masing usaha ekonomi kelompok khususnya di masa Pandemi Covid-19 untuk perempuan korban kekerasan terutama korban perkawinan anak	Kegiatan					884.800.000	EU dan HIVOS	DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Makassar.	Institut KAPAL Perempuan
	Penyusunan rancangan desain pengembangan dan penguatan usaha-usaha ekonomi komunitas yang dapat menjadi acuan pelaksanaannya	Dokumen								
	Pengadaan alat, bahan dan modal usaha ekonomi komunitas untuk perempuan korban kekerasan terutama korban perkawinan anak	Alat bahan usaha								
	Pendampingan ekonomi kolektif di komunitas yang terintegrasi dengan penguatan perspektif gender dan inklusif untuk perempuan korban kekerasan terutama korban perkawinan anak	Kegiatan	23							
	Evaluasi perkembangan dan proyeksi usaha paska pandemi Covid-19	Kegiatan	4							
Kegiatan 12: Pengumpulan data kekerasan terhadap perempuan di wilayah bencana alam dan pandemi	Jumlah kegiatan pengumpulan data perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan	Kegiatan	4				10.000.000	MAMPU dan Equal Measures 2030	NTB dan Sulawesi Barat	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah
	Jumlah pengumpulan data tentang perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan	Dokumen	4							
	Advokasi ke pemerintah dan instansi terkait hasil pengumpulan data tentang perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan	Dokumen								
Kegiatan: Pos pengaduan untuk korban kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas untuk Sekolah Perempuan untuk menerima pengaduan isu-isu perempuan dan perlindungan sosial	Kegiatan	5				89.750.000	Move 92	Kabupaten Kupang, NTT	Institut KAPAL Perempuan PEKA-PM Kupang
	Jumlah orang yang mendapatkan penguatan kapasitas untuk Sekolah Perempuan untuk menerima pengaduan isu-isu perempuan dan perlindungan sosial	Orang	200							
	Jumlah pengaduan yang diterima oleh Pos Pengaduan berdasarkan KK Perempuan	Kasus	600							
INDIKATOR SDGs: 5.3.1. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun										
Program: Membangun kesadaran dan komitmen untuk melakukan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak										
Kegiatan: Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Bupati Lombok Timur tentang	Penyusunan Peraturan Bupati	Dokumen					8.000.000	Equal Measures 2030	Lombok Timur, NTB	Institut KAPAL Perempuan dan LPSDM NTB
	Jumlah sosialisasi Peraturan Bupati	Kegiatan	1							

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Pencegahan dan Penghentian Perkawinan Anak	Jumlah peserta (OPD-OPD Kabupaten Lombok Timur, CSO, tokoh agama, tokoh adat, jurnalis, akademisi, dan Masyarakat Lombok Timur) sosialisasi Peraturan Bupati	Jumlah orang	100							
Kegiatan: Training Kepala Desa untuk penyusunan Peraturan Desa tentang Pencegahan dan Penghentian Perkawinan Anak	Pelaksanaan training penyusunan Peraturan Desa	Kegiatan					20.000.000	Equal Measures 2030	Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah	Institut KAPAL Perempuan, KPS2K, Dinas BP3AKB Kabupaten Gresik, Jawa Timur
	Penyusunan draft Peraturan Desa	Dokumen	40							
	Jumlah Kepala Desa yang mengikuti penyusunan Peraturan Desa	Desa								
	Persentase pemahaman kepala desa dalam menyusun Peraturan Desa	Persen								
	Follow up dan Finalisasi Penyusunan Peraturan Desa	Kegiatan	2							
Kegiatan: Training Advokasi Berbasis Data untuk Pencapaian SDGs khususnya SDGs Goal 5	Pelaksanaan Training Advokasi Berbasis Data	Kegiatan	1				50.000.000	Equal Measures 2030	Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, NTB	Institut KAPAL Perempuan
	Jumlah peserta yang mengikuti training advokasi berbasis data	Orang	50							
	Follow up hasil rencana tindak lanjut dari training advokasi berbasis data	Kegiatan	3							
	Persentase pemahaman peserta yang mengikuti training advokasi berbasis data	Persen	100							
Kegiatan: Sosialisasi Surat Edaran Gubernur tentang Pencegahan dan Penghentian Perkawinan Anak di Sulawesi Barat	Pelaksanaan Sosialisasi Surat Edaran Gubernur	Kegiatan					25.000.000	Equal Measures 2030	Sulawesi Barat	Institut KAPAL Perempuan, Kartini Manakarra Sulbar, dan Pemprov Sulawesi Barat
	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Surat Edaran Gubernur	Orang								
	Follow up hasil sosialisasi Surat Edaran Gubernur	Kegiatan	2							
Kegiatan: Media Briefing terkait SDGs dan Perkawinan Anak	Pelaksanaan Media Briefing	Kegiatan	1				16.000.000	Equal Measures 2030	Jabodetabek, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, NTB	Institut KAPAL Perempuan, YKPM, LPSDM, dan KPS2K
	Jumlah peserta yang mengikuti Media Briefing	Orang	60							
	Follow up hasil sosialisasi Surat Edaran Gubernur	Kegiatan	2							
Kegiatan: Penguatan kapasitas untuk kepala desa terkait SDGs khususnya Goal 5 dan pencegahan perkawinan anak	Pelaksanaan penguatan kapasitas untuk kepala desa	Kegiatan	1				8.500.000	Equal Measures 2030	Sulawesi Barat	Institut KAPAL Perempuan dan Lentera Perempuan Mandar Sulbar
	Jumlah peserta yang penguatan kapasitas	Orang	25							
	Follow up hasil penguatan kapasitas	Kegiatan	2							
	Persentase pemahaman kepala desa yang mendapatkan penguatan kapasitas	Persen	100							
Kegiatan: Pemberian beasiswa untuk pendamping kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak di tingkat desa	Jumlah kegiatan pemberian beasiswa untuk pendamping kekerasan	Kegiatan	1				9.000.000	Equal Measures 2030	Lombok Timur, Lombok Utara, Gresik	Institut KAPAL Perempuan
	Jumlah penerima beasiswa untuk pendamping kekerasan	Orang	3							
Kegiatan: Kampanye dan Publikasi tulisan tentang isu gender dalam pandemi	Jumlah publikasi tulisan yang masuk di media cetak dan online	Dokumen	2				Tidak mengeluarkan dana	Institut KAPAL Perempuan	Jakarta	Institut KAPAL Perempuan
	Jumlah publikasi tulisan yang masuk Jurnal ilmiah Internasional yaitu Jurnal Perempuan	Dokumen	1							
Kegiatan: Penguatan kapasitas pendamping untuk pelopor pencegahan dan penanganan perkawinan anak	Jumlah kegiatan Penguatan kapasitas pendamping	Kegiatan		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Belum ada	Dalam proses pencarian dana	DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulsel, Sulbar, Sumbar, Gorontalo, Aceh, Bali dan	Institut KAPAL Perempuan
	Jumlah peserta yang ikut kegiatan Penguatan kapasitas pendamping	Orang		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini				

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Jumlah persentase pemahaman peserta yang ikut kegiatan Penguatan kapasitas pendamping	Persen		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini			Maluku Utara		
INDIKATOR SDGs: 5.4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan tanggungjawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional										
Program: Penyediaan Data tentang Beban Kerja Perempuan										
Kegiatan: Penyediaan data tentang Beban Kerja Perempuan dalam Pengasuhan dan Pekerja Rumah Tangga yang tidak Dibayar	Jumlah kegiatan tentang penyediaan data profil gender yang terkait dengan beban kerja perempuan	Kegiatan	15	15			KPPPA, ACTION, Move 92, EM2030, Swadaya KAPAL Perempuan	DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulsel, Sulbar, Sumbar, Gorontalo, Aceh, Bali dan Maluku Utara	Insitut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah	
	Jumlah hasil data profil tentang penyediaan data tentang Beban Kerja Perempuan	Dokumen	3000	3000	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini				
	Advokasi hasil kegiatan tentang penyediaan data tentang Beban Kerja Perempuan	Dokumen		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini				
Kegiatan: Membangun diskursus untuk pengakuan dan penghargaan terhadap pekerjaan pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar (2022-2023)	Jumlah kegiatan diskursus	Kegiatan		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini				
	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan diskursus	Orang		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini				
	Jumlah persentase pemahaman peserta			Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini				
INDIKATOR SDGs: 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat										
Program: Penyediaan Data tentang Kepemimpinan dan Partisipasi Perempuan										
Kegiatan: Data tentang kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan	Jumlah kegiatan pengumpulan data tentang kepemimpinan dan partisipasi perempuan	Kegiatan		3	3	3	Belum ada	Dalam proses pencarian dana	DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulsel, Sulbar, Sumbar, Gorontalo, Aceh, Bali dan Maluku Utara	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah
	Jumlah hasil pengumpulan data tentang kepemimpinan dan partisipasi perempuan	Dokumen		3	3	3				
	Advokasi hasil pengumpulan data tentang kepemimpinan dan partisipasi perempuan	Dokumen		3	3	3				
Kegiatan: Kepemimpinan Perempuan untuk Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan Pembentukan Kebijakan, Program dan Anggaran untuk Pencapaian SDGs	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas untuk meningkatkan Kepemimpinan Perempuan	Kegiatan		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Belum ada	Dalam proses pencarian dana		
	Jumlah peserta kegiatan penguatan kapasitas untuk meningkatkan Kepemimpinan Perempuan	Orang		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini				
	Jumlah presentase pemahaman peserta kegiatan penguatan kapasitas untuk meningkatkan Kepemimpinan Perempuan	Persen		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini				
Kegiatan: Pendampingan Advokasi Kebijakan dan Anggaran untuk Pencapaian SDGs	Jumlah kegiatan pendampingan advokasi kebijakan dan anggaran	Kegiatan		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Belum ada	Dalam proses pencarian dana	DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulsel, Sulbar, Sumbar, Gorontalo, Aceh, Bali dan Maluku Utara	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendampingan advokasi kebijakan dan anggaran	Orang		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini				
	Jumlah database hasil pendampingan advokasi kebijakan dan anggaran	Dokumen		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini				
	Advokasi hasil pendampingan advokasi kebijakan dan anggaran	Dokumen		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini				
Kegiatan: Pemantauan impelentasi SDGs terutama isu-isu perempuan	Jumlah kegiatan pemantauan impelentasi SDGs terutama isu-isu perempuan	Kegiatan		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Belum ada	Dalam proses pencarian dana	DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulsel, Sulbar, Sumbar, Gorontalo, Aceh, Bali dan	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah
	Jumlah database hasil pemantauan impelentasi SDGs terutama isu-isu perempuan	Dokumen		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini				

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Jumlah orang yang terlibat melakukan pemantauan impelentasi SDGs terutama isu-isu perempuan	Orang		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini			Maluku Utara	
	Advokasi hasil pemantauan impelentasi SDGs terutama isu-isu perempuan	Dokumen		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini				
INDIKATOR SDGs: 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang disepakati sesuai dengan Programe of Action of the International Conference on Polution and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil										
Program: Advokasi Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Reproduksi untuk Perempuan										
Kegiatan: Advokasi untuk akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan dan anak	Jumlah kegiatan advokasi untuk akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan dan anak	Kegiatan		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Belum ada	Dalam proses pencarian dana	DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulsel, Sulbar, Sumbar, Gorontalo, Aceh, Bali dan Maluku Utara	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah
	Jumlah hasil advokasi untuk akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan dan anak	Dokumen		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini				
Kegiatan: Penyadaran tentang kualitas kesehatan reproduksi perempuan dan anak	Jumlah kegiatan penyadaran tentang kualitas kesehatan reproduksi perempuan dan ana	Kegiatan		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini				
	Jumlah peserta kegiatan penyadaran tentang kualitas kesehatan reproduksi perempuan dan anak	Orang		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini				
	Jumlah presentase pemahaman peserta kegiatan penyadaran tentang kualitas kesehatan reproduksi perempuan dan anak	Persen		Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini	Direncanakan tahun ini				
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN										
Indikator 15.4 Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana.										
Program: Memastikan pemerintah daerah mengadopsi dan menerapkan strategi daerah untuk pengurangan risiko bencana										
Kegiatan: Pengembangan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan kelompok minoritas di masa pandemi Covid-19	Jumlah kegiatan pengembangan usaha kolektif perempuan sektor pertanian (kebun sayur, kebun bibit, ternak ikan lele)	Kegiatan					198.413.000	Move 92	Jember, Padang, Kupang, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat	Pasar Kita, GPP-Jember, Lintas Iman, Jember PBT, PEKA PM, Pondok PERGERAKAN, Sofresna, YKPM, Lentera Perempuan Mandar, Kartini Mannakarra,
	Jumlah kegiatan pemberian bantuan pengembangan usaha kolektif produk dan jasa kreatif (masker, spre, tenun, souvenir dan koperasi)	Kegiatan	6							
	Jumlah kegiatan pemberian bantuan pengembangan usaha pangan lokal (keripik, emping jagung)	Kegiatan	6							
	Jumlah penerima bantuan pengembangan usaha kolektif perempuan sektor pertanian (kebun sayur, kebun bibit, ternak ikan lele)	Orang	6							
	Jumlah penerima bantuan modal usaha kolektif produk dan jasa kreatif (masker, spre, tenun, souvenir dan koperasi)	Orang	200							
	Jumlah penerima bantuan modal usaha tenun untuk perempuan dan kelompok minoritas	Orang	200							
Kegiatan: Pelatihan kewirausahaan perempuan berperspektif gender	Jumlah pelatihan kewirausahaan perempuan berperspektif gender	Kegiatan	3				323.178.000	KPPPA	Lombok Timur, Lombok Utara, dan Gresik	Institut KAPAL Perempuan dan mitra daerah
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan perempuan berperspektif gender	Orang	90							

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Jumlah persentase pemahaman peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan perempuan berperspektif gender	Persen	100							
	Jumlah kegiatan follow up paska pelatihan kewirausahaan	Kegiatan	18							
Kegiatan: Pelatihan SisterNet	Jumlah kegiatan pelatihan SisterNet		1			Budget dikelola langsung oleh KPPPA dan PT. XL Axiata	KPPPA dengan PT. XL Axiata	Lombok Timur, Makassar, Kabupaten Bogor dan Jakarta Timur	Institut KAPAL Perempuan dan mitra daerah	
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan SisterNet		60							
	Jumlah persentase pemahaman peserta yang mengikuti pelatihan SisterNet		80							
	Jumlah kegiatan follow up paska pelatihan SisterNet		5							
Kegiatan: Pengembangan Radio Komunitas Perempuan untuk pencegahan Covid-19	Jumlah kegiatan siaran radio dan rekaman	Kegiatan	200			900.000.000	Digital Access Programme (DAP) – Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), United Kingdom dan	Desa Sukadana, Kabupaten Lombok Utara, NTB dan Pulau Sabutung Desa Mattiro Kanja, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan	Institut KAPAL Perempuan, LPSDM dan YKPM	
	Jumlah ketersediaan stasiun radio	Studi radio	2							
	Jumlah jangkauan pendengar siaran radio	Orang	9.000							
	Jumlah wilayah jangkauan siaran radio	Desa	12							
	Advokasi pengembangan Radio Komunitas Perempuan kepada pemerintah dan instansi terkait	Dokumen	2							
Kegiatan: Advokasi gender mainstreaming dalam pengelolaan bencana alam dan non alam	Jumlah pertemuan dengan Multipihak untuk advokasi gender mainstreaming dalam kebencanaan	Kegiatan		6	6	Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten, Jakarta, Maluku Utara, Bali, Gorontalo, Jawa Barat	Institut KAPAL Perempuan dan mitra daerah	
	Jumlah wilayah pengumpulan data dan analisis untuk bahan advokasi gender mainstreaming dalam kebencanaan	Wilayah		12	12					12
	Advokasi anggaran responsif gender dan pro poor	Dokumen		1	1					1
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH										
Indikator 16.7.2 Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.										
Program: Pemantauan terhadap partisipasi perempuan, anak dan kelompok marginal dalam pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif gender										
Kegiatan: Mengembangkan manual pemantauan dan advokasi terhadap partisipasi dan keterlibatan perempuan, anak dan kelompok marginal	Mengembangkan manual pemantauan	dokumen		1		Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten, Jakarta, Maluku Utara, Bali, Gorontalo, Jawa Barat	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah	
Kegiatan: Penguatan kapasitas Multipihak sebagai pelaku pemantauan	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Kegiatan		12		Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten, Jakarta, Maluku Utara, Bali, Gorontalo, Jawa Barat	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah	
	Jumlah peserta yang mendapatkan penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Orang		100						
	Persentase jumlah pemahaman peserta yang mendapatkan penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Persen		80						
	Jumlah kegiatan follow up hasil penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Kegiatan		10						
Kegiatan: Implementasi pemantauan	Jumlah kegiatan pemantauan	Kegiatan			12	Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten,	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah	
	Jumlah orang yang berpartisipasi dalam pemantauan	Orang			100					
Kegiatan: Pelembagaan hasil	Jumlah kegiatan pertemuan	Kegiatan			36	Dalam proses	Dalam proses	NTB, NTT, Sulawesi Selatan,	Institut KAPAL Perempuan dan	

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
pemantauan dalam Voluntary Local Report	Advokasi hasil pemantauan	Dokumen (Policy paper)			12	12	pencarian	pencarian	Sulawesi Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten,	Mitra Daerah
Kegiatan: Advokasi anggaran responsif gender dan pro poor	Jumlah kegiatan pertemuan	Kegiatan			36	36	Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten,	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah
	Advokasi anggaran responsif gender dan pro poor	Dokumen			12	12				
Indikator 16.9.1 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.										
Program: Pemantauan dan pendataan kepemilikan akta kelahiran terutama dari masyarakat miskin, kelompok marginal dan wilayah khusus (3 T dan rawan bencana dan konflik).										
Kegiatan: Mengembangkan manual pemantauan dan pendataan kepemilikan akta kelahiran terutama dari masyarakat miskin, kelompok marginal dan wilayah khusus (3 T dan rawan bencana dan konflik).	Mengembangkan manual pemantauan	dokumen		1			Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten, Jakarta, Maluku Utara, Bali, Gorontalo, Jawa Barat	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah
Kegiatan: Penguatan kapasitas Multipihak sebagai pelaku pemantauan dan pendataan	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Kegiatan		12			Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Banten, Jakarta, Maluku Utara, Bali, Gorontalo, Jawa Barat	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah
	Jumlah peserta yang mendapatkan penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Orang		100						
	Persentase jumlah pemahaman peserta yang mendapatkan penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Persen		80						
	Jumlah kegiatan follow up hasil penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Kegiatan		10						
Kegiatan: Implementasi pemantauan	Jumlah kegiatan pemantauan	Kegiatan			12	12	Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten,	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah
	Jumlah orang yang berpartisipasi dalam pemantauan	Orang			100	100				
Kegiatan: Pelembagaan hasil pemantauan dalam Voluntary Local Report	Jumlah kegiatan pertemuan	Kegiatan			36	36	Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten,	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah
	Advokasi hasil pemantauan	Dokumen (Policy paper)			12	12				
Kegiatan: Advokasi anggaran responsif gender dan pro poor	Jumlah kegiatan pertemuan	Kegiatan			36	36	Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten,	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah
	Advokasi anggaran responsif gender dan pro poor	Dokumen			12	12				
Indikator 16.9.2 Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.										
Program: Memastikan kepemilikan akta lahir untuk penduduk usia 0-17 tahun terutama dari masyarakat miskin, kelompok marginal dan wilayah khusus (3 T dan rawan bencana dan konflik).										
Kegiatan: Mengembangkan manual pemantauan dan pendataan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun terutama dari masyarakat miskin, kelompok marginal dan wilayah khusus (3T, daerah rawan bencana dan konflik)	Mengembangkan manual pemantauan	dokumen		1			Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten, Jakarta, Maluku Utara, Bali, Gorontalo, Jawa Barat	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah
Kegiatan: Penguatan kapasitas Multipihak sebagai pelaku pemantauan dan pendataan	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Kegiatan		12			Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten, Jakarta, Maluku Utara, Bali, Gorontalo, Jawa Barat	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah
	Jumlah peserta yang mendapatkan penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Orang		100						

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Persentase jumlah pemahaman peserta yang mendapatkan penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Persen		80						
	Jumlah kegiatan follow up hasil penguatan kapasitas (training, workshop dan pendampingan)	Kegiatan		10						
Kegiatan: Implementasi pemantauan	Jumlah kegiatan pemantauan	Kegiatan			12	12	Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten,	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah
	Jumlah orang yang berpartisipasi dalam pemantauan	Orang			100	100				
Kegiatan: Pelembagaan hasil pemantauan dalam Voluntary Local Report	Jumlah kegiatan pertemuan	Kegiatan			36	36	Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten,	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah
	Advokasi hasil pemantauan	Dokumen (Policy paper)			12	12				
Kegiatan: Advokasi anggaran responsif gender dan pro poor	Jumlah kegiatan pertemuan	Kegiatan			36	36	Dalam proses pencarian	Dalam proses pencarian	NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten,	Institut KAPAL Perempuan dan Mitra Daerah
	Advokasi anggaran responsif gender dan pro poor	Dokumen			12	12				
Nama Pemangku Kepentingan: LAZISMU										
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN										
Indikator SDGs 1.2.1 : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
Program : Peduli Guru										
Kegiatan: Memberikan tunjangan ekonomi kepada guru	Jumlah guru yang dibantu	orang	1000	2000	3000	4000	5.000	Dana ZIS dan CSR	Seluruh Indonesia	- LAZISMU - DIKDASMEN PPM - DIKDASMEN PPA
Indikator SDGs 1.3.1 (c) : Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas										
Program : Pemberdayaan Difabel										
Kegiatan: Bantuan Modal Usaha	Jumlah Difabel yang dibantu	orang	100	200	300	400	5.500	Dana ZIS dan CSR	Seluruh Indonesia	
Indikator SDGs 1.3.1 : Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan										
Program: Connecting Generation (Sayangi Lansia)										
Kegiatan: Pendampingan Untuk Lansia	Jumlah Lansia yang dibantu dan didampingi	orang	100	200	300	400	2.200	Dana ZIS dan CSR	Seluruh Indonesia	
Indikator SDGs 1.4.1: Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar										
Program: Pendampingan Muallaf										
Kegiatan: Pendampingan Muallaf	Jumlah Muallaf yang didampingi (secara ekonomi)	orang	100	200	300	400	1.200	Dana ZIS dan CSR	Seluruh Indonesia	
Program: Da'i Mandiri										
Kegiatan: Pemberdayaan Da'i	Jumlah Da'i yang menjadi mandiri (secara ekonomi)	orang	100	200	300	400	2.750	Dana ZIS dan CSR	Seluruh Indonesia	
Indikator SDGs 1.5.1 (a): Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah										
Program: Warehouse										
Kegiatan: Terbentuk gudang kemanusiaan untuk siaga bencana	Terpenuhi kebutuhan darurat bencana	Bangunan	0	6	9	12	700	GALANG DANA, ZAKAT, MITRA DUNIA USAHA	Nasional	LAZISMU
Indikator SDGs 1.5.1 (b): Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial										
Program: Bantuan Korban Pandemi										
Kegiatan: Bantuan sembako untuk masyarakat terdampak Pandemi Covid19	Jumlah penduduk yang dibantu	orang	6600	20000	0	0	715	Donasi masyarakat dan Mitra Usaha (Kompas)	Jawa Barat, Jawa Tengah	
Program: Bebas Corona										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Kegiatan: Dukungan Penanggulangan Covid-19	Jumlah penduduk yang dibantu	orang	1500	100	150	200/lembaga	10.090.230.782		Seluruh Indonesia	
Program: Siaga Bencana										
Kegiatan: Terbantunya korban dan penyintas kebencanaan	Korban bencana dapat terlayani secara manusiawi (Kebutuhan dasar dan dalam masa respon/rehabilitasi)	Orang	302230	40	60	80	1.000	GALANG DANA, ZAKAT, MITRA DUNIA USAHA	Nasional	LAZISMU DAN MDMC
Program: Qurban Ketahanan Pangan & Kemanusiaan										
Kegiatan: Pengkalengan Hewan Qurban	Jumlah Penerima Manfaat	Orang	114625	70000	80000	180000		Dana Qurban Individu dan Perusahaan	Seluruh Indonesia	
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN										
Indikator SDGs 2.1.1: Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan										
Program: Qurban										
Kegiatan: Kegiatan Qurban untuk ketahanan pangan	Jumlah hewan qurban Sapi	ekor sapi	1312	3000	4000	5000	50.000	Dana Qurban Individu dan Perusahaan	Seluruh Indonesia	
	Jumlah hewan qurban Kambing	ekor kambing	1314	3000	4000	5000				
Program: Qurban Ketahanan Pangan & Kemanusiaan										
Kegiatan: Pengkalengan Hewan Qurban	Jumlah Kaleng RendangMU	kaleng	229250	140000	160000	180000	16.000	Dana Qurban Individu dan Perusahaan	Seluruh Indonesia	
Indikator SDGs 2.1.2: Proporsi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan										
Program: Qurban										
Kegiatan: Kegiatan Qurban untuk ketahanan pangan	Jumlah penerima qurban	orang	288680	660000	880000	1100000		Dana Qurban Individu dan Perusahaan	Seluruh Indonesia	
Program: Qurban Ketahanan Pangan & Kemanusiaan										
Kegiatan: Pengkalengan Hewan Qurban	Jumlah Kaleng RendangMU	kaleng	229250	140000	160000	180000		Dana Qurban Individu dan Perusahaan	Seluruh Indonesia	
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA										
Indikator SDGs 3.8.1: Cakupan Pelayanan Kesehatan Esensial										
Program: Peduli Kesehatan										
Kegiatan: Bantuan layanan kesehatan, biaya pengobatan pasien miskin, dan kampanye kesehatan	Jumlah penduduk yang dibantu	orang	1683	400	600	800	1.508	Donasi masyarakat dan Mitra Swasta (Alfamart, Alfamidi)		Lazismu dan Mitra
Program: Indonesia Mobile Clinic										
Kegiatan: Pengadaan mobil Ambulan	Jumlah pengadaan mobil	mobil	2				481	Donasi masyarakat dan Mitra Swasta (Alfamart)	Klaten, Tangerang	
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam program tani	kota/kabupaten	2							
Indikator SDGs 3.8.1 (a): Unmet need pelayanan kesehatan										
Program: Rumah Singgah Pasien										
Kegiatan: Rumah Singgah Pasien	Jumlah rumah singgah yang berdiri	bangunan yang berdiri	1	4	6	8	150		Yogyakarta	
Program: Peduli Kesehatan										
Kegiatan: Bantuan layanan kesehatan, biaya pengobatan pasien miskin, dan kampanye kesehatan	Jumlah penduduk yang dibantu	orang	1683	400	600	800	1.509	Donasi masyarakat dan Mitra Swasta (Alfamart, Alfamidi)	berbagai daerah	Lazismu dan Mitra

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS										
Indikator SDGs 4.1.1 Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika										
Program: Edutabmu: Pembelajaran dengan aplikasi digital										
Kegiatan: Pengadaan, distribusi Tablet dan pembelajaran berbasis Tablet.	Jumlah siswa yang pembelajaran berbasis tablet	siswa	2000	2000	2000	2000	10000	Dana Zis dan CSR	Seluruh Indonesia (tahap 1 thn 2020 di 6 Propinsi di Jawa)	Lazismu, Dikdasmen Muhammadiyah, Dikdasmen 'Aisyiyah dan Enuma Korea
	Jumlah mata pelajaran yang diajarkan melalui aplikasi digital (Matematika, Literasi dan Bahasa Inggris)	mata pelajaran	3	3	3	3				
Indikator SDGs 4.1.2 Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat										
Program: Beasiswa Mentari										
Kegiatan: Pemberian dana subsidi pendidikan untuk siswa dengan jenjang pendidikan SD sampai dengan SMA/ Sederajat	Jumlah siswa yang dibantu biaya pendidikannya	orang	1000	2000	3000	4000	10.000	Dana ZIS dan CSR	Seluruh Indonesia	LAZISMU
Indikator SDGs 4.3.1 Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin										
Program: Beasiswa Sangsurya										
Kegiatan: Pemberian dana subsidi pendidikan untuk mahasiswa dengan jenjang D3 sampai dengan S2	Jumlah mahasiswa yang dibantu biaya pendidikannya	orang	1000	2000	3000	4000	20.000	Dana ZIS dan CSR	Seluruh Indonesia	LAZISMU
Program: Muhammadiyah Scholarship Preparation Program (MSPP)										
Kegiatan: Persiapan Belajar Ke Luar Negeri	Output kegiatan:	orang	60	90	120	150	3.375	Dana ZIS dan CSR	Seluruh Indonesia	- LAZISMU - Majelis Diktilitbang, - Majelis Pendidikan - Kader (MPK) PP Muhammadiyah, - Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), - Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), - Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ), dan - Universitas Ahmad Dahlan (UAD).
Indikator SDGs 4.4.1 Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)										
Program: Edutabmu Pembelajaran dengan aplikasi digital										
Kegiatan: Pelatihan pembelajaran berbasis aplikasi digital untuk Guru	Jumlah guru menguasai penggunaan sumber belajar berbasis digital (tablet)	orang	188	200	200	200		Dana ZIS dan CSR	Seluruh Indonesia	
Indikator SDGs 4.a.1 Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)										
Program: Rehabilitasi Sekolah (Save Our School)										
Kegiatan: Membantu pembangunan infrastruktur sekolah	Jumlah sekolah yang dibantu	unit	20	40	60	80	5.500	Dana ZIS dan CSR	Seluruh Indonesia	
Program: Lazismu Goes To Campus/School										
Kegiatan: Lazismu Goes to Kampus	Jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan	sekolah	15	30	45	60	1.155	Dana ZIS dan CSR	Seluruh Indonesia	- LAZISMU - PTM
Program: Edutabmu :Pembelajaran dengan aplikasi digital										
Kegiatan: Pengadaan, distribusi Tablet dan pembelajaran berbasis aplikasi	Jumlah tablet yang terdistribusi	unit	600	600	600	600		Dana ZIS dan CSR	Seluruh Indonesia	- LAZISMU - DIKASMEN PPM
	Jumlah sekolah yang terlibat	sekolah	47	50	50	50				

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Indikator SDGs 4.c.1 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan									
Program : Peduli Guru									
Kegiatan: Memberikan beasiswa pendidikan tinggi kepada guru	Jumlah guru yang dibantu	orang				900	Dana ZIS dan CSR	Seluruh Indonesia	- LAZISMU - DIKDASMEN PPM - DIKDASMEN PPA
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER									
Indikator SDGs 5.2.1 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir									
Kegiatan: Penyusunan dan Seminar Buku Zakat Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah peserta yang mengikuti	orang	50						
	Jumlah zakat yang terkumpul dalam kampanye ini untuk korban	Juta rupiah	8			25	Dana ZIS		
	Jumlah buku yang diterbitkan	buku	1						
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK									
Indikator SDGs 6.1.1. Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman									
Program: SAUM (Sanitasi Untuk Masyarakat)									
Kegiatan: Sarana Sanitasi untuk Masyarakat	Jumlah bangunan Sarana Sanitasi	bangunan yang berdiri	2	10	15	20	50	Dana ZIS dan CSR	Bogor
Indikator SDGs 6.1.1 (a) Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak									
Program: Sayangi Daratmu									
Kegiatan: Pengadaan Infrastruktur sarana air bersih (sumur bor, pemipaan)	Jumlah penerima manfaat	Orang	140				81	Dana ZIS dan CSR	KAMPUNG PASIR GEDI CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI LAZISMU KOTA SUKABUMI
Kegiatan: Pengadaan Reaktor Biogas Mini	Jumlah Kepala Keluarga yang terlibat	Kepala Keluarga	40				36.469	Dana ZIS dan CSR	DUSUN IV DESA SINDANGLAYA CIANJUR LAZISMU DAN YAYASAN CIPTA ABDI BANGSA
Kegiatan: Penanaman Pohon dan Sayur dengan Pola Asuh	Jumlah Pohon yang ditanam	Kepala Keluarga	500				215	Dana ZIS dan CSR	Bali, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kaltara, Riau, Sumut LAZISMU DAN LLHPB 'Aisyiyah
Kegiatan: Penyediaan Air minum dengan pembuatan sarana panen hujan dan pengolahan air mineral serta RO (Reverse Osmosis)	Jumlah penerima manfaat	Orang	100				102	Dana ZIS dan CSR	LAZISMU KALBAR
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI									
Indikator SDGs 8.3.1 Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian, berdasarkan jenis kelamin									
Program: Pemberdayaan UMKM									
Kegiatan: Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	1					Donasi masyarakat dan Mitra Usaha	Bogor LAZISMU
	Jumlah peserta yang terlibat per rangkaian kegiatan pelatihan	orang	20						
Kegiatan: Bantuan Permodalan	Jumlah penduduk yang dibantu	orang	150					Donasi masyarakat dan Mitra Usaha	Seluruh Indonesia LAZISMU, Alfamart, Alfamidi
Kegiatan: Bantuan Renovasi Warung	Jumlah warung yang direnovasi	warung	13					Donasi masyarakat dan Mitra Usaha (Alfamart, Alfamidi)	Badung, Bogor, Tangerang Selatan, Serpong, Kebon Jeruk LAZISMU, Alfamart
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam program renovasi warung	kota/kabupaten	5	400	600	800/elompok	2.864.826.789		
Kegiatan: Pelatihan Ecoprint	Jumlah peserta yang terlibat per rangkaian kegiatan pelatihan	orang	185					Donasi masyarakat dan Mitra Usaha (Permata Bank Syariah)	Banjarnegara, Banyumas, Garut, Kota Bandung, Kota Bekasi, Yogyakarta, Bantul, Magelang, Kulonprogo, Klaten LAZISMU
	Jumlah penduduk yang dibantu dalam bentuk modal	orang	185						
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam program pelatihan	kota/kabupaten	10						
Program: Masyarakat Ternak Mandiri									

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Kegiatan: Memberikan permodalan bagi peternak	Jumlah peternak yang dibantu	kelompok	4	40	60	80	1.100.015.000	Donasi Masyarakat	Cijeruk, Parung, Serang, Jawa Timur, Sipirok Aceh	LAZISMU
	Jumlah hewan ternak	ekor	337							
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam program ternak	kota/kabupaten	4							
Indikator SDGs 8.3.1 (b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian										
Program: Tani Bangkit										
Kegiatan: Pelatihan peningkatan hasil pertanian dan pemasaran produk organik	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	1	20	30	40	118.555	Donasi masyarakat dan Mitra Usaha (Alfamidi)	Sukabumi	LAZISMU
	Jumlah peserta yang terlibat per rangkaian kegiatan pelatihan	orang	29							
Kegiatan: Bantuan permodalan bagi petani miskin	Jumlah petani yang didampingi	kelompok	8	6				Donasi masyarakat dan Mitra Swasta (Alfamidi)	Sukabumi, Bali, Yogyakarta, Kab Gianyar, Kab Badug, Denpasar, Karangasem	LAZISMU
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam program tani	kota/kabupaten	6							
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN										
Indikator SDGs 14.										
Program: Sayangi Lautmu										
Kegiatan: Terciptanya lingkungan laut yang bersih dan sehat	Ekosistem dan biota laut terpelihara dengan baik	area	0	4	6	8	750	GALANG DANA, ZAKAT, MITRA DUNIA USAHA	Nasional	LAZISMU, MLO, OMS
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN										
Indikator SDGs 15.										
Program: Pelihara Daratmu										
Kegiatan: Terjaganya lingkungan darat	Penyediaan air bersih, pengelolaan sampah	Bangunan	2	4	6	8	750	GALANG DANA, ZAKAT, MITRA DUNIA USAHA	Nasional	LAZISMU, MLO, OMS
Program: Penanaman Pohon										
Kegiatan: Tertanam pohon untuk penghijauan dan Pemanfaatan lahan serta ketahanan pangan	Jumlah Pohon yang ditanam	Pohon	6000	2000	3000	4000	750	GALANG DANA, ZAKAT, MITRA DUNIA USAHA	Nasional	LAZISMU, MLO, OMS
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH										
Indikator SDGs 16.6.1 (b) Presentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah										
Program : Audit Nasional										
Kegiatan: Pelaksanaan Audit Keuangan Lazismu Nasional	Jumlah Kantor Wilayah/Daerah Yang Teraudit	Kantor	180	200	240	270	1000	Dana Operasional Lembaga	Jakarta dan daerah kantor layanan	
Program: ISO 90001:2015										
Kegiatan: Pelaksanaan ISO 9001: 2015 Kantor Lazismu	Jumlah Kantor Wilayah/Daerah Yang Tersertifikat ISO	Kantor	1	2	4	6		Dana Operasional Lembaga	Jakarta	
Indikator SDGs 16.6.2 Proporsi Penduduk Yang Puas Terhadap Pengalaman Terakhir atas Layanan Publik										
Program: Survei Kepuasan Muzakki Lazismu										
Kegiatan: Pelaksanaan Survei Kepuasan Muzakki	Jumlah Muzakki yang mengisi survei	Orang	250	500	1000	2000	50	Dana Operasional Lembaga	Jakarta	
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN										
Program: Muhammadiyah Aid										
Kegiatan: Terbantunya korban dan penyintas kebencanaan Internasional	Korban bencana dapat terlayani secara manusiawi (Kebutuhan dasar dan dalam masa respon/rehabilitasi)	Orang	300	9	12	15	1.000	GALANG DANA, ZAKAT, MITRA DUNIA USAHA	Internasional	LAZISMU, LHKI, MDMC
Indikator SDGs 17.17.1 Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil										
Program: Kemitraan Lembaga										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Kegiatan: Kemitraan dengan MLO dan NGO lain	Jumlah lembaga yang bekerja sama (Luar Negeri)	Dokumen/Kegiatan	2	4	6	8		Lembaga	Nasional dan Internasional	
	Jumlah lembaga yang bekerja sama (Nasional)	Dokumen/Kegiatan	10	20	30	40				
	Jumlah lembaga yang bekerja sama (Regional)	Dokumen/Kegiatan	30	60	90	120				
	Jumlah lembaga yang bekerja sama (Internal Persyarikatan)	Dokumen/Kegiatan	30	60	90	120				
Nama Pemangku Kepentingan: Foodbank of Indonesia										
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB										
Indikator 12.3.1.(a) Persentase Sisa makanan										
Program: Mitra 100% Merdeka										
Kegiatan: Advokasi strategi pencegahan dan penanganan kemubaziran pangan	Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di tingkat nasional dan daerah berbasis data untuk mendukung pengelolaan makanan berlebih untuk peningkatan ketahanan pangan dan sisa makanan untuk pakan ternak dan kompos sesuai hierarki pemulihan makanan	kebijakan	-	1	2	2	1.000	Galang dana, mitra dunia usaha	daerah/nasional	Foodbank of Indonesia
Kegiatan: Pengelolaan makanan berlebih sehingga jumlah makanan yang berpotensi terbuang ke <i>landfill</i> menurun	Jumlah mitra yang mendonasikan produk atau bahan pangan untuk redistribusi kepada yang membutuhkan	mitra	28	50	75	150	1.000	Galang dana, mitra dunia usaha	22 kota/kabupaten 14 provinsi	Foodbank of Indonesia dan mitra
	Jumlah makanan berlebih yang didistribusi atau dikelola berdasarkan hierarki pemulihan makanan	ton	2.500	3.000	3.500	3.500				Foodbank of Indonesia
Kegiatan: Peningkatan kapasitas pengelolaan makanan berlebih dan penanganan sampah makanan pada Relawan Pejuang Pangan	Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas relawan pejuang pangan terkait pengelolaan makanan berlebih dan penanganan sampah makanan	kegiatan	3	4	10	12				Foodbank of Indonesia
	Jumlah relawan yang terlibat per rangkaian pelatihan	orang	100	100	100	100				
Kegiatan: Kampanye kemubaziran pangan, upaya pencegahan, dan penanganannya (<i>press release</i> , sosial media, kegiatan edukasi publik)	Jumlah kampanye kemubaziran pangan, upaya pencegahan dan penanganannya	kampanye	1	1	1	1			Indonesia (digital)	Foodbank of Indonesia dan mitra
Program: Mentari Bangsa										
Kegiatan: Program Mentari Bangsa adalah program pemberian makanan tambahan dan edukasi kepada anak-anak pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini guna menciptakan mentari-bangsa Indonesia di masa depan	Jumlah lembaga yang menjadi mitra program Mentari Bangsa	lembaga	1.045	1.200	1.800	1.800	67.960	Galang dana, mitra dunia usaha	22 kota/kabupaten 14 provinsi	Foodbank of Indonesia dan mitra
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam program Mentari Bangsa	kota/kabupaten	18	18	22	22				
	Jumlah anak penerima manfaat program Mentari Bangsa	orang	40.647	43.000	50.000	50.000				
Kegiatan: Edukasi tentang menghargai makanan kepada anak-anak penerima manfaat dan pengasuhnya	Jumlah kegiatan edukasi yang terlaksana	kegiatan	4	6	12	15				
Program: Sayap dari Ibu										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Kegiatan: Program Sayap dari Ibu merupakan program dimana FOI menggandeng posyandu untuk membantu ibu dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa periode emas	Jumlah lembaga yang menjadi mitra program Sayap dari Ibu	lembaga	130	220	250	250	43.100	Galang dana, mitra dunia usaha	15 kota/kabupaten	Foodbank of Indonesia dan mitra
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam program Sayap dari Ibu	kota/kabupaten	5	10	15	15				
	Jumlah anak penerima manfaat program Sayap dari Ibu	orang	7.000	12.000	15.000	15.000				
Program: Dapur Pangan Foodbank of Indonesia										
Kegiatan: Program Dapur Pangan Foodbank of Indonesia adalah program mendekatkan akses pangan berbasis masyarakat. Masyarakat atau mitra sinergi mengolah dan mendistribusikan makanan dengan gratis kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap kelaparan, baik melalui dapur, warung sosial, atau mobil pangan	Jumlah mitra Dapur Pangan Foodbank of Indonesia	mitra	115	250	350	400	175.600	Galang dana, mitra dunia usaha	22 kota/kabupaten 14 provinsi	Foodbank of Indonesia dan mitra
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam program Dapur Pangan Foodbank of Indonesia	kota/kabupaten	4	10	17	22				
	Jumlah penerima manfaat program Dapur Pangan Foodbank of Indonesia	orang	5.750	6.500	8.000	10.000				
	Jumlah pendistribusian melalui Mobil Pangan Foodbank of Indonesia	kegiatan	100	150	150	150				
Kegiatan: Edukasi tentang perkecambahan dan penanganan makanan berlebih melalui Dapur Pangan Foodbank of Indonesia	Jumlah kegiatan edukasi yang terlaksana	kegiatan	3	12	12	12	-	-	-	-
	Jumlah mitra program yang mendapatkan edukasi	edukasi	25	100	200	200				
Program: Kebun Pangan Keluarga (KEPAK)										
Kegiatan: Program Kebun Pangan Keluarga adalah program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendekatkan keluarga pada sumber pangan lokal yang berbasis komunitas. Dalam program ini, terdapat kegiatan	Jumlah KEPAK yang terbentuk	kelompok	50	150	170	200	6.840	Mitra dunia usaha	22 kota/kabupaten 14 provinsi	Foodbank of Indonesia dan mitra
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam program Kebun Pangan Keluarga	kota/kabupaten	8	14	22	22				
	Jumlah penerima manfaat KEPAK	orang	250	750	1250	1750				
	Manfaat ekonomi yang diperoleh	juta rupiah	150	450	510	600				
	Jumlah peserta yang terlibat per rangkaian kegiatan pelatihan	orang	250	750	1250	1750				
Nama Pemangku Kepentingan: 2030 Youth Force Indonesia										
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS										
Indikator 4.7.1 Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian										
Program: Kita 2030										
Kegiatan: Kelas Online Kita 2030	Jumlah pendaftar	orang	129	200	250	300	-	Galang dana	Online	2030 Youth Force Indonesia
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam program Kelas Kita 2030	kota/kabupaten	23	40	80	120				
	Jumlah peserta Kelas Kita 2030	orang	83	100	120	150				
	Jumlah peserta yang lulus Kelas Kita 2030	orang	32	60	120	150				
Program: International Youth Day										
Kegiatan: International Youth Day Celebration	Jumlah Pendaftar	orang	200	250	300	350	-	Mitra dunia usaha	Online	2030 Youth Force Indonesia
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam program IYD	kota/kabupaten	100	120	180	250				
	Jumlah penerima manfaat IYD	orang	850	1000	1500	2000				
	Jumlah peserta IYD	orang	250	500	750	1000				
	Jumlah organisasi pemuda yang terlibat	kelompok	180	200	300	350				
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Indikator 5.3.1 Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun										
Program: Power to Youth										
Kegiatan: Peningkatan Kapasitas / Youth Engagement Project Assessment (YEPA)	Jumlah daerah intervensi	Kota/Kabupaten	3	3	3	3	Grant	3 wilayah intervensi	2030 Youth Force Indonesia	
	Jumlah peserta (orang muda usia 12-24 tahun)	Orang	45	95	150	200				
	Jumlah persentase orang muda yang telah meningkat kapasitasnya	Persentase		70	80	80				
	Jumlah acara peningkatan kesadaran	Kegiatan	4	7	12	15				
	Jumlah platform	Website	1	2	2	2				
Jumlah penerima manfaat	orang	1.000	3.000	4.000	10.000					
Indikator 5.6.2 Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi										
Kegiatan: Pelibatan Orang Muda dalam Pengambilan Kebijakan / SDGs Youth Town Hall	Jumlah delegasi	Orang	50	50	60	80	Grant		2030 Youth Force Indonesia	
	Jumlah peserta	Orang	250	500	700	1000				
	Kampanye kolaborasi	Kampanye		3	3	3				
	Jumlah penerima manfaat	orang	1000	3.000	4.000	10.000				
	Rekomendasi kebijakan	Kebijakan		2	4	4				
Nama Pemangku Kepentingan: Yayasan Kesehatan Perempuan										
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA										
Indikator SDGs 3.8.1: Cakupan Pelayanan Kesehatan Esensial										
Kegiatan: Penyadaran & Pendidikan Kespro	Pendidikan Kespro kepada remaja	Orang	2258				250.000.000	Donor	Kab Bojonegoro, Ponorogo & Blitar	Yayasan Kesehatan Perempuan
	Pendidikan Kespro kepada kelompok perempuan dewasa	Orang	335				150.000.000	Donor	Kab Bojonegoro, Ponorogo & Blitar	YKP
	Pendidikan Kespro kepada kelompok laki-laki dewasa	ORang	112				100.000.000	Donor	Kab Bojonegoro, Ponorogo & Blitar	YKP
	Sosialisasi Kespro ke stakeholder, kelompok masyarakat, perempuan, orang muda, remaja sekolah, laki-laki, toga, toma	Orang	6700				550.000.000	Donor	Kab Bojonegoro, Ponorogo & Blitar, Aceh, Sumatera Utara, Padang, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta, Solo, NTB, NTT, Ambon, Makassar, Ujung Pandang, Manado	
	Penelitian layanan Kespro dalam skema JKN (kualitatif & kuantitatif)	Penelitian	1 kali di 3 kota				350.000.000	Donor	Aceh, Sumatera Utara, Padang, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta, Solo, NTB, NTT, Ambon, Makassar, Ujung Pandang, Manado	
	Pendidikan Kespro kepada Jurnalis/media	Pelatihan					80.000.000	Donor	Jakarta dan Jawa Timur	
Nama Pemangku Kepentingan: IISD/Jaringan TC										
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun (Rupiah (Juta))	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Indikator TPB/SDGs: 3.4.1 Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan, kronis.									
Indikator TPB/SDGs: 3.4.1 (a) Presentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.									
Indikator TPB/SDGs: 3.5.1 (a) Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.									
Indikator TPB/SDGs: 3.5.1 (e) Prevelensi penyalahgunaan narkotika.									
Indikator TPB/SDGs: 3.a.1* Presentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.									
Indikator TPB/SDGs: 3.b.1 Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.									
Indikator TPB/SDGs: 3.d.1 Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan kesiapsiagaan darurat kesehatan									
Program: Memperkuat program pengendalian tembakau									
Kegiatan: Advokasi kebijakan pelarangan total iklan, promosi dan sponsor rokok	Litigasi pelarangan iklan dalam UU Penyiaran	Naskah	50%	100%				NASIONAL	IISD/Jaringan TC
	Usulan Revisi PP 109/2012	Naskah	50%	100%				NASIONAL	IISD/Jaringan TC
	Monitoring dan evaluasi pelarangan IPS	data monitoring						NASIONAL	IISD/Jaringan TC
	Inventarisasi Perda Total IPS	data	50%	50%	100%			NASIONAL	IISD/Jaringan TC
Kegiatan: Advokasi kebijakan implementasi Kawasan Tanpa Rokok 100% di area publik	Usulan revisi PP 109/2012	naskah	50%	100%				NASIONAL	IISD/Jaringan TC
	Menghimpun data kab/kota yang telah mengimplementasikan KTR	data	80%	100%				NASIONAL	IISD/Jaringan TC
	Pertemuan seluruh stakeholder terkait	rekomenasasi	50%	80%	100%			NASIONAL	IISD/Jaringan TC
	Monitoring pelaksanaan implementasi 100% KTR	data	30%	80%	100%			NASIONAL	IISD/Jaringan TC
Program: Memperkuat program layanan berhenti merokok									
Kegiatan: Saran kebijakan kepada Kementerian Kesehatan untuk	FGD cakupan Maklumat pelayanan.	rekomenasasi	50%	100%				nasional	IISD/JARINGAN TC
	Maklumat Pelayanan memuat UBM	naskah	80%	100%				nasional	IISD/JARINGAN TC
Program: Mengusulkan nikotin sebagai zat adiktif lainnya									
Kegiatan: Menyusun Advokasi Kebijakan terkait nikotin sebagai zat adiktif lainnya	Menyusun policy brief terkait nikotin sebagai zat adiktif lainnya	Policy paper	30%	100%				NASIONAL	IISD
	FGD bersama stakeholder terkait	Rekomendasi	50%	50%				NASIONAL	IISD
	Usulan nikotin sebagai zat adiktif lainnya masuk dalam regulasi nasional	Naskah				100%		NASIONAL	IISD/KNMSPT
Program: Mendukung pengembangan lingkungan sehat bebas dari paparan asap rokok									
Kegiatan : Mendorong peran aktif masyarakat untuk peduli lingkungan sehat	Sosialisasi Penguatan KTR	Rekomendasii	50%	100%				NASIONAL	IISD/Jaringan TC
	Mendorong perluasan desa sehat bebas asap rokok melalui PERDES	Lembaga (Desa Sehat)	20%	50%	100%			NASIONAL	IISD/Jaringan TC
	Terbentuknya komunitas peduli sehat dari paparan sehat	Lembaga	30%	80%	100%			NASIONAL	IISD/Jaringan TC
Program : Akses Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) (3.a.1*)									
Kegiatan: Menyusun Advokasi Kebijakan strategi nasional pengendalian tembakau	Penyusunan Policy Brief Akses FCTC	Policy paper	100%					NASIONAL	IISD
	Analisa pendayagunaan FCTC	Naskah	100%					NASIONAL	IISD
	Polling dukungan akses FCTC	Hasil polling	100%					NASIONAL	IISD/KNMSPT
	Konsolidasi Masyarakat Sipil	Rekomendasi	100%					NASIONAL	IISD/MTCN/KNMSPT
Kegiatan: Advokasi kebijakan pengendalian tembakau.	Komunikasi advokasi ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Bappenas, dan Kementerian Hukum dan Ham	Nota Kesepahaman	30%	50%	100%			NASIONAL	IISD/Jaringan TC
	Advokasi komunikasi ke Presiden				100%			NASIONAL	IISD/Jaringan TC
	Penandatanganan akses FCTC		20%	30%	30%	100%		NASIONAL	IISD/Jaringan TC
Nama Pemangku Kepentingan: JARAK, PAACLA, YKAI dan eRKA									
INDIKATOR 8.7.1.(a) Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur									

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Program 1: Memperkuat PAACLA sebagai FORUM mitra untuk aksi penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian di Indonesia										
Nama Kegiatan 1: Pembentukan dan penguatan Forum Kemitraan Multi Stakeholders melibatkan lembaga Kementerian, OMS dan Perusahaan/Asosiasi Perusahaan sektor pertanian	Output Kegiatan: Adanya komitmen dari Lembaga Kementerian/Pemerintah Daerah, LSM, dan Perusahaan di Sektor Pertanian menjadi anggota PAACLA Indonesia	Lembaga	30	10	10	10	231.322.000	ECLT dan Anggota PAACLA	Nasional	JARAK
	Output Kegiatan: Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota PAACLA dalam mendesain, monitoring dan evaluasi Program Penanggulangan Pekerja Anak	orang dewasa	30	30			365.316.000	ECLT dan Anggota PAACLA	Nasional	JARAK
	Output Kegiatan: Publik mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang isu penghapusan pekerja anak melalui publikasi artikel / kajian / berita / best practices/regulasi tentang pekerja anak khususnya sektor pertanian di website dan media sosial PAACLA Indonesia	Publik	2.000	2.000	2.000	2.000	143.500.000	ECLT dan Anggota PAACLA	Nasional	PAACLA dan Anggota
Nama Kegiatan 2: Meningkatkan pemahaman dan kesadaran petani dan pekerja pertanian tentang pekerja anak dan peraturan terkait pekerja anak dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di bidang pertanian	Output Kegiatan: Petani dan Pekerja Pertanian mendapatkan pengetahuan tentang bentuk dan jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan bagi anak di sektor pertanian tembakau	orang dewasa	25.000	25.000	25.000	25.000	814.996.000	ECLT dan Anggota PAACLA	Desa	Anggota PAACLA
	Output Kegiatan : Meningkatkan Pengetahuan Pemangku Kepentingan Nasional dalam Menanggulangi Pekerja Anak	Praktik Baik	5	5	5	5	1.596.475.000	ECLT dan Anggota PAACLA		
Nama Kegiatan 3: Mengembangkan model desa ramah anak untuk mengurangi pekerja anak di sektor pertanian	Output Kegiatan: Adanya model Desa Ramah Anak di desa pertanian (Pertanian Tembakau dan Pertanian Sawit, di Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara)	Desa	25	25	25	25	255.528.000	ECLT dan Anggota PAACLA	Desa	JARAK, LPKP, SANTAI, PKPA, STAPA Center, GAPKI, dan Anggota PAACLA
	Output Kegiatan: Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di tingkat desa tentang desa layak anak dan pencegahan pekerja anak	Orang Dewasa	25	25	25	25	2.571.394.000			
	Output Kegiatan: Mencegah anak menjadi pekerja anak melalui Pusat Kegiatan Masyarakat (PKM) di desa sebagai wadah kegiatan forum anak dan kreatifitas anak	Anak (Pekerja Anak)	5.000	5.000	5.000	5.000	2.720.354.000	ECLT dan Anggota PAACLA	Desa	JARAK, LPKP, SANTAI, PKPA, STAPA Center, GAPKI, dan Anggota PAACLA
Nama Program 2: Penanggulangan pekerja anak di sektor sampah plastik										
Nama Kegiatan 4: Pelatihan dan remediasi penanggulangan pekerja anak di sektor sampah plastik	Output Kegiatan: Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran bagi pemulung, terutama Kolektor Besar dan Kolektor Kecil untuk tidak mempekerjakan anak dalam kegiatan pengelolaan sampah,	Orang Dewasa	10 Lapak dan Kolektor serta 100				283 juta	Perusahaan PET (Danone, Aqua dan Veolia)	Kota dan Kabupaten	JARAK
	Output Kegiatan: Mengembangkan Panduan Monitoring dan Remediasi pekerja anak di sektor sampah plastik, serta mempraktikkan di rantai pasok									
Nama Kegiatan 5: Kelompok Usaha Bersama	Output Kegiatan: Meningkatnya ekonomi keluarga pekerja anak agar tidak mempekerjakan anaknya dengan melakukan pelatihan, pemberian modal usaha dan Money	Kel/ Orang	15 Kel & 300 Orang				600.000.000	Kemnaker	Nasional	anggota JARAK

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan 6: Pencegahan Pernikahan Dini	Output Kegiatan: Tersosialisasikannya kampanye Pernikahan dini dan Penyadaran Untuk tidak menikah dibawah umur	Anak	600				250.000.000	Lambang, SANTAI	Desa	anggota JARAK
Nama Program 7 : Pemberian Beasiswa untuk anak anak yang tidak mampu namun berprestasi	Output Kegiatan	YKAI	150	150	150	150	4 Miliar	Protelindo	Seluruh Indonesia	YKAI
	Output Kegiatan	YKAI	20	20	20	20	378.842.068	Colruyt Belgia	Semarang	YKAI
	Output Kegiatan:	YKAI	6	6	6	6	228.748.000	Colruyt Belgia	Semarang	YKAI
Nama Kegiatan 8: Resolusi Konflik melalui kegiatan petualangan sejati	Output kegiatan: mengurangi permasalahan anak dan pengurangan pekerja anak	eRka	100	100	100	100	750.000.000,00	Donatur dan swakelola	Jawa Barat dan Jakarta	eRka
Nama Kegiatan 9: Children and Youth Talent Kompettionae	Output Kegiatan: Pemberian penghargaan dan motivasi bagi anak dan remaja yang berprestasi	eRka	300	300	300	300	500.000.000,00	Donatur dan swakelola	Jawa Barat dan Jakarta	eRka
Nama Kegiatan 10: Bimbingan belajar bagi anak jalan dan komunitas	Output Kegiatan: Meremediasi pendidikan anak-anak dampingan	eRka	50	50	50	50	250.000.000,00	Swakelola	Jakarta	eRka
	Output Kegiatan: meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran bagi anak dampingan untuk prestasi belajarnya agar tidak putus sekolah									
Nama Pemangku Kepentingan: CIMSA INDONESIA										
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN										
Indikator 1.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang										
Nama Program: Environmental Sustainability										
Pre-disaster management	Jumlah mahasiswa kedokteran yang mendapatkan training mengenai meminimalisir risiko bencana	Orang	86	91	91	96			18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	Jumlah kegiatan yang memberikan pelatihan mengenai mitigasi bencana kepada komunitas	Kegiatan	4	6	8	10				
	Jumlah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan	Kegiatan	2	2	4	6				
	Jumlah mahasiswa kedokteran yang mendapatkan training mengenai masalah kesehatan yang timbul akibat masalah lingkungan di masa mendatang	Orang	15	20	25	30				
Post-disaster management	Jumlah training yang diberikan kepada mahasiswa kedokteran mengenai manajemen pasca bencana	Kegiatan	2	4	6	8			18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	Jumlah kegiatan kemanusiaan dengan target untuk membantu pemulihan pasca bencana	Kegiatan	2	2	4	6				
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN										
Indikator 2.2.1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita										
Nama Program: Non Communicable Disease										
Stunting	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	10	10	15	25			18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	10	15	20	25				
	Jumlah kegiatan promotif dan preventif kesehatan	kegiatan	7	10	15	20				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti program promotif dan preventif kesehatan	orang	10	10	15	25				
	Jumlah advokasi yang dilakukan kepada pemangku kebijakan di tingkat kota	kota	1	2	2	3				
	Jumlah riset yang diselenggarakan di tingkat lokal atau nasional	kegiatan	1	2	2	3				
Indikator 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe										
Nama Program: Non Communicable Disease										
Malnutrition	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	10	10	15	25			18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	10	15	20	25				
	Jumlah kegiatan promotif dan preventif kesehatan	kegiatan	7	10	15	20				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti program promotif dan preventif kesehatan	orang	10	10	15	25				
	Jumlah advokasi yang dilakukan kepada pemangku kebijakan di tingkat kota	kota	1	2	2	3				
	Jumlah riset yang diselenggarakan di tingkat lokal atau nasional	kegiatan	1	2	2	3				
Kode dan Nama Indikator 2.2.3* Prevalensi anemia pada ibu hamil										
Nama Program: Maternal Health										
Antenatal Care	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	8	9	9	10			18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	200	215	215	230				
	Jumlah aktivitas (dan intervensi) terkait topik tersebut di tingkat lokal dan nasional	kegiatan	12	12	14	16				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti aktivitas	orang	813	818	825	835				
	Jumlah advokasi terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	2	3	3	4				
	Jumlah riset terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	1	2	3	3				
Nama Program: Maternal Health										
Fokus Area 2: Maternal Healthcare Service	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	2	3	4	6			18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	80	85	95	95				
	Jumlah aktivitas (dan intervensi) terkait topik tersebut di tingkat lokal dan nasional	kegiatan	2	4	6	8				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti aktivitas	orang	210	216	223	230				

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Jumlah advokasi terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	1	2	2	3				
	Jumlah riset terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	1	2	3	3				
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA										
Indikator 3.1.1 Angka Kematian Ibu										
Indikator 3.1.2 (a) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.										
Nama Program: Maternal Health										
Fokus Area 1: Antenatal Care	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	8	9	9	10			18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	200	215	215	230				
	Jumlah aktivitas (dan intervensi) terkait topik tersebut di tingkat lokal dan nasional	kegiatan	12	12	14	16				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti aktivitas	orang	813	818	825	835				
	Jumlah advokasi terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	2	3	3	4			18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	Jumlah riset terkait topik tersebut di lokal dan nasio	kegiatan	1	2	3	3				
Nama Program: Maternal Mental Health During Pregnancy										
Nama Kegiatan : Edukasi masyarakat umum terkait mental health selama kehamilan	Jumlah orang teredukasi	Orang							Nasional	CIMSA Indonesia
Nama Kegiatan : capacity building ke medical student	Jumlah orang teredukasi	Orang							Nasional	CIMSA Indonesia
Nama Kegiatan : <i>social media campaign</i>	Jumlah impressions	impressions							Nasional	CIMSA Indonesia
Nama Program: Maternal Health										
Nama Kegiatan : Maternal Healthcare Service	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	2	3	4	6			18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	80	85	95	95				
	Jumlah aktivitas (dan intervensi) terkait topik tersebut di tingkat lokal dan nasional	kegiatan	2	4	6	8				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti aktivitas	orang	210	216	223	230				
	Jumlah advokasi terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	1	2	2	3				
	Jumlah riset terkait topik tersebut di lokal dan nasio	kegiatan	1	2	3	3				
Nama Program : Maternal Health										
Nama Kegiatan :Edukasi wanita dan women of childbearing age	Jumlah orang teredukasi	Orang							Nasional	CIMSA Indonesia
	Jumlah Lokal CIMSA	Lokal CIMSA							Nasional	CIMSA Indonesia
Nama Kegiatan : capacity building ke medical student	Jumlah Lokal CIMSA	Lokal CIMSA							Nasional	CIMSA Indonesia
	Jumlah puskesmas	puskesmas							Nasional	CIMSA Indonesia
Nama Kegiatan : Mapping puskesmas untuk ANC	Jumlah publikasi mapping	jumlah akun soci							Nasional	CIMSA Indonesia
Indikator 3.3.1 Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi										
Nama Program : HIV & AIDS and Other STIs										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
HIV & AIDS and Other STIs Testing	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	8	8	10	12			18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	10	15	20	35				
	Jumlah aktivitas(dan intervensi) terkait topik tersebut di tingkat lokal dan nasional	kegiatan	3	3	6	10				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti aktivitas	orang	4500	5000	5700	6500				
	Jumlah advokasi terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	1	2	2	3				
	Jumlah riset terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	1	2	3	3				
HIV & AIDS and Other STIs Education, Prevention, and Protection	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	25	30	30	35			18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	700	750	750	850				
	Jumlah aktivitas(dan intervensi) terkait topik tersebut di tingkat lokal dan nasional	kegiatan	30	40	40	50				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti aktivitas	orang	20000	22500	22500	30000			18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	Jumlah advokasi terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	1	2	2	3				
	Jumlah riset terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	1	2	3	3				
Nama Program : HIV & AIDS during The COVID-19 Pandemic										
Nama Kegiatan 1: Edukasi masyarakat terkait topik HIV & AIDS	Jumlah orang tereduksi	Orang							Nasional	
Nama Kegiatan 2: Collaboration Campaign dengan ANEM-Portugal	Jumlah kolaborasi	Aktivitas							Nasional	
Nama Kegiatan 3: Capacity building for medical students	Jumlah medical students yang mengikuti capacity building	Orang							Nasional	
Nama Kegiatan 4: social media campaign	Impressions in social media	Impressions							Nasional	
Nama Kegiatan 5: Red Ribbon Challenge	Jumlah uang yang terkumpul	Rupiah								
Indikator 3.3.2 Insiden Tuberkulosis per 100.000 penduduk										
Nama Program: Communicable Diseases										
Air-borne Diseases (aerosols and droplets)	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	5	6	7	7			18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	170	175	180	185				
	Jumlah aktivitas (dan intervensi) terkait topik tersebut di tingkat lokal dan nasional	kegiatan	8	8	9	9				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti aktivitas	orang	2040	2045	2055	2065				
	Jumlah advokasi terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	1	2	2	4				
	Jumlah riset terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	2	3	4	4				
Indikator 3.3.3.(a) Jumlah Kabupaten/kota yang Mencapai Eliminasi Malaria										
Nama Program: Communicable Diseases										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Vector-borne Diseases	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	5	10	15	20		18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia	
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	25	35	35	50				
	Jumlah aktivitas (dan intervensi) terkait topik tersebut di tingkat lokal dan nasional	kegiatan	5	7	10	10				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti aktivitas	orang	10	15	20	25				
	Jumlah advokasi terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	1	2	2	4				
Jumlah riset terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	2	3	4	4					
Indikator 3.3.5(a) Jumlah Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Kusta										
Nama Program: Communicable Diseases										
Food, Water, and Blood-borne Diseases	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	5	10	15	20		18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia	
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	25	35	35	50				
	Jumlah aktivitas (dan intervensi) terkait topik tersebut di tingkat lokal dan nasional	kegiatan	5	7	10	10				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti aktivitas	orang	10	15	20	25				
	Jumlah advokasi terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	1	2	2	4				
Jumlah riset terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	2	3	4	4					
Indikator 3.3.5(b) Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang Mencapai Eliminasi										
Nama Program: Communicable Diseases										
Food, Water, and Blood-borne Diseases	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	5	10	15	20		18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia	
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	25	35	35	50				
	Jumlah aktivitas (dan intervensi) terkait topik tersebut di tingkat lokal dan nasional	kegiatan	5	7	10	10				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti aktivitas	orang	10	15	20	25				
	Jumlah advokasi terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	1	2	2	4				
Jumlah riset terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	2	3	4	4					
INDIKATOR SDGs :										
3.4.1. (a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun										
3.4.1 (b) Prevalensi tekanan darah tinggi										
3.4.1 (c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun										
Nama Program: Non Communicable Disease										
Cardiovascular Disease	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	3	3	4	4		18 Kota/11 Provinsi		
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	140	142	144	146				
	Jumlah kegiatan promotif dan preventif kesehatan	kegiatan	6	6	7	7				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti program promotif dan preventif kesehatan	orang	2200	2205	2210	2215				
	Jumlah advokasi yang dilakukan kepada pemangku kota	kegiatan	1	2	2	3				
Jumlah riset yang diselenggarakan di tingkat lokal at	kegiatan	1	2	2	3					

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Cancer	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	15	20	27	35		18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia	
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	700	800	900	1000				
	Jumlah kegiatan promotif dan preventif kesehatan	kegiatan	27	31	35	40				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti program promotif	orang	15835	15840	15845	15850				
	Jumlah advokasi yang dilakukan kepada pemangku kota	kota	1	2	2	3				
	Jumlah riset yang diselenggarakan di tingkat lokal at	kegiatan	1	2	2	3				
Diabetes	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	16	16	17	17		18 Kota/11 Provinsi		
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	650	655	670	675				
	Jumlah kegiatan promotif dan preventif kesehatan	kegiatan	27	27	28	28				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti program promotif	orang	23800	23805	23810	23815				
	Jumlah advokasi yang dilakukan kepada pemangku kota	kota	1	2	2	3				
	Jumlah riset yang diselenggarakan di tingkat lokal at	kegiatan	1	2	2	3				
Smoking Cessation	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	5	5	6	6		18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia	
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	180	185	190	195				
	Jumlah kegiatan promotif dan preventif kesehatan	kegiatan	6	6	7	7				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti program promotif	orang	3870	3875	3880	3885				
	Jumlah advokasi yang dilakukan kepada pemangku kota	kota	1	2	2	3				
	Jumlah riset yang diselenggarakan di tingkat lokal at	kegiatan	1	2	2	3				
Overweight and Obesity	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	10	10	15	25		18 Kota/11 Provinsi		
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	10	15	20	25				
	Jumlah kegiatan promotif dan preventif kesehatan	kegiatan	7	10	15	20				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti program promotif	orang	10	10	15	25				
	Jumlah advokasi yang dilakukan kepada pemangku kota	kota	1	2	2	3				
	Jumlah riset yang diselenggarakan di tingkat lokal at	kegiatan	1	2	2	3				
Healthy Lifestyles	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	23	23	26	30		18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia	
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	40	40	50	60				
	Jumlah kegiatan promotif dan preventif kesehatan	kegiatan	7	10	15	20				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti program promotif	orang	20	25	30	45				
	Jumlah advokasi yang dilakukan kepada pemangku kota	kota	1	2	2	3				
	Jumlah riset yang diselenggarakan di tingkat lokal at	kegiatan	1	2	2	3				

Nama Program : Breast Cancer (SADARI and SADANIS in COVID-19 Pandemic)

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan : Edukasi masyarakat terkait topik breast cancer	Jumlah orang teredukasi	Orang						Nasional		
Nama Kegiatan : Mengadakan aktivitas di tingkat regional	Jumlah aktivitas di tingkat regional	Aktivitas						Nasional		
Nama Kegiatan : <i>social media campaign</i>	Impressions/post	Impressions						Nasional		
Nama Kegiatan: <i>Capacity building for medical students</i>	Jumlah medical students yang mengikuti capacity building	Orang						Nasional		
Nama Program : Mental Health										
Nama Kegiatan : Edukasi masyarakat terkait topik mental health	Jumlah orang teredukasi	Orang						Nasional		
Nama Kegiatan : Konsultasi online	Jumlah peserta konsultasi online	Orang						Nasional		
Nama Kegiatan : <i>social media campaign</i>	Reach dan impressions/post	<i>Reach, impressions</i>						Nasional		
	Jumlah pengguna filter Instagram	<i>Captures, shares</i>						Nasional		
Nama Kegiatan : <i>Capacity building for medical students</i>	Jumlah medical students yang mengikuti capacity building	Orang						Nasional		
Indikator 3.8.1 Cakupan Layanan Kesehatan Esensial										
Nama Program: Health System										
Nama kegiatan : Strengthening Health Services	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	2	4	6	10			18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	104	105	120	135				
	Jumlah aktivitas (dan intervensi) terkait topik tersebut di tingkat lokal dan nasional	kegiatan	5	7	10	15				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti aktivitas	orang	663	663	688	690				
	Jumlah advokasi terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	1	2	2	3				
Nama Kegiatan: Healthy Paradigm	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	4	6	8	8			18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	50	55	60	70				
	Jumlah aktivitas (dan intervensi) terkait topik tersebut di tingkat lokal dan nasional	kegiatan	15	17	20	25				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti aktivitas	orang	1250	1250	1270	1300				
	Jumlah advokasi terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	1	2	2	3				
	Jumlah riset terkait topik tersebut di lokal dan nasio	kegiatan	2	2	3	3				
Indikator 3.8.2 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional										
Nama Program: Health System										
Nama Kegiatan: Health Financing and National Health Insurance	3.1 Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	2	4	4	8			18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	3.2 Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	40	50	65	65				
	3.3 Jumlah aktivitas (dan intervensi) terkait topik tersebut di tingkat lokal dan nasional	kegiatan	3	3	6	10				

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	3.4 Jumlah masyarakat yang mengikuti aktivitas	orang	208	223	223	245				
	3.5 Jumlah advokasi terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	1	2	2	3				
	3.6 Jumlah riset terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	2	2	3	3				
Indikator 3.b.1* Proporsi Target Populasi yang Telah Memperoleh Vaksin Program Nasional										
Nama Program: Communicable Diseases										
Neglected Tropical Diseases; Air-borne Diseases (aerosols and droplets); Food, Water, and Blood-borne Diseases	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	2	4	6	10			18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	55	65	65	80				
	Jumlah aktivitas (dan intervensi) terkait topik tersebut di tingkat lokal dan nasional	kegiatan	5	7	7	10				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti aktivitas	orang	460	460	475	500				
	Jumlah advokasi terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	2	3	4	4				
	Jumlah riset terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	1	2	3	3				
Indikator 3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan										
Nama Program: Human Resources for Health										
Nama Kegiatan: Distribution and Migration of Health Workers	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	8	8	10	12			18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	185	190	200	210				
	Jumlah aktivitas (dan intervensi) terkait topik tersebut di tingkat lokal dan nasional	kegiatan	8	10	12	15				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti aktivitas	orang	200	200	220	250				
	Jumlah advokasi terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	1	2	2	4				
	Jumlah riset terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	2	3	4	4				
Nama Program : Becoming a Good Health Professional										
Nama Kegiatan 1: Edukasi mahasiswa kedokteran terkait terkait edukasi kala pandemi serta beasiswa pendidikan	Jumlah orang teredukasi	Orang							Nasional	
Nama Kegiatan 2: Survei kurikulum pendidikan kesehatan	Jumlah kegiatan survei	Aktivitas							Nasional	
Nama Kegiatan 3: social media campaign	Engagements	Engagements							Nasional	
Nama Kegiatan 4: Distribusi buku farmakologi serta faceshield	Jumlah buku yang didistribusikan di 21 universitas	Buku							Nasional	
	Jumlah faceshield yang didistribusikan di 2 universitas	Faceshield							Nasional	
Nama Program 11: Interprofessional Education in Medical Education System										
Nama Kegiatan 1: Edukasi masyarakat terkait topik IPE dan IPC	Jumlah orang teredukasi	Orang							Nasional	
Nama Kegiatan 2: Video edukasi terkait IPE dan IPC di Indonesia	Jumlah viewers	Viewers							Nasional	
Nama Kegiatan 3: social media campaign	Impressions in social media	Impressions							Nasional	

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Nama Program 13: The Role of Medical Doctors Distribution									
Nama Kegiatan 1: Kompetisi Poster Publik	Jumlah orang mengikuti kompetisi	Orang						Nasional	
Nama Kegiatan 2: <i>social media campaign</i>	Jumlah views	views						Nasional	
TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS									
INDIKATOR 4.5.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d)									
Nama Program: Human Rights Equality									
Vulnerable People	Jumlah pelatih baru yang relevan dengan isu HAM di tingkat lokal dan nasional.	orang	3	5	7	7		18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	Jumlah pelatihan baru yang relevan dengan isu HAM di tingkat lokal dan nasional.	kegiatan	15	17	20	25			
	Jumlah aktivitas (dan intervensi) di tingkat lokal dan nasional.	kegiatan	17	17	20	25			
	Jumlah advokasi di tingkat lokal dan nasional.	kegiatan	2	3	3	5			
	Jumlah penelitian di tingkat lokal dan nasional.	kegiatan	1	2	3	3			
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER									
INDIKATOR 5.1.1 Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.									
Nama Program: Human Rights Equality									
Gender Equality	Jumlah pelatih baru yang relevan dengan isu HAM di tingkat lokal dan nasional.	orang	4	4	7	12		18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	Jumlah pelatihan baru yang relevan dengan isu HAM di tingkat lokal dan nasional.	kegiatan	14	16	16	20			
	Jumlah aktivitas (dan intervensi) di tingkat lokal dan nasional.	kegiatan	25	25	30	35			
	Jumlah advokasi di tingkat lokal dan nasional.	kegiatan	1	2	2	3			
	Jumlah penelitian di tingkat lokal dan nasional.	kegiatan	1	2	3	4			
INDIKATOR									
Nama Program : Gender-Based Violence									
Nama Kegiatan : Edukasi masyarakat umum terkait Victim Blaming	Jumlah orang tereduksi	Orang						Nasional	
	Lokal CIMSA	Lokal CIMSA						Nasional	
Nama Kegiatan : <i>social media campaign</i>	Jumlah views	views						Nasional	
Nama Kegiatan : capacity building ke medical student	Jumlah orang tereduksi	Orang						Nasional	
Indikator 5.6.1* Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan									
Nama Program: HIV & AIDS and Other STIs									
Sexual and Reproductive Health and Rights	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh lokal CIMSA	kegiatan	15	20	20	30		18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia
	Jumlah mahasiswa kesehatan yang mengikuti pengembangan kapasitas	orang	500	650	650	800			
	Jumlah aktivitas (dan intervensi) terkait topik tersebut di tingkat lokal dan nasional	kegiatan	15	20	20	30			
	Jumlah masyarakat yang mengikuti aktivitas	orang	700	800	850	900			
	Jumlah advokasi terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	1	2	2	3			
	Jumlah riset terkait topik tersebut di lokal dan nasional	kegiatan	1	2	3	3			

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Program 5: Comprehensive Sexuality Education										
Nama Kegiatan : Edukasi masyarakat terkait topik CSE	Jumlah orang teredukasi	Orang						Nasional		
	Jumlah video edukasi di TikTok	Video						Nasional		
Nama Kegiatan : <i>social media campaign</i>	Impressions	Impressions						Nasional		
Nama Kegiatan : <i>Capacity building for medical students</i>	Jumlah medical students yang mengikuti capacity building	Orang						Nasional		
TUJUAN 13 Penanganan Perubahan Iklim										
Indikator 13.1.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang										
Nama Program : Environmental Sustainability										
Pre-disaster management	Jumlah mahasiswa kedokteran yang mendapatkan training mengenai meminimalisir risiko bencana	Orang	86	91	91	96		18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia	
	Jumlah kegiatan yang memberikan pelatihan mengenai mitigasi bencana kepada komunitas	Kegiatan	4	6	8	10				
	Jumlah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan	Kegiatan	2	2	4	6				
	Jumlah mahasiswa kedokteran yang mendapatkan training mengenai masalah kesehatan yang timbul akibat masalah lingkungan di masa mendatang	Orang	15	20	25	30				
Post-disaster management	Jumlah training yang diberikan kepada mahasiswa kedokteran mengenai manajemen pasca bencana	Kegiatan	2	4	6	8		18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia	
	Jumlah kegiatan kemanusiaan dengan target untuk membantu pemulihan pasca bencana	Kegiatan	2	2	4	6				
Indikator 13.2.2 Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun										
Nama Program : Environmental Sustainability										
Climate change	Jumlah mahasiswa kedokteran yang mendapatkan training mengenai masalah kesehatan yang timbul akibat masalah lingkungan di masa mendatang	Orang	200	205	210	215		18 Kota/11 Provinsi	CIMSA Indonesia	
	Jumlah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan	Kegiatan	10	13	18	25				
Nama Pemangku Kepentingan: BAZNAS (Basis) DKI Jakarta										
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI										
INDIKATOR 8.3.1(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.										
Nama Program : SAUDAGAR TANGGUH										
Pemberian Modal Usaha Menjual Frozen Food	Bantuan Modal Pembelian alat dan Frozen Food	orang	500	500	500	500	600	Zakat, Infaq dan Shadaqah (1= Tersedia)	DKI Jakarta	BAZNAS (Basis) DKI Jakarta
Nama Program : ZMART										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Bantuan untuk Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro	Meningkatkan usaha mikro	Warung	2000	2000	2000	2000	40.000	Zakat, Infaq dan Shadaqah (I = Tersedia)	DKI Jakarta	BAZNAS (Basis) DKI Jakarta
TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR										
9.c.1* Proporsi penduduk terlayani mobile broadband										
Program : BAGII PIRING										
Kegiatan : Berbagi Makanan sebanyak 1 juta Khafalah melalui aplikasi	Pembuatan Aplikasi Bagii Piring untuk menyalurkan bantuan	Warung	3.000	2.000	2.000	2.000	112	Zakat, Infaq dan Shadaqah (I = Tersedia)	DKI Jakarta	BAZNAS (Basis) DKI Jakarta
Nama Pemangku Kepentingan: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)										
TUJUAN 13 MENGAMBIL TUJUAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA										
Indikator 13.3.1 (a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup										
Nama Program: Pengembangan kurikulum pembelajaran Sustainable Finance yang mengakomodir aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim										
Nama Kegiatan : Webinar bertemakan keuangan berkelanjutan dan SDGs Terselenggara: 1. "Mengelola Disrupsi Kembar" 2. "Implementasi Keuangan Berkelanjutan" 3. "How Indonesia/s Financial Institutions & Stakeholders Respond to Climate-Related Financial Risks" 4. "Laporan Keberlanjutan" 5. "Keuangan Berkelanjutan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional" 6. Ekonomi Sirkular: Aktivitas yang Menguntungkan Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Output Kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti webinar Webinar 1: Google Meet: 107 orang, YouTube: 888 views, Webinar 2: Google Meet: 232 orang, YouTube: 755 views, Webinar 3: Google Meet: 176 orang, YouTube: 479 views, Webinar 4: Google Meet: 220 orang, YouTube: 676 views, Webinar 5: Zoom: 382 orang, YouTube: 708 views, Webinar 6: Zoom: 500 orang, YouTube: 331 views.	orang/frekuensi	4 Webinar	3 Webinar	3 Webinar	3 Webinar	Rp 70 juta++/webinar	CSFK - LPPI	CSFK - LPPI	Center for Sustainable Finance Knowledge (CSFK) - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
<p>Nama Kegiatan : Training bertemakan keuangan berkelanjutan dan SDGs: 1. Sustainable Finance Awareness 2. Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 3. Penyusunan Laporan Keberlanjutan 4. Introduction to Sustainability 5. Training Analisis Lingkungan kerjasama IFC</p>	<p>Output Kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti training dan frekuensi penyelenggaraan 2019: 1095 orang (44 training) 2020: 991 orang (7 training) 2021: 269 (ongoing) orang (5 training)</p>	orang/frekuensi	5 Training	5 Training	5 Training	5 Training	<p>1. Online: Rp 30 juta+*/training/hari (6 jam) 2. Offline: Rp 60 juta+*/training/hari (6 jam)</p>	CSFK - LPPI	CSFK - LPPI	Center for Sustainable Finance Knowledge (CSFK) - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
<p>Nama Kegiatan: Penyusunan Modul 1. Sustainable Finance for Strategic Level (BOC-BOD) 2. Sustainable Finance for Middle Level (BOE-Mid Mgt) 3. Sustainable Finance & Reputation Risk Management (Strategic Level) 4. Sustainable Finance & Reputation Risk Management (Middle Level) 5. Sustainable Finance & Branding (Strategic Level) 6. Sustainable Finance & Branding (Middle Level) 7. Green Building Financing 8. Energy Efficiency Financing 9. Renewable Energy Financing 10. ESG for Banks 11. Kurikulum lainnya sesuai permintaan klien</p>	<p>Output Kegiatan Jumlah modul (outline pembelajaran dan bahan ajar)</p>	modul	2 modul baru	2 modul baru	2 modul baru	2 modul baru	Rp 15 juta per modul	CSFK - LPPI	CSFK - LPPI	Center for Sustainable Finance Knowledge (CSFK) - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
<p>Nama Kegiatan: Konsultansi 1. Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2. Penyusunan Laporan Keberlanjutan (SR) 3. Penyusunan Buku Pedoman Perusahaan dan SOP Keuangan Berkelanjutan (BPP SOP)</p>	<p>Output Kegiatan Jumlah klien yang menggunakan jasa konsultansi: 6 klien</p>	klien	RAKB =1 SR = 1 BPPSOP=1	RAKB =1 SR = 1 BPPSOP=1	RAKB =1 SR = 1 BPPSOP=1	RAKB =1 SR = 1 BPPSOP=1	Rp 100 juta per program konsultansi	CSFK - LPPI	CSFK - LPPI	Center for Sustainable Finance Knowledge (CSFK) - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Nama Pemangku Kepentingan: The Conservation International Indonesia (CII)

PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

TUJUAN 13 MENGAMBIL TUJUAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

Indikator 13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang

Nama Program: Mendukung upaya KLHK dalam perlindungan dan pengawetan kawasan konservasi

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Dukungan program kegiatan penyampaian pembelajaran (<i>lessons learned</i>) dan best practices pengelolaan kawasan konservasi dengan pendekatan ekosistem ke tingkat nasional	Output Kegiatan Tersampainya pembelajaran (<i>lesson learned</i>) dan best practices pengelolaan kawasan konservasi dengan pendekatan ekosistem tingkat nasional	Workshop		4				International Climate Initiative (IKI)-German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU)	Sumatra Utara, Papua Barat	Conservation International Indonesia (CII)
Nama Program: Mendukung upaya KLHK dalam pengembangan inisiatif program untuk perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)										
Dukungan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat serta pengembangan alternatif mata pencaharian berbasis perlindungan ekosistem esensial	Output Kegiatan Kapasitas Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat dalam perlindungan kawasan ekosistem esensial (KEE) meningkat	Orang	386	30				IKI-BMU	Sumatra Utara, Papua Barat	CII bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Universitas, LSM Lokal, Meganesia
	Output Kegiatan Keterampilan masyarakat dalam pengolahan produk berbasis mangrove, pertanian, perikanan dan pengembangan usaha meningkat	Orang	2.400					IKI-BMU	Sumatra Utara, Papua Barat	CII bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Universitas, LSM Lokal
	Output Kegiatan Pendapatan, ketahanan pangan dan produksi pertanian/perikanan masyarakat meningkat	Orang	400	9.600					Sumatra Utara, Papua Barat	
Indikator 13.1.2* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030										
Nama Program: Dukungan bagi Kebijakan Nasional										
Mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di ekosistem gambut dan mangrove kedalam kerangka kebijakan dan tata kelola nasional dan untuk mengimplementasikan kebijakan yang diperbarui tersebut.	Output Kegiatan Jumlah Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Lahan Basah yang terbentuk	Tim						IKI-BMU	Nasional	CI, CIFOR, Yayasan Lahan Basah dan Bappenas
	Output Kegiatan Jumlah peta jalan pengelolaan lahan basah di Indonesia yang tersusun	Dokumen	1					IKI-BMU	Nasional	CI, CIFOR, Yayasan Lahan Basah dan Bappenas
	Output Kegiatan Jumlah kertas putih (<i>white paper</i>) untuk mendukung pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove yang tersusun	Dokumen	2	1				IKI-BMU	Nasional	CII & CIFOR
Indikator 13.2.2 (a) Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)										
Nama Program: Mendukung upaya KLHK dalam perlindungan dan pengawetan kawasan konservasi										
Mendukung Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) 2021-2040 sesuai Rencana Kehutanan Tingkat Nasional	Output Kegiatan Tersusunnya RKTP Papua Barat yang memasukkan setidaknya 80.000 ha ekosistem gambut dan bakau bernilai tinggi dan melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan serta disahkan melalui Peraturan Gubernur	Dokumen Perencanaan	1					IKI-BMU	Papua Barat	CII bekerjasama dengan Meganesia, Dinas Kehutanan dan Biro Hukum Pemprov Papua Barat
	Output Kegiatan Total area pengurangan deforestasi terencana dari ekosistem gambut dan mangrove minimal seluas 80.000 hektar berdasarkan perencanaan baru dan yang lebih baik	Hektar	80.000					IKI-BMU	Papua Barat	CII bekerjasama dengan Meganesia, Dinas Kehutanan dan Biro Hukum Pemprov Papua Barat
Nama Pemangku Kepentingan: GGGI										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU										
7.2.1* Bauran energi terbarukan										
Nama Program : Proyek Biological Compressed Natural Gas (BioCNG)										
Investasi BioCNG	16.1 BioCNG financial close	\$US juta	-	\$10	-	-	\$US 0,6 juta	Denmark	3 Lokasi	GGGI
Nama Pemangku Kepentingan: BAITUL MUAMALAT										
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN										
INDIKATOR SDGs:										
Nama Program: Rumah Harapan										
Kegiatan : Program renovasi atau perbaikan rumah tidak layak huni dan tidak sehat menjadi rumah layak huni dan sehat	Jumlah rumah yang diperbaiki akibat bencana alam dan ketidakberdayaan ekonomi	Rumah	300				6.000	Donor (Tersedia Sebagian)	SELINDO	BMM
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs :										
Nama Program 1:Jaminan Sosial Muamalat										
Kegiatan : Mendistribusikan ZISDSKL secara konsumtif kepada mustahik dibidang pendidikan, kemanusiaan, sosial dakwah dan kesehatan	Membantu mustahik memenuhi kebutuhan darurat dan keluar dari garis kemiskinan	Orang	#REF!				50.000	Donor (Tersedia Sebagian)	Nasional	BMM
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs :										
Nama Program 1: BMM Rescue										
Kegiatan : Rekonstruksi pasca bencana kepada korban yang terdampak dengan mengintegrasikan aspek bantuan pangan, obat-obatan dan keperluan lainnya dilokasi bencana	Para korban terdampak bencana mendapat bantuan kebutuhan darurat, rekonstruksi infrastruktur dan pemberdayaan berkelanjutan	Orang	#REF!				3.000	Donor (Tersedia Sebagian)	Nasional	BMM
Nama Program 1: Dusun Zakat Muamalat										
Kegiatan : Pembangunan sanitasi di wilayah pasca bencana dan pelosok	Masyarakat korban bencana dan pedalaman memiliki sanitasi yang layak	orang	#REF!				5000	Donor (Tersedia Sebagian)	SELINDO	BMM
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 1.4.1 Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.										
Nama Program1: Dusun Zakat Muamalat										
Kegiatan : Pembangunan sanitasi di wilayah pasca bencana dan pelosok	Masyarakat korban bencana dan pedalaman memiliki sanitasi yang layak	orang	#REF!				5000	Donor (Tersedia Sebagian)	SELINDO	BMM
TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS										
INDIKATOR SDGs:										
Nama Program :Beasiswa Cikal Muamalat										
Kegiatan : Memberikan bantuan berupa dana pendidikan selama 3 tahun	Siswa dhuafa mendapat dana pendidikan dan terhindar dari putus sekolah	Orang	348				8.000	Donor (Tersedia)	Nasional	BMM
Kegiatan : Melakukan pembinaan setiap bulannya di setiap sekolah	Penerima manfaat mendapatkan pembinaan	Orang	348							
INDIKATOR SDGs: 4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin										
Nama Program 1: Beasiswa Tahfidz Muamalat										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Kegiatan : Memberikan bantuan berupa dana pendidikan selama 1 tahun	Siswa dhuafa mendapat dana pendidikan selama 1 tahun	Orang	100				2.000	Donor (Tersedia Sebagian)	Nasional	BMM
	Melahirkan hafidz dan hafidzah hafal 30 juz selama 1 tahun	Orang	100							
INDIKATOR SDGs: 4.3.1.(a): Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)										
Nama Program: Beasiswa Sarjana Muamalat										
Kegiatan : Memberikan bantuan berupa dana pendidikan selama 2 tahun kepada mahasiswa dhuafa	Mahasiswa dhuafa mendapat dana pendidikan selama 2 tahun	Orang	206				4.000	Donor (Tersedia)	Nasional	BMM
	Kegiatan : Melakukan pembinaan persemester untuk meningkatkan skill dari para penerima manfaat	Penerima manfaat mendapatkan pembinaan tentang <i>leadership</i>	Orang	206						
Nama Pemangku Kepentingan: UNPAGE										
TUJUAN 13 MENGAMBIL TUJUAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA										
Indikator 13.2.2* Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun										
Nama Program: Penguatan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (di Propinsi/Sub-nasional)										
Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Jawa Barat	Output Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen RPRKD Provinsi Jawa Barat	Pertemuan	2				22.000.000	Hibah Program UNPAGE melalui UNDP Indonesia	Provinsi Jawa Barat	UNPAGE & Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Barat
	Output Kegiatan: Dokumen RPRKD Provinsi Jawa Barat	Unit/Paket	1				151.925.000	Hibah Program UNPAGE melalui UNDP Indonesia	Provinsi Jawa Barat	UNPAGE & Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Barat
Nama Kegiatan : Penyusunan Macro Model LCDI Provinsi Jawa Barat	Output Kegiatan: Asistensi Penyusunan Model Macro LCDI Provinsi Jawa Barat	Pertemuan						Hibah Program UNPAGE melalui UNDP Indonesia	Provinsi Jawa Barat	UNPAGE & Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Barat
	Model Macro LCDI untuk Propinsi (versi 1)	Unit/Paket					150.000.000	Hibah Program UNPAGE melalui UNDP Indonesia	Jakarta	UNPAGE & Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas
	Output Kegiatan: Model Macro LCDI Provinsi Jawa Barat	Unit/Paket					247.877.000	Hibah Program UNPAGE melalui UNDP Indonesia	Provinsi Jawa Barat	UNPAGE & Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Barat
Indikator 13.2.2 (a) Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)										
Nama Program: Penguatan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon di Sektor Energi & Industri										
Nama Kegiatan : Penyusunan Sub-model Energi (Benchmarking Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dengan pemodelan sistem dinamik)	Output Kegiatan: Asistensi penyusunan sub-model energi	Pertemuan					28.000.000	Hibah Program UNPAGE melalui UNDP Indonesia	Jakarta	Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
	Output Kegiatan: Sub-Model Energi LCDI, laporan akhir	Unit/Paket					854.000.000	Hibah Program UNPAGE melalui UNDP Indonesia	Jakarta	Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan : Resource Efficient Cleaner Production (RECP) Programme in Fertilizer & Cement Industry	Output Kegiatan: Laporan, Rekomendasi Kebijakan, Strategy & Rencana Aksi Resource Efficiency di Sektor Industri Pupuk	Unit/Paket	1				USD 60,000	Hibah Program UNPAGE melalui UNIDO	Jakarta	UNIDO, berkoordinasi dengan Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, dan berkonsultasi dengan Direktorat Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian, Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian, dan Direktorat Konservasi Energi Kementerian ESDM
	Output Kegiatan: Laporan, Rekomendasi Kebijakan, Strategi, dan Rencana Aksi Resource Efficiency di Sektor Industri Semen			1			USD 60,000	Hibah Program UNPAGE melalui UNIDO	Jakarta	UNIDO, berkoordinasi dengan Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, dan berkonsultasi dengan Direktorat Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian, Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian, dan Direktorat Konservasi Energi Kementerian ESDM
	Output Kegiatan: Dokumen panduan teknis penghematan bahan baku di sektor industri pupuk & semen dalam rangka implementasi industri hijau dengan kerangka Pembangunan Rendah Karbon	Unit/Paket		1			USD 60,000	Hibah Program UNPAGE melalui UNIDO	Jakarta	UNIDO, berkoordinasi dengan Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, dan berkonsultasi dengan Direktorat Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian, Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian, dan Direktorat Konservasi Energi Kementerian ESDM
Indikator 13.2.2 (b) Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)										
Nama Program: Program Pengembangan Usaha dengan sesuai dengan penurunan emisi GRK, adaptasi perubahan iklim, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pemeliharaan keanekaragaman hayati										
Nama Kegiatan : Pengembangan usaha dalam rangka penurunan emisi GRK, adaptasi iklim dan pengmanan keanekaragaman hayati	Output Kegiatan Jumlah kelompok usaha yang melakukan pengembangan usaha, emisi turun, pendapatan masyarakat meningkat dan keanekaragaman hayati terpelihara	Perusahaan atau kelompok usaha	3 Usaha membangun model usaha	3 Usaha membangun model usaha	3 Usaha membangun model usaha	3 Usaha membangun model usaha	Rp	Pemerintah Belanda melalui program DFCD	Lampung, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Papua dan Papua Barat	Perusahaan, Kelompok Usaha
Nama Program: Penguatan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon di Sektor Persampahan										
Nama Kegiatan : Kajian/Assesmen Kebijakan Susut & Sampah Pangan (Food Loss & Waste/FLW) di Propinsi Jawa Barat	Output Kegiatan: Jumlah unit/paket Rekomendasi Kebijakan dan Strategy untuk Mengurangi FLW di Jawa Barat	Unit/Paket	1				USD 38,000	Hibah Program UNPAGE melalui UNEP		UNPAGE & Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas
	Output Kegiatan: FGD & Roundtable Discussion	Pertemuan	2							UNPAGE & Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas
Nama Kegiatan : Survey Baseline FLW di 3 propinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali)	Output Kegiatan: Data Survey FLW di 3 propinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali)	Unit/Paket	1				USD 60,000	Hibah Program UNPAGE melalui UNEP		UNPAGE & Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas
Nama Program: Pembelajaran Ekonomi Hijau Inklusif & Rendah Karbon										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan: Penyusunan kerangka kompetensi ekonomi hijau dan rendah karbon dalam rangka penguatan program pembelajaran yang ada & Penyusunan Modul Referensi pembelajaran ekonomi hijau & rendah karbon bagi K/L.	Output Kegiatan: Laporan assessmen program pembelajaran, kapasitas lembaga & kompetensi SDM di lembaga penyedia pembelajaran ekonomi hijau dan rendah karbon	Unit/Paket	1				USD 20,000	Hibah Program UNPAGE melalui UNITAR	UNITAR bekerjasama dengan LAN & GGGI, berkoordinasi dengan Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas
	Output Kegiatan: Modul referensi pembelajaran ekonomi hijau inklusif & rendah karbon bagi KL	Unit/Paket		1			USD 25,000	Hibah Program UNPAGE melalui UNITAR	UNITAR bekerjasama dengan LAN & GGGI, berkoordinasi dengan Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas
Nama Kegiatan: Implementasi Pembelajaran Ekonomi Hijau (IGEM Piloting) di Universitas	Output Kegiatan: Uji coba implementasi Pembelajaran Model Ekonomi Hijau (IGEM) untuk Mahasiswa (S2 & S3) selama satu semester di Universitas Indonesia		1				USD 5,000	UNITAR	UNITAR bekerjasama dengan Universitas Indonesia

Nama Pemangku Kepentingan: Laz Harfa dan Mitra

TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

INDIKATOR 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
 INDIKATOR 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin
 INDIKATOR 8.5.1* Upah rata-rata per jam kerja
 INDIKATOR 8.5.2* Tingkat Pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
 INDIKATOR 8.5.2.(a) Tingkat Setengah Pengangguran

Nama Program 2: Kelompok KKM - Produksi Lokal

Nama Kegiatan 1: Pelatihan Kewirausahaan dan Peningkatan Produksi Lokal	1.1 Output Kegiatan : Jumlah pelatihan	Kali	5	7	9	12	90	Tahun 2020 Dana tersedia ; Tahun 2021 sebagian dana tersedia ; Tahun 2022-2024 Dana belum tersedia (akan dilakukan fundrising melalui crowdfunding dan kemitraan)	Provinsi Banten : Kab. Pandeglang (12, Kab. Lebak (10), Kab/Kota Serang (7), Kota Cilegon (5), Kab/Kota Tangerang (2)	Laz Harfa dan Mitra
	1.2 Output Kegiatan : Jumlah penerima manfaat pelatihan	Jiwa	50	70	90	120			Provinsi Banten : Kab. Pandeglang (120), Kab. Lebak (100), Kab/Kota Serang (70), Kota Cilegon (50), Kab/Kota Tangerang (20)	
Nama Kegiatan 2: Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Produksi	2.1 Output Kegiatan : Jumlah kelompok produksi lokal yang terbentuk	Kelompok	5	7	9	12	900	Tahun 2020 Dana tersedia ; Tahun 2021 sebagian dana tersedia ; Tahun 2022-2024 Dana belum tersedia (akan dilakukan fundrising melalui crowdfunding dan kemitraan)	Provinsi Banten : Kab. Pandeglang (12, Kab. Lebak (10), Kab/Kota Serang (7), Kota Cilegon (5), Kab/Kota Tangerang (2)	Laz Harfa dan Mitra
	2.2 Output Kegiatan : Jumlah anggota kelompok produksi lokal	Jiwa	50	70	90	120			Provinsi Banten : Kab. Pandeglang (120), Kab. Lebak (100), Kab/Kota Serang (70), Kota Cilegon (50), Kab/Kota Tangerang (20)	

Nama Program 3: Kelompok KKM - Warung KKM

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan 1: Pelatihan Kewirausahaan dan Tata Kelola Warung KKM	1.1 Output Kegiatan : Jumlah pelatihan kewirausahaan dan tata kelola warung kkm	Kali	5	10	10	15	115	Tahun 2020 Dana tersedia ; Tahun 2021 sebagian dana tersedia ; Tahun 2022-2024 Dana belum tersedia (akan dilakukan fundrising melalui crowdfunding dan kemitraan)	Provinsi Banten : Kab. Pandeglang (18), Kab. Lebak (13), Kab/Kota Serang (8), Kota Cilegon (5), Kab/Kota Tangerang (2)	Laz Harfa dan Mitra
	1.2 Output Kegiatan : Jumlah penerima manfaat pelatihan kewirausahaan dan tata kelola warung kkm	Jiwa	50	100	100	150			Provinsi Banten : Kab. Pandeglang (180), Kab. Lebak (130), Kab/Kota Serang (80), Kota Cilegon (50), Kab/Kota Tangerang (20)	
Nama Kegiatan 2: Pembentukan dan Pendampingan Warung KKM	2.1 Output Kegiatan : Jumlah kelompok yang terbentuk	Kelompok	5	10	10	15	1.150	Tahun 2020 Dana tersedia ; Tahun 2021 sebagian dana tersedia ; Tahun 2022-2024 Dana belum tersedia (akan dilakukan fundrising melalui crowdfunding dan kemitraan)	Provinsi Banten : Kab. Pandeglang (18), Kab. Lebak (13), Kab/Kota Serang (8), Kota Cilegon (5), Kab/Kota Tangerang (2)	Laz Harfa dan Mitra
	2.2 Output Kegiatan : Jumlah anggota kelompok	Jiwa	50	100	100	150			Provinsi Banten : Kab. Pandeglang (180), Kab. Lebak (130), Kab/Kota Serang (80), Kota Cilegon (50), Kab/Kota Tangerang (20)	
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN										
Indikator 14.1.1.(a) Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut										
Nama Program: Bak Sampah Terintegrasi Pesisir Banten										
Nama Kegiatan 1: Pelatihan Pengelolaan Sampah	1.1 Output Kegiatan : Pelatihan Pengelolaan Sampah	pelatihan	4	10	10	10	340	Dana belum tersedia (akan dilakukan fundrising melalui crowdfunding dan kemitraan)	Provinsi Banten : Serang, Pandeglang, Cilegon, Lebak, Tangerang	Laz Harfa & Mitra
	1.2 Output Kegiatan : Jumlah Penerima Manfaat	Jiwa	200	500	500	500				
Nama Kegiatan 2: Pembangunan Bak Sampah	2.1 Output Kegiatan : Pembangunan Bak Sampah	unit	4	10	10	10	4.182	Dana belum tersedia (akan dilakukan fundrising melalui crowdfunding dan kemitraan)	Provinsi Banten : Serang, Pandeglang, Cilegon, Lebak, Tangerang	Laz Harfa & Mitra
	2.2 Output Kegiatan : Pengelolaan Sampah	pelatihan	48	120	120	120	2.040			
Indikator 14.2.1* Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan										
Nama Program: Konservasi Terumbu Karang										
Nama Kegiatan 1: Pelatihan Transplantasi Terumbu Karang	1.1 Output Kegiatan : Pelatihan Transplantasi Terumbu Karang	Kali	2	4	4	4	700	Dana belum tersedia (akan dilakukan fundrising melalui crowdfunding dan kemitraan)	Provinsi Banten : Pandeglang, Serang	Laz Harfa & Mitra
	1.2 Output Kegiatan : Jumlah Penerima Manfaat	Paket	100	200	200	200				
Nama Kegiatan 2: Transplantasi Terumbu Karang	1.1 Output Kegiatan : Transplantasi Terumbu Karang	Paket	500	1.000	1.000	1.000	1.050	Dana belum tersedia (akan dilakukan fundrising melalui crowdfunding dan kemitraan)	Provinsi Banten : Pandeglang, Serang	Laz Harfa & Mitra
	1.2 Output Kegiatan : Pendampingan Masyarakat Pesisir	Kali	200	400	400	400	5.600			
Nama Pemangku Kepentingan: SDGs Center Universitas Negeri Gorontalo										
TUJUAN 8 PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEKERJAAN LAYAK										
INDIKATOR 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.										
INDIKATOR 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR 8.5.1* Upah rata-rata per jam kerja										
INDIKATOR 8.5.2* Tingkat Pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur										
INDIKATOR 8.5.2.(a) Tingkat Setengah Pengangguran										
Nama Program: Ketahanan ekonomi masyarakat melalui penguatan BUMDES berbasis potensi lokal										
Nama Kegiatan : Pendampingan secara berkelanjutan peningkatan ekonomi rakyat melalui Pembentukan sekolah UMKM berbasis potensi lokal	Output Kegiatan: Terdapatnya kelompok UMKM yang dapat meningkatkan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal.	Kelompok UMKM	5	7	7	12	xx	UNG dan SDGs Center	Desa Binaan UNG dan SDGs Center UNG	SDGs Center UNG
	Output Kegiatan : terdapatnya lembaga yang secara berkelanjutan yaitu sekolah UMKM untuk membentuk pengetahuan, skill dan attitude dalam memberikan pendampingan sekolah UMKM									
Nama Kegiatan : Penguatan kapasitas masyarakat kelompok UMKM dalam mengolah potensi lokal yang dapat meningkatkan ekonomi	Output Kegiatan: Terdapatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok UMKM dalam mengolah dan memproduksi olahan potensi lokal bernilai ekonomi.	Kelompok UMKM	5	7	7	12	xx	UNG dan SDGs Center	Desa Binaan UNG dan SDGs Center UNG	SDGs Center UNG
	Output Kegiatan : Terdapatnya kelompok UMKM yang terampil dan mahir dalam mengolah potensi lokal bernilai ekonomi									
Nama Kegiatan : Penguatan kapasitas kelompok UMKM melalui market place berbasis IT	Output Kegiatan : Terdapatnya kemampuan kelompok UMKM dalam strategi pemasaran berbasis IT	Kelompok UMKM	5	7	7	12	xx	UNG dan SDGs Center	Desa Binaan UNG dan SDGs Center UNG	SDGs Center UNG
Nama Kegiatan : Pelaksanaan Pengabdian KKN SDGs	Output kegiatan: Terdapatnya pendampingan solusi sesuai permasalahan dan tipologi desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa	Desa	124	124	124	130	xx	UNG dan SDGs Center	Kawasan Teluk Tomini	LPPM, SDGs Center UNG
Nama Kegiatan: Penguatan kapasitas aparat desa melalui sekolah SDGs sebagai role model	Output Kegiatan: Meningkatkan SDM aparat desa dalam memahami SDGs	Desa	7	7	15	15	xx	UNG dan SDGs Center	Desa Binaan SDGs Center UNG	LPPM, SDGs Center UNG
	Output Kegiatan: Meningkatkan SDM aparat desa yang mampu menyusun RPJM desa dan RKP desa berbasis SDGs									
Nama Kegiatan : Penguatan skill IT dan tata kelola bagi aparat desa	Output Kegiatan: Terdapatnya aparat desa yang mahir dan cerdas dalam mengelola data dan administrasi desa berbasis IT	Desa	7	7	15	15	xx	UNG dan SDGs Center	Desa Binaan SDGs Center UNG	LPPM, SDGs Center UNG
	Output Kegiatan: Terdapatnya aparat desa yang memiliki kemampuan manajemen dan tata kelola desa yang bersih dan cerdas									
Nama Kegiatan : Penguatan ekonomi desa dengan meningkatkan produktivitas Bumdes melalui program inkubasi Bumdes	Output kegiatan: Terdapatnya embrio BUMDES yang dikelola dengan manajemen yang baik berdasarkan potensi desa oleh kelompok-kelompok masyarakat desa	Desa	7	7	15	15	xx	UNG dan SDGs Center	Desa Binaan SDGs Center UNG	LPPM, SDGs Center UNG
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESEJARAN										
Indikator 10.1.1.(e) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal										
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Program 1: Ketahanan ekonomi masyarakat melalui penguatan BUMDES berbasis potensi lokal										
Kegiatan 1: Pendampingan secara berkelanjutan peningkatan ekonomi rakyat melalui Pembentukan sekolah	Terdapatnya kelompok UMKM yang dapat meningkatkan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal.	Kelompok UMKM	5	7	7	12	xx	UNG dan SDGs Center UNG	Desa Binaan UNG dan SDGs Center UNG	SDGs Center UNG

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
UMKM berbasis potensi lokal	Terdapatnya lembaga yang secara berkelanjutan yaitu sekolah UMKM untuk membentuk pengetahuan, skill dan attitude dalam memberikan pendampingan sekolah UMKM									
Kegiatan 2: Penguatan kapasitas masyarakat kelompok UMKM dalam mengolah potensi lokal yang dapat meningkatkan ekonomi	Terdapatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok UMKM dalam mengolah dan memproduksi olahan potensi lokal bernilai ekonomi.	Kelompok UMKM	5	7	7	12	xx	UNG dan SDGs Center UNG	Desa Binaan UNG dan SDGs Center UNG	SDGs Center UNG
	Terdapatnya kelompok UMKM yang terampil dan mahir dalam mengolah potensi lokal bernilai ekonomi									
Kegiatan 3: Penguatan kapasitas kelompok UMKM melalui market place berbasis IT	Terdapatnya kemampuan kelompok UMKM dalam strategi pemasaran berbasis IT	Kelompok UMKM	5	7	7	12	xx	UNG dan SDGs Center UNG	Desa Binaan UNG dan SDGs Center UNG	SDGs Center UNG
Kegiatan 4: Pelaksanaan Pengabdian KKN SDGs	Terdapatnya pendampingan solusi sesuai permasalahan dan tipologi desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa	Desa	124	124	124	130	xx	UNG dan SDGs Center UNG	Kawasan Teluk Tomini	LPPM, SDGs Center UNG
Kegiatan 5: Penguatan kapasitas aparat desa melalui sekolah SDGs sebagai role model	Meningkatnya SDM aparat desa dalam memahami SDGs	Desa	7	7	15	15	xx	UNG dan SDGs Center UNG	Desa Binaan SDGs Center UNG	LPPM, SDGs Center UNG
	Meningkatnya SDM aparat desa yang mampu menyusun RPJM desa dan RKP desa berbasis SDGs									
Kegiatan 6: Penguatan skill IT dan tata kelola bagi aparat desa	Terdapatnya aparat desa yang mahir dan cerdas dalam mengelola data dan administrasi desa berbasis IT	Desa	7	7	15	15	xx	UNG dan SDGs Center UNG	Desa Binaan SDGs Center UNG	LPPM, SDGs Center UNG
	Terdapatnya aparat desa yang memiliki kemampuan manajemen dan tata kelola desa yang bersih dan cerdas									
Kegiatan 7: Penguatan ekonomi desa dengan meningkatkan produktivitas Bumdes melalui program inkubasi Bumdes	Terdapatnya embrio BUMDES yang dikelola dengan manajemen yang baik berdasarkan potensi desa oleh kelompok-kelompok masyarakat desa	Desa	7	7	15	15	xx	UNG dan SDGs Center UNG	Desa Binaan SDGs Center UNG	LPPM, SDGs Center UNG
Program 2: Penguatan multi stakeholder partnership										
Kegiatan : Pelatihan need asesmen serta penyusunan program SDGs, implementasi serta evaluasi monitoring secara berkolaborasi oleh NSA dan CSR	Menumbuhkan partisipasi yang saling sinergi antara NSA dan CSR dalam mendorong pencapaian target SDGs	Organisasi/ Lembaga Keagamaan	10	15	20	25	xx	Kerjasama pemerintah Jerman, pemerintah daerah, UNG dan SDGs Center UNG	Provinsi Gorontalo	SDGs Center UNG
	Terdapatnya kemitraan yang berkelanjutan antara NSA, CSR dan pemerintah daerah dalam mendorong pencapaian target SDGs									
Kegiatan: Kajian RPJM dan RKP kabupaten/Kota Gorontalo dalam mendorong pencapaian target SDGs	Terdapatnya dokumen RPJMD dan RKPd yang memuat program yang mendorong pencapaian target SDGs	Satuan pemerintah	2	3	5	8	xx	LPPM dan SDGs Center UNG	Provinsi Gorontalo	SDGs Center UNG

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Terdapatnya evaluasi yang memberikan rekomendasi terhadap upaya percepatan pencapaian target SDGs oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam mendorong pencapaian SDGs di tingkat Provinsi Gorontalo									
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN									
Indikator 11.b.1* Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030									
Nama Program: Penguatan multi stakeholder partnership									
Nama Kegiatan : Pelatihan need asesmen serta penyusunan program SDGs, implementasi serta evaluasi monitoring secara berkolaborasi oleh NSA dan CSR	Output Kegiatan: Menumbuhkan partisipasi yang saling sinergi antara NSA dan CSR dalam mendorong pencapaian target SDGs	Organisasi/ Lembaga Keagamaan	10	15	20	25	Kerjasama pemerintah Jerman, pemerintah daerah, UNG dan SDGs Center UNG	Provinsi Gorontalo	SDGs Center UNG
	Output Kegiatan: Terdapatnya kemitraan yang berkelanjutan antara NSA, CSR dan pemerintah daerah dalam mendorong pencapaian target SDGs								
Nama Kegiatan: Kajian RPJM dan RKP kabupaten/Kota Gorontalo dalam mendorong pencapaian target SDGs	Output Kegiatan : Terdapatnya dokumen RPJMD dan RKP yang memuat program yang mendorong pencapaian target SDGs	Satuan pemerintah	2	3	5	8	LPPM dan SDGs Center UNG	Provinsi Gorontalo	SDGs Center UNG
	Output Kegiatan: Terdapatnya evaluasi yang memberikan rekomendasi terhadap upaya percepatan pencapaian target SDGs oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam mendorong pencapaian SDGs di tingkat Provinsi Gorontalo								
Nama Pemangku Kepentingan: IPB University									
TUJUAN 13 MENGAMBIL TUJUAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA									
Indikator 13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang									
Nama Program: Mendukung upaya KLHK dalam pengembangan inisiatif program untuk perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)									
Dukungan dalam peningkatan kapasitas manajemen areal bernilai konservasi tinggi di dalam dan di luar kawasan konservasi/ekosistem esensial	Output Kegiatan Tersusunnya kajian mendalam terkait pemetaan potensi areal bernilai konservasi tinggi di dalam dan di luar kawasan konservasi di Papua Barat	Dokumen Kajian	3				IKI-BMU	Papua Barat	IPB, Konsultan Individu
	Output Kegiatan 40.000 ha kawasan PME (dari potensi 2 juta ha kawasan lindung) telah ditingkatkan pengelolannya bekerja sama dengan masyarakat setempat	Hektar		40.000			IKI-BMU	Sumatra Utara, Papua Barat	
	Output Kegiatan Terselenggarakannya pelatihan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) kepada pemerintah dan pihak terkait	Pelatihan	1				IKI-BMU	Sumatra Utara	

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Output Kegiatan Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan strategis kabupaten (Kecamatan Muara Batang Toru) dan diserahkan kepada pemerintah dengan menitikberatkan pentingnya menjaga kelestarian habitat species penyu yang dilindungi	Dokumen teknis RDTR		1				IKI-BMU	Sumatra Utara	
Nama Program: Mendukung upaya KLHK dalam penguatan kebijakan konservasi										
Bersama KLHK melakukan kajian teknis untuk referensi ilmiah dalam kebijakan kelola kawasan ekosistem esensial tingkat nasional	Output Kegiatan Tersusunnya dokumen kajian hidrologi gambut di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal dan sebagai kajian ilmiah untuk pembentukan Forum Gambut	Dokumen Kajian	1					IKI-BMU	Sumatra Utara	IPB & ITB
	Output Kegiatan Tersusunnya dokumen nilai valuasi ekonomi aset hutan dan gambut yang lengkap sebagai rekomendasi kebijakan dalam pengelolaan ekosistem hutan dan gambut di Provinsi Sumatra Utara	Dokumen		1				IKI-BMU	Sumatra Utara	CEDS IPB
Bersama KLHK menyediakan referensi ilmiah sebagai rujukan pengembangan inisiatif kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis kawasan konservasi dan ekosistem esensial dan pendampingan penyediaan teknis	Output Kegiatan Terselenggarakannya pelatihan dan pendampingan dalam penerapan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim seperti pelestarian hutan, ekosistem gambut dan ekosistem bakau sebagai penyimpan karbon (termasuk perhitungan dan penyimpanan karbon)	Pelatihan		1				IKI-BMU	Sumatra Utara	
Nama Program: Mendukung upaya KLHK dalam pengembangan program jasa lingkungan										
Kajian skema investasi berkelanjutan berbasis jasa lingkungan (ekowisata dan <i>blue carbon</i>) pada ekosistem gambut dan bakau	Output Kegiatan Tersusunnya kajian skema investasi berkelanjutan berbasis jasa lingkungan (ekowisata dan <i>blue carbon</i>) pada ekosistem gambut dan bakau	Dokumen Kajian		1				IKI-BMU	Papua Barat	CEDS IPB
	Output Kegiatan Tersusunnya kajian kebijakan untuk mendukung sistem investasi berkelanjutan berbasis jasa lingkungan (ekowisata dan <i>blue carbon</i>) pada ekosistem gambut dan bakau	Dokumen Kajian		1				IKI-BMU	Papua Barat	CEDS IPB
	Output Kegiatan Terselenggarakannya workshop kajian pengembangan skema sistem dan penyusunan rekomendasi untuk pembiayaan konservasi alam yang inovatif sebagai dana berkelanjutan bagi pelestarian alam	Workshop		2				IKI-BMU	Papua Barat	CEDS IPB
Nama Program: Mendukung KLHK dalam peningkatan kapasitas bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat dan daerah serta masyarakat sekitar kawasan konservasi										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi pelatihan untuk peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan hutan dan kawasan ekosistem esensial	Output Kegiatan Meningkatnya efektivitas fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Penyuluh dan Polisi Hutan dalam pengelolaan kawasan hutan dan kawasan ekosistem esensial	Orang	74					IKI-BMU	Papua Barat	CEDS IPB
Nama Pemangku Kepentingan: Universitas Lampung										
TUJUAN 13 MENGAMBIL TUJUAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA										
Indikator 13.1.2* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030										
Nama Program 1: Konservasi Kawasan Mangrove										
Nama Kegiatan 1: Pemetaan lahan Mangrove melalui Drone	1.1. Output Kegiatan: Dokumen Kebijakan Pengelolaan Konservasi Mangrove	hektar (m2)	1.200	1.500	2.000	2.500	50 juta	BLU Unila	Lampung Timur	SDGs Center Universitas Lampung
	1.2. Output Kegiatan: Dokumen video/visual kawasan Mangrove	hektar (m2)	1.200	1.500	2.000	2.500	35 juta	BLU Unila	Lampung Timur	SDGs Center Universitas Lampung
Nama Pemangku Kepentingan: TANOTO FOUNDATION										
TUJUAN 2: TANPA KELAPARAN										
Indikator 2.2.1: Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita										
Stunting Prevalence Reduction / Penurunan Prevalensi Stunting										
Stunting Reduction	Development and Implementation of District BCC Strategy	District		7	11	11	11	50.336.000.000	Tanoto Foundation	Kalimantan Selatan (Hulu Sungai Utara), Sulawesi Barat (Majene), Maluku (Seram Barat), Sumatera Barat (Pasaman), Jawa Barat (Garut), NTT (Alor, Timor Tengah Selatan, Kupang)
	Improvement of Stunting Awareness in Frontline Workers	Person			14.621	26.000	40.000	13.689.000.000	Tanoto Foundation	National
	Development of Stunting Reduction Policy & Strategy	District		6	9	9	9	15.845.000.000	Tanoto Foundation	Riau (Rokan Hulu), Kalimantan Timur (Kutai Kartanegara), Sumatera Barat (Pasaman Barat), Banten (Pandeglang), Jawa Barat (Garut), NTB (Lombok Barat, Lombok Utara)
TUJUAN 4: PENDIDIKAN BERKUALITAS										
Indikator 4.2.1: Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelekaran, dan psikososial										
Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan Anak Usia Dini										
Rumah Anak SIGAP	Development of Champion Early Childhood Caregivers	Person		134	134	134	134	8.698.000.000	Tanoto Foundation	National
	Implementation of Rumah Anak SIGAP	District		3	5	7	9	33.330.000.000	Tanoto Foundation	Sumatera Utara (Langkat, Labuhanbatu Selatan), Kalimantan Timur (Kutai Kartanegara), Banten (Pandeglang), DKI Jakarta (Kep. Seribu, Jakarta), NTT (Alor, Timor Tengah Selatan, Kupang)
Indikator 4.1.1: Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Pendidik										
PINTAR	Educator Capacity Development	Person	5.372	10.392	50.000	50.000	50.000	43.519.000.000	Tanoto Foundation	Karo, Pematang Siangtar, batubara, Asahan, Dumai, Bengkalis, Siak, Pekanbaru, Tebo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batang Hari, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur
	Whole School Improvement Program	Schools	592	584	584	584	584			
	Parenting Engagement Program & Training	Person		68.528	70.000	70.000	70.000	6.660.000.000	Tanoto Foundation	
	Program Organisasi Penggerak	Schools		263	263	263	263	19.604.000.000	Tanoto Foundation	
	District Development Program	District	21	21	25	25	11	12.747.000.000	Tanoto Foundation	
	Teacher Training Institute Development	Universities	10	10	10	3	3	15.113.000.000	Tanoto Foundation	
Indikator 4.3.1: Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal										
Program Beasiswa TELADAN										
TELADAN	Scholarship & Leadership Development Program	Person	612	573	676	676	676	89.846.000.000	Tanoto Foundation	Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya,
	Experiential Learning	Kegiatan	67	80	80	80	80	15.211.000.000	Tanoto Foundation	
TUJUAN 16: PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH										
Indikator 16.6.2.(a): Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik										
Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik										
Civil Service Leadership Development	Partnership with LAN RI	Person		24.000	16.000	16.000	16.000	4.805.000.000	Tanoto Foundation	National
	SDG Academy Indonesia	Person		2.752	3.000	3.200	3.400	10.385.000.000	Tanoto Foundation	National
TUJUAN 17: KEMITRAAN MENCAPAI TUJUAN										
Indikator 17.9.1: Bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang										
SDG Academy										
SDG Academy Indonesia	Development of SDG Academy	Juta Rupiah	1.786	2.173	2.267	2.380	2.499	11.105.000.000	Tanoto Foundation	National
World Bank MDTF-INEY										
Grant to World Bank	Advocacy Initiatives at National Level	Juta Rupiah	7.073	3.596	3.500			14.169.000.000	Tanoto Foundation	National
Nama Pemangku Kepentingan: UCLG ASPAC-APEKSI										
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN										
Indikator SDGs 1.4.1: Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar										
Nama Program: LOCALISE SDGs (Leadership, Ownership, and Capacities for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholders Empowerment)										
Nama Kegiatan: Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi COVID-19, secara virtual	Output Kegiatan: dilaksanakannya kegiatan virtual bertema TPB (<i>matchmaking virtual event #6: Mendorong Strategi Komunikasi Publik yang Efektif untuk Mendukung Perubahan Perilaku Disiplin Protokol Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19.</i>) yang mendukung pencapaian TPB di masa pandemi untuk pemerintah daerah dengan tema perubahan perilaku disiplin protokol kesehatan dan penyediaan amenities (fasilitas cuci tangan, sabun, dll)	event	1					Rp 10.000.000	UCLG ASPAC - Europe Union	Virtual

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
	1.2 Output Kegiatan: dilaksanakannya kegiatan virtual bertema TPB (diskusi daring TPB dan COVID-19 #2: Pemerintah Daerah dalam Penegakan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19*) yang mendukung pencapaian TPB di masa pandemi untuk pemerintah daerah dengan tema perubahan perilaku disiplin protokol kesehatan dan penyediaan amenities (fasilitas cuci tangan, sabun, dll)	event	1				Rp 5.000.000	UCLG ASPAC - Europe Union	Virtual
Nama Kegiatan: Penyusunan kajian, riset dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah, dan asosiasi pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi COVID-19	2.1 Output Kegiatan: tersusunnya dokumen riset "Kesadaran Kolektif sebagai Kunci dalam Membangun Ketahanan Masyarakat Saat dan Pasca Pandemi COVID-19"	dokumen		1			Rp 127.100.000	UCLG ASPAC - Europe Union	Indonesia
	2.2 Output Kegiatan: tersusunnya dokumen kajian dan rekomendasi kebijakan "Kompilasi Praktik Baik Pemerintah Daerah di Indonesia untuk Bangkit dan Atasi Pandemi"	dokumen		1			Rp 76.700.000	UCLG ASPAC - Europe Union	Indonesia
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK									
Indikator 6.2.1*Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.									
Nama Program: LOCALISE SDGs (Leadership, Ownership, and Capacities for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholders Empowerment)									
Nama Kegiatan 1: Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi COVID-19, secara virtual	1.1 Output Kegiatan: dilaksanakannya kegiatan virtual bertema TPB (<i>matchmaking virtual event</i> #6: Mendorong Strategi Komunikasi Publik yang Efektif untuk Mendukung Perubahan Perilaku Disiplin Protokol Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19.) yang mendukung pencapaian TPB di masa pandemi untuk pemerintah daerah dengan tema perubahan perilaku disiplin protokol kesehatan dan penyediaan amenities (fasilitas cuci tangan, sabun, dll)	event	1				Rp 10.000.000	UCLG ASPAC - Europe Union	Virtual
	1.2 Output Kegiatan: dilaksanakannya kegiatan virtual bertema TPB (diskusi daring TPB dan COVID-19 #2: Pemerintah Daerah dalam Penegakan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19*) yang mendukung pencapaian TPB di masa pandemi untuk pemerintah daerah dengan tema perubahan perilaku disiplin protokol kesehatan dan penyediaan amenities (fasilitas cuci tangan, sabun, dll)	event	1				Rp 5.000.000	UCLG ASPAC - Europe Union	Virtual
Nama Kegiatan 2: Penyusunan kajian, riset dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah, dan asosiasi pemerintah daerah dalam menghadapi	2.1 Output Kegiatan: tersusunnya dokumen riset "Kesadaran Kolektif sebagai Kunci dalam Membangun Ketahanan Masyarakat Saat dan Pasca Pandemi COVID-19"	dokumen		1			Rp 127.100.000	UCLG ASPAC - Europe Union	Indonesia

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
pandemi COVID-19		2.2 Output Kegiatan: tersusunnya dokumen kajian dan rekomendasi kebijakan "Kompilasi Praktik Baik Pemerintah Daerah di Indonesia untuk Bangkit dan Atasi Pandemi"	dokumen		1			Rp 76.700.000	UCLG ASPAC - Europe Union	Indonesia
Nama Pemangku Kepentingan: ISLAMIC RELIEF INDONESIA										
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
Nama Program: Water Project (WAPRO) di Mamuju-Sulbar dan SWAPPOC (Safe Water Provision for Poor Communities) di Pandeglang-Banten										
Nama Kegiatan 1: Perbaikan sumber mata air dan pemasangan pipa di Kabupaten Mamuju sepanjang total 2,5 km		1.2 Output Kegiatan: jumlah rumah tangga mendapatkan akses air minum yang aman	Rumah Tangga		110			576.921.053,00	WAQF - Islamic Relief HQ-UK	Desa Bambang dan Desa Rantedoda
Nama Kegiatan 1: Pemasangan pipa dari sumber mata air ke perumahan warga di Kabupaten Pandeglang sepanjang 5,7 km		2.1 Output Kegiatan: Jumlah Rumah Tangga mendapatkan akses air minum yang aman	Rumah Tangga		439			1.272.079.079,57	Islamic Relief USA	Desa Cibadak, Kecamatan Cimanggu, Kab Pandeglang-Banten
Indikator 6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.										
Nama Program: SWAPPOC (Safe Water Provision for Poor Communities) Pandeglang-Banten dan ELSSAN - Mamuju-Sulbar										
Nama Kegiatan 2: Pelatihan Pembuatan toilet jongkok dan Pemicuan pembangunan Jamban sehat		1.1 Output Kegiatan: Jumlah komunitas memiliki keterampilan membuat toilet jongkok	Komunitas		4			198.509.155,73	Islamic Relief USA	Desa Cibadak, Kecamatan Cimanggu, Kab Pandeglang-Banten
		1.2 Output Kegiatan: Jumlah rumah tangga membangun jamban sehat keluarga	Rumah Tangga		191				Islamic Relief USA	Desa Cibadak, Kecamatan Cimanggu, Kab Pandeglang-Banten
Nama Kegiatan 2: Perbaikan Jamban yang rusak akibat bencana		2.1 Output Kegiatan: Jumlah Rumah Tangga memiliki kembali jamban sehat setelah sebelumnya hancur karena bencana	Rumah Tangga		100			200.000.000	Islamic Relief Canada dan UK	Desa Rantedoda dan Desa Mekkata
Indikator 6.3.2.(a) Kualitas air permukaan sebagai air baku										
Nama Program: SWAPPOC (Safe Water Provision for Poor Communities) di Pandeglang-Banten										
Nama Kegiatan 1: Pemasangan skyhydrant dan pengetesan air		1.1 Output Kegiatan: jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses mesin penyaring air 'skyhydrant' yang terpasang untuk menyaring bakteri coli	Rumah tangga		439			300.000.000	Islamic Relief USA, Islamic Relief Australia, Islamic Relief Irlandia	Desa Cibadak, Kecamatan Cimanggu, Kab Pandeglang-Banten
Nama Pemangku Kepentingan: Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC)										
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN										
Nama Program: Safe water provision, emergency sanitation, hygiene promotion, distribution of Hygiene Kiot, Environmental sanitation										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun (Rupiah (Juta))	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Kegiatan: Penyediaan air bersih, sanitasi, promosi higiene, distribusi kit higiene, sanitasi lingkungan	Jumlah orang penerima bantuan	Orang	68,099 (realisasi 519054)				CFH 671,016 (ekivalen dengan Rp10,378,604,472, kurs Sept 2021)		Luwu, Melawi, Bolaang Mongondow Selatan, Aceh, Ite Lewotolok, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Papua, NTB/NTT, Malang	
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
Nama Program: Safe water provision, emergency sanitation, hygiene promotion, distribution of Hygiene Kit, Environmental sanitation										
Nama Kegiatan: Penyediaan air bersih, sanitasi, promosi higiene, distribusi kit higiene, sanitasi lingkungan	Jumlah orang penerima bantuan	Orang	68,099 (realisasi 519054)				CFH 671,016 (ekivalen dengan Rp10,378,604,472, kurs Sept 2021)		Luwu, Melawi, Bolaang Mongondow Selatan, Aceh, Ite Lewotolok, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Papua, NTB/NTT, Malang	
Nama Pemangku Kepentingan: Yayasan Obor Tani										
Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2020	2021	2022	2023	2024				
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
Nama Program: Sentra Pemberdayaan Petani										
Kegiatan: penyediaan air bersih	Penyediaan air bersih masyarakat desa Lerep	300 KK	50	100	150	200	300	100.000.000	CSR	Desa Lerep, Ungaran, Semarang
Nama Pemangku Kepentingan: International Council on Clean Transportation (ICCT)										
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN										
Indikator 11.2.1.(a) Proporsi populasi yang mendapat akses yang nyaman pada transportasi publik										
Nama Program: Remote Sensing Testing & Diesel leapfrogging campaign										
Nama Kegiatan 1: Remote Sensing Testing	1.1 Mengetahui emisi nyata (real-world emission) dari armada kendaraan yang beroperasi (in-use) dengan fokus parameter pencemar udara NOx, CO, HC, Partikulat di kawasan Jabodetabek		2020	2021					Dana hibah	Jabodetabek
	1.2 Rekomendasi untuk pengetatan standar emisi kendaraan, baik kendaraan tipe baru maupun kendaraan yang beroperasi (in-use)			2021					Dana hibah	Nasional
	2.1 Kampanye publik akan bahaya pencemaran, terutama dari kendaraan tugas berat terkait (terutama yang bermesin diesel) dan penggunaan bahan bakar yang tidak memenuhi baku mutu emisi terkini					2022				Dana hibah

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Kegiatan 2: Diesel Leapfrogging campaign				2022				Dana hibah	Nasional	
<p>Nama Pemangku Kepentingan: KEMITRAAN KOTA HIJAU</p> <p>TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN</p> <p>Nama Program: Partisipasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</p>										
Nama Kegiatan 1: Kampanye Kota Hijau	1.1 Output Kegiatan: Pembuatan Indeks Kota Hijau								Indonesia	
	1.2 Output Kegiatan: Penerbitan Buku tentang Kota Hijau								Jakarta	
	1.3 Output Kegiatan: Diskusi daring per bulan								Jakarta	
Nama Kegiatan 2: Penambahan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	2.1 Output Kegiatan: Fasilitasi Pemda dan CSR untuk pembangunan Taman Baru								Kota/Kabupaten	
	2.2 Output Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan RTH Berbasis Masyarakat dan Pemda								Kota/Kabupaten	
<p>Nama Pemangku Kepentingan: Ayo ke Taman</p> <p>TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN</p> <p>Indikator 11.2.1.(a) Proporsi populasi yang mendapat akses yang nyaman pada transportasi publik</p> <p>Nama Program: Remote Sensing Testing & Diesel leapfrogging campaign</p>										
Nama Kegiatan 1: Remote Sensing Testing	1.1 Mengetahui emisi nyata (real-world emission) dari armada kendaraan yang beroperasi (in-use) dengan fokus parameter pencemar udara NOx, CO, HC, Partikulat di kawasan Jabodetabek		2020	2021					Dana hibah	Jabodetabek
	1.2 Rekomendasi untuk pengetatan standar emisi kendaraan, baik kendaraan tipe baru maupun kendaraan yang beroperasi (in-use)			2021					Dana hibah	Nasional
	2.1 Kampanye publik akan bahaya pencemaran, terutama dari kendaraan tugas berat terkait (terutama yang bermesin diesel) dan penggunaan bahan bakar yang tidak memenuhi baku mutu emisi terkini				2022				Dana hibah	Nasional

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Kegiatan 2: Diesel ceaprogging campaign 2.2 Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan standar emisi khususnya untuk kendaraan bermesin diesel dan juga perbaikan kualitas bahan bakar dengan mengacu kepada standar terkini (Kendaraan listrik maupun standar Euro VI)				2022				Dana hibah	Nasional	
Indikator 11.4.1.(a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)										
Indikator 11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah yang baik										
Nama Program: BebasSampah.id										
Nama Kegiatan 1: Fitur 'Asset'	1.1 Output Kegiatan Mendukung gaya hidup pilah sampah masyarakat dengan mempromosikan pengelola sampah berbasis masyarakat sektor semi-formal dan informal untuk dapat mengelola sampah yang telah terpilah oleh masyarakat sebagai bahan baku dalam rangka mendukung ketercapaian pengurangan dan penanganan sampah tahunan menuju target pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018	unit	50	50	50	50	50	IDR 50,000,000 /tahun	dana hibah, sponsorship	nasional
Nama Kegiatan 2: Fitur 'Index'	2.1 Output Kegiatan Menghimpun, mempublikasikan, serta mengukur data terkait sistem tata kelola persampahan di tingkat kabupaten/kota menggunakan metodologi Zero Waste Index dari Atiq Uz Zaman melalui data pengelolaan sampah oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah dalam rangka mendukung ketercapaian pengurangan dan penanganan sampah tahunan menuju target pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018	persentase	10	10	10	10	10	IDR 60,000,000 /tahun	dana hibah, sponsorship	Nasional
Indikator 11.6.1.(b) Persentase sampah nasional yang tertangani dengan pengelolaan yang baik										
Nama Program: BebasSampah.id										
Nama Kegiatan 1: Fitur 'Asset'	1.1 Output Kegiatan Mendukung gaya hidup pilah sampah masyarakat dengan mempromosikan pengelola sampah berbasis masyarakat sektor semi-formal dan informal untuk dapat mengelola sampah yang telah terpilah oleh masyarakat sebagai bahan baku dalam rangka mendukung ketercapaian pengurangan dan penanganan sampah tahunan menuju target pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018	unit	50	50	50	50	50	IDR 50,000,000 / year	dana hibah, sponsorship	Nasional

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan 2: Fitur 'Index'	2.1 Output Kegiatan Menghimpun, mempublikasikan, serta mengukur data terkait sistem tata kelola persampahan di tingkat kabupaten/kota menggunakan metodologi Zero Waste Index dari Atiq Uz Zaman melalui data pengelolaan sampah oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah dalam rangka mendukung ketercapaian pengurangan dan penanganan sampah tahunan menuju target pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018	persentase	10	10	10	10	10	IDR 60,000,000 / year	dana hibah, sponsorship	nasional
Indikator 11.6.2.(b) Indeks kualitas udara										
Nama Kegiatan 2: Pemetaan Jenis Pohon di Ruang Terbuka Hijau	2.1 Konservasi Jenis Pohon Lokal Perkotaan	jumlah jenis pohon								Kota Metropolitan & Kota Besar
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN										
Nama Kegiatan 1: Kampanye Kota Hijau	1.1 Output Kegiatan: Pembuatan Indeks Kota Hijau									Indonesia
	1.2 Output Kegiatan: Penerbitan Buku tentang Kota Hijau									Jakarta
	1.3 Output Kegiatan: Diskusi daring per bulan									Jakarta
Nama Kegiatan 2: Penambahan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	2.1 Output Kegiatan: Fasilitasi Pemda dan CSR untuk pembangunan Taman Baru									Kota/Kabupaten
	2.2 Output Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan RTH Berbasis Masyarakat dan Pemda									Kota/Kabupaten
Nama Program:										
Aktivasi Ruang Terbuka	1.1 Mengajak publik (dari beragam usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas) untuk memanfaatkan ruang terbuka perkotaan	jumlah orang	-	50	100	1000	2000			Jakarta
	1.2 Keterlibatan beragam komunitas (usia, jenis kelamin, penyandang disabilitas) untuk memanfaatkan ruang terbuka perkotaan	jumlah komunitas	-							Jakarta
Kampanye Ruang Terbuka Perkotaan untuk Semua	2.1 Peningkatan Kesadaran Pentingnya Ruang Terbuka Perkotaan untuk Semua	jumlah orang	5000	500	500	500	500			Nasional
Edukasi Alam di Ruang Terbuka Perkotaan	1.1 Peningkatan Kesadaran terhadap keberadaan alam dan keanekaragaman hayati perkotaan	jumlah orang	50	100	200	500	1000			Jakarta
Nama Pemangku Kepentingan: Greeneration Foundation										
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN										
Nama Program: BebasSampah.id										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan 1: Fitur 'Asset'	1.1 Output Kegiatan Mendukung gaya hidup pilah sampah masyarakat dengan mempromosikan pengelola sampah berbasis masyarakat sektor semi-formal dan informal untuk dapat mengelola sampah yang telah terpilah oleh masyarakat sebagai bahan baku dalam rangka mendukung ketercapaian pengurangan dan penanganan sampah tahunan menuju target pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018	unit	50	50	50	50	50	IDR 50,000,000 / tahun	dana hibah, sponsorship	nasional
Nama Kegiatan 2: Fitur 'Index'	2.1 Output Kegiatan Menghimpun, mempublikasikan, serta mengukur data terkait sistem tata kelola persampahan di tingkat kabupaten/kota menggunakan metodologi Zero Waste Index dari Atiq Uz Zaman melalui data pengelolaan sampah oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah dalam rangka mendukung ketercapaian pengurangan dan penanganan sampah tahunan menuju target pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018	persentase	10	10	10	10	10	IDR 60,000,000 / tahun	dana hibah, sponsorship	Nasional
Indikator 11.6.1.(b) 'Persentase sampah nasional yang tertangani dengan pengelolaan yang baik										
Nama Program: BebasSampah.id										
Nama Kegiatan 1: Fitur 'Asset'	1.1 Output Kegiatan Mendukung gaya hidup pilah sampah masyarakat dengan mempromosikan pengelola sampah berbasis masyarakat sektor semi-formal dan informal untuk dapat mengelola sampah yang telah terpilah oleh masyarakat sebagai bahan baku dalam rangka mendukung ketercapaian pengurangan dan penanganan sampah tahunan menuju target pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018	unit	50	50	50	50	50	IDR 50,000,000 / year	dana hibah, sponsorship	Nasional
Nama Kegiatan 2: Fitur 'Index'	2.1 Output Kegiatan Menghimpun, mempublikasikan, serta mengukur data terkait sistem tata kelola persampahan di tingkat kabupaten/kota menggunakan metodologi Zero Waste Index dari Atiq Uz Zaman melalui data pengelolaan sampah oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah dalam rangka mendukung ketercapaian pengurangan dan penanganan sampah tahunan menuju target pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018	persentase	10	10	10	10	10	IDR 60,000,000 / year	dana hibah, sponsorship	nasional

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Pemangku Kepentingan: Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)										
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN										
Indikator SDGs: 1.3.1 (a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan										
Nama Program:										
Pelatihan jaminan sosial untuk buruh di sektor formal dan informal	1.1 Jumlah pekerja/buruh yang terlibat dalam kegiatan	Orang	300	600	900	1800	3600	Partner KSBSI	45Kota/Kabupaten	
	1.2 Jumlah Kota/Kabupaten yang dijangkau dalam kegiatan Pelatihan	Kota/Kabupaten	9	18	27	36	45			
	1.3 Jumlah buruh yang memahami peraturan tentang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	Orang	600	1.200	1.800	3.600	7.200			
Kampanye untuk meningkatkan kesadaran buruh akan manfaat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	2.1 Jumlah leaflet yang didistribusikan	Satuan	12.000	24.000	74.000	124.000	174.000	Partner KSBSI	45 Kota/Kabupaten	
	2.2 Jumlah Kota/Kabupaten yang dijangkau dalam kegiatan pelatihan	Kota/Kabupaten	9	18	27	36	45			
	2.3 Jumlah buruh yang memahami manfaat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	Orang	12.000	24.000	74.000	124.000	174.000			
TUJUAN 13 MENGAMBIL TUJUAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA										
Indikator 13.3.1 (a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup										
Kegiatan 4: Mainstream isu climate change dalam setiap pelatihan organisasi	1.1 Jumlah pelatihan yang membahas isu CC	Orang	300	600	900	1800	3600	\$ 264.000.000	Partner KSBSI	45Kota/Kabupaten
	1.2 Jumlah buruh yang terinfo CC an mengenal kebijakan2 yang ada	Kota/ Kabupaten	9	18	27	36	45			
Kegiatan 5: Kampanye perubahan iklim dan Transisi yang Adil dan dialogue dengan pengusaha	2.1 Jumlah material yang dibagikan	Satuan	12.000	24.000	74.000	124.000	174.000	90.750.000	Partner KSBSI	45 Kota/Kabupaten
	2.2 Jumlah kab/kota dengan buruh/masyarakat yang mengenal konsep CC dan Transisi yang adil	Kota/ Kabupaten	9	18	27	36	45			
	2.3. Jumlah perusahaan yang berdialog dan bersiap dengan konsep pengurangan karbon dan konsep transisi yang adil	satuan perusahaan	0	1	5	10	15			
Indikator SDGs: 13.3.2 Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi, mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan										
Nama Program: Kampanye Perubahan Iklim										
Mainstream isu climate change dalam setiap pelatihan organisasi	1.1 Jumlah pelatihan yang membahas isu CC	Orang	300	600	900	1800	3600	Rp 264.000.000	Partner KSBSI	45Kota/Kabupaten
	1.2 Jumlah buruh yang terinfo CC an mengenal kebijakan2 yang ada	Kota/Kabupaten	9	18	27	36	45			
Kampanye perubahan iklim dan Transisi yang Adil dan dialogue dengan pengusaha	2.1 Jumlah material yang dibagikan	Satuan	12.000	24.000	74.000	124.000	174.000	90.750.000	Partner KSBSI	45 Kota/Kabupaten
	2.2 Jumlah kab/kota dengan buruh/masyarakat yang mengenal konsep CC dan Transisi yang adil	Kota/Kabupaten	9	18	27	36	45			
	2.3. Jumlah perusahaan yang berdialog dan bersiap dengan konsep pengurangan karbon dan konsep transisi yang adil	satuan perusahaan	0	1	5	10	15			
Nama Pemangku Kepentingan: LPBI NU										
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN										
Kode dan Nama Indikator SDGs 1.5.3* Rencana dan implementasi strategi/rencana nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
PROGRAM: Penguatan Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Covid - 19 dan Bencana Alam (PKMM)										
Kegiatan : Sosialisasi Dokumen Pendukung	a. Jumlah peserta Sosialisasi Dokumen Katalog Bantuan dan SOP Relawan	orang		100	100	100		Swadaya	Seluruh Indonesia	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten melalui metode daring
	a. Jumlah peserta Sosialisasi Dokumen PSEA	orang		300	300	300		Swadaya	Seluruh Indonesia	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten melalui metode daring
Program: Aksi Kemanusiaan Bencana di Indonesia							30000			
Kegiatan: Assesment dan Penyusunan Rencana Penanganan Darurat	Jumlah dokumen rencana operasi darurat bencana	dokumen	60	60	60	60		Swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah
	Koordinasi Relawan dan stakeholder di daerah terdampak bencana	kabupaten	60	60	60	60		Swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah
Kegiatan : Mendirikan Posko Kebencanaan	Jumlah Posko yang didirikan di lokasi bencana	unit	100	100	100	100		swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah
Kegiatan: Distribusi Bantuan Kemanusiaan (Makanan, Family Kits, Hygiene Kits, School Kits dan Psikososial)	Jumlah Bantuan yang disalurkan	unit posko	100	100	100	100		swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Kegiatan: Penyediaan Air Bersih dan sanitasi	Jumlah Penyediaan Air Bersih dan sanitasi	unit posko	100	100	100	100	swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah
Kegiatan: Pelayanan medis	Jumlah Pelayanan Medis	unit posko	100	100	100	100	swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah
Kegiatan: Penyusunan Dokumen Rencana RR (Pemulihan)	Jumlah dokumen rencana operasi darurat bencana	dokumen	60	60	60	60	Swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah
Program: Aksi Kemanusiaan Covid - 19						5000			
Kegiatan: Pemberian bantuan masker	Jumlah penerima bantuan	unit		100000	100000		Donatur	Seluruh Indonesia	LPBI NU
Kegiatan: Pemberian bantuan Handsanitizer	Jumlah penerima bantuan	unit		100000	100000		Donatur	Seluruh Indonesia	LPBI NU
Kegiatan: Pemberian bantuan APD Non Medis	Jumlah penerima bantuan	orang		100000	100000		Donatur	Seluruh Indonesia	LPBI NU
Kegiatan: Penyemprotan Disinfektan di rumah ibadah, sekolah dan perkantoran	Jumlah Kegiatan	act		1000	1000		Donatur	Seluruh Indonesia	LPBI NU
Kegiatan: Pemberian Sembako Bantuan Covid	Jumlah Sembako	paket		1000	1000		Donatur	Seluruh Indonesia	LPBI NU
Kegiatan: Pemberian Bantuan Bencana banjir	Jumlah Bantuan yang disalurkan	paket		1000	1000		Donatur	Seluruh Indonesia	LPBI NU
Kegiatan: Pemberian bantuan Suplay Air Bersih	Jumlah Bantuan yang disalurkan	unit		200	200		Donatur	20 daerah di Jawa Tengah dan	LPBI NU
Program: Sosialisasi & Kampanye Publik									
Kegiatan: Webinar LPBI NU (Isu Penanggulangan Bencana Alam dan	Jumlah webinar	webinar		24	24	0	Swadaya	Daring	LPBI NU
	Jumlah Peserta	orang		100	100		Swadaya	Daring	LPBI NU
Kegiatan: Talkshow daring BSN LPBI NU (Isu Sampah, Limbah Medis dan	Jumlah talkshow daring	talkshow		24	24	0	Swadaya	Daring	LPBI NU
	Jumlah Peserta	orang		100	100		Swadaya	Daring	LPBI NU
Kegiatan: Pelatihan Pengelolaan Sampah	Jumlah Pelatihan daring	Pelatihan		15	15		Swadaya	daring	LPBI NU

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
dan Pembuatan Produk Ramah	Jumlah Peserta	orang		100	100		Swadaya	Daring	LPBI NU	
Kegiatan : Sosialisasi, Kampanye dan Sharing Informasi melalui digital	Jumlah Penerima Manfaat	orang	20000	27000	41500	45000	Swadaya	LPBI NU Pusat	LPBI NU	
	Jumlah Media Digital (Website, Youtube Warta LPBI NU, IG LPBI NU, IG BSN LPBI NU, Twitter LPBI NU, FB LPBI NU, FB BSN LPBI NU, Website BSN LPBI NU)	unit	8	8	8	8	Swadaya	LPBI NU Pusat	LPBI NU	
	Jumlah Konten		5000	7000	10000	20000	Swadaya	LPBI NU Pusat	LPBI NU	
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
PROGRAM 1 : PENYEDIAAN AIR MINUM LAYAK										
INDIKATOR SDGs : 6.1.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak										
Kegiatan 1: Penyediaan air minum layak	1.1 jumlah PC MNU yang memproduksi air minum layak	unit	-	-	50	50	2000	III- Belum tersedia sumber	Nasional. Piloting : Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah	Muslimat NU
PROGRAM 2 : PEMBUATAN KERAN AIR BERSIH DAN PENYEDIAAN SABUN DI PAUD MUSLIMAT NU										
INDIKATOR SDGs : 6.2.1 Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun										
6.2.1 (a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air										
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Air Bersih dan Sabun di Setiap PAUD Muslimat NU	1.1 jumlah unit PAUD	unit	-	-	8.000	8.000	12.000	III- Belum tersedia sumber	Nasional = 34 provinsi	Muslimat NU
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN										
Indikator 11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah yang baik										
Program: Pengelolaan Sampah dan bank sampah berbasis masyarakat dan pesantren										
Kegiatan: Pembentukan bank sampah	Jumlah bank sampah yang terbentuk	unit						Swadaya		LPBI NU Pusat dan kab, LAZISNU
Kegiatan: Pelatihan manajemen bank sampah berbasis perbankan										LPBI NU Pusat dan kab, LAZISNU
Kegiatan: Pelatihan bisnis daur ulang sampah										LPBI NU Pusat dan kab, LAZISNU
Program: Pesantren Hijau										
Kegiatan: Pelatihan pengelolaan sampah										LPBI NU Pusat dan kab, LAZISNU
Kegiatan: Konservasi Air										LPBI NU Pusat dan kab, LAZISNU
Kegiatan: Konservasi Energi										LPBI NU Pusat dan kab, LAZISNU
Indikator 11.6.1.(b) Persentase sampah nasional yang tertangani dengan pengelolaan yang baik										
Program: Pengelolaan Sampah dan Pembentukan Bank Sampah Berbasis Masyarakat, Pesantren dan Masjid										
Kegiatan : Sosialisasi Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat dan pesantren dengan prinsip 3R	a. Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing Sosialisasi	orang	50	50	50	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pematang Siantar, Maluku Utara	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU
	b. Jumlah Kabupaten yang telah mendapatkan Sosialisasi	kabupaten	30	30	30			Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pematang Siantar, Maluku Utara	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU
	c. Jumlah Pesantren, sekolah dan komunitas yang mendapatkan sosialisasi	kabupaten	100	250	100			Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pematang Siantar, Maluku Utara	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Kegiatan: Pembentukan Bank Sampah	a. Jumlah bank sampah yang terbentuk	unit	50	50	50	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pematang Siantar, Maluku Utara	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU
	b. Jumlah nasabah bank sampah di masing-masing bank sampah	orang	50	50	50			Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pematang Siantar, Maluku Utara	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU
	c. jumlah reduksi sampah	kilo/minggu	2.500	2.500	2.500			Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pematang Siantar, Maluku Utara	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU
	d. Jumlah manfaat ekonomi yang diperoleh	rupiah/minggu	2.500.000	2.500.000	2.500.000			Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pematang Siantar, Maluku Utara	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU
Kegiatan: Sedekah Sampah Berbasis Masjid An Nahdliah	Jumlah Pengelola Program	orang	-	-	25	50		Swadaya	DKI Jakarta & Pulau Jawa	LPBI NU Pusat - Masjid An Nahdloh- TKN PSL - MUI
	Jumlah Mitra Kerja Sama	lembaga	-	-	10	20		Swadaya	DKI Jakarta & Pulau Jawa	LPBI NU Pusat - Masjid An Nahdloh- TKN PSL - MUI _- Aplikasi Duitin, Danone Grab, Masjid Pilot Project
	Jumlah Sosialisasi Media Kampanye (Khutbah Jum'at, Medsos, Youtube, WAG, E-Flyer)	Jenis	-	-	100	200		Swadaya	DKI Jakarta & Pulau Jawa	LPBI NU Pusat - Masjid An Nahdloh- TKN PSL - MUI
	Jumlah Pembentukan Masjid Binaan untuk Program Sedekah Sampah Berbasis Masjid	Masjid	-	-	20	50		Swadaya	DKI Jakarta & Pulau Jawa	LPBI NU Pusat - Masjid An Nahdloh- TKN PSL - MUI
Kegiatan: Warung Lestari (Sosialisasi Pengganti Sedotan Plastik ke Warung-Warung kecil)	a. Jumlah Warung	Warung	-	-	10	25	10.000.000	Swadaya, Evoware dan Carbonethics	DKI Jakarta & Pulau Jawa	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU - Evoware & Carbonethics
Kegiatan : Bergabung dalam Forum NPAP Indonesia (National Plastic Action Partnership)	b. Jumlah Kolaborasi multipihak yang bertujuan untuk mengurangi 70% sampah plastik ke lautan di Indonesia pada tahun 2025	lembaga	-	-	125	200		Swadaya	Seluruh Indonesia	LPBI NU - NPAP (9 Kementerian, 4 pemerintah daerah, 12 perusahaan, 100 sektor publik, swasta dan masyarakat sipil)
Program: Pesantren Hijau										
Kegiatan : mainstreaming pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berbasis pesantren	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang	75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	Jumlah Pesantren yang mendapatkan sosialisasi	unit	30	40	50			Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
Kegiatan: Pelatihan Pengelolaan sampah (Komposting, Daur Ulang & Ecobricks)	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang	75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	Jumlah Pesantren yang mendapatkan pelatihan	unit	30	40	50			Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
Kegiatan: Pelatihan Konservasi Air (Pemanen Air Hujan, Pengelolaan Limbah Air Wudhu & Mandi, Keran Hemat Air)	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang	75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	Jumlah Pesantren yang mendapatkan pelatihan	unit	30	40	50			Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Kegiatan: Pelatihan Konservasi Energi (Penggunaan Lampu LED & SOP Penggunaan energi)	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang	75	75	75	75	Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat	
	Jumlah Pesantren yang mendapatkan pelatihan	unit	30	40	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat	
Kegiatan: Pelatihan Hidroponik dan Aquaponik	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang	75	75	75	75	Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat	
	Jumlah Pesantren yang mendapatkan pelatihan	unit	30	40	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat	
Program: Sosialisasi & Kampanye Publik										
Kegiatan: Talkshow daring BSN LPBI NU (Isu Sampah, Limbah Medis dan	Jumlah talkshow daring	talkshow		24	24	0		Swadaya	Daring	LPBI NU
	Jumlah Peserta	orang	100	100				Swadaya	Daring	LPBI NU
Kegiatan : Pelatihan Pengelolaan Sampah dan Pembuatan Produk Ramah	Jumlah Pelatihan daring	Pelatihan		15	15			Swadaya	daring	LPBI NU
	Jumlah Peserta	orang	100	100				Swadaya	Daring	LPBI NU
Indikator 11.b.2* Persentase jumlah daerah yang memiliki dokumen strategi penanggulangan bencana (RPB) yang sesuai dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB)										
PROGRAM: Slogan Study Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam PRB dan dampak perubahan iklim										
Kegiatan: Pelatihan PRB	Jumlah peserta yang mendapat pelatihan PRB	orang	600	600	600	600		DFAT	Jateng (Kudus, Jepara); Sulsel (Barru,...)	LPBI NU Pusat dan kab
Kegiatan: Pelatihan Partisipasi Risk Assessment (PRA)										LPBI NU Pusat dan kab, LAZISNU
Kegiatan: Pendampingan penyusunan regulasi berbasis Kab/Kota dan Desa										LPBI NU Pusat dan kab, LAZISNU
Kegiatan: Pelatihan EWS										LPBI NU Pusat dan kab, LAZISNU
Kegiatan: Aksi PRB										LPBI NU Pusat dan kab, LAZISNU
Kegiatan: Adaptasi perubahan iklim										LPBI NU Pusat dan kab, LAZISNU
PROGRAM: Penguatan Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Covid - 19 dan Bencana Alam (PKMM)										
Kegiatan : Workshop & Pelatihan tentang PRB (Pelatihan Risiko Bencana, Pelatihan Koordinasi Lintas Sektor, Penyusunan Platform, Identifikasi Ancaman Bencana, Penyusunan SOP Tanggap Darurat saat Pandemi)	Jumlah peserta yang mendapat pelatihan	orang	31	31	31	31	10000	SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten (Metode Daring)
Kampanye Publik tentang Pencegahan Covid-19 , Vaksinasi dan Pengurangan Risiko Bencana di daerah target			960	960	960			SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
a. Sosialisasi materi Kampanye Publik & SOP Pencegahan Covid-19 melalui rumah ibadah	Sosialisasi di lakukan ke 19 (sembilan belas Rumah Ibadah di 112 RW di 18 Desa/Kelurahan, 3 (tiga) Provinsi, 8 Kabupaten/Kota	lembaga	-	960	960	960		SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
b. Pembuatan Poster & Banner Media kampanye	a. Jumlah Poster dengan 6 (enam) tema di 3 (tiga) Provinsi, 8 Kabupaten/Kota	eksemplar	-	0,944444444	20.160	-		SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
	b. Jumlah Banner dengan 6 (enam) temadi 3 (tiga) Provinsi, 8 Kabupaten/Kota	eksemplar	0,280555556	1.344			SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
Kegiatan : Pemanfaatan Fasilitas Pendukung untuk upaya Pencegahan Covid-19 Berbasis Masyarakat	Jumlah fasilitas Cuci Tangan Portable di 112 RW di 18 Desa/Kelurahan, 8 Kabupaten/Kota, 3 (tiga) Provinsi	unit			748		SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
	Jumlah fasilitas Karantina di 112 RW di 18 Desa/Kelurahan, 8 Kabupaten/Kota, 3 (tiga) Provinsi	Unit			112		SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
	Jumlah Thermo Gun sebagai penunjang kegiatan Pemeriksaan Rutin Kesehatan masyarakat di 112 RW di 18 Desa/Kelurahan, 8 Kabupaten/Kota, 3 (tiga) Provinsi	Unit			363		SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
	Jumlah Pemeriksaan Rutin Kesehatan Masyarakat di 112 RW di 18 Desa/Kelurahan, 8 Kabupaten/Kota, 3 (tiga) Provinsi	Dokumen/orang		960			SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
Kegiatan : Penyediaan dan Dstribusi Paket Bantuan kepada Kelompok masyarakat terdampak covid-19, termasuk kelompok rentan	Jumlah penerima bantuan sebanyak 37% dari total KK di 112 RW di 18 Desa/Kelurahan, 8 Kabupaten/Kota, 3 (tiga) Provinsi melalui mekanisme CVA (e- voucher dan perekaman wajah via smartphone) dari fintech duihape. Data seleksi diperoleh dari data up date menggunakan geospasial	KK		929		929	SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
Kegiatan : Pelatihan Teknik Tanggap Darurat Bencana	Jumlah peserta pelatihan yang terlibat	orang	110	110	110	110	SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
Kegiatan: Monitoring Implementasi Program	a. Jumlah kelompok Kerja di daerah program	lembaga			112	112	SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
	b. Jumlah Masyarakat Penerima Manfaat	orang	0	929	929		SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	c. Jumlah Pemerintah Desa/Kelurahan	lembaga	18	18	18		SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten	
	d. Jumlah tim daerah pelaksana Program	orang	24	24	24		SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten	
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana	a. Jumlah peserta yang terlibat dalam Pelatihan Manajemen Logistik	orang		15	50	50	Swadaya & IMC	Jakarta	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten melalui metode daring	
	b. Jumlah peserta yang terlibat dalam Pelatihan Manajemen Gudang	orang	15	50	50		Swadaya & IMC	Jakarta	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten melalui metode daring	
	c. Jumlah peserta yang terlibat dalam Pelatihan Desain Program	orang	15	50	50		Swadaya & IMC	Jakarta	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten melalui metode daring	
Kegiatan : Pembuatan Dokumen Pendukung	a. Jumlah dokumen untuk pelaksanaan operasional Tanggap Darurat (SOP Relawan, Buku saku Relawan, Katalog Bantuan, SOP Manajemen Gudang, SOP Logistik, data relawan & kapasitas)	dokumen		10	10		Swadaya & IMC	Jakarta	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten melalui metode daring	
	b. Jumlah dokumen untuk penunjang pelaksanaan program (dokumen PSEA (Protection Against Sexual Exploitation and Abuse) : Kode Etik, Pakta Integritas, Kontrak, Mekanisme Umpan balik, Mekanisme Penyelidikan Pelanggaran, Pelaporan dan Rujukan)	dokumen	5	5			Swadaya dan CRS (catholic Relief Services)	Jakarta	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten melalui metode daring	
Kegiatan : Sosialisasi Dokumen Pendukung	a. Jumlah peserta Sosialisasi Dokumen Katalog Bantuan dan SOP Relawan	orang		100	100	100	Swadaya	Seluruh Indonesia	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten melalui metode daring	
	a. Jumlah peserta Sosialisasi Dokumen PSEA	orang	300	300	300		Swadaya	Seluruh Indonesia	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten melalui metode daring	
Program: Satuan Pendidikan Aman Bencana & Perubahan Iklim						15000				
Kegiatan: Sosialisasi Sekolah dan Madrasah Aman Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing sekolah/madrasah	orang	100	100	100	100	Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat	
	Jumlah sekolah/madrasah yang mendapatkan sosialisasi	kabupaten	30	30	30		Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat	
Kegiatan: Pelatihan PRB - API	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing sekolah/madrasah	orang	30	30	30	30	Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat	

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Jumlah sekolah/madrasah yang mendapatkan sosialisasi	kabupaten	50	50	50		Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat	
Kegiatan: Penyusunan Rencana PRB - API Sekolah dan Madrasah	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing sekolah/madrasah	orang	30	30	30	30	Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat	
	Jumlah sekolah/madrasah yang mendapatkan sosialisasi	kabupaten	50	50	50		Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat	
Kegiatan: Penyusunan SOP dan Mekanisme Penanganan Bencana	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing sekolah/madrasah	orang	30	30	30	30	Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat	
	Jumlah sekolah/madrasah yang mendapatkan sosialisasi	kabupaten	50	50	50		Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat	
Kegiatan: Simulasi Penanganan Bencana di Sekolah dan Madrasah	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing sekolah/madrasah	orang	150	150	150	150	Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat	
	Jumlah sekolah/madrasah yang mendapatkan sosialisasi	kabupaten	50	50	50		Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat	
Program: Aksi Kemanusiaan Bencana di Indonesia						30000				
Kegiatan: Assesment dan Penyusunan Rencana Penanganan Darurat	Jumlah dokumen rencana operasi darurat bencana	dokumen	60	60	60	60	Swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah	
	Koordinasi Relawan dan stakeholder di daerah terdampak bencana	kabupaten	60	60	60		Swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah	

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Kegiatan : Mendirikan Posko Kebencanaan	Jumlah Posko yang didirikan di lokasi bencana	unit	100	100	100	100	swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah	
Kegiatan: Distribusi Bantuan Kemanusiaan (Makanan, Family Kits, Hygiene Kits, School Kits dan Psikososial)	Jumlah Bantuan yang disalurkan	unit posko	100	100	100	100	swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah	
Kegiatan: Penyediaan Air Bersih dan sanitasi	Jumlah Penyediaan Air Bersih dan sanitasi	unit posko	100	100	100	100	swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah	
Kegiatan: Pelayanan medis	Jumlah Pelayanan Medis	unit posko	100	100	100	100	swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah	
Kegiatan: Pendampingan pembangunan sekolah darurat, hunian darurat dan livelihood	Tersedianya hunian darurat, sekolah darurat dan livelihood	orang	1000	1000			Child Fund	Palu, Sigi dan Donggala	LPBINU Pusat, LPBI NU Sulawesi Tengah, LPBI NU Palu, LPBI NU Sigi dan LPBI NU Donggala	

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Kegiatan: Penyusunan Dokumen Rencana RR (Pemulihan)	Jumlah dokumen rencana operasi darurat bencana	dokumen	60	60	60	60	Swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah	
Program: Sosialisasi & Kampanye Publik										
Kegiatan: Webinar LPBI NU (Isu Penanggulangan Bencana Alam dan	Jumlah webinar	webinar		24	24	0	Swadaya	Daring		LPBI NU
	Jumlah Peserta Webinar	orang	100	100			Swadaya	Daring	LPBI NU	
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB										
Indikator 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.										
Program: Pengelolaan Sampah dan Pembentukan Bank Sampah Berbasis Masyarakat, Pesantren dan Masjid										
							15000	Swadaya		
Kegiatan : Sosialisasi Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat dan pesantren dengan prinsip 3R	a. Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing Sosialisasi	orang	50	50	50	50	Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pematang Siantar, Maluku Utara	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU	
	b. Jumlah Kabupaten yang telah mendapatkan Sosialisasi	kabupaten	20	30	30	30	Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pematang Siantar, Maluku Utara	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU	
	c. Jumlah Pesantren, sekolah dan komunitas yang mendapatkan sosialisasi	kabupaten	100	100	250	100	Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pematang Siantar, Maluku Utara	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU	
Kegiatan: Pembentukan Bank Sampah	a. Jumlah bank sampah yang terbentuk	unit	50	50	50	50	Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pematang Siantar, Maluku Utara	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU	
	b. Jumlah nasabah bank sampah di masing-masing bank sampah	orang	50	50	50	50	Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pematang Siantar, Maluku Utara	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU	
	c. jumlah reduksi sampah	kilo/minggu	2.500	2.500	2.500	2.500	Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pematang Siantar, Maluku Utara	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU	
	d. Jumlah manfaat ekonomi yang diperoleh	rupiah/minggu	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pematang Siantar, Maluku Utara	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU	
Kegiatan: Sedekah Sampah Berbasis Masjid An Nahdiah	Jumlah Pengelola Program	orang	-	-	25	50	Swadaya	DKI Jakarta & Pulau Jawa	LPBI NU Pusat - Masjid An Nahdloh- TKN PSL - MUI	

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Mitra Kerja Sama	lembaga	-	-	10	20		Swadaya	DKI Jakarta & Pulau Jawa	LPBI NU Pusat - Masjid An Nahdloh- TKN PSL - MUI _- Aplikasi Duitin, Danone Grab, Masjid Pilot Project
	Sosialisasi Media Kampanye (Khutbah Jum'at, Medsos, Youtube, WAG, E-Flyer)	Jenis	-	-	100	200		Swadaya	DKI Jakarta & Pulau Jawa	LPBI NU Pusat - Masjid An Nahdloh- TKN PSL - MUI
	Pembentukan Masjid Binaan untuk Program Sedekah Sampah Berbasis Masjid	Masjid	-	-	20	50		Swadaya	DKI Jakarta & Pulau Jawa	LPBI NU Pusat - Masjid An Nahdloh- TKN PSL - MUI
Kegiatan : Warung Lestari (Sosialisasi Pengganti Sedotan Plastik ke Warung-Warung kecil)	a. Jumlah Warung	Warung	-	-	10	25	10.000.000	Swadaya, Ewaware dan Carbonethics	DKI Jakarta & Pulau Jawa	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU - Ewaware & Carbonethics
Kegiatan : Bergabung dalam Forum NPAP Indonesia (National Plastic Action Partnership)	Kolaborasi multipihak yang bertujuan untuk mengurangi 70% sampah plastik ke lautan di Indonesia pada tahun 2025	lembaga	-	-	125	200		Swadaya	Seluruh Indonesia	LPBI NU - NPAP (9 Kementerian, 4 pemerintah daerah, 12 perusahaan, 100 sektor publik, swasta dan masyarakat sipil)
Program: Pesantren Hijau										
Kegiatan : mainstreaming pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berbasis pesantren	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang	75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	Jumlah Pesantren yang mendapatkan sosialisasi	unit	30	30	40	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
Kegiatan : Pelatihan Pengelolaan sampah (Komposting, Daur Ulang & Ecobricks)	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang	75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	Jumlah Pesantren yang mendapatkan pelatihan	unit	30	30	40	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
Kegiatan : Pelatihan Konservasi Air (Pemanen Air Hujan, Pengelolaan Limbah Air Wudhu & Mandi, Keran Hemat Air)	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang	75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	Jumlah Pesantren yang mendapatkan pelatihan	unit	30	30	40	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
Kegiatan : Pelatihan Konservasi Energi (Penggunaan Lampu LED & SOP Penggunaan energi)	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang	75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	Jumlah Pesantren yang mendapatkan pelatihan	unit	30	30	40	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
Kegiatan : Pelatihan Hidroponik dan Aquaponik	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang	75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	Jumlah Pesantren yang mendapatkan pelatihan	unit	30	30	40	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
TUJUAN 13 MENGAMBIL TUJUAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA										
Indikator 13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang										
PROGRAM: Penguatan Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Covid - 19 dan Bencana Alam (PKMM)							10.000,00	SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten (Metode Daring)

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Kegiatan : Workshop & Pelatihan tentang PRB (Pelatihan Risiko Bencana, Pelatihan Koordinasi Lintas Sektor, Penyusunan Platform, Identifikasi Ancaman Bencana, Penyusunan SOP Tanggap Darurat saat Pandemi)	Jumlah peserta yang mendapat pelatihan	orang	31	31	31	31		Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten (Metode Daring)
	Jumlah Peserta yang melakukan Kampanye Publik tentang Pencegahan Covid-19 , Vaksinasi dan Pengurangan Risiko Bencana di daerah target	orang		960	960	960	SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
a. Sosialisasi materi Kampanye Publik & SOP Pencegahan Covid-19 melalui rumah ibadah	Jumlah Sosialisasi yang di lakukan ke 19 (sembilan belas Rumah Ibadah di 112 RW di 18 Desa/Kelurahan, 3 (tiga) Provinsi, 8 Kabupaten/Kota	lembaga	-	960	960	960	SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
b. Pembuatan Poster & Banner Media kampanye	a. Jumlah Poster dengan 6 (enam) tema di 3 (tiga) Provinsi, 8 Kabupaten/Kota	eksemplar	-	20.160	20.160	-	SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
	b. Jumlah Banner dengan 6 (enam) temadi 3 (tiga) Provinsi, 8 Kabupaten/Kota	eksemplar	-	1.344	1.344	-	SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
Kegiatan : Pemanfaatan Fasilitas Pendukung untuk upaya Pencegahan Covid-19 Berbasis Masyarakat	Jumlah fasilitas Cuci Tangan Portable di 112 RW di 18 Desa/Kelurahan, 8 Kabupaten/Kota, 3 (tiga) Provinsi	unit	-	-	748	-	SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
	Jumlah fasilitas Karantina di 112 RW di 18 Desa/Kelurahan, 8 Kabupaten/Kota, 3 (tiga) Provinsi	Unit	-	-	112	-	SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
	Jumlah Thermo Gun sebagai penunjang kegiatan Pemeriksaan Rutin Kesehatan masyarakat di 112 RW di 18 Desa/Kelurahan, 8 Kabupaten/Kota, 3 (tiga) Provinsi	Unit	-	-	363	-	SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
	Jumlah Pemeriksaan Rutin Kesehatan Masyarakat di 112 RW di 18 Desa/Kelurahan, 8 Kabupaten/Kota, 3 (tiga) Provinsi	Dokumen/orang	-	-	960	-	SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Kegiatan : Penyediaan dan Dstribusi Paket Bantuan kepada Kelompok masyarakat terdampak covid-19, termasuk kelompok rentan	Jumlah penerima bantuan sebanyak 37% dari total KK di 112 RW di 18 Desa/Kelurahan, 8 Kabupaten/Kota, 3 (tiga) Provinsi melalui mekanisme CVA (e- voucher dan perekaman wajah via smartphone) dari fintech duitthape. Data seleksi diperoleh dari data up date menggunakan geospasial	KK		929	929	-		SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
Kegiatan : Pelatihan Teknik Tanggap Darurat Bencana	Jumlah peserta pelatihan yang terlibat	orang	110	110	110	110		SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
Kegiatan: Monitoring Implementasi Program	a. Jumlah kelompok Kerja di daerah program	lembaga			112	112		SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
	b. Jumlah Masyarakat Penerima Manfaat	orang	-	-	929	929		SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
	c. Jumlah Pemerintah Desa/Kelurahan	lembaga		18	18	18		SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
	d. Jumlah tim daerah pelaksana Program	orang		24	24	24		SIAGA PALLADIUM	Jawa Timur (Bangil, Kota Kediri, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang), Bali (Buleleng) dan NTB (Lombok Barat)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana	a. Jumlah peserta yang terlibat dalam Pelatihan Manajemen Logistik	orang		15	50	50		Swadaya & IMC	Jakarta	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten melalui metode daring
	b. Jumlah peserta yang terlibat dalam Pelatihan Manajemen Gudang	orang		15	50	50		Swadaya & IMC	Jakarta	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten melalui metode daring
	c. Jumlah peserta yang terlibat dalam Pelatihan Desain Program	orang		15	50	50		Swadaya & IMC	Jakarta	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten melalui metode daring
Kegiatan : Pembuatan Dokumen Pendukung	a. Jumlah dokumen untuk pelaksanaan operasional Tanggap Darurat (SOP Relawan, Buku saku Relawan, Katalog Bantuan, SOP Manajemen Gudang, SOP Logistik, data relawan & kapasitas)	dokumen		10	10			Swadaya & IMC	Jakarta	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten melalui metode daring

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
	b. Jumlah dokumen untuk penunjang pelaksanaan program (dokumen PSEA (Protection Against Sexual Exploitation and Abuse) : Kode Etik, Pakta Integritas, Kontrak, Mekanisme Umpan balik, Mekanisme Penyelidikan Pelanggaran, Pelaporan dan Rujukan)	dokumen		5	5		Swadaya dan CRS (catholic Relief Services)	Jakarta	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten melalui metode daring
Kegiatan : Sosialisasi Dokumen Pendukung	a. Jumlah peserta Sosialisasi Dokumen Katalog Bantuan dan SOP Relawan	orang		100	100	100	Swadaya	Seluruh Indonesia	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten melalui metode daring
	a. Jumlah peserta Sosialisasi Dokumen PSEA	orang		300	300	300	Swadaya	Seluruh Indonesia	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten melalui metode daring
Program: Aksi Kemanusiaan Bencana di Indonesia						30000			
Kegiatan: Assesment dan Penyusunan Rencana Penanganan Darurat	Jumlah dokumen rencana operasi darurat bencana	dokumen	60	60	60	60	Swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah
	Jumlah Kabupaten yang melakukan koordinasi Relawan dan stakeholder di daerah terdampak bencana	kabupaten	60	60	60	60	Swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah
Kegiatan : Mendirikan Posko Kebencanaan	Jumlah Posko yang didirikan di lokasi bencana	unit	100	100	100	100	swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Kegiatan: Distribusi Bantuan Kemanusiaan (Makanan, Family Kits, Hygiene Kits, School Kits dan Psikososial)	Jumlah Bantuan yang disalurkan	unit posko	100	100	100	100	swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah
Kegiatan: Penyediaan Air Bersih dan sanitasi	Jumlah Penyediaan Air Bersih dan sanitasi	unit posko	100	100	100	100	swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah
Kegiatan: Pelayanan medis	Jumlah Pelayanan Medis	unit posko	100	100	100	100	swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah
Kegiatan: Pendampingan pembangunan sekolah darurat, hunian darurat dan livelihood	Tersedianya hunian darurat, sekolah darurat dan livelihood	orang	1.000	1.000			Child Fund	Palu, Sigi dan Donggala	LPBINU Pusat, LPBI NU Sulawesi Tengah, LPBI NU Palu, LPBI NU Sigi dan LPBI NU Donggala
Kegiatan: Penyusunan Dokumen Rencana RR (Pemulihan)	Jumlah dokumen rencana operasi darurat bencana	dokumen	60	60	60	60	Swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah
Indikator 13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications									
Program: Satuan Pendidikan Aman Bencana & Perubahan Iklim									
Kegiatan: Sosialisasi Sekolah dan Madrasah Aman Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing sekolah/madrasah	orang	100	100	100	100	Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat
	Jumlah sekolah/madrasah yang mendapatkan sosialisasi	kabupaten	30	30	30	30	Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Kegiatan: Pelatihan PRB - API	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing sekolah/madrasah	orang	30	30	30	30		Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat
	Jumlah sekolah/madrasah yang mendapatkan sosialisasi	kabupaten	50	50	50	50		Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat
Kegiatan: Penyusunan Rencana PRB - API Sekolah dan Madrasah	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing sekolah/madrasah	orang	30	30	30	30		Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat
	Jumlah sekolah/madrasah yang mendapatkan sosialisasi	kabupaten	50	50	50	50		Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat
Kegiatan: Penyusunan SOP dan Mekanisme Penanganan Bencana	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing sekolah/madrasah	orang	30	30	30	30		Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat
	Jumlah sekolah/madrasah yang mendapatkan sosialisasi	kabupaten	50	50	50	50		Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat
Kegiatan: Simulasi Penanganan Bencana di Sekolah dan Madrasah	Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing sekolah/madrasah	orang	150	150	150	150		Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat
	Jumlah sekolah/madrasah yang mendapatkan sosialisasi	kabupaten	50	50	50	50		Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN										
Indikator: 14.1.1(a) Indeks eutrofikasi pesisir dan (b) kepadatan sampah plastik terapung										
Indikator: 14.1.1(a) Presentase penurunan sampah terbuang ke laut										
Indikator: 14.a.1 Proporsi dari total pengeluaran untuk penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan										
Program: Bersih Sampah Laut							1500			
Kegiatan 1: Sosialisasi & Edukasi	1.1 Output Kegiatan Jumlah peserta yang terlibat sosialisasi di masing-masing kabupaten		0	0	100	100	Swadaya & Econusa	Pulau Jawa	LPBI NU Pusat	
	1.2 Output Kegiatan Jumlah kabupaten yang terlibat sosialisasi di masing-masing kabupaten		0	0	10	10	Swadaya & Econusa	Pulau Jawa	LPBI NU Pusat	
Kegiatan 2: Aksi Bersih Sampah Laut	2.1 Output Kegiatan Jumlah peserta yang terlibat aksi di masing-masing kabupaten	orang	0	0	50	50	Swadaya & Econusa	Pulau Jawa	LPBI NU Pusat	
	2.2 Output Kegiatan Jumlah kabupaten yang terlibat aksi di masing-masing kabupaten	kabupaten	0	0	10	10	Swadaya & Econusa	Pulau Jawa	LPBI NU Pusat	
Kegiatan 3: Pelatihan Pemanfaatan sampah laut melalui metode ecobricks ocean	3.1 Output Kegiatan Jumlah peserta yang terlibat pelatihan di masing-masing kabupaten	orang	0	50	50	50	Swadaya	Pulau Jawa	LPBI NU Pusat	

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
3.2 Output Kegiatan Jumlah kabupaten yang terlibat pelatihan di masing-masing kabupaten	kabupaten	3	3	3	3	Swadaya	Pulau Jawa	LPBI NU Pusat	
Nama Pemangku Kepentingan: Lakpesdam NU									
TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR									
9.c.1* Proporsi penduduk terlayani mobile broadband									
Program 2: Inklusi Desa Berbasis Digital									
Kegiatan 1: FGD Inklusi Sosial dan Desa Digital	1.1 Jumlah peserta yang mendapat pelatihan	Orang	20	20	20	5.000.000.000.000	K/L & Funding Agency	Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur (10 Desa)	Lakpesdam PBNU & Lakpesdam PCNU
Kegiatan 2: Pelatihan Inklusi Sosial		Orang	100	100	100				
Kegiatan 3: Pelatihan Desa Digital		Orang	100	100	100				
Kegiatan 4: Bimtek Inklusi Sosial dan Desa Digital		Orang	100	100	100				
Kegiatan 5: Monitoring dan Evaluasi		Orang	20	20	20				
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAIPI TUJUAN									
Indikator 17.8.1* Persentase pengguna internet									
Program 1: Inklusi Desa Berbasis Digital									
Kegiatan 1: FGD Inklusi Sosial dan Desa Digital	1.1 Jumlah peserta yang mendapat pelatihan	Orang	20	20	20	5.000	K/L & Funding Agency	Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur (10 Desa)	Lakpesdam PBNU & Lakpesdam PCNU
Kegiatan 2: Pelatihan Inklusi Sosial	1.2 Jumlah peserta yang mendapat pelatihan	Orang	100	100	100				
Kegiatan 3: Pelatihan Desa Digital	1.3 Jumlah peserta yang mendapat pelatihan	Orang	100	100	100				
Kegiatan 4: Bimtek Inklusi Sosial dan Desa Digital	1.4 Jumlah peserta yang mendapat pelatihan	Orang	100	100	100				
Kegiatan 5: Monitoring dan Evaluasi	1.5 Jumlah peserta yang mendapat pelatihan	Orang	20	20	20				
Program 2: Knowledge Management untuk Penguatan Demokrasi dan Keagamaan									
Kegiatan 1: Digitalisasi Perpustakaan	1.1 Perluasan dan kemudahan akses pustaka dan literasi dengan teknologi digital	Koleksi	500	500	500	1000	Swadaya dan Kerjasama dengan Swasta	Jakarta	Lakpesdam PBNU
Kegiatan 2: Penambahan Content Media Sosial	1.2 Tersedianya sejumlah content media sosial untuk kampanye demokrasi, agama, dan kebudayaan	Koleksi	20	20	20		Swadaya	Jakarta	Lakpesdam PBNU
Nama Pemangku Kepentingan: Muslimat NU									
Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	2021	2022	2023	2024	Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA									
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA									
INDIKATOR SDGs : 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).									

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan										
PROGRAM 6 :PENINGKATAN STATUS GIZI DAN KESEHATAN MASYARAKAT										
Kegiatan 3 : Pemberian TTD bagi ibu hamil dan remaja perempuan	1.1 Jumlah ibu hamil dan remaja perempuan dan penerima TTD	jiwa	-	-	10.000	10.000	1.000	III- Belum tersedia sumber	7 Provinsi : DKI, Banten Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Sumatera Utara, Papua	Muslimat NU
INDIKATOR SDGs :										
3.2.1 (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. (AKBa) per 1000 kelahiran hidup										
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup										
PROGRAM 7 :										
PENDAMPINGAN KEDARURATAN KELAHIRAN DAN BAYI BARU LAHIR										
Kegiatan : Layanan Kedaruratan Kelahiran dan Bayi Baru Lahir	1.1 Jumlah kegiatan pelatihan Nakes untuk Kedaruratan Kelahiran dan Bayi Baru Lahir	kegiatan	-	-	12.525	12.525	25.050	III- Belum tersedia sumber	Nasional = 34 Provinsi	Muslimat NU
PROGRAM 8 :										
LASKAR PEDULI TB-MUSLIMAT NU										
INDIKATOR SDGs :										
3.3.2* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.										
Kegiatan : Layanan Peduli TB Muslimat NU	1.1 Jumlah kegiatan Pelatihan Laskar Peduli TB	kegiatan	-	-	50.000	50.000	29.500	III- Belum tersedia sumber	Nasional = 34 Provinsi	Muslimat NU
PROGRAM 9 - GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT										
INDIKATOR SDGs :										
3.4.1 (b) Prevalensi tekanan darah tinggi										
3.4.1 (c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun										
Kegiatan 1 : Workshop Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	1.1 Jumlah kegiatan workshop GERMAS	kegiatan	-	-	10	10	3000	II - Masih diusulkan (Promkes)	TBD	Muslimat NU
Kegiatan 2 : Mobilisasi massa GERMAS	1.2 Jumlah kegiatan mobilisasi massa GERMAS	kegiatan	-	-	10	10	4000	II - Masih diusulkan (Promkes)	TBD	Muslimat NU
PROGRAM 10 : LASKAR ANTI NARKOBA										
INDIKATOR SDGs :										
3.5.1.(a) Jumlah penyalahguna napsa yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis										
Kegiatan : Laskar Anti Narkoba	1.1 Jumlah Da'iyah/Penyuluh	jiwa	-	-	5000	5000	50000	III- Belum tersedia sumber	Nasional = 34 Provinsi	Muslimat NU
PROGRAM 11 : AYO BER-KB MUSLIMAT NU										
INDIKATOR SDGs :										
3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern										
3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.										
3.7.1.(a) Total Fertility Rate (TFR).										
Kegiatan 1 :Layanan KB Muslimat NU	1.1 Jumlah akseptor KB	jiwa	-	-	500.000	500.000	1.000	III- Belum tersedia sumber	5 provinsi : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri	Muslimat NU
TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS										
INDIKATOR SDGs :										
4.1.2.(a) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.										
4.2.1* Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin										
4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin										
PROGRAM 12 : PAUD BERKUALITAS MUSLIMAT NU										
Kegiatan : Layanan PAUD Muslimat NU	1.1 Jumlah PAUD Muslimat NU	unit	-	-	8.000	8.000	468.000	III- Belum tersedia sumber	Nasional = 34 Provinsi	Muslimat NU
INDIKATOR SDGs :										
4.6.1 (a) Presentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun										
PROGRAM 13 : PROGRAM LITERASI MUSLIMAT NU										
Kegiatan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Muslimat NU - Program Paket A, B, C	1.1 Jumlah unit PKBM	20.000	-	-	5.000	5.000	100.000	III- Belum tersedia sumber	Nasional = 34 Provinsi	Muslimat NU
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan										
PROGRAM 2 : PEMBUATAN KERAN AIR BERSIH DAN PENYEDIAAN SABUN DI PAUD MUSLIMAT NU										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Air Bersih dan Sabun di Setiap PAUD Muslimat NU	1.1 jumlah unit PAUD	unit	-	-	8.000	8.000	12.000	III- Belum tersedia sumber	Nasional = 34 provinsi	Muslimat NU
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER										
INDIKATOR SDGs : 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.										
PROGRAM 14 : LEMBAGA BIMBINGAN KELUARGA MUSLIMAT NU										
Kegiatan : Layanan Bimbingan Keluarga Muslimat NU	1.1 jumlah peserta kursus	jiwa	-	-	5.000	5.000	19.000	III- Belum tersedia sumber	Nasional = 34 Provinsi	Muslimat NU
INDIKATOR SDGs : 5.b.1 Proporsi individu yang menguasai/memiliki telpon genggam										
PROGRAM 15 : LITERASI DIGITAL MUSLIMAT NU										
Kegiatan : Pelatihan Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi	1.1 jumlah peserta pelatihan	jiwa	-	-	500	500	2.000	III- Belum tersedia sumber	Nasional = 34 Provinsi	Muslimat NU
TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR										
9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit										
Program 1: Koperasi Muslimat NU										
Kegiatan 1: Layanan Koperasi Muslimat NU	1.1 Jumlah unit koperasi	unit	-	-	20	20	200	III- Belum tersedia sumber	Nasional = 34 provinsi	Muslimat NU
Nama Pemangku Kepentingan: Wahana Visi Indonesia (WVI)										
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs										
Nama Program 1 : Anak - anak bergizi baik										
Nama Kegiatan 1: Meningkatnya status gizi dan keamanan pangan keluarga - keluarga dengan anak usia 0 - 5 tahun	1.1. Output Kegiatan: Keluarga - keluarga dengan anak usia 0-5 tahun mendapat dukungan untuk mempraktikkan pemberian makan yang baik dan benar dan memonitor tumbuh kembang anak - anaknya	# dan %						WVI dan lembaga donor	11 Kabupaten Nias Selatan Bengkulu Selatan Sekadau Melawi Sintang Surabaya Sumba Barat Daya Kupang TTS Manggarai Barat Ende Ngada Nagekeo	WVI
	1.2. Output Kegiatan : orang tua dan pengasuh mempunyai kemampuan untuk memproduksi makanannya melalui kebun gizi dan ternak kecil	# & %								
	1.3 Output kegiatan : keluarga - keluarga meningkat kemampuannya dalam mempersiapkan keamanan pangan keluarga melalui kelompok simpan pinjam	# & %								
Nama Kegiatan 2: Meningkatnya upaya - upaya pencegahan penyakit menular pada anak - anak, keluarga dan masyarakat	1.1. Output kegiatan: masyarakat mempunyai akses ke fasilitas air bersih, sanitasi dan higiene	# orang unit						WVI dan lembaga donor	11 Kabupaten Nias Selatan Bengkulu Selatan Sekadau Melawi Sintang Surabaya Sumba Barat Daya Kupang TTS Manggarai Barat Ende Ngada Nagekeo	WVI
	1.2. Output kegiatan : masyarakat meningkatkan perilaku sanitasi dan kebersihan dan pengolahan air aman	# orang unit								
	1.3. Output kegiatan : masyarakat meningkatkan kemampuan advokasi dan kemitraannya untuk perbaikan layanan kesehatan	# & %								
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
Indikator 6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.										
Nama Program: Kesehatan										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan 1.1: Pembangunan/rehabilitasi sarana air minum dasar untuk anak keluarga dan masyarakat di pedesaan	1.1.1 Output Kegiatan: jumlah orang yang mengakses sarana air minum dasar	orang	6.500	10.639	12702	13458	Rp 30 M	WVI, lembaga donor, masyarakat , pemerintah	Nias Selatan, Bengkulu Selatan, Kota Surabaya, Sekadau, Melawi, Sintang,	Wahana Visi Indonesia
	1.1.2 Output Kegiatan: Jumlah sarana air yang dibangun atau direhabilitasi	unit/jaringan	18	21	25	29				Wahana Visi Indonesia
Nama kegiatan 1.2: peningkatan kapasitas pengelola sarana air minum desa	1.2.1 Pembentukan/aktivasi, pelatihan dan pendampingan komite air pedesaan (pengelola air minum desa)	kelompok	18	25	40	52				Wahana Visi Indonesia
Nama Kegiatan 1.3: peningkatan kualitas air minum pedesaan	1.3.1 Output Kegiatan: melakukan uji kualitas air selama assessment dan setelah uji coba sarana	parameter	36	42	50	58				Wahana Visi Indonesia
	1.3.2 Output Kegiatan: Edukasi masyarakat tentang pengelolaan air minum rumah tangga	orang	8.650	10.000	12.000	14.000	WVI, lembaga donor, masyarakat , pemerintah	Wahana Visi Indonesia		
Indikator 6.2.1*Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.										
Nama Program: Anak - anak bergizi yang baik										
Nama Kegiatan 2.1: STBM	2.1.1 Output Kegiatan: Jumlah masyarakat yang hadir dalam pemicuan STBM	orang	8.650	10.000	12.000	14.000	Rp 44 M	WVI, lembaga donor, masyarakat , pemerintah	Nias Selatan, Bengkulu Selatan, Kota Surabaya, Sekadau, Melawi, Sintang, Manggarai Barat, Manggarai, Ende, Ngada, Nagekeo, Kupang, TTS, Asmat	Wahana Visi Indonesia
	2.1.2 Output Kegiatan: Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dasar rumah tangga	orang	36.412	55.694	74.259	92.823				Wahana Visi Indonesia
	2.1.3 Output Kegiatan: Jumlah rumah tangga dengan fasilitas cuci tangan baru	rumah tangga	2.500	3.740	4.987	6.233				Wahana Visi Indonesia
Nama Kegiatan 2.2: ODF	2.2.1 Output Kegiatan: Jumlah masyarakat yang tersertifikasi bebas buang air besar sembarangan (ODF)	desa	17	20	23	25				WVI, lembaga donor, masyarakat , pemerintah
	2.2.2 Output Kegiatan: Jumlah orang yang telah berpartisipasi dalam program perubahan perilaku kebersihan masyarakat	orang	8.650	10.000	12.000	14.000	WVI, lembaga donor, masyarakat , pemerintah	Wahana Visi Indonesia		
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN										
Indikator 11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.										
Nama Program: PHINLA										
Nama Kegiatan 1: PHINLA	1.1 Output Kegiatan Masyarakat lokal dan pengelola RPTRA memiliki kapasitas untuk mendukung perlindungan anak	RPTRA baru dibangun	1						Kelurahan Klender	WVI, Dinas PPPAP, Kelurahan Klender
	1.2 Output Kegiatan Children participate in positive development	kegiatan untuk anak-anak	10						Kelurahan Klender	WVI, Dinas PPPAP, Kelurahan Klender

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	activities through RTPTRA	anak yang mendapatkan sosialisasi tentang sistem mekanisme rujukan Perlindungan Anak	180						Kelurahan Klender	WVI, Dinas PPPAP, Kelurahan Klender
		anak-anak yang didukung oleh paket perlindungan diri	170						Kelurahan Klender	WVI, Dinas PPPAP, Kelurahan Klender
1.3Output Kegiatan Masyarakat lokal dan pengelola RPTRA memiliki kapasitas untuk mendukung perlindungan anak		anak-anak yang berpartisipasi dalam kampanye atau Forum COVID-19	180						Kelurahan Klender	WVI, Dinas PPPAP, Kelurahan Klender
		manajemen dan tim pendukung yang mendapatkan pelatihan/sosialisasi perlindungan anak (Termasuk on/offline)	6						Kelurahan Klender	WVI, Dinas PPPAP, Kelurahan Klender
		orang tua/pengasuh yang mendapatkan pelatihan/sosialisasi perlindungan anak (Termasuk on/offline)	90						Kelurahan Klender	WVI, Dinas PPPAP, Kelurahan Klender

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
		orang tua yang menunjukkan peningkatan pengetahuan dalam disiplin positif dan masalah terkait CP lainnya	90					Kelurahan Klender	WVI, Dinas PPPAP, Kelurahan Klender	
Indikator 11.6.1.(b) 'Persentase sampah nasional yang tertangani dengan pengelolaan yang baik										
Nama Program: PHINLA										
Nama Kegiatan 1: PHINLA	1.1 Output Kegiatan: Jumlah Bank sampah yang berkelanjutan	Unit		10				BMZ (pemerintah Jerman)	Kelurahan Penjaringan, Marunda, Cilincing, Semper barat, dan Cipinang besar Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Wahana Visi Indonesia dan Diver Clean Action
	1.2 Output Kegiatan: Jumlah nasabah (rumah tangga) bank sampah yang mendapat manfaat dari kegiatan bank sampah	rumah tangga		650-1000				BMZ (pemerintah Jerman)	Kelurahan Penjaringan, Marunda, Cilincing, Semper barat, dan Cipinang besar Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Wahana Visi Indonesia dan Diver Clean Action
	1.3 Output Kegiatan: Jumlah Kelompok masyarakat/kelurahan yang memiliki sistem pengelolaan sampah terpilah di akhir project	kelompok		5				BMZ (pemerintah Jerman)	Kelurahan Penjaringan, Marunda, Cilincing, Semper barat, dan Cipinang besar Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Wahana Visi Indonesia dan Diver Clean Action
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH										
KODE DAN NAMA INDIKATOR TPB/SDGs: 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiaksan terhadap anak.										
NAMA PROGRAM 1:	Pengembangan kapasitas kemampuan pengasuhan dalam rumah tangga									
Nama Kegiatan 1: Pelatihan Pengasuhan Dengan Cinta untuk keluarga	Indikator Kegiatan: Jumlah keluarga yang terlibat aktif dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap anak satu tahun terakhir	Keluarga	1000 KK di wilayah dampingan WVI	1000 KK di wilayah dampingan WVI di wilayah dampingan yang berbeda dari tahun sebelumnya	1000 KK di wilayah dampingan WVI di wilayah dampingan yang berbeda dari tahun sebelumnya	1000 KK di wilayah dampingan WVI di wilayah dampingan yang berbeda dari tahun sebelumnya	Belum diketahui	Wahana Visi Indonesia dan mitra terkait	Wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia	Wahana Visi Indonesia
Nama kegiatan 2: Pengasuhan tanpa Kekerasan, Ayah Sejati, Disiplin Positif	Indikator Kegiatan: Jumlah keluarga yang terlibat aktif dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap anak satu tahun terakhir	Keluarga						Yayasan Save the Children dan mitra terkait	Wilayah dampingan Yayasan Save The Children; partisipan pelatihan daring YSTC	Yayasan Save The Children

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan 3: Workshop Saluran Harapan untuk Perlindungan Anak	Indikator Kegiatan: Jumlah tokoh agama yang terlibat aktif dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap anak	Tokoh Agama	200 orang di wilayah dampingan WVI	200 orang di wilayah dampingan WVI di wilayah dampingan yang berbeda dari tahun sebelumnya	200 orang di wilayah dampingan WVI di wilayah dampingan yang berbeda dari tahun sebelumnya	200 orang di wilayah dampingan WVI di wilayah dampingan yang berbeda dari tahun sebelumnya		Wahana Visi Indonesia dan mitra terkait	Wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia	Wahana Visi Indonesia
NAMA PROGRAM 2:	Pengembangan kapasitas kemampuan fasilitator dan kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat									
Nama Kegiatan 1: Kajian Implementasi Panduan PATBM dalam pandemi COVID-19	Indikator Kegiatan: Jumlah fasilitator/kader PATBM yang terpapar hasil kajian	Fasilitator/Kader	100 orang di wilayah dampingan WVI	100 orang di wilayah dampingan WVI	100 orang di wilayah dampingan WVI	100 orang di wilayah dampingan WVI		Wahana Visi Indonesia dan mitra terkait	Wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia	Wahana Visi Indonesia
Nama Kegiatan 2: Pelatihan Panduan PATBM dalam pandemi COVID-19	Indikator Kegiatan: Jumlah fasilitator dan kader PATBM yang mengikuti pelatihan Panduan PATBM masa Pandemi COVID-19	Fasilitator/Kader	100 orang di wilayah dampingan WVI	100 orang di wilayah dampingan WVI	100 orang di wilayah dampingan WVI	100 orang di wilayah dampingan WVI		Wahana Visi Indonesia dan mitra terkait	Wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia	Wahana Visi Indonesia
Nama Kegiatan 3: Pelatihan Management Kasus dan mengembangkan SOP penanganan kasus bagi PATBM (termasuk Pengembangan mekanisme monitoring dan remediasi pekerja anak disektor pertanian)	Indikator Kegiatan: * Jumlah fasilitator dan kader PATBM yang mengikuti pelatihan manajemen kasus oleh PATBM * tersedia mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak oleh PATBM	Fasilitator/Kader SOP						Yayasan Save the Children dan mitra terkait	Wilayah dampingan Yayasan Save The Children; partisipan pelatihan daring YSTC	Yayasan Save The Children
NAMA PROGRAM 3:	Advokasi kebijakan untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak									
Nama Kegiatan 1: Pelatihan penyusunan RKP Desa yang memenuhi indikator KLA	Indikator Kegiatan: Adanya RPJM Desa atau RKP Desa yang menargetkan indikator Desa Layak Anak	Fasilitator/Kader	25% wilayah dampingan WVI	25% wilayah dampingan WVI di wilayah dampingan yang berbeda dari tahun sebelumnya	25% wilayah dampingan WVI di wilayah dampingan yang berbeda dari tahun sebelumnya	25% wilayah dampingan WVI di wilayah dampingan yang berbeda dari tahun sebelumnya	Rp. 3.500.000.000,00	Wahana Visi Indonesia dan mitra terkait	Wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia	Wahana Visi Indonesia
		Fasilitator/Kader						Yayasan Save the Children dan mitra terkait	Wilayah dampingan Yayasan Save The Children; partisipan pelatihan daring YSTC	Yayasan Save The Children
Nama Kegiatan 2: Akuntabilitas Sosial Layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak/ Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	Indikator Kegiatan: Jumlah UPTD PPA/ P2TP2A yang menjalani proses akuntabilitas sosial	UPTD PPA/P2TP2A	25% wilayah dampingan WVI	25% wilayah dampingan WVI di wilayah dampingan yang berbeda dari tahun sebelumnya	25% wilayah dampingan WVI di wilayah dampingan yang berbeda dari tahun sebelumnya	25% wilayah dampingan WVI di wilayah dampingan yang berbeda dari tahun sebelumnya	Rp. 3.500.000.000,00	Wahana Visi Indonesia dan mitra terkait	Wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia	Wahana Visi Indonesia

KODE DAN NAMA INDIKATOR TPB/SDGs 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
NAMA PROGRAM 4:		Kampanye Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak								
Nama Kegiatan 1: Suara Anak untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak	1.1 Indikator Kegiatan: Jumlah anak yang terlibat dalam aksi kolaborasi advokasi untuk penghapusan kekerasan terhadap anak	Anak	2000 anak di Wilayah dampingan Indonesia Joining Forces for EVAC dan Aliansi PKTA	2000 anak di Wilayah dampingan Indonesia Joining Forces for EVAC dan Aliansi PKTA	2000 anak di Wilayah dampingan Indonesia Joining Forces for EVAC dan Aliansi PKTA	2000 anak di Wilayah dampingan Indonesia Joining Forces for EVAC dan Aliansi PKTA		Anggota IJF for EVAC dan Aliansi PKTA	Wilayah dampingan Indonesia Joining Forces for EVAC dan Aliansi PKTA	Indonesia Joining Forces for EVAC dan Aliansi PKTA
	1.2 Indikator Kegiatan: Pesan advokasi anak untuk penghapusan kekerasan terhadap anak	Risalah kebijakan	2000 anak di Wilayah dampingan Indonesia Joining Forces for EVAC dan Aliansi PKTA	2000 anak di Wilayah dampingan Indonesia Joining Forces for EVAC dan Aliansi PKTA	2000 anak di Wilayah dampingan Indonesia Joining Forces for EVAC dan Aliansi PKTA	2000 anak di Wilayah dampingan Indonesia Joining Forces for EVAC dan Aliansi PKTA		Anggota IJF for EVAC dan Aliansi PKTA	Wilayah dampingan Indonesia Joining Forces for EVAC dan Aliansi PKTA	Indonesia Joining Forces for EVAC dan Aliansi PKTA
Nama Kegiatan 2: Pelatihan Perlindungan Anak bagi Anak #DimulaiDariSaya	Indikator Kegiatan: Jumlah anak yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk mencegah kekerasan terhadap dirinya dan tidak menjadi pelaku kekerasan	Anak	400 anak di wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia	400 anak di wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia di wilayah dampingan yang berbeda dari tahun sebelumnya	400 anak di wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia di wilayah dampingan yang berbeda dari tahun sebelumnya	400 anak di wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia di wilayah dampingan yang berbeda dari tahun sebelumnya		Wahana Visi Indonesia dan mitra terkait	Wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia	Wahana Visi Indonesia
NAMA PROGRAM 5:		ACTIVE4FUTURE								
Nama Kegiatan 1: Advokasi dan Kampanye	1.1 Indikator Kegiatan : Jumlah pengasuh yang terlibat dalam aksi kampanye pengasuhan positif	Keluarga						Private and Non Private Funding	8 Propinsi	ChildFund International & Mitra Kerja & Koalisi antar NGO-IJF- Aliansi PKTA-Child/Youth Forum
	1.2 Indikator Kegiatan : Jumlah aksi kampanye penghapusan kekerasan terhadap anak yang diinisiasi oleh anak dan kelompok anak	Prototype kampanye						Private and Non Private Funding	8 Propinsi	ChildFund International & Mitra Kerja & Koalisi antar NGO-IJF- Aliansi PKTA-Child/Youth Forum
KODE DAN NAMA INDIKATOR TPB/SDGs		INDIKATOR TPB 16.2.1 Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir								
KODE DAN NAMA INDIKATOR TPB/SDGs		INDIKATOR TPB 16.9 Presentasi Anak yang memiliki Akta Kelahiran								
NAMA PROGRAM 1:		PRIME (Protected and Friendly Environment for children and youth) (termasuk implementasi kebijakan)								
Nama Kegiatan 1: Penguatan Mekanisme PATBM	1.1 Indikator Kegiatan : Jumlah desa dengan implementasi sistem pencegahan dan pelaporan PA	Desa	15 % dari 60 desa	20 % dari 60 desa	25% dari 60 desa	30 % dari 60 desa		Private and Non Private Funding	8 Propinsi	ChildFund International & Mitra Kerja
	1.2 Indikator Kegiatan : Jumlah Desa yang mempromosikan akuntabilitas layanan PA (responsif, inklusif dan dapat diakses)	Desa	10% dari anggota kelp anak / youth	10% dari anggota kelp anak / youth	10% dari anggota kelp anak / youth	25 % dari anggota kelp anak / youth		Private and Non Private Funding	8 Propinsi	ChildFund International & Mitra Kerja

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
1.3 Indikator Kegiatan : Jumlah kasus kekerasan anak yang dirujuk ke layanan PA dan atau layanan keadilan dan Jumlah kelahiran baru yang segera dicatat oleh layanan PA/Kesehatan/desa	kasus Anak, cakupan akta	11 % dari 60 desa	12 % dari 60 desa	13 % dari 60 desa	14 % dari 60 desa		Private and Non Private Funding	8 Propinsi	ChildFund International & Mitra Kerja
1.4 Indikator Kegiatan : Jumlah stakeholder/Institusi layanan/PATBM yang dapat memberikan dukungan psikososial kepada anak dan pengasuh utama	Jumlah stakes/institusi yang di latih PSS/CPMS	25% dari institusi layanan yang ada di desa/kab	35% dari institusi layanan yang ada di desa/kab	35% dari institusi layanan yang ada di desa/kab	40% dari institusi layanan yang ada di desa/kab		Private and Non Private Funding	8 Propinsi	ChildFund International & Mitra Kerja
Nama Kegiatan 2: Akuntabilitas Ramah Anak - Child Friendly Accountability	Doc Kebijakan/Program	Proporsi kelp anak yang terlibat dan menyuarkan rekomendasi	Proporsi kelp anak yang terlibat memberi masukan terhadap doc perencanaan desa/stakes	Proporsi kelp anak yang terlibat memberi masukan terhadap doc perencanaan desa/stakes	Proporsi kelp anak yang terlibat memberi masukan terhadap doc perencanaan desa/stakes		Private and Non Private Funding	8 Propinsi	ChildFund International & Mitra Kerja
Nama kegiatan 3 : Pengasuhan dan dukungan terhadap pengasuh utama	keluarga	35% keluarga yang terlibat dalam kelp pengasuhan	40% keluarga yang terlibat dalam kelp pengasuhan	55% keluargayang terlibat dalam kelp pengasuhan	65% keluarga yang terlibat dalam kelp pengasuhan		Private and Non Private Funding	8 Propinsi	ChildFund International & Mitra Kerja
KODE DAN NAMA INDIKATOR TPB/SDGs: 16.6.2 Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.									
NAMA PROGRAM 1:	Terselenggaranya pemantauan pembangunan desa berbasis masyarakat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa di 200 desa percontohan								
Nama Kegiatan 1: Sosialisasi Kebijakan Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa kepada para pemangku kepentingan.	Indikator Kegiatan:						Wahana Visi Indonesia dan mitra terkait	Wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia	Wahana Visi Indonesia
Nama Kegiatan 2: Tersusunnya rencana pembelajaran bagi masyarakat desa (termasuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/KPMD) perihal Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa.	Indikator Kegiatan:						Wahana Visi Indonesia dan mitra terkait	Wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia	Wahana Visi Indonesia
Nama Kegiatan 3: Terlaksananya pembelajaran bagi masyarakat desa (termasuk KPMD) perihal akuntabilitas sosial dalam pembangunan Desa.	Indikator Kegiatan:						Wahana Visi Indonesia dan mitra terkait	Wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia	Wahana Visi Indonesia
Nama Pemangku Kepentingan: BAZNAS									
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN									
Indikator:									
PROGRAM 1: Pemberdayaan UMKM									

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Kegiatan 1:	1.1 terbinanya 500 mustahik millennial preneur	orang	500	1000	1500	2000		Zakat	nasional	BAZNAS
Optimasi bisnis mikro millennialpreneur	1.2 terbangunnya inti-plasma usaha dari millennial preneur	orang	5.000	10.000	15.000	20.000		Zakat	nasional	BAZNAS
Kegiatan 2:	2.1 Terbangunnya Mustahik Business Center (MBC)	unit	5	10	20			Zakat	nasional	BAZNAS
Inisiasi Mustahik Business Center sebagai sarana training bisnis mustahik & Marketing House pusat pemasaran	2.2 Terbangunnya Marketing House (MH)	unit	5	10	20			Zakat	nasional	BAZNAS
	2.3 Terbangunnya Koperasi dan ekosistem bisnis mustahik	unit			5	10		Zakat	nasional	BAZNAS
PROGRAM 2: Pemberdayaan Ritel Mikro dengan 'Zmart'										
Kegiatan 1:										
expansi pemberdayaan Zmart di BAZNAS Daerah	1.1 duplikasi program Zmart di daerah	titik	2500	5000	7500	8000		Zakat	nasional	BAZNAS
Kegiatan 2:	2.1 Peningkatan pendapatan mustahik	persen	40	60	80	100		Zakat	nasional	BAZNAS
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas usaha saudagar Zmart, serta penguatan kelembagaan mustahik	2.2 Terbangunnya Distribution Center	unit	15					Zakat	nasional	BAZNAS
Kegiatan 3: membangun ritel training center	3.1 terbangunnya ritel training center	unit	10	10				Zakat	nasional	BAZNAS
	3.2 terbangunnya korporasi distribusi barang	unit			1	1		Zakat	nasional	BAZNAS
PROGRAM ADVOKASI										
Kegiatan 1 Basic Need	1.1 Terdistribusikannya 100% Paket Basic Need kepada Mualaf di Titik Lokasi	Titik Lokasi	Terdistribusi di 10 titik	Terdistribusi di 13 titik	Terdistribusi di 16 titik	Terdistribusi di 20 titik	2.880.000.000	Zakat	JABODETABEK, Banten, Sumatera Barat, Kalimantan	BAZNAS
Kegiatan 2 Mualafpreneur	1.1 Adanya Pengembangan Produk Bisnis Mualaf	Titik Lokasi	Terbantunya 4 Mualaf	Terbantunya 8 Mualaf	Terbantunya 16 Mualaf	Terbantunya 32 Mualaf	294.000.000	Zakat	JABODETABEK, Banten, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku	BAZNAS
	1.2 Meningkatkan Pendapatan Harian 20% dari Pendapatan Semula									
Kegiatan 1 Paket Logistik Keluarga	1.1 Terdistribusikannya 100% Paket Logistik Keluarga di Titik Lokasi Rawan Pemurtadan	Titik Lokasi	Terdistribusi di 6 titik	Terdistribusi di 9 titik	Terdistribusi di 12 titik	Terdistribusi di 15 titik	600.000.000	Zakat	JABODETABEK, Banten, Sumatera Barat, Kalimantan	BAZNAS
INDIKATOR SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
PROGRAM 3: Program Ramadhan dan Cash for Work										
Kegiatan 1: PLK "Paket Logistik Keluarga" dan "Gulai Ramadhan"	1.1 Indikator Kegiatan : Kebutuhan Gizi terpenuhi. Terutama protein hewani disekitar lokasi program BT BAZNAS	Orang	0	0	0	0	Menyesuaikan	Zakat	Semua Balai Ternak	BAZNAS RI BAZNAS Provinsi BAZNAS Kab/Kota
	1.2 Indikator Kegiatan : Terbantunya terkait pemasaran ternak hasil budidaya dari peternak mustahik binaan LPPM BAZNAS	Orang	0	0	0	0	Menyesuaikan	Zakat	Semua Balai Ternak	BAZNAS RI BAZNAS Provinsi BAZNAS Kab/Kota
Kegiatan 2 : CFW (Cash For Work)	2.1 Indikator Kegiatan : Terbantunya Masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19	Orang	0	0	0	0	Menyesuaikan	Zakat	Semua Balai Ternak	BAZNAS RI BAZNAS Provinsi BAZNAS Kab/Kota
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN										
INDIKATOR SDGs: 2.4.1.(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan										
PROGRAM 1: Pertanian Berkelanjutan										
Kegiatan 1: inisiasi program pertanian pada 5 cluster komoditas utama	1.1 ekspansi luasan lahan pemberdayaan petani	hektar	200	300	400	500		Zakat	nasional	BAZNAS
	1.2 terbangunnya korporasi usaha pertanian milik mustahik	cluster wilayah	2	3	4	5		Zakat	nasional	BAZNAS
Kegiatan 2:	2.1 Penerapan teknologi tepat guna	cluster komoditas	2	3	4	5		Zakat	nasional	BAZNAS
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas petan	2.2 terciptanya jaringan pasar	cluster komoditas	2	3	4	5		Zakat	nasional	BAZNAS

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
2.3 moving out of mustahik	orang	2.000	2.500	3.200	5.000		Zakat	nasional	BAZNAS	
INDIKATOR SDGs: 2.3.1* Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/ kehutanan										
PROGRAM 1: Integrated Farming										
Kegiatan 1: Budidaya Perikanan	1.1 Indikator Kegiatan : Menambah sumber pendapatan bulanan peternak mustahik sehingga pendapatan peternak mustahik bisa mencapai diatas garis kemiskinan	Balai Ternak	7	6	4	0	Menyesuaikan	Zakat & Infak	Semua Balai Ternak	BAZNAS RI BAZNAS Provinsi BAZNAS Kab/Kota
Kegiatan 2: Budidaya Pertanian	2.1 Indikator Kegiatan : Menambah sumber pendapatan bulanan peternak mustahik sehingga pendapatan peternak mustahik bisa mencapai diatas garis kemiskinan	Balai Ternak	20	26	30	35	Menyesuaikan	Zakat & Infak	Semua Balai Ternak	BAZNAS RI BAZNAS Provinsi BAZNAS Kab/Kota
PROGRAM 1: Pelatihan Sumber Daya Manusia										
Kegiatan 1: BOCF "BAZNAS Online Class Farming"	1.1 Indikator Kegiatan : Peningkatan kapasitas peternak mustahik , pendamping , masyarakat umum & pelaku usaha peternakan	Orang	0	500	750	1.000	Menyesuaikan	Zakat & Infak	Online	BAZNAS Universitas Dinas Peternakan Praktisi Peternakan
Kegiatan 2: SVP "Sekolah Virtual Peternak"	2.1 Indikator Kegiatan : Peningkatan kapasitas peternak mustahik , pendamping , masyarakat umum & pelaku usaha peternakan	Orang	0	0	0	0	Menyesuaikan	Zakat & Infak	Online	BAZNAS Universitas Dinas Peternakan Praktisi Peternakan
Kegiatan 3: Tadarus Online Peternak	3.1 Indikator Kegiatan : Peningkatan kapasitas peternak mustahik , pendamping , masyarakat umum & pelaku usaha peternakan	Orang	250	0	0	0	Menyesuaikan	Zakat & Infak	Online	BAZNAS Universitas Dinas Peternakan Praktisi peternakan
Kegiatan 4: LPPM Class	4.1 Indikator Kegiatan : Peningkatan kapasitas peternak mustahik , pendamping , masyarakat umum & pelaku usaha peternakan	Orang	100	150	200	250	Menyesuaikan	Zakat & Infak	Online & Offline	BAZNAS
INDIKATOR SDGs: 2.3.1.(a) Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan										
PROGRAM 1: Balai Ternak										
Kegiatan 1: Pemberdayaan Peternak Mustahik	1.1 Indikator Kegiatan : Meningkatkan pendapatan peternak mustahik diatas garis kemiskinan	Orang	882	1.041	1.235	1.470	Menyesuaikan	Zakat & Infak	Semua Balai Ternak	BAZNAS RI BAZNAS Provinsi BAZNAS Kab/Kota
PROGRAM 2: Pemberdayaan Kurban										
Kegiatan 1: Kurban Berdayakan Desa dan Kurban Online BAZNAS	1.1 Indikator Kegiatan : Menambah sumber pendapatan peternak mustahik	Orang	882	1.041	1.235	1.470	Menyesuaikan	Infak	60 Lembaga Mitra 24 Provinsi 61 Kab/Kota	BAZNAS RI BAZNAS Provinsi BAZNAS Kab/Kota Lembaga Mitra
Kegiatan 3 : Tanggap Covid-19	3.1 Indikator Kegiatan : Mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada mustahik mengenai bahaya COVID-19 agar mereka terhindar dari paparan virus tersebut	Orang	0	0	0	0	Menyesuaikan	Zakat	Semua Balai Ternak	BAZNAS
	3.2 Indikator Kegiatan : Memberikan sosialisasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan Balai Ternak BAZNAS	Orang	0	0	0	0	Menyesuaikan	Zakat	Semua Balai Ternak	BAZNAS
	3.2 Indikator Kegiatan : Memberikan informasi dan edukasi kepada para peternak mustahik dan masyarakat sekitar Balai Ternak BAZNAS mengenai Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Orang	0	0	0	0	Menyesuaikan	Zakat	Semua Balai Ternak	BAZNAS

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS										
Indikator SDGs										
PROGRAM 1:										
Kegiatan 1:	1.1 Akreditasi A (SMP)	%	100%	100%	100%	100%	10.000.000	ZAKAT	Sekolah Cendekia BAZNAS	BAZNAS
Kurikulum, Legalitas & Mutu Pendidikan	1.2 Penerbitan Best practices sekolah model berasrama bebas biaya.	%	40%	60%	80%	100%	100.000.000	BOS, ZAKAT	Sekolah Cendekia BAZNAS	BAZNAS
	1.3 pengembangan kurikulum internasional	%	40%	60%	80%	100%	100.000.000	BOS, ZAKAT	Sekolah Cendekia BAZNAS	BAZNAS
	1.4 Implementasi replikasi SCB di 5 daerah	Daerah	0	0	0	3	750.000.000	ZAKAT	Sekolah Cendekia BAZNAS	BAZNAS
	1.5 Kurikulum Sister School	%	0	50%	100%	100%	50.000.000	ZAKAT	Sekolah Cendekia BAZNAS	BAZNAS
	1.6 Sekolah Adiwiyata	%	0	25%	50%	75%	100.000.000	ZAKAT	Sekolah Cendekia BAZNAS	BAZNAS
	1.7 Pembangunan infrastruktur IT untuk Big data jejaring sekolah nasional	%	0	0	0	100%	250.000.000	ZAKAT,BOS	Sekolah Cendekia BAZNAS	BAZNAS
PROGRAM 1: Zakat Community Development										
Kegiatan 1:	1.1 Tersedianya sarana belajar yang memadai	paket	25	25	25	25	Rp 200,000,000	zakat	desa	BAZNAS
Bantuan sarana belajar mengajar	1.2 Meningkatnya kualitas pendidikan di desa									BAZNAS
Kegiatan 2:	2.1 Meningkatnya kapasitas guru di desa	org	100	100	100	100	Rp 800,000,000	zakat	desa	BAZNAS
Pelatihan guru	2.2 Meningkatnya kualitas pendidikan di desa									BAZNAS
Kegiatan 3:	3.1 Tersedianya wadah literasi desa	desa	10	10	10	10	Rp 400,000,000	zakat	desa	BAZNAS
Rumah baca	3.2 Meningkatnya minat baca masyarakat									BAZNAS
Kegiatan 4 :	4.1 Peningkatan kualitas guru	org	100	100	100	100	Rp 200,000,000	zakat	desa	BAZNAS
Suport Gaji Dai dan guru	4.2 Peningkatan Kesejahteraan guru									BAZNAS
PROGRAM 2:										
Dukungan psikososial dan Pendampingan Sekolah pasca pembangunan										
Kegiatan 1: Pendampingan SDN 21 Sindue	1.1 Indikator Kegiatan : Peningkatan kualitas pendidikan sekolah	sekolah	70	0	0	0	Menyesuaikan	CSR	Sulawesi Tengah	BAZNAS
Kegiatan 2:	2.1 Indikator Kegiatan : Berkontribusi aktif pada layanan psikososial dan pendidikan	orang	323	0	0	0	Menyesuaikan	Zakat	Majene, NTB	BAZNAS
Pendampingan siswa Usia SD pasca bencana dan edukasi Siap tanggap Bencana	2.2 Indikator Kegiatan : Edukasi Boardgame SIAGA Siap Tanggap Bencana	orang	100	100	100	100	Menyesuaikan	Zakat	5 wilayah	BAZNAS
INDIKATOR SDGs: 4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).										
PROGRAM 2:										
Kegiatan 1:	1.1 Internalisasi sistem LMS dan ICT SCB di daerah secara terintegrasi	%	0	0	0	100%	50.000.000	ZAKAT, BOS	Sekolah Cendekia BAZNAS	BAZNAS
Informasi & Teknologi Komunikasi	1.2 Pengembangan Literasi Digital	%	25%	50%	100%	100%	50.000.000	ZAKAT, BOS	Sekolah Cendekia BAZNAS	BAZNAS
INDIKATOR SDGs:										
PROGRAM 1:										
Basiswa Cendekia BAZNAS										
Kegiatan 1:	1.1 Indikator Kegiatan : Meningkatnya kualitas SDM Peserta Basiswa Dalam Negeri BAZNAS	orang	929	900	900	900	Menyesuaikan	Zakat	83 kampus, 22 propinsi	BAZNAS
Basiswa Cendekia Baznas Indonesia	1.2 Indikator Kegiatan: Terkelolanya Jejaring Alumni Penerima Basiswa BAZNAS	orang	1432	1911	2361	2811	Menyesuaikan	Zakat	83 kampus, 22 propinsi	BAZNAS
Kegiatan 2:	2.1 Indikator Kegiatan:Meningkatnya kualitas SDM Peserta Basiswa Dalam Negeri BAZNAS	orang	230	330	330	330	Menyesuaikan	Zakat	Malaysia, Mesir, & India	BAZNAS

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Beasiswa Cendekia BAZNAS Luar Negeri	2.2 Indikator Kegiatan: Terkelolanya Jejaring Alumni Penerima Beasiswa BAZNAS	orang	45	85	166	266	Menyesuaikan	Zakat	Indonesia	BAZNAS
Indikator SDGs										
PROGRAM 3:										
Program Kemitraan bagi Disabilitas, 3T, dan khusus perempuan										
Kegiatan 1: Pendampingan suku anak dalam	1.1 Indikator Kegiatan : Peningkatan kualitas diri penerima manfaat	orang	24	25	25	25	Menyesuaikan	Zakat	Jambi	BAZNAS & Lembaga Mitra
Kegiatan 2: Pendampingan adik-adik difabilitas	2.1 Indikator Kegiatan	orang	46	100	100	100	Menyesuaikan	Zakat	Solo Raya	BAZNAS & Lembaga Mitra
Kegiatan 3: Pendampingan remaja putri di Pandeglang	3.1 Indikator Kegiatan	orang	55	0	0	0	Menyesuaikan	Zakat	Pandeglang Banten	BAZNAS & Lembaga Mitra
Kegiatan 4: Beasiswa daerah 3T	4.1 Indikator Kegiatan	orang	50	100	100	100	Menyesuaikan	Zakat	Papua, Maluku, Sulawesi Barat, NTT, dan Kaltara	BAZNAS & Lembaga Mitra
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.										
PROGRAM 1: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat										
Kegiatan 1: Jamban Sehat	1.1 Tersedianya jamban yang layak dan bersih	Unit	15.205	16.726	18.398	20.238	30.171.050.207	Zakat	Jabodetabek, Yogyakarta, Sidoarjo, Makassar, Pangkal Pinang, Parigi Moutong, Palu	BAZNAS
Tersedianya jamban yang memenuhi standar kesehatan	1.2 Tersedianya SOP dan sistem penilaian Jamban Sehat									
Kegiatan 2: Sarana Air Bersih	2.1 Penyediaan sarana dan prasarana air bersih	Unit								
Tersedianya sarana prasarana dan sumber air bersih	2.2 Tersedianya SOP dan sistem penilaian Sarana dan prasarana air bersih									
Kegiatan 3 : Tempat Sampah	1.1 Penyediaan tempat pembuangan sampah yang layak	Unit								
Tersedianya tempat pembuangan sampah	1.2 Tersedianya SOP dan sistem penilaian tempat pembuangan sampah									
Kegiatan 1: Penyuluhan	1.1 Meningkatkan pengetahuan tentang perilaku dan kebiasaan sanitasi yang baik pada 1000 rumah tangga mustahik	Orang								
Terwujudnya perilaku dan kebiasaan masyarakat tentang sanitasi yang baik	1.2 membuat evaluasi keberhasilan kegiatan									
PROGRAM 1: Zakat Community Development										
Kegiatan 1: Pembangunan MCK umum	1.1 Jumlah fasilitas MCK yang layak	unit	5	5	5	5	Rp 125,000,000	Infraq/DSKL	desa	BAZNAS
Kegiatan 2: Fasilitas sarana air bersih	2.1 Tersedianya sarana air bersih	unit	5	5	5	5	Rp 125,000,000	Infraq/DSKL	desa	BAZNAS
Kegiatan 3 : Penyulingan air laut dan waduk	3.1 Tersedianya fasilitas sistem penyulingan	unit	5	5	5	5	Rp 1,000,000,000	Infraq/DSKL	desa	BAZNAS
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI										
INDIKATOR 8.3.1(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.										
PROGRAM : Zakat Community Development										
Nama Kegiatan: Pemberdayaan petani dan peternak	1.1 Terbentuknya kelembagaan lokal petani dan peternak	klp	20	20	20	20	Rp2,000,000,000	zakat	desa	BAZNAS
	1.2 Meningkatkan kapasitas petani dan peternak	org	200	200	200	200				
	1.3 Meningkatkan akses terhadap teknologi tepat guna	%	40	60	80	100				
	1.4 Meningkatkan taraf hidup petani dan peternak	org	200	200	200	200				

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan : Pemberdayaan nelayan	2.1 Terbentuknya kelembagaan lokal nelayan	klp	20	20	20	20	Rp2,000,000,000	zakat	desa	BAZNAS
	2.2 Meningkatnya kapasitas nelayan	org	200	200	200	200				BAZNAS
	2.3 Meningkatnya akses nelayan terhadap teknologi tepat guna	%	40	60	80	100				
	2.4 Meningkatnya taraf hidup nelayan	org	200	200	200	200				
Nama Kegiatan : Pengembangan UMKM	3.1 Terbentuknya unit usaha berbasis komunitas	klp	20	20	20	20	Rp2,000,000,000	zakat	desa	BAZNAS
	3.2 Meningkatnya kapasitas kewirausahaan masyarakat	org	200	200	200	200				
	3.3 Meningkatnya akses nelayan terhadap teknologi tepat guna	%	40	60	80	100				
	3.4 Meningkatnya taraf hidup masyarakat	org	200	200	200	200				
PROGRAM 2: Pembangunan Infrastruktur Penunjang Produksi Ternak										
Nama Kegiatan 1: Pembangunan Rumah Kompos	1.1 Indikator Kegiatan : Mendorong semangat wirausaha dengan menjual kompos untuk meningkatkan pendapatan peternak mustahik	Balai Ternak	11	23	30	35	Menyesuaikan	Zakat & Infak	Semua Balai Ternak	BAZNAS RI BAZNAS Provinsi BAZNAS Kab/Kota Stakeholder
Nama Kegiatan 2: Pembangunan Unit Pengolahan Pakan	2.1 Indikator Kegiatan : Menjaga persediaan pakan & menekan harga pakan berkualitas	Balai Ternak	10	15	22	25	Menyesuaikan	Zakat & Infak	Semua Balai Ternak	BAZNAS RI BAZNAS Provinsi BAZNAS Kab/Kota Stakeholder
	2.2 Indikator Kegiatan : Mendorong semangat wirausaha dengan menjual pakan ternak untuk meningkatkan pendapatan peternak mustahik	Balai Ternak					Menyesuaikan	Zakat & Infak	Semua Balai Ternak	BAZNAS RI BAZNAS Provinsi BAZNAS Kab/Kota Stakeholder
PROGRAM : BAZNAS Microfinance Desa										
Nama Kegiatan : Inisiasi dan Pengembangan BMD dan Titik Layanan	h1.1 Adanya Unit Layanan Keuangan Microfinance Non Profit di suatu wilayah Desa	Titik	16	21	26	30	20.581.460.915	Infak dan Zakat	30 Desa , 20 Provinsi	BAZNAS
Nama Kegiatan : Permodalan	2.1 Pelaku usaha mikro mendapatkan kemudahan akses permodalan tanpa bunga	KK	5.120	6.656	8.652	11.247	39.088.526.000	Infak dan Zakat	30 Desa , 20 Provinsi	BAZNAS
Nama Kegiatan: Asistensi BMD Baznas Daerah (Daring) dan training program	3.1 BMD BAZNAS Daerah yang akan mendirikan BMD dan pengelola BMD mendapatkan asistensi	Titik	26	27	33	36	650.829.500	Infak dan Zakat	30 Desa , 20 Provinsi	BAZNAS
Nama Kegiatan: Layanan Pengembangan Usaha	4.1 pelaku usaha mikro yang sudah mendapatkan fasilitas pembiayaan mendapatkan fasilitas	Jiwa	6.000	8.000	10.000	12.000	4.141.685.000	Infak dan Zakat	30 Desa , 20 Provinsi	BAZNAS
TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR										
9.5.1* Proporsi anggaran riset terhadap PDB										
Program 2: Riset Strategis Zakat										
Kegiatan 1: Kajian Strategis Seputar Isu Pengelolaan Zakat Terkini	1.1 Penguatan Riset Kelembagaan Zakat	Buku Seputar	2	2	2	2	1.000.000.000	zakat	Nasional	BAZNAS
	1.2 Penguatan Riset Operasi dan Keuangan	Buku	2	2	2	2	1.000.000.000	zakat	Nasional	BAZNAS
	1.3 Penguatan Riset Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Buku	2	2	2	2	1.000.000.000	zakat	Nasional	BAZNAS
	1.4 Tersedianya Database Mustahik Zakat Nasional	Provinsi	10	20	34	34	100.000.000	zakat	Nasional	BAZNAS
	1.5 Penguatan Publikasi dan Jaringan Zakat International	Kegiatan	3	3	3	3	750.000.000	zakat	Nasional dan International	BAZNAS
Tujuan 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN										
Indikator 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.										
Program 1: Balai Ternak										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Kegiatan 1: Pelatihan Peternak / Peningkatan Kapasitas Peternak	1.1 Jumlah balai ternak yang dilatih/ditingkatkan kapasitasnya (memberikan dampak ekonomi, pendidikan, kesehatan, spiritual dan kelembagaan)	Balai Ternak	22	28	36	46	Menyesuaikan	Zakat & Infak	Semua Balai Ternak	BAZNAS
PROGRAM SYIAR EDUKASI										
Kegiatan 1	1.1 Terhimpun Data <i>Ashnaf</i> Mualaf BAZNAS Se Indonesia	Kegiatan	Terintegrasi data mualaf BAZNAS se-	Terintegrasi data mualaf MCB se-	Terintegrasi data mualaf BAZNAS se-Indonesia	Terintegrasi data mualaf jaringan	48.000.000	Zakat	Lintas Indonesia	BAZNAS
PROGRAM ADVOKASI										
Kegiatan 1: Mualaf Kit	1.1 Terdistribusikannya Paket Mualaf Kit di Titik Lokasi Baru	Titik Lokasi	Terdistribusi di 10 titik	Terdistribusi di 13 titik	Terdistribusi di 16 titik	Terdistribusi di 20 titik	180.000.000	Zakat	JABODETABEK, Banten, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Utara, NTT	BAZNAS
Kegiatan 2 : Rumah Dakwah BAZNAS	1.1 Terlaksananya 100% Kegiatan Pembinaan di Rumah Dakwah BAZNAS 1.2 Pemahaman Akidah dan Ibadah Mualaf Meningkat 30% dari 50% Jumlah Binaan di Rumah Dakwah BAZNAS	Titik Lokasi	Tersedianya 1 shelter Mualaf Wanita	Tersedianya 2 Shelter Mualaf: 1 Wanita dan 1 Pria	Tersedianya 1 shelter permanen wanita	Tersedianya 2 shelter permanen: 1 wanita dan 1 Pria	1.728.000.000	Zakat	JABODETABEK, Banten, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Utara, NTT	BAZNAS
Kegiatan 3 : Pendampingan & Advokasi	1.1 Terlayannya 50% Kasus Advokasi yang Ada di Setiap Titik Lokasi	Titik Lokasi	Teradvokasinya 10 Mualaf pada setiap bidang Ekonomi, hukum, kesehatan, Pendidikan dan fasilitas Ibadah	Teradvokasinya 20 Mualaf pada setiap bidang Ekonomi, Hukum, Kesehatan, Pendidikan dan fasilitas Ibadah	Teradvokasinya 30 Mualaf pada setiap bidang ekonomi, hukum, Kesehatan, Pendidikan dan fasilitas ibadah	Teradvokasinya 40 Mualaf pada setiap bidang ekonomi, hukum, Kesehatan, Pendidikan dan fasilitas ibadah	1.152.000.000	Zakat	JABODETABEK, Banten, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Utara, NTT	BAZNAS
Kegiatan 4 : Training Paralegal	1.1 50 Da'i dan/atau Pembina Mualaf (BAZNAS Daerah/Lembaga Pembina Mualaf) Mengikuti Training Paralegal 1.2 Pemahaman Da'i meningkat 30% dari Seluruh Peserta yang Mengikuti Training Paralegal	Titik Lokasi	Terlaksana di 1 titik lokasi	Terlaksana di 3 titik lokasi	Terlaksana di 5 titik lokasi	Terlaksana di 7 titik lokasi	48.000.000	Zakat	JABODETABEK, Banten, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Utara, NTT	BAZNAS
Kegiatan 5 Program Dukungan Fasilitas Ibadah	1.1 Terdistribusikannya Paket Fasilitas Ibadah 13 Titik Rawan Akidah di JABODETABEK	Titik Lokasi	terdistribusikan di 15 titik	terdistribusikan di 17 titik	terdistribusikan di 19 titik	terdistribusikan di 21 titik	222.048.000	Zakat	JABODETABEK, Banten, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Utara, NTT	BAZNAS
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN										
Indikator 14.2.1* Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan										
Nama Kegiatan 1: Konservasi mangrove	1.1 Output Kegiatan Terjaganya kelestarian ekosistem di daerah muara dan pantai	Titik	5	5	5	5	50	Infraq/DSKL	Desa pesisir	BAZNAS

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
1.2 Output Kegiatan Membangun ekowisata hutan mangrove										
Nama Kegiatan 2: Budidaya kerang dan rumput laut	2.1 Output Kegiatan Terciptanya kawasan sentra budidaya dengan komoditas unggulan 2.2 Output Kegiatan Tersedianya fasilitas dan pengetahuan mustahik dalam budidaya kerang dan rumput laut	Titik	5	5	5	5	100	Infraq/DSKL	Desa pesisir	BAZNAS
Nama Kegiatan 3: Inisiasi wisata basis laut	3.1 Output Kegiatan Tersedianya fasilitas penunjang pembentukan wisata 3.2 Output Kegiatan Dukungan dari pemerintah setempat 3.3 Output Kegiatan Promosi tempat wisata	Titik	10	10	10	10	100	Infraq/DSKL	Desa pesisir	BAZNAS
Indikator 14.b.1.(a) Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.										
Nama Program: Pembentukan UKM bagi nelayan										
Nama Kegiatan 1: Pembentukan UKM basis hasil laut	1.1 Output Kegiatan Pelatihan UKM 1.2 Output Kegiatan Tersedianya fasilitas kegiatan UKM	unit	20	20	20	20	200	Infraq/DSKL	Desa pesisir	BAZNAS
Nama Program: Penyulingan air laut										
Nama Kegiatan 1: Penyulingan air laut	1.1 Output Kegiatan Tersedianya fasilitas sistem penyulingan	paket	5	5	5	5	1.000	Infraq/DSKL	Desa pesisir	BAZNAS
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN										
INDIKATOR SDGs: 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.										
PROGRAM 1: Aktif dalam gerakan zakat dunia										
Kegiatan 1: World Zakat Forum (WZF) International Conference	1.1 Terselenggara kegiatan World Zakat Forum International Conference setiap tahun	Kegiatan	1	1	1	1	500	Zakat	International	BAZNAS, World Zakat Forum
Kegiatan 2: World Zakat Forum Research and Development	2.1 Tersusunnya Riset dan Kajian Strategis Seputar isu zakat dunia	Kajian	1	1	1	1	500	Zakat	International	BAZNAS, World Zakat Forum
Nama Pemangku Kepentingan: LAZ Harfa										
Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	2021	2022	2023	2024	Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.										
Nama Program 1: Penyediaan Sarana Air Bersih Sehat										
Nama Kegiatan 1: Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)	1.1 Output Kegiatan : Jumlah SAB dibangun	Unit	20	25	30	45	136	3.400	Provinsi Banten : Serang (28), Pandeglang (36), Lebak (32), Cilegon (25), Tangerang	Laz Harfa & Mitra
	1.2 Output Kegiatan : Jumlah penerima manfaat SAB	Jiwa	1.960	2.450	2.940	4.410	13.328			
Nama Kegiatan 2: Pembangunan MCK	2.1 Output Kegiatan : Jumlah MCK dibangun	Unit	15	20	25	40	110	4.400	Provinsi Banten : Serang (22), Pandeglang (31), Lebak (27), Cilegon (20), Tangerang	Laz Harfa & Mitra
	2.2 Output Kegiatan : Jumlah penerima manfaat MCK	Jiwa	1.470	1.960	2.450	3.920	10.780			
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Program 2: Community Led Total Sanitation (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)										
Nama Kegiatan 1: Pembangunan Jamban Non Subsidi	1.1 Output Kegiatan : Jumlah Jamban dibangun	Unit	200	250	300	350	1.226	3.065	Provinsi Banten : Serang (275), Pandeglang (376), Lebak (300), Cilegon (175),	Laz Harfa & Mitra
	1.2 Output Kegiatan : Jumlah penerima manfaat Jamban	Jiwa	600	750	900	1.050	3.678			
Nama Kegiatan 2: Deklarasi Kampung Open Defecation Free (ODF)	2.1 Output Kegiatan : Jumlah Kampung yang ODF	Kampung	10	15	20	25	75	375	Provinsi Banten : Serang (10), Pandeglang (25), Lebak (20), Cilegon (10)	Laz Harfa & Mitra
Nama Program 3: Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air										
Nama Kegiatan 1: Fasilitas Sarana CTPS	1.1 Output Kegiatan : Jumlah CTPS (Desa & Perkotaan)	Unit	30	35	40	45	150	300	Provinsi Banten : Serang , Pandeglang, Lebak , Cilegon, Tangerang	Laz Harfa & Mitra
	1.2 Output Kegiatan : Jumlah penerima manfaat CTPS	Jiwa	2.880	3.360	3.840	4.320	14.400			
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI										
INDIKATOR 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. INDIKATOR 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin INDIKATOR 8.5.1* Upah rata-rata per jam kerja INDIKATOR 8.5.2* Tingkat Pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur INDIKATOR 8.5.2.(a) Tingkat Setengah Pengangguran Nama Program 2: Kelompok KKM - Produksi Lokal										
Nama Kegiatan 1: Pelatihan Kewirausahaan dan Peningkatan Produksi Lokal	1.1 Output Kegiatan : Jumlah pelatihan	Kali	5	7	9	12	90	Tahun 2020 Dana tersedia ; Tahun 2021 sebagian dana tersedia ; Tahun 2022-2024 Dana belum tersedia (akan dilakukan fundrising melalui crowdfunding dan kemitraan)	Provinsi Banten : Kab. Pandeglang (12, Kab. Lebak (10), Kab/Kota Serang (7), Kota Cilegon (5), Kab/Kota Tangerang (2)	Laz Harfa dan Mitra
	1.2 Output Kegiatan : Jumlah penerima manfaat pelatihan	Jiwa	50	70	90	120			Provinsi Banten : Kab. Pandeglang (120), Kab. Lebak (100), Kab/Kota Serang (70), Kota Cilegon (50), Kab/Kota Tangerang (20)	
Nama Kegiatan 2: Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Produksi	2.1 Output Kegiatan : Jumlah kelompok produksi lokal yang terbentuk	Kelompok	5	7	9	12	900	Tahun 2020 Dana tersedia ; Tahun 2021 sebagian dana tersedia ; Tahun 2022-2024 Dana belum tersedia (akan dilakukan fundrising melalui crowdfunding dan kemitraan)	Provinsi Banten : Kab. Pandeglang (12, Kab. Lebak (10), Kab/Kota Serang (7), Kota Cilegon (5), Kab/Kota Tangerang (2)	Laz Harfa dan Mitra
	2.2 Output Kegiatan : Jumlah anggota kelompok produksi lokal	Jiwa	50	70	90	120			Provinsi Banten : Kab. Pandeglang (120), Kab. Lebak (100), Kab/Kota Serang (70), Kota Cilegon (50), Kab/Kota Tangerang (20)	
Nama Program 3: Kelompok KKM - Warung KKM										
Nama Kegiatan 1: Pelatihan	1.1 Output Kegiatan : Jumlah pelatihan kewirausahaan dan tata kelola warung kkm	Kali	5	10	10	15		Tahun 2020 Dana tersedia ; Tahun 2021 sebagian dana tersedia ; Tahun 2022-2024	Provinsi Banten : Kab. Pandeglang (18), Kab. Lebak (13), Kab/Kota Serang (8), Kota Cilegon (5), Kab/Kota Tangerang (2)	

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Kewirausahaan dan Tata Kelola Warung KKM						115				
1.2 Output Kegiatan : Jumlah penerima manfaat pelatihan kewirausahaan dan tata kelola warung kkm	Jiwa	50	100	100	150		Dana belum tersedia (akan dilakukan fundrising melalui crowdfunding dan kemitraan)	Provinsi Banten : Kab. Pandeglang (180), Kab. Lebak (130), Kab/Kota Serang (80), Kota Cilegon (50), Kab/Kota Tangerang (20)	Laz Harfa dan Mitra	
Nama Kegiatan 2: Pembentukan dan Pendampingan Warung KKM	2.1 Output Kegiatan : Jumlah kelompok yang terbentuk	Kelompok	5	10	10	15	1.150	Tahun 2020 Dana tersedia ; Tahun 2021 sebagian dana tersedia ; Tahun 2022-2024 Dana belum tersedia (akan dilakukan fundrising melalui crowdfunding dan kemitraan)	Provinsi Banten : Kab. Pandeglang (18), Kab. Lebak (13), Kab/Kota Serang (8), Kota Cilegon (5), Kab/Kota Tangerang (2)	Laz Harfa dan Mitra
	2.2 Output Kegiatan : Jumlah anggota kelompok	Jiwa	50	100	100	150				
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN										
Indikator 11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.										
Nama Program 6: Bedah Rumah untuk Dhuafa										
Nama Kegiatan 1: Pembangunan Rumah untuk Dhuafa	1.1 Output Kegiatan : Pembangunan Rumah	unit	6	8	10	12	600	Tahun 2020 Dana tersedia ; Tahun 2021	Provinsi Banten : Lebak, Serang, Pandeglang, Cilegon,	Laz Harfa & Mitra
	1.2 Output Kegiatan : Jumlah Penerima Manfaat	KK	24	32	40	48				
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN										
Indikator: 14.1.1(a) Indeks eutrofikasi pesisir dan (b) kepadatan sampah plastik terapan										
Indikator: 14.1.1(a) Presentase penurunan sampah terbuang ke laut										
Nama Program: Bak Sampah Terintegrasi Pesisir Banten										
Nama Kegiatan 1: Pelatihan Pengelolaan Sampah	1.1 Output Kegiatan : Pelatihan Pengelolaan Sampah	pelatihan	4	10	10	10	340	Dana belum tersedia (akan dilakukan fundrising melalui crowdfunding dan	Provinsi Banten : Serang, Pandeglang, Cilegon, Lebak, Tangerang	Laz Harfa & Mitra
	1.2 Output Kegiatan : Jumlah Penerima Manfaat	Jiwa	200	500	500	500				
Nama Kegiatan 2: Pembangunan Bak Sampah	2.1 Output Kegiatan : Pembangunan Bak Sampah	unit	4	10	10	10	4.182	Dana belum tersedia (akan dilakukan fundrising melalui crowdfunding dan	Provinsi Banten : Serang, Pandeglang, Cilegon, Lebak, Tangerang	Laz Harfa & Mitra
	2.2 Output Kegiatan : Pengelolaan Sampah	pelatihan	48	120	120	120	2.040			
Indikator 14.2.1* Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan										
Nama Program: Konservasi Terumbu Karang										
Nama Kegiatan 1: Pelatihan Transplantasi Terumbu Karang	1.1 Output Kegiatan : Pelatihan Transplantasi Terumbu Karang	Kali	2	4	4	4	700	Dana belum tersedia (akan dilakukan fundrising melalui	Provinsi Banten : Pandeglang, Serang	Laz Harfa & Mitra
	1.2 Output Kegiatan : Jumlah Penerima Manfaat	Paket	100	200	200	200				
	1.1 Output Kegiatan : Transplantasi Terumbu Karang	Paket	500	1.000	1.000	1.000	1.050			

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Kegiatan 2: Transplantasi Terumbu Karang	1.2 Output Kegiatan : Pendampingan Masyarakat Pesisir Kali	200	400	400	400	5.600	Dana belum tersedia (akan dilakukan fundrising melalui crowdfunding dan kemitraan)	Provinsi Banten : Pandeglang, Serang	Laz Harfa & Mitra	
Nama Pemangku Kepentingan: WWF										
TUJUAN 13 MENGAMBIL TUJUAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA										
Indikator 13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang										
PROGRAM : Replikasi model terbaik pendampingan masyarakat dan pengembangan sumber penghidupan di Kalimantan Barat										
Kegiatan 1: Pengembangan bakar bersih	Jumlah kelompok tani yang melakukan pengembangan bakar bersih (Standar SNI 06-2047-2002)	Kelompok Tani (14 Poktan)	peningkatan 30% Pendapatan	peningkatan 30% Pendapatan			Rp	WWF	Desa Labian Iraang, Labian, Sungai Ajung, Pulau manak, Tanjung, Kelakar, Mentawit, Na Tepuai, Lubuk Antuk, Merarai 1 dan merarai 2 , sungai segak, kayu bunga dan Poring	WWF, Pemda, Desa
Kegiatan 2: Pengembangan Madu Hutan	Jumlah kelompok tani yang melakukan pengembangan madu hutan di sekitar perusahaan IUPHHK-HA kab Ketapang	Kelompok Tani (2 Poktan)	Pendampingan/ Serial pelatihan (sekolah lapang) terlaksana – Uji Coba sertifikasi organik	Pendampingan/ Serial pelatihan (sekolah lapang) terlaksana – Uji Coba sertifikasi organik			Rp.	WWF	Desa Labian Iraang, Labian, Sungai Ajung, Pulau manak, Tanjung, Kelakar, Mentawit, Na Tepuai, Lubuk Antuk, Merarai 1 dan merarai 2 , sungai segak, kayu bunga dan Poring	WWF
Kegiatan 3: Pengembangan bibit karet unggul	umlah kelompok tani yang melakukan pengembangan pusat pembibitan karet unggul	Kelompok Tani (14 Poktan)	Pendampingan/ Serial pelatihan (sekolah lapang) pembibitan				Rp.	WWF	Desa Kayong Utara dan Kayong Hulu, Kab Ketapang	WWF
Kegiatan 4: Pengembangan Agroforestry	Jumlah KUPS yang mengembangkan Agroforestry Kopi dan Jagung	6 KUPS LPHD Kalibandung	pendampingan rencana usaha KUPS LPHD alibandung	600 ha agroforestry di lahan HPK Hutan desa Kalibandung Kuburaya			Rp.	WWF	Desa Labian Iraang, Labian, Sungai Ajung, Pulau manak, Tanjung, Kelakar, Mentawit, Na Tepuai, Lubuk Antuk, Merarai 1 dan merarai 2 , sungai segak, kayu bunga dan Poring	WWF
PROGRAM : Pengembangan Pangan Bijak (Hijau, lokal, sehat, adil) Nusantara										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Kegiatan 1: Kampanye Pangan Bijak Nusantara	Jumlah lokasi pelaksanaan Kampanye Pangan Bijak Nusantara	3 lokasi target	- Identifikasi dan kajian pangan lokal terlaksana - Identifikasi mitra dan event strategis untuk kolaborasi terlaksana - Komitmen kolaborasi untuk mendorong pangan bijak terbangun bersama mitra	- Minimal 2 event kolaborasi untuk kampanye pangan bijak bersama mitra terlaksana - Produk komunikasi (buku, leaflet, booklet, siaran radio dll) terdistribusi	- Minimal 2 event kolaborasi untuk kampanye pangan bijak bersama mitra terlaksana - Produk komunikasi (buku, leaflet, booklet, siaran radio dll) terdistribusi	Konsumsi pangan bijak (hijau, lokal, sehat, adil) setidaknya meningkat 20%	Rp	WWF Indonesia	Kota Pontianak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu	WWF Indonesia
Kegiatan 2: Pengembangan Pangan Bijak	Jumlah forum/kebijakan yang mendorong dukungan/kebijakan pemerintah daerah untuk pengembangan pangan bijak	- 1 Forum - 1 produk kebijakan	Mitra strategis untuk forum bijak teridentifikasi	- Mitra sepakat membangun multi stakeholder forum untuk pangan bijak - Rencana tindak lanjut Forum Pangan Bijak (mengakomodir kebijakan terkait pangan bijak) terbangun - Salah 1 rencana tindak lanjut forum pangan bijak terfasilitasi	- Draft kebijakan terkait dukungan terhadap pangan bijak terbangun - RTL forum pangan bijak terfasilitasi	Adanya kebijakan dan dukungan (program/kegiatan/pendanaan) Pemda terkait pengembangan pangan bijak	Rp	WWF Indonesia	Kabupaten Melawi	WWF Indonesia
PROGRAM : Membantu desain dan penataan ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)										
Kegiatan 1: Pengembangan KSK	Jumlah informasi ilmiah yang tersedia untuk penyusunan konsep pengembangan KSK	1	verifikasi lapangan untuk ICP/GCP bersama BIG dan pemda Sintang terlaksana	verifikasi titik ICP/GCP diapproved oleh BIG	laporan rancangan detail JSJ submitted to DPRD		Rp	WWF	KSK LHK, KASK Koridor, KSK Agropolitan	WWF

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Kegiatan 2: Studi KLHS dan HCV	Jumlah Studi KLHS dan HCV di melawi dan Sintang	1	kajian terlaksana	dokumen HCV dan KLHS submitted	formulasi NO and GO areas submitted, Rencana Aksi Sintang Lestari (RAD SL) implement		WWF	Dusun Sungai Mali, Desa Seberu	WWF	
	Jumlah rumusan konsep pengembangan ekonomi di dalam KSK Agropolitan	1				Rp	WWF	KSK Agropolitan & KSK Koridor Labian-Leboyan	WWF	
	Jumlah rumusan kebijakan pengembangan pola dan struktur ruang untuk kepentingan lingkungan dan kehutanan Kab. Sintang	- 1 produk DRAFT kebijakan			implementasi KSK LHK		Rp	WWF	Kecamatan Serawai dan Ambalau	WWF
Kegiatan 2: Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah lokasi pelatihan pembuatan website desa	6 lokasi target	web desa online	web desa online		Rp.	WWF	Desa Tanjung, Melemba, (kapuas Hiulu), desa Sungai Segak (Sintang), desa Kayu Bunga (Melawi) desa Kayong Utara dan Kayong Hulu (ketapang)	WWF	
	Jumlah lokasi pelatihan kewirausahaan dan rencana usaha BUMDes	6 lokasi target	rencana usaha BUMDes	rencana usaha BUMDes		Rp.	WWF	Desa Tanjung, Melemba, (kapuas Hiulu), desa Sungai Segak (Sintang), desa Kayu Bunga (Melawi) desa Kayong Utara dan Kayong Hulu (ketapang)	WWF	
Nama Program: Pengembangan Inventarisasi emisi AFOLU pada tingkat subnasional	1.1 Output Kegiatan: Jumlah desa/kampung yang melakukan webbase MMR disosislisasikan kepada pemilik/pengelola hutan dan lahan, Desa/kampung, swasta dan pengelola pemerintah	Desa/kampung, perusahaan dan UPT pemerintah	10 Desa di Kutai Barat dan Mahakam Ulu, 3 perusahaan, 2 entitas pemerintah		50 Desa diKutai Barat dan Mahakam Ulu, 15 perusahaan, 5 UPT Pemerintah	Rp	WWF, Pemda Provinsi	Kalimantan Timur	WWF	
Nama Kegiatan 1: Pengembangan web based MMR (sistem monitoring dan pelaporan emisi) pada tingkat subnasional	1.2 Output Kegiatan: jumlah daerah yang mengembangkan program webbase MMR di provinsi Jambi, Papua dan Papua Barat	Provinsi	Provinsi Papua	Provinsi Papua	Provinsi Papua	Rp	WWF, Pemda Provinsi	Papua dan Papua Barat, Jambi	WWF	
Program: Leading the Change										
Nama Kegiatan 1: Masyarakat memiliki pengaruh pada proses kebijakan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan hak dan pengelolaan sumber daya alam dan mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari sumber daya tersebut secara berkelanjutan	1.1 Output Kegiatan: Jumlah Kapasitas mitra organisasi masyarakat sipil dan koalisi/forum/platform telah meningkat.	Kelompok masyarakat	4	4	4	4	Rp.	SIDA	Aceh, Jambi, Lampung dan Kaltara	Yayasan WWF Indonesia, AGF, AYE, FPA PSDA, ForMerci, Ruko, Pionir
	1.2 Output Kegiatan: Jumlah Masyarakat Sipil terlibat secara efektif dalam dialog kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam dan energi terbarukan.	Kelompok masyarakat	4	4	4	4	Rp.	SIDA	Aceh, Jambi, Lampung dan Kaltara	Yayasan WWF Indonesia, AGF, AYE, FPA PSDA, ForMerci, Ruko, Pionir
	1.3 Output Kegiatan: Jumlah Organisasi masyarakat sipil terlibat dengan pengambil kebijakan pada upaya memperbaiki kondisi pemungkin untuk keterlibatan dan pengaruh organisasi masyarakat sipil dalam kebijakan dan pengambilan keputusan.	Kelompok masyarakat	4	4	4	4	Rp.	SIDA	Aceh, Jambi, Lampung dan Kaltara	Yayasan WWF Indonesia, AGF, AYE, FPA PSDA, ForMerci, Ruko, Pionir

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
1.4 Output Kegiatan Masyarakat mendapatkan peningkatan dan pemerataan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam dan energi terbarukan yang berkelanjutan.	Kelompok masyarakat	4	4	4	4		SIDA	Aceh, Jambi, Lampung dan Kaltara	Yayasan WWF Indonesia, AGF, AYE, FPA PSDA, ForMerici, Ruko, Pionir
1.5 Output Kegiatan: Champion yang diberdayakan terlibat dan memotivasi berbagai stakeholder dan kalangan pemuda dalam meningkatkan suara mereka untuk pengelolaan sumber daya alam dan energi terbarukan yang berkelanjutan.	Kelompok masyarakat	4	4	4	4		SIDA	Aceh, Jambi, Lampung dan Kaltara	Yayasan WWF Indonesia, AGF, AYE, FPA PSDA, ForMerici, Ruko, Pionir
Nama Program: Pengembangan modul pembelajaran berbasis Environment for Sustainable Development (ESD)	1.1 Materi edukasi terkait konservasi dan lingkungan (1 buku panduan birdwatching)	Lesson-learned	6				MAC Philanthropies (WWF-US)	Kabupaten Jayapura, Papua	WWF-Indonesia Program Papua, UNCEN
Nama Kegiatan 1: Mengembangkan materi edukasi untuk dipakai di sekolah formal & non-formal	1.2 Modul pembelajaran ESD yang diterapkan di sekolah formal dan sekolah non-formal (sekolah alam, sekolah lapang, sekolah rimba)	Modul/buku	3				MAC Philanthropies (WWF-US)	Kabupaten Jayapura, Papua	WWF-Indonesia Program Papua, Pemda, Mitra Lokal
	1.3 Jumlah sekolah formal (SD & SMP) yang menerapkan modul ESD yang dikembangkan WWF	Sekolah					MAC Philanthropies (WWF-US)	Kabupaten Asmat, Papua	WWF-Indonesia Program Papua, Pemda
	2.1 video story telling tentang wildlife, konservasi, keanekaragamanhayati	Video	5				Rp. MAC Philanthropies (WWF-US)	Kabupaten Jayapura, Papua	WWF-Indonesia Program Papua
Nama Kegiatan 2: Training of Trainer (ToT) Pengembangan materi edukasi konservasi & perubahan iklim	2.2 25 orang peserta memperoleh materi & memiliki kemampuan <i>story telling</i>	Orang	25				MAC Philanthropies (WWF-US)	Kabupaten Jayapura, Papua	WWF-Indonesia Program Papua

Nama Pemangku Kepentingan: Caritas Indonesia

TUJUAN 13 MENGAMBIL TUJUAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

Indikator 13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana

Nama Program 1: Emergency Appeal (EA) 04/2020 Palu, Sulawesi Tengah

Nama Kegiatan 1: Pembangunan Rumah dan Toilet	1.1 Output kegiatan: 250 unit Rumah Semi Permanen terbangun lengkap dengan toiletnya, untuk 250 KK penyintas.	KK					Telah tercatat pada indikator 1.5.3	Emergency Appeal Caritas Internationalis	Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Palu, Sigi dan Donggala	Caritas Indonesia dan Caritas PSE Manado
Nama Kegiatan 2: Perbaikan Mata Pencapaian	2.1 Output kegiatan: Perbaikan livelihood di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM untuk 79 KK penyintas.	KK								

Nama Program 2: Emergency Appeal (EA) 06/2021 Palu, Sulawesi Tengah

Nama Kegiatan 1 : Pembangunan Rumah dan Toilet	1.1 Output kegiatan: 60 unit Rumah Semi Permanen Tterbangun lengkap dengan toiletnya, untuk 60 KK penyintas.	KK	60				Telah tercatat pada indikator 1.5.3	Emergency Appeal Caritas Internationalis	Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala	Caritas Indonesia dan Caritas PSE Manado
Nama Kegiatan 2 : Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana oleh Masyarakat (CMDRR)	2.1 Output kegiatan: 20 KK melaksanakan rencana aksi komunitas di bidang Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	KK	20							

Nama Program 3: Program AO /2019/014 Palu, Sulawesi Tengah

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun (Rupiah (Juta))	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Kegiatan 1 : Pembangunan Rumah dan Toilet	2.2 Output kegiatan: 261 Unit rumah semi permanen terbangun lengkap dengan toiletnya, untuk 261 KK penyintas.	KK					Telah tercatat pada indikator 1.5.3	Konferensi Uskup Italia melalui Caritas Italiana	Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Palu, Sigi dan Donggala	Caritas Indonesia dan Caritas PSE Manado
Nama Kegiatan 2 : Pelatihan Pertanian untuk pemulihan mata pencaharian	2.1 Output kegiatan: 47 KK penyintas terlibat dalam pelatihan pertanian	KK								
Nama Kegiatan 3 : Pengurangan Resiko Bencana oleh masyarakat	3.1 Output kegiatan: 36 orang terlibat dalam pelatihan PRB.	Jiwa								
Nama Kegiatan 4 : Pendidikan anak sekolah masa darurat.	4.1 Output kegiatan: 40 orang anak usia sekolah terlibat dalam kegiatan pendidikan non formal.	Jiwa								
Nama Program 4: Emergency Appeal (EA) 02/2021 Mamuju, Sulawesi Barat										
Nama Kegiatan 1 : Penyaluran paket Sembako, perlengkapan kebersihan keluarga dan paket bukan makanan	1.1 Output kegiatan: 2000 KK mendapatkan bantuan paket Sembako, perlengkapan kebersihan keluarga dan paket bukan makanan.	KK	2.000				Telah tercatat pada indikator 1.5.3	Caritas Internasionalis	Propinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju dan Majene	Caritas Indonesia dan Caritas PSE Keuskupan Agung Makassar
Nama Kegiatan 2 : Pelayanan kesehatan masa emergency	2.1 Output kegiatan: 1,946 Jiwa mendapatkan pelayanan kesehatan masa emergency	Jiwa	1.946							
Nama Program 5: Program AO /2021/007 Mamuju, Sulawesi Barat										
Nama Kegiatan 1 : Pembangunan Rumah dan Toilet	1.1 Output kegiatan:141 Unit rumah permanen terbangun lengkap dengan toiletnya, untuk 141 KK penyintas..	KK	141				Telah tercatat pada indikator 1.5.3	Caritas Italiana, Caritas Australia, Donasi Caritas Indonesia dan Jaringan	Propinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju dan Majene	Caritas Indonesia dan Caritas PSE Keuskupan Agung Makassar
Nama Kegiatan 2 : Pelatihan Pertanian untuk pemulihan mata pencaharian	2.1 Output kegiatan: 60 KK penyintas terlibat dalam pelatihan pertanian berbasis CMDRR	KK	60							
Nama Kegiatan 3 : Pelatihan Tanggap Darurat Bencana	3.1 Output kegiatan: 30 Jiwa penyintas terlibat dalam pelatihan tanggap darurat bencana.	Jiwa	30							
Nama Kegiatan 4 : Pendidikan anak sekolah masa darurat.	4.1 Output kegiatan: Anak-anak usia sekolah dari 60 KK terlibat dalam kegiatan pendidikan non formal.	KK	60							
Nama Program 6: Program Tanggap Darurat Banjir Kalimantan Selatan.										
Nama Kegiatan 1 : Penyaluran paket Sembako, perlengkapan kebersihan keluarga, dapur umum, dan obat-obatan.	1.1 Output kegiatan: Penyintas di 81 Desa menerima bantuan Sembako, perlengkapan kebersihan keluarga, dapur umum, dan obat-obatan.	Desa	81				Telah tercatat pada indikator 1.5.3	Dana APP Caritas Indonesia	Kalimantan Selatan, 7 Kabupaten/Kota	Caritas Indonesia dan Caritas PSE Banjarmasin
Nama Program 7: Program Tanggap Darurat Bencana Siklon Tropis Seroja Nusa Tenggara Timur.										
Nama Kegiatan 1 : Penyaluran dukungan dana kepada 4 Keuskupan terdampak.	1.1 Output kegiatan: 4 Keuskupan terdampak menerima bantuan dana tanggap darurat.	Keuskupan	4				Telah tercatat pada indikator 1.5.3	Dana APP Caritas Indonesia	Nusa Tenggara Timur, 6 Kabupaten/Kota	Caritas Indonesia dan 4 Keuskupan terdampak.
Nama Program 8: Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Malaka, Keuskupan Atambua, Nusa Tenggara Timur.										
Nama Kegiatan 1 : Penyaluran paket bantuan pangan	1.1 Output kegiatan: 5,548 KK menerima bantuan pangan.	KK	5.548				Telah tercatat pada indikator 1.5.3	Caritas Indonesia dan donasi melalui Keuskupan Atambua	Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Malaka	Caritas Indonesia dan Caritas Atambua
Nama Kegiatan 2 : Pemulihan mata pencaharian	2.2 Output kegiatan:1,958 KK terlibat dalam kegiatan pemulihan mata pencaharian	KK	1.958							
Nama Kegiatan 1 : Sektor WASH	2.2 Output kegiatan: 2,610 KK menikmati sarana air bersih	KK	2.610							
Nama Program 9: Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Sabu Raijua, Keuskupan Agung Kupang, Nusa Tenggara Timur.										
Nama Kegiatan 1 : Perbaikan rumah yang rusak terdampak bencana siklon tropis Seroja	2.2 Output kegiatan: 400 KK menerima bantuan perbaikan rumah.	KK	400				Telah tercatat pada indikator 1.5.3	Fundraising dari Keuskupan-Keuskupan, Paroki, Lembaga dan Individu	Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua	Caritas Indonesia dan Caritas PSE Keuskupan Agung Kupang
Nama Kegiatan 1 : Pengadaan benih kacang hijau dan shorgum	2.1 Output kegiatan: 400 KK menerima bantuan benih kacang hijau dan shorgum.	KK	400							

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Nama Program 10: Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Sumba Timur, Keuskupan Weetebula, Nusa Tenggara Timur.									
Nama Kegiatan 1 : Distribusi pangan	1.1 Output kegiatan: 620 KK menerima bantuan pangan	KK				Telah tercatat pada indikator 1.5.3	Fundraising dari Keuskupan-Keuskupan, Paroki, Lembaga dan Individu	Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Timur	Caritas Indonesia dan Caritas PSE Keupan Weetebula
Nama Kegiatan 2 : Pemulihan mata pencaharian	2.1 Output kegiatan: 235 KK terlibat dalam kegiatan pemulihan mata pencaharian	KK							
Nama Kegiatan 3 : Sektor WASH	3.1 Output kegiatan: 439 KK menikmati sarana air bersih	KK	439						
Nama Kegiatan 4 : Penguatan Kapasitas Tanggap Darurat	4.1 Output kegiatan: 139 Orang mengikuti pelatihan penguatan kapasitas tanggap darurat.	Jiwa	139						
Nama Program 11: Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Flores Timur dan Lembata, Keuskupan Larantuka, Nusa Tenggara Timur.									
Nama Kegiatan 1 : Sektor Shelter	1.1 Output kegiatan: 300 KK mendapatkan bantuan hunian	KK	300			Telah tercatat pada indikator 1.5.3	Caritas Indonesia dan Jaringan, serta donasi melalui Keuskupan Larantuka	Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata dan Flores Timur Adonara	Caritas Indonesia dan caritas PSE Larantuka
Nama Kegiatan 2 : Perbaikan Mata pencaharian	2.1 Output kegiatan: 1,840 KK mendapat bantuan perbaikan mata pencaharian	KK	1.840						
Nama Kegiatan 3 : Sektor Pangan	3.1 Output kegiatan: 2,849 KK mendapatkan bantuan pangan.	KK	2.849						
Nama Kegiatan 4 : Sektor WASH	4.1 Output kegiatan: 6,500 KK menikmati saran air bersih	KK	6.500						
Nama Kegiatan 5 : Sektor Pendidikan	5.1 Output kegiatan: 355 Jiwa mendapatkan bantuan pendidikan	Jiwa	355						
Nama Kegiatan 6 : Sektor Kesehatan	6.1 Output kegiatan: 176 Jiwa mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa	176						
Nama Kegiatan 7 : Sektor Psikososial	7.1 Output kegiatan: 988 Jiwa mendapatkn layanan psikososial	Jiwa	988						
Nama Kegiatan 8 : Penguatan Kapasitas Kelembagaan	8.1 Output kegiatan: 51 Paroki terlibat dalam kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan	Paroki	51						
Nama Program 12: Program penguatan ketahanan masyarakat yang terdampak tsunami Banten di tengah Pandemi Covid-19.									
Nama Kegiatan 1 : Keluarga tangguh bencana dan desa tangguh bencana.	1.1 Output kegiatan: 6,334 Jiwa terlibat dalam kegiatan keluarga dan desa tangguh bencana di 7 Desa, Kecamatan Sumur, Pandengglang, Provinsi Banten	Jiwa	6.334			Telah tercatat pada indikator 1.5.3	Caritas Germany	7 Desa, Kecamatan Sumur, Pandengglang, Provinsi Banten	Caritas Indonesia dan Caritas Keuskupan Bogor
Nama Program 13: Program Umbrella Regio Sub Kalimantan Barat.									
Nama Kegiatan 1 : Peningkatan mata pencaharian, pengurangan resiko bencana dan promosi pariwisata	1.1 Output kegiatan: 3,902 Jiwa terlibat dalam kegiatan mata pencaharian, pengurangan resiko bencana dan promosi pariwisata	Jiwa	3.902			Telah tercatat pada indikator 1.5.3	Caritas Australia	Keuskupan Agung Pontianak, Keuskupan Ketapang dan Keuskupan Sintang	Caritas Indonesia dan Caritas PSE Pontianak, Caritas Ketapang dan Caritas PSE Sintang.
Nama Program 14: Program Pendampingan Keuskupan bidang tanggap darurat di Banjarmasin.									
Nama Kegiatan 1 : Penguatan organisasi lembaga sosial pastoral keuskupan	1.1 Output kegiatan: 40 Orang terlibat dalam kegiatan penguatan organisasi lembaga sosial pastoral di Banjarmasin	Jiwa	40			Telah tercatat pada indikator 1.5.3	Caritas Australia	Kalimantan Selatan, 7 Kabupaten/Kota	Caritas Indonesia dan Caritas PSE Banjarmasin
Nama Kegiatan 2 : Penguatan kapasitas di bidang tanggap darurat	2.1 Output kegiatan: 40 Orang terlibat dalam kegiatan penguatan kapasitas di bidang tanggap darurat.	Jiwa	40						
Nama Kegiatan 3 : Peningkatan matapencaharian berbasis CMDRR oleh masyarakat	3.1 Output kegiatan: 80 KK terlibat dalam kegiatan CMDRR	KK	80						

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Pemangku Kepentingan: Burung Indonesia										
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN										
Indikator SDGs 15.1.1* Proporsi kawasan hutan terhadap total luas hutan										
Nama Program: Penguatan Aktor Non Pemerintah Dalam Tata Kelola Kehutanan										
Nama Kegiatan: Peningkatan penerapan pengelolaan hutan lestari oleh kelompok jati masyarakat	1.1 Kebun agroforest dikelola secara berkelanjutan	Luas (ha)	94,7				100.000.000	EU - BirdLife	Mbeliling, Manggarai Barat	Burung Indonesia
	1.2. Tersedianya kebun contoh terkait pengelolaan hutan lestari	Jumlah kebun contoh	2				50.000.000	EU - BirdLife	Mbeliling, Manggarai Barat	Burung Indonesia
	1.3. Tersedianya pembibitan tanaman kayu dan buah untuk petani	Jumlah balai	5				140.000.000	EU - BirdLife	Mbeliling, Manggarai Barat	Burung Indonesia
	1.4. Meningkatnya nilai ekonomi kayu masyarakat melalui pemasaran dan pengolahan yang lebih efisien dan efektif	Jumlah (orang)	122				500.000.000	EU - BirdLife	Mbeliling, Manggarai Barat	Burung Indonesia
Nama Kegiatan: Peningkatan peran Komite Mbeliling dalam merekomendasikan program dan atau kebijakan dalam pengelolaan bentang alam Mbeliling	2.1 Data tentang hasil pemantauan bentang alam Mbeliling disampaikan kepada para pihak	Jumlah pertemuan/ diskusi	2				40.000.000	EU - BirdLife	Manggarai Barat	Burung Indonesia
	2.2 Komite Mbeliling merekomendasikan program/kebijakan kepada para pihak terkait dalam konteks pengelolaan bentang alam Mbeliling	Jumlah produk hukum atau kebijakan daerah	1				20.000.000	EU - BirdLife	Manggarai Barat	Burung Indonesia
Nama Program: Pengelolaan Bentang Alam Popayato Paguat Berkelanjutan										
Nama Kegiatan : Rehabilitasi hutan dan lahan terdegradasi.	1.1 Optimalisasi lahan dan hutan terdegradasi dengan pola agroforestry.	Luas (ha)	80				340.000.000	KfW, pm	Pohuwato	Burung Indonesia
	1.2 Monitoring kawasan hutan secara partisiatif oleh KMPH.	kali	4	4	4	4	60.000.000	KfW, pm	Pohuwato, Boalemo	Burung Indonesia
	1.3 Dilakukan monitoring kawasan hutan secara kolaboratif (KMPH,KPH,BKSDA).	kali	2	2	2	2	75.000.000	KfW, pm	Pohuwato, Boalemo	Burung Indonesia
Nama Kegiatan : Membangun kebun bibit masyarakat. (jenis kayu, buah, kakao)	2.1 Dilakukan seri pelatihan pembibitan terhadap kelompok Masyarakat.	Kelompok	16	25	25	25	267.500.000	KfW, pm	Pohuwato	Burung Indonesia
	2.2 Dibangun rumah bibit yang akan dikelola oleh kelompok masyarakat.	unit	2	5	5	5	105.000.000	KfW, Pm	Pohuwato	Burung Indonesia
Nama Program: Memperluas Jaringan Kawasan Lindung Strategis di Hutan Pegunungan Jawa Barat dan Jawa Tengah										
Nama Kegiatan : Pengelolaan berkelanjutan bentang alam pegunungan patuha	1.1 Pemulihan areal hutan lindung terdegradasi (HI Gn. Patuha)	ha	10	10			37.800.000	Rainforest Trust dan PT Geo Dipa Energi Unit Patuha	Jawa Barat	Burung Indonesia, PT Geo Dipa Energi Unit Patuha dan Perum Perhutani
	1.2 Luasan areal hutan lindung terdegradasi	ha					15.900.000	Rainforest Trust dan PT Geo Dipa Energi Unit Patuha	Jawa Barat	Burung Indonesia, PT Geo Dipa Energi Unit Patuha dan Perum Perhutani
Nama Program: Restoring Environmental Services and Protecting Biodiversity in the Hutan Harapan Ecosystem Restoration Concession, Sumatra										
Nama Kegiatan : Perlindungan dan Monitoring kawasan hutan	1.1 Menurunnya laju deforestasi	ha/tahun					304.888.495	kfw, partner	Hutan Harapan	Burung Indonesia; PT.REKI
	1.2 Luas kawasan hutan yang dipertahankan	hektar	71.198	71.198	71.198	71.198	304.888.495	kfw, partner	Hutan Harapan	Burung Indonesia; PT.REKI
	1.3 Luas kawasan hutan yang dirambah yang berhasil direklam	hektar					521.888.495	kfw, partner dan NABU	Hutan Harapan	Burung Indonesia; PT.REKI
	1.4 Meningkatnya jumlah patroli dan luas wilayah yang dimonitoring	km/hari	3,2	3,5	3,6	4	304.888.495	kfw, partner	Hutan Harapan	Burung Indonesia; PT.REKI

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun (Rupiah (Juta))	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Kegiatan : Pembangunan kesepakatan pengelolaan lahan dan sumberdaya alam)	2.1 Jumlah community yang berada masuk dalam skema kemitraan kehutanan	community	11	12		236.241.240	kfw	Hutan Harapan	Burung Indonesia; PT.REKI	
Nama Program: Program Kemitraan Wallacea (fase 1)										
Nama Kegiatan : Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil di Wallacea dalam Konservasi Kehati	Mempertahankan tutupan hutan di daerah-daerah penting bagi keragaman hayati	hektar			700.000	800.000	20.000.000	CEPF, Pm	Wallacea	Burung Indonesia; mitra CSO lokal
Indikator 15.1.2.(a) Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)										
Nama Program: Penguatan Aktor Non Pemerintah Dalam Tata Kelola Kehutanan										
Nama Kegiatan : Pemantauan Key Biodiversity Area (KBA)	1.1 Tersedia seri data perubahan tutupan hutan di 5 KBA	Luas (ha)	58000				10.000.000	EU - BirdLife	Manggarai Barat	Burung Indonesia
	1.2 Pemantauan hutan dan layanan alam berbasis masyarakat	Jumlah (desa)	16				32.000.000	EU - BirdLife	Mbeliling-Manggarai Barat	Burung Indonesia
Nama Kegiatan : Meningkatkan pelaksanaan KPAD (Kesepakatan Pelestarian Alam Desa) oleh masyarakat	2.1 Tersedianya data dan informasi tentang pelaksanaan KPAD dan dampaknya terhadap pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan	Jumlah desa					16.000.000	EU - BirdLife	Mbeliling-Manggarai Barat	Burung Indonesia
Nama Program: Program Kemitraan Wallacea (fase 1)										
Nama Kegiatan :Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil di Wallacea dalam Konservasi Kehati	Identifikasi Kawasan Penting bagi Keanekaragaman Hayati di Wallacea	Jumlah KBA					200.000.000	Pm	Wallacea	Burung Indonesia;
	Identifikasi dan pengusulan KEE di kawasan Wallacea	KEE	7			12	1.000.000.000	CEPF, pm	Wallacea	Burung Indonesia; mitra CSO lokal
Nama Program: Pengelolaan Bentang Alam Popayato Paguat Berkelanjutan										
Nama Kegiatan : Pemantauan keutuhan Ekosistem di Bentang Alam Popayato Pagat.	1.1 Stabilitnya tutupan hutan kunci di sekitar IBA 228 Popayato Paguat	Luas (ha)	49.726	49.726	49.726	49.726	20.000.000	KfW, Pm	Pohuwato dan Boalemo	Burung Indonesia
	1.2 Monitoring hutan dan biodiversiti partisipatif	kali/Desa	4/6	4/10	4/10	4/10	420.000.000	KfW, Pm	Pohuwato	Burung Indonesia
Nama Program: Memperluas Jaringan Kawasan Lindung Strategis di Hutan Pegunungan Jawa Barat dan Jawa Tengah										
Nama Kegiatan : Identifikasi kawasan bernilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi	1.1 Informasi tutupan vegetasi hutan pegunungan yang memiliki nilai kehati tinggi	blok hutan	3				10.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat dan Jawa Tengah	Burung Indonesia
	1.2 Informasi areal hutan pegunungan yang memiliki nilai kehati tinggi	ha	21000				10.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat dan Jawa Tengah	Burung Indonesia
Nama Kegiatan : Mengusulkan kawasan bernilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi	2.1 Kawasan bernilai kehati tinggi di luar Kawasan Konservasi yang diusulkan sebagai HCV (Hutan Tambakruyung dan Hanjawa Timur, Hutan Gunung Patuha dan Hutan Gunung Kencana - Garut)	ha	21000				100.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
Nama Program: Restoring Environmental Services and Protecting Biodiversity in the Hutan Harapan Ecosystem Restoration Concession, Sumatra										
Nama Kegiatan : Initial recording and review of existing biodiversity studies	1.1 Identifikasi kawasan NKT di Hutan harapan	hektar					100.000.000	kfw	Hutan Harapan	Burung Indonesia; PT.REKI
Indikator 15.2.1.(a) Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju										
Nama Program: Penguatan Aktor Non Pemerintah Dalam Tata Kelola Kehutanan										
Nama Kegiatan : Meningkatkan kapasitas stakeholder kunci di Bentang Alam Mbeliling mengenai perencanaan hutan, pemantauan hutan dan sertifikasi	1.1 Meningkatnya kapasitas KPH dalam pemantauan hutan berbasis aplikasi	Jumlah (orang)	15				50.000.000	EU - BirdLife	Manggarai Barat	Burung Indonesia
	1.2 Adanya aturan lokal tingkat kabupaten yang mendukung pencegahan peredaran kayu ilegal maupun penebangan ilegal	Jumlah produk hukum atau kebijakan daerah		1				25.000.000	EU - BirdLife	Manggarai Barat

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
1.3. Terbentuk dan beroperannya tim kerja lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan SVLK	Jumlah pertemuan/diskusi	2				20.000.000	EU - BirdLife	Manggarai Barat	Burung Indonesia	
1.4. Diterapkannya skema kemitraan kehutanan dalam pengelolaan ekowisata	Luas (ha)	5				100.000.000	EU - BirdLife	Manggarai Barat	Burung Indonesia	
Nama Program: Pengelolaan Bentang Alam Popayato Paguat Berkelanjutan										
Nama Kegiatan : Perlindungan ekosistem hutan dan pemantauan keanekaragaman hayati di KPH Unit III	1.1 Dijalankan Monitoring hutan dan keanekaragaman hayati secara berkala.	kali/ tahun	4	4	4	4	130.000.000	KfW, Pm	Kabupaten Pohuwato	Burung Indonesia
	1.2 Dibangunnya Pos perlindungan hutan terpadu di wilayah KPH.	unit					250.000.000	KfW, Pm	Kabupaten Pohuwato	Burung Indonesia
	1.3 Tersedianya alat pemadam kebaran hutan.	unit					150.000.000	KfW, Pm	Kabupaten Pohuwato	Burung Indonesia
Nama Kegiatan : Penguatan rencana pengelolaan dan pemanfaatan unit Perhutanan Sosial.	2.1 Unit Perhutanan Sosial yang telah berizin dikelola oleh Kelompok Masyarakat pemegang izin.	unit	5	8	8	8	170.000.000	KfW, Pm	Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo	Burung Indonesia
	2.2 Unit Perhutanan Sosial yang baru telah diusulkan ke KLHK.	unit	2	3	3	3	300.000.000	KfW, Pm	Kabupaten Pohuwato	Burung Indonesia
Nama Program: Memperluas Jaringan Kawasan Lindung Strategis di Hutan Pegunungan Jawa Barat dan Jawa Tengah										
Nama Kegiatan : Penguatan tata kelola dan pengelolaan KPH Bandung Selatan	1.1 Pembuatan persemaian tanaman endemik hutan pegunungan	Unit persemaian	1				124.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	1.2 Peningkatan kapasitas staff KPH Bandung Selatan untuk melakukan pemantauan kehati hutan pegunungan bernilai kehati tinggi	Unit KPH	1				15.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	1.3 Membangun alat monitoring kehati dan layanan ekosistem partisipatif	unit alat monitoring	1				10.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	1.4 Melakukan Monitoring kehati dan layanan ekosistem hutan pegunungan secara partisipatif	kegiatan monitoring	2	2	1		74.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	1.5 Membuat perencanaan strategi konservasi tapak areal bernilai konservasi tinggi (dokumen perencanaan strategi konservasi)	unit dokumen	1				15.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
Nama Kegiatan : Penguatan tata kelola dan pengelolaan KPH Garut	2.1 Peningkatan kapasitas staff KPH Garut untuk melakukan pemantauan kehati hutan pegunungan bernilai kehati tinggi	Unit KPH	1				15.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	2.2 Membangun alat monitoring kehati dan layanan ekosistem partisipatif	unit alat monitoring	1				10.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	2.3 Melakukan Monitoring kehati dan layanan ekosistem hutan pegunungan secara partisipatif	kegiatan monitoring	1				15.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	2.4 Membuat perencanaan strategi konservasi tapak areal bernilai konservasi tinggi (dokumen perencanaan strategi konservasi)	unit dokumen	1				15.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
Nama Kegiatan : Penguatan tata kelola dan pengelolaan KPHK Papandayan	3.1 Peningkatan kapasitas staff KPHK Papandayan untuk melakukan pemantauan kehati hutan pegunungan bernilai kehati tinggi	Unit KPH	1				15.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	3.2 Membangun alat monitoring kehati dan layanan ekosistem partisipatif	unit alat monitoring	1				10.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	3.3 Melakukan Monitoring kehati dan layanan ekosistem CA Gn. Papandayan secara partisipatif	kegiatan monitoring	1				15.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	3.4 Memperkuat perencanaan strategi konservasi CA Gn Papandayan (dokumen perencanaan strategi konservasi)	unit dokumen	1				15.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
Nama Kegiatan : Penguatan tata kelola dan pengelolaan KPHK Tilu Simpang	4.1 Peningkatan kapasitas staff KPHK Tilu Simpang untuk melakukan pemantauan kehati hutan pegunungan bernilai kehati tinggi	Unit KPH	1				15.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	4.2 Membangun alat monitoring kehati dan layanan ekosistem partisipatif	unit alat monitoring	1				10.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	4.3 Melakukan Monitoring kehati dan layanan ekosistem CA Gn. Tilu Simpang secara patisipatif	kegiatan monitoring	1				15.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	4.4 Memperkuat perencanaan strategi konservasi CA Gn Tilu Simpang (dokumen perencanaan strategi konservasi)	unit dokumen	1				15.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
Nama Program: Restoring Environmental Services and Protecting Biodiversity in the Hutan Harapan Ecosystem Restoration Concession, Sumatra										
Nama Kegiatan : Pelibatan stakeholder	1.1 Jumlah MoU antara Hutan Harapan dengan KPH	kph		2		3	298.085.140	kfw	Hutan Harapan	Burung Indonesia; PT.REKI
Nama Program: Menyelamatkan hutan dan burung endemik di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara.										
Nama Kegiatan : Pemetaan/identifikasi penggarap lahan, fasilitasi komunikasi antara KPH dan masyarakat sekitar HL Sahendaruman II	1.1 Adanya data penggarap lahan di dalam kawasan dan komunikasi awal tentang kerjasama pengelolaan kawasan hutan lindung	desa	1				4.880.000	BirdLife - PEP (Preventing Extinction Program)	HL Sahendaruman II, Sangihe, Sulawesi Utara.	BURUNG Indonesia
	1.2 Adanya informasi mengenai kawasan hutan Sahendaruman, sejarah pengelolaan kawasan dan apa yang diinginkan atau harapan penggarap lahan	desa	2				6.360.000	BirdLife - PEP (Preventing Extinction Program)	HL Sahendaruman II, Sangihe, Sulawesi Utara.	BURUNG Indonesia
	1.3 Adanya informasi mengenai kawasan hutan Sahendaruman, sejarah pengelolaan kawasan dan program apa yang akan dilakukan oleh KPH (RPJHP).	desa	2				2.100.000	BirdLife - PEP (Preventing Extinction Program)	HL Sahendaruman II, Sangihe, Sulawesi Utara.	BURUNG Indonesia
	1.4 Adanya kesepakatan dan kesepakatan tentang pengelolaan kawasan hutan Gunung Sahendaruman. Teridentifikasi poin-poin awal program kerjasama KPH-Masyarakat	desa	2				4.800.000	BirdLife - PEP (Preventing Extinction Program)	HL Sahendaruman II, Sangihe, Sulawesi Utara.	BURUNG Indonesia
	1.5 Disahkan atau dilegalisasi dokumen kesepakatan/perjanjian kerjasama antara KPH dengan masyarakat.	desa	2				800.000	BirdLife - PEP (Preventing Extinction Program)	HL Sahendaruman II, Sangihe, Sulawesi Utara.	BURUNG Indonesia
Indikator 15.3.1* Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan										
Nama Program: Program Kemitraan Wallacea (fase 1)										
Nama Kegiatan : Meningkatkan pengelolaan bentang alam produksi yang berkelanjutan bagi pelestarian kehati	Luas bentang alam produksi (bukan kawasan konservasi) yang dikelola secara berkelanjutan	hektar				250.000	2.000.000.000	CEPF, Pm	Wallacea	Burung Indonesia;
Nama Program: Penguatan Aktor Non Pemerintah Dalam Tata Kelola Kehutanan										
Nama Kegiatan : Penyusunan rencana tata guna lahan desa untuk mendukung pengelolaan ruang secara berkelanjutan	1.1 Tersusunnya dokumen rencana tata guna lahan desa yang berwawasan lingkungan	Jumlah (desa)	13				50.000.000	EU - BirdLife	Mbeliling, Manggarai Barat	Burung Indonesia
Nama Program: Pengelolaan Bentang Alam Popayato Paguat Berkelanjutan										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan : Penyusunan rencana tata guna lahan desa untuk mendukung pengelolaan ruang secara berkelanjutan	1.1 Tersusunnya dokumen rencana tata guna lahan desa sebagai tindak lanjut Kesepakatan Pelestarian Alam Desa (KPAD)	Desa	2	4	10	15	525.000.000	KfW, Pm	Bentang Alam Popayato Paguat, Pohuwato-Gorontalo	Burung Indonesia
	1.2 Terlaksana monitoring implemetasi tata guna lahan desa	Desa	2	4	10	15	87.500.000	KfW, Pm	Pohuwato,Boalemo	Burung Indonesia
Nama Program: Memperluas Jaringan Kawasan Lindung Strategis di Hutan Pegunungan Jawa Barat dan Jawa Tengah										
Nama Kegiatan : Analisis lahan kritis hutan pegunungan di dalam kawasan konservasi	1.1 Informasi lahan kritis hutan pegunungan jawa di dalam kawasan konservasi (CA Gn. Tilu)	situs					500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	1.2 luasan lahan kritis hutan pegunungan jawa di dalam kawasan konservasi	ha					500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
Nama Kegiatan : Analisis lahan kritis hutan pegunungan di luar kawasan konservasi	2.1 Informasi lahan kritis hutan pegunungan jawa di luar kawasan konservasi	situs					500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	2.2 luasan lahan kritis hutan pegunungan jawa di luar kawasan konservasi (Gn. Slamet, Gn. Cikuray, Gn. Limbung, Gn. Kencana, Gn. Patuha, Hutan Tambakruyung, Gn. Malabar, Gn. Wayang Windu)	ha					500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat dan Jawa Tengah	Burung Indonesia
Nama Kegiatan : Analisis lahan kritis hutan pegunungan di luar kawasan konservasi	3.1 Ijin pengelolaan perhutanan sosial yang mengimplementasikan praktik-praktik untuk memberikan tujuan konservasi kehati	Unit Perhutanan sosial	2				10.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	3.2 luasan lahan di areal Perhutanan sosial yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan kaidah konservasi	ha	150				50.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
Nama Program: Restoring Environmental Services and Protecting Biodiversity in the Hutan Harapan Ecosystem Restoration Concession, Sumatra										
Nama Kegiatan : Implementasi kesepakatan pengelolaan lahan dan sumberdaya alam	1.1 Luas kawasan agroforestry yang masuk dalam wilayah kemitraan kehutanan	hektar	100	120	150	200	300.000.000	kfw, darwin	Hutan Harapan	Burung Indonesia; PT.REKI
Nama Kegiatan : Restorasi Hutan	2.1 Luas kawasan terdegradasi yang ditanami oleh tanaman kehutanan	hektar					200.000.000	kfw, partner	Hutan Harapan	
Indikator 15.4.1* Situs keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi										
Nama Program: Memperluas Jaringan Kawasan Lindung Strategis di Hutan Pegunungan Jawa Barat dan Jawa Tengah										
Nama Kegiatan : Survei biologis pada hutan pegunungan di dalam kawasan konservasi	1.1 Identifikasi keanekaragaman hayati hutan pegunungan dalam kawasan konservasi (CA Gn. Tilu, CA Gn. Simpang, CA Gn. Papandayan, CA Gn. Guntur)	situs	2				120.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	2.1 Identifikasi keanekaragaman hayati hutan pegunungan di luar kawasan konservasi (Gn. Slamet, Gn. Cikuray, Gn. Limbung, Gn. Kencana, Gn. Patuha, Hutan Tambakruyung, Gn. Malabar, Gn. Wayang Windu)	situs	1				240.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat dan Jawa Tengah	Burung Indonesia
Indikator 15.4.2* Indeks tutupan hijau pegunungan										
Nama Program: Memperluas Jaringan Kawasan Lindung Strategis di Hutan Pegunungan Jawa Barat dan Jawa Tengah										
Nama Kegiatan : Analisis spatial tutupan vegetasi hutan pegunungan pada kawasan konservasi di jawa bagian barat	1.1 informasi areal berhutan pada CA Gn. Tilu dan CA Gn. Simpang	ha	21.045				500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	1.2 informasi areal berhutan pada CA Gn. Papandayan	ha	7.772				500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	1.3 informasi areal berhutan pada TWA Kawah Kamojang	ha	3.322				500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024						
Nama Kegiatan : Analisis spatial tutupan vegetasi hutan pegunungan di luar kawasan konservasi di Jawa bagian barat	2.1 Informasi areal berhutan pada hutan lindung Gunung Slamet	ha				500.000	Rainforest Trust	Jawa Tengah	Burung Indonesia		
	2.2 Informasi areal berhutan pada hutan lindung Gn. Patuha	ha	1.476			500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia		
	2.3 Informasi areal berhutan pada hutan lindung Tambakruyung timur	ha	12.271			500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia		
	2.4 Informasi areal berhutan pada hutan lindung Tambakruyung - Hanjajar timur	ha	28.154			500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia		
	2.5 Informasi areal berhutan pada hutan lindung Gn. Kencana - Kab Garut	ha	25.231			500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia		
Indikator 15.5.1* Indeks Daftar Merah (Red-list index)											
Nama Program: Program Kemitraan Wallacea (fase 1)											
Nama Kegiatan : Mengurangi ancaman kepunahan bagi jenis-jenis prioritas darat	jumlah jenis terancam punah yang diintervensi untuk menurunkan ancamannya	jenis				22	1.500.000.000	CEPF, Pm	Wallacea	Burung Indonesia; mitra CSO lokal	
Nama Program: Pengelolaan Bentang Alam Popayato Paguat Berkelanjutan											
Nama Kegiatan : Monitoring Biodiversity dan Satwa kunci di Bentang Alam Popayato Paguat	1.1 Jenis satwa kunci Popayato paguat terpantau secara berkala.	kali/ jenis	4/4	4/4	4/4	4/4	100.000.000	KfW,pm	Pohuwato	Burung Indonesia	
	1.2 Tersedianya data biodiversity di lokasi Pehutan Sosial, dilakukan monitoring berkala.	unit PS		5	8	8	8	160.000.000	KfW,pm	Pohuwato	Burung Indonesia
	1.3 Dilakukan monitorig biodiversity dan jenis satwa kunci area Perhutanan sosial.	kali/unit	1/5	1/8	1/8	1/8	320.000.000	KfW,pm	Pohuwato	Burung Indonesia	
Nama Kegiatan : Melibatkan peran serta masyarakat terhadap konservasi biodiversity.	2.1 Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui kegiatan awareness.	kali/desa	8/8	8/10	8/10	8/10	320.000.000	KfW,pm	Pohuwato	Burung Indonesia	
	2.2 Dilakukan seri pelatihan tentang teknik survey dan monitiring bagi Kelompok Masyarakat Pemantau Hutan (KMPH).	kali/desa	2/8	2/10	2/10	2/10	102.000.000	KfW,pm	Pohuwato	Burung Indonesia	
Nama Program: Memperluas Jaringan Kawasan Lindung Strategis di Hutan Pegunungan Jawa Barat dan Jawa Tengah											
Nama Kegiatan : Survei biologis pada hutan pegunungan dalam kawasan konservasi	1.1 Jumlah jenis satwa (burung, herpetofauna, mamalia) terancam punah secara global pada Cagar Alam Gunung Tilu	jumlah jenis					3.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia	
	1.2 Jumlah jenis satwa (burung, herpetofauna, mamalia) terancam punah secara global pada Cagar Alam Gunung Papandayan	jumlah jenis		9			3.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia	
	1.3 Jumlah jenis satwa (burung, herpetofauna, mamalia) terancam punah secara global pada Cagar Alam Gunung Simpan	jumlah jenis		11			3.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia	
Nama Kegiatan : Survei biologis pada hutan pegunungan di luar kawasan konservasi	2.1 Jumlah jenis satwa (burung, herpetofauna, mamalia) terancam punah secara global pada HL Gn. Slamet	jumlah jenis					3.000.000	Rainforest Trust	Jawa Tengah	Burung Indonesia	
	2.2 Jumlah jenis satwa (burung, herpetofauna, mamalia) terancam punah secara global pada HL Gn. Kencana	jumlah jenis					3.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia	
	2.3 Jumlah jenis satwa (burung, herpetofauna, mamalia) terancam punah secara global pada HL Gn. Patuha	jumlah jenis					3.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia	

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
2.4 Jumlah jenis satwa (burung, herpetofauna, mamalia) terancam punah secara global pada HL Gn. Cikuray	jumlah jenis					3.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia	
2.5 Jumlah jenis satwa (burung, herpetofauna, mamalia) terancam punah secara global pada HL Gn. Limbung	jumlah jenis					3.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia	
2.6 Jumlah jenis satwa (burung, herpetofauna, mamalia) terancam punah secara global pada HL Gn. Wayang Windu	jumlah jenis					3.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia	
2.7 Jumlah jenis satwa (burung, herpetofauna, mamalia) terancam punah secara global pada HL Gn. Malabar	jumlah jenis					3.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia	
2.8 Jumlah jenis satwa (burung, herpetofauna, mamalia) terancam punah secara global pada bagian hutan Tambakruyung-Hanjawar Timur	jumlah jenis					3.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia	
Nama Program: Konservasi burung kicau										
Nama Kegiatan : Kajian supply demand burung berkicau	1.1 Ratio jenis burung kicau lokal hasil tangkapan alam dibandingkan kebutuhan hobiis	persen					30.000.000	Rainforest Trust, March Conservation Fund, VBNs	Jawa Barat, DIY, Jateng	Burung Indonesia
	1.2 Informasi kapasitas penangkaran burung kicau lokal yang memproduksi burung hasil penangkaran	jumlah burung/unit penangkaran/ta hun					30.000.000	Rainforest Trust, March Conservation Fund, VBNs	Jawa Barat, DIY, Jateng	Burung Indonesia
Nama Program: Restoring Environmental Services and Protecting Biodiversity in the Hutan Harapan Ecosystem Restoration Concession, Sumatra										
Nama Kegiatan : Initial recording and review of existing biodiversity studies	1.1 Data populasi Helmeted Hornbil	kali survey	1	1	1	1	100.000.000	Nat Geo, Ernst Kleinworth	Hutan Harapan	Burung Indonesia; PT.REKI
	1.2 Data okupansi Harimau sumatera	kali survey		1		1	100.000.000	kfw;	Hutan Harapan	Burung Indonesia; PT.REKI
	1.3 Data pergerakan gajah sumatera	kali survey	6	6	6	6	150.000.000	IEP, kfw	Hutan Harapan	Burung Indonesia; PT.REKI
	1.5 Data vegetasi atau tutupan lahan untuk dilaporkan ke pemerintah	kali survey	1	1	1	1	100.000.000	kfw	Hutan Harapan	Burung Indonesia; PT.REKI
	1.6 Jumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam mitigasi konflik gajah	orang	20				150.000.000	IEP, kfw	Hutan Harapan	Burung Indonesia; PT.REKI
	1.7 Jumlah pertemuan dengan masyarakat mengenai perlindungan satwa yang terancam punah	kali	4				100.000.000	kfw	Hutan Harapan	Burung Indonesia; PT.REKI
Nama Program: Menyelamatkan hutan dan burung endemik di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara.										
Nama kegiatan : survey populasi dan sebaran empat spesies burung endemis dan terancam punah secara global di HL Sahendaruman, Sangihe, Sulawesi Utara.(Seriwang Sangihe (<i>Eutrichomyias rowleyi</i>), Brinji-emas Sangihe (<i>Thapsinillas platanae</i>), Anis-bentet Sangihe (<i>Coracornis sanghirensis</i>)	1.1 Adanya pembaruan data pada jenis-jenis endemis Sangihe yang terancam punah untuk menunjang perencanaan konservasi yang efektif.	species					90.000.000	BirdLife - PEP (Preventing Extinction Program)	Sahendaruman, Sangihe, Sulawesi Utara.	BURUNG Indonesia
	1.2 Dihasilkannya laporan studi tentang populasi dan distribusi jenis-jenis endemis G. Sahendaruman dan status habitatnyan	Laporan					IDEM	BirdLife - PEP (Preventing Extinction Program)	Sangihe, Sulawesi Utara.	BURUNG Indonesia

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Kegiatan : Disseminasi hasil Survey populasi dan sebaran empat spesies burung endemis dan terancam punah secara global di HI. Sahendarman, bersama para pihak (pemkab, pemdes, LSM dan pihak terkait).	2.1 Adanya dukungan pemerintah daerah dalam upaya pelestarian jenis endemis lewat alokasi anggaran untuk kegiatan konservasi.	Lokakarya/pertemuan	1				22.205.000	BirdLife - PEP (Preventing Extinction Program)	Sangihe, Sulawesi Utara.	BURUNG Indonesia
Nama Program: Pendekatan Holistik dalam Memerangi Perburuan dan Perdagangan Burung Paruh bengkok										
Nama Kegiatan : Survei/Kajian Populasi Paruh bengkok di Pulau Obi	1.1 Adanya pembaruan data burung paruh bengkok di Pulau Obi, untuk menunjang perencanaan konservasi yang efektif di habitatnya.	survey	-	-	-	-		Full Circle Foundation	Hutan Lindung Wehea dan Hutan Adat Muluy, Kalimantan Timur.	BURUNG Indonesia & Rekam Nusantara
Nama Program: Pemantauan Burung dara-laut cina di lokasi migrasinya di wilayah Indonesia (Pulau Seram, Maluku)										
Nama Kegiatan : Pemantauan dan penandaan burung dara-laut di Sawai, Kec. Seram Utara, Propinsi Maluku.	1.1 Adanya pembaruan data burung dara-laut cina di lokasi tujuan migrasinya di Indonesia	survey	-	-	-	-		HKBWS & BirdLife Tokyo	Sawai, Pulau Seram, Maluku	BURUNG Indonesia, HKBWS & BirdLife Tokyo
	1.2 Informasi pergerakan individu burung dara-laut jambul yang ditandai, sebagai indikasi pergerakan dara-laut secara umum.	satelite tag	-	-	-	-	-		HKBWS & BirdLife Tokyo	Sawai, Pulau Seram, Maluku
Nama Program: Menyelamatkan Populasi Kakatua jambul-kuning, (Yellow-Crested Cockatoo, <i>Cacatua sulphurea</i>) di Pulau Sumba.										
Nama Kegiatan : Penguatan kapasitas KMPH disekitar habitat kakatua jambul-kuning	1.1 Peningkatan kapasitas 4 KMPH untuk melakukan pemantauan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati (kawasan Waimanu, Umamanu, Wanokaza / Ponorumbu, Mbilur Pagadu).	kelompok masyarakat	4				153.024.600	Keidanren Nature Conservation Fund (KNCF)	Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur	BURUNG Indonesia
	1.2 Peningkatan kapasitas 4 KMPH untuk mempraktikkan pertanian berkelanjutan.	kelompok masyarakat						Keidanren Nature Conservation Fund (KNCF)	Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur	BURUNG Indonesia
Nama Program: Upaya Konservasi Rangkong Gading pada lokasi potensial di Sumatera dan Kalimantan.										
Nama Kegiatan : Survei Status dan Keberadaan Rangkong Gading di Bentang Alam Kalimantan Timur	1.1 Adanya pembaruan data burung rangkong gading yang terancam punah secara global, untuk menunjang perencanaan konservasi yang efektif di habitatnya.	survey	-	-	-	-	121.500.000	National Geographic	Hutan Lindung Wehea dan Hutan Adat Muluy, Kalimantan Timur.	BURUNG Indonesia & Rekam Nusantara
	1.2 Dihasilkannya laporan studi tentang populasi dan distribusi lokasi target/potensial	Laporan	1					National Geographic	Hutan Lindung Wehea dan Hutan Adat Muluy, Kalimantan Timur.	BURUNG Indonesia
Nama Kegiatan : Survei dan upaya konservasi Rangkong Gading di Hutan Harapan, Jambi.	2.1 Adanya pembaruan data burung rangkong gading di area kerja Hutan Harapan, Jambi.	Lokakarya/pertemuan	1				90.700.000	BirdLife - PEP (Preventing Extinction Program); Ernest Kleinwort Charitable Trust	Hutan Harapan, Jambi.	BURUNG Indonesia & PT REKI
	2.2 Penyadartahuan bagi masyarakat terkait upaya konservasi rangkong di habitat alaminya.	pertemuan	1					BirdLife - PEP (Preventing Extinction Program); Ernest Kleinwort Charitable Trust	Hutan Harapan, Jambi.	BURUNG Indonesia & PT REKI
Indikator 15.6.1* Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Program: Pengelolaan Bentang Alam Popayato Paguat Berkelanjutan										
Nama Kegiatan : Mengawal Kebijakan Pengelolaan Hutan dan Sumber Daya Alam di Kabupaten dan Provinsi	1.1 Tersedianya Rancangan Kebijakan Daerah (Ranperda/Pebup) tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam terpadu.	unit	1				75.000.000	KfW,pm	Kabupaten Pohuwato	Burung Indonesia
	1.2 Terselenggaranya Bimbingan teknis penyusunan RPJMD berbasis Lingkungan dan Ketahanan pangan.	kali	6				30.000.000	KfW,pm	Kab. Pohuwato dan Prov. Gorontalo.	Burung Indonesia
	1.3 Terbentuknya Forum/Pokja multistakeholder untuk urusan pengelolaan Bentang Alam terpadu.	Tim	1				22.500.000	KfW,pm	Pohuwato	Burung Indonesia
Nama Kegiatan : Penguatan perencanaan dan kelembagaan pembangunan desa	2.1 Tersedianya Peraturan desa tentang pengelolaan SDA desa berkelanjutan.	Desa	2	4	15	10	122.500.000	KfW,pm	Kabupaten Pohuwato	Burung Indonesia
	2.2 Tersusunnya dokumen RKPDES yang berwawasan lingkungan.	Desa	2	4	15	10	122.500.000	KfW,pm	Pohuwato	Burung Indonesia
Indikator 15.7.1.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.										
Nama Program: Pengelolaan Bentang Alam Popayato Paguat Berkelanjutan										
Nama Kegiatan : Perlindungan terhadap flora, fauna dan habitatnya.	1.1 Menurunnya tindak kejahatan terhadap lingkungan hidup.	kasus	0	0	0	0				
	1.2 Terlaksananya kegiatan Awareness/ penyuluhan di masyarakat desa sekitar hutan.	kali/Desa	4/10	4/15	4/20	4/25	570.000.000	KfW,pm	Pohuwato	Burung Indonesia
Nama Program: Restoring Environmental Services and Protecting Biodiversity in the Hutan Harapan Ecosystem Restoration Concession, Sumatra										
Nama Kegiatan : Perlindungan dan Monitoring kawasan hutan	1.1 Jumlah kasus P.21	jumlah kasus					304.888.495	kfw, partner	Hutan Harapan	Burung Indonesia; PT.REKI
Indikator 15.9.1.(a) Rencana pemanfaatan Keaneekaragaman Hayati Aichi target 2 dari Rencana Strategis										
Nama Program: Memperluas Jaringan Kawasan Lindung Strategis di Hutan Pegunungan Jawa Barat dan Jawa Tengah										
Nama Kegiatan : Perencanaan konservasi berbasis masyarakat	1.1 Integrasi strategi perlindungan kehati kedalam perencanaan pembangunan desa secara partisipatif di desa penyangga kawasan bernilai kehati tinggi	desa	2				50.000.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	1.2 Integrasi strategi perlindungan kehati kedalam perencanaan pembangunan desa secara partisipatif di desa penyangga kawasan bernilai kehati tinggi	desa		3			150.000.000	March Conservation Fund	Jateng dan DIY	Burung Indonesia
Nama Kegiatan : Pengelolaan berkelanjutan bentang alam pegunungan patuha	2.1 Masyarakat desa memahami praktik budidaya komoditas kopi berkelanjutan	Jumlah pelatihan	3	2			20.000.000	Rainforest Trust dan PT Geo Dipa Energi Unit Patuha		
	2.2 luasan lahan kebun kopi yang dikembangkan dengan pola agroforestry berkelanjutan	ha	5	10			15.000.000	Rainforest Trust dan PT Geo Dipa Energi Unit Patuha	Jawa Barat	Burung Indonesia, PT Geo Dipa Energi Unit Patuha dan Perum Perhutani
Indikator 15.a.1.(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan										
Nama Program: Investasi dalam Inisiatif Ekonomi Hijau di Bentang Alam Mbeliling										
Nama Kegiatan :Bimbingan teknis penyusunan RPJMD Manggarai Barat berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana	1.1 Tersusunnya dokumen RPJMD Manggarai Barat 2021 - 2026 yang berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana	Jumlah sesi	8				100.000.000	BirdLife	Manggarai Barat	Burung Indonesia
Nama Program: Memperluas Jaringan Kawasan Lindung Strategis di Hutan Pegunungan Jawa Barat dan Jawa Tengah										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan : Pengelolaan berkelanjutan bentang alam pegunungan patuha	1.1 Pembuatan persemaian tanaman endemik hutan pegunungan	Unit persemaian	1				150.000.000	Rainforest Trust dan PT Geo Dipa Energi Unit Patuha	Jawa Barat	Burung Indonesia, PT Geo Dipa Energi Unit Patuha dan Perum Perhutani
	1.2 Pembangunan kebun contoh agroforestry kopi	unit	1				44.600.000	Rainforest Trust dan PT Geo Dipa Energi Unit Patuha	Jawa Barat	Burung Indonesia, PT Geo Dipa Energi Unit Patuha dan Perum Perhutani
Indikator 15.c.1.(a) Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL										
Nama Program: Memperluas Jaringan Kawasan Lindung Strategis di Hutan Pegunungan Jawa Barat dan Jawa Tengah										
Nama Kegiatan : Investigasi ancaman kehati pada hutan pegunungan dalam kawasan konservasi	1.1 Jumlah temuan kasus perburuan (jerat burung) pada Cagar Alam Gunung Tilu	jumlah temuan					2.500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	1.2 Jumlah temuan kasus perburuan (jerat burung) pada Cagar Alam Gunung Papandayan	jumlah temuan					2.500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	1.3 Jumlah temuan kasus perburuan (jerat burung) pada Cagar Alam Gunung Simpang	jumlah temuan					2.500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
Nama Kegiatan : Investigasi ancaman kehati pada hutan pegunungan di luar	2.1 Jumlah temuan kasus perburuan (jerat burung) pada HL Gn. Slamet	jumlah temuan					2.500.000	Rainforest Trust	Jawa Tengah	Burung Indonesia
	2.2 Jumlah temuan kasus perburuan (jerat burung) pada HL Gn. Kencana	jumlah temuan					2.500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	2.3 Jumlah temuan kasus perburuan (jerat burung) pada HL Gn. Patuha	jumlah temuan					2.500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	2.4 Jumlah temuan kasus perburuan (jerat burung) pada HL Gn. Cikuray	jumlah temuan					2.500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	2.5 Jumlah temuan kasus perburuan (jerat burung) pada HL Gn. Limbung	jumlah temuan					2.500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	2.6 Jumlah temuan kasus perburuan (jerat burung) pada HL Gn. Wayang Windu	jumlah temuan					2.500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	2.7 Jumlah temuan kasus perburuan (jerat burung) pada HL Gn. Malabar	jumlah temuan					2.500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
	2.8 Jumlah temuan kasus perburuan (jerat burung) pada bagian hutan Tambakruyung-Hanjawar Timur	jumlah temuan					2.500.000	Rainforest Trust	Jawa Barat	Burung Indonesia
Nama Program: Restoring Environmental Services and Protecting Biodiversity in the Hutan Harapan Ecosystem Restoration Concession, Sumatra										
Nama Kegiatan : Perlindungan dan Monitoring kawasan hutan	1.1 Menurunnya jumlah kasus perburuan	jumlah kasus					304.888.495	kfw, partner	Hutan Harapan	Burung Indonesia; PT.REKI
Nama Program: Pendekatan Holistik dalam Memerangi Perburuan dan Perdagangan Burung Paruh bengkok										
Nama Kegiatan : Kajian populasi paruh bengkok secara komprehensif di Maluku Utara	1.1 Memperbarui informasi terkait perburuan dan perdagangan paruh bengkok melalui pemantauan hotspot-hotspot IWT	Survey	-	-	-	-		Full Circle Foundation	Halmahera, Maluku Utara.	BURUNG Indonesia
	1.2 Memperluas studi populasi paruh-bengkok di Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan (Obi)	Survey	-	-	-	-		Full Circle Foundation	Halmahera dan Pulau Obi, Maluku Utara.	BURUNG Indonesia
Nama Kegiatan : Update monitoring perdagangan dan pemelihara burung paruh bengkok di Desa Kosa, Gandasuli, Dodaga, Panamboang, dan Tutuling Jaya, Maluku Utara	2.1 Pembaharuan informasi terkait isu perdagangan dan pemeliharaan burung paruh bengkok di Desa Kosa, Gandasuli, Dodaga, Panamboang, dan Tutuling Jaya, Maluku Utara	desa	4	-	-	-	25.720.000	Full Circle Foundation	Halmahera dan Pulau Bacan, Maluku Utara.	BURUNG Indonesia

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Kegiatan : Kajian/Investigasi perdagangan paruh bengkok ilegal di Maluku (Pulau Seram)	desa	10				49.490.000	Full Circle Foundation	Halmahera dan Pulau Bacan, Maluku Utara.	BURUNG Indonesia	
Nama Program: Menyelamatkan Populasi Kakatua jambul-kuning, (Yellow-Crested Cockatoo, <i>Cacatua sulphurea</i>) di Pulau Sumba.										
Nama Kegiatan : Investigasi perburuan/penangkapan dan perdagangan kakatua Sumba di empat (4) lokasi.	site	4				153.024.600	Keidanren Nature Conservation Fund (KNCF)	Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur	BURUNG Indonesia	
Nama Kegiatan : Lokakarya untuk mengembangkan mekanisme bagi para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam memerangi perdagangan burung ilegal	event	1					Keidanren Nature Conservation Fund (KNCF)	Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur	BURUNG Indonesia	
Nama Pemangku Kepentingan: Aliansi Jurnalis Independen										
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH										
Indikator SDGs 16.10.1.(a) Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media										
Nama Program										
Pelatihan Digital Safety untuk Jurnalis	Pengenalan Tools Keamanan Digital	Peserta	30	45	60	75			AJI	
	Praktek Penerapan Tools Keamanan Digital	Peserta	30	45	60	75			AJI	
	Evaluasi	Peserta	30	45	60	75			AJI	
Pelatihan Paralegal Jurnalis	Tenaga advokasi untuk jurnalis	Peserta	Anggota Div Advokasi AJI Kota	Anggota Div Advokasi AJI Kota	Anggota Div Advokasi AJI Kota	Anggota Div Advokasi AJI Kota			AJI	
	Evaluasi	Peserta	Anggota Div Advokasi AJI Kota	Anggota Div Advokasi AJI Kota	Anggota Div Advokasi AJI Kota	Anggota Div Advokasi AJI Kota			AJI	
Advokasi Bersama Komite Keselamatan Jurnalis	Pemantauan Kasus Kekerasan Jurnalis	Kasus							AJI	
	Penanganan dan Pendampingan	Kasus							AJI	
Nama Pemangku Kepentingan: Childfund Internasional										
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH										
Indikator SDGs 16.2.1 Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir										
Indikator SDGs 16.9 Presentasi Anak yang memiliki Akta Kelahiran										
Nama Program :										
PRIME (Protected and Friendly Environment for children and youth) (termasuk implementasi kebijakan)										
Nama Kegiatan : Penguatan Mekanisme PATBM	1.1 Indikator Kegiatan : Jumlah desa dengan implementasi sistem pencegahan dan pelaporan PA	Desa	15 % dari 60 desa	20 % dari 60 desa	25% dari 60 desa	30 % dari 60 desa		Private and Non Private Funding	8 Propinsi	ChildFund International & Mitra Kerja
	1.2 Indikator Kegiatan : Jumlah Desa yang mempromosikan akuntabilitas layanan PA (responsif, inklusif dan dapat diakses)	Desa	10% dari anggota kelp anak / youth	10% dari anggota kelp anak / youth	10% dari anggota kelp anak / youth	25 % dari anggota kelp anak / youth		Private and Non Private Funding	8 Propinsi	ChildFund International & Mitra Kerja

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun (Rupiah (Juta))	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
1.3 Indikator Kegiatan : Jumlah kasus kekerasan anak yang dirujuk ke layanan PA dan atau layanan keadilan dan Jumlah kelahiran baru yang segera dicatat oleh layanan PA/Kesehatan/desa	kasus Anak, cakupan akta	11 % dari 60 desa	12 % dari 60 desa	13 % dari 60 desa	14 % dari 60 desa		Private and Non Private Funding	8 Propinsi	ChildFund International & Mitra Kerja
1.4 Indikator Kegiatan : Jumlah stakeholder/Institusi layanan/PATBM yang dapat memberikan dukungan psikososial kepada anak dan pengasuh utama	Jumlah stakes/institusi yang ada di latih PSS/CPMS	25% dari institusi layanan yang ada di desa/kab	35% dari institusi layanan yang ada di desa/kab	35% dari institusi layanan yang ada di desa/kab	40% dari institusi layanan yang ada di desa/kab		Private and Non Private Funding	8 Propinsi	ChildFund International & Mitra Kerja
Nama Kegiatan : Akuntabilitas Ramah Anak - Child Friendly Accountability	2.1 Indikator Kegiatan : Jumlah rekomendasi isue anak yang disampaikan oleh forum anak yang dimasukkan dalam rencana kerja/dokument perencanaan pemerintah	Doc Kebijakan/Program	Proporsi kelp anak yang terlibat dan menyuarakan rekomendasi	Proporsi kelp anak yang terlibat memberi masukan terhadap doc perencanaan desa/stakes	Proporsi kelp anak yang terlibat memberi masukan terhadap doc perencanaan desa/stakes		Private and Non Private Funding	8 Propinsi	ChildFund International & Mitra Kerja
Nama kegiatan : Pengasuhan dan dukungan terhadap pengasuh utama	2.3 Indikator Kegiatan : Jumlah pengasuh utama yang mempraktekan pola pengasuhan tanpa kekerasan dan penelantaran anak	keluarga	35% keluarga yang terlibat dalam kelp pengasuhan	40% keluarga yang terlibat dalam kelp pengasuhan	55% keluarga yang terlibat dalam kelp pengasuhan	65% keluarga yang terlibat dalam kelp pengasuhan	Private and Non Private Funding	8 Propinsi	ChildFund International & Mitra Kerja

Nama Pemangku Kepentingan: Serikat Buruh Migran Indonesia

TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Indikator SDGs 8.3.1(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.

Nama Program: Pemberdayaan Ekonomi Untuk Pekerja Migran Melalui Koperasi

Nama Kegiatan : Peningkatan kapasitas tentang koperasi	1.1 Jumlah pengurus koperasi	Pengurus	25	25	25	25	125	Kemitraan	22 Kabupaten	Serikat Buruh Migran Indonesia
	1.2 Jumlah anggota koperasi	Anggota	1000	1000	1000	1000	4600			
Nama Kegiatan : Perekrutan anggota koperasi	2.3 Jumlah anggota yang memproduksi	Produsen	10	20	20	20	75			
	2.4 Jumlah dana koperasi	Dana	800 Jt	1,6 Miliar	3,2 Miliar	6,4 Miliar	12,4 Miliar			
	2.5 Jumlah sebaran koperasi SBMI Mart	Daerah	5	5	5	5	22			

Indikator SDGs 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

Indikator SDGs 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin

Indikator SDGs 8.5.1* Upah rata-rata per jam kerja

Indikator SDGs 8.5.2* Tingkat Pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

Indikator SDGs 8.5.2.(a) Tingkat Setengah Pengangguran

Nama Program: Pendidikan dan Pelatihan Calon PMI

Nama Kegiatan : Pelatihan untuk pelatih	1.1 Jumlah pelatihan	Pelatihan	1	2	2	2	8	KPPPA	7 Provinsi	Serikat Buruh Migran Indonesia
	1.2 Jumlah pelatih meningkat	Jumlah pelatih	50	50	50	50	225			
Nama Kegiatan : Pelatihan calon PMI	2.1 Jumlah lembaga pelatihan SBMI	LPKS	5	5	5	5	20			
	2.2 Jumlah calon PMI yang dilatih	Calon PMI	60	300	300	300	1020			

Nama Program: Perbaikan Layanan Berbasis Gender

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana				
			2021	2022	2023	2024								
Nama Kegiatan : Peningkatan kapasitas desa buruh migran	1.1 jumlah PMI dan keluarga	PMI dan Keluarga	30	30	30	30	120	ILO & UN Women	2 Kabupaten	Serikat Buruh Migran Indonesia				
	1.2 Jumlah desa penerima manfaat	Desa	18	18	18	18	72							
	1.3 Jumlah penjangkauan kabupaten	Kabupaten	2	2	2	2	8							
Nama Kegiatan : Layanan LTSA yang tanggap gender	2.1 Petugas yang tanggap gender	Jumlah petugas	10	10	10	10	40							
	2.2 Sebaran LTSA tanggap gender	LTSA	2	2	2	2	8							
Indikator SDGs 8.8.2 Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.														
Nama Program: Bantuan Hukum Untuk Pekerja Migran Terkendala														
Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Paralegal	1.1 Jumlah pelatihan	Pelatihan	4	4	4	4	20	Kemitraan	30 Kabupaten	Serikat Buruh Migran Indonesia				
	1.2 Jumlah paralegal	Paralegal	50	50	50	50	250							
Nama Kegiatan : Penanganan Kasus	2.1 Jumlah kasus yang ditangani	Cases	700	800	900	1000	4050							
	2.2 Jumlah Hak PMI yang diperjuangkan	Uang	10 M	10 M	10 M	10 M	50 M							
Nama Program: Kampanye Kerja Layak PRT														
Nama Kegiatan : Membuat poster di media sosial	1.1 Peningkatan kapasitas KIE	Alat kampanye	140	280	420	840	1680	Kemitraan	5 Negara	Serikat Buruh Migran Indonesia				
	1.2 Jumlah campaigner	Campaigner	7	14	28	56	105							
	1.3 Jumlah PMI terlibat dalam diskusi	PMI	210	420	840	1680	3150							
Nama Program: Advokasi Kebijakan														
Nama Kegiatan : Mendorong Penerbitan PP Pelindungan ABK Perikanan	1.1 Penelitian untuk membangun baseline	Buku	1	1	1	1	1	Jejaring	Nasional	Serikat Buruh Migran Indonesia				
	1.2 Policy brief	Kertas kebijakan	1	0	0	0	1							
	1.3 Lobby	Audiensi	10	10	10	10	40							
Nama Kegiatan : Mendorong Perda Pelindungan PMI melalui LTSA	2.1 Policy brief	Kertas kebijakan	1	0	0	0	1							
	2.2 Lobby	Audiensi	10	10	10	10	40							
Nama Kegiatan : Mendorong perbaikan layanan perwakilan masa pandemi	3.1 Penelitian	Buku	1				1							
	3.2 Policy brief	Kertas kebijakan	1				1							
Nama Program: Pembentukan SBMI di desa														
Nama Kegiatan : Mendorong Pembentukan SBMI di desa	1.1 Pelatihan organisier	organisier	36	36	36	36	144	SBMI	60 Kabupaten	Serikat Buruh Migran Indonesia				
	1.2 SBMI tingkat desa	Desa	36	36	36	36	144							
	1.3 Sebaran Kabupaten	Kabupaten	15	15	15	15	60							
Nama Pemangku Kepentingan: SDGs Center Universitas Kaltara														
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS														
Indikator 4.1.1 Proporsi anak-anak dan Remaja														
Nama Program :														
Workshop Pelatihan Menejemen Sekolah Jarak Jauh	1.1 . Output Kegiatan: Jumlah Sekolah yang mendapatkan pelatihan manajemen sekolah jarak	Sekolah	15	30	35		580	BMZ	4 Kabupaten dan 1 Kota Propinsi Kalimantan Utara	SDGs Center Unikaltar				
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH														
Indikator SDGs 16.6.2 Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik														
Nama Program :														
Sosisalisasi terkait SDGs di lingkungan OKG	1.1. Output Kegiatan: Jumlah OKG yang mendapatkan sosialisasi terkait SDGs	OKG	15	30	35									
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS														
Indikator SDGs 4.4.1 (a) Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan TIK														
Indikator SDGs 4.6.1 (a) Persentase angka melek aksara penduduk umur >= 15 tahun														
Nama Program :														

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Pelatihan remaja putus sekolah sebagai SDM utama dalam pembangunan daerah	orang	30	90	120			FFI	Desa Long	SDGs Center Unikaltar	
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB										
Indikator SDGs 12.3.1 (a) Persentase Sisa Makanan										
Nama Program :										
Sosialisasi Kebun Pangan Keluarga	orang	50	200	350		Belum ada	Belum ada	Kabupaten Bulungan	SDGs Center Unikaltar	
Nama Pemangku Kepentingan: Bina Swadaya										
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI										
INDIKATOR 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.										
INDIKATOR 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin										
Nama Program : Pilot Market Driven Organic Dairy Production in Indonesia (MDOD)										
Kegiatan : Dairy farmers produce and the KPSP cooperative deliver significant quantities of high quality certified organic milk	1.1. Output Kegiatan: Organic Dairy Farming standards	type of standards	SNI	SNI	SNI	SNI	17.466	Commercial Partner Arla, Commercial Partner Indolakto, Partner DAF/SEGES Budget, Partner Bina Swadaya, Partner KPSP (Koperasi Peternak Sapi Perah Setia Kawan)	KPSP	SEGES - Danish Agriculture and Food Council
	1.2. Output Kegiatan: Pilot production of organic milk from demonstration farms	number of demo farms	1	3	7	15		Commercial Partner Arla, Commercial Partner Indolakto, Partner DAF/SEGES Budget, Partner Bina Swadaya, Partner KPSP	KPSP	Koperasi peternakan sapi perah
	1.3. Output Kegiatan: Farmers have upgraded stables and production systems to comply with organic milk production standards for Indonesia	accumulated number of farms	20	45	75	110		Commercial Partner Arla, Commercial Partner Indolakto, Partner DAF/SEGES Budget, Partner Bina Swadaya, Partner KPSP	KPSP	Koperasi peternakan sapi perah
	1.4. Output Kegiatan: Organic milk production	litre per day	0	1500	3200	5900		Commercial Partner Arla, Commercial Partner Indolakto, Partner DAF/SEGES Budget, Partner Bina Swadaya, Partner KPSP	KPSP	Koperasi peternakan sapi perah

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	1.5. Output Kegiatan: Milk yield	litre/cow/day	10.2	11	12	13		Commercial Partner Arla, Commercial Partner Indolakto, Partner DAF/SEGES Budget, Partner Bina Swadaya, Partner KPSP	KPSP	Koperasi peternakan sapi perah
	1.6. Output Kegiatan: Farmers offered a loan facility for on-farm investments related to organic milk production	number of farmers	20	45	75	110		Commercial Partner Arla, Commercial Partner Indolakto, Partner DAF/SEGES Budget, Partner Bina Swadaya, Partner KPSP	KPSP	Bina Swadaya
	1.7. Output Kegiatan: Gross income of MDOD trained conventional dairy farmers	x % of baseline income y years after training	100%	107,50%	116%	124%		Commercial Partner Arla, Commercial Partner Indolakto, Partner DAF/SEGES Budget, Partner Bina Swadaya, Partner KPSP	KPSP	Bina Swadaya
	1.8. Output Kegiatan: Farmer gross income from organic milk production increased	z % of baseline income y years after training	0%	185%	204%	218%		Commercial Partner Arla, Commercial Partner Indolakto, Partner DAF/SEGES Budget, Partner Bina Swadaya, Partner KPSP	KPSP	Bina Swadaya
	1.9. Output Kegiatan: Additional jobs at KPSP linked to organic milk production and collection	number of additional jobs	3	5	10	15		Commercial Partner Arla, Commercial Partner Indolakto, Partner DAF/SEGES Budget, Partner Bina Swadaya, Partner KPSP	KPSP	Bina Swadaya
	1.10. Output Kegiatan: Additional jobs at service sector linked to organic milk production e.g. farm input and service suppliers	number of additional jobs	4	8	11	15		Commercial Partner Arla, Commercial Partner Indolakto, Partner DAF/SEGES Budget, Partner Bina Swadaya, Partner KPSP	KPSP	Bina Swadaya
Kegiatan : Indolakto processes certified organic dairy products and has expanded their dairy product portfolio	2.1. Output Kegiatan: Intake and processing of organic milk	tons per day	0	2	3,5	6	2.219	Commercial Partner Arla, Commercial Partner Indolakto	KPSP	KPSP, Indolakto
	2.2. Output Kegiatan: Additional jobs created at Indolakto	number of additional jobs	0	1	3	6		Commercial Partner Arla, Commercial Partner Indolakto	KPSP	Indolakto

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
	2.3. Output Kegiatan: Organic product produced by Indolakto	number of organic product	0	1	2	4		Commercial Partner Arla, Commercial Partner Indolakto	KPSP	Indolakto
Kegiatan : Market for Indonesian organic dairy products developed	3.1. Output Kegiatan: Local organic dairy product developed	number of product	1	2	3	4	3.439	Commercial Partner Arla, Commercial Partner Indolakto	KPSP	Arla
	3.2 Output Kegiatan: Local organic product marketed	number of product	0	1	2	3		Commercial Partner Arla, Commercial Partner Indolakto	KPSP	Arla
	3.3. Output Kegiatan: Job created at Arla's JV in Indonesia linked to marketing and distribution of organic products in Indonesia	number of jobs	1	3	5	7		Commercial Partner Arla, Commercial Partner Indolakto	KPSP	Arla
	3.4. Output Kegiatan: Local organic dairy product brand present in supermarket	brand present in supermarket	not present	few	few	major high-end supermarket		Commercial Partner Arla, Commercial Partner Indolakto	KPSP	Arla
Kegiatan : Dialogue and collaboration improved in the dairy value chain	4.1. Output Kegiatan: Establishment of value chain forum for organic dairy	Establishment	active	active	active	active	2.492	Commercial Partner Arla, Partner DAFC/SEGES Budget, Partner Bina Swadaya, Partner KPSP	KPSP	Bina Swadaya
	4.2. Output Kegiatan: Meeting to identify needs, prioritise and plan actions	number of meeting(s)	1	2	2	2		Commercial Partner Arla, Partner DAFC/SEGES Budget, Partner Bina Swadaya, Partner KPSP	KPSP	Arla
	4.3. Output Kegiatan: Workshops and action plans on Responsible Business Conduct	number of workshops	1	1	1	1		Commercial Partner Arla, Partner DAFC/SEGES Budget, Partner Bina Swadaya, Partner KPSP	KPSP	DAFC/SEGES
	4.4. Output Kegiatan: External farmer cooperatives visited organic dairy demonstration sites	number of cooperatives	1	1	2	4		Commercial Partner Arla, Partner DAFC/SEGES Budget, Partner Bina Swadaya, Partner KPSP	KPSP	Koperasi peternakan sapi perah
Kegiatan : Project model and results communicated	5.1. Output Kegiatan: Appearance in Danish, International and/or Indonesian media	number of appearance(s)	2	2	2	2	987	Commercial Partner Arla, Partner DAFC/SEGES Budget, Partner Bina Swadaya, Partner KPSP	KPSP	Arla/DAFC

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
5.2. Output Kegiatan: Annual appearances on each partners' media platform including SoMe		number of appearance(s)	1	1	1	1		Commercial Partner Arla, Partner DAFC/SEGES Budget, Partner Bina Swadaya, Partner KPSP	KPSP	Arla/DAFC
Nama Pemangku Kepentingan: SDGs Center Universitas Bandar Lampung										
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERMUTU										
Indikator 4.7.1 Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan										
Nama Program 1: Pengarusutamaan SDGs dalam Riset dan Kebijakan										
Kegiatan 1: Pengembangan Aplikasi SDG Meter	Jumlah user aplikasi versi beta	orang	20	40	200	500	98.000	LPDP (proposal untuk 2021)	Online	MIS UBL, SDGs Center UBL
	Jumlah data mandiri	input data	200	400	4.000	10.000				
Kegiatan 2: Studi Independen SDGs	Jumlah peserta program	orang	20	40	40	50	20.000	LPPM UBL	Universitas Bandar Lampung dan/atau sesuai dengan kegiatan	SDGs Center UBL
	Jumlah karya ilmiah	artikel	20	40	40	50				
	Jumlah karya publikasi media	artikel	40	80	120	150				
	Jumlah seminar	kegiatan	2	3	3	4				
Nama Pemangku Kepentingan: Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Keluarga (PEKKA)										
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER										
Indikator 5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.										
Nama Program: Program Suara dan Kepemimpinan Perempuan Kepala Keluarga untuk Kesetaraan dan Keadilan										
Kegiatan: Meningkatnya pengelolaan dan keberlanjutan organisasi perempuan lokal di Indonesia, khususnya organisasi yang mewakili perempuan dan anak perempuan yang rentan dan marginal	Pengurus Serikat Pekka mengikuti pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan organisasi, jaringan dan keterampilan advokasi tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia di tingkat kabupaten	perempuan	50	50			8.471, 234	WVL-GAC	Acen Besar dan Acen Singkil, Batubara-SUMUT, OI-SUMSEL, Pandeglang-Banten, DKI Jakarta, Subang-JABAR, Kota Pekalongan dan	Yayasan PEKKA, Federasi Serikat Pekka Indonesia dan 18 Serikat Pekka di 18 kabupaten/kota di 11 propinsi
	Pengurus Federasi Serikat Pekka mengikuti pelatihan dan Pendampingan dalam pengembangan dan pengelolaan organisasi, membangun jejaring dan advokasi terkait kesetaraan jender dan hak asasi manusia di tingkat nasional	perempuan	13	13	13					
	Fasilitator Lapangan dan Koordinator Pendidikan mengikuti pelatihan mengelola Kelas Pendidikan	perempuan	16							
	Terlaksana Monitoring, Evaluasi, Pembelajaran dan Pengelolaan Pengetahuan program	pelaksanaan	3	3	3					

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Produksi pengetahuan dalam penyelenggaraan kelas pendidikan untuk akses keadilan dan kesejahteraan	kelas pendidikan	18	18						
	Terlaksana Refleksi organisasi dan perencanaan strategis	pelaksanaan	1	1						
Kegiatan: Meningkatnya kinerja program bagi organisasi perempuan dan advokasi untuk meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia	Terselenggaranya kursus pelatihan paralegal untuk perempuan	perempuan	25	50	25	4.795, 467				
	Paralegal perempuan memfasilitasi Pelayanan Terpadu	Forum	7	13	13					
	Paralegal perempuan memfasilitasi Forum Desa untuk membahas temuan dan data dari kegiatan KLIK PEKKA	aksi kolektif	7	13	13					
	Paralegal perempuan dan Serikat Pekka di mengusulkan dan melobby forum pengambil keputusan di desa tentang penggunaan dana desa setiap tahun untuk mendukung pelatihan paralegal perempuan serta implementasi KLIK PEKK bagi anggota masyarakat	aksi kolektif		1	1					
Kegiatan: Meningkatnya efektivitas platform nasional dan sub-nasional terkait hak asasi perempuan, jaringan dan aliansi dalam advokasi kesetaraan gender	Terselenggara Forum Pemangku Kepentingan tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia di tingkat kabupaten	Forum	7	13	13	2.284, 589				
	Ada aksi Kolektif antara anggota Forum Pemangku Kepentingan dan Serikat Pekka di tingkat kabupaten	aksi kolektif	7	13	13					
	Ada aksi Kolektif antara anggota Forum Pemangku Kepentingan di tingkat nasional tentang platform hak perempuan dalam menghadapi keyakinan yang diskriminatif dan praktek berbahaya di Indonesia	aksi kolektif		1	1					
Nama Program: Pemberdayaan Hukum : Perlindungan, hak-hak dan keadilan bagi perempuan dan anak dalam keluarga di Indonesia										
Kegiatan: Pemantauan Penerapan UU No.16 tahun 2019 dan PERMA No.5 tahun 2019	Pengembangan materi dan instrumen pemantauan penerapan Penerapan UU No.16 tahun 2019 dan PERMA No.5 tahun 2019	Unit					105, 250	AIPJ-2	Pidie-Aceh, Cianjut-JABAR, Lombok Tengah-NTB	Yayasan PEKKA dan Serikat Pekka di 3 kabupaten
	Paralegal PEKKA mengikuti pelatihan pemantauan Penerapan UU No.16 tahun 2019 dan PERMA No.5 tahun 2019	Perempuan					59, 865			
	Paralegal PEKKA melakukan pemantauan Penerapan UU No.16 tahun 2019 dan PERMA No.5 tahun 2019	Perempuan	14				48, 322			
	Lokakarya hasil Pemantauan upaya pencegahan perkawinan anak sebagai Penerapan UU No.16 tahun 2019 dan PERMA No.5 tahun 2019	Lokakarya	1				43, 410			
Kegiatan: Meningkatkan kesadaran kritis akan konsep keluarga dalam prespektif keadilan gender di Islam berdasarkan	Diskusi dan konsultasi dengan tim ALIMAT terkait Penyelenggaraan Madrasah Keluarga Muslim Indonesia	Pertemuan					92, 150	AIPJ-2	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, JABAR, JATENG DIY JATIM KALBAR	Yayasan PEKKA dan ALIMAT
	Modul dan materi Madrasah Keluarga Muslim Indonesia	Modul	1				21, 450			

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
keragaman keluarga Indonesia	Anggota Serikat Pekka mengikuti Madrasah Keluarga Muslim Indonesia terselenggara	Orang	60				103, 400	KALSEL, NTB, NTT, SULSEL, SULTRA, dan SULUT		
	Evaluasi Penyelenggaraan Madrasah Keluarga Muslim Indonesia	pelaksanaan	1				92, 150			
Indikator										
5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.										
5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.										
Nama Program: Kemandirian dan keswadayaan ekonomi PEKKA berbasis potensi sumberdaya lokal untuk kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat lokal										
Kegiatan: Meningkatnya kapasitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi dari perempuan untuk mendorong perubahan di keluarga dan masyarakat	Perempuan mengakses pelatihan kepemimpinan	perempuan	46	138	161	115	1.923, 988	Pemerintah Belanda	Bireun, Bener Meriah, Aceh Barat, Asahan, Sijunjung, Dhamasraya, Ogan Komering Ilir, Tangerang, Karawang, Brebes, Banyumas, Pemalang, Bantul, Pacitan, Bengkulu, Buleleng, Lombok Utara, Bima, Flores Timur, Bone, Baubau, Mamasa, Bolaangmongondow, Halmahera Utara	Yayasan PEKKA, dan organisasi komunitas Perempuan kepala keluarga di 23 kabupaten di 19 propinsi
	Perempuan memimpin inisiatif pengembangan ekonomi berkeadilan	perempuan	46	138	161	115				
	Perempuan memimpin keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan	perempuan	46	138	161	115				
	Perempuan memiliki kepercayaan diri untuk memimpin di kelembagaan desa	perempuan	12	35	40	29				
Kegiatan: Berkembangnya kapasitas Organisasi Basis dalam merancang dan mengimplementasikan strategi yang efektif dan mengartikulasikan agenda politik	Produk pengetahuan produk pengetahuan terkait keadilan gender dalam isu ekonomi	unit	4	4	2	0	1.391, 913			
	Cerita yang menggambarkan persepsi perempuan akar rumput tentang pengalamannya dalam membangun ekonomi yang adil	cerita	12	35	40	29				
Kegiatan: Peningkatan akses Perempuan kepada sumberdaya dan ekonomi yang otonom	aksi kolektif perempuan untuk akses sumberdaya dan memastikan keselamatan perempuan secara kolektif	aksi kolektif	2	7	8	6	1.960, 353			
	produk media yang menggambarkan pengalaman, kepemimpinan, perspektif, tuntutan, dan tawaran solusi dari perempuan	unit	1	1	1	1				
	inisiatif ekonomi yang dikembangkan oleh kelompok perempuan	pilot usaha	2	8	8	5				
Nama Pemangku Kepentingan: Alumni Paradigta										
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER										
Indikator 5.C.1* Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.										
Nama Program: Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Kepemimpinan Perempuan sebagai Agen Perubahan										
Kegiatan: Advokasi kebijakan di desa	Adanya kebijakan untuk pemberdayaan perempuan	peraturan	20	15	10	10			7 propinsi (Aceh, Kalbar, Ja	Alumni Paradigta
	Adanya alokasi anggaran desa untuk pemberdayaan	Rupiah	100	100	100	100		pemerintah desa, pemerintah kabupaten	7 propinsi (Aceh, Kalbar, Ja	Alumni Paradigta
	Adanya program inisiatif yang dilakukan di desa	Jumlah kegiatan	64					pemerintah desa, pemerintah kabupaten	7 propinsi (Aceh, Kalbar, Ja	Alumni Paradigta
Nama Pemangku Kepentingan: KONFERENSI WALI GEREJA INDONESIA (KWI)										
TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Indikator 4.a.1 Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).										
Nama Program 4: Program Bantuan Pendidikan Menghadapi dampak Pandemi Covid-19 .										
Nama Kegiatan 1 : Bantuan fasilitas kesehatan sekolah	2.2 Output kegiatan: 58 sekolah dari wilayah 13 keuskupan mendapatkan bantuan dana pengadaan fasilitas kesehatan di sekolah.	Sekolah	58				0,34	Caritas Indoensia, PSE KWI dan dana fundrasing LG4C bersama AAJI	28 Wilayah keuskupan di Indonesia	Caritas Indonesia dan Komdik KWI
Indikator 4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan										
Nama Program 4: Program Bantuan Pendidikan Menghadapi dampak Pandemi Covid-19 .										
Nama Kegiatan 1 : Bantuan dana untuk guru honoror	2.2 Output kegiatan: 3,178 guru honoror dari 558 sekolah di wilayah 28 keuskupan menerima bantuan dana Pendidikan	Jiwa	3.178				3.125	Caritas Indoensia, PSE KWI dan dana fundrasing LG4C bersama AAJI	28 Wilayah keuskupan di Indonesia	Caritas Indonesia dan Komdik KWI
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER										
Indikator 5.1.1 : Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.										
Nama Program 1: Peningkatan Kapasitas SDM untuk Para Penggerak Gender										
Kegiatan 1: Pemetaan dan Pembaharuan Data Sumber Daya Manusia (Penghubung) SGPP di tiap regio	1.1 Jumlah regio yang terlibat	Regio		6	6	6	SGPP KWI, Keuskupan, Donatur, Kontribusi Peserta	Lingkup Wilayah kerja KWI, 34 Propinsi	SGPP KWI, Keuskupan	
	1.2 Jumlah keuskupan	keuskupan		37	37	37				
	1.3 Jumlah penghubung SGPP	Orang		24	148	296				
	1.4 Jumlah kuisisioner yang disebarluaskan	lembar		74	148	296				
Kegiatan: Training Of Trainer (TOT)	2.1 Jumlah kegiatan sosialisasi gender dan pemberdayaan perempuan	kegiatan		6	18	37				
	2.2 Jumlah penggerak gender yang mendapatkan pelatihan	Orang		90	108	222				
Nama Program 2 : Edukasi dan Kampanye Media tentang KKG										
Kegiatan: Sosialisasi dan Edukasi lewat media sosial SGPP : FB, IG, Youtu.be.	1.1. Tersedia editorial plan	kegiatan		1	1	1	SGPP KWI	Lingkup Wilayah Kerja KWI, 34 Propinsi	SGPP KWI & Mitra	
	1.2 Tersedia postingan photo, desain grafis, video tentang: profil SGPP, promosi KKG, dan isu tematik.	postingan		24	24	24				
Nama Pemangku Kepentingan: Indonesia Global Compact Network (IGCN)										
TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS										
Indikator SDGs										
4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum										
4.a.1 Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua										
Nama Program: Transformasi Pendidikan/Proses Belajar Mengajar										
Pengembangan Video Pembelajaran, Webinar & Workshop Online	Video pembelajaran yang diunggah melalui YouTube Kupuku Indonesia.		35	40	45	50	750.000	IGCN, Mitra & Sponsor	Nasional	IGCN, Kupuku
	Para pendidik mendapatkan inspirasi dari video pembelajaran, webinar & workshop online yang diunggah melalui YouTube Kupuku Indonesia.		220.000	280.000	370.000	500.000	900.000	IGCN, Mitra & Sponsor	Nasional	IGCN, Kupuku
	Peserta (Guru & Orangtua) mendapatkan inspirasi dari Webinar Read Aloud untuk diterapkan ke peserta didik/anak.		300				10.000	IGCN & Mitra	Nasional	IGCN, Kupuku, Reading Bugs

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Literasi	Peserta ToT (3 Pertemuan) Read Aloud dapat menyebarkan praktik baik dengan mengelaborasi materi ToT yang sudah didapatkan (melakukan pelatihan pengimbasan).		30	60	120		-	IGCN & Mitra	Nasional	IGCN, Kupuku, Reading Bugs
	Peserta Kompetisi Read Aloud memanfaatkan momentum bersama dengan peserta didik/anak.		100	200	300		30.000	IGCN, Mitra & Sponsor	Nasional	IGCN, Kupuku, Reading Bugs
Pengembangan Numerasi	Peserta (Guru, Orangtua & Peserta didik) mendapatkan inspirasi dari Webinar Literasi Keuangan.			1.000	2.000		50.000	IGCN & Mitra	Nasional	IGCN, Kupuku, BCA
Pengembangan Literasi & Numerasi berbasis Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)	Peserta (Guru) dapat menerapkan proses belajar mengajar (Literasi dan Numerasi) yang sesuai dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).		1.000	2.000			30.000	IGCN, Mitra & Sponsor	Nasional	IGCN, Kupuku, LPMP
	Peserta ToT (3 Pertemuan) AN-AKM dapat menyebarkan praktik baik dengan mengelaborasi materi ToT yang sudah didapatkan (melakukan pelatihan pengimbasan).		30	60			30.000	IGCN, Mitra & Sponsor	Nasional	IGCN, Kupuku, LPMP
Learning Series "Pendidikan Karakter"	Peserta (Guru & Kepala Sekolah) dapat menerapkan ekosistem sekolah dan proses belajar mengajar yang mendukung penguatan pendidikan karakter yang baik untuk para peserta didik.		1.000	2.000			30.000	IGCN, Mitra & Sponsor	Nasional	IGCN, Kupuku, Pendidikan Karakter Education Consulting
	Peserta Kompetisi Esai Pendidikan Karakter dapat berbagi dan menyuarakan ide tentang penerapan dari Pendidikan Karakter di institusi sekolah masing-masing.		150	300			30.000	IGCN, Mitra & Sponsor	Nasional	IGCN, Kupuku, Pendidikan Karakter Education Consulting
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER										
5.5.2 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial										
Nama Program: Target Gender Equality										
Kegiatan Target Gender Equality Workshop	1.1 Jumlah pelaksanaan workshop		3	3	3	3		IGCN dan mitra program	Nasional (virtual)	IGCN dan mitra program
	1.2 Jumlah peserta dengan peningkatan pemahaman untuk mendukung kesetaraan gender		15	15	15	15				
	1.3 Jumlah perusahaan yang membuat target proporsi perempuan pada jajaran dewan		5	7	9	10				
Nama Program: Mempromosikan Penerapan Women's Empowerment Principles (WEPs)										
Kegiatan Seri Pembelajaran WEPs	1.1. Jumlah pelaksanaan seri pembelajaran		2	2	2	2		UN Women & IGCN (for 2020-2021)	Nasional (virtual)	UN Women & IGCN (for 2020-2021)
	1.2. Jumlah peserta dengan peningkatan pemahaman WEPs		63	75	75	75		mitra program (for 2022-2024)		mitra program (for 2022-2024)
Kegiatan Seri Dialog Multi Pihak tentang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	2.1. Jumlah pelaksanaan seri dialog		2	2	2	2		WEPWG (IGCN, IBCWE, UN Women)	Nasional (virtual)	WEPWG (IGCN, IBCWE, UN Women)
	2.2. Jumlah peserta acara		328	300	300	300				
Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak										
Indikator 6.a.1 Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah										
Nama Program: CEO Water Mandate										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Kegiatan 1: Seri Pembelajaran mengenai CEO Water Mandate dan Water Stewardship	1.1 Jumlah pelaksanaan seri pembelajaran	-	4	4	4		IGCN dan mitra	Virtual	IGCN dan mitra
	1.2 Jumlah minimum perusahaan yang berpartisipasi pada seri pembelajaran dengan peningkatan pemahaman mengenai CEO Water Mandate dan Water Stewardship	-	30	30	30				
	1.3 Jumlah minimum perusahaan yang mendukung CEO Water Mandate setelah pelaksanaan seri pembelajaran	-	10	10	10				
	1.4 Jumlah minimum perusahaan yang bergabung dengan Indonesia Water Mandate Working Group (IWMWG) IGCN	-	10	10	10				
Nama Program: Hari Air Sedunia									
Kegiatan 1: Seminar Tahunan dalam Rangka Hari Air Sedunia	1.1 Jumlah minimum peserta yang berpartisipasi pada seminar		215	200	200	200	IGCN dan mitra	Virtual	IGCN dan UNESCO Indonesia
	1.2 Jumlah minimum perusahaan yang bergabung dengan Indonesia Water Mandate Working Group (IWMWG) IGCN	-	10	10	10				
TUJUAN 8									
TARGET 8.2, 8.3, 8.4									
Indikator 8.2.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1 (a)									
Labour									
Labour Webinar: One Year of UU Cipta Kerja	Jumlah Webinar kegiatan		1					Nasional (virtual)	IGCN - BPJS Ketenagakerjaan
	Jumlah Peserta/Penerima Manfaat orang		500						
Labour Summit	Jumlah Konferensi kegiatan			2			Donor	Nasional (virtual)	
	Jumlah Peserta/Penerima Manfaat orang			1000					
	Guidebook buah			1		50			
TUJUAN 10									
TARGET 10.2, 10.3, 12.7, 12.8, 16.3, 16.10, 16.B									
Indikator 10.2.1, 10.3.1, 12.7.1, 12.8.1, 16.3.1, 16.3.3, 16.10.1, 16.B.1									
Business and Human Rights									
Peningkatan Kesadaran & Dialog Kebijakan dalam masa Pandemi	1.1 Jumlah pelaksanaan webinar	Kegiatan					IGCN dan UNDP	Nasional (Virtual)	IGCN - UNDP
	1.2 Jumlah peserta	orang							
	1.3 Jumlah organisasi yang berpartisipasi	Institusi							
Seri Workshop Mengenai Bisnis di Kenormalan Baru Pada Masa Pandemi	1.1 Jumlah Executive Roundtable	Kegiatan					IGCN dan UNDP	Nasional (Virtual)	IGCN, UNDP, WHO, ILO
	1.2 Jumlah Workshop	Kegiatan							
	1.3 Jumlah peserta	orang							
	1.4 Jumlah organisasi yang berpartisipasi	Institusi							
Mendukung Pemerintah dalam menjalankan UNGPs - Kementerian Hukum dan HAM	1.1 Focus Group Discussion	Kegiatan					-	Nasional (Virtual)	IGCN mendukung Kementerian Hukum dan HAM & UNDP
	1.2 Peluncuran Penilaian Risiko Bisnis Dan Ham (PRISMA)	Kegiatan							
	1.3 Pelatihan untuk Gugus Tugas Bisnis dan HAM	Kegiatan	2						
Dialog Multipihak Seri XIII: "New EU Mandatory Human Rights Due Diligence: What Are the	1.1 Jumlah pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	1				IGCN, ELSAM dan The Kingdom of the Netherlands Embassy	Global (Virtual)	IGCN, APINDO, ELSAM, The Kingdom of the Netherlands Embassy
	1.2 Jumlah peserta/penerima manfaat	orang	219						
	1.3 Jumlah organisasi yang berpartisipasi	Institusi	99						
Sesi Dialog Multipihak mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia	1.1 Jumlah pelaksanaan webinar	Kegiatan	1	3	3	3	IGCN dan Mitra	Global (Virtual)	IGCN
	1.2 Jumlah peserta	orang	200	600	600	600			
	1.3 Jumlah organisasi yang berpartisipasi	Institusi	90	150	150	150			
Pelatihan dan Pengembangan	1,2 Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan	Kegiatan		1	1	1			

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Kapasitas mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan UNGPs kepada	1.2 Jumlah peserta	orang		30	30	30		IGCN dan Mitra	Nasional	IGCN
	1.3 Jumlah Perusahaan	Kegiatan		15	15	15				
Business and Children's Rights										
Dialogues on Business and Children's Rights	Jumlah pelaksanaan dialog	Kegiatan	4	4	4	4	-	IGCN dan Mitra	Virtual	Business and Children's Rights Working Group /BCRWG (
	Jumlah peserta	Orang								
National Learning Series on BCRWG	Jumlah Learning Series	Kegiatan		1			-	IGCN dan Mitra	Virtual	Business and Children's Rights Working Group /BCRWG (
	Jumlah peserta	Orang								
Disability										
Facilitate Job Matching for Disability	Jumlah orang mendapat pekerjaan	Orang		10	11	12	-	-	Virtual	IGCN, Golden Care Nusantara
SMEs										
Training for Trainers (ToT) on BCP	Jumlah Webinar	Orang	2					IGCN dan Mitra	Virtual	IGCN dan Mitra
	Jumlah Peserta	Orang								
Entrepreneurial training on BCP for MSEs	Jumlah Webinar	Orang	4					IGCN dan Mitra	Virtual	IGCN dan Mitra
	Jumlah Penerima Sertifikat	Orang								
Policy Advocacy	Policy Dialogue	dialogue		2				IGCN dan Mitra	Virtual	IGCN dan Mitra
Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab										
Indikator										
12.6.1: Perusahaan yang Mempublikasi Laporan Keberlanjutan										
12.8.1: Pemahaman tentang Gaya Hidup yang Selaras dengan Alam										
Nama Program: Circular Economy										
Kegiatan 1: Seri Dialog Multipihak mengenai Circular Economy	1.1 Jumlah pelaksanaan dialog		-	3	3	3		IGCN dan mitra	Virtual	IGCN dan mitra
	1.2 Jumlah minimum peserta yang berpartisipasi pada dialog		-	100	100	100				
Nama Program: Sustainable Fashion										
Kegiatan 1: Seri Dialog Multipihak mengenai Sustainable Fashion	1.1 Jumlah pelaksanaan dialog		-	1	1	1		IGCN dan mitra	Virtual	IGCN dan mitra
	1.2 Jumlah minimum peserta yang berpartisipasi pada dialog		-	100	100	100				
Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim										
Indikator 13.3.2: Pembangunan Kapasitas untuk Perubahan Iklim										
Nama Program: Science Based Targets initiative (SBTi)										
Kegiatan: <i>Roundtable</i> mengenai Science Based Targets (SBT)	1.1 Jumlah minimum perusahaan yang berpartisipasi pada roundtable dengan peningkatan pemahaman mengenai <i>science-based targets</i>		-	25	25	25		IGCN dan mitra	Virtual	IGCN didukung oleh WRI Indonesia, CDP, dan WWF Indonesia
	1.2 Jumlah minimum perusahaan yang menerapkan penurunan emisi berbasis sains setelah pelaksanaan <i>roundtable</i>		-	20	20	20				
	1.3 Jumlah minimum perusahaan yang menerapkan penurunan emisi berbasis sains dengan berkomitmen terhadap SBTi setelah pelaksanaan <i>roundtable</i>		-	10	10	10				
Nama Program: Climate Ambition Accelerator										
Kegiatan: Climate Ambition Accelerator (durasi: 6 bulan)	1.1 Jumlah sesi <i>on-demand</i> yang dipelajari di UN Global Compact Academy Platform		8	8	8	8		IGCN dan mitra	Virtual	IGCN didukung oleh WSP dan WRI
	1.2 Jumlah pelaksanaan lokakarya		5	5	5	5				

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
1.3 Jumlah minimum perusahaan yang berpartisipasi pada program		15	15	15	15				
Tujuan 14: Ekosistem Lautan									
Semua Indikator dengan Peran IGCN sebagai Pembangun Kapasitas untuk Perusahaan									
Program 1: Sustainable Ocean									
Kegiatan 1: Lokakarya dan Konsultasi mengenai UN Global Compact Action Platform for Sustainable Ocean Business	1.1 Jumlah pelaksanaan lokakarya dan konsultasi	Kegiatan	-	1	1	1	IGCN dan mitra	Virtual	IGCN dan mitra
	1.2 Jumlah minimum institusi penelitian/akademia yang berpartisipasi pada lokakarya dan konsultasi	Institusi Penelitian	-	10	10	10			
	1.3 Jumlah minimum perusahaan yang berpartisipasi pada lokakarya dan konsultasi	Perusahaan	-	30	30	30			
	1.4 Jumlah minimum perusahaan yang menandatangani Sustainable Ocean Principles dan mengacu pada Ocean Stewardship 2030 setelah pelaksanaan lokakarya dan konsultasi	Perusahaan	-	10	10	10			
	1.5 Area fokus rekomendasi Indonesia untuk UN Ocean Conference	Buah	-	5	5	5			
Tujuan 16.5: Secara substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk									
Indikator 16.5.1, 16.5.2									
Business Ethics & Governance									
Mendukung Seminar Pencegahan Korupsi oleh Universitas Paramadina dan KPK	1.1 Jumlah Seminar	Kegiatan					-		IGCN mendukung Universitas Paramadina & KPK
Menyelenggarakan Integrity Talks untuk Bisnis di Masa Pandemi	1.1 Jumlah kegiatan Webinar	Kegiatan	2				-	Virtual	Kolaborasi antara IGCN, Alliance for Integrity, Transparency International Indonesia dan Indonesia Business Links
Mendukung Global Integrity Campaign	1.1 Jumlah kegiatan (campaign dengan durasi 1 bulan)	Kegiatan	1				-	Virtual	Kolaborasi antara IGCN, Alliance for Integrity, GIZ
	1.2 Jumlah perusahaan yang berpartisipasi dari Indonesia	Institusi	4						
Mendukung DUKU Training	1.1 Jumlah Pelatihan di mana IGCN berpartisipasi	Kegiatan	1	2	2	2	-	Virtual	IGCN mendukung Alliance for Integrity
Dialog Multi Pihak mengenai Kepemimpinan Beretika sebagai Landasan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	1.1 Jumlah kegiatan	Kegiatan	1	3	3	3	-	Virtual	Collaboration antara IGCN PPM Manajemen
Anti-corruption Collective Action	1.1 Kegiatan meningkatkan kesadaran	Kegiatan	1				UN Global Compact and Siemens	Virtual	IGCN
	1.2 Pelatihan untuk mendukung terkait metodologi Aksi Kolektif Anti Korupsi menggunakan Collective Action Playbook	Kegiatan		1				Virtual	
	1.3 Kegiatan peninjauan dan identifikasi tantangan terkait korupsi dan melakukan penilaian terhadap metodologi	Kegiatan		2				Virtual	
	1.4 Kegiatan pengembangan inisiatif	Kegiatan			3	3		Virtual	
	1.5 Kegiatan High Level Policy Dialigue	Kegiatan		1				Virtual	

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Multi-Tujuan										
Indikator 5.5.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1,										
Program 1: SDG Ambition Accelerator										
Kegiatan 1: SDG Ambition Accelerator (durasi: 6 bulan)	1.1 Jumlah sesi <i>on-demand</i> yang dipelajari di	Kegiatan	11	11	11	11	IGCN dan mitra	Virtual	IGCN didukung oleh Accenture	
	1.2 Jumlah pelaksanaan lokakarya	Kegiatan	11	11	11	11				
	1.3 Jumlah minimum perusahaan yang	Perusahaan	10	15	15	15				
Nama Pemangku Kepentingan: Yayasan CARE Peduli (YCP)										
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN										
Indikator 11.b.2* Persentase jumlah daerah yang memiliki dokumen strategi penanggulangan bencana (RPB) yang sesuai dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB)										
Nama Program: Building Resilience towards natural disaster in Central Sulawesi (Project EPF)										
Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota Terhadap Bencana	Laporan Hasil Penilaian Ketangguhan Kabupaten Sigi dan Kota Palu Terhadap Bencana	Dokumen					Rp562.350.000	Emergency Pooled Fund_CARE	Kabupaten Sigi dan Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah	Yayasan CARE Peduli (YCP)
	Organisasi Perangkat Daerah, Komunitas di kawasan rawan bencana, LSM, Akademisi, Media Massa dan Dunia Usaha menerima desiminasi hasil penilaian ketangguhan Kabupaten/Kota Terhadap Bencana	Stakeholder	150					Rp30.000.000	Emergency Pooled Fund_CARE	Kabupaten Sigi dan Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah
Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim Ke Dalam RPJMD Kabupaten/Kota	Indeks Ketangguhan Daerah menjadi salah satu Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD (Kab. Sigi dan Kota Palu)	Pemerintah Daerah	2				Rp200.000.000	Emergency Pooled Fund_CARE	Kabupaten Sigi dan Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah	Yayasan CARE Peduli (YCP)
	Indeks Risiko Bencana menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD (Kab. Sigi dan Kota Palu)	Pemerintah Daerah	2				Rp200.000.000	Emergency Pooled Fund_CARE	Kabupaten Sigi dan Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah	Yayasan CARE Peduli (YCP)
Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim Ke Dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD)	Menurunnya Indeks Risiko Bencana menjadi tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis OPD	Organisasi Perangkat Daerah	2				Rp100.000.000	Emergency Pooled Fund_CARE	Kabupaten Sigi dan Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah	Yayasan CARE Peduli (YCP)
Penguatan Ketangguhan Desa/Kelurahan melalui Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat dan Penguatan Ketangguhan Ekonomi	Meningkatnya Indeks Ketangguhan Desa/Kelurahan terhadap bencana dan Perubahan Iklim	Desa/ Kelurahan	11				Rp6.000.000.000	Emergency Pooled Fund_CARE	Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah	Yayasan CARE Peduli dan Mitra (KARSA Institute, Perkumpulan Imunitas, Perkumpulan ROA)
TUJUAN 13 MENGAMBIL TUJUAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA										
Indikator 13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana										
Nama Program: Building Resilience towards natural disaster in Central Sulawesi (Membangun Ketangguhan Terhadap Bencana Alam di Sulawesi Tengah)										
Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota Terhadap Bencana	Laporan Hasil Penilaian Ketangguhan Kabupaten Sigi dan Kota Palu Terhadap Bencana	Dokumen					Rp562.350.000	Emergency Pooled Fund_CARE	Kabupaten Sigi dan Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah	Yayasan CARE Peduli (YCP)

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Organisasi Perangkat Daerah, Komunitas di kawasan rawan bencana, LSM, Akademisi, Media Massa dan Dunia Usaha menerima desiminasi hasil penilaian ketangguhan Kabupaten/Kota Terhadap Bencana	Stakeholder	150				Rp30.000.000	Emergency Pooled Fund_CARE	Kabupaten Sigi dan Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah	Yayasan CARE Peduli (YCP)
Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim Ke Dalam RPJMD Kabupaten/Kota	Indeks Ketangguhan Daerah menjadi salah satu Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD (Kab. Sigi dan Kota Palu)	Pemerintah Daerah	2			Rp200.000.000	Emergency Pooled Fund_CARE	Kabupaten Sigi dan Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah	Yayasan CARE Peduli (YCP)
	Indeks Risiko Bencana menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD (Kab. Sigi dan Kota Palu)	Pemerintah Daerah	2			Rp200.000.000	Emergency Pooled Fund_CARE	Kabupaten Sigi dan Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah	Yayasan CARE Peduli (YCP)
Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim Ke Dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD)	Menurunnya Indeks Risiko Bencana menjadi tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis OPD	Organisasi Perangkat Daerah	2			Rp100.000.000	Emergency Pooled Fund_CARE	Kabupaten Sigi dan Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah	Yayasan CARE Peduli (YCP)
Penguatan Ketangguhan Desa/Kelurahan melalui Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat dan Penguatan Ketangguhan Ekonomi	Meningkatnya Indeks Ketangguhan Desa/Kelurahan terhadap bencana dan Perubahan Iklim	Desa/ Kelurahan	11			Rp6.000.000.000	Emergency Pooled Fund_CARE	Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah	Yayasan CARE Peduli dan Mitra (KARSA Institute, Perkumpulan Imunitas, Perkumpulan ROA)

Nama Pemangku Kepentingan: Universitas Indonesia

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN

Indikator										
Nama Program 1. Program Kerjasama Eksternal										
Penyusunan Modul SDG Academy Indonesia dengan topik "Pengentasan Kemiskinan"	Berhasil menyusun kurikulum (rancangan pembelajaran) untuk SDG Mobile Learning Program	Rancangan Kurikulum					600	SDG Academy (UNDP Indonesia)	Nasional	SDGs Hub UI (sebagai knowledge partner/konsultan dari SDG Academy Indonesia UNDP)
	Berhasil menyusun kurikulum (rancangan pembelajaran) untuk SDG Leadership Certification Program	Rancangan Kurikulum								
	Berhasil menyusun materi SDG Mobile Learning Program	Dokumen (sesi)								
	Berhasil menyusun materi SDG Leadership Certification Program	Dokumen (sesi)								
	Berhasil menyusun bank soal SDG Mobile Learning Program	Dokumen								

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Berhasil menyusun bank soal SDG Leadership Certification Program	Dokumen								
	Berhasil menyusun script untuk voice over SDG Mobile Learning Program	Dokumen (sesi)								
	Berhasil menyusun script untuk voice over SDG Leadership Certification Program	Dokumen (sesi)								
Kajian Kaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Ekonomi Kreatif dalam Menyambut <i>International Year of Creative Economy 2021</i>	Berhasil menyusun kajian Keterkaitan SDGs/TPB dengan Ekonomi Kreatif di Indonesia untuk <i>International Year of Creative Economy 2021</i> . Salah satu sub-bab melakukan analisa untuk Tujuan 1.	Kajian					376,2	Kememparekraf (APBN)	Riset Lapangan di Sumatera Utara, Bandung, Bali, Jogjakarta	SDGs Hub UI (sebagaitenaga ahli Kememparekraf)
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA										
Indikator										
Nama Program 1. Program Kerjasama Eksternal										
Penyusunan Modul SDG Academy Indonesia dengan topik "Pelayanan Kesehatan"	Berhasil menyusun kurikulum (rancangan pembelajaran) untuk SDG Mobile Learning Program	Rancangan Kurikulum					Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1
	Berhasil menyusun materi SDG Mobile Learning Program	Dokumen (sesi)								
	Berhasil menyusun bank soal SDG Mobile Learning Program	Dokumen								
	Berhasil menyusun script voice over SDG Mobile Learning Program	Dokumen (sesi)								
Indikator										
Program Kerjasama Eksternal										
Kajian Isu Prioritas Presidensi Indonesia 2022	Berhasil menyusun kajian isu prioritas sebagai bahan penentuan prioritas presidensi Indonesia di G20 2022 dengan pembahasan mengenai Global Health (Kooperasi Penanganan Pandemi & Vaksin)	Kajian	1				100	Kementerian Luar Negeri (APBN) - Pusat P2K Multilateral	Nasional	SDGs Hub UI (sebagai konsultan Kemenlu)
	Berhasil menyusun <i>issue notes</i> sebagai bahan penentuan prioritas presidensi Indonesia di G20 2022 dengan topik Global Health (Kooperasi Penanganan Pandemi & Vaksin)	Issue Notes	1							
Webinar "Pelita Sehat Talks"	Terlibatnya Duta Kampus SDGs UI sebagai narasumber dalam webinar nasional Pelita Sehat Talks "Youth Empowerment: Gerakan Terintegrasi Pengembangan Literasi Kesehatan 4,0 Pemuda Dalam Arus Perwujudan Target SDGs 2030 Indonesia Sehat dan Sejahtera"	Peserta					Tidak diketahui		Nasional	SDGs Center Universitas Gorontalo
TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS										
Indikator										
Program Kerjasama Eksternal										
Penyusunan Modul SDG Academy Indonesia dengan topik "Peningkatan Kualitas Pendidikan"	Berhasil menyusun kurikulum (rancangan pembelajaran) untuk SDG Mobile Learning Program	Rancangan Kurikulum					Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 2	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 3	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 4

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Berhasil menyusun kurikulum (rancangan pembelajaran) untuk SDG Leadership Certification Program	Rancangan Kurikulum									
Berhasil menyusun materi SDG Mobile Learning Program	Dokumen (sesi)									
Berhasil menyusun materi SDG Leadership Certification Program	Dokumen (sesi)									
Berhasil menyusun bank soal SDG Mobile Learning Program	Dokumen									
Berhasil menyusun bank soal SDG Leadership Certification Program	Dokumen									
Berhasil menyusun script untuk voice over SDG Mobile Learning Program	Dokumen (sesi)									
Berhasil menyusun script untuk voice over SDG Leadership Certification Program	Dokumen (sesi)									
Indikator: 4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.										
Program Kerjasama Eksternal										
Duta Kampus SDGs UI - Webinar Power to Talk x GPTECH UI "How to Improve Your CV & Application Letter"	Terlaksananya webinar "How to Improve Your CV & Application Letter" dan mengundang narasumber eksternal dan ditujukan untuk mahasiswa umum	Peserta	100				500(ribu)	Seknas SDGs Indonesia BAPPENAS	Nasional	Duta Kampus SDGs Hub UI, GPTECH UI
Survey Persepsi Publik atas Presidensi Indonesia di G20 2022 (pemahaman mengenai kewarganegaraan dunia dan pembangunan berkelanjutan pada mahasiswa)	Berhasil menyusun pelaksanaan dan menganalisa survey persepsi publik (mahasiswa) mengenai pemahaman mengenai kewarganegaraan dunia dan pembangunan berkelanjutan pada mahasiswa	Kajian	1				50	Kementerian Luar Negeri (APBN) - Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup	Nasional	SDGs Hub UI (sebagai peneliti/konsultan)
International Conference on Sustainable Development	Terlibat mempresentasikan kegiatan SDGs Hub UI di International Conference on Sustainable Development 2021	Sesi	1	1	1	1	Tidak diketahui	Tidak diketahui	Global	Sustainable Development Solutions Network & Master Development Practice
	Terlibat mempresentasikan hasil riset tenaga ahli SDGs Hub UI di International Conference on Sustainable Development 2021	Sesi	1	2	2	4				
Indikator: 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).										
Program Kerjasama Eksternal										
Pelatihan Pendidikan untuk Mendukung Lingkungan Sekolah yang Aman dan Positif dengan Menerapkan GEDSI dalam Manajemen Kelas dan Sekolah	Terlibat sebagai narasumber "Introduction to SDGs" dan membahas 4 Pillar Pembangunan dalam pelatihan online "Pelatihan Pendidikan untuk Mendukung Lingkungan Sekolah yang Aman dan Positif dengan Menerapkan GEDSI dalam Manajemen Kelas dan Sekolah"	Peserta	110				13	AEF (Asia Education Foundation)	Sekolah Mitra dari Australia-Indonesia BRIDGE School Partnerships - 110 Guru (Nasional)	Australia-Indonesia BRIDGE School Partnerships AEF (Asia Education Foundation) dan SDGs Hub UI sebagai pengembang Materi dan fasilitator pada workshop.
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER										
Indikator:										
Program Kerjasama Eksternal										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Modul SDG Academy Indonesia dengan topik "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak"	Berhasil menyusun kurikulum (rancangan pembelajaran) untuk SDG Mobile Learning Program	Rancangan Kurikulum					Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1
	Berhasil menyusun kurikulum (rancangan pembelajaran) untuk SDG Leadership Certification Program	Rancangan Kurikulum								
	Berhasil menyusun materi SDG Mobile Learning Program	Dokumen (sesi)								
	Berhasil menyusun materi SDG Leadership Certification Program	Dokumen (sesi)								
	Berhasil menyusun bank soal SDG Mobile Learning Program	Dokumen								
	Berhasil menyusun bank soal SDG Leadership Certification Program	Dokumen								
	Berhasil menyusun script untuk voice over SDG Mobile Learning Program	Dokumen (sesi)								
Berhasil menyusun script untuk voice over SDG Leadership Certification Program	Dokumen (sesi)									
Indikator: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.										
Program Internal										
Ruang Diskusi SDGs - Webinar "Penerapan Kurikulum Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs/TPB) Berdasarkan Kebijakan Kampus Merdeka di Universitas Indonesia	Tertindakannya webinar "Pilkada dan Prioritas Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi" yang mengundang akademisi internal Universitas Indonesia dan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	Peserta					5.750	Unit Kerja Khusus Lembaga Sains Terapan FMIPA UI	Nasional	SDGs Hub UI
Indikator										
Program Kerjasama Eksternal										
Kajian Kaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Ekonomi Kreatif dalam Menyambut International Year of Creative Economy 2021	Berhasil menyusun kajian Keterkaitan SDGs/TPB dengan Ekonomi Kreatif di Indonesia untuk International Year of Creative Economy 2021. Salah satu sub-bab melakukan analisa untuk Tujuan 5 (aspek pemberdayaan ekonomi).	Kajian					Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 2	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 2	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 2	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 2
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI!										
INDIKATOR 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.										
INDIKATOR 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin										
INDIKATOR 8.5.1* Upah rata-rata per jam kerja										
INDIKATOR 8.5.2* Tingkat Pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur										
INDIKATOR 8.5.2.(a) Tingkat Setengah Pengangguran										
Kajian Isu KTT G-20										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Kajian isu Digital Economy & UMKM	Berhasil menyusun kajian mengenai isu Ekonomi Digital & UMKM untuk diajukan bersama Kementerian Luar Negeri dan UNDESA sebagai topik dalam KTT G-20 2022	Dokumen	1				100 (bersama 3-4 isu lain)	Kementerian Luar Negeri	Nasional & Internasional	SDGs Hub UI (sebagai kajian bersama dengan Kemenlu dan UNDESA)
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN										
Indikator 11.7.1.(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua										
Program Kerjasama Eksternal										
Webinar "Planning Post-Pandemic City"	Terlibatnya SDGs Hub UI sebagai narasumber dalam webinar Dept. Arsitektur FT UI "Planning Post-Pandemic City" yang membahas kota berkelanjutan pasca-pandemi dalam rangkaian konferensi dan kerjasama internasional Dept. Arsitektur FTUI	Peserta					Tidak diketahui	Tidak diketahui	Global	Dept. Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Indikator 11.a.1.(a) Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS										
Program Kerjasama Eksternal										
Webinar "Planning Post-Pandemic City"	Terlibatnya SDGs Hub UI sebagai narasumber dalam webinar Dept. Arsitektur FT UI "Planning Post-Pandemic City" yang membahas kota berkelanjutan pasca-pandemi dalam rangkaian konferensi dan kerjasama internasional Dept. Arsitektur FTUI	Peserta					Tidak diketahui	Tidak diketahui	Global	Dept. Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia
TUJUAN 13 MENGAMBIL TUJUAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA										
Indikator 13.2.2 (b) Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)										
Pengembangan kurikulum dan materi untuk SDG Academy Indonesia (UNDP)										
Penyusunan Modul Polusi	Berhasil menyusun kurikulum (rancangan pembelajaran) untuk SDG Mobile Learning Program	Dokumen	1				22	SDG Academy (UNDP Indonesia)	Nasional	SDGs Hub UI (sebagai knowledge partner/konsultan dari SDG Academy Indonesia UNDP)
	Berhasil menyusun materi SDG Mobile Learning Program	Dokumen (sesi)	6							
	Berhasil menyusun bank soal SDG Mobile Learning Program	Dokumen	1							
	Berhasil menyusun script untuk voice over SDG Mobile Learning Program	Dokumen (sesi)	6							
Penyusunan Modul Manajemen Lahan Kritis	Berhasil menyusun kurikulum (rancangan pembelajaran) untuk SDG Mobile Learning Program	Dokumen	1				22	SDG Academy (UNDP Indonesia)	Nasional	SDGs Hub UI (sebagai knowledge partner/konsultan dari SDG Academy Indonesia UNDP)
	Berhasil menyusun materi SDG Mobile Learning Program	Dokumen (sesi)	6							
	Berhasil menyusun bank soal SDG Mobile Learning Program	Dokumen	1							
	Berhasil menyusun script untuk voice over SDG Mobile Learning Program	Dokumen (sesi)	6							
Indikator 13.3.1 (a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup										
BRIDGE (Building Relationships through Intercultural Dialogue and Growing Engagement) School Partnership Program										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Workshop Hari 1 - BRIDGE Program Partnership "Introduction to SDGs"	Penyusunan materi pembelajaran dengan Pilar Lingkungan sebagai salah satu komponen	Materi	1				13	ASIA EDUCATION FOUNDATION (IALF - YAYASAN BAHASA INDONESIA AUSTRALIA)	Virtual (Nasional)	Asia Education Foundation - BRIDGE Partnership Program Team & SDGs Hub UI
	Pemberian Pelatihan Interaktif ke 110 kepala sekolah dan guru (tersebar di seluruh Indonesia) yang merupakan mitra dari BRIDGE School Partnership Program (Asia Education Foundation)	Kegiatan Workshop	1					ASIA EDUCATION FOUNDATION (IALF - YAYASAN BAHASA INDONESIA AUSTRALIA)	Virtual (Nasional)	Asia Education Foundation - BRIDGE Partnership Program Team & SDGs Hub UI
UI Green Metric World University Ranking										
UI Green Metric World University Ranking	Penyusunan ranking tahunan terhadap universitas anggota yang melakukan kegiatan <i>sustainability</i> (pengurangan <i>carbon footprint</i> dan memitigasi perubahan iklim)	Ranking	1	1	1	1	xx	xx	Global	UI Green Metric
Webinar "Peningkatan Aksi Perubahan Iklim di Tengah Pandemi"	Jumlah peserta SDGs Hub UI sebagai narasumber dalam webinar FMIPA UI & EU Climate Diplomacy Week "Peningkatan Aksi Perubahan Iklim di Tengah Pandemi"	Peserta					Tidak diketahui	Tidak diketahui	Global	FMIPA UI
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN										
Indikator: 14.a.1 Proporsi dari total pengeluaran untuk penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan										
Pengembangan kurikulum dan materi SDG Academy Indonesia (UNDP)										
Modul Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (Termasuk sampah laut)	Jumlah kurikulum (rancangan pembelajaran) untuk SDG Mobile Learning Program yang tersusun	Dokumen	1					SDG Academy (UNDP Indonesia)	Nasional	SDGs Hub UI (Knowledge Partner dari SDG Academy Indonesia)
	Jumlah kurikulum (rancangan pembelajaran) untuk SDG Leadership Certification Program yang tersusun	Dokumen	1							
	Jumlah materi SDG Mobile Learning Program yang tersusun	Dokumen (Sesi)	6							
	Jumlah materi SDG Leadership Certification Program yang tersusun	Dokumen (Sesi)	8							
	Jumlah bank soal SDG Mobile Learning Program yang tersusun	Dokumen	1							
	Jumlah bank soal SDG Leadership Certification Program yang tersusun	Dokumen	1							
Jumlah script untuk voice over SDG Mobile Learning Program yang tersusun	Dokumen (Sesi)	6								
	Dokumen (Sesi)	8								
Pengembangan kurikulum dan materi SDG Academy Indonesia (UNDP)										
Modul Polusi (termasuk Polusi Laut)	Jumlah kurikulum (rancangan pembelajaran) untuk SDG Mobile Learning Program yang tersusun	Dokumen	1					SDG Academy (UNDP Indonesia)	Nasional	SDGs Hub UI (Knowledge Partner dari SDG Academy Indonesia)
	Jumlah materi SDG Mobile Learning Program yang tersusun	Dokumen	1							
	Jumlah bank soal SDG Mobile Learning Program yang tersusun	Dokumen	1							

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Jumlah script untuk voice over SDG Mobile Learning Program yang tersusun	Dokumen (Sesi)	6								
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH										
16.1.3 Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.										
Program Kerjasama Eksternal										
Penyusunan Modul SDG Academy Indonesia dengan topik "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak"	Berhasil menyusun kurikulum (rancangan pembelajaran) untuk SDG Mobile Learning Program	Rancangan Kurikulum					Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1
	Berhasil menyusun kurikulum (rancangan pembelajaran)	Rancangan Kurikulum								
	Berhasil menyusun materi SDG Mobile Learning Program	Dokumen (sesi)								
	Berhasil menyusun materi SDG Leadership Certification Program	Dokumen (sesi)								
	Berhasil menyusun bank soal SDG Mobile Learning	Dokumen								
	Berhasil menyusun bank soal SDG Leadership Certification Program	Dokumen								
	Berhasil menyusun script untuk voice over SDG Mobile Learning Program	Dokumen (sesi)								
Berhasil menyusun script untuk voice over SDG Leadership Certification Program	Dokumen (sesi)									
16.b.1 Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional										
Program Kerjasama Eksternal										
Penyusunan Modul SDG Academy Indonesia dengan topik "Multikulturalisme"	Berhasil menyusun kurikulum (rancangan pembelajaran) untuk SDG Mobile Learning Program	Rancangan Kurikulum	1				Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1
	Berhasil menyusun materi SDG Mobile Learning Program	Dokumen (sesi)	6							
	Berhasil menyusun bank soal SDG Mobile Learning Program	Dokumen	1							
	Berhasil menyusun script untuk voice over SDG Mobile Learning Program	Dokumen (sesi)	6							
16.7.2 Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.										
Program Kerjasama Eksternal										
Penyusunan Modul SDG Academy Indonesia dengan topik "Tata Kelola"	Berhasil menyusun kurikulum (rancangan pembelajaran) untuk SDG Mobile Learning Program	Rancangan Kurikulum	1				Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 1 - Program 1 - Kegiatan 1
	Berhasil menyusun materi SDG Mobile Learning Program	Dokumen (sesi)	6							
	Berhasil menyusun bank soal SDG Mobile Learning Program	Dokumen	1							
	Berhasil menyusun script untuk voice over SDG Mobile Learning Program	Dokumen (sesi)	6							
Program Internal										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Ruang Diskusi SDGs - Webinar "Pilkada di tengah Pandemi"	Terlaksananya webinar "Pilkada dan Prioritas Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi" yang mengundang Kemendagri dan akademisi (FIA UI) sebagai narasumber	Peserta					Mengacu Tujuan 3 - Indikator 3.d.1 - Program 2 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 3 - Indikator 3.d.1 - Program 2 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 3 - Indikator 3.d.1 - Program 2 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 3 - Indikator 3.d.1 - Program 2 - Kegiatan 1
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPI TUJUAN										
INDIKATOR SDGs: 17.2.1 Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/ Komite Bantuan Pembangunan.										
Program Kerjasama Eksternal										
Kajian Isu Prioritas Presidensi Indonesia 2022	Berhasil menyusun kajian isu prioritas sebagai bahan penentuan prioritas presidensi Indonesia di G20 2022 dengan pembahasan mengenai pendanaan pencapaian SDGs	Kajian	1	-	-	-	Mengaju Tujuan 3 - Indikator 3.b.1 - Program 1 - Kegiatan 1	Mengaju Tujuan 3 - Indikator 3.b.1 - Program 1 - Kegiatan 1	Mengaju Tujuan 3 - Indikator 3.b.1 - Program 1 - Kegiatan 1	SDGs Hub UI
	Berhasil menyusun <i>issue notes</i> sebagai bahan penentuan prioritas presidensi Indonesia di G20 2022 dengan topik SDGs Financing	Issue Notes	1	-	-	-				
INDIKATOR SDGs: 17.9.1 Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.										
Program Kerjasama Eksternal										
SDG Snapshot at Subnational Government Level	Menyusun kajian SDGs Snapshot pada level pemerintah daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan	Kajian	1	-	-	-	500	ADB	Nasional	SDGs Hub UI & Konsultan Internasional ADB (berkolaborasi dengan UCLG ASPAC)
Program Internal										
Kerjasama Riset/Peningkatan Kapasitas/Pengabdian Masyarakat (Jasa Konsultansi)	Memobilisasi tenaga ahli SDGs Hub UI dalam kerjasama Riset / Penyusunan Modul / Peningkatan Kapasitas / Pengabdian Masyarakat	Kerjasama	-	5	6	6	minimal 50	belum ditentukan	Global/Regional/Nasional/Lokal	SDGs Hub UI dan mitra
Seminar Internasional (Virtual)	Menyelenggarakan seminar/konferensi internasional mengenai SDGs berkolaborasi dengan state/non state actors lainnya (misal: SDGs Center se-Indonesia) atau diintegrasikan sebagai side-event SDGs Annual Conference	Peserta	-	500	500	500	500	belum ditentukan	Global	SDGs Hub UI dan mitra
Webinar (Ruang Diskusi SDGs & Program Duta Kampus SDGs)	Menyelenggarakan webinar mengenai isu SDGs terkini berkolaborasi level nasional dengan non state actor lain dan Duta Kampus SDGs UI	Peserta	-	100	100	100	10	belum ditentukan	Universitas/Nasional	SDGs Hub UI dan mitra
	Terlibat sebagai narasumber konferensi/seminar mengenai isu SDGs dalam kegiatan state actor/nonstate actor lain baik internal maupun eksternal Universitas Indonesia	Peserta	-	50	50	50	-	belum ditentukan	Universitas/Nasional	SDGs Hub UI dan mitra
INDIKATOR SDGs: 17.18.1.(a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.										
Program Kerjasama Eksternal										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Alat Monitoring dan Evaluasi Awal dalam pencapaian SDGs untuk Pemerintah Daerah	Melakukan pemetaan Alat Monitoring dan Evaluasi yang tersedia pada saat ini untuk mengevaluasi dan memberikan masukan atas pelaksanaan implementasi Permendagri SDGs menuju keberhasilan pencapaian SDGs di Indonesia	Dokumen	1	-	-	-	50	UCLG ASPAC	Nasional	SDGs Hub UI (sebagai knowledge partner/konsultan)
	Melakukan pemetaan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pembangunan daerah menuju indikator SDGs yang ditetapkan dalam Permendagri 7 Tahun 2018 dan Indikator Metadata edisi 2 yang dirilis oleh Bappenas,	Dokumen	1	-	-	-				
	Analisis kesenjangan dari KLHS yang tersedia dan adopsi indikator SDGs yang diintegrasikan ke RPJMD sebagai pelokalan tujuan SDGs pada pemda	Dokumen	1	-	-	-				
	Memberikan usulan alat dan rekomendasi untuk mengatasi kesenjangan dan untuk mempercepat strategi lokalisasi SDGs	Dokumen	1	-	-	-				
	Memfasilitasi FGD online dan sarana pengumpulan data online lainnya untuk Pemda dalam perencanaan pembangunan daerah dan pencapaian SDG	FGD (sesi)	3	-	-	-				
Kajian Comprehensive/Inclusive Wealth for Sustainability and Well-being	Berhasil menyusun kajian Comprehensive Wealth (perhitungan terhadap Natural Capital, Produced Capital, Financial Capital, Human Capital, Social Capital) untuk Indonesia. Partner lain sebagai pelengkap PDB: Ethiopia dan Trindad & Tobago	Dokumen Laporan	1	-	-	-	Mengacu Tujuan 8 - Indikator 8.4.1 dan 8.4.1 (a) - Program 1 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 8 - Indikator 8.4.1 dan 8.4.1 (a) - Program 1 - Kegiatan 1	Mengacu Tujuan 8 - Indikator 8.4.1 dan 8.4.1 (a) - Program 1 - Kegiatan 1	SDGs Hub UI
	Penyusunan paper dan briefing notes dari hasil kajian Comprehensive Wealth	Paper/Artikel	-	2	-	-				
	Melakukan diseminasi kajian kepada pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait sustainability/keberlanjutan	Kegiatan Diseminasi	-	1	-	-				
INDIKATOR SDGs: 17.9.1 Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.										
Program Kerjasama Eksternal										
SDG Snapshot at Subnational Government Level	Menyusun kajian SDGs Snapshot pada level pemerintah daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan	Kajian	1	-	-	-	500	ADB	Nasional	SDGs Hub UI & Konsultan Internasional ADB (berkolaborasi dengan UCLG ASPAC)
Program Internal										
Kerjasama Riset/Peningkatan Kapasitas/Pengabdian Masyarakat (Jasa Konsultasi)	Memobilisasi tenaga ahli SDGs Hub UI dalam kerjasama Riset / Penyusunan Modul / Peningkatan Kapasitas / Pengabdian Masyarakat	Kerjasama	-	5	6	6	minimal 50	belum ditentukan	Global/Regional/Nasional/Local	SDGs Hub UI dan mitra

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Seminar Internasional (Virtual)	Menyelenggarakan seminar/konferensi internasional mengenai SDGs berkolaborasi dengan state/non state actors lainnya (misal: SDGs Center se-Indonesia) atau diintegrasikan sebagai side-event SDGs Annual Conference	Peserta	-	500	500	500	500	belum ditentukan	Global	SDGs Hub UI dan mitra
Webinar (Ruang Diskusi SDGs & Program Duta Kampus SDGs)	Menyelenggarakan webinar mengenai isu SDGs terkini berkolaborasi level nasional dengan non state actor lain dan Duta Kampus SDGs UI	Peserta	-	100	100	100	10	belum ditentukan	Universitas/Nasional	SDGs Hub UI dan mitra
	Terlibat sebagai narasumber konferensi/seminar mengenai isu SDGs dalam kegiatan state actor/nonstate actor lain baik internal maupun eksternal Universitas Indonesia	Peserta	-	50	50	50	-	belum ditentukan	Universitas/Nasional	SDGs Hub UI dan mitra
Nama Pemangku Kepentingan: SDGs Center Universitas Padjadjaran										
TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS										
Indikator SDGs										
Kerjasama Riset										
Technical Support for Development of SDG4 Monitoring Report	Final report of SDG4 Monitoring Report based on consultation with relevant government partners	persen	20	60	700.825.000		659.326.125	UNICEF (United Nations Children's Fund)	Bandung	SDGs Center
	Policy brief on SDG4 Monitoring Report	persen		20				UNICEF (United Nations Children's Fund)	Bandung	SDGs Center
An Efficiency based Regional Approach to Realize Sustainable Development Goals (SDGs): Calibrating Covid-19 Impacts Measuring the Impacts of Covid 19 on SDGs in ASEAN	An integrative report/book on realizing the SDG targets: ASEAN Way	Persen	0	40	71.662.500	-	71.662.500	ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)	Bandung	SDGs Center
	Booklet on private sector role in realizing SDGs	Persen	0	30		-		ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)	Bandung	SDGs Center
	Policy recommendation	Persen	0	30		-		ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)	Bandung	SDGs Center
SDGs Interlinkages Analysis in Indonesia	Pre-analysis related to various concepts d methods of SDGs Interlinkages in Indonesia based on literature studies on various publications related to indicators/targets/goals SDGs Interlinkages The document is in Indonesian language.	Persen	40	0	674.510.000	269.804.000	-	GIZ	Bandung	SDGs Center
	Quantitative and qualitative data on SDGs interlinkages in Indonesia are collected	Persen	0	10			404.706.000	GIZ	Bandung	SDGs Center
	SDGs interlinkages network	Persen	0	10					Bandung	SDGs Center
	Series of related studies/discussions	Persen	0	10					Bandung	SDGs Center

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Report of SDGs interlinkages analysis in Indonesia, including in the 4 pilot provinces	Persen	0	10				Bandung	SDGs Center	
	One (1) Scientific publications of the study results at the national level	Persen	0	10				Bandung	SDGs Center	
	Material or article of the study results for popular publications to be published by Bappenas (as the SDGs Coordinator in Indonesia)	Persen	0	10				Bandung	SDGs Center	
Conducting Stakeholder Consultations (via online) related to the SDG interlinkages study in West Java, Indonesia	Conduct an online stakeholders consultation/survey on SDG localisation in West Java, particularly related to key issues, priorities, and challenges, and major interlinkages among SDGs and compile the results in a brief report (English) together with the original survey results.	Persen	40		65.459.650	-	65.459.650	IGES (Institute for Global Environmental Strategies)	Bandung	SDGs Center
	Organising (together with IGES) an online validations/dissemination workshop (in English) with 15-20 selected people from consultation/survey participants and developing a brief report/meeting note (in English)	Persen	40			-		IGES (Institute for Global Environmental Strategies)	Bandung	SDGs Center
	Collection of relevant governmental documents (in their original languages and English is preferable) at the national level and for West Java related to the national/regional development planning and SDG implementation	Persen	20			-		IGES (Institute for Global Environmental Strategies)	Bandung	SDGs Center
Two national consultants to develop a Guideline and a Training Module for the government to develop and using the Youth Development Index (YDI) at the national level and sub-national level	Guideline for the government to develop and use the YDI at the national and sub-national levels in the Indonesian Language, with an English executive summary.	persen		50				UNFPA (United Nations Population Fund)	Bandung	SDGs Center
	Training module for the government to develop and use the YDI at the national and sub-national levels in the Indonesian Language, with an English executive summary	persen		50				UNFPA (United Nations Population Fund)	Bandung	SDGs Center
National consultant to develop the 2021 Youth Development Index (YDI)	The 2021 Youth Development Index including the results visualization (such as graphics and tables) and a 2-3 page executive summary of the key findings, conclusions and recommendations. The document is in Indonesian language.	persen		40	275.925.000		275.925.000	UNFPA (United Nations Population Fund)	Bandung	SDGs Center
	An executive summary of the key findings, conclusions and recommendations in English.	persen		60				UNFPA (United Nations Population Fund)	Bandung	SDGs Center

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Kontribusi SDGs	Identifikasi dan pentautan (tagging) program – program yang telah dilakukan AAL terhadap 17 tujuan, 169 target dan 319 indikator SDGs	Persen	0	40	254.762.000	-	254.762.000	PT. Astra Agro Lestari	Bandung	SDGs Center
	Rekomendasi perbaikan atau peningkatan program untuk dapat meningkatkan kontribusi perusahaan dalam pemenuhan target SDGs	Persen	0	30	254.762.000	-		PT. Astra Agro Lestari	Bandung	SDGs Center
	Infografis / visualisasi, yang diambil dari hasil pemantauan/tagging keterkaitan antara program-program AAL dengan 17 SDGs (diintisarkan dari matrix)	Persen	0	30	254.762.000	-		PT. Astra Agro Lestari	Bandung	SDGs Center
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI										
INDIKATOR 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.										
INDIKATOR 8.1.1.(a) PDB per kapita										
Seminar										
Seminar and Book Launch – Asia's Journey to Prosperity: Policy, Market and Technology Over 50 Years	Peningkatan kapasitas peserta mengenai Asia's Journey to Prosperity: Policy, Market and Technology Over 50 Years	orang					69,405	Asian Development Bank	Grha Sanusi UNPAD, Bandung	SDGs Center UNPAD
TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR										
Indikator 9.5.2* Jumlah sumber daya manusia bidang IPTEKS										
Capacity Building Workshop on Ecosystem Services, Valuation and Financing Mechanisms for Production Landscapes	Membangun kapasitas peserta dan memfasilitasi pembelajaran tentang cara menilai manfaat dan layanan non-produksi dari lanskap produksi, dan memahami penerapan instrumen sosioekologi dan alat pendukung keputusan untuk mendorong praktik-praktik berkelanjutan dalam lanskap produksi	orang					54,883	World Agroforestry and University of Adelaide	UTC Hotel, Bandung	SDGs Center UNPAD and EEI Indonesia
Virtual Public Lecture – System Approach to Global Sustainability and Sustainable Development	Mainstreaming SDGs System	orang					0	ATDIKBUD USA	Bandung	SDGs Center UNPAD
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN										
Indikator 11.3.1.(a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.										
Seminar										
Seminar Series – Unpacking the Myth of Smart City	Peningkatan kapasitas peserta mengenai smart city	orang					0,6	Mandiri	SDGs Center, Bandung	SDGs Center UNPAD
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN										
Indikator: 14.a.1 Proporsi dari total pengeluaran untuk penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan										
Penelitian Ekosistem Lautan										
Ecology-Economic of Marine Debris in Indonesian Coastal Waters	Peningkatan jumlah kum riset	persen		0			110.000.000	Academic Leadership Grant (ALG) UNPAD	Bandung	SDGs Center UNPAD
	Publikasi jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi	persen	30	70				Academic Leadership Grant (ALG) UNPAD	Bandung	
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN										
INDIKATOR SDGs: 17.13.1* Tersedianya Dashboard Makroekonomi.										
Pelatihan										
Workshop Introduction to Choice Modelling	Capacity building non-market valuation and its microeconomic foundation	orang	33	-	-	-	23	EEI Indonesia	Bandung	SDGs Center UNPAD

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Training for Business PT. Astra Agro Lestari	Peningkatan pemahaman keterkaitan PROPER dengan SDGs	orang	39				45,129	PT. Astra Agro Lestari	Bandung	SDGs Center UNPAD
	Dapat mengidentifikasi kontribusi program/ kegiatan perusahaan terhadap pencapaian SDGs							PT. Astra Agro Lestari	Bandung	SDGs Center UNPAD
	Mengetahui metode untuk pengukuran dampak program/ kegiatan perusahaan untuk pencapaian SDGs							PT. Astra Agro Lestari	Bandung	SDGs Center UNPAD
INDIKATOR SDGs: 17.16.1 Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.										
Kerjasama Riset										
Two national consultants to develop a Guideline and a Training Module for the government to develop and using the Youth Development Index (YDI) at the national level and sub-national level	Guideline for the government to develop and use the YDI at the national and sub-national levels in the Indonesian Language, with an English executive summary.	persen	50	-	-	-	486	UNFPA (United Nations Population Fund)	Bandung	SDGs Center UNPAD
	Training module for the government to develop and use the YDI at the national and sub-national levels in the Indonesian Language, with an English executive summary	persen	50	-	-	-		UNFPA (United Nations Population Fund)	Bandung	SDGs Center UNPAD
National consultant to develop the 2021 Youth Development Index (YDI)	The 2021 Youth Development Index including the results visualization (such as graphics and tables) and a 2-3 page executive summary of the key findings, conclusions and recommendations. The document is in Indonesian language.	persen	40	-	-	-	276	UNFPA (United Nations Population Fund)	Bandung	SDGs Center UNPAD
	An executive summary of the key findings, conclusions and recommendations in English.	persen	60	-	-	-	N/A	UNFPA (United Nations Population Fund)	Bandung	SDGs Center UNPAD
Kontribusi SDGs	Identifikasi dan pentautan (tagging) program – program yang telah dilakukan AAL terhadap 17 tujuan, 169 target dan 319 indikator SDGs	Persen		-	-	-	255	PT. Astra Agro Lestari	Bandung	SDGs Center UNPAD
	Rekomendasi perbaikan atau peningkatan program untuk dapat meningkatkan kontribusi perusahaan dalam pemenuhan target SDGs	Persen	15	-	-	-		PT. Astra Agro Lestari	Bandung	SDGs Center UNPAD
	Infografis / visualisasi, yang diambil dari hasil pemantauan/tagging keterkaitan antara program-program AAL dengan 17 SDGs (diintisarkan dari matrix)	Persen	30	-	-	-		PT. Astra Agro Lestari	Bandung	SDGs Center UNPAD
Kajian Kontribusi Program CSR Pertamina Pada Rencana Aksi SDGs	Memetakan kontribusi SDGs dari program-program CSR Pertamina	Persen	-	-	-	-	236,501	PT. Pertamina	Tangerang Selatan dan Bandung	SDGs Center UNPAD
	Rekomendasi hasil persepsi stakeholder terhadap SDGs dari program – program CSR Pertamina	Persen	-	-	-	-		PT. Pertamina	Tangerang Selatan dan Bandung	SDGs Center UNPAD
	Dukungan komunikasi/publikasi edukasi untuk 2 (dua) program CSR Pertamina di Kota Tangerang Selatan	Persen	-	-	-	-		PT. Pertamina	Tangerang Selatan dan Bandung	SDGs Center UNPAD

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Indikator: 17.18.1 Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs										
Indikator: 17.18.1a Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional										
Indikator: 17.18.1b Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.										
SDGs Interlinkages Analysis in Indonesia										
SDGs Indonesia	PencapaianB73:B83an dan gap SDGs terhadap target 2030	Persen	100	100	100	100	405	Hibah PUSU UNPAD	Bandung	SDGs Center UNPAD
SDGs Interlinkages Analysis in Indonesia	Pre-analysis related to various concepts d methods of SDGs Interlinkages in Indonesia based on literature studies on various publications related to indicators/targets/goals SDGs Interlinkages The document is in Indonesian language.	Persen	40	-	-	-	674,51	GIZ	Bandung	SDGs Center UNPAD
	Quantitative and qualitative data on SDGs Interlinkages in Indonesia are collected	Persen	10	-	-	-		GIZ	Bandung	SDGs Center UNPAD
	SDGs interlinkages network	Persen	10	-	-	-		GIZ	Bandung	SDGs Center UNPAD
	Series of related studies/discussions	Persen	10	-	-	-		GIZ	Bandung	SDGs Center UNPAD
	Report of SDGs interlinkages analysis in Indonesia, including in the 4 pilot provinces	Persen	10	-	-	-		GIZ	Bandung	SDGs Center UNPAD
	One (1) Scientific publications of the study results at the national level	Persen	10	-	-	-		GIZ	Bandung	SDGs Center UNPAD
	Material or article of the study results for popular publications to be published by Bappenas (as the SDGs Coordinator in Indonesia)	Persen	10	-	-	-		GIZ	Bandung	SDGs Center UNPAD
Conducting Stakeholder Consultations (via online) related to the SDG interlinkages study in West Java, Indonesia	Conduct an online stakeholders consultation/survey on SDG localisation in West Java, particularly related to key issues, priorities, and challenges, and major interlinkages among SDGs and compile the results in a brief report (English) together with the original survey results.	Persen	20	-	-	-	65,459	IGES (Institute for Global Environmental Strategies)	Bandung	SDGs Center UNPAD
	Organising (together with IGES) an online validations/dissemination workshop (in English) with 15-20 selected people from consultation/survey participants and developing a brief report/meeting note (in English)	Persen	40	-	-	-		IGES (Institute for Global Environmental Strategies)	Bandung	SDGs Center UNPAD
	Collection of relevant governmental documents (in their original languages and English is preferable) at the national level and for West Java related to the national/regional development planning and SDG implementation	Persen	20	-	-	-		IGES (Institute for Global Environmental Strategies)	Bandung	SDGs Center UNPAD
	Menghitung dan menganalisa capaian indikator setiap tujuan (goals) SDGs Kabupaten Bekasi sebelum pandemic COVID-19	Persen	-	-	-	-	Bappeda Kabupaten Bekasi	Bandung dan Bekasi	SDGs Center UNPAD	

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Sustainable Developments Goals Kabupaten Bekasi	Menghitung dan menganalisa capaian indikator setiap tujuan (goals) SDGs Kabupaten Bekasi pasca pandemic COVID-19	Persen	-	-	-	-	257,999	Bappeda Kabupaten Bekasi	Bandung dan Bekasi	SDGs Center UNPAD
	Analisis faktor-faktor berpengaruh terhadap capaian setiap indikator SDGs Kabupaten Bekasi	Persen	-	-	-	-		Bappeda Kabupaten Bekasi	Bandung dan Bekasi	SDGs Center UNPAD
Data Collection of the SDG Indicators at the Provincial Level for West Java in Indonesia	Identification of relevant indicators/proxy indicators (including brief description of the indicator, unit, methodology, and references) related to the official Global Indicators Framework of The United Nations at the provincial level for West Java, Indonesia. A template with the official SDG indicators as a reference will be provided by IGES	Persen	-	-	-	-	52,116	IGES (Institute for Global Environmental Strategies)	Bandung	SDGs Center UNPAD
	Collection of the time-series statistical data (2000-2019) at the provincial level for West Java, Indonesia for the indicators identified by the above a	Persen	-	-	-	-		IGES (Institute for Global Environmental Strategies)	Bandung	SDGs Center UNPAD
An Efficiency based Regional Approach to Realize Sustainable Development Goals (SDGs): Calibrating Covid-19 Impacts Measuring the Impacts of Covid 19 on SDGs in ASEAN	An integrative report/book on realizing the SDG targets: ASEAN Way	Persen	-	-	-	-	71,662	ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)	Bandung	SDGs Center UNPAD
	Booklet on private sector role in realizing SDGs	Persen	-	-	-	-		ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)	Bandung	SDGs Center UNPAD
	Policy recommendation	Persen	-	-	-	-		ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)	Bandung	SDGs Center UNPAD
Technical Assistance on Developing Sub-National Action Plan for Sustainable Development Goals	RAD sub-nasional SDGs di Provinsi Kalimantan Barat	Persen	-	-	-	-	405,195	IDCJ (International Development Center Japan Inc.)	Bandung	SDGs Center UNPAD
Program 2: Pelatihan										
Pelatihan "Text Mining Menggunakan Orange"	Peningkatan kapasitas peserta tentang Software Orange untuk Text Mining	Orang	-	-	-	-	7,2	UNPAD	SDGs Center UNPAD, Bandung	SDGs Center UNPAD
Training Phyton	Peningkatan kapasitas peserta dalam penggunaan software Phyton untuk interlinkages SDGs	Orang	-	-	-	-	4	UNPAD	SDGs Center UNPAD, Bandung	SDGs Center UNPAD
Pengolahan Data Indikator SDGs	Peningkatan kapasitas peserta dalam melakukan pengolahan data indikator SDGs	Persen	50	-	-	-	486	UNPAD	SDGs Center UNPAD, Bandung	SDGs Center UNPAD

Nama Pemangku Kepentingan: Yayasan Lahan Basah

TUJUAN 13 MENGAMBIL TUJUAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

Indikator 13.1.2* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Rehabilitasi ekosistem mangrove dan peningkatan ekonomi untuk ketangguhan masyarakat	meningkatnya resiliensi masyarakat terhadap bencana rob dan abrasi	orang	250				1.446.000.500,00	SWF dan IKI	Kabupaten Demak	YLBA
Eco DRR (restorasi dan pengelolaan gambut berkelanjutan berbasis masyarakat untuk PRB)										
Pelatihan retorasi dan kegiatan restorasi gambut untuk PRB	Meningkatnya resiliensi masyarakat terhadap bencana karhutla	Orang	750				2.250.000.000	EU, UNEP	Tapanuli Selatan, Sumut	YLBA
Nama program : IKI PME (restorasi dan pengelolaan gambut berkelanjutan untuk mitigasi PI)										
Pelatihan restorasi dan kegiatan restorasi gambut	Meningkatnya resiliensi masyarakat terhadap bencana karhutla	orang		1.000			4.050.000.000	IKI	Tapanuli Selatan, Sumut	YLBA bekerjasama dengan CI International
Indikator 13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana										
Water Dialogue										
Penyusunan Roadmap Mitigasi dan Adaptasi Penurunan Muka Tanah	Dihasilkannya dokumen roadmap mitigasi dan adaptasi land subsidence provinsi jawa tengah	Dokumen	1				200.000.000	SWF dan IKI	Jawa Tengah	YLBA bekerjasama dengan Eco shape consortium
Indikator 13.2.2 (b) Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)										
Nama Program: Building with Nature Indonesia										
rehabilitasi mangrove di tambak tepi laut	luas tambak yang dirubah menjadi mangrove	hektar	17,55				1.334.250.000	SWF dan IKI	Kabupaten Demak	Yayasan Lahan Basah
rehabilitasi mangrove di tambak tepi sungai	luas tambak yang terhubung dengan mangrove	hektar	64,98				1.619.325.000	SWF dan IKI	Kabupaten Demak	Yayasan Lahan Basah
Building with Nature Indonesia										
Rehabilitasi mangrove dan peningkatan ekonomi	Jumlah kelompok masyarakat yang melakukan rehabilitasi mangrove	kelompok	11				1.446.000.500,00	SWF dan IKI	Kabupaten Demak	YLBA
	Jumlah masyarakat yang melakukan rehabilitasi mangrove	orang	250				1.446.000.500,00	SWF dan IKI	Kabupaten Demak	YLBA
Eco DRR (restorasi dan pengelolaan gambut berkelanjutan berbasis masyarakat untuk PRB)										
Pembentukan kelompok retorasi gambut untuk PRB	Jumlah kelompok masyarakat restorasi gambut yang terbentuk	kelompok	15				2.250.000.000	EU, UNEP	Tapanuli Selatan, Sumut	YLBA
	Jumlah kelompok masyarakat peduli api yang terbentuk	Kelompok	2							
IKI PME (restorasi dan pengelolaan gambut berkelanjutan untuk mitigasi PI)										
Pembentukan kelompok retorasi gambut	Jumlah kelompok kelompok masyarakat restorasi gambut yang terbentuk	kelompok		20			4.050.000.000	IKI	Tapanuli Selatan, Sumut	YLBA bekerjasama dengan CI International
Eco DRR dan IKI PME										
Restorasi Gambut terdegradasi	Luas gambut yang terkena dampak pembasahan dan yang direvegetasi	Hektar	500				5.400.000.000	EU DEVCO, UNEP, IKI PME	kabupaten Tapanuli Selatan	Yayasan Lahan Basah
To Plant no To Plant										
Retorasi mangrove melalui metode EMR	luas mangrove yang direstorasi			75	75		1.350.000.000	Turing Foundation, Waterloo Foundation, Otter Foundation, Greenchoice	Kaltim/Kaltara	Yayasan Lahan Basah

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Pemangku Kepentingan: SAFE INDONESIA										
TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS										
Indikator SDGs:										
DiscusSAFE (Diskusi Bulanan)										
Edukasi Pendidikan	Jumlah kegiatan edukasi yang terlaksana	kegiatan	6	6	6	6				
	Jumlah mitra program yang mendapatkan edukasi	edukasi	25	50	100	150				
Diskusi Pendidikan	Jumlah kegiatan diskusi pendidikan yang terlaksana	kegiatan	6	6	6	6	Rp 7.500.000,-	Mitra dunia usaha	Nasional	
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam program	kota/kabupaten	15	20	30	30				
	Jumlah penerima manfaat program	orang	300	750	1500	2000				
	Jumlah peserta yang terlibat dalam program	orang	300	750	1500	2000				
Sharing Session										
Live Instagram	Jumlah kegiatan yang terlaksana	kegiatan	6	6	6	6				
	Jumlah penerima manfaat program	orang	300	750	1500	2000	Rp 5.000.000,-	Mitra dunia usaha	Nasional	
Podcast SAFE Talk	Jumlah kegiatan yang terlaksana	kegiatan	6	6	6	6				
	Jumlah penerima manfaat program	orang	300	750	1500	2000				
TUJUAN 13 MENGAMBIL TUJUAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA										
Indikator 13.3.1 (a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup										
DiscusSAFE (Diskusi Bulanan)										
Edukasi Lingkungan	Jumlah kegiatan edukasi yang terlaksana	kegiatan	6	6	6	6	Rp 7.500.000,-	Mitra dunia usaha	Nasional	SAFE Indonesia
	Jumlah mitra program yang mendapatkan edukasi	edukasi	25	50	100	150				
Diskusi Lingkungan	Jumlah kegiatan diskusi lingkungan yang terlaksana	kegiatan	6	6	6	6				
	Jumlah kota / kabupaten yang dijangkau dalam program	kota/ kabupaten	15	20	30	30				
	Jumlah penerima manfaat program	orang	300	750	1500	2000				
	Jumlah peserta yang terlibat dalam program	orang	300	750	1500	2000				
Sharing Session										
Live Instagram	Jumlah kegiatan yang terlaksana	kegiatan	6	6	6	6	Rp 5.000.000,-	Mitra dunia usaha	Nasional	SAFE Indonesia
	Jumlah penerima manfaat program	orang	300	750	1500	2000				
Podcast SAFE Talk	Jumlah kegiatan yang terlaksana	kegiatan	6	6	6	6				
	Jumlah penerima manfaat program	orang	300	750	1500	2000				
Ekspedisi SAFE Indonesia (Bidang Lingkungan)										
Combat the Climate Crisis	Jumlah kegiatan yang terlaksana	kegiatan	1	2	2	2	Rp 80.000.000,-	Galang Dana dan Mitra dunia usaha	7 kabupaten/kota	SAFE Indonesia dan mitra
	Jumlah mitra yang terlibat dalam program	institusi	10	20	20	20				
	Jumlah penerima manfaat program	kota/ kabupaten	1	3	3	3				
SAFE Market	Jumlah kegiatan terlaksana	kegiatan	1	2	2	2				
	Jumlah mitra yang terlibat	institusi	10	20	20	20				
	Jumlah penerima manfaat program	orang	50	100	100	100				
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam program	kota/ kabupaten	1	2	2	2				

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Ekspedisi SAFE Berbagi	Jumlah kegiatan terlaksana	kegiatan	1	2	2	2				
	Jumlah mitra yang terlibat	institusi	10	20	20	20				
	Jumlah penerima manfaat program	orang	50	100	100	100				
	Jumlah kota/kabupaten yang dijangkau dalam program	kota/kabupaten	1	2	2	2				
Nama Pemangku Kepentingan: WORLD BANK										
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
Indikator 6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.										
Optimalisasi dan Peningkatan Akses Air Minum										
Proyek Air Minum Perkotaan Nasional (NUWSP)	Peningkatan pelayanan air minum di perkotaan	Sumbangan Rumah (SR)	800.000	1.200.000			Dana pinjaman USD100 juta, dana Pemerintah dan lainnya USD 500 juta	Pinjaman Bank Dunia dan Dana Lainnya (APBN, APBD, PDAM, Swasta dll)	200 Kota, termasuk didalamnya 40 kota bantuan program fisik	World Bank & Kemen PUPR
Nama Kegiatan 2: Proyek Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Peningkatan pelayanan air minum di perdesaan	Desa						Pinjaman Bank Dunia dan Dana Lainnya (APBN, APBD, Masyarakat, dll)	Tersebar di 32 Provinsi	World Bank & Kemen PUPR
Nama Pemangku Kepentingan: USAID										
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
Indikator 6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.										
Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan Untuk Semua (IUWASH PLUS)										
Peningkatan akses terhadap kualitas layanan air minum yang lebih baik	Peningkatan akses air minum layak bagi penduduk perkotaan	Jumlah orang	902.195	336.500	N/A	N/A	N/A	USAID	-	USAID & Kemen PUPR
	Peningkatan akses air minum layak bagi penduduk perkotaan dengan 40% tingkat kesejahteraan terendah dari total populasi (Bottom 40)	Jumlah orang	253.470	94.205	N/A	N/A	N/A	USAID	-	USAID & Kemen PUPR
Indikator 6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.										
Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan Untuk Semua (IUWASH PLUS)										
Peningkatan akses terhadap kualitas layanan sanitasi yang terkelola dengan baik	Peningkatan akses sanitasi aman bagi penduduk perkotaan	Jumlah orang	604.670	221.060	N/A	N/A	N/A	USAID	-	USAID & Kemen PUPR
	Peningkatan akses sanitasi dasar atau bersama (sharing) bagi penduduk perkotaan	Jumlah orang	190.015	346.585	N/A	N/A	N/A	USAID	-	USAID & Kemen PUPR
	Peningkatan akses sanitasi dasar atau bersama (sharing) bagi penduduk perkotaan dengan 40% tingkat kesejahteraan terendah dari total populasi (Bottom 40)	Jumlah orang	121.365	60.635	N/A	N/A	N/A	USAID	-	USAID & Kemen PUPR
Nama Pemangku Kepentingan: ASIAN DEVELOPMENT BANK										
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
Indikator 6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.										
Loan 3793-INO: Emergency Assistance for Reconstruction and Rehabilitation (Component 1: Public Works Infrastructure)										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
PASIGALA Water Treatment Distribution	By 2023, setidaknya 35.000 sambungan layanan rumah tangga (menguntungkan setidaknya 66.000 perempuan dan anak perempuan) untuk pasokan air yang dibangun dengan konsultasi sebelumnya (45% partisipasi perempuan dalam konsultasi) <i>At least 35,000 household service connections (benefiting at least 66,000 women and girls) for water supply established with prior consultation (45% participation of women in consultations)</i>	Sambungan rumah household connections			35.000		USD 44.67 juta	ADB Loan 3793-INO	Sulawesi Tengah	ADB & Pemda Sulawesi Tengah
PASIGALA Raw Water Supply	42 kilometer sistem transmisi air baku Palu–Sigi–Donggala direkonstruksi dan ditingkatkan 42 kilometers of Palu–Sigi–Donggala raw water transmission system reconstructed and upgraded	Kilometer (Km)			42		USD 40.74 juta	ADB Loan 3793-INO	Sulawesi Tengah	ADB & Pemda Sulawesi Tengah
	4,3 km sistem transmisi pasokan air baku Paneki terbangun 4.3 km of Paneki raw water supply transmission system constructed	Kilometer (Km)			4		USD 1.44 juta	ADB Loan 3793-INO	Sulawesi Tengah	ADB & Pemda Sulawesi Tengah
	20,6 km sistem transmisi pasokan air baku Tondo terbangun 20.6 km of Tondo raw water supply transmission system constructed	Kilometer (Km)			21		USD 5.8 juta	ADB Loan 3793-INO	Sulawesi Tengah	ADB & Pemda Sulawesi Tengah
	1,5 km pipa transmisi pasokan air baku Duyu terbangun 1.5 km of Duyu raw water supply transmission pipeline constructed.	Kilometer (Km)			2		USD 0.5 juta	ADB Loan 3793-INO	Sulawesi Tengah	ADB & Pemda Sulawesi Tengah
Indikator 6.2.1*Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.										
Nama Program:										
Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP)	Terbangunnya unit pengelola air limbah terpusat (wastewater treatment plant) dan saluran perpipaan air limbah di 3 kota melalui pendanaan ADB dan terbangunnya sambungan rumah melalui pendanaan pemerintah	Sambungan rumah (SR)			32.300		USD 94 juta untuk 2020-2023 (nilai total loan: USD 120 juta untuk 2014-2023)	ADB	Makassar, Jambi dan Pekanbaru	ADB & Pemda Sulawesi Tengah
Nama Pemangku Kepentingan: DFAT										
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
Indikator 6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.										
Indikator 6.2.1*Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.										
SAIIG / HAL	sAIIG -> Pengolahan air limbah domestik untuk jumlah sambungan rumah:	SR (2018 s/d 2020)					#REF!	DFAT	44 Pemda	DFAT & PEMDA
	HAL -> Pengolahan air limbah domestik untuk jumlah sambungan rumah:	SR	4.700				28.200	DFAT	Medan, Kota Bandung, DKI JK	DFAT & PEMDA

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Nama Pemangku Kepentingan: Unilever Indonesia									
TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU									
Indikator 7.2.1* Bauran energi terbarukan									
Nama Program : Penghematan energi dan penggunaan energi terbaruka									
Kegiatan: Penggunaan energi terbarukan seperti panel surya - untuk pemanas yang memasok air panas ke proses produksi menggantikan pemanas air listrik, penggunaan energi biomassa yang berasal dari cangkang sawit menggantikan gas alam sebagai bahan bakar pada Menara NSD, pengolahan sampah khususnya plastik diproses menjadi material bahan bakar alternatif pengganti batu bara atau Refuse Derived Fuel (RDF)	Penghematan energi dari penggunaan panel surya	GJ per hari	6,7 (2020)	PM	PM	PM	PM		Pabrik personal care dan kantor Grha Unilever
	Penghematan energi dari penggunaan panel surya	kWh	241308 (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Penghematan energi dari penggunaan energi biomassa	GJ	280013 (2020)	PM	PM	PM	PM		Pabrik Powder NSD, Cikarang
	Konsumsi bubuk dasar yang diproduksi dari cangkang inti sawit	Mcal/ton	375 (2020)	PM	PM	PM	PM		
	LHV	kkal/kg	4000-4500 (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Penggunaan plastik daur ulang sebagai alternatif Refuse Derived Fuel (RDF)	ton	3070,44 (2020)		PM	PM	PM	PM	1. Pabrik semen PT SBI Narogong 2. TPST Jeruklegi Cilacap
Kegiatan : Penghematan energi melalui efisiensi pencahayaan, - penginstalan Power Meter, mengganti peralatan dengan konsumsi energi yang lebih rendah, seperti blower, motor kompresor, serta efisiensi energi dalam boiler	Penghematan dari efisiensi pencahayaan, penginstalan Power Meter, mengganti peralatan dengan konsumsi energi yang lebih rendah, seperti blower, motor kompresor, serta efisiensi energi dalam boiler	GJ/tahun	19656,16 (2020)	PM	PM	PM	PM		
Kegiatan : Penurunan intensitas energi sebesar 7,24% dibanding - tahun sebelumnya atau sebesar 37% dari tahun dasar (2008)	Penurunan vs tahun dasar (GJ)	%	25% (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Penurunan vs tahun dasar (GJ/ton)	%	-37% (2020)	PM	PM	PM	PM		
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI									
INDIKATOR 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.									
INDIKATOR 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin									
INDIKATOR 8.5.1* Upah rata-rata per jam kerja									
INDIKATOR 8.5.2* Tingkat Pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur									
INDIKATOR 8.5.2.(a) Tingkat Setengah Pengangguran									
Nama Program : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta									
Kegiatan 1: Menciptakan lapangan pekerjaan di seluruh wilayah - operasional termasuk rantai pasokan dan mitra ritel skala kecil	Pabrik-pabrik Unilever yang berlokasi di Cikarang dan Rungkut	Pabrik	9 (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Pabrik pemasok	Pabrik	16 (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Peritel skala kecil	Peritel	500000+ (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Distributor independen	Distributor	800+ (2020)	PM	PM	PM	PM		

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Depot gudang	Depot gudang	15 (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Pusat distribusi	Pusat distribusi	2 (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Petani kecil yang tersebar di Jawa, Lampung dan Sulawesi	Petani gula kelapa	25000 (2020)	PM	PM	PM	PM			
Kegiatan 2: Standar upah yang memperhatikan ketentuan Upah - Minimum Regional	Rasio upah karyawan tetap Kantor Pusat terhadap UMR	%	291% (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Rasio upah karyawan tetap Pabrik Cikarang Jawa Barat terhadap UMR	%	276% (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Rasio upah karyawan tetap Pabrik Rungkut Jawa Timur terhadap UMR	%	291% (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Rasio upah karyawan kontrak Kantor Pusat terhadap UMR	%	643% (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Rasio upah karyawan kontrak Pabrik Cikarang Jawa Barat terhadap UMR	%	271% (2020)	PM	PM	PM	PM			
Kegiatan 5: Pelatihan dan pengembangan bagi karyawan dengan - total 33.802 jam belajar	Modul/Judul pelatihan	Modul	693 (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Pelatih	orang	237 (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Peserta pelatihan	Peserta	14214 (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Peserta pelatihan (laki-laki)	Peserta	5549 (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Peserta pelatihan (perempuan)	Peserta	8676 (2020)	PM	PM	PM	PM			
Kegiatan 6: Tidak mempekerjakan anak di bawah umur, tidak - memberlakukan kerja paksa			Tercapai (2020)	PM	PM	PM	PM			
INDIKATOR 8.8.1.(a) Jumlah Perusahaan yang menerapkan norma K3										
Kegiatan 3: Menerapkan norma K3, nihil kecelakaan kerja fatal	Safety Behavior Observation	Jumlah laporan observasi per 100000 jam kerja	20 (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Karyawan baru bergabung dalam program BeSafe pada 2020	Karyawan	20 (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Safe travel	km	33140730 (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Audit kontraktor	Audit	53 (2020)	PM	PM	PM	PM		Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan	
	Kelas Pelatihan K3	Kelas	13 (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Peserta Kelas Pelatihan K3	Peserta	74 (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Total Recordable Frequency Rate (TRFR) kontraktor	TRFR	0,28 (2020)	PM	PM	PM	PM			

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Total Recordable Frequency Rate (TRFR) karyawan	TRFR	0,37 (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Jam kerja aman di pabrik Unilever Indonesia	jam	2781028 (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Lost Time Accident	Lost Time Accident	1 (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Serious HSE Incident	Serious HSE Incident	0 (2020)	PM	PM	PM	PM			
INDIKATOR 8.8.2 Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundangundangan negara terkait.										
Kegiatan 1: Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Perseroan mengikuti perkembangan regulasi ketenagakerjaan dan menjalin komunikasi yang baik dengan serikat pekerja. Diskusi rutin dilakukan secara berkala untuk lebih memahami kepentingan masing masing dan menjaga keharmonisan antar pemangku kepentingan industri		Tersedia (2020)	PM	PM	PM	PM			
Kegiatan 4: Kebebasan berserikat, adanya serikat pekerja dan - Perjanjian Kerja Bersama (PKB)			Tersedia (2020)	PM	PM	PM	PM			
Kegiatan 5: Pelatihan dan pengembangan bagi karyawan dengan - total 33.802 jam belajar	Modul/Judul pelatihan	Modul	693 (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Pelatih	orang	237 (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Peserta pelatihan	Peserta	14214 (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Peserta pelatihan (laki-laki)	Peserta	5549 (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Peserta pelatihan (perempuan)	Peserta	8676 (2020)	PM	PM	PM	PM			
Kegiatan 6: Tidak mempekerjakan anak di bawah umur, tidak - memberlakukan kerja paksa			Tersedia (2020)	PM	PM	PM	PM			
TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR										
Indikator 9.4.1* Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur										
Nama Program: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi										
Kegiatan 2: Penurunan emisi CO2 sebesar 65,8% dibanding tahun sebelumnya atau penurunan 86% dibanding tahun dasar (2008)	Penurunan vs tahun dasar CO2 dari energi (basis pasar) - ton	%	-73% (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Penurunan vs tahun dasar CO2 dari energi (basis pasar) - kg/ton	%	-86% (2020)	PM	PM	PM	PM			
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN										
Indikator 11.6.1 Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota										
Nama Program 11: Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan										
Kegiatan: Pengelolaan sampah dan limbah telah menciptakan kota - yang bersih dan nyaman. Inisiatif yang telah dicapai, 13.262 ton sampah terkumpul melalui bank sampah, 3.070 ton telah diolah menjadi energi melalui Refuse	Pengurangan berat limbah dibandingkan 2019	ton	1541,83 (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Volume sampah yang dibuang ke Landfill	%	0% (2020)	PM	PM	PM	PM			
	Jumlah sampah plastik yang berhasil dibantu dikumpulkan dan diproses	ton	16402 (2020)	PM	PM	PM	PM			

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Derived Fuel (RDF), penggunaan 68,60 ton plastik Post Consumer Recycled (PCR) untuk kemasan kami	Pengembangan unit Bank Sampah	unit	hampir 4000 (2020)	PM	PM	PM	PM	37 kota	
	Pengembangan unit Bank Sampah	Anggota Bank Sampah	500000+ (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Edukasi pesantren dalam melakukan pemilahan dan pemanfaatan sampah organik serta anorganik	Pesantren	18 (2020)	PM	PM	PM	PM	Pulau Jawa	
	Fasilitas pengolahan sampah plastik CreaSolv - sampah kemasan multilayer yang berhasil di daur ulang	kg	94066 (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Fasilitas pengolahan sampah plastik CreaSolv - sampah kemasan multilayer yang berhasil di daur ulang	kg Rpe	46210 (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Penggunaan plastik daur ulang sebagai alternatif Refuse Derived Fuel (RDF)	ton	3070,44 (2020)	PM	PM	PM	PM	1. Provinsi DKI Jakarta 2. Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah	1. PT Solusi Bangun Indonesia 2. Pemerintah Daerah
Kegiatan : Kantor pusat yang telah menerapkan Green Building - Program Ruang Terbuka Hijau	Green Building yang tersertifikasi Greenship dengan kategori Platinum	hektar	3 (2020)	PM	PM	PM	PM	Kantor Pusat	
	Gedung Hijau Besar dengan Efisiensi Energi Terbaik di Indonesia menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	sertifikasi	Tersedia (2020)	PM	PM	PM	PM	Kantor Pusat	
Kegiatan : Membangun ketahanan kota terhadap pandemi Covid-19 - melalui bantuan kesehatan dan kebersihan untuk mengurangi korban meninggal	Dukungan bagi tenaga medis	Paket makanan	55200 (2020)	PM	PM	PM	PM	Rumah sakit di Jakarta, Tangerang, Bekasi	
	Dukungan bagi tenaga medis	Masker N95	60000 (2020)	PM	PM	PM	PM	8 (delapan) Rumah Sakit Rujukan di bawah naungan PERSI	Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dan Tangerang
	Donasi paket produk dan alat kebersihan kepada masjid di seluruh Indonesia	Masjid	100000 (2020)	PM	PM	PM	PM		Dewan Masjid Indonesia (DMI)
	Donasi peralatan kesehatan	unit	1. 40320 alat tes PCR 2. 2 ventilator ICU 3. 60000 APD (2020)	PM	PM	PM	PM	1. 12 rumah sakit dan lembaga kesehatan 2. RS Siloam Mampang & Mitra Keluarga Jatiasih 3. Melalui PERSI ke 10 rumah sakit dan lembaga kesehatan	1. PERSI 2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
	Donasi hand sanitizer, sabun, produk makanan dan minuman, produk perawatan higienitas rumah, dan paket makanan bagi tenaga medis	Miliar rupiah	10 (2020)	PM	PM	PM	PM	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Perseroan
	Donasi 1300000 produk Unilever seperti Lifebuoy, Wipol, SariWangi dan Buavita	Miliar rupiah	7,2 (2020)	PM	PM	PM	PM	3 provinsi dan 13 kabupaten/kota di Indonesia	Palang Merah Indonesia (PMI)

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Donasi untuk Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	unit	1. 10000 unit hand sanitizer Lifebuoy 2. 3000 unit masker KN95 3. 2880 unit alat test PCR 4. 250 unit wastafel portabel 5. 15000 unit Vaseline petroleum jelly (2020)	PM	PM	PM	PM			
Donasi wastafel portabel dan sabun cuci tangan untuk 3 bulan	unit	746 (285 Surabaya, 421 Jakarta, 40 Kabupaten Bekasi) (2020)	PM	PM	PM	PM	1. Surabaya 2. Jakarta 3. Kabupaten Bekasi		
Distribusi Hygiene Kit dan Produk UL ke warung kecil	Warung	631 (2020)	PM	PM	PM	PM		1. BenihBaik 2. Muslimat NU 3. Gusdurian	
TUJUAN 12 POLA KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB									
Indikator 12.1.1* Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan									
Nama Program 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan									
Kegiatan : Efisien pemakaian sumber daya alam, penurunan intensitas - energi sebesar 7,24% dibanding tahun sebelumnya atau sebesar 37% dari tahun	Penurunan vs tahun dasar (GJ)	%	25% (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Penurunan vs tahun dasar (GJ/ton)	%	-37% (2020)	PM	PM	PM	PM		
Kegiatan : Total limbah yang didaur ulang 26.640.552 kg di tahun - 2020	Daur ulang lumpur non B3	ton	10,5 (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Limbah yang didaur ulang	kg/ton	22144 (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Penurunan vs tahun dasar limbah yang didaur ulang	%	283%	PM	PM	PM	PM		
Kegiatan : Penerapan ISO 140001			Tersedia (2020)	PM	PM	PM	PM		
Kegiatan : 8 Pabrik Unilever Indonesia telah mendapat penilaian - PROPER BIRU	Data PROPER	pabrik	8 (2020)	PM	PM	PM	PM	1. Pabrik Cikarang (6 pabrik) 2. Pabrik Rungkut (2 pabrik)	
Kegiatan 5: Perolehan bahan baku dari pertanian yang berkelanjutan. - Bahan baku teh kami 100% telah tersertifikasi Rainforest Alliance (RA) dan 99,6% pasokan kelapa sawit kami secara global telah tersertifikasi RSPO	Pembinaan melalui proses konsultasi serta pendampingan pada proses audit dalam memenuhi dan memperoleh sertifikasi Rainforest Alliance (RA)	Supplier teh tersertifikasi RA	19 (2020)	PM	PM	PM	PM	1. Rainforest Alliance (RA) 2. Unilever global	

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2021	2022	2023	2024				
Pelatihan dan pendanaan untuk pemenuhan sertifikasi RSPO	Jumlah pabrik	8 (2020)							1. Pemerintah 2. Swasta 3. LSM 4. Kelompok tani
	Orang	90 (2020)	PM	PM	PM	PM			Daemeter
Kegiatan 6: Mendorong gaya hidup yang berkelanjutan, di antaranya - memasyarakatkan pola hidup yang sehat	Capaian masyarakat dalam menanamkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	juta 100 (2020)	PM	PM	PM	PM			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
	Pelayanan perawatan gigi gratis	Masyarakat	500000+	PM	PM	PM	PM		
Kegiatan 7: Melalui Zero Waste to Landfill tidak ada lagi sampah atau - limbah non-B3 dari pabrik dan kantor yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Volume sampah yang dibuang ke Landfill	%	0% (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Pengurangan limbah plastik dengan pendekatan strategi yaitu, mengurangi plastik, plastik yang lebih baik, tanpa plastik. Beragam produk Unilever telah di desain untuk menggunakan lebih sedikit plastik, memakai plastik daur ulang dan menjual produk dengan cara isi ulang (refill) di toko tertentu	Penggunaan bahan plastik PET daur ulang untuk kemasan botol Bango	%	100% (2020)	PM	PM	PM	PM	
	Penggunaan plastik daur ulang untuk kemasan botol Love and Beauty Planet	%	100%	PM	PM	PM	PM		
	Penggunaan plastik daur ulang untuk kemasan botol Rinso, Molto, Wipol dan Sunlight		Tersedia (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Sampah plastik yang dikumpulkan melalui jaringan bank sampah	ton	13262,67 (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Penggunaan plastik daur ulang sebagai alternatif Refuse Derived Fuel (RDF)	ton	3070,44 (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Penggunaan plastik daur ulang untuk kemasan produk Unilever	ton	68,6 (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Sarana operasional untuk meningkatkan kinerja para pemulung dalam pemanfaatan sampah plastik (Pepsodent)	KIP (Kawasan Industri Pemulung)	3 (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Pengurangan penggunaan plastik pada Rinso	%	20% (2020)	PM	PM	PM	PM		
	TUJUAN 13 PERUBAHAN IKLIM								
Indikator 13.2.(b) Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)									
Nama Program 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya									
Kegiatan : Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 65,82% dibanding tahun lalu atau berkurang 86% dari tahun dasar (2008)	Penurunan vs tahun dasar CO2 dari energi (basis pasar) - ton	%	-73% (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Penurunan vs tahun dasar CO2 dari energi (basis pasar) - kg/ton	%	-86% (2020)	PM	PM	PM	PM		
Kegiatan : Inisiatif mitigasi perubahan iklim melalui pemakaian energi terbarukan seperti panel surya untuk pemanas, penggunaan energi biomassa yang berasal dari cangkang sawit, pengolahan sampah khususnya plastik diproses menjadi material bahan bakar alternatif pengganti batu bara atau Refuse Derived Fuel (RDF)	Penghematan energi dari penggunaan panel surya	GJ per hari	6,7 (2020)	PM	PM	PM	PM		Pabrik personal care dan kantor Grha Unilever
	Penghematan energi dari penggunaan panel surya	kWh	241308 (2020)	PM	PM	PM	PM		
	Penghematan energi dari penggunaan energi biomassa	GJ	280013 (2020)	PM	PM	PM	PM		Pabrik Powder NSD, Cikarang
	Konsumsi bubuk dasar yang diproduksi dari cangkang inti sawit	Mcal/ton	375 (2020)	PM	PM	PM	PM		
LHV	kkal/kg	4000-4500 (2020)	PM	PM	PM	PM			

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Penggunaan plastik daur ulang sebagai alternatif Refuse Derived Fuel (RDF)	ton	3070,44 (2020)	PM	PM	PM	PM		1. Pabrik semen PT SBI Narogong 2. TPST Jeruklegi Cilacap	1. PT Solusi Bangun Indonesia 2. Pemerintah Daerah di dua lokasi, yaitu di Provinsi DKI Jakarta, dan Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah	
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN										
Indikator 15.a.1.(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan										
Nama Program 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati										
Kegiatan : Kebijakan Zero deforestation, di antaranya melalui sumber bahan baku diperoleh dari pertanian/perkebunan berkelanjutan yang tidak memperbolehkan adanya deforestasi	Program Pengembangan Petani Kedelai Hitam	Jumlah petani	10602 (2020)	PM	PM	PM	PM		Lebih dari 25 kabupaten di Di Yogyakarta dan Jawa Timur	
	Pembinaan melalui proses konsultasi serta pendampingan pada proses audit dalam memenuhi dan memperoleh sertifikasi Rainforest Alliance (RA)	Supplier teh tersertifikasi RA	19 (2020)	PM	PM	PM	PM		1. Rainforest Alliance (RA) 2. Unilever global	
	Pelatihan pertanian gula kelapa yang berkelanjutan	Jumlah petani	25000 (2020)	PM	PM	PM	PM		1. Jawa 2. Lampung 3. Sulawesi	
	Penanaman kembali bibit kelapa	hektar	4600 (2020)	PM	PM	PM	PM		1. Jawa 2. Lampung 3. Sulawesi	
	Volume minyak sawit yang berasal dari sumber berkelanjutan yang tersertifikasi fisik	%	94,4% (2020)	PM	PM	PM	PM		1. Pemerintah 2. Swasta 3. LSM 4. Kelompok tani	
	Pelatihan dan pendanaan untuk pemenuhan sertifikasi RSPO	Jumlah pabrik	8 (2020)	PM	PM	PM	PM		1. Pemerintah 2. Swasta 3. LSM 4. Kelompok tani	
	Pelatihan dan pendanaan untuk pemenuhan sertifikasi RSPO	Orang	90 (2020)	PM	PM	PM	PM		Daemeter	
	Pelatihan untuk meningkatkan produksi berkelanjutan	hektar	13000 (2020)	PM	PM	PM	PM		Leuser	Yayasan IDH (Inisiatif Dagang Hijau)
	Pelatihan untuk meningkatkan produksi berkelanjutan	hektar hutan dengan HCV (High Conservation Value)/HCS (High Carbon Stock)	Tersedia (2020)	PM	PM	PM	PM		Leuser	Yayasan IDH (Inisiatif Dagang Hijau)

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	0 Meningkatkan mata pencaharian	Jumlah petani swadaya dan anggota masyarakat	1. 1500 petani swadaya 2. 100 anggota masyarakat (termasuk 50 perempuan) (2020)	PM	PM	PM	PM	Leuser	Yayasan IDH (Inisiatif Dagang Hijau)	
Kegiatan : Program “Mendukung Aceh Tamiang” termasuk di dalamnya perlindungan kawasan konservasi di kawasan Ekosistem Leuser, melestarikan 100.000 hektar hutan dengan High Conservation Value (HCV)/High Carbon Stock (HCS)	Pelatihan untuk meningkatkan produksi berkelanjutan	hektar	13000	PM	PM	PM	PM	Leuser	Yayasan IDH (Inisiatif Dagang Hijau)	
	Pelatihan untuk meningkatkan produksi berkelanjutan	hektar hutan dengan HCV (High Conservation Value)/HCS (High Carbon Stock)	Tersedia (2020)	PM	PM	PM	PM	Leuser	Yayasan IDH (Inisiatif Dagang Hijau)	
	Meningkatkan mata pencaharian	Jumlah petani swadaya dan anggota masyarakat	1. 1500 petani swadaya 2. 100 anggota masyarakat (termasuk 50 perempuan) (2020)	PM	PM	PM	PM	Leuser	Yayasan IDH (Inisiatif Dagang Hijau)	
Kegiatan: Turut melindungi keanekaragaman hayati di Seruyan dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Melindungi dan memulihkan habitat dan koridor ekologi yang penting bagi satwa liar seperti orangutan, bekantan, owa, beruang madu serta keanekaragaman hayati lainnya yang terdapat di Taman Nasional Tanjung Puting	Pabrik di Seruyan dan Kotawaringin Barat yang telah diidentifikasi sebagai bagian langsung atau tidak langsung dari rantai pasokan Unilever	Pabrik	27 (2020)	PM	PM	PM	PM	Kalimantan Tengah	Yayasan Inobu	
Kegiatan : Sumber bahan baku kami diperoleh secara berkelanjutan ditandai dengan rantai pasokan teh kami 100% telah tersertifikasi Rainforest Alliance (RA) dan 94,4% pasokan kelapa sawit kami secara global telah tersertifikasi RSPO secara, sisanya 5,2% lagi melalui sertifikat petani swadaya untuk mencapai total 99,6% volume minyak sawit yang bersumber secara berkelanjutan	Program Pengembangan Petani Kedelai Hitam	Jumlah petani	10602 (2020)	PM	PM	PM	PM	Lebih dari 25 kabupaten di Di Yogyakarta dan Jawa Timur		
	Pembinaan melalui proses konsultasi serta pendampingan pada proses audit dalam memenuhi dan memperoleh sertifikasi Rainforest Alliance (RA)	Supplier teh tersertifikasi RA	19 (2020)	PM	PM	PM	PM		1. Rainforest Alliance (RA) 2. Unilever global	
	Pelatihan pertanian gula kelapa yang berkelanjutan	Jumlah petani	25000 (2020)	PM	PM	PM	PM	1. Jawa 2. Lampung 3. Sulawesi		

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Penanaman kembali bibit kelapa	hektar	4600 (2020)	PM	PM	PM	PM		1. Jawa 2. Lampung 3. Sulawesi		
Volume minyak sawit yang berasal dari sumber berkelanjutan yang tersertifikasi fisik	%	94,4% (2020)	PM	PM	PM	PM			1. Pemerintah 2. Swasta 3. LSM 4. Kelompok tani	
Pelatihan dan pendanaan untuk pemenuhan sertifikasi RSPO	Jumlah pabrik	8 (2020)	PM	PM	PM	PM			1. Pemerintah 2. Swasta 3. LSM 4. Kelompok tani	
Pelatihan dan pendanaan untuk pemenuhan sertifikasi RSPO	Orang	90 (2020)	PM	PM	PM	PM			Daemeter	
Pelatihan untuk meningkatkan produksi berkelanjutan	hektar	13000 (2020)	PM	PM	PM	PM		Leuser	Yayasan IDH (Inisiatif Dagang Hijau)	
Pelatihan untuk meningkatkan produksi berkelanjutan	hektar hutan dengan HCV (High Conservation Value)/HCS (High Carbon Stock)	Tersedia (2020)	PM	PM	PM	PM		Leuser	Yayasan IDH (Inisiatif Dagang Hijau)	
0 Meningkatkan mata pencaharian	Jumlah petani swadaya dan anggota masyarakat	1. 1500 petani swadaya 2. 100 anggota masyarakat (termasuk 50 perempuan) (2020)	PM	PM	PM	PM		Leuser	Yayasan IDH (Inisiatif Dagang Hijau)	
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPI TUJUAN										
INDIKATOR SDGs 17.17.1 Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars)										
Program 1: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan										
Kegiatan : Dalam melaksanakan strategi keberlanjutannya Unilever Sustainable Living Plan (USLP), Unilever Indonesia telah bekerjasama dengan banyak pihak baik dari luar negeri, pemerintah maupun lembaga swalayan masyarakat	Jumlah organisasi yang bekerjasama	Organisasi								Unilever Indonesia

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Pemangku Kepentingan: SDGs Hub UNDIP										
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN										
INDIKATOR 1.1.1 Tingkat kemiskinan ekstrim										
Nama Program: Pengurangan angka kemiskinan										
Nama Kegiatan 1: Peningkatan kapasitas masyarakat miskin	1.1 Output Kegiatan - peningkatan pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat	jumlah pendampingan	18	22	26	31	200	non APBN	Terutama Jawa Tengah	Universitas Diponegoro bekerjasama dengan mitra
	1.2 Output Kegiatan - peningkatan keterampilan masyarakat miskin melalui i.e pelatihan, motivasi, pendampingan	jumlah peserta	250	300	350	400	200	non APBN	Terutama Jawa Tengah	Universitas Diponegoro bekerjasama dengan mitra
	1.3 Output Kegiatan - ketersediaan alat	bantuan alat/mesin	65	80	100	125	500	non APBN	Terutama Jawa Tengah	Universitas Diponegoro bekerjasama dengan mitra
Nama Kegiatan 1: Bantuan siswa miskin berprestasi	1.1 Output Kegiatan - pemberian kesempatan studi lanjut dengan beasiswa i.e beasiswa miskin berprestasi, alumni, bidikmisi, BAZNAS untuk siswa miskin	jumlah penerima beasiswa	1575	1654	1736	1823		non APBN	seluruh Indonesia	Universitas Diponegoro bekerjasama dengan mitra
	1.2 Output Kegiatan - lembaga donor pemberi beasiswa	jumlah donor	40	46	53	61		non APBN	seluruh Indonesia	Universitas Diponegoro bekerjasama dengan mitra
Nama Kegiatan 2: Pembagian sembako	2.1 Output Kegiatan - pemberian paket sembako untuk masyarakat, mahasiswa miskin, dan terdampak pandemi	jumlah penerima bantuan	2500	2500	2500	2500	625	non APBN	Kota Semarang dan sekitarnya	Universitas Diponegoro bekerjasama dengan mitra i.e alumni, bank BTN, DWP
	2.2 Output Kegiatan - lembaga mitra pemberi paket sembako	jumlah donor	12	13	15	17		non APBN	seluruh Indonesia	Universitas Diponegoro bekerjasama dengan mitra i.e alumni, bank BTN, DWP
Nama Kegiatan 3: Kajian kemiskinan	3.1 Output Kegiatan - peta kemiskinan, analisis kemiskinan	%	100	100	100	100	500	non APBN	seluruh Indonesia	Tim Peneliti Universitas Diponegoro; LPPM
INDIKATOR 1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur										
Nama Program: Pngentasan garis kemiskinan										
Nama Kegiatan 1: Pelatihan Keterampilan Perempuan	1.1 Output Kegiatan - peningkatan keterampilan berpotensi ekonomi i.e pembuatan usaha berbasis industri kreatif dan usaha kecil	jumlah peserta	150	200	250	300	100	non APBN	Terutama Jawa Tengah	P2KKN Universitas Diponegoro; Tim Pengabdian
	Nama Kegiatan 2: KKN Pelatihan Keterampilan Remaja	2.1 Output Kegiatan - peningkatan keterampilan berpotensi ekonomi i.e fotografi, digital marketing, jasa layanan	jumlah peserta	150	200	250	300	100	non APBN	Terutama Jawa Tengah
Nama Kegiatan 3: Desa Binaan	3.1 Output Kegiatan - peningkatan kapasitas desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	jumlah desa binaan	15	20	25	30	500	non APBN	Terutama Jawa Tengah	P2KKN Universitas Diponegoro; Tim Pengabdian
INDIKATOR 1.2.2 Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional										
Nama Program: Pemberdayaan masyarakat marjinal										
Nama Kegiatan 1: Dynamic learning: Pendampingan anak jalanan	1.1 Output Kegiatan - pendampingan, pelatihan karakter, agama, nasionalisme, motivasi, teknologi dan kewirausahaan	jumlah peserta	200	300	400	500	100	non APBN	Kota Semarang dan sekitarnya	Organisasi kemahasiswaan

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
1.2 Output Kegiatan - pendampingan, pelatihan karakter, agama, nasionalisme, motivasi, teknologi dan kewirausahaan	jumlah kegiatan	20	30	40	50	100	non APBN	Kota Semarang dan sekitarnya	Organisasi kemahasiswaan	
INDIKATOR 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan										
Nama Program: Perlindungan Sosial Masyarakat										
Nama Kegiatan 1: KKN Skrining dan edukasi kesehatan lansia	1.1 Output Kegiatan - lansia dengan perlindungan sosial memadai i.e pengecekan hipertensi dan kegiatan kebugaran	jumlah lansia	300	400	500	600	100	non APBN	Terutama Jawa Tengah	P2KKN Universitas Diponegoro; Tim Pengabdian
Nama Kegiatan 2: Occupational Safety Health Forum	2.1 Output Kegiatan - keberadaan forum pendampingan kesehatan dan keselamatan kerja	%	100	100	100	100	250	non APBN	Terutama Jawa Tengah	FKM Universitas Diponegoro
Nama Kegiatan 3: Fasilitas akses pendidikan dan alat untuk difabel	3.1 Output Kegiatan - sarana prasarana untuk difabel di lingkungan kampus i.e parking, lift, meja/kursi	%	100	200	300	400	250	non APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
	3.2 Output Kegiatan - tangan bionik untuk difabel	%	100	100	100	100	1000	non APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
INDIKATOR 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan										
Nama Program: Layanan kesehatan masyarakat										
Nama Kegiatan 1: Rumah Sakit Nasional Diponegoro	1.1 Output Kegiatan - ketersediaan fasilitas layanan kesehatan yang handal, memadai, lengkap	%	100	100	100	100	250	non APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
INDIKATOR 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan										
Nama Program: Kajian ketenagakerjaan										
Nama Kegiatan 1: Kajian ketenagakerjaan yang meliputi UU Ciptakerja, Perlindungan ketenagakerjaan, dan hubungan industrial	1.1 Output Kegiatan - kontribusi keilmuan UU Ciptakerja, Perlindungan ketenagakerjaan, dan hubungan industrial	%	100	100	100	100	25	non APBN	seluruh Indonesia	Universitas Diponegoro
	1.2 Output Kegiatan - Output publikasi ketenagakerjaan	jumlah publikasi	25	30	35	40	25	non APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
INDIKATOR 1.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang										
Nama Program: Universitas Diponegoro Tanggap Bencana										
Nama Kegiatan 1: Pembentukan Pusat Kajian Bencana	1.1 Output Kegiatan - keberadaan Pusat Kajian Mitigasi Bencana ie CoREM, DART	%	100	100	100	100	100	non APBN	seluruh Indonesia	COREM, DART Universitas Diponegoro
	1.2 Output Kegiatan - pelatihan tanggap bencana	jumlah pelatihan	10	14	18	22		non APBN	seluruh Indonesia	COREM Universitas Diponegoro
	1.3 Output Kegiatan - KKN desa tanggap bencana	jumlah desa	10	14	18	22		non APBN	seluruh Indonesia	P2KKN Universitas Diponegoro; Tim Pengabdian
INDIKATOR 1.a.1 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan										
Nama Program: Kebijakan Pemberantasan Kemiskinan										
Nama Kegiatan 1: Kajian berbasis paper dan keahlian dalam upaya pemberantasan kemiskinan	1.1 Output Kegiatan - kajian dan kontribusi tenaga ahli dalam pembuatan kebijakan pemerintah	jumlah paper dan tenaga ahli	60	70	80	90	100	non APBN	seluruh Indonesia	LPPM
INDIKATOR 1.a.2 Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah										
Nama Program: Kebijakan Layanan Pokok										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan 1: Kajian berbasis paper dan keahlian dalam upaya peningkatan layanan pokok	1.1 Output Kegiatan - kajian dan kontribusi tenaga ahli dalam pembuatan kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, dan kesehatan sosial	jumlah paper dan tenaga ahli	60	70	80	90	100	non APBN	seluruh Indonesia	LPPM
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA										
Indikator 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)										
Nama Program: Interprofessional Education (IPE) Pendampingan keluarga selama 4 bulan yang dilakukan oleh mahasiswa FK dari 3 program studi (Kedokteran Umum, Keperawatan, dan Gizi)										
Nama Kegiatan 1: Pendampingan keluarga dengan ibu hamil	1.1 Output Kegiatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	orang	18	15	10	5	250	NON APBN	Jawa Tengah	Universitas Diponegoro
Indikator 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.										
Nama Program: Interprofessional Education (IPE) Pendampingan keluarga selama 4 bulan yang dilakukan oleh mahasiswa FK dari 3 program studi (Kedokteran Umum, Keperawatan, dan Gizi)										
Nama Kegiatan 1: Edukasi terkait fasilitas pelayanan kesehatan	1.1 Output Kegiatan Persen perempuan melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	%	70	75	80	85	250	NON APBN	Jawa Tengah	Universitas Diponegoro
Nama Kegiatan 2: Pendampingan pendaftaran BPJS	2.1 Output Kegiatan Persen perempuan melahirkan di fasilitas kesehatan	%	70	75	80	85	250	NON APBN	Jawa Tengah	Universitas Diponegoro
Indikator 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.										
Nama Program: Pendampingan Gizi Buruk bekerja sama dengan Rumah Gizi Kota Semarang										
Nama Kegiatan 1: Konseling Gizi dan Pelatihan pembuatan MP-ASI	1.1 Output Kegiatan Penurunan Angka Kematian Balita (AKBa)	orang	15	10	6	2	250	NON APBN	Jawa Tengah	Universitas Diponegoro
	1.2 Output Kegiatan Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)	orang	15	10	6	2				
Indikator 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup										
Nama Program: Interprofessional Education (IPE) Pendampingan keluarga selama 4 bulan yang dilakukan oleh mahasiswa FK dari 3 program studi (Kedokteran Umum, Keperawatan, dan Gizi)										
Nama Kegiatan 1: Pendampingan keluarga dengan ibu hamil	1.1 Output Kegiatan Penurunan Angka Kematian Neonatal (AKN)	orang	4	3	2	1	250	NON APBN	Jawa Tengah	Universitas Diponegoro
Indikator 3.4.1.(a) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.										
Nama Program: Kawasan Bebas Rokok										
Nama Kegiatan 1: Kampus bebas rokok	1.1 Output Kegiatan Penurunan persentase civitas akademika yang merokok	%	25	20	10	0	150	NON APBN	Jawa Tengah	Universitas Diponegoro
Indikator 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.										
Nama Program: Penelitian terkait pengembangan pangan fungsional										
Nama Kegiatan 1: Pemanfaatan klorofil daun pepaya	1.1 Output Kegiatan Penurunan prevalensi tekanan darah tinggi	%	25	20	15	10	150	NON APBN	Jawa Tengah	Universitas Diponegoro
Indikator 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.										
Nama Program: Penelitian intervensi dengan subjek mahasiswa obesitas										
Nama Kegiatan 1: Olahan Pangan Fermentasi Asli Indonesia Untuk Mengatasi Risiko Penyakit Kardiovaskular Pada Wanita Obesitas	1.1 Output Kegiatan Penurunan prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	%	25	20	15	10	150	NON APBN	Jawa Tengah	Universitas Diponegoro
TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS										
INDIKATOR 4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika										
Nama Program: Gerakan Literasi										
Nama Kegiatan 1: KKN Taman Baca dan Phobia Matematika	1.1 Output Kegiatan - penurunan buta huruf pada anak/remaja usia sekolah	jumlah siswa	250	300	350	400	100	non APBN	Lokasi KKN	P2KKN Universitas Diponegoro
	1.2 Output Kegiatan - peningkatan jumlah taman baca	jumlah taman baca	25	30	35	40				
	1.3 Output Kegiatan - penurunan phobia matematika pada siswa	jumlah siswa	50	60	70	80				

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR										
Nama Program: Partisipasi Sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, SMA										
Nama Kegiatan 1: TPA/KB/TK Permata Universitas Diponegoro	1.1 Output Kegiatan - penurunan angka tidak sekolah jenjang PAUD/TK	jumlah siswa	40	50	60	70	450	non APBN	Kota Semarang dan sekitarnya	Universitas Diponegoro
	1.2 Output Kegiatan - peningkatan jumlah program pendidikan jenjang PAUD/TK	jumlah program	2	2	3	3				
Nama Program: Pengurangan angka kemiskinan										
Nama Kegiatan 1: Bantuan siswa miskin berprestasi	1.1 Output Kegiatan - pemberian kesempatan studi lanjut dengan beasiswa i.e beasiswa miskin berprestasi, alumni, bidikmisi, BAZNAS untuk siswa miskin	jumlah penerima beasiswa	1575	1654	1736	1823		non APBN	seluruh Indonesia	Universitas Diponegoro bekerjasama dengan mitra
	1.2 Output Kegiatan - lembaga donor pemberi beasiswa	jumlah donor	40	46	53	61				
INDIKATOR 4.2.1* Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin										
Nama Program: Gerakan Kesehatan Mental										
Nama Kegiatan 1: Lembaga Konseling Mahasiswa dan Masyarakat	1.1 Output Kegiatan - peningkatan kesehatan mental anak	pengguna layanan	60	70	80	90	25	non APBN	Kota Semarang dan sekitarnya	BEM F Psikologi Universitas Diponegoro
	1.2 Output Kegiatan - penurunan jumlah korban perundungan	%	100	100	100	100				
Nama Kegiatan 2: Kesetaraan Gender	2.1 Output Kegiatan - peningkatan kesadaran gender	jumlah peserta	150	200	250	300	25	non APBN	Terutama Jawa Tengah	P2KKN Universitas Diponegoro; Tim Pengabdian
	2.2 Output Kegiatan - keberadaan buku saku kesetaraan gender	%	100	100	100	100				
INDIKATOR 4.2.2 Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin										
Nama Program: Sekolah persiapan sebelum SD										
Nama Kegiatan 1: TPA/KB/TK Permata Universitas Diponegoro	1.1 Output Kegiatan - peningkatan peserta pembelajaran sebelum SD	jumlah siswa	40	50	60	70	150	non APBN	Kota Semarang dan sekitarnya	Universitas Diponegoro
	1.2 Output Kegiatan - peningkatan kualitas mental input siswa SD	%	100	100	100	100				
INDIKATOR 4.3.1 Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin										
Nama Program: Remaja dan Perempuan Produktif										
Nama Kegiatan 1: KKN Pelatihan Keterampilan Ibu RT/PKK	1.1 Output Kegiatan - beragam keterampilan berpotensi ekonomi	jumlah peserta	150	200	250	300	25	non APBN	Terutama Jawa Tengah	P2KKN Universitas Diponegoro; Tim Pengabdian
	1.2 Output Kegiatan - peningkatan jumlah peserta	jumlah peserta	150	200	250	300				
Nama Kegiatan 2: KKN Pelatihan Keterampilan Remaja	2.1 Output Kegiatan - beragam keterampilan berpotensi ekonomi	jumlah peserta	150	200	250	300	25	non APBN	Terutama Jawa Tengah	P2KKN Universitas Diponegoro; Tim Pengabdian
	2.2 Output Kegiatan - peningkatan jumlah peserta	jumlah peserta	150	200	250	300				
INDIKATOR 4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)										
Nama Program: Pengembangan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)										
Nama Kegiatan 1: eGovernment	1.1 Output Kegiatan - penggunaan website sebagai media informasi dan layanan masyarakat di kelurahan/desa	jumlah desa/kelurahan	10	15	20	25	25	non APBN	Terutama Jawa Tengah	P2KKN Universitas Diponegoro; Tim Pengabdian
	1.2 Output Kegiatan - penggunaan sosial media sebagai media informasi dan layanan masyarakat di kelurahan/desa	jumlah desa/kelurahan	20	30	40	50				

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan 2: Digital literacy	2.1 Output Kegiatan - penggunaan website sebagai media pemasaran digital bagi UMKM	jumlah UMKM	35	40	45	50	250	non APBN	Terutama Jawa Tengah	P2KKN Universitas Diponegoro; Tim Pengabdian
	2.2 Output Kegiatan - penggunaan sosial media sebagai media pemasaran digital bagi UMKM	jumlah UMKM	150	200	250	300				
	2.3 Output Kegiatan - booklet digital marketing	%	100	100	100	100				
INDIKATOR 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)										
Nama Program: Partisipasi Pendidikan Tinggi dalam Angka Partisipasi Kasar PT										
Nama Kegiatan 1: Intelektual muda terdidik dan terampil	1.1 Output Kegiatan - peningkatan jumlah mahasiswa Universitas Diponegoro	jumlah mahasiswa	51.605	52.605	53.605	54.605	0	non APBN/APBN	Seluruh Indonesia	Universitas Diponegoro
	1.2 Output Kegiatan - peningkatan kualitas lulusan mahasiswa	%	100	100	100	100				
INDIKATOR 4.b.1 Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang										
Nama Program: Beasiswa Internasional										
Nama Kegiatan 1: Universitas Diponegoro Scholarship	1.1 Output Kegiatan - peningkatan jumlah mahasiswa asing	jumlah mahasiswa	100	120	140	160	7500	non APBN	seluruh Negara	Universitas Diponegoro
	1.2 Output Kegiatan - peningkatan jumlah negara penerima beasiswa Universitas Diponegoro	jumlah negara	25	30	35	40				
Nama Kegiatan 2: Darmasiswa	2.1 Output Kegiatan - peningkatan jumlah mahasiswa asing	jumlah mahasiswa	70	90	110	130	6000	APBN	seluruh Negara	Universitas Diponegoro
	2.2 Output Kegiatan - peningkatan jumlah negara peserta Darmasiswa	jumlah negara	20	25	30	35				
Nama Kegiatan 3: Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	3.1 Output Kegiatan - peningkatan jumlah mahasiswa asing	jumlah mahasiswa	20	30	40	50	1500	APBN	seluruh Negara	Universitas Diponegoro
	3.2 Output Kegiatan - peningkatan jumlah negara penerima beasiswa KNB	jumlah negara	10	15	20	25				
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER										
INDIKATOR										
Nama Program: Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Masyarakat										
Nama Kegiatan 2: Badan Konsultasi Hukum	2.1 Output Kegiatan - keberadaan Badan Konsultasi Hukum	%	100	100	100	100	200	non APBN	seluruh Indonesia	Badan Konsultasi Hukum FH
	2.2 Output Kegiatan - peningkatan jumlah layanan konsultasi dan bantuan hukum	jumlah layanan	20	30	40	50		non APBN	seluruh Indonesia	Badan Konsultasi Hukum FH
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
INDIKATOR 6.3.1 Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman										
Nama Program: Peengelolaan limbah cair domestik Universitas Diponegoro										
Nama Kegiatan 1: Pengelolaan limbah cair domestik kampus Tembalang Universitas Diponegoro	1.1 Output Kegiatan Dokumen perencanaan penyaluran dan pengolahan limbah cair domestik Universitas Diponegoro	1 dokumen	1	1,2	1,44	1	100	APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
	1.2 Output Kegiatan Jumlah saluran limbah cair domestik terintegrasi dalam kampus	Unit		1	1	1	2000	APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
	1.3 Output Kegiatan Jumlah unit pengolahan limbah cair di Universitas Diponegoro	Unit			1	1	1500	APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
INDIKATOR 6.4.1 Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Program: Penghematan air										
Nama Kegiatan 1: Penggantian alat dan aksesoris kamar mandi hemat air	1.1 Output Kegiatan Penggunaan alat-alat hemat air (kran dan closet) di lingkungan UNDIIP	%	85	90	95	100	1000	APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI										
INDIKATOR 8.3.1(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.										
INDIKATOR 8.10.1.(a) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit										
Nama Program: Peningkatan akses UMKM ke layanan keuangan										
Nama Kegiatan 1: Pendampingan UMKM untuk akses keuangan	1.1 Output Kegiatan Jumlah UMKM mendapat pendampingan akses keuangan	unit	15	15	20	20	100	APBN/Non APBN	Kab/Kota Semarang	Universitas Diponegoro
Nama Kegiatan 2: Sosialisasi potensi sumber pendanaan	2.1 Output Kegiatan Jumlah UMKM mendapat sosialisasi sumber pendanaan	unit	15	15	20	20	80	APBN/Non APBN	Kab/Kota Semarang	Universitas Diponegoro
INDIKATOR 8.6.1* Persentase Usia Muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)										
Nama Program: Pengembangan rintisan usaha										
Nama Kegiatan 1: Pendampingan mahasiswa untuk pendirian rintisan usaha	1.1 Output Kegiatan Jumlah mahasiswa yang memulai rintisan usaha	orang	10	10	20	20	60	APBN/Non APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Nama Kegiatan 2: Pendampingan mahasiswa untuk manajemen usaha	2.1 Output Kegiatan Jumlah mahasiswa yang mendapat pendampingan manajemen usaha	unit	10	10	20	20	60	APBN/Non APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
INDIKATOR 8.9.1* Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB										
INDIKATOR 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara										
INDIKATOR 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara										
INDIKATOR 8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata										
Nama Program: Peningkatan Promosi Wisata										
Nama Kegiatan 1: Pelatihan strategi promosi pariwisata	1.1 Output Kegiatan Jumlah pengelola pariwisata mendapat pelatihan promosi	orang	10	10	15	15	150	APBN/Non APBN	Kab/Kota Semarang	Universitas Diponegoro
TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs										
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB manufaktur										
Program 1: Peningkatan produktivitas sektor usaha										
Kegiatan 1: Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM	1.1 Jumlah UMKM mendapat pelatihan kewirausahaan	unit	15	15	20	20	100	APBN/Non APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Kegiatan 2: Pengembangan unit usaha/bisnis Universitas Diponegoro	2.1 Jumlah unit usaha berbasis temuan/inovasi Universitas Diponegoro	unit		2	2	2	300	APBN/Non APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Kegiatan 3: Peningkatan kerjasama penelitian dengan Industri	3.1 Jumlah kerjasama dengan industri	unit	72	81	91	100		APBN/Non APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur										
Program 1: Peningkatan keterampilan pekerja										
Kegiatan 1: Pelatihan untuk tenaga kerja industri	1.1 Jumlah TK yang mendapat pelatihan keterampilan di Universitas Diponegoro	orang	30	50	50	50	150	APBN/Non APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Kegiatan 2: Peningkatan kapasitas layanan laboratorium Universitas Diponegoro	unit	5	7	10	12	150	APBN/Non APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro	
9.5.1* Proporsi anggaran riset terhadap PDB										
Program 1: World class university research										
Kegiatan 1: Memperkuat riset ilmiah	1.1 Persentase kenaikan anggaran riset Universitas Diponegoro	%	5	10	10	15	250000	APBN/Non APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
	1.2 Rasio anggaran riset terhadap total anggaran Universitas Diponegoro	%	2	4	6	8				
	1.3 Jumlah paten yang dihasilkan Universitas Diponegoro	unit	353	456	567	687				
	1.4 Jumlah HAKI	unit	413	468	525	643				
Kegiatan 2: Peningkatan kerjasama dengan sektor industri	%	18	20	22	24	100	Non APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro	
9.5.2* Jumlah sumber daya manusia bidang IPTEKS										
Program 1: World class university research										
Kegiatan 1: Pengembangan SDM	1.1 Rasio dosen IPTEKS terhadap total	%	45	46	48	50	10000	APBN/Non APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
9.5.2.a Proporsi SDM bidang IPTEKS dengan gelar S3										
Program 1: Peningkatan dosen bergelar S3										
Kegiatan 1: Peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM	1.1 Proporsi dosen bergelar S3	%	48	52	56	60	200000	APBN/Non APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Kegiatan 2: Pemberian insentif & beasiswa studi lanjut	2.1 Proporsi anggaran beasiswa & insentif studi lanjut	%	17%	20%	22%	25%		APBN/Non APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN										
Indikator 10.1.1.(b) Jumlah desa tertinggal										
Program 1: Pengabdian Kepada Masyarakat										
Kegiatan 1: Iptek Bagi Desa Binaan Undip (IDBU)	1.1 Jumlah Desa Mandiri	desa	15	20	25	30	3000	NON APBN	Jawa Tengah	Universitas Diponegoro
Indikator 10.1.1.(c) Jumlah Desa Mandiri										
Program 1: Pengabdian Kepada Masyarakat										
Kegiatan 1: Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)	1.1 Jumlah Desa Mandiri	desa	10	15	20	30	3000	NON APBN	Jawa Tengah	Universitas Diponegoro
Kegiatan 2: UNDIP for Science Techno Tourism Development (UFST2D)	2.1 Jumlah Desa Mandiri	desa	10	15	20	30	2000	NON APBN	Jawa Tengah	Universitas Diponegoro
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN										
Indikator 11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.										
Nama Program: Akomodasi murah untuk mahasiswa										
Nama Kegiatan 1: Penyediaan akomodasi murah untuk mahasiswa di lingkungan kampus	1.1 Output Kegiatan Mahasiswa mendapatkan hunian layak dan terjangkau	orang	400	400	400	400	250	NON APBN	Kampus Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Indikator 11.2.1.(a) Proporsi populasi yang mendapat akses yang nyaman pada transportasi publik										
Nama Program: Peningkatan kualitas pedestrian, jalur sepeda, dan penyediaan shuttle bus										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan 1: Pembangunan jalur pejalan kaki di lingkungan kampus	1.1 Output Kegiatan Terkoneksinya lingkungan kampus dengan jalur pedestrian	%	45	50	55	60	732	NON APBN	Kampus Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Nama Kegiatan 2: Peningkatan kualitas jalur sepeda di lingkungan kampus	1.1 Output Kegiatan Terkoneksinya lingkungan kampus dengan jalur sepeda	%	45	50	55	60		NON APBN	Kampus Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Nama Kegiatan 3: Peningkatan kualitas shuttle stop	1.1 Output Kegiatan Tersedianya 5 (lima) unit shuttle stop yang nyaman bagi pengguna	Orang	2000	3000	4000	5000	5750	NON APBN	Kampus Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Indikator 11.4.1.(a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)										
Nama Program: Pengembangan kerjasama pelestarian budaya dengan berbagai stakeholders										
Nama Kegiatan 1: Pengelolaan hutan pendidikan alam Penggaron	1.1 Output Kegiatan Terlokasikannya pendanaan universitas untuk pengelolaan hutan alam Penggaron sebagai hutan pendidikan	%	0,2	0,3	0,4	0,5		NON APBN	Hutan Penggaron	Universitas Diponegoro
Nama Program: Pengelolaan sampah terpadu di lingkungan kampus										
Nama Kegiatan 1: Optimalisasi TPST dan Bank Sampah	1.1 Output Kegiatan Timbulan sampah yang terkelola	%	65	65	67	70	100	NON APBN	Kampus Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Indikator 11.7.1.(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua										
Nama Program: Manajemen RTH di Lingkungan Kampus										
Nama Kegiatan 1: Manajemen RTH di Lingkungan Kampus	1.1 Output Kegiatan Total RTH di lingkungan kampus terpelihara diatas 90%	Ha	252	252	252	252	507.000	NON APBN	Kampus Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
TUJUAN 13 MENGAMBIL TUJUAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA										
Indikator 13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications										
Nama Program: Pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim										
Nama Kegiatan 1: Revisi dokumen Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Universitas (Climate Action Plan Roadmap)	1.1 Output Kegiatan Dokumen rencana aksi	dokumen	1	2	2	2	100	NON APBN	Kampus Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Nama Kegiatan 2: Sosialisasi roadmap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Universitas Diponegoro	2.1 Output Kegiatan Roadmap yang tersosialisasi kepada seluruh civitas akademika Universitas Diponegoro	kegiatan	1	1	1	1	25	NON APBN	Kampus Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
	2.2 Output Kegiatan Jumlah civitas akademika (dosen, mahasiswa, dan tendik) Universitas Diponegoro yang terinformasi mengenai isu-isu dan roadmap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Universitas Diponegoro	Orang	5830	6413	7054	7759	25	NON APBN	Kampus Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Nama Program: Pengembangan kurikulum pembelajaran yang mengakomodir aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim										
Nama Kegiatan 1: Workshop kurikulum program studi S1, S2, dan S3	1.1 Output Kegiatan Persentase kurikulum Prodi S1, S2, dan S3 yang telah menakomodir aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang tersusun	%	45	50	55	60	100	NON APBN	Kampus Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Nama Kegiatan 2: Penyusunan modul/buku/bahan ajar yang terkait dengan perubahan iklim	1.1 Output Kegiatan Jumlah Modul/buku/bahan ajar yang terkait dengan perubahan iklim yang tersusun	modul/buku/bahan ajar	26	39	42	55	325	NON APBN	Kampus Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Program: Pengembangan kelas tambahan dengan tema perubahan iklim (<i>degree supplement in climate change</i>)										
Nama Kegiatan 1: Penyusunan modul dan rancangan kegiatan	1.1 Output Kegiatan Jumlah modul pembelajaran dan rancangan kegiatan kelas tambahan	modul	0	5	5	5	125	NON APBN	Kampus Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Nama Kegiatan 2: Pelaksanaan kelas tambahan perubahan iklim	1.1 Output Kegiatan Jumlah mahasiswa Universitas Diponegoro yang mengikuti kelas tambahan	Orang	0	50	150	250	100	NON APBN	Kampus Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN										
Indikator 14.1.1.(a) Persentase penurunan sampah yang terbang ke laut										
Nama Program: Edukasi dan Pengolahan Sampah di Wilayah Pesisir dan Laut										
Nama Kegiatan 1: Pelatihan dan edukasi masyarakat dalam pengolahan sampah di wilayah pesisir dan laut	1.1 Output Kegiatan Peningkatan pemanfaatan daur ulang sampah oleh masyarakat di wilayah pesisir	%	15	20	25	30	250	NON APBN	Semarang, Demak, Kendal	Universitas Diponegoro
	1.2 Output Kegiatan Penurunan jumlah sampah di pesisir dan laut	%	79	76	73	70	200	NON APBN	Semarang, Demak, Kendal	Universitas Diponegoro
Indikator 14.2.1* Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan										
Nama Program: Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia dalam Pengelolaan Ekosistem di Wilayah Pesisir dan Laut										
Nama Kegiatan 1: Monitoring dan evaluasi kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut	1.1 Output Kegiatan Reef Check : pemantauan kondisi terumbu karang secara sukarela berskala internasional, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat umum (<i>public awareness</i>) bagi pelestarian terumbu karang di seluruh dunia	% luasan	40	50	60	70	250	NON APBN	Pulau Panjang dan Kep. Karimunjawa, Jepara	Universitas Diponegoro
	1.2 Output Kegiatan Kesemat : pendataan dan pemantauan kondisi ekosistem mangrove di wilayah pesisir	% luasan	50	60	70	80	200	NON APBN	Semarang, Demak, Kendal	Universitas Diponegoro
	1.3 Output Kegiatan Pendataan dan pemantauan kondisi ekosistem lamun di wilayah pesisir dan laut	% luasan	30	40	45	50	150	NON APBN	Pulau Panjang dan Kep. Karimunjawa, Jepara	Universitas Diponegoro
Nama Kegiatan 2: Rehabilitasi ekosistem wilayah pesisir dan laut	2.1 Output Kegiatan Rehabilitasi terumbu karang dengan terumbu karang buatan	% luasan	10	15	20	25	250	NON APBN	Pulau Panjang dan Kep. Karimunjawa, Jepara	Universitas Diponegoro
	2.2 Output Kegiatan Rehabilitasi ekosistem mangrove dengan penanaman mangrove	% luasan	10	15	20	25	200	NON APBN	Kab. Demak, Kab Pekalongan	Universitas Diponegoro
Nama Kegiatan 3: Pelatihan dan sertifikasi kompetensi penilaian kondisi ekosistem di pesisir dan laut	3.1 Output Kegiatan Sertifikasi kompetensi penilaian kondisi ekosistem terumbu karang dan lamun	orang	60	70	80	90	250	NON APBN	Semarang	Universitas Diponegoro
	3.2 Output Kegiatan Sertifikasi kompetensi penilaian kondisi ekosistem mangrove	orang	60	70	80	90	225	NON APBN	Semarang	Universitas Diponegoro
Indikator 14.2.1* Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan										
Indikator 14.2.1.(a) Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan										
Nama Program: Pengelolaan Daerah Penangkapan Ikan (Fishing Ground) yang Berkelanjutan										
Nama Kegiatan 1: Pelatihan identifikasi daerah fishing ground	1.1 Output Kegiatan Kemampuan mendeteksi daerah penangkapan ikan	orang	75	100	125	150	250	NON APBN	Semarang	Universitas Diponegoro
Indikator 14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
Nama Program: Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan										
Nama Kegiatan 1: Pelatihan penggunaan alat tangkap ikan ramah lingkungan	1.1 Output Kegiatan Kemampuan penggunaan alat tangkap perikanan yang ramah lingkungan	orang	75	100	125	150	250	NON APBN	Semarang	Universitas Diponegoro
Indikator 14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut										
Nama Program: Optimalisasi dan Rehabilitasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut										
Nama Kegiatan 1: Monitoring dan rehabilitasi kawasan konservasi pesisir dan laut	1.1 Output Kegiatan Evaluasi Penetapan Status kawasan konservasi	% luasan	60	70	80	90	150	NON APBN	Kep. Karimunjawa, Jepara	Universitas Diponegoro
	1.2 Output Kegiatan Rehabilitasi kawasan konservasi pesisir dan laut	% luasan	10	15	20	25	200	NON APBN	Kep. Karimunjawa, Jepara	Universitas Diponegoro
Indikator 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha.										
Indikator 14.b.1* Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil										
Nama Program: Peningkatan Kapasitas Nelayan Dalam Memahami Perlindungan Nelayan untuk keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan										
Nama Kegiatan 1: Pelatihan kemampuan kapasitas nelayan dalam pemahaman arti penting nya berurusan	1.1 Output Kegiatan Jumlah nelayan yang sadar terhadap pentingnya berurusan	orang	75	100	125	150	150	NON APBN	Semarang, Jepara	Universitas Diponegoro
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH										
INDIKATOR 16.3.1(c) Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.										
Nama Program: Edukasi Hukum dan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat										
Nama Kegiatan 1: KKN Edukasi Hukum dan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat	1.1 Output Kegiatan peningkatan jumlah orang yang menerima pos bantuan hukum	jumlah pendampingan	20	30	40	50	200	non APBN	Terutama Jawa Tengah	Mahasiswa dan P2KKN
	1.2 Output Kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait hukum, bantuan hukum, dan sidang di luar pengadilan	orang	250	300	350	400	200	non APBN	Terutama Jawa Tengah	Mahasiswa dan P2KKN
	1.3 Output Kegiatan - jumlah perkara yang dibebaskan biayanya	orang	20	30	40	50	500	non APBN	Terutama Jawa Tengah	Mahasiswa dan P2KKN
Nama Kegiatan 2: Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Masyarakat	2.1 Output Kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait hukum, bantuan hukum, dan sidang di luar pengadilan	orang	250	300	350	400	200	non APBN	Terutama Jawa Tengah	Dosen, LPPM
INDIKATOR 16.3.3 Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.										
Nama Program: Edukasi Hukum untuk Masyarakat Pesisir										
Nama Kegiatan 1: Pengabdian Kepada Masyarakat Edukasi Hukum Perdata	1.1 Output Kegiatan peningkatan jumlah orang yang menerima pos bantuan hukum	jumlah pendampingan	20	30	40	50	200	non APBN	Terutama Jawa Tengah	Dosen, LPPM
	1.2 Output Kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.	orang	250	300	350	400	200	non APBN	Terutama Jawa Tengah	Dosen, LPPM
Nama Kegiatan 2: KKN Edukasi Hukum di Wilayah Pesisir	2.1 Output Kegiatan peningkatan jumlah orang yang menerima pos bantuan hukum	jumlah pendampingan	20	30	40	50	200	non APBN	Terutama Jawa Tengah	Mahasiswa dan P2KKN
	2.2 Output Kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.	orang	250	300	350	400	200	non APBN	Terutama Jawa Tengah	Mahasiswa dan P2KKN

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR 16.5.1 Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.										
INDIKATOR 16.5.2 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)										
Nama Program: Pemberantasan Korupsi										
Nama Kegiatan 1: KKN Edukasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	1.1 Output Kegiatan - peningkatan pengetahuan perangkat desa terkait upaya pencegahan korupsi	orang	250	300	350	400	200	non APBN	Terutama Jawa Tengah	Universitas Diponegoro
	1.2 Output Kegiatan - peningkatan pengetahuan masyarakat terkait upaya pencegahan korupsi	orang	250	300	350	400	200	non APBN	Terutama Jawa Tengah	Universitas Diponegoro
	1.3 Output Kegiatan - peningkatan pengetahuan anak-anak terkait budaya bebas korupsi	orang	250	300	350	400	200	non APBN	Terutama Jawa Tengah	Universitas Diponegoro
Nama Kegiatan 2: Webinar/ Talkshow Edukasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	1.1 Output Kegiatan - peningkatan pengetahuan masyarakat secara luas terkait upaya pencegahan korupsi	orang	750	1000	1250	1500	200	non APBN	Terutama Jawa Tengah	Universitas Diponegoro
Nama Kegiatan 3: Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	3.1 Output Kegiatan peningkatan jumlah fakultas bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani	jumlah fakultas	2	3	4	5	500	non APBN	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
INDIKATOR 16.8.1 (a) Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.										
Nama Program: Peningkatan Partisipasi Universitas Diponegoro di organisasi tingkat internasional										
Nama Kegiatan 1: Peningkatan Partisipasi Universitas Diponegoro di organisasi tingkat internasional	1.1 Output Kegiatan jumlah organisasi internasional yang diikuti	jumlah organisasi internasional	20	30	40	50	100	non APBN		Universitas Diponegoro
	1.2 Output Kegiatan jumlah sivitas Universitas Diponegoro yang tergabung dalam organisasi internasional	orang	250	300	350	400				
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN										
INDIKATOR SDGs 17.7.1.Total jumlah dana untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.										
Program 1: Inovasi Universitas Diponegoro										
Nama Kegiatan 1: Video Edukasi dan Science Talk	1.1 Output Kegiatan jumlah video edukasi	buah	20	30	40	50	200	non APBN	Terutama Jawa Tengah	SDGs Center UNDIP (Mahasiswa dan P2KKN)
Nama Kegiatan 2: Hibah Penelitian Riset Terapan	2.1 Output Kegiatan jumlah dana penelitian	rupiah	58 M	60 M	60 M	60 M	286000	APBN dan Non APBN	Nasional	SDGs Center UNDIP (Dosen, LPPM)
	1.3 Output Kegiatan jumlah judul penelitian	buah	350	400	450	500				
Nama Kegiatan 3: Pengabdian Kepada Masyarakat Penerapan Teknologi Tepat Guna	3.1 Output Kegiatan jumlah dana pengabdian	rupiah	5 M	5,5 M	5,5 M	5,5 M	265000	APBN dan Non APBN	Nasional	SDGs Center UNDIP (Dosen, LPPM)
	3.3 Output Kegiatan jumlah judul pengabdian	buah	150	200	250	300				
INDIKATOR SDGs 17.8.1*.Persentase pengguna internet										
Program 1: Pendidikan Internet untuk Masyarakat										
Nama Kegiatan 1: KKN Pelatihan Internet dan kegunaannya	1.1 Output Kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait internet dan kegunaannya	orang	250	300	350	400	200	non APBN	Terutama Jawa Tengah	SDGs Center UNDIP (Mahasiswa dan P2KKN)
Nama Kegiatan 2: Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan Literasi Digital Masyarakat	2.1 Output Kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait internet dan kegunaannya	orang	250	300	350	400	200	non APBN	Terutama Jawa Tengah	SDGs Center UNDIP (Dosen, LPPM)
INDIKATOR SDGs 17.16.1 Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.										
Program 1: Pemantauan SDGs Universitas Diponegoro										
Nama Kegiatan 1: Pemeringkatan SDGs THE Impact	1.1 Output Kegiatan peningkatan kontribusi Universitas Diponegoro terhadap SDGs berdasarkan ranking THE IMPACT	ranking	100	80	60	50	200	non APBN		Kantor Pemeringkatan dan SDGs Center UNDIP

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
Nama Kegiatan 2: Peningkatan UI GreenMetric	2.1 Output Kegiatan peningkatan kontribusi Universitas Diponegoro terhadap SDGs berdasarkan ranking UI GreenMetric	ranking	35	30	25	20	200	non APBN		Kantor Peningkatan dan SDGs Center UNDIIP
INDIKATOR SDGs 17.19.2. Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan										
Program 1: Peningkatan Database dan Informasi Demografis										
Nama Kegiatan 1: KKN Pendampingan Pembuatan Database dan Informasi Demografis Desa	1.1 Output Kegiatan desa yang memiliki database demografis penduduk	desa	20	30	40	50	200	non APBN	Terutama Jawa Tengah	SDGs Center UNDIIP (Mahasiswa dan P2KKN)
Nama Pemangku Kepentingan: DJARUM Foundation										
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA										
Nama Program: Keselamatan dan kesehatan kerja										
Pelayanan Medis Masyarakat Desa dan Pesantren	Sejak 2014 hingga 2019 lebih dari 57.000 warga di Jawa Tengah – Jawa Timur mendapat pemeriksaan medis gratis bagi warga kurang mampu	orang	PM	PM	PM	PM	PM			
Renovasi Bangunan Panti Asuhan dan Bantuan Fasilitas	Sejak 2014 telah merenovasi bangunan di 8 Panti Asuhan di Kudus dan 4 Panti Asuhan di Solo	panti asuhan	PM	PM	PM	PM	PM			
Bantuan kesehatan COVID-19 yang tersebar di seluruh Indonesia	Di tahun 2020 memberikan Sumbangan Berupa Baju Coverall (500 pcs), Kacamata Goggle (400 pcs), Dental Protective Face (300 pcs), Masker N95 (4 ribu pcs), Masker Bedah (1.000 box), Sepatu Boot (400 pasang), Sarung Tangan (1.000 box), Penutup Kepala (5.000 pcs), Virus Transportation Media (VTM) atau alat untuk mengecek pasien yang diduga terinfeksi virus corona sebanyak (5.000 pcs), 125 alat High Flow Nasal Cannula (HFNC)	unit	PM	PM	PM	PM	PM			
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS										
Nama Program: Kualitas pendidikan tinggi										
Pendidikan untuk anak Karyawan	Di tahun 2020 memberikan beasiswa kepada 186 anak karyawan	penerima beasiswa	PM	PM	PM	PM	PM			
Program Djarum Beasiswa Plus	Sejak 1984 hingga 2019, lebih dari 11.000 mahasiswa telah menerima program Djarum Beasiswa Plus.	penerima beasiswa	PM	PM	PM	PM	PM			
Kualitas Pendidikan Kejuruan	Hingga 2019 terdapat 16 SMK di Kabupaten Kudus yang telah dikembangkan melalui program Vokasi Unggulan	jumlah SMK	PM	PM	PM	PM	PM			
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER										
Nama Program: Kesetaraan dan keberagaman										
Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender	Di tahun 2020 mempekerjakan lebih dari 39.000 tenaga kerja wanita	jumlah karyawan perempuan	PM	PM	PM	PM	PM			

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2021	2022	2023	2024				
	Lebih dari 98% pekerja Pabrik Sigaret Kretek Tangan adalah wanita	persentase	PM	PM	PM	PM	PM			
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
Nama Program: Melestarikan air tanah dan meningkatkan pengelolaan air										
Membangun dua reservoir air	Memiliki kapasitas 150.000 m3 dan 8.500 m3	m3	PM	PM	PM	PM	PM			
Penyediaan Air Bersih	Telah melakukan pemulihan 12 mata air di Lereng Gunung Muria	jumlah mata air	PM	PM	PM	PM	PM			
	Telah melakukan Pengadaan dan pemeliharaan 19 sumur resapan	jumlah sumur resapan	PM	PM	PM	PM	PM			
	Hingga 2019 lebih dari 28.000 orang mendapatkan bantuan air bersih dari sumur resapan dan penampungan air	jumlah orang	PM	PM	PM	PM	PM			
TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU										
Nama Program: Inisiatif untuk energi bersih dan emisi bersih										
Pemasangan Solar Panel	Telah memasang solar panel dengan kapasitas sebesar 1.071,04 kWp.	kWp	PM	PM	PM	PM	PM			
Penggunaan biomassa	Menggunakan 9.015 GJ biomassa untuk bahan bakar boiler.	Gj	PM	PM	PM	PM	PM			
Penggunaan compressed natural gas (CNG)	Menggunakan 78.762 GJ CNG untuk kebutuhan operasional.	Gj	PM	PM	PM	PM	PM			
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI										
Nama Program: Memberdayakan masyarakat										
Komitmen pada Kesetaraan dan Keberagaman	Di tahun 2020 telah memberi pekerjaan kepada lebih dari 54.000 orang	jumlah karyawan	PM	PM	PM	PM	PM			
Penguatan Badan Usaha Milik Desa	Peningkatan kapasitas pada 26 BUMDes melalui pelatihan dan webinar	jumlah BUMDes	PM	PM	PM	PM	PM			
Memberdayakan masyarakat lokal	Sejak 1975 telah menjalin mitra dengan lebih dari 10.000 petani lokal	mitra petani	PM	PM	PM	PM	PM			
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB										
Pengolahan Limbah	Total area pengaspalan seluas 39.000 m2 dengan menggunakan campuran sampah plastik	m2	PM	PM	PM	PM	PM			
	Pengolahan sampah organik sebanyak 3.481 ton.	ton	PM	PM	PM	PM	PM			
	Pengolahan 160.183 m3 air limbah	m3	PM	PM	PM	PM	PM			
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM										
Nama Program: Konsumsi energi										
Pemasangan lampu LED.	Menurunkan pemakaian listrik dari 450 kWh menjadi 173 kWh	KWh	PM	PM	PM	PM	PM			
Pemasangan Solar Panel	Energi dihasilkan sebesar 56.933 KWh	KWh	PM	PM	PM	PM	PM			
	Sebesar 52 ton CO2eq potensi reduksi emisi GRK	ton CO2eq	PM	PM	PM	PM	PM			

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2021	2022	2023	2024					
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN										
Nama Program: Restorasi ekosistem mangrove										
Konservasi Pantai Utara Jawa	Sejak 2008 hingga 2020 lebih dari 800.000 pohon mangrove telah ditanam	jumlah pohon	PM	PM	PM	PM	PM			
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN										
Nama Program: Keanekaragaman hayati										
Konservasi alam	Penanaman 73.633 tanaman seluas 188,4 hektar untuk merestorasi dan merehabilitasi Lereng Muria dan Patiyam	hektar	PM	PM	PM	PM	PM			
Penanaman Trembesi	Sejak 2010 hingga 2020 lebih dari 133.000 pohon trembesi telah ditanam	jumlah pohon	PM	PM	PM	PM	PM			
Nama Pemangku Kepentingan: DHARMA WANITA										
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI										
Indikator 8.3.1. (a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan										
Nama Program 1: Kegiatan Perkoperasian										
Kegiatan 1: Kegiatan Koperasi Anggota DWP	1.1 Kegiatan perkoperasian	kegiatan	666				PM	PM	34 Provinsi	Dharma Wanita Persatuan
	1.2. Kegiatan koperasi belum berbadan hukum	kegiatan	96							
	1.3. Kegiatan koperasi sudah berbadan hukum	kegiatan	26							
Nama Program 2: Kegiatan Ekonomi Produktif										
Kegiatan 1: Kegiatan Pembangunan Ekonomi Produktif	1.1 Kegiatan terkait bazar anggota	kegiatan	3141				PM	PM	34 Provinsi	Dharma Wanita Persatuan
	1.2. Kegiatan terkait bidang jasa	kegiatan	1414							
	1.3. Kegiatan terkait toko	kegiatan	2.098							
	1.4. Kegiatan terkait kantin	kegiatan	898							
	1.5. Kegiatan terkait catering	kegiatan	428							
	1.6. Pelatihan dan kursus untuk anggota	kegiatan	7468							
	1.7 Webinar atau ceramah ekonomi produktif anggota	kegiatan	596							

MATRIKS 4

PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/ Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana						
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)			Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024	
Nama Pemangku Kepentingan: APP SINAR MAS																
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan																
A.6.c.2.a.1	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	1	Meningkatkan proporsi perempuan di posisi manajemen senior dalam program talent pool - Pelatihan prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan	30% perempuan di posisi manajemen senior	%	10		27,12%	27,44%	27,76%	28,08%	APP SINAR MAS		
A.6.c.2.a.2		8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities	2	Penerapan gaji yang sama antara pekerja laki-laki dengan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama	Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1	%	Tahunan		100%	100%	100%	100%	APP SINAR MAS		
A.6.c.2.b.		8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja	3	Penerapan upah minimum sesuai peraturan pada pekerja	Upah minimum sesuai dengan regulasi	%	Tahunan		100%	100%	100%	100%	APP SINAR MAS		
A.6.c.2.a.3		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	4	Perusahaan memberikan hak kepada karyawan untuk cuti parental/hamil	Pegawai laki-laki dan Perempuan mendapatkan hak cutinya	%	Tahunan		100%	100%	100%	100%	APP SINAR MAS		
A.6.c.2.a.4		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	5	Perusahaan memberikan hak kepada karyawan untuk cuti parental/hamil	Pegawai laki-laki dan Perempuan mendapatkan hak cutinya	%	Tahunan		100%	100%	100%	100%	APP SINAR MAS		
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	6	Training tentang BCoC/Kode Etik Bisnis kepada karyawan	Persentase kelulusan peserta training dengan nilai minimal 70%	%	Tahunan		100%	100%	100%	100%	APP SINAR MAS		
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	7	Training tentang BCoC/Kode Etik Bisnis kepada karyawan	Persentase kelulusan peserta training dengan nilai minimal 70%	%	Tahunan		100%	100%	100%	100%	APP SINAR MAS		
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	8	Training tentang BCoC/Kode Etik Bisnis kepada karyawan	Persentase kelulusan peserta training dengan nilai minimal 70%	%	Tahunan		100%	100%	100%	100%	APP SINAR MAS		
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil	9	Perusahaan memberikan kebebasan hak kepada karyawan untuk menjadi anggota serikat pekerja atau asosiasi pekerja -sosialisasi mengenai kebebasan berorganisasi	Jaminan Kebebasan berorganisasi untuk menjadi anggota dari asosiasi pekerja	%	Tahunan		100%	100%	100%	100%	APP SINAR MAS		
Aspek Ekonomi																
A.2.a.1.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	1	Produksi pulp, paper dan tisu	produksi tahunan pulp dan kertas	ton	Tahunan						APP SINAR MAS		
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	1	Meningkatkan produksi melalui peningkatan Mean Annual Increment (MAI) - Perbaikan pembibitan - Praktik terbaik silvikultur - Pemantauan kehilangan kayu	Mean Annual Increment of 12 ADT/ha/tahun by 2030	ADT/ha/tahun	10		6,5	7,2	7,7	8,4	APP SINAR MAS		
A.6.c.2.a.6		8.7.1	Proportion and number of children aged 5-17 years engaged in child labour, by sex and age	2	Menetapkan persyaratan penerimaan karyawan dengan usia minimal 18 tahun	Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang	Tahunan		0	0	0	0	APP SINAR MAS		
		8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	3	- Dukungan terhadap UMKM terhadap akses modal melalui mikrofinansial - Program Desa Makmur Peduli Api: Pembentukan dan penguatan BumDes dan institusi lain/koperasi	Jumlah UMKM yang terbantu	Jumlah UMKM	5		75	75	75	75	APP SINAR MAS		

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/ Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana			
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)			Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023
A.3.c.2.p.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal	4	Perusahaan mengangkat karyawan baru sebagai karyawan tetap setelah melewati masa percobaan	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%	Tahunan		100%	100%	100%	100%	APP SINAR MAS
A.3.c.2.i.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal		Identifikasi data karyawan dengan berbagai kriteria	Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang	Tahunan						APP SINAR MAS
A.3.c.2.j.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang	Tahunan						APP SINAR MAS
A.3.c.2.k.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang	Tahunan						APP SINAR MAS
A.3.c.2.l.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang	Tahunan						APP SINAR MAS
A.3.c.2.m.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang	Tahunan						APP SINAR MAS
A.3.c.2.n.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang	Tahunan						APP SINAR MAS
A.3.c.2.o.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S3	orang	Tahunan						APP SINAR MAS
A.3.c.2.p.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%	Tahunan						APP SINAR MAS
A.3.c.2.q.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%	Tahunan						APP SINAR MAS
A.3.c.2.s.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	Tahunan						APP SINAR MAS
A.3.c.2.t.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal		Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	Tahunan						APP SINAR MAS	
A.2.a.4. A.6.f.1.a	Produk ramah lingkungan	12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		Jumlah produk <i>Biodegradable</i>	Minimal 1 produk <i>Biodegradable</i>	Jumlah produk	10		0	1	0	0	APP SINAR MAS
Aspek Lingkungan Hidup														
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	1	Meningkatkan proporsi bahan bakar terbarukan - Meningkatkan efisiensi Recovery Boiler (RB)* - Menggunakan sludge sebagai substitusi bahan bakar (Limbah menjadi energi) - Mencari bahan bakar biofuel alternatif	Minimal 50% bahan bakar terbarukan dari total penggunaan semua sumber energi (baseline 2018)	%	10		>50%	>50%	>50%	>50%	APP SINAR MAS
A.6.d.3.b.2		7.3.1*	Intensitas energi primer.	2	Pengurangan konsumsi energi - Meningkatkan Efektivitas Peralatan Operasi (OEE). - Efisiensi energi - Program pemeliharaan - Adaptasi teknologi baru - Meningkatkan konsumsi bahan bakar biofuel	25% pengurangan Intensitas energi (baseline 2018)	%	10		6%	9%	11%	14%	APP SINAR MAS
A.6.d.3.b.3.		6.4.1.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	3	Pengurangan pemakaian air - Efisiensi air - Tingkatkan pemulihan kondensat	30% pengurangan intensitas air (baseline 2018)	%	10		9%	12%	14%	17%	APP SINAR MAS
A.6.e.5.a.1.		12.5.1(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		- daur ulang menjadi bahan baku dan energi - Penggunaan kembali limbah menjadi <i>soil conditioner</i>	Jumlah limbah yang di daur ulang dan digunakan kembali	Ton	Tahunan						APP SINAR MAS
A.6.e.5.a.2	Pencegahan dan Pengendalian Polusi	6.3.1.	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	4	Perbaikan kualitas air limbah - Perbaiki operasi air limbah - Instalasi pengolahan air limbah anaerobik - Instalasi pemantauan online untuk nilai COD	pengurangan COD air limbah 30% lebih rendah dari peraturan pemerintah (baseline 2018)	%	10		10%	10%	10%	15%	APP SINAR MAS
A.6.e.5.b		12.4.2.	Proporsi limbah berbahaya yang dikelola menurut jenis penanganannya	5	Pengurangan limbah padat ke landfill - Pemanfaatan limbah (pupuk, energi & produk) - Kurangi timbulan sampah	0 Ton sampah padat ke TPA (baseline 2018)	Ton	10		420.144	357.122	303.554	242.843	APP SINAR MAS

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan										Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana		
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022			Target tahun 2023	Target tahun 2024
		15.1.2.	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.	6	Melestarikan hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) dan kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan melanjutkan upaya restorasi Program : 1. Analisis tutupan lahan 2. Analisis struktur & komposisi vegetasi 3. Mengembangkan strategi & teknik restorasi 4. Kegiatan restorasi dengan pendekatan berikut: suksesi alami, eradikasi, pengayaan dan metode kombinasi combined Perlindungan/ Pencegahan : 1. Pemantauan rutin menggunakan program MDA 2. Patroli rutin 3. ikut patroli dengan pemangku kepentingan 4. Patroli Masyarakat 5. Pengelolaan Konservasi	95% hutan alam dalam konsesi akan dipertahankan dalam kondisi baik pada tahun 2030	%	10		83%	86%	88%	91%		APP SINAR MAS
		15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	7	Melestarikan hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) dan kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan melanjutkan upaya restorasi Program : 1. Analisis tutupan lahan 2. Analisis struktur & komposisi vegetasi 3. Mengembangkan strategi & teknik restorasi 4. Kegiatan restorasi dengan pendekatan berikut: suksesi alami, eradikasi, pengayaan dan metode kombinasi combined Perlindungan/ Pencegahan : 1. Pemantauan rutin menggunakan program MDA 2. Patroli rutin 3. ikut patroli dengan pemangku kepentingan 4. Patroli Masyarakat 5. Pengelolaan Konservasi	95% hutan alam dalam konsesi akan dipertahankan dalam kondisi baik pada tahun 2030	%	10		83%	86%	88%	91%		APP SINAR MAS

A.6.e.3.b.1

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan												Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024		
A.6.e.3.b.3	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.2.1	Proporsilahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	8	Melestarikan hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) dan kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan melanjutkan upaya restorasi Program : 1. Analisis tutupan lahan 2. Analisis struktur & komposisi vegetasi 3. Mengembangkan strategi & teknik restorasi 4. Kegiatan restorasi dengan pendekatan berikut: suksesi alami, eradikasi, pengayaan dan metode kombinasi combined Perlindungan/ Pencegahan : 1. Pemantauan rutin menggunakan program MDA 2. Patroli rutin 3. Ikut patroli dengan pemangku kepentingan 4. Patroli Masyarakat 5. Pengelolaan Konservasi	95% hutan alam dalam konsesi akan dipertahankan dalam kondisi baik pada tahun 2030	%	10		83%	86%	88%	91%		APP SINAR MAS
		15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	9	Melestarikan hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) dan kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan melanjutkan upaya restorasi Program : 1. Analisis tutupan lahan 2. Analisis struktur & komposisi vegetasi 3. Mengembangkan strategi & teknik restorasi 4. Kegiatan restorasi dengan pendekatan berikut: suksesi alami, eradikasi, pengayaan dan metode kombinasi combined Perlindungan/ Pencegahan : 1. Pemantauan rutin menggunakan program MDA 2. Patroli rutin 3. Ikut patroli dengan pemangku kepentingan 4. Patroli Masyarakat 5. Pengelolaan Konservasi	95% hutan alam dalam konsesi akan dipertahankan dalam kondisi baik pada tahun 2030		10		83%	86%	88%	91%	APP SINAR MAS	
		15.5.1	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas	10	Melindungi flora dan fauna Indonesia, dengan fokus pada tiga prioritas satwa liar dan sepuluh spesies pohon langka. Program: - pemantauan melalui perangkat Kamera, Drone, line transect, GPS collar - Pencegahan & Perlindungan	3 spesies satwa yang dilindungi dalam area pemasok APP dalam habitatnya	spesies	10		3	3	3	3		APP SINAR MAS

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan										Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ItE-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024				
A.6.e.3.b.3		15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	12	Melindungi flora dan fauna Indonesia, dengan fokus pada tiga prioritas satwa liar dan sepuluh spesies pohon langka. Program: -Memetakan sebaran 10 jenis pohon langka diseluruh konsesi -Mendaftarkan jenis pohon langka yang potensial untuk mendapatkan sertifikat sumber benih tanaman hutan. - Pembangunan pembibitan dan pengembangan/perbanyak (produksi bibit) pohon langka untuk digunakan dalam proses repopulasi di kawasan lindung/ SKT dalam konsesi	10 Spesies pohon yang dipelihara dan dilindungi	spesies	10		2	4	6	8		APP SINAR MAS		
A.6.e.3.b.3		15.9.1	Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020	13	Melestarikan hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) dan kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan melanjutkan upaya restorasi Program : 1. Analisis tutupan lahan 2. Analisis struktur & komposisi vegetasi 3. Mengembangkan strategi & teknik restorasi 4. Kegiatan restorasi dengan pendekatan berikut: suksesi alami, eradikasi, pengayaan dan metode kombinasi combined Perlindungan/ Pencegahan : 1. Pemantauan rutin menggunakan program MDA 2. Patroli rutin 3. Ikut patroli dengan pemangku kepentingan 4. Patroli Masyarakat 5. Pengelolaan Konservasi	95% hutan alam dalam konsesi akan dipertahankan dalam kondisi baik pada tahun 2030	% of areas in good condition	10		65%	68%	71%	75%		APP SINAR MAS		
A.6.e.4.a.4.	Adaptasi Perubahan Iklim	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	14	Pengurangan emisi karbon/Gas Rumah Kaca -Meningkatkan Efektivitas Peralatan Operasi (OEE). -Efisiensi energi -Program pemeliharaan -Adaptasi teknologi baru -Meningkatkan konsumsi bahan bakar nabati pabrik	Mengurangi 30% intensitas emisi karbon (lingkup 1 & 2) (baseline 2018)	%	10		9%	12%	14%	17%		APP SINAR MAS		
A.6.e.6.c		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	15	Perusahaan menerapkan sertifikasi ISO 14001	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikasi ISO 14001	Jumlah Perusahaan	Tahunan		9	9	9	9		APP SINAR MAS		
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	16	Peringkat PROPER perusahaan yang mencakup anak perusahaan (mill) minimal biru	Jumlah perusahaan yang memiliki PROPER ranking biru	Jumlah Perusahaan	Tahunan							APP SINAR MAS		
A.6.d.2.a.	Penggunaan material yang ramah	8.4.1	Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP	17	Meningkatkan proporsi bahan baku daur ulang dengan meningkatkan kapasitas produksi kertas dari bahan daur ulang	Minimum 30% komposisi bahan baku daur ulang dari total bahan baku	%	2030		35%	35%	32%	32%		APP SINAR MAS		

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan										Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Itte-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024				
A.6.e.6.c	lingkungan dan dapat didaur ulang	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	18	Perusahaan menerapkan sertifikasi ISO 14001	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISO 14001	Jumlah Perusahaan	Tahunan	9	9	9	9		APP SINAR MAS			
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru	19	Peringkat PROPER perusahaan yang mencakup anak perusahaan (mil) minimal biru	Jumlah perusahaan yang memiliki PROPER ranking biru	Jumlah Perusahaan	Tahunan						APP SINAR MAS			
		6.1.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	20	Dukungan peningkatan akses air bersih masyarakat - Pembuatan sumur baik gali maupun bor - Bantuan perpipaan - Penyaluran air bersih - Bantuan untuk usaha air minum isi ulang, RO, dll	Jumlah keluarga yang mempunyai akses air bersih yang layak	Jumlah KK	5	10.740	8.800	9.000	9.000	APP SINAR MAS				
		6.2.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	21	Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) - Pemetaan sosial masyarakat - Pelatihan pemucun STBM - Pelatihan PHBS - Pembangunan WC keluarga - Studi banding - workshop pembelajaran - Monitoring dan evaluasi	Jumlah keluarga yang mengakses sanitasi layak dan bersih	Jumlah KK	5		100			APP SINAR MAS				
		11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	22	Dukungan program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) untuk warga kurang mampu - Renovasi bangunan rumah - Bantuan material untuk bangunan misal genteng, seng, semen, dll	Jumlah KK yang direnovasi/dibangun	Jumlah KK	5	10	10	10	10	APP SINAR MAS				
		11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya.	23	Dukungan Pengelolaan sampah berbasis masyarakat - Pelatihan pengelolaan sampah, pembuatan kompos, dll - Penyediaan peralatan dan sarana prasarana pengelolaan sampah mis. Gerobak angkut - Penguatan kelompok bank sampah - Penyediaan sarana prasarana untuk bank sampah	Jumlah rumah yang mendapat layanan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Jumlah rumah	5	3.000	3.000	3.000	3.000	APP SINAR MAS				
		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	24	Pemanfaatan limbah pabrik untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat - Penyediaan tali strapping bekas pengikat barang untuk bahan anyaman	Jumlah limbah yang di re use	Jumah ton	5	96	96	96	96	APP SINAR MAS				
		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.		Dukungan inisiatif 3R melalui pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat - Penyediaan kayu bekas peti kemas untuk mebel sekolah maupun kelompok usaha kerajinan masyarakat	Jumlah limbah yang di re use	Jumah ton	5	145	145	145	145	APP SINAR MAS				
		12.b.1.a	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development.		Dukungan pengembangan ekowisata - Program Sustainable Business Model	Jumlah lokasi edu ekowisata	Jumlah lokasi ekowisata	5		2			APP SINAR MAS				

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan										Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024				
		14.2	Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat daya tahannya, dan melakukan aksi restorasi agar dapat mencapai kelautan yang sehat dan produktif	25	Program pengelolaan dan konservasi daerah pesisir Serang dan Tangerang - Penyediaan bibit mangrove - Penanaman mangrove - Perawatan mangrove	Jumlah tanaman bakau yang tumbuh baik	Jumlah tanaman bakau	5		35.000	25.000	35.000	35.000		APP SINAR MAS		
Aspek Sosial																	
Internal																	
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	1	Penerapan program BPJS ketenagakerjaan kepada semua karyawan - Memastikan setiap karyawan baru sudah terdaftar di BPJS	Persentase karyawan yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	Tahunan		100%	100%	100%	100%		APP SINAR MAS		
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SISN Bidang Kesehatan	2	Perusahaan memberikan fasilitas BPJS kesehatan kepada semua karyawan	Persentase karyawan yang memiliki BPJS Kesehatan	%	Tahunan		100%	100%	100%	100%		APP SINAR MAS		
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	3	Penerapan program sistem manajemen K3 - Mengurangi kecelakaan kerja	Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) kurang dari 1	Indeks LTIFR	10		2,15	1,83	1,64	1,48		APP SINAR MAS		
A.6.c.2.d.1.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	4	Perusahaan memberikan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi karyawan - Leadership skill, etc	Pelatihan pengembangan kompetensi karyawan, leadership, technical, etc	jam/tahun/karyawan	Tahunan		23	23	23	23		APP SINAR MAS		
A.6.c.2.d.2.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	5	Pelatihan untuk mengembangkan kompetensi karyawan - Leadership skill, etc	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan karyawan laki-laki dalam setahun	jam/tahun/karyawan	Tahunan		23	23	23	23		APP SINAR MAS		
A.6.c.2.d.2.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	5	Pelatihan untuk mengembangkan kompetensi karyawan - Leadership skill, etc	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan karyawan perempuan dalam setahun	jam/tahun/karyawan	Tahunan		23	23	23	23		APP SINAR MAS		
Eksternal																	
		1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana pertanian skala kecil menurut subsektor.	1	- Program Desa Makmur Peduli Api - Program Masyarakat Peduli Api (MPA)	mengurangi 75% insiden kebakaran di desa DMPA	%	10		53%	55%	57%	59%		APP SINAR MAS		
		2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.	2	Program Desa Makmur Peduli Api	Persentase rumah tangga anggota DMPA yang memiliki pendapatan setara dengan upah minimum regional	%	10		23%	26%	29%	32%		APP SINAR MAS		
		2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.	1	Pemberdayaan petani termasuk petani wanita - Pelatihan dan pendampingan untuk pertanian, peternakan, dll - Penyediaan bibit tanaman, anakan ternak atau bibit ikan, dll - Pemberian modal usaha melalui pinjaman lunak, dana bergulir, dll	Jumlah petani yang mendapatkan dukungan	Jumlah petani	5		1.800	1.800	1.800	1.800		APP SINAR MAS		

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan										Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ItE-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024				
		3.2.1	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	2	- Dukungan peningkatan kesehatan bayi-balita melalui kegiatan posyandu - Training bagi kader posyandu	Jumlah balita yang mendapat layanan posyandu	Jumlah bayi dan balita	5		1.500	1.500	1.500	1.500		APP SINAR MAS		
		3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	3	- Kampanye kesehatan dan layanan pengobatan gratis untuk masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan akses layanan kesehatan	Jumlah masyarakat	5		5.000	5.000	5.000	5.000		APP SINAR MAS		
		4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	4	Dukungan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar (SD, SMP, SMA) - Bantuan penyediaan sarana prasarana sekolah - Renovasi gedung sekolah - Pelatihan untuk anak2 sekolah - Pelatihan untuk guru2 sekolah	Jumlah anak yang mendapatkan dukungan pendidikan	Jumlah penerima manfaat	5		2.300	2.300	2.300	2.300		APP SINAR MAS		
		4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	5	Beasiswa perguruan tinggi untuk siswa berprestasi golongan menengah kebawah	Jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi untuk siswa berprestasi	Jumlah penerima beasiswa	5		70	70	70	70		APP SINAR MAS		
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	6	Fasilitasi magang untuk SMK dan perguruan tinggi	Jumlah peserta magang yang difasilitasi	Jumlah peserta magang	5		100	1.000	1.000	1.000		APP SINAR MAS		
		4.a.1	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua Water Sanitation and Hygiene (WASH)).		WASH in School Sosialisasi program - Training PHBS untuk anak dan guru - Dukungan sarana cuci tangan untuk sekolah - pembangunan dan renovasi toilet sekolah - Pembangunan sumur sekolah - Pola hidup bersih dan sehat	Jumlah sekolah dengan sarana cuci tangan pake sabun	Jumlah sekolah	1							APP SINAR MAS		
A.6.f.2.a.1.a		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru	8	Perusahaan memastikan kualitas dan keamanan produk melalui ISO 9001	Persentase perusahaan yang memiliki PROPER minimal ranking BIRU	Jumlah Perusahaan	Tahunan		9	9	9	9		APP SINAR MAS		
A.6.f.2.a.2		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru	9	Perusahaan memastikan informasi produk melalui ISO 9001	Persentase perusahaan yang memiliki PROPER minimal ranking BIRU	Jumlah Perusahaan	Tahunan							APP SINAR MAS		
A.6.c.3.a		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	10	Perusahaan mempublikasikan sustainability report setiap tahun	Publikasi sustainability report setiap tahun	%	Tahunan		100%	100%	100%	100%		APP SINAR MAS		
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik	11	- Sosialisasi tentang saluran/mechanisme pengaduan masyarakat dan proses tindak lanjutnya	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%	Tahunan		100%	100%	100%	100%		APP SINAR MAS		
A.6.c.3.b.2.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik	12	- Sosialisasi tentang saluran/mechanisme pengaduan masyarakat dan proses tindak lanjutnya	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%	Tahunan		100%	100%	100%	100%		APP SINAR MAS		
NAMA PEMANGKU KEPENTINGAN: SINTESA GROUP-PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA/ Strategic Investment Holding Company																	
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan																	
A.6.c.2.a.1		5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	1	Program mentoring SDM perempuan internal	Meningkatkan proporsi top level executive perempuan	%	5	30%	10%	20%	20%	30%	tbc	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.3.c.2.				2	Head hunting khusus manager perempuan	Ratio Manager perempuan: laki	%	5	40%	20%	30%	30%	40%	tbc	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan										Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024				
A.6.c.2.a.2	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities	3		Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1	%	Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	tbc	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.6.c.2.b.		8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja	4	Sistem remunerasi berdasarkan level kompetensi dan jabatan struktural	Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	%	Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	tbc	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.6.c.2.a.3		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.			Jumlah pegawai laki-laki yang mengambil cuti parental/hamil	orang								tbc	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA	
A.6.c.2.a.4		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.			Jumlah pegawai perempuan yang mengambil cuti parental/hamil	orang	Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	tbc	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA	
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan	Tahunan							PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%								PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%								PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2.(b)	Kebebasan sipil		Strategic partnership towards the SDGs	Jumlah keanggotaan pada asosiasi untuk	asosiasi	5		6	7	8	9	tbc	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
			(Indikator SDGs yang sesuai)		Mendorong anakperusahaan melakukan gender assesment	Jumlah perusahaan yang melakukan gender assesment yang mendapatkan sertifikasi	perusahaan	5		1 perusahaan	2 perusahaan	2 perusahaan	2 perusahaan	tbc	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
Aspek Ekonomi															PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.3.c.1.a.	Skala usaha LK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Pengembangan portfolio bisnis untuk kontribusi SDGs melalui new business model	Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah),	Juta rupiah	5	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Pengembangan portfolio bisnis untuk kontribusi SDGs melalui new business model	Total kewajiban (dalam jutaan rupiah),	Juta rupiah	5	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual		5	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Pengembangan portfolio bisnis untuk kontribusi SDGs melalui new business model	Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)	Juta rupiah	5	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Pengembangan portfolio bisnis untuk kontribusi SDGs melalui new business model	Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Juta rupiah	5	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Pengembangan portfolio bisnis untuk kontribusi SDGs melalui new business model	Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)	%	5	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.3.c.4.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Pengembangan portfolio bisnis untuk kontribusi SDGs melalui new business model	Cakupan wilayah operasional berdasarkan tingkat administrasi	Provinsi kab/kota	5	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kontribusi kenaikan serapan lapangan kerja berdasarkan gender	Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang	5	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kontribusi kenaikan serapan lapangan kerja berdasarkan gender	Jumlah karyawan perempuan level staf	orang	5	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.6.c.2.a.6		8.7.1	Proportion and number of children aged 5-17 years engaged in child labour, by sex and age			Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang	5							PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kontribusi kenaikan serapan lapangan kerja berdasarkan usia	Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang	5	tbc	0	0	0	0	0	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kontribusi kenaikan serapan lapangan kerja berdasarkan usia	Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang	5	tbc	0	0	0	0	0	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kontribusi kenaikan serapan lapangan kerja berdasarkan usia	Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang	5	tbc	0	0	0	0	0	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kontribusi kenaikan serapan lapangan kerja berdasarkan jenjang pendidikan	Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang	5	tbc	0	0	0	0	0	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kontribusi kenaikan serapan lapangan kerja berdasarkan jenjang pendidikan	Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang	5	tbc	0	0	0	0	0	PT.WIDJAJATUNGGAL SEJAHTERA		

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan										Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024				
A.3.c.2.n.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kontribusi kenaikan serapan lapangan kerja berdasarkan jenjang pendidikan	Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang	5	tbc	0	0	0	0	0	PT.WIDIAJATUNGGAL SEIAHTERA		
A.3.c.2.o.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kontribusi kenaikan serapan lapangan kerja berdasarkan jenjang pendidikan	Jumlah karyawan berpendidikan S3	orang	5	tbc	0	0	0	0	0	PT.WIDIAJATUNGGAL SEIAHTERA		
A.3.c.2.p.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kontribusi kenaikan serapan lapangan kerja	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%	5	tbc	0	0	0	0	0	PT.WIDIAJATUNGGAL SEIAHTERA		
A.3.c.2.q.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kontribusi kenaikan serapan lapangan kerja	Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%	5	tbc	0	0	0	0	0	PT.WIDIAJATUNGGAL SEIAHTERA		
A.3.c.2.r.		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin		Kontribusi kenaikan serapan lapangan kerja	Persentase karyawan berstatus pekerja musiman atau pihak ketiga	%	5	tbc	0	0	0	0	0	PT.WIDIAJATUNGGAL SEIAHTERA		
A.2.a.4.		Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Serapan tenaga kerja lokal berdasarkan wilayah operasional	Persentase karyawan lokal terhadap seluruh karyawan	%	5	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	PT.WIDIAJATUNGGAL SEIAHTERA	
A.2.a.5.	9.3.1*		Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Pasokan bahan baku lokal yang digunakan dalam proses produksi	Persentase bahan baku dari wilayah lokal yang dipergunakan terhadap total bahan baku	%	5	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	PT.WIDIAJATUNGGAL SEIAHTERA		
A.2.a.5.	9.3.1*		Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Serapan produk dan bahan baku yang berasal dari UMKM lokal berdasarkan wilayah operasional	Jumlah UMKM dari wilayah lokal yang dilibatkan sebagai supplier	UMKM	5	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	PT.WIDIAJATUNGGAL SEIAHTERA		
A.2.a.4.	Produk ramah lingkungan	12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	produk								PT.WIDIAJATUNGGAL SEIAHTERA		
A.6.f.1.a	Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas		(Indikator SDGs yang sesuai)												PT.WIDIAJATUNGGAL SEIAHTERA		

NAMA PEMANGKU KEPENTINGAN: PT Pertamina (Persero) Tbk

Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan

A.6.c.2.a.1	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	1	Struktur BOD Pertamina	Ratio BOD laki: perempuan = 3:1	%	5	sesuai keputusan KBUMN						PT Pertamina (Persero) Tbk
A.3.c.2.				2	belum ada peraturan. Namun ada Persentase wanita dalam Nominated talent pool (15%)	Ratio Wanita dalam Nominated Pool : laki	%	5	15%						PT Pertamina (Persero) Tbk
A.6.c.2.a.2		8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities	3	tidak ada perbedaan. Variabel yang membedakan hanya kinerja dan level	Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1	%	5	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	PT Pertamina (Persero) Tbk
A.6.c.2.b.		8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja		Upah pekerja di atas UMR. Angka tidak dapat di disclose	Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk
A.6.c.2.a.3		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		Tidak ada data tersebut	Jumlah pegawai laki-laki yang mengambil cuti parental/hamil	orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk
A.6.c.2.a.4		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		Jumlah pekerja perempuan yang mengambil cuti parental	Jumlah pegawai perempuan yang mengambil cuti parental/hamil	orang	5	443	NA	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		100% insan pertama melaksanakan pelatihan anti korupsi	Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk
A.3.g.2.		16.5.1(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		100% insan pertama melaksanakan pelatihan anti korupsi	Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	5	100	100	100	100	100	100	PT Pertamina (Persero) Tbk
A.3.g.3.		16.5.1(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		100% insan pertama melaksanakan pelatihan anti korupsi	Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	5	100	100	100	100	100	100	PT Pertamina (Persero) Tbk
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil		persentase pekerja pada keanggotaan Serikat Pekerja	Jumlah keanggotaan pada asosiasi	%	5	72	NA	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk
	(jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas untuk penguatan corporate governance untuk isu sustainability		(Indikator SDGs yang sesuai)												PT Pertamina (Persero) Tbk
Aspek Ekonomi															
A.3.c.1.a.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Perhitungan dalam USD Juta	Total aset atau kapitalisasi aset (dalam USD Juta).	USD Million		69.143	NA	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan										Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ItE-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024				
A.3.c.1.b.	Skala usaha LK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Perhitungan dalam USD Juta	Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	USD Million		37.889	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk			
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual			NA	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk			
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Pendapatan dalam USD juta	Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)	Juta rupiah	41.469	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk			
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Laba Perusahaan dalam USD juta	Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Juta rupiah	1.051	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk			
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			100% dimiliki Pemerintah	Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)	%	5	100	100	100	100	100	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.3.c.4.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Pertamina mencakup seluruh wilayah Indonesia	Cakupan wilayah operasional berdasarkan tingkat administrasi	Provinsi	5	34	34	34	34	34	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal				Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang		11.941	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal				Jumlah karyawan perempuan level staf	orang		1.585	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.6.c.2.a.6		8.7.1	Proportion and number of children aged 5-17 years engaged in child labour, by sex and age			Tidak ada pekerja di bawah umur (15 tahun)	Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang	5	0	0	0	0	0	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal				Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang		4509	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal				Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang		7557	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal				Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang		1460	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal				Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang		6749	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal				Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang		5506	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.3.c.2.n.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			pascasarjana (S2 dan S3)	Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang		1271	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.3.c.2.o.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal				Jumlah karyawan berpendidikan S3	orang		NA	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Hanya Pekerja (PWTT)	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%		88	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			PWT (Pekerja waktu Tertentu)	Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%		12	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.3.c.2.r.		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin				Persentase karyawan berstatus pekerja musiman atau pihak ketiga	%		NA	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.3.c.2.s.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Total pekerja yang mengundurkan diri : 22 Laki-laki : 15	Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%		0,12	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.3.c.2.t.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Pekerja perempuan yang mengundurkan diri : 7	Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%		0,05	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.3.c.2.u.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Total recruitment : 260 Recruitment Laki-laki: 230	Persentase karyawan laki-laki yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%		88	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.3.c.2.v.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Recruitment Perempuan : 30	Persentase karyawan perempuan yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%		12	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.2.a.4.		Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Total Pekerja Lokal tidak dapat dihitung karena sesuai peraturan kerja adalah ditempatkan di seluruh wilayah operasi.	Persentase karyawan lokal terhadap seluruh karyawan	%		NA	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.2.a.5.			9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Target TKDN dalam program pengadaan Pertamina sesuai ketentuan.	Persentase bahan baku dari wilayah lokal yang dipergunakan terhadap total bahan baku	%		25	30	35	35	40	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.2.a.5.	9.3.1*		Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		total UMKM baru yang menjadi partner di tahun 2020	Jumlah UMKM baru yang menjadi Mitra Binaan dari wilayah sekitar area operasional	UMKM		2300	2100	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk			
A.2.a.4. A.6.f.1.a	Produk ramah lingkungan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, Musicool, Fastron SR hal 189	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	produk		6					PT Pertamina (Persero) Tbk			

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan										Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Itte-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024				
	(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas		(indikator SDGs yang sesuai)													PT Pertamina (Persero) Tbk	
Aspek Lingkungan Hidup																	
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.			Total bauran energi terbarukan	%										PT Pertamina (Persero) Tbk
						Solar PV	Proyeksi Produksi Listrik	MWh	NA	4.978	8.638	85.904	259.019	548.467	664.219	PT Pertamina (Persero) Tbk	
						Biomass/Biogas	Proyeksi Produksi Listrik	MWh	NA	13.669	16.862	16.862	17.199	17.543		PT Pertamina (Persero) Tbk	
						Bayu	Proyeksi Produksi Listrik	MWh	NA	-	-	-	-	23.652		PT Pertamina (Persero) Tbk	
						Geothermal	Proyeksi Produksi Listrik	MWh	NA	4.618.265	4.464.134	4.378.563	4.907.391	5.620.322		PT Pertamina (Persero) Tbk	
						Hydro	Proyeksi Produksi Listrik	MWh	NA	-	-	-	12.264	12.264		PT Pertamina (Persero) Tbk	
						H2 Plant	Proyeksi Produksi Listrik	MWh	NA	-	-	-	-	105.120		PT Pertamina (Persero) Tbk	
						Battery Swap 2 Wheeler	Proyeksi Produksi Penyimpanan Listrik	MWh	NA	-	-	4	18	24		PT Pertamina (Persero) Tbk	
						Others	Proyeksi Produksi Listrik	MWh	NA	-	-	160.926	252.168	351.869		PT Pertamina (Persero) Tbk	
	Program Desa Energi*	Jumlah desa yang termasuk dalam Program Desa Energi Berdikani	Desa	N/A	11	13					131.849.82*	PT Pertamina (Persero) Tbk					
												*Alokasi pendanaan program juga untuk mendukung poin TPB lainnya dan merupakan alokasi hingga tahun 2022					
A.6.d.3.a.1	Efisiensi Energi	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita			Total konsumsi energi	Juta GJ	131,32	NA	NA	NA	NA				PT Pertamina (Persero) Tbk	
A.6.d.3.a.2		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.			Total konsumsi air	juta m3	30,84	NA	NA	NA	NA				PT Pertamina (Persero) Tbk	
A.6.d.b.2		7.3.1*	Intensitas energi primer.	Intensitas energi tidak dapat diakumulasikan, karena berbeda satuan. SR hal 119			Intensitas efisiensi energi yang dipergunakan		NA	NA	NA	NA					PT Pertamina (Persero) Tbk
				Peningkatan kapasitas dan kualitas Kilang/RDMP (Dumai, Plaju, Balongan, Cilacap, Balikpapan)			Proyeksi Produksi Kilang RON 92, RON 97 / (EURO IV)	Ribu BBL	NA	41.780	34.808	43.206	67.416	94.003	15.691.178 *	PT Pertamina (Persero) Tbk	
							Proyeksi Produksi HVO (Green Diesel)	Ribu BBL	NA	-	-	611	1.601	6.103		PT Pertamina (Persero) Tbk	
																	*) Alokasi danayang disajikan adalahalokas seluruh proyekRDMP.
A.6.d.3.b.3.		6.4.1.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.			Efisiensi penggunaan air	juta m3	29,68	NA	NA	NA	NA				PT Pertamina (Persero) Tbk	
A.6.e.5.a.2		6.3.1.	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.			Pengurangan limbah cair yang dihitung	juta m3	8,57	NA	NA	NA	NA				PT Pertamina (Persero) Tbk	
A.6.e.5.b		12.4.2.	Proporsi limbah berbahaya yang dikelola menurut jenis penanganannya			pengurangan limbah B3 yang dihitung	ribu TON	180,12	NA	NA	NA	NA				PT Pertamina (Persero) Tbk	
A.6.e.5.a.3.a.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).			Proporsi limbah berbahaya (b3) - padat yang diolah	%	NA	NA	NA	NA	NA				PT Pertamina (Persero) Tbk	
A.6.e.5.a.3.b.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).			Proporsi limbah berbahaya (b3) - cair yang diolah	%	NA	NA	NA	NA	NA				PT Pertamina (Persero) Tbk	
A.6.e.5.c.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).			Jumlah tumpahan limbah yang terjadi		NA	NA	NA	NA	NA				PT Pertamina (Persero) Tbk	
A.6.e.3.b.2		14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.			Jumlah luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati air	Ha	NA	NA	NA	NA	NA				PT Pertamina (Persero) Tbk	
A.6.e.3.b.1	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.1.2.	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.			Jumlah luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati darat	Ha	NA	NA	NA	NA	NA				PT Pertamina (Persero) Tbk	
A.6.e.3.b.3		15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi.			Jumlah program konservasi hewan endemis	kegiatan	87	NA	NA	NA	NA				PT Pertamina (Persero) Tbk	
A.6.e.4.b		13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.			Jenis Pelatihan bagi karyawan dan kontraktor terkait K3	kegiatan	6	NA	NA	NA	NA				PT Pertamina (Persero) Tbk	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan										Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSI)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024				
A.6.e.4.a.1.	Adaptasi Perubahan Iklim	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		Emisi yang diukur scope 1 dan scope 2	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 1 & 2	%	5	26	26,25	26,5	27	27,5		PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.6.e.4.a.2.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 2									PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.6.e.4.a.3.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		Score 3 belum dihitung	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 3			NA	NA	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.			Jumlah kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya		kegiatan		NA	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.							NA	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.6.d.1.		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		Program CSR Pertamina Hijau	Jumlah biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	Juta rupiah		19,11	NA	NA	NA	NA	NA	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.6.d.2.a.	Penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	8.4.1	Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP			Persentase penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaurulang	%			NA	NA	NA	NA		PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.6.d.2.b.		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		Program Pengolahan Sampah*	Jumlah lokasi yang menjalankan program pengolahan sampah	Lokasi			8	10	11	12	2.670.783.050	PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.6.e.6.a	Kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi		Perhitungan total keluhan/pengaduan terkait lingkungan	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan terhadap seluruh jumlah yang diterima	keluhan		5	NA	NA	NA	NA		PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.6.e.6.c		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001		Total Anak Perusahaan dan Unit Operasi serta Kantor Pusat yang memiliki Sertifikasi ISO 14001	Jumlah sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	sertifikat		42	NA	NA	NA	NA		PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.6.f.1.a	Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teragister.		Biodiesel B20 / B30	Jumlah inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan	produk		1						PT Pertamina (Persero) Tbk		
Aspek Sosial																	
Internal																	
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	5	100	100	100	100	100		PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SDN Bidang Kesehatan				Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%	5	100	100	100	100	100		PT Pertamina (Persero) Tbk	
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3		total incident yang dialami pekerja	Jumlah kecelakaan kerja	kejadian	5	0	0	0	0	0		PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah penyakit akibat kerja	kejadian		NA	NA	NA	NA	NA		PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.6.c.2.d.1.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		jam pelatihan/ learning hour/ pekerja (tidak dihitung berdasarkan jenis kelamin)	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan laki-laki dalam setahun	jam/tahun/karyawan		182	250	NA	NA	NA		PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.6.c.2.d.2.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan perempuan dalam setahun	jam/tahun/karyawan		NA	NA	NA	NA	NA		PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.6.c.2.d.3.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Total kegiatan pelatihan tdd: 1. Pre-employee Program 2. Advanced Education Program 3. Long & Short term training programs 4. E learning/ mobile learning program Dihitung berdasarkan jumlah program dan jumlah peserta	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level entry dalam setahun --> TOTAL KEGIATAN PELATIHAN SELAMA SETAHUN	Jumlah Program		346	NA	NA	NA	NA		PT Pertamina (Persero) Tbk		
Eksternal																	
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.		Target UMKM yang 'naik kelas'	Jumlah UMKM yang naik kelas sesuai dengan indikator penambahan omzet, penambahan jumlah tenaga kerja, peningkatan nilai pinjaman, peningkatan kapasitas produksi, pelibatan masyarakat sekitar untuk menghasilkan produk, pemasaran produk di luar kota/negeri dan penambahan sertifikasi serta perizinan	jumlah	2	230	106	NA	NA	NA		PT Pertamina (Persero) Tbk		
A.6.f.2.a.1.a		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru		Proper Biru	Persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan	unit bisnis		90							PT Pertamina (Persero) Tbk	
A.6.f.2.a.2	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru		Semua produk memiliki label informasi barang/dan jasa	Persentase produk dan/jasa yang memiliki label atau informasi barang dan/atau jasa	%		100	100	100	100	100	100		PT Pertamina (Persero) Tbk		

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan										Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Itte-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024				
A.4.c.2		17.6.1. (a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular			Jumlah kerjasama dalam rangka Sustainable Development dan/atau Sustainable Finance	kerjasama									PT Pertamina (Persero) Tbk	
A.6.c.3.a		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.		PT Pertamina (Persero) menerbitkan SR sejak 2011	Jumlah kegiatan yang menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar perusahaan	kegiatan	5	1	1	1	1	1			PT Pertamina (Persero) Tbk	
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik		Persentasi pengaduan masyarakat yang diTL	Persentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%	5	98,2	100	100	100	100			PT Pertamina (Persero) Tbk	
A.6.c.3.b.2.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		%										PT Pertamina (Persero) Tbk
A.6.f.4.a.	Kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik		Target Tingkat Kepuasan terhadap produk dinilai dengan survey customer satisfaction index (CSI)	Persentase produk yang ditarik kembali dari pasar --> TINGKAT KEPUASAN TERHADAP PRODUK	skala likert		3,9	3,9	NA	NA	NA			PT Pertamina (Persero) Tbk	
A.6.c.3.c	Kegiatan TJSI yang relevan dengan isu SDGs		(indikator SDGs yang sesuai)													PT Pertamina (Persero) Tbk	

NAMA PEMANGKU KEPENTINGAN: Sinar Mas Land																
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan																
A.6.c.2.a.1	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	1	1. Membuat kebijakan kesetaraan gender dan anti diskriminasi dalam pengembangan karir,	Ratio BOD laki: perempuan = 3:1	% manpower	5	60:40		90:10	80:20	70:30			Sinar Mas Land
A.3.c.2.				2		Ratio Manager perempuan: laki	% manpower	5	60:40		90:10	80:20	70:30			Sinar Mas Land
A.6.c.2.a.2		8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities	3	Penetapan nilai gaji ditetapkan bukan berdasarkan jenis kelamin, fisik dll, namun berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki	Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1	%	5	100		100	100	100			Sinar Mas Land
A.6.c.2.b.		8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja		Mensosialisasikan kebijakan dan SOP tentang penetapan nilai upah yang merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.	Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	%	5	100		100	100	100	100		
A.6.c.2.a.3		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		Memberikan hak cuti hamil kepada karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah pegawai laki-laki yang mengambil cuti parental/hamil	orang	5	100		100	100	100			Sinar Mas Land
A.6.c.2.a.4		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.			Jumlah pegawai perempuan yang mengambil cuti parental/hamil	orang	5	100		100	100	100			Sinar Mas Land
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		1. Membuat kebijakan dan prosedur tentang Code of Ethical Conduct atau Code of Ethical Business	Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan	5	100		100	100	100			Sinar Mas Land
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		2. Mensosialisasikan kebijakan dan SOP kepada seluruh level karyawan dan/atau pekerja secara	Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	5	100		100	100	100			Sinar Mas Land
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	5	100		100	100	100			Sinar Mas Land
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil		1. Membuat kebijakan tentang kebebasan bergosiasi kepada seluruh karyawan dan/atau pekerja 2. Tidak menghalangi karyawan dan/atau pekerja untuk bergabung bersama asosiasi, selama tidak mengganggu jam kerja (kedinasannya)	Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi	5	100		100	100	100			Sinar Mas Land
(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas untuk penguatan corporate governance untuk isu sustainability																
Aspek Ekonomi																
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Update database pekerja secara berkala	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%	5	100		25	25	25			Sinar Mas Land

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan										Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Itte-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024				
A.3.c.2.q.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal		Update database pekerja secara berkala	Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%	5	70		30	25	15		Sinar Mas Land		
A.3.c.2.r.		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin		Update database pekerja secara berkala	Persentase karyawan berstatus pekerja musiman atau pihak ketiga	%	5							Sinar Mas Land		
A.3.c.2.s.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal		Update database pekerja secara berkala	Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	5							Sinar Mas Land		
A.3.c.2.t.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal		Update database pekerja secara berkala	Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	5							Sinar Mas Land		
A.3.c.2.u.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal		Update database pekerja secara berkala	Persentase karyawan laki-laki yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%	5							Sinar Mas Land		
A.3.c.2.v.		8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal		Update database pekerja secara berkala	Persentase karyawan perempuan yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%	5							Sinar Mas Land		
A.2.a.4.	Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		1. Memberikan kesempatan masyarakat lokal untuk menjadi karyawan sesuai dengan kemampuan, keahlian yang dimiliki	Persentase karyawan lokal terhadap seluruh karyawan	%	5	30		5	5	10		Sinar Mas Land		
A.2.a.5.		9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		1. Melakukan kerjasama dengan supplier lokal 2. Melakukan inventarisasi jumlah bahan baku yang dibeli di supplier lokal	Persentase bahan baku dari wilayah lokal yang dipergunakan terhadap total bahan baku	%	5							Sinar Mas Land		
Aspek Lingkungan Hidup																	
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.		1. Menggunakan photovoltaic sebagai instrument untuk menghasilkan energi terbarukan 2. Mencatat jumlah photovoltaic yang telah diinstal	Total bauran energi terbarukan	Unit	5	4		1	1	1		Sinar Mas Land		
A.6.d.3.a.1	Efisiensi Energi	7.1.1(a)	Konsumsi listrik per kapita		Merekap jumlah konsumsi energi listrik yang digunakan per tahun	Total konsumsi energi	kWh	5	200.407.650		57.259.328	57.259.328	57.259.328		Sinar Mas Land		
A.6.d.3.a.2		6.1.1(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.		1. Pembangunan water treatment 2. Mencatat setiap jumlah raw water input dan water distribusi ke seluruh pengguna pertahun	Total konsumsi air	m3	5	5.449.889		1.362.472	1.362.472	1.362.472		Sinar Mas Land		
A.6.d.b.2		7.3.1*	Intensitas energi primer.		1. Instalasi chiller untuk efisiensi energi 2. Menghitung jumlah efisiensi energi yang berhasil dari penggunaan chiller	Intensitas efisiensi energi yang dipergunakan	%	5	12%		3	3	3		Sinar Mas Land		
A.6.d.3.b.3.		6.4.1.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.		1. Mengkampanyekan program "hemat air" kepada seluruh karyawan/pekerja/tenant/vendor dan penghuni perumahan 2. Mencatat trend penggunaan air per tahun 3. Melakukan reuse dan recycle kembali air yang digunakan sebagai raw water	Efisiensi penggunaan air	%	5	4		1	1	1		Sinar Mas Land		
A.2.a.4.		11.2.1.	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpisah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.		1. Inventarisasi ketersediaan akses transportasi publik yang nyaman dan aman bagi segala jenis usia, jenis kelamin dan berkebutuhan khusus 2. Kemudahan akses khusus bagi kelompok usia tertentu dan berkebutuhan khusus 3. Banyaknya penumpang yang menggunakan transportasi publik tersebut	Persentase moda transportasi ramah lingkungan yang dipergunakan	%	5	4		1	1	1		Sinar Mas Land		

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan										Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Itte-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024				
A.6.e.5.a.1.	Pencegahan dan Pengendalian Polusi	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		1. Inventarisasi jenis limbah/sampah 2. Penyediaan sarana/prasarana untuk pengelolaan limbah/sampah 3. Pencatatan jenis limbah/sampah yang dihasilkan	Jumlah limbah dan effluen yang dihasilkan berdasarkan jenis	%	5	4		1	1	1		Sinar Mas Land		
A.6.e.5.a.2		6.3.1.	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.		1. Inventarisasi karakteristik limbah cair 2. Inventarisasi ketersediaan instalasi WWTP 3. Pencatatan limbah cair yang dihasilkan per tahun 4. Pencatatan jumlah limbah cair yang berhasil diolah/dikelola	Proporsi limbah air yang dikelola	%	5	4		1	1	1		Sinar Mas Land		
A.6.e.5.b		12.4.2.	Proporsi limbah berbahaya yang dikelola menurut jenis penanganannya		1. Inventarisasi jenis dan karakteristik LB3 2. Ketersediaan sarana prasarana pengelolaan LB3 3. Neraca LB3 yang diupdate berkala 4. Kerjasama dengan pengangkut dan/atau pengelola LB3 berizin	Proporsi limbah berbahaya yang dikelola	%	5	4		1	1	1		Sinar Mas Land		
A.6.d.2.a.	Penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	8.4.1	Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP		1. Inventarisasi jenis material yang digunakan yang memiliki pengakuan "green label" 2. Inventarisasi jenis material yang dapat didaur ulang	Persentase penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	%	5	50		10	10	10,5		Sinar Mas Land		
A.6.d.2.b.		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		1. Inventarisasi jumlah sampah yang dihasilkan per hari 2. Pemilahan jenis sampah yang dapat didaur ulang 3. Pengembangan program daur ulang sampah 4. Implementasi program daur ulang sampah	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	%	5	4		1	1	1		Sinar Mas Land		
A.6.e.2.a		6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya		1. Inventarisasi jumlah DAS yang melintasi area project 2. Penyusunan program konservasi dan perlindungan DAS 3. Rehabilitasi sempadan DAS			5	4		1	1	1		Sinar Mas Land		
A.6.e.2.b		15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati		NA											Sinar Mas Land	
A.6.e.6.a	Kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi		1. Sosialisasi jenis-jenis pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup kepada seluruh unit	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan terhadap seluruh jumlah yang diterima	%	5	0		0	0	0		Sinar Mas Land		
A.6.e.6.c		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001		NA	Jumlah sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	sertifikat								Sinar Mas Land		
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru		1. Inventarisasi jumlah unit usaha yang mengikuti PROPER dengan level BIRU			5	4		1	1	1		Sinar Mas Land		
A.6.f.1.a	Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan;	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		1. Inventarisasi produk yang telah mendapatkan sertifikasi "green"	Jumlah inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan	produk	5	4		1	1	1		Sinar Mas Land		
Aspek Sosial																	
Internal																	
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan		Data base karyawan/pekerja yang terdaftar di dalam program BPJS TK	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	5	100		100	100	100		Sinar Mas Land		
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SSN Bidang Kesehatan		Data base karyawan/pekerja yang terdaftar di dalam program BPJS KES	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%	5	100		100	100	100		Sinar Mas Land		
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3		1. Jumlah Ahli K3 Umum (AK3U) di lokasi/unit kerja	Jumlah kecelakaan kerja	kejadian	5	2		1	1	0		Sinar Mas Land		
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3		2. Inventarisasi rekamkecelakaan dan penyakit akibat kerja	Jumlah penyakit akibat kerja	kejadian	5	0		0	0	0		Sinar Mas Land		

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan										Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024				
A.6.c.2.d.1.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		1. Identifikasi kebutuhan pelatihan karyawan per level dan per bidang kerja 2. Kemudahan akses karyawan (laki-laki dan perempuan) dalam mendapatkan pelatihan	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan laki-laki dalam setahun	jam/tahun/karyawan	5	12		3	3	3		Sinar Mas Land		
A.6.c.2.d.2.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		3. Rekap pelaksanaan pelatihan yang diikuti oleh karyawan (laki-	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan perempuan dalam setahun	jam/tahun/karyawan	5	12		3	3	3		Sinar Mas Land		
Eksternal																	
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.		1. Inventarisasi jenis UMKM yang sudah bekerja sama dengan perusahaan 2. Inventarisasi Jumlah UMKM yang telah mendapatkan bantuan	Persentase UMKM yang mendapat bantuan yang naik kelas		5	4		1	1	1		Sinar Mas Land		
A.6.f.2.a.1.a		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru		1. Inventarisasi unit usaha yang sudah mendapatkan PROPER, level BIRU 2. Keaktifan unit usaha untuk meningkatkan level PROPERnya	Persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan		5	2		0	0	1		Sinar Mas Land		
A.6.f.2.a.2		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru		1. Inventarisasi unit usaha yang sudah mendapatkan PROPER, level BIRU 2. Keaktifan unit usaha untuk meningkatkan level PROPERnya	Persentase produk dan/jasa yang memiliki label atau informasi barang dan/atau jasa		5	2		0	0	1		Sinar Mas Land		
A.4.c.2		17.6.1. (a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular		NA	Jumlah kerjasama dalam rangka Sustainable Development dan/atau Sustainable Finance	kerjasama									Sinar Mas Land	
A.6.c.3.a		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.		1. Inventarisasi jumlah usaha lokal yang bekerjasama dengan perusahaan dalam bidang pengadaan jasa dan servis 2. Rekap nilai transaksi (IDR) antara pengusaha lokal dengan perusahaan dalam 1 tahun	Jumlah kegiatan yang menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar perusahaan	kegiatan	5	4		1	1	1		Sinar Mas Land		
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik		1. Membangun prosedur penanganan pengaduan dan keluhan untuk internal dan eksternal 2. Sosialisasi mekanisme	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%	5	4		1	1	1		Sinar Mas Land		
A.6.c.3.b.2.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik		2. Sosialisasi mekanisme	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan	5	4		1	1	1		Sinar Mas Land		
A.6.f.4.a.	Kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik		NA	Persentase produk yang ditarik kembali dari pasar	%								Sinar Mas Land		
NAMA PEMANGKU KEPENTINGAN: PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk																	
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan																	
A.6.c.2.a.1	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.		TIDAK ADA PROGRAM	Ratio BOD laki: perempuan = 3:1	%	5	N/A	3:0	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.2.						TIDAK ADA PROGRAM	Ratio Manager perempuan: laki	%	5	N/A	1:5	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk	
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Business Ethics	Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan	5	1x setahun	1	1	1	1		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Business Ethics	Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	5	100	100	100	100	100		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Business Ethics	Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	5	100	100	100	100	100		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas untuk penguatan corporate governance untuk isu sustainability																	
Aspek Ekonomi																	
A.3.c.1.a.	Laju pertumbuhan PDB per kapita	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		TIDAK ADA PROGRAM	Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah),	Juta rupiah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		TIDAK ADA PROGRAM	Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	Juta rupiah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual	Juta Ton semen		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan										Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ItE-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024				
A.2.a.2.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		TIDAK ADA PROGRAM	Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)	Juta rupiah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		TIDAK ADA PROGRAM	Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Juta rupiah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		TIDAK ADA PROGRAM	Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)	%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.4.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		TIDAK ADA PROGRAM	Cakupan wilayah operasional berdasarkan tingkat administrasi	Provinsi		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang		N/A	1945	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah karyawan perempuan level staf	orang		N/A	213	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.c.2.a.6		8.7.1	Proportion and number of children aged 5-17 years engaged in child labour, by sex and age		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang		N/A	0	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang		N/A	210	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang		N/A	1549	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang		N/A	550	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang		N/A	1302	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang		N/A	926	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.2.n.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang		N/A	79	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.2.o.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah karyawan berpendidikan S3	orang		N/A	2	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		TIDAK ADA PROGRAM	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%		N/A	94,46%	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		TIDAK ADA PROGRAM	Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%		N/A	4,72%	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.2.r.		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin		TIDAK ADA PROGRAM	Persentase karyawan berstatus pekerja musiman atau pihak ketiga	%		N/A	0,82%	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.2.s.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		TIDAK ADA PROGRAM	Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%		N/A	0,39%	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.2.t.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		TIDAK ADA PROGRAM	Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%		N/A	0,26%	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.2.u.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		TIDAK ADA PROGRAM	Persentase karyawan laki-laki yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%		N/A	88,14%	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.3.c.2.v.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		TIDAK ADA PROGRAM	Persentase karyawan perempuan yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%		N/A	11,86%	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.2.a.4.		Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		TIDAK ADA PROGRAM	Persentase karyawan lokal terhadap seluruh karyawan	%		N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk	
A.2.a.5.			9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		TIDAK ADA PROGRAM	Persentase bahan baku dari wilayah lokal yang dipergunakan terhadap total bahan baku	%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk	
A.2.a.5.	9.3.1*		Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah UMKM dari wilayah lokal yang dilibatkan sebagai supplier	UMKM		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan												Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Itte-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan		Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana	
					Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian			Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023			Target tahun 2024
A.2.a.4. A.6.f.1.a	Produk ramah lingkungan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		Produk dan jasa solusi berkelanjutan: 1. Semen Dynamix ramah lingkungan - Green Label dari Green Product Council Indonesia 2. Beton ramah lingkungan - SWA Deklarasi KLHK 3. Produk beton cepat kering - Speedcrete 4. Jasa pengelolaan sampah&Limbah	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	produk	5	1. Semen Dynamix dari semua pabrik teregister Green Label 2. Beton dari 3 plant teregister green label SWA deklarasi	2	3	3	4		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
					WEBINAR Sustainable construction towards Sustainable city Series. Sebuah wadah diskusi multipihak yang membahas strategi, solusi dan inovasi untuk mencapai Sustainable City di Indonesia th 2030	Jumlah Pelatihan/Seminar untuk mendorong Sustainable Constructions	jumlah	5	tiap tahun 1x event	1	1	1	1		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
					Jasa solusi Berkelanjutan. Integrated waste management MSW to RDF Projects	Kerjasama & pelaksanaan program MSW to RDF	jumlah	5	3 MOU/Proyek	2	2	2	2		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
															PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
Aspek Lingkungan Hidup															
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.		TIDAK ADA PROGRAM	Total bauran energi terbarukan	kWh		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
					Studi dan Inital project pemanfaatan energi terbarukan	Mempunyai inital project energi terbarukan	Jumlah	5	5	1	1	1	1		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
		12.c.1*(a)	persentase Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; (b) persentase Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.		Substitusi bahan bakar fosil dengan limbah dan sampah.	Meningkatkan rasio substitusi panas (TSR) batu bara dengan bahan bakar alternatif sebesar 15%.	%	5	10%	9,5	9,7	10	10		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
A.6.d.3.a.1		7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita		TIDAK ADA PROGRAM	Total konsumsi energi listrik	kWh	5	Tidak ada target	Tidak ada target	Tidak ada target	Tidak ada target	Tidak ada target		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
A.6.d.3.a.2		6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya		TIDAK ADA PROGRAM	Total konsumsi air	m3	5	Tidak ada target	Tidak ada target	Tidak ada target	Tidak ada target	Tidak ada target		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
A.6.d.b.2	Efisiensi Energi	7.3.1*	Intensitas energi primer.			Intensitas efisiensi energi (panas) yang dipergunakan	MJ/ton terak	5	3328	3353	3340	3338	3335		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
						Menurunkan Intensitas energi listrik sebesar 3,5% di tahun 2025	kWh/ton semen	5	reduksi 3,5% dari tahun 2020	87,6	86,9	86,3	85,7		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
A.6.d.3.b.3.		6.4.1.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.			Efisiensi penggunaan air (target disesuaikan dengan target Industri Hijau kemenperind)	m3/ton semen	5	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
A.2.a.4.		11.2.1.	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.		TIDAK ADA PROGRAM	Persentase moda transportasi ramah lingkungan yang dipergunakan	N/A	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	n/a		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
A.6.e.5.a.1.		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		Pengelolaan Limbah Non B3 internal	Jumlah sampah & Limbah internal Non B3 yang didaur ulang	Tonase	5	2104	2.104	2.104	2.104	2.104		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
						90 Persen limbah internal Non B3 yang didaur ulang	Persentase	6	90% didaur ulang	90	90	90	90		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
A.6.e.5.a.2		6.3.1.	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.		Konservasi Sumber Daya Air	Proporsi limbah air yang dikelola	Persentase	5	100%	100%	100%	100%	100%		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
A.6.e.5.b	Pencegahan dan Pengendalian Polusi	12.4.2.	Proporsi limbah berbahaya yang dikelola menurut jenis penanganannya		Pengelolaan Limbah B3 internal	Proporsi limbah berbahaya yang dikelola	Persentase	5	100%	100%	100%	100%	100%		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
A.6.e.5.a.3.a.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		Pengelolaan Limbah B3 internal	Proporsi limbah berbahaya (b3) - padat yang diolah	%	5	100%	100%	100%	100%	100%		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan										Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ItE-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024				
A.6.e.5.a.3.b.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		Pengelolaan Limbah B3 internal	Proporsi limbah berbahaya (b3) - cair yang diolah	%	5	100%	100%	100%	100%	100%		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.e.5.c.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		Pengelolaan lingkungan	Jumlah tumpahan limbah yang terjadi	Litre	5	0	0	0	0	0		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		Pemanfaatan Bahan Bakar & Bahan Baku alternatif - Non Municipal Solid Waste (MSW)	Jumlah timbulan limbah industri yang didaur ulang	Tonase	5	1 juta ton/tahun	955.050	949.180	941.920	934.660	102.910.000	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		Pelatihan pemanfaatan Limbah B3 bagi transporter dan pelanggan	Jumlah transporter dan pelanggan mengikuti pelatihan Limbah B3	jumlah	5	1000 peserta/per tahun	1000	1000	1000	1000	150.000.000	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.e.3.b.1	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.1.2.	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.		Program Kenaekaragaman hayati	Jumlah luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati darat	Ha	5	829,77	829,77	829,77	829,77	829,77		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
15.3.1.(a)		Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.													PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
15.2.1.(a)		Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.													PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.e.3.b.3		15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.		TIDAK ADA PROGRAM		kegiatan	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
		15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.		Program Kenaekaragaman hayati	Jumlah kegiatan konservasi keanekaragaman hayati darat untuk satwa langka	%	5	100% pelaksanaan rencana aksi Kenaekaragaman Hayati di semua area pertambangan Unit Semen	50%	60%	70%	90%		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
					Program Kenaekaragaman hayati	Area konservasi mempunyai daftar jenis spesies yang dilindungi sesuai IUCN (Red List) dan Perundangan Indonesia	%	5	100%	100%	100%	100%	100%		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
					Program Kenaekaragaman hayati	Area konservasi mempunyai Biodiversity Management Plan & Biodiversity Action Plan	%	5	100%	100%	100%	100%	100%		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.e.4.b		13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Jumlah kegiatan pelatihan pencegahan risiko bencana	kegiatan	5	1x setahun	3	3	3	3		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
		13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)		Program: Pengurangan intensitas emisi karbon spesifik bersih sebesar 15% per ton semen ekivalen pada tahun 2025 (dari baseline 2010).	15% reduction CO2 emission scope 1, baseline 2010. (kgCO2/Ton semen ekivalen) Data emisi intensitas CO2 th 2010 : 685 kg CO2/ton cement equivalent	%	5	15% reduction CO2 emission scope 1, baseline 2010.	13	13	14	14		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.e.4.a.1.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 1	tonase	5	Tidak ada target	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
					Program: Pengurangan intensitas emisi karbon spesifik bersih sebesar 15% per ton semen ekivalen pada tahun 2025 (dari baseline 2010).		kgCO2/Ton semen eq.	5	15% reduction CO2 emission scope 1, baseline 2010.	594	590	589	582		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.e.4.a.2.	Adaptasi Perubahan Iklim	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah Emisi CO2 (tidak langsung) dari pembangkit listrik eksternal	tonase	5	Tidak ada target	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
						Program: Pengurangan intensitas emisi karbon spesifik bersih sebesar 15% per ton semen ekivalen pada tahun 2025 (dari baseline 2010).		kgCO2/Ton semen eq.	5	Tidak ada target	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk	
A.6.e.4.a.3.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.e.4.a.4.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		Pengurangan faktor terak dalam semen	Rasio terak dalam semen (konsolidasi semua jenis & tipe semen)	%	5	69%	69	69	69	69		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
					Peningkatan Rasio Substitusi Panas (thermal substitution rate) dari batu bara ke bahan bakar alternatif (limbah & sampah)	Meningkatkan rasio substitusi panas (TSR) batu bara dengan bahan bakar alternatif sebesar 15%.	%	5	15%						PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan										Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Itte-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024				
A.6.e.6.c		12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional	unit		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	kegiatan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.			TIDAK ADA PROGRAM										PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk	
A.6.d.1.		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		Program Pengelolaan Lingkungan	Jumlah biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	Juta rupiah	5	Tidak ada target - hanya mengikuti RKAP-	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.d.2.a.	Penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	8.4.1	Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP		Pemanfaatan bahan baku alternatif	Persentase penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaurulang	%	5	Tidak ada target	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.d.2.b.		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		Pemanfaatan sampah rumah tangga (MSW) untuk RDF/ Bahan Bakar alternatif	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Tonase	5	65.500	44.950	50.820	58.080	65.340	3.000.000	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
		11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya												PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
		11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola												PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.e.2.a			6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya		TIDAK ADA PROGRAM				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk	
A.6.e.2.b		15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati		TIDAK ADA PROGRAM				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.e.6.a	Kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi		Grievance mechanism	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan terhadap seluruh jumlah yang diterima	%	5	100	100	100	100	100		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.e.6.c		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001		Sustainable implementation of ISO management system	Jumlah sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	Jumlah	5	(sertifikat ISO 9001, 14001,50001, 45001, 17025)	(sertifikat ISO 9001, 14001,50001, 45001, 17025)	(sertifikat ISO9001, 14001,50001, 45001, 17025)	(sertifikat ISO9001, 14001,50001, 45001, 17025)	(sertifikat ISO9001, 14001,50001, 45001, 17025)		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru		GREEN PROPER	Tingkat PROPER yang dicapai pabrik semen		5	PROPER HIAJU semua pabrik semen (4ea)	4	4	4	4		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.f.1.a	Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan; (Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. (Indikator SDGs yang sesuai)		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan	produk	5	Tidak ada target	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
Aspek Sosial																	
Internal																	
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan		Program Jaminan Kesehatan Karyawan	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	5	100%	100%	100%	100%	100%		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta Jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan		Program Jaminan Kesehatan Karyawan	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%	5	100%	100%	100%	100%	100%		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3		Health & safety improvement program & RKAP Initiatives	Jumlah kecelakaan kerja	kejadian	5	12	12	12	12	12	3.675	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3		Health Monitoring & Industrial Hygiene Monitoring	Jumlah penyakit akibat kerja	kejadian	5	0	0	0	0	0	625	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.c.2.d.1.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Learning & Development	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan laki-laki dalam setahun	jam/tahun/karyawan	5	24	24	24	24	24	2.000	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.c.2.d.2.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Learning & Development	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan perempuan dalam setahun	jam/tahun/karyawan	5	24	24	24	24	24	500	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.c.2.d.3.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Learning & Development	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level entry dalam setahun	jam/tahun/karyawan	5	24	24	24	24	24	1.500	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.c.2.d.4.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Learning & Development	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level middle dalam setahun	jam/tahun/karyawan	5	24	24	24	24	24	600	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan										Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ItE-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024				
A.6.c.2.d.5.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Learning & Development	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level senior dalam setahun	jam/tahun/karyawan	5	24	24	24	24	24	400	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
Eksternal																	
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.		TIDAK ADA PROGRAM	Persentase UMKM yang mendapat bantuan yang naik kelas			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.f.2.a.1.a		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru		Produk telah mempunyai SNI	Persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan	%	5	100	100	100	100	100		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.f.2.a.2		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru		Product safety - Setiap produk semen dilengkapi dengan MSDS dan/atau peringatan keselamatan saat penggunaan di kemasan	Persentase produk dan/jasa yang memiliki label atau informasi barang dan/atau jasa	%	5	100	100	100	100	100		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.4.c.2		17.6.1. (a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular		Keanggotaan Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSd)	Jumlah kerjasama dalam rangka Sustainable Development dan/atau Sustainable Finance	kerjasama	5	1	1	1	1	1		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.c.3.a		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.		TIDAK ADA PROGRAM	Jumlah kegiatan yang menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar perusahaan	kegiatan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
						Pelaporan berkelanjutan	Membuat laporan berkelanjutan	%	5	100	100	100	100	100		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk	
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik		Grievance mechanism	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%	5	100	100	100	100	100		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.c.3.b.2.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik		Grievance mechanism	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan	5	N/A	30	N/A	N/A	N/A		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.f.4.a.	Kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik		Grievance mechanism	Persentase produk yang ditarik kembali dari pasar	%	5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5		PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
A.6.c.3.c	Kegiatan TJSL yang relevan dengan isu SDGs				Program pemberdayaan dan pelibatan masyarakat	Total penerima manfaat kumulatif sejak tahun 2019 (121,415 orang)	Jumlah orang	5	1 juta	500.000,00	650.000	750.000,00	900.000	sesuai RKAP Tahunan	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
						Program ini terdiri atas:									PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
		1.5.1*	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Program Tanggap Bencana dan kedaruratan (paket sembako/jaring pengaman sosial)	Total jumlah paket yang terdistribusikan	paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	436.000.000	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk	
		13.1.2*	13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030		Program pemulihan infrastruktur dan pemukiman paska bencana	Total jumlah semen dan material bangunan yang terdistribusikan	sak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50.000.000	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk	
		13.1.3*	13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional pengurangan bencana		Program Mitigasi Kebencanaan (desa siaga bencana)	Persentase desa tanggap bencana vs total desa ring 1	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	204.977.500	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk	
		2.1.1*	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).		Program Santunan Keagamaan (sembako, daging kurban dan santunan yatim)	Total jumlah paket dalam setahun	paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.023.825.000	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk	
		9.1.1*	9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.		Program peningkatan sarana dan prasarana ibadah	Total rumah ibadah yang terbantu	buah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	58.012.500	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk	
		4.1.1	4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.		Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Jumlah penerima manfaat program	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.485.800.000	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk	
		9.1.1*	9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.		Program peningkatan sarana dan prasarana umum (Jalan, PJU) di tingkat desa, kecamatan, kabupaten yang diinisiasi oleh masyarakat, pemerintah, TNI/Polri dan stakeholder lainnya.	Total nilai proyek yang dianggarkan	juta rupiah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.258	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk	
	11.1.1.(a)	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau		Program peningkatan kualitas perumahan (Plesterisasi, Elektrisasi, Jambanisasi, Bedah rumah-Rutilahu)	Jumlah penerima manfaat program	rumah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	318.726.200	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan										Target				Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Itte-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024				
		6.2.1*	6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.		Program air bersih dan sanitasi layak bagi warga di Ring 1 dan lainnya	Jumlah penerima manfaat program	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	182.930.000	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
		13.2.2.(a)	13.2.2.(a) Potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		Program penghijauan dan upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Total tanaman yang ditanam	buah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	141.742.500	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
		12.5.1.(a)	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.		Program peningkatan kesadaran terhadap lingkungan terkait Sampah (Bank sampah, pilah sampah, pengolahan sampah, 3R)	Jumlah total bank sampah dan total sampah yang dikelola dalam setahun	buah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	981.851.250	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
		8.3.1*	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin		Program peningkatan ekonomi berbasis kelompok UMKM (kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok berkebutuhan khusus, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak) meliputi dari proses sosialisasi, peningkatan kapasitas, pengorganisasian, pendampingan dan exit strategi	Jumlah penerima manfaat program	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.174.714.000	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
		8.3.1.(a)	8.3.1.(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan		Program peningkatan ekonomi berbasis Desa (Pokdarwis, Bumdes, Desawisata)	Jumlah penerima manfaat program	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.277.000.000	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
		3.8.1*	3.8.1* Cakupan pelayanan kesehatan esensial.		Program peningkatan kesehatan masyarakat melalui Posyandu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Pemeriksaan kesehatan gratis dan lain-lain	Jumlah penerima manfaat program	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	993.565.000	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
		4.1.2*	4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.		Program dukungan keberlangsungan pendidikan siswa kurang mampu/berprestasi	Jumlah penerima manfaat program	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.599.601.950	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
		4.c.1*	4.c.1* Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan		Program peningkatan kapasitas pendidik dan pelatihan khusus lainnya	Jumlah penerima manfaat program	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	698.500.000	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		
		17.17.1	17.17.1 Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).		Program kerjasama dengan stakeholder dan program peningkatan hubungan baik dengan stakeholder terkait PHBN, PHBI dan kegiatan yang bersifat lokal dan budaya	Jumlah penerima manfaat program	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	876.050.000	PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk		

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT. Astra International															
Pendidikan															
A.3.c.2.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	1	Program SMK, Politeknik, Balai Latihan Kerja, Training Non Gelar	Tingkat partisipasi pendidikan vokasi, pelatihan dan training	orang					3.852 siswa/mahasiswa mengikuti skill training (data akumulasi)			PT. Astra International
A.6.c.2.b.		4.1.2	Angka Partisipasi Sekolah seluruh jenjang	2	Beasiswa, Pembangunan/Penyediaan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah seluruh jenjang	%					Jumlah total beasiswa 267.479 Jumlah sekolah binaan 21.209 Jumlah kelas/sekolah direvitalisasi/renovasi 110			PT. Astra International
A.6.c.2.a.4		4.c.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	3	Pelatihan Guru & Penambahan Guru	Jumlah Guru memenuhi kualifikasi dan persentase guru memenuhi kualifikasi	orang dan %					2253 (Guru PAUD) 656 (Guru SMK Bisa) 1607 (Guru YPA-MDR)			PT. Astra International
Kesehatan															
A.3.c.1.a.		3.6.1	Angka kematian dan cedera fatal kecelakaan lalu lintas	1	Pencegahan Preventif dan Pertolongan Pertama	Penurunan Jumlah angka kecelakaan lalu lintas	%					34.000.000 (Masyarakat Terpapar IAABL) 590 Pelopor IAABL			PT. Astra International
A.3.c.1.b.		3.5.1a	Jumlah penyalahguna yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi	2	Pencegahan Preventif dan Rehabilitasi	Penurunan jumlah angka penyalahguna narkoba dan alkohol	%					1026 Agent AORTA			PT. Astra International
A.2.a.1.		3.4.1	Persentase merokok usia 10 -18 tahun	3	Pencegahan Preventif dan Rehabilitasi	Penurunan jumlah angka muda merokok	%					1026 Agent AORTA			PT. Astra International
			Tanpa Kelaparan												PT. Astra International
A.3.c.3.		2.2.1	Prevalensi Underweight termasuk kurang gizi kurus, pendek dibawah 5 tahun	4	Posyandu dan Pemberian Makanan Tambahan	Persentase penurunan prevalensi underweight	%					1006 Bayi 5 tahunkekurangan gizi diintervensi 22758 bayi 5 tahun terecord dalam posyandu binaan 1951 Posyandu Digital			PT. Astra International
			Ekonomi												PT. Astra International
A.6.c.2.a.6		8.3.1	Proporsi lapangan kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin	5	Desa Sejahtera Astra / UMKM Binaan	Lapangan kerja informal yang dibuka	lapangan kerja					16.093 lapangan kerja baru			PT. Astra International

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.3.c.2.i.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM ke Layanan Keuangan	6	Peningkatan Kualitas Layak Finansial UMKM Binaan	Jumlah UMKM yang mampu dan dapat mengakses layanan keuangan	UMKM					841 UMKM binaan memiliki kemampuan untuk akses ke layanan keuangan		PT. Astra International	
A.3.c.2.k.		8.9.1a	Jumlah wisatawan mancanegara	7	Desa Wisata	Jumlah wisatawan mancanegara	orang					473 orang (2021) dari 65 Desa Binaan		PT. Astra International	
A.3.c.2.l.		8.9.1b	Jumlah wisatawan domestik	8	Desa Wisata	Jumlah wisatawan domestik	orang					18.762 orang (65 Desa Binaan		PT. Astra International	
A.3.c.2.m.		8.9.1 c	Jumlah devisa sektor pariwisata	9	Desa Wisata	Jumlah devisa sektor pariwisata	orang					Rp. 2.207.000.000(Masa Pandemi) dari 65 Desa Wisata binaan		PT. Astra International	
			Mengurangi Kesenjangan											PT. Astra International	
A.3.c.2.o.			10.1.1b	Jumlah Desa Tertinggal	10	Desa Sejahtera	Jumlah Desa tertinggal yang dibantu	jumlah desa					Desa Sejahtera Astra 930 Desa (97 Merupakan Desa Tertinggal) Menurut Data Kemendes		PT. Astra International
A.3.c.2.p.			10.1.1c	Jumlah Desa Mandiri	11	Desa Sejahtera	Jumlah Desa Binaan naik level mandiri	jumlah desa					Desa Sejahtera Astra 930 Desa (97 Merupakan Desa Tertinggal, 560 Desa Maju dan 273 Desa Mandiri)		PT. Astra International
			Air Bersih & Sanitasi											PT. Astra International	
A.3.c.2.r.			6.1.1	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	12	Program Air Bersih	Kenaikain Persentase rumah tangga yang menerima manfaat air	jumlah orang					7 Desa di 4 Kecamatan Penerima Manfaat Panjang Pipa Air Bersih 17,19 km 7667 Penerima Manfaat Total Bantuan Rp. 24.821 M		PT. Astra International
			Produksi dan Konsumi Berkelanjutan											PT. Astra International	
A.3.c.2.t.		12.5.1a	Jumlah timbulan sampah terkelola 3R	13	Gerakan 3R	Jumlah sampah daur ulang	ton					105 Ton Manajemen Sampah Plastik 107 Bank Sampah Binaan 7098 Masyarakat berpartisipasi 3R		PT. Astra International	
		Adaptasi Perubahan Iklim											PT. Astra International		

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.3.c.2.u.		13.3.1	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, pendidikan guru dan asesmen siswa	14	Sekolah Adiwiyata, Kurikulum Adiwiyata	Jumlah masyarakat	orang				261 Sekolah Adiwiyata				PT. Astra International
A.3.c.2.v.		13.3.1a	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	15	Program Kampung Iklim, Sekolah Adiwiyata	Jumlah komunitas/ lembaga	lembaga				261 Sekolah Adiwiyata 26 Proklam (1 Lestari, 25 Utama) & 121 Calon Kampung Iklim KBA				PT. Astra International
		13.2.1	Terwujudnya penyelenggaraan Ekosistem Daratan	16	Inventarisir GRR	Jumlah penurunan GRG	%				55,9 ribu ton				PT. Astra International
Aspek Lingkungan Hidup															
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.	1	Pranaraksa, Penanaman Pohon	Jumlah situs keanekaragaman hayati	jumlah				33 Pranaraksa Center 212 jenis tanaman				PT. Astra International
		15.1.2a	Luasan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	2	Konservasi, Reboisasi, Menjaga Stok Karbon Tinggi	Jumlah titik dan luasan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	Titik dan persentase area				- Acent Singkil (3% lahan) stok karbon 12.791,5 Ton C - Siak (3%lahan) stok karbon 7.926 Ton C - Pelalawan (1%lahan) stok karbon 11.010 Ton C - Kumai (7%lahan) stok karbon 46.749 Ton C - Penajam (32% lahan) stok karbon 264.620 Ton C - Muara Wahau (10% lahan) stok karbon 143.682 Ton C - Sangkulirang Site (34% lahan) stok karbon				PT. Astra International
A.6.e.5.a.2		15.3.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	3	Penanaman Pohon	Jumlah lahan yang di revitalisasi	Ha				Jumlah Pohon yang ditanam 5.100.000 pohon luas area 160 Ha				PT. Astra International

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024			
Nama Pemangku Kepentingan: PT Pan Brothers Tbk																
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan																
A.6.c.2.a.1	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	1	Management Development program	Ratio BOD laki: perempuan = 2:2	100%	5	2:2	2:2	2:2	2:2	2:2	5.000.000	PT Pan Brothers Tbk	
					2		Ratio Senior Management laki: perempuan = 43:10	100%	5	30:25	40:15	38:17	35:20	33:22		PT Pan Brothers Tbk
					3		Ratio Midle Management laki: perempuan = 114:55	100%	5	90:80	110:60	105:65	100:70	95:75		PT Pan Brothers Tbk
					4		Ratio Junior Management laki: perempuan = 699:701	100%	5	725:725	700:700	705:705	710:710	720:720		PT Pan Brothers Tbk
					5		Ratio Staffs laki: perempuan = 535:882	100%	5	600:800	540:860	560:840	575:825	590:810		PT Pan Brothers Tbk
A.3.c.2.					6		Ratio Operator laki: perempuan = 9921:17544	100%	5	12000:15000	10000:17000	10500:16500	11000:16000	11500:15500		PT Pan Brothers Tbk
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	8	Penandatanganan Kode Etik Perusahaan untuk Anti Korupsi	Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan	5	150	20	25	30	35		PT Pan Brothers Tbk	
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	9	Pengawasan dan Pemeriksaan internal Audit	Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	5	100	100	100	100	100		PT Pan Brothers Tbk	
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	10	Seminar, Pelatihan dan sosialisasi program Anti Korupsi	Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	5	100	100	100	100	100		PT Pan Brothers Tbk	
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil	11	Keanggotaan Asosiasi Independen	Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi	5	10	10	10	10			PT Pan Brothers Tbk	
Aspek Ekonomi																
A.3.c.1.a.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	1	Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan	Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah),	Juta rupiah	5	11.600.000	10.360.000	10.670.000	10.990.000	11.300.000		PT Pan Brothers Tbk	
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	2	Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan	Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	Juta rupiah	5	32.000.000	6.162.000	5.237.000	4.450.000	3.780.000		PT Pan Brothers Tbk	
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	3	Laporan Penjualan Global	Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual	potong (Jutaan)	5	130	117	120	123	126		PT Pan Brothers Tbk	
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	4	Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan	Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)	Juta rupiah	5	16.000.000	10.920.000	12.000.000	13.200.000	14.500.000		PT Pan Brothers Tbk	
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	5	Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan	Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Juta rupiah	5	451.800.000	308.800.000	339.600.000	373.500.000	410.800.000		PT Pan Brothers Tbk	
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	6	Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan	Persentase kepemilikan saham (publik dan Individu)	%	5	77:23	77:23	77:23	77:23	77:23		PT Pan Brothers Tbk	
A.3.c.4.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	7	Laporan Penjualan Global	Cakupan wilayah operasional berdasarkan tingkat administrasi	Negara	5	100	80	85	90	95		PT Pan Brothers Tbk	
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	8	Laporan HRM MPP (Man Power Planning)	Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang	5	1.407	1157	1.218	1.281	1.344		PT Pan Brothers Tbk	
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	9	Laporan HRM MPP (Man Power Planning)	Jumlah karyawan perempuan level staf	orang	5	1.363	1.208	1.234	1.276	1.317		PT Pan Brothers Tbk	
A.6.c.2.a.6		8.7.1	Proportion and number of children aged 5–17 years engaged in child labour, by sex and age	10	Laporan HRM MPP (Man Power Planning)	Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang	5	0	0	0	0	0		PT Pan Brothers Tbk	
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	11	Laporan HRM MPP (Man Power Planning)	Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang	5	19617	17355	17847	18225	18706		PT Pan Brothers Tbk	
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	12	Laporan HRM MPP (Man Power Planning)	Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang	5	9225	8321	8623	8830	9046		PT Pan Brothers Tbk	
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	13	Laporan HRM MPP (Man Power Planning)	Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang	5	753	658	711	728	741		PT Pan Brothers Tbk	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.3.c.2.l.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	14	Laporan HRM MPP (Man Power Planning)	Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang	5	21175	19225	19741	20132	20643	PT Pan Brothers Tbk	
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	15	Laporan HRM MPP (Man Power Planning)	Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang	5	1881	1484	1580	1681	1780	PT Pan Brothers Tbk	
A.3.c.2.n.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	16	Laporan HRM MPP (Man Power Planning)	Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang	5	129	106	110	116	124	PT Pan Brothers Tbk	
A.3.c.2.o.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	17	Laporan HRM MPP (Man Power Planning)	Jumlah karyawan berpendidikan S3	orang	5	1	1	1	1	1	PT Pan Brothers Tbk	
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	18	Laporan HRM MPP (Man Power Planning)	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%	5	95	95	95	95	95	PT Pan Brothers Tbk	
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	19	Laporan HRM MPP (Man Power Planning)	Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%	5	5	5	5	5	5	PT Pan Brothers Tbk	
A.3.c.2.r.		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	20	Laporan HRM MPP (Man Power Planning)	Persentase karyawan berstatus pekerja musiman atau pihak ketiga	%	5	5	5	5	5	5	PT Pan Brothers Tbk	
A.3.c.2.s.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	21	Laporan HRM MPP (Man Power Planning)	Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	5	5	7	7	5	5	PT Pan Brothers Tbk	
A.3.c.2.t.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	22	Laporan HRM MPP (Man Power Planning)	Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	5	5	9	9	5	5	PT Pan Brothers Tbk	
A.3.c.2.u.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	23	Laporan HRM MPP (Man Power Planning)	Persentase karyawan laki-laki yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%	5	30	30	30	30	30	PT Pan Brothers Tbk	
A.3.c.2.v.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	24	Laporan HRM MPP (Man Power Planning)	Persentase karyawan perempuan yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%	5	70	70	70	70	70	PT Pan Brothers Tbk	
A.2.a.4.		Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	25	Laporan HRM MPP (Man Power Planning)	Persentase karyawan lokal terhadap seluruh karyawan	%	5	99	99	99	99	99	PT Pan Brothers Tbk
A.2.a.5.			9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	26	Laporan Procurement	Persentase bahan baku dari wilayah lokal yang dipergunakan terhadap total bahan baku	%	5	35	25	28	30	32	PT Pan Brothers Tbk
A.2.a.5.	9.3.1*		Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	27	Proyek Kantin dengan UMKM	Pada Tahun 2020 terdapat 23 UMKM .	UMKM	5	40	25	28	33	36	100.000	PT Pan Brothers Tbk
A.2.a.4. A.6.f.1.a	Produk ramah lingkungan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	28	Produk dengan Bahan Baku berkelanjutan	Sertifikasi antara lain dari : PFOA / PFOS Free, Biodegradable, RDS, BCI, GOTS, OCS, OEKO-TEX, IOS MAT 0010, Bluesign, PFC Free, CO, GRS (Global Recycling Standard), RCS (Recycled Claim Standard)	%	5	45	25	30	35	40	PT Pan Brothers Tbk	
				29	Pengembangan Produk dari Serat Organik Kapuk	Dimulainya proses ujicoba di pabrik Cikande / Ocean	ton	5	5	1	2	3	4	PT Pan Brothers Tbk	
				30	Pewarna Alami	Dimulainya proses Uji coba pencelupan di pabrik Sragen / ELHI	potong (Jutaan)	5	5	1	2	3	4	PT Pan Brothers Tbk	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024			
				31	Proyek Daur Ulang Kain Bekas	Kerjasama dengan pihak ketiga (Pilot Project Di Jawa Tengah)	ton	5	2.500	1.500	1.750	2.000	2.250	500.000	PT Pan Brothers Tbk	
Aspek Lingkungan Hidup																
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	1	Instalasi Panel Surya	Total bauran energi terbarukan	KWP	5	6.000	2.500	3.500	6.000	6.000		PT Pan Brothers Tbk	
A.6.d.3.a.1	Efisiensi Energi	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	2	Penggunaan Energi di seluruh pabrik dan kantor	Total konsumsi energi Listrik Solar dan Batubara	MJ	5	330.000	400.000	380.000	360.000	350.000		PT Pan Brothers Tbk	
A.6.d.3.a.2		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	3	Penggunaan Air di Seluruh pabrik dan kantor	Total konsumsi air	ML	5	1.400	1.200	1.250	1.300	1.350		PT Pan Brothers Tbk	
A.6.d.b.2		7.3.1*	Intensitas energi primer.	4	Instalasi Panel Surya di Seluruh pabrik dan kantor	Instalasi Tahun 2021 di 5 Pabrik, tahun 2024 di 4 Pabrik	KWP	5	6.000	2.500	3.500	6.000	6.000		PT Pan Brothers Tbk	
A.6.d.3.b.3.		6.4.1.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	5	Penampungan Air Hujan	Penambahan Sumber Air	ML	5	140	28	28	28	28		PT Pan Brothers Tbk	
A.2.a.4.		11.2.1.	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpecah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.	6		Persentase moda transportasi ramah lingkungan yang dipergunakan										PT Pan Brothers Tbk
A.6.e.5.a.1.		Pencegahan dan Pengendalian Polusi	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	7	Program daur Ulang dengan Pihak ketiga	Pengelolaan Limbah Tidak Berbahaya	Metrik Ton	5	1.550	1.200	1.300	1.400	1.500		PT Pan Brothers Tbk
A.6.e.5.a.2	6.3.1		Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	8	Penggunaan Water Treatment di pabrik Cikande dan Sragen	Penerapan Water Treatment di Cikande dan Sragen	Unit	5	2	2	2	2	2		PT Pan Brothers Tbk	
A.6.e.5.b	12.4.2.		Proporsi limbah berbahaya yang dikelola menurut jenis penanganannya	9												PT Pan Brothers Tbk
A.6.e.5.a.3.a.	12.4.2.(a)		Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	10	Program kerjasama dengan Pihak ketiga	Proporsi limbah berbahaya (b3) - padat yang diolah	Metrik Ton	5	13.500	12.500	12.750	13.000	13.250		PT Pan Brothers Tbk	
A.6.e.5.a.3.b.	12.4.2.(a)		Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	11	Program kerjasama dengan Pihak ketiga	Proporsi limbah berbahaya (b3) - cair yang diolah	Metrik Ton	5	3.300	3.200	3.225	3.250	3.275		PT Pan Brothers Tbk	
A.6.e.5.c.	12.4.2.(a)		Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	12	Program kerjasama dengan Pihak ketiga	Jumlah tumpahan limbah yang terjadi	Metrik Ton	5	16.800	15.700	15.975	16.250	16.525		PT Pan Brothers Tbk	
A.6.e.4.a.1.	9.4.1(a)		Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	13	Penurunan Emisi GRK di Seluruh Pabrik	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 1	tCO2	5	51.000	55.000	54.000	53.000	52.000		PT Pan Brothers Tbk	
A.6.e.6.c	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	14	Pendirian Green Office di Boyolali	Jumlah bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional	unit	5	1	1	1	1	1			PT Pan Brothers Tbk	
	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	15	Sertifiasi Perusahaan Garmen	Jumlah kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	Perusahaan	5	5	5	5	5	5			PT Pan Brothers Tbk	
	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	16	Sertifiasi Perusahaan Garmen			5	5	5	5	5	5			PT Pan Brothers Tbk	
A.6.d.1.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	17	Kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	Miliar rupiah	5	25	5	5	5	5			PT Pan Brothers Tbk	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.6.d.2.a.	Penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	8.4.1	Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP	18	Penggunaan material berkelanjutan	Persentase penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaurulang	%	5	50	25	30	35	40		PT Pan Brothers Tbk
A.6.e.6.c		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	19	Sertifikasi Perusahaan Garmen	Jumlah sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	Perusahaan	5	5	5	5	5	5		PT Pan Brothers Tbk
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru					5	5	5	5	5	5		PT Pan Brothers Tbk
A.6.f.1.a	Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan;	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	20	Pengembangan Produk dari Serat Organik Kapuk	Dimulainya proses ujicoba di pabrik Cikande / Ocean	ton	5	5	1	2	3	4		PT Pan Brothers Tbk
				21	Pewarna Alami	Dimulainya proses Uji coba pencelupan di pabrik Sragen / ELHI	potong (jutaan)	5	5	1	2	3	4		PT Pan Brothers Tbk
				22	Proyek Daur Ulang Kain Bekas	Kerjasama dengan pihak ketiga (Pilot Project Di Jawa Tengah)	ton	5	2.500	1.500	1.750	2.000	2.250	500.000	
Aspek Sosial															
Internal															
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	1	Pendaftaran BPJS untuk seluruh karyawan	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	5	100	100	100	100	100		PT Pan Brothers Tbk
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SISN Bidang Kesehatan	2	Pendaftaran BPJS untuk seluruh karyawan	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%	5	100	100	100	100	100		PT Pan Brothers Tbk
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	3	Penerapan K3 di seluruh Perusahaan	jumlah kecelakaan kerja	kejadian	5	0	150	100	50	25		PT Pan Brothers Tbk
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	4	Sosialisasi Program K3 di Seluruh Perusahaan	Jumlah penyakit akibat kerja	kejadian	5	0	0	0	0	0		PT Pan Brothers Tbk
A.6.c.2.d.1.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	5	Program Pelatihan dan Pendidikan	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan laki-laki dalam setahun .	Jam	5	8	24	8	16	24		PT Pan Brothers Tbk
A.6.c.2.d.2.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	6	Program Pelatihan dan Pendidikan	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan perempuan dalam setahun	jam/tahun/k aryawa	5	8	24	8	16	24		PT Pan Brothers Tbk
A.6.c.2.d.3.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	7	Program Pelatihan dan Pendidikan	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level entry dalam setahun	jam/tahun/k aryawa	5	72	24	48	72	72		PT Pan Brothers Tbk
A.6.c.2.d.4.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	8	Program Pelatihan dan Pendidikan	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level middle dalam setahun	jam/tahun/k aryawa	5	72	24	48	72	72		PT Pan Brothers Tbk
A.6.c.2.d.5.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	9	Program Pelatihan dan Pendidikan	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level senior dalam setahun	jam/tahun/k aryawa	5	72	24	48	72	72		PT Pan Brothers Tbk
Eksternal															
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	10	Proyek Kantin dengan UMKM	Persentase UMKM yang mendapat bantuan yang naik kelas	%	5	100	100	100	100	100		PT Pan Brothers Tbk

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.6.f.2.a.1.a	dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru	11	Sertifikasi ISO 14001: 2015 Sistem Manajemen Lingkungan yaitu PT Pancaprima Ekabrothers dan PT. PSS	Persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan	%	5	100	100	100	100		PT Pan Brothers Tbk	
A.6.c.3.a		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	12	Laporan Keberlanjutan Holding	Laporan Keberlanjutan 2020 di publikasikan	kegiatan	5	5	1	1	1	1	200	PT Pan Brothers Tbk
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Persentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%	5	0	0	0	0	0		PT Pan Brothers Tbk
A.6.c.3.b.2.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan	5	0	0	0	0	0		PT Pan Brothers Tbk
A.6.f.4.a.	Kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Persentase produk yang ditarik kembali dari pasar	%	5	0	0	0	0	0		PT Pan Brothers Tbk
				13	Program PAN BERSAHABAT	Distribusi Vitamin dan susu kepada masyarakat dan karyawan	kegiatan	5	15	3	3	3	3	500.000	PT Pan Brothers Tbk
				14	Donasi Masker dan APD (Alat Pelindung Diri)	Distribusi masker dan APD kepada masyarakat dan Karyawan	Pcs	5	1.000.000	500.000	500.000	0	0	100.000	PT Pan Brothers Tbk
				15	Program Air Bersih bekerjasama dengan Pihak ketiga	Pembangunan menara air bersih menampung 1000 lt per hari	Unit	5	3	1	2	0	0	150.000	PT Pan Brothers Tbk
				16	Program Donor darah	Karyawan terlibat dalam donor	Unit	5	20	4	4	4	4		PT Pan Brothers Tbk
Nama Pemangku Kepentingan: PT Berlina															
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.6.c.2.a.2		8.5.1	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities	1	Standar gaji sesuai jenis pekerjaan tanpa memandang gender	Ratio gaji laki: perempuan = 1:1	%	4	100%						PT Berlina
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	2	Sosialisasi budaya perusahaan yaitu I4C (Integrity, Communication, Collaboration, Customer Focus, Continuous Improvement)	Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur yang mendukung tindakan anti korupsi di perusahaan	kegiatan	4	4						PT Berlina
A.3.g.3		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3	Penjelasan Anti-Corruption Policy dalam Conduct Perusahaan yang disampaikan dalam Induction Training	Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	4	100%						
Aspek Ekonomi															
A.3.c.2.p.	Skala usaha LUK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	1	Optimasi tenaga kerja terhadap kebutuhan produksi	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%	4	50%						PT Berlina
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	2		Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%	4	30%						PT Berlina
A.3.c.2.r.		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	3		Persentase karyawan berstatus pekerja musiman atau pihak ketiga	%	4	20%						PT Berlina
A.2.a.4.	Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	4	Pedulih masyarakat	Persentase karyawan lokal terhadap seluruh karyawan	%	4	60%						PT Berlina
Aspek Lingkungan Hidup															
A.6.d.3.a.1		7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	1	Hemat energi	Total konsumsi energi	kWh/kg	4	3						PT Berlina

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana			
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	2021			2022	2023	2024
A.6.d.3.a.2	Efisiensi Energi	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	2	Hemat sumber daya alam	Total konsumsi air	liter/kg	4	5					PT Berlina	
A.6.e.5.a.3.b.	Pencegahan dan Pengendalian Polusi	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	4	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga yang tersertifikasi	Proporsi limbah berbahaya (b3) - cair yang diolah	drum	4	128					PT Berlina	
A.6.e.4.b	Adaptasi Perubahan Iklim	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	5	Pelatihan Risiko Bencana	Jumlah kegiatan pelatihan pencegahan risikobencana	kegiatan per tahun	4	3					PT Berlina	
A.6.d.2.b		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	6	Optimasi pemanfaatan hasil samping produksi dengan daur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	%	4	25%					PT Berlina	
A.6.d.2.b		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	7	Anak usaha yang mengelola post consumer recycle plastic	Peningkatan tonase produksi	%	4	25%					PT Berlina	
A.6.e.6.c		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	8	Sertifikasi ISO 14001 pada masing-masing entitas Perseroan	Jumlah sertifikasi	Sertifikat	4	5					PT Berlina	
Aspek Sosial Internal															
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	1	Compliance terhadap pemenuhan hak karyawan	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	4	100%					PT Berlina	
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan	2		Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%	4	100%					PT Berlina	
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	3	Zero Accident	Jumlah kecelakaan kerja	%	4	0					PT Berlina	
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	4	1. Peraturan penggunaan APD sesuai dengan risiko pekerjaan 2. Pengukuran berkala terhadap parameter penyebab risiko kerja (intensitas pencahayaan, kebisingan, temperatur, dll) di area kerja 3. Fasilitas susu untuk karyawan dengan risiko paparan 4. Program pemberian vitamin kepada semua karyawan	Jumlah penyakit akibat kerja	%	4	0					PT Berlina	
A.6.c.2.d.3.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	5	Pelatihan dan Pengembangan sesuai kebutuhan kompetensi karyawan	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan dalam setahun	jam/tahun/karyawan	4	8					PT Berlina	
Nama Pemangku Kepentingan: PT SMART Tbk															
A.6.e.4.a.1.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	10	1) Mengembangkan fasilitas methane capture di 7 lokasi operasi untuk menghasilkan energi alternatif 2) Membuat fasilitas composting yang mengurangi emisi GRK 3) Pengelolaan air limbah dari pengolahan tandan buah segar (TBS) atau sering disebut pengolahan Palm Oil Mill Effluent (POME) 4) Manajemen dan monitoring penggunaan pupuk kimia dan menggantikannya dengan coated urea fertiliser	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 1	tCO2eq			2.046.551	2.094.250	2.182.501	2.182.501	2.182.501	PT SMART Tbk
A.6.e.4.a.4.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	11		Jumlah tensitas emisi	tCO2eq/CPO Produced			0,84	0,91	0,99	0,99	0,99	PT SMART Tbk
		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	12		Jumlah kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang	kegiatan			37	37	37	37	37	PT SMART Tbk

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.6.d.1.		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	13		berwawasan lingkungan lainnya				34	35	35	35	35	PT SMART Tbk
		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	14		Jumlah biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	Juta rupiah				28 Milyar	28 Milyar	28 Milyar	28 Milyar	28 Milyar
A.6.d.2.b.		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	15		Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	tonnes			3.757	2.821	2.495	2.495	2.495	PT SMART Tbk
A.6.e.6.c	Kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak terhadap Lingkungan	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	16		Jumlah sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	sertifikat			17	17	17	17	17	PT SMART Tbk
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru	17							35	35	35	35	35
A.6.f.1.a	Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan;	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	18		Jumlah inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan	produk			2	2	2	2	2	PT SMART Tbk
Aspek Sosial Internal															
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	1		Jumlah kecelakaan kerja	kejadian				242	175	175	175	PT SMART Tbk
A.6.c.2.d.2.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	2		Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan perempuan dalam setahun	jam/tahun/karyawan			5	5	3	3	3	PT SMART Tbk
A.6.c.2.d.3.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	3		Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level entry dalam setahun	jam/tahun/karyawan			6	6	1	1	1	PT SMART Tbk
A.6.c.2.d.4.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	4		Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level middle dalam setahun	jam/tahun/karyawan			7	7	5	5	5	PT SMART Tbk
A.6.c.2.d.5.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	5		Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level senior dalam setahun	jam/tahun/karyawan			6	6	3	3	3	PT SMART Tbk
Eksternal															
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik	6		Persentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%			100%	100%	100%	100%	100%	PT SMART Tbk
A.6.c.3.b.2.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik	7		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan			16	18	16	16	16	16
Nama Pemangku Kepentingan: PT Unilever															
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.6.c.2.a.1		5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	1		Ratio BOD laki: perempuan = 60:40	%					40%			PT Unilever
A.3.c.2.				2	Head hunting khusus manager perempuan	Ratio Manager perempuan: laki = 42:58	%					42%			PT Unilever
A.6.c.2.a.2		8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities	3	Bisnis yang mendorong inklusifitas, mendukung orang - dengan kebutuhan khusus (disabilitas)	Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1	%								PT Unilever

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024			
A.6.c.2.b.	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja	4	Standar upah yang memperhatikan ketentuan Upah - Minimum Regional	Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	%				1. 291% (Kantor Pusat) 2. 276% (Pabrik Cikarang Jawa Barat) 3. 291% (Pabrik Rungkut Jawa Timur)				PT Unilever	
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	5	Penerapan kebijakan perilaku anti korupsi, sepanjang tahun 2020 tidak ada insiden korupsi	Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan				151 Business Integrity Offline Trainings				PT Unilever	
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	6		Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%				100%				PT Unilever	
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	7		Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%					84%				PT Unilever
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil	8	Keanggotaan pada Asosiasi	Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi				14				PT Unilever	
Aspek Ekonomi																
A.3.c.1.a.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	1	Skala Perusahaan	Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah),	Rupiah triliun				20,5				PT Unilever	
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	2	Skala Perusahaan	Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	Rupiah triliun					15,6				PT Unilever
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	3	Skala Perusahaan	Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual	Rupiah triliun					1. Home and Personal Care (30) 2. Food and Refreshment (13)				PT Unilever
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	4	Kinerja Ekonomi	Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)	Rupiah triliun					42,97				PT Unilever
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	5	Skala Perusahaan	Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Rupiah triliun					7,2				PT Unilever
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	6	Pemegang Saham	Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)	% (lembar saham)					1. Unilever Indonesia Holding B.V.: 32.424.387.500 lembar saham 2. Masyarakat: 5.725.612.500 lembar saham				PT Unilever
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	7	Rekrutmen dan Retensi Karyawan	Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang					3363				PT Unilever
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	8	Komparasi Perempuan (2020) di Setiap Tingkatan	Jumlah karyawan perempuan level staf	orang					367				PT Unilever
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	9	Rekrutmen dan Retensi Karyawan	Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang					1538				PT Unilever
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	10	Rekrutmen dan Retensi Karyawan	Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang					3528				PT Unilever
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	11	Rekrutmen dan Retensi Karyawan	Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang					156				PT Unilever
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	12	Rekrutmen dan Retensi Karyawan	Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang					3531				PT Unilever

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	13	Rekrutmen dan Retensi Karyawan	Jumlah karyawan berpendidikanS1	orang			1656			PT Unilever		
A.3.c.2.n.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	14	Rekrutmen dan Retensi Karyawan	Jumlah karyawan berpendidikanS2	orang			35 (total dengan S3)			PT Unilever		
A.3.c.2.o.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	15	Rekrutmen dan Retensi Karyawan	Jumlah karyawan berpendidikanS3	orang			35 (total dengan S2)			PT Unilever		
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	16	Rekrutmen dan Retensi Karyawan	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%			94%			PT Unilever		
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	17	Rekrutmen dan Retensi Karyawan	Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%			6%			PT Unilever		
A.3.c.2.s.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	18	Rekrutmen dan Retensi Karyawan	Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%			3%			PT Unilever		
A.3.c.2.t.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	19	Rekrutmen dan Retensi Karyawan	Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%			3%			PT Unilever		
A.3.c.2.u.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	20	Keberagaman Gender	Persentase karyawan laki-laki yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%			68%			PT Unilever		
A.3.c.2.v.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	21	Keberagaman Gender	Persentase karyawan perempuan yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%			32%			PT Unilever		
A.2.a.4. A.6.f.1.a		Produk ramah lingkungan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	22	Produk yang bisa dikaitkan dengan ramah lingkungan	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	produk					1. Bango (100% bahan plastik PET daur ulang) 2. Love and Beauty Planet (100% plastik daur ulang) 3. Rinso, Sunlight, Molto (botol kemasan dapat didaur ulang dan terbuat dari material plastik daur ulang) 4. Pepsodent (produk sikat gigi terbuat dari bambu)		PT Unilever
Aspek Lingkungan Hidup															
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	1	Inisiatif mitigasi perubahan iklim melalui pemakaian energi terbarukan seperti panel surya untuk pemanas, penggunaan energi biomassa yang berasal dari cangkang sawit, pengolahan sampah khususnya plastik diproses menjadi material bahan bakar alternatif pengganti batu bara atau Refuse Derived Fuel (RDF)	Total bauran energi terbarukan (penghematan)	GJ					1. Energi surya (6,7 GJ) 2. Energi biomassa (280.013 GJ)		PT Unilever	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana			
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	2021			2022	2023	2024
A.6.d.b.2	Efisiensi Energi	7.3.1*	Intensitas energi primer.	2	Penurunan intensitas energi sebesar 7,24% dibanding - tahun sebelumnya atau sebesar 37% dari tahun dasar (2008)	Intensitas efisiensi energi yang dipergunakan	GJ/ton					0,8		PT Unilever	
A.6.d.3.b.3.		6.4.1.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	3	Penurunan intensitas air sebesar 33% dari tahun dasar (2008)	Efisiensi penggunaan air	m ³ /ton					1,21		PT Unilever	
A.6.e.5.a.1.	Pencegahan dan Pengendalian Polusi	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	4	Jumlah sampah plastik yang berhasil dibantu dikumpulkan dan diproses	Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis	ton					16402		PT Unilever	
A.6.e.5.a.2		6.3.1.	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	5		Proporsi limbah air yang dikelola	m ³					128986,07		PT Unilever	
	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	6	Program "Mendukung Aceh Tamiang" termasuk di dalamnya perlindungan kawasan konservasi di kawasan Ekosistem Leuser, melestarikan 100.000 hektar hutan dengan high conservation value (HCV)/ high carbon stock (HCS)							100000		PT Unilever	
A.6.e.3.b.3		15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi.	7	Turut melindungi keanekaragaman hayati di Seruyan dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Melindungi dan memulihkan habitat dan koridor ekologi yang penting bagi satwa liar seperti orangutan, bekantan, owa, beruang madu serta keanekaragaman hayati lainnya yang terdapat di Taman Nasional Tanjung Puting	Jumlah kegiatan konservasi keanekaragaman hayati darat untuk satwa langka	kegiatan						1. Turut melindungi keanekaragaman hayati di Seruyan dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 2. Melindungi dan memulihkan habitat dan koridor ekologi yang penting bagi satwa liar seperti orangutan, bekantan, owa, beruang madu serta keanekaragaman hayati lainnya yang terdapat di Taman Nasional Tanjung Puting		PT Unilever
A.6.e.4.a.4.	Adaptasi Perubahan Iklim	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	8		Jumlah tensitas emisi	kg/ton					20,595		PT Unilever	
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	9										1. Pabrik Cikarang (6 pabrik) 2. Pabrik Rungkut (2 pabrik)	
A.6.d.2.a.	Penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	8.4.1	Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP	10	Secara global bahan baku yang berkelanjutan	Persentase penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	%					67%		PT Unilever	
A.6.d.2.b.		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	11	Total limbah yang didaur ulang 26.640.552 kg di tahun - 2020	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	kg					26640552		PT Unilever	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.6.e.6.c	Kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	12	Sertifikasi	Jumlah sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	sertifikat					1. Pabrik Cikarang (6 pabrik) 2. Pabrik Rungkut (2 pabrik)		PT Unilever	
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru	13						Tercapai			PT Unilever		
A.6.f.1.a	Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan;	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	14		Jumlah inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan	produk					Tersedia		PT Unilever	
Aspek Sosial															
Internal															
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	1	Zero Serious HSE Incident	Jumlah kecelakaan kerja	kejadian					0		PT Unilever	
A.6.c.2.d.1.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	2	Pelatihan dan Pengembangan Karyawan	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan laki-laki dalam setahun	jam/tahun/karyawan					3,18		PT Unilever	
A.6.c.2.d.2.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	3	Pelatihan dan Pengembangan Karyawan	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan perempuan dalam setahun	jam/tahun/karyawan					21,72		PT Unilever	
Eksternal															
A.6.f.2.a.1.a	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru	4		Persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan						Tersedia		PT Unilever	
A.6.f.2.a.2		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru	5	Informasi Label	Persentase produk dan/jasa yang memiliki label atau informasi barang dan/atau jasa	%					100%		PT Unilever	
A.4.c.2		17.6.1. (a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	6		Jumlah kerjasama dalam rangka Sustainable Development dan/atau Sustainable Finance	kerjasama					lebih dari 20		PT Unilever	
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik	7	Kepuasan Konsumen	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%					100%		PT Unilever	
A.6.c.3.b.2.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik	8	Kepuasan Konsumen	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan					1280		PT Unilever	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT SEMEN INDONESIA															
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.6.c.2.a.1	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	1	Mempromosikan praktik non-bias di semua inisiatif ketenagakerjaan	Persentase pemimpin wanita	%	10	Target 2024 dan 2030: 15%		15	15	15	opex : N/A	PT SEMEN INDONESIA
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	2	Memenuhi pernyataan kepatuhan Kode Etik tahunan	Persentase karyawan yang menandatangani Kode Etik (CoC)	%	4	100% ditahun 2024	100%	100%	100%	100%	Opex: Rp35 juta untuk terjemahan dan buku, Rp25 juta per tahun untuk maintenance aplikasi SPKE (Terdapat maintenance Rp75 juta untuk risk)	PT SEMEN INDONESIA
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3	Mempertahankan sertifikasi ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Suap) di tingkat Holding	Sertifikasi ISO 37001	dipertahankan	10	mempertahankan sertifikasi sampai tahun 2030	dipertahankan	dipertahankan	dipertahankan	dipertahankan	Opex: Rp75 juta untuk sertifikasi (3 tahun sekali) dan Rp60 juta untuk audit surveillance	PT SEMEN INDONESIA
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	4	Melaporkan kasus gratifikasi dan laporan harta kekayaan kepada KPK saat diperlukan	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	%	4	100% di tahun 2024	100%	100%	100%	100%	Opex : sesuai RKAP	PT SEMEN INDONESIA
Aspek Ekonomi															
A.2.a.4.	Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis	12.7.1	Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan	1	Memperkuat prosedur pengadaan untuk memasukkan praktik Pengadaan berkelanjutan yang berisi minimal, namun tidak terbatas pada Anti Bribery Corruption (ABC) dan Supplier Code of Conduct (CoC)	Tingkat kepatuhan vendor aktif terhadap Supplier Code of Conduct	%		100% (dicapai di tahun 2022)		100%	100%	100%	opex ; N/A	PT SEMEN INDONESIA
A.2.a.5.		8.4.2	Konsumsi material domestik	2	Pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait TKDN dalam proses pengadaan barang dan jasa	Memastikan target tercapai untuk inisiatif ini	%	2	Peningkatan jumlah produk yang memiliki sertifikat dan nilai TKDN >_ 25%	terimplementasikan	terimplementasikan	terimplementasikan	terimplementasikan	Opex Rp. 2,5 M (untuk aktivitas sourcing)	PT SEMEN INDONESIA
A.2.a.4. A.6.f.1.a	Produk ramah lingkungan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	3	Pemenuhan atribut produk ramah lingkungan	sertifikasi produk	juml produk	4	semua produk PCC dari semua pabrik tersertifikasi Green Label Product dengan predikat Gold	produk tersertifikasi	produk tersertifikasi	produk tersertifikasi	produk tersertifikasi	opex Rp. 32,5 jt per brand per pabrik	PT SEMEN INDONESIA
Aspek Lingkungan Hidup															
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	1	Meningkatkan jumlah limbah yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif dengan memasang peralatan yang dibutuhkan	Thermal Substitution Rate (TSR)	%	10	10.07% (2,96% baseline 2019)	4,04%	4,38%	5,08%	5,57%	capex : Rp. 672 M (2021 - 2030)	PT SEMEN INDONESIA
A.6.d.3.b.2		Efisiensi Energi	7.3.1*	Intensitas energi primer.	2	Menerapkan Smart Plant melalui teknologi otomasi dan machine learning	Implementasi plant optimizer	unit pabrik	2	plan optimizer terinstalasi pada seluruh pabrik		1	1	1	capex : Rp. 900 juta tiap cement mill
	7.3.1*		Intensitas energi primer.	3	Melaksanakan program optimasi energi untuk setiap pabrik semen (energi termal dan listrik)	Penurunan Specific Thermal Energy Consumption (STEC) per kg terak	kcal/kg terak	4	830 (856 baseline 2019)	853	850	847	844	opex : Rp. & 5 M/tahun (biaya maintenance) dan Rp. 2,4 M untuk biaya pengukuran proximate dan ultimate analysis batu bara	PT SEMEN INDONESIA
A.6.d.3.b.3.		6.4.1.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	4	Menerapkan Directive Pengelolaan Air di semua pabrik semen	Tersusunnya directive Pengelolaan Air	unit pabrik	3	Directive Pengelolaan Air tersusun dan terimplementasikan	proses penyusunan	proses penyusunan	Penerapan directive di semua pabrik semen	Memantau penerapan directive	Opex : N/A	PT SEMEN INDONESIA

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.6.e.3.b.1	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.1.2.	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.	5	Menetapkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati untuk tambang/tambang pada area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi	Implementasi BMP pada quarry dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	%	2	100% quarry dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi sudah mengimplementasikan BMP pada tahun 2030	penyusunan BMP	penyusunan BMP	penyusunan BMP	penyusunan BMP	Capex: Rp5 miliar (perkiraan untuk assessment dan penyusunan BMP Opco)	PT SEMEN INDONESIA
A.6.e.4.a.2.	Adaptasi Perubahan Iklim	9.4.1	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	6	Meningkatkan proporsi produk semen dengan emisi CO2 rendah	Peningkatan proporsi semen non OPC curah	%	4	> 35% (baseline 2019 : < 20%)	>30%	>30%	>35%	>35%	opex : lk 0,5 - 0,6% dari revenue bruto	PT SEMEN INDONESIA
Aspek Sosial															
Internal															
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	1	Memastikan pelaksanaan sistem manajemen K3 dan audit kinerja	Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)	%	10	0,33	0,81	0,77	0,73	0,69	opex : Rp.50.000.000/audit	PT SEMEN INDONESIA
Eksternal															
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik	2	Melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Score IKM	%	10	75% (baseline 2019 : 77%)	76,6%	76,2%	75,8%	75,4%	opex : base on RKAP	PT SEMEN INDONESIA
Nama Pemangku Kepentingan: PT. PLN															
Aspek Lingkungan Hidup															
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.		Peningkatan produksi listrik dari pembangkit EBT	Produksi PLTP	TWh			15,6	16,85	17,66	19,16	*termasuk dalam biaya pengembangan	PT. PLN
						Produksi PLTA	TWh			19,4	18,88	18,57	20,44		PT. PLN
						Produksi PLTB+PLTS	TWh			0,599	2,905	4,2616	6,388		PT. PLN
A.6.d.b.2	Efisiensi Energi	7.b.1	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan di dalam watt per kapita		Penambahan kapasitas pembangkit EBT	Kapasitas total pembangkit E	MW	#REF!	8.008	8.760	9.408	11.434	90 triliun		PT. PLN
						Total kapasitas PLTP		3018	2443	2579	2687	2877			PT. PLN
						Total kapasitas PLTA		5465	4793	5193	5246	5378			PT. PLN
						Total kapasitas PLTB+PLTS		3194	211	282	615	2041			PT. PLN
A.6.d.3.a.1	Efisiensi Energi	7.1.1.	Rasio Elektrifikasi		Penambahan kapasitas transmisi	Panjang transmisi total	kms	89.230	60.564	68.255	75.545	84.915	170 triliun		PT. PLN
					Penambahan kapasitas pembangkitan	Kapasitas pembangkit terpasang	GW	84,3	63,3	72,1	76,5	81,5	430 triliun (PLN dan IPP)		PT. PLN
					Penambahan jumlah pelanggan	Jumlah pelanggan	Juta pelanggan	90	79	82	84	87	-		PT. PLN
		7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita		Peningkatan penjualan listrik	Penjualan tenaga listrik	TWh	295	242	253	266	280	-		PT. PLN
						Pembangunan SPKLU	Jumlah SPKLU		168	235	580	1273	2,1 triliun		PT. PLN
					Program intensifikasi konsumsi listrik	Konsumsi listrik per kapita (hanya PLN, tidak termasuk non PLN)	kWh/kapita		955	1072	1115	1157	-		PT. PLN

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Indah Prakarsa Sentosa Tbk															
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		pelaksanaan seminar team building, workshop tentang money laundry, fraud dll	Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan			4 kegiatan	5 kegiatan di HO dan 2 kegiatan di kantor Cabang	masing - masing 5 kegiatan di kantor HO dan Cabang	masing - masing 6 kegiatan di HO dan Kantor Cabang	untuk per acara di sediakan biaya perkiraan 650 - 800 ribu untuk biaya workshop yang diadakan oleh internal kantor, apabila mengundang pembicara diperkirakan sekitar 5-6 jt per acara	PT Indah Prakarsa Sentosa Tbk
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		workshop yang diselenggarakan oleh internal maupun external	Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	untuk external sekitar 2,5 jt tp apabila yang melaksanakan perusahaan dengan mengundang/berkerjasama dengan pihak eksternal maka sekitar 4 - 5 jt	PT Indah Prakarsa Sentosa Tbk
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		workshop yang diselenggarakan oleh internal maupun external	Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	untuk external sekitar 2,5 jt tp apabila yang melaksanakan perusahaan dengan mengundang/berkerjasama dengan pihak eksternal maka sekitar 4 - 5 jt	PT Indah Prakarsa Sentosa Tbk
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil			Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi								PT Indah Prakarsa Sentosa Tbk
					Pelatihan dan pengembangan team building yang dilaksanakan secara internal dan pelatihan K3 bagi bagian operasional	menambah wawasan bagi karyawan menjadi tim yang solid dan memberikan pemahaman bagi karyawan di bagian operasional mengenai K3 dalam melaksanakan kegiatan operasional	kegiatan			1 - 2 kegiatan	rutin 2 kegiatan	rutin 2 kegiatan	rutin 23kegiatan		PT Indah Prakarsa Sentosa Tbk
Aspek Sosial Eksternal															
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik		angket/survei kepuasan pelanggan/konsumen	Persentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%	berlanjut			100%	100%	100%		PT Indah Prakarsa Sentosa Tbk
A.6.c.3.b.2.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik		angket/survei kepuasan pelanggan/konsumen	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan	berlanjut			100%	100%	100%	100%	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
		3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun		memberikan penyuluhan tentang kesehatan dan berolahraga kepada anak - anak dan para remaja. Mmemberikan sumbangan alat - alat kesehatan, alat - alat serta fasilitas yang menunjang kegiatan berolahraga anak - anak	masyarakat dapat mulai sadar dalam hal hidup sehat, dan anak - anak yang mengalami keterbatasan biaya dapat lebih sadar, dan semakin menyalurkan minat mereka di bidang olahraga yang didukung oleh fasilitas yang lebih memadai		berlanjut		anak - anak dan remaja panti asuhan	anak - anak dan remaja panti asuhan	anak - anak dan remaja panti asuhan	anak - anak dan remaja panti asuhan	sekitar kurang lebih per setiap kunjungan 5-10 jt	PT Indah Prakarsa Sentosa Tbk
		12.8.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup		memberikan seminar internal tentang lingkungan dan dampak dari globalisasi	meningkatkan kesadaran karyawan dan dapat menerapkan kedalam kehidupan sehari - hari serta dapat memberikan dampak baik bagi keluarganya	karyawan	berlanjut	100%	100%	100%	100%	-	PT Indah Prakarsa Sentosa Tbk	
					memberikan pembekalan kepada karyawan spbu untuk menawarkan kepada masyarakat yang hendak mengisi BBM untuk memilih bahan bakar yang lebih ramah lingkungan	meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih produk bbm	konsumen spbu	berlanjut	100%	100%	100%	100%	-	PT Indah Prakarsa Sentosa Tbk	
Nama Pemangku Kepentingan: PT Vale															
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.6.c.2.a.2		8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities	3		Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1	%	5	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1		PT Vale
A.6.c.2.b.		8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja			Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	%	5	108:100	108:100	108:100	108:100	108:100		PT Vale
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Sosialisasi dan pelatihan anti korupsi untuk karyawan, kontraktor dan pemangku kepentingan lain	Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan	5	1	1	1	1	1		PT Vale
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	5	100	100	100	100	100		PT Vale
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	5	100	100	100	100	100		PT Vale

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Bank Capital Indonesia															
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.3.g.2.	Komunikasi dan Pelatihan Anti Korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Anti Suap	Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi: ISO 37001-2016 Manajemen Anti Suap	kegiatan (jumlah peserta)	5	100%	50%	80%	90%	95%	Belum di tetapkan	PT Bank Capital Indonesia
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Anti Suap	Persentase karyawan executive dan unit terkait (Marketing & Front Office Cabang, GA, Akunting, yang mengikuti pelatihan anti korupsi: ISO 37001-2016 Manajemen Anti Suap	kegiatan (jumlah peserta)	5	100%	50%	80%	90%	95%	Belum di tetapkan	PT Bank Capital Indonesia
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Indeks aspek Kebebasan sipil		Keanggotaan Asosiasi terkait Tata Kelola	Jumlah keanggotaan pada asosiasi (Indonesia Corporate Secretary Association) untuk memperoleh sosialisasi dan update mengenai tata kelola dan green economy/ ekonomi keberlanjutan)	jumlah membership (orang)	5	2	1	2	2	2	Belum di tetapkan	PT Bank Capital Indonesia
Nama Pemangku Kepentingan: PT. UOB Kay Hian Sekuritas															
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.6.c.2.a.1	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	1		Ratio BOD laki: perempuan = 3:1	%	5	2:1	N/A	N/A	N/A	N/A		PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.c.2.				2	Head hunting khusus manager perempuan	Ratio Manager perempuan: laki	%	5	2:1	N/A	N/A	N/A	N/A		PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.6.c.2.a.2		8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities	3		Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1	%	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.6.c.2.b.		8.5.1.*	Upah rata-rata per jam kerja			Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	%	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.6.c.2.a.3		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.			Jumlah pegawai laki-laki yang mengambil cuti parental/hamil	orang	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.6.c.2.a.4		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.			Jumlah pegawai perempuan yang mengambil cuti parental/hamil	orang	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	5	N/A	100%	N/A	N/A	N/A		PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PT. UOB Kay Hian Sekuritas

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil			Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi	5	N/A	2	N/A	N/A	N/A		PT. UOB Kay Hian Sekuritas
Aspek Ekonomi															
A.3.c.1.a.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah).	Juta rupiah	5	3.754.645	871.122	914.678	960.412	1.008.433		PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	Juta rupiah	5	2.378.292	551.792	579.382	608.351	638.768		PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual		5	450.408	104.500	109.725	115.211	120.972		PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)	Juta rupiah	5	451.546	104.764	110.002	115.502	121.277		PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Juta rupiah	5	70.445	16.344	17.161	18.019	18.920		PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)	%	5	N/A	N/A	N/A	N/A			PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.c.4.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Cakupan wilayah operasional berdasarkan tingkat administrasi	Provinsi kab/kota	5	7	N/A	N/A	N/A			PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang	5	19	N/A	N/A	N/A			PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan perempuan level staf	orang	5	87	N/A	N/A	N/A			PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.6.c.2.a.6		8.7.1	Proportion and number of children aged 5-17 years engaged in child labour, by sex and age			Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang	5	11	N/A	N/A	N/A			PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang	5	21	N/A	N/A	N/A			PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang	5	87	N/A	N/A	N/A			PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang	5	9	N/A	N/A	N/A			PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang	5	0	N/A	N/A	N/A			PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang	5	99%	N/A	N/A	N/A			PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.c.2.n.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang	5	0,10%	N/A	N/A	N/A			PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.c.2.o.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S3	orang	5	0	N/A	N/A	N/A			PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%	5	6,80%	N/A	N/A	N/A			PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%	5	5,12%	N/A	N/A	N/A			PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.c.2.r.		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin			Persentase karyawan berstatus pekerja musiman atau pihak ketiga	%	5	7,69%	N/A	N/A	N/A			PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.3.c.2.s.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	5	4,20%	N/A	N/A	N/A			PT. UOB Kay Hian Sekuritas	
A.3.c.2.t.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	5	100%	N/A	N/A	N/A			PT. UOB Kay Hian Sekuritas	
Aspek Sosial Internal															

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana			
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	2021			2022	2023	2024
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	5	100%	100%	100%	100%	100%	PT. UOB Kay Hian Sekuritas	
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah kecelakaan kerja	kejadian	5	0	0	0	0	0	PT. UOB Kay Hian Sekuritas	
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah penyakit akibat kerja	kejadian	5	0	0	0	0	0	0	PT. UOB Kay Hian Sekuritas
Eksternal															
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%	5	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	PT. UOB Kay Hian Sekuritas	
A.6.c.3.b.2.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan	5	2	0	0	0	0	0	PT. UOB Kay Hian Sekuritas
A.6.f.4.a.	Kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Persentase produk yang ditarik kembali dari pasar	%	5	99,995%	99,995%	99,995%	99,995%	99,995%	PT. UOB Kay Hian Sekuritas	
Nama Pemangku Kepentingan: PT Thorcon Power Indonesia															
Aspek Lingkungan Hidup															
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	1	Pembangunan Fasilitas Uji Keselamatan PLTT ThorCon500	1. Jumlah pengadaan lahan fasilitas uji keselamatan PLTT	lokasi	-	-	-	1	-	-	80.000	PT Thorcon Power Indonesia
						2. Jumlah Fasilitas pre-fission test bed platform unit uji keselamatan PLTT	Unit	-	-	-	-	1	-	1.000.000	PT Thorcon Power Indonesia
				2	Pembangunan Fasilitas laboratorium bahan bakar Molten Salt berbasis thorium	1. Pengadaan laboratorium dan peralatan	Unit	-	-	-	1	-	-	10.000	PT Thorcon Power Indonesia
						2. Uji dan produksi Molten Salt	Kg	-	-	-	2	100	-	5.000	PT Thorcon Power Indonesia
						3. Bangun Fabrik bahan bakar MSR	Unit	-	-	-	-	1	-	100.000	PT Thorcon Power Indonesia
				3	Pemasangan fasilitas untuk persiapan Izin tapak	Pengadaan dan pemasangan peralatan pemantau data sumber primer tapak dan peralatan	Unit	-	-	-	1	-	-	25.000	PT Thorcon Power Indonesia
				4	Feasibility Study Tapak PLTT ThorCon500	Lokasi Tapak PLTT	Lokasi	-	-	-	-	1	-	25.000	PT Thorcon Power Indonesia
						Izin Tapak PLTT	lokasi	-	-	-	-	1	-	10.000	PT Thorcon Power Indonesia
				5	Persiapan Pembangunan Prototype PLTT	Sewa Pulau untuk lokasi PLTT	lokasi	-	-	-	-	1	-	100.000	PT Thorcon Power Indonesia
						Izin Bapeten , KLH, PUPR, Pemprof/Pemda	lokasi	-	-	-	-	-	4	10.000	PT Thorcon Power Indonesia

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana	
Kode Sesuai Lampiran PDJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024			
Nama Pemangku Kepentingan: PT Riau Andalan Pulp & Paper Sinar Mas																
A.6.c.3.c Kegiatan TJSL yang relevan dengan SDGs																
Aspek Lingkungan Hidup																
A.6.e.4.a.4.	Upaya dan pencapaian pengurangan emisi	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	14	-Meningkatkan Efektivitas Peralatan Operasi (OEE). -Efisiensi energi -Program pemeliharaan -Adaptasi teknologi baru -Meningkatkan konsumsi bahan bakar nabati pabrik	Mengurangi 30% intensitas emisi karbon (lingkup 1 & 2) (baseline 2018)	%	10	30%	12%	14%	17%	19%		PT Riau Andalan Pulp & Paper Sinar Mas	
Nama Pemangku Kepentingan: Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSO)																
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan																
A.6.c.2.a.1	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	1		Ratio BOD laki: perempuan = 3:1	%	5	2:1	100	100	100	100		IBCSO	
A.3.c.2.						Head hunting khusus manager perempuan	%	5	2:1	100	100	100	100		IBCSO	
A.6.c.2.a.2		8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities				Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1	%	5	1:1	100	100	100	100		IBCSO
A.6.c.2.b.		8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja				Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	%	5	100	100	100	100	100		IBCSO
A.6.c.2.a.3		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.				Jumlah pegawai laki-laki yang mengambil cuti parental/hamil	orang	5	N/A						IBCSO
A.6.c.2.a.4	5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.				Jumlah pegawai perempuan yang mengambil cuti parental/hamil	orang	5	N/A						IBCSO	
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan	5	1	1	1	1	1		IBCSO	
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%								IBCSO	
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%								IBCSO	
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2.(b)	Kebebasan sipil			Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi								IBCSO	
Aspek Ekonomi																
A.6.b.2	Target pembiayaan yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan	17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST	2	Program Transformasi Sektor Bisnis untuk mewujudkan SDGs	Jumlah pendanaan kerja sama internasional	USD	5	1,060,000	205K	215K	215K	220K	125,000,000	IBCSO	
Aspek Lingkungan Hidup																
A.6.e.5.b	Mekanisme pengelolaan limbah dan effluen	12.3.1.(a)	Presentasi sisa makanan	3	GRASP 2030: Gotong Royong Atasi Susut & Limbah Pangan 2030	Jumlah lembaga yang ikut persetujuan sukarela (voluntary agreement)	lembaga	9	50	10	10	10	11	2,450,000,000	IBCSO	
A.6.e.4.b	Upaya dan pencapaian pengurangan emisi	13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	4	Promote Business Leadership towards net zero emissions	Jumlah perusahaan yang berkomitmen untuk penurunan GRK	perusahaan	5	30	5	5	7	8	1,000,000,000	IBCSO	
Aspek Sosial																
Internal																

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran PDJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	5	Kepertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	5	100	100	100	100		BCSD	
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan		Kepersertaan dalam BPJS kesehatan	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%	5	100	100	100	100		BCSD	
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3		Penyediaan fasilitas P3K	Jumlah kecelakaan kerja	kejadian	5	0	0	0	0		BCSD	
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3		Penyediaan asuransi kesehatan	Jumlah penyakit akibat kerja	kejadian	5	0	0	0	0		BCSD	
Eksternal															
A.4.c.2	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	17.6.1. (a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	5	Knowledge sharing events & SDGs Working Groups	Jumlah kerjasama dalam rangka Sustainable Development dan/atau Sustainable Finance	kerjasama	5	25	5	5	5	5	100,000,000	BCSD
A.6.c.3.a	Informasi kegiatan yang berdampak positif terhadap masyarakat sekitar	12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	5	Dokumentasi best practices terkait SDGs/ sustainability	Jumlah kegiatan yang menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar perusahaan	kegiatan	5	5	1	1	1	1	100,000,000	BCSD
Nama Pemangku Kepentingan: PT. ASTRA INTERNASIONAL															
Pendidikan															
4,3	Menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Program SMK, Politeknik, Balai Latihan Kerja, Training Non Gelar	Tingkat partisipasi pendidikan vokasi, pelatihan dan training	orang	3.852 siswa/mahasiswa mengikut+L5+O9:O18+O9:O22+L5+O9:O18+O9:O24+L5+O9:O9:O29							PT. ASTRA INTERNASIONAL
4,1	Menjamin semua anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas	4.1.2	Angka Partisipasi Sekolah seluruh jenjang		Beasiswa, Pembangunan/Penyediaan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah seluruh jenjang	%	Jumlah total beasiswa 267.479 Jumlah sekolah binaan 21.209 Jumlah kelas/sekolah direvitalisasi/renovasi 110							PT. ASTRA INTERNASIONAL
4.c.	Meningkatkan pasokan guru berkualitas termasuk pelatihan guru terutama di negara berkembang/kepulauan kecil	4.c.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan		Pelatihan Guru & Penambahan Guru	Jumlah Guru memenuhi kualifikasi dan persentase guru memenuhi kualifikasi	orang dan %	2253 (Guru PAUD) 656 (Guru SMK Bisa) 1607 (Guru YPA-MDR)							PT. ASTRA INTERNASIONAL
Kesehatan															
3,6	Mengurangi jumlah kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas	3.6.1	Angka kematian dan cedera fatal kecelakaan lalu lintas		Pencegahan Preventif dan Pertolongan Pertama	Penurunan Jumlah angka kecelakaan lalu lintas	%	34.000.000 (Masyarakat Terpapar IAABL) 590 Pelopor IAABL							PT. ASTRA INTERNASIONAL
3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk narkoba dan alkohol yang membahayakan	3.5.1a	Jumlah penyalahguna yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi		Pencegahan Preventif dan Rehabilitasi	Penurunan jumlah angka penyalahguna narkoba dan alkohol	%	1026 Agent AORTA							PT. ASTRA INTERNASIONAL

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran PDJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
3,4	Mengurangi angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental	3.4.1	Persentase merokok usia 10-18 tahun		Pencegahan Preventif dan Rehabilitasi	Penurunan jumlah angka muda merokok	%	1026 Agent AORTA						PT. ASTRA INTERNASIONAL	
	Tanpa Kelaparan														
2,2	Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk untuk anak kurus dan pendek dibawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja, ibu hamil menyusui serta manula	2.2.1	Prevalensi Underweight termasuk kurang gizi kurus, pendek dibawah 5 tahun		Posyandu dan Pemberian Makanan Tambahan	Persentase penurunan prevalensi underweight	%	1006 Bayi 5 tahunkekurangan gizi di intervensi 22758 bayi 5 tahun terecord dalam posyandu binaan 1951 Posyandu Digital						PT. ASTRA INTERNASIONAL	
	Ekonomi														
8,3	Mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi dan mendorong pertumbuhan UMKM termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	8.3.1	Proporsi lapangan kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin		Desa Sejahtera Astra / UMKM Binaan	Lapangan kerja informal yang dibuka	lapangan kerja	16.093 lapangan kerja baru						PT. ASTRA INTERNASIONAL	
		8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM ke Layanan Keuangan		Peningkatan Kualitas Layak Finansial UMKM Binaan	Jumlah UMKM yang mampu dan dapat mengakses layanan keuangan	UMKM	841 UMKM binaan memiliki kemampuan untuk akses ke layanan keuangan						PT. ASTRA INTERNASIONAL	
8,9	Mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	8.9.1a	Jumlah wisatawan mancanegara		Desa Wisata	jumlah wisatawan mancanegara	orang	473 orang (2021) dari 65 Desa Binaan						PT. ASTRA INTERNASIONAL	
		8.9.1b	Jumlah wisatawan domestik		Desa Wisata	jumlah wisatawan domestik	orang	18.762 orang (65 Desa Binaan						PT. ASTRA INTERNASIONAL	
		8.9.1 c	Jumlah devisa sektor pariwisata		Desa Wisata	jumlah devisa sektor pariwisata	orang	Rp. 2.207.000.000(Masa Pandemi) dari 65 Desa Wisata binaan						PT. ASTRA INTERNASIONAL	
	Mengurangi Kesenjangan														
10,1	Mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	10.1.1b	Jumlah Desa Tertinggal		Desa Sejahtera	Jumlah Desa tertinggal yang dibantu	jumlah desa	Desa Sejahtera Astra 930 Desa (97 Merupakan Desa Tertinggal) Menurut Data kemendes						PT. ASTRA INTERNASIONAL	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran PDJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
		10.1.1c	Jumlah Desa Mandiri		Desa Sejahtera	Jumlah Desa Binaan naik level mandiri	jumlah desa	Desa Sejahtera Astra 930 Desa (97 Merupakan Desa Teringgal, 560 Desa Maju dan 273 Desa Mandiri)						PT. ASTRA INTERNASIONAL	
	Air Bersih & Sanitasi														
6,1	Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	6.1.1	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Program Air Bersih	Kenaiknaan Persentase rumah tangga yang menerima manfaat air	jumlah orang	7 Desa di 4 Kecamatan Penerima Manfaat Panjang Pipa Air Bersih 17,19 km 7667 Penerima Manfaat Total Bantuan Rp. 24.821 M						PT. ASTRA INTERNASIONAL	
	Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan														
12,5	Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan daur ulang, dan penggunaan kembali	12.5.1a	Jumlah timbulan sampah terkelola 3R		Gerakan 3R	Jumlah sampah daur ulang	ton	105 Ton Manajemen Sampah Plastik 107 Bank Sampah Binaan 7098 Masyarakat berpartisipasi 3R						PT. ASTRA INTERNASIONAL	
	Adaptasi Perubahan Iklim														
13,3	Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim	13.3.1	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, pendidikan guru dan asesmen siswa		Sekolah Adiwiyata, Kurikulum Adiwiyata	Jumlah masyarakat	orang	261 Sekolah Adiwiyata						PT. ASTRA INTERNASIONAL	
		13.3.1a	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup		Program Kampung Iklim, Sekolah Adiwiyata	Jumlah komunitas/ lembaga	lembaga	261 Sekolah Adiwiyata 26 Proklm (1 Lestari, 25 Utama) & 121 Calon Kampung Iklim KBA						PT. ASTRA INTERNASIONAL	
13,2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	13.2.1	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) serta monitoring pelaporan dan verifikasi emisi GRK		Inventarisir GRK	Jumlah penurunan GHG	%	33,6 ribu ton CO2-eq / 2,76%						PT. ASTRA INTERNASIONAL	
	Ekosistem Daratan														
15,1	Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya	15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.		Pranaraksa, Penanaman Pohon	jumlah situs keanekaragaman hayati	jumlah	33 Pranaraksa Center 212 jenis tanaman						PT. ASTRA INTERNASIONAL	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran PDJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
		15.1.2a	Luasan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi		Konservasi, Reboisasi, Menjaga Stok Karbon Tinggi	Jumlah titik dan luasan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	Titik dan persentase area	-Aceh Singkil (3% lahan) stok karbon 12.791,5 Ton C - Siak (3%lahan) stok karbon 7.926 Ton C - Pelalawan (1%lahan) stok karbon 11.010 Ton C - Kumai (7%lahan) stok karbon 46.749 Ton C - Penajam (32% lahan) stok karbon 264.620 Ton C - Muara Wahau (10% lahan) stok karbon 143.682 Ton C - Sangkulirang Site (34% lahan) stok karbon 229.972 Ton C - Tikke Site (3% lahan) stok karbon 10.943 Ton C						PT. ASTRA INTERNASIONAL	
15,3	Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi	15.3.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan		Penanaman Pohon	Jumlah lahan yang di revitalisasi	Ha	Jumlah Pohon yang ditanam 5.100.000 pohon luas area 160 Ha						PT. ASTRA INTERNASIONAL	

Nama Pemangku Kepentingan: PT. SIPEF

A.6.c.3.c Kegiatan TJSL yang relevan dengan SDGs
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN

		15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas hutan		Patroli perlindungan dan pengamanan hutan	Mempertahakan tutupan minimal tetap 66% dari luas areal izin.	hektar	13	2032	8.292	8.292	8.292	8.292	705	PT SIPEF
		15.1.2.(a)	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)		Pemeliharaan tegakan alami pada tipe tutupan hutan sekunder	Dinamika pertumbuhan tegakan pada hutan sekunder seluas 7.120 hektar berjalan normal	hektar	16	2035	382	440	440	440	673	PT SIPEF
		15.1.2.(a)	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)		Deliniasi mikro zona lindung dan pemasangan plank	Zona lindung di dalam areal kerja 3.808,98 hektar terjaga dari aktifitas ilegal	hektar	5	2024	200	950	1.308	1.250	110	PT SIPEF
				Patroli perlindungan dan pengamanan hutan pada zona lindung setempat	Jumlah zona lindung dalam areal kerja 3.808,98 hektar	hektar	13	2032	3.808	3.808	3.808	3.808	include 15.1.1	PT SIPEF	
				Penanaman dan Pengkayaan pada zona lindung yang terdegradasi	Penanaman dan pengkayaan pada buffer TNKS seluas 33,4 hektar	hektar		2022	13,4	20,0	-	-	include 15.3.1*	PT SIPEF	
		15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan		Pembangunan persemaian	Penyediaan bibit jenis berkayu dan MPTS sebanyak 319.347 bibit	Bibit	14	2033	14.452	16.783	19580	20047		PT SIPEF

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPR/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
						Penyediaan bibit jenis berkayu dan MPTS sebanyak 66.696 bibit (40%)	Bibit	20	2039	1792	2.352	2800	3024		PT SIPEF
					Penanaman, penyesipan, dan pengayaan	Penanaman mandiri seluas 530 hektar	Hektar	14	2033	31	36	42	43	553	PT SIPEF
						Penanaman pola agroforestri pada areal Perhutanan Sosial dengan skema Kemitraan Kehutanan 1.191 hektar	Hektar	20	2039	32	42	50	54	114	PT SIPEF
					Pemeliharaan tanaman	Pemeliharaan tanaman mandiri pada tahun ke-1 hingga ke-5 seluas 530 hektar	Hektar	19	2038	186	222	264	307	1247	PT SIPEF
						Pemeliharaan tanaman Perhutanan Sosial pada tahun ke-1 hingga ke-4 seluas 1.191 hektar	Hektar	24	2043	235	277	327	381	284	PT SIPEF
		15.4.1*	Situs keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi		Monitoring satwa liar menggunakan kamera trap.	Teridentifikasinya satwa liar yang berada di dalam areal kerja	Unit	13	2032	23	33	40	40	140	PT SIPEF
		15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan												
					Pelatihan survei keragaman dan kelimpahan satwa liar untuk karyawan	Tersusun prosedur standar, metodologi survei, manajemen dan analisis data, serta pelaporan sesuai standar	Orang	2	2022		9	9		151	PT SIPEF
					Melakukan kajian kelimpahan mangsa satwa kunci (Harimau Sumatra) di dalam areal kerja	Jenis dan kelimpahan satwa kunci (Harimau Sumatra)	Laporan	3	2022		1	1	1	168	PT SIPEF
					Melakukan kajian identifikasi individu satwa kunci (harimau Sumatra) di dalam areal kerja	Data dasar jumlah individu Harimau Sumatra di dalam areal kerja	Laporan	10	2029	1	1	1	1	263	PT SIPEF
A.6.e.6.a	Kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI).		Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI).	20 ha	5	2027	Penyusunan proposal dokumen proyek	Implementasi pengendalian IAS di taman nasional Bromo Tengger Semeru	Implementasi pengendalian IAS di taman nasional Bantimurung Bulusaraung	Ketersediaan database IAS	GEF 7 Proposal	PT SIPEF

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.6.e.2.b	Penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	15.a.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan		Program SMARTS-BE (Sekolah Mandiri Produksi Tanaman Sayur dan Buah Edukasi)	Jumlah jenis Luasan sumber daya manusia produk turunan jumlah sekolah	Varietas Orang Dokumen Unit	6	2026	Jumlah Jenis: 46 jenis (16 824 tanaman) Luasan: 36 hektar (32.5 Ha lahan dan 3.5 Ha tabulamp ot) sumber daya manusia: 7000 murid 300 guru produk turunan: 99 produk turunan, 51 SOP jumlah sekolah: 37 sekolah	Jumlah Jenis: 46 jenis (16 824 tanaman) Luasan: 36 hektar (32.5 Ha lahan dan 3.5 Ha tabulamp ot) sumber daya manusia: 7000 murid 300 guru produk turunan: 99 produk turunan, 51 SOP jumlah sekolah: 37 sekolah	Jumlah Jenis: 46 jenis (16 824 tanaman) Luasan: 36 hektar (32.5 Ha lahan dan 3.5 Ha tabulamp ot) sumber daya manusia: 7000 murid 300 guru produk turunan: 99 produk turunan, 51 SOP jumlah sekolah: 37 sekolah	Jumlah Jenis: 46 jenis (16 824 tanaman) Luasan: 36 hektar (32.5 Ha lahan dan 3.5 Ha tabulamp ot) sumber daya manusia: 7000 murid 300 guru produk turunan: 99 produk turunan, 51 SOP jumlah sekolah: 37 sekolah	1.500.000.000 per tahun	PT SIPEF
										19	19	19	19		

Nama Pemangku Kepentingan: PT. Restorasi Ekosistem (REKI)														
A.6.c.3.c Kegiatan TJSL yang relevan dengan SDGs														
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN														
		15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas hutan	1	- Perlindungan dan pengamanan termasuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran seluas 20.378 (Degradasi Ringan) dan 3.136 ha (Degradasi Sedang) - Identifikasi dan riset keanekaragaman hayati - Pembuatan plot permanen	Terjadi suksesi alami dan regenerasi pada tiap tingkat permudaan	hektar	10 tahun	2027	Suksesi Alami (3.507 ha)	Suksesi Alami (3.192 ha)	Suksesi Alami (2.525 ha)	Suksesi Alami (2.913 ha)	PT REKI (Sumsel)

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran PDJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
				1	- Perlindungan dan pengamanan termasuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran seluas 9.495 (Degradasi Ringan) dan 2.618 ha (Degradasi Sedang) - Identifikasi dan riset keanekaragaman hayati - Pembuatan plot permanen	Terjadi suksesi alami dan regenerasi pada tiap tingkat permudaan	ha	10 tahun	2030	Suksesi Alami (5.932 ha)	Suksesi Alami (5.934 ha)	Suksesi Alami (4.372 ha)	Suksesi Alami (1.469 ha)		PT REKI (Jambi)
				1	Perlindungan dan pengamanan termasuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran seluas 20.378 ha	Terjadi suksesi alami dan regenerasi pada tiap tingkat permudaan	hektar	10	2027	Suksesi Alami (2.396 ha)	Suksesi Alami (1.982 ha)	Suksesi Alami (2.258 ha)	Suksesi Alami (2.446 ha)		PT REKI (Sumsel)
				1	Perlindungan dan pengamanan termasuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran seluas 9.495 ha	Terjadi suksesi alami dan regenerasi pada tiap tingkat permudaan	hektar	10	2030	Suksesi Alami (4.574 ha)	Suksesi Alami (4.532 ha)	Suksesi Alami (3.053 ha)	Suksesi Alami (793 ha)		PT REKI (Jambi)
		15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju												
		15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	1	- Perlindungan dan pengamanan termasuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran seluas 3.147 ha - Pengayaan/penanaman Seluas 492 ha - Pembinaan agroforestri seluas 659 ha	- areal dengan tingkat degradasi berat terpulihkan melalui penanaman/pengayaan seluas 492 ha serta meningkatkan keanekaragaman hayati - meningkatnya nilai tambah hasil usaha kehutanan, perkebunan, dan pertanian serta tutupan hutan sebagai upaya stabilisasi kawasan hutan.	Hektar	10 tahun	2027	- Perlindungan dan pengamanan termasuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran seluas 626 ha - Penelitian model eradikasi - Implementasi model eradikasi seluas 90 ha dengan tanaman asli dan pakan satwa	- Perlindungan dan pengamanan serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran seluas 831 ha di zona lindung - Pembinaan agroforestry dan budidaya karet di zona kemitraan seluas 53 ha - Eradikasi akasia	- Perlindungan dan pengamanan termasuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran seluas 31 ha - Pembinaan agroforestry karet seluas 76 ha dan sosialisasi perment tentang agroforestry pada Rompok Kapas	- Perlindungan dan pengamanan termasuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran seluas 157 ha - Pembinaan agroforestri dan budidaya karet seluas 49 ha di zona kemitraan		PT REKI (Sumsel)

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran PDJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
				1	- Perlindungan dan pengamanan termasuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran seluas 9.495 ha - Pengayaan/penanaman Seluas 220 ha	- areal dengan tingkat degradasi berat terpulihkan melalui penanaman/pengayaan seluas 220 ha serta meningkatkan keanekaragaman hayati - meningkatnya nilai tambah hasil usaha kehutanan, perkebunan, dan pertanian serta tutupan hutan sebagai upaya stabilisasi kawasan hutan.	ha	10 tahun	2030	- Suksesi Alami (7.691 ha) - Penanaman/Pengayaan (71 ha)	- Suksesi Alami (7.640 ha) - Penanaman/Pengayaan (44 ha)	- Suksesi Alami (7.614 ha) - Penanaman/Pengayaan (31 ha)	- Suksesi Alami (5.100 ha) - Penanaman/Pengayaan (14 ha)		PT REKI (Jambi)
Nama Pemangku Kepentingan: AP2HII															
A.6.c.3.c Kegiatan TJSL yang relevan dengan SDGs															
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN															
		14.1.1.(a)	Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut		Ghost fishing clean-up	Persentase alat tangkap yang hilang/tertinggal di laut	%	5		√	√	√	√	60	Asosiasi Pengusaha Rajungan Indonesia (APRI)
		14.1.1.(a)	Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut		Pelatihan dan edukasi perusahaan dan nelayan perikanan one-by-one tuna dalam pengolahan sampah di atas kapal	Persentase supply chain perusahaan anggota AP2HII yang mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan sampah di atas kapal	%	4		50	75	80	100	500	Asosiasi Perikanan Pole&line+Q9:Q32 dan Handline Indonesia (AP2HII)
		14.1.1.(a)	Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut			Persentase supply chain perusahaan anggota AP2HII yang memiliki standar prosedur penanganan sampah di atas kapal	%	4		50	75	80	100	150	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HII)
		14.1.1.(a)	Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut			Tersedianya data alat tangkap yang dibuang untuk perikanan PL & HL dari program pemantauan di atas kapal KKP	%	4		50	75	80	100	64	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HII)
		14.1.1.(a)	Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut		Mempertahankan pemenuhan standard Fair-trade mengenai Resource Management di perikanan one-by-one tuna	Tidak ditemukannya Non-compliance (NC) mengenai Resource Management (Waste management) dalam perikanan PL yang tersertifikasi Fairtrade di tahun ke-3	%	1		-	-	-	-	50	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HII)
		14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan		1) Pemetaan habitat/ekosistem penting rajungan	Peta habitat rajungan	(-)	2		√	-	-	-	800	Asosiasi Pengusaha Rajungan Indonesia (APRI)
					2) Pengumpulan data hasil tangkapan sampingan (bycatch) dan spesies ETP	Database bycatch	(-)	5		√	√	√	√	250	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
					3) Risk assessment bycatch rajungan dengan environmental DNA	DNA bycatch	(-)	5		√	√	√	√	200	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
					4) Instalasi vessel tracking system-TREKfish	Pelacakan lokasi rajungan MLS dan EBF, CPUE, dan SPR	(-)	5		√	√	√	√	465	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
					1) Menyediakan bibit karang untuk kegiatan rehabilitasi ekosistem terumbu karang	Minimal sebanyak 10% dari produksi karang hias hasil transplantasi digunakan sebagai bibit karang	pcs	5	2026	75.000	75.000	100.000	100.000	500	Asosiasi Korai Karang dan Ikan hias Indonesia (AKKII)
					2) Rehabilitasi ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat	Luasan area terumbu karang yang direhabilitasi	hektar	5	2026	5	8	8	10	1.000	Asosiasi Korai Karang dan Ikan hias Indonesia (AKKII)

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran PDJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
		14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan		Melakukan kegiatan pemantauan di atas kapal perikanan one-by-one tuna (observer, port sampling, VTD, TLC)	1.1 Tersedianya informasi mengenai komposisi tangkapan termasuk penggunaan umpan pada perikanan one-by-one tuna	Dokumen	5		1	1	1	1	170	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI) & KKP
		14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan			1.2 Tersedianya informasi interaksi ETP pada perikanan one-by-one tuna	Dokumen	5		1	1	1	1	170	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI) & KKP
		14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan			1.3 Tersedianya informasi mengenai Rumpon pada perikanan one-by-one tuna	Dokumen	5		1	1	1	1	170	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI) & KKP
		14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan			1.4 Tersedianya informasi mengenai overlap perikanan one-by-one dengan MPA pada perikanan one-by-one tuna	Dokumen	5		1	1	1	1	170	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI) & KKP
		14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan		Melakukan kegiatan review terhadap data pemantauan di atas kapal perikanan one-by-one tuna	Tersedianya informasi mengenai komposisi tangkapan termasuk penggunaan umpan pada perikanan one-by-one tuna	Dokumen	5		1	1	1	1	170	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI) & KKP
		14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan		Pendataan rajungan di WPP 571, 712, 713, dan 714 oleh enumerator dan kegiatan <i>co-management</i>	Database rajungan	(-)	5		√	√	√	√	250	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan		Partisipasi aktif perikanan tuna one-by-one di dalam Lembaga Pengelolaan Perikanan daerah	Partisipasi nelayan dan industri perikanan one-by-one tuna di dalam forum LPP-WPP	%	5		70	80	90	100	170	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI)
		14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan			Partisipasi nelayan dan industri perikanan one-by-one tuna di dalam forum Komite Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna di level Provinsi	%	5		100	100	100	100	170	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI)
		14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan			Pembentukan lembaga Komite Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna di 2 Provinsi	%	5		80	100	100	100	300	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI)
		14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.		1) Pengkajian stok rajungan <i>Portunus pelagicus</i>	Spawning Potential Ratio (SPR)	%	5	30%	20%	20%	30%	30%	110	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.		2) GTKSI, apartemen rajungan, buku saku nelayan	Persentase rajungan kecil dan bertelur	%	5	10%	15%	10%	10%	10%	125	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.		Mendukung pengembangan HS dan HCR perikanan tuna di RFMO dan IAW	Tersedianya HS dan HCR Perikanan Tuna untuk Perairan Kepulauan Republik Indonesia	%	5		75	80	100	100	125	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI)
		14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.			Berpartisipasinya perwakilan industri di dalam pembahasan HS/HCR Tuna di RFMO	%	5		75	80	100	100	125	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI)
		14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.		Terlaksananya National Tuna Management Plan	Rencana aksi di dalam national tuna management plan terlaksana	%	5		75	80	100	100	125	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI)

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran PDJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
		14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.		Pengembangan platform ketertelusuran dan interoperabilitas perikanan tuna one-by-one dari penangkapan hingga export	Tersedianya platform sistem ketertelusuran perikanan una one-by-one	%	5		75	100	100	100	300	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI)
		14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut		Pembentukan kawasan konservasi	Luas kawasan konservasi	Ha	5	600					120	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut		Monitoring kegiatan perikanan one-by-one dengan kawasan MPA	Monitoring terjadinya overlap kegiatan penangkapan one-by-one tuna dengan kawasan konservasi melalui data Vessel Tracking System/VMS	%	5		75	100	100	100	300	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI)
		14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut		Monitoring terjadinya overlap kegiatan pembelian umpan hidup dengan kawasan MPA melalui data pemantauan di atas kapal untuk perikanan Pole & Line	Monitoring terjadinya overlap kegiatan pembelian umpan hidup dengan kawasan MPA melalui data pemantauan di atas kapal untuk perikanan Pole & Line	%	5		75	100	100	100	300	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI)
		14.6.1(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.		Audit kontrol dokumen (CDAS)	Persentase MLS dan EBF	%	5	10%	10%	10%	10%	10%	300	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil		Impelementasi Harvest Strategy rajungan	Harvest control rules diimplementasikan di lokasi penangkapan rajungan				√	√	√	√	210	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.b.1(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.		Pembentukan dan pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan, seperti KUB Berkah Capit Biru	KUB dikelola mandiri oleh nelayan	(-)	5		√	√	√	√	234	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.		Pendampingan pendaftaran KUSUKA dan asuransi nelayan	Database nelayan	(-)	5		√	√	√	√	90	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).		Pertemuan rutin Komite Pengelolaan Rajungan dan Komite Pengelolaan Data rajungan Indonesia	Rencana pengelolaan perikanan rajungan	(-)	5		√	√	√	√	200	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
Nama Pemangku Kepentingan: AKKII															
A.6.c.3.c	Kegiatan TJSL yang relevan dengan SDGs														
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN															
		14.1.1(a)	Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut		Ghost fishing clean-up	Persentase alat tangkap yang hilang/tertinggal di laut	%	5		√	√	√	√	60	Asosiasi Pengusaha Rajungan Indonesia (APRI)
		14.1.1(a)	Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut		Pelatihan dan edukasi perusahaan dan nelayan perikanan one-by-one tuna dalam pengolahan sampah di atas kapal	Persentase supply chain perusahaan anggota AP2HI yang mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan sampah di atas kapal	%	4		50	75	80	100	500	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HII)
		14.1.1(a)	Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut			Persentase supply chain perusahaan anggota AP2HI yang memiliki standar prosedur penanganan sampah di atas kapal	%	4		50	75	80	100	150	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HII)
		14.1.1(a)	Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut			Tersedianya data alat tangkap yang dibuang untuk perikanan PL & HL dari program pemantauan di atas kapal KKP	%	4		50	75	80	100	64	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HII)

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran PDJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
		14.1.1.(a)	Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut		Mempertahankan pemenuhan standar Fair-trade mengenai Resource Management di perikanan one-by-one tuna	Tidak ditemukannya Non-compliance (NC) mengenai Resource Management (Waste management) dalam perikanan PL yang tersertifikasi Fairtrade di tahun ke-3	%	1		-	-	-	-	50	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HII)
		14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal laut		1) Pemetaan habitat/ekosistem penting rajungan	Peta habitat rajungan	(-)	2		√	-	-	-	800	Asosiasi Pengusaha Rajungan Indonesia (APRI)
					2) Pengumpulan data hasil tangkapan sampingan (bycatch) dan spesies ETP	Database bycatch	(-)	5		√	√	√	√	250	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
					3) Risk assessment bycatch rajungan dengan environmental DNA	DNA bycatch	(-)	5		√	√	√	√	200	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
					4) Instalasi vessel tracking system-TREKfish	Pelacakan lokasi rajungan MLS dan EBF, CPUE, dan SPR	(-)	5		√	√	√	√	465	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
					1) Menyediakan bibit karang untuk kegiatan rehabilitasi ekosistem terumbu karang	Minimal sebanyak 10% dari produksi karang hias hasil transplantasi digunakan sebagai bibit karang	pcs	5	2026	75.000	75.000	100.000	100.000	500	Asosiasi Karang Kerang dan Ikan hias Indonesia (AKKII)
			2) Rehabilitasi ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat	Luasan area terumbu karang yang direhabilitasi	hektar	5	2026	5	8	8	10	1.000	Asosiasi Karang Kerang dan Ikan hias Indonesia (AKKII)		
		14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal laut		Melakukan kegiatan pemantauan di atas kapal perikanan one-by-one tuna (observer, port sampling, VTD, TLC)	1.1 Tersedianya informasi mengenai komposisi tangkapan termasuk penggunaan umpan pada perikanan one-by-one tuna	Dokumen	5		1	1	1	1	170	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI) & KKP
		14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal laut			1.2 Tersedianya informasi interaksi ETP pada perikanan one-by-one tuna	Dokumen	5		1	1	1	1	170	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI) & KKP
		14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal laut			1.3 Tersedianya informasi mengenai Rumpun pada perikanan one-by-one tuna	Dokumen	5		1	1	1	1	170	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI) & KKP
		14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal laut			1.4 Tersedianya informasi mengenai overlap perikanan one-by-one dengan MPA pada perikanan one-by-one tuna	Dokumen	5		1	1	1	1	170	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI) & KKP
		14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal laut		Melakukan kegiatan review terhadap data pemantauan di atas kapal perikanan one-by-one tuna	Tersedianya informasi mengenai komposisi tangkapan termasuk penggunaan umpan pada perikanan one-by-one tuna	Dokumen	5		1	1	1	1	170	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI) & KKP
		14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan		Pendataan rajungan di WPP 571, 712, 713, dan 714 oleh enumerator dan kegiatan co-management	Database rajungan	(-)	5		√	√	√	√	250	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan		Partisipasi aktif perikanan tuna one-by-one di dalam Lembaga Pengelolaan Perikanan	Partisipasi nelayan dan industri perikanan one-by-one tuna di dalam forum LPP-WPP	%	5		70	80	90	100	170	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI)

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran PDJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
		14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan		daerah	Partisipasi nelayan dan industri perikanan one-by-one tuna di dalam forum Komite Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna di level Provinsi	%	5		100	100	100	100	170	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI)
		14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan			Pembentukan lembaga Komite Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna di 2 Provinsi	%	5		80	100	100	100	300	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI)
		14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.		1) Pengkajian stok rajungan <i>Portunus pelagicus</i>	Spawning Potential Ratio (SPR)	%	5	30%	20%	20%	30%	30%	110	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
					2) GTKSI, apartemen rajungan, buku saku nelayan	Persentase rajungan kecil dan bertelur	%	5	10%	15%	10%	10%	10%	125	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.		Mendukung pengembangan HS dan HCR Perikanan Tuna untuk Perairan Kepulauan Republik Indonesia	Tersedianya HS dan HCR Perikanan Tuna untuk Perairan Kepulauan Republik Indonesia	%	5		75	80	100	100	125	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI)
		14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.			Berpartisipasinya perwakilan industri di dalam pembahasan HS/HCR Tuna di RFMO	%	5		75	80	100	100	125	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI)
		14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.		Terlaksananya National Tuna Management Plan	Rencana aksi di dalam national tuna management plan terlaksana	%	5		75	80	100	100	125	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI)
		14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.		Pengembangan platform ketertelusuran dan interoperabilitas perikanan tuna one-by-one dari penangkapan hingga export	Tersedianya platform sistem ketertelusuran perikanan tuna one-by-one	%	5		75	100	100	100	300	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI)
		14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut		Pembentukan kawasan konservasi	Luas kawasan konservasi	Ha	5	600					120	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut		Monitoring kegiatan perikanan one-by-one dengan kawasan MPA	Monitoring terjadinya overlap kegiatan penangkapan one-by-one tuna dengan kawasan konservasi melalui data Vessel Tracking System/VMS	%	5		75	100	100	100	300	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI)
		14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut			Monitoring terjadinya overlap kegiatan pembelian umpan hidup dengan kawasan MPA melalui data pemantauan di atas kapal untuk perikanan Pole & Line	%	5		75	100	100	100	300	Asosiasi Perikanan Pole&line dan Handline Indonesia (AP2HI)
		14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.		Audit kontrol dokumen (CDAS)	Persentase MLS dan EBF	%	5	10%	10%	10%	10%	10%	300	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil		Impelementasi Harvest Strategy rajungan	Harvest control rules diimplementasikan di lokasi penangkapan rajungan				v	v	v	v	210	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.		Pembentukan dan pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan, seperti KUB Berkah Capit Biru	KUB dikelola mandiri oleh nelayan	(-)	5		v	v	v	v	234	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.		Pendampingan pendaftaran KUSUKA dan asuransi nelayan	Database nelayan	(-)	5		v	v	v	v	90	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran PDJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
		14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).		Pertemuan rutin Komite Pengelolaan Rajungan dan Komite Pengelolaan Data rajungan Indonesia	Rencana pengelolaan perikanan rajungan	(-)	5		√	√	√	√	200	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
Nama Pemangku Kepentingan: Asosiasi Pengusaha Rajungan Indonesia (APRI)															
A.6.c.3.c	Kegiatan TJSL yang relevan dengan SDGs														
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN															
		14.1.1.(a)	Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut		Ghost fishing clean-up	Persentase alat tangkap yang hilang/tertinggal di laut	%	5		√	√	√	√	60	Asosiasi Pengusaha Rajungan Indonesia (APRI)
		14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal laut		1) Pemetaan habitat/ekosistem penting rajungan	Peta habitat rajungan	(-)	2		√	-	-	-	800	Asosiasi Pengusaha Rajungan Indonesia (APRI)
					2) Pengumpulan data hasil tangkapan sampingan (bycatch) dan spesies ETP	Database bycatch	(-)	5		√	√	√	√	250	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
					3) Risk assessment bycatch rajungan dengan environmental DNA	DNA bycatch	(-)	5		√	√	√	√	200	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
					4) Instalasi vessel tracking system-TREKfish	Pelacakan lokasi rajungan MLS dan EBF, CPUE, dan SPR	(-)	5		√	√	√	√	465	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan		Pendataan rajungan di WPP 571, 712, 713, dan 714 oleh enumerator dan kegiatan co-management	Database rajungan	(-)	5		√	√	√	√	250	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.		1) Pengkajian stok rajungan <i>Portunus pelagicus</i>	Spawning Potential Ratio (SPR)	%	5	30%	20%	20%	30%	30%	110	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
					2) GTK51, apartemen rajungan, buku saku nelayan	Persentase rajungan kecil dan bertelur	%	5	10%	15%	10%	10%	10%	125	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut		Pembentukan kawasan konservasi	Luas kawasan konservasi	Ha	5	600					120	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.		Audit kontrol dokumen (CDAS)	Persentase MLS dan EBF	%	5	10%	10%	10%	10%	10%	300	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil		Implementasi Harvest Strategy rajungan	Harvest control rules diimplementasikan di lokasi penangkapan rajungan				√	√	√	√	210	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.		Pembentukan dan pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan, seperti KUB Berkah Capit Biru	KUB dikelola mandiri oleh nelayan	(-)	5		√	√	√	√	234	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.		Pendampingan pendaftaran KUSUKA dan asuransi nelayan	Database nelayan	(-)	5		√	√	√	√	90	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
		14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).		Pertemuan rutin Komite Pengelolaan Rajungan dan Komite Pengelolaan Data rajungan Indonesia	Rencana pengelolaan perikanan rajungan	(-)	5		√	√	√	√	200	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
Nama Pemangku Kepentingan: PT Angkasa Pura II (Persero)															
A.6.c.3.c	Kegiatan TJSL yang relevan dengan SDGs														

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran PDJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Program untuk Warga Terdampak Pandemi / Covid 19															
		2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		Pembelian Multivitamin pencegahan Covid 19	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			80.217.500	PT Angkasa Pura II (Persero)
		2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		Bantuan Sembako Dinas Sosial Provinsi Aceh	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			8.250.000	PT Angkasa Pura II (Persero)

Nama Pemangku Kepentingan: PT Nindya Karya (Persero)															
A.6.c.3.c	Kegiatan TJSL yang relevan dengan SDGs														
Program Bantuan Rumah Ibadah															
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid Al Manar Taman Duta	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			20.000.000	PT Nindya Karya (Persero)
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Taman Pendidikan Al Qur'an Masjid Al Muhajirin	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			10.000.000	PT Nindya Karya (Persero)
Bantuan Logistik & Peralatan Penanganan Bencana															
		13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana		Bantuan Sinergi BUMN Klaster Danareksa - PPA (Bencana Alam Mamuju dan Kalimantan Selatan)	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				8			50.000.000	PT Nindya Karya (Persero)
		13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana		Bantuan Sembako untuk Korban Banjir Wilayah Jakarta, Bekasi dan Sekitarnya	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				2			11.550.000	PT Nindya Karya (Persero)
		13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana		Bantuan Sinergi BUMN Klaster Danareksa - PPA (Banjir Bandang di NTT)	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				5			15.000.000	PT Nindya Karya (Persero)
		13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana		Bantuan Air Mineral dan APD Kolaborasi BUMN Klaster Danareksa - PPA	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				7			10.000.000	PT Nindya Karya (Persero)
		13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana		Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada PMI Kota Jakarta Timur dalam Penanganan Pencegahan COVID-19	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			20.000.000	PT Nindya Karya (Persero)
		13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana		Bantuan Sembako untuk Warga yang Terdampak COVID-19 di Sekitar Gedung Nindya - Jakarta Timur	Jumlah orang penerima bantuan	Orang				50			59.850.000	PT Nindya Karya (Persero)
		13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana		Bantuan Kebutuhan ICU Urgent Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			4.044.000	PT Nindya Karya (Persero)
Program Pelestarian & Penataan Lingkungan															

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana	
Kode Sesuai Lampiran PDJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024			
		15.1.2	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)		Penataan Lingkungan Sekitar Proyek Pembangunan Jalur Ganda KA Batu Tulis - Ciomas Lintas Bogor - Sukabumi	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1			48.911.000	PT Nindya Karya (Persero)
Pelatihan dan Pembinaan																
		16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun		Pemberian Dukungan atas Kegiatan Launching Desa Digital Tawang Sari dan Pelatihan Digital UMMK Kolaborasi BUMN Klaster Danareksa - PPA	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1			20.000.000	PT Nindya Karya (Persero)
Bantuan Fasilitas Pendidikan																
		4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun		Khitanan Yatim dalam rangka HUT PT Nindya Karya (Persero) ke-61 Tahun 2021	Jumlah orang penerima bantuan	orang					40			23.400.000	PT Nindya Karya (Persero)
		4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun		Peringatan Nuzulul Quran 1442 Hijriah "Pemberian Santunan kepada Anak Yatim"	Jumlah orang penerima bantuan	orang					300			10.000.000	PT Nindya Karya (Persero)
Nama Pemangku Kepentingan: PT Perkebunan Nusantara II																
A.6.c.3.c	Kegiatan TJSL yang relevan dengan SDGs															
PTPN II Sehat																
		3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan		Santunan Panti Asuhan	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					2			50.000.000	PT Perkebunan Nusantara II
		3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan		Renovasi Lapangan Tenis	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1			15.000.000	PT Perkebunan Nusantara II

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT. Bank BTPN, Tbk															
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.6.c.2.a.1	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.			Ratio BOD laki: perempuan = 3:1	%	2024	70%	7:3	7:3	7:3	7:3	PT. Bank BTPN, Tbk	
A.3.c.2.					Talent management	Ratio Manager perempuan: laki	%	2024	35%	7,4:13,6	7,4:13,6	7,4:13,6	7,4:13,6	PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.c.2.a.2		8.5.1	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities		Kebijakan human capital	Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1	%	2024	61%	4,9:3,1	4,9:3,1	4,9:3,1	4,9:3,1	PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.c.2.b.		8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja		Kebijakan human capital	Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	%	2024	100,35%	100,35%	100,35%	100,35%	100,35%	PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.c.2.a.3		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan		Kebijakan human capital	Jumlah pegawai laki-laki yang mengambil cuti parental/hamil	orang	2024	190	190	190	190	190	PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.c.2.a.4		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan		Kebijakan human capital	Jumlah pegawai perempuan yang mengambil cuti parental/hamil	orang	2024	214	214	214	214	214	PT. Bank BTPN, Tbk	
A.3.g.1.		Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		1. Sosialisasi Prosedur 2. Teaser perhal topik terkait melalui media elektronik (BTPN Info) 3. Online Training Anti Fraud Awareness	Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di	kegiatan	2024	117	118	117	117	117	PT. Bank BTPN, Tbk
A.3.g.2.	16.5.1.(a)		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		E- Learning Anti Fraud Awareness	Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	2024	50%		BOD : 50%	BOD : 50%	BOD : 50%	PT. Bank BTPN, Tbk	
A.3.g.3.	16.5.1.(a)		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		E- Learning Anti Fraud Awareness	Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	2024	90%	100% (related employee)	90%	90%	90%	PT. Bank BTPN, Tbk	
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil		Perbanas, Forum Direktur Kepatuhan (FKDKP) Perbanas, AEI,BARa, Foruk Komunikasi Direktur	Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi	2024	5	5	5	5	5	PT. Bank BTPN, Tbk	
Aspek Ekonomi															
A.3.c.1.a.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Pertumbuhan bisnis	Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah),	Juta rupiah			168.178.044				PT. Bank BTPN, Tbk	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024			
A.3.c.1.b.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Pertumbuhan bisnis	Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	Juta rupiah			139.870.193					PT. Bank BTPN, Tbk	
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Pertumbuhan bisnis	Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual				± 5%						PT. Bank BTPN, Tbk
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Pertumbuhan bisnis	Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)	Juta rupiah			8.994.076						PT. Bank BTPN, Tbk
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Pertumbuhan bisnis	Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Juta rupiah			1.393.730						PT. Bank BTPN, Tbk
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		SMBC (92,43%) Publik (5,23%) PT BCA (1,02%) PT. BNI 0,15%	Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)	%			Publik : 5,23% Swasta : 94,62% Pemerintah : 0,15%						PT. Bank BTPN, Tbk
A.3.c.4.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Operasional bisnis	Cakupan wilayah operasional berdasarkan tingkat administrasi	Provinsi kab/kota	2024	33 Provinsi 272 Kab/Kota	33 Provinsi 272 Kab/Kota	33 Provinsi 272 Kab/Kota	33 Provinsi 272 Kab/Kota	33 Provinsi 272 Kab/Kota			PT. Bank BTPN, Tbk
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Talent management	Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang	2024	3035	3035	3035	3035	3035			PT. Bank BTPN, Tbk
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Talent management	Jumlah karyawan perempuan level staf	orang	2024	2348	2348	2348	2348	2348			PT. Bank BTPN, Tbk
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Talent management	Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang	2024	1586	1586	1586	1586	1586			PT. Bank BTPN, Tbk
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Talent management	Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang	2024	5592	5592	5592	5592	5592			PT. Bank BTPN, Tbk
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Talent management	Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang	2024	304	304	304	304	304			PT. Bank BTPN, Tbk
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Talent management	Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang	2024	1287	1287	1287	1287	1287			PT. Bank BTPN, Tbk
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Talent management	Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang	2024	5899	5899	5899	5899	5899			PT. Bank BTPN, Tbk
A.3.c.2.n.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Talent management	Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang	2024	295	295	295	295	295			PT. Bank BTPN, Tbk
A.3.c.2.o.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Talent management	Jumlah karyawan berpendidikan S3	orang	2024	1	1	1	1	1			PT. Bank BTPN, Tbk

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kebijakan human capital	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%	2024	92,33%	92,33%	92,33%	92,33%		PT. Bank BTPN, Tbk	
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kebijakan human capital	Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%	2024	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%		PT. Bank BTPN, Tbk	
A.3.c.2.r.		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin		Kebijakan human capital	Persentase karyawan berstatus pekerja musiman atau pihak ketiga	%	2024	42,42%	42,42%	42,42%	42,42%		PT. Bank BTPN, Tbk	
A.3.c.2.s.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	2024	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%		PT. Bank BTPN, Tbk	
A.3.c.2.t.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah	%	2024	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%		PT. Bank BTPN, Tbk	
A.3.c.2.u.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Talent management	Persentase karyawan laki-laki yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam	%	2024	63,21	63,21%	63,21%	63,21%		PT. Bank BTPN, Tbk	
A.3.c.2.v.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Talent management	Persentase karyawan perempuan yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam	%	2024	36,79	36,79%	36,79%	36,79%		PT. Bank BTPN, Tbk	
A.2.a.4.		Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Kebijakan human capital	Persentase karyawan lokal terhadap seluruh karyawan	%	2024	99,91%	99,91%	99,91%	99,91%		PT. Bank BTPN, Tbk
A.2.a.4. A.6.f.1.a	Produk ramah lingkungan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		List Produk : -BTPN Wow -Jenius -Wholesale & Corporate Banking	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	produk	2024	3					PT. Bank BTPN, Tbk	
Aspek Lingkungan Hidup															
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.			Total bauran energi terbarukan								PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.d.3.a.1	Efisiensi Energi	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2019	Total konsumsi energi			2.444 gjoule					PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.d.3.a.2		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2020	Total konsumsi air								PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.d.b.2		7.3.1*	Intensitas energi primer.		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2021	Intensitas efisiensi energi yang dipergunakan								PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.d.3.b.3.		6.4.1.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2022	Efisiensi penggunaan air								PT. Bank BTPN, Tbk	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.2.a.4.		11.2.1.	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2023	Persentase moda transportasi ramah lingkungan yang dipergunakan								PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.e.5.a.1.	Pencegahan dan Pengendalian Polusi	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2024	Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis								PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.e.5.a.2		6.3.1 .	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2025	Proporsi limbah air yang dikelola								PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.e.5.b		12.4.2.	Proporsi limbah berbahaya yang dikelola menurut jenis penanganannya		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2026	Proporsi limbah berbahaya yang dikelola								PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.e.5.a.3.a.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2027	Proporsi limbah berbahaya (b3) - padat yang diolah	%								PT. Bank BTPN, Tbk
A.6.e.5.a.3.b.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2028	Proporsi limbah berbahaya (b3) - cair yang diolah	%								PT. Bank BTPN, Tbk
A.6.e.5.c.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2029	Jumlah tumpahan limbah yang terjadi									PT. Bank BTPN, Tbk
A.6.e.3.b.2			14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2030	Jumlah luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati air	Ha							PT. Bank BTPN, Tbk
A.6.e.3.b.1	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.1.2.	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2031	Jumlah luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati darat	Ha							PT. Bank BTPN, Tbk	
		15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2032								PT. Bank BTPN, Tbk		
		15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya.		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2033								PT. Bank BTPN, Tbk		
A.6.e.3.b.3		15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2034	Jumlah kegiatan konservasi keanekaragaman hayati darat untuk satwa langka	kegiatan							PT. Bank BTPN, Tbk	
		15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2035									PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.e.4.b		13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2036	Jumlah kegiatan pelatihan pencegahan risiko bencana	kegiatan							PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.e.4.a.1.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2037	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 1					1.481 ton CO2e, intensitas 0,00769 per Sqm			PT. Bank BTPN, Tbk	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.6.e.4.a.2.	Adaptasi Perubahan Iklim	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2038	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 2				6.133 ton CO2e, intensitas 0,03183 per Sqm					PT. Bank BTPN, Tbk
A.6.e.4.a.3.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		Telah dilakukan perhitungan mengenai kalkulator karbon sejak tahun 2039	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 3				47 ton CO2e, intensitas 0,00024 per Sqm					PT. Bank BTPN, Tbk
A.6.e.4.a.4.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.				Jumlah tensesis emisi								
A.6.e.6.c		12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		Kantor Pusat dibangun dengan memperhatikan standar berwawasan lingkungan	Jumlah bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang	unit			1					PT. Bank BTPN, Tbk
		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.			Jumlah kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	kegiatan								PT. Bank BTPN, Tbk
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.												PT. Bank BTPN, Tbk
A.6.d.1.		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.			Jumlah biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	Juta rupiah								PT. Bank BTPN, Tbk
A.6.d.2.a.	Penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	8.4.1	Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP			Persentase penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaurulang	%								PT. Bank BTPN, Tbk
A.6.d.2.b.		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang												PT. Bank BTPN, Tbk
A.6.e.2.a		6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya			Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang									PT. Bank BTPN, Tbk
A.6.e.2.b		15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati												PT. Bank BTPN, Tbk
A.6.e.6.a	Kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi			Persentase pengadilan lingkungan hidup yang diselesaikan terhadap seluruh jumlah yang	%								PT. Bank BTPN, Tbk
A.6.e.6.c		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001			Jumlah sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	sertifikat								PT. Bank BTPN, Tbk
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru												PT. Bank BTPN, Tbk
A.6.f.1.a	Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		Produk BTPN yang pro lingkungan dan sosial : - BTPN Wow! - Jenius	Jumlah inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan	produk			2					PT. Bank BTPN, Tbk

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Aspek Sosial															
Internal															
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan		Kebijakan human capital	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%		100%	100%	100%	100%	100%	PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan		Kebijakan human capital	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%		98,99%	98,99%	98,99%	98,99%	98,99%	PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah kecelakaan kerja	kejadian		0	2	0	0	0	PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah penyakit akibat kerja	kejadian							PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.c.2.d.1.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Program pelatihan karyawan	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan	jam/tahun/karyawan		33,33	31,07				PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.c.2.d.2.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Program pelatihan karyawan	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan	jam/tahun/karyawan		36,67	32,83				PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.c.2.d.3.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Program pelatihan karyawan	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan	jam/tahun/karyawan		39,28	34,99				PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.c.2.d.4.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Program pelatihan karyawan	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan	jam/tahun/karyawan		31,94	30,05				PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.c.2.d.5.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Program pelatihan karyawan	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan	jam/tahun/karyawan		32,67	31,43				PT. Bank BTPN, Tbk	
Eksternal															
A.6.c.3.c	dan/atau investor	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.			Persentase UMKM yang mendapat bantuan yang naik kelas								PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.f.2.a.1.a	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM,	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru		Telah memiliki kebijakan yang mengatur mengenai kajian dari unit terkait kepada setiap produk dan layanan	Persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan			100%					PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.f.2.a.2		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru		Telah memiliki kebijakan terkait dengan perlindungan konsumen	Persentase produk dan/jasa yang memiliki label atau informasi barang dan/atau jasa			100%					PT. Bank BTPN, Tbk	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.4.c.2	asing	17.6.1. (a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular			Jumlah kerjasama dalam rangka Sustainable Development dan/atau Sustainable Finance	kerjasama							PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.c.3.a		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.		Telah dilakukan berbagai kegiatan pemberdayaan terkait kesehatan dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat	Jumlah kegiatan yang menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar	kegiatan		4.107					PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik		Melakukan proses kerja penerimaan, penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh nasabah berdasarkan ketentuan dan standard	Persentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah	%		100%					PT. Bank BTPN, Tbk	
A.6.c.3.b.2.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik		Melakukan proses kerja penerimaan, penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh nasabah berdasarkan ketentuan dan standard	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan		130.846					PT. Bank BTPN, Tbk	
Nama Pemangku Kepentingan: PT. Sinar Mas Multifinance															
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil	1	Perusahaan telah bergabung dalam Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)	Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi	5	1	1	1	1	1	PT. Sinar Mas Multifinance	
Aspek Ekonomi															
A.3.c.1.a.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	2	Perusahaan telah membuat laporan budget untuk 5 tahun kedepan	Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah);	Juta rupiah	5	6.886.442	7.884.384	7.243.989	7.016.389	6.886.442	0	PT. Sinar Mas Multifinance
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	3	Perusahaan telah membuat laporan budget untuk 5 tahun kedepan	Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	Juta rupiah	5	4.590.622	5.722.619	5.056.683	4.778.123	4.590.622	0	PT. Sinar Mas Multifinance
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual									PT. Sinar Mas Multifinance
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	4	Perusahaan telah membuat laporan budget untuk 5 tahun kedepan	Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)	Juta rupiah	5	1.443.650	1.292.702	1.352.603	1.441.616	1.443.650	0	PT. Sinar Mas Multifinance
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	5	Perusahaan telah membuat laporan budget untuk 5 tahun kedepan	Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Juta rupiah	5	57.554	34.979	25.542	50.960	57.554	0	PT. Sinar Mas Multifinance
Internal															

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	7	Seluruh Karyawan tetap telah didaftarkan ke program BPJS Ketenagakerjaan	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	5	100	100	100	100	100	PT. Sinar Mas Multifinance	
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	8	Seluruh Karyawan tetap telah didaftarkan ke program BPJS Ketenagakerjaan	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%	5	100	100	100	100	100	PT. Sinar Mas Multifinance	
Eksternal															
A.6.c.3.a		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	9	Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan untuk periode 2020	Perusahaan telah melaporkan laporan keberlanjutannya kepada pihak yang berwenang	Laporan	5	1	1	1	1	1	PT. Sinar Mas Multifinance	
Nama Pemangku Kepentingan: PT Medikaloka Hermina Tbk															
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.6.c.2.a.1	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	1	a. Maping BOD sesuai gender (saat ini = 4:0)	Ratio BOD laki: perempuan = 3:1	%	5	3:1	4:0	4:0	4:0	3:1	PT Medikaloka Hermina Tbk	
					b. Kaderisasi /suksesi calon BOD Wanita									PT Medikaloka Hermina Tbk	
					c. RIUPS menunjuk & mengesahkan BOD Wanita									PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.3.c.2.					2	Head Hunting manager wanita	Ratio Manager perempuan: laki	%	5	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	PT Medikaloka Hermina Tbk
A.6.c.2.a.2			8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities	3	a. Peraturan Perusahaan	Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1	%	5	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	PT Medikaloka Hermina Tbk
		b. Struktur Skala Upah No 469/KEP- DIR/MH/X/2021 Tentang Penetapan Struktur & Skala Upah Tahun 2021 dilingkungan PT MH Tbk				PT Medikaloka Hermina Tbk									
	c. Pedoman Pengelolaan SDM	PT Medikaloka Hermina Tbk													
A.6.c.2.b.		8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja		a. Struktur Skala Upah No 469/KEP- DIR/MH/X/2021 Tentang Penetapan Struktur & Skala Upah Tahun 2021 dilingkungan PT MH Tbk (Setiap tahun)	Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	%	5	100%	100%	100%	100%	100%	PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.6.c.2.a.3		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan		a. Melakukan edukasi kepada karyawan laki-laki yang sudah berkeluarga dan usia produktif (seperti program Pemerintah 2 anak cukup)	Jumlah pegawai laki-laki yang mengambil cuti parental/hamil	orang							PT Medikaloka Hermina Tbk	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
			reproduksi.					5	4 org/RS/Thn	7 org/RS/Thn	6 org/RS/Thn	5 org/RS/Thn	4 org/RS/Thn		PT Medikaloka Hermina Tbk
															PT Medikaloka Hermina Tbk
					b. Kebijakan plafon pengobatan untuk melahirkan mencover 2 anak										PT Medikaloka Hermina Tbk
A.6.c.2.a.4		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		Melakukan edukasi kepada karyawan wanita yang sudah berkeluarga dan usia produktif (seperti program Pemerintah 2 anak cukup)	Jumlah pegawai perempuan yang mengambil cuti parental/hamil	orang	5		20 org/RS/Thn	18 org/RS/Thn	16 org/RS/Thn	14 org/RS/Thn		PT Medikaloka Hermina Tbk
					b. Kebijakan plafon pengobatan untuk melahirkan mencover 2 anak										PT Medikaloka Hermina Tbk
A.3.g.1.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		a. Melakukan pelatihan Anti Korupsi	Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di	kegiatan	3	100%	25%	100%	100%	100%	100 JT	PT Medikaloka Hermina Tbk
A.3.g.2.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		b. Melakukan pelatihan Anti Korupsi untuk BOD dan BOC	Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	1	100%	100%	100%	100%	100%	100 JT	PT Medikaloka Hermina Tbk
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		b. Melakukan pelatihan Anti Korupsi untuk Karyawan	Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	3	100%	25%	100%	100%	100%	100 JT	PT Medikaloka Hermina Tbk
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil		Menambah keikutsertaan dalam asosiasi	Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi	5	6	6	6	6	6		PT Medikaloka Hermina Tbk
		3.1 3.2	Mengurangi rasio angka kematian hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup Mengakhiri kematian bayi baru lahir		Standardisasi Akreditasi RS	Jumlah RS yang memenuhi standar akreditasi baik nasional maupun internasional	RS	5	100% RS terakreditasi nasional dan 10 RS terakreditasi	100% RS terakreditasi nasional dan 2 RS terakreditasi	100% RS terakreditasi nasional dan 3 RS terakreditasi internasional	100% RS terakreditasi nasional dan 5 RS terakreditasi internasional	100% RS terakreditasi nasional dan 7 RS terakreditasi internasional		PT Medikaloka Hermina Tbk
Aspek Ekonomi															
A.3.c.1.a.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Aset atas piutang kepada BPJS, Asuransi Kemenkes, dan juga atas peningkatan aset tetap	Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah),	Juta rupiah	5	9.480.141	6.120.698	7.243.138	8.050.580	9.480.141		PT Medikaloka Hermina Tbk
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Kewajiban atas pembelian obat-obatan, alat kesehatan, pembangunan dan pinjaman kepada pihak ketiga	Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	Juta rupiah	5	2.348.509	2.411.743	2.771.991	2.549.109	2.348.509		PT Medikaloka Hermina Tbk
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Pendapatan atas jasa kesehatan, Pendidikan, Manajemen dan konsultasi	Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)	Milliar rupiah	5	8.808	4.811	5.828	7.130	8.808		PT Medikaloka Hermina Tbk

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.2.a.3.	Skala usaha L1K, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Adanya Program Cost Containment untuk mengendalikan biaya dan program tertentu untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit	Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Miliar rupiah	5	1.095	467	622	824	1.095	PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Split Stock untuk membuat nilai saham lebih valuable dimata masyarakat	Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)	%	5	45,56%	45,56%	45,56%	45,56%	45,56%	PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.3.c.4.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Penambahan jumlah RS Hermina di beberapa kota/kabupaten	Cakupan wilayah operasional berdasarkan tingkat administrasi	Provinsi kab/kota	5	40	35	37	39	40	1,5 T	PT Medikaloka Hermina Tbk
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Rekrutmen tenaga karyawan laki-laki dengan status PKWTT sesuai dengan Kebijakan Status Karyawan	Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang	5	3654	3429	3504	3579	3654	PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Rekrutmen tenaga karyawan Wanita dengan status PKWTT sesuai dengan Kebijakan Status Karyawan	Jumlah karyawan perempuan level staf	orang	5	11784	10110 Org	10510 org	10910 org	11310 org	PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Rekrutmen tenaga Karyawan sesuai dengan kebutuhan tenaga dengan usia dibawah 30 thn	Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang	5	8763	8526 org	8601	8677	8763	PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Rekrutmen tenaga Karyawan sesuai dengan kebutuhan tenaga dengan usia dibawah 30-50 thn	Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang	5	6333	5433 org	5733	6033	6333	PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Rekrutmen tenaga Karyawan sesuai dengan kebutuhan tenaga diatas 50 thn	Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang	5	607	382	457	532	607	PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Rekrutmen karyawan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan	Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang	5	10202	9602	9802	10002	10202	PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melanjutkan pendidikan S1 sesuai kualifikasi yang dibutuhkan	Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang	5	3619	3169	3319	3469	3619	PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.3.c.2.n.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melanjutkan pendidikan S2 sesuai kualifikasi yang dibutuhkan	Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang	5	147	117	127	137	147	PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.3.c.2.o.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melanjutkan pendidikan S3 sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, contohnya: sebagai pengajar di Poltek Hermina	Jumlah karyawan berpendidikan S3	orang	5	2	0	0	0	2	PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		a. Rekrutmen karyawan sesuai dengan Kebijakan Status Karyawan	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%	5	99%	99%	99%	98%	98%	98%	PT Medikaloka Hermina Tbk
				b. Monitoring dan evaluasi pada masa percobaan	PT Medikaloka Hermina Tbk										
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Rekrutmen karyawan untuk tingkat Manajemen/ Strategis dengan usia > 45 thn	Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%	5	0.2%	0.1%	0.1%	0,20%	0.2%	PT Medikaloka Hermina Tbk	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.3.c.2.r.		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin		a. Pekerja musiman diperbolehkan berdasarkan Kebijakan BOD	Persentase karyawan berstatus pekerja musiman atau pihak ketiga	%	5	0.1%	1.4% (diperbolehkan PKWT karena Pasien tinggi karena pandemi)	0.1%	0.1%	0.1%		PT Medikaloka Hermina Tbk
					b. Unit kerja yang outsourcing hanya untuk Security, Parkir, Kebersihan										PT Medikaloka Hermina Tbk
A.3.c.2.s.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		a. Survey Engagement setiap 3 bulan	Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%		1%	1.5%	1.5%	1%	1%		PT Medikaloka Hermina Tbk
					b. Tindak lanjut survey engagement salah satunya dengan melakukan Individual Career Plan & Individual Development Plan.										PT Medikaloka Hermina Tbk
					c. Monitoring DO (Dashboard HRD) tenaga Laki-laki sehingga terpantau dan ditindaklanjuti										PT Medikaloka Hermina Tbk
A.3.c.2.t.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		a. Survey Engagement setiap 3 bulan	Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	5	5%	8%	7%	6%	5%		PT Medikaloka Hermina Tbk
					b. Tindak lanjut survey engagement salah satunya dengan melakukan Individual Career Plan & Individual Development Plan.										PT Medikaloka Hermina Tbk
					c. Monitoring DO (Dashboard HRD) tenaga wanita sehingga terpantau dan ditindaklanjuti										PT Medikaloka Hermina Tbk
A.3.c.2.u.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Melakukan Rekrutmen Karyawan laki-laki sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan	Persentase karyawan laki-laki yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam	%	5	2%	1%	1.5%	1.5%	2%		PT Medikaloka Hermina Tbk
A.3.c.2.v.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Melakukan Rekrutmen Karyawan wanita sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.	Persentase karyawan perempuan yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam	%	5	80%	90%	98.5%	98.5%	80%		PT Medikaloka Hermina Tbk
A.2.a.4.	Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Melakukan Rekrutmen Karyawan dari tenaga lokal (kota) > 70%	Persentase karyawan lokal terhadap seluruh karyawan	%	5	90%	80%	85%	85%	90%		PT Medikaloka Hermina Tbk
															PT Medikaloka Hermina Tbk
					a. Mendata jumlah supplier lokal alkes										Jumlah UMKM dari wilayah lokal yang dilibatkan sebagai supplier
A.2.a.5.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			Distributor lokal farmasi 247, PMA 36, PMDN 43	Distributor lokal farmasi 235, PMA 37, PMDN 42	Distributor lokal farmasi 235, PMA 37, PMDN 42	Distributor lokal farmasi 235, PMA 37, PMDN 42	Distributor lokal farmasi 247, PMA 36, PMDN 43		PT Medikaloka Hermina Tbk				
					c. Mendata jumlah supplier lokal Alat umum			5	0	Distributor lokal BHP, bahan makanan : 129, PMDN : 51	Distributor lokal BHP, bahan makanan : 138, PMDN : 61	Distributor lokal BHP, bahan makanan : 147, PMDN : 71	Distributor lokal BHP, bahan makanan : 156, PMDN : 81		PT Medikaloka Hermina Tbk

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024			
		3.1 3.2	Mengurangi rasio angka kematian hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup dan hingga 25 per 1000 angka kematian balita		Penambahan jumlah Pasien yang terlayani	Jumlah pasien rawat jalan (RWJ)/hari dan pasien rawat inap (RWI)/hari yang dapat dilayani	Pasien/Hari	5	RWJ = 27.000 RWI = 4.640	RWJ = 18.750 RWI = 3.225	RWJ = 21.180 RWI = 3.640	RWJ = 23900 RWI = 4.110	RWJ = 27.000 RWI = 4.640		PT Medikaloka Hermina Tbk	
						Penambahan jumlah RS		RS	5	52	43	46	49	52		PT Medikaloka Hermina Tbk
							Penambahan jumlah Tempat Tidur (TT) RS		TT	5	7.400	5.300	5.900	6.600	7.400	
Aspek Lingkungan Hidup																
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.		Program energi terbarukan Panel Surya	Total bauran energi terbarukan	KWH	5	62721,6	0	31360,8	47041,2	62721,6		PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.6.d.3.a.1	Efisiensi Energi	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita		Program Green Hospital	Total konsumsi energi	KWH	5							PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.6.d.3.a.2		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.		Program Green Hospital	Total konsumsi air	liter	5							PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.6.d.b.2		7.3.1*	Intensitas energi primer.				Intensitas efisiensi energi yang dipergunakan	%	5							PT Medikaloka Hermina Tbk
A.6.d.3.b.3.		6.4.1.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.		Program Green Hospital		Efisiensi penggunaan air	liter	5							PT Medikaloka Hermina Tbk
A.2.a.4.		11.2.1.	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang		Program Green Hospital		Persentase moda transportasi ramah lingkungan yang dipergunakan (sepeda)	unit	5							PT Medikaloka Hermina Tbk
A.6.e.5.a.1.	Pencegahan dan Pengendalian Polusi	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		Program Green Hospital	Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis	kg	5							PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.6.e.5.a.2		6.3.1.	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.		Program Green Hospital	Proporsi limbah air yang dikelola	liter	5							PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.6.e.5.b		12.4.2.	Proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya		Program Green Hospital	Proporsi limbah berbahaya yang dikelola	kg	5							PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.6.e.5.a.3.a.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		Program Green Hospital	Proporsi limbah berbahaya (b3) - padat yang diolah	%	5	100	100	100	100	100	100		PT Medikaloka Hermina Tbk

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana							
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024									
A.6.e.5.a.3.b.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		Program Green Hospital	Proporsi limbah berbahaya (b3) - cair yang diolah	%	5	100	100	100	100	100		PT Medikaloka Hermina Tbk							
A.6.e.4.b		13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		Program Penanggulangan bencana RS	Jumlah kegiatan pelatihan pencegahan risiko bencana	kegiatan	5	52	43	46	49	52		PT Medikaloka Hermina Tbk							
A.6.e.4.a.1.	Adaptasi Perubahan Iklim	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		Program Green Hospital	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 1	ton CO2e	5	2.956.598,77	3.000.001,08	2.996.701,07	2.992.206,02	2.956.598,77		PT Medikaloka Hermina Tbk							
A.6.e.4.a.2.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		Program Green Hospital	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 2															PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.6.e.4.a.3.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		Program Green Hospital	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 3																PT Medikaloka Hermina Tbk
A.6.e.4.a.4.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		Program Green Hospital	Jumlah itensitas emisi																PT Medikaloka Hermina Tbk
A.6.e.6.c		12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		Program Proper LH (Green Bulding Council)	Jumlah bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang	unit	5	1	0	1	1	1		PT Medikaloka Hermina Tbk							
		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		belum ada	Jumlah kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	kegiatan	5	0	0	0	0	0		PT Medikaloka Hermina Tbk							
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.		Program Proper LH (Properda)			5	4	1	2	3	4		PT Medikaloka Hermina Tbk							
A.6.d.1.		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		Program Green Hospital	Jumlah biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	Juta rupiah		4658		3850	4235	4658		PT Medikaloka Hermina Tbk							
A.6.d.2.a.	Penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	8.4.1	Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP			Persentase penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaurulang	%	5	0	0	0	0	0		PT Medikaloka Hermina Tbk							
A.6.d.2.b.		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		Program Green Hospital	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	kg %		17365	15.000	15.750	16.537,50	17.365		PT Medikaloka Hermina Tbk							
A.6.e.6.a	Kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi		Kegiatan UKL UPL RS	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan terhadap seluruh jumlah yang				5%	5%	5%	5%		PT Medikaloka Hermina Tbk							
A.6.e.6.c		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001		belum ada	Jumlah sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	sertifikat		0	0	0	0	0		PT Medikaloka Hermina Tbk							
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru		Program Proper LH (daerah)			5	4	1	2	3	4		PT Medikaloka Hermina Tbk							

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.6.f.1.a	Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			Jumlah inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan	produk							PT Medikaloka Hermina Tbk	
		12.5	Secara substansial mengurangi produksi limbah melalui tindakan pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali		Pengurangan limbah dan emisi	Jumlah limbah dan emisi yang dapat dikurangi dari tahun dasar	%	5	>10%	2,5%	10%	>10%		PT Medikaloka Hermina Tbk	
		12.2	Mencapai manajemen berkelanjutan dan penggunaan yang efisien dari sumber daya alam		Penerapan green hospital	Jumlah RS yang menerapkan green hospital	%RS	5	50%	5%	10%	15%	50%	PT Medikaloka Hermina Tbk	
Internal															
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan		Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	5	100%	100%	100%	100%	100%	PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan		Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%	5	100%	100%	100%	100%	100%	PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3		Penerapan K3RS di seluruh RS Hermina	Jumlah kecelakaan kerja	kejadian	5	0	0	0	0	0	PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah penyakit akibat kerja	%	5	< 0,5 % dari Jumlah Karyawan	< 0,5 % dari Jumlah Karyawan	< 0,5 % dari Jumlah Karyawan	< 0,5 % dari Jumlah Karyawan	< 0,5 % dari Jumlah Karyawan	PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.6.c.2.d.1.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		a. Melakukan pendataan jumlah karyawan sesuai jenis kelamin b. Melakukan pelatihan sesuai kebutuhan c. Menghitung presentase capaian jumlah jam pelatihan sesuai jenis kelamin	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan	jam/tahun/karyawan	1	600	120	120	120	120	50 M	PT Medikaloka Hermina Tbk
A.6.c.2.d.2.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		a. Melakukan pendataan karyawan yang termasuk kategori entry, middle, dan senior, yaitu : - entry = karyawan baru s.d level 1 - middle = level 2 - senior = level 3 s.d BOD b. Melakukan pelatihan sesuai kebutuhan c. Menghitung presentase capaian jumlah jam pelatihan sesuai kategori entry, middle dan senior	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan	jam/tahun/karyawan	1	600	120	120	120	120	100 M	PT Medikaloka Hermina Tbk
A.6.c.2.d.3.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		a. Melakukan pendataan karyawan yang termasuk kategori entry, middle, dan senior, yaitu : - entry = karyawan baru s.d level 1 - middle = level 2 - senior = level 3 s.d BOD b. Melakukan pelatihan sesuai kebutuhan c. Menghitung presentase capaian jumlah jam pelatihan sesuai kategori entry, middle dan senior	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan	jam/tahun/karyawan	1	600	120	120	120	120	PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.6.c.2.d.4.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		a. Melakukan pendataan karyawan yang termasuk kategori entry, middle, dan senior, yaitu : - entry = karyawan baru s.d level 1 - middle = level 2 - senior = level 3 s.d BOD b. Melakukan pelatihan sesuai kebutuhan c. Menghitung presentase capaian jumlah jam pelatihan sesuai kategori entry, middle dan senior	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan	jam/tahun/karyawan	1	600	120	120	120	120	PT Medikaloka Hermina Tbk	
A.6.c.2.d.5.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		a. Melakukan pendataan karyawan yang termasuk kategori entry, middle, dan senior, yaitu : - entry = karyawan baru s.d level 1 - middle = level 2 - senior = level 3 s.d BOD b. Melakukan pelatihan sesuai kebutuhan c. Menghitung presentase capaian jumlah jam pelatihan sesuai kategori entry, middle dan senior	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan	jam/tahun/karyawan	1	600	120	120	120	120	PT Medikaloka Hermina Tbk	
	(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas	4.2	Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun		Pemberian beasiswa kepada masyarakat	Jumlah Penerima Beasiswa	Orang	5	500	100	100	100	100	30 M	PT Medikaloka Hermina Tbk
Eksternal															

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.6.f.2.a.2		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru		a. Promosi melalui offline (leaflet, brosur, spanduk, poster)	Persentase produk dan/jasa yang memiliki label atau informasi barang dan/atau jasa		5	100%	100%	100%	100%	100%	10 M	PT Medikaloka Hermina Tbk
A.6.c.3.a		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.		a. Edukasi atau penyuluhan offline dan online b. Bantuan bencana alam c. Pembinaan posyandu dan pemberian makanan tambahan d. Pemeriksaan ibu hamil (USG dan Konsultasi) e. Sunatan masal f. Operasi katarak g. Pengobatan gratis	Jumlah kegiatan yang menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar	kegiatan	6000	1600	1700	1800	1900			PT Medikaloka Hermina Tbk
															PT Medikaloka Hermina Tbk
															PT Medikaloka Hermina Tbk
															PT Medikaloka Hermina Tbk
															PT Medikaloka Hermina Tbk
															PT Medikaloka Hermina Tbk
A.6.c.3.b.1.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Persentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah	%	5	100%	100%	100%	100%	100%		PT Medikaloka Hermina Tbk
A.6.c.3.b.2.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan	5	0	0	0	0	0		PT Medikaloka Hermina Tbk
Nama Pemangku Kepentingan: PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA															
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.6.c.2.a.1		5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	1	Struktur BOD TGRA	Ratio BOD TGRA laki: perempuan = 3:1	%	5	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1		(PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA)
A.3.c.2.	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja			2	Head hunting khusus manager perempuan	Ratio Manager perempuan: laki	%	5	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1		(PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA)

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.6.c.2.a.2		8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities	3	tidak ada perbedaan. Variabel yang membedakan hanya kinerja dan level	Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1	%	5	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1		(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase BOD dan BOC TGRA yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	5	100	100	100	100	100		(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase karyawan TGRA yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	5	100	100	100	100	100		(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil			Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi	5	2	3	4	5	6		(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)
Aspek Ekonomi															
A.3.c.1.a.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Perhitungan dalam RP Juta	Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah),	Juta rupiah	5	#REF!	#REF!	1.384.833.784.479	1.784.833.784.479	16.575.746.514.479		(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Perhitungan dalam RP Juta	Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	Juta rupiah	5	#REF!	#REF!	761.658.581.463	1.249.383.649.135	7.459.085.931.516		(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Pendapatan dalam RP juta	Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)	Juta rupiah	5	#REF!	#REF!	265.063.445.768	265.063.445.768	1.835.838.152.348		(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Laba Perusahaan dalam RP juta	Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Juta rupiah	5	#REF!	#REF!	166.666.931.405	130.070.538.840	1.255.459.392.067		(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Saham dimiliki publik dan individu	Persentase kepemilikan saham (publik dan individu);	%	5	Individu : 28,76 Publik : 71,24	Individu : 28,76 Publik : 71,24	Individu : 28,76 Publik : 71,24	Individu : 28,76 Publik : 71,24	Individu : 28,76 Publik : 71,24		(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)
A.3.c.4.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Berada di Sumatera	Cakupan wilayah operasional berdasarkan tingkat administrasi	Provinsi kab/kota	5	2	2	2	2	2		(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang	5	22	22	44	57	117		(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan perempuan level staf	orang	5	5	5	4	6	8		(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang	5	19	19	40	50	82		(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang	5	11	11	24	29	48		(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang	5	2	2	4	4	7		(PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA)
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang	5	4	4	27	33	55		(PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA)
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang	5	24	24	34	41	68		(PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA)
A.3.c.2.n.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang	5	4	4	7	9	14		(PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA)
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Hanya Pekerja (PWTT)	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%	5	60	60	60	60	60		(PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA)
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		PWT (Pekerja waktu Tertentu)	Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%	5	40	40	40	40	40		(PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA)
A.3.c.2.u.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Total Recruitment Laki-laki	Persentase karyawan laki-laki yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam	%	5	70	70	70	70	70		(PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA)
A.3.c.2.v.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Total Recruitment Perempuan	Persentase karyawan perempuan yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam	%	5	30	30	30	30	30		(PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA)
A.2.a.4.	Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Total Pekerja Lokal tidak dapat dihitung karena sesuai peraturan kerja adalah ditempatkan di seluruh wilayah operasi.	Persentase karyawan lokal terhadap seluruh karyawan	%	5	90	90	90	90	90		(PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA)
A.2.a.5.		9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Community development	Jumlah UMKM dari wilayah lokal yang dilibatkan sebagai supplier	UMKM	5	NA	10	20	30	50		(PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA)
A.2.a.4. A.6.f.1.a	Produk ramah lingkungan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		kelistrikan	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	produk	5	NA	NA	29,8 MW	43,8 MW	510,8 MW		(PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA)
Aspek Lingkungan Hidup															
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.		PLTMH Batang Toru 3	Proyeksi Produksi Listrik	MWh		0	0	10 MW (2 x 5.0 MW)	10 MW (2 x 5.0 MW)	10 MW (2 x 5.0 MW)	350 Milyar	(PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA)
A.6.d.3.a.1			Bauran energi terbarukan.		PLTMH Sisira	Proyeksi Produksi Listrik	MWh		0	0	9.8 MW (2 X 4.9 MW)	9.8 MW (2 X 4.9 MW)	9.8 MW (2 X 4.9 MW)	248 Milyar	(PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA)
			Bauran energi terbarukan.		PLTMH Batang Toru 4	Proyeksi Produksi Listrik	MWh		0	0	10 MW (2 x 5.0 MW)	10 MW (2 x 5.0 MW)	10 MW (2 x 5.0 MW)	350 Milyar	(PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA)

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
			Bauran energi terbarukan.		PLTMH Naga Timbul	Proyeksi Produksi Listrik	MWh		0	0	NA	7 MW (2 X 3.5 MW)	7 MW (2 X 3.5 MW)	200 Milyar	(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)
			Bauran energi terbarukan.		PLTMH Huta Dolok	Proyeksi Produksi Listrik	MWh		0	0	NA	7 MW (2 X 3.5 MW)	7 MW (2 X 3.5 MW)	200 Milyar	(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)
			Bauran energi terbarukan.		PLTA Teunom II	Proyeksi Produksi Listrik	MWh		0	0	NA	NA	332 MW	10.515 Milyar	(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)
			Bauran energi terbarukan.			PLTA Teunom III	Proyeksi Produksi Listrik	MWh		0	0	NA	NA	135 MW	4.275 Milyar
	Efisiensi Energi		Intensitas Energi Primer		Peningkatan kapasitas dan kualitas Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro	Proyeksi Produksi Listrik	MWh		0	0	NA	40 MW (8 x 5.0 MW)	60 MW (12 x 5.0 MW)	1.479 Milyar	(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)
Eksternal															
A.6.f.2.a.2		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru		Semua produk memiliki label informasi barang/dan jasa	Persentase produk dan/jasa yang memiliki label atau informasi barang dan/atau jasa	%	NA	100	100	100	100	100		(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik		Persentasi pengaduan masyarakat yang ditTL	Persentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah	%	NA	100	100	100	100	100		(PT Terrega Asia Energy Tbk-TGRA)
Nama Pemangku Kepentingan: Danone Indonesia															
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.6.c.2.a.1	Keseimbangan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	1		Ratio BOD laki: perempuan = 3:1	%	5	9:1	9:1					Danone Indonesia
A.3.c.2.				2	Head hunting khusus manager perempuan	Ratio Manager perempuan: laki	%	5	4:1	4:1					Danone Indonesia
A.6.c.2.a.4			5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan			Jumlah pegawai perempuan yang mengambil cuti parental/hamil	orang		27	40				
A.3.g.1.	Komunikasi dan pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Semua karyawan berkomunikasi dengan baik termasuk komisaris dan karyawan eksternal	Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di	kegiatan	Berkala	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		Danone Indonesia
A.3.g.2.			16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	100%		Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	Berkala	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		100%	Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	Berkala	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		Danone Indonesia	
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil			Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi		17	17				Danone Indonesia	
Aspek Ekonomi															
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang		10816	10949				Danone Indonesia	
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan perempuan level staf	orang		1491	1375				Danone Indonesia	
A.6.c.2.a.6		8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan)			Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang		0	0				Danone Indonesia	
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang		1683	1738				Danone Indonesia	
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang		10063	10035				Danone Indonesia	
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang		1884	1916				Danone Indonesia	
A.2.a.4.	Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			Persentase karyawan lokal terhadap seluruh karyawan	%		99,40%	99,50%				Danone Indonesia	
A.2.a.4. A.6.f.1.a	Produk ramah lingkungan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	produk		3	17				Danone Indonesia	
Aspek Lingkungan Hidup															
A.6.e.5.a.1.		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang			Jumlah limbah dan effluen yang dihasilkan berdasarkan jenis	% recovery rate	Setiap tahun	90%	90%	90%	90%	90%	Danone Indonesia	
A.6.e.5.a.2		6.3.1 .	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.			Proporsi limbah air yang dikelola	%	Setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	Danone Indonesia	
A.6.e.5.b	Pencegahan dan	12.4.2.	Proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya			Proporsi limbah berbahaya yang dikelola	%	Setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	Danone Indonesia	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.6.e.5.a.3.a.	Pengendalian Polusi	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).			Proporsi limbah berbahaya (b3) - padat yang diolah	%	Setiap tahun	100% diolah oleh pihak ke3 berijin KLHK	100% diolah oleh pihak ke3 berijin KLHK	100% diolah oleh pihak ke3 berijin KLHK	100% diolah oleh pihak ke3 berijin KLHK		Danone Indonesia	
A.6.e.5.a.3.b.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).			Proporsi limbah berbahaya (b3) - cair yang diolah	%	Setiap tahun	100% diolah oleh pihak ke3 berijin KLHK	100% diolah oleh pihak ke3 berijin KLHK	100% diolah oleh pihak ke3 berijin KLHK	100% diolah oleh pihak ke3 berijin KLHK		Danone Indonesia	
A.6.e.5.c.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).			Jumlah tumpahan limbah yang terjadi	per kejadian	Setiap tahun	0 kejadian tumpahan	0 kejadian tumpahan	0 kejadian tumpahan	0 kejadian tumpahan	0 kejadian tumpahan		Danone Indonesia
A.6.e.6.c		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001			Jumlah sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	sertifikat		20	20				Danone Indonesia	
A.6.f.1.a	Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			Jumlah inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan	produk		1	16				Danone Indonesia	
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. (kelompok penduduk 40%		WASH at workplace, Penyediaan air, sanitasi, dan higienitas dilokasi, kerja sesuai standar WBCSD	Target Sasaran adalah lebih dari 15000 karyawan Danone Indonesia memiliki akses	orang	5	15000	15000	15000	15000	50000	Danone Indonesia	
					Program WASH- Peningkatan akses terhadap air bersih, sanitasi dan Higienitas di masyarakat sekitar area operasional Aqua dan daerah lain yang membutuhkan	Jumlah akses terhadap air bersih, sanitasi dan Higienitas di masyarakat sekitar area operasional	Orang	5	50000	50000	50000	50000	50000	Danone Indonesia	
Internal															
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%		100%	100%				Danone Indonesia	
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%		99%	99%					Danone Indonesia
		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3		Program Vaksinasi Covid-19	Cakupan Vaksinasi Covid-19 per seluruh karyawan			100%	100%				Danone Indonesia	
Eksternal															
A.6.c.3.c	Pemda/maat/ri peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.			Persentase UMKM yang mendapat bantuan yang naik kelas			300	1000				Danone Indonesia	
					Program Donasi dalam rangka penanggulangan Covid-19	Jumlah dan Jenis Donasi yang diberikan								Danone Indonesia	
					Program Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan bagi masyarakat umum	Jumlah sentra vaksinasi yang difasilitasi								Danone Indonesia	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
		2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.		Edukasi Isi Piringku Buku Panduan yang merupakan bentuk dukungan Danone Indonesia terhadap Kampanye Isi Piringku yang digagas oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jumlah guru PAUD yang tereduksi			1000 Guru	1000 Guru	1000 Guru	1000 Guru	1000 Guru		Danone Indonesia
					Menjadikan isi piringku sebagai panduan orang tua dalam menyiapkan dan menyajikan makanan harian anak	Jumlah murid yang terpapar edukasi Isi Piringku			1000 siswa	1000 siswa	1000 siswa	1000 siswa	1000 siswa		Danone Indonesia
		2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta.		Program Gasing Nekmese dilakukan dengan cara peningkatan pengetahuan, praktik dan status gizi. Program ini sekaligus bertujuan Membangun dan meningkatkan kesadaran	Jumlah penerima manfaat			1000 Jiwa	2000 Jiwa					Danone Indonesia
					Program Tangkas dilakukan dengan cara peningkatan pengetahuan, praktik dan status gizi. Program ini sekaligus bertujuan Membangun dan meningkatkan kesadaran	Jumlah penerima manfaat			500 Jiwa	3000 Jiwa					Danone Indonesia
					Program Akasi Cegah Stunting	Jumlah daerah yang tereduksi untuk penanganan anak berisiko stunting dengan	Dinas Kesehatan Kab/Kota	5	100	100	100	100	114		Danone Indonesia
						Jumlah tenaga kesehatan yang tereduksi untuk penanganan anak berisiko stunting dengan	Tenaga Kesehatan	5	300	300	300	300	300		Danone Indonesia
					Program Generasi Sehat Indonesia (GESID)	Jumlah anak remaja yang didedukasi tentang pentingnya nutrisi dan PHBS			500	500	500	500		Danone Indonesia	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK															
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.6.c.2.a.1	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.			Ratio BOD laki: perempuan = 3:1	%	5		0%	20%	20%	20%	PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
A.3.c.2.					Head hunting khusus manager perempuan		Ratio Manager perempuan: laki	%	5		16,60%	-	-	-	PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.6.c.2.a.2		8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities	-		Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1	%	5		95,15%	-	-	-	PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
A.6.c.2.b.		8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja	-		Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	%	5		-	-	-	-	PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
A.6.c.2.a.3		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	-		Jumlah pegawai laki-laki yang mengambil cuti parental/hamil	orang	5		45	-	-	-	PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
A.6.c.2.a.4		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	-		Jumlah pegawai perempuan yang mengambil cuti parental/hamil	orang	5		45	-	-	-	PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Training dan Sosialisasi untuk Management Trainee dan WOM Managerial Program	Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan	5		6	-	-	-	PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		-	Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%			-	-	-	-	PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Peserta yang mengikuti adalah dari program Management Trainee dan WOM Managerial	Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	orang	5		133	-	-	-	PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil			Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi	5		5	-	-	-	PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024		
Aspek Ekonomi															
A.3.c.1.a.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		-	Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah),	Juta rupiah	5		4.823.748	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		-	Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	Juta rupiah	5		3.534.770	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		-	Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual	unit	5		152.962	327.027	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		-	Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)	Juta Rupiah	5		2.962.902	5,533,380.12	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		-	Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Juta rupiah	5		75.633	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		-	Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)	%	5		a. PT Bank Maybank Indonesia : 67.49 %	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.3.c.4.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		-	Cakupan wilayah operasional berdasarkan tingkat administrasi	Provinsi	5	187	165	169	177	187		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		-	Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang	5		349	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		-	Jumlah karyawan perempuan level staf	orang	5		191	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.6.c.2.a.6		8.7.1	Proportion and number of children aged 5–17 years engaged in child labour, by sex and age		-	Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang			-	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		-	Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang	5		610	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		-	Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang	5		1581	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		-	Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang	5		116	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		-	Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang	5		732	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024		
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		-	Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang	5		1552	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.3.c.2.n.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		-	Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang	5		23	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.3.c.2.o.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		-	Jumlah karyawan berpendidikan S3	orang				-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		-	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%	5		30,94%	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		-	Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%	5		1,62%	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.3.c.2.r.		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin		-	Persentase karyawan berstatus pekerja musiman atau pihak ketiga	%	5		67,44%	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.3.c.2.s.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		-	Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	5		14,48%	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.3.c.2.t.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		-	Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	5		4,68%	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.3.c.2.u.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		-	Persentase karyawan laki-laki yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%	5		74,36%	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.3.c.2.v.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		-	Persentase karyawan perempuan yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%	5		25,64%	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
Aspek Lingkungan Hidup															
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.		-	Total bauran energi terbarukan			-	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
A.6.d.3.a.1	Efisiensi Energi	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita		-	Total konsumsi energi	KWH	5	-	281.160	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
A.6.d.3.a.2		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri,		-	Total konsumsi air	m3	5	-	2.399	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024		
A.6.d.3.b.3.		6.4.1.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.			Efisiensi penggunaan air	%	5	-	-	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
A.6.e.4.b	Adaptasi Perubahan Iklim	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.			Jumlah kegiatan pelatihan pencegahan risiko bencana	kegiatan	5		4	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
Aspek Sosial															
Internal															
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	5	100%	100%	100%	100%		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%	5	100%	100%	100%	100%		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
A.6.c.2.d.3.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal		Training untuk Staff	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level entry dalam setahun	karyawan	5		561	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
A.6.c.2.d.4.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Training untuk Supervisor, Department Head dan Manager	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level middle dalam setahun	karyawan	5		1799	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
A.6.c.2.d.5.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Training untuk Senior Manager	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level senior dalam setahun	karyawan	5		39	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
Eksternal															
A.6.c.3.a		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.		Program CSR	Jumlah kegiatan yang menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar perusahaan	kegiatan	5		22	24	26	28	PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%	5		100%	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
A.6.c.3.b.2.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan	5		8	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
A.6.f.4.a.	Kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Persentase produk yang ditarik kembali dari pasar	%	5		0%	-	-		PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK	
Nama Pemangku Kepentingan: PT. BANK CENTRAL ASIA (BCA) Tbk															
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.6.c.2.a.1			Proporsi perempuan			Ratio BOD perempuan : laki	%							BCA	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program					2021	2022	2023	2024		
A.3.c.2.	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	yang berada di posisi managerial.		Senior, Middle, Line manager	Ratio Manager perempuan: laki	%							BCA	
A.6.c.2.a.2		8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities			Ratio Gaji perempuan : laki	%							BCA	
A.6.c.2.b.		8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja		Gaji Pokok Pekerja Tetap di Jakarta pada Tingkat Terendah Terhadap UMR	Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	%							BCA	
A.6.c.2.a.3		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.			Jumlah pegawai laki-laki yang mengambil cuti parental/hamil	orang							BCA	
A.6.c.2.a.4		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.			Jumlah pegawai perempuan yang mengambil cuti parental/hamil	orang							BCA	
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan							BCA	
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%							BCA	
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%							BCA	
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil		Jumlah serikat pekerja	Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi							BCA	
Aspek Ekonomi															
A.3.c.1.a.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah).	Juta rupiah							BCA	
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	Juta rupiah							BCA	
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual								BCA	
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)	Juta rupiah							BCA	
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Juta rupiah							BCA	
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)	%							BCA	
A.3.c.4.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Cakupan wilayan operasional berdasarkan tingkat administrasi	Provinsi kab/kota							BCA BCA	
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang							BCA	
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan perempuan level staf	orang							BCA	
A.6.c.2.a.6		8.7.1	Proportion and number of children aged 5-17 years engaged in child labour, by sex and age			Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang							BCA	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024		
A.3.c.2.i.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang							BCA	
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang								BCA
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang								BCA
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang								BCA
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang								BCA
A.3.c.2.n.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang								BCA
A.3.c.2.o.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S3	orang								BCA
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%								BCA
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%								BCA
A.3.c.2.r.		8.3.1.*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin			Persentase karyawan berstatus pekerja musiman atau pihak ketiga	%								BCA
A.3.c.2.s.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%								BCA
A.3.c.2.t.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%								BCA
A.3.c.2.u.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan laki-laki yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%								BCA
A.3.c.2.v.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan perempuan yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%								BCA
A.2.a.4.		Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis	9.3.1.*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			Persentase karyawan lokal terhadap seluruh karyawan	%							BCA
A.2.a.5.	9.3.1.*		Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			Persentase bahan baku dari wilayah lokal yang dipergunakan terhadap total bahan baku	%							BCA	
A.2.a.5.	9.3.1.*		Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			Jumlah UMKM dari wilayah lokal yang dilibatkan sebagai supplier	UMKM								BCA
A.2.a.4.	Produk ramah lingkungan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	produk							BCA	
A.6.f.1.a														BCA	
Aspek Lingkungan Hidup															
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1.*	Bauran energi terbarukan.			Total bauran energi terbarukan	cabang							BCA	
A.6.d.3.a.1		7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita			Total konsumsi energi	kwh							BCA	
A.6.d.3.a.2		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.			Total konsumsi air	m2								BCA
A.6.d.b.2		7.3.1.*	Intensitas energi primer.			Intensitas efisiensi energi yang dipergunakan	kWh/m2								BCA

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024		
A.6.d.3.b.3.	Efisiensi Energi	6.4.1.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.			Efisiensi penggunaan air								BCA	
A.2.a.4.		11.2.1.	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.			Persentase moda transportasi ramah lingkungan yang dipergunakan								BCA	
A.6.e.5.a.1.	Pencegahan dan Pengendalian Polusi	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang			Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis								BCA	
A.6.e.5.a.2		6.3.1.	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.			Proporsi limbah air yang dikelola								BCA	
A.6.e.5.b		12.4.2.	Proporsi limbah berbahaya yang dikelola menurut jenis penanganannya			Proporsi limbah berbahaya yang dikelola								BCA	
A.6.e.5.a.3.a.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).			Proporsi limbah berbahaya (b3) - padat yang diolah	%							BCA	
A.6.e.5.a.3.b.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).			Proporsi limbah berbahaya (b3) - cair yang diolah	%							BCA	
A.6.e.5.c.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).			Jumlah tumpahan limbah yang terjadi								BCA	
A.6.e.3.b.2		Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan			Jumlah luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati air	Ha							BCA
A.6.e.3.b.1	15.1.2.		Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.			Jumlah luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati darat	Ha							BCA	
	15.3.1.(a)		Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.										BCA		
	15.2.1.(a)		Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.										BCA		

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024		
A.6.e.3.b.3		15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.		mangrove, orngutan	Jumlah kegiatan konservasi keanekaragaman hayati darat untuk satwa langka	kegiatan							BCA	
		15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.											BCA	
A.6.e.4.b	Adaptasi Perubahan Iklim	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.			Jumlah kegiatan pelatihan pencegahan risiko bencana	kegiatan							BCA	
A.6.e.4.a.1.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 1								BCA	
A.6.e.4.a.2.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 2	ton CO2 eq							BCA	
A.6.e.4.a.3.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 3	ton CO2 eq							BCA	
A.6.e.4.a.4.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah tensitas emisi	ton CO2 eq							BCA	
A.6.e.6.c		12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			Jumlah bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional	unit								BCA
		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.			Jumlah kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	kegiatan								BCA
	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.												BCA	
A.6.d.1.		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.			Jumlah biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	Juta rupiah							BCA	
A.6.d.2.a.	Penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	8.4.1	Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP			Persentase penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaurulang	%							BCA	
A.6.d.2.b.		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang											BCA	
A.6.e.2.a		6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya			Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang								BCA	
A.6.e.2.b		15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati											BCA	
A.6.e.6.a	Kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi			Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan terhadap seluruh jumlah yang diterima	%							BCA	
A.6.e.6.c		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001			Jumlah sertifikasi di bidang								BCA	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024		
	ekosistem	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru			lingkungan yang dimiliki	serumika								BCA
A.6.f.1.a	Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan;	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			Jumlah inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan	produk								BCA
Aspek Sosial Internal															
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%								BCA
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%								BCA
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah kecelakaan kerja	kejadian								BCA
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah penyakit akibat kerja	kejadian								BCA
A.6.c.2.d.1.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan laki-laki dalam setahun	jam/tahun/karyawan								BCA
A.6.c.2.d.2.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan perempuan dalam setahun	jam/tahun/karyawan								BCA
A.6.c.2.d.3.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level entry dalam setahun	jam/tahun/karyawan								BCA
A.6.c.2.d.4.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level middle dalam setahun	jam/tahun/karyawan								BCA
A.6.c.2.d.5.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level senior dalam setahun	jam/tahun/karyawan								BCA
Eksternal															
A.6.c.3.c		8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.			Persentase UMKM yang mendapat bantuan yang naik kelas									BCA

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024		
A.6.f.2.a.1.a	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru			Persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan								BCA	
A.6.f.2.a.2		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru			Persentase produk dan/jasa yang memiliki label atau informasi barang dan/atau jasa								BCA	
A.4.c.2		17.6.1. (a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular			Jumlah kerjasama dalam rangka Sustainable Development dan/atau Sustainable Finance	kerjasama								BCA
A.6.c.3.a		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.		donor darah, desa binaan, sekolah binaan, PPA PPTI, magang bakti, beasiswa bakti, operasi katarak, klinik layanan kesehatan, tanggap bencana	Jumlah kegiatan yang menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar perusahaan	kegiatan								BCA
A.6.c.3.b.1.		Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%							BCA
A.6.c.3.b.2.			16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan							BCA
A.6.f.4.a.	Kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Persentase produk yang ditarik kembali dari pasar	%							BCA	
Nama Pemangku Kepentingan: PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA															
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.6.c.2.a.1	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.			Ratio BOD laki: perempuan = 3:1	%	5	03:01	02:01				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA	
A.3.c.2.					Head hunting khusus manager perempuan		Ratio Manager perempuan: laki	%	5	01:01	01:01				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.6.c.2.a.2		8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities			Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1	%	5	01:01	01:01				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA	
A.6.c.2.b.		8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja			Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	%	100%	100%	> 100%					PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.6.c.2.a.4		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.			Jumlah pegawai perempuan yang mengambil cuti parental/hamil	orang	Sesuai dengan target karyawan	Sesuai dengan target karyawan	1					PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
Aspek Ekonomi															

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024		
A.3.c.1.a.	Skala usaha UK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah),	Juta rupiah			49.405.534					PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	Juta rupiah			4.219.548					PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual									PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)	Juta rupiah				14.707.456				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Juta rupiah				14.071.899				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)	%				12,17%				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang				27%				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan perempuan level staf	orang				73%				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.6.c.2.a.6		8.7.1	Proportion and number of children aged 5–17 years engaged in child labour, by sex and age			Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang	N/A							PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang				7				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang				38				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang				16				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang				15				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang				26				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.3.c.2.n.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang				19				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.3.c.2.o.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S3	orang				1				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%				93%				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%				7%				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.3.c.2.r.		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin			Persentase karyawan berstatus pekerja musiman atau pihak ketiga	%								PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.3.c.2.s.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%				4,90%				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.3.c.2.t.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%				3,30%				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.3.c.2.u.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentasi karyawan laki-laki yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%				9,80%				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.3.c.2.v.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentasi karyawan perempuan yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%				4,90%				PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
Aspek Sosial															
Internal															

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024		
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%			55					PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%			52					
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah kecelakaan kerja	kejadian			0					PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah penyakit akibat kerja	kejadian			0					
A.6.c.2.d.1.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan laki-laki dalam setahun	jam/tahun/karyawan			24					PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.6.c.2.d.2.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan perempuan dalam setahun	jam/tahun/karyawan			24					PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.6.c.2.d.3.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level entry dalam setahun	jam/tahun/karyawan			24					PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.6.c.2.d.4.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level middle dalam setahun	jam/tahun/karyawan			24					PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024		
A.6.c.2.d.5.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level senior dalam setahun	jam/tahun/karyawan		24						PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
Eksternal															
A.6.c.3.c	Kegiatan TJSL yang relevan dengan isu SDGs - Edukasi - SMK Ora et Labora -	04:03:01	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		SMK Ora et Labora - membantu dalam pengembangan program dan kondisi sekolah	Jumlah murid dan pengembangan program			1						PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.6.c.3.c	Kegiatan TJSL yang relevan dengan isu SDGs - Program Wirasaha Muda khusus Mahasiswa	08.3.1 dan 1a	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin. Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan		ENVOY - Entrepreneur Development for Youth	Jumlah kelulusan, pencapaian pendapatan income dan dampak sekitar juga jumlah tenaga kerja yang mereka pekerjakan			1						PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.6.c.3.c	Kegiatan TJSL yang relevan dengan isu SDGs. - Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Para Guru se Indonesia	13:03:01	(indikator SDGs yang sesuai) - Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.		Green Leaders - Pendidikan Guru dan pemimpin lokal se Indonesia	Jumlah kelulusan dan dampak yang mereka berikan pada daerah mereka setempat			1						PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.6.c.3.c	Kegiatan TJSL yang relevan dengan isu SDGs - Pandemi Covid-19	3.b.3	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.		Mendonasikan APD kepada NAKES di beberap RS di Indonesia	Jumlah barang yang disumbahkan ke Rumah Sakit			1						PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
A.6.c.3.c	Kegiatan TJSL yang relevan dengan isu SDGs - Bantuan untuk para kelompok miskin & rentan, lansia, dan penyandang cacat	01:03:01	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan		Bantuan untuk para kelompok miskin & rentan, lansia, dan penyandang cacat	Jumlah bantuan yang disumbangkan kepada yang membutuhkan			2						PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk															
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.6.c.2.a.1	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	1		Ratio BOD perempuan: laki =1:3	%	4	25%	25%	25%	25%	25%	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.c.2.			Head hunting khusus manager perempuan	2		Ratio Manager perempuan: laki =1:4	%	4	33%	20%	33%	33%	33%	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.6.c.2.a.2		8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities	3		Kebijakan remunerasi	Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1	%	4	01:01	01:01	01:01	01:01	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.6.c.2.b.		8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja			Disesuaikan dengan ketentuan upah minimum regional	Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	Rp	4	31.250	28.125	29.375	30.000	31.250	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk
A.6.c.2.a.3		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.				Jumlah pegawai laki-laki yang mengambil cuti parental/hamil	orang							PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk
A.6.c.2.a.4		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.			Rekrutmen Pegawai perempuan usia 15 - 30	Jumlah pegawai perempuan yang mengambil cuti parental/hamil	orang	4	8	5	6	7	8	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan	4	3	3	3	3	3	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	4	100%	100%	100%	100%	100%	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	4	44%	18%	42%	42%	42%	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil			Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi	4	2	2	2	2	2	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
Aspek Ekonomi															
A.3.c.1.a.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah),	Juta rupiah	4	390.170	303.332	336.031	359.649	390.170	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	Juta rupiah	4	167.409	111.606	135.988	149.384	167.409	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual	Class Of Business (COB)	4	8	8	8	8	8	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Pendapatan atau penjualan (jumlah omzet)	Juta rupiah	4	195.103	112.898	135.488	162.585	195.103	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Juta rupiah	4	20.495	11.693	14.318	17.222	20.495	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)	%	4	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024		
A.3.c.4.	Skala usaha UK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Cakupan wilayah operasional berdasarkan tingkat administrasi	Provinsi kab/kota	4	2	2	2	2	2	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang	4	10	5	7	8	10	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan perempuan level staf	orang	4	13	13	13	13	13	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.6.c.2.a.6		8.7.1	Proportion and number of children aged 5–17 years engaged in child labour, by sex and age			Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang	4	0	0	0	0	0	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang	4	12	10	12	13	13	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang	4	20	17	18	20	20	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang	4	6	6	6	6	6	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang	4	11	11	11	11	11	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang	4	26	21	24	26	26	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.c.2.n.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang	4	2	1	1	2	2	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.c.2.o.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S3	orang							PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%	4	100%	94%	100%	100%	100%	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%	4	0%	9%	6%	3%	0%	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.c.2.r.		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin			Persentase karyawan berstatus pekerja musiman atau pihak ketiga	%							PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.c.2.s.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	4	0%	3%	0%	0%	0%	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.c.2.t.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	4	0%	6%	0%	0%	0%	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.c.2.u.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan laki-laki yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%	4	33%	33%	33%	33%	33%	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.3.c.2.v.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan perempuan yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%	4	67%	67%	67%	67%	67%	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.2.a.4.		Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			Persentase karyawan lokal terhadap seluruh karyawan	%	4	100%	100%	100%	100%	100%	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk
A.2.a.5.			9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			Persentase bahan baku dari wilayah lokal yang dipergunakan terhadap total bahan baku	%							PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk
A.2.a.5.	9.3.1*		Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			Jumlah UMKM dari wilayah lokal yang dilibatkan sebagai supplier	UMKM							PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.2.a.4.	Produk ramah lingkungan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	produk							PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.6.f.1.a														PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
Aspek Lingkungan Hidup															

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024		
A.6.e.6.c	Adaptasi Perubahan Iklim	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.			Jumlah kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	kegiatan	4	1	0	1	1	1		PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.												
A.6.d.1.		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.			Jumlah biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	Juta rupiah	4	30	0	10	10	10		PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk
Aspek Sosial															
Internal															
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	4	100%	100%	100%	100%	100%		PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SISN Bidang Kesehatan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%	4	100%	100%	100%	100%	100%		PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah kecelakaan kerja	kejadian	4	0	0	0	0	0		PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah penyakit akibat kerja	kejadian	4	0	0	0	0	0		PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk
A.6.c.2.d.1.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata jumlah pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan laki laki dalam setahun	Jumlah Pelatihan/Tahun	4	12	12	12	12	12		PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024		
A.6.c.2.d.2.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata jumlah pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan perempuan dalam setahun	Jumlah Pelatihan/Tahun	4	12	12	12	12	12	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.6.c.2.d.3.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata jumlah pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level entry dalam setahun	Jumlah Pelatihan/Tahun	4	12	12	12	12	12	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.6.c.2.d.4.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata jumlah pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level middle dalam setahun	Jumlah Pelatihan/Tahun	4	12	12	12	12	12	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.6.c.2.d.5.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata jumlah pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level senior dalam setahun	Jumlah Pelatihan/Tahun	4	6	6	6	6	6	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
Eksternal															
A.4.c.2	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	17.6.1. (a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular			Jumlah kerjasama dalam rangka Sustainable Development dan/atau Sustainable Finance	kerjasama/Perjanjian Kerjasama	4	1	0	1	1	1	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.6.c.3.a		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.			Jumlah kegiatan yang menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar perusahaan	kegiatan	4	1	0	1	1	1	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh perusahaan	pengaduan	4	0	0	0	0	0	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
						Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%	4	100%	100%	100%	100%	100%	PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana	
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024			
A.6.c.3.b.2.						Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan	4	0	0	0	0	0		PT. VICTORIA INSURANCE, Tbk	
Nama Pemangku Kepentingan: PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk																
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan																
A.6.c.2.a.1	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.		Independent Head Hunter	Ratio BOD laki: perempuan = 3:1	%	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.c.2.					Independent Head Hunter	Ratio Manager perempuan: laki	%	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.6.c.2.a.2		8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities				Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1	%	5	01:01						PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk
A.6.c.2.b.		8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja			Kebijakan kesejahteraan karyawan	Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	%	5	> 100%						PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk
A.6.c.2.a.3		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.			Kebijakan kepegawaian	Jumlah pegawai laki-laki yang mengambil cuti parental/hamil	orang	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk
A.6.c.2.a.4		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.			Kebijakan kepegawaian	Jumlah pegawai perempuan yang mengambil cuti parental/hamil	orang	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Deklarasi Pakta Integritas, Penyampaian Surat Anti Gratifikasi	Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Deklarasi Pakta Integritas, Pelatihan Anti fraud dan Korupsi	Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	5	100%						PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Deklarasi Pakta Integritas, Pelatihan Anti fraud dan Korupsi	Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	5	100%						PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil			Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
Aspek Ekonomi																
A.3.c.1.a.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah),	Juta rupiah	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	Juta rupiah	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Inovasi produk dan jasa	Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual		5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)	Juta rupiah	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Juta rupiah	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)	%	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana	
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024			
A.3.c.4.	Skala usaha UK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Cakupan wilayah operasional berdasarkan tingkat administrasi	Provinsi kab/kota	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kebijakan perekrutan karyawan	Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kebijakan perekrutan karyawan	Jumlah karyawan perempuan level staf	orang	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.6.c.2.a.6		8.7.1	Proportion and number of children aged 5–17 years engaged in child labour, by sex and age		Kebijakan perekrutan karyawan	Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan usia 30-40 tahun	orang	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di atas 40 tahun	orang	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.c.2.n.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.c.2.o.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S3	orang	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kebijakan kepegawaian	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kebijakan kepegawaian	Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.c.2.r.		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin		Kebijakan kepegawaian	Persentase karyawan berstatus pekerja musiman atau pihak ketiga	%	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.c.2.s.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kebijakan Berakhirnya Hubungan Kerja	Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.c.2.t.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kebijakan Berakhirnya Hubungan Kerja	Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.c.2.u.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kebijakan Rekrutmen	Persentasi karyawan laki-laki yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.3.c.2.v.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kebijakan Rekrutmen	Persentasi karyawan perempuan yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.2.a.4.		Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Kebijakan Rekrutmen	Persentase karyawan lokal terhadap seluruh karyawan	%	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk
A.2.a.5.			9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			Persentase bahan baku dari wilayah lokal yang dipergunakan terhadap total bahan baku	%	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk
A.2.a.5.	9.3.1*		Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			Jumlah UMKM dari wilayah lokal yang dilibatkan sebagai supplier	UMKM	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.2.a.4.	Produk ramah lingkungan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		Melakukan inovasi produk & layanan	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	produk	5							PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
Aspek Lingkungan Hidup																
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.			Total bauran energi terbarukan									PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	
A.6.d.3.a.1	Efisiensi Energi	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita		Melakukan penyesuaian cara kerja dan mengurangi luasan tempat kerja, menggunakan solar panel, mengganti AC dan genset, penggunaan LED, pengurangan kendaraan operasional	Total konsumsi energi	Ton setara CO ₂		efisiensi 10%						PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program					2021	2022	2023	2024		
A.6.e.4.b	Adaptasi Perubahan Iklim	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		fire drill	Jumlah kegiatan pelatihan pencegahan risiko bencana	kegiatan		1x/tahun						PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk
A.6.f.1.a	Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan;	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		Tabungan Sustainability Linked Wakaf	Jumlah inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan	produk		5						PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk
Aspek Sosial															
Internal															
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan		Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%		100%						PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan		Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%		100%						PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3		Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja	Jumlah kecelakaan kerja	kejadian		0						PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3		Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja	Jumlah penyakit akibat kerja	kejadian		0						PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk
Nama Pemangku Kepentingan: PT. PANIN SEKURITAS, Tbk															
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.6.c.2.b.		8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja		Gaji pekerja diatas UMR	Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	%	5	100	100	100	100	100	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapani	Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan	5	1	1	1	1	1	tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapani	Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	5	50%	50	50	50	50	tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapani	Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	5	50%	50	50	50	50	tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2.(b)	Kebebasan sipil		Tidak melarang berorganisasi	Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi	5	2	2	2	2	2	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk
Aspek Ekonomi															
A.3.c.1.a.	Skala usaha LK, Emiten, dan	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah),	Milyar rupiah	5	Tbc	Tbc	Tbc	Tbc	Tbc	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	Milyar rupiah	5	Tbc	Tbc	Tbc	Tbc	Tbc	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita				Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual	Milyar rupiah	5	Tbc	Tbc	Tbc	Tbc	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita				Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)	Milyar rupiah	5	Tbc	Tbc	Tbc	Tbc	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita				Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Milyar rupiah	5	Tbc	Tbc	Tbc	Tbc	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita				Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)	%	5	40,25%	40,25%	40,25%	40,25%	40,25%	Tbc

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana	
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024			
A.3.c.4.	Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Dengan produk aplikasi online trading (POST) Panin Online Stok Trading	Cakupan wilayah operasional berdasarkan tingkat administrasi	Provinsi	5	34	34	34	34	34	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk	
A.6.c.2.a.6		8.7.1	Proportion and number of children aged 5–17 years engaged in child labour, by sex and age		Kebijakan perekrutan karyawan	Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang	5	0	0	0	0	0	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk	
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang	5	30%	26%	26%	26%	26%	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk	
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang	5	60%	62%	62%	60%	60%	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk	
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang	5	10%	12%	12%	10%	10%	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk	
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang								Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang	5	65%	65%	65%	65%	65%	tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk	
A.2.a.4.		Produk ramah lingkungan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		Melakukan inovasi produk & layanan	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	produk	5	1	0	0	1	1	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk
Aspek Lingkungan Hidup																
A.6.d.3.a.1	Efisiensi Energi	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita		Melakukan kegiatan campaign Green Office	Total kegiatan campaign agar bijak konsumsi energi	Jumlah per tahun	5	2	2	2	2	2	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk	
A.6.d.3.a.2		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.		Melakukan kegiatan campaign Green Office	Total kegiatan campaign agar bijak konsumsi air	Jumlah per tahun	5	2	1	2	2	2	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk	
A.6.e.4.b	Adaptasi Perubahan Iklim	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		Melakukan kegiatan Business Continuity Plan sesuai dengan SK Direksi IDX Kep-00014/BEI/01-2021 mengenai Perubahan pedoman Remote Trading	Jumlah kegiatan pelatihan pencegahan risiko bencana dilakukan 1x dalam setahun	kegiatan	5	1	1	1	1	1	tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk	
A.6.f.1.a	Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan;	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			Jumlah inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan	produk	5	1	0	0	1	1	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk	
Aspek Sosial																
Internal																
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	5	100	100	100	100	100	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk	
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%	5	100	100	100	100	100	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk	
Eksternal																

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2024)	Target Pencapaian				Alokasi Dana (Juta Rp)	Lembaga Pelaksana
			Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program					2021	2022	2023	2024		
A.6.c.3.a	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.		Perseroan akan mempublikasikan laporan keberlanjutannya pada saat laporan keberlanjutan pertama dirilis di April 2022	Jumlah kegiatan yang menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar perusahaan	kegiatan	5	1	0	1	1	1	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik		Pengaduan nasabah melalui customer care	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%	5	100	100	100	100	100	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk
A.6.c.3.b.2.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan	5	10	10	10	10	10	Tbc	PT. PANIN SEKURITAS, Tbk

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Target Pencapaian							Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	2021	2022	2023	2024			
Nama Pemangku Kepentingan: PT. Menteng Kencana Mas																
Aspek Lingkungan Hidup																
A.6.e.3.b.1	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.1.2.(a)	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)	1	HCV Assesment oleh Konsultan Remark Asia Tahun 2016	2705,36	Hektar (Ha)	Satu Tahun	Lima Tahun	2705,36	2705,36	2705,36	2705,36		PT Menteng Kencana Mas	
				2	Membangun persemaian anakan alam untuk upaya restorasi kawasan HCV dan sempadan sungai	2000	Bibit	Satu tahun	Lima tahun	2000	2000	2000	2000		PT Menteng Kencana Mas	
				3	Penanaman areal sempadan dan kawasan HCV	250	Bibit	Satu Tahun		700	700	700	700		PT Menteng Kencana Mas	
A.6.e.3.b.3	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.5.1*	Indeks Daftar Merah (Red-list index)	1	Mengidentifikasi sebaran dan jenis satwaliar	31	Jenis	Satu Tahun		31	31	31	31	5	PT Menteng Kencana Mas	
				2	Mengidentifikasi sebaran dan jenis tumbuhan	45	Jenis	Satu Tahun		45	45	45	45	5	PT Menteng Kencana Mas	
				3	Melakukan monitoring satwaliar prioritas yaitu bekantan (<i>Nasalis larvatus</i>)	1	Jenis	Satu Tahun		1	1	1	1		PT Menteng Kencana Mas	
A.6.e.e.a	Kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.		Pemantauan/Patrol area konservasi secara periodik. Perusahaan PT MKM belum pernah mengalami kejadian perdagangan ilegal terhadap tumbuhan dan satwa liar.	100	Persen (%)	1	5	100	100	100	100	20	PT Menteng Kencana Mas	
		15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL		Pemantauan/Patrol area konservasi secara periodik. Perusahaan PT MKM belum pernah mengalami kejadian perdagangan ilegal terhadap tumbuhan dan satwa liar.	0	Kasus	Satu Tahun	Lima Tahun	0	0	0	0	20	PT Menteng Kencana Mas	
Nama Pemangku Kepentingan: BIOTROP																
Aspek Lingkungan Hidup																
		15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif (JAI).	1	Pengendalian tanaman akasia mangium 2.240 batang di dalam areal kerja.	Sebaran populasi tanaman akasia mangium terkendali dan musnah dari dalam areal kerja	individu/batang	7	2026	230	350	425	435	54	Biotrop	
				2	Pemusnahan tanaman kelapa sawit 1979 batang di dalam areal kerja.	Tanaman kelapa sawit musnah dari dalam areal kerja	individu/batang	7	2026	100	60	40	30	66	Biotrop	
Nama Pemangku Kepentingan: PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.																
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan																
A.3.c.2.					Ratio Manager perempuan: laki	%									Biotrop	
A.6.c.2.a.2		8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities		Compensation Fairness	Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1	%	3	100%	100%	100%	100%			BRI	
A.6.c.2.b.		8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja		Compensation Fairness	Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	%		114%	114%	114%	114%			BRI	
A.6.c.2.a.3		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		Paternity Leave Policy	Jumlah pegawai laki-laki yang mengambil cuti parental/hamil	orang		1.468	1.468	1.468	1.468			BRI	
A.6.c.2.a.4		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		Maternity Leave Policy	Jumlah pegawai perempuan yang mengambil cuti parental/hamil	orang		3.632	3.632	-	3.632			BRI	
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan								BRI	
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%								BRI	
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%								BRI	
A.3.e		Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil		Keanggotaan dalam asosiasi	Jumlah keanggotaan pada asosiasi	Jumlah asosiasi	3 Tahun		5 Asosiasi	6 Asosiasi	7 Asosiasi	8 Asosiasi		BRI
	(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas untuk penguatan corporate governance untuk isu sustainability		(indikator SDGs yang sesuai)												BRI	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai POKJ S1/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	2021				2022	2023	2024			
Aspek Ekonomi																
A.3.c.1.a.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Penetapan target total aset tahun berjalan dan proyeksi hingga 3 tahun ke depan	Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah).	Juta rupiah	3 Tahun	1.747.131	1.413.304	1.505.916	1.612.130	1.747.131		BRI	
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Penetapan target total DPK tahun berjalan dan proyeksi hingga 3 tahun ke depan	Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	Juta rupiah	3 Tahun	1.276.583	1.023.113		1.176.136	1.276.583		BRI	
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual										BRI
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)		Juta rupiah								BRI
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Penetapan target laba bersih Perusahaan tahun berjalan dan proyeksi 3 tahun ke depan	Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Juta rupiah	3 Tahun	41.351	13.377	23.516	30.140	41.351		BRI
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita				Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)	%								BRI
A.3.c.4.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita				Cakupan wilayah operasional berdasarkan tingkat administrasi	Provinsi/kab/kota								BRI
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Implementasi Reinventing Job (Strategic Workforce Planning)	Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang	3	47.724		48.205	47.964	47.724		BRI
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Implementasi Reinventing Job (Strategic Workforce Planning)	Jumlah karyawan perempuan level staf	orang	3	37.182		37.556	37.368	37.182		BRI
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Implementasi Reinventing Job (Strategic Workforce Planning)	Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang	3	-		-	-	-		BRI
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Implementasi Reinventing Job (Strategic Workforce Planning)	Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang	3	25.694		25.953	25.823	25.694		BRI
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Implementasi Reinventing Job (Strategic Workforce Planning)	Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang	3	58.292		58.879	58.585	58.292		BRI
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Implementasi Reinventing Job (Strategic Workforce Planning)	Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang	3	4.316		4.359	4.337	4.316		BRI
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal				Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang								BRI
A.3.c.2.n.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Brilian Bright Scholarship Program	Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang	3							BRI
A.3.c.2.o.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal				Jumlah karyawan berpendidikan S3	orang								BRI
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Implementasi Reinventing Job (Strategic Workforce Planning)	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%	3	65%		67%	66%	65%		BRI
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal				Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%								BRI
A.3.c.2.s.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Employee Engagement & Experience Program	Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	3	2.15%	2.25%	2.20%	2.15%			BRI
A.3.c.2.t.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Employee Engagement & Experience Program	Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	3	1.15%	1.2%	1.18%	1.15%			BRI
A.3.c.2.u.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal				Persentasi karyawan laki-laki yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%								BRI
A.3.c.2.v.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal				Persentasi karyawan perempuan yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%								BRI
A.2.a.4.		Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			Persentase karyawan lokal terhadap seluruh karyawan	%								BRI
A.2.a.4. A.6.f.1.a		Produk ramah lingkungan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	produk								BRI
				Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan		Serapan anggaran		Rupiah	2 Tahun	2.700.000.000	3.150.000.000	-	-	-	3.000.000.000	BRI
				Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas		Bantuan Peralatan Usaha										BRI
			Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan		Pelatihan UMKM	Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan sesuai dengan target	Pelaku usaha/UMKM	3 Tahun	700 UMKM	500 UMKM	500 UMKM	-	-	5.000.000.000	BRI	
	(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas		(indikator SDGs yang sesuai)												BRI	
Aspek Lingkungan Hidup																
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.		Penerapan Alih daya dari Sumber Energi Fosil ke sumber energi terbarukan (Tenaga Surya) sebagai bentuk Penerapan Konsep ESG di dalam pengelolaan Fixed Assets	Total bauran energi terbarukan	UKO Terpasang Panel Surya	3 Tahun	33 UKO	3 UKO BRI Terpasang Panel Surya untuk kebutuhan energi listrik	10 UKO BRI Terpasang Panel Surya untuk kebutuhan energi listrik	20 UKO BRI Terpasang Panel Surya untuk kebutuhan energi listrik			Besar kebutuhan alokasi anggaran atau pola kerjasama sedang proses RFI kepada penyedia barang/jasa	BRI
A.6.d.3.a.1		7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita			Total konsumsi energi									BRI	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.6.d.3.a.2	Efisiensi Energi	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.			Total konsumsi air								BRI	
A.6.d.b.2		7.3.1*	Intensitas energi primer.			Intensitas efisiensi energi yang dipergunakan								BRI	
A.6.d.3.b.3		6.4.1.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.			Efisiensi penggunaan air									BRI
A.6.e.4.b	Adaptasi Perubahan Iklim	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.			Jumlah kegiatan pelatihan pencegahan risiko bencana								BRI	
A.6.e.4.a.1.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 1								BRI	
A.6.e.4.a.2.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 2								BRI	
A.6.e.4.a.3.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 3								BRI	
A.6.e.4.a.4.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah tinitas emisi									BRI
A.6.e.6.c		12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			Jumlah bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional									BRI
		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.			Jumlah kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	kegiatan								BRI
	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BRIU.												BRI	
A.6.d.1.		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.			Jumlah biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	Juta rupiah							BRI	
A.6.e.6.c		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001			Jumlah sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	sertifikat							BRI	
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Briu											BRI	
A.6.f.1.a	Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan;	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan (PBIB) / Sustainable Procurement sangat terkait dengan konsep yang berorientasi kepada Aspek ESG (Environment, Social, Governance) dengan melakukan shifting barang dan jasa yang digunakan di BRI menjadi produk-produk yang ramah lingkungan (Green Product) telah menjadi isu penting agar selaras dengan kebijakan keberlanjutan (Sustainability) BRI	Jumlah inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan	produk	3 Tahun	3 Produk		1 Produk ramah lingkungan baru (Penggunaan alat kantor Stationary/ folder file ekotabel sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/S/ETJEN/KUM.1/2/2019)	1 Produk ramah lingkungan baru (Penggunaan Furnitur berbahan kayu Sistem verifikasi dan legalitas Kayu sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/S/ETJEN/KUM.1/2/2019)	1 Produk ramah lingkungan baru (Penggunaan Furnitur berbahan kayu Sistem verifikasi dan legalitas Kayu sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/S/ETJEN/KUM.1/2/2019)	Besar kebutuhan alokasi anggaran masih dalam proses analisa dan perhitungan	BRI
		11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.		BRI Bersih-Bersih kali	Jumlah sungai yang dilakukan revitalisasi sesuai dengan target	Lokasi	2 Tahun		19 Sungai	10 Sungai			7.000.000.000	BRI
		15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan												BRI
	(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas		(Indikator SDGs yang sesuai)												BRI
Aspek Sosial Internal															
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan		Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Tetap	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%		3 Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Tetap saat penerimaan Pekerja baru dilakukan 100%		100%	100%	100%		BRI
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SISN Bidang Kesehatan		Pendaftaran BPJS Kesehatan bagi Pekerja Tetap	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%		3 Pendaftaran BPJS Kesehatan Pekerja Tetap saat penerimaan Pekerja baru dilakukan 100%		100%	100%	100%		BRI
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah kecelakaan kerja	kejadian								

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana				
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urutan kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	2021			2022	2023	2024	
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah penyakit akibat kerja	kejadian								BRI	
A.6.c.2.d.1.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan laki-laki dalam setahun	jam/tahun/karyawan								BRI	
A.6.c.2.d.2.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan perempuan dalam setahun	jam/tahun/karyawan								BRI	
A.6.c.2.d.3.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Pendidikan dengan Corporate Title Assistant & Officer, diantaranya BBOP, BSDP 0, BFLP, BIP, BLDP 6	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level entry dalam setahun	jam/tahun/karyawan			55.884,00	60.913,56	67.004,92	2022 : Rp 77.600.000.000 2023 : Rp 85.360.000.000 2024 : Rp 95.603.200.000		BRI	
A.6.c.2.d.4.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Pendidikan dengan Corporate Title Assistant Manager-Senior Manager, diantaranya BSDP, BBSP, BLDP 4,5	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level middle dalam setahun	jam/tahun/karyawan			7.427,00	8.095,43	8.904,97	2022 : Rp81.900.000.000 2023 : Rp 90.090.000.000 2024 : Rp 100.900.800.000		BRI	
A.6.c.2.d.5.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Pendidikan dengan Corporate Title Assistant AVP, VP, SVP, EVP, SEVP- Senior Manager, diantaranya BSDP, BLDP 1,2,3, BLRP, BGLP, BYLI, BSEP	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level senior dalam setahun	jam/tahun/karyawan			707,00	770,63	847,69	2022 : Rp183.400.000.000 2023 : Rp 179.740.000.000 2024 : Rp 201.308.800.000		BRI	
		(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas		(indikator SDGs yang sesuai)												BRI
																BRI
Eksternal																
A.6.c.3.c		8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.			Persentase UMKM yang mendapat bantuan yang naik kelas									BRI	
A.6.f.2.a.1.a	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru			Persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan									BRI	
A.6.f.2.a.2		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru			Persentase produk dan/jasa yang memiliki label atau informasi barang dan/atau jasa									BRI	
A.4.c.2		17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular			Jumlah kerjasama dalam rangka Sustainable Development dan/atau Sustainable Finance	kerjasama								BRI	
A.6.c.3.a		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.			Jumlah kegiatan yang menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar perusahaan	kegiatan								BRI	
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%								BRI	
A.6.c.3.b.2.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan								BRI	
A.6.f.4.a.	Kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Persentase produk yang ditarik kembali dari pasar	%								BRI	
		4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika		Program Beasiswa	Jumlah siswa (SD/SMP/SMA) dan Mahasiswa yang menerima beasiswa sesuai target	Orang	2 Tahun		4.830	5.300	-	-	15.000.000.000	BRI	
		4.a.1	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Sarana & Prasana Sekolah	Serapan anggaran	Rupiah	2 Tahun		#####	#####	-	-	17.000.000.000	BRI	
		1.5	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial		Sarana Pendukung Pencegahan Covid-19	Serapan anggaran	Rupiah	1 Tahun		#####	-	-	-	50.000.000.000	BRI	
		3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).												BRI	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024			
		3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).		Bantuan Sarana & Prasana Kesehatan	Serapan anggaran	Rupiah	1 Tahun		#####				30.000.000.000	BRI	
Nama Pemangku Kepentingan: PT TRANSKON JAYA TBK																
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan																
A.6.c.2.a.1	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	5	Program kelompok grup (FGD) antara senior dan junior wanita untuk evaluasi pekerjaan guna kenaikan dalam jenjang karier	Ratio BOD laki: perempuan = 3:2	%	5	3:2	2:1	2:1	2:1	2:1	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.c.2.				5	Training khusus karyawan wanita terkait pelatihan leadership dan kenaikan dalam jenjang karier	30% perempuan di posisi manajemen senior	30%	5	30%	10,99%	15,29%	17,39%	21,22%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.6.c.2.a.2		8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities	10	Hire disabilities person to handle such occupation and make evaluation for it.	Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1		%	Tahunan	1:1	1:1	1:1	1:1	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.6.c.2.b.		8.5.1.*	Upah rata-rata per jam kerja	10	Telah dituangkan kedalam Peraturan Perusahaan yang selalu diperbaharui dalam jangka waktu tertentu guna penyesuaian dengan update regulasi terbaru.	Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional		%	Tahunan	100%	100%	100%	100%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.6.c.2.a.3		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	5	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun Perseroan sehingga dapat diperoleh grafik proporsi perempuan yang membuat keputusan terkait kebutuhan kewanitaannya.	Jumlah pegawai laki-laki yang mengambil cuti parental/hamil		orang	Tahunan	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.6.c.2.a.4		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	5	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun Perseroan sehingga dapat diperoleh grafik proporsi perempuan yang membuat keputusan terkait kebutuhan kewanitaannya.	Jumlah pegawai perempuan yang mengambil cuti parental/hamil		orang	Tahunan	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	16	Karyawan seluruh jenjang manajemen wajib mengikuti pelatihan anti korupsi	Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan		kegiatan	Tahunan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	16	Perusahaan membuat suatu program ISO Manajemen Anti Suap dan Anti Korupsi yang diikuti oleh karyawan berbagai jenjang manajemen	Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi		%	Tahunan	100%	100%	100%	100%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	16	Perusahaan membuat suatu peraturan anti suap dan anti korupsi yang didasarkan pada evaluasi hasil pelatihan Anti Suap dan Anti Korupsi dan Program ISO Manajemen Anti Suap dan Anti Korupsi yang wajib dipatuhi oleh tiap-tiap karyawan dari berbagai jenjang manajemen	Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi		%	Tahunan	100%	100%	100%	100%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2.(b)	Kebebasan sipil	17	Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk dapat berasosiasi baik demi kepentingan perusahaan maupun kepentingan pribadinya yang tidak merugikan perusahaan	Jumlah keanggotaan pada asosiasi		asosiasi	Tahunan	3 Asosiasi	3 Asosiasi	3 Asosiasi	3 Asosiasi	3 Asosiasi	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
	(jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas untuk penguatan corporate governance untuk isu sustainability		(Indikator SDGs yang sesuai)	17	Departemen Sekretaris Perusahaan yang menaungi badan tata kelola perusahaan memberikan kewajiban bagi Struktur Badan Tata Kelola Perusahaan untuk mengikuti asosiasi yang bergerak dalam bidang ekonomi, lingkungan dan masyarakat			asosiasi	Tahunan	3 Asosiasi	3 Asosiasi	3 Asosiasi	3 Asosiasi	3 Asosiasi	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
Aspek Ekonomi																
A.3.c.1.a.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	9	Inovasi bisnis guna penyesuaian dengan kebutuhan pasar sehingga pendapatan setara dengan pertumbuhan PDB per kapita di NKRI	Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah),		Juta rupiah	Tahunan	100* juta rupiah	200 juta rupiah	300 juta rupiah	400 juta rupiah	500 juta rupiah	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	9	Inovasi bisnis guna penyesuaian dengan kebutuhan pasar sehingga pendapatan setara dengan pertumbuhan PDB per kapita di NKRI	Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);		Juta rupiah	Tahunan	100 juta rupiah	200 juta rupiah	300 juta rupiah	400 juta rupiah	500 juta rupiah	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	9	Inovasi bisnis guna penyesuaian dengan kebutuhan pasar sehingga pendapatan setara dengan pertumbuhan PDB per kapita di NKRI	Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual		kendaraan	Tahunan	100 kendaraan	100 kendaraan	100 kendaraan	100 kendaraan	100 kendaraan	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	9	Inovasi bisnis guna penyesuaian dengan kebutuhan pasar sehingga pendapatan setara dengan pertumbuhan PDB per kapita di NKRI	Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)		Juta rupiah	Tahunan	100 juta rupiah	200 juta rupiah	300 juta rupiah	400 juta rupiah	500 juta rupiah	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	9	Inovasi bisnis guna penyesuaian dengan kebutuhan pasar sehingga pendapatan setara dengan pertumbuhan PDB per kapita di NKRI	Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan		Juta rupiah	Tahunan	100 juta rupiah	200 juta rupiah	300 juta rupiah	400 juta rupiah	500 juta rupiah	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	9	Inovasi bisnis guna penyesuaian dengan kebutuhan pasar sehingga pendapatan setara dengan pertumbuhan PDB per kapita di NKRI	Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)		%	Tahunan	50%	24,22%	30,22%	45,22%	47,22%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024			
A.3.c.4.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	9	Inovasi bisnis guna penyesuaian dengan kebutuhan pasar sehingga pendapatan setara dengan pertumbuhan PDB per kapita di NKRI	Cakupan wilayah operasional berdasarkan tingkat administrasi provinsi kab/kota	Provinsi kab/kota	Tahunan	15	7	9	11	13	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	8	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun guna memperoleh angka, jumlah dan grafik pertumbuhan tenaga kerja formal Perusahaan	Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang	Tahunan	800 orang	600 orang	650 orang	700 orang	750 orang	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	8	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun guna memperoleh angka, jumlah dan grafik pertumbuhan tenaga kerja formal Perusahaan	Jumlah karyawan perempuan level staf	orang	Tahunan	500 orang	300 orang	350 orang	400 orang	450 orang	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.6.c.2.a.6		8.7.1	Proportion and number of children aged 5-17 years engaged in child labour, by sex and age	8	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun guna memperoleh angka, jumlah dan grafik tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa (jika ada)	Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang	Tahunan	0	0	0	0	0	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	8	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun guna memperoleh angka, jumlah dan grafik pertumbuhan tenaga kerja formal Perusahaan	Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang	Tahunan	520 orang	320 orang	370 orang	420 orang	470 orang	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	8	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun guna memperoleh angka, jumlah dan grafik pertumbuhan tenaga kerja formal Perusahaan	Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang	Tahunan	415 orang	205 orang	255 orang	315 orang	365 orang	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	8	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun guna memperoleh angka, jumlah dan grafik pertumbuhan tenaga kerja formal Perusahaan	Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang	Tahunan	40 orang	20 orang	25 orang	30 orang	35 orang	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	8	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun guna memperoleh angka, jumlah dan grafik pertumbuhan tenaga kerja formal Perusahaan	Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang	Tahunan	540 orang	500 orang	510 orang	520 orang	530 orang	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	8	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun guna memperoleh angka, jumlah dan grafik pertumbuhan tenaga kerja formal Perusahaan	Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang	Tahunan	115 orang	75 orang	85 orang	95 orang	105 orang	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.c.2.n.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	8	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun guna memperoleh angka, jumlah dan grafik pertumbuhan tenaga kerja formal Perusahaan	Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang	Tahunan	5	1	2	3	4	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.c.2.o.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	8	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun guna memperoleh angka, jumlah dan grafik pertumbuhan tenaga kerja formal Perusahaan	Jumlah karyawan berpendidikan S3	orang	Tahunan	5	1	2	3	4	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	8	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun guna memperoleh angka, jumlah dan grafik pertumbuhan tenaga kerja formal Perusahaan	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%	Tahunan	45%	35,17%	38,76%	39,78%	41,23%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	8	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun guna memperoleh angka, jumlah dan grafik pertumbuhan tenaga kerja formal Perusahaan berdasarkan perikatan kerja	Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%	Tahunan	45%	35,17%	38,76%	39,78%	41,23%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.c.2.r.		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	5	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun guna memperoleh angka, jumlah dan grafik pertumbuhan tenaga kerja lapangan Perusahaan berdasarkan perikatan kerja	Persentase karyawan berstatus pekerja musiman atau pihak ketiga	%	Tahunan	10%	10%	10%	10%	10%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.c.2.s.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	8	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun guna memperoleh angka, jumlah dan grafik pertumbuhan tenaga kerja lapangan berdasarkan jenis kelamin	Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	Tahunan	5%	5%	5%	5%	5%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.c.2.t.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	8	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun guna memperoleh angka, jumlah dan grafik pertumbuhan tenaga kerja lapangan berdasarkan jenis kelamin	Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	Tahunan	5%	5%	5%	5%	5%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.c.2.u.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	8	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun guna memperoleh angka, jumlah dan grafik pertumbuhan tenaga kerja lapangan berdasarkan jenis kelamin	Persentase karyawan laki-laki yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%	Tahunan	35%	15%	20%	25%	30%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.3.c.2.v.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	8	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun guna memperoleh angka, jumlah dan grafik pertumbuhan tenaga kerja lapangan berdasarkan jenis kelamin	Persentase karyawan perempuan yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%	Tahunan	35%	15%	20%	25%	30%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.2.a.4.		Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	9	Inovasi bisnis guna penyesuaian dengan kebutuhan pasar sehingga proporsi nilai tambah industri kecil berdampak pada total nilai tambah industri	Persentase karyawan lokal terhadap seluruh karyawan	%	Tahunan	75%	55%	60%	65%	70%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.2.a.5.			9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	9	Inovasi bisnis guna penyesuaian dengan kebutuhan pasar sehingga proporsi nilai tambah industri kecil berdampak pada total nilai tambah industri	Persentase bahan baku dari wilayah lokal yang dipergunakan terhadap total bahan baku	%	Tahunan	75%	55%	60%	65%	70%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.2.a.5.	9.3.1*		Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	9	Inovasi bisnis guna penyesuaian dengan kebutuhan pasar sehingga proporsi nilai tambah industri kecil berdampak pada total nilai tambah industri	Jumlah UMKM dari wilayah lokal yang dilibatkan sebagai supplier	UMKM	Tahunan	30	10	15	20	25	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.2.a.4. A.6.f.1.a	Produk ramah lingkungan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	12	Meningkatkan inovasi bisnis untuk mengembangkan bisnis yang menghasilkan produk ramah lingkungan	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	produk	Tahunan	25	5	10	15	20	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
	(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas	(indikator SDGs yang sesuai)		9	Program kerjasama dengan berbagai UMKM dan Perguruan Tinggi guna mengenalkan isu bisnis keberlanjutan sehingga mahasiswa/ dapat menerapkannya secara langsung dengan pelaksanaan praktik magang di Perusahaan	UMKM dapat mengembangkan usahanya dengan baik	kegiatan	Tahunan	40	20	25	30	35	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
Aspek Lingkungan Hidup																

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	7	Pengurangan dan pemanfaat limbah B3 dan Non B3	Total bauran energi terbarukan	ton	Tahunan	1400 ton	1000 ton	1100 ton	1200 ton	1300 ton	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.d.3.a.1	Efisiensi Energi	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	7	Pengurangan konsumsi dan penerapan kebijakan penghematan dengan memberlakukan waktu penerangan dan pengaturan ruangan secara optimal	Total konsumsi energi	ton	Tahunan	1000 ton	1400 ton	1300 ton	1200 ton	1100 ton	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.d.3.a.2		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	7	Perusahaan menggunakan pihak ketiga guna supply air dengan pertimbangan konsumsi air dapat diperkirakan setiap periode waktu tertentu	Total konsumsi air	mg/l	Tahunan	1000mg/l	1400 mg/l	1300 mg/l	1200 mg/l	1100 mg/l	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.d.b.2		7.3.1*	Intensitas energi primer.	7	HSE melakukan evaluasi dan peninjauan setiap periode waktu tertentu	Intensitas efisiensi energi yang dipergunakan	joule	Tahunan	1000 joule	1400 joule	1300 joule	1200 joule	1100 joule	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.d.3.b.3.		6.4.1.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	6	Perusahaan menggunakan air terbatas untuk kegiatan di dalam kantor, yakni untuk minum dan MCK. Perseroan tetap berupaya menghemat jumlah konsumsi air. Penghematan dilakukan melalui penggunaan kran yang dapat membatasi konsumsi air, dan pemasangan banner/himbauan untuk menghemat air.	Efisiensi penggunaan air	mg/l	Tahunan	1000mg/l	1400 mg/l	1300 mg/l	1200 mg/l	1100 mg/l	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.2.a.4.		11.2.1.	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, teripah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.	11	Perusahaan dan/atau kantor cabang perwakilan perusahaan dibangun dekat dengan sarana-sarana transportasi publik (saat ini kantor utama/head office Perusahaan terletak di dekat Jalan Tol sehingga mudah bagi karyawan dan pelanggan dari berbagai wilayah untuk mencapai kantor utama Perusahaan).	Persentase moda transportasi ramah lingkungan yang dipergunakan	%	Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.e.5.a.1.	Pencegahan dan Pengendalian Polusi	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	11	Perseroan mengelola limbah termasuk sampah tersebut melalui kerja sama erat dengan perusahaan pengelola limbah bersertifikat dan independen. Perseroan mengevaluasi peningkatan timbulan sampah sementara menyediakan tempat penampungan sementara limbah sebelum diambil dan dikelola oleh perusahaan pengelola limbah secara berkala untuk dapat didaur ulang kembali.	Jumlah limbah dan effluen yang dihasilkan berdasarkan jenis	ton	Tahunan	1000 ton	1400 ton	1300 ton	1200 ton	1100 ton	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.e.5.a.2		6.3.1.	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	11	Perseroan mengelola limbah termasuk limbah cair tersebut melalui kerja sama erat dengan perusahaan pengelola limbah bersertifikat dan independen. Perseroan mengevaluasi peningkatan limbah sementara menyediakan tempat penampungan sementara limbah sebelum diambil dan dikelola oleh perusahaan pengelola limbah secara berkala untuk dapat didaur ulang kembali.	Proporsi limbah air yang dikelola	ton	Tahunan	1000 ton	1400 ton	1300 ton	1200 ton	1100 ton	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.e.5.b		12.4.2.	Proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya	11	Perseroan mengelola limbah termasuk limbah berbahaya tersebut melalui kerja sama erat dengan perusahaan pengelola limbah bersertifikat dan independen. Perseroan mengevaluasi peningkatan limbah sementara menyediakan tempat penampungan sementara limbah sebelum diambil dan dikelola oleh perusahaan pengelola limbah secara berkala untuk dapat dikelola menurut jenis penanganannya.	Proporsi limbah berbahaya yang dikelola	ton	Tahunan	1000 ton	1400 ton	1300 ton	1200 ton	1100 ton	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.e.5.a.3.a.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	7	Perseroan mengelola limbah termasuk limbah padat, cair dan bahan berbahaya tersebut melalui kerja sama erat dengan perusahaan pengelola limbah bersertifikat dan independen. Perseroan mengevaluasi peningkatan timbulan sampah sementara menyediakan tempat penampungan sementara limbah sebelum diambil dan dikelola oleh perusahaan pengelola limbah secara berkala untuk dapat didaur ulang dan/atau dikelola sesuai penanganannya sebagaimana mestinya.	Proporsi limbah berbahaya (b3) - padat yang diolah	%	tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.6.e.5.a.3.b.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	7	Perseroan mengelola limbah termasuk limbah padat, cair dan bahan berbahaya tersebut melalui kerja sama erat dengan perusahaan pengelola limbah bersertifikat dan independen. Perseroan mengevaluasi peningkatan timbulan sampah sementara menyediakan tempat penampungan sementara limbah sebelum diambil dan dikelola oleh perusahaan pengelola limbah secara berkala untuk dapat didaur ulang dan/atau dikelola sesuai penangganya sebagaimana mestinya.	Proporsi limbah berbahaya (b3) - cair yang dioleh	%	tahunan	100%	100%	100%	100%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.6.e.5.c.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	7	Perseroan mengelola limbah termasuk limbah padat, cair dan bahan berbahaya tersebut melalui kerja sama erat dengan perusahaan pengelola limbah bersertifikat dan independen. Perseroan mengevaluasi peningkatan timbulan sampah sementara menyediakan tempat penampungan sementara limbah sebelum diambil dan dikelola oleh perusahaan pengelola limbah secara berkala untuk dapat didaur ulang dan/atau dikelola sesuai penangganya sebagaimana mestinya.	Jumlah tumpahan limbah yang terjadi	%	tahunan	0%	0%	0%	0%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.6.e.3.b.2		14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	7	Perusahaan melaksanakan berbagai program CSR dalam bidang lingkungan untuk membantu perluasan konservasi kawasan perairan	Jumlah luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati air	Ha	tahunan	1000 Ha	200 Ha	350 Ha	500 Ha	750 Ha	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.e.3.b.1	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.1.2.	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.	7	Perusahaan melaksanakan berbagai program CSR dalam bidang lingkungan dengan menjalin kerjasama dengan kawasan wisata lingkungan hidup (KWPLH) untuk melakukan konservasi beruang madu dan berbagai keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung tersebut.	Jumlah luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati darat	Ha	tahunan	1000 Ha	200 Ha	350 Ha	500 Ha	750 Ha	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
		15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	15	Program Penanaman 2000 Bibit Mangrove di lahan seluas 2 hektar di Kawasan Hutan Mangrove Pendopo Teritip		tahunan	1000 Ha	200 Ha	350 Ha	500 Ha	750 Ha	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
		15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	15	Program Penanaman 2000 Bibit Mangrove di lahan seluas 2 hektar di Kawasan Hutan Mangrove Pendopo Teritip		tahunan	1000 Ha	200 Ha	350 Ha	500 Ha	750 Ha	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.6.e.3.b.3		15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi.	15	Perusahaan melaksanakan berbagai program CSR dalam bidang lingkungan dengan menjalin kerjasama dengan kawasan wisata lingkungan hidup (KWPLH) untuk melakukan konservasi beruang madu dan berbagai keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung tersebut.	Jumlah kegiatan konservasi keanekaragaman hayati darat untuk satwa langka	kegiatan	tahunan	4	4	4	4	4	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
		15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	15	Perusahaan melaksanakan berbagai program CSR dalam bidang lingkungan dengan menjalin kerjasama dengan kawasan wisata lingkungan hidup (KWPLH) untuk melakukan konservasi beruang madu dan berbagai keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung tersebut.		tahunan	4	4	4	4	4	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.6.e.4.b		13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	3	Perusahaan membuat cetak biru tata kelola perusahaan terbuka untuk mengelola risiko bencana tingkat nasional dan daerah berdasarkan SKMEN BUMN No.5K-16/5.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara yang akan diterapkan guna evaluasi kedalam berbagai program ISO, Pelatihan, dan dituangkan kedalam PP yang wajib diketahui oleh seluruh karyawan Perusahaan	Jumlah kegiatan pelatihan pencegahan risiko bencana	kegiatan	tahunan	4	4	4	4	4	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.e.4.a.1.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	13	Perusahaan mengelola dan mengevaluasi penggunaan BBM transportasi, Perseroan menerapkan penggunaan kendaraan yang dikenal hemat bahan bakar dan dipastikan merupakan produk yang ramah lingkungan (B30), selain menerapkan kontrol penggunaan kendaraan dinas.	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 1	ton	tahunan	1000 ton	1400 ton	1300 ton	1200 ton	1100 ton	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	2021				2022	2023	2024			
A.6.e.4.a.2.	Adaptasi Perubahan Iklim	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	13	Perusahaan mengelola dan mengevaluasi penggunaan BBM transportasi, Perseroan menerapkan penggunaan kendaraan yang dikenal hemat bahan bakar dan dipastikan merupakan produk yang ramah lingkungan (B30), selain menerapkan kontrol penggunaan kendaraan dinas.	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 2	ton	tahunan	1000 ton	1400 ton	1300 ton	1200 ton	1100 ton	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.6.e.4.a.3.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	13	Perusahaan mengelola dan mengevaluasi penggunaan BBM transportasi, Perseroan menerapkan penggunaan kendaraan yang dikenal hemat bahan bakar dan dipastikan merupakan produk yang ramah lingkungan (B30), selain menerapkan kontrol penggunaan kendaraan dinas.	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 3	ton	tahunan	1000 ton	1400 ton	1300 ton	1200 ton	1100 ton	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.6.e.4.a.4.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	13	Perusahaan mengelola dan mengevaluasi penggunaan BBM transportasi, Perseroan menerapkan penggunaan kendaraan yang dikenal hemat bahan bakar dan dipastikan merupakan produk yang ramah lingkungan (B30), selain menerapkan kontrol penggunaan kendaraan dinas.	Jumlah tensesitas emisi	ton	tahunan	1000 ton	1400 ton	1300 ton	1200 ton	1100 ton	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.6.e.6.c	Penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	12	Perusahaan mengelola dan mengevaluasi penggunaan BBM transportasi, Perseroan menerapkan penggunaan kendaraan yang dikenal hemat bahan bakar dan dipastikan merupakan produk yang ramah lingkungan (B30), selain menerapkan kontrol penggunaan kendaraan dinas.	Jumlah bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional	unit	tahunan	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.6.d.1.		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	3	Perusahaan telah kick off start mempersiapkan program ISO 14001 dalam rencana bisnis berkelanjutan.	Jumlah kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	kegiatan	tahunan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	3	Perusahaan telah kick off start mempersiapkan program ISO 14001 dalam rencana bisnis berkelanjutan.			tahunan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.d.2.a.	8.4.1	Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP	8	Inovasi bisnis guna penyesuaian dengan kebutuhan pasar sehingga pendapatan setara dengan pertumbuhan PDB per kapita di NKRI	Persentase penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaurulang	%	tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.6.d.2.b.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	12	Perseroan mengelola limbah termasuk sampah tersebut melalui kerja sama erat dengan perusahaan pengelola limbah bersertifikat dan independen. Perseroan mengevaluasi peningkatan timbulan sampah sementara menyediakan tempat penampungan sementara limbah sebelum diambil dan dikelola oleh perusahaan pengelola limbah secara berkala untuk dapat didaur ulang kembali.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	%	tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.6.e.2.a	6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	6	Perseroan mengelola limbah termasuk sampah tersebut melalui kerja sama erat dengan perusahaan pengelola limbah bersertifikat dan independen. Perseroan mengevaluasi peningkatan timbulan sampah sementara menyediakan tempat penampungan sementara limbah sebelum diambil dan dikelola oleh perusahaan pengelola limbah secara berkala untuk dapat didaur ulang kembali.		%	tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	
A.6.e.2.b	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	3	Badan tata kelola Perusahaan membuat laporan CSR dalam bidang lingkungan, ekonomi dan sosial termasuk pelaksanaan atas pengelolaan keanekaragaman hayati yang dituangkan kedalam proposal sehingga terlaksana sebagai suatu program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan secara berkelanjutan dan meminimalisir terjadinya risiko bencana dan risiko bisnis Perusahaan		%	tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.6.e.6.a	Kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	3	Badan tata kelola Perusahaan membuat laporan CSR dalam bidang lingkungan, ekonomi dan sosial termasuk pelaksanaan atas pengelolaan keanekaragaman hayati yang dituangkan kedalam proposal sehingga terlaksana sebagai suatu program CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan secara berkelanjutan dan meminimalisir terjadinya risiko bencana dan risiko bisnis Perusahaan	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan terhadap seluruh jumlah yang diterima	%	tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.e.6.c		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	3	Perusahaan telah kick off start mempersiapkan program ISO 14001 dalam rencana bisnis berkelanjutan	Jumlah sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	sertifikat	tahunan	30 sertifikat	10 sertifikat	15 sertifikat	20 sertifikat	25 sertifikat	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru	3	Perusahaan telah kick off start mempersiapkan program ISO 14001 dalam rencana bisnis berkelanjutan	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru	30 sertifikat	10 sertifikat	15 sertifikat	20 sertifikat	25 sertifikat	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK		
A.6.f.1.a	Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan;	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	7	Perusahaan mengelola dan mengevaluasi penggunaan BBM transportasi, Perseroan menerapkan penggunaan kendaraan yang dikenal hemat bahan bakar dan dipastikan merupakan produk yang ramah lingkungan (B30), selain menerapkan kontrol penggunaan kendaraan dinas.	Jumlah inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan	produk	tahunan	50 produk	10 produk	20 produk	30 produk	40 produk	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
	(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas		(Indikator SDGs yang sesuai)	3	Perusahaan telah kick off start mempersiapkan berbagai program ISO dalam rencana bisnis berkelanjutan	kegiatan	tahunan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
Aspek Sosial															
Internal															
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	3	Evaluasi pendataan SDM oleh Departemen HR per tahun guna memperoleh angka dan grafik jumlah karyawan yang telah diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang diberikan kepada karyawan secara merata	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	3	Evaluasi pendataan SDM oleh Departemen HR per tahun guna memperoleh angka dan grafik jumlah karyawan yang telah diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang diberikan kepada karyawan secara merata	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%	tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	3	Perusahaan telah membuat Peraturan K3 yang diawasi oleh Divisi HSE agar norma K3 tersebut diterapkan oleh seluruh karyawan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman	Jumlah kecelakaan kerja	kejadian	tahunan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	3	Perusahaan telah membuat Peraturan K3 yang diawasi oleh Divisi HSE agar norma K3 tersebut diterapkan oleh seluruh karyawan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman	Jumlah penyakit akibat kerja	kejadian	tahunan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.c.2.d.1.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	7	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun sehingga dapat diperoleh grafik proporsi tingkat partisipasi remaja dan dewasa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan laki-laki dalam setahun	jam/tahun/karyawan	288 jam	288 jam	288 jam	288 jam	288 jam	288 jam	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.c.2.d.2.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	5	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun sehingga dapat diperoleh grafik proporsi tingkat partisipasi remaja dan dewasa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan perempuan dalam setahun	jam/tahun/karyawan	288 jam	288 jam	288 jam	288 jam	288 jam	288 jam	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.c.2.d.3.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	5	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun sehingga dapat diperoleh grafik proporsi tingkat partisipasi remaja dan dewasa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level entry dalam setahun	jam/tahun/karyawan	288 jam	288 jam	288 jam	288 jam	288 jam	288 jam	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.c.2.d.4.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	5	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun sehingga dapat diperoleh grafik proporsi tingkat partisipasi remaja dan dewasa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level middle dalam setahun	jam/tahun/karyawan	288 jam	288 jam	288 jam	288 jam	288 jam	288 jam	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.c.2.d.5.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	5	Evaluasi SDM oleh Departemen HR per tahun sehingga dapat diperoleh grafik proporsi tingkat partisipasi remaja dan dewasa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level senior dalam setahun	jam/tahun/karyawan	288 jam	288 jam	288 jam	288 jam	288 jam	288 jam	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
				5	Kepala tiap-tiap divisi dari berbagai jenjang manajemen diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan yang dibiayai oleh Perusahaan guna peningkatan kompetensinya.		tahunan	96 jam	96 jam	96 jam	96 jam	96 jam	96 jam	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
Eksternal															

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	9	Program guru tamu oleh Divisi Accounting dan Specialist UMKM kepada berbagai UMKM untuk meningkatkan pengetahuan Pelaku Usaha UMKM dalam menjalankan bisnisnya	Persentase UMKM yang mendapat bantuan yang naik kelas	UMKM	tahunan	35 UMKM	15 UMKM	20 UMKM	25 UMKM	30 UMKM	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.f.2.a.1.a		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru	9	Evaluasi oleh badan tata kelola Perusahaan dalam penulisan indeks ESG	Persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan	%	tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.f.2.a.2		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru	9	Evaluasi oleh badan tata kelola Perusahaan dalam penulisan peserta UMKM proper guna pencapaian penulisan indeks ESG	Persentase produk dan/jasa yang memiliki label atau informasi barang dan/atau jasa	%	tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.4.c.2		17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	9	Badan tata kelola perusahaan menjalin kerjasama dengan konsultan dan/atau specialist dalam bidang SDGs agar dapat mendampingi peserta UMKM dan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pengetahuannya dan merancang silabus terkait isu keberlanjutan bisnis	Jumlah kerjasama dalam rangka Sustainable Development dan/atau Sustainable Finance	kerjasama	tahunan	12 kerjasama	4 kerjasama	6 kerjasama	8 kerjasama	10 kerjasama	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.c.3.a		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	8	Badan tata kelola perusahaan menjalin kerjasama dengan konsultan dan/atau specialist dalam bidang SDGs agar dapat mendampingi peserta UMKM dan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pengetahuannya dan sekaligus perancangan silabus terkait isu keberlanjutan bisnis	Jumlah kegiatan yang menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar perusahaan	kegiatan	12 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan	6 kegiatan	8 kegiatan	10 kegiatan	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik	10	Perusahaan melaksanakan <i>polling</i> dalam periode waktu terkait untuk mengetahui kepuasan <i>stakeholders</i> dan <i>shareholders</i> atas layanan publik yang diberikan oleh Perusahaan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.c.3.b.2.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik	16	Perusahaan aktif dalam berbagai media sosial untuk menerima kritik, apresiasi, maupun saran oleh <i>stakeholder</i> dan <i>shareholders</i> dapat berbagi pengalaman atas layanan publik yang diberikan oleh Perusahaan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.f.4.a.	Keputusan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik	16	Perusahaan menyediakan layanan <i>whistleblowing system</i> sehingga <i>stakeholders</i> maupun <i>shareholders</i> dapat berbagi pengalaman atas layanan publik yang diberikan oleh Perusahaan	Persentase produk yang ditarik kembali dari pasar	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
A.6.c.3.c	Kegiatan TJSJ yang relevan dengan isu SDGs	(indikator SDGs yang sesuai)		16	Perusahaan dalam rangka menjadi fasilitator dalam mempersiapkan pihak ketiga yang dapat membantu UMKM untuk dapat mengembangkan bisnisnya		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(ditentukan kemudian)	PT TRANSKON JAYA TBK
Nama Pemangku Kepentingan: PT Trisula Textile Industries															
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.6.c.2.a.1	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	1	-	Ratio BOD laki: perempuan 3:1	%	-	-	-	-	-	-		
A.3.c.2.				2	1. Program peningkatan kompetensi second layer manager melalui pelatihan hard dan soft competency. 2. Program New Wave/ Management Training, untuk mempersiapkan calon-calon leader	Ratio Manager Laki : Perempuan	%	5	-	85% : 15%	85% : 15%	80% : 20%	80% : 20%		PT Trisula Textile Industries
A.6.c.2.a.2		8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities	3	Pembuatan skala golongan upah sesuai dengan ketentuan PP No 38 tanpa membedakan jenis kelamin	Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1	%	5	-	1:1	1:1	1:1	1:1		PT Trisula Textile Industries
A.6.c.2.b.		8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja		Surat Keputusan Direksi setiap tahun mengenai Penetapan UMK yang berlaku dan sebagai gaji terendah	Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	%	5	-	100%	100%	100%	100%		PT Trisula Textile Industries
A.6.c.2.a.3		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.			Jumlah pegawai laki-laki yang mengambil cuti parental/hamil	orang	-	-	-	-	-	-		PT Trisula Textile Industries
A.6.c.2.a.4	5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		Penetapan aturan pengambilan cuti hamil sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah pegawai perempuan yang mengambil cuti parental/hamil	%	5	-	100% karyawan wanita yg hamil	100% karyawan wanita yg hamil	100% karyawan wanita yg hamil	100% karyawan wanita yg hamil		PT Trisula Textile Industries	
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Membuat Kebijakan dan Program Sosialisasi kepada semua Karyawan	Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan	5	-	5 Kegiatan	7 kegiatan	10 kegiatan	11 kegiatan		PT Trisula Textile Industries
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Program Sosialisasi kepada BOC BOD	Persentase BOD dan BOC yang mendapatkan sosialisasi anti korupsi	%	5	-	100%	100%	100%	100%		PT Trisula Textile Industries
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Program Sosialisasi kepada semua Karyawan	Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	5	-	100%	100%	100%	100%		PT Trisula Textile Industries
100%	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2.(b)	Kebebasan sipil		Bergabung dengan asosiasi yang menitikberatkan pada masalah sustainability	Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi	5	-	1	2	3	3		PT Trisula Textile Industries

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana			
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	2021			2022	2023	2024
	(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas untuk penguatan corporate governance untuk isu sustainability		(Indikator SDGs yang sesuai)												PT Trisula Textile Industries
Aspek Ekonomi															PT Trisula Textile Industries
A.3.c.1.a.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		-	Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah),	Juta rupiah	-	-	-	-	-	-		PT Trisula Textile Industries
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		-	Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	Juta rupiah	-	-	-	-	-	-		PT Trisula Textile Industries
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		-	Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual	K Yard	-	-	-	-	-	-		PT Trisula Textile Industries
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		-	Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)	Juta rupiah	-	-	-	-	-	-		PT Trisula Textile Industries
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		-	Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Juta rupiah	-	-	-	-	-	-		PT Trisula Textile Industries
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		-	Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)	%	-	-	-	-	-	-		PT Trisula Textile Industries
A.3.c.4.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		-	Cakupan wilayah operasional berdasarkan tingkat administrasi	Provinsi kab/kota	5		1	1	1	1		PT Trisula Textile Industries
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Program pemenuhan karyawan sesuai kebutuhan	Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang	5		25 orang	25 orang	25 orang	25 orang		PT Trisula Textile Industries
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Program pemenuhan karyawan sesuai kebutuhan	Jumlah karyawan perempuan level staf	orang	5		18 orang	18 orang	18 orang	18 orang		PT Trisula Textile Industries
A.6.c.2.a.6		8.7.1	Proportion and number of children aged 5-17 years engaged in child labour, by sex and age		Penetapan persyaratan usia minimum recruitment	Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang	5		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang		PT Trisula Textile Industries
A.3.c.2.i.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Program kaderisasi dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kerja	Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang	5		123 orang	135 orang	135 orang	150 orang		PT Trisula Textile Industries
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Program kaderisasi dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kerja	Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang	5		366 orang	360 orang	360 orang	350 orang		PT Trisula Textile Industries
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Program kaderisasi dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kerja	Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang	5		40 orang	35 orang	35 orang	30 orang		PT Trisula Textile Industries
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Menetapkan persyaratan jenjang pendidikan minimal pada level jabatan tertentu	Jumlah karyawan berpendidikan < S1	orang	5		481 orang	473 orang	467 orang	461 orang		PT Trisula Textile Industries
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Menetapkan persyaratan jenjang pendidikan minimal pada level jabatan tertentu	Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang	5		47 orang	55 orang	60 orang	65 orang		PT Trisula Textile Industries
A.3.c.2.n.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Menetapkan persyaratan jenjang pendidikan minimal pada level jabatan tertentu	Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang	5		2 orang	2 orang	3 orang	4 orang		PT Trisula Textile Industries
A.3.c.2.o.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Menetapkan persyaratan jenjang pendidikan minimal pada level jabatan tertentu	Jumlah karyawan berpendidikan S3	orang	-		-	-	-	-		PT Trisula Textile Industries
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Program pengangkatan karyawan tetap berbasis kompetensi	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%	5		90%	90%	85%	80%		PT Trisula Textile Industries
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Program pengangkatan karyawan tetap berbasis kompetensi	Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%	5		10%	10%	15%	20%		PT Trisula Textile Industries
A.3.c.2.r.		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin		Menetapkan kebijakan/persyaratan recruitment karyawan	Persentase karyawan berstatus pekerja musiman atau pihak ketiga	%	5		0	0	0	0		PT Trisula Textile Industries
A.3.c.2.s.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Program peningkatan kompetensi, produktifitas dan kesejahteraan karyawan	Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	5		1%	1%	1%	1%		PT Trisula Textile Industries
A.3.c.2.t.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Program peningkatan kompetensi, produktifitas dan kesejahteraan karyawan	Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	5		1%	1%	1%	1%		PT Trisula Textile Industries
A.3.c.2.u.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kebijakan rekrutmen	Persentase karyawan laki-laki yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%	5		75%	75%	75%	75%		PT Trisula Textile Industries
A.3.c.2.v.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Kebijakan rekrutmen	Persentase karyawan perempuan yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%	5		25%	25%	25%	25%		PT Trisula Textile Industries
A.2.a.4.		9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Kebijakan rekrutmen	Persentase karyawan lokal terhadap seluruh karyawan	%	5		99,90%	99,90%	99,90%	99,90%		PT Trisula Textile Industries
A.2.a.5.	Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Program Substitusi bahan baku dari luar negeri	Persentase bahan baku dari wilayah lokal yang dipergunakan terhadap total bahan baku	%	5	95%	86%	87%	88%	89%		PT Trisula Textile Industries
A.2.a.5.		9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Program penajakan kerjasama dengan UMKM industri	Jumlah UMKM dari wilayah lokal yang dilibatkan sebagai supplier	UMKM	5	5	3	3	3	4		PT Trisula Textile Industries
A.2.a.4. A.6.f.1.a	Produk ramah lingkungan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		Program penggunaan bahan baku dan proses produksi ramah lingkungan	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	produk	5		2	2	2	2		PT Trisula Textile Industries
	(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas		(Indikator SDGs yang sesuai)												PT Trisula Textile Industries
Aspek Lingkungan Hidup															PT Trisula Textile Industries
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.		1. Pemanfaatan sumber energi biomassacangkang sawit atau wood pellet untuk campuran batubara. 2. Pemasangan solar panel untuk penerangan jalan, benteng dan taman.	Total bauran energi terbarukan	Giga Joule	5	4	0	0	2	2		PT Trisula Textile Industries
A.6.d.3.a.1	Efisiensi Energi	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita		Program penghematan penggunaan energi (terlampir)	Total konsumsi energi	Giga Joule	10	242.103	180.947	214.800	238.390	256.205		PT Trisula Textile Industries

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024			
A.6.d.3.a.2		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.		Program penghematan penggunaan air (terlampir)	Total konsumsi air	M3	10	624.055	429.250	509.611	565.636	607.971		PT Trisula Textile Industries	
A.6.d.3.b.2		7.3.1*	Intensitas energi primer.		Program penghematan penggunaan energi (terlampir)	Efisiensi energi yang dipergunakan	%	10	10%	1%	2%	3%	4%		PT Trisula Textile Industries	
		6.4.1.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.		Program penghematan penggunaan air (terlampir)	Efisiensi penggunaan air	%	10	35%	26%	27%	28%	29%		PT Trisula Textile Industries	
A.2.a.4.		11.2.1.	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terampil menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.		-	Persentase moda transportasi ramah lingkungan yang dipergunakan	Ada/Tdk	-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak		PT Trisula Textile Industries	
A.6.e.5.a.1.	Pencegahan dan Pengendalian Polusi	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		Program Penajakan teknologi produksi yang hemat air dan Program pemilahan dan daur ulang sampah/limbah	Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis	Cair (M3)	10	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		PT Trisula Textile Industries	
								Padat (Ton)	10	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		PT Trisula Textile Industries
A.6.e.5.a.2		6.3.1.	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.		Program pengelolaan limbah cair	Proporsi limbah cair yang dikelola	%	10	100%	100%	100%	100%	100%		PT Trisula Textile Industries	
A.6.e.5.a.b		12.4.2.	Proporsi limbah berbahaya yang dikelola menurut jenis penanganannya		Program pengelolaan limbah berbahaya sesuai jenisnya	Proporsi limbah berbahaya yang dikelola	%	10	100%	100%	100%	100%	100%		PT Trisula Textile Industries	
A.6.e.5.a.3.a.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		Program pengangkutan limbah dengan pihak ke 3	Proporsi limbah berbahaya (B3) - padat yang diolah	%	10	0%	0%	0%	0%	0%		PT Trisula Textile Industries	
A.6.e.5.a.3.b.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		Program pengangkutan dan pengolahan limbah dengan pihak ke 3	Proporsi limbah berbahaya (B3) - cair yang diolah	%	10	100%	100%	100%	100%	100%		PT Trisula Textile Industries	
A.6.e.5.c.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		Pelaksanaan SOP Pengelolaan Limbah	Jumlah tumpahan limbah yang terjadi	Kejadian Limbah	10	0	0	0	0	0		PT Trisula Textile Industries	
A.6.e.3.b.2			14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.		-	Jumlah luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati air	Ha	-	-	-	-	-	-		PT Trisula Textile Industries
A.6.e.3.b.1	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.1.2.	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.		-	Jumlah luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati darat	Ha								PT Trisula Textile Industries	
		15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.		-											PT Trisula Textile Industries
		15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya.		-											PT Trisula Textile Industries
A.6.e.3.b.3		15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.		-	Jumlah kegiatan konservasi keanekaragaman hayati darat untuk satwa langka	kegiatan	-	-	-	-	-	-		PT Trisula Textile Industries	
		15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.		-										PT Trisula Textile Industries	
A.6.e.4.b		13.1.1*	DoKumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		Program pelatihan penanggulangan bencana untuk semua karyawan	Jumlah kegiatan pelatihan pencegahan risiko bencana	kegiatan	5		3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan		PT Trisula Textile Industries	
A.6.e.4.a.1.	Adaptasi Perubahan Iklim	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		Program pengurangan emisi CO2 yang dihasilkan GRK - scope 1 (terlampir)	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 1	Ton CO2	10	#REF!	13.468	15.987	17.743	19.069		PT Trisula Textile Industries	
A.6.e.4.a.2.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		Program pengurangan emisi CO2 yang dihasilkan GRK - scope 2 (terlampir)	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 2	Ton CO2	10	#REF!	7.655	9.087	10.085	10.838		PT Trisula Textile Industries	
A.6.e.4.a.3.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		-	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 3	Ton CO2	-	-	-	-	-	-		PT Trisula Textile Industries	
A.6.e.4.a.4.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		-	Jumlah intensitas emisi	Ton CO2	10	#REF!	21.122	25.074	27.827	29.907		PT Trisula Textile Industries	
A.6.e.6.c		12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		-	Jumlah bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional	unit	-	-	-	-	-	-		PT Trisula Textile Industries	
		12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		Implementasi dan sertifikasi ISO 14001	Jumlah kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	kegiatan	10	12	10	10	11	11		PT Trisula Textile Industries	
A.6.d.1.		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.		Program pemenuhan persyaratan Propernas Biru										PT Trisula Textile Industries	
		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		Segala program pengolahan limbah, dan program pelestarian lingkungan hidup di lingkungan perusahaan dan sekitar perusahaan	Jumlah biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	Juta rupiah	10	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M		PT Trisula Textile Industries	
A.6.d.2.a.	Penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	8.4.1	Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP		Penggunaan Bahan baku dan Bahan Pembantu yang tersertifikasi Oeotex	Persentase penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	%	10	100%	100%	100%	100%	100%		PT Trisula Textile Industries	
A.6.d.2.b.		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		Program composting untuk sampah organik										PT Trisula Textile Industries	
A.6.e.2.a		6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya		Adanya penampungan air permukaan dari sungai Cimancong Cimahi dan telah memiliki izin	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	kg / %	10	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg		PT Trisula Textile Industries	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana			
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	2021			2022	2023	2024
A.6.e.2.b		15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati												PT Trisula Textile Industries
A.6.e.6.a	Kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi		Program antisipasi pencemaran lingkungan dan program penyelesaian pengaduan lingkungan	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan terhadap seluruh jumlah yang diterima	%	5		100%	100%	100%	100%		PT Trisula Textile Industries
A.6.e.6.c		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001		Program Sertifikasi dan Implementasi ISO 14001 dan Propernas Biru. Program sertifikasi Industri Hijau	Jumlah sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	sertifikat	10	3	2	3	3	3		PT Trisula Textile Industries
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru												
A.6.f.1.a	Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan; Jika ada kegiatan tematik selain isu diatas	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		Mengembangkan inovasi produk berkelanjutan	Jumlah inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan	produk	10	420	420	420	420	420		PT Trisula Textile Industries
				(Indikator SDGs yang sesuai)											
Aspek Sosial															PT Trisula Textile Industries
Internal															PT Trisula Textile Industries
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan		Program Fasilitas Kesejahteraan untuk semua karyawan	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	5		100%	100%	100%	100%		PT Trisula Textile Industries
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan		Program Fasilitas Kesejahteraan untuk semua karyawan	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%	5		100%	100%	100%	100%		PT Trisula Textile Industries
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3		Program pengawasan pelaksanaan K3 melalui team P2K3	Jumlah kecelakaan kerja	kejadian	5		0	0	0	0		PT Trisula Textile Industries
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3		Program pengawasan pelaksanaan K3 melalui team P2K3	Jumlah penyakit akibat kerja	kejadian	5		0	0	0	0		PT Trisula Textile Industries
A.6.c.2.d.1.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Program peningkatan hard dan soft competency seluruh karyawan	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan laki-laki dalam setahun	jam/tahun/karyawan	5		12	15	18	21		PT Trisula Textile Industries
A.6.c.2.d.2.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Program peningkatan hard dan soft competency seluruh karyawan	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan perempuan dalam setahun	jam/tahun/karyawan	5		12	15	18	21		PT Trisula Textile Industries
A.6.c.2.d.3.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Program peningkatan hard dan soft competency karyawan level operator	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level entry (operator)dalam setahun	jam/tahun/karyawan	5		12	15	18	21		PT Trisula Textile Industries
A.6.c.2.d.4.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Program peningkatan hard dan soft competency karyawan level staff	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level middle (Staff) dalam setahun	jam/tahun/karyawan	5		24	24	24	30		PT Trisula Textile Industries
A.6.c.2.d.5.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.		Program peningkatan hard dan soft competency karyawan level manager	Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level senior (manager ke atas) dalam setahun	jam/tahun/karyawan	5		24	24	24	30		PT Trisula Textile Industries
			(Indikator SDGs yang sesuai)												PT Trisula Textile Industries
Eksternal															PT Trisula Textile Industries
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.			Persentase UMKM yang mendapat bantuan yang naik kelas	%	10	1	0	0	0	0		PT Trisula Textile Industries
A.6.f.2.a.1.a		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru		Program Resertifikasi Oekotex, SNI dan Oekotex	Persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan	%	5		100%	100%	100%	100%		PT Trisula Textile Industries
A.6.f.2.a.2		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru		Penggunaan Label SNI dan Oekotex dan K3L	Persentase produk dan/jasa yang memiliki label atau informasi barang dan/atau jasa	%	5		100%	100%	100%	100%		PT Trisula Textile Industries
A.4.c.2		17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular		Menjajaki kerjasama sustainability dengan lembaga terkait	Jumlah kerjasama dalam rangka Sustainable Development dan/atau Sustainable Finance	Kerjasama	10	10	5	5	6	6		PT Trisula Textile Industries
A.6.c.3.a	Mekanisme pengaduan masyarakat	12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya		Program Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan	Jumlah kegiatan yang menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar perusahaan	kegiatan	5		10 kegiatan per bulan	10 kegiatan per bulan	13 kegiatan per bulan	13 kegiatan per bulan		PT Trisula Textile Industries
A.6.c.3.b.1.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik		Mekanisme pengaduan masyarakat	Persentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%	5		100%	100%	100%	100%		PT Trisula Textile Industries
A.6.c.3.b.2.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik		Mekanisme pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan	5		100%	100%	100%	100%		PT Trisula Textile Industries
A.6.f.4.a.	Kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik		Program CSI	Persentase produk yang ditarik kembali dari pasar	%	5		0	0	0	0		PT Trisula Textile Industries
Nama Pemangku Kepentingan: PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.															
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.6.c.2.b.		8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja	1		Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	%			100%	100%	100%	100%		PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Aspek Ekonomi															

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Lembaga Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	2	(1) Peningkatan area perkebunan yang mencapai usia tanaman produktif; (2) Peningkatan produktivitas area perkebunan dengan inovasi agronomi dan mekanisasi; (3) 3. peningkatan kapasitas olah pabrik kelapa sawit dan ekstraksi minyak sawit	Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual	Metrik Ton Minyak Kelapa Sawit	4	340243	270837	303454	326083	340243		PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
				3		Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual	Metrik Ton Kernel Kelapa Sawit	4	59542	56160	57479	58611	59542		PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
				4		Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual	Metrik Ton Minyak Kernel Kelapa Sawit	4	3814	1359	2375	3353	3814		PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
A.3.c.4.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	5	Operasional perusahaan di masing-masing provinsi tetap menguntungkan melalui manajemen biaya	Cakupan wilayah operasional berdasarkan tingkat administrasi	Provinsi		7	7	7	7		PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.	
A.6.c.2.a.6		8.7.1	Proportion and number of children aged 5-17 years engaged in child labour, by sex and age	6	Proses perekrutan sebagai karyawan di ANI wajib 18 tahun keatas dan dilakukan pemeriksaan ke Kartu Tanda Penduduk	Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang		0	0	0	0		PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.	
A.2.a.4. A.6.f.1.a	Produk ramah lingkungan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	7	Mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO untuk (1) Minyak kelapa sawit berkelanjutan, (2) Inti kelapa sawit berkelanjutan, (3) minyak inti kelapa sawit berkelanjutan	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	produk	4	3	2	3	3	3		PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Aspek Lingkungan Hidup															
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	8	Penggunaan dan efisiensi energi	Total bauran energi terbarukan	GJ		119583,78	121975,4556	124414,9647	126903,264			PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
A.6.d.3.a.2		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk gulau-pulau.	9	Efisiensi penggunaan air dalam proses ekstraksi kelapa sawit	Total konsumsi air	m3/ton TBS	9	1	1,15	1,14	1,13	1,12		PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	10	Sertifikasi ISO 14001	Jumlah kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	kegiatan			4	5	5	6		PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BRU.	11	Keikutsertaan PROPER Nasional					4	4	4	5		PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
A.6.d.1.		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	12	Sertifikasi ISO 14001	Jumlah biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	Juta rupiah			5.464	6.011	6.612	7.273		PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
A.6.d.2.a.	Penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	8.4.1	Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP	13		Persentase penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaurulang	%								PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
A.6.d.2.b.		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	14	Daur ulang limbah padat	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	ton			170.042	175.143	180.397	185.809		PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
A.6.e.6.a	Kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	15		Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan terhadap seluruh jumlah yang diterima	%								PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
A.6.e.6.c		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	16	Sertifikasi ISO 14001	Jumlah sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	sertifikat			4	5	5	6		PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BRU	17	Keikutsertaan PROPER Nasional					4	4	4	5		PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Aspek Sosial															
Internal															
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	18	Bagian Kepegawaian mendaftarkan semua karyawan	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%		100	100	100	100	100		PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	19	Bagian Kepegawaian mendaftarkan semua karyawan	Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%		100	100	100	100	100		PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Eksternal															
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	20	Dukungan mendapatkan sertifikasi RSPO bagi koperasi plasma dan kemitraan	Persentase UMKM yang mendapat bantuan yang naik kelas	%	6	100%	42,86%	50,00%	78,57%	78,57%		PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan					Target					Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana		
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEQJK-lte-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2025)	Target tahun 2021	Target tahun 2022			Target tahun 2023	Target tahun 2024
Nama Pemangku Kepentingan: PT Tanjung Sawit Abadi															
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN															
A.6.e.3.b.1	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.1.2.(a)	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)	1	HCV Assesment oleh Konsultan Sonokeling 2013 dan Aksenta Tahun 2014	1261,22	Hektar (Ha)	Satu Tahun	Lima Tahun	1261,22	1261,22	1261,22	1261,22	-	PT Tanjung Sawit Abadi
				2	Membangun persemaian anakan alam untuk upaya restorasi kawasan HCV dan sempadan sungai	5000	Bibit	Satu Tahun	Dua tahun	5890	1000	1000	0	PT Tanjung Sawit Abadi	
				3	Penanaman areal sempadan dan kawasan HCV	2000	Bibit	Satu Tahun	Lima Tahun	2046	2000	2000	2000	PT Tanjung Sawit Abadi	
A.6.e.6.a	Kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.		Pemantauan/Patroli area konservasi secara periodik. Perusahaan PT SMU belum pernah mengalami kejadian perdagangan ilegal terhadap tumbuhan dan satwa liar.	100	Persen (%)	1	5	100	100	100	100	20	PT Tanjung Sawit Abadi
		15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL		Pemantauan/Patroli area konservasi secara periodik. Perusahaan PT MMS belum pernah mengalami kejadian perdagangan ilegal terhadap tumbuhan dan satwa liar.	0	Kasus	1	5	0	0	0	0	20	PT Tanjung Sawit Abadi
Nama Pemangku Kepentingan: PT Sawit Sumbermas Sarana															
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN															
A.6.e.3.b.1	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan	1	Review Laporan HCV Assesment yang telah di buat oleh Konsultan Sonokeling di tahun 2012	1858,46	Hektar (Ha)	1	5	1.858,46			1.858,46	-	PT Sawit Sumbermas Sarana
				2	Menghitung performa area konservasi dengan penilaian Indeks Keaneekaragaman Hayati	3	Indeks	1	5	3.21	≥3	≥3	≥3	-	PT Sawit Sumbermas Sarana

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target					Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEQJK-lte-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian			Target Jangka Panjang (hingga tahun 2025)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024		
				3	Membangun persemaian anakan alam untuk upaya restorasi kawasan HCV dan sempadan sungai	5000	Bibit	1	2	3679	2000	2000	2000	10	PT Sawit Sumbermas Sarana
				4	Penanaman areal sempadan dan kawasan HCV	2000	Bibit	1	5	3050	2000	2000	2000	-	PT Sawit Sumbermas Sarana
A.6.e.3.b.3	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan			1	Mengidentifikasi sebaran dan jenis satwaliar	42	Jenis	Satu Tahun	Lima Tahun	42	42	42	42	5	PT Sawit Sumbermas Sarana
				2	Mengidentifikasi sebaran dan jenis tumbuhan	69	Jenis	Satu Tahun	Lima Tahun	69	0	0	0	5	PT Sawit Sumbermas Sarana
				3	Melakukan monitoring satwaliar prioritas yaitu bekantan (<i>Nasalis larvatus</i>)	1	Jenis	Satu Tahun	Lima Tahun	1	1	1	1	-	PT Sawit Sumbermas Sarana
				4	Monitoring mamalia owa kelawat (<i>Hylobates albibarbis</i>)	8	Individu	Satu tahun	Lima Tahun	8	8	8	8	-	PT Sawit Sumbermas Sarana
				5	Program konservasi orangutan di Pulau Salat	35	Individu	Satu Tahun	25 Tahun	57	40	40	40	1200	PT Sawit Sumbermas Sarana
				6	Pelepaslarian orangutan ke taman nasional dan hutan lindung	23	Individu	Satu Tahun	25 Tahun	23	0	0	0	-	PT Sawit Sumbermas Sarana
		15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL		Patroli pengamanan hutan mandiri dan gabungan, serta pemasangan plank peringatan larangan berburu	Menurunnya kasus perburuan satwa liar dilindungi, khususnya Harimau Sumtra	kali	13	2032	10	10	10	10	include 15.1.1*	PT Sawit Sumbermas Sarana
Nama Pemangku Kepentingan: PT Kalimantan Sawit Abadi															
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN															
A.6.e.3.b.1	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan			1	HCV Assesment oleh Konsultan Sonokeling Tahun 2012 dan Aksenta 2013	481,62	Hektar (Ha)	Satu Tahun	Lima Tahun	481,62	481,62	481,62	481,62	-	PT Kalimantan Sawit Abadi
				2	Menghitung performa area konservasi dengan penilaian Indeks Keanekaragaman Hayati	3	Indeks	Satu Tahun	Lima Tahun	3,33	≥3	≥3	≥3	-	PT Kalimantan Sawit Abadi
				3	Membangun persemaian anakan alam untuk upaya restorasi kawasan HCV dan sempadan sungai	1000	Bibit	Satu Tahun	Dua tahun	933	1000	1000	1000	10	PT Kalimantan Sawit Abadi

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target					Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEQJK-lte-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian			Target Jangka Panjang (hingga tahun 2025)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024		
				4	Penanaman areal sempadan dan kawasan HCV	2000	Bibit	Satu Tahun	Lima Tahun	2211	2000	2000	2000	-	PT Kalimantan Sawit Abadi
A.6.e.3.b.3	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan			1	Mengidentifikasi sebaran dan jenis satwaliar	54	Jenis	Satu Tahun	Lima Tahun	42	42	42	42	5	PT Kalimantan Sawit Abadi
				2	Mengidentifikasi sebaran dan jenis tumbuhan	46	Jenis	Satu Tahun	Lima Tahun	46	46	46	46	5	PT Kalimantan Sawit Abadi
				3	Melakukan monitoring satwaliar prioritas yaitu bekantan (<i>Nasalis larvatus</i>) dan Orangutan Kalimantan (<i>Pongo pygmaeus</i>)	2	Jenis	Satu Tahun	Lima Tahun	2	2	2	2	-	PT Kalimantan Sawit Abadi
A.6.e.3.b.3	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan			1	Mengidentifikasi sebaran dan jenis satwaliar	56	Jenis	Satu Tahun	Lima Tahun	56	56	56	56	5	PT Kalimantan Sawit Abadi
				2	Mengidentifikasi sebaran dan jenis tumbuhan	56	Jenis	Satu Tahun	Lima Tahun	56	56	56	56	5	PT Kalimantan Sawit Abadi
15.b.1.(a)			Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan												
					Sosialisasi kepada publik	Sosialisasi dan publikasi kegiatan restorasi ekosistem melalui media cetak lokal	edisi	10	2029	24	24	24	24	60	PT Kalimantan Sawit Abadi

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan					Target					Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana		
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEQJK-lte-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2025)	Target tahun 2021	Target tahun 2022			Target tahun 2023	Target tahun 2024
Nama Pemangku Kepentingan: PT. Sawit Multi Utama															
A.6.e.3.b.1	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.1.2.(a)	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)	1	HCV Assesment oleh Konsultan Sonokeling Tahun 2013	1631,45	Hektar (Ha)	Satu Tahun	Lima Tahun	1631,45	1631,45	1631,45	1631,45	-	PT Sawit Multi Utama
				2	Penanaman areal sempadan dan kawasan HCV	250	Bibit	Satu Tahun	Lima Tahun	270	500	500	500	-	PT Sawit Multi Utama
A.6.e.3.b.3	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.5.1*	Indeks Daftar Merah (Red-list index)	1	Mengidentifikasi sebaran dan jenis satwaliar	53	Jenis	Satu Tahun	Lima Tahun	56	56	56	56	5	PT Sawit Multi Utama
				2	Mengidentifikasi sebaran dan jenis tumbuhan	59	Jenis	Satu Tahun	Lima Tahun	56	56	56	56	5	PT Sawit Multi Utama
A.6.e.6.a	Kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.		Pemantauan/Patrol area konservasi secara periodik. Perusahaan PT KSA belum pernah mengalami kejadian perdagangan ilegal terhadap tumbuhan dan satwa liar.	100	Persen (%)	1	5	100	100	100	100	20	PT Sawit Multi Utama
		15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL		Pemantauan/Patrol area konservasi secara periodik. Perusahaan PT KSA belum pernah mengalami kejadian perdagangan ilegal terhadap tumbuhan dan satwa liar.	0	Kasus	1	5	0	0	0	0	20	PT Sawit Multi Utama
Nama Pemangku Kepentingan: PT. Mitra Mendawai Sejati															
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN															
A.6.e.3.b.1	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.1.2.(a)	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)	1	HCV Assesment oleh Konsultan Sonokeling Tahun 2012	1644,04	Hektar (Ha)	Satu Tahun	Lima Tahun	1644,04	1644,04	1644,04	1644,04	-	PT Mitra Mendawai Sejati
				2	Menghitung performa area konservasi dengan penilaian Indeks Keanekaragaman Hayati	3	Indeks	Satu Tahun	Lima Tahun	3,05	≥3	≥3	≥3		PT Mitra Mendawai Sejati

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan					Target					Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana		
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEQJK-lte-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2025)	Target tahun 2021	Target tahun 2022			Target tahun 2023	Target tahun 2024
				3	Membangun persemaian anakan alam untuk upaya restorasi kawasan HCV dan sempadan sungai	1000	Bibit	Satu Tahun	Dua tahun	1310	1000	1000	1000		PT Mitra Mendawai Sejati
				4	Penanaman areal sempadan dan kawasan HCV	1000	Bibit	Satu Tahun	Lima Tahun	727	1000	1000	1000		PT Mitra Mendawai Sejati
A.6.e.3.b.3	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.5.1*	Indeks Daftar Merah (Red-list index)	1	Mengidentifikasi sebaran dan jenis satwaliar	50	Jenis	Satu Tahun	Lima Tahun	42	42	42	42	5	PT Mitra Mendawai Sejati
				2	Mengidentifikasi sebaran dan jenis tumbuhan	23	Jenis	Satu Tahun	Lima Tahun	23	23	23	23	5	PT Mitra Mendawai Sejati
				3	Melakukan monitoring satwaliar prioritas yaitu bekantan (<i>Nasalis larvatus</i>)	1	Jenis	Satu Tahun	Lima Tahun	1	1	1	1	-	PT Mitra Mendawai Sejati
A.6.e.6.a	Kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.		Pemantauan/Patrol area konservasi secara periodik. Perusahaan PT SSS belum pernah mengalami kejadian perdagangan ilegal terhadap tumbuhan dan	100	Persen (%)	1	5	100	100	100	100	20	PT Mitra Mendawai Sejati
		15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL		Pemantauan/Patrol area konservasi secara periodik. Perusahaan PT SSS belum pernah mengalami kejadian perdagangan ilegal terhadap tumbuhan dan satwa liar.	0	Kasus	1	5	0	0	0	0	20	PT Mitra Mendawai Sejati

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target					Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEQJK-lte-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian			Target Jangka Panjang (hingga tahun 2025)	Target tahun 2021	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT. Mirza Pratama Putra															
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN															
A.6.e.3.b.1	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.1.2.(a)	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)	1	HCV Assesment oleh Konsultan Remark Asia Tahun 2016	1140,66	Hektar (Ha)	Satu Tahun	Lima Tahun	1140,66	1140,66	1140,66	1140,66	0	PT Mirza Pratama Putra
A.6.e.3.b.1	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	1	Tidak ada pembangunan diarea perkebunan PT MPP sejak tahun 2012.	0	Hektar (Ha)	-	25 tahun	0	0	0	0	0	PT Mirza Pratama Putra
				2	Kerjasama Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Koversi bersama KPHP dan Kelompok Tani Hutan	MoU kerjasama pengelolaan hutan kemasyarakatan	MoU	1	5	1	1	1	0	PT Mirza Pratama Putra	
				3	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan hutan secara lestari (Kerjasama antara PT MPP, KPHP Kobar, dan KTH Kom Karya Masoraian)	Program demplot kerambal ikan endemik Masoraian, budidaya madu kelulut	paket	1	5	1	1	1	150/tahun	PT Mirza Pratama Putra	
				4	Mitigasi Karhutla di kawasan Hutan Kemasyarakatan Masoraian (Kerjasama antara PT MPP, KPHP Kobar, dan KTH Kom Karya Masoraian)	tersedianya satu et alat pemadam karhutla dan sumberdaya penanggulangan karhutla	paket	1	5	1	1	1	158/tahun	PT Mirza Pratama Putra	
				5	Deliniasi kawasan Hutan Kemasyarakatan Masoraian (Kerjasama antara PT MPP, KPHP Kobar, dan KTH Kom Karya Masoraian)	27	km	1	1	13,5	13,5	48/tahun	PT Mirza Pratama Putra		
				6	Patroli (gabungan) untuk perlindungan dan pengamanan kawasan Hutan Kemasyarakatan Masoraian (Kerjasama antara PT MPP, KPHP Kobar, dan KTH Kom Karya Masoraian)	12	kali	Satu Tahun	5	4	12	12	45/tahun	PT Mirza Pratama Putra	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan					Target					Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana		
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEQJK-lte-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2025)	Target tahun 2021	Target tahun 2022			Target tahun 2023	Target tahun 2024
A.6.e.3.b.3	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.5.1*	Indeks Daftar Merah (Red-list index)	1	Mengidentifikasi sebaran dan jenis satwalliar	31	Jenis	Satu Tahun		31	31	31	31	5	PT Mirza Pratama Putra
				2	Mengidentifikasi sebaran dan jenis tumbuhan	45	Jenis	Satu Tahun		45	45	45	45	5	PT Mirza Pratama Putra
				3	Penjagaan kawasan Hutan Kemasyarakatan Masorai dan monitoring orangutan (Kerjasama antara PT MPP, KPHP Kobar, dan KTH Kom Karya Masorai)	300	hari	Satu Tahun	5		100	300	300	155/tahun	PT Mirza Pratama Putra
				4	Penelitian/ Baseline Study habitat&populasi Orangutan, Biodiversity dan Sosekbud Hutan Kemasyarakatan (Kerjasama antara PT MPP, KPHP Kobar, dan	dokumen (hasil dan rekomendasi) baseline study	buah	1	5		1	1	1	15/tahun	PT Mirza Pratama Putra
		15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL		Pemantauan/Patrol area konservasi secara periodik. Perusahaan PT MPP belum pernah mengalami kejadian perdagangan ilegal terhadap tumbuhan dan satwa liar.	0	Kasus	1	5	0	0	0	0	20	PT Mirza Pratama Putra

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
A.6.c.3.c	Kegiatan TISL yang relevan SDGs														
					Strengthening Digital Infrastructure Development										
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pembangunan Talud Irigasi Pertanian dan Irigasi Sungai	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pembangunan Jembatan Gantung Penghubung Desa Bojongkerta dan Desa Cimanggu di Kabupaten Sukabumi	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			360.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pengaspalan Jalan Ds Tlingsing	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Perbaikan drainase pengendalian banjir di Desa Turunrejo Kec.Brangsong, Kab.Kendal	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			34.201.200	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bantuan Dana Untuk Yayasan Assalam Surabaya	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		SANTUNAN KEPADA MASYARAKAT DHUAFA	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Kegiatan Sosial Bayt Musa\\\\adah Kesan Langitan, Widang Tuban, Jawa Timur	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		bantuan dana kegiatan sosial Forsikatel Telkom Regional VI Kalimantan dengan kegiatan Bakti Sosial dan menyambut bulan suci Ramadhan 1442-H	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			38.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Rehabilitasi Gedung Asrama Putra Panti Asuhan Amanah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bantuan Dana Sarana Umum Untuk Dsn Ketapang	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			40.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bantuan Dana Untuk Raudhatul Athfal Nurul Hasan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			40.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bantuan Untuk Yayasan Panti Asuhan Baitul Yatim	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bantuan Dana Kegiatan Employee Volunteer Program Di Waerebo	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			11.900.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pemb Gd Serbaguna MWC NU Moga Pemaalang	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			175.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pemb Gd Kesenian Ds Sidowarno	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pembuatan shelter Wifi Kodim 0606 Bogor	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			158.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		PEMBANGUNAN RUANG KELAS DAN ASRAMA SANTRI PUTRA MTS AL - HIKMAH	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bantuan Bedah Pondok Pesantren Mazhairul Haq dalam Rangka RAFI 2021 di Wil Treg 6	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bedah Panti Asuhan Setia Karya dalam rangka RAFI 2021	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bedah Panti Asuhan Amaliyah dalam rangka RAFI 2021	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bedah Panti Asuhan Al-Birru dalam rangka RAFI 2021	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bedah Panti Asuhan Al-Madinah dalam rangka RAFI 2021	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bedah Panti Asuhan Nurul Qolbi dalam rangka RAFI 2021	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bedah Panti Asuhan Bahtera Maulana Kie Raha dalam rangka RAFI 2021	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bedah Panti Asuhan Yayasan Putra Putri Al-Ikhlas Papua dalam rangka RAFI 2021	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bedah Panti Asuhan Tetada Kalimasada dalam rangka RAFI 2021	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bantuan Bedah Panti Asuhan Cinta Rasul dalam Rangka RAFI 2021 di Wil Treg 6	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bantuan Bedah Panti Asuhan Bina Sejahtera dalam Rangka RAFI 2021 di Wil Treg 6	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bantuan Bedah LKSA Darussilmi dalam Rangka RAFI 2021 di Wil Treg 6	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bantuan Mini BLC Untuk Komunitas Literasi Laskar Ilmu Sidoarjo	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			40.700.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Permohonan Bantuan Renovasi Atap Lantai 2 RA/TK BUDI LUHUR	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			4.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Permohonan Bantuan Pembuatan Ruang Keterampilan SLB BINA SIWI	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Permohonan Bantuan Pembangunan Jalan dan Pagar Makam	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			12.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Permohonan Bantuan Rehab Kelas/Renovasi Gedung MI Sukorejo 01	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Tajil Bersama Bulan Suci Ramadhan 1442H / 2021	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			12.100.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bantuan sarana pendukung kelompok mega mandiri	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			56.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pengadaan Ambulance Kerukunan Kematian Warga Rw09 Kel.Cempaka Baru	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bedah Panti Asuhan Daarul Yatim dalam rangka RAFI 2021 (Treg 1)	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bedah Panti Asuhan Moriah (RAFI TREG 1 2021)	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Renovasi Balai Banjar Den Yeh Pekraman Peguyangan Kaja	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Rehab Sanggar Pramuka Kwartir Ranting Gringsing	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			75.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pengaspalan Jalan Jembaran Ds Kerten	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pemb Talud Jalan Poktan Subur Makmur	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			75.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pemb Tembok Penahan Tanah Ds Palengan Laok	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Permohonan Bantuan Ruang Kelas Baru MI Islamiyah Kambangan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			12.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bantuan Sosial Motor Roda Tiga	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			165.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bantuan Dukungan Perangkat Studio Mini Untuk Komunitas Musisi Difabel Denpasar	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pembangunan tebing penahan jalan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pembangunan infrastruktur plengseran	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pembangunan RKB MTS Nurul Huda Gladagsari	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			75.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pembangunan rabat beton jalan desa	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pembangunan/Rehab Saluran Drainase di Dukuh Gosten Lor Kamolan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pembangunan gedung asrama santri Pongpes Ash-Habul Yamin	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bantuan Penerangan Jalan Umum Randudongkal	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			75.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pemb Drainase Desa Sindangwangi	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Permohonan Bantuan Pembangunan Asrama Yayasan Pongpes Al Munawwar Al-Islami	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bantuan Ambulan Masyarakat	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			211.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bantuan dana Renovasi Madrasah Diniyah Baiturahim	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			61.900.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pembangunan tebing penahan tanah Desa	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pemb Perkumpulan PKL Berkah Raharja Klaten	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pembangunan tebing penahan tanah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pemb Tembok Penahan Tanah Ds Tambah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Permohonan Bantuan Rehab Kelas/Renovasi RA Dadapayam 02	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			5.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Permohonan Bantuan Rehab Kelas MI Raudlatul Atfal Krandon Lor 01	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			6.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bedah Pondok Pesantren Al-Muttaqin	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Renovasi Muhammadiyah Boarding School Darul Arqom Kerasaan	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Renovasi 3 Pondok Pesantren di wilayah Treg2 (RAFI 2021)	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				3			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			65.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Permohonan Bantuan Dana Pengadaan APE dan Renovasi Prasarana Gedung PAUD Jati Mulia	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			5.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Renovasi Sekolah SLB Tunas Bangsa Di Balikpapan	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			2.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Renovasi dan Pemb TK Riandha Parungpanjang	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			60.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Bantuan Sarpras Pddkn Stipol Wira Bhakti Denpasar	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			80.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Rehab Kelas dan Lap Olahraga Yayasan El Rahmana	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			60.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Pembangunan Rumah Pintar	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			60.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		Permohonan bantuan dana pengadaan meubiler TPA	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
					Renovasi Infrastruktur Pemukiman & Sarana Ibadah										
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Pembangunan Aula Pertemuan Warga dkh Godekan	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Pembangunan Talud Jalan Sendang Nyai Ketrik	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			5.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan untuk Pembangunan Masjid	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			7.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Kegiatan Adu Soro Januari dan Februari 2021	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			8.200.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Baksos PWKI DPD Jabar dalam rangka Natal 2020	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		PEMBANGUNAN MASJID SEKOLAH	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bakti sosial GMASI Peduli membantu sarana & prasarana Gereja GKI Siborongborong	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Masjid Nurul Falah	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			45.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Pastoran Gereja Khatolik Paroki Roh Kudus	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Gedung Gereja GMIM Baru di Tinoor	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan alat multimedia untuk Gereja Toraja Jemaat Masale	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan alat musik dan sound sistem di Gereja Pantekosta di Indonesia	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Penerangan Jalan Dk Curidan Sukoharjo	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			65.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program				Indikator Capaian	2021	2022	2023			2024
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bedah Rumah P2TEL 2020 Tahap IV	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		468.742.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Gereja GKJW Pepathan Karangrejo	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Gedung Gereja GKJW Jawi Wetan Kedung Kandang	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Perbaikan Gedung Gereja GPIB Pancaran Kasih Kalianget	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid Al-Mu'Ayanah	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Gong Kebyar Banjar Adat Dangin Labak	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid Al-Barokah Datasemen Hanud 472 Paskhas	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Musholla As Salaam	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		123.746.265	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Pengembangan Masjid Asy Syifa Wal Hidayah	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid dan Rumah Tahfidz Mabruruurrohman	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan 4 Gerobak Sampah Ds. Parung	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		120.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Pemb Lapangan Tennis Meja	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		120.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Ubah Sampah Jadi Rupiah #AyoBikinNyata	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Gd Serbaguna Yys Budhi Luhur Mulia	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Bale Serbaguna Banjar Adat Lebah	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Gerobak Motor Ds Darmaga	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		90.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Gerobak Sampah Ds. Barendkok	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		90.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Berbagi Natal dan Tahun Baru 2020-2021	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		82.390.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan untuk anak yatim dalam rangka Telkom Berbagi Natal dan Tahun Baru	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		77.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Masjid Al-Awwabin	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		60.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Optimalisasi Wana Wisata Sabrangan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Gandu	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1		60.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Gereja Pentakosta	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit					1		10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Gereja HKBP Parbuahan	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit					1		10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Gereja HKBP Simantin	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit					1		10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan bantuan dana pembangunan Masjid	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit					1		20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Gereja Pantekosta	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit					1		10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bedah Rumah Telkom Group 2020 1 Rumah PMP	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit					1		30.509.500	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Masjid Nurul Falah Buol, Sulteng	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit					1		40.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan bantuan dana renovasi Masjid Marhamah	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit					1		10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Musholla Al-Hidayah	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit					1		5.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid AL-Barkah	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit					1		40.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan HKBP Simanondong	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid AL Munawar	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Dana Untuk Renovasi Perluasan Sekretariat Masjid Agung Pelita	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Atap Halaman Masjid Al-Ishlah Kab. Bandung	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							17.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid Al-Ikhlash Perum Taman Griya Kencana Bogor	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							75.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan masjid As-Sajadah	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah organik dalam rangka gerakan Indonesia Bersih	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							27.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Gapura Makam Umum di Dusun Kebonombo, Ds.Blimbing Kec.Koja, Kab.Kendal	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							47.459.500	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bersih-Bersih Masjid (BBM) Berkah Sosialisasi Disiplin Protokol Kesehatan	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Masjid Al-Muttaqien Taman Kopo Indah Tahap II	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							30.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah Tahfiz Makkah	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Rehab Kamar Mandi dan Tempat Wudhu Masjid Legowo Kendalisada	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							18.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan perbaikan alat2 gamelan	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Pembangunan Pura HARGO LOKA	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							10.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Dana Untuk Masjid Nurul Islam Surabaya	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							3.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Gedung Gereja Baru Jemaat GKI Sion Mapura Klass Ayamuru Kab.Maybrat, Papua Barat	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan bantuan dana pembangunan Masjid	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Masjid Al Mukhsinin	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							40.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid AL-HIKMAH	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan dana pembangunan Masjid	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan bantuan dana pembangunan masjid	Tingkat penyerapan anggaran	%	100						25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Sukaluyu Kec.Sukaluyu, Kab.Cianjur	Tingkat penyerapan anggaran	%	100						315.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid Baitul Akbar	Tingkat penyerapan anggaran	%	100						50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Program dan kegiatan DKM Masjid Miftahussalam	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event							15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Masjid Nurul Hilyah	Tingkat penyerapan anggaran	%	100						25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Rabat Beton Jln Lingkungan RT 05/12 Puri Persada	Tingkat penyerapan anggaran	%	100						180.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis Masyarakat	Tingkat penyerapan anggaran	%	100						150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Talud Jalan Ds Tegalwulung Kec Jatibarang	Tingkat penyerapan anggaran	%	100						50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Rehab Masjid Baitul Haq Brebes	Tingkat penyerapan anggaran	%	100						50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Talud Irigasi Pertanian Ds Larangan	Tingkat penyerapan anggaran	%	100						200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Mushola YPI Riyadlotul \Uqul	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Betonisasi Desa Jagalempeni	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Rumah Duka dan Incinerator Krematorium	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			737.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Perekhaban Pura Batur	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Balai Pasanekan Merajan Pasek kayu Selem	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			60.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Balai Los Merajan Pasek Gelgel, Br Lebah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			60.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Padmasana dan Bale Pawedan Pura Mrajapati	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Bale Paselang Pura Panti Dalem	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Pelinggih Pengaruman Pura Buda Manis	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			80.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Bale Piyasan Pura Bale Agung	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Pemb Kori Agung Pura	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			75.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Bale Paebatan dan Serbaguna Pura Dadia Arya	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			80.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Balai Banjar Kanginan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Tembok Penyengker Pura Buda Manis	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			65.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Bale Banjar Adat Talibeng	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			80.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Bale Banten Merajan Dauh Bale Agung	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			80.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Penataan & Perbaikan Pelinggih Pura Dadua dukuh Kangin	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Balai Sangkepan Pengempon Pura Penataran Poh gading	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			70.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Perehaban Pengempon Pura Penataran Kubon Sari	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			80.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Perehaban Pengempon Pura Dadia Sari Harum Kuta	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			80.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Bale Banten Pengempon Pura Dadia Pasek Gelgel, Kubu	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			70.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Tenda di Pura Puseh Ds Adat Padangkerta	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			77.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Pagar dan CAndi Bentar Pura Muter	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			60.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Sound System STT Banjar Adat Kerta Yasa	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			45.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan tembok Penyengker Pura Penataran Linggih Ida Bhatara Made	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			70.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Pelinggih Pura Dadia Swara Sepi	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			80.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Balai Pesedetan Pura Batur	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Perehaban Pura Penataran Sriyakti Telaga	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			80.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Masjid Nurul Iman	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid At-Taubah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Dana CSR Dharma Shanti Nasional Telkomgroup tahun 2021	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			250.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Pemb Talud Makam Mbah Gede Serang	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Musholla Baitussa`adah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Plafon Gd MD Taklimiyah Riyadlatul Uqul	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Musholla Darussalam	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Lampu Jalan Ds Jembayat	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Gapura, Pnrgn Jln, Air Bersih dan Pembuangan Sampah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			75.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Mushola Tanbihul Ghofilin	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Masjid Jami Al Muhajirin	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Masjid Jami Baitur Rohman	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Masjid Hidayatul Abidin	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb TPQ Baitussalam	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Asrama dan Kelas Baru dan Renov Mushola Ponges Assalam	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Masjid Baiturrahman	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Masjid Al Hidayah Bandung Barat	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Renovasi Masjid Utsman bin Affan Bogor	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Renovasi Masjid Jami\` Quba	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			19.675.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Renovasi Musholla Al Muawanah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			88.422.100	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Renovasi Masjid Jami Baitul Karim	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			70.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Renovasi Musholla Nurul Iman	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			121.395.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Masjid Jami At Taqwa	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			96.600.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi atap dan penggantian keramik Masjid Jami Syarif Hidayatullah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			143.950.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Pemb jembatan Rawayan 40 Meter Kp Babakan Pundy	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			407.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Renovasi dan Pengembangan Masjid Jami\`\ Sirojul Huda	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			245.950.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Ponges Tahfudzul Qur`an Thariiqul Jannah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Mushallah AL Anshar	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Pesantren Daarul Syifaa	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Gereja HKBP Garu VIII Medan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid Taqwa Tegal rejo	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Majlis Ta`lim & Madrasah Baitul Mu`min	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Musholla Al-Ghufron	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Perbaikan Bocor dan Penggantian Masjid Al-Hikmah Kantor Regional 3 Jabar	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Tata kelola sampah dan kader lingkungan hidup	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Kepedulian lingkungan untuk pengelolaan sampah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Kepedulian lingkungan untuk pengelolaan sampah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Tata kelola sampah lingkungan dan kader lingkungan hidup	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Tata kelola sampah dan kader lingkungan hidup SMK Yasmi Gerbang	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Tata kelola sampah dan kader lingkungan hidup SMK Muhammadiyah Kota Cirebon	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Tata kelola sampah lingkungan dan kader lingkungan hidup SMK Delta Mundu Cirebon	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Tata kelola sampah dan kader lingkungan SMK Pertiwi Sukamandi Subang	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Penanganan sampah dan lingkungan hidup SMK Kesehatan Bhakti Kencana Subang	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Tata kelola sampah dan kader lingkungan hidup SMK Bina Karya 2 Karawang	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Pondok Pasantren dan Masjid Baitul Mannan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Balai Serbaguna	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid Hikmatul Ilmi	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid Al-Hidayah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Motor Sampah)	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Dana Renovasi Atap Masjid Miftahul Huda	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Pembangunan Masjid Ponpes Darul Qur'an	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Musholla SMPN Satu Atap Pulau Messah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			125.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Dana Renovasi Masjid Al-Ichwan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			30.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Yasin Braille	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan MCK Musholla Jabal Hikmah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			44.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb. Tempat Wudhu, MCK dan Tandon Masjid Syafa Atul Ikhwan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		PERMOHONAN BANTUAN TOA	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			4.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Dana Renovasi Langgar Wal-Ashri	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		PEMBANGUNAN POS KAMLING RT.01 /RW.12 KALBAR	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		PERMOHONAN BANTUAN REHAB MASJID NURUL INSAN	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			9.400.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan bantuan renovasi Masjid	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan bantuan pembangunan Masjid	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan MCK Masjid Al-Hijrah di Desa Baebunta, Luwu Utara	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			55.615.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		BANTUAN REHAB GEDUNG SERBA GUNA PURA KERTAJAYA	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Gereja Kristen Injili Jemaat Pniel Kampung PAM Raja Empat	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid Nurul Hidayah Kloofkamp, Kota Jayapura	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Pesantren Cendikia Amanah	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			250.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Dana Kegiatan Keagamaan dan Kreatifitas Seni Budaya Hindu	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			12.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Sarana & Prasarana Gereja Kristen di Tanah Papua Jemaat GKI Betania Dok IX Jayapura	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Gereja Kristen Nazarene (GKN) Jemaat Aletheia Sentani	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Gereja Pantekosta Tabernakel "Kristus Penebus" Jayapura	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan asrama santri Yayasan Ikhwanul Mulimin, Banjarbaru	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Perbaikan bangunan bedeng untuk tempat peribadatan di Pasar Kemis	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Untuk TPA Al-Fattah Ds Agung Baru	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.800.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Dana Rehab Musholla Al-Taqwa	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			6.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Pengembangan Musholla Baitus Salam	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Gereja Injili Jemaat Eden Kampung Friwen Raja Empat	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Dana Renovasi Masjid Usamah Bin Zaid Jember	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid AL-Barokah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Gedung Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Kristus Jaya Obolyo Putali Jayapura	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		BANTUAN REHABILITASI MASJID	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid AL Hanif	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid Baitul Ihsan	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid Jamie Al-Ikhlas Majalengka	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid Darul Jannah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		BANTUAN SOUND SYSTEM MASJID JABALUSSALAM	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			23.200.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Sound System	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Mushola Babussalam	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan bantuan dana renovasi Masjid Al-Ikhlas	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembebasan dan perluasan lahan Masjid	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Pembangunan Mesjid Nurul Qolbi	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan bantuan dana pembangunan Masjid	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Perbaikan Panti Asuhan Tunas Bangsa	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program				Indikator Capaian	2021	2022	2023			2024
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid Al-Nahdlah Islamic Boarding School	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gapura	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		8.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan bantuan dana renovasi Masjid Jannatul Firdaus Palu	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Musholla Al-Kahfi	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Pemasangan Turap dan renovasi Pastori Gereja Kristen Pasundan	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Dana, Masjid Baitul Mannan	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Dana Bantuan Pura AMERTHA SANTHI	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		11.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		BANTUAN DANA PEMBUATAN MIHROB & MIMBAR MASJID	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Dana Masjid Jami Al-Ikhlas	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Perbaikan Panti Asuhan Lahtiful Muhtadin	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Dana Hibah Pembangunan Balai Rt.05	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		7.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Dana Rehabilitasi Gedung MA Bahrul Amin Al-Kholili	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bedah Panti Asuhan & Pesantren dalam rangka RAFI 2021 di wilayah Treg 5	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Dana Renovasi Musholla Al Hidayah	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Dana Pemb. Asrama Panti Asuhan	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		9.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid Baiturrahman Jurong Dapu Bata, Kota Sabang	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Pagar Masjid Jami Baiturrahman Dusun Perumnas	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid Baiturrahman	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Mesjid Al Amin Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid UNISA Universitas Yogyakarta	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		1.500.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Mushola AL Hidayah	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid Darul Ihsan	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Masjid Auliyah Kranyak	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		75.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid 1000 Tahfidz Qur'an Rumah Tahfidz Yatim Dhuafa (RAFI 2021 Treg 1)	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Pura Melanting dan Pasar Agung Gunung Salak	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Candi Kurung dan Penyengker	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Sound System Sekaa Taruna Gangga Temaja	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		70.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Masjid Al-Hidayah Bandung	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		14.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan dana renovasi Mushollah	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan dana pembangunan Masjid	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan dana pembangunan Masjid	Tingkat penyerapan anggaran	%					100		10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024			
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.																
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan menara Masjid	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Pagar Gereja Jemaat GPI Papua Eden Sota	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan/Renovasi Masjid Raya Al-Aqsha Merauke	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Pagar Keliling Masjid Nurul Huda Kampung Sota	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan bantuan renovasi Masjid	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan bantuan dana pembuatan pagar lingkungan Masjid	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		PEMBANGUNAN MUSHOLLA AR-RIYADH	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		PEMBANGUNAN MUSHOLLA AL BAROKAH	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			8.950.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemberian Santunan 25 Anak Yatim di LKSA Darussilmi dalam Rangka RAFI 2021	Jumlah orang penerima bantuan	Orang					25			6.250.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemberian Santunan 25 Anak Yatim di Pondok Pesantren Mazhairul Haq dalam Rangka RAFI 2021	Jumlah orang penerima bantuan	Orang					25			6.250.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemberian Santunan Anak Yatim di Panti Asuhan Bina Sejahtera dalam Rangka RAFI 2021	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			6.250.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemberian Santunan 25 Anak Yatim di Panti Asuhan Cinta Rasul dalam Rangka RAFI 2021	Jumlah orang penerima bantuan	Orang					25			6.250.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Alat Pencacah Sampah Untuk Kelompok Sampah Lubbak	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Alat Pres Plastik Manual Bank Sampah Kaliber	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Pemb./Renov. asrama LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			9.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan bantuan dana pembangunan Mushola Perum Korpri UPN	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			9.225.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Dana Renovasi Masjid Al Mukarramah	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan masjid At-Taufiq Cimahi	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Mesjid At Taqwa	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Rehabilitasi Masjid Jamie Al Fatah	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		BANTUAN CSR UNUTK PROGRAM PENGURANGAN SAMPAH DI SUMBER	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		BANTUAN DANA UNTUK PEMBUATAN CANOPY MASJID DAN TPA NURUL HUDA	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid Al Ikhlas Aceh Selatan	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Pura Penataran Anyar Karangasem	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Finishing Bale Gong Banjar Pekuwuadan	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Masjid Al Fatah Pemalang	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			75.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Mushola Baitul Mu`minin	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			30.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pavingisasi Halaman Pongpes An Nasyiin	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Masjid Baitul Mu`min	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			75.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Rehabilitasi Tempat Wudhu dan Kamar Mandi di Ma`had Tarbiyatul Islamiyah Dayah Al-Furqan Serambi Malaysia	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan pavingisasi di halaman sekolah Ponpes Bustanul Jadid	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Rehabilitasi asrama putri Ponpes Miftahul Ihsan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan paving di halaman Masjid Rahmatullah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Program Pengelolaan Sampah Plastik dan Organik di Desa Sitisari, Kec.Cileungsi, Kab.Bogor	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			135.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Program Bank Sampah di Kampung Genteng dan Kampung Antawis, Kel.Genteng, Kota Bogor	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			30.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Bale Pesandekan Desa Adat Padangkerta	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan bantuan dana pembangunan pagar keliling Madrasah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Pagar TPU	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Finishing Balai Banjar Adat Belang Kaler	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Madin As Suyaibiyah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Penyediaan Tempat Sampah Untuk Pasar Oebobo Kec. Oebobo, Kupang	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			72.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb. Candi Bentar dan Balai Pewarekan Blitar	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Musholla Alif Arofah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			75.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Masjid Nurul Iman	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			75.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Rehab Atap Masjid Fastabiquil Khoirot	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Sound System Masjid	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			84.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Yayasan Bina Thobiat Luhur Klaten	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			60.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan perpustakaan, pagar sekolah & WC siswa	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Sound System Masjid	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			51.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Tembok Penyengker Pura Marga Moksa	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Galery II Museum Affandi	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			65.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Panti Asuhan Anak Yatim & Dhuafa Assalam	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Gong Baleganjur Banjar Adat Kertha Sentana	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			75.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Mesjid Sabihussalam	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi dan Finishing Bale Pengabenan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pavingisasi Halaman Sekolah MTs Nurul Islam	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Bale Pengiyasan Pura Batur Sari Banjar Adat Cemenggaon	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Museum Wayang Beber Bantul	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			65.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Dana Renovasi Masjid Al-Hikmah	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			7.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Masjid Al-Ikhlash Komplek TNI AU Daya Makoopsau	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Dana Masjid Al-Hikmah	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			12.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid Baitul Muttaqin	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			7.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		BANTUAN RENOVASI BALAI WARGA RW 08 KEL.KEBON SIRIH	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan tembok penahan jalan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			45.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid Jami Nurul Karim	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		BANTUAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN SEDERHANA DI PONTIANAK	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Dana Pembangunan Masjid Al-Ghifari	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gapura Masjid Al-Muqqorobin	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			7.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Dana Mushola Baiturrahmat 3	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			7.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		BANTUAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Renovasi Masjid Nurul Amal	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			64.025.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan gedung MTs Darul Huda	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Gedung Sekolah dan SarPras Taman Pendidikan Qur'an Al-Hamzah	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		PEMBANGUNAN MUSHOLLA NURUL ULUM	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Penggiling Serabut Kelapa dan Kopi	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		BANTUAN DANA REHABILITASI SARANA PRASARANA TPA MANBAUL ULUM KAB. JEPARA	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Taman Pendidikan Al-Qur'an "Darus Surur"	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		PEMBANGUNAN TALUD JALAN RW 05 DESA PURWOJATI BANYUMAS	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Bale Kul Kul Banjar Adat Tangkup	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			109.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Sarpras BSA College	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Sarpras Hidden Canyon Bali	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Bale Kul Kul Banjar Adat Tangtu Denpasar Timur	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Perbaikan Bale Kul Kul Banjar Adat Tarukan	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Finishing Bale Desa Adat Guwang	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Dana Pembangunan Asrama Panti Asuhan As Sajad	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			8.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Fasilitas Umum Penerangan Jalan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			8.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Lapangan (fasum)	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			9.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		BANTUAN SARANA & PRASARANA PASAR RAKYAT CILACAP	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Dana Pembangunan Gapura Ds Ledokombo	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Olah Raga Bulu Tangkis	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan bantuan dana pembangunan taman/ruang hijau	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			12.750.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Mushalla Tarbiyah Mts Annisa Kedaisianam	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Candi Bentar dan Tembok Penyengker Pura Penataran Agung Satriya DAlem	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Perbaikan Kostum Seni Ketoprak	Tingkat penyerapan anggaran	%					100	97.400.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		BANTUAN RENOVASI BANGUNAN MADRASAH ALIYAH NURUL HIDAYAH	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						93.600.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Tingkat penyerapan anggaran	%					100	70.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bedah Rumah 13 Unit Rumah Pensiunan Telkom	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit						325.286.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Masjid Jamie At-Taqwa	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Permohonan Bantuan Dana Mushola Mawardi	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						22.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Bale Banjar Penasan Gede Ds Adat Penasan	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Penyengker Merajan Pande I Ketut Kerana	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Pura Dadia Tutuan	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Pengempon Panti Pasek Ketewel Bjr Penarukan Kaja	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Pengempon Merajan Pasek Gel Banjar Penarukan	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Pemb Merajan Gede Pasek Banjar Tuakilang	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Rabat Beton Peng Petirtaan Beji Bj Dinas Batu Ngadeg	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						40.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bedah Pomes Al-Fataa & Santunan Anak Yatim Piatu dalam rangka RAFI 2021	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Bale Kul Kul Banjar Adat Bandung	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Aula Yayasan Al-Umam Cisande Cicantayan	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Renovasi Musholla Al Barokah	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Plengsengan Pokmas Jaya Asri	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Musholla Al Ikhlas	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU TPQ TASHILUL MUROTTILIN	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Madrasah Diniyah Tarbiyatul Khususiyah	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Penerangan Jalan	Tingkat penyerapan anggaran	%					100	65.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Sarpras Musholla Al Muhajirin	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						65.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Masjid Al Muslimin	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Revitalisasi Tempat Pentas Seni dan Dinner	Tingkat penyerapan anggaran	%					100	200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Pemb Panti Asuhan Hidayah 3	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						65.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Tenda Adat Panca Dharma	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Gong Banjar Adat Penastanan Kelod	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		BANTUAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RW 04 DESA SUMBANG BANYUMAS	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi						200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pengadaan Gong Kebyar Desa Adat Sumita	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb MTs Hidayatus Shibyan Karangasem	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		PEMBANGUNAN PEMELIHARAAN JALAN DESA KARANGGUDE KULON	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							180.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		PEMBANGUNAN ASRAMA SANTRI TAHFID AL QURAN PONPES DARUL HIKMAH	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Pagur TPU Makam Gede	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							60.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Tenda Sosial Majelis Talim	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							60.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Rehab dan Pengembangan Ponpes Hidayatul Athfal	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							60.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Ruang Belajar di Pesantren Mustofawiyah	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Rumah Tahfidz Baitul Qur'an Afiah Muminun	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Musholla "Annida"	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		PENINGKATAN JALAN DI LINGKUNGAN KELURAHAN KARANGTALUN CILACAP	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							120.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Masjid Baitur Rahim	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Renovasi Musholla At-Taufiq	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Pura Dalem Desa Adat Iseh	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pembangunan Musholla Al-Hikmah Sunan Muria	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Bantuan Sarpras Ikatan Keluarga Muslim Ahmad Nabawi Bj Dinas Kp Sindu	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Bale Pesandekan Dadia Pasek Selulung Ds Tajun	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Bale Pesandekan Pura Dadia Pasek Dangka	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Pemb Bale Paebatan Pura Dadia Pasek Gel Gel	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		Rabat Beton Pengempon Petirtaan Genjong	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi							50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
					Bantuan Penanganan Perubahan Iklim										
		13.3.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup		Pengelolaan limbah kotoran sapi Desa Cilupus Cilengkrang, Bandung (ABN)	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit							35.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		13.3.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup		Program Wali Pohon DPW Jabar 2 Sekar Telkom 2021	Tingkat penyerapan anggaran	%							25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		13.3.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup		Penghijauan Lahan Eks Tambang di Desa Namang	Tingkat penyerapan anggaran	%							20.450.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
					Bantuan Sanitasi Layak										
		6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun		Clean Up Sungai Jangkok Ampenan Dalam Rangka Kegiatan EVP	Tingkat penyerapan anggaran	%							3.916.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun		Pembangunan MCK di Lingkungan Salena, Kel. Buluri, Kec. Ulujadi	Tingkat penyerapan anggaran	%							72.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
					Bantuan Penjagaan Ekosistem Laut										

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024			
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.																
		14.2.1*	Terkelolanya 11 Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan		Konservasi Terumbu Karang dan Pemberdayaan Masy. Lokal di Pulau Badul dan Liwungan, Prov.Banten	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			155.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
					Bantuan Penjagaan Ekosistem Darat											
		15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas hutan lahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Taman Konservasi Puspa Langka Kab.Kepahiang, Bengkulu	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas hutan lahan		Bantuan Kegiatan Bina Desa dan Pelestarian Lingkungan	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			57.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas hutan lahan		Conserve Nature \\\\"Save The Endangered\\\\"	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event					1			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas hutan lahan		Bantuan Pemb Sumur Bor Ponpes Attauhidiyah Cikura	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			90.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas hutan lahan		Penanaman Pohon Go green Lokasi Pantai Natal	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			23.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas hutan lahan		Pemb Tembok Keliling Makam Kemangmang	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas hutan lahan		BANTUAN DANA UNTUK PENANGANAN PASKA BANJIR (REHAB TERAS LANGGAR TANWIRUL QOLUB) DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			36.200.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas hutan lahan		Bantuan Mobil Rescue Untuk Penanggulangan Bencana	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			408.150.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas hutan lahan		Solar Cell Program	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event					1			200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas hutan lahan		Bantuan Perahu Karet Rescue Untuk Penanggulangan Banjir	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			96.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas hutan lahan		Penyediaan Bak Sampah di Dusun Krajan Desa Sumberlesung Kec.Ledokombo, Jember	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			45.863.100	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas hutan lahan		BANTUAN PROGRAM PENGURANGAN SAMPAH DI SUMBER	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas hutan lahan		Reboisasi Lahan Kritis di Desa Cilandaeun, Kec.Lebak Gedong, Kab.Lebak	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			650.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas hutan lahan		Reboisasi Hutan Terhadap Lahan Kritis di Desa Suka Jaya, Kec.Jonggol, Kab.Bogor	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			650.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
					Bantuan Hewan Qurban											
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Bantuan Daging Qurban Utk Masy. Miskin dlm Rangka Qurban 1442H di Sekitar Yayasan Al-Fawwaz Al-Islami	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event					1			27.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Btn Daging Sapi Qurban utk Masy Miskin dlm Rangka Hari Raya Idul Adha 1442H di TREG VII KTI	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			250.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Btn Daging Sapi Qurban utk Masy Miskin dlm Rangka Hari Raya Idul Adha 1442H di TREG VI Kalimantan	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			168.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Btn Daging Sapi Qurban utk Masy Miskin dlm Rangka Hari Raya Idul Adha 1442H di TREG V Jatim Balnus	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			350.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Permohonan Bantuan Dukungan Kegiatan Dapur Umum,Bhayangkari Tegal	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Btn Daging Sapi Qurban utk Masy Miskin dlm Rangka Hari Raya Idul Adha 1442H di TREG 4 Jateng & DIY	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			216.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Btn Daging Sapi Qurban utk Masy Miskin dlm Rangka Hari Raya Idul Adha 1442H di TREG III JABAR	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			171.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Bantuan Sarana dan Peralatan Pematangan Hewan Qurban	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		BANTUAN DANA QURBAN DI MASJID AL - ISLAM	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		PENGAJUAN BANTUAN TENDA DARURAT	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			19.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Btn Daging Sapi Qurban untuk Masy. Miskin dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1442H di lingkungan TREG II Jakarta	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			540.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Bantuan dana QUrban utk dalam rangka COVID-19	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Btn Daging Sapi Qurban utk Masy Miskin dlm Rangka Hari Raya Idul Adha 1442H di TREG 1 Sumatera	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			240.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Penyediaan Hewan 1 (Satu) Ekor Sapi Qurban untuk Lokasi Pengiriman Masjid Al Hikmah Sawah Besar	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			33.275.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Penyediaan Hewan 1 (Satu) Ekor Sapi Qurban utk Lokasi Pengiriman Masjid Jami\\ Al \\tishom Cilandak	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			33.275.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Penyediaan Hewan 1 (Satu) Ekor Sapi Qurban untuk Lokasi Pengiriman Pondok Gus Miftah Jogjakarta	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			33.275.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Penyediaan Hewan 1 (Satu) Ekor Sapi Qurban utk Lokasi Pengiriman Saung Dakwah Pesantren Bahrul'ulum	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			33.275.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Penyediaan Hewan 1 (Satu) Ekor Sapi Qurban di Lokasi Pengiriman Kantor FKPPi Bdg	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			33.275.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Penyediaan 1 ekor sapi hewan qurban untuk lokasi Grup-B Paspampres	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			50.215.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Bantuan Daging Qurban Untuk Masy. Miskin Melalui Cipta Nusantara Masagi Foundation	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Bantuan hewan qurban 1442 H	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			54.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Bantuan hewan qurban bagi masyarakat di lingkungan Telkom University	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Bantuan Hewan Qurban Yayasan Manarul Ulum	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			500.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Bantuan Hewan Qurban Yayasan Seni Rudana	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Bantuan hewan kurban bagi masyarakat di lingkungan Telkom Gegerkalong	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Bantuan Daging Qurban Utk Masy. Miskin dlm Rangka Qurban 1442H di Daerah RW 10 Baleendah	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			27.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
Bantuan Penanggulangan Covid-19															
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Smart System Sterilisasi Udara Pada Ruang Tertutup Berbasis IoT #AyoBikinNyata	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Operasional Ibnu Rumah Centre Bandung Sebagai Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		BANTUAN PEMBUATAN GARASI AMBULANCE SIAGA	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Permohonan Bantuan 2 Unit Cuci tangan portable	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				2			1.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Paket sembako & paket kesehatan charity Hari Ibu \\ "Perempuan Tangguh\\ "	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			59.400.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Bantuan 1 Unit Mobil Ambulance	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			246.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Bantuan 1 Unit Mobil Ambulance	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			238.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Bantuan Sunatan Masal dan Baksos Ponpes Riyadus Salam CicangKang	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.650.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Bantuan 1 Unit Ambulance untuk Yayasan Sahabat Kebaikan Umat	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			247.400.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Bantuan 1 unit Ambulance untuk Yayasan Cahaya Al Fatih Nusantara (Treg3)	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			247.400.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Bantuan 1 Unit Ambulance untuk Yayasan Pesantren Terpadu Darul Hidayah Bandung	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			247.400.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		BANTUAN MASKER UNTUK SESAMA OLEH SEKAR DPD KALTENG	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Peningkatan akses layanan penyandang disabilitas	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			350.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Penanggulangan kesehatan petugas outsource di Telkom Group	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			623.844.800	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		BANTUAN APD UNTUK IPNU MALANG	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			6.840.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Bantuan Dukungan Pelaksanaan Sentra Vaksinasi Bersama BUMN oleh Yayasan BUMN Untuk Indonesia	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			10.000.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Bantuan Dukungan Pelaksanaan Sentra Vaksinasi Bersama BUMN oleh Yayasan BUMN Untuk Indonesia (Termin 2)	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			15.000.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Peduli Tenaga Kesehatan (Nakes) Rumah Sakit di Wilayah Bekasi & Bogor	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Penyediaan Alat Ventilator di RS.Aloei Saboe dan RS.Otanaha Prov. Gorontalo	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Penyediaan Layanan Call Center BNPB Terkait Donor Plasma Konvalesen Periode Bulan Feb sd April 2021	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			546.051.089	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		KEGIATAN VAKSI TAHAP 1 (SATU) DALAM RANGKA HUT TELKOM INDONESIA KE-56 DI BALIKPAPAN	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Bantuan dana dukungan kegiatan serbuan vaksinasi kepada masyarakat di Wilayah Kota Makassar	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			30.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Bantuan dana kegiatan Vaksin	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		BANTUAN DANA KEGIATAN VAKSINASI TAHAP 2 (DUA) DI BALIKPAPAN	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		BANTUAN DANA KEGIATAN VAKSIN UNTUK KEMANUSIAAN DI SAMARINDA	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			5.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Permohonan bantuan dana dukungan kegiatan serbuan vaksinasi II kepada masyarakat di Wilayah Kota Makassar	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Penanggulangan biaya kesehatan masyarakat karyawan outsource Telkom Group	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			159.486.240	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Bantuan Bina Lingkungan Melalui Satgas Bencana Nasional BUMN Jatim	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			40.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Bantuan Ambulan Masyarakat	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			232.600.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Bantuan Kegiatan Vaksin Tahap 2 (Dua) Di - Pontianak	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Penyediaan Tabung Oksigen untuk Wilayah Telkom Jambi	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			18.830.075	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		BANTUAN DANA KEGIATAN VAKSIN TAHAP 1 (SATU) DI PONTIANAK	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
					Edukasi Talenta Digital Untuk Mendukung Peningkatan Literasi Digital Nasional										
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Bagi Buku #AyoBikinNyata	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Bantuan 10 PC program bantuan internet untuk belajar (Witel Sidoarjo)	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				10			80.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Bantuan kegiatan Rumah Tahfidz Quran	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Pelatihan dan Seminar Untuk Membangun Keterampilan dan Karakter Anak Bangsa	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Pembangunan Pesantren Ibnu Hajar	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Kelas Merdeka #AyoBikinNyata	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Pelatihan Kaligrafi anak rentan putus sekolah di wilayah Subang #AyoBikinNyata	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Pembinaan Sepakbola Anak-Anak Usia Dini	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Beasiswa Bagi Anak-Anak Tidak Mampu (Bidang Pendidikan) POII Telkom Group Anggana Kasih Bandung	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Pembangunan Rehab Pondok Pesantren Al-Muthola`ah	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Pembangunan Sarana Prasarana Pesantren Fatthul Ulum	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Bantuan Kegiatan Innovillage Tahap 3 tahun 2021	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			856.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Pelatihan pembuatan konten digital kreatif positif melawan hoax untuk remaja	Jumlah orang penerima bantuan	Orang				100			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Peringatan HUT Ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2020 \Kreatifitas dan Dedikasi Guru Menuju Indonesia Maju\	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			125.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Bantuan Wifi Gratis untuk Penunjang Sekolah Daring	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			70.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Permohonan Bantuan Bina Lingkungan	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			12.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		KERJA SAMA PROGRA LAPAK BERKAH DISABILITAS DAN DHUJAF	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			66.700.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		PEMBIAYAAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Webinar & Training Digital Education for Indonesia 2021 untuk 3000 Guru di Jawa Barat	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				3000			680.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Dukungan dana pada kegiatan Turnamen Bulutangkis HUT ke 69 kopassus Cijantung	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Inkubator Bisnis Teknologi Tanaman dan Geleri UMKM	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Pelatihan Dharma Baraya FPIK Bina Desa	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Bantuan Dana Untuk Majelis Ta'lim Qur'ani	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			2.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Webinar & Training Digital Education for Indonesia 2021 untuk 3000 Guru di Jawa Barat	Jumlah orang penerima bantuan	Orang				3000			675.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Bantuan Beasiswa Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Batu Tiga, NTT	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			4.900.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Pembinaan Olahraga Baseball Anak-Anak Usia Dini	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Pembangunan Lab. Perpustakaan Digital SMK Bhakti Kencana Pangandaran	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		PROGRAM PEMBINAAN /PELATIHAN UKM & PEMBEKALAN CMB	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			35.888.600	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Pelatihan Kewirausahaan dan Teknik Pembuatan Sofa	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Penyelenggaraan pelatihan, pembinaan dan peralatan usaha program Wirakriya Milenial	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			806.850.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Bantuan Dana Untuk Kegiatan Ngaji Braille Adu Soro	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.450.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Bantuan Dana Program International leader	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			4.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Inovasi Digital dalam Rangka Kegiatan SMK Digsocial Innovation	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			1.061.362.500	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Pelatihan Pendidikan Kepemimpinan Nasional DPN Peradiah Indonesia	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			250.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		PELATIHAN/PEMBEKALAN CALON MITRA BINAAN PT.TELKOM UNTUK SALUR TW 2 TAHUN 2021	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			30.063.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Pelatihan Jurnalistik LSM Kompas	Tingkat penyerapan anggaran	%				1			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Pelatihan dan Sertifikasi untuk Teknisi Fiber Optik	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Bantuan untuk kegiatan Lomba dalam rangka HUT RI ke 76 di KOPASUS	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Permohonan Bantuan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		BANTUAN DANA PENDIDIKAN	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			6.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Bantuan dana Pembiayaan Berlangganan Internet Untuk IKM dan UKM Binaan DEKRANAS (Bin Agustus-2021)	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			44.638.398	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		BANTUAN DANA KEGIATAN EDUKASI/PELATIHAN KERAJINAN PANDAN	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Implementasi Social Project Innovillage Tahap I	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			825.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		INNOVILLAGE 2021 (TAHAP 1)	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			675.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Pelatihan Literasi Digital di Kawasan Danau Toba	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			80.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
					Edukasi Talenta Digital Untuk Mendukung Peningkatan Literasi Digital Nasional										
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pembangunan Ruang Perpustakaan Terpadu Pelita	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Dana Untuk Pesantren Bumi Shalawat Sidoarjo	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan bantuan pengadaan sound system & perlengkapan TPA	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Dana Untuk Yayasan ABK Peduli Kasih Dim Rangka Kunjungan Komisaris Utama Telkom	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			30.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Dana Untuk Ponpes Miftachus Sunnah Kedung Tarukan Surabaya	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pembangunan RKB SMP Islam Nurus Syamsi	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		LOMBA CIPTA LAGU DAERAH & KOREOGRAFI	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan sarana dan prasarana belajar di Yayasan Al-Kahfi Cimahi	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru Madrasah Roudhotul Irfan Ciganea	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pembangunan Gedung Miftahul Ulum Th 2020	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan sarana prasarana TPA /TPQ M SAQI	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan Dana Untuk SLB Samudra Lavender Dlm Rangka Kunjungan Komisaris Utama Telkom	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			30.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan Pengem Taman Pendidikan Al Quran Daud Salsabil	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			75.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pembangunan Ponpes Hidayatulloh Al Fatah Jayanihim	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			19.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Permohonan bantuan dana pembangunan ruang kelas baru	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pemb RKB MI Darrusalam Sumingkir	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan Alat Marching Band MI Darwata	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pemb RKB Maarif NU 2 Pancasan	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pembangunan RKB Madin AN Nur	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pemb Asrama Pondok Pesantren Al Hidayah Banyumas	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			18.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pemb RKB MI Maarif Nu 04 Banjareja, Cilacap	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pemb Ruang Belajar TK Diponegoro 25 Karangnangka	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			18.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pemb TK Diponegoro 53 Pasir Kulon	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			23.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pembangunan Gedung API Pongpes Salaf	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			24.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan RKB MI Maarif Nu 01 Panisihan	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			24.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pemb RKB RA AL Barokah Babakan	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pemb TPQ Nurul Iman Batu Raden	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan Peningkatan Pendidikan Di Pongpes Langitan Tuban	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pemb Ruang Kelas MI Maarif NU Teluk	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			18.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pemb Ged PAUD Kober Sabulul Iman	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			18.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Sarpras SMP Permata Hati	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			18.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Penyaluran Bantuan Perlengkapan Sekolah Untuk Siswa/i Kurang Mampu di Wilayah Bandung Raya	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			12.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan bantuan dana pengadaan meubiler TPA	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan dana pengadaan perlengkapan TK-TPA	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan Bantuan APE PAUD Tahun 2021	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			5.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan Bantuan Pelatihan	Jumlah orang penerima bantuan	Orang				100			4.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Rasa oleh Rumah Belajar Atap Sagu Di Dusun Waipot	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			40.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pemb Pagar dan Gapura Ponges Anwarun Najah Bondowoso	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pemb RKB Paud Hidayatullah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pembangunan Ruang Kelas PAUD Cahaya Bunda	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Rehab Sarpras Madin Riyadluth Thullab	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Rehab Sarpras Madin Awwaliyah Al Intidhom	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pemb Sarpras Madin Awwaliyah Al Amiin	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan Betonisasi dan Plafon MI Tsamrotul Huda	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pemb Atap Gedung Olahraga Dkh Sidorejo	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			75.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pemb Gd TPA Al Mu\`sin	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			75.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pemb RKB LP Ma\`arif NU MTs Maarif Karanggede	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			75.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pemb RKB LP Ma\`arif NU MI Islamiyah Karangpake	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pembangunan SMK Percontohan Tegalwaru, Purwakarta	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			300.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Kegiatan Senyum Mama Papua	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			57.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan PC untuk 23 Pesantren dan Madrasah	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				23			490.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pembangunan asrama santri putra/putri Ponpes Padamulya An Nahdliyah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Sarpras TAAM Firdaus	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Sistem administrasi digital GP Ansor	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pondok Tahfidz Darul Quraa	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Ponpes Tahfizul Qur'an Al Bayyinah	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event				1			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pemasangan Plafon Balai pengajian Balai Meurunoe	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pembangunan TPQ Ihsanul Ulum	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan Alat Bermain Edukatif PAUD Tunas Bangsa	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pemb RKB Yys Hidayatul Islamiyah MI Selajambe	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Balai Pengajian Ma'rifatullah.	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pembangunan MDA Subulussalam	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan Dana Pembangunan dan sarana Tahfidz Qur'an	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan Perbaikan Fasilitas Olahraga dan lahan STIKESMI	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pemb RKB Madin Tarbiyatuh Thullab	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pemb RKB Yayasan Sabilul Khoirot	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pemb RKB Pongpes Bismillah Barugbug Banten	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan Rehab Ruang Kelas MTs Assaid Blado	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			120.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan dukungan akses dan sarana IT Mukhtar Mathlaul Anwar	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			49.350.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRA	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			98.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pemb RKB Mts Nurul Hidayah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			120.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Paket sarana akses internet untuk kesekretariatan Asosiasi Pelaku Usaha Talas Beneng Kab.Pandeglang	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			55.757.075	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pembangunan Interior Perpustakaan dan TPA	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Sarpras Olahraga SMP Muhammadiyah Terpadu Moga Pematang	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Sarana pendidikan internet & komputer untuk SMK Putera Pangandaran	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pemb RKB MI Hidayatul Islam Probolinggo	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pemb Ruang Kelas SMK Veteran Pekalongan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Sarana pendidikan internet & komputer untuk SMK Suhara Mandiri	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Sarana pendidikan internet & komputer untuk SMK YABP Garut	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Sarana pendidikan internet & komputer untuk SMK Ma'arif Cidaun	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Sarana pendidikan internet & komputer untuk SMK Bumi Persada Cidaun	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Sarana pendidikan internet & komputer untuk SMK Salsabiila Zaina	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Sarana pendidikan internet & komputer untuk SMK Doa Bangsa Palabuhanratu	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Sarana pendidikan internet & komputer untuk SMK Harapan Bangsa	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Sarana pendidikan internet & komputer SMK Dwi Warna Sukabumi	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan Dana Pendidikan Atas Nama Ajeng Rispa Juniawati	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			3.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pembangunan Madrasah Abaabil	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			10.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Permohonan Bantuan APE Paud AL-Hidayah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Rehabilitasi Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqien	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			300.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Pemasangan WIFI Sekolah SMP Negeri Satu Atap Pulau Mesah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			37.390.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pengadaan 5 unit PC untuk sarana belajar mengajar MTs Ar-Rahman Merombok	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			45.650.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pengadaan sarana belajar mengajar 10 unit komputer, Meja & Kursi	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				10			74.225.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan sarana belajar mengajar 10 unit komputer	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				10			69.310.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pengadaan sarana komputer SD Islam Al Mubarak	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Sarpras SMP Al Islam Al Falah Baron	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			49.950.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Sarana komputer dan internet untuk SMP Tahfid Al-Azhar	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.700.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Gamelan Tradisional	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			80.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pembangunan RKB Mts Salafiyah Sofwaniyah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pembangunan Gedung TPQ Raudlatul Mujawwidin	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024			
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.																
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Sarpras Pongpes Assalafiyah Alquraniyah Nusantara	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pembelian Prasarana Pondok Pesantren Darul Huffazh Al-Matin Berupa Genset dan Speaker	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Sarana komputer dan internet MI Mutiara Iman Jember	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			50.700.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan sarana komputer dan internet untuk SMP Al Hasan	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			50.700.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan bantuan dana pengadaan perangkat komputer untuk dukungan operasional	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			35.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan Bantuan dana renovasi gedung Sekolah Binaan Hidayatullah Mamuju	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan bantuan pengadaan komputer	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan bantuan dana pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana Rumah Qur'an	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			20.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan bantuan dana pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana Rumah Qur'an	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			16.800.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024			
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.																
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pemb Ruang Kelas Yayasan Al Mukhlisin Bondowoso	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pembangunan Laboratorium Digital Marketing di SMK Telkom Sidoarjo	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			130.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Sarana dan Prasarana PAUD Kampung Naga	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Apresiasi Kegiatan Sosial Puger Mulyono Kick Andy Heroes 2021	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			55.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan komputer untuk menunjang pembelajaran IT kepada Masyarakat di Wilayah Kaltara Treg 6	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			60.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan komputer untuk menunjang pembelajaran IT kepada Masyarakat di Wilayah Kaltim Treg 6	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			120.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Paket sarana akses internet untuk MA Nurul Hidayah	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			73.492.375	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Perangkat Laboratorium Komputer Program Stella Care	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			130.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan komputer untuk menunjang pembelajaran IT kepada Masyarakat di Wilayah Kaltimeng Treg 6	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan komputer untuk menunjang pembelajaran IT kepada Masyarakat di Wilayah Kalteng Treg 6	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan Pengadaan Alat permainan Edukasi (APE) TK IT AL-IKHLAS	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan Perbaikan Sarana dan Prasarana Paud IT Cahaya Bunda	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan Bantuan Sarpras Paud TK Pancasila Bandungan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan sarana pengajaran berupa laptop	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Dana Peningkatan Pendidikan Di Panti Asuhan Asih Madiun	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Digitalisasi Informasi dan Media Belajar Online	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			40.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Pembiayaan Berlangganan Internet Utk IKM & UKM Binaan DEKRANAS Sebanyak 1405SL (Tag Bln April 2021)	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				1			48.907.565	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan komputer untuk menunjang pembelajaran IT kepada Masyarakat di Wilayah Kalbar Treg 6	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan komputer untuk menunjang pembelajaran IT kepada Masyarakat di Wilayah Kalsel Treg 6	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Renovasi Ponpes Salafiah Al-Falah Bojongsong dim Rangka RAFI Tahun 2021 dan Safar 1442H BOD Telkom	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Renovasi Pembangunan TPA Raudlatul Adha	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			15.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		BANTUAN DANA KONVENSI WILAYAH XX NADATHUL ULAMA PROV.DKI JAKARTA	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			85.074.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		BANTUAN KEGIATAN PERPISAHAN KELAS	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pembangunan SMA Keberbakatan Olahraga San Bernardino Lewoleba - Lembata	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			225.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		KEGIATAN SOSIAL UNTUK ANAK ASUH 6 WITEL FORSIKA GROUP	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			36.471.500	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		BANTUAN 10 UNIT PC, 1 PAKET HUB 24 PORT DAN INSTALASI KABEL. PENDIDIKAN INTEGRAL HIDAYATULLAH MADRASAH ALYAH TAHFIDZ PUTRI	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				10			79.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Sarana Komputer Untuk Ponpes Salafiyah Tahfidzul Qur'an Al-Furqan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan Bantuan Rehab Kelas/Renovasi KB Al-Munawaroh	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan Bantuan APE TK Marsudi Utami	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan Bantuan Rehab Kelas/Renovasi PAUD AL- KHAIR	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan Bantuan SARPRAS TK MAHARDHIKA	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Renovasi Ponpes At-Tamim dlm Rangka RAFI Tahun 2021 dan Safar 1442H BOD Telkom	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pemb RKB RA Masyithoh	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pemb Ruang Belajar, Asrama dan Peninggian Tanah Ponpes	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pembangunan Asrama & Ruang Belajar Santri Tahfidz Al-Qur'an & Kitab Kuning	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Alat Bantu Gerak & Tulis Sarana Pembelajaran di SLB ABC Aisyiyah Kawalu, Tasikmalaya	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			79.750.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Renovasi Asrama Putri Yayasan Islam Al-Istikhlas	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Komputer dan Internet untuk SMP Gurukula Bangli	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Sarana Komputer untuk Yayasan Peduli Kasih (SMP Surya Mandala)	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			80.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan Bantuan APE PAUD TK Sari 02	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pembangunan Asrama Santri Yayasan Darul Misbah Dayah Misbahus Shalihin Al-Waliyah Gampong Pande	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan bantuan APE PAUD TK Dharma Putri	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan Bantuan APE PAUD TK ABAJeblosan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan Bantuan Rehab Ruang Kelas MI Darussalam Bancak	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			6.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pembangunan Asrama Pesantren Tahfidz Kiai Marogan (RAFI 2021 Treg 1)	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pembangunan Gedung Asrama Pesantren Darunur Al Musthafa (RAFI 2021 Treg 1)	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Pembangunan Ponpes Tahfidzul Qur'an (Bedah Pesantren Treg1) RAFI 2021	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Sarana Ruang Pembelajaran Daring dan Video Conference di IPDN Kampus Jakarta	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			154.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan komputer dan printer untuk MTs Safinatun Naja	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.400.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Rutilahu Yayasan Al Falah Caruban	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Penyediaan 7 Unit Tablet untuk Sarana Pembelajaran di SLB ABC Aisyiyah Kawalu Tasikmalaya	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				7			37.620.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Penyediaan 5 (Lima) Unit Laptop Untuk Sarana Pembelajaran di SLB Aisyiyah Kawalu Tasikmalaya	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				5			40.150.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan 5 Unit Komputer	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				5			24.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan komputer untuk SMK Pariwisata Aisyiyah Sumbar	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			14.997.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan 2 unit komputer	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				2			9.998.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Sarana Internet Sekolah Mts Al-Masthuriyah Kota Bekasi	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			97.759.773	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan komputer dan internet untuk MTs Muhammadiyah Srumbung	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			35.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan komputer dan internet untuk Ponpes Assalafiyah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan komputer dan internet untuk SMK 17 Sayegan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan Bantuan SARPRAS TK Tahun 2021	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan komputer untuk SLB Bhakti Putra Palu (Anniversafari 56th Telkom)	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			52.023.400	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan komputer untuk SMK Lipupang Manado (Anniversafari 56th Telkom)	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.257.900	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Sukumulya	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Hegarmulya	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Kanangari	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Cikarang	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Perangkat Free WICO dan Sarana Pendidikan di 30 Desa di Jawa Barat	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				30			252.450.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Komputer untuk Ponpes Madinah Al-Hijrah & MI/MTs Al-Khoeriyah	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			170.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan 3 unit komputer untuk Pondok Pesantren di 6 Kabupaten Provinsi Jawa Barat	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				3			350.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan Bantuan Sarana Pembelajaran/APE PAUD	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan APE (Alat Permainan Edukatif) Tahun 2021 TK Pancasila	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			5.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Dukungan Komputer dan Printer KESDAM III Siliwangi	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			17.550.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Komputer dan Internet	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			77.600.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan komputer & internet untuk Yayasan Baeturahman	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			49.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Bangbayang	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Cipanjalau	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Permohonan bantuan dana pengadaan komputer sekolah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Laboratorium Komputer & Layanan Internet dalam rangka PON XX Papua	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			106.165.400	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Lab. Komputer & Layanan Internet untuk SMK Harapan dalam rangka PON XX Papua	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			106.165.400	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Perlengkapan Olahraga & Layanan Internet untuk SSB Batik dalam rangka PON XX Papua	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.014.398	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Lab Komputer MTS Matholiul Huda	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			70.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024			
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.																
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan komputer untuk SMP Nurul Jannah Natuna (Anniversafari 56 Thn)	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			63.492.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Komputer untuk SLB ABC Swadaya Kendal (Anniversafari HUT 56 Telkom)	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			54.060.380	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Dana Pembiayaan Berlangganan Internet utk IKM & UKM Binaan Dekranas 123 SSL(Tag Bln Sept 2021)	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit					123			43.540.038	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Cibuluh	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Bunter	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Sukajaya	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Bojongsari	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Bagawat	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Mekarwangi	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Darmacaang	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Cilebak	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Argalingga	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Sirnasari	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Mulyasari	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Karangasari	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Lebaksiuh	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Subang	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Sukumulya	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Cidugaleun	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Cikaracak	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Darawolong	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Cisitit	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Pangumbahan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Sukarame	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Tegalsari	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Tenjolout	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Banyuresmi	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Cidadap	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Dukuh	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan Akses Internet Gratis Untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Di Desa Gandasoli	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			31.471.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Employee Voluntary Program Bantuan Internet Untuk Smart KKN Digital di 28 Pedesaan Yang Tidak Terjangkau Jaringan FTTH di Wilayah Kalimantan Barat	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				28			30.100.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan Dana Bina Lingkungan Untuk SMP Al Jihad Surabaya	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			30.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan Laboratoriu Fiber Optik (FO) untuk SMK Terpadu Al-Ikhwan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			166.650.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Permohonan Bantuan APE TK BINA PUTR A	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Permohonan APE (Alat Permainan Edukatif) TK Wiyata Rini	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Permohonan APE (Alat Permainan Edukatif)TK Pertiwi Pasakan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			5.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024			
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.																
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))		Bantuan komputer untuk Desa Wawonian Kec.Likupang Barat, Minahasa Utara	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			21.950.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
					Bantuan Sarana Sanitasi & Air Bersih											
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Rehabilitasi Sanitasi dan Lingkungan	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					1			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pemb Saluran Air Pokmas Mahkota	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					5			200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Renovasi Toilet Putri Pondok Pesantren Al-Quran "\\\"Arriyadhoh\\\" Ciamis	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					5			25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan Sarana Sanitasi Untuk Masyarakat Di Lingkungan Denpom III/5 Bandung	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					5			55.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pemb dan Peningkatan Sarana Taman Lingkungan Masyarakat perum Guru Makmur	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					5			200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan MCK dan Sarana Air Bersih di Desa Taring, Sulawesi Selatan	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			91.800.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Sanitasi air bersih, MCK dan Tandon air serbaguna	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Sanitasi air bersih dan MCK Masyarakat	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Sanitasi air bersih dan MCK Masyarakat	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Sanitasi air bersih dilingkungan sekitar Yayasan	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan sanitasi dan MCK	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		BANTUAN PEMBUATAN SARANA AIR BERSIH & MCK	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			76.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembuatan sumur bor dan MCK di 4 titik di Kab.Garut dan Kab.Tasik	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					4			720.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembuatan pipanisasi, sumur bor dan MCK di 3 titik di Kab.Garut dan Kab.Tasik	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi					3			715.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Program Recovery Jaringan Air Bersih Pasca Bencana - Desa Jarak, Wonosalam	Jumlah event pelaksanaan bantuan	Event					1			200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan Saluran Air Limbah Rumah Tangga Ds Karangsembung	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pengadaan sumur Bor dan MCK di Desa Ciemas, Sukabumi	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			200.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Sanitasi air bersih lingkungan untuk masyarakat sekitar	Tingkat penyerapan anggaran	%					100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Urain kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024		
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.															
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pemb Taman Cuci Tangan dan Wudlu Mts KRM Marzuki	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Sanitasi air bersih dan MCK masyarakat	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Sanitasi Air Bersih untuk masyarakat lingkungan sekitar Ponpes	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan sanitasi air bersih untuk masyarakat lingkungan sekitar yayasan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Sanitasi air bersih dan MCK	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			100.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan 6 unit MCK untuk masyarakat transmigasi Desa Macang Tanggar	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				6			30.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat Desa Liang Ndara	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			78.739.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan MCK di SD Katolik Melo	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			71.640.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan MCK Di Desa Samaenre, Sulawesi Selatan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			70.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan MCK dan Sarana Air Bersih di Dusun Kaemba Jaya, Desa Pa' bentengang, Sulawesi Selatan	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			70.509.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pemb Sumur Bor RA AL Ma arif 1 Ujung Ketangge	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Bantuan Sanitasi Sekolah, Kamar Mandi dan WC	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pengembangan Air Bersih Pokmas Mekar	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			99.500.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pemb MCK Musholla Ds Ledokombo	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			99.990.700	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan Sarana Air Bersih Di Kecamatan Leihutu, Maluku Tengah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			74.445.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan MCK Musholla At-Tauhid	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			90.155.591	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan 5 unit MCK untuk masyarakat transmigasi Desa Macang Tanggar	Jumlah unit paket bantuan yang diberikan	Unit				5			150.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Karya Bhakti Pembersihan Laut Pantai dan Pembelian Fasum Berupa Tempat Sampah di Kota/Kab Maluku	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1			56.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Penyediaan filter air minum Panti Asuhan Karya Anak Perdamaian	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			50.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan Jaringan Pipa Air Bersih Desa Kembes	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			93.835.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan MCK Musholla	Tingkat penyerapan anggaran	%				100			99.990.700	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MATRIKS 4 PROGRAM KEGIATAN NON PEMERINTAH PELAKU USAHA/BISNIS TPB/SDGs

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam Tahun)	Target Jangka Panjang (hingga Tahun)	Target Pencapaian				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	Pelaksana	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian kegiatan usaha berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut (Sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2021	2022	2023	2024			
Nama Pemangku Kepentingan: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.																
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembuatan Sumur Bor di Masjid Haji Mabur Desa Boneana II	Tingkat penyerapan anggaran	%				100				135.003.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembuatan Sumur Bor, MCK dan Bak Sampah	Tingkat penyerapan anggaran	%				100				75.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan MCK di Desa Gunung Kleng Kec.Meureubo, Aceh Barat	Tingkat penyerapan anggaran	%				100				16.900.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembuatan sumur bor air bersih di Jl.Nagur Kel.Martoba, Kec.Siantar, Pematang Siantar	Tingkat penyerapan anggaran	%				100				26.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan MCK Komunal dan Jaringan Air Bersih	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1				70.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan MCK Komunal & Sarana Air Bersih di Kp.Pasir Pujit, Kab.Pandeglang	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1				70.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan Sarana Air Bersih & MCK di Kp.Lebak Wareng & Kp.Sukamaju, Kab.Lebak	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1				140.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan Saluran Sanitasi Rumah Tangga Gang Setyaki	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1				75.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan MCK & Sarana Air Bersih di Kp.Cidarigdud & Kp.Tebet Kab.Pandeglang	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1				140.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Bantuan Sarana Air Bersih Tirta Ning Bhakti	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1				30.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembuatan Sumur Bor	Tingkat penyerapan anggaran	%				100				60.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pemb Pengempon Merajan Pasek Gel Gel	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				1				25.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
		6.2.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		Pembangunan MCK komunal 5 lokasi di wilayah Bogor	Jumlah lokasi pemberian bantuan	Lokasi				5				325.000.000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati